BUMN
Hadir untuk negeri

PLN

Memaknai Tantangan, Meningkatkan Layanan

Redefining Challenges, Enhancing Services

Laporan Tahunan 2019 Annual Report

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

www.pln.co.id @pln_123 PLN 123 @plnkita PT PLN (Persero)

Keberlanjutan Tema

Themes Continuity

2015

35.000 MW untuk Indonesia
A 35,000 MW Power Plant Program for Indonesia

Ketersediaan tenaga listrik yang memadai menjadi salah satu infrastruktur utama mendasar yang memiliki andil besar dalam mendukung pertumbuhan perekonomian suatu negara, oleh karenanya, kini dan seterusnya PLN bertekad memastikan seluruh kawasan di tanah air mendapatkan pasokan listrik yang memadai.

Adequate availability of electricity is one of the major fundamental needs with a significant role in the economic growth of a country. Hence, from now onwards, PLN is determined to supply ample electricity to every region of the country.

2016

Listrik untuk Membangun dan Menyejahterakan
Electricity for Developing & Prospering

Bagi PT PLN (Persero), semangat mendorong ketersediaan listrik sebagai pendukung pembangunan dan sarana bagi terciptanya kesejahteraan sejalan dengan motto yang sudah ditetapkan: "Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik".

The driving spirit to strive for electricity availability, as a basic necessity for the development and prosperity creation, is in line with motto of PT PLN (Persero): "Electricity for a Better Life".

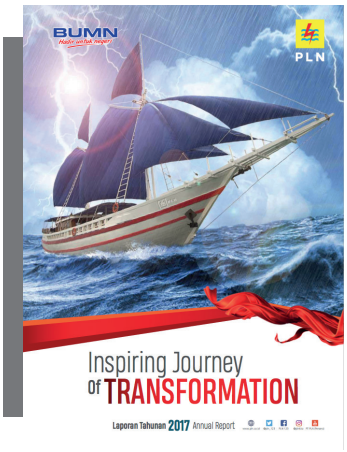

2017

Inspiring Journey of Transformation

Berbagai tantangan kami hadapi dalam perjalanan transformasi menuju ekselen, namun PLN tetap kokoh melewatinya demi memberi sumbangsih terbaik bagi Indonesia.

We encountered challenges during our transformation journey to excellent. Despite this, PLN remain solid in sailing through the journey to deliver the best efforts for Indonesia.

2018

Energi Optimisme untuk Indonesia
Energy Optimism for Indonesia

Sepanjang tahun 2018, PLN masih menghadapi berbagai tekanan eksternal usaha seperti kenaikan harga energi primer dan penurunan nilai tukar mata uang Rupiah. Meskipun begitu, PLN memaknai setiap tantangan sebagai motivasi untuk lebih tangguh, lebih kapabel, dan lebih mumpuni lagi dalam mengemban komitmen menyediakan listrik ke seluruh penjuru nusantara dan meningkatkan keandalan layanan dengan tarif terjangkau. Fokus kami adalah menyelesaikan proyek-proyek yang sedang berjalan, membangun sinergi saling menguntungkan dengan pemasok, dan mengefisiensikan Biaya Pokok Penyediaan. Dalam pengimplementasiannya, kami mendorong seluruh unit dan anak perusahaan untuk meningkatkan efisiensi di semua lini dan terus berinovasi untuk mencapai tingkat layanan pelanggan yang prima. Semangat ini harus dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai kinerja terbaik dan menjadi kontributor penting bagi profitabilitas Perusahaan. PLN sangat memahami bahwa semua pencapaian yang telah diraih adalah hasil kerja keras, semangat, dan motivasi tinggi seluruh insan PLN. Apapun tantangan yang dihadapi, seluruh insan PLN terus bekerja melistriki negeri hingga ke pelosok dan daerah terisolir. Mereka lah yang menebarkan energi untuk meraih kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Karena kami telah berkomitmen untuk terus memberikan energi optimisme untuk Indonesia

During 2018, PLN still faced various external business pressures, such as increasing primary energy price and a declining Rupiah exchange rate. Nevertheless, PLN accepted every challenge as motivation to be more resilient, more capable and more proficient in carrying out its commitment to provide electricity throughout Indonesia and to improve service reliability at an affordable tariff. Our focus is on completing ongoing projects, building mutually beneficial synergies with suppliers and streamlining the cost of supply. In implementing this, we have encouraged all units and subsidiaries to improve efficiency in all lines and to introduce innovations to ensure an excellent customer service level. This enthusiasm must be shared to achieve top performance and to become a significant contributor to the Company's profitability. PLN is well aware that all achievements are the result of hard work, enthusiasm and the high motivation of all PLN personnel. Whatever challenges are faced, all PLN personnel continue to work to electrify the entire country, including reaching remote and isolated areas. The PLN personnel are the ones who distribute the energy to achieve a better life for the community in line with our commitment to share energy optimism for Indonesia.

2019

Memaknai Tantangan, Meningkatkan Layanan

Redefining Challenges, Enhancing Services

Dari waktu ke waktu PLN terus menghadapi tantangan bisnis yang silih berganti dan semakin kompleks. Namun PLN tetap berpegang teguh pada misi untuk terus menjaga kepuasan pelanggan, menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, menjadi pendorong kegiatan ekonomi serta tetap fokus dalam menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Sepanjang tahun 2019, PLN tetap melanjutkan penyelesaian pembangunan infrastruktur kelistrikan yang telah dimulai sebelumnya. Di tahun ini penambahan kapasitas pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) dan non EBT, penambahan kapasitas transmisi serta gardu induk bisa melampaui target yang ditetapkan.

Komitmen PLN dalam menjalankan kegiatan usaha berwawasan lingkungan turut dibuktikan dengan beroperasinya 462,89 MW pembangkit EBT serta diraihnya 5 PROPER emas oleh 5 unit pembangkit listrik di lingkungan PLN Group.

Upaya untuk menurunkan biaya pokok penyediaan pun terus dilakukan di antaranya dengan terus menekan penggunaan bahan bakar minyak dan mengoptimalkan produksi listrik dari sumber energi primer yang lebih murah demi menjalankan amanah Pemerintah untuk tetap mempertahankan harga listrik untuk menjaga daya beli masyarakat dan daya saing industri.

PLN juga terus meningkatkan akses masyarakat di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) untuk ikut menikmati energi listrik lewat berbagai program seperti Lisa (Listrik Pedesaan), Penyambungan Listrik Gratis, One Man One Hope, pembangunan PLTS Komunal, penggunaan tabung listrik (Talis) dan lain sebagainya.

Untuk memastikan seluruh proses bisnis di PLN dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance,* di tahun 2019 PLN semakin melengkapi berbagai infrastruktur tata kelola di antaranya melalui aktivitas pengambilan pengambilan keputusan dengan mekanisme GRC *(Governance, Risk, and Compliance),* merevitalisasi tata nilai dan etika bisnis insan PLN menjadi PLN Terbaik, memperbaiki pedoman manajemen risiko serta pedoman pengadaan barang dan jasa, membangun sistem manajemen anti *fraud* dan memulai pembangunan sistem manajemen anti suap.

Berkat dedikasi seluruh insan PLN yang telah bekerja secara profesional, berorientasi pada hasil, dan senantiasa mematuhi setiap ketentuan yang berlaku, PLN berhasil menutup tahun 2019 dengan catatan kinerja keuangan yang solid dan kinerja operasional yang positif.

From time to time, PLN have been facing increasingly complex business challenges. However, PLN still adheres to its missions, which are maintaining customer satisfaction, making electricity as a medium to improve quality of life of the public, driving economic activity and focusing on carrying out environmentally-friendly business activities. During 2019, PLN continued to complete the construction of electricity infrastructure which had been started in the previous year. This year, the additional capacity of new and renewable energy (NRE) and non-NRE power plants, the additional capacity of transmission and substations exceeded the predetermined targets.

PLN's commitment in carrying out environmentally-friendly business activities is also reflected in the operations of 462.89 MW NRE power plant and the achievement of 5 Gold PROPER by 5 power plants under PLN Group.

Continuous efforts to reduce cost of electricity supplies are also made by, among others, reducing the use of fossil fuel and optimizing power production from primary energy sources of lower prices in order to carry out the Government's mandate to keep electricity prices stable to maintain people's purchasing power and industrial competitiveness.

PLN also continues to improve public access in 3T (foremost, outermost and disadvantaged) areas to be electrified through various programs, such as Lisa (Rural Electrification), Free Power Connection, One Man One Hope, Communal PLTS development, use of electric tubes (Talis) and so forth.

To ensure that all business processes in PLN are carried out in accordance with good corporate governance principles, in 2019, PLN also improved various governance infrastructure by, among others, decision making with GRC (Governance, Risk and Compliance) mechanism, revitalizing values code of conducts of PLN personnel to become the Best PLN, refining guidelines for risk management and procurement of goods and services, developing anti-fraud management system and commencing development of anti-bribery management system.

Owing to dedication of all PLN personnel who worked professionally, results-oriented, and always comply with the applicable laws and regulations, PLN concluded the year 2019 with solid financial performance and positive operational performance.

Daftar Isi

Table of Contents

Keberlanjutan Tema IFC
Themes Continuity

Memaknai Tantangan, Meningkatkan Layanan 1
Redefining Challenges, Enhancing Services

Ikhtisar Utama
Main Highlights

Kinerja Keuangan 2019 20
2019 Financial Performance

Ikhtisar Keuangan 22
Financial Highlights

Kinerja Operasional 2019 24
2019 Operational Performance

Ikhtisar Saham & Obligasi 26
Bonds & Shares Highlights

Laporan Manajemen
Management Reports

Laporan Dewan Komisaris 34
Report of the Board of Commissioners

Dewan Komisaris 54
Board of Commissioners

Laporan Direksi 60
Report of the Board of Directors

Direksi 80
Board of Directors

Profil Perusahaan
Corporate Profile

Informasi Umum 88
General Information

Riwayat Singkat Perusahaan 89
Company at a Glance

Perubahan Nama Perusahaan 91
The Company's Changes of Name

Jejak Langkah Perusahaan 92
The Company's Milestones

Bidang Usaha 94
Business Lines

Segmen Operasi 96
Operation Segment

Struktur Organisasi 98
Organizational Structure

Visi, Misi, Moto & Budaya Perusahaan 100
Vision, Mission, Motto and Culture of the Company

Peta Jalan Budaya Perusahaan 2017-2021 104
Corporate Culture Roadmap 2017-2021

Strategi Korporat 105
Corporate Strategies

Informasi Pemegang Saham dan Obligasi 106
Shareholders and Bonds Information

Profil Dewan Komisaris 110
Board of Commissioners Profiles

Profil Direksi 116
Board of Directors Profiles

Pengelolaan Human Capital 128
Human Capital Management

Sistem Manajemen Kinerja Pegawai (SIMKP) 134
Employee Performance Management System (SIMKP)

Kesejahteraan Pegawai 136
Employee Welfare

Hubungan Industrial 138
Industrial Relations

Survei Keterikatan Pegawai/ *Employee Engagement Survey* (EES) 141
Employee Engagement Survey (EES)

Entitas Anak 142
Subsidiaries

Entitas Afiliasi Anak Perusahaan 143
Affiliated Entities of Subsidiaries

Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama 145
Associates and Joint Ventures

Struktur Usaha Grup PLN 148
PLN Business Group Structure

Wilayah Operasi 150
Operational Area

Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan di Pasar Modal 152
Capital Market Supporting Institutions and Proffessions

Alamat Unit Bisnis dan Kantor Perwakilan 157
Address of Business Units and Representative Offices

Situs Perusahaan 162
Corporat Website

Penghargaan dan Pengakuan Eksternal 164
Awards and External Recognitions

Sertifikasi 168
Certification

Peristiwa Penting 2019 170
Event Highlights 2019

Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

GAMBARAN UMUM 177
General Description

- Kondisi Pasar Internasional 177
  International Market Outlook
- Kondisi Pasar Domestik 178
  Domestic Market Outlook
- Komoditas Energi 181
  Energy Commodities

KONDISI INDUSTRI KETENAGALISTRIKAN 183
Electricity Industry Outlook

- Kebutuhan Tenaga Listrik 185
  Electricity Demand
- Pengembangan Sistem Tenaga Listrik 185
  Electricity System Development

Program 35.000 MW 187
35,000 MW Program

Program Peningkatan Rasio Elektrifikasi 187
Program to Increase Electrification Ratio

KINERJA OPERASI PER SEGMEN USAHA 188
Operational Performance by Business Segment

Dasar Penetapan Segmen Usaha PLN 188
Basis for Application of PLN Business Segments

Penjualan Listrik 189
Electricity Sales

Jumlah Pelanggan 190
Number of Customers

Daya Tersambung 191
Connected Power

Susut Jaringan 192
Network Losses

Tingkat Keandalan 193
Service Reliability Level

TINJAUAN KINERJA USAHA 195
Tinjauan Kinerja Usaha

Kapasitas Terpasang 195
Installed Capacity

Produksi Listrik 195
Power Production

Bauran Energi 196
Energy Mix

Biaya Pokok Penyediaan 198
Cost of Supply

Tarif Tenaga Listrik 200
Electricity Tariff

Subsidi Listrik 202
Electricity Subsidy

Kompensasi 203
Compensation

Pendapatan Penjualan Listrik 203
Electricity Sales Revenue

URAIAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN 204
Financial Review

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 205
Consolidated Statements of Financial Position

Aset 205
Assets

Liabilitas 210
Liabilities

Ekuitas 213
Equity

Laporan Laba Rugi Konsolidasian 213
Consolidated Statements of Profit or Loss

Laporan Arus Kas 220
Statements of Cash Flows

Kemampuan Membayar Utang 222
Solvency

Struktur Modal dan Kebijakan Struktur Modal 226
Capital Structure and Capital Structure Policy

Modal kerja Bersih 227
Net Working Capital

Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal 227
Material Commitments for Capital Expenditures

Realisasi Investasi Barang Modal 229
Realization of Capital Expenditures

Realisasi Dibandingkan Target 231
Comparison of Realization and Target

Target-Target Kuantitatif pada Tahun Mendatang 232
Quantitative Targets for the Coming Year

Peristiwa Setelah Periode Pelaporan 233
Events After Reporting Period

Prospek Usaha 238
Business Prospects

Aspek Pemasaran 240
Marketing

Dividen dan Kebijakan Dividen 254
Dividend and Dividend Policy

Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP) 254
Employee and/or Management Stock Ownership Program (ESOP/MSOP)

Realisasi Penggunaan Dana Obligasi dan Efek Lainnya 254
Use of Proceeds from Issueance of Bonds and Other Securities

Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi atau Restrukturisasi Hutang/Modal 257
Divestment, Business Combination/Merger, Aqcuisition or Debt/Capital Restructuring

Informasi Material Mengenai Ekspansi 257
Material Information Regarding Ekspansion

Transaksi Benturan Kepentingan 257
Transaction of Conflict of Interests

Transaksi Dengan Pihak-Pihak yang Berelasi 257
Related Party Transactions

Perubahan Peraturan 264
Changes in Regulation

Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan pada Tahun Buku Terakhir 268
Changes in Accounting Policies Applied in The Current Fiscal Year

Informasi Kelangsungan Usaha 270
Going Concern

Profitabilitas 271
Profitability

Kontribusi Kepada Negara 271
Contribution to the Country

Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance

PERNYATAAN TATA KELOLA 275
Governance Statement

MILESTONE GCG 276
GCG Milestone

PERATURAN PERUSAHAAN 278
Corporate's Regulation

PENILAIAN GCG 283
GCG Assessment

Kriteria yang Digunakan Dalam Penilaian 283
Assessment Criteria

Pihak yang Melakukan Penilaian 284
Assessor

Hasil Penilaian GCG Periode Tahun 2019 284
2019 GCG Assessment Results

Hasil Penilaian GCG Aspek Dewan Komisaris 285
GCG Assessment Results on Board of Commissioners

Hasil Penilaian GCG Aspek Direksi 286
GCG Assessment Results on Board of Directors

Rekomendasi Hasil Penilaian GCG Tahun 2019 287
Recommendations from 2019 GCG Assessment Results

Penilaian GCG oleh Lembaga Penilai Lainnya 290
GCG Assessment by Other Assessors

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 292
General Meeting of Shareholders

Pemegang Saham 293
Shareholders

Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham 294
Rights and Responsibilities of the Shareholders

Informasi Mengenai Penyelenggaraan RUPS Tahun 2019 294
Information Regarding 2019 GMS

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan Laporan Pertanggungjawaban Tahunan
Attendance of Board of Commissioners and Board of Directors in GMS on Annual Corporate Work Plan and Budget and GMS on Accountability for Annual Report 295

Keputusan dan Realisasi RUPS 2019
Resolutions and Realization of 2019 GMS 297

Informasi Mengenai Keputusan RUPS Tahun Sebelumnya yang Direalisasikan pada Tahun Buku atau Belum Direalisasikan
Information on Resolutions of GMS in the Previous Year that were Realized or Not Realized in Current Year 305

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners 306

Komposisi Dewan Komisaris dan Dasar Hukum Penunjukan
Composition of Board of Commissioners and Legality of Appointment 306

Informasi Mengenai Komisaris Independen
Independent Commissioners 307

Masa Jabatan Dewan Komisaris
Office Term of Board of Commissioners 308

Panduan Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris
Board Manual for Board of Commissioners 309

Kebijakan Terkait Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris Apabila Terlibat Dalam Kejahatan Keuangan
Policies Related to Resignation of Commissioners due to Involvement in Financial Crime 309

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Duties and Responsibilities of Board of Commissioners 309

Wewenang Dewan Komisaris
Authorities of Board of Commissioners 310

Pembagian Tugas Dewan Komisaris
Segregation of Duties of Board of Commissioners 311

Independensi, Hubungan Afiliasi dan Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris
Independence, Affiliate Relationship and Share Ownership of Member of Board of Commissioners 311

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris
Concurent Positions of Board of Commissioners 313

Program Pengenalan untuk Komisaris Baru
Induction Program for Commissioners 314

Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris
Competency Development Programs of Board of Commissioners 314

Remunerasi Dewan Komisaris
Remuneration of Board of Commissioners 315

Rapat Dewan Komisaris
Meetings of Board of Commissioners 318

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
Joint Meetings of Board of Commissioners and Board of Directors 323

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris
Performance Assessment of Board of Commissioners 328

Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2019
Board of Commissioners' 2019 Work Plan 331

Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2019
Implementation of Supervision of Board of Commissioners in 2019 331

Produk Pengawasan
Supervisory Products 334

Pengungkapan Hubungan Afiliasi Antar Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham
Disclosure of Affiliation among Members of Board of Directors, Board of Commissioners and/or Shareholder 336

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris
Diversity in Composition of Board of Commissioners 337

ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS
Supporting Organs of Board of Commissioners 338

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of Board of Commissioners 338

Komite Audit
Audit Committee 340

Komite Manajemen Risiko
Risk Management Committee 349

Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee 357

Kebijakan Suksesi Direksi
Policy of Board of Directors Succession 363

Tata Laksana Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi
Work Procedures for Board of Commissioners and Board of Directors 364

DIREKSI
Board of Directors 366

Komposisi Direksi dan Dasar Hukum Penunjukan
Composition of Board of Directors and Legality of Appointment 366

Masa Jabatan Direksi
Tenure of The Board of Directors 368

Panduan Tata Laksana Kerja Direksi
Board Manual for Board of Directors 369

Kebijakan Terkait Pengunduran Diri Anggota Direksi Apabila Terlibat Dalam Kejahatan Keuangan
Policies Related to Resignation of Directors due to Involvement in Financial Crime 369

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi
Duties, Responsibilities and Authority of Board of Directors 369

Pembagian Tugas Direksi
Division of Duties of Board of Directors 371

Independensi, Hubungan Afiliasi dan Kepemilikan Saham Anggota Direksi
Independence, Affiliate Relationship and Share Ownership of Member of Board of Directors 378

Program Pengenalan Perusahaan untuk Direktur Baru
Induction Program for Directors 380

Pengembangan Kompetensi Direksi
Competence Development of Directors 380

Remunerasi Direksi
Remuneration for Board of Directors 383

Rapat Direksi
Board of Directors Meeting 385

Penilaian Kinerja Direksi
Performance Assessment of Board of Directors 391

Pengungkapan Hubungan Afiliasi Antar Anggota Direksi dengan Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham
Disclosure of Affiliation among Members of Board of Directors, Board of Commissioners and/or Shareholder 394

Keberagaman Komposisi Direksi
Diversity of Composition of Board of Directors 394

KOMITE DI BAWAH DIREKSI 396
Committees Under Board of Directors

CORPORATE SECRETARY 398
Corporate Secretary

UNIT AUDIT INTERNAL (SATUAN PENGAWASAN INTERN) 402
Internal Audit Unit

AKUNTAN PUBLIK 410
Public Accountant

MANAJEMEN RISIKO 411
Risk Management

KEPATUHAN 418
Compliance

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL 420
Internal Control System

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI 423
Information Technology Governance

PERMASALAHAN HUKUM 428
Legal Cases

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN 432
Access to The Company's Information Data

STANDAR ETIKA PERUSAHAAN 435
Code of Conduct

PENGADAAN BARANG DAN JASA 439
Procurement of Goods and Services

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN (ESOP/MSOP) 441
Employee/Management Stock Ownership Program (ESOP/MSOP)

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) 442
Whistleblowing System

PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) 446
Reports on Assets of State Officials (LHKPN) Management

KEBIJAKAN ANTI FRAUD 448
Anti Fraud Policy

PENCEGAHAN GRATIFIKASI DAN KONFLIK KEPENTINGAN 449
Prevention of Gratuity and Conflict of Interest

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA 451
Corporate Governance Implementation of Public Companies

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL 462
Corporate Social Responsibility Governance

Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) 463
The Commitment and Policies on Corporate Social Responsibility (CSR)

Perumusan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 465
Formulation of Corporate Social Responsibility

Perencanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 469
Corporate Social Responsibility Planning

Uraian Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial 473
Description of the Implementation of Social Responsibility Programs

Pengukuran Capaian Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 475
Measurement of the Achievement of Corporate Social Responsibility Implementation

TANGGUNG JAWAB SOSIAL YANG TERKAIT ASPEK OPERASI YANG ADIL 478
Corporate Social Responsibility Related to Fair Operations

PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL YANG TERKAIT ASPEK HAK ASASI MANUSIA 490
Social Responsibilities Program Related to Human Rights Aspects

PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL YANG TERKAIT DENGAN KETENAGAKERJAAN 500
Social Responsibility Program Related to Employment

PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL YANG TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN HIDUP 514
Corporate Social Responsibility Related to The Environment

PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL YANG TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN 540
Corporate Social Responsibility on Social and Community Development

PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT DENGAN TANGGUNG JAWAB KEPADA KONSUMEN 556
Customer-Oriented Social Responsibility Program

Laporan Keuangan 2019 578
Financial Report 2019

SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2019 PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) 826
Board of Commissioners and Board of Directors Statement of Accountability for 2019 Annual Report of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

CHECKLIST ISI LAPORAN TAHUNAN BERDASARKAN SURAT EDARAN OJK NO. 30 TAHUN 2016 ("SEOJK 30/2016") 833
Checklist of the Annual Report Contents Pursuant to the Circular Letter of OJK No. 30/2016 ("SEOJK 30/2016")

KRITERIA ANNUAL REPORT AWARD 2018 851
Annual Report 2018 Criteria

Ikhtisar Utama

Main Highlights

20 **Kinerja Keuangan 2019**
2019 Financial Performance

22 **Ikhtisar Keuangan**
Financial Highlights

24 **Kinerja Operasional 2019**
2019 Operational Performance

26 **Ikhtisar Saham & Obligasi**
Bonds & Shares Highlights

/01

Jangkauan Listrik Semakin Luas

Wider Electricity Coverage

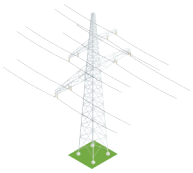

Turut Berkontribusi pada Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional

Participating in Improving National Electrification Ratio

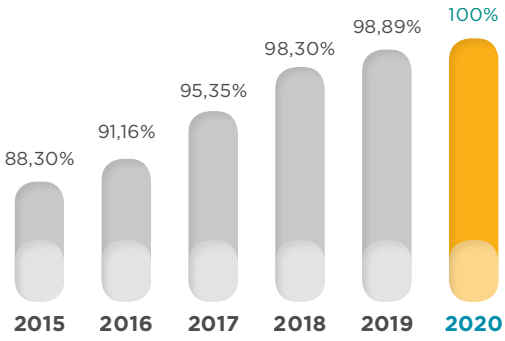

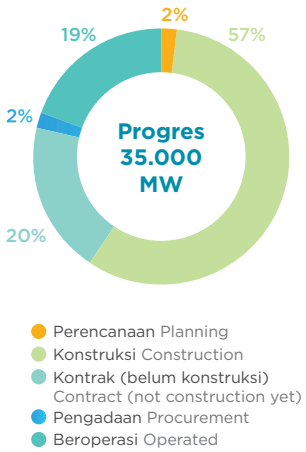

Dalam 2 tahun terakhir (2017-2019) sekitar 7 juta rumah tangga baru telah menikmati listrik. Rasio elektrifikasi nasional terus ditingkatkan dari 95,35% pada tahun 2017 menjadi 98,89% pada akhir tahun 2019 dimana PLN berkontribusi sebesar 95,75%. Peningkatan rasio tersebut ditopang oleh program listrik perdesaan dan megaproyek 35.000 MW termasuk listrik dari sumber energi baru terbarukan (EBT). Pemerintah telah menargetkan rasio elektrifikasi nasional sebesar 100% pada tahun 2020. Bagi PLN, tugas ini adalah tugas mulia untuk menerangi desa-desa di daerah terdepan, terluar dan tertinggal, di antaranya bahkan ada yang belum pernah menikmati listrik sejak Indonesia merdeka.

Within the last 2 years (2017-2019), around 7 million new households have been electrified. The National electrification ratio continued to increase from 95.35% in 2017 to 98.89% at end of 2019 with 95.75% of PLN's contribution. The increase in the ratio was supported by the rural electricity program and the 35,000 MW megaproject, including electricity from new renewable energy sources (EBT). The government has targeted a national electrification ratio of 100% by 2020. For PLN, this is a grand undertaking to illuminate villages in the foremost, outermost and disadvantaged areas, some of which have not been electrified since Indonesia's independence.

Rasio Elektrifikasi Tahun 2019

Electrification Ratio (RE) in 2019

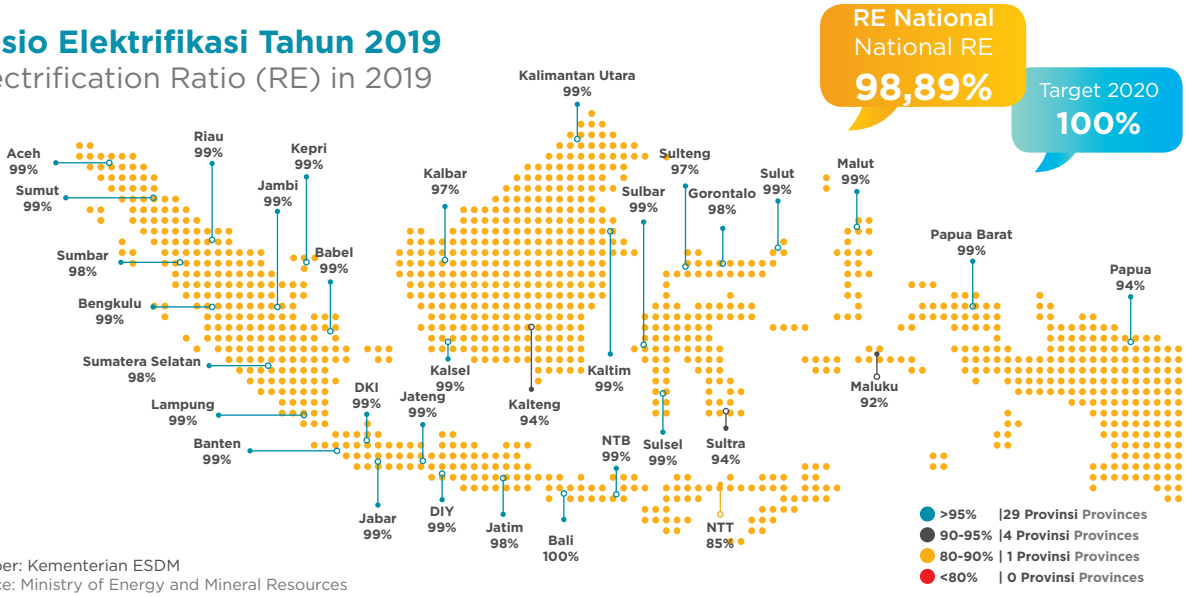

sumber: Kementerian ESDM
source: Ministry of Energy and Mineral Resources

Semakin Terdepan dalam Mengoperasikan Pembangkit Listrik Ramah Lingkungan

'02

Leading in Operating Environmentally Friendly Power Plant

PROPER EMAS
Gold PROPER

- PLTU Tanjung Jati B
- PLTU Paiton Unit 1-2
- PLTGU Gresik
- PLTDG Pesanggaran
- PLTP Kamojang Darajat

PROPER HIJAU
Green PROPER

- PLTGU Priok
- PLTU Suralaya 1-7
- PLTU Pelabuhan Ratu
- PLTP Gunung Salak
- PLTU Suralaya 8
- PLTU Paiton 9
- PLTGU Tambak Lorok
- PLTGU Muara Tawar
- PLTU Rembang
- PLTG Gilimanuk
- PLTGU Perak Grati
- PLTG Pemaron
- PLTU Lontar
- PLTU Indramayu
- PLTD Keramasan
- PLTU Labuan

Kerja keras dan dedikasi insan PLN Group untuk senantiasa menjaga kelestarian dalam menjalankan proses bisnis menghasikan raihan 5 PROPER emas dan 16 PROPER Hijau pada tahun 2019 serta tidak ada PROPER Hitam. Penilaian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini adalah bentuk pengakuan bahwa PLN telah menjalankan usahanya dengan berwawasan lingkungan. PLN mendukung komitmen pemerintah pada Paris Agreement untuk menurunkan kadar emisi karbon dioksida dengan mengembangkan pembangkit EBT secara masif. Dalam memenuhi kebutuhan listrik Indonesia, PLN senantiasa melestarikan alam, menjaga lingkungan serta berperan aktif menjalankan program-program pengembangan kemasyarakatan yang berkelanjutan.

The hard work and dedication of PLN Group personnel to consistently maintain business sustainability resulted in achieving 5 Gold PROPER and 16 Green PROPER certificates in 2019 with no Black PROPER performance. This assessment of the Ministry of Environment and Forestry was an acknowledgment that PLN has carried out its business with an environmental perspective. PLN supports the Government's commitment to the Paris Agreement to reduce carbon dioxide emissions through widespread development of EBT power plants. In meeting Indonesia's electricity needs, PLN consistently preserves nature, protects the environment and plays an active role in carrying out sustainable community development programs.

/03

Melangkah Pasti Menuju Energi Hijau

Stepping towards Green Energy

Pemerintah telah menetapkan target pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi pada tahun 2025 minimal 23%, dan ditingkatkan menjadi minimal 28% pada tahun 2038. Target tersebut tertuang di dalam RUKN 2019-2038. Potensi EBT di Indonesia seperti panas bumi, air, bioenergi, sinar matahari (surya) dan angin (bayu) sangat melimpah. Secara total, potensi EBT Indonesia mencapai 443,2 GW, sedangkan yang telah termanfaatkan saat ini baru sekitar 2% atau sebesar 8,8 GW.

PLN sangat berkepentingan untuk mewujudkan target Pemerintah tersebut. Selain untuk menghasilkan pasokan listrik dengan harga yang lebih baik bagi pelanggan dengan sumber energi bersih, murah dan ramah lingkungan, PLN juga ikut mendukung upaya-upaya menurunkan emisi gas rumah kaca. Pada tahun 2019, PLN telah menambah kapasitas pembangkit EBT sebesar 462,89 MW (COD/SLO). Walaupun masih relatif kecil dibandingkan kapasitas pembangkit secara keseluruhan, pencapaian tahun 2019 ini merupakan penambahan kapasitas pembangkit EBT yang terbesar dari tahun-tahun sebelumnya.

PLN telah mengelola kapasitas pembangkit EBT sebesar 7.790 MW atau 12,4% dari total bauran seluruh energi pembangkit. Pembangkit EBT tersebut terdiri dari PLTA sebesar 4.981 MW, PLTP 2.439 MW, PLTS (surya) 67 MW, serta PLTB dan PLTBM sebesar 303 MW.

Selain itu PLN juga sedang menjalankan program uji coba pembangkit menggunakan biosolar B20 dan B30 100%. Langkah ini akan membantu Pemerintah mengurangi impor BBM sehingga memperbaiki defisit transaksi berjalan.

The Government has set a target for the use of new renewable energy (EBT) in the energy mix to a minimum of 23% by 2025, with an increase to a minimum of 28% by 2038. The target is stated in the 2019-2038 RUKN. EBT potentials in Indonesia, such as geothermal, water, bioenergy, solar and wind are abundant. In total, the potential for Indonesia's EBT is able to reach 443.2 GW, while current utilization is only around 2% or 8.8 GW.

PLN is determined to realize the Government's target. In addition to generating electricity supply at a lower price for customers with clean, cheap and environmentally friendly energy sources, PLN supports the efforts to reduce greenhouse gas emissions. In 2019, PLN increased its EBT power plant capacity by 462.89 MW (COD/SLO). Although it was still relatively small compared to the overall power plant capacity, this achievement in 2019 was the largest increase in EBT power plant capacity in recent years.

PLN manages a EBT power plant capacity of 7,790 MW or 12.4% of the total energy mix. EBT power plants consist of PLTA of 4,981 MWs, PLTP of 2,439 MW, PLTS (solar) of 67 MW, and also PLTB and PLTBM as much as 303 MW.

Currently, PLN is running a power plant testing program using 100% B20 and B30 biosolar. This step will help the Government reduce fuel imports, thereby improving its current account deficit.

Mengembangkan Ekosistem Kendaraan Listrik

Developing Electric Vehicle Ecosystem

/04

Untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Untuk Transportasi Jalan, PLN berinisiatif menginisasi pengembangan ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik (KBL). Saat ini PLN telah menandatangani 20 MoU dengan mitra strategis baik dari pihak swasta maupun BUMN dan Kementerian untuk bersinergi membangun ekosistem kendaraan listrik. Penggunaan KBL akan mengurangi konsumsi bahan bakar fosil, mengurangi emisi gas karbon dan mempercepat implementasi energi hijau.

Hingga akhir tahun 2019, PLN telah menyediakan 9 titik stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) *showcase* di 6 lokasi dari target 34 titik di 20 lokasi di 10 kota. Penyediaan SPKLU *showcase* dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat pengguna KBL untuk mengisi ulang daya di *charging station* terdekat. PLN, melalui skema kerja sama bisnis, menargetkan membangun 4.200 SPKLU pada 2025 atau sekitar 10% dari populasi mobil listrik pada tahun 2025 yang diperkirakan akan mencapai 42 ribu unit.

Di tahun 2019, PLN juga meluncurkan program pemberian insentif tarif tenaga listrik (TTL) bagi rumah tangga pemilik KBL. Diskon tarif sebesar 30% dikenakan atas tambahan pemakaian pada pukul 22.00 - 04.00 bagi pelanggan Rumah Tangga dengan daya di atas 1.300 VA dan Bisnis di atas 6.600 VA yang memiliki KBL. Program ini berlaku hingga 31 Desember 2019.

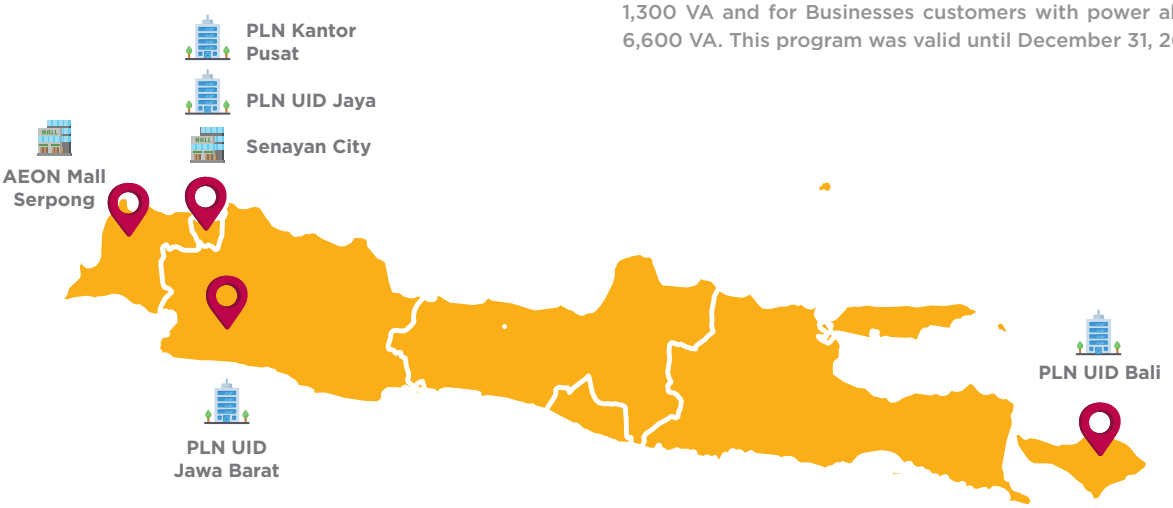

To support implementation of Presidential Regulation No. 55 of 2019 concerning Acceleration of the Battery Electric Vehicle Program for Road Transportation, PLN took the initiative to instigate development of the Electric Motor Vehicle (KBL) ecosystem. The use of KBL will reduce fossil fuel consumption, reduce carbon gas emissions and accelerate green energy implementation.

At end of 2019, PLN provided 9 public electric vehicle charging stations (SPKLU) showcased in 6 locations out of a targeted 34 stations in 20 locations in 10 cities. SPKLU showcases are intended to help KBL users to recharge at the nearest charging station. PLN, through a business cooperation scheme, has targeted the construction of 4,200 SPKLU by 2025 or around 10% of the electric car population, which is estimated to have reached 42 thousand units.

In 2019, PLN also launched the electricity tariff (TTL) incentive program for households that own KBL. A discounted rate of 30% is applied for additional usage from 22:00 to 04:00 for Household customers with power above 1,300 VA and for Businesses customers with power above 6,600 VA. This program was valid until December 31, 2019.

/05

Mewujudkan Tol Listrik Sumatera

Realizing Sumatra Electricity Toll Road

Tol Listrik
Electricity Toll Road
Lahat - Pangkalan Susu

BPP Sumatera Utara Turun
Decrease of Basic Cost of Production in North Sumatra
Rp60/kwh

Potensi Penghematan
Saving Potential
Rp47,2 miliar/billion
per bulan
per month

Kapasitas Transmisi
Transmission Capacity
275 kV

Panjang Jaringan
Length of Transmission
2.834 kms

Jumlah Total Tower
Number of Tower
4.098 unit

Menyalurkan Daya
Evacuate Power
+2.000 MW

Pada tahun 2019, PLN telah menuntaskan pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 kV yang dikenal sebagai Tol Listrik Sumatera dan telah dinyatakan layak beroperasi pada 29 Juni 2019 setelah mendapatkan Rekomendasi Laik Bertegangan (RLB) pada Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 kV. Tol Listrik Sumatera membentang di sepanjang jalur Lahat - Lubuk Linggau - Bangko - Muara Bungo - Kiliranjao - Payakumbuh - Padang Sidempuan - Sarula - Simangkok - Galang sepanjang 2.834 kilometer sirkit (kms).

Tol listrik ini menjadi *backbone* penyaluran energi listrik dari Sistem Sumatera Bagian Selatan menuju Sumatera Bagian Utara atau sebaliknya. Dengan adanya Tol Listrik, maka keandalan listrik Sumatera akan semakin meningkat dan semakin efisien karena pasokan evakuasi daya listrik dari pembangkit berbahan bakar murah (batubara) hingga 2.000 MW dari berbagai PLTU Mulut Tambang yang ada di Sumatera Selatan ke Sumatera Utara. Selain menurunkan BPP listrik di Sumatera, Tol Listrik juga meningkatkan keandalan pasokan dengan terwujudnya interkoneksi listrik yang membentang dari Selatan hingga Utara Pulau Sumatera.

SUTET 275 kV akan terus dikembangkan ke arah Utara dan Selatan. Ke arah Aceh saat ini jalur yang sudah selesai konstruksi adalah Galang - Pangkalan Susu dan jalur Pangkalan Susu - Arun - Sigli - Aceh dalam tahap konstruksi. Sedangkan untuk arah Selatan sampai Lampung sedang dibangun jalur Lahat - Muara Enim - Gumawang - Lampung.

In 2019, PLN completed construction of the Extra High Voltage Overhead Transmission Line (SUTET) 275 kV known as the Sumatra Electricity Toll Road, with operational feasibility being announced on June 29, 2019 after obtaining Feasible Voltage Recommendation (RLB) on Extra High Voltage Overhead Transmission Line (SUTET) 275 kV. The Sumatra Electricity Toll Road interconnects Lahat - Lubuk Linggau - Bangko - Muara Bungo - Kiliranjao - Payakumbuh - Padang Sidempuan - Sarula - Simangkok - Galang along 2,834 kilometers of circuits (kms).

This electricity toll road has become the backbone of power distribution from the Southern Sumatra System to North Sumatra. With the Electricity Toll Road, electricity reliability in Sumatra will improve and be more efficient due to power evacuation supply from cheap fuel power plants (coal) up to 2,000 MW from various Mine Mouth Power Plants from South Sumatra to North Sumatra. In addition to reducing Cost of Electricity Supply (BPP) in Sumatra, the Electricity Toll Road has improved supply reliability with the realization of electricity interconnection running from South to North Sumatra.

SUTET 275 kV will continue to be developed to the north and south. Towards Aceh, the currently completed construction section is Galang- Pangkalan Susu, while the Pangkalan Susu - Arun - Sigli - Aceh sections are under construction. Meanwhile, towards Lampung in the south, the Lahat - Muara Enim - Gumawang - Lampung sections are in progress.

Meningkatkan Kualitas, Meminimalisir Potensi Gangguan

Improving Quality, Minimizing Potential Disruption

/06

Terjadinya peristiwa *blackout* 4 Agustus 2019 menjadi pelajaran berharga bagi PLN sekaligus *milestone* penting bagi perbaikan kinerja berkesinambungan mulai dari penguatan manajemen aset (pembangkit, transmisi dan distribusi), peningkatan kualitas Contact Center 123, serta pembentukan Pusat Pengelolaan Informasi dan Solusi (P2IS).

P2IS yang diresmikan pada 27 November 2019 adalah pusat *advanced analysis* untuk menghimpun, memantau, dan menganalisis seluruh data dan kondisi sistem ketenagalistrikan nasional. Sebagai *monitoring room,* P2IS mengawasi seluruh kondisi kelistrikan nasional secara *real time* sehingga dapat meminimalisir potensi gangguan, dan mempermudah koordinasi antar bidang untuk mengambil tindakan perbaikan sesuai data yang ada. Dengan adanya P2IS, diharapkan semua kinerja dan kondisi kelistrikan dapat dikelola secara optimal dalam rangka memitigasi risiko dan sebagai sistem peringatan dini Perusahaan dan membantu Direksi untuk menetapkan solusi konkret, cepat dan efektif.

The power outage on August 4, 2019 was a valuable lesson for PLN as well as a critical milestone for continuous performance improvement by strengthening asset management (power plants, transmissions and distributions), improving the quality of Contact Center 123 and establishing the Information and Solutions Management Center (P2IS).

Launched on November 27, 2019, P2IS is a center for advanced analysis to collect, monitor and analyze all data and conditions in the national electricity system. As a monitoring room, P2IS oversees all national electricity conditions in real time so as to minimize potential disruption and to facilitate coordination among departments to take corrective action according to the existing data. With P2IS, it is expected that all electricity performance and conditions can be optimally managed in order to mitigate risk and to serve as an early warning system for the Company while helping the Board of Directors decide on concrete, fast and effective solutions.

/07

Sinergi dan Kolaborasi

Synergy and Collaboration

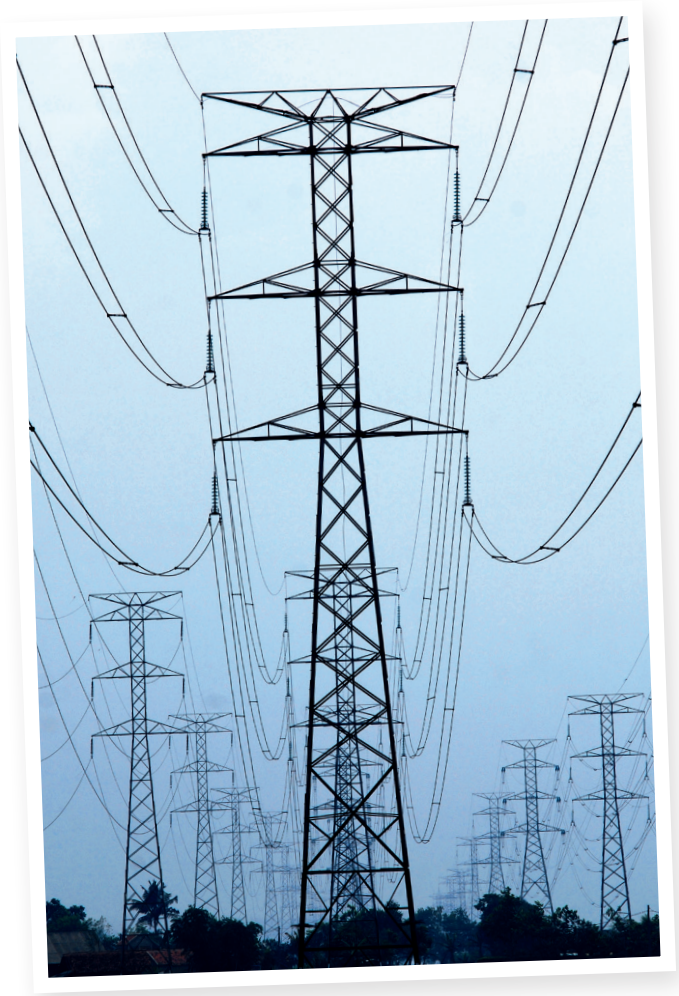

Pada tahun 2019, PLN telah menjalin sinergi dan kolaborasi dengan TNI, Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). TNI dan Polri akan membantu PLN dalam pengamanan instalasi pembangkit sebagai objek vital strategis dan jalur-jalur transmisi. Sedangkan Kejaksaan Agung dan Kementerian ATR/BPN untuk sinergi dalam rangka percepatan pembebasan lahan untuk proyek.

Untuk menjaga keandalan pasokan listrik terutama di sistem Kelistrikan Jawa Bali, PLN melakukan berbagai upaya perawatan dan pemeliharaan rutin pada jaringan transmisi 500 kV. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pemasangan proteksi dan inspeksi rutin jalur *right of way* (ROW) di sepanjang lokasi yang dilewati jaringan transmisi. Inspeksi jalur ROW dilakukan oleh Tim Ground Patrol dan Tim Pemeliharaan dengan dukungan TNI dan Polri serta partisipasi masyarakat. Selain pembersihan, PLN juga memberikan sosialisasi kepada warga setempat terkait ruang bebas dan jarak aman minimum pada saluran udara tegangan ekstra tinggi yang tertuang pada Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2019. Diharapkan, masyarakat akan lebih memahami pentingnya menjaga dan mengamankan jalur transmisi demi keandalan pasokan listrik terutama dari gangguan pohon serta tanam tumbuh milik warga.

In 2019, PLN synergized and collaborated with TNI, Polri, the Attorney General's Office, the Ministry of Agrarian Affairs and the Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN). TNI and Polri will support PLN in securing power plant installations and transmission lines as vital strategic entities. While the synergy with Attorney General's Office and the Ministry of ATR/BPN was in the context of accelerating land acquisition for projects.

To maintain electricity supply reliability, especially in the Java-Bali Electricity system, PLN performed various routine maintenance efforts on the 500 kV transmission network. Activities carried out included protection installation and routine inspection on the right of way (ROW) along the locations that are passed through by transmission networks. ROW inspection was carried out by Ground Patrol and Maintenance Teams with the support of TNI and Polri, as well as community participation. In addition to cleaning, PLN provided information to local residents regarding free space and minimum safety distances on extra-high voltage overhead transmission lines as stipulated in Regulation of the Minister of ESDM No. 2 of 2019. It is expected that the public will better understand the importance of maintaining and securing transmission lines for electricity supply reliability, especially from disruptions by the residents' trees and plants.

Menjaga Kinerja Keuangan yang Sehat

Maintaining Sound Financial Performance

/08

Beban Usaha (Rp triliun)
Operating Expenses (Rp trillion)

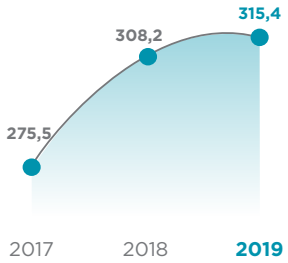

Kenaikan beban usaha hanya 2% dibandingkan pertumbuhan pendapatan usaha sebesar 4,67% pada tahun 2019.

The increase in operating expenses was only 2% compared to growth in operating revenue of 4.67% in 2019.

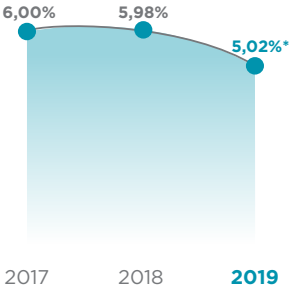

Bauran energi BBM turun seiring optimalisasi utilisasi pembangkit batubara.

Reduce in fuel energy mix by optimizing utilization of coal power plants.

BPP (Rp)

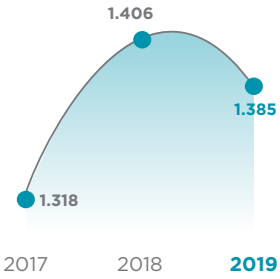

Biaya Pokok Penyediaan (BPP) turun 1,5% pada tahun 2019.

Cost of Provision (BPP) decreased by 1.5% in 2019.

* Perhitungan tahun 2019 tidak memperhitungkan Pembangkit IPP
Calculations for 2019 do not take into account IPP Generation

PLN harus menjadi perusahaan dengan kinerja keuangan yang sehat agar senantiasa memiliki kemampuan untuk membiayai mandat yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan sistem ketenagalistrikan *end-to-end*. Di tengah dinamika global yang belum membaik dan kebijakan pemerintah untuk tidak melakukan penyesuaian tarif tenaga listrik sejak tahun 2017, PLN mengajak seluruh insan PLN untuk bekerja secara inovatif, efektif dan efisien dalam rangka pengendalian biaya tanpa mengorbankan target-target produksi.

It is essential that PLN is a company with a sound financial performance so that it always has the ability to fund the mandate given by the government to increase the capacity and reliability of the end-to-end electricity system. In the midst of yet-to- recover global dynamics and the government's policy not to adjust electricity tariffs since 2017, PLN has called for all PLN personnel to work in an innovative, effective and efficient manner so as to control costs without losing sight of production targets.

/09

Memperkuat Tata Kelola untuk Praktik Bisnis yang Bersih dan Berintegritas

Strengthening Governance of Clean Business Practices and Integrity

Hasil Penilaian GCG Tahun 2017-2019
Result of GCG Assessments in 2017-2019

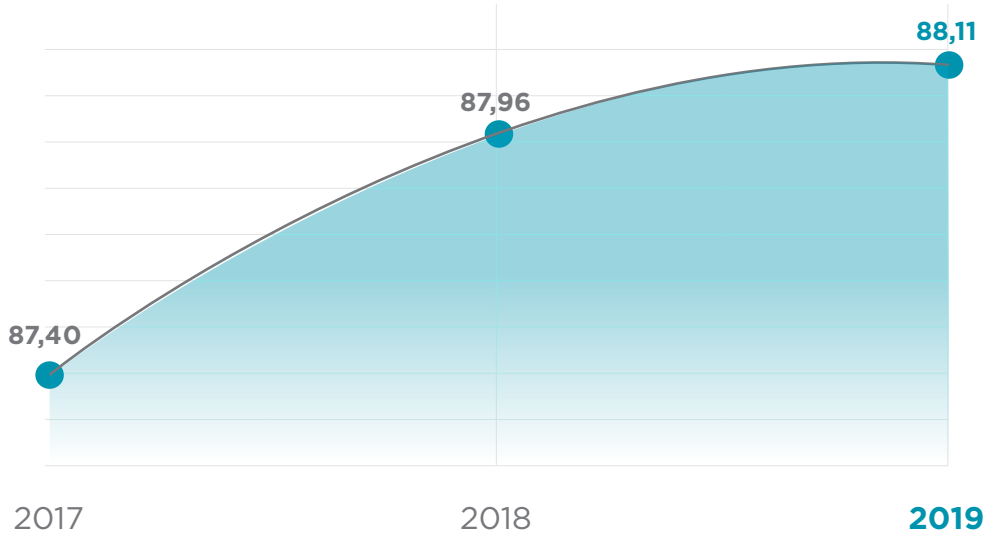

Pada tahun 2019 PLN berinisiatif meningkatkan kualitas tata kelola dengan menerapkan *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) secara terintegrasi di PLN Group. Direksi PLN telah mengeluarkan Perdir No. 0196.P/DIR/2019 tanggal 20 November 2019 tentang Penerapan *Governance, Risk Management, and Compliance* (GRC) di Lingkungan PT PLN (Persero). Penerapan GRC akan mendorong pencapaian kondisi kinerja berprinsip (*principled performance*) sehingga PLN dapat mencapai tujuan perusahaan, mengatasi ketidakpastian, dan bertindak secara berintegritas. Untuk mendukung terlaksananya proses bisnis yang bersih dan berintegritas, PLN juga telah menginisiasi penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016. Upaya-upaya memperkuat tata kelola secara konsisten dan berkelanjutan menghasilkan peningkatan penilaian penerapan GCG yang terus meningkat dari tahun.

In 2019, PLN took the initiative to improve the quality of governance by implementing Integrated Governance, Risk and Compliance (GRC) in the PLN Group. Thus, PLN issued Regulation of the Board of Directors No. 0196.P/DIR/2019, dated November 20, 2019 concerning Implementation of Governance, Risk Management and Compliance (GRC) in PT PLN (Persero). GRC implementation will encourage achievement of principled performance, so that PLN is able to achieve its objectives, overcome uncertainties and act with integrity. To support the implementation of clean business practices, PLN also initiated the application of ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System. Efforts to strengthen governance in a consistent and sustainable way have resulted in improved assessment results of GCG which is implemented annually.

Melistriki Negeri Hingga Wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal)

Electrifying the Country to
3T (Frontier, Outermost, Least Developed) Areas

/10

Tantangan terberat yang dihadapi PLN dalam mencapai target Rasio Elektrifikasi (RE) 100% di 2020 adalah melistriki wilayah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) yang tidak terjangkau jaringan listrik (grid), terutama di wilayah kepulauan. Tetapi PLN tetap menjalankan komitmennya untuk membangun dan menghadirkan infrastruktur kelistrikan hingga ke pelosok negeri untuk membantu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia. Pada tahun 2019, PLN mengoptimalkan potensi sumber energi lokal dengan membangun pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) di berbagai wilayah seperti Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal. Selain itu, PLN juga memberikan layanan sambung listrik gratis (melalui program Sinergi BUMN, OMOH, atau CSR) sehingga masyarakat tidak mampu dapat segera menikmati daya listrik yang sudah tersedia.

The toughest challenge faced by PLN in achieving the target of 100% Electrification Ratio (RE) in 2020 is electrifying 3T (frontier, outermost and least developed) areas that are not reached by the electricity grid, especially on remote islands. However, PLN continues to carry out its commitment to build and install electricity infrastructure in remote areas of the country to help improve the quality of life of the Indonesian people. In 2019, PLN optimized the potential of local energy sources by building new renewable energy-based power plants (EBT) in various areas, such as Mini-hydro Power Plant (PLTMH), Biomass Power Plant (PLTBm) and Communal Solar Power Plant (PLTS). In addition, PLN provided free power connection services (through SOE Synergy, OMOH, or CSR programs) so that underprivileged people could be electrified.

/11 Gerakan OMOH (One Man One Hope), Dari Insan PLN Untuk Indonesia

OMOH (One Man One Hope) Movement, from PLN Personnel to Indonesia

Pada tahun 2019, insan PLN dan anak perusahaan sepakat mengusung gerakan sosial menggalang dana sukarela untuk membantu biaya pasang baru listrik bagi keluarga tidak mampu. Gerakan ini diberi nama OMOH (*One Man One Hope*), yang menggambarkan keinginan setiap insan PLN untuk mewujudkan harapan para keluarga Indonesia yang ingin menikmati listrik namun tidak mampu membayar biaya pasang.

Hingga akhir tahun 2019, dana yang telah terkumpul mencapai Rp5,56 miliar yang digunakan untuk membiayai pasang baru listrik daya 450 VA bagi 7.571 rumah tangga. Sebarannya meliputi 2.836 rumah tangga di Sumatera, 2.829 rumah tangga di Jawa, 1.374 rumah tangga di Bali dan Nusa Tenggara, 188 rumah tangga di Kalimantan, 205 rumah tangga di Sulawesi, dan 139 rumah tangga di Maluku dan Papua. Proses penyambungan listrik masih terus bergulir, sebanyak 2.380 rumah tangga di seluruh Indonesia saat ini telah menikmati listrik dari program OMOH, dan 5.191 rumah tangga masih dalam proses penyambungan. Penerimaan donasi program OMOH masih terus dilakukan hingga 31 Oktober 2020 melalui aplikasi LinkAJA.

Gerakan sukarela OMOH berawal dari gagasan internal PLN, seorang pegawai PLN. Saat terjadi bencana gempa di Pidie, Aceh tahun 2016, pegawai PLN yang melihat sendiri banyaknya keluarga tidak mampu yang belum berlistrik, bertekad memberikan bantuan penyambungan listrik dari kantongnya sendiri minimal satu rumah tangga per tahun. PLN mengapresiasi inisiatif ini dan menyediakan sarana bagi insan PLN yang ingin berbuat kebaikan yang sama melalui Program OMOH. Kini gerakan OMOH terus bergulir dan semakin banyak pegawai yang memberikan donasinya. Gerakan OMOH membantu masyarakat untuk merasakan kehidupan yang lebih baik.

In 2019, personnel of PLN and subsidiaries agreed to carry out a social movement to voluntarily raise funds to help with the cost of new power connection for underprivileged families. This movement was called OMOH (One Man One Hope), depicting the desire of all PLN personnel to realize the hopes of Indonesian families to be electrified but could not afford the installation fee.

At the end of 2019, the collected funds reached Rp5.56 billion, which was used to finance new power connection of 450 VA for 7,571 households. The distribution covered 2,836 households in Sumatra, 2,829 households in Java, 1,374 households in Bali and Nusa Tenggara, 188 households in Kalimantan, 205 households in Sulawesi and 139 households in Maluku and Papua. The power connection process is still running, with 2,380 households throughout Indonesia now enjoying electricity through the OMOH program. 5,191 households are still under installation. Donations for the OMOH program will continue until October 31, 2020 through the LinkAJA application.

The OMOH voluntary movement started with an idea from internal PLN, an employee of PLN. During the 2016 earthquake in Pidie, Aceh, PLN employee, who saw for himself the number of disadvantaged families that were not electrified, was determined to provide electricity using his own money, at least for one household per year. PLN appreciated this initiative and provided a means for PLN personnel who were willing to do the same, through the OMOH Program. To date, the OMOH movement is ongoing and more and more employees are giving donations. The OMOH movement helps people to enjoy a better life.

Para Pejuang Indonesia Terang

Bright Indonesia Fighters

/12

Melistriki pulau-pulau wilayah 3T memiliki tantangan tersendiri. Selain letak geografis, tantangan lainnya adalah sulitnya akses transportasi ke lokasi, cuaca buruk dan gelombang tinggi, serta ketiadaan sinyal komunikasi. Di balik semua tantangan itu, ada pegawai PLN yang telah bekerja keras penuh dedikasi demi melistriki seluruh pelosok negeri.

Susanto, petugas tim layanan teknik PLN Cabang Muarasabak, Jambi, yang harus berjibaku melewati jalan tanah yang licin dan berlumpur saat hujan, demi memenuhi SLA 1x40 menit dalam melayani pelanggan. Ada Arief Fadillah, pegawai PLN Unit Layanan Pembangkit Sinabang PLN UIW Aceh yang bangga berhasil melistriki 30 keluarga di Pulau Teupah, salah satu pulau terluar di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Senyum warga dan anak-anak pulau Teupah yang kini bisa bekerja, belajar dan mengaji dengan listrik yang cukup, meluruhkan segala lelah dan perjuangan melalui hempasan gelombang, terik matahari dan derasnya hujan badai dalam perjalanan ke pulau Teupah.

Di Distrik Okaba, Papua, ada Sudarnoto, yang sudah 10 tahun bertugas menjaga keandalan listrik di distrik tesebut. Tak kurang dari 6,5 jam waktu yang dibutuhkan dari Merauke untuk mencapai distrik Okaba melalui jalur darat dan air dengan kondisi medan berlumpur melewati hutan dan kondisi sungai yang tidak menentu. Sementara di perbatasan Indonesia-Malaysia, Kalimantan Utara, Mochammad Fadel dan Tito Setyo menjadi garda terdepan ULD Krayan. Untuk mencapai Krayan, jalur udara menjadi cara paling efektif. Jalan darat, hanya bisa lewat Malinau dengan medan berat dan perjalanan selama 7 hari. Kedua petugas PLN ini telah menorehkan prestasi melistriki dua desa setelah membangun tiang listrik dari kayu, menarik jaringan, serta memasang kWh meter di 389 rumah.

Apa yang dilakukan semua pejuang listrik tersebut menjadi bukti nyata energi optimisme insan PLN untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan terus berkomitmen menjaga terang Indonesia.

Electrifying 3T islands has its own challenges. In addition to geographical location, other challenges are difficult access to transportation, bad weather and high waves, and lack of communication signals. Overcoming all these challenges, PLN employees worked hard with dedication to electrify all regions in the country.

Susanto, a member of the technical service team of PLN Muarasabak Branch, Jambi, had to struggle through slippery and muddy dirt roads when it rained, in order to meet the SLA of 1x40 minutes to serve customers. Arief Fadillah, an employee of Sinabang Power Plan Service Unit of PLN UIW Aceh was proud to successfully electrify 30 families on Teupah Island, one of the outer islands in Nanggroe Aceh Darussalam Province. The smiles of residents and children of Teupah Island were everywhere. They are now able to work, study and recite the Quran with enough lighting, shed all fatigue and struggle through the pounding waves, blazing sun and heavy rainstorms on the way to Teupah Island.

In Okaba District, Papua, Sudarnoto, has been in charge of maintaining electricity reliability in the district for 10 years. It takes no less than 6.5 hours from Merauke to reach Okaba district by land and water with muddy terrain passing through forests and fast flowing rivers. While at the Indonesia-Malaysia border, North Kalimantan, Mochammad Fadel and Tito Setyo became the front guard of ULD Krayan. To reach Krayan, air travel is the most effective way. Travelling by road takes 7 days via the heavy terrain around Malinau. The two PLN technicians worked wonders by electrifying the two villages after constructing wooden poles, installing pull networks and kWh meters for 389 houses.

Everything the electricity fighters have done is clear proof of the optimism of PLN personnel to provide the best possible service to the community and to keep to their commitment to maintain “Bright Indonesia”.

Laba Usaha

Operating Profit

Rp44,16

triliun trillion

Laba usaha PLN tahun 2019 setelah subsidi mengalami kenaikan menjadi Rp44,16 triliun dari Rp35,98 triliun di tahun 2018.

PLN's operating profit in 2019 after subsidies increased to Rp44.16 trillion from Rp35.98 trillion in 2018.

Kinerja Keuangan 2019

2019 Financial Performance

Dengan strategi bauran energi yang efektif dan efisiensi operasi di semua lini, PLN mencatat kinerja keuangan yang solid dengan pertumbuhan pendapatan 4,7% dan laba sebelum pajak meningkat 31,2% dibandingkan tahun sebelumnya.

With energy mix strategy that is effective and efficient for operations on all area, PLN recorded a solid financial performance with 4.7% growth of revenue and 31.2% profit before tax increased compared to previous years.

Laba Sebelum Pajak

Income Before Tax

Rp26,12

triliun trillion

Di akhir tahun 2019 PLN tetap membukukan kinerja keuangan positif dengan laba sebelum pajak sebesar Rp26,12 triliun, meningkat dibanding Rp19,90 triliun di tahun 2018.

At the end of 2019, PLN continued to record positive financial performance with an income before tax of Rp26.12 Trillion, increased compared to Rp19.9 Trillion in 2018.

Pendapatan Usaha
Operating Income

4,67%

Rp272,89
triliun trillion

Rp285,64
triliun trillion

Pendapatan usaha PLN mengalami kenaikan 4,67% dari Rp272,89 triliun di tahun 2018 menjadi Rp285,64 triliun di tahun 2019.

PLN's operating income increased 4.67% from Rp272.89 trillion in 2018 to Rp285.64 trillion in 2019.

Pendapatan Penjualan Tenaga Listrik
Electricity Sales Revenue

4,78%

Rp263,47
triliun trillion

Rp276,06
triliun trillion

Pendapatan penjualan tenaga listrik di tahun 2019 naik sebesar 4,78% menjadi Rp276,06 triliun dibanding Rp 263,48 tahun sebelumnya.

Electricity sales revenue in 2019 increased by 4.78% to Rp276.06 trillion compared to Rp263.48 the previous year.

Aset
Assets

Rp1.492,49
triliun trillion

Rp1.585,06
triliun trillion

6,2%

Aset PLN mengalami kenaikan 6,2% dari Rp1.492,49 triliun di akhir tahun 2018 menjadi Rp1.585,06 triliun di tahun 2019.

PLN's assets increased by 6.2% from Rp1,492.49 trillion at the end of 2018 to Rp1,585.06 trillion in 2019.

Ikhtisar Keuangan

Financial Highlights

(Rp miliar)				(Rp billion)
IKHTISAR POSISI KEUANGAN	**2017**	**2018**	**2019**	**SUMMARY OF FINANCIAL POSITION**
Aset tidak lancar	1.241.160	1.379.072	1.433.688	Non-Current Assets
Aset lancar	93.797	113.415	151.367	Current Assets
JUMLAH ASET	1.334.958	1.492.488	1.585.055	TOTAL ASSETS
Liabilitas jangka panjang	326.466	407.178	496.376	Long Term Liabilities
Liabilitas jangka pendek	139.075	157.896	159.298	Short Term Liabilities
JUMLAH LIABILITAS	465.541	565.074	655.675	TOTAL LIABILITIES
JUMLAH EKUITAS	869.417	927.414	929.380	TOTAL EQUITY
Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	6.878	8.726	10.301	Investments in Associates and Joint Ventures
IKHTISAR LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN				**OVERVIEW OF INCOME STATEMENT & COMPREHENSIVE INCOME**
PENDAPATAN USAHA	255.295	272.898	285.641	REVENUES
Penjualan Tenaga Listrik	246.587	263.478	276.062	Sales of Electricity
Penyambungan Pelanggan	7.113	7.309	6.935	Customer Connection Fees
Lain-lain	1.595	2.111	2.644	Others
BEBAN USAHA	275.474	308.189	315.441	OPERATING EXPENSES
Bahan bakar dan pelumas	116.948	137.267	136.084	Fuel and Lubricants
Pembelian tenaga listrik	72.427	84.268	83.564	Purchased Electricity
Sewa	6.592	4.272	3.617	Lease
Pemeliharaan	19.516	20.738	22.328	Maintenance
Kepegawaian	23.125	22.950	25.909	Personnel
Penyusutan	29.161	30.745	35.318	Depreciation
Lain-lain	7.707	7.950	8.620	Others
LABA (RUGI) USAHA SEBELUM SUBSIDI	(20.179)	(35.291)	(29.800)	OPERATING INCOME AFTER SUBSIDY
Subsidi Listrik Pemerintah	45.738	48.102	51.712	Government Electricity Subsidy
Pendapatan Kompensasi	-	23.173	22.254	Compensation Income
LABA USAHA SETELAH SUBSIDI	25.559	35.984	44.165	OPERATING INCOME AFTER SUBSIDY
LABA SEBELUM PAJAK	8.544	19.901	26.119	INCOME (LOSS) BEFORE TAX
Beban Pajak	(4.116)	(8.325)	(21.797)	Tax Expenses
LABA TAHUN BERJALAN	4.428	11.576	4.322	INCOME FOR THE YEAR
Laba tahun berjalan diatribusikan kepada:				**Income for the Year Attributable to:**
Pemilik entitas induk	4.410	11.568	4.271	Owners of the Parent
Kepentingan non pengendali	18	7	51	Non-Controlling Interest
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(6.269)	58.963	27	TOTAL COMPREHENSIVE (LOSS) INCOME FOR THE YEAR
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan diatribusikan kepada:				**Total comprehensive (expense) income for the year attributable to:**
Pemilik entitas induk	(6.287)	58.955	(25)	Owner of the parent
Kepentingan non pengendali	18	7	51	Non-controlling interest
LABA PER SAHAM DASAR (dalam Rupiah penuh)	50.541	105.332	37.516	BASIC EARNINGS PER SHARE (in full Rupiah)

Rasio Lancar
Current Ratio
(%)

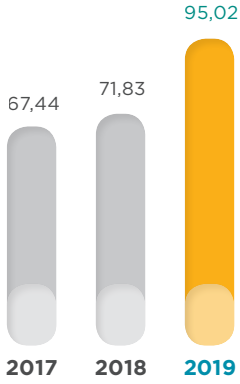

Total Liabilitas terhadap Aset
Debt to Asset Ratio
(%)

Rasio Laba terhadap Aset
Net Return on Investment
(%)

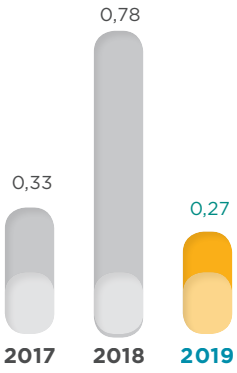

Total Liabilitas terhadap Ekuitas
Debt to Equity Ratio
(%)

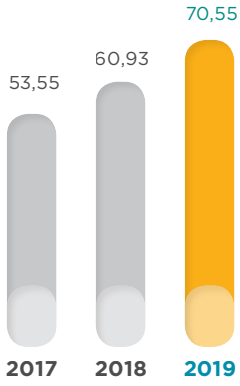

Rasio Laba terhadap Ekuitas
Net Return on Equity
(%)

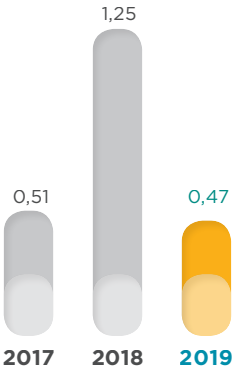

RASIO-RASIO KEUANGAN	2017	2018	2019	FINANCIAL RATIOS
Rasio Solvabilitas				**Solvability Ratio**
Total Liabilitas terhadap Aset	34,87%	37,86%	41, 37%	Debt to Asset Ratio
Total Liabilitas terhadap Ekuitas	53,55%	60,93%	70,55%	Debt to Equity Ratio
Rasio Likuiditas				**Liquidity Ratio**
Rasio Lancar	67,44%	71,83%	95,02%	Current Ratio
Rasio Kas	30,62%	21,86%	29,46%	Cash Ratio
Rasio Rentabilitas				**Rentability Ratio**
Rasio Laba terhadap Ekuitas	0,51	1,25	0,47	Net Return on Equity
Rasio Laba terhadap Aset	0,33	0,78	0,27	Net Return on Investment
Rasio Profitabilitas				**Profatibility Ratio**
Margin Laba Kotor	10,37%	13,66%	16,00%	Gross Profit Margin
Margin Laba Bersih	1,80%	4,39%	1,57%	Net Profit Margin
Rasio Operasional				**Operational Ratio**
Perputaran Piutang Usaha (Kali)	11,16	11,39	11,28	Receivable Turnover (Times)
Collection Period (Hari)	32,71	32,05	32,35	Collection Period (Days)
Perputaran Aset Tetap (Kali)	0,20	0,24	0,23	Fixed Asset Turn Over (Times)

Kinerja Operasional 2019

2019 Operational Performance

Penjualan Listrik
Electricity Sales

4.6%

234.618 GWh ➡ **245.518 GWh**

Penjualan tenaga listrik nasional mencapai 245.518 GWh, atau meningkat sebesar 4,6% dari 234.618 GWh pada tahun 2018.
National electricity sales reached 245,518 GWh, an increase of 4.6% from 234,618 GWh in 2018.

Daya Tersambung
Connected Power

6.0%

130.281 MVA ➡ **138.077 MVA**

Daya tersambung meningkat 6,0% dari 130.281 MVA pada tahun 2018 menjadi 138.077 MVA.
Connected power increased by 6.0% from 130,281 MVA in 2018 to 138,077 MVA.

Jumlah Pelanggan
Number of Customer

5.3%

71,92 ➡ **75,71** juta pelanggan / million customers

Jumlah pelanggan PLN mencapai 75,71 juta pelanggan, tumbuh 5,3% dibandingkan 71,92 juta pelanggan pada tahun 2018.
The number of PLN customers reached 75.71 million, growing by 5.3% compared to 71.92 million customers at end of 2018.

Susut Jaringan
Network Losses

9.32%

9,51% ➡ **9,32%**

Susut jaringan mengalami perbaikan dengan nilai yang menurun dari 9,51% pada tahun 2018 menjadi 9,32%.
Network losses improved with a decreasing percentage from 9.51% in 2018 to 9.32%.

Uraian	Satuan Unit	2019	2018	2017	Description
Penjualan Listrik	GWh	234.618	234.618	223.134	Electricity Sales
Jumlah Pelanggan	Pelanggan Customer	75.705.614	71.917.397	68.068.283	Number of Customers
Daya Tersambung	MVA	138.077	130.281	122.018	Connected power
Susut Jaringan	%	9,32	9,51	8,75	Network Losses
SAIDI[1)]	Menit/pelanggan Minnutes/customer	1.136,72	958,35	1.159,60	SAIDI
SAIFI[2)]	Kali/pelanggan Timer/customer	11,51	9,90	12,65	SAIFI
Kapasitas Terpasang	MW	62.833	57.822	55.936	Installed Capacity
Produksi Listrik	GWh	278.941	267.085	254.660	Electricity Production
BPP[3)]	Rp	1.385	1.406	1.318	BPP

[1)] System Average Interruption Duration Index
[2)] System Average Interruption Frequency Index
[3)] Biaya Pokok Penyediaan | Cost of Suppy

Penjualan Listrik
Electricity Sales
(GWh)

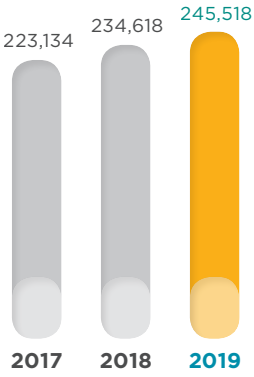

Jumlah Pelanggan
Number of Customer
(juta pelanggan million customers)

Daya Tersambung
Connected Power
(MVA)

Ikhtisar Saham & Obligasi

Bonds & Shares Highlights

Ikhtisar Saham Shares Highlights

100%

Saham dimiliki Pemerintah Republik Indonesia

Share owned by Government of the Republic of Indonesia

Nama Pemegang Saham Shareholders Name	**Modal disetor dan ditempatkan penuh (lembar saham)** Subscribed and Paid up (Shares)	**Persentase** Percentage
Pemerintah Republik Indonesia	115.181.002	100%

* Satu Lembar Saham senilai Rp1.000.000,- | One Share as Rp1,000,000,-

Obligasi Domestik Masih Beredar Outstanding Domestic Bonds

Obligasi Lokal Local Bond		**Plafon** Plafond	**Penerbitan** Issued	**Tenor (tahun)** (year)	**Kode Obligasi** Bond Code	**Jatuh Tempo** Notional Payment Due	**Pefindo**	
							2018	**2019**
Obligasi PLN VIII Seri B | Bonds PLN VIII Series B	IDR	865,000,000,000	21 Juni/June 2006	15	PPLN08B	21 Juni/June 2021	AAA	AAA
Obligasi PLN IX Seri B | Bonds PLN IX Series B	IDR	1,200,000,000,000	10 Juli/July 2007	15	PPLN09B	10 Juli/July 2022	AAA	AAA
Obligasi PLN XI Seri B | Bonds PLN IX Series B	IDR	1,783,000,000,000	12 Januari/ Januari 2010	10	PPLN11B	12 Januari/ Januari 2020	AAA	AAA
Sukuk Ijarah PLN IV Seri B | Sukuk Ijarah PLN IV Series B	IDR	167,000,000,000	12 Januari/ Januari 2010	10	SIKPPLN03B	12 Januari/ Januari 2020	AAA	AAA
Obligasi PLN XII Seri B | Bonds PLN XII Series B	IDR	1,855,000,000,000	8 Juli/July 2010	12	PPLN12B	8 Juli/July 2022	AAA	AAA
Sukuk Ijarah PLN V Seri B | Sukuk Ijarah PLN V Series B	IDR	340,000,000,000	8 Juli/July 2010	12	SIKPPLN04B	8 Juli/July 2022	AAA	AAA
Berkelanjutan I PLN Tahap I Seri A | Bonds Shelf I PLN Tranche I Series A	IDR	182,000,000,000	5 Juli/July 2013	7	PPLN01ACN1	5 Juli/July 2020	AAA	AAA
Berkelanjutan I PLN Tahap I Seri B | PLN Tranche I Series B	IDR	697,000,000,000	5 Juli/July 2013	10	PPLN01BCN1	5 Juli/July 2023	AAA	AAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I | Sukuk Ijarah Shelf I Tranche I PLN	IDR	121,000,000,000	5 Juli/July 2013	7	SIPPLN01CN1	5 Juli/July 2020	AAA	AAA
Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri B | Shelf I PLN Tranche II Series B	IDR	651,000,000,000	10 Desember/ December 2013	10	PPLN01BCN2	10 Desember/ December 2023	AAA	AAA

Obligasi Lokal Local Bond	Plafon Plafond		Penerbitan Issued	Tenor (tahun) (year)	Kode Obligasi Bond Code	Jatuh Tempo Notional Payment Due	Pefindo	
							2018	2019
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Seri B | Sukuk Ijarah Shelf I PLN Tranche II Series B	IDR	108,000,000,000	10 Desember/December 2013	10	SIPPLN01BCN2	10 Desember/December 2023	AAA	AAA
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri A | Bonds Shelf II PLN Tranche I Series A	IDR	214,000,000,000	11 Juli/July 2017	5	PPLN02ACN1	11 Juli/July 2022	AAA	AAA
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri B | Bonds Shelf II PLN Tranche I Series B	IDR	169,000,000,000	11 Juli/July 2017	7	PPLN02BCN1	11 Juli/July 2024	AAA	AAA
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri C | Bonds Shelf II PLN Tranche I Series C	IDR	1,217,000,000,000	11 Juli/July 2017	10	PPLN02CCN1	11 Juli/July 2027	AAA	AAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri A | Sukuk Ijarah Shelf II PLN Tranche I Series A	IDR	186,000,000,000	11 Juli/July 2017	5	SIPPLN02ACN1	11 Juli/July 2022	AAA	AAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri B | Sukuk Ijarah Shelf II PLN Tranche I Series B	IDR	214,000,000,000	11 Juli/July 2017	10	SIPPLN02BCN1	11 Juli/July 2027	AAA	AAA
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri A | Bonds Shelf II PLN Tranche II Series A	IDR	451,500,000,000	3 November 2017	5	PPLN02ACN2	3 November 2022	AAA	AAA
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri B | Bonds Shelf II PLN Tranche II Series B	IDR	201,000,000,000	3 November 2017	7	PPLN02BCN2	3 November 2024	AAA	AAA
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri C | Bonds Shelf II PLN Tranche II Series C	IDR	800,000,000,000	3 November 2017	10	PPLN02CCN2	3 November 2027	AAA	AAA
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri D | Bonds Shelf II PLN Tranche II Series D	IDR	1,093,000,000,000	3 November 2017	15	PPLN02DCN2	3 November 2032	AAA	AAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri A | Sukuk Ijarah Shelf II PLN Tranche II Series A	IDR	83,500,000,000	3 November 2017	5	SIPPLN02ACN2	3 November 2022	AAA	AAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri B | Sukuk Ijarah Shelf II PLN Tranche II Series B	IDR	121,000,000,000	3 November 2017	10	SIPPLN02BCN2	3 November 2027	AAA	AAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri C | Sukuk Ijarah Shelf II PLN Tranche II Series C	IDR	490,000,000,000	3 November 2017	15	SIPPLN02CCN2	3 November 2032	AAA	AAA
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Seri A | Bonds Shelf II PLN Tranche III Series A	IDR	457,000,000,000	22 Februari/February 2018	5	PPLN02ACN3	22 Februari/February 2023	AAA	AAA
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Seri B | Bonds Shelf II PLN Tranche III Series B	IDR	10,000,000,000	22 Februari/February 2018	7	PPLN02BCN3	22 Februari/February 2025	AAA	AAA
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Seri C | Bonds Shelf II PLN Tranche III Series C	IDR	341,000,000,000	22 Februari/February 2018	10	PPLN02CCN3	22 Februari/February 2028	AAA	AAA
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Seri D | Bonds Shelf II PLN Tranche III Series D	IDR	362,000,000,000	22 Februari/February 2018	15	PPLN02DCN3	22 Februari/February 2033	AAA	AAA
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Seri E | Bonds Shelf II PLN Tranche III Series E	IDR	1,365,000,000,000	22 Februari/February 2018	20	PPLN02ECN3	22 Februari/February 2038	AAA	AAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Seri A | Sukuk Ijarah Shelf II PLN Tranche III Series A	IDR	104,000,000,000	22 Februari/February 2018	5	SIPPLN02ACN3	22 Februari/February 2023	AAA	AAA

Obligasi Lokal Local Bond	Plafon Plafond		Penerbitan Issued	Tenor (tahun) (year)	Kode Obligasi Bond Code	Jatuh Tempo Notional Payment Due	Pefindo	
							2018	2019
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Seri B | Sukuk Ijarah Shelf II PLN Tranche III Series B	IDR	88,000,000,000	22 Februari/ February 2018	10	SIPPLN02BCN3	22 Februari/ February 2028	AAA	AAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Seri C | Sukuk Ijarah Shelf II PLN Tranche III Series C	IDR	57,500,000,000	22 Februari/ February 2018	15	SIPPLN02CCN3	22 Februari/ February 2033	AAA	AAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Seri D | Sukuk Ijarah Shelf II PLN Tranche III Series D	IDR	449,000,000,000	22 Februari/ February 2018	20	SIPPLN02DCN3	22 Februari/ February 2038	AAA	AAA
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Seri A | Bonds Shelf III PLN Tranche I Series A	IDR	78,500,000,000	10 Juli/July 2018	5	PPLN03ACN1	10 Juli/July 2023	AAA	AAA
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Seri B | Bonds Shelf III PLN Tranche I Series B	IDR	442,000,000,000	10 Juli/July 2018	7	PPLN03BCN1	10 Juli/July 2025	AAA	AAA
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Seri C | Bonds Shelf III PLN Tranche I Series C	IDR	138,000,000,000	10 Juli/July 2018	10	PPLN03CCN1	10 Juli/July 2028	AAA	AAA
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Seri D | Bonds Shelf III PLN Tranche I Series D	IDR	281,000,000,000	10 Juli/July 2018	15	PPLN03DCN1	10 Juli/July 2033	AAA	AAA
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Seri E | Bonds Shelf III PLN Tranche I Series E	IDR	339,000,000,000	10 Juli/July 2018	20	PPLN03ECN1	10 Juli/July 2038	AAA	AAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Seri A | Sukuk Ijarah Shelf III PLN Tranche I Series A	IDR	127,000,000,000	10 Juli/July 2018	5	SIPPLN03ACN1	10 Juli/July 2023	AAA	AAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Seri B | Sukuk Ijarah Shelf III PLN Tranche I Series B	IDR	150,000,000,000	10 Juli/July 2018	7	SIPPLN03BCN1	10 Juli/July 2025	AAA	AAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Seri C | Sukuk Ijarah Shelf III PLN Tranche I Series C	IDR	258,000,000,000	10 Juli/July 2018	10	SIPPLN03CCN1	10 Juli/July 2028	AAA	AAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Seri D | Sukuk Ijarah Shelf III PLN Tranche I Series D	IDR	105,000,000,000	10 Juli/July 2018	15	SIPPLN03DCN1	10 Juli/July 2033	AAA	AAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Seri E | Sukuk Ijarah Shelf III PLN Tranche I Series E	IDR	110,000,000,000	10 Juli/July 2018	20	SIPPLN03ECN1	10 Juli/July 2038	AAA	AAA
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Seri A | Bonds Shelf III PLN Tranche II Series A	IDR	210,000,000,000	10 Oktober/ October 2018	5	PPLN03ACN2	10 Oktober/ October 2023	AAA	AAA
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Seri B | Bonds Shelf III PLN Tranche II Series B	IDR	483,000,000,000	10 Oktober/ October 2018	7	PPLN03BCN2	10 Oktober/ October 2025	AAA	AAA
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Seri C | Bonds Shelf III PLN Tranche II Series C	IDR	78,000,000,000	10 Oktober/ October 2018	10	PPLN03CCN2	10 Oktober/ October 2028	AAA	AAA
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Seri D | Bonds Shelf III PLN Tranche II Series D	IDR	15,000,000,000	10 Oktober/ October 2018	15	PPLN03DCN2	10 Oktober/ October 2033	AAA	AAA
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Seri E | Bonds Shelf III PLN Tranche II Series E	IDR	46,000,000,000	10 Oktober/ October 2018	20	PPLN03ECN2	10 Oktober/ October 2038	AAA	AAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Seri A | Sukuk Ijarah Shelf III PLN Tranche II Series A	IDR	114,000,000,000	10 Oktober/ October 2018	5	SIPPLN03ACN2	10 Oktober/ October 2023	AAA	AAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Seri B | Sukuk Ijarah Shelf III PLN Tranche II Series B	IDR	45,000,000,000	10 Oktober/ October 2018	7	SIPPLN03BCN2	10 Oktober/ October 2025	AAA	AAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Seri C | Sukuk Ijarah Shelf III PLN Tranche II Series C	IDR	15,000,000,000	10 Oktober/ October 2018	10	SIPPLN03CCN2	10 Oktober/ October 2028	AAA	AAA

Obligasi Lokal Local Bond		Plafon Plafond	Penerbitan Issued	Tenor (tahun) (year)	Kode Obligasi Bond Code	Jatuh Tempo Notional Payment Due	Pefindo	
							2018	2019
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Seri D | Sukuk Ijarah Shelf III PLN Tranche II Series D	IDR	50,000,000,000	10 Oktober/ October 2018	20	SIPPLN03DCN2	10 Oktober/ October 2038	AAA	AAA
OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 2019 SERI A	IDR	369,000,000,000	19 Februari/ February 2019	3	PPLN03ACN3	19 Februari/ February 2022	AAA	AAA
OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 2019 SERI B	IDR	1,212,000,000,000	19 Februari/ February 2019	5	PPLN03BCN3	19 Februari/ February 2024	AAA	AAA
OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 2019 SERI C	IDR	183,000,000,000	19 Februari/ February 2019	7	PPLN03CCN3	19 Februari/ February 2026	AAA	AAA
OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 2019 SERI D	IDR	211,000,000,000	19 Februari/ February 2019	10	PPLN03DCN3	19 Februari/ February 2029	AAA	AAA
OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 2019 SERI E	IDR	263,000,000,000	19 Februari/ February 2019	15	PPLN03ECN3	19 Februari/ February 2034	AAA	AAA
OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 2019 SERI F	IDR	155,000,000,000	19 Februari/ February 2019	20	PPLN03FCN3	19 Februari/ February 2039	AAA	AAA
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 2019 SERI A	IDR	263,000,000,000	19 Februari/ February 2019	3	SIPPLN03ACN3	19 Februari/ February 2022	AAA	AAA
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 2019 SERI B	IDR	263,000,000,000	19 Februari/ February 2019	5	SIPPLN03BCN3	19 Februari/ February 2024	AAA	AAA
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 2019 SERI C	IDR	204,000,000,000	19 Februari/ February 2019	7	SIPPLN03CCN3	19 Februari/ February 2026	AAA	AAA
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 2019 SERI D	IDR	45,000,000,000	19 Februari/ February 2019	10	SIPPLN03DCN3	19 Februari/ February 2029	AAA	AAA
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 2019 SERI E	IDR	60,000,000,000	19 Februari/ February 2019	15	SIPPLN03ECN3	19 Februari/ February 2034	AAA	AAA
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 2019 SERI F	IDR	28,000,000,000	19 Februari/ February 2019	20	SIPPLN03FCN3	19 Februari/ February 2039	AAA	AAA
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri A	IDR	637,000,000,000	1 Agustus/ August 2019	5	PPLN03ACN4	1 Agustus/ August 2024	AAA	AAA
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri B	IDR	315,250,000,000	1 Agustus/ August 2019	7	PPLN03BCN4	1 Agustus/ August 2026	AAA	AAA
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri C	IDR	549,000,000,000	1 Agustus/ August 2019	10	PPLN03CCN4	1 Agustus/ August 2029	AAA	AAA
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri D	IDR	395,000,000,000	1 Agustus/ August 2019	15	PPLN03DCN4	1 Agustus/ August 2034	AAA	AAA
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri E	IDR	1,057,370,000,000	1 Agustus/ August 2019	20	PPLN03ECN4	1 Agustus/ August 2039	AAA	AAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri A	IDR	274,000,000,000	1 Agustus/ August 2019	5	SIPPLN03ACN4	1 Agustus/ August 2024	AAA	AAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri B	IDR	368,000,000,000	1 Agustus/ August 2019	7	SIPPLN03BCN4	1 Agustus/ August 2026	AAA	AAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri C	IDR	20,000,000,000	1 Agustus/ August 2019	10	SIPPLN03CCN4	1 Agustus/ August 2029	AAA	AAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri D	IDR	49,000,000,000	1 Agustus/ August 2019	15	SIPPLN03DCN4	1 Agustus/ August 2034	AAA	AAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri E	IDR	539,000,000,000	1 Agustus/ August 2019	20	SIPPLN03ECN4	1 Agustus/ August 2039	AAA	AAA
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri A	IDR	795,700,000,000	1 Oktober/ October 2019	5	PPLN03ACN5	1 Oktober/ October 2024	AAA	AAA
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri B	IDR	445,000,000,000	1 Oktober/ October 2019	7	PPLN03BCN5	1 Oktober/ October 2026	AAA	AAA

Obligasi Lokal Local Bond	**Plafon** Plafond		**Penerbitan** Issued	**Tenor (tahun)** (year)	**Kode Obligasi** Bond Code	**Jatuh Tempo** Notional Payment Due	**Pefindo**	
							2018	**2019**
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri C	IDR	6,200,000,000	1 Oktober/ October 2019	10	PPLN03CCN5	1 Oktober/ October 2029	AAA	AAA
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri D	IDR	166,000,000,000	1 Oktober/ October 2019	15	PPLN03DCN5	1 Oktober/ October 2034	AAA	AAA
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri E	IDR	500,000,000,000	1 Oktober/ October 2019	20	PPLN03ECN5	1 Oktober/ October 2039	AAA	AAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri A	IDR	6,500,000,000	1 Oktober/ October 2019	5	SIPPLN03ACN5	1 Oktober/ October 2024	AAA	AAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri B	IDR	10,000,000,000	1 Oktober/ October 2019	7	SIPPLN03BCN5	1 Oktober/ October 2026	AAA	AAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri C	IDR	92,000,000,000	1 Oktober/ October 2019	10	SIPPLN03CCN5	1 Oktober/ October 2029	AAA	AAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri D	IDR	135,000,000,000	1 Oktober/ October 2019	15	SIPPLN03DCN5	1 Oktober/ October 2034	AAA	AAA
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri E	IDR	554,000,000,000	1 Oktober/ October 2019	20	SIPPLN03ECN5	1 Oktober/ October 2039	AAA	AAA

Obligasi Internasional Masih Beredar Outstanding International Bonds

Obligasi Lokal Local Bond	Plafon Plafond		Penerbitan Issued	Tenor (tahun) (year)	Kode Obligasi Bond Code	Jatuh Tempo Notional Payment Due	S & P		Moody		Fitch	
							2018	2019	2018	2019	2018	2019
II B	USD	500,000,000	28 Juni/June 2007	30	56068TAD9 N54360AD9	29 Juni/June 2037	BBB- BBB-	BBB BBB	Baa3 Baa3	Baa2 Baa2	BBB- BBB-	- -
III	USD	750,000,000	7 Agustus/August 2009	10	N54360AE7 56068TAE7	7 Agustus/August 2019	BBB- BBB-	BBB BBB	Baa3 Baa3	Baa2 Baa2	BBB- BBB-	- -
IV	USD	1,250,000,000	6 November 2009	10	N54360AF4 56068TAF4	20 Januari/January 2020	BBB- BBB-	BBB BBB	Baa3 Baa3	Baa2 Baa2	BBB- BBB-	- -
GMTN 2011	USD	1,000,000,000	22 November 2011	10	71568PAA7 71568QAA5	22 November 2021	BBB- BBB-	BBB BBB	Baa3 Baa3	Baa2 Baa2	BBB- BBB-	BBB BBB
GMTN 2012	USD	1,000,000,000	24 Oktober/October 2012	30	71568PAB5 71568QAB3	24 Oktober/October 2042	BBB- BBB-	BBB BBB	Baa3 Baa3	Baa2 Baa2	BBB- BBB-	BBB BBB
GMTN 2017 - 10Y	USD	1,500,000,000	15 Mei/May 2017	10	71568PAC3 71568QAC1	15 Mei/May 2027	- -	- -	Baa3 Baa3	Baa2 Baa2	BBB- BBB-	BBB BBB
GMTN 2017 - 30Y	USD	500,000,000	15 Mei/May 2017	30	71568PAD1 71568QAD9	15 Mei/May 2047	- -	- -	Baa3 Baa3	Baa2 Baa2	BBB- BBB-	BBB BBB
GMTN 2018 Seri 1 - USD 10Y	USD	1,000,000,000	21 Mei/May 2018	10	71568PAE9 71568QAE7	21 Mei/May 2028	- -	- -	Baa3 Baa3	Baa2 Baa2	BBB- BBB-	BBB BBB
GMTN 2018 Seri 2 - USD 30Y	USD	1,000,000,000	21 Mei/May 2018	30	71568PAF6 71568QAF4	21 Mei/May 2048	- -	- -	Baa3 Baa3	Baa2 Baa2	BBB- BBB-	BBB BBB
GMTN 2018 Seri 3 - USD 10Y	USD	500,000,000	25 Oktober/October 2018	10.25	71568PAG4 71568QAG2	25 Januari/January 2029	- -	- -	Baa2 Baa2	Baa2 Baa2	BBB BBB	BBB BBB
GMTN 2018 Seri 4 - USD 30Y	USD	500,000,000	25 Oktober/October 2018	30.25	71568PAH2 71568QAH0	25 Januari/January 2049	- -	- -	Baa2 Baa2	Baa2 Baa2	BBB BBB	BBB BBB
GMTN 2018 Seri 5 - EUR 7Y	EUR	500,000,000	25 Oktober/October 2018	7	XS1895571328 XS1891336932	25 Oktober/October 2025	- -	- -	Baa2 Baa2	Baa2 Baa2	BBB BBB	BBB BBB
GMTN 2019 Seri 6 - USD 10Y	USD	700,000,000	17 Juli/July 2019	10	71568PAJ8 71568QAJ6	17 Juli/July 2029	- -	BBB BBB	- -	Baa2 Baa2	BBB BBB	BBB BBB
GMTN 2019 Seri 7 - USD 30Y	USD	700,000,000	17 Juli/July 2019	30	71568PAK5 71568QAK3	17 Juli/July 2049	- -	BBB BBB	- -	Baa2 Baa2	BBB BBB	BBB BBB
Japanese Yen Bond 2019 Seri 1 - 3Y	JPY	3,700,000,000	20 September 2019	3	JP536002AK96 JP536002AK96	20 September 2022	- -	BBB BBB	- -	Baa2 Baa2	- -	- -
Japanese Yen Bond 2019 Seri 2 - 5Y	JPY	18,500,000,000	20 September 2019	5	JP536002BK95 JP536002BK95	20 September 2024	- -	BBB BBB	- -	Baa2 Baa2	- -	- -
Japanese Yen Bond 2019 Seri 4 - 10Y	JPY	1,000,000,000	20 September 2019	10	JP536002DK93 JP536002DK93	20 September 2029	- -	BBB BBB	- -	Baa2 Baa2	- -	- -
GMTN 2019 Seri 8 - USD 10.25Y	USD	500,000,000	5 November 2019	10.25	71568PAL3 71568QAL1	5 Februari/February 2030	- -	BBB BBB	- -	Baa2 Baa2	BBB BBB	BBB BBB
GMTN 2019 Seri 9 - USD 30.25Y	USD	500,000,000	5 November 2019	30.25	71568PAM1 71568QAM9	5 Februari/February 2050	- -	BBB BBB	- -	Baa2 Baa2	BBB BBB	BBB BBB
GMTN 2019 Seri 10 - EUR 12Y	EUR	500,000,000	5 November 2019	12	XS2073758612 XS2073758885	5 November 2031	- -	BBB BBB	- -	Baa2 Baa2	BBB BBB	BBB BBB

Laporan Manajemen

Management Reports

34 **Laporan Dewan Komisaris**
Report of the Board of Commissioners

54 **Dewan Komisaris**
Board of Commissioners

60 **Laporan Direksi**
Report of the Board of Directors

80 **Direksi**
Board of Directors

Rp
Rp
Rp
Rp

Laporan Dewan Komisaris

Report of the Board of Commissioners

Secara keseluruhan, kami menilai bahwa Direksi telah melakukan upaya yang maksimal dengan strategi bisnis yang tepat untuk merespons kondisi eksternal sehingga Perusahaan dapat menjaga kesinambungan pertumbuhan.

Overall, we consider that the Board of Directors has made maximum efforts with the right business strategy to respond to external conditions so that the Company can maintain sustainable growth.

Para Pemegang Saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Pertama-tama kami ingin memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga PT PLN (Persero) dapat melalui tahun 2019 dengan pencapaian kinerja yang positif. Perkenankanlah kami menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris atas perkembangan dan pengelolaan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.

Dear Honorable Shareholders and Stakeholders,

First of all, we would like to praise God Almighty for His mercy and grace, so that PT PLN (Persero) could go through the year of 2019 with positive performance achievements. Please allow us to deliver the supervisory report of Board of Commissioners regarding development and management of the Company for the financial year ended December 31, 2019.

Amien Sunaryadi
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner and Independent Commissioner

KONDISI EKSTERNAL

Kondisi ekonomi global pada tahun 2019 semakin dilanda ketidakpastian terutama sebagai imbas dari perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang berkepanjangan. Ketegangan AS-Tiongkok telah memicu kontraksi ekonomi di berbagai negara dan menekan volume perdagangan dunia. Hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi global tahun 2019. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam laporan tahunannya "World Economic Situation and Prospects 2020" yang dirilis tanggal 16 Januari 2020 menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi global tahun 2019 hanya mencapai 2,3%. Angka tersebut lebih rendah dari prediksi sebelumnya (3%). Jauh di bawah pertumbuhan tahun 2018 (3,6%), bahkan terendah dalam 10 tahun terakhir.

EXTERNAL ENVIRONMENT

The global economy in 2019 was uncertain, mainly as a result of the prolonged trade dispute between the United States (US) and China. US-China tensions triggered economic contractions in various countries and suppressed the world's trading volume. This affected global economic growth in 2019. The United Nations (UN) in its annual report "World Economic Situation and Prospects 2020" released on January 16, 2020 mentioned that the global economic growth in 2019 only reached 2.3%. This figure is lower than the predicted 3%, and far below the 3.6% growth in 2018, indeed the lowest in the last 10 years.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia sudah mengarah pada tanda-tanda resesi di sejumlah negara tertentu, turunnya kepercayaan konsumen dan meningkatnya gejolak pasar. Negara-negara mitra dagang AS dan Tiongkok, termasuk Indonesia, telah mengalami perlambatan ekonomi sebagai dampak langsung maupun tidak langsung dari perseteruan kedua negara dengan ekonomi terbesar dunia tersebut.

The slowing world economic growth led to recession signals in a number of countries, declining consumer confidence and increasing market turmoil. The US and China's trading partners, including Indonesia, experienced economic slowdowns as a direct or indirect impact of the dispute between the two countries with the world's largest economies.

Dibandingkan tahun sebelumnya, di tahun 2019 dampak perang dagang pada perekonomian Indonesia lebih signifikan. Melemahnya harga komoditas di pasar global, terutama batubara dan minyak kelapa sawit (*crude palm oil*/CPO), menekan volume perdagangan ekspor. Penurunan harga minyak mentah dunia berdampak pada harga rata-rata acuan minyak mentah Indonesia (Indonesia *Crude Price*/ICP) yang lebih rendah dari asumsi APBN sehingga menahan pencapaian target penerimaan negara dari sektor migas.

Compared to the previous year, in 2019 the impact of the trade war on the Indonesian economy was more significant. Weakening commodity prices in the global market, especially coal and crude palm oil (CPO), depressed the export trading volume. The decline in world crude oil prices had an impact on the average price of Indonesian Crude Price (ICP) which was lower than APBN assumptions, thereby holding back the achievement of the state revenue target from the oil and gas sector.

Di dalam negeri, hampir sepanjang tahun aktivitas ekonomi domestik masih tertahan karena adanya perhelatan nasional pemilihan umum legislatif dan presiden-wakil presiden pada bulan April 2019. Banyak kalangan usaha bersikap "*wait and see*" hingga situasi dianggap lebih kondusif. Di sisi lain, eksekusi tender proyek-proyek infrastruktur pemerintah mengalami penundaan karena menunggu pembentukan kabinet baru.

Meanwhile, the national economy was held back due to the national legislative and presidential-vice presidential elections in April 2019. Many business players took a "wait and see" position until the situation was considered more conducive. On the other hand, tender executions for government infrastructure projects were delayed, awaiting the new cabinet formation.

Perlambatan ekonomi domestik tak dapat dihindari. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tahunan hanya mencapai 5,02%, lebih rendah dibandingkan 5,17% pada tahun 2018, sebagai imbas dari perlambatan ekonomi global.

A slowdown in the domestic economy was unavoidable. Statistics Indonesia (BPS) announced that Indonesia's economic growth on an annual basis only reached 5.02%, lower than the 5.17% in 2018, as a result of the global economic slowdown.

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI ATAS PENGELOLAAN PERUSAHAAN

Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja Direksi berdasarkan pencapaian target kinerja yang telah disepakati yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2019 dan pencapaian indikator kinerja utama (KPI) korporat. Selain itu, Dewan Komisaris juga memonitor penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) di dalam pengelolaan Perusahaan.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF BOARD OF DIRECTORS

The Board of Commissioners assesses the performance of the Board of Directors primarily based on achievement of predetermined performance targets as set out in the Company's 2019 Work Plan and Budget as well as achievement of corporate key performance indicators (KPI). In addition, the Board of Commissioners also considers good corporate governance as carried out by Board of Directors.

Penilaian kinerja Direksi juga tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan Direksi melaksanakan penugasan Pemerintah, dalam hal ini merealisasikan program pembangunan strategis nasional proyek pembangkit 35.000 MW termasuk FTP I dan FTP II, lengkap dengan infrastruktur transmisi dan distribusi. Hingga akhir tahun 2019, kemajuan Proyek 35.000 MW yang terdiri dari: 6.811 MW telah mencapai tahap COD/SLO, 20.168 MW tahap konstruksi, 6.878 MW tahap belum konstruksi, 829,0 MW tahap pengadaan serta 734,0 tahap perencanaan.

Untuk seluruh program pembangunan infrastruktur PLN, proyek transmisi yang telah *energized* mencapai 6.222 kilometer sirkit (Kms) atau 189,3% dari target 3.287 Kms termasuk yang berasal dari penyelesaian proyek tahun sebelumnya (*carry over*). Sedangkan proyek gardu induk yang telah *energized* mencapai 17.507 MVA atau 162,8% dari target 10.752 MVA termasuk yang berasal dari penyelesaian proyek tahun sebelumnya (*carry over*).

Kinerja Keuangan

Realisasi pendapatan usaha Perusahaan tahun 2019 mencapai Rp285,64 triliun, naik 4,67% dibandingkan Rp272,90 triliun pada tahun 2018 dan tercapai 97,3% dari anggaran sebesar Rp293,42 triliun. Kontributor terbesar pendapatan usaha berasal dari penjualan tenaga listrik yang mencapai Rp276,06 triliun, naik 4,8% dari Rp263,48 triliun pada tahun 2018 dan tercapai 97,6% dari target sebesar Rp282,72 triliun.

Realisasi daya listrik terjual dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah pelanggan dan peningkatan penggunaan daya listrik pelanggan/kelompok pelanggan. Pada tahun 2019, jumlah pelanggan PLN bertambah 3,79 juta pelanggan dan penjualan tenaga listrik naik 10,9 TWh dibandingkan tahun sebelumnya.

Realisasi biaya usaha naik 2,4% dari Rp308,19 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp315,44 triliun dan tercapai 91,1% dari anggaran sebesar Rp346,33 triliun. Komponen biaya usaha terbesar adalah pembelian bahan bakar dan minyak pelumas

Performance assessment of the Board of Directors depends on its capability to carry out government assignments, including realization of the national strategic development program for 35,000 MW power plant project including FTP I and FTP II, complete with transmission and distribution infrastructure. At end of 2019, progress of the 35,000 MW Project of: 6,811 MW at COD/SLO phase, 20,168 MW at construction phase, 6,878 MW at pre-construction phase, 829.0 MW at procurement phase and 734.0 at planning phase.

For all PLN infrastructure development programs, energized transmission projects reached 6,222 kilometer of circuit (Kms) or 189.3% of the targeted 3,287 Kms, including those originating from carried over projects. Whereas energized substation projects reached 17,507 MVA or 162.8% of the targeted 10,752 MVA including those originating from carried over projects.

Financial Performance

Realization of operating revenues in 2019 amounted to Rp285.64 trillion, increased by 4.67% compared to Rp272.90 trillion in 2018 and reached 97.3% of the budget of Rp293.42 trillion. The biggest contributor to operating revenues came from electricity sales which reached Rp276.06 trillion, increased by 4.8% from Rp263.48 trillion in 2018 and reached 97.6% of the target Rp282.72 trillion.

Electricity sales increased due to growth in the number of customers and increased use by consumers. At end of 2019, the number of PLN customers grew by 3.79 million customers and electricity sales increased by 10.9 TWh compared to the previous year.

Realization of operating expenses up 2.4% from Rp308.19 trillion in 2018 to Rp315.44 trillion and reached 91.1% of the budget of Rp346.33 trillion. The largest contributors of operating expenses were purchased fuel and lubricant which reached

yang mencapai 43% dan biaya pembelian tenaga listrik yang mencapai 26% dari komposisi biaya usaha. Sebagai hasil dari peningkatan bauran energi primer, Perusahaan berhasil menurunkan biaya bahan bakar dan minyak pelumas sebesar 0,9% dari Rp137,27 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp136,08 triliun dan hanya 87,3% dari target sebesar Rp155,90 triliun. Pencapaian ini terutama didorong oleh penurunan konsumsi BBM. Sedangkan biaya pembelian tenaga listrik juga turun 0,84% dari Rp84,27 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp83,56 triliun dan tercapai 87,3% dari target sebesar Rp95,72 triliun.

Perusahaan memperoleh laba usaha setelah subsidi sebesar Rp44,16 triliun, naik 22,7% dari Rp35,98 triliun pada tahun sebelumnya dan tercapai 335,1% dari anggaran sebesar Rp13,18 triliun. Laba bersih tahun berjalan mencapai Rp4,32 triliun, turun 62,7% dari Rp11,58 triliun pada tahun 2018 dan tercapai 53,9% terhadap anggaran sebesar Rp8,02 triliun.

Pada tahun 2019, efisiensi operasi Perusahaan berhasil menurunkan BPP sebesar dari Rp1.406 per kWh pada tahun 2018 menjadi Rp1,385.07 per kWh. Hal ini sebagai hasil dari upaya PLN memperbaiki kualitas bauran energi dan meningkatkan efisiensi operasional. Penurunan BPP didukung oleh stabilnya unsur-unsur biaya variabel seperti kurs US Dollar, harga ICP, inflasi dan Harga Batubara Acuan (HBA).

Kinerja Operasional

Pada tahun 2019, jumlah pelanggan PLN mencapai 75,71 juta pelanggan, tumbuh 5,3% dibandingkan 71,92 juta pelanggan pada tahun 2018 dan 98,5% dari target sebesar 76,82 juta pelanggan.

Penambahan jumlah pelanggan mendorong kenaikan penjualan listrik nasional mencapai 245.518 GWh, naik 4,6% atau 10.900 GWh dari 234.618 GWh pada tahun 2018 dan tercapai 97,8% dari anggaran sebesar 251.070 GWh.

Realisasi produksi listrik mencapai 278.942 GWh, meningkat 4,4% dari 267.085 GWh pada tahun 2018 dan tercapai 97,4% dari anggaran sebesar 286.517 GWh. Produksi listrik yang berasal dari

43% and purchased electricity which reached 26% of total operating expenses. As a result of the increase in the primary energy mix, the Company managed to reduce purchased fuel and lubricant by 0.9% from Rp137.27 trillion in 2018 to Rp136.08 trillion and only 87.3% of the target of Rp155.90 trillion. This achievement was mainly driven by a reduction in fuel consumption. While the cost of purchase electricity also down 0.84% from Rp84.27 trillion in 2018 to Rp83.56 trillion and reached 87.3% of the target of Rp95.72 trillion.

The Company recorded operating income after subsidy amounting to Rp44.16 trillion, significantly increased by 22.7% from Rp35.98 trillion in the previous year or reaching 335.1% of the budget of Rp13.18 trillion. Net income for the year was Rp4.32 trillion, decreased by 62.7% compared to Rp11.58 trillion in 2018 and reached 53.9% of the budget of Rp8.02 trillion.

In 2019, the Company's operational efficiency reduced its operating expenses from Rp1,406 per kWh in 2018 to Rp1.385,07 per kWh. This was a result of PLN's efforts to improve the quality of the energy mix and operational efficiency. The decrease in BPP was supported by stable variable cost elements such as USD exchange rate, ICP, inflation and Benchmark Coal Price (HBA).

Operational Performance

At the end of 2019, the number of PLN customers reached 75.71 million customers, growing by 5.3% compared to the 71.92 million at year-end 2018 and 98.5% of the expected 76.82 million customers.

Additional PLN customers encouraged the increase in national electricity sales reaching 245,518 GWh, up 4.6% or 10,900 GWh from 234,618 GWh in 2018 and reaching 97.8% of the budget of 251,070 GWh.

Power production reached 278,942 GWh, an increase of 4.4% from 267,085 GWh in 2018 and reaching 97.4% of the budgeted 286,517 GWh. Power production from owned power plants

pembangkit listrik sendiri sebesar 186.457 GWh dengan kontribusi 67% terhadap total produksi, pembelian listrik swasta sebesar 85.398 GWh (31%) dan pembangkit sewa sebesar 7.086 GWh (3%). Pembelian listrik swasta naik 8,9% dari tahun sebelumnya karena peningkatan jumlah pembangkit swasta dalam skema IPP yang telah beroperasi.

amounted to 186,457 GWh with a contribution of 67% of the total production, the purchase of private power amounted to 85,398 GWh (31%) and rented power plants amounted to 7,086 GWh (3%). Purchased private power increased by 8.9% from the previous year because more private plants in IPP scheme began their operations.

Penambahan daya tersambung mencapai 7.796 MVA, lebih rendah 5,6% dari tahun 2018 dan tercapai 87,4% dari target sebesar 8.922 MVA. Secara total, daya tersambung sampai akhir tahun 2019 adalah 138.076 MVA, naik 6,0% dari tahun 2018 dan tercapai 99,2% dari target sebesar 139.202 MVA.

The addition of connected power reached 7,796 MVA, slower 5.6% from 2018 and reaching 87.4% of the target of 8,922 MVA. In total, connected power at end of 2019 was 138,076 MVA, up 6.0% from 2018 and reaching 99.2% of the target of 139,202 MVA.

Tingkat pelayanan pelanggan yang diukur dengan indikator SAIDI (*system average interruption duration index*) dan SAIFI (*system average interruption frequency index*) masing-masing sebesar 1.136,72 menit/pelanggan dan 11,51 kali/pelanggan, memburuk dibandingkan tahun 2018 sebesar 958,35 menit/pelanggan dan 9,90 kali/pelanggan. Hal ini terutama disebabkan oleh gangguan transmisi yang terjadi di Pulau Jawa pada 4 Agustus 2019.

Customer service levels measured by SAIDI (system average interruption duration index) and SAIFI (system average interruption frequency index) indicators were respectively at 1,136.72 minutes/customers and 11.51 times/customer, deteriorating compared to 2018 at 958.35 minutes/customer and 9.90 times/customer. It was mainly caused by the Java blackout in August 4th, 2019.

Realisasi susut jaringan mengalami perbaikan dengan nilai yang menurun dari 9,51% pada tahun 2018 menjadi 9,32% dan di bawah target sebesar 9,36%. Susut jaringan terdiri dari susut transmisi (2,26%) dan susut distribusi (7,24%).

The realization of network losses improved with a decreasing percentage from 9.51% in 2018 to 9.32% and below the target of 9.36%. Network losses consisted of transmission losses (2.26%) and distribution losses (7.24%).

PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI PENGELOLAAN PERUSAHAAN

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menilai bahwa sepanjang tahun 2019 Direksi telah melakukan upaya yang maksimal dengan strategi bisnis yang tepat untuk merespons kondisi eksternal, walaupun beberapa target tidak tercapai, tetapi Perusahaan dapat menjaga kesinambungan pertumbuhan. Atas pencapaian kinerja Perusahaan pada tahun 2019, Dewan Komisaris telah menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian serius oleh Direksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut:

SUPERVISION OF IMPLEMENTATION OF CORPORATE MANAGEMENT

Overall, the Board of Commissioners considers that during 2019 the Board of Directors has made maximum efforts with appropriate business strategies to respond to external conditions, although some targets were not achieved, the Company was able to maintain sustainable growth. For the achievement of the Company's performance in 2019, the Board of Commissioners remarked on a number of serious matters to the Board of Directors, including but not limited to the following:

a. Dewan Komisaris mendorong Direksi agar mengupayakan pencapaian sasaran kinerja Perusahaan yang tertuang dalam KPI di masa yang akan datang, khususnya untuk beberapa indikator yang belum mencapai target.
b. Direksi agar mengupayakan pencapaian target penjualan daya listrik yang dalam beberapa tahun terakhir tidak mencapai target dengan mengimplementasikan strategi khusus dan agresif dan mencari peluang yang timbul dari disrupsi di bidang ketenagalistrikan dan menginisiasi strategi terobosan-terobosan di bidang pemasaran untuk menumbuhkan konsumsi listrik pada berbagai segmen pelanggan. Selain itu, Direksi agar menyelesaikan daftar tunggu dan percepatan perolehan SLO atas permohonan sambungan baru dan menjamin ketersediaan material sambungan terkait serta menjaga agar tingkat mutu pelayanan (TMP) dapat dilaksanakan sesuai standar yang berlaku.
c. Direksi harus mengupayakan ekstensifikasi dan intensifikasi optimalisasi aset dan penjualan listrik jenis baru yang saat ini belum memberikan kontribusi pendapatan penjualan non-listrik (*beyond* kWh) secara signifikan.

d. Direksi agar terus meningkatkan efisiensi operasional melalui inisatif-inisiatif berikut:
   - Efisiensi pada berbagai kegiatan Perusahaan, terutama terkait dengan kinerja pembangkit, transmisi dan distribusi;
   - Pengendalian biaya utama, yaitu energi primer, pembelian tenaga listrik, sewa pembangkit dan pemeliharaan;
   - Mengoptimalkan pembangkit milik PLN dengan meningkatkan parameter performa pembangkit (CF, EAF, SFC, NHPR);
   - Mengoptimalkan pelaksanaan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) untuk menurunkan susut, khususnya di Jawa sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan;
   - Mengoptimalkan pengoperasian pembangkit-pembangkit yang lebih efisien, khususnya pembangkit batubara

a. The Board of Commissioners encouraged Board of Directors to achieve the Company's performance targets set forth in KPI going forward, especially for several indicators that did not reach the targets.
b. The Board of Directors achieving the targeted electricity sales which has not reached the targets in recent years by implementing specific and aggressive strategies and looking for opportunities arising from disruption in the electricity sector and initiating breakthrough strategies in marketing to grow electricity consumption in various customer segments. In addition, the Board of Directors to complete the waiting list and to accelerate obtaining of SLO for requests for new connections, to ensure availability of related connection materials and to maintain service level agreement (SLA) according to applicable standards.

c. The Board of Directors must strive for extensification and intensification of asset optimization and sales of new types of electricity that currently do not contribute significantly to non-electricity sales revenue (beyond kWh).
d. The Board of Directors to improve operational efficiency through the following initiatives:
   - Efficiency in various activities, especially those which are related to performance of power plant, transmission and distribution;
   - Control of the main costs, including primary energy, purchased electricity, power plant rental and maintenance;
   - Optimization of PLN-owned generators by increasing power plant performance parameters (CF, EAF, SFC, NHPR);
   - Optimized implementation of electricity usage control program (P2TL) to reduce losses, especially in Java so as to increase revenue;
   - Optimized operations of more efficient power plants, especially coal power plants so that they could reduce BPP further

sehingga dapat menurunkan BPP lebih baik lagi secara berkesinambungan serta meningkatkan keandalan pembangkit-pembangkit non-BBM sebagai pendukungnya *(follower* dan *peaker).*

e. Direksi agar meningkatkan kualitas pelayanan terutama pada aspek berikut:
   - Mencegah pemadaman sistem baik dalam skala kecil atau luas (*black out*) sebagaimana terjadi pada 4 Agustus 2019 dan secara terus-menerus mengupayakan agar seluruh regional dapat menjaga mutu dan keandalan;
   - Menerapkan SLA secara tegas dan konsisten pada pengelola Pelayanan Teknik (Yantek) dalam rangka perbaikan SAIDI dan SAIFI yang diharapkan secara tidak langsung akan berdampak juga pada kenaikan penjualan kWh.

f. Direksi agar memonitor pelaksanaan proyek dan penyerapan investasi agar proyek-proyek pembangkit, transmisi dan gardu induk dapat selesai sesuai targetnya di RKAP tahun masing-masing untuk menekan atau meniadakan *carry over* dan sinkronisasinya sesuai kondisi keuangan dan RUPTL dan menyiapkan pendanaan untuk proyek-proyek berikutnya dengan biaya keuangan dan persyaratan lain yang optimal.

g. Sehubungan dengan Keputusan RUPS untuk mengubah jumlah dan nomenklatur Direksi pada akhir Desember 2019, Direksi hendaknya menyusun penyesuaian organisasi-organisasi di bawahnya termasuk deskripsi pekerjaan, pola hubungan kerja dan hal-hal terkait lainnya.

   Dalam penyusunan organisasi tersebut, Direksi agar mengakomodasi pembenahan dari aspek organisasi sebagai bagian dari upaya menangkal kejadian pemadaman secara luas (*black out*) seperti yang terjadi pada tanggal 4 Agustus 2019 yang mencakup kurang lebih 22 juta pelanggan di Regional Bisnis Jawa Barat dan Jawa Tengah dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pemulihan (*recovery*) sistem kelistrikan terkait.

while improving reliability of non-BBM plants as followers and peakers.

e. The Board of Directors to improve service quality, especially in the following aspects:
   - Preventing system outages either on a small or broad scale (black out) as happened on August 4, 2019 and striving for the entire regions to maintain their quality and reliability;
   - Applying SLA firmly and consistently to Technical Service (Yantek) management in order to improve SAIDI and SAIFI which is expected to indirectly also have an impact on the increase in kWh sales.

f. The Board of Directors to monitor project implementation and investment absorption so that power plant, transmission and substation projects can be completed according to their targets in RKAP of each year to reduce or eliminate carry over and to synchronize them according to financial conditions and RUPTL and to prepare funding for subsequent projects with optimal financial costs and other requirements.

g. Pertaining to GMS decisions to change the number and nomenclature of the Board of Directors at end of December 2019, the Board of Directors should prepare adjustments to the organizational structure at the lower levels including job descriptions, work relationship schemes and other related matters.

   In preparing the organizational restructuring, the Board of Directors should accommodate improvements in the organizational aspects as part of efforts to prevent blackout events as occurred on August 4, 2019 which affected approximately 22 million customers in West Java and Central Java Business Regions and needed quite a long recovery time.

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

Pencapaian KPI manajemen pada tahun 2019 mendapat skor 96,41 sehingga masuk ke dalam golongan perusahaan BUMN yang "Sehat" dengan kategori AAA. Dewan Komisaris mengapresiasi pencapaian kinerja manajemen tersebut dan berpendapat Direksi mampu meraih pencapaian yang lebih baik lagi di tahun mendatang.

SOUNDNESS LEVEL

The management's KPI result in 2019 was 96.41 ranging within the category of "Sound" SOE with AAA category. The Board of Commissioners appreciates the management's performance achievement and believes that the Board of Directors is able to achieve even better going forward.

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dengan berpedoman pada Anggaran Dasar, *Board Manual*, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas pengawasan dilakukan melalui penelaahan, pembahasan dan pemberian nasihat atas pengelolaan Perusahaan dan pengendalian internal, khususnya dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris dimulai sejak perumusan RKAP dan RJPP, sampai dengan evaluasi atas pencapaian indikator kinerja utama (KPI) korporat.

DUTIES OF BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners carried out its supervisory and advisory functions referring to the Articles of Association and the applicable laws and regulations. Supervisory duties of the Board of Commissioners were carried out by reviewing, discussing and providing advice on the Company's internal control, particularly in improving operational effectiveness and efficiency, reliability of financial reporting and compliance with the applicable laws and regulations. Supervisory duties carried out by the Board of Commissioners started from formulation of RKAP and RJPP up to evaluation of the corporate's key performance indicators.

Secara berkala, Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat internal untuk mengonsolidasikan pendapat Dewan Komisaris dalam memberikan persetujuan/rekomendasi atas usul Direksi dan nasihat/arahan atas isu strategis terkait pelaksanaan kegiatan Perusahaan. Selain itu, rapat internal juga membahas laporan Komite atas penugasan penelaahan usulan Direksi yang memerlukan persetujuan/rekomendasi maupun untuk pemberian nasihat/arahan kepada Direksi.

Periodically, the Board of Commissioners held internal meetings to consolidate the opinion of the Board of Commissioners in giving approvals/recommendations on the proposals of the Board of Directors and advice and guidance on strategic issues related to implementation of the Company's activities. In addition, the internal meetings also discussed Committee reports on the review of Board of Directors proposals which required approvals/recommendations and provided advice/guidance to the Board of Directors.

Dewan Komisaris juga menyelenggarakan rapat konsultasi dengan Direksi untuk membahas isu-isu strategis, rencana kerja dan kinerja Perusahaan triwulanan, kebijakan Direksi atas pengurusan Perusahaan, dan tindak lanjut atas arahan Dewan Komisaris. Di luar forum rapat konsultasi, Dewan Komisaris telah menyampaikan nasihat/teguran/arahan dan pemberian tanggapan tertulis/persetujuan atas usulan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners also held consultation meetings with the Board of Directors to discuss strategic issues, quarterly and annual operational and financial performances, corporate management policies and Board of Commisioner assigned follow ups. In addition to consultation meetings, the Board of Commissioners delivered their advice/warning/guidance and provided written responses/approvals on Board of Directors proposals that require Board of Commissioners approval.

Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan dengan monitoring langsung ke unit-unit dengan melakukan kunjungan lapangan. Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris melakukan 14 kali kunjungan lapangan yang juga diikuti oleh Komite Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris.

Secara khusus, Dewan Komisaris telah memberikan saran agar Direksi dalam menjalankan RKAP 2019 memberi perhatian dan mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan terhadap faktor-faktor berikut:

a. Perkembangan makroekonomi yang menunjukkan berbagai pergerakan yang sporadik dan bersifat anomali, termasuk pergeseran pola dan model konsumsi masyarakat, perubahan prioritas dan daya beli masyarakat, perkembangan teknologi yang mempengaruhi konsumen listrik, fluktuasi kurs valuta asing dan naiknya biaya pinjaman (*cost of debt*), yang mempengaruhi kinerja Perusahaan.
b. Menjaga dan memastikan bahwa Perusahaan dalam kondisi yang sehat dan menjaga likuiditas, serta memiliki *cash* yang memadai untuk operasional Perusahaan dan pembiayaan proyek-proyek investasi.
c. Mengambil kebijakan yang tepat atas perkembangan harga gas, ketersediaannya beserta pengangkutan dan penyimpanannya di pembangkit-pembangkit sehingga diperoleh ketersediaan suplai yang stabil dan harga yang kompetitif.
d. Segera mengoptimalkan struktur organisasi baru dalam rangka meningkatkan pendapatan Perusahaan secara signifikan, baik untuk jenis pendapatan tradisional (penjualan kWh, pemasangan sambungan listrik, dan lain-lain) maupun pendapatan baru (pemanfaatan aset dan kompetensi SDM yang dimiliki Perusahaan, jasa kelistrikan, dan lain-lain atau yang disebut sebagai pendapatan *beyond* kWh).
e. Meningkatkan efsisiensi melalui berbagai cara, termasuk menerapkan perkembangan teknologi berbasis Industri 4.0.

The Board of Commissioners also monitored units directly by conducting site visits. During 2019, the Board of Commissioners conducted 14 site visits which were also attended by Committees of the Board of Commissioners and Secretary of the Board of Commissioners.

Specifically, the Board of Commissioners advised that Board of Directors in implementing 2019 RKAP pay attention and take necessary strategic steps in regards to the following factors:

a. Macroeconomic trends that showed various sporadic and anomalous movements, including shifting patterns and models of public consumption, changes in people's priorities and purchasing power, technological advancements that affected electricity consumers, fluctuations in foreign exchange rates and rising cost of debt, which affected the Company's performance.
b. Maintaining and ensuring that the Company was in a sound condition, maintaining liquidity, as well as having sufficient cash for the Company's operations and financing of investment projects.
c. Appropriate policy making on gas price trend, availability, transportation and storage in power plants so as to maintain stable supply and competitive price.
d. Immediate optimization of the new organizational structure in order to significantly increase the Company's revenue from traditional revenue streams (kWh sales, installation of power connections and so forth) and new revenue streams (utilization of assets and HR competencies possessed by the Company, electricity services and others, the so called beyond kWh revenue).
e. Increased efficiency in various ways, including Industry 4.0-based technology advancement.

f. Menjalankan dan meningkatkan peran Perusahaan sebagai agen perubahan (*agent of change*) dan pelaksanaan penugasan dari pemerintah secara baik.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Dewan Komisaris menilai Perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten. Sepanjang tahun 2019, Perusahaan telah melakukan kegiatan untuk penguatan implemetasi GCG meliputi sosialisasi Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis, pembaruan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko, penerbitan Peraturan Direksi tentang Kebijakan Anti Fraud di Lingkungan PT PLN (Persero), penerbitan Pedoman Direksi mengenai Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan PT PLN (Persero), pelaksanaan *Gap Analysis* SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan, serta penataan organisasi dan tata kerja PT PLN (Persero).

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris harus memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG telah berjalan baik, tertib dan berkelanjutan di setiap lini organisasi. Secara khusus, Dewan Komisaris telah memberi arahan kepada Direksi untuk:

- Menindaklanjuti secara tuntas temuan-temuan BPK-RI tahun 2018 dan tahun-tahun sebelumnya (sampai 2003), serta memastikan temuan yang sama tidak terjadi lagi pada tahun 2019 dan seterusnya. Untuk temuan-temuan yang bukan tanggung jawab Perusahaan atau secara teknis tidak mungkin bisa ditindaklanjuti, agar Direksi menjelaskan secara secara tertulis kepada BPK RI;
- Menindaklanjuti secara tuntas temuan-temuan Auditor Independen lain seperti KAP dan BPKP dan memastikan temuan-temuan yang sama tidak terjadi di tahun-tahun ke depan;
- Menindaklanjuti secara tuntas temuan Satuan Pengawasan Intern (SPI), terutama yang berkaitan dengan aspek kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku, serta memastikan agar temuan yang sama

f. Performing and enhancing the Company's role as an agent of change and carrying out government assignments properly.

VIEW ON GOOD CORPORATE GOVERNANCE

The Board of Commissioners considers that the Company has consistently applied the principles of good corporate governance (GCG). Throughout 2019, the Company carried out activities to strengthen GCG implementation including dissemination of Code of Business Conduct and Ethics, renewal of Goods and Services Procurement Guidelines and Risk Management Implementation Guidelines, issuance of Regulation of Board of Directors concerning Anti-Fraud Policies in PT PLN (Persero), issuance of Board of Directors Guidelines concerning Conflict of Interest Management in PT PLN (Persero), implementation of SNI ISO 37001:2016 Gap Analysis on Anti-Bribery Management System, as well as organizational and work arrangement in PT PLN (Persero).

As part of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners must ensure that GCG principles are running well, in an orderly and sustainable manner in every line of the organization. Specifically, the Board of Commissioners advised Board of Directors to:

- Follow up thoroughly the findings of BPK-RI for 2018 and previous years (since 2003) and to ensure no recurring findings for 2019 and going forward. For findings that were not under the Company's control or technically impossible to be followed up, the Board of Directors should provide written explanation to BPK RI;
- Follow up thoroughly the findings of other Independent Auditors such as KAP and BPKP and ensure no recurring findings going forward;
- Follow up thoroughly the findings of Internal Audit Unit (SPI), especially those relating to aspects of compliance with the applicable laws and regulations, as well as to ensure no

tidak terjadi lagi pada tahun 2019 dengan melibatkan seluruh direktorat, divisi, unit-unit yang terkait;
- Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SPI agar mampu melaksanakan audit kinerja unit-unit perusahaan dengan baik untuk mendorong peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan.

recurring findings for 2019 by involving all relevant directorates, divisions and units;

- Increase capacity and capabilities of SPI so as to be able to carry out audits of the performance of the Company's units properly to encourage improvement in overall corporate performance.

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris dibantu oleh komite di bawah Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris menilai komite-komite Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengawasi aspek-aspek operasional dan strategis Perusahaan dengan baik.

Komite Audit telah mengawasi efektivitas pelaksanaan audit Laporan Keuangan Perusahaan tahun buku 2018 oleh auditor eksternal, dan memberikan rekomendasi kantor akuntan publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perusahaan tahun buku 2019 untuk diusulkan kepada RUPS. Komite Audit secara terus-menerus menelaah efektivitas audit internal dan sistem pengendalian intern, memastikan bahwa semua informasi keuangan dan operasional Perusahaan yang akan dipublikasikan telah melalui prosedur evaluasi yang memuaskan, dan memastikan ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk di bidang pasar modal, serta melaksanakan praktik GCG secara konsisten. Komite Audit juga memberikan pandangannya atas permintaan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui usulan penghapusan piutang, persediaan, aktiva tidak beroperasi dan aset lainnya. Pada tahun 2019, KPI Komite Audit Dewan Komisaris mencapai 99.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER BOARD OF COMMISSIONERS

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners is assisted by committees under the Board of Commissioners, namely Audit Committee, Risk Management Committee and Nomination and Remuneration Committee. For 2019, the Board of Commissioners considers that the Committees under Board of Commissioners carried out their duties and responsibilities properly in overseeing the Company's operational and strategic practices.

The Audit Committee carried out its duties to supervise the effectiveness of the audit of the Company's Financial Statements for financial year 2018 by external auditors and to propose recommended public accounting firm to audit the Company's Financial Statements for financial year 2019 to the GMS. The Audit Committee continuously reviewed effectiveness of internal audit and internal control systems, ensured that all financial and operational information of the Company to be published had gone through satisfactory evaluation procedures, ensured the Company's compliance with the applicable laws and regulations including those in the capital market, and implemented GCG practices consistently. The Audit Committee also gave its views on Board of Directors' request to the Board of Commissioners to approve the proposed write-off of receivables, inventories, non-operating assets and other assets. In 2019, the KPI of Audit Committee reached 99.

Komite Manajemen Risiko telah membantu Dewan Komisaris mengevaluasi berbagai risiko yang dihadapi Perusahaan, menguji strategi, sistem dan kebijakan manajemen risiko Perusahaan, dan menelaah efektivitas sistem pengendalian intern Perusahaan, termasuk kebijakan, metodologi dan infrastruktur. Komite juga membantu Dewan Komisaris untuk mengkaji hasil evaluasi risiko dan dokumen lainnya yang disampaikan oleh Direksi sebagai kelengkapan atas usulan rencana investasi/pendanaan/ transaksi dan kegiatan operasional lainnya yang berdampak besar terhadap Perusahaan serta memberikan tanggapannya kepada Dewan Komisaris terhadap usulan Direksi tersebut. Pada tahun 2019, KPI Komite Manajemen Risiko Dewan Komisaris mencapai 99.

The Risk Management Committee assisted the Board of Commissioners in evaluating various risks faced by the Company; testing the Company's risk management strategies, systems and policies; and examined effectiveness of the Company's internal control system, including policies, methodologies and infrastructure. The Committee also assisted the Board of Commissioners to review the results of risk evaluations and other documents submitted by the Board of Directors as a complement to the proposed investment/funding/transaction plans and other operational activities that had material impacts on the Company and provided its responses to the Board of Commissioners for Board of Directors proposals. In 2019, the KPI of Risk Management Committee reached 99.

Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan tugasnya untuk memastikan bahwa Direksi telah melaksanakan proses rekrutmen, pengembangan karir, serta nominasi dan remunerasi sesuai sistem yang telah ditetapkan, dan membantu merumuskan kebijakan remunerasi berupa gaji dan honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap serta insentif dan tantiem yang bersifat variabel bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Pada tahun 2019, KPI Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris mencapai 97,5.

The Nomination and Remuneration Committee performed its duties to ensure that the Board of Directors carried out recruitment, career development, as well as nomination and remuneration processes according to the established system and helped formulate remuneration policy in the form of salaries and honoraria, fixed allowances and facilities, as well as variable incentives and bonuses for the Board of Commissioners and Board of Directors. In 2019, the KPI of the Nomination and Remuneration Committee reached 97.5.

EVALUASI ATAS PENERAPAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Perusahaan telah menerapkan sistem pelaporan pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) sejak tahun 2012 yang telah disempurnakan melalui Surat Edaran Direksi Nomor: 008.E/ DIR/2016. WBS bertujuan untuk memperkuat upaya preventif dan melindungi pelapor sehingga mendorong pelaporan atas praktik korupsi, suap, dan praktik kecurangan lainnya yang dapat merugikan Perusahaan secara finansial maupun reputasi.

WHISTLEBLOWING SYSTEM EVALUATION

The Company has been implementing Whistleblowing System (WBS) since 2012, which was refined by Board of Directors Circular No. 008.E/DIR/2016. The WBS aims to strengthen preventive efforts and to protect whistleblowers so as to encourage reporting on corruption, bribery and other fraudulent practices that may harm the Company's financials or reputation.

Dewan Komisaris sangat memberi perhatian terhadap penerapan WBS dan telah meminta Komite Audit melakukan monitoring atas efektivitas penerapan WBS dan menyampaikan hasil telaah kepada Dewan Komisaris untuk

The Board of Commissioners is very concerned about WBS implementation and asked the Audit Committee to monitor effectiveness of WBS implementation and to submit the review results to the Board of Commissioners to be discussed

didiskusikan di dalam forum rapat Dewan Komisaris bersama Direksi. Dewan Komisaris berpendapat bahwa penyelenggaraan WBS di Perusahaan sudah cukup baik dan efektif.

Selama tahun 2019, Tim WBS menerima 189 laporan pengaduan yang terdiri dari 373 item pengaduan yang disampaikan melalui media WBS (*e-mail*, surat dan WhatsApp). Dari laporan tersebut, sebanyak 114 pengaduan yang terdiri dari 250 item pengaduan telah selesai proses pemeriksaan dan dibuat Laporan Hasil Audit (LHA). Dari 114 LHA (250 item pengaduan) terdapat 77 item pengaduan (31%) yang terbukti dan 173 item pengaduan (69%) yang tidak terbukti. Mayoritas pengaduan yang terbukti adalah terkait dengan kasus dugaan penyalahgunaan wewenang/jabatan dan fasilitas/aset yaitu sebanyak 13 laporan pengaduan. SPI telah membuat laporan atas kasus-kasus yang terbukti kepada Direktur Utama untuk proses pengenaan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA YANG DISUSUN DIREKSI

Direksi telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT PLN Persero Tahun Anggaran 2020 ("RKAP 2020") dengan mengacu pada target-target pertumbuhan jangka panjang dan Aspirasi Pemegang Saham (APS) yang tertuang di dalam surat Menteri BUMN No. S-574/MBU/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019. Fokus APS BUMN Tahun 2020 adalah "Akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia" dengan penerapan konsolidasi akuntabilitas, tata kelola yang baik, manajemen risiko dan peningkatan mutu pengelolaan sumber daya manusia unggul dan manajemen pengetahuan dalam penyusunan, penerapan, dan pengawasan serta pertanggungjawaban RKAP.

APS 2020 mengamanatkan BUMN untuk mengoptimalkan pertumbuhan produksi operasi dan investasi sebagai sasaran keluaran (*output*) RKAP 2020, dengan tetap memperhatikan tingkat imbal hasil pemegang saham yang kompetitif. Oleh karena itu, RKAP 2020 telah disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

in Board of Commissioners meetings with the Board of Directors. The Board of Commissioners believes that WBS implementation in the Company is running well and effectively.

During 2019, the WBS Team received 189 reports consisting of 373 items submitted through WBS media (e-mail, letter and WhatsApp). 114 reports consisting of 250 items were investigated and reported in Audit Reports (LHA). Out of 114 LHA (250 report items), 77 report items (31%) were proven and 173 report items (69%) were not proven. The majority of proven complaints were related to alleged abuse of authority/position and facilities/assets, representing 13 complaint reports. The SPI reported the proven cases to the President Director for further action in accordance with the applicable regulations.

VIEW ON BUSINESS PROSPECTS PREPARED BY BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors has prepared the 2020 Work Plan and Budget of the PT PLN Persero for Budget Year 2020 ("2020 RKAP") with reference to the long-term growth targets and Shareholder Aspirations (APS) as stated in Minister of SOE Letter No. S-574/MBU/08/2019 dated August 30, 2019. The focus of SOE APS for 2020 is "Accelerating competitiveness through innovation and enhanced quality of human resources" by implementing accountability consolidation, good governance, risk management, improved quality of excellent human resources management and knowledge management in preparation, implementation, supervision and accountability of RKAP.

The APS for 2020 mandated SOEs to optimize the growth of operational production and investment as the targeted output of 2020 RKAP, while taking into account competitive shareholder returns. Therefore, the 2020 RKAP was prepared by taking into account the following matters:

1. Penyelarasan RJPP dengan Rencana Pengembangan Usaha Jangka Menengah (*roadmap*) BUMN 2020-2024 dengan langkah-langkah strategis untuk konsolidasi BUMN agar dapat mewujudkan kesatuan ekosistem industri dalam suatu bentuk holding strategis.
2. Perumusan strategi ekosistem bisnis di tahun 2020 melalui aliansi dan/atau kooptasi entitas berdasarkan rantai industri maupun sektoral untuk menciptakan dan menangkap nilai tambah ekonomi sebagai antisipasi tantangan lingkungan strategis untuk diterapkan secara bertahap dalam 5 tahun ke depan.

Direksi telah memaparkan mengenai rencana kerja dan prospek usaha Perusahaan ke depan berdasarkan asumsi-asumsi yang realistis dan rasional. Mengacu pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang telah memperlihatkan tren yang relatif stabil di kisaran 5% sejak tahun 2015, Dewan Komisaris optimis Direksi mampu mencapai target-target pertumbuhan yang telah dicanangkan.

Dewan Komisaris telah menyampaikan pandangan dan pendapat atas RKAP 2020 kepada Menteri BUMN selaku pemegang saham yang disampaikan melalui Surat Dewan Komisaris No. 311/DK-PLN/2019 tanggal 20 November 2019 dan Surat No. 18/DK-PLN/2020 tanggal 24 Januari 2020. Dalam pandangan Dewan Komisaris, RKAP 2020 telah disusun selaras dengan RJPP 2020-2024 dan ASP. Dewan Komisaris telah memperhatikan seluruh program dan sasaran Perusahaan yang tertuang di dalam Buku RKAP 2020 dan menyatakan dukungan dan memberikan rekomendasi kepada RUPS untuk menyetujui dan mengesahkan RKAP 2020.

FREKUENSI DAN CARA PEMBERIAN NASIHAT KEPADA DIREKSI

Dewan Komisaris melaksanakan pemberian nasihat kepada Direksi dengan cara menyelenggarakan rapat konsultasi dengan Direksi untuk membahas isu-isu strategis, rencana kerja dan kinerja Perusahaan triwulanan, kebijakan Direksi atas pengurusan Perusahaan, dan tindak lanjut atas arahan Dewan Komisaris.

1. Alignment of RJPP and 2020-2024 SOE Mid-Term Business Development Plan (roadmap) with strategic measures for SOE consolidation in order to realize the unity of an industrial ecosystem in the form of strategic holdings.
2. Formulation of business ecosystem strategy in 2020 through alliances and/or co-optation of entities based on industrial and sectoral chains to create and capture economic added value in anticipation of strategic environmental challenges to be implemented gradually over the next 5 years.

The Board of Directors has explained the Company's business prospects going forward based on realistic and rational assumptions. Referring to Indonesia's economic growth, which has shown a relatively stable trend at around 5% since 2015, the Board of Commissioners is optimistic that the Board of Directors is able to achieve the planned growth targets.

The Board of Commissioners has submitted their views and opinions on the 2020 RKAP to the Minister of SOE as shareholder, which was conveyed through Board of Commissioners Letter No. 311/DK-PLN/2019 dated November 20, 2019 and Letter No. 18/DK-PLN/2020 dated January 24, 2020. In the view of the Board of Commissioners, the 2020 RKAP was prepared in line with 2020-2024 RJPP and ASP. The Board of Commissioners has examined all of the Company's programs and objectives incorporated in 2020 RKAP; hence, the Board of Commissioners supported and recommended the GMS approve and ratify the 2020 RKAP.

FREQUENCY AND METHOD OF PROVIDING ADVICES TO BOARD OF DIRECTORS

Board of Commissioners provides advice to the Board of Directors by holding consultation meetings with Board of Directors to discuss strategic issues, the Company's quarterly work plans and performance, corporate management policy and follow-ups on recommendations of Board of Commissioners. During 2019, the Board

Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris telah melaksanakan 20 kali rapat internal Dewan Komisaris dan 17 kali rapat konsultasi bersama Direksi.

Di luar forum rapat konsultasi, Dewan Komisaris telah menyampaikan nasihat/teguran/arahan dan pemberian tanggapan tertulis/persetujuan atas usulan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Terkait dengan pelaksanaan fungsi tersebut, pada tahun 2019 Dewan Komisaris telah mengeluarkan 79 Surat Dewan Komisaris. Dewan Komisaris juga telah menyampaikan 3 surat berupa tanggapan dan laporan kepada Menteri BUMN selaku Pemegang Saham.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2019 terjadi perubahan komposisi Dewan Komisaris PLN dengan alasan sebagai berikut:

1. Pemberhentian dengan hormat Oegroseno dari jabatannya sebagai Komisaris Independen dan Andi Noorsaman Sommeng sebagai Komisaris, serta pengangkatan Deden Juhara sebagai Komisaris Independen dan pengangkatan Rida Mulyana sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT PLN (Persero) No. SK-55/MBU/02/2019 tanggal 28 Februari 2019;
2. Pemberhentian dengan hormat Rionald Silaban dari jabatannya sebagai Komisaris dan penunjukan Sumiyati sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT PLN (Persero) No. SK-189/MBU/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019;
3. Pemberhentian dengan hormat Darmono dari jabatannya sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT PLN (Persero) No. SK-221/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019;
4. Pemberhentian dengan hormat Aloysius Kiik Ro dan Sumiyati dari jabatannya sebagai Komisaris Perusahaan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT PLN (Persero) No. SK-326/MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019;

of Commissioners held 20 internal meetings of Board of Commissioners and 17 consultation meetings with the Board of Directors.

In addition to consultation meeting, the Board of Commissioners delivered our advice/warning/guidance and provided written responses/approval for Board of Directors proposals that required Board of Commissioners approval. Pertaining to implementation of this function, in 2019, the Board of Commissioners issued 79 Letters and delivered 3 letters to respond and report to the Minister of SOE as shareholder.

CHANGES IN BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION

In 2019, there were changes in the composition of PLN's Board of Commissioners for the following reasons:

1. Honorable dismissal of Oegroseno from his position as Independent Commissioner and Andi Noorsaman Sommeng as Commissioner, as well as appointment of Deden Juhara as Independent Commissioner and Rida Mulyana as Commissioner according to Minister of SOE as GMS of PT PLN (Persero) Decision No. SK-55/MBU/02/2019 dated February 28, 2019;
2. Honorable dismissal of Rionald Silaban from his position as Commissioner and appointment of Sumiyati as Commissioner according to Decision of the Minister of SOE as GMS of PT PLN (Persero) No. SK-189/MBU/08/2019 dated August 30, 2019;
3. Honorable dismissal of Darmono from his position as Independent Commissioner according to Minister of SOE as GMS of PT PLN (Persero) Decision No. SK-221/MBU/10/2019 dated October 17, 2019;
4. Honorable dismissal Aloysius Kiik Ro and Sumiyati from their positions as Commissioners according to Minister of SOE as GMS of PT PLN (Persero) Decision No. SK-326/MBU/12/2019 dated December 23, 2019;

5. Pengangkatan Amien Sunaryadi sebagai Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen dan Suahasil Nazara sebagai Wakil Komisaris Utama berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT PLN (Persero) No. SK-326/MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019;
6. Pemberhentian dengan hormat Darmawan Prasodjo dari jabatannya sebagai Komisaris dan pengangkatan Mohamad Ikhsan sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT PLN (Persero) No. SK-334/MBU/12/2019 tanggal 26 Desember 2019.

5. Appointment of Amien Sunaryadi as President Commissioner and concurrently Independent Commissioner and Suahasil Nazara as Deputy President Commissioner according to Minister of SOE as GMS of PT PLN (Persero) Decision No. SK-326/MBU/12/2019 dated December 23, 2019;
6. Honorable dismissal of Darmawan Prasodjo from his position as Commissioner and appointment of Mohamad Ikhsan as Commissioner accordin to Minister of SOE as GMS of PT PLN (Persero) Decision No. SK-334/MBU/12/2019 dated December 26, 2019.

Sehubungan dengan dinamika pergantian Dewan Komisaris PT PLN (Persero) yang terjadi sepanjang tahun 2019, maka untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang susunan Dewan Komisaris sepanjang tahun 2019 serta memperjelas batasan tanggung jawab Dewan Komisaris sesuai dengan masa jabatannya, maka kami sampaikan rincian susunan Dewan Komisaris PT PLN (Persero) sepanjang tahun 2019 sebagai berikut:

Due to the dynamics of the change in the Board of Commissioners of PT PLN (Persero) that occurred throughout 2019, to further explain the composition of the Board of Commissioners throughout 2019 and to clarify the limits of the responsibilities of the Board of Commissioners according to their tenure, we submit details of the composition of the Board of Commissioners of PT PLN (Persero) throughout 2019 as follows:

Susunan Komisaris PT PLN (Persero) Sepanjang Tahun 2019

The Composition of The Board of Commisioner of PT PLN (Persero) during 2019

1 Januari 2019 - 28 Februari 2019

January 1, 2019 to February 28, 2019

No	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Letter	Tanggal Efektif Efective Date
1	Ilya Avianti	PLT Komisaris Utama Acting President Commisioner	SK Menteri BUMN No SK-224/MBU/08/2018	6 Agustus 2018
		Komisaris Commisioner	SK Menteri BUMN No SK-145/MBU/07/2017	28 Juli 2017
2	Oegroseno	Komisaris Independen Independent Commisioner	SK Menteri BUMN No SK-211/MBU/10/2014	16 Oktober 2014
3	Darmono	Komisaris Independen Independent Commisioner	SK Menteri BUMN No SK-211/MBU/10/2014	16 Oktober 2014
4	Budiman	Komisaris Commisioner	SK Menteri BUMN No SK-273/MBU/12/2014	23 Desember 2014
5	Aloysius Kiik Ro	Komisaris Commisioner	SK Menteri BUMN No SK-183/MBU/09/2014	25 September 2015
6	Rionald Silaban	Komisaris Commisioner	SK Menteri BUMN No SK-41/MBU/02/2017	28 Februari 2017
7	Andy Noorsaman Sommeng	Komisaris Commisioner	SK Menteri BUMN No SK-128/MBU/07/2017	12 Juli 2017
8	Darmawan Prasodjo	Komisaris Commisioner	SK Menteri BUMN No SK-224/MBU/08/2018	6 Agustus 2018

28 Februari 2019 - 30 Agustus 2019 — Februari 28, 2019 to August 30, 2019

No	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Letter	Tanggal Efektif Efective Date
1	Ilya Avianti	PLT Komisaris Utama Acting President Commisioner	SK Menteri BUMN No SK-224/MBU/08/2018	6 Agustus 2018
		Komisaris Commisioner	SK Menteri BUMN No SK-145/MBU/07/2017	28 Juli 2017
2	Deden Juhara	Komisaris Independen Independent Commisioner	SK Menteri BUMN No SK-55/MBU/02/2019	28 Februari 2019
3	Darmono	Komisaris Independen Independent Commisioner	SK Menteri BUMN No SK-211/MBU/10/2014	16 Oktober 2014
4	Budiman	Komisaris Commisioner	SK Menteri BUMN No SK-273/MBU/12/2014	23 Desember 2014
5	Aloysius Kiik Ro	Komisaris Commisioner	SK Menteri BUMN No SK-183/MBU/09/2014	25 September 2015
6	Rionald Silaban	Komisaris Commisioner	SK Menteri BUMN No SK-41/MBU/02/2017	28 Februari 2017
7	Rida Mulyana	Komisaris Commisioner	SK Menteri BUMN No SK-55/MBU/02/2019	28 Februari 2019
8	Darmawan Prasodjo	Komisaris Commisioner	SK Menteri BUMN No SK-224/MBU/08/2018	6 Agustus 2018

30 Agustus 2019 - 17 Oktober 2019 — August 30, 2019 to October 17, 2019

No	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Letter	Tanggal Efektif Efective Date
1	Ilya Avianti	PLT Komisaris Utama Acting President Commisioner	SK Menteri BUMN No SK-224/MBU/08/2018	6 Agustus 2018
		Komisaris Commisioner	SK Menteri BUMN No SK-145/MBU/07/2017	28 Juli 2017
2	Deden Juhara	Komisaris Independen Independent Commisioner	SK Menteri BUMN No SK-55/MBU/02/2019	28 Februari 2019
3	Darmono	Komisaris Independen Independent Commisioner	SK Menteri BUMN No SK-211/MBU/10/2014	16 Oktober 2014
4	Budiman	Komisaris Commisioner	SK Menteri BUMN No SK-273/MBU/12/2014	23 Desember 2014
5	Aloysius Kiik Ro	Komisaris Commisioner	SK Menteri BUMN No SK-183/MBU/09/2014	25 September 2015
6	Sumiyati	Komisaris Commisioner	SK Menteri BUMN No SK-189/MBU/08/2019	30 Agustus 2019
7	Rida Mulyana	Komisaris Commisioner	SK Menteri BUMN No SK-55/MBU/02/2019	28 Februari 2019
8	Darmawan Prasodjo	Komisaris Commisioner	SK Menteri BUMN No SK-224/MBU/08/2018	6 Agustus 2018

17 Oktober 2019 - 23 Desember 2019 October 17, 2019 to December 23, 2019

No	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Letter	Tanggal Efektif Efective Date
1	Ilya Avianti	PLT Komisaris Utama Acting President Commisioner	SK Menteri BUMN No SK-224/MBU/08/2018	6 Agustus 2018
		Komisaris Commisioner	SK Menteri BUMN No SK-145/MBU/07/2017	28 Juli 2017
2	Deden Juhara	Komisaris Independen Independent Commisioner	SK Menteri BUMN No SK-55/MBU/02/2019	28 Februari 2019
3	Budiman	Komisaris Commisioner	SK Menteri BUMN No SK-273/MBU/12/2014	23 Desember 2014
4	Aloysius Kiik Ro	Komisaris Commisioner	SK Menteri BUMN No SK-183/MBU/09/2014	25 September 2015
5	Sumiyati	Komisaris Commisioner	SK Menteri BUMN No SK-189/MBU/08/2019	30 Agustus 2019
6	Rida Mulyana	Komisaris Commisioner	SK Menteri BUMN No SK-55/MBU/02/2019	28 Februari 2019
7	Darmawan Prasodjo	Komisaris Commisioner	SK Menteri BUMN No SK-224/MBU/08/2018	6 Agustus 2018

23 Desember 2019 - 31 Desember 2019 December 23, 2019 to December 31, 2019

No	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Letter	Tanggal Efektif Efective Date
1	Amien Sunaryadi	Komisaris Utama President Commisioner	SK Menteri BUMN No SK-326/MBU/12/2019	23 Desember 2019
		Komisaris Independen Independent Commisioner		
2	Suahasil Nazara	Wakil Komisaris Utama Vice President Commisioner	SK Menteri BUMN No SK-326/MBU/12/2019	23 Desember 2019
3	Deden Juhara	Komisaris Independen Independent Commisioner	SK Menteri BUMN No SK-55/MBU/02/2019	28 Februari 2019
4	Ilya Avianti	Komisaris Commisioner	SK Menteri BUMN No SK-145/MBU/07/2017	28 Juli 2017
5	Rida Mulyana	Komisaris Commisioner	SK Menteri BUMN No SK-55/MBU/02/2019	28 Februari 2019
6	Mohamad Ikhsan	Komisaris Commisioner	SK Menteri BUMN No SK-334/MBU/12/2019	26 Desember 2019

PERGANTIAN KOMISARIS SETELAH 31 DESEMBER 2019 SAMPAI DENGAN PENERBITAN LAPORAN TAHUNAN

Pada 16 Januari 2020, RUPS mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Budiman sejak 23 Desember 2019 dan mengangkat Dudy Purwagandhi sebagai komisaris dan Murtaqi Syamsuddin sebagai komisaris independen.

CHANGE OF COMMISSIONERS AFTER 31 DECEMBER 2019 UNTIL THE ISSUANCE OF THE ANNUAL REPORT

On January 16, 2020, the General Meeting of Shareholders confirmed the dismissal of Budiman since December 23, 2019 and appointed Dudy Purwagandhi as a commissioner and Murtaqi Syamsuddin as an independent commissioner.

APRESIASI

Akhirnya, atas nama Dewan Komisaris, saya menyampaikan terima kasih kepada Pemegang Saham dan seluruh pemangku kepentingan atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan. Penghargaan yang tulus saya sampaikan kepada Direksi, manajemen dan segenap pegawai PLN dan anak perusahaan yang telah menunjukkan kerja keras, loyalitas dan dedikasinya demi keberhasilan kita bersama. Semoga Perusahaan dapat terus memberikan manfaat terbaik bagi pelanggan, mitra usaha, pemegang saham, dan seluruh pemangku kepentingan di masa mendatang.

APPRECIATION

Finally, on behalf of the Board of Commissioners, I would like to express my gratitude to the shareholder and all stakeholders for their support and trust. My sincere appreciation goes to the Board of Directors, the management and all personnel of PLN and subsidiaries who have demonstrated their hard work, loyalty and dedication for our success. Hopefully, the Company will continue to provide the best benefits to customers, business partners, the shareholder and all stakeholders in the future.

Atas nama Dewan Komisaris
On Behalf of the Board of Commissioners

Amien Sunaryadi
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner and Independent Commissioner

Dewan Komisaris
Periode 1 Januari 2019–28 Februari 2019

Board of Commissioners'
as of 1 January 2019-28 February 2019

Ilya Avianti
PLT Komisaris Utama dan Komisaris
Acting President Commissioner and Commissioner

Oegroseno
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Darmono
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Budiman
Komisaris
Commissioner

Aloysius Kiik Ro
Komisaris
Commissioner

Rionald Silaban
Komisaris
Commissioner

Andy Noorsaman Sommeng
Komisaris
Commissioner

Darmawan Prasodjo
Komisaris
Commissioner

Dewan Komisaris
Periode 28 Februari 2019–30 Agustus 2019

Board of Commissioners'
as of 28 February 2019-30 August 2019

Ilya Avianti
PLT Komisaris Utama dan Komisaris
Acting President Commissioner and Commissioner

Deden Juhara
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Darmono
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Budiman
Komisaris
Commissioner

Aloysius Kiik Ro
Komisaris
Commissioner

Rionald Silaban
Komisaris
Commissioner

Rida Mulyana
Komisaris
Commissioner

Darmawan Prasodjo
Komisaris
Commissioner

Dewan Komisaris
Periode 30 Agustus 2019–17 Oktober 2019

Board of Commissioners'
as of 30 August 2019-17 October 2019

Ilya Avianti
PLT Komisaris Utama dan Komisaris
Acting President Commissioner and Commissioner

Deden Juhara
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Darmono
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Budiman
Komisaris
Commissioner

Aloysius Kiik Ro
Komisaris
Commissioner

Sumiyati
Komisaris
Commissioner

Rida Mulyana
Komisaris
Commissioner

Darmawan Prasodjo
Komisaris
Commissioner

Dewan Komisaris
Periode 17 Oktober 2019–23 Desember 2019

Board of Commissioners'
as of 17 October 2019-23 December 2019

Ilya Avianti
PLT Komisaris Utama dan Komisaris
Acting President Commissioner and Commissioner

Deden Juhara
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Budiman
Komisaris
Commissioner

Aloysius Kiik Ro
Komisaris
Commissioner

Sumiyati
Komisaris
Commissioner

Rida Mulyana
Komisaris
Commissioner

Darmawan Prasodjo
Komisaris
Commissioner

Dewan Komisaris
Periode 23 Desember 2019–31 Desember 2019

Board of Commissioners'
as of 23 December 2019-31 December 2019

Amien Sumnaryadi
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner and Independent Commisioner

Suahasil Nazara
Wakil Komisaris Utama
Vice President Commissioner

Deden Juhara
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Ilya Avianti
Komisaris
Commissioner

Rida Mulyana
Komisaris
Commissioner

Mohamad Ikhsan
Komisaris
Commissioner

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

Laporan Direksi

Report of the Board of Directors

PLN memperkuat komitmen untuk memenuhi kebutuhan listrik yang andal dengan tarif yang terjangkau guna meningkatkan daya saing industri nasional, yang pada akhirnya akan menunjang kemajuan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PLN strengthens its commitment to meet reliable electricity needs with affordable tariffs to improve the competitiveness of national industries, which in turn will support economic progress and improve people's welfare.

Pemegang Saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, PT PLN (Persero) dapat melalui berbagai tantangan eksternal yang terjadi di sepanjang tahun 2019 dengan baik. Seluruh insan Perusahaan telah bekerja keras melaksanakan mandat Pemerintah untuk menjaga keberlangsungan pembangunan infrastruktur dan operasi sektor ketenagalistrikan yang efisien sebagai stimulus pertumbuhan perekonomian nasional. Mewakili Direksi, perkenankanlah saya melaporkan ringkasan kinerja Perusahaan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.

Dear Shareholders and stakeholders,

We offer our thanks to the presence of Almighty God, because of His mercy and grace, PT PLN (Persero) can get through various external challenges that occur throughout 2019 well. All Company people have worked hard in carrying out the Government's mandate to maintain the continuity of infrastructure development and efficient electricity sector operations as a stimulus for national economic growth. Representing the Board of Directors, please allow me to report a summary of the Company's performance for the Fiscal Year ending on December 31, 2019.

Zulkifli Zaini
Direktur Utama
President Director

TINJAUAN KONDISI EKSTERNAL

Ekonomi Global dan Domestik Semakin Melambat

Perekonomian dunia di tahun 2019 masih ditandai dengan perang dagang antar negara adidaya yang turut menekan harga komoditas dan melemahkan arus perdagangan dan investasi yang menekan pertumbuhan ekonomi global. Prospek perekonomian domestik di sepanjang tahun 2019 juga ikut terdampak, ditambah dengan sikap "wait and see" dari kalangan usaha disebabkan tensi politik yang sempat meningkat oleh karena perhelatan politik pemilu legeslatif dan pemilu presiden-wakil presiden di April 2019. Kedua hal ini berdampak pada realisasi

REVIEW OF EXTERNAL CONDITIONS

The Global and Domestic Economy Slows Down

The world economy in 2019 is still marked by trade wars between superpowers that have helped to reduce commodity prices and weaken trade and investment flows which have suppressed global economic growth. The prospect of the domestic economy throughout 2019 was also affected, coupled with a "wait and see" attitude from the business community due to political tension which had increased due to the political events of the legislative and presidential and vice-presidential elections in April 2019. Both of these

pertumbuhan ekspor Indonesia yang lebih rendah dan menahan pertumbuhan investasi yang terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 hanya mencapai 5,02%, lebih rendah dibandingkan 5,17% pada tahun sebelumnya.

Nilai tukar mata uang rupiah juga tak terlepas dari bayangan sentimen global. Melanjutkan pelemahan di akhir tahun 2018, rupiah memasuki tahun 2019 dengan kurs Rp14.465 per USD (kurs tengah Bank Indonesia). Tetapi masih di bulan Januari, dolar AS melemah secara global dipicu kebijakan Bank Sentral AS The Fed untuk tidak menaikkan suku bunga acuannya yang akhirnya memicu masuknya aliran modal asing ke Indonesia yang mendorong penguatan rupiah yang meski fluktuatif namun terus menguat dan ditutup di level Rp13.901 pada 31 Desember, terbaik sepanjang tahun 2019.

Terlepas dari gejolak ekonomi global, Pemerintah konsisten melanjutkan akselerasi pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional dengan alokasi anggaran infrastruktur sebesar Rp415 triliun di tahun 2019 yang dialokasikan pada proyek-proyek strategis nasional termasuk program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Perkembangan Harga Komoditas Energi

Sepanjang tahun 2019, harga komoditas energi dunia seperti harga batubara dan harga minyak dunia n terus terkoreksi seiring tren perlambatan ekonomi global. Sepanjang tahun 2019 HBA berfluktuasi dengan rata-rata HBA dari Januari-Desember 2019 sebesar USD77,89 per MT, turun 21% dibandingkan rata-rata tahun 2018 sebesar USD98,97 per MT. Demikian juga dengan harga minyak dunia juga menunjukkan tren menurun yang berdampak pada harga rata-rata acuan minyak mentah Indonesia (Indonesia *Crude Price*/ICP). Di awal tahun 2019, harga Brent kembali turun ke USD53,18 per barel. Pada Agustus 2019,harga ICP mencapai USD57,27 per barel yang terendah pada paruh kedua 2019 walaupun terkoreksi hingga mencapai USD67,18 per barel pada Desember 2019.

had an impact on realization Indonesia's export growth is lower and is holding back investment growth as seen from Indonesia's economic growth in 2019 reaching only 5.02%, lower than 5.17% in the previous year.

The rupiah exchange rate is also inseparable from the shadow of global sentiment. Continuing to weaken at the end of 2018, the rupiah entered 2019 with an exchange rate of Rp14,465 per USD (Bank Indonesia middle rate). But still in January, the US dollar weakened globally triggered by the US Federal Reserve's policy not to raise its benchmark interest rate, which in turn triggered the inflow of foreign capital into Indonesia which encouraged the strengthening of the rupiah which, although fluctuating, continued to strengthen and closed at Rp13,901 as of December 31, the best in 2019.

In spite of the global economic turmoil, the Government consistently continues to accelerate infrastructure development to improve national economic competitiveness, growth and equity with an infrastructure budget allocation of Rp415 trillion in 2019 allocated to national strategic projects including the electricity infrastructure development program.

Development of Energy Commodity Prices

Throughout 2019, world energy commodity prices such as coal prices and world oil prices will continue to be corrected in line with the global economic slowdown. During 2019 the Reference Coal Prices (RCP) fluctuated with an average RCP from January-December 2019 of USD77.89 per MT, down 21% compared to the 2018 average of USD98.97 per MT. Likewise, world oil prices also showed a downward trend which had an impact on the average price of the Indonesian Crude Price (ICP). At the beginning of 2019, the price of Brent fell again to USD53, 18 per barrel. In August 2019, ICP prices reached USD57.27 per barrel, the lowest in the second half of 2019, although corrected to reach USD67.18 per barrel in December 2019.

Industri Ketenagalistrikan

Pertumbuhan kebutuhan listrik nasional didorong oleh beberapa faktor yaitu pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk dan program elektrifikasi, serta program-program pembangunan yang memicu tumbuhnya kawasan bisnis dan permukiman baru. Data PLN menunjukkan, realisasi penjualan listrik PLN dalam lima tahun terakhir terus meningkat dari 202.845 GWh menjadi 245.518 GWh dengan tingkat pertumbuhan majemuk tahunan (*compound annual growth rate*/CAGR) mencapai 5%.

PLN melalui RUPTL 2019-2028 menetapkan enam sasaran untuk dicapai dalam sepuluh tahun ke depan yakni: 1) pemenuhan kebutuhan kapasitas energi listrik setiap tahun dengan tingkat keandalan yang diinginkan secara *least cost*, 2) bauran energi pembangkit yang optimal untuk menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP), 3) pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) terutama panas bumi, tenaga air, serta sumber EBT lain seperti surya, bayu, biomass, dan sampah, 4) pencapaian target Rasio Elektrifikasi (RE), 5) keandalan dan kualitas listrik yang semakin baik, dan 6) angka rugi jaringan transmisi dan distribusi yang semakin rendah.

Dua hal yang paling menjadi perhatian Pemerintah saat ini adalah peningkatan RE dan pengembangan EBT. RE secara nasional ditargetkan mencapai 99,9% pada tahun 2019 dan 100% pada 2020. Sementara porsi bauran energi dari Energi Baru Terbarukan sebesar 23% direncanakan akan dicapai pada tahun 2025.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS

Dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan telah ditetapkan delapan kebijakan strategis tahun 2019 dengan memperhatikan tantangan dan dinamika di lingkungan internal dan eksternal. Kebijakan strategis tersebut adalah: 1) optimalisasi kapasitas infrastruktur ketenagalistrikan, 2) menyempurnakan pengelolaan energi primer, 3) meningkatkan kinerja operasional, 4) memberikan layanan melebihi ekspektasi pelanggan, 5) mengembangkan usaha dan portofolio, 6) meningkatkan kemampuan keuangan, 7) meningkatkan keunggulan organisasi dan *human capital,* serta 8) menyempurnakan manajemen pemangku kepentingan dan regulasi.

Electricity Industry

The growth of national electricity demand is driven by several factors, namely economic growth, population growth and electrification programs, as well as development programs that trigger the growth of new business and residential areas. PLN data shows, the realization of PLN electricity sales in the last five years continued to increase from 202,845 GWh to 245,518 GWh with a compound annual growth rate (CAGR) reaching 5%.

PLN through 2019-2028 RUPTL set six goals to be achieved in the next ten years, namely: 1) meeting the needs of electrical energy capacity every year with the desired level of reliability at the least cost, 2) the optimal mix of generating energy to reduce the Cost of Supply (BPP)), 3) utilization of new and renewable energy (RE) especially geothermal, hydropower, and other RE sources such as solar, wood, biomass, and waste, 4) achieving the target Electrification Ratio (RE), 5) reliability and quality of electricity that is the better, and 6) the lower transmission and distribution network loss rates.

The two things that concern the Government the most today are increasing RE and developing RE. National RE is targeted to reach 99.9% in 2019 and 100% in 2020. While the portion of the energy mix from Renewable Energy of 23% is planned to be achieved in 2025.

STRATEGY AND STRATEGIC POLICY

In the Company's Long Term Plan eight strategic policies have been established in 2019 with due regard to challenges and dynamics in the internal and external environment. These strategic policies are: 1) optimizing electricity infrastructure capacity, 2) improving primary energy management, 3) improving operational performance, 4) providing services beyond customer expectations, 5) developing businesses and portfolios, 6) increasing financial capability, 7) increasing excellence organization and human capital, and 8) improving stakeholder management and regulation.

Dalam upaya mengeksekusi langkah-langkah strategis tersebut, Perusahaan tentu menghadapi tantangan besar seperti penyelesaian proyek-proyek sarana ketenagalistrikan tepat waktu, pengamanan pasokan energi primer, efisiensi operasi, kemampuan keuangan untuk mendukung investasi, kesiapan *human capital* dan organisasi, serta manajemen pemangku kepentingan dan regulasi.

In an effort to execute these strategic steps, the Company certainly faces major challenges such as the completion of electricity infrastructure projects on time, securing primary energy supply, operating efficiency, financial capacity to support investment, human capital and organizational readiness, and stakeholder and regulatory management .

Dengan adanya proyek percepatan 35.000 MW sejak 2015, PLN telah menambah infrastruktur ketenagalistrikan dan meningkatkan pasokan tenaga listrik secara signifikan. Dalam kurun waktu lima tahun (2015-2019), kemajuan yang terdiri dari: 6.811 MW telah mencapai tahap COD/SLO, 20.168 MW tahap konstruksi, 6.878 MW tahap belum konstruksi, 829,0 MW tahap pengadaan serta 734,0 MW tahap perencanaan. Dengan demikian, kapasitas terpasang pembangkit secara nasional sampai akhir tahun 2019 adalah 62.833 MW yang terdiri dari pembangkit milik sendiri 69,8%, swasta (IPP) 27,27%, dan sewa 2,93% dengan produksi listrik mencapai 278.941 GWh.

With the project to accelerate 35,000 MW since 2015, PLN has added electricity infrastructure and significantly increased electricity supply. Within a period of five years (2015-2019), the progress consisting of: 6,811 MW had reached the COD/SLO stage, 20,168 MW of the construction phase, 6,878 MW of the non-construction phase, 829, 0 MW procurement stage and 734.0 MW planning phase. Thus, the installed capacity of national plants until the end of 2019 is 62,833 MW consisting of 69.8% self-owned plants, 27.27% private (IPP), and 2.93% rent with electricity production reaching 278,941 GWh.

Pertumbuhan kapasitas terpasang mendorong penyaluran daya listrik secara optimal ke pelanggan sehingga Perusahaan perlu memiliki strategi pemasaran yang inovatif, agresif, dan responsif sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Untuk itu pada tahun 2019, PLN menyusun dokumen rencana strategi dan riset pengembangan produk inovatif sebagai acuan dalam merancang dan mengembangkan produk layanan yang akan diimplementasikan dalam kurun waktu tiga tahun ke depan.

Growth in installed capacity encourages optimal power distribution to customers so that the Company needs to have an innovative, aggressive and responsive marketing strategy so that it can generate greater revenue. For this reason, in 2019, PLN will prepare a strategic plan and innovative product development research document as a reference in designing and developing service products that will be implemented within the next three years.

PERBANDINGAN ANTARA PENCAPAIAN DAN TARGET YANG DITETAPKAN

Secara umum, baik kinerja keuangan maupun kinerja operasional Perusahaan telah tercapai dengan baik, meskipun beberapa indicator kinerja keuangan seperti pendapatan usaha, besaran subsidi listrik dan laba bersih belum mencapai 100% sasaran, namun Perusahaan mampu menurunkan rugi usaha sebelum subsidi dan meningkatkan laba setelah subsidi. Di sisi

COMPARISON BETWEEN ACHIEVEMENTS AND TARGETS SET

In general, both financial performance and operational performance of the Company have been well achieved, although some financial performance indicators such as operating revenues, the amount of electricity subsidies and net income have not reached 100% target, but the Company is able to reduce operating losses before subsidies and increase profits after

operasional meskipun target penjualan tenaga listrik, penambahan pelanggan, SAIDI dan SAIFI belum mencapai 100% sasaran, Perusahaan mampu melampaui RKAP di sisi penurunan BPP, penurunan susut jaringan, penambahan kapasitas pembangkit EBT dan non EBT, penambahan kapasitas jaringan transmisi dan gardu induk,dan pencapaian investasi.

Kapasitas Terpasang, Produksi Listrik dan Bauran Energi

Sampai akhir tahun 2019, kapasitas terpasang pembangkit secara nasional mencapai 62.833 MW, naik 8,7% dibanding tahun 2018 sebesar 57.822 MW. Total produksi listrik mencapai 278.941 GWh, tumbuh 4,4% dari 267.085 GWh di tahun 2018. Produksi pembelian tenaga listrik dan IPP naik 8,9% dari 78.387 GWh di tahun 2018 menjadi 85.398 GWh. Pada tahun 2019, produksi listrik dari pembangkit sewa turun signifikan sebesar 32,5% dari 10.505 GWh di tahun 2018 menjadi 7.086 GWh di tahun 2019. Kondisi ini disebabkan oleh keberhasilan PLN menyelesaikan pembangunan proyek-proyek transmisi, distribusi, dan gardu induk serta menurunkan produksi listrik dari pembangkit sewa yang kurang efisien karena menggunakan bahan bakar minyak(BBM). Hal ini menunjukkan konsistensi PLN dalam melakukan rasionalisasi bauran energi primer pembangkit dengan menurunkan porsi sumber energi BBM dan pelumas dari tahun ke tahun.

Biaya Pokok Penyediaan Listrik (BPP)

Salah satu tujuan efisiensi operasional berkesinambungan adalah untuk menurunkan biaya pokok penyediaan (BPP). PLN berhasil menurunkan realisasi BPP tahun 2019 menjadi Rp1.385 per kWh, lebih rendah dibandingkan Rp1.406 per kWh pada tahun 2018. Hal ini adalah hasil dari upaya PLN memperbaiki kualitas bauran energi dan meningkatkan efisiensi operasional yang didukung oleh stabilnya unsur-unsur biaya variabel seperti kurs Dolar AS, harga ICP, inflasi dan Harga Batubara Acuan (HBA) sebagai dampak penerapan Domestic Market Obligation (DMO) batubara sepanjang tahun 2019.

subsidies. On the operational side, although the electricity sales target, additional customers, SAIDI and SAIFI have not reached 100% of the target, the Company was able to surpass RKAP in terms of decreasing BPP, decreasing network losses, increasing RE and non RE generating capacity, increasing transmission network capacity and substations, and investment attainment.

Installed Capacity, Electricity Production and Energy Mix

Until the end of 2019, the installed capacity of national plants reached 62,833 MW, up 8.7% compared to 2018 of 57,822 MW. Total electricity production reached 278,941 GWh, growing 4.4% from 267,085 GWh in 2018. Production of electricity and IPP purchases rose 8.9% from 78,387 GWh in 2018 to 85,398 GWh. In 2019, electricity production from rental plants will decrease significantly by 32.5% from 10,505 GWh in 2018 to 7,086 GWh in 2019. This condition is caused by PLN's success in completing transmission, distribution and substation projects and reducing production. electricity from rental plants is less efficient because it uses fuel oil (BBM). This shows the consistency of PLN in rationalizing the primary energy mix of power plants by reducing the portion of fuel and lubricant energy sources from year to year.

Cost of Electricity Supply (BPP)

One of the objectives of sustainable operational efficiency is to reduce the cost of supply (BPP). PLN succeeded in reducing the realization of the BPP in 2019 to Rp1,385 per kWh, lower than Rp1,406 per kWh in 2018. This was the result of PLN's efforts to improve the quality of the energy mix and improve operational efficiency supported by the stable elements of variable costs such as the US Dollar exchange rate, ICP prices, inflation and the Reference Coal Price (HBA) as a result of the implementation of the Domestic Market Obligation (DMO) of coal throughout 2019.

Penjualan Tenaga Listrik, Pertumbuhan Pelanggan dan Daya Tersambung

Pada tahun 2019, penjualan tenaga listrik nasional mencapai 245.518 GWh, atau tumbuh 4,6% dari 234.618 GWh pada tahun 2018 berkorelasi dengan jumlah pelanggan yang bertambah 3,8 juta pelanggan pada tahun 2019. Jumlah pelanggan PLN mencapai 75,71 juta pelanggan di tahun 2019, tumbuh 5,3% dari tahun 2018. Seiring dengan pertumbuhan jumlah pelanggan, daya tersambung mengalami kenaikan sebesar 6,0% atau 7.796 MVA menjadi 138.077 MVA.

Susut Jaringan

Realisasi susut jaringan mengalami perbaikan menjadi 9,32% dari 9,51% pada tahun 2018. Penurunan angka susut jaringan sebagai hasil dari sejumlah langkah investasi dan perbaikan jaringan transmisi dan distribusi.

Kinerja Keuangan

Perusahaan mencatat kenaikan pendapatan usaha sebesar 4,67% dari Rp272,90 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp285,64 triliun pada tahun 2019. Pendapatan usaha terutama berasal dari penjualan tenaga listrik yang naik 4,8% dari tahun 2018. Sedangkan pendapatan usaha lain-lain naik 25,25% dari Rp2,11 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp2,64 triliun yang terutama berasal dari pendapatan atas usaha jaringan dan jasa telekomunikasi.

Strategi efisiensi dan bauran energi berhasil menekan kenaikan biaya usaha hanya 2,4% yaitu dari Rp308,19 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp315,44 triliun yang terutama dipicu dari efisiensi biaya pembelian tenaga listrik yang turun 0,83% dari Rp84,3 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp83,6 triliun, sewa pembangkit yang turun 15,3% dari Rp4,27 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp3,62 triliun, dan biaya bahan bakar dan pelumas yang turun 0,87% dari Rp137,27 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp136,08 triliun.

Perusahaan mencatat rugi usaha sebelum subsidi sebesar Rp29,8 triliun, turun 15,6% dibandingkan Rp35,29 triliun pada tahun 2018 dan laba usaha setelah subsidi tahun 2019 sebesar Rp44,16 triliun, naik 22,7% dari Rp35,98 triliun pada tahun sebelumnya.

Electric Power Sales, Customer Growth and Connected Power

In 2019, national electricity sales reached 245,518 GWh, or grew 4.6% from 234,618 GWh in 2018 correlated with the number of customers who increased 3.8 million customers in 2019. The number of PLN customers reached 75.71 million customers in the year 2019, grew 5.3% from 2018. Along with the growth in the number of subscribers, connected power has increased by 6.0% or 7,796 MVA to 138,077 MVA.

Losses

The realization of network losses has improved to 9.32% from 9.51% in 2018. The decline in network losses as a result of a number of investment measures and improvements to the transmission and distribution network.

Financial Performance

The company recorded an increase in operating income by 4.67% from Rp272.90 trillion in 2018 to Rp285.64 trillion in 2019. Operating income mainly came from electricity sales which rose 4.8% from 2018. While other operating revenues-others rose by 25.25% from Rp2.11 trillion in 2018 to Rp2.64 trillion, which mainly came from revenues from telecommunications network and service businesses.

The energy efficiency and mix strategy succeeded in suppressing the increase in operating costs by only 2.4%, from Rp308.19 trillion in 2018 to Rp315.44 trillion, which was mainly triggered by the efficiency of electricity purchase costs which fell 0.83% from Rp84.3 trillion in in 2018 to Rp83.6 trillion, power plant rent decreased by 15.3% from Rp4.27 trillion in 2018 to Rp3.62 trillion, and fuel and lubricant costs which fell 0.87% from Rp137.27 trillion in 2018 to Rp136.08 trillion.

The company recorded a pre-subsidized operating loss of Rp29.8 trillion, down 15.6% compared to Rp35.29 trillion in 2018 and operating profit after the 2019 subsidy of Rp44.16 trillion, up 22.7% from Rp35.98 trillion in the year previous.

Pada tahun 2019, Perusahaan memperoleh subsidi Pemerintah dan pendapatan kompensasi sebesar Rp73,96 triliun, meningkat 3,77% dibandingkan Rp71,27 triliun pada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan dukungan Pemerintah kepada PLN agar tetap dapat merealisasikan investasi pengembangan ketenagalistrikan di tengah kewajiban menyediakan listrik yang terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat.

In 2019, the Company obtained Government subsidies and compensation income of IDR73.96 trillion, an increase of 3.77% compared to IDR71.27 trillion in the previous year. This shows the Government's support for PLN to continue to be able to realize electricity development investment amid the obligation to provide affordable electricity for all levels of society.

Beban di luar usaha naik 12,2% dari Rp16,08 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp18,05 trilliun pada tahun 2019. Kenaikan beban di luar usaha dan peningkatan beban pajak berdampak pada penurunan laba bersih Perusahaan dari Rp11,58 triliun di tahun 2018 menjadi Rp4,32 triliun di tahun 2019.

Non-operating expenses rose 12.20% from Rp16.08 trillion in 2018 to Rp18.05 trillion in 2019. The increase in non-operating expenses and an increase in tax expenses have an impact on the decline in the Company's net profit from Rp11.58 trillion in 2018 to Rp4.32 trillion in 2019.

Aspek Pendanaan

Pada tahun 2019, PLN menerbitkan obligasi lokal dan sukuk ijarah yang diterbitkan sebanyak 32 seri dengan nilai total Rp10,17 triliun dan obligasi global sebanyak 8 seri dengan nilai USD 2,4 miliar, EUR 0,5 miliar dan JPY 23,2 miliar. Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi/sukuk ijarah lokal serta obligasi global digunakan untuk membiayai ekspansi infrastruktur ketenagalistrikan, kredit modal kerja dan corporate general purpose sebagaimana disampaikan di dalam prospektus penerbitannya.

Funding Aspects

In 2019, PLN issued 32 series of local bonds and ijarah sukuk with a total value of Rp10.17 trillion and 8 series of global bonds with a value of USD 2.4 billion, EUR 0.5 billion and JPY 23.2 billion. Funds obtained from the issuance of local ijarah bonds/sukuk and global bonds are used to finance the expansion of electricity infrastructure, working capital loans and corporate general purpose as stated in the issuance prospectus.

Pada tahun 2019 Pemerintah kembali memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp6,5 triliun kepada PLN untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha dalam rangka meningkatkan kemampuan pendanaan guna melanjutkan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

In 2019 the Government will again give a State Capital Participation (PMN) of Rp6.5 trillion to PLN to improve the capital structure and increase business capacity in order to increase the ability of funding to continue the development of electricity infrastructure.

Investasi

Jumlah investasi yang dikeluarkan pada tahun 2019 sebesar Rp104,79 triliun yang didanai dari APLN sebesar Rp48,20 triliun, utang bank sebesar Rp52,41 triliun, dan PMN sebesar Rp4,17 triliun. Proyek-proyek yang telah direalisasikan pada tahun 2019 adalah:

- Penambahan kapasitas pembangkit EBT dengan realisasi penambahan kapasitas pembangkit EBT yang sudah COD/SLO

Investment

The total investment spent in 2019 was IDR 104.79 trillion funded from APLN at IDR 48.20 trillion, bank loans at IDR 52.41 trillion, and PMN at IDR 4.17 trillion. The projects that have been realized in 2019 are:

- Increased RE generating capacity with the realization of additional CBT/SLO RE generating capacity reaching 462.89 MW

mencapai 462,89 MW pada akhir tahun 2019. Penambahan kapasitas pembangkit non-EBT mencapai 4.232,55 MW.
- Penambahan kapasitas transmisi (transmission line/T/L) 500 kV Jawa-Bali, T/L 150 kV untuk luar Jawa-Bali) hingga akhir tahun 2019 terealisasi sepanjang 6.222,33 kms.
- Penambahan kapasitas gardu induk sebesar 17.674 MVA.
- Peningkatan sistem teknologi informasi Perusahaan dan sistem pendukung kegiatan operasional maupun adminstrasi lainnya.

at the end of 2019. Adding non-generating capacity RE reached 4,232.55 MW.

- Increased transmission capacity (transmission line/T/L) 500 kV Java-Bali, T/L 150 kV for outside Java-Bali) until the end of 2019 realized as long as 6,222.33 kms.
- Increased substation capacity by 17,674 MVA.
- Improved the Company's information technology system and activity support system operational and other administration.

Keterangan	Satuan Unit	Target 2019	Realisasi Realization 2019	Pencapaian Ahievement	Description
Pendapatan usaha	Rp miliar billion	293.425	285.640	97,3%	Revenues
Biaya usaha	Rp miliar billion	346.333	315.440	91,1%	Operating expenses
Laba (rugi) usaha	Rp miliar billion	(52.908)	(29.800)	143,7%	Operating income (loss)
Subsidi listrik Pemerintah	Rp miliar billion	66.092	51.711	78,2%	Government's electricity subsidy
Pendapatan kompensasi	Rp miliar billion	-	22.253		Compensation income
Laba setelah subsidi	Rp miliar billion	13.184	44.164	334,98%	Operating income after subsidy
Laba bersih	Rp miliar billion	8.020	4.322	53,9%	Net income after tax
Penjualan tenaga listrik	TWh	251,1	245,5	97,8%	Electricity sales
Penambahan pelanggan	juta pelanggan	3,84	3,79	98,6%	Additional customer
Biaya Pokok Penyediaan (BPP)	Rp/kWh	1.480	1.385,07	106,4%	Cost of supply
Penambahan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT)	MW	284	462,89	163%	Increase capacity of New Renewable Energy (NER) power plant
Penambahan kapasitas pembangkit non-EBT	MW	2.058	4.232,55	205,7%	Increase capacity of Non-NRE power plant
Penambahan kapasitas transmisi	kms	3.287	6.222,33	189,3%	Increase capacity of transmission line
Penambahan kapasitas gardu induk	MVA	10.752	17.674	164,4%	Increase capacity of substation
Susut jaringan	%	9,36	9,32	99,57%	Network losses
SAIDI (konsolidasi)	menit/pelanggan	993	1.136,72	85,55%	SAIDI consolidated
SAIFI (konsolidasi)	kali/pelanggan	10,96	11,51	94,98%	SAIFI consolidated

KENDALA YANG DIHADAPI DAN LANGKAH PENYELESAIAN

Pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 terjadi gangguan yang berakibat pemadaman (blackout) hampir selama 8 jam di wilayah Jabodetabek dan sebagian wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pemadaman bermula pada pukul 11.45 WIB karena adanya gangguan di Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 KV Ungaran-Pemalang yang mengalirkan

CONSTRAINTS FACED AND SETTLEMENT STEPS

On Sunday, August 4, 2019, a disturbance occurred which resulted in a blackout of almost 8 hours in the Greater Jakarta area and parts of West and Central Java. The blackout started at 11:45 WIB due to a disturbance in the 500 KV Ungaran-Pemalang Extra High Voltage Air Line that conducts electricity from East to West. The disruption first occurred in circuit 1, then

listrik dari Timur ke Barat. Gangguan pertama kali terjadi pada sirkit 1, kemudian disusul pada sirkit 2 sehingga menyebabkan penurunan tegangan yang diikuti trip pemutus beban seluruh pembangkit di sisi tengah dan barat Jawa dan berakibat jaringan SUTET Depok dan Tasikmalaya mengalami gangguan. Pada pukul 11.48 WIB daerah Jawa Barat dan DKI Jakarta mengalami padam secara serentak.

Sebagai langkah penanganan darurat, PLN mengalirkan listrik dari Jawa Timur ke PLTA Saguling dan PLTA Cirata untuk menghidupkan listrik secara bertahap mulai Minggu malam pukul 19.27 WIB dan listrik di berbagai wilayah di Jabodetabek mulai menyala. Pada Senin malam seluruh wilayah DKI Jakarta dapat kembali normal meskipun pemadaman bergilir masih terjadi di wilayah Banten dan Jawa Barat. PLN telah menambah mesin pembangkit yang dapat menghasilkan listrik sebesar 5.000 MW dan 3.000 MW untuk menormalkan wilayah Banten dan Jawa Barat.

Direksi dan segenap insan PLN meminta maaf kepada seluruh pelanggan yang terdampak peristiwa tersebut dan menyampaikan apresiasi atas kritik dan masukan yang disampaikan oleh berbagai pihak. Perusahaan memastikan akan memperbaiki persoalan ini mulai dari sisi infrastruktur pendukung, prosedur operasi standar (SOP) serta kesiapan pusat krisis atau crisis center apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Sejumlah mitigasi yang telah dilakukan di antaranya adalah sebagai berikut:

Membangun Pusat Pengelolaan Informasi dan Solusi (P2IS)

PLN meresmikan Pusat Pengelolaaan Informasi dan Solusi (P2IS) di Kantor Pusat PLN. P2IS diproyeksikan sebagai pusat *advanced analysis* untuk menghimpun seluruh data dan kondisi sistem ketenagalistrikan nasional yang meliputi data sistem operasi, kemajuan proyek yang tengah dibangun, hingga data manajemen kinerja. Keberadaan P2IS bertujuan untuk sentralisasi dan konsolidasi sehingga seluruh kondisi kelistrikan dapat terpantau secara *real time* sehingga dapat meminimalisir potensi gangguan karena adanya sistem peringatan dini.

followed in circuit 2 so that it caused a voltage drop which was followed by a trip breaker of the entire power plant on the central and west sides of Java and resulted in the SUTET Depok and Tasikmalaya networks experiencing interference. At 11.48 West Indonesian Time the West Java and DKI Jakarta areas experienced outages simultaneously.

As an emergency measure, PLN supplies electricity from East Java to the Saguling Hydroelectric Power Plant and Cirata Hydroelectric Power to gradually turn on electricity starting Sunday night at 19.27 West Indonesian Time and electricity in various areas in Jabodetabek starts to turn on. On Monday night the entire DKI Jakarta area was able to return to normal even though rolling blackouts still occurred in the Banten and West Java regions. PLN has added a generator engine that can produce 5,000 MW and 3,000 MW of electricity to normalize the Banten and West Java regions.

The Directors and all PLN people apologize to all customers affected by the incident and express appreciation for the criticism and input submitted by various parties. The company ensures that it will correct this problem starting from the supporting infrastructure, standard operating procedures (SOP) and the readiness of the crisis center or crisis center if something unexpected happens. Some mitigations that have been carried out include the following:

Building an Information and Solutions Management Center (P2IS)

PLN inaugurated the Center for Information and Solution Management (P2IS) at the PLN Headquarters. P2IS is projected as a center of advanced analysis to collect all data and conditions of the national electricity system that includes data on operating systems, project progress being built, and performance management data. The existence of P2IS aims to centralize and consolidate so that all electrical conditions can be monitored in real time so as to minimize the potential for disruption due to an early warning system.

Peningkatan Kapasitas Layanan Contact Center PLN 123

Sejak tahun 2012 PLN memiliki layanan Contact Center PLN 123 (CC 123) sebagai kemudahan akses layanan tanpa batas kepada pelanggan. PLN telah memperbaiki sistem CC 123 dengan opsi menambah *channeling* (dengan menambah tenaga *customer service officer*/CSO) dan mengatur channeling yang aktif tergantung dari kondisi daerah yang padam dengan mekanisme *load balancing* di mana CSO dari wilayah yang bebannya rendah dapat menangani panggilan telepon dari wilayah yang bebannya penuh.

Kompensasi Untuk Pelanggan Terdampak

PLN memberikan kompensasi dalam bentuk non-tunai sesuai deklarasi Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) pada Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dengan indikator lama gangguan. PLN mengalokasikan biaya kompensasi sebesar Rp865 miliar sesuai dengan perhitungan yang telah ditetapkan. Khusus untuk pelanggan premium, PLN memberikan kompensasi sesuai *Service level Agreement* (SLA) yang telah disepakati bersama.

Kompensasi sudah diterima pelanggan pasca bayar pada saat pelanggan membayarkan tagihan listrik pemakaian bulan Agustus pada bulan September 2019 dan untuk pelanggan prabayar kompensasi diberikan saat membeli token pertama kali di 1 September 2019.

PROSPEK KE DEPAN

Transformasi "Power Beyond Generations"

Untuk pengembangan bisnis ke depan, Perusahaan mengusung Transformasi Power Beyond Generations. Melalui transformasi ini, PLN bertekad menjadi Perusahaan Penyedia Energi Listrik terbaik se-Asia Tenggara dan pilihan utama konsumen sebagai solusi penyediaan energi.

Transformasi PLN memiliki 4 tujuan strategis, yaitu: Pertama, Meningkatkan penggunaan *green energy* sebagai pembangkit masa depan yang semakin murah seiring berjalannya waktu,

Increased Capacity of PLN Contact Center Services 123

Since 2012 PLN has a PLN 123 Contact Center (CC 123) service as a convenience of unlimited service access to customers. PLN has improved the CC 123 system with the option to add channeling (by increasing customer service officers/CSOs) and regulating active channeling depending on the condition of the area that goes out with a load balancing mechanism where CSOs from low-burden areas can handle phone calls from areas that are full load.

Compensation for Affected Customers

PLN provides compensation in the form of non-cash in accordance with the declaration of Service Quality Level (TMP) in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 27 of 2017 concerning Service Quality Levels and Costs Related to Electric Power Distribution by PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), with an indicator of the duration of disruption. PLN allocates compensation costs of Rp.865 billion in accordance with predetermined calculations.

Especially for premium customers, PLN provides compensation according to the Service level Agreement (SLA) that has been mutually agreed upon.

PROSPECT FORWARD

"Power Beyond Generations" Transformation

For future business development, the Company carries the Power Beyond Generations Transformation. Through this transformation, PLN is determined to become the best Electric Energy Provider Company in Southeast Asia and the consumer's first choice as an energy supply solution.

PLN's transformation has 4 strategic objectives, namely: First, Increase the use of green energy as a generator of a cheaper future over time, as an effort by PLN to protect future generations.

sebagai upaya PLN melindungi generasi masa depan. Kedua, Mendorong inovasi dengan mendigitalisasi semua proses bisnis dan operasi, adaptif terhadap tuntutan zaman, kreatif menangkap peluang, dan mencari solusi. Ketiga, Mengefisienkan proses bisnis dan operasi, sehingga menjadi makin lincah dan gesit menghadapi perubahan. Keempat, Berfokus dan melayani pelanggan dengan lebih baik, menggunakan pendekatan teknologi terkini.

Second, encourage innovation by digitizing all business processes and operations, being adaptive to the demands of the times, creatively capturing opportunities, and finding solutions. Third, streamline business processes and operations, so that they become more agile and nimble in the face of change. Fourth, Focus and serve customers better, using the latest technological approach.

Breakthrough initiative dari Transformasi PLN yang telah dicanangkan antara lain: (a). Green: Implementasi proyek EBT sesuai RJPP 2020-2024, Launching 'Green Booster', Launching EBT skala besar. (b). Innovative: optimasi billing dan penagihan, Rollout Fiber Optic, penyediaan infrastruktur kendaraan listrik, dan Captive Power. (c). Lean: Digitalisasi pembangkit, Digitalisasi Procurement, Digitalisasi untuk distribution excellent; Optimasi Dispatch, Prioritisasi Investasi, Optimasi Energi Primer, dan Anti BlackOut. (d). Customer Focused: Optimalisasi manajemen gangguan dan peluncuran new PLN Mobile.

Breakthrough initiatives from the PLN Transformation that have been announced include: (a). Green: Implementation of RE projects according to RJPP 2020-2024, Launching 'Green Booster', Large-scale RE Launching. (b). Innovative: billing and billing optimization, Fiber Optic Rollout, Electric vehicle infrastructure provision, and Captive Power. (c). Lean: Digitizing plants, Digitizing Procurement, Digitizing for excellent distribution; Dispatch Optimization, Investment Prioritization, Primary Energy Optimization, and Anti Blackout. (d). Customer Focused: Optimization of disruption management and launch of new PLN Mobile.

Keempat tujuan strategis tersebut didukung oleh Strategic Enabler yaitu keunggulan SDM dan organisasi, manajemen anak perusahaan, manajemen eksekusi, serta regulasi dan tata kelola sektor ketenagalistrikan.

The four strategic objectives are supported by Strategic Enabler, namely superiority of HR and organization, subsidiary management, execution management, as well as regulation and governance in the electricity sector.

Dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) Tahun 2019-2038 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 143K/20/MEM/2019 tanggal 1 Agustus 2019, Pemerintah telah menetapkan target bauran energi pada tahun 2025 di mana komposisi batubara sekitar 55%, energi baru dan terbarukan (EBT) minimal 23%, gas sekitar 22%, dan bahan bakar minyak (BBM) sekitar 0,4%. Sedangkan pada tahun 2038, komposisi bauran energi menjadi: batubara sekitar 47%, EBT minimal 28%, gas sekitar 25%, dan BBM sekitar 0,1%.

In the National Electricity General Plan (RUKN) of 2019-2038 established through Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) No. 143K/20/MEM/2019 dated 1 August 2019, the Government has set an energy mix target by 2025 in which the composition coal around 55%, new and renewable energy (RE) of at least 23%, gas around 22%, and fuel oil (BBM) around 0.4%. Whereas in 2038, the composition of the energy mix would be: coal around 47%, RE at least 28%, gas around 25%, and fuel around 0.1%.

Target EBT sebesar 23% pada tahun 2035 cukup rasional mengingat potensi EBT di Indonesia seperti panas bumi, air, bioenergi, sinar matahari (surya) dan angin (bayu) sangat melimpah. Secara total, potensi EBT Indonesia mencapai

The RE target of 23% in 2035 is quite rational considering the potential of RE in Indonesia such as geothermal, water, bioenergy, sunshine (solar) and wind (wind) is very abundant. In total, the potential for Indonesia's RE reaches 443.2 GW,

443,2 GW, sedangkan yang telah termanfaatkan saat ini baru sekitar 2% atau sebesar 8,8 GW. Hingga akhir tahun 2019 PLN telah memiliki pembangkit listrik EBT dengan kapasitas total sebesar 6.711,2 MW. PLN akan terus menambah kapasitas pembangkit listrik EBT sebagai sumber energi bersih, murah, dan ramah lingkungan.

MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA BERKELANJUTAN

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*/GCG) merupakan salah satu prasyarat utama keberlanjutan Perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip GCG di dalam setiap aspek proses bisnis akan menghasilkan kinerja unggul dan berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat dan nilai tambah yang optimal bagi pemegang saham, pegawai, pelanggan, mitra kerja, dan pemangku kepentingan lainnya. Setiap insan PLN, di posisi apapun, diharapkan senantiasa bekerja secara profesional dengan memegang teguh integritas, bertanggung jawab, memiliki rasa memiliki atas semua tugas dan target kinerja yang diembannya, menghindari potensi konflik kepentingan dalam bentuk apapun, dan berorientasi pada hasil namun patuh terhadap ketentuan yang berlaku.

Untuk memperkuat implementasi GCG dan memperjelas panduan bagi pegawai PLN dalam menjalankan tugasnya di dalam koridor GCG, sepanjang tahun 2019 Perusahaan mengeluarkan berbagai kebijakan/pedoman baru maupun penyempurnaan dokumen yang sudah ada, antara lain Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis, Pedoman Penerapan Manajemen Risiko, Pedoman GRC (Governance, Risk, Compliance), Kebijakan Anti Fraud, Pengelolaan Konflik Kepentingan, dan sebagainya.

Sosialisasi kebijakan GCG dilakukan melalui tampilan desktop korporat, aplikasi KOMANDO, e-mail blasting, dan sosialisasi langsung kepada para pegawai.

Secara berkala PLN melaksanakan penilaian penerapan GCG untuk mengukur tingkat kepatuhan penerapan GCG di Perusahaan. Penilaian dilakukan oleh pihak eksternal yang independen dua tahun sekali dan di antara periode tersebut Perusahaan melakukan

while the current utilization is only around 2% or 8.8 GW. Until the end of 2019 PLN already has an RE power plant with a total capacity of 6,711.2 MW. PLN will continue to increase the capacity of the RE power plant as a source of clean, cheap and environmentally friendly energy.

IMPROVE SUSTAINABLE MANAGEMENT QUALITY

The application of good corporate governance (GCG) is one of the main prerequisites for the Company's sustainability. The application of GCG principles in every aspect of business processes will produce superior and sustainable performance, thereby providing optimal benefits and added value for shareholders, employees, customers, business partners, and other stakeholders. Every PLN individual, in any position, is expected to always work professionally by upholding integrity, being responsible, having a sense of ownership of all tasks and performance targets they carry, avoiding potential conflicts of interest in any form, and being results-oriented but compliant with the provisions in place applicable.

To strengthen GCG implementation and clarify guidelines for PLN employees in carrying out their duties within the GCG corridor, throughout 2019 the Company issued various new policies/guidelines and improvements to existing documents, including the Code of Business Conduct and Ethics, Guidelines for Implementing Risk Management, GRC Guidelines (Governance, Risk, Compliance), Anti-Fraud Policy, Conflict of Interest Management, and so on.

GCG policy socialization is carried out through corporate desktop displays, KOMANDO applications, e-mail blasting, and direct socialization to employees.

PLN periodically evaluates the implementation of GCG to measure the level of compliance with GCG implementation in the Company. The assessment is carried out by an independent external party every two years and between these periods the Company conducts a self-assessment. In early

penilaian mandiri (*self assessment*). Pada awal tahun 2020, Perusahaan mengadakan penilaian GCG periode tahun 2019 secara *self assessment* yang dititikberatkan pada evaluasi pemenuhan rekomendasi perbaikan (*Area of Improvement/* AoI) hasil penilaian GCG tahun 2018 oleh BPKP. Secara keseluruhan hasil penilaian mandiri GCG periode tahun 2019 mencapai skor 88,11.

Selain melaksanakan *self assessment* GCG, PLN juga mengikuti penilaian penerapan GCG berdasarkan kriteria *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang dilakukan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG). Hasil penilaian CGPI tahun 2019, PLN meraih predikat Perusahaan "TERPERCAYA" dengan skor 84,85. pencapaian ini lebih baik dari skor tahun 2018 sebesar 84,52. Pada tahun 2019, CGPI mengusung tema "Penguatan Platform Bisnis dengan Kerangka GCG."

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Pada tahun 2019 terjadi perubahan komposisi dan nomenklatur Direksi PLN berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberhentian sementara Sofyan Basir sebagai Direktur Utama dan penugasan Muhamad Ali sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 7/SK/DK-PLN/2019 tanggal 24 April 2019.
2. Pemberhentian Sofyan Basir sebagai Direktur Utama, Penunjukan Djoko Rahardjo Abumanan menjadi Direktur Pengadaan Strategis 2 sekaligus sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama, Pengangkatan Sripeni Inten Cahyani sebagai Direktur Pengadaan Strategis 1; dan Penugasan Supangkat Iwan Santoso menjadi Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-109/MBU/05/2019 tanggal 29 Mei 2019.
3. Pemberhentian Machnizon sebagai Direktur Bisnis Regional Kalimantan, penugasan Sripeni Inten Cahyani sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama, dan Penugasan Syamsul Huda sebagai Pelaksana Tugas Direktur Bisnis Regional Kalimantan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-169/MBU/08/2019 tanggal 2 Agustus 2019.

2020, the Company conducted a self-assessment of the GCG period in 2019 which focused on evaluating the fulfillment of recommendations for improvement (Area of Improvement/AoI) on the results of the 2018 GCG assessment by BPKP. Overall results of the GCG self-assessment for the 2019 period reached a score of 88.11.

In addition to carrying out a GCG self-assessment, PLN also participated in an assessment of the implementation of GCG based on the criteria of the Corporate Governance Perception Index (CGPI) conducted by The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). The results of the 2019 CGPI assessment, PLN won the "RELIABLE" Company score of 84.85. This achievement is better than the 2018 score of 84.52. In 2019, CGPI brought the theme "Strengthening the Business Platform with the GCG Framework."

CHANGES IN BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION

In 2019 there was a change in the composition and nomenclature of the PLN Board of Directors based on the following matters:

1. Temporary dismissal of Sofyan Basir as President Director and the assignment of Muhamad Ali as Acting President Director's Tasks based on Board of Commissioners Decree No. 7/SK/DK-PLN/2019 dated April 24, 2019.
2. Dismissal of Sofyan Basir as President Director, Appointment of Djoko Rahardjo Abumanan to become Director of Strategic Procurement 2 as well as Acting President Director, Appointment of Sripeni Inten Cahyani as Director of Strategic Procurement 1; and the Assignment of Supangkat Iwan Santoso to become the Regional Business Director of East Java, Bali and Nusa Tenggara based on SOE Minister's Decree as RUPS No. SK-109/MBU/05/2019 dated May 29, 2019.
3. Dismissal of Machnizon as Regional Business Director of Kalimantan, assignment of Sripeni Inten Cahyani as Acting President Director, and Assignment of Syamsul Huda as Acting Director of Regional Business Director of Kalimantan based on SOE Ministerial Decree as RUPS No. SK-169/MBU/08/2019 dated August 2, 2019.

4. Pemberhentian Sarwono Sudarto sebagai Direktur Keuangan, Amir Rosidin sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah, dan Supangkat Iwan Santoso sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara; Pengangkatan Zulkifli Zaini sebagai Direktur Utama, Darmawan Prasodjo sebagai Wakil Direktur Utama, dan Sinthya Roesly sebagai Direktur Keuangan; serta Penetapan Haryanto WS sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura, dan Bali, Syamsul Huda sebagai Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Kalimantan, dan Ahmad Rofik sebagai Direktur Bisnis Regional Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-325/MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019.

4. Dismissal of Sarwono Sudarto as Director of Finance, Amir Rosidin as Regional Business Director of Central Java, and Supangkat Iwan Santoso as Regional Business Director of East Java, Bali and Nusa Tenggara; The appointment of Zulkifli Zaini as President Director, Darmawan Prasodjo as Vice President Director, and Sinthya Roesly as Director of Finance; and Determination of Haryanto WS as Regional Business Director of Java, Madura and Bali, Syamsul Huda as Regional Business Director of Sulawesi and Kalimantan, and Ahmad Rofik as Regional Business Director of Maluku, Papua and Nusa Tenggara based on SOE Ministerial Decree as RUPS No. SK-325/MBU/12/2019 dated December 23, 2019.

Sehubungan dengan dinamika pergantian Direksi PT PLN (Persero) yang cukup tinggi yang terjadi di sepanjang tahun 2019, maka untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang susunan Direksi sepanjang tahun 2019 serta memperjelas batasan tanggung jawab Direksi sesuai dengan masa jabatannya, maka kami sampaikan rincian susunan Direksi PT PLN (Persero) sepanjang tahun 2019 sebagai berikut:

Due to the dynamics of the change in the Board of Directors of PT PLN (Persero) that occurred throughout 2019, to further explain the composition of the Board of Directors throughout 2019 and to clarify the limits of the responsibilities of the Board of Directors according to their tenure, we submit details of the composition of the Board of Directors of PT PLN (Persero) throughout 2019 as follows:

Susunan Direksi PT PLN (Persero) selama Periode Tahun 2019

The Composition of Board of Directors of PT PLN (Persero) during the Period of 2019

1 Januari 2019 s.d 24 April 2019

January 1, 2019 to April 24, 2019

No	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Letter	Tanggal Efektif Efective Date
1	Sofyan Basir	Direktur Utama President Director	SK Menteri BUMN No SK-272/MBU/12/2014	2 Januari 2015
		PLT Direktur Pengadaan Strategis 1 Acting Director of Strategic Procurement 1	Kepdir No 108/DIR/2017	27 November 2017
2	Sarwono Sudarto	Direktur Keuangan Director of Finance	SK Menteri BUMN No SK-272/MBU/12/2014	2 Januari 2015
3	Syofvi Felienty Roekman	Direktur Perencanaan Korporat Director of Corporate Planning	SK Menteri BUMN No SK-138/MBU/07/2017	24 Juli 2017
4	Muhamad Ali	Direktur Human Capital Management Director of Human Capital Management	SK Menteri BUMN No SK-211/MBU/10/2015	30 Oktober 2015
5	Supangkat Iwan Santoso	Direktur Pengadaan Strategis 2 Director of Strategic Procurement 2	SK Menteri BUMN No SK-272/MBU/12/2014	23 Desember 2014

No	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Letter	Tanggal Efektif Efective Date
6	Wiluyo Kusdwiharto	Direktur Bisnis Regional Sumatera Regional Business Director of Sumatera	SK Menteri BUMN No SK-138/MBU/07/2017	24 Juli 2017
7	Haryanto W.S	Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat Regional Business Director of Western Java	SK Menteri BUMN No SK-211/MBU/10/2015	30 Oktober 2015
8	Amir Rosidin	Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah Regional Business Director of Central Part of Java	SK Menteri BUMN No SK-272/MBU/12/2014	23 Desember 2014
9	Djoko Rahardjo Abumanan	Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara Regional Business Director of Eastern Java, Bali and Nusa Tenggara	SK Menteri BUMN No SK-211/MBU/10/2015	30 Oktober 2015
10	Machnizon	Direktur Bisnis Regional Kalimantan Regional Business Director of Kalimantan	SK Menteri BUMN No SK-211/MBU/10/2015	30 Oktober 2015
11	Syamsul Huda	Direktur Bisnis Regional Sulawesi Regional Business Director of Sulawesi	SK Menteri BUMN No SK-138/MBU/07/2017	24 Juli 2017
12	Ahmad Rofik	Direktur Bisnis Regional Maluku Papua Regional Business Director of Maluku and Papua	SK Menteri BUMN No SK-138/MBU/07/2017	24 Juli 2017

24 April 2019 s.d 29 Mei 2019 — April 24, 2019 to May 29, 2019

No	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Letter	Tanggal Efektif Efective Date
1	Muhamad Ali	PLT Direktur Utama Acting President Director	SK Dewan Komisaris No 7/SK/DK-PLN/2019	24 April 2019
		Direktur Human Capital Management Director of Human Capital Management	SK Menteri BUMN No SK-211/MBU/10/2015	30 Oktober 2015
2	Sarwono Sudarto	Direktur Keuangan Director of Finance	SK Menteri BUMN No SK-272/MBU/12/2014	2 Januari 2015
3	Syofvi Felienty Roekman	Direktur Perencanaan Korporat Director of Corporate Planning	SK Menteri BUMN No SK-138/MBU/07/2017	24 Juli 2017
4	Supangkat Iwan Santoso	Direktur Pengadaan Strategis 2 Director of Strategic Procurement 2	SK Menteri BUMN No SK-272/MBU/12/2014	23 Desember 2014
5	Wiluyo Kusdwiharto	Direktur Bisnis Regional Sumatera Regional Business Director of Sumatera	SK Menteri BUMN No SK-138/MBU/07/2017	24 Juli 2017
6	Haryanto W.S	Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat Regional Business Director of Western Java	SK Menteri BUMN No SK-211/MBU/10/2015	30 Oktober 2015
7	Amir Rosidin	Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah Regional Business Director of Central Part of Java	SK Menteri BUMN No SK-272/MBU/12/2014	23 Desember 2014

No	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Letter	Tanggal Efektif Efective Date
8	Djoko Rahardjo Abumanan	Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara Regional Business Director of Eastern Java, Bali and Nusa Tenggara	SK Menteri BUMN No SK-211/MBU/10/2015	30 Oktober 2015
9	Machnizon	Direktur Bisnis Regional Kalimantan Regional Business Director of Kalimantan	SK Menteri BUMN No SK-211/MBU/10/2015	30 Oktober 2015
10	Syamsul Huda	Direktur Bisnis Regional Sulawesi Regional Business Director of Sulawesi	SK Menteri BUMN No SK-138/MBU/07/2017	24 Juli 2017
11	Ahmad Rofik	Direktur Bisnis Regional Maluku Papua Regional Business Director of Maluku and Papua	SK Menteri BUMN No SK-138/MBU/07/2017	24 Juli 2017

29 Mei 2019 s.d 2 Agustus 2019 — 29 May 2019 to 2 August 2019

No	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Letter	Tanggal Efektif Efective Date
1	Djoko Rahardjo Abumanan	PLT Direktur Utama Acting President Director	SK Menteri BUMN No SK-109/MBU/05/2019	29 Mei 2019
		Direktur Pengadaan Strategis 2 Director of Strategic Procurement 2	SK Menteri BUMN No SK-211/MBU/10/2015, SK Menteri BUMN No SK-109MBU/05/2019	30 Oktober 2015, 29 Mei 2019
2	Sarwono Sudarto	Direktur Keuangan Director of Finance	SK Menteri BUMN No SK-272/MBU/12/2014	2 Januari 2015
3	Syofvi Felienty Roekman	Direktur Perencanaan Korporat Director of Corporate Planning	SK Menteri BUMN No SK-138/MBU/07/2017	24 Juli 2017
4	Muhamad Ali	Direktur Human Capital Management Director of Human Capital Management	SK Menteri BUMN No SK-211/MBU/10/2015	30 Oktober 2015
5	Sripeni Inten Cahyani	Direktur Pengadaan Strategis 1 Director of Strategic Procurement 1	SK Menteri BUMN No SK-109/MBU/05/2019	29 Mei 2019
6	Wiluyo Kusdwiharto	Direktur Bisnis Regional Sumatera Regional Business Director of Sumatera	SK Menteri BUMN No SK-138/MBU/07/2017	24 Juli 2017
7	Haryanto W.S	Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat Regional Business Director of Western Java	SK Menteri BUMN No SK-211/MBU/10/2015	30 Oktober 2015
8	Amir Rosidin	Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah Regional Business Director of Central Part of Java	SK Menteri BUMN No SK-272/MBU/12/2014	23 Desember 2014
9	Supangkat Iwan Santoso	Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara Regional Business Director of Eastern Java, Bali and Nusa Tenggara	SK Menteri BUMN No SK-272/MBU/12/2014, SK Menteri BUMN No SK-109/MBU/05/2019	23 Desember 2014, 29 Mei 2019
10	Machnizon	Direktur Bisnis Regional Kalimantan Regional Business Director of Kalimantan	SK Menteri BUMN No SK-211/MBU/10/2015	30 Oktober 2015

No	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Letter	Tanggal Efektif Efective Date
11	Syamsul Huda	Direktur Bisnis Regional Sulawesi Regional Business Director of Sulawesi	SK Menteri BUMN No SK-138/MBU/07/2017	24 Juli 2017
12	Ahmad Rofik	Direktur Bisnis Regional Maluku Papua Regional Business Director of Maluku and Papua	SK Menteri BUMN No SK-138/MBU/07/2017	24 Juli 2017

2 Agustus 2019 s.d 23 Desember 2019 — August 2, 2019 to December 23, 2019

No	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Letter	Tanggal Efektif Efective Date
1	Sripeni Inten Cahyani	PLT Direktur Utama Acting President Director	SK Menteri BUMN No SK-169/MBU/08/2019	2 Agustus 2019
		Direktur Pengadaan Strategis 1 Director of Strategic Procurement 1	SK Menteri BUMN No SK-109/MBU/05/2019	29 Mei 2019
2	Sarwono Sudarto	Direktur Keuangan Director of Finance	SK Menteri BUMN No SK-272/MBU/12/2014	2 Januari 2015
3	Syofvi Felienty Roekman	Direktur Perencanaan Korporat Director of Corporate Planning	SK Menteri BUMN No SK-138/MBU/07/2017	24 Juli 2017
4	Muhamad Ali	Direktur Human Capital Management Director of Human Capital Management	SK Menteri BUMN No SK-211/MBU/10/2015	30 Oktober 2015
5	Djoko Rahardjo Abumanan	Direktur Pengadaan Strategis 2 Director of Strategic Procurement 2	SK Menteri BUMN No SK-211/MBU/10/2015, SK Menteri BUMN No SK-109/MBU/05/2019	30 Oktober 2015, 29 Mei 2019
6	Wiluyo Kusdwiharto	Direktur Bisnis Regional Sumatera Regional Business Director of Sumatera	SK Menteri BUMN No SK-138/MBU/07/2017	24 Juli 2017
7	Haryanto W.S	Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat Regional Business Director of Western Java	SK Menteri BUMN No SK-211/MBU/10/2015	30 Oktober 2015
8	Amir Rosidin	Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah Regional Business Director of Central Part of Java	SK Menteri BUMN No SK-272/MBU/12/2014	23 Desember 2014
9	Supangkat Iwan Santoso	Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara Regional Business Director of Eastern Java, Bali and Nusa Tenggara	SK Menteri BUMN No SK-272/MBU/12/2014, SK-109/MBU/05/2019	23 Desember 2014, 29 Mei 2019
10	Syamsul Huda	Direktur Bisnis Regional Sulawesi Regional Business Director of Sulawesi	SK Menteri BUMN No SK-138/MBU/07/2017	24 Juli 2017
		PLT Direktur Bisnis Regional Kalimantan Acting Regional Business Director of Kalimantan	SK Menteri BUMN No SK-169/MBU/08/2019	2 Agustus 2019
11	Ahmad Rofik	Direktur Bisnis Regional Maluku Papua Regional Business Director of Maluku and Papua	SK Menteri BUMN No SK-138/MBU/07/2017	24 Juli 2017

23 Desember 2019 s.d 31 Desember 2019 Desember 23, 2019 to December 31, 2019

No	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Letter	Tanggal Efektif Efective Date
1	Zulkifli Zaini	Direktur Utama President Director	SK Menteri BUMN No. SK-325/MBU/12/2020	23 Desember 2019
2	Darmawan Prasodjo	Wakil Direktur Utama Vice President Director	SK Menteri BUMN No. SK-325/MBU/12/2020	23 Desember 2019
3	Sinthya Roesly	Direktur Keuangan Director of Finance	SK Menteri BUMN No. SK-325/MBU/12/2020	23 Desember 2019
4	Syofvi Felienty Roekman	Direktur Perencanaan Korporat Director of Corporate Planning	SK Menteri BUMN No. SK-138/MBU/07/2017	24 Juli 2017
5	Muhamad Ali	Direktur Human Capital Management Director of Human Capital Management	SK Menteri BUMN No. SK-211/MBU/10/2015	30 Oktober 2015
6	Sripeni Inten Cahyani	Direktur Pengadaan Strategis 1 Director of Strategic Procurement 1	SK Menteri BUMN No. SK-109/MBU/05/2019	29 Mei 2019
7	Djoko Rahardjo Abumanan	Direktur Pengadaan Strategis 2 Director of Strategic Procurement 2	SK Menteri BUMN No SK-211/MBU/10/2015, SK Menteri BUMN No SK-109/MBU/05/2019	30 Oktober 2015, 29 Mei 2019
8	Wiluyo Kusdwiharto	Direktur Bisnis Regional Sumatera Regional Business Director of Sumatera	SK Menteri BUMN No. SK-138/MBU/07/2017	24 Juli 2017
9	Haryanto WS	Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali Regional Business Director of Java, Madura and Bali	SK Menteri BUMN No SK-211/MBU/10/2015, SK Menteri BUMN No SK-325/MBU/12/2020	30 Oktober 2015, 23 Desember 2019
10	Syamsul Huda	Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Kalimantan Regional Business Director of Sulawesi and Kalimantan	SK Menteri BUMN No SK-138/MBU/07/2017, SK Menteri BUMN No SK-325/MBU/12/2020	24 Juli 2017, 23 Desember 2019
11	Ahmad Rofik	Direktur Bisnis Regional Maluku, Papua dan Nusa Tenggara Regional Business Director of Maluku, Papua and Nusa Tenggara	SK Menteri BUMN No SK-138/MBU/07/2017, SK Menteri BUMN No SK-325/MBU/12/2020	24 Juli 2017, 23 Desember 2019

PERGANTIAN DIREKSI SETELAH 31 DESEMBER 2019 SAMPAI DENGAN PENERBITAN LAPORAN TAHUNAN

Pada 14 Mei 2020, RUPS melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK-147/MBU/05/2020 memberhentikan dengan hormat Sripeni Inten Cahyani sebagai Direktur Pengadaan Strategis 1, Djoko Rahardjo Abu Manan sebagai Direktur Pengadaan Strategis 2, Muhamad Ali sebagai Direktur Human Capital Management, dan Ahmad Rofik sebagai Direktur Bisnis Regional Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Selanjutnya, mengalihkan penugasan Syofvi Felienty Roekman semula Direktur Perencanaan Korporat menjadi Direktur Human Capital dan Management, Wiluyo Kusdwiharto semula Direktur Bisnis Regional Sumatera menjadi Direktur Bisnis Regional Sumatera Kalimantan, dan Syamsul Huda semula Direktur Bisnis Regional Sulawesi

CHANGE OF DIRECTORS AFTER DECEMBER 31, 2019 UNTIL THE ISSUANCE OF THE ANNUAL REPORT

On May 14, 2020, the General Meeting of Shareholders through Minister of SOE Decree No. SK-147/MBU/05/2020 dismissed Sripeni Inten Cahyani as Director of Strategic Procurement 1, Djoko Rahardjo Abu Manan as Director of Strategic Procurement 2, Muhamad Ali as Director of Human Capital Management, and Ahmad Rofik as Regional Business Director of Maluku, Papua, and Nusa Tenggara. Subsequently, the assignment of Syofvi Felienty Roekman was originally Director of Corporate Planning to Director of Human Capital and Management, Wiluyo Kusdwiharto, formerly Regional Business Director of Sumatra to Regional Business Director of Sumatra Kalimantan, and Syamsul Huda, formerly Regional Business Director of

dan Kalimantan menjadi Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. RUPS juga mengangkat Muhammad Ikbal Nur sebagai Direktur Perencanaan Korporat, Bob Saril sebagai Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan, Rudy Hendra Prastowo sebagai Direktur Energi Primer, dan M Ikhsan Asaad sebagai Direktur Mega Project.

APRESIASI

Mewakili Direksi, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, pelanggan, investor, mitra usaha, serta para pemangku kepentingan lainnya atas dukungan dan kepercayaan yang terus diberikan. Saya sampaikan penghargaan kepada seluruh insan PLN dan anak perusahaan yang telah menunjukkan dedikasi dan kerja kerasnya sehingga kita dapat melalui tahun 2019 dengan baik. Saya yakin, dengan dukungan semua pihak, PLN akan terus bertumbuh secara berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan nilai bagi Pemegang Saham dan memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi negara dan masyarakat.

Sulawesi and Kalimantan to Regional Business Director of Sulawesi, Maluku, Papua and Nusa Tenggara. The AGM also appointed Muhammad Ikbal Nur as Director of Corporate Planning, Bob Saril as Director of Commerce and Customer Management, Rudy Hendra Prastowo as Director of Primary Energy, and M Ikhsan Asaad as Director of Mega Project.

APPRECIATION

On behalf of the Board of Directors, I would like to express my gratitude to the Shareholders, the Board of Commissioners, customers, investors, business partners, and other stakeholders for their continued support and trust. I extend my appreciation to all the people of PLN and its subsidiaries who have shown their dedication and hard work so that we can get through 2019 well. I am sure, with the support of all parties, PLN will continue to grow sustainably so that it can increase shareholder value and make beneficial contributions to the country and society.

Atas nama Direksi
On Behalf of the Board of Directors

Zulkifli Zaini
Direktur Utama
President Director

Direksi
Periode 1 Januari 2019–24 April 2019

Board of Directors'
as of 1 January 2019-24 April 2019

Sofyan Basir
Direktur Utama dan Pelaksana Tugas Direktur Pengadaan Strategis 1
President Director and Acting Director of Strategic Procurement 1

Syofvi Felienty Roekman
Direktur Perencanaan Korporat
Director of Corporate Planning

Sarwono Sudarto
Direktur Keuangan
Director of Finance

Muhamad Ali
Direktur Human Capital Management
Director of Human Capital Management

Supangkat Iwan Santoso
Direktur Pengadaan Strategis 2
Director of Strategic Procurement 2

Wiluyo Kusdwiharto
Direktur Bisnis Regional Sumatera
Regional Business Director of Sumatra

Haryanto WS
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat
Regional Business Director of Western Java

Amir Rosidin
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah
Regional Business Director of Central Part of Java

Djoko Rahardjo Abumanan
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara
Regional Business Director of Eastern Java, Bali & Nusa Tenggara

Machnizon
Direktur Bisnis Regional Kalimantan
Regional Business Director of Kalimantan

Syamsul Huda
Direktur Bisnis Regional Sulawesi
Regional Business Director of Sulawesi

Ahmad Rofik
Direktur Bisnis Regional Maluku & Papua
Regional Business Director of Maluku & Papua

Direksi
Periode 24 April 2019–29 Mei 2019

Board of Directors'
as of 24 April 2019-29 May 2019

Muhamad Ali
Pelaksanan Tugas Direktur Utama, Direktur Human Capital Management
Acting President Director, Director of Human Capital Management

Syofvi Felienty Roekman
Direktur Perencanaan Korporat
Director of Corporate Planning

Sarwono Sudarto
Direktur Keuangan
Director of Finance

Supangkat Iwan Santoso
Direktur Pengadaan Strategis 2
Director of Strategic Procurement 2

Wiluyo Kusdwiharto
Direktur Bisnis Regional Sumatera
Regional Business Director of Sumatra

Haryanto WS
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat
Regional Business Director of Western Java

Amir Rosidin
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah
Regional Business Director of Central Part of Java

Djoko Rahardjo Abumanan
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara
Regional Business Director of Eastern Java, Bali & Nusa Tenggara

Machnizon
Direktur Bisnis Regional Kalimantan
Regional Business Director of Kalimantan

Syamsul Huda
Direktur Bisnis Regional Sulawesi
Regional Business Director of Sulawesi

Ahmad Rofik
Direktur Bisnis Regional Maluku & Papua
Regional Business Director of Maluku & Papua

Direksi
Periode 29 Mei 2019–2 Agustus 2019

Board of Directors'
as of 29 May 2019-2 August 2019

Djoko Rahardjo Abumanan
Pelaksana Tugas Direktur Utama, Direktur Pengadaan Strategis 2
Acting President Director, Director of Strategic Procurement 2

Syofvi Felienty Roekman
Direktur Perencanaan Korporat
Director of Corporate Planning

Sarwono Sudarto
Direktur Keuangan
Director of Finance

Muhamad Ali
Direktur Human Capital Management
Director of Human Capital Management

Sripeni Inten Cahyani
Direktur Pengadaan Strategis 1
Director of Strategic Procurement 1

Wiluyo Kusdwiharto
Direktur Bisnis Regional Sumatera
Regional Business Director of Sumatra

Haryanto WS
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat
Regional Business Director of Western Java

Amir Rosidin
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah
Regional Business Director of Central Part of Java

Supangkat Iwan Santoso
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara
Regional Business Director of Eastern Java, Bali & Nusa Tenggara

Machnizon
Direktur Bisnis Regional Kalimantan
Regional Business Director of Kalimantan

Syamsul Huda
Direktur Bisnis Regional Sulawesi
Regional Business Director of Sulawesi

Ahmad Rofik
Direktur Bisnis Regional Maluku & Papua
Regional Business Director of Maluku & Papua

Direksi
Periode 2 Agustus 2019–23 Desember 2019

Board of Directors'
as of 2 August 2019-23 December 2019

Sripeni Inten Cahyani
Pelaksana Tugas Direktur Utama, Direktur Pengadaan Strategis 1
Acting President Director, Director of Strategic Procurement 1

Syofvi Felienty Roekman
Direktur Perencanaan Korporat
Director of Corporate Planning

Sarwono Sudarto
Direktur Keuangan
Director of Finance

Muhamad Ali
Direktur Human Capital Management
Director of Human Capital Management

Djoko Rahardjo Abumanan
Direktur Pengadaan Strategis 2
Director of Strategic Procurement 2

Wiluyo Kusdwiharto
Direktur Bisnis Regional Sumatera
Regional Business Director of Sumatra

Haryanto WS
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat
Regional Business Director of Western Java

Amir Rosidin
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah
Regional Business Director of Central Part of Java

Supangkat Iwan Santoso
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara
Regional Business Director of Eastern Java, Bali & Nusa Tenggara

Syamsul Huda
Direktur Bisnis Regional Sulawesi, PLT Direktur Bisnis Regional Kalimantan
Regional Business Director of Sulawesi, Acting Regional Business Director of Kalimantan

Ahmad Rofik
Direktur Bisnis Regional Maluku & Papua
Regional Business Director of Maluku & Papua

Direksi
Periode 23 Desember 2019–31 Desember 2019

Board of Directors'
as of 23 December 2019-31 December 2019

Zulkifli Zaini
Direktur Utama
President Director

Darmawan Prasodjo
Wakil Direktur Utama
Vice President Director

Syofvi Felienty Roekman
Direktur Perencanaan Korporat
Director of Corporate Planning

Sinthya Roesly
Direktur Keuangan
Director of Finance

Muhamad Ali
Direktur Human Capital Management
Director of Human Capital Management

Sripeni Inten Cahyani
Direktur Pengadaan Strategis 1
Director of Strategic Procurement 1

Djoko Rahardjo Abumanan
Direktur Pengadaan Strategis 2
Director of Strategic Procurement 2

Wiluyo Kusdwiharto
Direktur Bisnis Regional Sumatera
Regional Business Director of Sumatra

Haryanto WS
Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali
Regional Business Director of Java, Madura dan Bali

Syamsul Huda
Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Kalimantan
Regional Business Director of Sulawesi and Kalimantan

Ahmad Rofik
Direktur Bisnis Regional Maluku, Papua dan Nusa Tenggara
Regional Business Director of Maluku, Papua and Nusa Tenggara

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

Profil Perusahaan

Corporate Profile

PLN telah berkembang menjadi salah satu kelompok korporasi dengan aset terbesar di dunia. Sampai akhir tahun 2019, total daya pembangkit milik PLN mencapai 43.857 MW. Selain itu, PLN juga mengelola 17.136 MW Pembangkit Independent Power Producer (IPP) dan 1.840 MW Pembangkit Sewa.

PLN has become one of the corporate groups with the largest assets in the world. At the end of 2019, the capacity of power plants owned by PLN reached 43,857 MW. In addition, PLN also managed 17,136 MW Independent Power Producers (IPP) and 1,840 MW Rented Power Plants.

88 **Informasi Umum**
General Information

89 **Riwayat Singkat Perusahaan**
Company at a Glance

91 **Perubahan Nama Perusahaan**
The Company's Changes of Name

92 **Jejak Langkah Perusahaan**
The Company's Milestones

94 **Bidang Usaha**
Business Lines

96 **Segmen Operasi**
Operation Segment

98 **Struktur Organisasi**
Organizational Structure

100 **Visi, Misi, Moto & Budaya Perusahaan**
Vision, Mission, Motto and Culture of the Company

104 **Peta Jalan Budaya Perusahaan 2017-2021**
Corporate Culture Roadmap 2017-2021

105 **Strategi Korporat**
Corporate Strategies

106 **Informasi Pemegang Saham dan Obligasi**
Shareholders and Bonds Information

110 **Profil Dewan Komisaris**
Board of Commissioners Profiles

116 **Profil Direksi**
Board of Directors Profiles

128 **Pengelolaan Human Capital**
Human Capital Management

134 **Sistem Manajemen Kinerja Pegawai (SIMKP)**
Employee Performance Management System (SIMKP)

136 **Kesejahteraan Pegawai**
Employee Welfare

138 **Hubungan Industrial**
Industrial Relations

141 **Survei Keterikatan Pegawai/*Employee Engagement Survey* (EES)**
Employee Engagement Survey (EES)

142 **Entitas Anak**
Subsidiaries

143 **Entitas Afiliasi Anak Perusahaan**
Affiliated Entities of Subsidiaries

145 **Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama**
Associates and Joint Ventures

148 **Struktur Usaha Grup PLN**
PLN Business Group Structure

150 **Wilayah Operasi**
Operational Area

152 **Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan di Pasar Modal**
Capital Market Supporting Institutions and Proffessions

157 **Alamat Unit Bisnis dan Kantor Perwakilan**
Address of Business Units and Representative Offices

162 **Situs Perusahaan**
Corporat Website

164 **Penghargaan dan Pengakuan Eksternal**
Awards and External Recognitions

168 **Sertifikasi**
Certification

170 **Peristiwa Penting 2019**
Event Highlights 2019

Informasi Umum

General Information

Nama Name	**PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)**
Bidang Usaha Line of Business	Pembangkitan, Distribusi, Transmisi dan Jasa Lain Terkait Kelistrikan Generation, Distribution, Transmission and Other Services Related to Electricity
Kepemilikan Ownership	100% Pemerintah Indonesia 100% Government of Indonesia
Alamat Address	**Kantor Pusat** | Head Office PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Jl. Trunojoyo Blok M-I No.135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia Tel. : +62 21 725 1234, 725 0550, 726 1122 Fax. : +62 21 722 1330 *E-mail* : pln123@pln.co.id Website: www.pln.co.id
Tanggal Pendirian Date of Establishment	Pertama kali didirikan sebagai Jawatan Listrik dan Gas berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 1 SD/1945 tanggal 27 Oktober 1945. Selanjutnya menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT PLN (Persero) berdasarkan Akta 169, 30 Juli 1994 dari Sutjipto, Notaris. Established as Jawatan Listrik dan Gas based on Government Decree No. 1 SD/1945 dated October 27, 1945. Since 1994 became a Limited Liability Company under the name of PT PLN (Persero) based on Deed 169, July 30, 1994 from Sutjipto, Notary Public.
Dasar Hukum Pendirian Establishment Legal Basis	1. Peraturan Pemerintah No. 1 SD/1945 tanggal 27 Oktober 1945 berdiri sebagai Jawatan Listrik dan Gas. 2. Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1961, diganti sebagai Perusahaan Negara, disebut sebagai Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara. 3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1965, dibentuk sebagai Perusahaan Listrik Negara. 4. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1972, tanggal 3 Juni 1972, ditegaskan menjadi Perum Perusahaan Listrik Negara. 5. Akta 169, 30 Juli 1994 dari Sutjipto, Notaris, Perum PLN diubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT PLN (Persero). 1. Government Regulation No. 1 SD/1945, 27 October 1945, established as Jawatan Listrik dan Gas. 2. Government Regulation No. 67 of 1961, changed to State Company (Perusahaan Negara), and called State-Owned Electricity Ultimate Enterprise. 3. Government Regulation No. 19 of 1965, established as State-Owned Electricity Enterprise. 4. Government Regulation No. 18 of 1972, dated 3 June 1972, affirmed as State-Owned Electricity Enterprise. 5. Deed No. 169, 30 July 1994 from Sutjipto, Notary, Perum PLN was changed to a Limited Liability Company under the name of PT PLN (Persero).
Modal Dasar Authorized Capital	Rp439 Triliun | Trillion
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid Capital	Rp115,18 triliun | Trillion
Kode Obligasi Bonds Code	**PPLN**

Riwayat Singkat Perusahaan

Company at a Glance

"Listrik untuk kehidupan yang lebih baik" mungkin telah menjadi dasar pemikiran awal ketika para pengurus beberapa pabrik gula dan perkebunan teh Hindia Belanda di akhir abad ke-19 mulai membangun pembangkit listrik untuk keperluan sendiri. Hadirnya tenaga listrik oleh swasta yang diproduksi untuk keperluan sendiri, menjadi cikal bakal tumbuhnya industri ketenagalistrikan Indonesia. Kemudian di masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945, seluruh pembangkit listrik tersebut diambil alih dan dimanfaatkan oleh tentara pendudukan Jepang.

"Electricity for a better life" might have been the initial premise when managers of several sugar factories and Dutch Indies tea plantations in the late 19th century began building power plants for their own needs. The electricity produced by the private sector for its own needs, became the forerunner to the growth of Indonesian electricity industry. Then, during the Japanese occupation in 1942-1945, all power plants were taken over and utilized by the Japanese army.

Seiring dengan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II pada tahun 1945, para pemuda dan buruh listrik yang tergabung dalam delegasi buruh/pegawai listrik dan gas bersama-sama dengan pimpinan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) mendesak Presiden Soekarno untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan listrik tersebut.

As the Japanese defeated in World War II in 1945, the youth and electric workers who joined the delegation of electricity and gas workers together with the leaders of Central Indonesian National Committee (KNIP) urged President Soekarno to nationalize the electricity companies.

Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas, yang berada di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga untuk mengelola pembangkit listrik yang dimiliki saat itu dengan kapasitas total 157,5 MW. Pada 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas berubah nama menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang usaha listrik, gas dan kokas. Pada 1 Januari 1965 BPU-PLN dibubarkan dan Pemerintah membentuk dua perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas.

On October 27, 1945, President Soekarno incorporated Electricity and Gas Bureau, which was under the Department of Public Works and Energy to manage those power plants with a total capacity of 157.5 MW. On January 1, 1961, Electricity and Gas Bureau changed its name to BPU-PLN (Board of General Administration of the State Power Company) which was engaged in the business of power, gas and coke. On January 1, 1965 BPU-PLN was dissolved and the Government established two state-owned companies namely Perusahaan Listrik Negara (PLN) to manager power supply and Perusahaan Gas Negara (PGN) to manage gas supply.

Sesuai PP No. 18 tahun 1972, PLN berubah status menjadi Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara, yang bertindak sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Di tahun 1994 PLN beralih menjadi Perusahaan (Persero) yang tetap sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum.

In accordance with Government Regulation No. 18 of 1972, PLN changed its status to a State Power Company (Perum), which acted as the Authorized Agency in Power Business (PKUK) with the task of providing power for the public interest. In 1994, PLN turned into a Limited Liability Company (Persero) which remained as a PKUK in providing power for public needs.

Dengan terbitnya UU No. 30 tahun 2009, berdampak pada PLN bukan lagi sebagai PKUK tetapi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pemegang Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik (IUPTL) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

Law No. 30 of 2009 changed the status of PLN. It was no longer PKUK but a State-Owned Enterprise (BUMN) holding Electric Power Supply Business License (IUPTL) with the task of providing power for public interest.

Kini PLN telah berkembang sebagai salah satu kelompok korporasi dengan aset terbesar di dunia. Total daya pembangkit milik PLN yang dikelola sampai akhir tahun 2019 telah berkembang menjadi 43.857 MW. Selain itu, PLN juga mengelola 17.136 MW pembangkit milik *Independent Power Producer* (IPP) dan 1.840 MW Pembangkit Sewa.

Now, PLN has been developeding as one of the corporate groups with the largest assets in the world. The capacity of power plants owned and managed by PLN at end of 2019 was 43,857 MW. In addition, PLN also managed 17,136 MW power plants owned by Independent Power Producers (IPP) and 1,840 MW Rented Power Plants.

Perubahan Nama Perusahaan

The Company's Changes of Name

27 Oktober 1945
Sesuai PP No. 1 SD/1945 berdiri dengan nama Jawatan Listrik dan Gas, di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga.

1 Januari 1961
Sesuai PP No. 67/1961 berubah nama menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara).

1 Januari 1965
Sesuai PP No. 19/1965 BPU PLN dipecah menjadi 2 perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Gas Negara (PGN).

3 Juni 1972
Sesuai PP No. 18/1972 berubah nama menjadi Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara.

30 Juli 1994
Sesuai PP No. 23/1994 berubah nama menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Listrik Negara atau PT PLN (Persero) berdasarkan akta 169 tanggal 30 Juli 1994 dari Sutjipto, Notaris.

October 27, 1945
Based on Government Regulation No. 1 SD/1945 established as Jawatan Listrik dan Gas (Electricity and Gas Bureau) under the Department of Public Works and Power.

January 1, 1961
Based on Government Regulation No. 67/1961, changed to BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara/Board of General Administration of the State Power Company).

January 1, 1965
Based on Government Regulation No. 19/1965 demerged into 2 state companies namely Perusahaan Listrik Negara (PLN) and Perusahaan Gas Negara (PGN).

June 3, 1972
Based on Government Regulation No. 18/1972, changed to State Power Company (Perum).

Juli 30, 1994
Based on Government Regulation No. 23/1994 changed to Limited Liability Company under the name of Perusahaan Perseroan (Persero) Listrik Negara atau PT PLN (Persero) on Deed 169, July 30, 1994 from Sutjipto, Notary Public.

Jejak Langkah Perusahaan

The Company's Milestones

AKHIR ABAD KE-19
Late 19th Century

Perusahaan-perusahaan Hindia Belanda bidang pabrik gula dan perkebunan teh membangun pembangkit listrik untuk keperluan sendiri.

Dutch companies (sugar factories and tea plantations) constructed power plants for their own use.

1942–1945

Seluruh perusahaan penyedia tenaga listrik eks Hindia Belanda diambil alih Jepang.

All of the electricity generating facilities under the Dutch rule were taken over by Japan.

1945

Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga.

On 27 October 1945, President Sukarno established the Electricity and Gas Bureau under the command of the Department of Public Works and Power.

1961

Pada 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) dengan bidang usaha penyediaan listrik, gas dan kokas.

On January 1, 1961, the Electricity and Gas Bureau reconstituted into BPU-PLN (Board of General Administration of the State Electricity Company) with its line of business as provider of electricity, gas, and coking coal.

2015

Pada 4 Mei 2015, Presiden RI Joko Widodo meluncurkan Program 35.000 MW Listrik untuk Indonesia sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk menciptakan kemandirian energi dengan memanfaatkan secara optimal sumber-sumber energi terbarukan.

On May 4, 2015, President of the Republic of Indonesia Joko Widodo launched 35,000 MW Electricity Program for Indonesia as a the Government's commitment to create energy independence by optimally utilizing renewable energy sources.

2014

PLN menjadi salah satu dari perusahaan dengan pendapatan terbesar di dunia versi Fortune 500.

PLN became one of the companies with the largest revenues in the world, according to Fortune 500.

2011

Pemerintah menyerahkan saham BUMN PT Pelayaran Bahtera Adiguna (BAG) kepada PT PLN (Persero) pada tanggal 5 Agustus 2011 dan menjadi anak perusahaan PT PLN (Persero).

The Government handed over the SOE shares of PT Pelayaran Bahtera Adiguna (BAG) to PT PLN (Persero) in August 5, 2011, thus establishing BAG as a subsidiary of PT PLN (Persero).

2010

Sesuai Perpres No. 4 tahun 2010 tanggal 8 Januari 2010, PLN ditugasi untuk membangun PLTU berbahan bakar batu bara, gas maupun panas bumi dalam program percepatan/*Fast Track Program* tahap II (FTP II).

In accordance to the Presidential Regulation No. 4 of 2010, PLN was mandated to build coal, gas, and geothermal Power Plants under Fast Track Program phase II (FTP II).

2017

Di akhir tahun 2017 tercatat tiada lagi sistem kelistrikan di Indonesia yang mengalami defisit. Ini berarti masalah pemadaman karena kurangnya pasokan daya listrik sudah terselesaikan.

At the end of 2017 there was no longer deficit in Indonesia's electricity system. This means the blackout problem due to lack of electricity supply has been resolved.

2018

- **PLN memberikan kontribusi penting bagi pencapaian target rasio elektrifikasi nasional yang harus mencapai 100% sebelum tahun 2020 hingga ke wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T).**
- **Di tahun 2018, rasio elektrifikasi nasional berhasil mencapai 98,3% dimana PLN berkontribusi sebesar 97,05%. Penambahan desa berlistrik telah mencapai 3.359 desa, sehingga jumlah desa teraliri listrik di seluruh wilayah Indonesia adalah 79.041 desa atau 95,95%.**

- PLN made an important contribution to achieve the national electrification ratio target which must reach 100% before 2020 to the foremost, outermost and lagging regions (3T).
- In 2018, the national electrification ratio has reached by 98.3% where PLN contributed by 97.05%. The addition of electrified villages has reached 3,359 villages, so the number of electrified villages in all regions of Indonesia is 79,041 villages or 95.95%.

1965

Pada 1 Januari 1965, BPU-PLN dibubarkan dan dibentuk Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas.

On January 1, 1965, BPU-PLN was dismissed to establish two state companies, namely the State Electricity Company (PLN) managing the electricity sector and the National Gas Company (PGN) managing the gas sector.

1970

Status Perusahaan berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) sesuai PP No. 30 tahun 1970 tanggal 31 Juli 1970.

The Company's status was changed to Public Company (Perum) in accordance with the Government Regulation No. 30 of 1970 dated July 31, 1970.

1972

Berdasarkan PP No. 18 tahun 1972 tanggal 3 Juni 1972 status PLN berubah menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara dan bertindak sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

Based on Government Regulation No. 18 of 1972 dated June 3 1972, PLN's status was changed to Public State-Owned Electricity Company and acted as the Holder of the Authority to Conduct Electricity Business (Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan—PKUK) with the mandate to provide electricity for public use.

1992

Pertama kali mendapatkan dana investasi dari pasar modal domestik melalui penerbitan Obligasi PLN I.

For the first time PLN obtained investment funds from the domestic capital market through the issuance of the PLN Bonds I.

2009

Sesuai UU No. 30 tahun 2009 tanggal 23 September 2009, PLN tidak lagi berstatus PKUK, namun beroperasi sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

In accordance to Law No. 30 of 2009 dated 23 September 2009, PLN is no longer designated as PKUK, but operates as a State-Owned Enterprise (BUMN) with the duty to provide electricity to the public.

2006

Sesuai PP No. 71 tahun 2006 tanggal 5 Juli 2006, PLN ditugaskan untuk membangun PLTU berbahan bakar batu bara kapasitas 10.000 MW dalam rangka Proyek Percepatan/ *Fast Track Project* tahap I (FTP I).

In accordance to the Presidential Regulation No. 71 of 2006, PLN was mandated to build coal-fired Steam Power Plant with a capacity of 10,000 MW under Fast Track Project phase I (FTP I).

2005

PLN memulai program transformasi menjadi Perusahaan Penyedia dan Penyalur Listrik Kelas Dunia.

PLN began its transformation program into a World-Class Electricity Provider and Distributor.

1994

Pemerintah mengubah status badan hukum PLN menjadi Perseroan melalui PP No 23 tahun 1994 tanggal 16 Juni 1994 dan Akta No. 169 tanggal 30 Juli 1994 dari Sutjipto S.H. notaris di Jakarta.

The Government chaged PLN legal entity status into Limited Liability Company, through Government Regulation No. 23 of 1994 dated June 16, 1994 and Deed No. 169 on 30 July 1994 from Sutjipto S.H. notary in Jakarta.

2019

- **Dengan terbitnya Perpres No. 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk transportasi Jalan, PLN mendukung penuh pembangunan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia sebagai salah satu peluang bisnis baru di masa depan, di antaranya dengan menginisiasi pengembangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).**
- **Pada tahun 2019 PLN memperkuat manajemen aset kelistrikan PLN melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti TNI, POLRI, Kejaksaan.**
- **PLN mencatatkan prestasi di bidang lingkungan hidup, dimana 5 unit pembangkit di lingkungan Grup PLN meraih PROPER Emas dan seluruh pembangkit listrik di Grup PLN tidak ada lagi yang mendapatkan predikat PROPER Merah dan Hitam.**

- **Based on Presidential Regulation No. 55 of 2019 concerning Acceleration of Battery Electric Vehicle Program for Road transportation, PLN fully supported development of electric vehicle ecosystem in Indonesia as one of new business opportunities in the future, including by initiating development of Public Electric Vehicle Charging Station (SPKLU).**
- **In 2019, PLN strengthened PLN's electricity asset management through synergy and collaboration with various parties, such as Army, Police and Attorney.**
- **PLN recorded achievements in the environmental field, with 5 power plants within PLN Group received PROPER Gold and no power plant within PLN Group received PROPER Red or Black.**

Bidang Usaha

Business Lines

BIDANG USAHA BERDASARKAN ANGGARAN DASAR

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, kegiatan usaha Perusahaan adalah:

a. Menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik, yang meliputi kegiatan: Pembangkitan, Penyaluran, dan DIstribusi, serta melakukan perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik serta pengembangan penyediaan tenaga listrik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Menjalankan usaha penunjang tenaga listrik yang meliputi kegiatan:
   1) Konsultasi yang berhubungan dengan ketenagalistrikan;
   2) Pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan;
   3) Pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan;
   4) Pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik.
c. Selain melakukan usaha-usaha tersebut di atas, Perseroan dapat:
   1) Ikut dalam kegiatan usaha dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energi lainnya yang terkait dengan penyediaan ketenagalistrikan, antara lain: energi tidak terbarukan (antara lain batubara, gas alam, minyak bumi), energi terbarukan (antara lain air, panas bumi, matahari, angin, biomas, bahan bakar, nabati, hibrida, gelombang air laut), dan sumber energi lainnya seperti nuklir yang dapat dikembangkan seiring dengan perkembangan teknologi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
   2) Melakukan pemberian jasa operasi dan pengaturan (dispatcher) pada bidang pembangkitan, penyaluran, distribusi, dan retail tenaga listrik;
   3) Menjalankan kegiatan perindustrian perangkat keras dan perangkat lunak bidang ketenagalistrikan dan peralatan lain yang terkait dengan listrik;
   4) Melakukan kerjasama dengan badan lain atau pihak lain atau badan penyelenggara bidang ketenagalistrikan baik dari dalam negeri maupun luar negeri di bidang pembangunan, operasional telekomunikasi, dan informasi yang berkaitan dengan ketenagalistrikan, keuangan, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan sesuai dengan lapangan usahanya ataupun bidang-bidang lain yang dianggap perlu untuk menunjang usaha Perseroan, baik dalam bentuk kerja sama usaha patungan, kerja sama bagi hasil, kontrak manajemen, dan bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BUSINESS LINES ACCORDING TO ARTICLE OF ASSOCIATION

In accordance with the Company's Articles of Association, the Company's lines of business are:

a. Running a business providing electricity, which includes activities: Generation, Transmission a, and Distribution, as well as planning and constructing electricity supply facilities and developing electricity supply, in accordance with applicable laws and regulations.

b. Running a business supporting electricity that includes activities:
   1) Consultation related to electricity;
   2) Construction and installation of electricity equipment;
   3) Maintenance of electricity equipment;
   4) Development of equipment technology that supports the supply of electricity.
c. In addition to carrying out the above efforts, the Company can:
   1) Participate in business activities and utilization of natural resources and other energy sources related to electricity supply, including: non-renewable energy (including coal, natural gas, petroleum), renewable energy (including water, geothermal, solar , wind, biomass, fuel, vegetable, hybrid, wave of sea water), and other energy sources such as nuclear which can be developed in line with technological developments and in accordance with statutory provisions;
   2) Providing operations and dispatcher services in the field of electricity generation, distribution, distribution and retailing;
   3) Running industrial activities in the field of electricity hardware and software electricity and other equipment related to electricity;
   4) Collaborating with other bodies or other parties or electricity management bodies from domestic and abroad in the fields of development, telecommunications operations, and information related to electricity, finance, human resources, research and development in accordance with their business fields or other fields deemed necessary to support the Company's business, both in the form of joint venture cooperation, profit sharing cooperation, management contracts, and other forms in accordance with applicable laws and regulations;

5) Melakukan usaha jasa yang menyangkut bidang ketenagalistrikan termasuk konsultasi, konstruksi, pendidikan, dan pelatihan manajemen jasa enjinering, penelitian dan pengembangan tehnik ketenagalistrikan dan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN

Bidang usaha PLN, meliputi:

1. Kegiatan perencanaan pengembangan fasilitas tenaga listrik (pembangkitan, transmisi dan distribusi umum) dan penunjang, rencana pendanaan, pengembangan usaha, pengembangan organisasi, dan SDM.
2. Kegiatan pembangunan konstruksi sarana penyediaan tenaga listrik pembangkitan, transmisi dan gardu induk.
3. Kegiatan pengusahaan/operasi pusat-pusat pembangkit tenaga listrik misalnya: Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU); Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA); Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG-gas turbine); Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) serta pengoperasian transmisi dan distribusi listrik pada pelanggan. PLN juga menjalankan kegiatan sewa pembangkit dan pembelian tenaga listrik yang diproduksi oleh pusat-tenaga listrik swasta.
4. Kegiatan riset dan penunjang berkaitan dengan bidang kelistrikan.

Produk dan jasa yang dihasilkan:

1. Jasa layanan dan penyediaan tenaga listrik.
2. Jasa sertifikasi peralatan dan instalasi ketenagalistrikan.
3. Jasa konsultasi ketenagalistrikan.
4. Jasa pembangunan, pemeliharaan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan.
5. Jasa pengembangan ketenagalistrikan (riset dan penunjang).
6. Jasa lainnya di bidang ketenagalistrikan.

Jasa-jasa yang disebutkan di atas dilaksanakan oleh PLN melalui 15 Unit Wilayah, 7 Unit Distribusi, 3 Unit Pembangkitan, 3 Unit Transmisi, 2 Unit Pembangkitan & Penyaluran, 18 Unit Induk Pembangunan, 2 Unit Pusat Pengatur Beban dan 6 Unit Pusat/Jasa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

5) Conducting business services related to electricity including consulting, construction, education, and management training in engineering services, research and development of electricity techniques and other services in accordance with applicable laws and regulations.

BUSINESS ACTIVITIES

PLN's business lines include:

1. Planning and development activities of electric power facilities (generation, transmission and distribution) and supporting activities of budgeting, business development, organization development and human resources.
2. Construction of electricity infrastructure, including construction of power generating facilities, transmission and substations (transformers, facility stations).
3. Utilization and commercialization activities of power plants, which consist of Coal Fired Power Plant (CFPP), hydroelectric power plant (HPP), gas turbine power plant (GTPP), geothermal power plant (GPP), diesel power plant (DPP), solar power plant (SPP) and wind power plant (WPP), also operation of electricity transmission and distribution to customers. PLN also purchases electrical power produced by private power plant and rents other public power plant to be utilized.
4. Research and development, activities and other related to electricity.

Products and Services includes:

1. Provision of electricity.
2. Equipment certification and electrical power installation.
3. Electrical power consultation.
4. Building, maintaining and installing equipment to produce electrical power.
5. Electrical power development services (research and support).
6. Other services related to electrical power.

The services mentioned above are conducted by PLN through its 15 Regional Units, 7 Distribution Units, 3 Generation Units, 3 Transmission Units, 2 Generation and Transmission Units, 18 Construction Units, 2 Dispatcher Center Units and 6 Central/Service Units across Indonesia.

Segmen Operasi

Operating Segment

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan karakteristik ekonomis yang sejenis (seperti marjin keuntungan, persebaran, tingkat pertumbuhan penjualan, dan sebagainya).

Operating segments are identified on the basis of similar economic characteristics (such as: profit margin, distribution, sales growth and so forth).

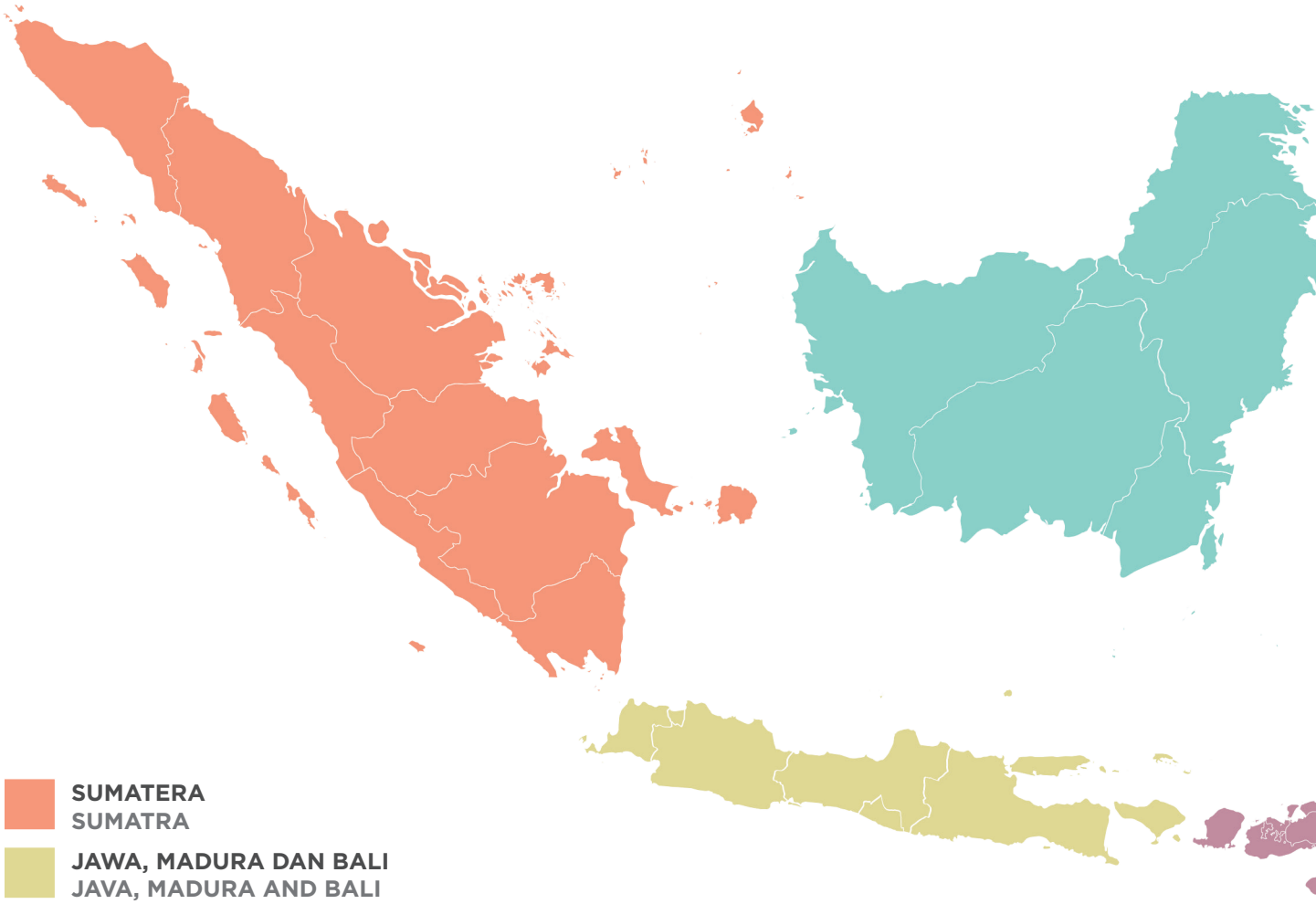

SUMATERA
SUMATRA

JAWA, MADURA DAN BALI
JAVA, MADURA AND BALI

SULAWESI DAN KALIMANTAN
SULAWESI AND KALIMANTAN

MALUKU, PAPUA DAN NUSA TENGGARA
MALUKU, PAPUA AND NUSA TENGGARA

Perusahaan membagi segmen operasi berdasarkan regionalisme. Oleh karenanya, segmen operasi PLN terdiri dari 4 segmen operasi regional, yaitu Regional Sumatera, Regional Jawa, Madura dan Bali, Regional Sulawesi dan Kalimantan, Regional Maluku, Papua dan Nusa Tenggara.

The Company divides operating segment by region. Therefore, PLN's operating segments consist of 4 regional operating segments, namely Sumatra Region, Java Madura and Bali Region, Sulawesi and Kalimantan Region, Maluku, Papua and Nusa Tenggara Region.

Struktur Organisasi per 31 Desember 2019

Organisation Structure as of December 31, 2019

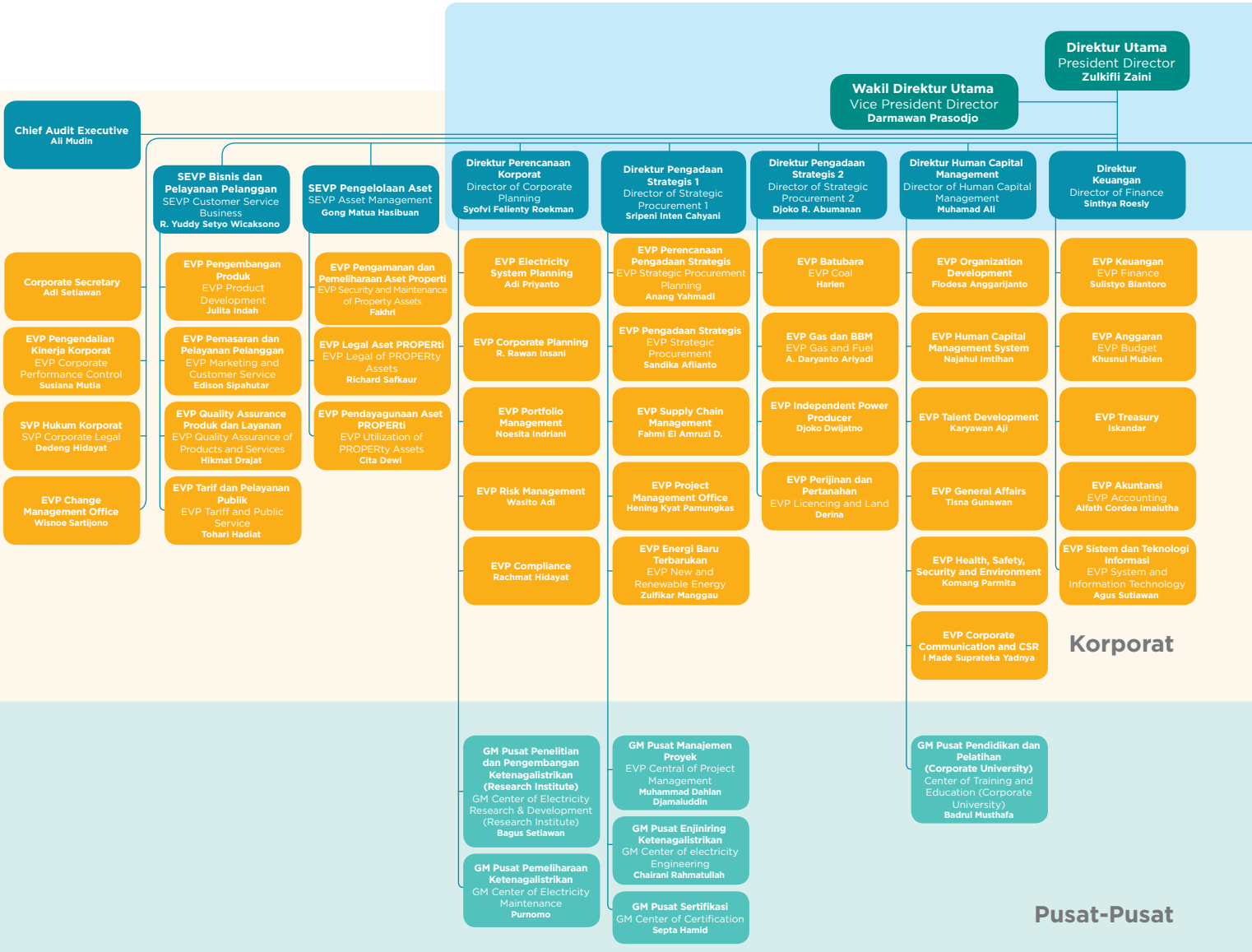

Pada tahun 2019 PLN melakukan perubahan organisasi sesuai dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0220.P/DIR/2019 tanggal 24 Desember 2019, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0051.P/DIR/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero).

In 2019, PLN restructured its organization according to Regulation of Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 0220.P/DIR/2019 dated December 24, 2019, concerning the Second Amendment to Regulation of Board of Directors No. 0051.P/DIR/2018 concerning Organizational and Work Procedure of PT PLN (Persero).

Direksi

Direktur Bisnis Regional Sumatera
Regional Business Director of Sumatra
Wiluyo Kusdwiharto

- **EVP Pengembangan Regional Sumatera**
  EVP Development of Regional of Sumatra
  Budi Pangestu
- **EVP Konstruksi Regional Sumatera**
  EVP Construction of Regional of Sumatra
  Adi Lumakso
- **EVP Operasi Regional Sumatera**
  EVP Operation of Regional of Sumatra
  Supriyadi

Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali
Regional Business Director of Java, Madura and Bali
Haryanto WS

- **EVP Pengembangan Regional Jawa Bagian Barat**
  EVP Development of Regional of Western Part Java
  Didik Sudarmadi
- **EVP Konstruksi Regional Jawa Bagian Barat**
  EVP Construction of Regional of Western Part Java
  Mayarudin
- **EVP Operasi Regional Jawa Bagian Barat**
  EVP Operation of Regional of Western part Java
  Bima Putrajaya
- **EVP Pengembangan Regional Jawa Bagian Tengah**
  EVP Development of Regional of Central Part Java
  Rustamadji
- **EVP Konstruksi Regional Jawa Bagian Tengah**
  EVP Construction of Regional of Central Part Java
  Dady Murihno
- **EVP Operasi Regional Jawa Bagian Tengah**
  EVP Operation of Regional of Central Part Java
  Purnomo
- **EVP Pengembangan Regional Jawa Bagian Timur, Madura dan Bali**
  EVP Development of Regional of Eastern Part Java, Madura and Bali
  Paranai Suhafsan
- **EVP Konstruksi Regional Jawa Bagian Timur, Madura dan Bali**
  EVP Construction of Regional of Eastern Java, madura and Bali
  Aji Sutrisno
- **EVP Operasi Regional Jawa Bagian Timur, Madura dan Bali**
  EVP Operation of Regional of Eastern Part Java, Madura and Bali
  Ida Bagus Ari Wardhana

Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Kalimantan
Regional Business Director of Sulawesi and Kalimantan
Syamsul Huda

- **EVP Pengembangan Regional Kalimantan**
  EVP Development of Regional of Kalimantan
  Riza Novianto Gustam
- **EVP Konstruksi Regional Kalimantan**
  EVP Construction of Regional of Kalimantan
  Iswan Prahastono
- **EVP Operasi Regional Kalimantan**
  EVP Operation of Regional of Kalimantan
  Mukhtar
- **EVP Pengembangan Regional Sulawesi**
  EVP Development of Regional of Sulawesi
  Suwarno
- **EVP Konstruksi Regional Sulawesi**
  EVP Construction of Regional of Sulawesi
  Didik Mardiyanto
- **EVP Operasi Regional Sulawesi**
  EVP Operation of Regional of Sulawesi
  Yohanes Sukrisismono

Direktur Bisnis Regional Maluku, Papua dan Nusa Tenggara
Regional Business Director of Maluku, Papua and Nusa Tenggara
Ahmad Rofik

- **EVP Pengembangan Regional Maluku, Papua dan Nusa Tenggara**
  EVP Development of Regional of Maluku, Papua and Nusa Tenggara
  Eman Prijono Wasito Adi
- **EVP Konstruksi Regional Maluku, Papua dan Nusa Tenggara**
  EVP Construction of Regional of Maluku, Papua and Nusa Tenggara
  Robert Aprianto Purba
- **EVP Operasi Regional Maluku, Papua dan Nusa Tenggara**
  EVP Operation of Regional of Maluku, Papua and Nusa Tenggara
  Indradi Setiawan

Regional

Unit Induk

- **GM Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera**
  GM Parent Unit of Generation Development of Sumatra
  Weddy Bernadi Sudirman
- **GM Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara**
  GM Parent Unit of Development of Northern Sumatra
  Octavianus Padudung
- **GM Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah**
  GM Parent Unit of Development of Central Part Sumatra
  Henvry Setijabudi
- **GM Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan**
  GM Parent Unit of Development of Southern Part Sumatra
  R. Dendi Kusumawardana
- **GM Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Utara**
  GM Parent Unit of Generation of Northern part Sumatra
  Bambang Iswanto
- **GM Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan**
  GM Parent Unit of Generation of Southern Part Sumatra
  Rachmanoe Indarto
- **GM Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera**
  GM Parent Unit of Transmission and Load Dispatching Center of Sumatra
  Nur Wahyu Dhinianto
- **GM Unit Induk Wilayah Aceh**
  GM Parent Unit of Region of Aceh
  Jefri Rosiadi
- **GM Unit Induk Wilayah Sumatera Utara**
  GM Parent Unit of Region of North Sumatra
  M. Irwansyah Putra
- **GM Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau**
  GM Parent Unit of Region of Riau and Riau Islands
  Daru Tri Tjahjono
- **GM Unit Induk Wilayah Sumatera Barat**
  GM Parent Unit of Region of West Sumatra
  Bambang Dwiyanto
- **GM Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu**
  GM Parent Unit of Region of South Sumatra, Jambi and Bengkulu
  Daryono
- **GM Unit Induk Wilayah Bangka Belitung**
  GM Parent Unit of Region of Bangka Belitung
  Abdul Mukhlis
- **GM Unit Induk Distribusi Lampung**
  GM Parent Unit of Distribution of Lampung
  Pandapotan Manurung
- **GM Unit Induk Pembangunan Interkoneksi Sumatera Jawa**
  GM Parent Unit of Development of Sumatra Jawa Interconnection
  Henrison Adventius Lumbanraja
- **GM Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat**
  GM Parent Unit of Development of Western Java
  Ratnasari Sjamsuddin
- **GM Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Barat**
  GM Parent Unit of Transmission of Western Part Java
  Warsono
- **GM Unit Induk Distribusi Jakarta Raya**
  GM Parent Unit of Distribution of Jakarta Raya
  Muhammad Ikhsan Asaad
- **GM Unit Induk Distribusi Banten**
  GM Parent Unit of Distribution of Banten
  Doddy Benyamin Pangaribuan
- **GM Unit Induk Pusat Pengatur Beban**
  GM Parent Unit of Load Dispatching Center
  E. Haryadi
- **GM Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah I**
  GM Parent Unit of Development of Central Part Java I
  Octavianus Duha
- **GM Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah II**
  GM Parent Unit of Development of Central Part Java II
  Eko Priyantono Aviantoro
- **GM Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B**
  GM Parent Unit of Generation of Tanjung Jati B
  Rachmat Azwin
- **GM Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah**
  GM Parent Unit of Transmission of Central Part Java
  Sumaryadi
- **GM Unit Induk Distribusi Jawa Barat**
  GM Parent Unit of Distribution of West Java
  Agung Nugraha
- **GM Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta**
  GM Parent Unit of Distribution of Central Java and D.I. Yogyakarta
  Feby Joko Priharto
- **GM Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur & Bali I**
  GM Parent Unit of Development of Eastern Part Java and Bali I
  Djarot Hutabri EBS
- **GM Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur & Bali II**
  GM Parent Unit of Development of Eastern Part Java and Bali II
  Djarot Hutabri EBS (Plt)
- **GM Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali**
  GM Parent Unit of Transmission of Eastern Part Java and Bali
  Suroso
- **GM Unit Induk Distribusi Jawa Timur**
  GM Parent Unit of Distribution of East java
  Bob Saril
- **GM Unit Induk Distribusi Bali**
  GM Parent Unit of Distribution of Bali
  Nyoman S. Astawa
- **GM Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat**
  GM Parent Unit of Development of Western Part Kalimantan
  Rachmad Lubis
- **GM Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Tengah**
  GM Parent Unit of Development of Central Part Kalimantan
  Hariyadi Krismiyanto
- **GM Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur**
  GM Parent Unit of Development of Eastern Part Kalimantan
  Muhammad Ramadhansyah
- **GM Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Kalimantan**
  GM Parent Unit of Generation and Transmission of Kalimantan
  Ikram
- **GM Unit Induk Wilayah Kalimantan Barat**
  GM Parent Unit of Region of West Kalimantan
  Agung Murdifi
- **GM Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah**
  GM Parent Unit of Region of South and Central Kalimantan
  Sudirman
- **GM Unit Induk Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara**
  GM Parent Unit of Region of East and North Kalimantan
  Sigit Witjaksono
- **GM Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara**
  GM Parent Unit of Development of Northern Part Sulawesi
  Mimin Insani (Plt)
- **GM Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Selatan**
  GM Parent Unit of Development of Southern Part Sulawesi
  I Putu Riasa
- **GM Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi**
  GM Parent Unit of Generation and Transmission of Sulawesi
  Suroso Isnandar
- **GM Unit Induk Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo**
  GM Parent Unit of Region of North Sulawesi, Central Sulawesi & Gorontalo
  Christyono
- **GM Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat**
  GM Parent Unit of Region of South Sulawesi, Southeast Sulawesi & West Sulawesi
  Ismail Deu
- **GM Unit Induk Pembangunan Maluku**
  GM Parent Unit of Development of Maluku
  Jonner MP Pardosi
- **GM Unit Induk Pembangunan Papua**
  GM Parent Unit of Development of Papua
  Reisal Rimtahi Hasoloan
- **GM Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara**
  GM Parent Unit of Development of Nusa Tenggara
  Yuyun Mimbar Saputra
- **GM Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara**
  GM Parent Unit of Region of Maluku and North Maluku
  Romantika Dwi Juni Putra
- **GM Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat**
  Papua and West Papua
  Johanes Avilla Ari Dartomo
- **GM Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat**
  GM Parent Unit of Region of West Nusa Tenggara
  Rudi Purnomoloka Putra
- **GM Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur**
  GM Parent Unit of Region of East Nusa Tenggara
  Ignatius Rendroyoko

* Status Per 31 Desember 2019
* December 31, 2019 Status

Visi, Misi, Moto, Nilai Dasar & Budaya Perusahaan

Vision, Mission, Motto, and Culture of the Company

VISI Vision

Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani.

To be acknowledged as a growing, superior and trusted world-class company, supported by its competent human resources.

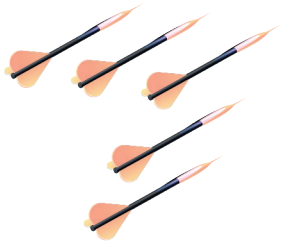

Mission

1. **Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham.**
2. **Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.**
3. **Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.**
4. **Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan**

1. Running an electricity business and other related sectors, oriented to customer satisfaction, company members and shareholders.
2. Making electricity as a medium to improve quality of life of the public.
3. Making every effort for electricity as an economic booster.
4. Operating an environmentally friendly business.

Review Visi dan Misi

Review of Vision and Missions

Tahapan penetapan Visi, Misi dan Tata Nilai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus *review* perencanaan jangka panjang (RJP) Perusahaan yang dilakukan setiap tahun pada perioda berjalan. Visi dan misi pada RJP 2020-2024 yang telah ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada tahun 2019 masih sama dengan visi dan misi yang dideklarasikan pada Oktober tahun 2002. Visi dan misi tersebut dinyatakan masih relevan dengan kondisi saat ini. Pada Oktober 2019 PT PLN telah mendeklarasikan Tata Nilai PLN TERBAIK yang merupakan hasil *review* dari Tata Nilai PLN sebelumnya.

The stage of determining Vision, Missions and Values is an integrated part of the Company's long-term plan (RJP) review cycle which is prepared on an annual basis. 2020-2024 RJP was prepared by Board of Directors and Board of Commissioners in 2019. The Vision and Missions were declared in October 2002 and are still relevant today and in the future. In October 2019, PT PLN declared PLNTERBAIK Values after reviewing the previous PLN's Values.

Penjabaran Visi Perusahaan
Explanation of the Company Vision

Tumbuh Kembang
Sustainable Growth

Perusahaan mampu mengantisipasi berbagai peluang dan tantangan usaha, serta konsisten dalam pengembangan standar kerja

The Company is able to anticipate business opportunities and challenges, and consistent in developing working standards

Perusahaan Kelas Dunia
World Class Company

Perusahaan mampu memberikan pelayanan dengan standar kualitas pelayanan kelas dunia, memiliki cakrawala pemikiran yang mutakhir, terdepan dalam pemanfaatan teknologi, haus akan kesempurnaan kerja dan perilaku, serta merupakan perusahaan idaman bagi pencari kerja. Pelayanan kelas dunia yang dimaksud diharapkan dapat diwujudkan pada tahun 2025 di mana perusahaan menjadi 25% terbaik dunia dengan sasaran antara 35% terbaik dunia di tahun 2022

The Company is able to provide a world-class services standard, has an advanced reflection, at the forefront in technology utilization, striving for work and conduct refinement, as well as a company of choice by the community. The world class service aimed to be realized in 2025 where the Company strives to become the best 25% in the world with the target of between the best 35% in the world by 2022

Unggul
Excellent

Perusahaan menjadi yang terbaik, terkemuka dan mutakhir dalam bisnis kelistrikan, fokus dalam usaha mengoptimalkan potensi insani, serta mampu meningkatkan kualitas input, proses, dan output produk dan jasa pelayanan secara berkesinambungan

The Company strives to be the best, prominent and advance in electricity business, focus in optimizing its people potentials, and able to enhance the quality of inputing, processing, and output of product and services continuously

Terpercaya
Trustworthy

Perusahaan mampu memegang teguh etika bisnis, konsisten memenuhi standar layanan yang dijanjikan, serta menjadi perusahaan favorit para pihak yang berkepentingan

The Company is able to firmly upholding business ethics, consistent in delivering services standards, and becomes favourite entity for the stakeholders

Potensi Insani
People Potentials

Perusahaan mampu mengembangkan insan yang kompeten, profesional dan berpengalaman, serta memenuhi standar etika dan kualitas

The Company is able to enhance competent, professional and experience human resources, as well as delivering ethical and quality standards

Moto & Tata Nilai Perusahaan

Company's Motto & Value

Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik

ELECTRICITY FOR A BETTER LIFE

Tata Nilai Perusahaan

Corporate Value

Pada akhir tahun 2018 PLN melakukan revitalisasi Tata Nilai Perusahaan dan disosialisasikan pada tahun 2019. Tata Nilai Perusahaan bertransformasi dari yang sebelumnya dikenal sebagai SIPP (Saling Percaya, Integritas, Peduli dan Pembelajar) menjadi tata nilai baru yang meliputi Prinsip, Pikiran dan Perbuatan segenap insan PLN.

PRINSIP

Prinsip menjadi dasar keyakinan (belief) bagi semua insan PLN untuk berpikir dan bertindak. Tumbuh Berkembang dengan Integritas dan Keunggulan (TERBAIK) adalah keyakinan dasar yang berisi filosofi dasar bagi setiap insan PLN bahwa kemajuan PLN disebabkan oleh Insan PLN yang berintegritas dan senantiasa unggul dalam mengelola operasi serta bisnisnya.

PIKIRAN

Penajaman prinsip-prinsip dalam bentuk nilai-nilai yang memandu insan PLN dalam bertindak dan berperilaku. Nilai-nilai tersebut adalah:

a. Sinergi
   Bekerja sama dengan produktif dengan seluruh pihak terkait dilandasi dengan sikap saling menghargai dan menghormati.
b. Profesionalisme
   Cerdas, tuntas, antusias dan akurat dalam melihat aspek bisnis untuk memberikan nilai tambah bagi Perusahaan dalam mencapai kinerja terbaik secara efektif dan efisien.
c. Berkomitmen kepada Pelanggan
   Komitmen memberikan pengalaman terbaik (dari sisi produk, layanan, dan tarif) bagi pelanggan baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal.

PERBUATAN

Perilaku atau tindakan yang merepresentasikan nilai-nilai dan prinsip yang ditetapkan, terdiri dari:

a. Satu
Satu ucapan dan tindakan: Senantiasa menunjukkan perilaku konsisten antara ucapan dan tindakan, disiplin dan memenuhi komitmen
Satu arah dan tujuan: Senantiasa mengacu pada arah dan tujuan perusahaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Satu Jiwa: Menunjukkan loyalitas, solidaritas, dan semangat kerja tinggi yang dilandaskan nilai-nilai luhur sebagai bagian dari pengabdian tulus kepada perusahaan, negara dan Ilahi.

b. Maju
Belajar dan Berkembang: Menunjukkan inisiatif untuk meningkatkan keahlian dan potensi dirinya serta orang lain.
Gigih dan Gesit: Menunjukkan semangat kerja yang tinggi, cepat beradaptasi, proaktif, memberikan respons yang cepat dan tepat, serta pantang menyerah.
Kreatif dan Inovatif: Mampu menghasilkan ide-ide/gagasan baru, cara baru, dan berani mengambil terobosan dan inovatif serta menjadi pelopor dalam aplikasinya untuk keberlangsungan perusahaan.

c. Andal
Jujur dan Berani: Dapat dipercaya dan berani mengambil risiko demi tercapainya tujuan perusahaan.
Peduli dan Kompeten: Memiliki kepekaan dan kecakapan untuk menjadi pelopor dalam mengubah lingkungan dan kondisi perusahaan ke arah yang lebih baik.
Berwawasan Sosial dan Bisnis: Memahami cara-cara menempatkan diri dan mengambil tindakan yang tepat dalam lingkungan sosial dan berorientasi keberlanjutan bisnis perusahaan.

At end of 2018, PLN revitalized the Corporate Values and socialized them in 2019. The Corporate Values transformed from what were previously known as SIPP (Mutual Trust, Integrity, Care and Learning) to a new value system that includes Principle, Thought and Action of all PLN people.

PRINCIPLE

Principle is the basis of belief for all PLN people to think and act. Growing and Developing with Integrity and Excellence or Tumbuh Berkembang dengan Integritas dan Keunggulan (TERBAIK) is a basic belief that contains a basic philosophy for every PLN personnel that PLN's development is contributed by PLN People of integrity and excellence in managing their operations and business.

THOUGHT

Sharpening the principle in the form of values that guide PLN personnel in acting and behaving. These values are:

a. Synergy
   Productive cooperation with all relevant parties based on mutual respect.
b. Professionalism
   Smart, thorough, enthusiastic and accurate in viewing business aspects to provide added value to the Company in achieving its best performance effectively and efficiently.
c. Committed to Customers
   Commitment to provide the best experience (in terms of products, services and tariff) to internal and external customers.

ACT

Behavior or actions that represent the established values and principle, consisting of:

a. One
One word and action: Always show consistency between words and actions, discipline and fulfill commitments
One direction and purpose: Always refer to the Company's direction and purpose in performing duties and functions.
One Soul: Demonstrate loyalty, solidarity and high morale according to the noble values as part of sincere devotion to the Company, the state and God.

b. Forward
Learning and developing: Show initiatives to improve skills and potential of himself/herself and others.
Persistent and Swift: Show high morale, quick to adapt, proactive, promptly and precisely responsive and determined.
Creative and Innovative: Generate new ideas, new ways, breakthroughs, innovations and be a pioneer in the applications for the Company's sustainability.

c. Reliable
Honest and Courageous: Be trustworthy and risk-taker for the achievement of the Company's objectives.
Caring and Competent: Have the sensitivity and ability to be a pioneer in changing the Company's environment and condition for the better.
Social and Business Insights: Understand appropriate behavior and action in the social environment for the Company's business sustainability.

Budaya Perusahaan

Corporate Culture

Budaya Perusahaan memiliki peranan penting dalam mengelola Human Capital Management guna mencapai visi, misi, dan target perusahaan. Budaya Perusahaan kami adalah Program unggul yang terus digalakkan PLN untuk mendukung program strategis PLN untuk menjadikan *mindset, values*, dan *beliefs* PLN menjadi standar & identitas bagi perusahaan serta profesional bagi pegawainya.

Corporate culture is essential in Human Capital Management so as to achieve the Company's vision, mission and targets. Our Corporate Culture is a flagship program that PLN continues to encourage to support PLN's strategic programs to make PLN's mindset, values and beliefs become the standard & identity of the Company and its professional employees.

Pada tahun 2019 fokus program ini terdiri dari 3 bagian utama yaitu:

The program focuses on 3 main elements in 2019, as follows:

Change Agent Enrichment

***Change Agent* adalah para pelopor dan pengawal program budaya PLN khususnya di Unit Kerja masing-masing dan juga sekaligus sebagai kepanjangan tangan manajemen dalam melakukan internalisasi dan memastikan baik kebijakan maupun produk PLN tersampaikan ke seluruh pegawai yang ada di unit kerja masing-masing.**

Change Agent is a participant pioneering and guarding Integrity PLN program especially in their Units and also serves as an extension of the management in internalizing and ensuring that PLN's policies and products are conveyed to all employees in their respective work units.

Festival Budaya Culture Festival

Festival Budaya merupakan program penguatan *Change Agent* dengan mengangkat program budaya unit untuk menjadi program nasional yang akan menjadi sebuah identitas perusahaan yang mana fokus program budaya di tahun 2019 adalah perubahan perilaku yang berdampak kepada peningkatan *engagement* pegawai.

Culture Festival is an empowering program for Change Agent by elevating the unit culture program to become the national program that will turn into a corporate identity. The focus of cultural program in 2018 was behavior change that had an impact on increasing employee engagement.

Engagement Survey

Seluruh kegiatan program budaya unggul unit akan dilakukan evaluasi secara periodik dengan menggunakan media survei yang dilaksanakan dengan bekerja sama dengan pihak independen yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan implementasi program budaya unggul tersebut di unit kerja.

All activities in Program Excellent Culture in Units will be evaluated periodically by using media survey conducted in cooperation with independent party, which aims to identify effectiveness and implementation of Excellent Culture Program in Units.

Peta Jalan Budaya Perusahaan 2017-2021

Corporate Culture Roadmap 2017-2021

2017

Evaluasi Budaya Perusahaan

Corporate Culture Evaluation

1. Survei secara menyeluruh atas elemen Budaya Perusahaan
2. Menyelenggarakan *workshop* untuk mendefinisikan budaya dan nilai yang selaras dengan visi dan misi
3. Menentukan *critical behaviours*

1. Company wide survey on culture elements
2. Workshop to define culture and value align with vision mission
3. Determine critical behaviours

2018

Revitalisasi Budaya Perusahaan

Revitalize Corporate Culture

1. Menentukan *role model* dan *change agent* budaya
2. Menyelenggarakan *corporate values day*
3. Pembelajaran Budaya Perusahaan

1. Role modeling & culture change agent
2. Corporate values day
3. Culture learning

2019

Deployment Transformasi Tata Nilai

Deployment of Transformation of Values

1. Penerapan Budaya Perusahaan pada sistem rekrutmen untuk pegawai baru
2. Pengembangan sistem karir dan kompetensi yang sesuai dengan Budaya Perusahaan
3. Budaya Perusahaan dalam sistem kinerja

1. Culture in recruitment system & for new employee
2. Career and competency development system fit with corporate culture
3. Culture in performance system

2020

Culture Embedded to System

Culture Embedded to System

1. Budaya Perusahaan dalam sistem pelatihan
2. Sistem *reward* selaras dengan Budaya Perusahaan
3. Budaya Perusahaan dalam hubungan industrial
4. Pengembangan organisasi selaras dengan Budaya Perusahaan

1. Culture in training system
2. Reward system fit with corporate culture
3. Culture in industrial relations
4. Organizational development fit with corporate culture

2021

Stabilization Stage

Stabilization Stage

Para Pemangku Kepentingan mengalami & dipengaruhi oleh nilai tambah yang diberikan Perusahaan

External stakeholder experience & influenced by corporate adding value

Budaya Berkinerja Tinggi sebagai Perusahaan Kelas Dunia

High-Performance Culture as a World Class Company

Strategi Korporat

Corporate Strategies

RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN 2020-2024

Untuk memastikan tercapainya visi Perusahaan, PLN senantiasa melaksanakan *review* terhadap strategi yang telah disusun pada periode terdahulu. Penyusunan strategi korporat pada dokumen Rencana Jangka Panjang (RJP) PLN 2019-2023 merupakan pemutakhiran atas RJP PLN 2020-2024 di mana proses *review* meliputi penyesuaian terhadap Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028 dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan isu dan tantangan strategis yang dihadapi oleh PLN dalam menjalankan bisnis ketenagalistrikan saat ini maupun ke depannya.

Strategi korporat pada RJP PLN 2020-2024 disusun dengan mengacu pada tiga fokus keunggulan sebagaimana berikut, yaitu:

1. *Human capital excellence*, mencakup aspek budaya perusahaan berkinerja tinggi, sistem dan tata kelola terintegrasi, serta pemenuhan kuantitas dan kualitas sumber daya insani.
2. *Operational excellence*, yang merupakan akumulasi dari kinerja keamanan (*security*), keandalan (*reliability*), dan efisiensi operasional.
3. *Business development excellence*, menggabungkan proses bisnis terintegrasi dengan pengelolaan portofolio bisnis dan berorientasi pada pelanggan.

   Mengacu pada tiga fokus keunggulan (*operational excellence, business development excellence*, dan *human capital exellence*), disusun sejumlah inisiatif strategis untuk mencapai masing-masing tujuan strategis. Inisiatif strategis menjadi pedoman bagi setiap entitas di dalam PLN Group untuk penyusunan program-program terkait.

2020-2024 CORPORATE LONG TERM PLAN

To ensure the achievement of the Company's vision, PLN always reviews the strategies that are prepared in the previous period. The preparation of corporate strategies in PLN's 2019-2023 Long Term Plan (RJP) was an update of PLN's 2020-2024 RJP. The review process included adjustment to 2019-2028 Electricity Supply Business Plan (RUPTL) taking into account various strategic issues and challenges that faced by PLN in conducting electricity business today and in the future.

Corporate strategies in PLN's 2020-2024 RJP were prepared by referring to the three focuses of excellence as follows:

1. Human capital excellence, covering aspects of high-performance corporate culture, integrated systems and governance, as well as high quantity and quality of human capital.
2. Operational excellence, representing accumulation of operational security, reliability and efficiency.

3. Business development excellence, combining integrated and customer-oriented business processes and business portfolio management.

   Referring to the three focuses of excellence (operational excellence, business development excellence, and human capital excellence), a number of strategic initiatives have been prepared to achieve each of the strategic objectives. Strategic initiatives become guidelines for each entity in the PLN Group for the preparation of related programs.

Informasi Pemegang Saham dan Obligasi

Shareholders and Bonds Information

KRONOLOGI PENCATATAN SAHAM

PLN adalah perusahaan BUMN dengan kepemilikan saham Pemerintah Republik Indonesia sebesar 100% dan tidak/belum pernah memperdagangkan sahamnya di bursa efek.

CHRONOLOGY OF SHARE LISTING

PLN is a state-owned company with 100% share ownership by the Government of the Republic of Indonesia and has not/has never traded its shares on the stock exchange.

KRONOLOGI PENCATATAN EFEK BERSIFAT UTANG DARI AWAL PENCATATAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2019

Sejak tahun 1992, Perusahaan telah menerbitkan Obligasi dan Surat Utang PLN sebagai berikut:

CHRONOLOGY OF DEBT SECURITIES LISTING FROM INITIAL LISTING TO END OF 2019 FINANCIAL YEAR

Since 1992, the Company has issued PLN Bonds and Notes as follows:

Nama Efek Bersifat Utang Name of Debt Securities	**Tanggal Efektif** Effective Date	**Bursa Pencatatan** Listed In	**Tanggal Pencatatan** Listed Date	**Jumlah Pokok** Principal Amount **Rp'000.000**
Obligasi Rupiah | Rupiah Bonds				
Obligasi PLN I Tahun 1992 | PLN I Bonds Year 1992	25-Sep-92	PBI	10-Nov-92	300.000
Obligasi PLN II Tahun 1993 | PLN II Bonds Year 1993	28-Sep-93	PBI	8-Nov-93	600.000
Obligasi PLN III Tahun 1995 | PLN III Bonds Year 1995	30-Jan-95	PBI	18-Apr-95	318.430
Obligasi PLN IV Tahun 1995 | PLN IV Bonds Year 1995	30-Jun-95	PBI	4-Sep-95	680.000
Obligasi PLN V Tahun 1996 | PLN V Bonds Year 1996	28-Jun-96	BES	28-Aug-96	1.000.000
Obligasi PLN VI Tahun 1997 | PLN VI Bonds Year 1997	27-Jun-97	BES	12-Aug-97	600.000
Obligasi PLN VII Tahun 2004 | PLN VII Bonds Year 2004	3-Nov-04	BES	12-Nov-04	1.500.000
Obligasi PLN VIII Tahun 2006 | PLN VIII Bonds Year 2006	12-Jun-06	BES	22-Jun-16	2.200.100
Sukuk Ijarah PLN I Tahun 2006 | Sukuk Ijara I PLN Year 2006	12-Jun-06	BES	22-Jun-16	200.000
Obligasi PLN IX Tahun 2007 | PLN IX Bonds Year 2007	29-Jun-07	BES	11-Jul-07	2.700.000
Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007 | Sukuk Ijara II PLN Year 2007	29-Jun-07	BES	11-Jul-07	300.000
Obligasi PLN X Tahun 2009 | PLN X Bonds Year 2009	31-Dec-08	BEI	12-Jan-09	1.440.000
Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009 | Sukuk Ijara III PLN Year 2009	31-Dec-08	BEI	12-Jan-09	760.000
Obligasi PLN XI Tahun 2010 | PLN XI Bonds Year 2010	31-Dec-09	BEI	13-Jan-10	2.703.000
Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010 | Sukuk Ijara IV PLN Year 2010	31-Dec-09	BEI	13-Jan-10	297.000
Obligasi PLN XII Tahun 2010 | PLN XII Bonds Year 2010	30-Jun-10	BEI	9-Jul-10	2.500.000
Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010 | Sukuk Ijara V PLN Year 2010	30-Jun-10	BEI	9-Jul-10	500.000
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 | Shelf Registration Bonds I PLN Phase I Year 2013	27-Jun-13	BEI	8-Jul-13	879.000

Nama Efek Bersifat Utang Name of Debt Securities	**Tanggal Efektif** Effective Date	**Bursa Pencatatan** Listed In	**Tanggal Pencatatan** Listed Date	**Jumlah Pokok** Principal Amount **Rp'000.000**
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 | Shelf Registration Sukuk Ijara I PLN Phase I Year 2013	27-Jun-13	BEI	8-Jul-13	121.000
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 | Shelf Registration Bonds I PLN Phase II Year 2013	27-Jun-13	BEI	11-Dec-13	1.244.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 | Shelf Registration Sukuk Ijara I PLN Phase II Year 2013	27-Jun-13	BEI	11-Dec-13	429.000
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 | Shelf Registration Bonds II PLN Phase I Year 2017	21-Jun-17	BEI	12-Jul-17	1.600.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 | Shelf Registration Sukuk Ijara II PLN Phase I Year 2017	21-Jun-17	BEI	12-Jul-17	400.000
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017 | Shelf Registration Bonds II PLN Phase II Year 2017	21-Jun-17	BEI	2-Nov-17	2.545.500
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017 | Shelf Registration Sukuk Ijara II PLN Phase II Year 2017	21-Jun-17	BEI	2-Nov-17	694.500
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018 | Shelf Registration Bonds II PLN Phase III Year 2018	21-Jun-17	BEI	23-Feb-18	2.535.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018 | Shelf Registration Sukuk Ijara II PLN Phase III Year 2018	21-Jun-17	BEI	23-Feb-18	698.500
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018 | Shelf Registration Bonds III PLN Phase I Year 2018	29-Jun-18	BEI	10-Jul-18	1.278.500
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018 | Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN Phase I Year 2018	29-Jun-18	BEI	10-Jul-18	750.000
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018 | Shelf Registration Bonds III PLN Phase II Year 2018	10-Oct-18	BEI	10-Oct-18	832.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018 | Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN Phase II Year 2018	10-Oct-18	BEI	10-Oct-18	224.000
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019 | Shelf Registration Bonds III PLN Phase III Year 2019	19-Feb-19	BEI	19-Feb-19	2.393.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019 | Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN Phase III Year 2019	19-Feb-19	BEI	19-Feb-19	863.000

Informasi Pemegang Saham dan Obligasi
Shareholders and Bonds Information

Nama Efek Bersifat Utang Name of Debt Securities	Tanggal Efektif Effective Date	Bursa Pencatatan Listed In	Tanggal Pencatatan Listed Date	Jumlah Pokok Principal Amount Rp'000.000
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019 | Shelf Registration Bonds III PLN Phase IV Year 2019	1-Aug-19	BEI	1-Aug-19	2.953.620
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019 | Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN Phase III Year 2019	1-Aug-19	BEI	1-Aug-19	1.250.000
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 | Shelf Registration Bonds III PLN Phase V Year 2019	1-Oct-19	BEI	1-Oct-19	1.912.900
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 | Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN Phase V Year 2019	1-Oct-19	BEI	1-Oct-19	797.500
Jumlah | Total				**42.999.550**

Nama Efek Bersifat Utang Name of Debt Securities	Tanggal Efektif Effective Date	Bursa Pencatatan Listed In	Tanggal Pencatatan Listed Date	Jumlah Pokok Principal Amount USD'000.000
Surat Utang Jangka Menengah Global - USD | Global Medium Term Notes - USD				
Penerbitan tahun 2011 | Issued in 2011	22-Nov-11	SGX	23-Nov-11	1.000
Penerbitan tahun 2012 | Issued in 2012	24-Oct-12	SGX	25-Oct-12	1.000
Penerbitan tahun 2017 | Issued in 2017	15-May-17	SGX	16-May-17	2.000
Penerbitan tahun 2018 | Issued in 2018	25-Oct-18	SGX	25-Oct-18	1.000
	21-May-18	SGX	16-May-18	2.000
Penerbitan Tahun 2019 | Issued in 2019	17-Jul-19	SGX	17-Jul-19	1.400
	5-Nov-19	SGX	5-Nov-19	1.000
Jumlah | Total				**9.400**
Surat Utang Jangka Menengah Global - EUR | Global Medium Term Notes - EUR				
Penerbitan tahun 2018 | Issued in 2018	25-Oct-18	SGX	25-Oct-18	500
Penerbitan tahun 2019 | Issued in 2019	5-Nop-19	SGX	5-Nop-19	500
Jumlah | Total				**1.000**
Surat Utang Jangka Menengah Global - JPY | Global Medium Term Notes - JPY				
Penerbitan tahun 2019 | Issued in 2019	20-Sep-19	-	20-Sep-19	23.200
Jumlah | Total				**23.200**

Selain itu, Majapahit Holding B.V. yang berkedudukan di Belanda, entitas anak yang bertujuan khusus yang sepenuhnya milik Perusahaan, dalam kurun waktu 2006-2009 telah menerbitkan Obligasi Terjamin sebagai berikut:

Moreover, Majapahit Holding B.V., Netherlands, a wholly-owned special-purpose subsidiary of the Company, within 2006-2009 have issued Guaranteed Notes as follows:

Nama Efek Bersifat Utang Name of Debt Securities	**Tanggal Efektif** Effective Date	**Bursa Pencatatan** Listed In	**Tanggal Pencatatan** Listed Date	**Jumlah Pokok** Principal Amount **USD'000.000**
Penerbitan 2006 | Issued in 2006	16-Oct-06	SGX	17-Oct-06	1.000
Penerbitan 2007 | Issued in 2007	28-Jun-07	SGX	29-Jun-07	1.000
Penerbitan 2009 | Issued in 2009	7-Aug-09	SGX	11-Aug-09	750
Penerbitan 2009 | Issued in 2009	6-Nov-09	SGX	9-Nov-09	1.250
Jumlah|Total				**4.000**

Catatan Notes:
- BPI|IPX: Bursa Paralel Indonesia | Indonesia Parallel Exchange.
- BES|SSX: Bursa Efek Surabaya | Surabaya Stock Exchange.
- BEI|IDX: Bursa Efek Indonesia | Indonesia Stock Exchange.
- SGX: Bursa Efek Singapura | Singapore Exchange
- Pada tanggal 22 Juli 1995 Bursa Paralel Indonesia diakuisisi oleh Bursa Efek Surabaya | On July 22, 1995 Indonesia Parallel Exchange was acquired by the Surabaya Stock Exchange.
- Pada tanggal 30 Oktober 2007 Bursa Efek Surabaya melakukan merger dengan melebur ke dalam Bursa Efek Jakarta yang selanjutnya berganti nama menjadi Bursa Efek Indonesia | On October 30, 2007, Surabaya Stock Exchange was officially merged to Jakarta Stock Exchange which then changed its name to Indonesia Stock Exchange.

Dengan durasinya yang panjang, obligasi merupakan salah satu sumber pendanaan bagi kegiatan investasi pembangunan pembangkit maupun infrastruktur ketenagalistrikan selain Penyertaan Modal Negara (PMN), *project loan, subsidiary loan agreement*, Pinjaman Pemerintah, Pinjaman Lembaga Keuangan Pemerintah Non Bank, dan *direct lending* dengan jaminan atau tanpa jaminan pemerintah.

With their long durations, bonds serve as one of the funding sources for investments in power plants and electricity infrastructure, in addition to State Invesment (PMN), poject loans, subsidiary loan agreements, Government Loans, Non-Bank Government Financial Institution Loans, and direct lending with or without government guarantee.

Pada tahun 2019, *rating* untuk indeks Fitch adalah BBB (*stable*), Moodys Baa2 (*stable*), dan S&P upgrade dari BBB- (*stable*) menjadi BBB (*stable*) di 31 Mei 2019. *Rating* Pefindo untuk obligasi lokal stabil di AAA.

In 2019, ratings given by Fitch is BBB (stable), Moodys Baa2 (stable), and S&P upgraded from BBB- (stable) to BBB (stable) on May 31, 2019. Pefindo's rating for local bonds is stable at AAA.

Pada tahun 2019, PLN menerbitkan 32 seri obligasi domestik dengan total dana sebesar Rp10,17 triliun dan 3 seri obligasi global sebesar USD2,2 miliar dan JPY23,2 miliar. Dengan penerbitan obligasi tersebut, total *outstanding* obligasi domestik PLN adalah Rp42,99 triliun, sedangkan untuk obligasi global adalah USD9,2 miliar, EUR500 juta dan dan JPY23,2 miliar.

In 2019, PLN issued 32 series of domestic bonds at total funds of Rp10.17 trillion and 3 series of global bonds amounting to USD2.2 billion and JPY23.2 billion. With these bonds issuances, PLN's total domestic bond outstanding was Rp42.99 trillion, whereas total global bond was USD9.2 billion, EUR500 million and JPY23.2 billion.

Profil Dewan Komisaris per 31 Desember 2019

Profile of the Board of Commissioners as of December 31, 2019

Amien Sunaryadi

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner and Independent Commissioner

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	Indonesia
Usia Age	59 tahun	59 years old
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Malang, 23 Januari 1960	Malang, January 23, 1960
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Riwayat Pendidikan History of Education	• Master of Professional Accounting (MPA), School of Accountancy, Georgia State University, USA (1992) • Sarjana Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) (1986) • Diploma Akuntansi, STAN (1982)	• Master of Professional Accounting (MPA), School of Accountancy, Georgia State University, USA (1992) • Bachelor of Accounting, State Accounting College (STAN) (1986) • Diploma of Accounting, STAN (1982)
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-326/MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019	Appointed as President Commissioner and Independent Commissioner based on SOE Ministerial Decree as GMS No. SK-326/MBU/12/2019 dated December 23, 2019
Riwayat Pekerjaan/Jabatan Work/Position History	• Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi/SKK Migas (2014-2018) • Partner di Divisi Fraud Investigation & Dispute Services (FIDS) Ernst & Young Indonesia (2012-2014) • Senior Governance and Anti-Corruption Officer di World Bank Indonesia (2008-2012) • Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK (2003-2007)	• Head of SKK Migas (Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities) (2014-2018) • Partner in Fraud Investigation & Dispute Services (FIDS) Division of Ernst & Young Indonesia (2012-2014) • Senior Governance and Anti-Corruption Officer at World Bank Indonesia (2008-2012) • Deputy Chairman of Corruption Eradication Commission/KPK (2003-2007)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	• Partner pada Firma Hukum Assegaf Hamzah and Patners/AHP (2019-sekarang) • Senior Advisor PT Integra Solusi Optima/ISO (2019-sekarang)	• Partner at Assegaf Hamzah and Partners Law Firm/ AHP (2019-present) • Senior Advisor of PT Integra Solusi Optima/ISO (2019-present)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham	Does not have affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders
Masa Jabatan Term of Office	Masa Jabatan sebagai Komisaris Independen tidak melebihi 2 periode	The term of office as Independent Commissioner does not exceed 2 periods

Suahasil Nazara

Wakil Komisaris Utama
Vice President Commissioner

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	Indonesia
Usia Age	49 tahun	49 years old
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Jakarta, 23 November 1970	Jakarta, November 23, 1970
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Riwayat Pendidikan History of Education	• Doctor of Philosophy (PhD), University of Illinois at Urbana-Champaign, USA (2003) • Master of Science (MSc), Cornell Univeristy, USA (1997) • Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia (1994)	• Doctor of Philosophy (PhD), University of Illinois at Urbana-Champaign, USA (2003) • Master of Science (MSc), Cornell University, USA (1997) • Bachelor of Economics, University of Indonesia (1994)
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat sebaga Wakil Komisaris Utama berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-326/MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019	Appointed as Vice President Commissioner based on SOE Ministerial Decree as GMS No. SK-326/MBU/12/2019 dated December 23, 2019
Riwayat Pekerjaan/Jabatan Work/Position History	• Anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional/KEN (2013-2019) • Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (2016) • Koordinator Pokja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan/TNP2K (2010-1015) • Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah/KPPOD (2009-2015) • Ketua Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis/FEB Universitas Indonesia (2009-2013) • Anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal (2009-2011) • Kepala Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis/FEB, Universitas Indonesia (2005-2008)	• Member of the Board of National Economic Committee/KEN (2013-2019) • Head of Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance (2016) • Coordinator of Policy Working Group at the Secretariat of National Team for Poverty Reduction Acceleration/TNP2K (2010-1015) • Deputy Chairman of Supervisory Committee Regional Autonomy Implementation/KPPOD (2009-2015) • Head of Department of Economics, Faculty of Economics and Business/FEB, University of Indonesia (2009-2013) • Members of Assistance Team of Minister of Finance in the field of Fiscal Decentralization (2009-2011) • Head of Demographic Institute, Faculty of Economics and Business/FEB University of Indonesia (2005-2008)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	• Wakil Menteri Keuangan • Guru Besar Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) • Anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional (KEN)	• Vice minister of Finance • Professor in Economics at the Faculty of Economics and Business, University of Indonesia (FEB UI) • Member of National Economics Committee (KEN)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham	Does not have affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders

Profil Dewan Komisaris
Profile of the Board of Commissioners'

Ilya Avianti

Komisaris
Commissioner

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	Indonesia
Usia Age	60 tahun	60 years old
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Bandung, 12 Juli 1959	Bandung, July 12, 1959
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Riwayat Pendidikan History of Education	• Doktor Akuntansi, Universitas Padjadjaran (2000) • Magister Akuntansi, Universitas Padjadjaran (1994) • Sarjana Akuntansi, Universitas Padjadjaran (1984)	• Doctor of Accounting, Padjadjaran University (2000) • Master of Accounting, Padjadjaran University (1994) • Bachelor of Accounting, Padjadjaran University (1984)
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-145/MBU/07/2017 tanggal 28 Juli 2017	Appointed as Commissioner based on SOE Ministerial Decree as GMS No. SK-145/MBU/07/2017 dated Juli 28, 2017
Riwayat Pekerjaan/ Jabatan Work/Position History	• Pelaksana Tugas Komisaris Utama PT PLN (Persero) (6 Agustus 2018-23 Desember 2019) • Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (2012-2017) • Auditor Utama Keuangan Negara VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) (2010-2012) • Pelaksana Tugas Auditor Utama Keuangan Negara VII BPK RI (2009-2010) • Staf Ahli bidang BUMN/BUMD BPK RI (2008-2010) • Tenaga Ahli Badan Pemeriksa Keuangan (2007-2008) • Komisaris PT Tuban Petro Industry (2006-2009) • Staf Ahli Menteri Keuangan (2005-2006)	• Caretaker President Commissioner of PT PLN (Persero) (August 6, 2018-December 23, 2019) • Chairperson of Audit Board concurrently a Member of Board of Commissioners of Financial Services Authority (2012-2017) • Main Auditor of State Finance VII, State Audit Board (BPK RI) (2010-2012) • Acting Main Auditor of State Finance VII BPK RI (2009-2010) • Expert Staff in BUMN/BUMD BPK RI (2008-2010) • Expert at BPK RI (2007-2008) • Commissioner of PT Tuban Petro Industry (2006-2009) • Expert Staff of Minister of Finance (2005-2006)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran (2007-Sekarang)	Professor of the Faculty of Economics, Padjadjaran University (2007-Present)
Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Training and Competence Development	• Kunjungan kerja ke PLN Puslitbang, Pusenlis dan Pusertif, Jakarta (16 Januari) • Kunjungan kerja ke PLN Batam (6-8 Februari) • Kunjungan kerja ke PLN Area Bengkulu Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu 17-19 Februari) • Kunjungan kerja ke PLN Wilayah Sumatera Utara 11-13 Maret) • Kunjungan kerja ke PLN Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (24-26 Maret) • Kunjungan kerja ke PLN Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta (12-14 April) • Kunjungan kerja ke PLN Distribusi Jawa Barat (24-25 Juni) • Kunjungan kerja ke PLN Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta (12 Agustus) • Kunjungan kerja ke PLN UIT JBTB dan PLN UIP JBTB 1 (14-16 Agustus) • Work visit to PLN UIT JBTB and PLN UIP JBTB 1 (August 14-16) • Kunjungan kerja ke PLN Distribusi Bali (26-28 Agustus) • Kunjungan kerja ke PLN Wilayah Aceh (1-3 Oktober) • Kunjungan kerja ke PLN Area Kupang & Labuan Bajo (4-7 Oktober) • Kunjungan kerja ke PLN Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo (9-11 Oktober) • Konferensi Internal Audit - European Confederation of Institute of Internal Auditing (ECIIA) 2019 – Luxembourg (13-22 Oktober) • Kunjungan kerja ke PLN Wilayah Kalimantan Barat (30 Oktober-1 November) • Kunjungan kerja ke PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur (28-29 November) • Kunjungan kerja ke PLN Wilayah Kalimantan Timur dan Utara (4-6 Desember) • Kunjungan kerja ke PLN Distibusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta (18-20 Desember)	• Work visit to PLN Puslitbang, Pusenlis and Pusertif, Jakarta (January 16) • Work visit to PLN Batam (February 6-8) • Work visit to PLN Area of Bengkulu, Region of South Sumatra, Jambi and Bengkulu (February 17-19) • Work visit to PLN Region of North Sumatra (March 11-13) • Work visit to PLN Region of South Sulawesi, Southeast Sulawesi and West Sulawesi (March 24-16) • Work visit to PLN Distribution of Central Java and D.I. Yogyakarta (April 12-14) • Work visit to PLN Distribution of West Java (June 24-25) • Work visit to PLN Distribution of Central Java and D.I. Yogyakarta (August 12) • Work visit to PLN Distribution of Bali (August 26-28) • Work visit to PLN Region of Aceh (October 1-3) • Work visit to PLN Area of Kupang & Labuan Bajo (October 4-7) • Work visit to PLN Region of North Sulawesi, Central Sulawesi and Gorontalo (October 9-11) • Internal Audit Conference – European Confederation of Institute of Internal Auditing (ECIAA) 2019 - Luxembourg (October 13-22) • Work visit to PLN Region of West Kalimantan (October 31-November 1) • Work visit to PLN Region of East Nusa Tenggara (November 28-29) • Work visit to PLN Region of East and North Kalimantan (December 4-6) • Work visit to PLN Distribution of Central Java and D.I. Yogyakarta (December 18-20)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham	Does not have affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders

Deden Juhara

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	Indonesia
Usia Age	58 tahun	58 years old
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Bandung, 14 Januari 1961	Bandung, January 14, 1961
Domisili Domicile	Bandung	Bandung
Riwayat Pendidikan History of Education	• Sespati Polri (2010) • Sespim Polri (2000) • Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (1992) • Akademi Kepolisian (1985)	• Sespati Polri (2010) • Sespim Polri (2000) • College of Police Science (1992) • Police Academy (1985)
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-55/MBU/02/2019 tanggal 28 Februari 2019	Appointed as Independent Commissioner based on SOE Ministerial Decree as GMS No. SK-55/MBU/02/2019 dated February 28, 2019
Riwayat Pekerjaan/Jabatan Work/Position History	• Asisten Operasi Kapolri (2018) • Kapolda Maluku (2017) • Widyaiswara Utama Sespim Polri (2013) • Karo Binkar SDM Polri (2011) • Analis Kebijakan Madya SSDM Polri (2010) • Karo Pers Polda Jabar (2009) • Karo Pers Polda Aceh (2008) • Karo Pers Polda Banten (2005) • Kapolres Kediri Polda Jatim (2003)	• Operation Assistant of the Chief of Indonesian National Police (Polri) (2018) • Chef of Regional Police of Maluku (2017) • Widyaiswara Utama Sespim Polri (2013) • Bureau Head of Binkar SDM Polri (2011) • Senior Policy Analyst SSDM Polri (2010) • Bureau Head of Press, Regional Police of West Java (2009) • Bureau Head of Press, Regional Police of Aceh (2008) • Bueau Head of Press, Regional Police of Banten (2005) • Police Head of Kediri Regional Police of East Java (2003)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Tidak ada	None
Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Training and Competence Development	• Kunjungan kerja ke PLN Wilayah Sumatera Utara (11-13 Maret) • Kunjungan kerja ke PLN Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (24-26 Maret) • Kunjungan kerja ke PLN Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta (12-14 April) • Kunjungan kerja ke PLN Distribusi Jawa Barat (24-25 Juni) • Kunjungan kerja ke PLN Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (24-25 Juli) • Kunjungan kerja ke PLN UIT JBTB dan PLN UIP JBTB 1 (14-16 Agustus) • Kunjungan kerja ke PLN Distribusi Bali (26-28 Agustus) • Kunjungan kerja ke PLN Wilayah Aceh (1-3 Oktober) • Kunjungan kerja ke PLN Wilayah Kalimantan Barat (30 Oktober-1 November) • Kunjungan kerja ke PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur (28-29 November) • Kunjungan kerja ke PLN Distibusi Jawa Tengah & DI. Yogyakarta (18-20 Desember)	• Work visit to PLN Region of North Sumatera (March 11-13) • Work visit to PLN Region of South Sulawesi, Southeast Sulawesi and West Sulawesi (March 24-26) • Work visit to PLN Distribution of Central Java and D.I. Yogyakarta (April 12-14) • Work visit to PLN Distribution of West Java (June 24-25) • Work visit to PLN Region of South Sulawesi, Southeast Sulawesi and West Sulawesi (July 24-25) • Work visit to PLN UIT JBTB and PLN UIP JBTB 1 (August 14-16) • Work visit to PLN Distribution of Bali (August 26-28) • Work visit to PLN Region of Aceh (October 1-3) • Work visit tu PLN Region of West Kalimantan (October 30-November 1) • Work visit to PLN Region of East Nusa Tenggara (November 28-29) • Work visit to PLN Distribution of Central Java & D.I. Yogyakarta (December 18-20)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham	Does not have affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders
Masa Jabatan Masa Jabatan	Masa Jabatan sebagai Komisaris Independen tidak melebihi 2 periode	The term of office as Independent Commissioner does not exceed 2 periods

Profil Dewan Komisaris
Profile of the Board of Commissioners'

Rida Mulyana

Komisaris
Commissioner

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	Indonesia
Usia Age	56 tahun	56 years old
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Sumedang, 2 Mei 1963	Sumedang, May 2, 1963
Domisili Domicile	Tangerang Selatan	South Tangerang
Riwayat Pendidikan History of Education	• Master of Petroleum Engineering, University of London, UK (1992) • Sarjana Perminyakan, Institut Teknologi Bandung (1988)	• Master of Petroleum Engineering, University of London, UK (1992) • Bachelor of Petroleum Engineering, Bandung Institute of Technology (1988)
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-55/MBU/02/2019 tanggal 28 Februari 2019.	Appointed as Commissioner based on SOE Ministerial Decree as GMS No. SK-55/MBU/02/2019 dated February 28, 2019
Riwayat Pekerjaan/Jabatan Work/Position History	• Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM (2013-2019) • Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ESDM (2010-2013) • Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "Lemigas" (2009-2010) • Sekretaris Direktorat Jenderal Migas (2009) • Kabid Program, Puslitbangtek Migas "Lemigas" (2008-2009) • Kabag Tata Usaha, Puslitbangtek Migas "Lemigas" (2002-2008)	• Director General of New & Renewable Energy and Energy Conservation, Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) (2013-2019) • Bureau Head of Planning and Cooperation of Ministry of Energy and Mineral Resources (2010-2013) • Head of Research and Development Center for Oil and Gas Technology "Lemigas" (2009-2010) • Secretary of Directorate General of Oil and Gas (2009) • Division Head of Program, Research and Development Center for Oil and Gas "Lemigas" (2008-2009) • Section Head of Administration, Research and Development Center for Oil and Gas "Lemigas" (2002-2008)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM (2019-sekarang)	Director General of Electricity, Ministry of Energy and Mineral Resources (2019-present)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham	Does not have affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders

Mohamad Ikhsan

Komisaris
Commissioner

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	Indonesia
Usia Age	55 tahun	55 years old
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Sigli, 7 November 1964	Sigli, November 7, 1964
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Riwayat Pendidikan History of Education	• Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA (1999) • MA in Economics, Vanderbilt University, Nashville, Tenn, USA (1991) • Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia (1988)	• Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA (1999) • MA in Economics, Vanderbilt University, Nashville, Tenn, USA (1991) • Bachelor of Economics, University of Indonesia (1988)
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-334/MBU/12/2019 tanggal 26 Desember 2019	Appointed as Commissioner based on SOE Ministerial Decree as GMS No. SK-334/MBU/12/2019 dated December 26, 2019
Riwayat Pekerjaan/Jabatan Work/Position History	• Anggota Tim Asistensi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2017-2019) • Anggota Tim Ahli Wakil Presiden RI (2014-2019) • Komisaris PT PGN Tbk (2015-2019) • Head of Advisory Panel, ASEAN Plus 3 Macroeconomics Research Office/AMRO, Singapore (2018-2019) • Member of Policy Advisory AMRO, Singapore (2015-2019) • Komisaris PT JICT (2011-2017) • Staf Khusus Wakil Presiden RI (2009-2014) • Komisaris PT Danareksa (2008-2015)	• Member of Assistance Team, Coordinating Minister for Economic Affairs (2017-2019) • Members of Expert Team for Vice President of the Republic of Indonesia (2014-2019) • Commissioner of PT PGN Tbk (2015-2019) • Head of Advisory Panel, ASEAN Plus 3 Macroeconomics Research Office/AMRO, Singapore (2018-2019) • Member of Policy Advisory AMRO, Singapore (2015-2019) • Commissioner of PT JICT (2011-2017) • Special Staff to the Vice President of the Republic of Indonesia (2009-2014) • Commissioner of PT Danareksa (2008-2015)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	• Staf Khusus Menteri BUMN (2019-sekarang) • Member of Advisory Board, Mandiri Institute (Desember 2019-Sekarang) • Member of Policy Advisory, ADB Institute, Japan (2015-sekarang) • Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (2010-sekarang) • Anggota Masyarakat Ekonomi Statistik Badan Pusat Statistik & Bappenas	• Special Staff of Minister of SOEs (2019-present) • Member of Advisory Board, Mandiri Institute (December 2019-Present) • Member of Policy Advisory, ADB Institute, Japan (2015-present) • Professor of Faculty of Economics and Business, University of Indonesia (2010-present) • Member of Economic Statistics Society Statistics Indonesia & Bappenas
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham	Does not have affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders

Profil Direksi per 31 Desember 2019

Board of Directors Profile as of December 31, 2019

Zulkifli Zaini

Direktur Utama
President Director

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	Indonesia
Usia Age	63 tahun	63 years old
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	22 Oktober 1956	October 22, 1956
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Riwayat Pendidikan History of Education	• Master of Business Administration, University of Washington (1994) • Sarjana Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung (1980)	• Master of Business Administration, University of Washington (1994) • Bachelor of Civil Engineering, Bandung Institute of Technology (1980)
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-325/MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019	Appointed as President Director based on SOE Ministerial Decree as GMS No. SK-325/MBU/12/2019 dated December 23, 2019
Riwayat Pekerjaan/Jabatan Work/Position History	• Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero) (2015-2016) • Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2010-2013) • Direktur Teknologi dan Operasional PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mei-Juni 2010)	• Independent Commissioner of PT Bank Negara Indonesia (Persero) (2015-2016) • President Director of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2010-2013) • Director of Technology and Operational of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (May-June 2010)
Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Training and Competence Development	Seminar "PSAK 71 Impairment Deep Dive in Risk Management Perspective" Bankers Association for Risk Management (BARa) (24-25 Oktober)	"PSAK 71 Impairment Deep Dive in Risk Management Perspective" Bankers Association for Risk Management (BARa) Seminar (OCtober 24-25)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham	Does not have affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders

Darmawan Prasodjo

Wakil Direktur Utama
Vice President Director

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	Indonesia
Usia Age	49 tahun	49 years old
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Magelang, 19 Oktober 1970	Magelang, October 19, 1970
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Riwayat Pendidikan History of Education	• PhD Ekonomi Terapan, Texas A&M University kolaborasi dengan Duke University (2011) • Master of Computer Science, Texas A&M University (2000) • Bachelor of Computer Science & Industrial Engineering, Texas A&M University (1994)	• PhD in Applied Economics, Texas A&M University in collaboration with Duke University (2011) • Master of Computer Science, Texas A&M University (2000) • Bachelor of Computer Science & Industrial Engineering, Texas A&M University (1994)
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat sebagai Wakil Direktur Utama berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-325/MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019	Appointed as Vice President Director based on SOE Ministerial Decree as GMS No. SK-325/MBU/12/2019 dated December 23, 2019
Riwayat Pekerjaan/Jabatan Work/Position History	• Komisaris PT PLN (Persero) (2018-2019) • Pendiri, Pemimpin Redaksi, dan Ekonom Energi di Petronomist.com (2011-sekarang) • Co-chair Post 2015 Millenium Development Goals (MDGs), Bali (2013) • Direktur di Indonesia Center for Green Economy dan Kepala Jurusan di Prodi Green Economy, Surya University (2012-2013)	• Commissioner of PT PLN (Persero) (2018-2019) • Founder, Editor in Chief, and Energy Economist at Petronomist.com (2011-present) • Co-chair Post 2015 Millennium Development Goals (MDGs), Bali (2013) • Director at Indonesia Center for Green Economy and Department Head of Green Economy Study Program, Surya University (2012-2013)
Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Training and Competence Development	• Wisuda Program Operation and Maintenance Papua Technician Apprentice - Batch 1 (28 Januari) • Indosterling Forum ke 7: "Mengukur infrastruktur: sejauh mana pembangunan infrastruktur menstimulasi ekonomi daerah (6 Agustus) • Konvensi & Pameran IPA ke-43: "Talent leadership session theme: lets talk about people" (4-6 September) • Advancing Accountable Resource Governance in Asia Pasific 2019 (3 Oktober)	• Graduation of Operation and Maintenance of Papua Technician Apprentice Program - Batch 1 (January 28) • 7th Indosterling Forum: "Measuring infrastructure: How Far infrastructure development stimulates the regional economy (August 6) • 43rd IPA Convention & Exhibition Jakarta,Talent leadership session theme: lets talk about people (September 4-6) • Advancing Accountable Resource Governance in Asia Pacific 2019 (October 3)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham	Does not have affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders

Profil Direksi
Board of Directors Profile

Sinthya Roesly

Direktur Keuangan
Director of Finance

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	Indonesia
Usia Age	50 tahun	50 years old
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Pekanbaru, 6 Oktober 1969	Pekanbaru, October 6, 1969
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Riwayat Pendidikan History of Education	• Magister Manajemen, IPMI International Business School, Indonesia (2003) • Master of Business Administration, Monash University, Australia (2003) • Master of Engineering Science, School of Electrical Engineering, University of New South Wales, Australia (1996) • Sarjana Teknik Elektro, Universitas Indonesia (1993) • Diploma Sastra Inggris, Universitas Indonesia (1993)	• Master of Management, IPMI International Business School, Indonesia (2003) • Master of Business Administration, Monash University, Australia (2003) • Master of Engineering Science, School of Electrical Engineering, University of New South Wales, Australia (1996) • Bachelor of Electrical Engineering, University of Indonesia (1993) • Diploma, English Literature, University of Indonesia (1993)
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat Sebagai Direktur Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-325/MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019	Appointed as Director of Finance based on SOE Ministerial Decree as GMS No. SK-325/MBU/12/2019 dated December 23, 2019
Riwayat Pekerjaan/Jabatan Work/Position History	• Direktur Eksekutif/CEO merangkap Ketua Dewan Direktur, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/LPEI atau Indonesia Eximbank, Kementerian Keuangan (2017-2019) • Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII (2009-2017) • Deputi Direktur Corporate Strategy & Planning PT PLN (Persero) (2006–2009) • Manajer Analisa & Evaluasi Sistem PT PLN (Persero) (2003–2006) • Divisi Keuangan & Niaga PT PLN (Persero) (1996–2003) • Power System Operations Engineer PT PLN (Persero) (1994–1996) • Commissioning Engineer Thermal Power Generation Project PT PLN (Persero) (1993–1994)	• Executive Director/CEO concurrently as Chairperson of Board of Directors, Indonesian Export Financing Institution/LPEI or Indonesia Eximbank, Ministry of Finance (2017-2019) • Managing Director of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (Persero)/IIGF (2009-2017) • Deputy Director of Strategy & Corporate Planning of PT PLN (Persero) (2006–2009) • System Analysis & Evaluation Manager of PT PLN (Persero) (2003–2006) • Commerce & Finance Division of PT PLN (Persero) (1996–2003) • Power System Operation Engineer of PT PLN (Persero) (1994-1996) • Thermal Power Generation Project Commissioner Engineer, PT PLN (Persero) (1993-1994)
Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Training and Competence Development	• International Director Programme, INSEAD, France (2015) • International Leadership Workshop, Aspen Institute, Colorado (2012) • Infrastucture in Market Economy, Harvard JFK School of Government, Boston (2011) • Global Leadership Management Workshop, Cambridge university (2009)	- International Director Programme, INSEAD, France (2015) - International Leadership Workshop, Aspen Institute, Colorado (2012) - Infrastucture in Market Economy, Harvard JFK School of Government, Boston (2011) - Global Leadership Management Workshop, Cambridge university (2009)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham	Does not have affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders

Sripeni Inten Cahyani

Direktur Pengadaan Strategis 1
Director of Strategic Procurement 1

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	Indonesia
Usia Age	51 tahun	51 years old
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Pati, 7 Oktober 1968	Pati, October 7, 1068
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Riwayat Pendidikan History of Education	• Doktor Ilmu Ekonomi bidang Manajemen Strategi, Universitas Trisakti (2019) • Magister Manajemen Keuangan, STM PPM Jakarta (2001) • Sarjana Teknik Kimia, Universitas Diponegoro (1992)	• Doctor of Economics in Strategy Management, Trisakti University (2019) • Master of Financial Management, STM PPM Jakarta (2001) • Bachelor of Chemical Engineering, Diponegoro University (1992)
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat sebagai Direktur Pengadaan Strategis 1 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-109/MBU/05/2019 tanggal 29 Mei 2019	Appointed as Director of Strategic Procurement 1 based on SOE Ministerial Decree as GMS No. SK-109/MBU/05/2019 dated May 29, 2019
Riwayat Pekerjaan/Jabatan Work/Position History	• Pelaksana Tugas Direktur Utama PT PLN (Persero) (Agustus 2019-Desember 2019) • Direktur Utama PT Indonesia Power (2016-2019) • Direktur Keuangan PT Indonesia Power (2013 - 2016) • Eksekutif Utama Bidang Keuangan PT Indonesia Power yang ditugaskaryakan sebagai Senior Spesialis Keuangan Divisi Keuangan Korporat PT PLN (Persero) (2013) • Kepala Divisi Pendanaan dan Asuransi PT Indonesia Power (2010-2013) • Vice President PT Indonesia Power (2009-2010) • Manager Perencanaan & Administrasi Pendanaan PT Indonesia Power (2007-2009)	• Acting President Director of PT PLN (Persero) (August 2019-December 2019) • President Director of PT Indonesia Power (2016-2019) • Finance Director of PT Indonesia Power (2013 - 2016) • Chief Executive in Finance of PT Indonesia Power assigned as Senior Specialist in Finance in Corporate Finance Division of PT PLN (Persero) (2013) • Division Head of Funding and Insurance of PT Indonesia Power (2010-2013) • Vice President of PT Indonesia Power (2009-2010) • Fund Planning & Administration Manager of PT Indonesia Power (2007-2009)
Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Training and Competence Development	• *Workshop* Peningkatan GCG dalam Pengelolaan BUMN di Lingkup Kedeputian Bidang Usaha, Pertambangan, Industri strategis dan Media (25 September) • *Sharing* dalam *Workshop Destination Statement* (11 Oktober) • *Sharing* di acara KOL Academy (19 September) • Narasumber acara Internalisasi Tata Nilai PLN Terbaik (6 September) • Narasumber pada Renewable Energy Technology Workshop Indonesia-Austria (16 Juli)	• Workshop on GCG Improvement in SOE Management in the scope of Deputy for Mining Business, Strategic Industries and Media (September 25) • Sharing in the Destination Statement Workshop (October 11) • Sharing on KOL Academy event (September 19) • Keynote Speaker for Internalization of Best PLN Values (September 6) • Keynote Speaker on Renewable Energy Technology Workshop Indonesia - Austria (July 16)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham	Does not have affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders

Profil Direksi
Board of Directors Profile

Djoko Rahardjo Abumanan

Direktur Pengadaan Strategis 2
Director of Strategic Procurement 2

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	Indonesia
Usia Age	59 tahun	59 years old
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Surabaya, 10 September 1960	Surabaya, September 10, 1960
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Riwayat Pendidikan History of Education	• Magister Keuangan, Jakarta Institute of Management Studies (1999) • Sarjana Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung (1985)	• Master of Finance, Jakarta Institute of Management Studies (1999) • Bachelor of Electrical Engineering, Bandung Institute of Technology (1985)
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	• Diangkat sebagai Direktur berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Nomor: SK-211/MBU/10/2015 tanggal 30 Oktober 2015 • Ditetapkan sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Nomor: SK-138/MBU/07/2017 tanggal 24 Juli 2017 • Ditetapkan sebagai Direktur Pengadaan Strategis 2 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-109/MBU/05/2019 tanggal 29 Mei 2019 dengan melanjutkan sisa masa jabatan sebelumnya.	• Appointed as Director based on SOE Ministerial Decree as GMS No. SK-211/MBU/10/2015 dated 30 October 2015 • Defined as Regional Business Director of Eastern Part Java, Bali and Nusa Tenggara based on SOE Ministerial Decree as GMS No. SK-138/MBU/07/2017 dated 24 July 2017 • Defined as Director of Strategic Procurement 2 based on SOE Ministerial Decree as GMS No. SK-109/MBU/05/2019 dated May 29, 2019 by continuing the rest of the previous term.
Riwayat Pekerjaan/ Jabatan Work/Position History	• Pelaksana tugas Direktur Utama PT PLN (Persero) (Mei 2019-Agustus 2019) • Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara PT PLN (Persero) (2017-2019) • Direktur PT PLN (Persero) (2015-2017) • General Manager PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten (2015) • Kepala Divisi Energi Baru dan Terbarukan Kantor Pusat PT PLN (Persero) (2014-2015) • General Manager PLN Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta (2013-2014) • General Manager PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau (2011-2012)	• Acting President Director of PT PLN (Persero) (May 2019-August 2019) • Regional Business Director of Eastern Part Java, Bali and Nusa Tenggara of PT PLN (Persero) (2017-2019) • Director of PT PLN (Persero) (2015-2017) • General Manager of PLN Distribution of West Java and Banten (2015) • Division Head of New and Renewable Energy of PT PLN (Persero) Head Office (2014-2015) • General Manager of PLN Distribution of Central Java and D.I. Yogyakarta (2013-2014) • General Manager of PLN Region of Riau and Riau Islands (2011-2012)
Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Training and Competence Development	• Kuliah Umum Direksi oleh Wakil Menteri ESDM (30 Januari) • National Steering Committee CIGRE, Pembicara pada Forum CIGRE (25 Maret) • Delegasi Kementerian ESDM dalam G20 Ministerial Meeting of Energy Transition – Jepang (13-18 Juni) • *Roadshow* Global Medium Term Notes – Amerika Serikat (7-14 Juli) • PLN Outlook 2019 (15-16 Juli) • Assesment Kompetensi BUMN (17 Juli) • Gas Indonesia Summit (31 Juli) • Diskusi infrastruktur mini LNG pembangkit skala kecil di wilayah Indonesia Timur (17 September) • *Workshop* Peningkatan GCG dalam Pengelolaan BUMN (25 September) • FGD "The Future of Mobility and Implications for Indonesia" (21 Oktober)	• BOD Public Lecture by Vice Minister of Energy and Mineral Resources (January 30) • CIGRE National Steering Committee, Keynote Speaker on CIGRE Forum (March 25) • Delegation of Ministry of Energy and Mineral Resources in G20 Ministerial Meeting of Energy Transition - Japan (June 13-18) • Global Medium Term Notes Roadshow - United States (July 7-14) • PLN Outlook 2019 (July 15-16) • SOE Competence Assessment (July 17) • Gas Indonesia Summit (July 31) • Discussion on LNG Mini Infrastructure Small Scale Power Plant in Eastern Indonesia (September 17) • Workshop on GCG Improvement in SOE Management (September 25) • FGD "The Future of Mobility and Implications for Indonesia" (October 21)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham	Does not have affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders

Muhamad Ali

Direktur Human Capital Management
Director of Human Capital Management

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	Indonesia
Usia Age	58 tahun	58 years old
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Purworejo, 24 Februari 1961	Purworejo, February 24, 1961
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Riwayat Pendidikan History of Education	Sarjana Hukum, Universitas Gajah Mada (1987)	Bachelor of Law, Gadjah Mada University (1987)
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	• Diangkat sebagai Direktur berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-211/MBU/10/2015 tanggal 30 Oktober 2015 • Diangkat sebagai Direktur Human Capital Management berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-138/MBU/07/2017 tanggal 24 Juli 2017	• Appointed as Director based on SOE Ministerial Decree as GMS No. SK-211/MBU/10/2015 dated October 30, 2015 • Defined as Director of Human Capital Management based on SOE Ministerial Decree as GMS No. SK-138/MBU/07/2017 dated July 24, 2017 by continuing the rest of the previous term.
Riwayat Pekerjaan/Jabatan Work/Position History	• Koordinator Bisnis Ritel PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)/Bank BRI (2015) • Pemimpin Wilayah Bank BRI Yogyakarta (2014) • Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan Kantor Pusat Bank BRI • Kepala Biro Direksi Divisi Sekretariat Perusahaan Kantor Pusat Bank BRI • Wakil Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan Kantor Pusat Bank BRI • Pemimpin Bank BRI Cabang Surakarta • Kepala Bagian Pemasaran Consumer Banking Bank BRI • Pemimpin Bank BRI Cabang Selong, Denpasar • Pemimpin Bank BRI Cabang Kandangan, Banjarmasin	• Retail Business Coordinator of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)/Bank BRI (2015) • Regional Manager of Bank BRI Yogyakarta (2014) • Head of Corporate Secretariat Division of Bank BRI Head Office • Head of Board Bureau, Corporate Secretariat Division of Bank BRI Head Office • Deputy Head of Corporate Secretariat Division of Bank BRI Head Office • Branch Manager of Bank BRI Surakarta • Section Head of Consumer Banking Marketing of Bank BRI • Branc Manager of Bank BRI Selong, Denpasar • Branch Manager of Bank BRI Kandangan, Banjarmasin
Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Training and Competence Development	• Kunjungan kerja ke Perguruan Tinggi di Belanda, Austria dan Skotlandia untuk penandatanganan MoU (29 Juni–5 Juli) • Menerima award "Brand of The Year" dari Brand Energy Power di London, Inggris (14 November) • *Workshop* Big Data Analysis (21 November) • Narasumber FGD "Tantangan SDM Sektor Ketenagalistrikan Periode 2019-2024" (27 November)	• Work visit to Universities in Netherlands, Austria and Scotland for MoU signing (June 29-July 5) • Received "Brand of The Year" Award from Brand Energy Power in London, United Kingdom (November 14) • Big Data Analysis Workshop (November 21) • Key speaker in FGD of "The Challenges of Electricity Sector Human Resources in 2019-2024" (November 27)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham	Does not have affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders

Syofvi Felienty Roekman

Direktur Perencanaan Korporat
Director of Corporate Planning

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	Indonesia
Usia Age	48 tahun	48 years old
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Surabaya, 17 Maret 1971	Surabaya, March 17, 1971
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Riwayat Pendidikan History of Education	• Master Teknik Elektro, Staffordshire University, Inggris (2004) • Sarjana Teknik Elektro, Universitas Indonesia (1994)	• Master of electrical Engineering, Staffordshire University, UK (2004) • Bachelor of Electrical Engineering, University of Indonesia (1994)
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat sebagai Direktur Perencanaan Korporat berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-138/MBU/07/2017 tanggal 24 Juli 2017	Appointed as Director of Corporate Planning based on SOE Ministerial Decree as GMS No. SK-138/MBU/07/2017 dated July 24, 2017
Riwayat Pekerjaan/Jabatan Work/Position History	• General Manager PLN Distribusi Banten (2016-2017) • Kepala Divisi Perencanaan Korporat (2015) • Memulai karir di PLN sejak tahun 1994	• General Manager of PLN Distribution of Banten (2016-2017) • Head of Corporate Planning Division (2015) • Started her career at PLN (1994)
Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Training and Competence Development	• Kuliah Umum Direksi oleh Wakil Menteri ESDM (30 Januari) • JP Morgan Global Emerging Market Corporate Conference dan benchmarking ke CAISO dan ASU Arizona, Amerika Serikat (24 Februari-3 Maret) • *Roadshow* GMTN 2019 ke Inggris dan Eropa (6-16 Juli) • *Assessment* Kompetensi BUMN (17 Juli) • *Sharing Sesion* Perencanaan Strategis & Pengelolaan AP bersama KEPCO (26 Juli) • *Workshop* Lesson Learned Blackout System by USAID (8 Oktober) • IJEF by DELRI "Developing Electricity Infrastructure Capacity" Bali (10 Oktober)	• BOD Public Lecture by Deputy Minister of Energy and Mineral Resources (January 30) • JP Morgan Global Emerging Market Corporate Conference and benchmarking to CAISO and ASU Arizona, USA (February 24-March 3) • 2019 GMTN Roadshow to the UK and Europe (July 6-16) • SOE Competency Assessment (July 17) • Sharing Session on Strategic Planning & Subsidiary Management with KEPCO (July 26) • Workshop Lesson Learned Blackout System by USAID (October 8) • IJEF by DELRI "Developing Electricity Infrastructure Capacity" Bali (October 10)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham	Does not have affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders

Haryanto WS

Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali
Regional Business Director of Java, Madura and Bali

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	Indonesia
Usia Age	60 tahun	60 years old
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Boyolali, 6 April 1959	Boyolali, April 6, 1959
Domisili Domicile	Bogor	Bogor
Riwayat Pendidikan History of Education	• Magister Manajemen, STIE IPWIJA (2003) • Sarjana Elektro, Institut Teknologi Bandung (1983)	• Master of Management, STIE IPWIJA (2003) • Bachelor of Electrical Engineering, Bandung Institute of Technology (1983)
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	• Diangkat sebagai Direktur berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-211/MBU/10/2015 tanggal 30 Oktober 2015 • Ditetapkan sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-138/MBU/07/2017 tanggal 24 Juli 2017 • Ditetapkan sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali berdasarkan SK-325/MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 dengan melanjutkan sisa masa jabatan sebelumnya	• Appointed as Director based on SOE Ministerial Decree as GMS No. SK-211/MBU/10/2015 dated October 30, 2015 • Defined as Regional Business Director of Western Part Java based on SOE Ministerial Decree as GMS No. SK-138/MBU/07/2017 dated 24 July 2017 • Defined as Regional Business Director of Java, Madura and Bali based on SOE Ministerial Decree as GMS No. SK-325/MBU/12/2019 dated December 23, 2019 by continuing the rest of the previous term.
Riwayat Pekerjaan/Jabatan Work/Position History	• General Manager PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang (2014-2015) • General Manager PLN Distribusi Jawa Timur (2011-2014) • Kepala Divisi Distribusi Jawa-Bali pada Direktorat Operasi Jawa Bali PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2010-2011) • General Manager PLN Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara & Sulawesi Barat (2010) • General Manager PLN Wilayah Kalimantan Barat (2008-2009) • Manajer Bidang Perencanaan PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang (2003-2008)	• General Manager of PLN Distribution of Greater Jakarta and Tangerang (2014-2015) • General Manager of PLN Distribution of East Java (2011-2014) • Division Head of Java-Bali Distribution at Directorate of Operation of Java-Bali, PT PLN (Persero) Head Office (2010-2011) • General Manager of PLN Region of South, Southeast & West Sulawesi (2010) • General Manager of PLN Region of West Kalimantan (2008-2009) • Manager of Planning of PLN Distribution of Greater Jakarta and Tangerang (2003-2008)
Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Training and Competence Development	• Asesmen Kompetensi BUMN (8 Januari) • Kuliah umum Direksi oleh Wakil Menteri ESDM (30 Januari) • Diskusi dan Studi Banding SKTT 150 kV di Italia (14-20 Juli) • Workshop Lesson Learned Blackout System by KEPCO, Jepang (September) • CIGRE, Jakarta (18 September) • Management Level Discussion and Shipment Turbine PLTGU Muara Karang di Jepang (25-28 September) • ICHVEPS, Sanur-Bali (1-4 Oktober) • Workshop Lesson Learned Blackout System by Usaid (8 Oktober)	• BUMN Competency Assessment (8 January) • Public lecture of the Directors by the Deputy Minister of ESDM (30 January) • Discussion and Comparative Study on HV Underground Cable 150 kV in Italy (July 14-20) • Lesson Learned Blackout System Workshop by KEPCO, Japan (September) • CIGRE, Jakarta (18 September) • Management Level Discussion and Shipment of Turbine to CCPP Muara Karang (September 25-28) • ICHVEPS, Sanur-Bali (1-4 Oktober) • Lesson Learned Blackout System Workshop by Usaid (8 October)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham	Does not have affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders

Profil Direksi
Board of Directors Profile

Syamsul Huda

Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Kalimantan
Regional Business Director of Sulawesi and Kalimantan

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	Indonesia
Usia Age	51 tahun	51 years old
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Nganjuk, 31 Mei 1968	Nganjuk, Mei 31, 1968
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Riwayat Pendidikan History of Education	• Magister Manajemen, Institut Teknologi Bandung (2006) • Sarjana Elektro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1993)	• Master of Management, Bandung Institute of Technology (2006) • Bachelor of Electrical Engineering, Sepuluh Nopember Institute of Technology (1993)
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	• Diangkat sebagai Direktur Bisnis Regional Sulawesi berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-138/MBU/07/2017 tanggal 24 Juli 2017 • Ditetapkan sebagai Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Kalimantan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-325/MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 dengan melanjutkan sisa masa jabatan sebelumnya	• Appointed as Regional Business Director of Sulawesi based on SOE Ministerial Decree as GMS No. SK-138// MBU/07/2017 dated July 24, 2017 • Defined as Regional Business Director of Sulawesi and Kalimantan based on SOE Ministerial Decree as GMS No. SK-325/MBU/12/2019 dated December 23, 2019 by continuing the rest of the previous term
Riwayat Pekerjaan/Jabatan Work/Position History	• General Manager PLN Distribusi Jakarta Raya (2015-2016) • General Manager PLN Distribusi Bali (2014-2015)	• General Manager of PLN Distribution of Greater Jakarta (2015-2016) • General Manager of PLN Distribution of Bali (2014-2015)
Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Training and Competence Development	• *Assessment* Kompetensi BUMN (8 Juli) • *Executive Briefing* KPKU oleh Quality Assurance BUMN (19 Juli) • *Opening Meeting* dan Wawancara Direksi oleh Asesor KPKU BUMN (22 Juli) • Kunjungan Bersama Komisi VII DPR RI ke ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) & MASDAR – Abu Dhabi (23 Juli) • *Sharing Session* pada Senior Leader dan Change Agent oleh Menteri ESDM (1 Agustus) • Collaboration Program with The Private Sector for Disseminating Japanese Technology for Energy Management System for Micro Grid in Indonesia – Jepang (14 September)	• SOE Competence Assessment (July 8) • KPKU Executive Briefing by SOE Quality Assurance (July 19) • Opening Meeting and Interview of Board of Directors by SOE KPKU Assessors (July 22) • Work Visit of Commission VII of Indonesian Parliament to ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) & MASDAR - Abu Dhabi (July 23) • Sharing Session on Senior Leaders and Change Agents by Minister of Energy and Mineral Resources (August 1) • Collaboration Program with The Private Sector For Disseminating Japanese Technology For Energy Management Systems For Micro Grid in Indonesia - Japan (September 14)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham	Does not have affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders

Ahmad Rofik

Direktur Bisnis Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara
Regional Business Director of Maluku, Papua, and Nusa Tenggara

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	Indonesia
Usia Age	52 tahun	52 year old
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Jakarta, 4 Desember 1967	Jakarta, December 4, 1967
Domisili Domicile	Tangerang	Tangerang
Riwayat Pendidikan History of Education	Sarjana Teknik Mesin, Universitas Indonesia (1992)	Bachelor of Mechanical Engineering, University of Indonesia (1992)
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	• Diangkat sebagai Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-138/MBU/07/2017 tanggal 24 Juli 2017 • Ditetapkan sebagai Direktur Bisnis Regional Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-325/MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 dengan melanjutkan sisa masa jabatan sebelumnya	• Appointed as Regional Business Director of Maluku, and Papua based on SOE Ministerial Decree as GMS No. SK-138//MBU/07/2017 dated July 24, 2017 • Defined as Regional Business Director of Maluku, Papua and Nusa Tenggara based on SOE Ministerial Decree as GMS No. SK-325/MBU/12/2019 dated December 23, 2019 by continuing the rest of the previous term
Riwayat Pekerjaan/Jabatan Work/Position History	• Kepala Divisi Pengadaan Strategis PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2015-2017) • General Manager PLN Unit Induk Pembangunan I (2014-2015)	• Division Head of Strategic Procurement of PT PLN (Persero) Head Office (2015-2017) • General Manager of PLN Parent Unit of Development I (2014-2015)
Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Training and Competence Development	• *Assessment* Kompetensi BUMN (8 Juli) • *Executive Exchange* dan *Technical Meeting* terkait Teknologi Circulating Fluidized Bed (CFB) Boiler di Korea Selatan (18-20 Juni)	• SOE Competence Assessment (July 8) • Executive Exchange dan Technical Meeting terkait Teknologi Circulating Fluidized Bed (CFB) Boiler in South Korea (June 18-20)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham	Does not have affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders

Profil Direksi
Board of Directors Profile

Wiluyo Kusdwiharto

Direktur Bisnis Regional Sumatera
Regional Business Director of Sumatra

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	Indonesia
Usia Age	48 tahun	48 years old
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Jakarta, 25 Juli 1971	Jakarta, Juli 25, 1971
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Riwayat Pendidikan History of Education	• Magister Manajemen, Universiti Tenaga Nasional - Malaysia (2005) • Sarjana Teknik Mesin, Universitas Indonesia (1992)	• Master of Management, Universiti Tenaga Nasional - Malaysia (2005 • Bachelor of Mechanical Engineering, University of Indonesia (1992)
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat sebagai Direktur Bisnis Regional Sumatera berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-138/MBU/07/2017 tanggal 24 Juli 2017	Appointed as Regional Business Director of Sumatra based on SOE Ministrial Decree as GMS No. SK-138/MBU/07/2017 dated July 24, 2017
Riwayat Pekerjaan/Jabatan Work/Position History	• Kepala Divisi Konstruksi PLN Regional Sumatera (2015-2017) • General Manager PLN Unit Induk Pembangunan VIII (2013-2015) • Mulai berkarir di PLN (1995)	• Division Head of Construction, PLN Regional of Sumatra (2015-2017) • General Manager of PLN Parent Unit of Development VIII (2013-2015) • Started his career at PLN (1995)
Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Training and Competence Development	• Narasumber perihal "Pasokan Listrik dan Sumber Bioenergi Dalam Mendorong Percepatan Pengembangan Listrik" Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (30 Januari) • Invitation of Nuclear Energy Public Understanding Course and Hydrogen Energy Understanding Course di Jepang (24-29 Maret) • Penandatangan Nota Kesepahaman antara Tenaga Nasional BHD dan PLN (September 25-26)	• Keynote Speaker on "Electricity Supply and Bioenergy Sources in Encouraging Accelerated Electricity Development" at Coordinating Ministry for Maritime Affairs (January 30) • Invitation of Nuclear Energy Public Understanding Course and Hydrogen Energy Understanding Course in Japan (March 24-29) • MoU Agreement Signing Ceremony Between Tenaga Nasional BHD and PT PLN (September 25-26)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham	Does not have affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders

5.5m
PLN

Pengelolaan Human Capital

Human Capital Management

DEMOGRAFI PEGAWAI

Pada tahun 2019, jumlah pegawai PLN berjumlah 54.129 orang yang terdiri dari 45.061 pegawai *holding* dan 9.068 pegawai anak perusahaan. Jumlah pegawai (*holding*) tersebut terdiri dari 36.559 pegawai laki-laki (81%) dan 8.502 pegawai perempuan (19%). Perusahaan menerapkan prinsip kesetaraan gender sebagai bagian dari kebijakan non-diskriminasi. Komposisi pegawai laki-laki yang lebih banyak daripada pegawai perempuan semata-mata karena mayoritas bidang pekerjaan di Perusahaan adalah berupa pelayanan yang berlangsung di lapangan seperti: pengoperasian mesin pembangkit listrik, pemeliharaan jaringan transmisi distribusi listrik serta pelayanan pelanggan yang berlangsung 24 jam sehari yang menyebabkan kebutuhan pegawai laki-laki menjadi lebih dominan.

EMPLOYEE DEMOGRAPHICS

At the end of 2019, PLN had 54,129 employees, consisting of 45,061 employees of the holding company and 9,068 employees of subsidiaries. Holding company employees consisted of 36,559 male employees (81%) and 8,502 female employees (19%). The Company applies the principle of gender equality as part of its non-discrimination policy. The composition of male employees is more than female employees solely because the majority of jobs in the Company are in fields that require male employees, such as power plant operations, maintenance of power distribution transmission lines and 24-hour customer service.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Level Organisasi
Employees Based on Organizational Level
(Orang|People)

Jenjang Jabatan	2017	2018	2019	Position Level
Fungsional	34.075	30.909	29.374	Functional
Supervisori Dasar	6.776	8.635	9.250	Junior Supervisor
Supervisori Atas	3.213	3.795	3.984	Senior Supervisor
Manajemen Dasar	1.458	1.592	1.808	Junior Management
Manajemen Menengah	430	455	515	Middle Management
Manajemen Atas	110	111	130	Senior Management
JUMLAH	**46.062**	**45.497**	**45.061**	**TOTAL**

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Employees Based on Education Level
(Orang|People)

Pendidikan	2017	2018	2019	Education
≤ D2	22.216	21.012	18.977	≤ Diploma 2
D3	9.084	9.224	9.567	Diploma 3
S1	13.660	14.100	15.258	Bachelor
S2	1.096	1.153	1.248	Master
S3	6	8	11	Doctoral
JUMLAH	**46.062**	**45.497**	**45.061**	**TOTAL**

Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian
Employees Based on Employment Status
(Orang|People)

Status	2017	2018	2019	Status
Pegawai Tetap	46.046	46.496	45.057	Permanent Employee
Pegawai Kontrak	16	1	4	Non-Permanent Employee
JUMLAH	**46.062**	**45.497**	**45.061**	**TOTAL**

Pada dasarnya PLN tidak mempekerjakan pegawai dengan status kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Seluruh pegawai PLN berstatus pegawai tetap dengan hak-hak ketenagakerjaan sesuai peraturan yang berlaku. Hanya terdapat 4 orang di level manajemen puncak dengan status bukan pegawai tetap PLN/ kontrak. Sementara untuk pekerjaan pendukung seperti: petugas baca meter, petugas contact center, petugas layanan teknik, satpam, cleaning services dan lainnya, PLN menerapkan sistem pemborongan pekerjaan melalui perjanjian kontrak dengan perusahaan lain sebagai mitra kerja, sehingga para pegawai yang mengerjakan pekerjaan pendukung memiliki hubungan kerja dengan perusahaan mitra tersebut.

Principally, PLN does not hire contract employes with an Employee Agreement for a Specific Period (PKWT). All PLN employees are permanent employees with labor rights in accordance with the applicable regulations. There are only 4 people at the senior management level who are not permanent employees. As for support positions, such as meter reading officers, contact center officers, technical service officers, security guards, cleaning services and others, PLN uses an outsourcing system so that they are not considered to be PLN employees, but employees of outsourcing companies which are classified as Company vendors.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender
Employees Based on Gender
(Orang|People)

Gender	2017	2018	2019	Gender
Laki-laki	37.736	37.225	36.559	Male
Perempuan	8.326	8.272	8.502	Female
JUMLAH	**46.062**	**45.497**	**45.061**	**TOTAL**

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia
Employees Based on Age Group
(Orang|People)

Umur (Tahun)	2017	2018	2019	Age (old)
≤ 25	13.802	12.739	11.132	≤ 25
26 - 30	9.973	11.258	12.826	26 - 30
31 - 35	5.479	6.210	7.268	31 - 35
36 - 40	1.636	2.392	2.912	36 - 40
41 - 45	2.158	1.546	1.188	41 - 45
46 - 50	4.528	4.411	4.042	46 - 50
> 51	8.486	6.941	5.693	> 51
JUMLAH	**46.062**	**45.497**	**45.061**	**TOTAL**

Jumlah Pegawai Berdasarkan Penugasan
Employees Based on Status Assignment
(Orang|People)

Status Penugasan	2017	2018	2019	Assignment Status
Unit Bisnis PLN	43.490	42.377	41.753	PLN Business Unit
PLN Kantor Pusat	2.572	3.120	3.308	PLN Head Office
JUMLAH	**46.062**	**45.497**	**45.061**	**TOTAL**

Jumlah Pegawai Holding dan Anak Perusahaan
Employees in Holding and Subsidiaries
(Orang|People)

Unit Bisnis	2017	2018	2019	Business Unit
PLN (Holding)	46.062	45.497	45.061	PLN (Holding)
Anak Perusahaan	8.545	8.627	9.068	Subsidiaries
JUMLAH	**54.607**	**54.124**	**54.129**	**TOTAL**

Jumlah Pegawai Anak Perusahaan
Employees in Subsidiaries
(Orang|People)

Anak Perusahaan Subsidiary	**Jumlah Pegawai** Number of Employee
PT Indonesian Power	4.308
PT Pembangkitan Jawa Bali	3.176
PT Indonesian Comnet Plus	699
PT PLN Batubara	67
PT PLN Gas dan Geothermal	5
PT PLN Enjiniring	234
PT PLN Tarakan	41
PT PLN Batam	427
PT BAG	37
PT Haleyora Power	74
Jumlah Total	**9.068**

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Keberhasilan PLN untuk menjadi perusahaan dengan kualitas kelas dunia tidak hanya ditentukan oleh banyaknya *tangible asset* yang dimiliki, tetapi juga dipengaruhi oleh kompetensi *human capital* yang dimiliki sebagai salah satu *intangible asset* yang berharga. Semakin tinggi kualitas dan tingkat pengetahuan *human capital* yang dapat ditransformasikan menjadi pengetahuan organisasi, maka akan semakin mudah bagi PLN untuk menghasilkan inovasi dan keunggulan kompetitif di industrinya.

PLN mengembangkan sistem pembelajaran berjenjang sesuai kebutuhan organisasi, dimana jenis pelatihan terbagi atas beberapa jenjang mulai dari pelatihan khusus operasional hingga pelatihan manajerial. Program pendidikan dan pelatihan meliputi seminar dan kursus yang dilaksanakan baik di dalam dan luar negeri, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Adapun jenis pendidikan dan pelatihan meliputi:

DIKLAT PRAJABATAN

Mempersiapkan kompetensi pesertanya agar sesuai dengan kebutuhan kompetensi jabatan di Perusahaan, sehingga mampu menjadi pegawai yang siap bekerja.

DIKLAT PROFESI

Memenuhi kompetensi bidang yang dipersyaratkan pada setiap jabatan dan profesi di Perusahaan.

COMPETENCE DEVELOPMENT

The success of PLN in being a world class corporation does not only depend on its tangible assets, but also on its human capital competence becoming a valuable intangible asset. The higher the quality and level of knowledge of the human capital that can be transformed into organizational knowledge, the easier it will be for the Company to generate innovations and value added to beat the competition in its particular industry.

PLN develops a tiered learning system according to the needs of the organization, where the type of training is divided into several levels ranging from specialized operational training to managerial training. The education and training program includes seminars and courses held both at home and abroad, which aim to improve employee competency. The types of education and training include:

PRE-POSTING TRAINING

To prepare the competency of participants to fit the competency needs of the respective position in the Company, so that they can become ready-to-work employees.

PROFESSION TRAINING

To meet the required field competencies in every position and profession in the Company.

DIKLAT PENJENJANGAN
Memenuhi kompetensi peran, termasuk juga kompetensi utama dan kompetensi bidang yang dipersyaratkan pada setiap jenjang jabatan structural dan fungsional di Perusahaan.

TIERED TRAINING
To meet role competencies, including key competencies and field competencies required at every successive tier of structural and functional position in the Company.

DIKLAT PENUNJANG
Memenuhi pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan Perusahaan, dimana program tersebut belum menjadi Program Pembelajaran Profesi dan Sertifikasi maupun Program Pembelajaran Kepemimpinan.

SUPPORTING TRAINING
To meet education and training needed by the Company, where the program has not yet become a Profession and Certification Learning Program or Leadership Learning Program.

DIKLAT PURNABAKTI
Membangun kompetensi pegawai yang terkait dengan sikap, mental, dan perilaku untuk meniti karier selanjutnya setelah pensiun.

RETIREMENT TRAINING
To build employee competencies related to attitudes, mentality, and behavior to pursue further careers after retirement.

DIKLAT STRATEGIK
Meningkatkan kinerja unit/korporat dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

STRATEGIC TRAINING
To improve unit/corporate performance in short and long term.

Pengembangan Kompetensi Pegawai Tahun 2019

Employee Competency Development in 2019

Jenis Diklat Training Type	**Jumlah Judul Diklat** Number of Training Modul	**Jumlah Pelaksanaan Per Judul Diklat** Number of Training per Modul Diklat	**Jumlah Peserta Berdasarkan Level Jabatan** Number of Participant based on Position					
			Fungsional Functional	**Supervisor Atas** Senior Supervisor	**Supervisor Dasar** Junior Supervisor	**Manajemen Dasar** Junior Management	**Manajemen Menengah** Middle Management	**Manajemen Atas** Senior Management
Diklat Prajabatan Pre-Posting Training	48	397	2.305					
Diklat Profesi Profession Training	595	3.475	37.450	7.703	13.814	4.747	1.925	221
Diklat Penjenjangan Tiered Training	78	1.434	11.138	6.848	9.119	5.539	1.146	73
Diklat Penunjang Supporting Training	232	740	6.646	2.579	1.673	1.739	635	284
Diklat Purnabakti Retirement Training	2	128	901	77	72	49	22	5
Diklat Strategik Strategic Training	79	137	1.466	436	788	290	125	68
Jumlah Total	**1.034**	**6.311**	**59.906**	**17.643**	**25.466**	**12.364**	**3.853**	**651**

Lebih lanjut, Perusahaan memiliki program pengembangan kepemimpinan untuk kader pimpinan baru yaitu Program *Executive Education*. Pada tahun 2019, Program diikuti oleh 1.010 pegawai sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ada. Terdiri atas EE I sebanyak 144 pegawai, EE II sebanyak 221 pegawai dan EE III sebanyak 645 pegawai.

Sepanjang tahun 2019, biaya yang dikeluarkan Perusahaan untuk program pengembangan kompetensi adalah sebesar 756,21 miliar.

Furthermore, the Company has a leadership development program for new leadership cadres namely the Executive Education Program. In 2019, the Program was attended by 1,010 employees according to the needs of existing positions. Consisting of EE I with 144 employees, EE II with 221 employees and EE III with 645 employees.

Throughout 2019, the costs incurred by the Company for the competency development program are Rp 756.21 billion.

Sistem Manajemen Kinerja Pegawai (SIMKP)

Employee Performance Management System (SIMKP)

PLN menerapkan sistem manajemen kinerja yang diatur melalui Peraturan Direksi Nomor: 045.P/DIR/2017 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai (SIMKP). SIMKP merupakan sistem manajemen strategis dan terpadu untuk menyelaraskan pencapaian kinerja pegawai terhadap sasaran kinerja korporat melalui optimalisasi SDM.

SIMKP menjadi pedoman untuk mengevaluasi pencapaian kinerja pegawai secara obyektif, transparan, dan terukur. Pada tahun 2019, sistem dan tampilan dari aplikasi SIMKP telah disesuaikan agar menjadi lebih informatif dan menjadi sistem peringatan dini dalam mengawal pencapaian kinerja individu dan Perusahaan secara umum.

PLN implements a performance management system stipulated in Regulation of Board of Directors No: 045.P/DIR/2017 concerning Employee Performance Management System (SIMKP). SIMKP is a strategic and integrated management system to align employee performance achievements with corporate performance goals through HC optimization.

SIMKP is a guideline for employee performance evaluation in an objective, transparent and measurable manner. In 2019, the system and display of SIMKP application was adjusted to become more informative and to serve as an early warning system to ensure performance achievement of individuals and of the Company in general.

SIMKP bertujuan untuk meningkatkan target kinerja PLN melalui peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai, serta mewujudkan pengukuran kinerja pegawai yang berkeadilan untuk membina budaya pembelajar dan prestasi (*high performance culture*) serta memotivasi pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan kinerjanya.

SIMKP aims to increase PLN performance targets by improving employee competence and performance., as well as realizing fair measurement of employee performance in order to foster a high performance culture and to motivate employees to improve their competence and performance.

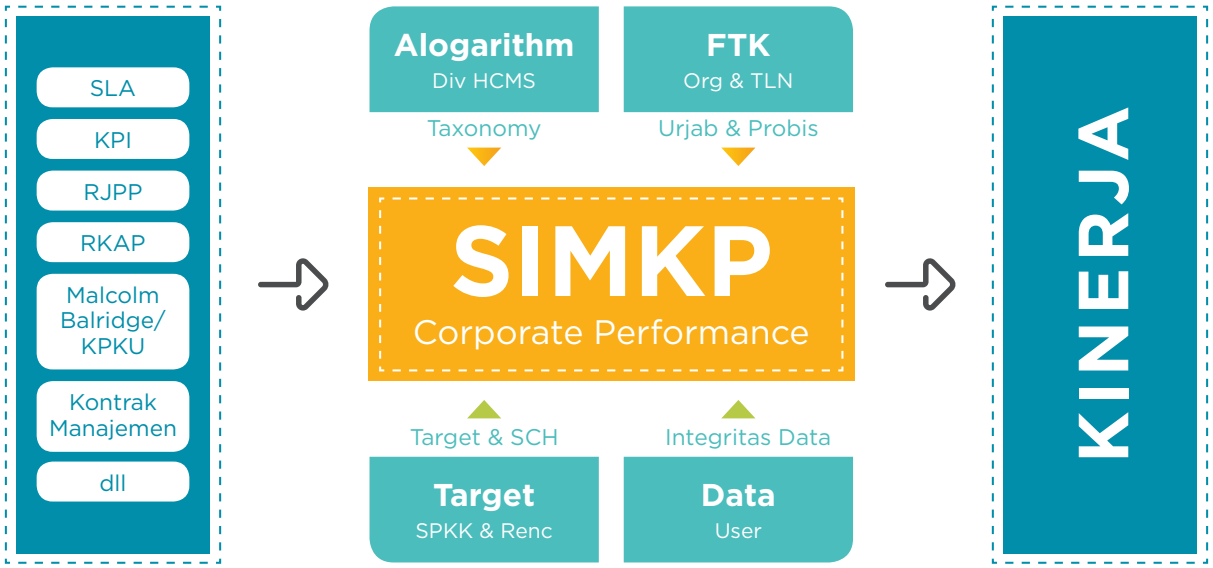

7 Unit Pilot Project
7 Unit Pilot Project
Disjaya, Pusdiklat, Wil. Sumbarm Wil. Suselrabar, UIP XIII, P3BS, Kit. Sumbangsel
Disjaya, Pusdiklat, Wil. Sumbarm Wil. Suselrabar, UIP XIII, P3BS, Kit Sumbangsel

Inisial di 7 Pilot Project
Initials on 7 Pilot Projects
Pemetaan KPI, Standardisasi KPI Urjab, (Sem. 2 sudah masuk ke SIMKP minimal untuk struktural sampai layer 3)
KPI Mapping, Urjab KPI Standardization, (Sem. 2 has entered SIMKP at a minimum for structural up to layer 3)

Roll Out #1 di Seluruh Unit
Roll Out # 1 in All Units
- Struktural: Kualitas & Kuantitas KPI
- Fungsional: Kuantitas KPI
- Dashboard SIMKP
- Structural: Quality & Quantity of KPIs
- Functional: Quantity of KPI
- SIMKP dashboard

Roll Out #2 di Seluruh Unit
Roll Out # 2 in All Units
- Struktural: Kualitas & Kuantitas KPI
- Inisiasi Aplikasi Blue Book PLN & Performance Dashboard
- Structural: Quality & Quantity of KPIs
- Initiation of PLN's Blue Book Application & Performance Dashboard

Strategi Perusahaan
Corporate Strategy

Vision - Mission

Corp. Strategic Objective (RUPTL & RJP)

Corp. Strategy (KPI & RKAP/ Finance)

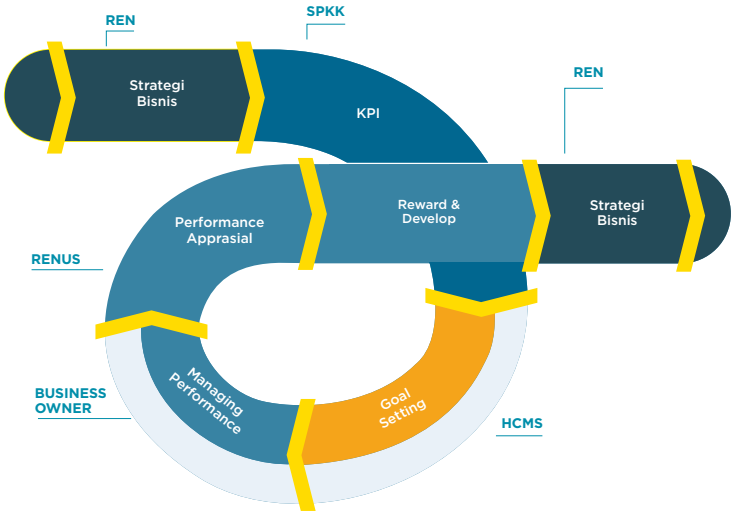

Value Creation

Culture

Performance

Perusahaan
Company

Karyawan
Employee

Engagement

Productivity

Kesejahteraan Pegawai

Employee Welfare

REMUNERASI

PLN menerapkan sistem remunerasi berbasis kinerja. Dengan sistem tersebut, komposisi penghasilan total tahunan berdasarkan performansi individu pegawai lebih besar dibandingkan dengan penghasilan tetap yang pasti didapatkan oleh pegawai tersebut (*fix annual cash*).

Secara bertahap, sejak tahun 2014 komposisi penghasilan berbasis kinerja dan bonus (P3+Bonus) semakin besar dan komponen penghasilan tetap berdasarkan kompetensi (*pay for person*/P1) dan tunjangan-tunjangan (*pay for position*/P2) semakin mengecil. Pada tahun 2019, komposisi penghasilan P3+Bonus telah mencapai 50% dari jumlah penghasilan tahunan yang diterima pegawai. Perbandingan komposisi komponen remunerasi sejak tahun 2017 hingga 2019 jika dilihat dari penganggaran biaya kepegawaian ditunjukkan pada diagram berikut:

REMUNERATION

PLN applies a performance-based remuneration system. With this system, composition of annual total income based on individual employee performance is greater than fixed annual payment.

Gradually, since 2014, the composition of income-based performance and bonuses (P3+Bonus) is increasing, with the competence-based fixed income component (pay for person/P1) and allowances (pay for position/P2) decreasing. In 2019, the composition of P3+Bonus income reached 50% of total annual income received by the employees. Comparison of the composition of remuneration components from 2017 to 2019 in terms of personnel expenses budget is shown in the following diagram:

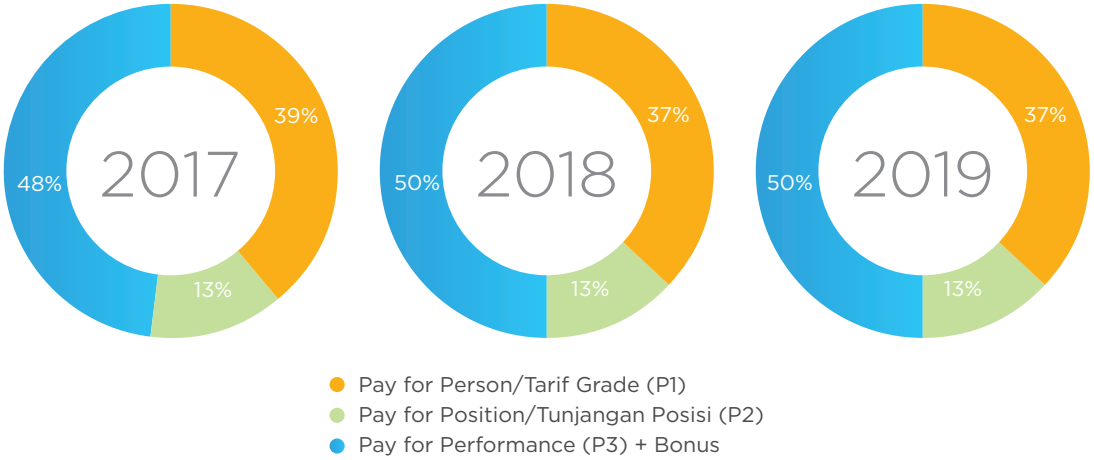

Komponen Remunerasi Lainnya

Selain komponen P1, P2 dan P3, pegawai PLN mendapatkan remunerasi dan benefit lainnya seperti: tunjangan cuti, tunjangan hari raya, fasilitas kesehatan PLN dan BPJS Kesehatan serta kepesertaan dalam dana pensiun PLN dan Jaminan Ketenagakerjaan Nasional (JKN).

KEPESERTAAN PADA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Per 31 Desember 2019, Perusahaan telah mendaftarkan 44.124 pegawai (termasuk Direksi dan Dewan Komisaris) pada program JKN KIS BPJS Kesehatan. Iuran Pemberi Kerja yang dibayarkan PLN untuk program BPJS Kesehatan pada tahun 2019 sebesar Rp16.066.411.851. Sejak April 2018, Direksi dan Dewan Komisaris Persusahaan telah terdaftar pada program BPJS Kesehatan.

KEPESERTAAN PADA PROGRAM JAMINAN KETENAGAKERJAAN

Perusahaan mendaftarkan seluruh pegawai pada program Jaminan Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Sejak Maret 2018, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan telah terdaftar pada program jaminan ketenagakerjaan dengan sertifikat kepesertaan Nomor 180000000407008.

Other Remuneration Components

In addition to components P1, P2 and P3, PLN employees receive remuneration and other benefits such as: leave benefits, holiday allowances, PLN health facility, BPJS Health and also participation in PLN pension funds and JKN.

PARTICIPATION IN NATIONAL HEALTH INSURANCE PROGRAM

As of December 31, 2019, the Company had registered 44,124 employees (including Board of Directors and Board of Commissioners) with the JKN KIS program of BPJS Kesehatan. The Employer contribution paid by PLN for BPJS Kesehatan program in 2019 was Rp16,066,411,851. Since April 2018, the Board of Directors and Board of Commissioners of PLN have been registered with the BPJS Kesehatan program.

PARTICIPATION IN EMPLOYMENT INSURANCE PROGRAM

The Company has registered all employees with the BPJS Ketenagakerjaan Employment Insurance program which includes Occupational Accident Insurance (JKK), Life Insurance (JKM), Old Age Insurance (JHT) and Pension Insurance (JP). In March 2018, all members of the Board of Directors and Board of Commissioners were also registered with the employment insurance program under membership certificate No. 180000000407008.

Hubungan Industrial

Industrial Relations

Perusahaan berkomitmen untuk membangun hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan menghargai hak-hak pegawai untuk berorganisasi dan membentuk serikat pekerja. Hubungan industrial di PLN dilaksanakan melalui sarana Serikat Pekerja, Berjanjian Kerja Bersama (PKB), Lembaga Kerja Sama Bipartit, Pembinaan Hubungan Industrial dan Penegakan Peraturan Disiplin Pegawai.

SERIKAT PEKERJA

Pada tahun 2019, Serikat Pekerja (SP) PLN telah menyelesaikan permasalahan dualisme kepengurusan. Kemudian, di tahun 2019 juga telah berdiri serikat pekerja baru yaitu Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia. Dengan demikian, hingga saat ini terdapat 4 serikat pekerja di PLN yaitu:

a) Serikat Pekerja (SP) PLN yang terdaftar dengan Bukti Pencatatan Sudinakertrans Jakarta Selatan Nomor: 22/V/IV/2001 tanggal 6 April 2001. Jumlah anggotanya adalah sebanyak 24.076 anggota.
b) Serikat Pegawai Perusahaan Listrik Negara yang terdaftar dengan Bukti Pencatatan Sudinakertrans Kota Palembang Nomor: 285/Disnaker/2015 tanggal 13 Agustus 2015. Jumlah anggotanya adalah sebanyak 1.445 anggota.
c) Serikat LASKAR PLN yang terdaftar dengan Bukti Pencatatan Sudinakertrans Jakarta Selatan Nomor: 762/SP/JS/II/2016 tanggal 9 Februari 2016. Jumlah anggotanya adalah sebanyak 4.909 anggota.
d) Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia yang terdaftar dengan Bukti Pencatatan Suku Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang Nomor: 330/Disnaker/2019 tanggal 9 Januari 2019. Jumlah anggotanya adalah sebanyak 555 anggota.

Sifat keanggotaan pegawai dalam serikat-serikat pekerja ini adalah sukarela. Sampai dengan tahun 2019 jumlah pegawai PLN yang tergabung baik sebagai anggota maupun pengurus serikat pekerja adalah sebanyak 30.985 Pegawai atau sekitar 69 % (enam puluh sembilan persen) dari pegawai.

The Company is committed to building harmonious, dynamic and equitable industrial relations through industrial relations complient with the applicable labor laws and regulations. The Company respects the rights of employees to organize and to form trade unions. Industrial relations in PLN is implemented through the Labor Union, Collective Labor Agreements (PKB), Bipartite Cooperation Institution, Fostering Industrial Relations and Enforcement of Employee Discipline Regulations.

LABOR UNION

In 2019, the PLN Labor Union (SP) resolved the dualism management problem. Then, in 2019, a new labor union was established, namely Labor Union of PT PLN (Persero) Indonesia. As a result, there are currently 4 unions in PLN, namely:

a) Serikat Pekerja (SP)-PLN which was registered with South Jakarta Sudinakertrans Registration No. 22/V/IV/2001, dated April 6, 2001 with 24,076 members.

b) Serikat Pegawai Perusahaan Listrik Negara which was registered with Palembang Sudinakertrans Registration No. 285/Disnaker/2015, dated August 13, 2015 with 1,445 members.

c) LASKAR PLN which was registered with South Jakarta Sudinakertrans Registration No. 762/SP/JS/II/2016, dated February 9, 2016 with 4,909 members.

d) Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia which was registered with Palembang Sudinakertrans Registration No. 330/Disnaker/2019, dated January 9, 2019 with 555 members.

Membership in these unions is voluntary. Up to 2019, the number of PLN employees, who are both union members and management, totaled 30,985 employees, or about 69% of employees.

PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)

Sehubungan dengan rencana perundingan pembaruan PKB, manajemen telah membentuk Tim Penyusun Draft PKB sesuai Keputusan Direksi (KEPDIR) Nomor: 0057.K/DIR/2019 tanggal 18 Juni 2019 dan diperpanjang masa kerjanya melalui KEPDIR Nomor: 0094.K/DIR/2019 tanggal 8 Agustus 2019. Selanjutnya, Tim Perunding Pembaruan PKB dari unsur manajemen telah dibentuk berdasarkan KEPDIR Nomor: 0269.K/DIR/2019 tanggal 5 November 2019.

Verifikasi terhadap 4 serikat pekerja yang ada di PLN telah dilakukan namun sampai dengan saat ini serikat pekerja belum menyampaikan susunan tim perunding.

LEMBAGA KERJA SAMA BIPARTIT

Lembaga Kerja Sama Bipartit (LKS Bipartit) merupakan forum komunikasi dan konsultasi antara manajemen dan perwakilan pegawai/serikat pekerja. Melalui LKS Bipartit, para pihak dapat mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan manajemen, mencari solusi atas masalah ketenagakerjaan yang mungkin dan/atau telah terjadi serta mendapatkan masukan perbaikan untuk meminimalisir potensi terjadinya masalah ketenagakerjaan. Perusahaan menetapkan keberadaan LKS Bipartit di seluruh unit sebagai KPI dalam Organization Capital Readiness ("OCR") tahun 2019, sehingga seluruh unit PLN dan anak perusahaan telah memiliki LKS Bipartit.

PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, Perusahaan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

a) Menetapkan pembinaan hubungan industrial di seluruh unit PLN sebagai salah satu KPI dalam target kinerja OCR tahun 2019. Tujuannya adalah untuk mengedukasi pegawai di seluruh unit agar memiliki pemahaman terkait ketentuan hubungan industrial dan dapat mengimplementasikan ketentuan kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.
b) Memberikan pendidikan dan pelatihan hubungan industrial di lingkungan PLN untuk mempercepat penyelarasan persepsi terhadap pengetahuan tentang hubungan industrial.

COLLECTIVE LABOR AGREEMENT (PKB)

Pertaining to the PKB renewal negotiation plan, management has formed the PKB Drafting Team in accordance with Decision of Board of Directors (KEPDIR) No. 0057.K/DIR/2019 dated June 18, 2019 and extended its term of service with KEPDIR No. 0094.K/DIR/2019 dated August 8, 2019. Furthermore, the PKB Renewal Team to represent management was formed based on KEPDIR No. 0269.K/DIR/2019, dated November 5, 2019.

Verification of the 4 unions in PLN has been carried out. However, to date, the unions have not submitted their negotiating team structures.

BIPARTITE COOPERATION AGENCY

The Bipartite Cooperation Agency (LKS Bipartite) is a forum for communication and consultation between management and employee representatives and the Labor Union. Through LKS Bipartite, all parties can communicate on management policies, find alternative solutions to potential and/or existing problems, as well as gather input for improvements to minimize potential industrial relations issues. The Company set LKS Bipartite in all PLN Units as KPI in Organization Capital Readiness (OCR) in 2019. Hence, all PLN units and subsidiaries already practise Bipartite LKS.

INDUSTRIAL RELATIONS ADVISORY

To create harmonious, dynamic and fair industrial relations, the Company has conducted the following activities:

a) Determination of industrial relations advisory in all PLN units as a KPI in performance targets of Organization Capital Readiness (OCR) in 2019. The objective was to educate employees in all units to have an understanding on industrial relations and to be able to implement industrial relations according to the applicable laws and regulations.
b) Education and training in industrial relations in PLN to accelerate alignment of perception of industrial relations.

c) Melakukan studi banding (*benchmarking*) ke beberapa perusahaan untuk mendapatkan *best practices* pengelolaan hubungan industrial.
d) Melakukan supervisi terhadap unit-unit PLN baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menyikapi kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh manajemen. Supervisi yang dilakukan pada tahun 2019 berkaitan dengan pembinaan hubungan industrial, pelanggaran disiplin pegawai khususnya tentang SPPD, dan lain-lain.

c) Benchmarking with several companies to observe the best practices in industrial relations management.
d) Supervision of PLN units, directly and indirectly, to address policies issued by management. Supervision in 2019 was related to industrial relations development, and employee discipline violations regarding SPPD, and so forth.

PENEGAKAN PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI

Dalam rangka penegakan disiplin pegawai di lingkungan PLN, pada tahun 2019 Perusahaan telah menjatuhkan sanksi disiplin atas berbagai jenis pelanggaran sesuai dengan peraturan disiplin pegawai yang berlaku. Sebanyak 120 pegawai menerima sanksi dari kategori ringan hingga berat.

EMPLOYEE DISCIPLINE ENFORCEMENT

In enforcing employee discipline within PLN, in 2019, the Company imposed disciplinary sanctions for various types of violations in accordance with the applicable employee discipline regulations. Sanctions were imposed on 120 employees, ranging from mild to severe.

Jumlah Sanksi Disiplin Tahun 2019
Number of Disciplinary Sanctions in 2019
(Orang People)

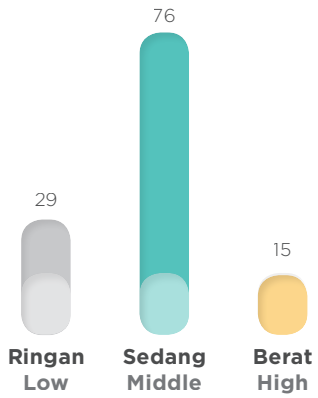

Survei Keterikatan Pegawai/Employee Engagement Survey (EES)

Employee Engagement Survey (EES)

Setiap tahun PLN melakukan pengukuran indeks keterikatan pegawai (*employee engagement index*) melalui Employee Engagement Survey (EES). Sejak tahun 2014 hingga 2018, pengukuran employee engagement dilakukan dengan menggunakan Teori Demerouti, yaitu teori yang menyimpulkan bahwa ketegangan di tempat kerja akan timbul apabila tuntutan pekerjaan (*job demand*) lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki pegawai untuk menangani tugas-tugasnya (*job resource*). Sumber daya pegawai dapat berupa kemampuan, keterampilan, kesempatan untuk mengambil keputusan yang dimiliki para pegawai untuk dapat menangani pekerjaan dengan baik, termasuk dukungan atau bantuan dari rekan kerja atau atasan.

Berbeda dengan EES sebelumnya, EES tahun 2019 dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Survei kuantitatif dengan responden sebanyak 28.614 pegawai dengan data valid sebanyak 28.280 pegawai.
2. Survei kualitatif (FGD) dengan sampel FGD dipilih dengan menggunakan teknik *Probability Random Sampling*. Total responden sebanyak 227 pegawai dan dilaksanakan sebanyak 10 sesi di 3 lokasi yakni Jakarta, Medan dan PLN Pusat.

Hasil EES 2019 memperoleh skor Indeks keterikatan pegawai sebesar 84, naik 5 poin dari EES tahun 2018 sebesar 79.

PLN conducts its employee engagement index measurement every year through the Employee Engagement Survey (EES). From 2014 to 2018, employee engagement measurement was conducted using the Demerouti Theory, which concludes that tension at work will arise if job demands are greater than the employees' resources to be able to conduct their duties. Employee resources can come in the form of employees' capabilities, skills, and opportunities to make decisions to be able to handle their jobs PROPERly, including support or assistance from colleagues or supervisors.

Different from the previous EES, EES in 2019 was conducted in the following two ways:

1. Quantitative survey of 28,614 employees with valid data of 28,280 employees.
2. Qualitative survey (FGD) with FGD samples selected using Probability Random Sampling technique. Total respondents were 227 employees, carried out over 10 sessions in 3 locations namely Jakarta, Medan and PLN Head Office.

2019 EES results achieved an employee engagement index score of 84, up 5 points from the 2018 EES of 79.

Dimensi Dimension	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Employee Engagement Index	78	80	79	79	84

Berdasarkan skor masing-masing dimensi, dimensi *brand reputation* memiliki indeks tertinggi (87,57). Sedangkan dimensi terendah adalah *work condition* (80,97). Dimensi *meaningful work* yang dikembangkan dari dimensi *engagement outcome* memiliki indeks yang sama dengan indeks keterikatan pegawai secara keseluruhan.

Based on the score of each dimension, the brand reputation dimension achieved the highest index (87.57). While the lowest dimension was work conditions (80.97). The meaningful work dimension, developed from the engagement outcome dimension, achieved the same index as overall employee engagement.

Entitas Anak

Subsidiaries

Entitas Anak Subsidiaries	**Domisili** Domicile	**Jenis Usaha** Business Types	**Persentase Kepemilikan (%)** Ownership (%)	**Status** Operasi
Kepemilikan Langsung | Direct Ownership				
PT Indonesia Power	Jl. Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta Selatan 12950	Pembangkitan Tenaga Listrik | Power Generation	99,99%	Beroperasi Operating
PT Pembangkitan Jawa Bali	Jl. Ketintang Baru No. 11, Surabaya 60231	Pembangkitan Tenaga Listrik | Power Generation	99,99%	Beroperasi Operating
PT Indonesia Comnets Plus	Kawasan PLN Cawang Jl. Mayjend Sutoyo No. 1, Cililitan Jakarta Timur 13640	Jasa Penyedia Jaringan Telekomunikasi | Telecommunication Provider	99,99%	Beroperasi Operating
PT Pelayanan Listrik Nasional Batam	Jl. Engku Putri No. 3, Batam Centre Batam 29432	Penyediaan Tenaga Listrik | Power Provider	99,99%	Beroperasi Operating
PT Prima Layanan Nasional Enjiniring	Jl. Ciputat Raya No. 123 Pondok Pinang, Kebayoran Lama Jakarta 12310	Jasa Enjiniring, Pengadaan dan Konstruksi | Engineering, Procurement and Construction	99,90%	Beroperasi Operating
PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan	Jl. RE. Martadinata RT. 52 No. 35, Balikpapan Kalimantan Timur 76121	Operation & Maintenance (O&M), Layanan Teknik di WIT dan Industri | Operation & Maintenance (O&M), Engineering Services in Eastern Indonesia and Industry	99,97%	Beroperasi Operating
PT PLN Batubara	Jl. Warung Buncit Raya No. 10 RT 011/009, Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan 12740	Perdagangan Batubara | Coal Trading	99,99%	Beroperasi Operating
PT PLN Gas dan Geothermal	Gedung KMO (Kyai Maja Office) Tower Lantai 8 Jl. Kyai Maja Office No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120	Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi | Geothermal Power Generation	99,99%	Beroperasi Operating
Majapahit Holding BV	Belanda	Lembaga Keuangan | Financial Institution	100%	Beroperasi Operating
PT Pelayanan Bahtera Adiguna	Jl. Kalibesar Timur No. 10 -12 Jakarta Barat 11110	Pelayaran | Shipping	99,99%	Beroperasi Operating
PT Haleyora Power	Kindo Square, Blok A15-16 Jl. Duren Tiga Raya No.101 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran, Jakarta 12760	Operation & Maintenance (O&M), Layanan Teknik di WIB dan Industri | Operation & Maintenance (O&M), Engineering Services in Western Indonesia and Industry	99,99%	Beroperasi Operating

Entitas Afiliasi Anak Perusahaan

Affiliated Entities of Subsidiaries

Entitas Anak Subsidiaries	Domisili Domicile	Jenis Usaha Business Types	Persentase Kepemilikan (%) Ownership (%)	Status Operasi
Kepemilikan Tidak Langsung | Kepemilikan Tidak Langsung				
PT Indonesia Power				
PT Cogindo Daya Bersama (CDB)	Jl. Jend Gatot Subroto Kav 18 Lantai 9 Jakarta	*Cogeneration*, pemasok energi, jasa pelayanan dan manajemen | Cogeneration, energy distribution, energy service and management	99,99%	Beroperasi Operating
PT Artha Daya Coalindo	Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 18 Jakarta 12950	Perdagangan batu bara | Coal Trading	80,00%	Beroperasi Operating
PT Indo Ridlatama Power	Jl. Jend Gatot Subroto Kav 18 Lt. 1 Jakarta Selatan 12950	Pembangkitan tenaga listrik | Power generation	89,39%	Beroperasi Operating
PT Indo Tenaga Hijau	Jl Jend Gatot Subroto Kav 18 Jakarta Selatan Lt. 1	Pengembangan energi baru terbarukan | Development of new and renewable energy	95.20%	Beroperasi Operating
PT Putra Indotenaga	Jl Jend Gatot Subroto Kav 18 Jakarta Selatan Lt. 1	Investasi terkait Pembangkitan | Investment related to Power Plant	99,99%	Beroperasi Operating
PT Pembangkitan Jawa Bali				
PT PJB Services	Jl. Raya Juanda No. 17 Sidoarjo 61253	Operation & Maintenance (O&M) Pembangkit | Operation & Maintenance (O&M) Power Plant	98,00%	Beroperasi Operating
PT Rekadaya Elektrika (RE)	Jl. Tanjung Karang No.3-4A, Jakarta 10230	Jasa listrik dan enjiniring | Electricity and engineering	98,91%	Beroperasi Operating
PT Navigat Innovative Indonesia (NII)	Jl. Tanjung Karang No.3-4A, Jakarta 10230	Investasi terkait Pembangkitan | Investment related to Power Plant	72,98%	Beroperasi Operating
PT PJB Investasi	Gedung PT PLN (Persero) Lantai 2. Jl. Gatot Subroto Kav 18, Jakarta Selatan	Investasi terkait Pembangkitan | Investment related to Power Plant	99,90%	Beroperasi Operating
PT PLN Suku Cadang	Jl Jend. Gatot Subroto Kav 18, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950	Penyedia Spare Part Pembangkit | Provision of Power Plant Spare Parts	51,00%	Beroperasi Operating
PT Pelayanan Listrik Nasional Batam				
PT Pelayanan Energi Batam	Graha Energi Batam Jl. Brigjen Katamso 8, Kampung Taroka – Tanjung Uncang – Batam	Pembangunan pipa gas dan energi lainnya | Construction of gas pipeline and other energy sector	99,99%	Beroperasi Operating
PT Prima Layanan Nasional Enjiniring				
PT Prima Power Nusantara	Menara enjiniring lantai 7 Jl. Ciputat Raya No.123, RT 01/RW 08, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan	Jasa enjiniring, pengadaan dan konstruksi | Engineering, procurement and construction	99,99%	Beroperasi Operating

Entitas Afiliasi Anak Perusahaan
Affiliated Entities of Subsidiaries

Entitas Anak Subsidiaries	**Domisili** Domicile	**Jenis Usaha** Business Types	**Persentase Kepemilikan (%)** Ownership (%)	**Status Operasi**
Kepemilikan Tidak Langsung | **Kepemilikan Tidak Langsung**				
Majapahit Holding B.V. (MH)				
Majapahit Finance B.V. (MF)	Belanda	Lembaga Keuangan | Financial Institution	100,00%	Beroperasi Operating
PT Haleyora Power				
PT Haleyora Powerindo (HPI)	Jl. Phh. Mustopha No 45 A Bandung	Operation & Maintenance (O&M) Distribusi dan Workforce Management | Operation & Maintenance (O&M) Distribution and Workforce Management	90,00%	Beroperasi Operating
PT PLN Batubara				
PT Jambi Prima Coal	Jl. Warung Buncit Raya 10 Jaksel	Pertambangan batu bara I Coal mining	60,00%	Beroperasi Operating
PT PLN Batubara Investasi	Jl. Warung Buncit Raya 10 Jaksel	Investasi terkait Energi Primer Batu bara	99,96%	Beroperasi Operating
PT PLN Batubara Niaga	Jl. Warung Buncit Raya No.10, RT.6/RW.3, Kalibata, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740	Perdagangan terkait Energi Primer Batu bara	99,99%	Beroperasi Operating
PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan (PLN Tarakan)				
PT Paguntaka Cahaya Nusantara Balikpapan	Jl. Markoni Atas No. 59 RT. 03 Kel. Damai Balikpapan KALTIM	Jasa pemeliharaan dan operasi | Maintenance and operation	99,96%	Beroperasi Operating

Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Associates and Joint Ventures

Nama Perusahaan Company Name	Alamat Address	Jenis Usaha/Hubungan Business Types/Relations	Persentase Kepemilikan (%) Ownership (%)		Status Operasi
			Langsung Direct	Tak Langsung In-Direct	
Kepemilikan Tidak Langsung | **Kepemilikan Tidak Langsung**					
PT Geo Dipa Energi	Gedung Aldevco Octagon Lantai 5, Jl.Warung Jati Barat raya No.75 Jakarta Selatan - 12740	Pembangkitan tenaga Listrik | Power Generation	6,67%		Beroperasi Operating
PT Mitra Energi Batam	Jl. Lintas Gas Negara Trans Barelang km 3,5 Panaran, Tembesi-Batu Aji, Batam 29438	Pembangkitan tenaga Listrik | Power Generation		30,00%/ PT PLN Batam	Beroperasi Operating
PT Indo Pusaka Berau	Indonesia Power Kav. 18, Jl. Gatot Subroto, RT.5/RW.4, Kuningan Tim, Kota Jakarta Selatan, 12950	Ketenagalistrikan | Electricity		46,80%/PT IP	Beroperasi Operating
PT Sumber Segara Primadaya	Office 8, 9th FL, SCBD LOT 28 Jl. Senopati Raya 8B, Jakarta Selatan 12190	Penyedia Tenaga Listrik | Electricity Supplier		49,00%/ PT PJB	Beroperasi Operating
PT Dalle Energy Batam	Jl. Lintas Gas Negara Trans Barelang km 3,5 Panaran, Tembesi-Batu Aji, Batam 29438	Pembangkitan tenaga Listrik | Power Generation		20,00%/ PTPLN Batam	Beroperasi Operating
PT Tanjung Kasam Power	Jl.Pattimura, Sei. Kasam RT/ RW 003/002 Kel. Kabil Kec. Nongsa Batam 29467	Pembangkitan tenaga Listrik | Power Generation		10,00%/ PT PLN Batam	Beroperasi Operating
PT Riau Power	Jl. Datuk Setia Maharaja Komplek Perkantoran Permata Hijau Kav. 4/5 Pekanbaru - Riau	Pembangkitan tenaga Listrik | Power Generation		0,25%/ PT PLN Batam	Beroperasi Operating
PT Energi Pelabuhan Indonesia	Jl. Yos Sudarso No.30, RT.19/ RW.5, Sunter Jaya, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Pembangkitan tenaga Listrik | Power Generation		45,00%/ PT Haleyora Power	Beroperasi Operating
PT PBM Adhiguna Putra	Jl. Kartini VII No. 2 Kelurahan Kartini Kecamatan Sawah Besar. Jakarta Pusat	Pelayaran | Shipping		25%/PT BAG	Beroperasi Operating
PT Unelec Indonesia	Jl. Swadaya PLN, Klender Jatinegara, Jakarta Timur, 13930	Penunjang Penyedia Tenaga Listrik | Electricity Supplier Supports	32,25%		Beroperasi Operating
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	PLTU Tanjung Jati B Jawa Bali Unit 3 & 4, Desa Tubanan, Kec.Kembang, Kab. Jepara, JawaTengah	Operasi dan Pemeliharaan | Operations and Maintenance		49,00%/ PT PJB	Beroperasi Operating
PT Bajradaya Sentranusa	Jl. Wijaya III No.5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170	Pembangkitan tenaga Listrik | Power Generation		36,61%/ PT PJB	Beroperasi Operating
PT Bukit Pembangkit Innovative	Graha Surveyor Indonesia Lt. 17 Suite 1703B, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 56 Jakarta Selatan, 12950 Indonesia	Pembangkitan tenaga Listrik | Power Generation		29,15%/ PT PJB	Beroperasi Operating

Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
Associates and Joint Ventures

Nama Perusahaan Company Name	Alamat Address	Jenis Usaha/Hubungan Business Types/Relations	Persentase Kepemilikan (%) Ownership (%)		Status Operasi
			Langsung Direct	Tak Langsung In-Direct	
Kepemilikan Tidak Langsung | Kepemilikan Tidak Langsung					
PT Perta Daya Gas	Gd oil Centre Lt. 3 Jl. MH Thamrin No. 55 Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat	Transportasi dan penyimpanan LNG | LNG transportation and storage		35,00%/PT IP	Beroperasi Operating
PT Rajamandala Electric Power	Wisma PMI Lantai 2 Suite 202 Jalan Wijaya I No. 63 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12170	Pembangkitan tenaga Listrik | Power Generation		51,00%/PT IP	Beroperasi Operating
PT Crompton Power Switchgear Indonesia	Kawasan Industri Modern Cikande Jl. Modern Industri VI Blok A No. 4 Desa Nambo Ilir Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Banten 42185	Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik | Control Equipment and Electricity Distribution		49,00%/ PT PLNE	Beroperasi Operating
PT Permata Prima Elektrindo	Senayan City Lot 19, Panin Tower Lantai 11, Jl. Asia Afrika, Jakarta Selatan	Industri dan Jasa Ketenagalistrikan| Industry and Electricity Services		15%/PT PLNE	Beroperasi Operating
PT Pura Daya Prima	Jl. Raya Kelapa Hibrida PF 23/11, Jakarta 14240	Ketenagalistrikan | Electricity		7,5%/ PT PLNE	Beroperasi Operating
PT Multi Daya Prima Elektrindo	Gedung Energi Lt. 50 Lot 11A, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan	Industri, Perdagangan, dan Jasa bidang Ketenagalistrikan | Industry, Trade and Services in the Electricity Sector		15%/PT PLNE	Beroperasi Operating
Energi Prima Elektrika	Gedung Energi Lt. 50 Lot 11A, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan	Perdagangan, Jasa listrik dan enjiniring | Electricity and engineering		15%/PT PLNE	Beroperasi Operating
PT Rekind Daya Mamuju	Gedung Nucira Lantai 4 JL. MT Haryono Kav. 27 Jakarta 12820 Indonesia	Pembangkitan tenaga Listrik | Power Generation		10,00%/ PT PJB	Beroperasi Operating
PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali	Desa Kramatwatu, Kec. Bojonegara, Kab.Serang, Banten	Pembangkitan tenaga Listrik | Power Generation		30,00%/ PT PJBI	Beroperasi Operating
PT Mitra Karya Prima	Juanda Business Centre (JBC) Blok A No. 4,5 dan 6. Jl Raya Juanda No. 1 Sidoarjo, 61253	Jasa Pendukung Teknis | Penyedia jasa tenaga kerja untuk O&M Pembangkitan		92%/PT PJB Service	Beroperasi Operating
PT Sertifikasi Kompetensi Pembangkitan Tenaga Listrik	Jl. Tebet Raya No. 44D Jakarta Selatan	Sertifikasi Pengoperasian Pembangkit untuk PJB Group | Plant Operation Certification for PJB Group		95%/PT PJB Service	Beroperasi Operating
PT Rekadaya Elektrika Consult (REC)	Wisma 46 Kota BNI Lt. 17, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220	Jasa Konsultan Engineering | Engineering Consultant Services		99,8%/ PT Rekadaya Electrika (PT PJB)	Beroperasi Operating
PT Sumbagselenergi Sakti Pewali	Gedung KYK, Jl. Cideng Barat No.32, Cideng Jakarta Pusat	Pembangkitan tenaga Listrik | Power Generation		10,00%/ PT PJBI	Beroperasi Operating
PT GCL Indotenaga	Chase Plaza Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 21 Jakarta Selatan 12920	Pembangkitan tenaga Listrik | Power Generation		35,00%/PT IP	Beroperasi Operating
PT Guohua Taidian ñ PJBI	Desa Kramatwatu, Kec. Bojonegara, Kab.Serang, Banten	Pembangkitan tenaga Listrik | Power Generation		35,00%/ PT PJBI	Beroperasi Operating

Nama Perusahaan Company Name	Alamat Address	Jenis Usaha/Hubungan Business Types/Relations	Persentase Kepemilikan (%) Ownership (%)		Status Operasi
			Langsung Direct	Tak Langsung In-Direct	
Kepemilikan Tidak Langsung | **Kepemilikan Tidak Langsung**					
PT North Sumatra Hydro Energy	Jl. Dharmawangsa VII No. 7, Jakarta 12160	Pembangkitan tenaga Listrik | Power Generation		25%/PT PJBI	Beroperasi Operating
PT Indo Raya Tenaga	Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta Selatan 12950	Pembangkitan tenaga Listrik | Power Generation		51%/PT PIT	Beroperasi Operating
PT Bangun Persada Jambi Energi	Komp. Citra Land NGK-B-07 Walk Plazza Alegro Mayang Mangurai, Kota Baru, Jambi 36129	Pertambangan batubara I Coal mining		80%/ PT PLNBB Investasi	Beroperasi Operating
PT Mahakarya Abadi Prima	Komp. Citra Land NGK-B-07 Walk Plazza Alegro Mayang Mangurai, Kota Baru, Jambi 36129	Pertambangan batubara I Coal mining		80%/ PT PLNBB Investasi	Beroperasi Operating
PT Prima Bara Indonesia	Jl. Sutera Barat Kav. 17 Synergi Building Lt. 11 Unit 06 Tangerang Banten 15143	Pertambangan batubara I Coal mining		51%/ PT PLNBB Investasi	Beroperasi Operating
PT Banyan Koalindo Lestari	Gedung Bank Sumsel Babel Lt. 5 R.503 Jalan Gubernur H.A Bastari, Jakabaring Palembang, Sumatera Selatan 30257	Pertambangan batubara I Coal mining		51%/ PT PLNBB Investasi	Beroperasi Operating
PT Sriwijaya Bara Logistik	Jl. Kemang Raya No 43, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan - 12730	Infrastruktur batubara | Coal infrastructure		25,5%/ PT PLNBB Investasi	Beroperasi Operating
PT Mitra Musi Jaya	Jl. Kemang Raya No 43, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan - 12730	Infrastruktur batubara | Coal infrastructure		25,5%/ PT PLNBB Investasi	Beroperasi Operating
PT PLN Suku Cadang	Jl Jend. Gatot Subroto Kav 18, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950	Penyedia Spare part Pembangkit | Generator Spare Parts Provider		49%/PT IP	Beroperasi Operating

Struktur Usaha Grup PLN

PLN Business Group Structure

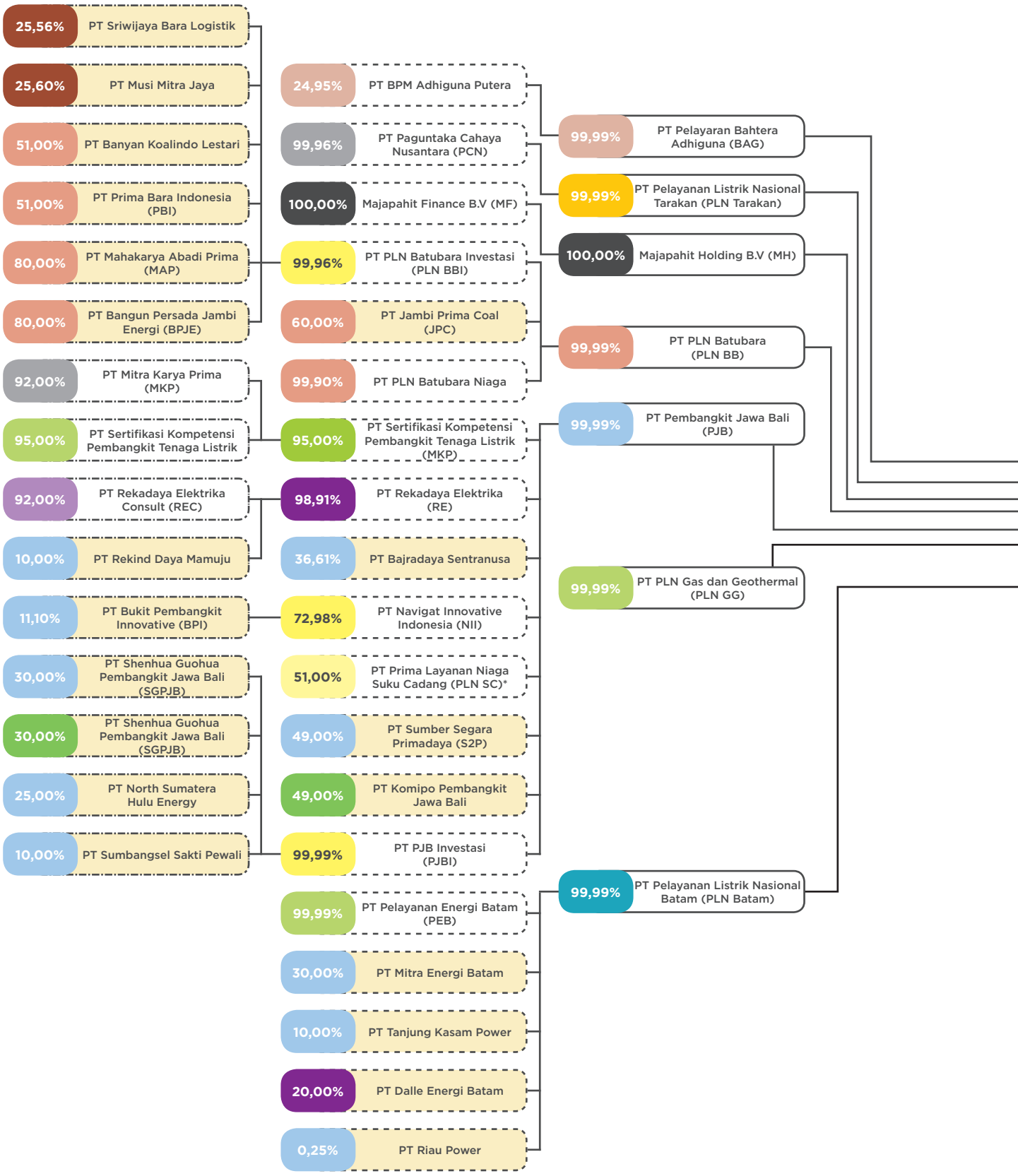

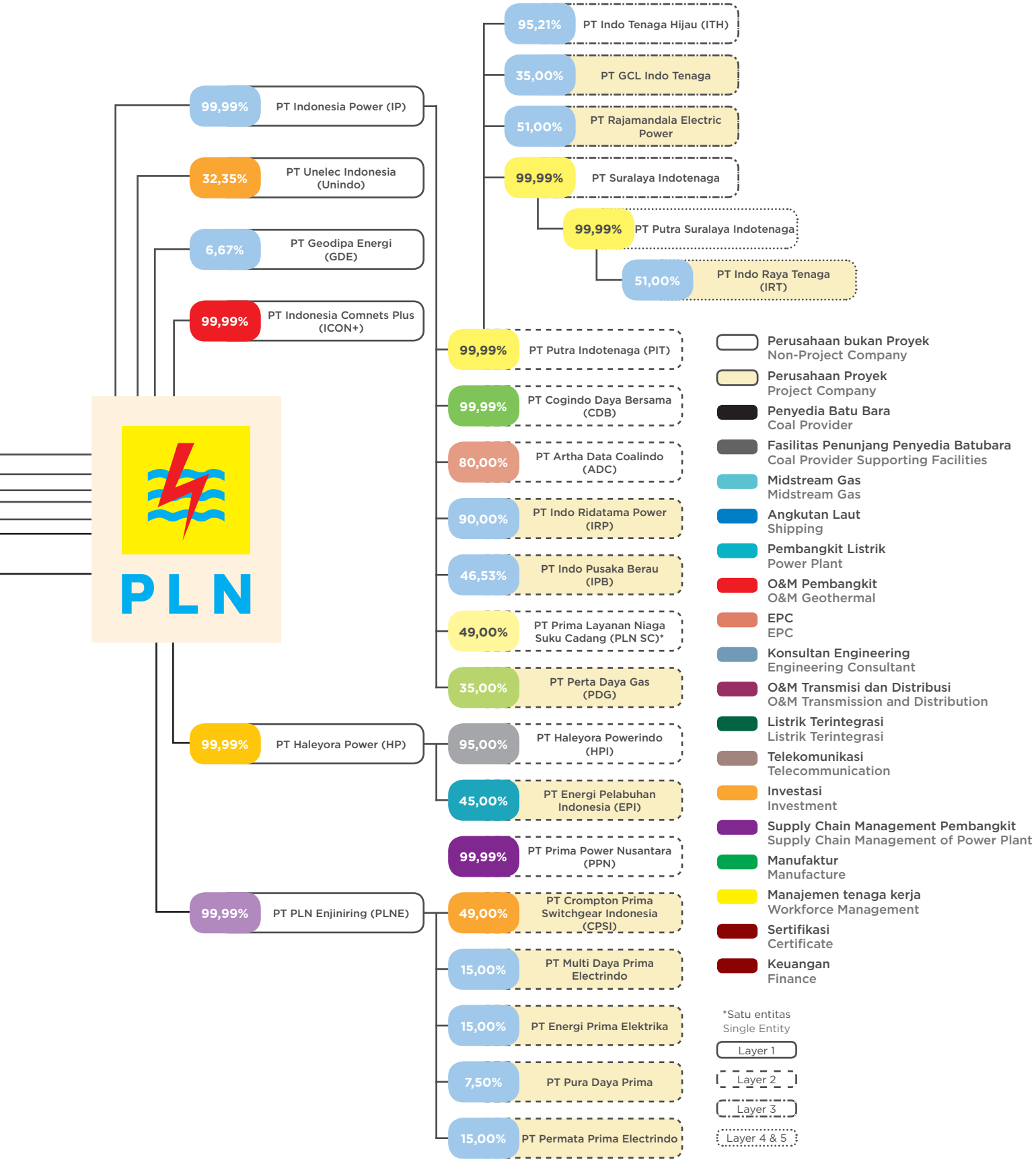
PLN
99,99% PT Indonesia Power (IP)
32,35% PT Unelec Indonesia (Unindo)
6,67% PT Geodipa Energi (GDE)
99,99% PT Indonesia Comnets Plus (ICON+)
99,99% PT Haleyora Power (HP)
99,99% PT PLN Enjiniring (PLNE)
95,21% PT Indo Tenaga Hijau (ITH)
35,00% PT GCL Indo Tenaga
51,00% PT Rajamandala Electric Power
99,99% PT Suralaya Indotenaga
99,99% PT Putra Suralaya Indotenaga
51,00% PT Indo Raya Tenaga (IRT)
99,99% PT Putra Indotenaga (PIT)
99,99% PT Cogindo Daya Bersama (CDB)
80,00% PT Artha Data Coalindo (ADC)
90,00% PT Indo Ridatama Power (IRP)
46,53% PT Indo Pusaka Berau (IPB)
49,00% PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (PLN SC)*
35,00% PT Perta Daya Gas (PDG)
95,00% PT Haleyora Powerindo (HPI)
45,00% PT Energi Pelabuhan Indonesia (EPI)
99,99% PT Prima Power Nusantara (PPN)
49,00% PT Crompton Prima Switchgear Indonesia (CPSI)
15,00% PT Multi Daya Prima Electrindo
15,00% PT Energi Prima Elektrika
7,50% PT Pura Daya Prima
15,00% PT Permata Prima Electrindo
Perusahaan bukan Proyek
Non-Project Company
Perusahaan Proyek
Project Company
Penyedia Batu Bara
Coal Provider
Fasilitas Penunjang Penyedia Batubara
Coal Provider Supporting Facilities
Midstream Gas
Midstream Gas
Angkutan Laut
Shipping
Pembangkit Listrik
Power Plant
O&M Pembangkit
O&M Geothermal
EPC
EPC
Konsultan Engineering
Engineering Consultant
O&M Transmisi dan Distribusi
O&M Transmission and Distribution
Listrik Terintegrasi
Listrik Terintegrasi
Telekomunikasi
Telecommunication
Investasi
Investment
Supply Chain Management Pembangkit
Supply Chain Management of Power Plant
Manufaktur
Manufacture
Manajemen tenaga kerja
Workforce Management
Sertifikasi
Certificate
Keuangan
Finance
*Satu entitas
Single Entity
Layer 1
Layer 2
Layer 3
Layer 4 & 5

Wilayah Operasi

Operational Area

Aceh Aceh
Unit Induk Wilayah Aceh
Holding Unit Region of Aceh

Sumatra Utara
North Sumatra
- Unit Induk Wilayah Sumatera Utara
  Holding Unit Region of North Sumatra
- Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Utara
  Holding Unit Generation of Northern Sumatra
- Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara
  Holding Unit of Construction of Northern Sumatra
- Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera
  Holding Unit of Power Plant Construction of Sumatra

Sumatra Selatan
South Sumatra
- Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu
  Holding Unit Region of South Sumatra, Jambi and Bengkulu
- Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan
  Holding Unit of Construction of Southern Sumatra
- Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan
  Holding Unit of Generation of Southern Sumatra

Kalimantan Barat
West Kalimantan
- Unit Induk Wilayah Kalimantan Barat
  Holding Unit Region of West Kalimantan
- Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat
  Holding Unit Construction of West Kalimantan

Bangka Belitung
Unit Induk Wilayah Bangka Belitung
Holding Unit Region of Bangka Belitung

Sumatera Barat West Sumatra
Unit Induk Wilayah Sumatera Barat
Holding Unit Region of West Sumatra

Riau dan Kepri Riau and Kepri Island
- Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau
  Holding Unit Region of Riau and Riau Islands
- Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera
  Holding Unit of Transmission and Load Dispatching Center of Sumatra
- Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah
  Holding Unit of Construction of Central Part of Sumatra

Lampung Lampung
Unit Induk Distribusi Lampung
Holding Unit Distribution of Lampung

Banten Banten
Unit Induk Distribusi Banten
Holding Unit Distribution of Banten

Bali Bali
Unit Induk Distribusi Bali
Holding Unit Distribution o

DKI Jakarta DKI Jakarta
- Kantor Pusat
  Head Office
- Unit Induk Distribusi Jakarta Raya
  Holding Unit Distribution of Jakarta Raya
- Unit Induk Pembangunan Interkoneksi Sumatera Jawa
  Holding Unit of Sumatra Jawa Interconnection Construction
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan (Research Institute)
  Center of Electricity Research & Development (Research Institute)
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Corporate University)
  Center for Education and Training (Corporate University)
- Pusat Enjiniring Ketenagalistrikan
  Electricity Engineering Center
- Pusat Sertifikasi
  Certification Center

Jawa Barat West Java
- Unit Induk Distribusi Jawa Barat
  Holding Unit Distribution of West Java
- Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat
  Holding Unit Construction of Western Java
- Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah I
  Holding Unit Construction of Central Part of Java I
- Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah
  Holding Unit Transmission of Central Part of Java
- Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan
  Electricity Maintenance Center
- Unit Induk Pusat Pengatur Beban
  Holding Unit of Load Dispatching Center
- Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Barat
  Holding Unit Transmission of Western Java

Jawa Tengah Central Java
- Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta
  Holding Unit Distribution of Central Java and DI Yogyakarta
- Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati
  Holding Unit of Tanjung Jati Generation
- Pusat Manajemen Proyek
  Project Management Center

Yogyakarta
Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah II
Holding Unit Construction of Central Part of Java II

Jawa Timur East Java
- Unit Induk Distribusi Jawa Timur
  Holding Unit Distribution of East Java
- Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur & Bali I
  Holding Unit Construction of Eastern Java & Bali I
- Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur & Bali Ii
  Holding Unit Construction of Eastern Java & Bali Ii
- Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur & Bali
  Holding Unit Transmission of Eastern Java & Bali

75,7 juta
Pangsa Pasar Pelanggan
75.7 million
Market Share Customers

Kalimantan Selatan
South Kalimantan
- Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah
  Holding Unit Region of South and Central Kalimantan
- Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Tengah
  Holding Unit Construction of Central Part of Kalimantan
- Unit Induk Pembangkitan Dan Penyaluran Kalimantan
  Holding Unit Generation and Transmission of Kalimantan

Kalimantan Timur
East Kalimantan
- Unit Induk Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
  Holding Unit Region of East and North Kalimantan
- Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur
  Holding Unit Construction of Eastern Kalimantan

Sulawesi Utara
North Sulawesi
- Unit Induk Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah & Gorontalo
  Holding Unit Region of North Sulawesi, Central Sulawesi & Gorontalo
- Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara
  Holding Unit Construction of Northern Sulawesi

Maluku
- Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara
  Holding Unit Region of Maluku and North Maluku
- Unit Induk Pembangunan Maluku
  Holding Unit Construction of Maluku

Papua Papua
- Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat
  Holding Unit Region of Papua and West Papua
- Unit Induk Pembangunan Papua
  Holding Unit Construction of Papua

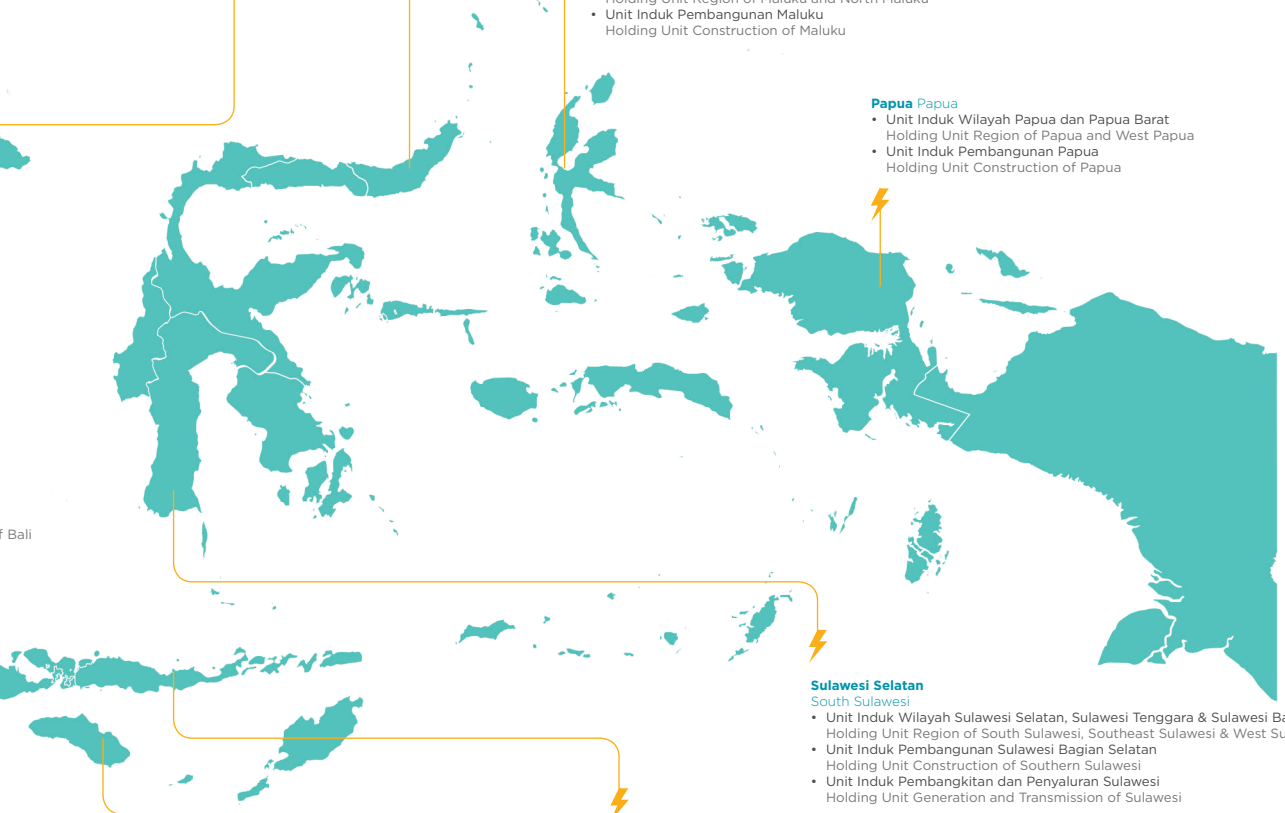

Sulawesi Selatan
South Sulawesi
- Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara & Sulawesi Barat
  Holding Unit Region of South Sulawesi, Southeast Sulawesi & West Sulawesi
- Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Selatan
  Holding Unit Construction of Southern Sulawesi
- Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi
  Holding Unit Generation and Transmission of Sulawesi

Nusa Tenggara Barat
West Nusa Tenggara
- Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat
  Holding Unit Region of West Nusa Tenggara
- Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara
  Holding Unit Construction of Nusa Tenggara

Nusa Tenggara Timur
East Nusa Tenggara
- Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur
  Holding Unit Region of East Nusa Teggara

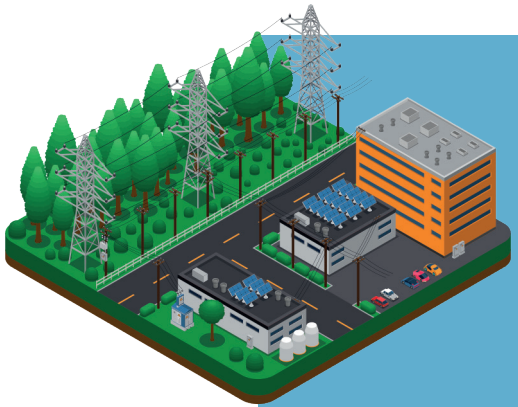

Perusahaan membagi segmen operasi berdasarkan regionalisme. Oleh karenanya, segmen operasi PLN terdiri dari 4 segmen operasi regional, yaitu Regional Sumatera, Regional Jawa, Madura dan Bali, Regional Sulawesi dan Kalimantan, Regional Maluku, Papua dan Nusa Tenggara.

The Company divides operating segment by region. Therefore, PLN's operating segments consist of 4 regional operating segments, namely Sumatra Region, Java Madura and Bali Region, Sulawesi and Kalimantan Region, Maluku, Papua and Nusa Tenggara Region.

Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan di Pasar Modal

Capital Market Supporting Institutions and Professions

AKUNTAN PUBLIK — PUBLIC ACCOUNTANT

Nama | Name	KAP RSM Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (KAP RSM AAJ)
Alamat | Address	Plaza Asia Lantai 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta 12190
Jasa yang Diberikan | Services	**Biaya** | Fees
Audit Umum atas Laporan Keuangan General Audit of Financial Statements	Rp12,16 Miliar
Audit atas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Audit on Partnership and Community Development Programs (PKBL)	Rp145,04 Juta
Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern Compliance Audit with the Laws and Regulations and Internal Control	Rp581,89 Juta
Review atas Laporan Evaluasi Kinerja Review on Performance Evaluation Report	Rp288,57 Juta
Review atas Laporan KPI per Direktorat Review on Directorate KPI Report	Rp 274,99 Juta
Atestasi atas Laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian Attest the Activity Report on the Application of Prudential Principles	Rp75,54 Juta
Audit atas Pekerjaan dalam Pelaksanaan Work-in-progress Audit	Rp188,82 Juta
Audit atas Project Financial Statement Audit on Project Financial Statements	Rp490,42 Juta
Audit atas Financial Covenant Ratio Audit on Financial Covenant Ratio	Rp553,27 Juta
Atestasi atas perhitungan Consolidated Interest Coverage Ratio (CICR) Attest the calculation of Consolidated Interest Coverage Ratio (CICR)	Rp48,66 Juta
Audit atas Laporan Portofolio Investasi dan Hasil Dana Pensiun PLN Audit on the Investment Portfolio Report and PLN Pension Fund Results	Rp38,69 Juta
Total	**Rp14,85 Miliar**
Periode | Period	**2019**

BIRO ADMINISTRASI EFEK — SHARE REGISTRAR

Nama|Name	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Alamat|Address	Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lantai 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 - Indonesia
Jasa yang Diberikan|Services	Penatausahaan Pencatatan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Efek, Agen Pembayaran dan/atau jasa administrasi lainnya sehubungan dengan Efek Bersifat Utang PLN di di Bursa Efek Indonesia Administration of Share Registration of Ownership or Change of Ownership of Securities, Payment Agents and/or other administrative services in connection with PLN's Debt Securities on Indonesia Stock Exchange
Biaya | Fees	Joining Fee: Rp15.000.000 per tahun, dibebankan satu kali pada saat PLN mendaftarkan Efeknya pertama kali Annual Fee: Rp10.000.000 per tahun, dibebankan atas setiap seri Efek Bersifat Utang dan atau Sukuk yang didaftarkan Pelaksanaan tugas Agen Pembayaran: 0,05% dari bunga Efek Bersifat Utang dan bagi hasil untuk Sukuk yang dibayarkan. Biaya diperhitungan per seri dengan ketentuan min. Rp2.500.000 dan maks Rp10.000.000 atau sesuai dengan ketentuan biaya layanan jasa berdasarkan Peraturan KSEI Joining Fee: Rp15,000,000 per year, charged once when PLN registers its Securities for the first time Annual Fee: Rp10,000,000 per year, charged to each series of registered Debt Securities and or Sukuk. Performing Payment Agent duties: 0.05% of the interest of the Debt Securities and profit sharing for the Sukuk paid. The fee is calculated per series with provisions of min. Rp2,500,000 and a maximum of Rp10,000,000 or in accordance with provisions regarding service fees based on KSEI Regulation
Periode|Period	2004 - sampai dengan Obligasi PLN dan/atau Sukuk PLN dinyatakan lunas 2004 – until the PLN Bonds and/or Sukuk are declared Settled

BURSA EFEK — STOCK EXCHANGE

Nama|Name	PT Bursa Efek Indonesia|Indonesia Stock Exchange
Alamat|Address	Gedung Bursa Efek Indonesia Menara I Lantai 6 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta – 12190
Jasa yang Diberikan|Services	Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka Organizing and providing a system or facility to bring about securities sale and purchase offers of other parties that aims at trading securities between them.
Biaya | Fees	Sekurang-kurangnya Rp10.000.000 dan sebanyak-banyaknya Rp150.000.000 per masing-masing jenis Efek bersifat utang At least Rp10,000,000 and as much as Rp150,000,000 per each debt securities types
Periode|Period	1992 - 2018

Nama|Name	Singapore Exchange Securities Trading Limited ("SGX")
Alamat|Address	2 Shenton Way, #02-02 SGX Centre 1, Singapore 068804
Jasa yang Diberikan|Services	Penyelenggaraan dan penyediaan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan permintaan dan penawaran jual-beli Efek oleh pihak-pihak terkait dengan tujuan perdagangan Efek (salah satunya obligasi) Organizing and providing a system and/or facilities to confront securities demand and sell by related parties for the aim of securities trading (such as bonds)
Biaya | Fees	±SGD25,000 per penerbitan ±SGD 25,000 per issuance
Periode|Period	Program Obligasi Internasional tahun 2006, 2007, 2009, 2011, 2012, 2017, dan 2018 International Bonds Programs for 2006, 2007, 2009, 2011, 2012, 2017 and 2018

WALI AMANAT OBLIGASI — BONDS TRUSTEE

Nama|Name	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Alamat|Address	Menara Bank BTN Lt. 18 Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130
Jasa yang Diberikan|Services	Wali Amanat atau Badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para pemegang Obligasi PLN VIII seri B, Obligasi PLN IX seri B, Obligasi PLN XI seri B, Obligasi XII seri B, Obligasi Berkelanjutan II & III PLN serta Sukuk Ijarah IV seri B, Sukuk Ijarah V seri B, Sukuk Ijarah Berkelanjutan II & III PLN Trustee or Agency entrusted to represent the interests of holders of PLN Shelf Bonds VIII series B, PLN Shelf Bonds IX series B, PLN Shelf Bonds XI series B, PLN Shelf Bonds XII series B, PLN Shelf Registration Bonds II & III and Shelf Sukuk Ijarah IV Series B, Shelf Sukuk Ijarah V series B, PLN Shelf Registration Sukuk Ijarah PLN II & III
Periode|Period	Sampai dengan Obligasi PLN dan/atau Sukuk Ijarah PLN dinyatakan lunas Until PLN Bonds and/or Sukuk Ijarah PLN are declared settled

Nama|Name	Deutsche Bank Trust Company Americas
Alamat|Address	60 Wall Street, MS: NYC 60-1630, New York, New York 10005
Jasa yang Diberikan|Services	Trustee atau Wali Amanat yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para pemegang obligasi serta menjadi agen pembayaran transaksi yang berhubungan dengan para pemegang obligasi Trustee or Agency trusted to represent the interest of bondholders as well as the agent for transaction payment related with the bondholders
Periode|Period	Program Obligasi Internasional tahun 2006, 2007, 2009, 2011, 2012, dan 2017 International Bonds Programs for 2006, 2007, 2009, 2011, 2012, and 2017

Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan di Pasar Modal
Capital Market Supporting Institutions and Professions

AGEN FISKAL — FISCAL AGENT

Nama|Name	Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Alamat|Address	3-2, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Japan
Jasa yang Diberikan|Services	Agen yang bertanggung jawab pada proses pembayaran-pembayaran semua transaksi yang berhubungan dengan obligasi Samurai dari PLN ke pemegang obligasi dan sebaliknya serta menangani proses administrasi dan notifikasi terkait obligasi Agent responsible for the process of payment of all transactions related to Samurai bonds from PLN to the bondholders and vice versa and handles the administration and notification-related bond processes
Periode|Period	Program Obligasi Samurai (dalam mata uang Japanese Yen) tahun 2019 Samurai Bond Program (in Japanese Yen) in 2019

PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK — RATING AGENCIES

Nama|Name	PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Alamat|Address	Panin Tower Senayan City 17th floor Jalan Asia Afrika Lot. 19
Jasa yang Diberikan|Services	Pemeringkatan atas Perusahaan dan Efek Bersifat Utang Perusahaan Rating the Company and the Company's Debt Securities
Biaya | Fees	Biaya Jasa Pemeringkatan atas Obligasi/Sukuk (Excld. PPN) (0,04% x nilai emisi setiap penerbitan Efek Bersifat Utang) Biaya Pemantauan Tahunan (Excld. PPN) Rp175.000.000 Rating Fees on Bonds/Sukuk (Excl. VAT) (0.04% x issuance value for each Debt Securities issuance) Annual Monitoring Fee (Exc. VAT) Rp175,000,000
Periode|Period	Sampai dengan PLN menginginkan diakhirinya kerja sama pemeringkatan/dinyatakan pailit/ dibubarkan dan/atau sampai dengan seluruh Efek Bersifat Utang PLN dinyatakan lunas Until PLN wants to end the rating cooperation/declared bankruptcy/dissolution and/or until the entire PLN Debt Securities are declared settled

Nama|Name	Moody's Investor Service Singapore Pte. Limited
Alamat|Address	50 Raffles Place #23-06, Singapore Land Tower Singapore, 048623
Jasa yang Diberikan|Services	Pemeringkatan atas Perusahaan Rating the Company
Periode|Period	Program Obligasi Internasional tahun 2006, 2007, 2009, 2011, 2012, 2017, 2018 dan 2019 International Bonds Programs for 2006, 2007, 2009, 2011, 2012, 2017, 2018 and 2019

Nama|Name	Standard and Poor's Singapore Pte. Ltd.
Alamat|Address	12 Marina Boulevard #23-01 Marina Bay Financial Centre Tower 3 Singapore 018982
Jasa yang Diberikan|Services	Pemeringkatan atas Perusahaan Rating the Company
Periode|Period	Program Obligasi Internasional tahun 2006, 2007, 2009, 2011, 2012, 2018, dan 2019 International Bonds Programs for 2006, 2007, 2009, 2011, 2012, 2017, 2018 and 2019

Nama|Name	Fitch Ratings Ltd
Alamat|Address	30 North Colonnade London E14 5GN
Jasa yang Diberikan|Services	Pemeringkatan atas Perusahaan Rating the Company
Periode|Period	Program Obligasi Internasional tahun 2011, 2012, 2017, 2018 dan 2019 International Bonds Programs for 2006, 2007, 2009, 2011, 2012, 2017, 2018 and 2019

Nama|Name	Japan Credit Rating Agency, Ltd (JCR)
Alamat|Address	Jiji Press Building 5-15-8 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061 Japan
Jasa yang Diberikan|Services	Pemeringkatan Perusahaan Rating the Company
Periode|Period	Program Obligasi Samurai (dalam mata uang Japanese Yen) tahun 2019 Samurai Bonds Program (in Japanese Yen) in 2019

Notaris|Notary

Lenny Janis, SH
Jln. Hang Lekir 9 No.1
Jakarta 12120

Muhammad Hanafi, SH
Komp. Rukan Tendean Square
No. 26
Jl. Walter Mongonsidi 122-124
Kebayoran Baru,
Jakarta 12180

Aryanti Artisari, SH, M.Kn.
Menara Sudirman Lantai 18
Jl. Jend Sudirman Kav 60
Jakarta Selatan 12190

Ati Mulyati, SH. MKn
Cyber 2 Tower Lantai 22 E
Jl. H.R. Rasuna Said
Blok X-5 No. 13
Jakarta Selatan 12950

Yualita Widyadhari, SH., MKn.
TCC Batavia Tower One
Lantai 9 Suite 9
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta Pusat 10220

Konsultan Hukum|Legal Consultant

Nahr Murdhono
Mitra Building 9th Floor
Suite 902
Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 21
Jakarta 12930

Soesilo Ariwibowo & Rekan
Graha Deka
Jl. TB Simatupang Kav. 8,
Kebagusan
Jakarta

Utomo Karim & Partner
Hanurata Graha 2nd Floor
Jl. Kebon Sirih 67-69
Jakarta Pusat 10430

UMBRA
Telkom Landmark Tower
Tower 2, 49th Floor
Jl. Gatot Subroto Kav. 52
Jakarta 12710

AKSET
The Plaza Office Tower 29th
Floor Unit A
Jl. MH Thamrin Kav 28-30
Jakarta 10350

Azwar Hadisupani Rum & Partners
Menara Palma Lt. 15
Jl. HR Rasuna Said Blok X2 Kav. 6
Jakarta

Ginting & Reksodiputro
The Energy Buliding 15th Floor
SCBD Lot II A
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Tumbuan & Partners
Jl. Gandaria Tengah III No. 8
RT 3/RW 1
Kramat Pela, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12240

Syahout & Prayoga Lawfirm
Equity Tower Lt 49
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53
SCBD
Jakarta

Kantor Hukum Anullah & Partners|Anullah & Partners Law Firm
Sampoerna Strategic Square
Tower B
19th Floor Jl. Jenderal Sudirman
Kav. 45-46
Jakarta

Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan di Pasar Modal
Capital Market Supporting Institutions and Professions

Citra Lentera Hukum
Gedung AKABA
Jl. Sunan Kalijaga No. 63 A
Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12160

Ferisamad
Perkantoran Royal Palace
Blok C No. 10
Jl. Prof Soepomo No. 178
Jakarta 12870

Genta Darwin & Partner
Ruko Mutiara Faza Blok RA. 9
Jl. Condet Raya No. 27
Jakarta Timur 13760

Hadiputranto Hadinoto & Partner (HHP)
Pacific Century Palace level 55
SCBD District Lot 10
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Hogan Lovellls Lee & Lee
50 Coller Quay 20-01 OVE
Bayfront
Singapore 049321

Karsa Mandiri
Kindo Square Blok C-8
Jl. Duren Tiga Raya No. 101
Jakarta Selatan 12790

Lubies Ganie Suruwidjojo
Menara Imperium 30th floor
Jl. HR. Rasuna Said Kav. I
Jakarta 12890

Linklaters Singapore Pte.Ltd
1 George St. Singapore 049145

Alamat Unit Bisnis dan Kantor Perwakilan

Address of Business Units and Representative Offices

No.	Kantor Cabang	Alamat
I	PT PLN (Persero) KANTOR PUSAT	Jl. Trunojoyo Blok M I -135 JAKARTA 12160 Telepon (021) 7261875; 7261122; 7262234; 7251234; 7250550 Fax. (021) 7221330; 7397150 E-mail: webmaster@pln.co.id Home page: www.pln.co.id
II.	PT PLN (Persero) PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ISO/IEC 17025 -2005	Jl. Duren Tiga No. 102, JAKARTA 12760 Telp. (021) 7973774, 7980190, 7989982 (Hunting) 7991155 (GM) Fax. (021) 7991762, 7975414 E-mail: customercare@pln-litbang.co.id Home Page: www.pln-litbang.co.id Jwots: 13107,13109,13110,13111,13115,13121
III.	PT PLN (Persero) PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Jl. HR. Harsono RM. No. 59, Ragunan - Pasar Minggu JAKARTA SELATAN 12550 Telp. (021) 7811292, 7811293, 7800832, 7811368 (KPUSDIKLAT) Fax. (021) 7811294, 7811295 (Sekretaris KPUSDIKLAT) 7829263 (SDM) Website: http://pln-pusdiklat.co.id Vicon Ruang Meeting: 192.168.13.178
IV.	PT PLN (Persero) PUSAT ENJINIRING KETENAGALISTRIKAN ISO 9001: 2008	Jl. Aipda K.S. Tubun I/2 Petamburan JAKARTA BARAT 11420 Telp. (021) 5640141, 5638642, 5638644 Fax. (021) 5638658, 5638661 E-mail: pusenlis@pln.co.id
V.	PT PLN (Persero) PUSAT PEMELIHARAAN KETENAGALISTRIKAN	Jl. Banten No. 10 BANDUNG 40272 Telp. (022) 7236791-3 Fax. (022) 7236794 E-mail: pusharlis@pln.co.id Homepage: www.pln.co.id/pusharlis
VI.	PT PLN (Persero) PUSAT MANAJEMEN PROYEK ISO 9001: 2000 LMK - KAN	Jl. Slamet No. 1, Gajah Mungkur, SEMARANG 50232 Telp. (024) 8310060 Fax. (024) 8317241 E-mail: pusmankon@pln.co.id
VII.	PT PLN (Persero) PUSAT SERTIFIKASI ISO 17021: 2011	Jl. Laboratorium, Duren Tiga JAKARTA SELATAN 12760 Telp. (021) 7900034 Fax. (021) 7982034, 7992056, 7943450 Jwots: 15192, 15193, 15194, 1595 E-mail: niaga.pusertif@pln.co.id Homepage: wwwpln.co.id/jaser Vicon: 192.168.1.154
VIII.	**PENYALURAN DAN PUSAT PENGATUR BEBAN**	
	1. PT PLN (Persero) UNIT INDUK PENYALURAN DAN PUSAT PENGATUR BEBAN SUMATERA	Jl. Musyawarah/Nangka Ujung Kel.Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru RIAU 28233 Telp. (0761) 6700011, 6700012 Fax (0761) 6700015 E-mail: sekretariatp3bs@yahoo.co.id, p3bs@pln.co.id
	2. PT PLN (Persero) UNIT INDUK PUSAT PENGATUR BEBAN ISO 9001: 2000	Jl. JCC Cinere 16514, JAKARTA SELATAN Telp. (021) 7542646, 7543566 Fax. (021) 7542516 E-mail: Sekr.p2b@gmail.com
	3. PT PLN (Persero) UNIT INDUK TRANSMISI JAWA BAGIAN BARAT	Jl. JCC, Krukut Limo Cinere JAKARTA SELATAN 16514 Telp. (021) 7543566 Fax. (021) 7542380
	4. PT PLN (Persero) UNIT INDUK TRANSMISI JAWA BAGIAN TENGAH	Jl. Moch. Toha Km. 4 Komplek PLN Cigereleng BANDUNG 40255 Telp. (022) 5201723 Fax. (022) 5220214 E-mail: sekretariat.tjbt@gmail.com; sekr.induk@pln.co.id

Alamat Unit Bisnis dan Kantor Perwakilan

Address of Business Units and Representative Offices

No.	Kantor Cabang	Alamat
	5. PT PLN (Persero) UNIT INDUK TRANSMISI JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI	Jl. Suningrat No. 45 Taman, Sidoarjo SURABAYA 61257 Telp. (031) 7882113, 7882114 Fax. (031) 7882578, 7883266 E-mail: tjbtb1@pln.co.id
IX.	**KANTOR WILAYAH**	
	1. PT PLN (Persero) UNIT INDUK WILAYAH ACEH	Jl. H. Mohd. Tgk. Daud Bereueh No. 172 Lampriet Banda Aceh, ACEH 23243 Telp. (0651) 22188 (Hunting 8 Saluran) Fax. (0651) 21516 E-mail: sekretariat.wa@pln.co.id
	2. PT PLN (Persero) UNIT INDUK WILAYAH SUMATERA UTARA	Jl. K.L. Yos Sudarso No. 284 MEDAN 20115 Telp. (061) 6615155 Fax. (061) 6613789 E-mail: plnsumut@plnwill.co.id
	3. PT PLN (Persero) UNIT INDUK WILAYAH SUMATERA BARAT	Jl. Dr. Wahidin No. 8, PADANG 25121 Telp. (0751) 33446 Fax. (0751) 29540, 31564 E-mail: PLN W3@indosat.net..id
	4. PT PLN (Persero) UNIT INDUK WILAYAH RIAU DAN KEPRI	Jl. Musyawarah RT. 01 RW. 09 Kel. Labuh Baru Barat, Kec. Payung Sekaki Pekanbaru, RIAU 28295 Telp. (0761) 855840, 855841, 853737, 855309 Fax. (0761) 855310 E-mail: wrkr@pln.co.id
	5. PT PLN (Persero) UNIT INDUK WILAYAH SUMATERA SELATAN JAMBI DAN BENGKULU	Jl. Kapten A. Rivai No. 37, PALEMBANG 30129 Telp. (0711) 358355, 358804, 358859, 313217 (GM) Fax. (0711) 310376, 356759 (GM) E-mail: gmws2jb@plnpalembang.co.id Website: http/www.plnpalembang.co.id
	6. PT PLN (Persero) UNIT INDUK WILAYAH BANGKA BELITUNG	Jl. Soekarno Hatta KM 5 Pangkalpinang 33171 Kep. BANGKA BELITUNG Telp. (0717) 439300 (Hunting) Fax. (0717) 439600 E-mail: wbabel@pln.co.id
	7. PT PLN (Persero) UNIT INDUK WILAYAH KALIMANTAN BARAT	Jl. Adi Sucipto Km 7,3 Sei Raya Pontianak KALIMANTAN BARAT 78391 Telp. (0561) 722037 Fax. (0561) 721395 E-mail: kalbar@pln.co.id
	8. PT PLN (Persero) UNIT INDUK WILAYAH KALIMANTAN SELATAN DAN KALIMANTAN TENGAH	Jl. Panglima Batur Barat No. 1, Banjarbaru KALIMANTAN SELATAN 70711 Telp. (0511) 4772520, 4774342, 4772261 Fax. (0511) 4772442 E-mail: humas.kalseteng@pln.co.id
	9. PT PLN (Persero) UNIT INDUK WILAYAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA	Jl. MT. Haryono No. 384, BALIKPAPAN 76114 Telp. (0542) 871840 (Hunting) Fax. (0542) 876130 E-mail: kaltimra@pln.co.id
	10. PT PLN (Persero) UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH DAN GORONTALO	Jl. Bethesda No. 32, MANADO 95116 Telp: (0431) 863644, 865651, 862444 (GM) Fax: (0431) 863660, 862360 E-mail: gmsutg@pln.co.id
	11. PT PLN (Persero) UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI SELATAN, SULAWESI TENGGARA DAN SULAWESI BARAT	Jl. Letjend Hertasning Blok B, Kotak Pos 1206 Panakukang, MAKASSAR 90222 Telp. (0411) 457155, 457157 Fax. (0411) 444800

No.	Kantor Cabang	Alamat
	12. PT PLN (Persero) UNIT INDUK WILAYAH MALUKU DAN MALUKU UTARA	Jl. Diponegoro No. 2, AMBON 97127 Telp. (0911) 311810, 347766, 354696 Fax: (0911) 310910 E-mail: plnwilmaluku@plnmmu.co.id
	13. PT PLN (Persero) UNIT INDUK WILAYAH PAPUA DAN PAPUA BARAT	Jl. Ahmad Yani No. 18, JAYAPURA 99111 Telp. (0967) 533891, 533981, 536637 Fax. (0967) 534694 E-mail: wilpapua@pln.co.id
	14. PT PLN (Persero) UNIT INDUK WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT	Jl. Langko No. 25-27 Ampenan MATARAM 83114 Telp. (0370) 643123 Fax. (0370) 648692 E-mail: sekretariat.ntb@pln.co.id
	15. PT PLN (Persero) UNIT INDUK WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR	Jl. Piet A. Tallo No. 101, KUPANG 85228 Telp. (0380) 8554005 (Hunting) Fax. (0380) 8554010 E-mail: ntt@pln.co.id Website: htpp//www.pln.co.id/ntt
X	**KANTOR DISTRIBUSI**	
	1. PT PLN (Persero) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TIMUR	Jl. Embong Trengguli No. 19 - 21 SURABAYA 60271 Telp. (031) 5340651 - 5340655 Fax. (031) 5310057 Jwots: 71016 -18 Hunting E-mail: moch.sulatyo@pln.co.id Website: www.pln-jatim.co.id
	2. PT PLN (Persero) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA	Jl. Teuku Umar No. 47, SEMARANG Telp. (024) 8411991 (hunting) Fax. (024) 8412268 E-mail: plnjatengdiy@pln.co.id Website: www.plnjateng.co.id E-mail: plnubd@plnjateng.co.id
	3. PT PLN (Persero) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA BARAT	Jl. Asia Afrika No. 63, BANDUNG 40111 Telp. (022) 4230747 (hunting), 4206287 (GM) Fax. (022) 4230822, 4207114 Jwots: 30995 E-mail: info.djbb@pln.co.id
	4. PT PLN (Persero) UNIT INDUK DISTRIBUSI BANTEN	Jl. Jendral Sudirman No. 1 TANGERANG 15118 Telp. (021) 5526716, 5526717 Fax. (021) 5526721 E-mail: disbanten@pln.co.id
	5. PT PLN (Persero) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAKARTA RAYA ISO 9001: 2008	Jl. M. I. Ridwan Rais No. 1, JAKARTA 10110 Telp. (021) 3454000, 3455000 Fax. (021) 3456694 E-mail: humasjaya@pln.co.id
	6. PT PLN (Persero) UNIT INDUK DISTRIBUSI BALI ISO 9001: 2000	Jl. Letda Tantular No. 1 Renon DENPASAR 80234 Telp. (0361) 221960 s.d 221968, 221957 Fax. (0361) 227101
	7. PT PLN (Persero) UNIT INDUK DISTRIBUSI LAMPUNG ISO 9001: 2008	Jl. Z.A. Pagar Alam No. 05 Rajabasa BANDAR LAMPUNG 35144 Telp. (0721) 774868 Fax. (0721) 780247 E-mail: kanwil.lampung@pln.co.id
XI	**PEMBANGKITAN**	
	1. PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN UTARA	Jl. Brigjend Katamso No. 30 KM. 5,5 Titikuning MEDAN 20146 Telp: (061) 7869025 Fax: (061) 7867967 Website: http://www:pln.co.id/Kitsbu E-mail: plnksu@pln.co.id

Alamat Unit Bisnis dan Kantor Perwakilan

Address of Business Units and Representative Offices

No.	Kantor Cabang	Alamat
	2. PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN SELATAN	Jl. Demang Lebar Daun No. 375 PALEMBANG 30128 Telp. (0711) 374955 (Hunting) Fax. (0711) 374958, 374959 E-mail: info.kitsbs@pln.co.id Website: http://www.pln.co.id/kitsbs/
	3. PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN KALIMANTAN	Jl. Panglima Batur Barat No. 1, Banjarbaru KALIMANTAN SELATAN 70711 Telp. (0511) 4772520, 4772633, 4772261 Fax. (0511) 4773283 E-mail: plnkitlur@pln.co.id
	4. PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI	Jl. Letjen Hertasning Blok B Panakukkang, MAKASSAR 90222 Telp. (0411) 444488 Fax. (0411) 440888
	5. PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGKITAN TANJUNG JATI B	Desa Tubanan, Kec Kembang Kab. Jepara JAWA TENGAH 59453 Telp. (0291) 772121, 772123, 772124 Fax. (0291) 772125 E-mail: tanjungjatib@pln.co.id
XII	**UNIT INDUK PEMBANGUNAN**	
	1. PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT SUMATERA	Jl. R.A Kartini No. 23 MEDAN 20152 Telp. (061) 4568629, 4568504 Fax. (061) 4568628 E-mail: www.plnsumatera-1.co.id
	2. PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN SUMATERA BAGIAN UTARA	Jl. Dr. Cipto No. 12, MEDAN 20152 Telp. (061) 4144151, 4144152 Fax. (061) 4144153 E-mail:sekrt.gm@pikitringsuar.co.id
	3. PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN SUMATERA BAGIAN TENGAH	Komplek Citra Garden Blok R1 No. 7 -11 dan R2 No. 1 - 3 Jl. Purwodadi Panam, Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, RIAU 28294 Telp. (0761) 6704881 Fax. (0761) 6704882 E-mail: uipsumbagteng@gmail.com
	4. PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN SUMATERA BAGIAN SELATAN	Jl. Residen A. Rozak No. 2180 Sekojo PALEMBANG 30118 Telp. (0711) 719103 s.d 719109 Fax. (0711) 719102 E-mail: info@uipring-sumatera2.co.id
	5. PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN INTERKONEKSI SUMATERA JAWA	Jl. Aipda K. S. Tubun I No. 2 Lantai 3, Petamburan JAKARTA BARAT 11420 Telp. (021) 56950412, 56950413 Fax. (021) 56950409 E-mail: sekr.uipiv@pln.co.id
	6. PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN JAWA BAGIAN BARAT	Jl. Ehave-Gandul Kel. Gandul Kec. Cinere DEPOK 16514 Telp. (021) 7535500, 7548461, 7548467 Fax. (021) 7535599
	7. PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN JAWA BAGIAN TENGAH 1	Jl. Karawitan No. 32, Turangga, Lengkong Kota Bandung JAWA BARAT 40264 Telp. (022) 7320595 Fax. (022) 7320596 E-mail: sekretariatuipjbt1@gmail.com
	8. PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN JAWA BAGIAN TENGAH II	Jl. Margo Utomo (d/h P. Mangkubumi) No. 16, Kel. Gowongan, Kec. Jetis, YOGYAKARTA 55232 Telp. (0274) 582912, 582922 Fax. (0274) 583580, 582971 E-mail: uipjbt2@pln.co.id

No.	Kantor Cabang	Alamat
	9. PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI 1	Jl. Ketintang Baru I No. 1-3 SURABAYA 60231 Telp. (031) 8281200 Fax. (031) 8280214 E-mail: sekre.uip7@pln.co.id; sekretariat.uip7@gmail.com
	10.PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI II	Jl. Ketintang Baru I No. 1-3, Surabaya JAKARTA TIMUR 60231 Telp. (031) 8291377, 8291538 Fax. (031) 8288959 E-mail: komunikasijbtb2@pln.co.id
	11. PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN KALIMANTAN BAGIAN TIMUR	Jl. MT. Haryono No. 384, Kel. Gunung Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, KALIMANTAN TIMUR 76114 Telp. (0542) 871559 Fax. (0542) 871558, 871565 E-mail: plnuipkalbagtim@pln.co,id
	12. PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN KALIMANTAN BAGIAN TENGAH	Jl. Mistar Cokrokusumo KM. 39, Banjarbaru KALIMANTAN SELATAN 70733 Telp. (0511) 4777571, 6749571 Fax. (0511) 6749900
	13. PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN KALIMANTAN BAGIAN BARAT	Jl. Letjen Suprapto No. 50 G, Pontianak KALIMANTAN BARAT 78121 Telp. (0561) 762580 Fax. (0561) 762579 E-mail: uip.kalimantan.barat@gmail.com
	14. PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN NUSA TENGGARA	Jl. Yos Sudarso No. 2A, MATARAM 83114 Telp. (0370) 621732, 621733 Fax. (0370) 621734 E-mail: pln@uip-nusra.co.id
	15. PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN SULAWESI BAGIAN UTARA	Jl. Bethesda No. 32, Kelurahan Ranotana Kecamatan Sario KOTA MANADO 95116 Telp. (0431) 855620 Fax. (0431) 855630 E-mail: sekretariat.uipsulbagut@gmail.com
	16. PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN SULAWESI BAGIAN SELATAN	Jl. Letjend. Hertasning, Panakkukang MAKASSAR 90222 Telp. (0411) 852519 Fax. (0411) 444339 E-mail: pln.uipsulbagsel@pln.co.id
	17. PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN PAPUA	Jl. Baru Kotaraja, Kelurahan Wai Mhorock, Kecamatan Abepura Jayapura, PAPUA 99225 Telp. (0967) 587773, 5180157, 581740 Fax. (0967) 581740 E-mail: plnuippapua@pln.co.id
	18. PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN MALUKU	Jl. Kapt. Piere Tendean, Halong, Galala, AMBON 97127 Telp. (0911) 341089 Fax: (0911) 341089 E-mail: uip.maluku@pln.co.id

Situs Perusahaan

Corporate Website

Untuk menerapkan prinsip keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan, PLN mengadopsi peraturan-peraturan, seperti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs *Web* Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

PLN memiliki *corporate website* dengan alamat http://www.pln.co.id. PLN selalu berupaya menyempurnakan *corporate website* secara berkala agar menjadi semakin informatif dan mudah untuk diakses.

Website PLN menggunakan bahasa Indonesia dan secara garis besar dibagi menjadi 6 bagian besar yang terdiri dari:

1. Informasi terkait Pelanggan: layanan *online*, listrik pintar, tarif tenaga listrik, tanya jawab seputar tarif listrik, uang jaminan langganan, dan informasi P2TL.
2. Informasi terkait Hubungan Investor: Laporan Keuangan, Laporan Tahunan, Laporan Statistik, RUPTL, 35.000 MW, IPP, ESSA, PLTU Batang, PLTU Indramayu, Proyek Jawa-Bali Crossing, PUB I PT PLN (Persero), Sutet 500 KV Kendal, LARP JawaBali 500 KV *Crossing*, IPTD II Loan IBRD, *investor presentation*, dan *request for meeting*.
3. Informasi tentang media: siaran pers, warta PLN, 35.000 MW, profil perusahaan, video berita, dan istilah kelistrikan.
4. Informasi tentang *supplier*: syarat menjadi vendor, pengumuman, portal E-Proc, pendaftaran penyedia barang/jasa, *local product announcement*, pengadaan batubara, model PJBL PLTM, dan pedoman penyambungan.
5. Informasi terkait profil perusahaan (Tentang Kami): Profil Perusahaan, *Good Corporate Governance*, struktur perusahaan, Dewan Komisaris, Direksi, bisnis PLN, unit PLN, inovasi dan penghargaan, *unit note*, anak perusahaan, PLN Peduli, Pedoman Perilaku, dan *whistleblowing system*.

To comply with transparency principle in the management of the Company, PLN adopted several pertaining regulations suh as OJK Regulation No. 8/POJK.04/2015 concerning Website of Issuers or Public Listed Companies and FSA Regulation No. 21/POJK.04/2015 on the Implementation of Governance Guidelines for Public Companies.

PLN has a corporate website http://www.pln.co.id. PLN continually updates its corporate website to be more informative and convenient to access.

Website PLN is Indonesian and is categorized into six major sections consisting of:

1. Customer related information: online services, listrik pintar, electrical power pricing, questions & answers regarding electricity rates, deposit subscriptions and P2TL information.
2. Investor Relations related information: Financial Statements, Annual Report, Statistics Report, RUPTL, 35,000 MW, IPPs, ESSA, Batang Coal Power Plant, Indramayu Coal Power Plant, Project JavaBali Crossing, PUB I PT PLN (Persero), SUTET 500 KV Kendal, LARP Java-Bali 500 KV Crossing, IPTD II IBRD Loan, investor presentation, and request for meeting.
3. Information on Media: press releases, PLN news, 35,000 MW, company profile, video news, and electricity terminology
4. Information on suppliers: vendor prerequisites, announcements, portal E-Proc, registration suppliers of goods/services, local product announcement, coal supply, model PJBL micro hydro power plants, and connection guidelines
5. Company rrofile related information (About Us): Company Profile, Good Corporate Governance, corporate structure, Board of Commissioners, Board of Directors, PLN business, PLN unit, innovation and awards, unit note, subsidiaries, PLN Peduli, Code of Conduct and whistleblowing system.

6. Informasi tentang keterbukaan informasi (KIP) layanan informasi publik dan daftar informasi publik.

Sesuai dengan POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, Perusahaan mengunggah Ringkasan Risalah RUPS pada website Perusahaan sesuai pemenuhan prinsip 1 Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, yakni meningkatkan nilai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

Situs *web* korporat PLN telah mencakup 4 bagian utama informasi yang wajib dimuat pada situs *web* perusahaan, yaitu:
1. Informasi umum Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Informasi bagi pemodal atau investor;
3. Informasi tata kelola perusahaan; dan
4. Informasi tanggung jawab sosial perusahaan.

Selain itu, *website* PLN juga memuat informasi-informasi lain yang dapat berfungsi untuk menambah pengetahuan mengenai istilah-istilah dalam kelistrikan dan lain-lain yang terkait dalam bisnis PLN.

6. Disclosure of information (KIP) public information services and list of public information.

In accordance with POJK 8/POJK.04/2015 on the Website of Issuers or Public Companies and OJK Regulation No. 21/POJK.04/2015 on the Implementation of Governance Guidelines for Public Companies, the Company uploads the GMS Minutes on its corporate website according to the fulfillment of principle 1 Governance Guideline of Public Company, which is to improve the value of General Meeting of Shareholders implementation.

PLN's corporate website comprises four (4) primary category of information that must be published on the Company's website, which are:
1. General information regarding Issuers or Public Companies;
2. Information for financiers or investors;
3. Corporate governance information; and
4. Information on corporate social responsibility

In addition, PLN website also contains other information that functions as additional knowledge on the electricity terminology and other information on PLN business.

Penghargaan dan Pengakuan Eksternal

Awards and External Recognitions

No.	Waktu Date	Penghargaan Awards	Jumlah Penghargaan Quantity	Pemberi Penghargaan Award Giver	Kategori Category
1	8 Januari 2020 January 8, 2020	PROPER Emas Glod PROPER	5	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ministry of Environment and Forestry	5 unit pembangkit meraih PROPER Emas: 1) PLTU Tanjung Jati B, 2) PLTU Paiton Unit 1 & 2 Probolinggo (PT PJB), 3) PLTGU Gresik (PT PJB), 4) PLTDG Pesanggrahan (PT Indonesia Power), dan 5) PLTP Kamojang Darajat (PT Indonesia Power) 5 generating units won Gold PROPER: 1) CFPP Tanjung Jati B, 2) CFPP Paiton Unit 1 & 2 Probolinggo (PT PJB), 3) Combined Cycle PP Gresik (PT PJB), 4) Diesel and Gas Turbine PP Pesanggrahan (PT Indonesia Power), and 5) Geothermal PP Kamojang Darajat (PT Indonesia Power)
2	13 Maret March 13	Penghargaan Wajib Pajak Besar 2019	1	Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Directorate General Tax Ministry of Finance	Penghargaan sebagai BUMN pemberi kontribusi besar pajak 2018 dan patuh terhadap peraturan perpajakan Appreciation as SOE giving a large contribution to 2018 tax and complying with tax regulations
3	27 Maret March 27	Indonesia Green (IGA) Award 2019	8	La Tofi	• Mempelopori Pencegahan Polusi: PLN UID Jakarta Raya • Penanganan Sampah Plastik: PLN UID Jawa Timur • Penyelamatan Sumber Daya Air: PLN UID Jawa Tengah • Mengembangkan Rekayasa Teknologi Energi Baru: UIA Bangka Belitung • Rekayasa Teknologi Dalam Menghemat Energi: UIW Bangka Belitung • Pengelolaan Sampah Terpadu: PLN UIW Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat • Mengembangkan Keanekaragaman Hayati: PLN UIK SBS • Mempelopori Pencegahan Polusi: PLN UIK Tanjung Jati B • Eksekutif Milenium: PLN UIK Tanjung Jati B • Pioneer on Pollution Prevention: PLN UID Jakarta Raya • Plastic Waste Handling: PLN UID East Java • Water Resource Conservation: PLN UID Central Java • Developing New Energy Technology: UIA Bangka Belitung • Technology in Energy Saving: UIW Bangka Belitung • Integrated Waste Management: PLN UIW South, Southeast and West Sulawesi • Developing Biodiversity: PLN UIK SBS • Pioneer in Pollution Prevention: PLN UIK Tanjung Jati B • Millennium Executive: PLN UIK Tanjung Jati B

No.	Waktu Date	Penghargaan Awards	Jumlah Penghargaan Quantity	Pemberi Penghargaan Award Giver	Kategori Category
4	28 Maret March 28	Public Relation Indonesia Awards (PRIA)	5	PR Indonesia	• Bronse Winner Kategori Media Cetak untuk PT PLN (Persero) • Silver Winner Kategori Annual Report untuk PT PLN (Persero) • Silver Winner Kategori Brand Visual Identity untuk PT PLN (Persero) • Pemenang Terpopuler Kategori BUMN Non Tbk untuk PT PLN (Persero) • Gold Winner Kategori Departemen PR untuk PT Indonesia Power • Bronse Winner in Printed Media Category for PT PLN (Persero) • Silver Winner in Annual Report Category for PT PLN (Persero) • Silver Winner in Brand Visual Identity Category for PT PLN (Persero) • Most Popular Winner in Non-Tbk BUMN Category for PT PLN (Persero) • Gold Winner in PR Department Category for PT Indonesia Power
5	10 April April 10	HR Excellence Award 2019	2	SWA Media & Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia SWA Media & Management Institute, Faculty of Economics, University of Indonesia	PT PLN (Persero) meraih 2 kategori: • Recruitment Strategic • Learning and Development Strategy PT PLN (Persero) won 2 categories: • Strategic Recruitment • Learning and Development Strategy
6	24 April April 24	BUMN Marketeers Awards 2019	5	MarkPlus	PT PLN (Persero) mendapat penghargaan di 5 kategori: • The Most Promising Company in Marketing 3.0 • The Most Promising Company in Entrepreneurial SOEs • The Most Promising Company in Branding Campaign • The Most Promising Company in Tactical Marketing • The Most Promising Company in Strategic Marketing PT PLN (Persero) awarded in 5 categories: • The Most Promising Company in Marketing 3.0 • The Most Promising Company in Entrepreneurial SOEs • The Most Promising Company in Branding Campaign • The Most Promising Company in Tactical Marketing • The Most Promising Company in Strategic Marketing
7	16 Juli July 16	Mitra BUMN periode 2017-2019	1	ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember)	Penghargaan untuk PT PLN (Persero) Awarded to PT PLN (Persero)
8	18 Juli July 18	Mitra Investasi Terbaik 2019	1	Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Hajj Financial Management Agency (BPKH)	Penghargaan untuk PT PLN (Persero) Awarded to PT PLN (Persero)

Penghargaan dan Pengakuan Eksternal
Awards and External Recognitions

No.	Waktu Date	Penghargaan Awards	Jumlah Penghargaan Quantity	Pemberi Penghargaan Award Giver	Kategori Category
9	6 September September 6	Indonesia Sustainable Development Goals Award (ISDA) 2019	10	Corporate Forum for Community Development (CFCD) bersama Bappenas dan Kementerian/ Lembaga terkait Corporate Forum for Community Development (CFCD) with Bappenas and related Ministries/ Institutions	• Grand Silver: PT PLN (Persero) • Platinum Kategori Tujuan 4 - Pendidikan Berkualitas: PLN Pusdiklat • Platinum Kategori Tujuan 8 - Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi: PLN UID Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta • Platinum Kategori Tujuan 12 - Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan: PLN UID Jawa Timur • Gold Kategori Tujuan 1 - Tanpa Kemiskinan: PLN UIW Bangka Belitung • Gold Kategori Tujuan 4 - Pendidikan Berkualitas: PLN UIT JBT • Gold Kategori Tujuan 6 - Air Bersih dan Sanitasi Layak: PLN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat • Gold Kategori Tujuan 11 - Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan: PLN UIW Nusa Tenggara Barat • Gold Kategori Tujuan 15 - Ekosistem Daratan: PLN UIK SBS • Silver Kategori Tujuan 7 - Energi Bersih dan Terjangkau: PLN UID Jawa Barat • Grand Silver: PT PLN (Persero) • Platinum in Category Goal 4 - Quality Education: PLN Pusdiklat • Platinum in Category Goal 8 - Decent Work and Economic Growth: PLN UID Central Java and D.I. Yogyakarta • Platinum in Category Goal 12 – Responsible Consumption and Production: PLN UID East Java • Gold inr Category Goal 1 - No Poverty: PLN UIW Bangka Belitung • Gold in Category Goal 4 - Quality Education: PLN UIT JBT • Gold in Category Goal 6 - Clean Water and Sanitation: PLN South, Southeast and West Sulawesi • Gold in Category Goal 11 - Sustainable Cities and Communities: PLN UIW West Nusa Tenggara • Gold in Category Goal 15 – Life on Land: PLN UIK SBS • Silver in Category Goal 7 – Affordable and Clean Energy: PLN UID West Java
10	6 September September 6	ASEAN Coal Awards 2019 - Bangkok Thailand	3	ASEAN Centre for Energy (ACE)	• 1st Winner Kategori Clean Coal Use and Technology Utilization – Sub Kategori Power Generation – Large Scale untuk Unit Pembangkit Suralaya • 1st Runner Up Kategori Clean Coal Use and Technology Utilisation – Sub Kategori Power Generation – Small Scale untuk Unit Jasa Pembangkitan Jeranjang • 2nd Runner Up Kategori Clean Coal Use and Technology Utilisation – Sub Kategori Power Power Generation – Medium Scale untuk Unit Jasa Pembangkitan Lontar • 1st Winner in Clean Coal Use and Technology Utilization Category - Power Generation - Large Scale Sub Category for Generating Unit of Suralaya • 1st Runner Up Clean Coal Use and Technology Utilization Category - Power Generation - Small Scale Sub Category for Generation Service Unit of Jeranjang • 2nd Runner Up Clean Coal Use and Technology Utilization Category - Power Power Generation - Medium Scale Sub Category for Generation Services Unit of Lontar

No.	Waktu Date	Penghargaan Awards	Jumlah Penghargaan Quantity	Pemberi Penghargaan Award Giver	Kategori Category
11	10 September September 10	The Best Contact Center Indonesia 2019	9	Indonesian Contact Center Association (ICCA)	Contact Center PLN yang dikelola oleh PT ICON+ mendapat 9 kategori: • GOLD Award untuk kategori The Best Customer Experience (Korporat) • SILVER Award untuk kategori The Best Tehnology Innovation (Korporat) • SILVER Award untuk kategori The Best People Development (Korporat) • BRONZE Award untuk kategori The Best Business Contribution (Korporat) • PLATINUM Award untuk kategori Agen Badan Publik atas nama Qudsiyah (Individu) • SILVER Award untuk kategori Supervisor Kecil atas nama atas Tony Wahyu Praditya (Individu) • SILVER Award untuk kategori Quality Assurance Kecil atas nama Heri Firmansyah (Individu) • BRONZE Award untuk kategori Quality Assurance Besar atas nama Ridwan Effendi (Individu) • BRONZE Award untuk kategori Agen Inbound Menengah atas nama Ketut Adi Putra (Individu) PLN's Centact Center managed by PT Icon+ wan 9 categories: • GOLD Award for the Best Customer Experience Category (Corporate) • SILVER Award for The Best Technological Innovation Category (Corporate) • SILVER Award for The Best People Development Category (Corporate) • BRONZE Award for The Best Business Contribution Category (Corporate) • PLATINUM Award for Public Institution Agent Category for Qudsiyah (Individual) • SILVER Award for Small Supervisor Category for Tony Wahyu Praditya (Individual) • SILVER Award for Small Quality Assurance Category for Heri Firmansyah (Individual) • BRONZE Award for Large Quality Assurance Category for Ridwan Effendi (Individual) • BRONZE Award for Medium Inbound Agent Category for Ketut Adi Putra (Individual)
12	14 November November 14	"Brand of The Year" 2019-2020	1	World Branding Forum	PT PLN (Persero) untuk kategori Energy-Power PT PLN (Persero) for Energy-Power Category
13	21 November November 21	Anugerah SNI Award 2019	1	Badan Standarisasi Nasional National Standardization Agency	PLN UID Jakarta Raya meraih Gold untuk Organisasi Besar Jasa PLN Parent Unit of Distribution of Jakarta Raya obtained Gold Award for Large Service Organization

Sertifikasi

Certification

Unit-unit PLN umumnya telah menerapkan standar operasional terakreditasi, baik dalam aspek manajemen mutu, manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, manajemen pengamanan, manajemen lingkungan, manajemen energi, implementasi manajemen aset, dan lainnya.

PLN Units generally have implemented accredited operating standards, both in quality management, occupation health and safety management, safety management, environmental management, energy management, assets management aspects, and so forth.

PAS 99:2012 - Integrated Management System (IMS) Sertifikasi PAS 99:2012 - Integrated Management System (IMS) dimiliki oleh 2 Unit Induk PLN.
The Integrated Management System (IMS) is held by 2 Units of PLN Holding.

SNI ISO 9001:2015 atau ISO 9001: 2008 – Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 atau ISO 9001: 2008 – Quality Management System Sistem Manajemen Mutu berjumlah 55 sertifikasi yang dimiliki oleh 16 unit induk PLN dan 39 unit pelaksana PLN.
55 Quality Management System certificates are held by 16 Units of PLN Holding and 39 PLN Managing Units.

PP No 50-2012 - Sistem Manajemen K3 PP No 50-2012 - OHS Management System Sertifikasi Sistem Manajemen K3 dimiliki oleh 183 Unit PLN, yang terdiri dari 39 Unit Induk PLN dan 144 Unit Pelaksana PLN.
The OHS Management System certificate is held by 183 Units of PLN, which consists of 39 Units of PLN Holding and 144 PLN Managing Units.

Perkapolri No 24-2007 - Sistem Manajemen Pengamanan Perkapolri No 24-2007 – Safety Management System Sistem Manajemen Pengamanan dimiliki oleh 40 Unit PLN, yang terdiri dari 4 Unit Induk PLN & 36 Unit Pelaksana PLN.
The Safety Management System is held by 40 Units of PLN, which consists of 4 Units of PLN Holding and 36 PLN Managing Units.

SNI ISO 14001:2015 atau ISO 14001: 2004 – Sistem Manajemen Lingkungan SNI ISO 14001:2015 atau ISO 14001: 2004 – Environmental Management System Sistem Manajemen Lingkungan dimiliki oleh 31 Unit, yang terdiri dari 5 Unit Induk PLN & 26 Unit Pelaksana PLN.
The Environmental Management System is held by 31 Units, which consists of 5 Units of PLN Holding and 26 PLN Managing Units.

SNI ISO 50001:2012 – Sistem Manajemen Energi SNI ISO 50001:2012 – Energy Management System Sistem Manajemen Energi dimiliki oleh 2 Unit Induk PLN.
The Energy Management System is held by 2 Units of PLN Holding.

SNI ISO 55001:2014 – Pengenalan dan Implementasi Manajemen Assets (EAM) SNI ISO 55001:2014 – Assets Management Introduction and Implementation (EAM) Pengenalan dan Implementasi Manajemen Assets (EAM) dimiliki oleh 4 Unit PLN, yang terdiri dari 3 Unit Induk PLN & 1 Unit Pelaksana PLN.
The Assets Management Introduction and Implementation (EAM) is held by 4 Units of PLN, which consists of 3 Units of PLN Holding and 1 PLN Managing Unit.

SNI ISO 17020, ISO 17021, ISO 17025, ISO 17065 - Akreditasi Laboratorium SNI ISO 17020, ISO 17021, ISO 17025, ISO 17065 - Laboratories Accreditation Akreditas Laboratorium dimiliki oleh 4 unit PLN, yang terdiri dari 3 Unit Induk PLN & 1 Unit Pelaksana PLN.
The Laboratories Accreditation is held by 4 Units of PLN, which consists of 3 Units of PLN Holding and 1 PLN Managing Unit.

SNI ISO 27001: 2013 - Sistem Manajemen Keamanan Informasi SNI ISO 27001: 2013 - Information Safety Management System Sistem Manajemen Keamanan Informasi dimiliki oleh 1 Unit Induk PLN.
The Information Safety Management System is held by 1 Unit of PLN Holding.

SNI ISO 20000-1: 2011 - IT Service Management SNI ISO 20000-1: 2011 - IT Service Management IT Service Management dimiliki oleh 2 Unit Induk PLN.
The IT Service Management is held by 2 Units of PLN Holding.

Rekapitulasi Sertifikasi Tahun 2019 — Certificate Recapitulation In 2019

No	Sertifikasi Standar yang Diimplementasikan di Unit Induk/Unit Pelaksana Standard Certification Implemented in Parent Unit/Executing Unit	Singkatan abbreviation	Total
1	PAS 99:2012 – Sistem Manajemen Terintegrasi (SMT)|Integrated Management System (IMS)	SMT (IMS)	68
2	SNI ISO 9001:2015/ISO 9001:2008 - Sistem Manajemen Mutu|Quality Management System	SMM	174
3	PP No 50-2012 - Sistem Manajemen K3|OHSAS 18001 - Ocupational Health and Safety Management Systems	SMK3	323
4	Perkapolri No 24-2007 - Sistem Manajemen Pengamanan|Safety Management System	SMP	44
5	SNI ISO 14001:2015/ISO 14001:2004 - Sistem Manajemen Lingkungan|Environmental Management System	SML	72
6	SNI ISO 50001:2012 - Sistem Manajemen Energi|Energy Management System	SME	3
7	SNI ISO 55001:2014 - Pengenalan dan Implementasi Manajemen Assets (EAM)|Assets Management Introduction and Implementation (EAM)	AMS	22
8	SNI ISO 17025:2008 - Akreditasi Laboratorium |Laboratories Accreditation	AL (Lab Pengujian Kalibrasi) (Calibration Testing Lab)	2
9	SNI ISO 17021:2011 - Akreditasi Laboratorium |Laboratories Accreditation	AL (Lembaga Sertifikasi SMM) (Certification Body)	1
10	SNI ISO 17021:2011 - Akreditasi Laboratorium |Laboratories Accreditation	AL (Lembaga Sertifikasi SML) (Certification Body)	1
11	Lembaga Audit SMK3 (Perpanjangan)| SMK3 Audit Institute (Extension)	Lembaga Audit SMK3 OHSMS	1
12	SNI ISO 17065:2012 - Akreditasi Laboratorium (Lembaga Sertifikasi Produk) |Laboratories Accreditation (Product Certification Body)	AL (LSPro)	1
13	SNI ISO 17020:2012 - Akreditasi Laboratorium (Lembaga Inspeksi Teknik) |Laboratories Accreditation (Technical Inspection Body)	AL (LIT ISO)	1
14	SNI ISO 26000:2010 – Tanggung Jawab Sosial|Social Responsibility	CSR	1
15	SNI ISO 31000:2009 – Manajemen Risiko|Risk Management	SMR	3
16	SNI ISO 28001:2007 – Sistem Manajemen Keamanan Rantai Pasok|Security Management System for Supply Chain	SMRP	3
17	Akreditasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Accreditation from Directorate General of Electricity	LIT	1
18	Pranata Penelitian dan Pengembangan|Research and Development Institution	Pranata Litbang R&D Institution	1

Peristiwa Penting 2019

Event Highlights 2019

18 Jan

Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat sambungan listrik gratis kepada 30.937 rumah tangga miskin dan rentan miskin di Garut, Jawa Barat yang merupakan Program Sponsorship Sinergi BUMN Penyambungan Listrik Gratis untuk Masyarakat Miskin. Program ini didukung oleh 34 BUMN dan 1 Anak Perusahaan. Hingga akhir tahun 2018, sebanyak 100.970 keluarga Jawa Barat telah menikmati sambungan listrik dengan daya 450 VA yang cukup untuk menggunakan TV, penanak nasi, dan menyalakan lampu.

President Joko Widodo handed over certificates for free power connections to 30,937 underprivileged and vulnerable households in Garut, West Java as part of SOE Synergy Sponsorship Program for Free Power Connection for Underprivileged People. This program was supported by 34 SOE and 1 Subsidiary. At end of 2018, there were 100,970 West Java families that could enjoy 450 VA power connection, enough for TV, rice cooker and lights.

25 Feb

Presiden Joko Widodo meresmikan PLTU Cilacap Ekspansi 1x660 MW yang berlokasi di Desa Karangkandri, Slarang dan Manganti, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pembangkit ini menggunakan Super-Critical Boiler berbahan bakar batubara low range (4.200 kilo kalori per kilogram) serta dilengkapi dengan Electristastic Precipitator dan Fluidized Gas Desulphurizaton (FGD) yang didesain untuk dapat beroperasi secara efisien dan ramah lingkungan.

President Joko Widodo launched CFPP Cilacap 1x660 MW located in Karangkandri, Slarang and Manganti Villages, Cilacap Regency, Central Java. This power plant uses low-range coal-fired Super-Critical Boiler (4,200 kilo calories per kilogram) and is equipped with Electristastic Precipitator and Fluidized Gas Desulphurizaton (FGD) which are designed to operate efficiently and environmentally friendly.

19 Mar

PLN menandatangani nota kesepahaman dengan Think Smart Grid (TSG) France untuk mengembangkan *Smart Grid* di sistem Sulawesi dan *Smart Micro Grid* di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Nota kesepahaman berjangka waktu dua tahun ini menunjukkan komitmen PLN dalam meningkatkan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT).

PLN signed a memorandum of understanding with France's Think Smart Grid (TSG) to develop Smart Grid in Sulawesi system and Smart Micro Grid in Mandalika, West Nusa Tenggara. This two-year memorandum of understanding shows PLN's commitment to increase the use of New Renewable Energy (EBT).

10 Apr

PLN meraih dua penghargaan Human Resource Excellence Award 2019 yang diadakan oleh SWA Media bekerja sama dengan Lembaga Manajemen – FE Universitas Indonesia. Penghargaan yang diterima PLN adalah untuk kategori: Recruitment Strategic dan Learning and Development Strategy.

PLN won two awards 2019 Human Resource Excellence Award held by SWA Media in collaboration with Management Institute - FE Universitas Indonesia. The awards received by PLN were for: Strategic Recruitment and Learning and Development Strategy categories.

23 Apr

PLN mendapat pinjaman kredit sindikasi perbankan nasional senilai Rp16,75 triliun dengan jangka waktu 10 tahun untuk pembangunan gardu induk dan transmisi dalam rangka mendukung program 35 GW. Sindikasi perbankan terdiri dari Bank BRI, Mandiri, BCA, CIMB Niaga, SMI, BNI Syariah dan BCA Syariah.

PLN obtained syndicated loan from local banks amounting to Rp16.75 trillion with a 10-year period for development of substations and transmissions in order to support the 35 GW program. The banking syndication consists of BRI, Mandiri, BCA, CIMB Niaga, SMI, BNI Syariah and BCA Syariah.

26 Apr

PLN dan anak usahanya B'Right PLN Batam meraih sepuluh penghargaan dalam ajang BUMN Marketeers Awards 2019. Penghargaan tersebut masing-masing pada kategori The Most Promising Company in Marketing 3.0, The Most Promising Company in Entrepreneurial SOEs, The Most Promising Company in Branding Campaign, The Most Promising Company in Tactical Marketing, dan The Most Promising Company in Strategic Marketing.

PLN and its subsidiary, B'Right PLN Batam, received ten awards in 2019 BUMN Marketeers Awards. The awards were in the categories of The Most Promising Company in Marketing 3.0, The Most Promising Company in Entrepreneurial SOEs, The Most Promising Company in Branding Campaign, The Most Promising Company in Tactical Marketing and The Most Promising Company in Strategic Marketing.

1 Mei May

Pemulihan kelistrikan pasca banjir bandang dan tanah longsor di Bengkulu telah mencapai 74,28%. Sebanyak 119 gardu telah dinormalkan, dan telah mengalirkan listrik untuk 7.348 pelanggan atau 74,64%.

Power outage recovery after flash floods and landslides in Bengkulu reached 74.28%. A total of 119 substations had been normalized and power had been supplied to 7,348 customers or 74.64%.

20 Mei May

Pemancangan tiang pertama sebagai simbol pembangunan Program Listrik Desa se-Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Dari 2.130 desa di Kalimantan Barat, 1.515 di antaranya sudah berlistrik (Rasio desa berlistrik PLN sebesar 71,13%). Dengan Program Listrik Desa, RE PLN di Kalimantan Barat akan meningkat menjadi 87,22% dari sebelumnya 87,07% dengan tambahan 13.169 pelanggan.

Commencement of development of Village Electricity Program in 2019 in Sanggau Regency, West Kalimantan. Of 2,130 villages in West Kalimantan, 1,515 of them were already electrified (Ratio of PLN electrified villages was 71.13%). With the Village Electricity Program, RE PLN in West Kalimantan increased to 87.22% from 87.07% with additional 13,169 customers.

24 Juni June

PLN berhasil menerangi desa-desa di dua pulau di Kabupaten Halmahera Utara yang meliputi Desa Tolonuo Selatan, Desa Dagasuli, Desa Dedeta, Desa Pitako dan Desa Jikolamo di Pulau Tolonuo, dan enam desa lainnya di Pulau Dagasuli. PLN menyediakan mesin berkapasitas 100 kilowatt (kW) untuk melistriki 300 pelanggan di Pulau Tolonuo dan 250 kW untuk 300 pelanggan di Pulau Dagasuli. Dari 199 desa di Kabupaten Halmahera Utara, hingga semester I 2019, PLN telah melistriki 182 desa.

PLN managed to electrify the villages on two islands in North Halmahera Regency including South Tolonuo Village, Dagasuli Village, Dedeta Village, Pitako Village and Jikolamo Village on Tolonuo Island, and six other villages on Dagasuli Island. PLN provided 100 kilowatt (kW) engine to electrify 300 customers on Tolonuo Island and 250 kW for 300 customers on Dagasuli Island. There were 182 villages out of 199 villages in North Halmahera Regency that had been electrified at end of the first semester of 2019.

5 Juli July

Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat Haryanto WS meresmikan operasi perdana terminal batubara PLTU Jawa 7 2x1.000 MW. PLTU Jawa 7 akan menjadi PLTU batu bara terbesar dan pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi *boiler Ultra Super Critical* (USC), dengan bahan bakar batu bara kalori rendah 4000-4600 kCal/kg. Konsumsi batu bara untuk operasi 2 unit akan mencapai 7 juta ton per tahun.

Regional Business Director of West Java, Haryanto WS, launched the operations of coal terminal for PLTU Java 7 2x1,000 MW. CFPP Java 7 will be the largest and the first coal CFPP in Indonesia that uses Ultra Super Critical (USC) boiler technology, with low calorie coal 4000-4600 kCal/kg. Coal consumption to operate 2 units will reach 7 million tons per year.

15 Juli July

PLN kembali menerbitkan obligasi internasional senilai USD1,4 miliar yang berhasil dipasarkan dengan harga yang lebih rendah dari *yield* di *secondary market*. Obligasi tersebut diterbitkan dengan tingkat bunga terendah sepanjang sejarah penerbitan obligasi USD, baik oleh PLN maupun dari BUMN manapun di Indonesia untuk tenor 10 dan 30 tahun. Dual-trance USD *global bond* masing-masing sebesar USD700 juta diterbitkan dengan tingkat bunga 3,875% untuk tenor 10 tahun dan 4,875% untuk tenor 30 tahun.

PLN once again issued global bonds worth USD1.4 billion, which were successfully sold at a price lower than the yield on the secondary market. The bonds were issued at the lowest interest rate in the history of USD bond issuance, both by PLN and any other SOE in Indonesia for 10 and 30-year tenors. Dual-trance USD global bonds amounting to USD700 million each were issued with an interest rate of 3.875% for the 10-year tenor and 4.875% for the 30-year tenor.

26 Agst Aug

PLN menandatangani perjanjian kerja sama dengan Gubernur Bali terkait penguatan sistem ketenagalistrikan dengan pemanfaatan energi bersih di Provinsi Bali. Dalam kerja sama ini, PLN dan Pemerintah Provinsi Bali antara lain menyepakati pembangunan Jawa-Bali Connection 500 kV untuk memperkuat sistem Bali, pengembangan pembangkit dalam RUPTL, pembangunan insfrastruktur hub LNG dan terminal LNG, peningkatan pasar kendaraan listrik dan kompor listrik dan peralatan lainnya, peningkatan kapasitas jaringan listrik menuju jaringan cerdas, pembangunan pembangkit energi bersih serta penerapan tarif khusus untuk membiayai pemanfaatan energi bersih.

PLN signed a cooperation agreement with the Governor of Bali to improve the power system with the use of clean energy in the Province of Bali. In this cooperation, PLN and the Provincial Government of Bali, among others, agreed on construction of Java-Bali Connection 500 kV to strengthen the Bali system, development of power plants in RUPTL, construction of LNG hub infrastructure and LNG terminal, market expansion for electric vehicles and electric stoves and other electric equipment, increase in capacity of power network towards smart network, construction of clean energy power plants and application of special tariffs to finance the use of clean energy.

31 Agst Aug

Plt Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani menyampaikan komitmen PLN untuk mendukung Peraturan Presiden (Perpres) No. 5 Tahun 2019 tentang kendaraan listrik. Dukungan tersebut diwujudkan dengan menyiapkan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). PLN menyediakan dua skema kerja sama bisnis SPKLU bagi mitra strategis, yaitu Company Owned Company Operated (COCO) dan Partner Owned Partner Operated (POPO).

Act. President Director of PLN, Sripeni Inten Cahyani, uttered PLN's commitment to support Presidential Regulation (Perpres) No. 5 of 2019 concerning electric vehicles. This support was realized by preparing Public Electric Vehicle Charging Station (SPKLU) infrastructure. PLN offered two SPKLU business cooperation schemes for strategic partners, namely Company Owned Company Operated (COCO) and Partner Owned Partner Operated (POPO).

19 Sept

PLN merealisasikan interkoneksi sistem kelistrikan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Interkoneksi ditandai dengan keberhasilan pengoperasian tegangan satu jalur terhadap jaringan transmisi bertegangan 150 kilo volt (kV) yang terbentang dari Wotu (Sulawesi Selatan) hingga Kendari (Sulawesi Tenggara) berlokasi di Gardu Induk Malili dan Lasusua. Pengoperasian ini mengoptimalkan sistem kelistrikan wilayah Sulawesi bagian selatan, serta meningkatkan keandalan dan efisiensi sistem kelistrikan Sulawesi Tenggara. Surplus daya sebesar 400 MW di Sulawesi Selatan kini dapat disalurkan ke sistem Sulawesi Tenggara.

PLN realized interconnection of power systems in South Sulawesi and Southeast Sulawesi. The interconnection was marked by successful operations of one-lane voltage on 150 kilo volt (kV) transmission network that runs from Wotu (South Sulawesi) to Kendari (Southeast Sulawesi) located in Malili and Lasusua substations. This interconnection optimizes the power system in the southern part of Sulawesi, and increases reliability and efficiency of the power system in Southeast Sulawesi. A power surplus of 400 MW in South Sulawesi can now be channeled to the Southeast Sulawesi system.

16 Okt Oct

PLN menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan 20 perusahaan untuk kerja sama percepatan pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan dan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). MoU ini merupakan langkah konkret dan komitmen bersama untuk mengimplementasikan Perpres nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*Battery Electric Vehicle*).

PLN signed a memorandum of understanding (MoU) with 20 companies for collaboration to accelerate development of battery electric vehicle for road transportation and Public Electric Vehicle Charging Station (SPKLU). This MoU was a concrete step and a joint commitment to implement Perpres No. 55 of 2019 concerning acceleration of Battery Electric Vehicle program.

19 Okt Oct

Setelah merampungkan pembangunan Tol Listrik Sulawesi tahap I, PLN mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan lainnya yang tersebar di Sulawesi Barat, Selatan dan Tenggara untuk memperluas jangkauan Tol Listrik Sulawesi Tahap I. Pembangunan prioritas meliputi 5 jaringan transmisi 150 kV Mamuju Baru-Pasangkayu, Siwa-Palopo, Tanjung Bunga-Punagaya, Kendari-Puuwatu dan 1 Gardu Induk 30 MVA di Topoyo.

After completing phase 1 of the construction of Sulawesi Electricity Toll, PLN accelerated completion of the construction of other electricity infrastructures spread across West, South and Southeast Sulawesi for coverage expansion of the phase I of Sulawesi Electricity Toll. Prioritized developments include 5 150 kV transmission lines Mamuju Baru-Pasangkayu, Siwa-Palopo, Tanjung Bunga-Punagaya, Kendari-Puuwatu and 1 30 MVA substation in Topoyo.

14 Nov

Hingga bulan Oktober 2019, PLN berhasil mencapai pengembangan pembangkit EBT sebesar 7.435 MW. Pemanfaatan EBT merupakan bukti komitmen PLN untuk menggunakan energi ramah lingkungan. PLN telah mengelola kapasitas pembangkit EBT sebesar 12.1% dari total bauran seluruh energi pembangkit yang terdiri dari PLTA sebesar 4.711 MW, PLTP 1.979 MW, PLTS 58 MW, PLTB 131 MW, PLTM 385 MW, dan PLT Bio/Sa (biomassa dan sampah) 171 MW.

Until October 2019, PLN had managed to develop 7,435 MW new and renewable energy (NRE) power plant. The use of NRE is the proof of PLN's commitment to use environmentally friendly energy. PLN had managed 12.1% NRE power plant capacity of the total energy mix of power plants consisting of HEPP 4,711 MW, GPP 1,979 MW, SPP 58 MW, WPP 131 MW, Minihydro PP 385 MW and biomass/waste PP 171 MW.

25 Nov

PLN menandatangani kontrak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di 151 lokasi di Papua dan Papua Barat dengan Konsorsium Sky-Tritama, dan Konsorsium Telkominfra-Pracom-Canadian Solar.

PLN signed a contract to develop Solar Power Plant (SPP) in 151 locations in Papua and West Papua with Sky-Tritama Consortium and Telkominfra-Pracom-Canadian Solar Consortium.

27 Nov

Untuk meningkatkan kinerja dan memantau proyek yang tengah dibangun dari Sabang sampai Merauke, PLN membentuk Pusat Pengelola Informasi dan Solusi (P2IS). Peluncuran P2IS oleh Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani dan Plt Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Energi, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Heri Purnomo dan dihadiri seluruh jajaran Direksi PLN bertempat di Kantor Pusat. P2IS adalah cikal bakal advanced analysis, yang meliputi sistem operasi, proyek yang tengah dibangun PLN, *media crisis center* dan juga memantau kinerja perusahaan.

To improve performance and to monitor projects under construction from Sabang to Merauke, PLN established Information and Solutions Management Center (P2IS). The launch of P2IS by Act. President Director of PLN, Sripeni Inten Cahyani, and Act. Deputy for Mining, Energy, Strategic Industries and Media of the Ministry of SOE, Heri Purnomo, and attended by PLN's Board of Directors at the Head Office. P2IS is the forerunner of advanced analysis, which includes operating system, ongoing projects, media crisis center and also corporate performance monitoring.

12 Des Dec

PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah 1 (UIP JBT 1) sedang membangun konstruksi pembangkit listrik dan jaringan transmisi di Regional Jawa Bagian Tengah (Jawa Barat, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta). Salah satunya adalah pembangunan PLTA Jatigede 2x55 MW yang telah mencapai 73,18 %. PLTA Jatigede akan jadi proyek pembangkit pertama dari PLN UIP JBT I yang ditargetkan selesai pada tahun 2020.

PLN Parent Unit of Development of Central Part Java 1 (UIP JBT 1) is currently constructing power plants and transmission line in Central Java Region (West Java, Central Java and Yogyakarta Special Region). One of them is construction of HEPP Jatigede 2x55 MW which had reached 73.18%. HEPP Jatigede will be the first power plant project of PLN UIP JBT I which is targeted to be completed in 2020.

PLN Peduli
KERTAS
PLN Peduli
PLN Peduli

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

177 **GAMBARAN UMUM**
General Description
177 **Kondisi Pasar Internasional**
International Market Outlook
178 **Kondisi Pasar Domestik**
Domestic Market Outlook
181 **Komoditas Energi**
Energy Commodities
183 **KONDISI INDUSTRI KETENAGALISTRIKAN**
Electricity Industry Outlook
185 **Kebutuhan Tenaga Listrik**
Electricity Demand
185 **Pengembangan Sistem Tenaga Listrik**
Electricity System Development
187 **Program 35.000 MW**
35,000 MW Program
187 **Program Peningkatan Rasio Elektrifikasi**
Program to Increase Electrification Ratio
188 **KINERJA OPERASI PER SEGMEN USAHA**
Operational Performance by Business Segment
188 **Dasar Penetapan Segmen Usaha PLN**
Basis for Application of PLN Business Segments
189 **Penjualan Listrik**
Electricity Sales
190 **Jumlah Pelanggan**
Number of Customers
191 **Daya Tersambung**
Connected Power
192 **Susut Jaringan**
Network Losses
193 **Tingkat Keandalan**
Service Reliability Level
195 **TINJAUAN KINERJA USAHA**
Tinjauan Kinerja Usaha
195 **Kapasitas Terpasang**
Installed Capacity
195 **Produksi Listrik**
Power Production
196 **Bauran Energi**
Energy Mix
198 **Biaya Pokok Penyediaan**
Cost of Supply
200 **Tarif Tenaga Listrik**
Electricity Tariff
202 **Subsidi Listrik**
Electricity Subsidy
203 **Kompensasi**
Compensation
203 **Pendapatan Penjualan Listrik**
Electricity Sales Revenue
204 **URAIAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN**
Financial Review
205 **Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian**
Consolidated Statements of Financial Position
205 **Aset**
Assets
210 **Liabilitas**
Liabilities
213 **Ekuitas**
Equity
213 **Laporan Laba Rugi Konsolidasian**
Consolidated Statements of Profit or Loss
220 **Laporan Arus Kas**
Statements of Cash Flows
222 **Kemampuan Membayar Utang**
Solvency
226 **Struktur Modal dan Kebijakan Struktur Modal**
Capital Structure and Capital Structure Policy
227 **Modal kerja Bersih**
Net Working Capital
227 **Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal**
Material Commitments for Capital Expenditures
229 **Realisasi Investasi Barang Modal**
Realization of Capital Expenditures
231 **Realisasi Dibandingkan Target**
Comparison of Realization and Target
232 **Target-Target Kuantitatif pada Tahun Mendatang**
Quantitative Targets for the Coming Year
233 **Peristiwa Setelah Periode Pelaporan**
Events After Reporting Period
238 **Prospek Usaha**
Business Prospects
240 **Aspek Pemasaran**
Marketing
254 **Dividen dan Kebijakan Dividen**
Dividend and Dividend Policy
254 **Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP)**
Employee and/or Management Stock Ownership Program (ESOP/MSOP)
254 **Realisasi Penggunaan Dana Obligasi dan Efek Lainnya**
Use of Proceeds from Issueance of Bonds and Other Securities
257 **Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi atau Restrukturisasi Hutang/Modal**
Divestment, Business Combination/Merger, Aqcuisition or Debt/Capital Restructuring
257 **Informasi Material Mengenai Ekspansi**
Material Information Regarding Ekspansion
257 **Transaksi Benturan Kepentingan**
Transaction of Conflict of Interests
257 **Transaksi Dengan Pihak-Pihak yang Berelasi**
Related Party Transactions
264 **Perubahan Peraturan**
Changes in Regulation
268 **Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan pada Tahun Buku Terakhir**
Changes in Accounting Policies Applied in The Current Fiscal Year
270 **Informasi Kelangsungan Usaha**
Going Concern
271 **Profitabilitas**
Profitability
271 **Kontribusi Kepada Negara**
Contribution to the Country

65%
65%

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discusion and Analysis

Prospek perekonomian tahun 2019 tidak terlalu optimistis. Selain karena dampak perang dagang, pertumbuhan Indonesia semester pertama 2019 masih tertahan karena adanya perhelatan nasional pemilihan umum.

The economic outlook for 2019 is not very optimistic. Apart from the effects of the trade war, Indonesia's growth in the first half of 2019 was still restrained due to national elections.

GAMBARAN UMUM

Kondisi Pasar Internasional

Sejak pertengahan tahun 2018, situasi global telah berubah drastis. Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang berkepanjangan telah memberi tekanan langsung pada volume perdagangan dunia. Arus perdagangan dan investasi di sektor produktif semakin melemah yang berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global.

Hampir semua negara mengalami tantangan pertumbuhan ekonomi, bahkan beberapa negara sudah mulai terjebak dalam resesi. Sementara negara maju dan berkembang lain berada dalam tren melambat dan berjuang untuk menghindari terjadinya krisis ekonomi ke depan melalui stimulus fiskal dan pelonggaran kebijakan moneter. Sejak bulan Maret 2019, perlambatan ekonomi global sudah mulai mengarah pada tanda-tanda resesi. Sejumlah indikator moneter di AS telah memberikan peringatan dini bahwa AS berpotensi mengalami resesi yang akan berlanjut menjadi resesi global.

Eskalasi ketegangan dagang yang terus meningkat telah menyebabkan semua harga komoditas mengalami pelemahan, termasuk harga komoditas logam, mineral (kecuali nikel dan emas), batu bara dan minyak kelapa sawit. Pelemahan harga komoditas sudah dimulai sejak menjelang akhir tahun 2018 dan mencapai titik terendah di tahun 2019.

Di Tiongkok, sejumlah indikator telah menunjukkan berlanjutnya perlambatan perekonomian. Pertumbuhan sektor industri Tiongkok dan indikator utama lainnya sudah melambat. Ekonomi Tiongkok hanya tumbuh 6,1% pada tahun 2019, pertumbuhan terendah dalam hampir tiga dekade terakhir. Permintaan global dan domestik yang melemah di tengah berlarut-larutnya perang dagang berdampak pada ekonomi Tiongkok, negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia.

Pada saat yang sama, perang dagang juga berdampak besar pada AS terutama di sektor pertanian karena Tiongkok menghentikan atau mengurangi pembelian komoditas pertanian AS.

GENERAL DESCRIPTION

International Market Outlook

Since mid-2018, the global situation has changed drastically. The prolonged trade war between the United States (US) and China put direct pressure on the world trade volume. The weakening trade and investment flows in productive sectors had an impact on slowing global economic growth.

Almost all countries experienced challenging economic growth. Even while some countries were experiencing recession, other developed and developing countries were in a slowing trend and struggling to avoid the onset of the economic crisis through fiscal stimulus and quantitative easing monetary policy. Since March 2019, the global economic slowdown led to recession signals. A number of monetary indicators in the US gave an early warning that the US had the potential to experience a recession that will continue to become a global recession.

Escalation of the increasing trade tension has weakened all commodity prices, including prices of metals and minerals (except nickel and gold), coal and palm oil. The weakening of commodity prices started since the end of last year and reached its lowest point in 2019.

In China, a number of indicators showed a continued economy slowdown. Growth in China's industrial sector and other key indicators decelerated significantly. From October 2019, China's growth had not met the projection, with the Chinese economy only growing by 6.1%, the lowest growth in almost three decades. Weakening global and domestic demands amid the prolonged trade war increasingly burdened the Chinese economy, the country with the second largest economy in the world.

At the same time, the trade war also affected the US especially in the agricultural sector because China stopped or reduced purchases of US agricultural commodities. On the contrary,

Sebaliknya, rencana pengenaan tarif produk-produk Tiongkok justru mendorong korporasi AS untuk mengimpor barang-barang input industri dari Tiongkok seperti suku cadang kendaraan dan elektronik yang dibutuhkan industri manufaktur sebelum tanggal penetapan tarif diberlakukan. Situasi tersebut meningkatkan defisit neraca perdagangan AS.

the plan to impose tariffs on Chinese products actually encouraged US corporations to import industrial raw materials from China, such as auto parts and electronics, needed by the manufacturing industry before the tariffs were enacted. This situation increased the US trade deficit.

Perubahan geopolitik global menimbulkan fragmentasi perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Sejak perang dagang, arus barang dari Tiongkok ke AS turun drastis. Banyak perusahaan keluar dari Tiongkok agar tetap bisa mengekspor ke AS tanpa terkena kenaikan tarif.

Global geopolitical changes triggered fragmentation in trade, investment and economic growth. Since the trade war, the flow of goods from China to the US dropped dramatically. Many companies left China to be able continue to export to the US without being hit by tariff increase.

Bagi negara-negara ASEAN, muncul peluang untuk menarik relokasi industri dari Tiongkok. Secara geografis, Vietnam paling diuntungkan sebagai penghubung logistik barang produksi Tiongkok. Perubahan geopolitik menjadi momentum pertumbuhan investasi bagi Vietnam. Peranannya dalam perdagangan global telah meningkat dari 0,5% pada 2010 menjadi 1,5% pada 2015. Sebagai perbandingan, Indonesia selama 20 tahun terakhir stagnan di 0,5%.

For ASEAN countries, there were opportunities to attract industrial relocation from China. Geographically, Vietnam had the most advantage as a logistics hub for Chinese goods. Geopolitical change was a momentum for investment growth for Vietnam. Its participation in the global trade increased from 0.5% in 2010 to 1.5% in 2015. In comparison, Indonesia, for over the past 20 years has stagnated at 0.5%.

Kondisi Pasar Domestik

Prospek perekonomian domestik tahun 2019 tidak terlalu optimistis. Selain karena dampak perang dagang, pertumbuhan Indonesia sepanjang paruh pertama 2019 masih tertahan karena adanya perhelatan nasional pemilihan umum legislatif dan presiden-wakil presiden pada bulan April 2019. Tensi politik yang sempat meninggi membuat kalangan usaha bersikap "*wait and see*" hingga pemerintahan dan kabinet baru terbentuk. Walaupun pada akhirnya pasar merespons positif situasi kondusif yang terjadi setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terkait perselisihan hasil Pemilihan Presiden 2019.

Domestic Market Outlook

The prospect for domestic economy in 2019 was not very optimistic. Apart from the effects of the trade war, Indonesia's growth during the first half of 2019 was still held back by the national legislative and presidental andvice-presidential elections in April 2019. The political tension made the business players tend to "wait and see" until the formation of the new cabinet. Although in the end the market responded positively to the conducive situation after Constitutional Court issued a verdict on disputes related to the results of 2019 presidental and vice-presidental election.

Perlambatan ekonomi dunia berdampak pada realisasi pertumbuhan ekspor Indonesia yang lebih rendah. Selain itu, ketidakpastian ekonomi global berdampak pula pada rendahnya pertumbuhan investasi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Pembentukan Modal Tetap

The slowdown in the global economy had an impact on the lower growth of Indonesia's exports. In addition, the uncertainty of global economy also led to a low investment growth. Statistics Indonesia (BPS) noted that Gross Fixed

Bruto (PMTB) atau investasi pada tahun 2019 hanya tumbuh 4,45%, lebih rendah dibandingkan 6,67% pada tahun 2018.

Nilai tukar mata uang Rupiah juga tak terlepas dari bayangan sentimen global walaupun secara tahunan Rupiah masih termasuk tangguh dibandingkan mata uang lainnya. Melanjutkan pelemahan di akhir tahun 2018, Rupiah memasuki tahun 2019 dengan kurs Rp14.465 per USD (kurs tengah Bank Indonesia). Tetapi masih di bulan Januari, Dolar AS melemah secara global dipicu pernyataan Ketua Bank Sentral AS The Fed yang mengindikasikan sikap "*dovish*", atau kecondongan untuk menunda kenaikan suku bunga. The Fed lebih memilih untuk tetap mempertahankan suku bunga acuannya di level 2,25%-2,50%.

Hal ini memicu masuknya aliran modal asing ke Indonesia yang mendorong penguatan Rupiah. Rupiah mampu mencapai level terbaik Rp13.945 per USD pada 19 Juli 2019 walaupun dengan pergerakan yang sangat fluktuatif. Ketidakjelasan kelanjutan perundingan dagang AS-Tiongkok, perkembangan Brexit, serta kenaikan harga minyak dunia menjadi faktor risiko bagi volatilitas nilai tukar Rupiah. Menjelang akhir tahun, Rupiah kembali menguat dan ditutup di level Rp13.901 pada 31 Desember, terbaik sepanjang tahun 2019. Sejak awal tahun, Rupiah menguat 3,9% dengan kurs rata-rata Rp14.147 per USD.

Capital Formation (PMTB), or investment, in 2019 only grew by 4.45%, lower than the 6.67% in the previous year.

The Rupiah exchange rate was also affected by the global sentiment, although on an annual basis the Rupiah was more resilient compared to other currencies. Continued to weaken at the end of 2018, the Rupiah entered the year 2019 with an exchange rate of Rp14,465 per USD (Bank Indonesia middle rate). Nevertheless, in January, the US dollar weakened globally, triggered by a statement by the Chair of the US Federal Reserve who indicated a "dovish" attitude, or the inclination to delay the increase in interest rates. The Fed preferred to keep its benchmark interest rate at 2.25% -2.50%.

This triggered an influx of foreign capital into Indonesia which encouraged the strengthening of Rupiah. The Rupiah was able to reach its best level at Rp13,945 per USD on July 19, 2019, although with volatile fluctuations. The uncertainty of US-China trade negotiations, Brexit continuation and the increase in world oil prices were risk factors for the volatility of the Rupiah exchange rate. Towards the end of the year, the Rupiah strengthened and closed at Rp13,901 on December 31, the best in 2019. Since the beginning of the year, the Rupiah strengthened by 3.9% with an average exchange rate of Rp14,147 per USD.

Nilai Tukar Dollar AS terhadap Rupiah Tahun 2019
USD to IDR Exchange Rate History in 2019
(Sumber Source: www.bi.go.id)

Perlambatan ekonomi domestik memang tidak dapat dihindari sebagaimana juga dihadapi oleh hampir semua negara. BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 sebesar 5,02%, lebih rendah dibandingkan 5,17% pada tahun 2018, terutama karena kontraksi pertumbuhan investasi barang modal, selain bangunan dan mesin sebagai imbas dari perlambatan perekonomian global.

The slowdown in the domestic economy was unavoidable, as experienced by almost all countries. BPS announced that Indonesia's economic growth in 2019 was 5.02%, slower than 5.17% in 2018, mainly due to contraction in the growth of investment in capital expenditures, other than buildings and machinery, as a result of the slowing global economy.

Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia 2014-2019
Indonesia's Gross Domestic Produk (GDP) 2014-2019
(Sumber Source: www.bi.go.id)

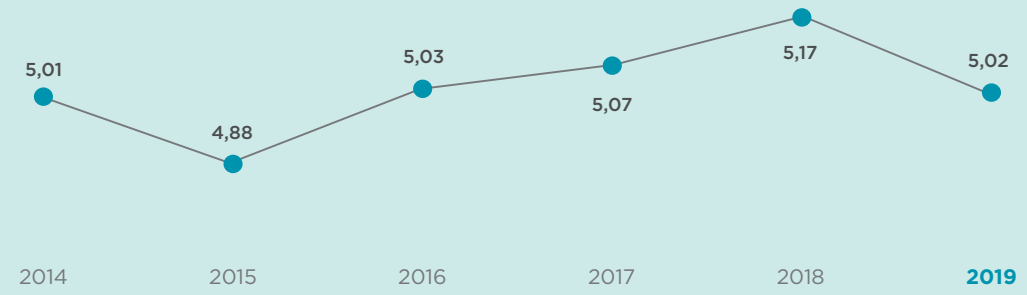

Terlepas dari gejolak perekonomian global, pemerintah tetap menunjukkan konsistensinya melanjutkan akselerasi pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional. Pada tahun 2019, pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp415 triliun. Dalam waktu 5 tahun, anggaran infrastruktur telah meningkat lebih dari 150% dari Rp162,6 triliun pada tahun 2014.

Despite the global economic turmoil, the government continued to show consistency in continuing the acceleration of infrastructure development to increase competitiveness, growth and equitable distribution of the national economy. In 2019, the government allocated an infrastructure budget of Rp415 trillion. Within 5 years, the infrastructure budget increased by more than 150% from Rp162.6 trillion in 2014.

Pemerintah telah menetapkan 227 Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Di dalam Perpres tersebut, proyek strategis nasional mencakup 223 proyek infrastruktur ditambah 4 program, yaitu program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, industri pesawat jarak menengah N-245, industri pesawat jarak menengah R-80, dan program pemerataan ekonomi. Hingga semester I-2019, sebanyak 48 proyek strategis telah dinyatakan selesai.

The government instigated 227 National Strategic Projects (PSN) with Presidential Regulation (Perpres) No. 56 of 2018 concerning the Second Amendment to Presidential Regulation No. 3 of 2016 concerning Accelerated Implementation of National Strategic Projects. In this Perpres, the national strategic projects include 223 infrastructure projects plus 4 programs, namely electricity infrastructure development program, N-245 medium range aircraft industry, R-80 medium range aircraft industry and economic equalization program. At end of the first semester of 2019, 48 strategic projects had been completed.

Pembangunan infrastruktur yang masif mendorong kenaikan indeks daya saing infrastruktur Indonesia. Dalam laporan Global Competitiveness Report 2019 yang dirilis WEF, nilai sub-indeks infrastruktur Indonesia mencapai 67,7, lebih baik dibandingkan tahun 2018 yaitu 66,8. Artinya ada peningkatan daya saing sebesar 0,9 poin. Pembangunan infrastruktur fisik terutama jalan raya telah membuat indeks daya saing Indonesia untuk aspek konektivitas jalan serta kualitas jalan mengalami perbaikan yang cukup signifikan.

A massive infrastructure development has boosted Indonesia's infrastructure competitiveness index. In 2019 the Global Competitiveness Report released by WEF, the score of Indonesia's infrastructure sub-index reached 67.7, higher than 66.8 in 2018. This implied an increase in competitiveness of 0.9 points. The development of physical infrastructure, especially roads, has made the Indonesian competitiveness index for road connectivity and road quality significantly improved.

Komoditas Energi

Komoditas energi sebagian besar merupakan komoditas yang ditambang atau diekstrak, termasuk bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi dan gas alam. Harga komoditas energi menjadi salah satu indikator ekonomi karena pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi kuat dengan konsumsi energi.

Energy Commodities

Energy commodities are mostly mined or extracted, including fossil fuels such as coal, petroleum and natural gas. Energy commodity prices are one of the main economic indicators because economic growth has a strong correlation with energy consumption.

Sepanjang tahun 2019, harga komoditas energi dunia terus terkoreksi seiring tren perlambatan ekonomi global. Harga batu bara mengacu pada Newcastle Index mengalami penurunan kurang lebih 30% hingga USD66,50 per metrik ton (MT) pada Desember 2019. Sedangkan acuan Indonesian Coal Index (ICI) 4 (4200 kcal/kg) berada di kisaran USD34,33 per MT.

During 2019, global energy commodity prices continued to be corrected, driven by the global economic slowdown. Coal prices referring to the Newcastle Index decreased by approximately 30% to USD66.50 per metric ton (MT) in December 2019. While Indonesian Coal Index (ICI) 4 (4200 kcal/kg) was in the range of USD34.33 per MT.

Mengacu pada data bulanan harga batu bara acuan (HBA) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sejak awal tahun 2019 harga batu bara sudah menunjukkan tren yang negatif. HBA pada bulan Januari 2019 hanya mencapai USD92,41 per MT sebagai kelanjutan dari laju penurunan yang telah dimulai sejak Agustus 2018 karena ketidakpastian pasar akibat kebijakan pemerintah Tiongkok yang membatasi impor batu bara.

Based on monthly data of the benchmark coal price (HBA) released by the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM), from the beginning of 2019, coal prices followed a negative trend. HBA in January 2019 only reached USD92.41 per MT as a continuation of the declining rate since August 2018 driven by market uncertainty due the coal import restriction policy of the Chinese government

Penurunan harga batu bara secara konsisten terus berlanjut walaupun sempat terjadi titik balik pada November, di mana HBA naik sedikit karena dua bulan terakhir 2019 merupakan musim dingin. Sepanjang tahun 2019 HBA berfluktuasi dalam rentang USD64,80-USD92,41 per MT dengan rerata HBA dari Januari-Desember 2019 sebesar USD77,89 per MT. Turun 21% dibandingkan rerata tahun 2018 sebesar USD98,97 per MT.

The decline in coal prices consistently continued despite a turning point in November, when HBA slightly increased because of the winter season in the last two months of 2019. During 2019, HBA fluctuated in the range of USD64.80-USD92.41 per MT with an average HBA from January-December 2019 of USD77.89 per MT, down 21% compared to the average in 2018 of USD98.97 per MT.

Harga Batu Bara Acuan (HBA) 2018-2019
Indonesia's Benchmark Thermal Coal Price 2018-2019
(Sumber Source: www.esdm.go.id)

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2019	92,41	91,80	90,57	88,85	81,86	81,48	71,92	72,67	65,79	64,80	66,27	66,30
2018	95,54	100,69	101,86	94,75	89,53	96,61	104,65	107,93	104,81	100,89	97,90	92,51

Harga minyak dunia juga terus menunjukkan tren menurun. Penurunan harga minyak dunia berdampak pada harga rata-rata acuan minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP). Di akhir tahun 2018, ICP turun hingga ke level USD54,81 per barel mengikuti harga minyak Brent yang berada di kisaran USD57 per barel. Di awal tahun 2019, harga Brent kembali turun ke USD53,18 per barel.

Harga mulai merangkak naik sejak Februari 2019 setelah organisasi negara-negara pengekspor minyak (Organization of the Petroleum Exporting Countries/OPEC), Rusia dan negara-negara produsen non-OPEC lainnya yang dikenal sebagai aliansi OPEC+ sepakat mengurangi pasokan sebesar 1,2 juta barel per hari mulai 1 Januari hingga akhir Juni 2019. Selain itu, sanksi AS yang membatasi ekspor minyak Venezuela dan Iran juga berdampak pada berkurangnya pasokan global. Pada Agustus 2019, ICP telah mencapai USD57,27 per barel. Angka tersebut merupakan yang terendah pada paruh kedua 2019 walaupun kembali terkoreksi hingga mencapai USD60,84 per barel pada September 2019.

The world's oil prices also showed a downward trend. The decline in the world's oil prices had an impact on the average price of Indonesia's Crude Price (ICP). At end of 2018, ICP fell to USD54.81 per barrel following the price of Brent oil which was in the range of USD57 per barrel. In early 2019, the price of Brent decreased further to USD53.18 per barrel.

The prices began to climb up since February 2019 after Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), Russia and other non-OPEC producing countries, known as the OPEC+ alliance, agreed to reduce supply by 1.2 million barrels per day from January 1 to the end of June 2019. In addition, US sanctions restricting the export of Venezuelan and Iranian oil also had an impact on the decreasing global supply. In August 2019, ICP reached USD57.27 per barrel. This figure was the lowest in the second half of 2019, although it was corrected again to USD60.84 per barrel in September 2019.

Pergerakan Harga Bulanan ICP
ICP Monthly Price Movement
(USD per barrel)

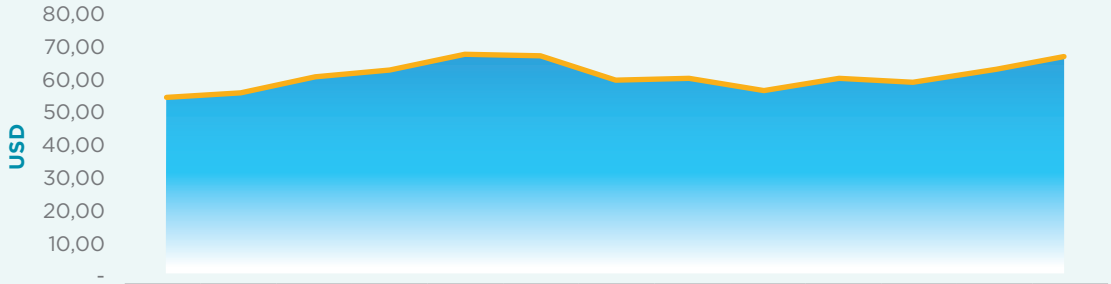

Dec-18	Jan-19	Feb-19	Mar-19	Apr-19	May-19	Jun-19	Jul-19	Aug-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Dec-19
54,81	56,55	61,31	63,60	68,31	68,07	61,00	61,32	57,27	60,84	59,82	63,26	67,18

USD

KONDISI INDUSTRI KETENAGALISTRIKAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan (UU 30/2009), penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah, dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, swasta dan swadaya masyarakat, yang meliputi usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, usaha penjualan tenaga listrik dan usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.

ELECTRICITY INDUSTRY OUTLOOK

According Law No. 30 of 2009 concerning Electricity (Law 30/2009), electricity supply is controlled by the state, which is carried out by the government and regional governments based on the principle of regional autonomy, implemented by State-Owned Enterprise (SOE), Regional-Owned Enterprises (BUMD), cooperatives, the private sector and non-governmental organizations, which include power plant, transmission, distribution, electricity sales and integrated electricity supply.

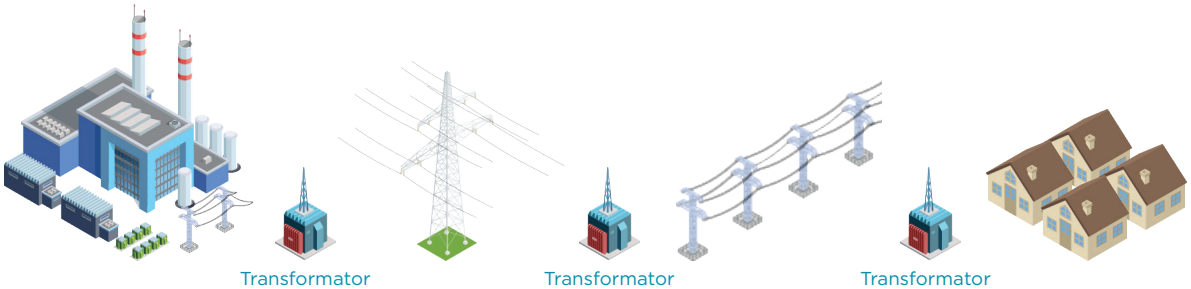

Pusat Listrik Power Plant	Saluran Transmisi Transmission Line	Saluran Distribusi Distribution Line	Konsumen Consumer
PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTA, PLTD	SUTET 500KV SUTT & SKTT 150KV SUTT 70KV		

Sistem Ketenagalistrikan | Electricity System

PLN adalah satu-satunya BUMN penyelenggara ketenagalistrikan untuk kepentingan umum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Peran PLN sebagai penyelenggara ketenagalistrikan mengalami perubahan setelah diterbitkannya UU 30/2009. Berdasarkan undang-undang tersebut, PLN tidak lagi memegang monopoli penyediaan tenaga listrik di Indonesia dan tidak lagi berperan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) tetapi sebagai Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL). Pemegang IUPTL adalah pelaku usaha yang mendapat izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen. Walaupun demikian, PLN sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, diberikan prioritas pertama (*first right of refusal*) dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

PLN is the only state-owned electricity company, operating in the public interest and established based on Government Regulation No. 23 of 1994 concerning conversion from Public Company (Perum) into a Liability Company (Persero).

The role of PLN as an electricity provider underwent changes after the issuance of Law 30/2009. Based on this law, PLN no longer holds a monopoly on electricity supply in Indonesia and no longer plays the role as the Holder of Authority to Conduct Electricity Business as a (PKUK) but as the Holder of Electricity Supply Business License (IUPTL). IUPTL holder is an entity that owns a license to conduct electricity supply business for public purposes, which include power plant, transmission, distribution and electricity sales to consumers. Nevertheless, PLN as an extension of the government in supplying electricity for public purposes is given the first priority (right of first refusal) in supplying electricity for public purposes.

Proses Bisnis PLN | PLN Business Process

Kebutuhan Tenaga Listrik

Pertumbuhan kebutuhan listrik nasional didorong oleh beberapa faktor utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk dan program elektrifikasi, serta program-program pembangunan yang memicu tumbuhnya kawasan bisnis dan permukiman baru. Pertumbuhan ekonomi berdampak pada peningkatan permintaan barang dan jasa, yang membutuhkan tenaga listrik sebagai salah satu pendukung proses produksinya. Selain itu, hasil dari pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mendorong peningkatan konsumsi listrik untuk peralatan listrik/elektronik. Data PLN menunjukkan, realisasi penjualan listrik PLN dalam lima tahun terakhir terus meningkat dari 202.845 GWh menjadi 245.518 GWh dengan tingkat pertumbuhan majemuk tahunan (compound annual growth rate/CAGR) mencapai 5%.

Electricity Demand

The growth of national electricity demand is driven by several main factors, including economic growth, population growth and electrification programs, as well as development programs that trigger the growth of new business and residential areas. Economic growth has an impact on increasing demand for goods and services, which require electricity as to support production process. In addition, the result of economic growth is an increase in people's welfare which further encourages an increase in electricity consumption for electronic equipment. PLN data showed that the realization of PLN electricity sales in the last five years continued to increase from 202,845 GWh to 245,518 GWh with a compound annual growth rate (CAGR) reaching 5%.

Pertumbuhan Penjualan Tenaga Listrik 2015-2019
Electricity Sales Growth 2015-2019
(GWh)

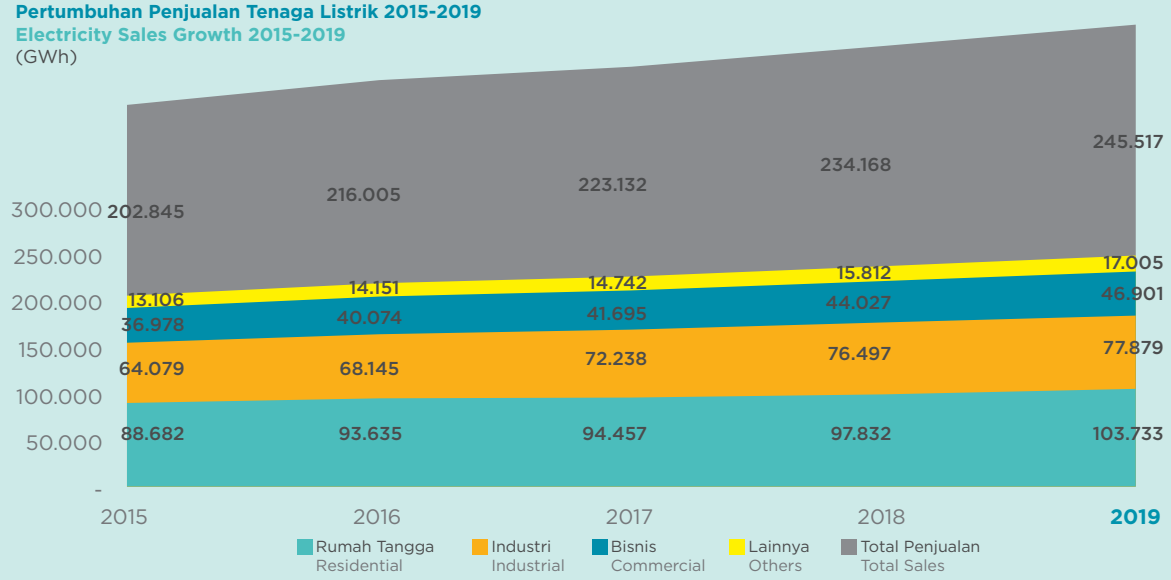

Pengembangan Sistem Tenaga Listrik

Mengacu pasal 28 dan 29 UU 30/2009, PLN selaku Pemegang IUPTL untuk kepentingan umum wajib menyediakan tenaga listrik secara terus-menerus, dalam jumlah yang cukup dengan mutu dan keandalan yang baik. PLN harus mampu melayani kebutuhan tenaga listrik saat ini

Electricity Systems Development

Referring to Articles 28 and 29 of Law 30/2009, PLN as the holder of IUPTL in the public interest is required to provide electricity continuously, in sufficient quantities with good quality and reliability. PLN must be able to serve current and future electricity needs in accordance with the

maupun di masa yang akan datang sesuai amanat undang-undang tersebut dengan merencanakan dan melaksanakan pengembangan sistem tenaga listrik jangka panjang berdasarkan proyeksi pertumbuhan kebutuhan listrik nasional.

Program pengembangan sistem tenaga listrik membutuhkan rencana investasi yang feasible dan efisien karena umumnya proyek-proyek tenaga listrik mempunyai *lead time* yang panjang. Sebagai contoh, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) atau Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 1.000 MW membutuhkan waktu 6-10 tahun sejak perencanaan awal (*feasibility study*) hingga beroperasi. Oleh karena itu, PLN menyusun dokumen perencanaan sepuluh tahun ke depan yang disebut Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Saat ini PLN telah memiliki RUPTL terbaru periode 2019-2028 yang telah memasukkan informasi terbaru mengenai kondisi pasokan, kebutuhan dan realisasi beban tenaga listrik, realisasi penyelesaian proyek-proyek pembangkit tenaga listrik, baik proyek PLN maupun proyek dari Pengembang Pembangkit Listrik (PPL) atau Independent Power Producer (IPP), serta pertumbuhan ekonomi.

Di dalam RUPTL 2019-2028, PLN memproyeksikan pertumbuhan kebutuhan listrik nasional sebesar 6,42% per tahun. Dasar penentuan meliputi data historis penjualan per segmen pelanggan hingga tahun 2017 dan estimasi penjualan 2018, serta asumsi pertumbuhan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi 10 tahun mendatang. Berdasarkan asumsi tersebut, pada tahun 2028 kebutuhan listrik nasional akan mencapai 432.713 GWh dengan proyeksi jumlah pelanggan mencapai 88,1 juta pelanggan.

Kebutuhan tenaga listrik tersebut tidak dapat seluruhnya dipenuhi oleh PLN karena keterbatasan kemampuan pendanaan. Penyediaan tenaga listrik membutuhkan dana yang sangat besar untuk investasi infrastruktur ketenagalistrikan, mulai dari pembangunan pembangkit, jaringan transmisi, hingga jaringan distribusi, agar listrik dapat disalurkan hingga ke konsumen dengan mutu dan keandalan yang terbaik. Untuk memenuhi kebutuhan listrik sebesar 432.713 GWh pada tahun 2028,

mandate of law by planning and implementing the development of long-term electricity systems based on projected growth in the national electricity demand.

Electricity system development programs require investment plans that are feasible and efficient because, in general, electricity projects have a long lead time. For example, the construction of 1,000 MW Steam Power Plant (PLTU) or Hydro Power Plant (PLTA) takes 6-10 years from the initial planning (feasibility study) to operations. Therefore, PLN prepared a ten-year planning document called Electricity Supply Business Plan (RUPTL). PLN currently has the latest RUPTL for 2019-2028 period, which includes the latest information on supply, demand and realization of electricity load, realization of completion power plant projects, both PLN projects and Independent Power Producer (IPP) projects, as well as economic growth.

In 2019-2028 RUPTL, PLN projected a national electricity demand growth of 6.42% per year. The basis included historical data on sales per customer segments until 2017 and estimated sales of 2018, as well as assumptions of population growth, economic growth and inflation in the next 10 years. Based on these assumptions, in 2028, the national electricity demand will reach 432,713 GWh with a projected number of customers reaching 88.1 million.

The electricity demand is not entirely met by PLN because of its limited financial capacity. Electricity supply requires huge funds for electricity infrastructure investment, starting from the construction of power plants, transmission networks, to distribution networks, so that electricity can be distributed to consumers with the best quality and reliability. To meet the electricity needs of 432,713 GWh in 2028, construction of power plants with a total

dibutuhkan pembangunan pembangkit listrik dengan kapasitas total 56.395 MW, jaringan transmisi sepanjang 57.293 kilometer sirkit (kms) serta gardu induk dengan kapasitas total 124.341 MVA.

Program 35.000 MW

Program pembangunan ketenagalistrikan 35.000 MW meliputi pengembangan pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi serta gardu induk. Program 35.000 MW didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Dukungan finansial yang dibutuhkan untuk membangun pembangkit baru berkapasitas total 35.000 MW lengkap dengan sarana penyaluran diperkirakan mencapai USD72,3 miliar. Sesuai kebijakan pemerintah untuk mewujudkan program 35.000 MW, pemerintah membuka kesempatan bagi investasi swasta untuk berpartisipasi maksimal dalam pembangunan pembangkit listrik melalui mekanisme pembangkit listrik swasta atau *Independent Power Producers* (IPP). Bahkan pemerintah memberikan porsi lebih besar kepada pengembang listrik swasta dibandingkan dengan PLN. Selain partisipasi melalui skema IPP, pihak swasta dapat berpartisipasi melalui proyek *Engineering, Procurement, and Construction* (EPC) yang ditawarkan PLN, kerja sama pemerintah swasta (KPS), ataupun skema sewa beli (*build, lease and transfer*).

Program Peningkatan Rasio Elektrifikasi

Rasio Elektrifikasi (RE) menandakan tingkat perbandingan rumah tangga yang telah menikmati listrik dengan jumlah keseluruhan rumah tangga. Pemerintah menargetkan RE seluruh Indonesia mencapai 100% pada tahun 2020. Berdasarkan data yang ada, sebagian besar masyarakat yang belum mendapat layanan penyediaan tenaga listrik berada di daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T). Oleh karena itu, diperlukan upaya maksimal untuk mempercepat peningkatan RE sehingga dalam dua tahun ke depan dapat mencapai target 100%, dimana ditargetkan RE 99,90% pada tahun 2019 dan 100% pada tahun 2020. Pada tahun 2019, secara nasional (rumah tangga pelanggan PLN dan non-PLN) RE tercapai sebesar 98,89%.

capacity of 56,395 MW, transmission lines along 57,293 circuit kilometers (kms) and substations with a total capacity of 124,341 MVA are required.

35,000 MW Program

The 35,000 MW electricity development program includes development of power plants, transmission and distribution networks and substations. The 35,000 MW program is supported by Presidential Regulation No. 4 of 2016 concerning Acceleration of Electricity Infrastructure Development.

The financial support required to build new plants with a total capacity of 35,000 MW equipped with transmission and distribution network (substations) is estimated to reach USD72.3 billion. In accordance with government policy to realize the 35,000 MW program, the government has opened the opportunity for private investments to participate maximally in the construction of power plants through the mechanism of Independent Power Producers (IPP). The government even gives a bigger portion to IPP compared to PLN. In addition to participation through the IPP scheme, a private party can participate through Engineering, Procurement, and Construction (EPC) projects offered by PLN, public private partnership (KPS), or build-lease-transfer scheme.

Program to Increase Electrification Ratio

An Electification Ratio (RE) indicates the comparison of households that have access to electricity with total number of households. The government targets RE throughout Indonesia to reach 100% by 2020. Based on available data, the majority of people who have not yet received electricity supply services are in the frontier, outermost, lagging (3T) regions. Therefore, maximum efforts are needed to accelerate the increase in RE so that in the next two years the target of 100% can be reached, which is targeted at RE 99.90% in 2019 and 100% in 2020. In 2019, nationally, (PLN and non-PLN household customers) RE reached 98.89%.

Untuk mencapai RE 100% pada tahun 2020, diperlukan penambahan rata-rata sekitar 870.000 rumah tangga berlistrik per tahun. Sedangkan untuk mempertahankan RE tetap 100%, selanjutnya diperlukan penambahan rata-rata sekitar 560.000 rumah tangga berlistrik per tahun mulai tahun 2021 sampai dengan 2038.

To achieve 100% RE by 2020, an average of around 870,000 households must be electrified annually. Meanwhile, to keep RE at 100%, it is necessary to add an average of around 560,000 electrified households annually from 2021 to 2038.

Grafik Rasio Elektrifikasi 2010 - 2020
2010-2019 Electrification Graphic Ratio

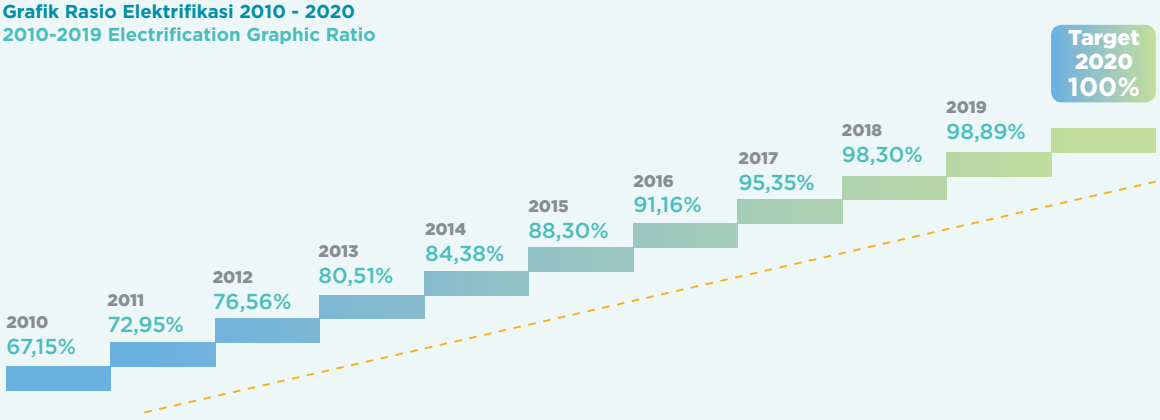

KINERJA OPERASI PER SEGMEN USAHA

Dasar Penerapan Segmen Usaha PLN

Segmen adalah proses pembagian pasar pelanggan potensial menjadi kelompok dan segmen yang berbeda berdasarkan karakteristik tertentu.

Kriteria utama yang harus dipenuhi adalah segmen operasi harus memiliki karakteristik ekonomis yang sejenis (margin keuntungan, persebaran, tingkat pertumbuhan penjualan, dan sebagainya). Wilayah Jawa Bagian Barat, Jawa Bagian Tengah dan Jawa Bagian Timur digabungkan sebagai satu segmen operasi dikarenakan memiliki karakteristik konsumen yang sejenis.

Manajemen menggunakan segmen operasi didasarkan kebutuhan pada sisi konstruksi, operasi, dan pengembangan, yang digunakan dalam mengambil keputusan strategis. Direksi membagi segmen operasi sepanjang tahun 2019 menjadi 4 segmen operasi regional, yaitu: 1. Sumatera, 2. Jawa, Madura dan Bali, 3. Sulawesi dan Kalimantan, 4. Maluku, Papua dan Nusa Tenggara.

OPERATIONAL PERFORMANCE BY BUSINESS SEGMENT

Basis for Application of PLN Business Segments

Segmentation is the process of dividing potential customer markets into different groups and segments based on certain characteristics.

The main criterion is that within an operating segment there are similar economic characteristics profit margin, distribution, sales growth and so forth. The regions of West Java, Central Java and East Java are combined as one operating segment because they have similar consumer characteristics.

Management applies operational segmentation by needs for construction, operations and development, which are considered in making strategic decisions. The Board of Directors during 2019 applied 4 regional operation segments, namely: 1. Sumatra, 2. Java, Madura and Bali, 3. Sulawesi and Kalimantan, 4. Maluku, Papua and Nusa Tenggara.

Penjualan Listrik

Pada tahun 2019, penjualan tenaga listrik nasional mencapai 245.518 GWh, atau meningkat sebesar 4,6% dari 234.618 GWh pada tahun 2018. Peningkatan penjualan listrik ini disebabkan oleh meningkatnya penjualan tenaga listrik pada segmen pelanggan lainnya (7,5%), segmen pelanggan bisnis (6,5%), dan segmen pelanggan rumah tangga (6%).

Electricity Sales

In 2019, national electricity sales reached 245,518 GWh, an increase of 4.6% from 234,618 GWh in 2018. This increase in electricity sales was driven by other customer segment (7.5%), business customer segment (6.5%) and household customer segment (6%).

Tabel: Penjualan Listrik Berdasarkan Segmen Pelanggan

Table: Electricity Sales by Customer Segment

Segmen Pelanggan	2017 (GWh)	2018 (GWh)	2019 (GWh)	Perubahan Change %	Customer Segment
	a	b	c	d = (c-b)/b	
Rumah Tangga	94.457	97.832	103.733	6,0	Residential
Industri	72.238	76.947	77.879	1,2	Industrial
Bisnis	41.695	44.027	46.901	6,5	Commercial
Lainnya	14.743	15.812	17.005	7,5	Others
Jumlah	223.134	234.618	245.518	4,6	Total

Berdasarkan segmen operasi regional, penjualan di Regional Jawa Bagian Tengah mencatat peningkatan tertinggi sebesar 2.944 GWh dari 75.727 GWh di tahun 2018 menjadi 78.671 GWh di tahun 2019. Secara persentase, Regional Kalimantan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 8,8% dari 9.836 GWh pada tahun 2018 menjadi 10.703 GWh di tahun 2019.

By regional operation segment, sales in Central Java Region recorded the highest increase of 2,944 GWh from 75,727 GWh in 2018 to 78,671 GWh in 2019. In percentage terms, the Kalimantan Region recorded the highest growth of 8.8% from 9,836 GWh in 2018 to 10,703 GWh in 2019.

Kontribusi penjualan listrik terbesar berasal dari wilayah regional Jawa Bagian Tengah, yakni sebesar 32,0% dari penjualan tenaga listrik tahun 2019. Sedangkan regional Jawa Bagian Barat menyumbang 23,5% dan Jawa Bagian Timur, Bali & Nusa Tenggara 18,7%. Secara total, Regional Jawa, Bali, Nusa Tenggara menyumbang 74,2% dari total penjualan listrik PLN tahun 2019.

The largest contribution to electricity sales came from Central Java Region, which amounted to 32.0% of electricity sales in 2019, while the West Java Region contributed 23.5% and East Java, Bali & Nusa Tenggara 18.7%. In total, Java, Bali, Nusa Tenggara Regions accounted for 74.2% of total electricity sales in 2019.

Tabel: Penjualan Listrik per Wilayah Regional

Table: Electricity Sales per Region

Wilayah Regional	2017 (GWh)	2018 (GWh)	2019 (GWh)	Perubahan Change %	Region
	a	b	c	d = (c-b)/b	
Sumatera*	34.627	36.797	39.158	6,4	Sumatra
Jawa Bagian Barat	53.325	55.941	57.692	3,1	Western part Java
Jawa Bagian Tengah	72.552	75.727	78.671	3,9	Central part Java
Jawa Bagian Timur, Bali & Nusa Tenggara**	39.184	43.825	45.885	4,7	Eastern part Java, Bali & Nusa Tenggara
Kalimantan	9.197	9.836	10.703	8,8	Kalimantan
Sulawesi	11.943	10.007	10.784	7,8	Sulawesi
Maluku & Papua	2.306	2.485	2.624	5,6	Maluku & Papua
Jumlah	223.134	234.618	245.518	4,6	Total

* Termasuk Batam | Including Batam.
** Pada tahun 2017 Nusa Tenggara masuk Regional Sulawesi bukan masuk Regional Jawa Bagian Timur dan Bali | In 2017, Nusa Tenggara Region was included in Sulawesi Region not included in Eastern Part Java and Bali Region

Jumlah Pelanggan

Pada tahun 2019, jumlah pelanggan PLN mencapai 75,71 juta pelanggan, tumbuh 5,3% dibandingkan 71,92 juta pelanggan pada tahun 2018. Penambahan pelanggan terbesar terjadi pada Segmen Rumah Tangga sebanyak 3,5 juta pelanggan baru, meningkat 5,4% menjadi 69,62 juta pelanggan. Secara persentase, segmen Industri mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 19,0% dari 99,18 ribu pelanggan pada tahun 2018 menjadi 104,92 ribu pelanggan. Sedangkan segmen Bisnis naik 2,1% dari 3,75 juta pelanggan pada tahun 2018 menjadi 3,83 juta pelanggan.

Number of Customers

At end of 2019, the number of PLN customers reached 75.71 million, growing by 5.3% compared to 71.92 million customers at end of 2018. The largest increase in the number of customers was in the Household Segment of 3.5 million new customers, an increase of 5.4% to 69.62 million customers. In percentage terms, the Industry Segment recorded the highest growth of 19% from 99.18 thousand customers at end of 2018 to 104.92 thousand customers. Meanwhile, the Business Segment was up 2.1% from 3.75 million customers at end of 2018 to 3.83 million customers.

Tabel: Jumlah Pelanggan per Segmen Pelanggan

Tabel: Customers by Customer Segment

Segmen Pelanggan	2017	2018	2019	Perubahan Change %	Customer Segment
	a	b	c	d = (c-b)/b	
Rumah Tangga	62.543.434	66.071.133	69.619.877	5,4	Residential
Industri	76.816	88.185	104.922	19,0	Industrial
Bisnis	3.579.364	3.750.666	3.829.553	2,1	Commercial
Lainnya	1.868.669	2.007.413	2.151.262	7,2	Others
Jumlah	68.068.283	71.917.397	75.705.614	5,3	Total

Berdasarkan wilayah, peningkatan jumlah pelanggan terbesar pada tahun 2019 terjadi di Regional Jawa Bagian Tengah yang mencatat penambahan 1,07 juta pelanggan baru, meningkat 4,3% dari 25,21 juta pelanggan pada tahun 2018 menjadi 26,28 juta pelanggan. Regional Sumatera mencatat penambahan 810,15 ribu pelanggan baru atau meningkat 5,6% menjadi 15,31 juta pelanggan. Sedangkan Jawa Bagian Timur, Bali & Nusa Tenggara meningkat 866,08 ribu pelanggan baru atau naik 5,8% dari 14,93 juta pelanggan pada tahun 2018 menjadi 15,80 juta pelanggan pada tahun 2019.

By region, the largest increase in the number of customers in 2019 was in Central Java Region, which recorded an increase of 1.07 million new customers, increasing by 4.3% from 25.21 million customers in 2018 to 26.28 million customers. The Sumatra Region recorded a growth of 810.15 thousand new customers, or growing by 5.6% to 15.31 million customers, and the Eastern Java, Bali & Nusa Tenggara Region was up 866 thousand new customers, rising by 5.8% from 14.93 million customers in 2018 to 15.80 million customers at end of 2019.

Tabel: Jumlah Pelanggan per Wilayah Regional

Tabel: Customers by Region

Wilayah Regional	2017	2018	2019	Perubahan Change %	Region
	a	b	c	d = (c-b)/b	
Sumatera*	13.669.601	14.502.646	15.312.795	5.6	Sumatra
Jawa Bagian Barat	7.137.946	7.537.581	7.919.461	5,1	Western part Java
Jawa Bagian Tengah	23.995.271	25.206.136	26.281.435	4,3	Central part Java
Jawa Bagian Timur, Bali & Nusa Tenggara**	14.195.660	14.930.660	15.796.739	5,8	Eastern part Java, Bali & Nusa Tenggara
Kalimantan	3.739.769	4.012.854	4.270.003	6,4	Kalimantan
Sulawesi**	4.211.622	4.518.687	4.831.245	6,9	Sulawesi
Maluku & Papua	1.118.414	1.208.833	1.293.936	7,0	Maluku & Papua
Jumlah	68.068.283	71.917.397	75.705.614	5,3%	Total

* Termasuk Batam | Including Batam.
** Pada tahun 2017 Nusa Tenggara masuk Regional Sulawesi bukan masuk Regional Jawa Bagian Timur dan Bali | In 2017, Nusa Tenggara Region was included in Sulawesi Region not included in Eastern Part Java and Bali Region

Jumlah pelanggan di Jawa, Bali & Nusa Tenggara tetap mendominasi sebanyak 49,99 juta pelanggan dengan kontribusi sekitar 66% dari jumlah pelanggan PLN secara nasional. Dari total pelanggan Jawa, Bali & Nusa Tenggara, jumlah pelanggan di regional Jawa Bagian Tengah mencapai 26,28 juta (34,7% dari total pelanggan), Jawa Bagian Timur, Bali & Nusa Tenggara sebanyak 15,80 juta (20,9% dari total pelanggan) dan Jawa Bagian Barat sebanyak 7,92 juta (10,5% dari total pelanggan). Sedangkan jumlah pelanggan di wilayah regional Sumatera sebesar 15,31 juta (20,2% dari total pelanggan).

The number of customers in Java, Bali & Nusa Tenggara continued to dominate with 49.99 million customers representing 66% of the number of PLN customers nationally. Of total customers in Java, Bali & Nusa Tenggara, the customers in Central Java Region reached 26.28 million customers (34.7% of total customers), East Java, Bali & Nusa Tenggara of 15.80 million customers (20.9%) and Western Java of 7.92 million customers (10.5% of total customers). Meanwhile the number of customers in Sumatera Region was 15.31 million customers (20.2% of total customers).

Daya Tersambung

Seiring dengan pertumbuhan jumlah pelanggan, daya tersambung mengalami kenaikan 6,0% atau 7.796 MVA menjadi 138.077 MVA di tahun 2019.

Connected Power

In line with the increasing number of customers, connected power also increased by 6.0% or 7,796 MVA to 138,077 MVA in 2019.

Tabel: Daya Tersambung per Segmen Pelanggan

Tabel: Connected Power by Customer Segment

Segmen Pelanggan	2017 (MVA)	2018 (MVA)	2019 (MVA)	Perubahan Change %	Customer Segment
	a	b	c	d = (c-b)/b	
Rumah Tangga	59.257	63.577	67.878	6,8	Residential
Industri	27.585	29.136	30.434	4,5	Industrial
Bisnis	26.198	27.752	29.180	5,1	Commercial
Lainnya	8.978	9.816	10.585	7,8	Others
Jumlah	122.018	130.281	138.077	6,0	Total

Peningkatan daya tersambung yang tinggi pada Segmen Rumah Tangga dan Segmen Lainnya merupakan dampak positif pembangunan infrastruktur yang berlangsung di seluruh wilayah Indonesia termasuk pembangunan infrastruktur pendukung transportasi.

The high increase in connected power in the Household Segment and Other Segments was a positive impact of infrastructure development across Indonesia including the construction of transportation supporting infrastructure.

Secara geografis, daya tersambung di Regional Jawa Bagian Tengah mencatat kenaikan tertinggi sebesar 2.295 MVA atau meningkat 5,8% menjadi 41.880 MVA di tahun 2019. Secara nasional, daya tersambung untuk Regional Jawa Bagian Tengah mendominasi hingga 30,33% dari total daya tersambung, selanjutnya Jawa Bagian Barat sebesar 21,9%, Jawa Bagian Timur, Bali & Nusa Tenggara sebesar 19,59% dan Sumatera sebesar 17,04%.

Geographically, connected power in the Central Java Region recorded the highest increase of 2,295 MVA or 5.8% to 41,880 MVA in 2019. Nationally, connected power in the Central Java Region dominated with 30.38% of total connected power, followed by West Java of 21.9%, Eastern Java, Bali & Nusa Tenggara of 19.59% and Sumatra of 17.04%.

Tabel: Daya Tersambung per Wilayah Regional **Table: Connected Power by Region**

Wilayah Regional	2017 (MVA)	2018 (MVA)	2019 (MVA)	Perubahan Change %	Region
	a	b	c	d = (c-b)/b	
Sumatera*	20.373	22.023	23.529	6,8	Sumatra
Jawa Bagian Barat	27.625	29.114	30.237	3,9	Western part Java
Jawa Bagian Tengah	37.293	39.585	41.880	5,8	Central part Java
Jawa Bagian Timur, Bali & Nusa Tenggara**	23.821	25.366	27.050	6,6	Eastern part Java, Bali & Nusa Tenggara
Kalimantan	5.363	5.893	6.387	8,4	Kalimantan
Sulawesi	5.920	6.491	7.017	8,1	Sulawesi
Maluku & Papua	1.623	1.807	1.977	9,4	Maluku & Papua
Jumlah	122.018	130.281	138.077	6,0	Total

* Termasuk Batam | Including Batam.
** Pada tahun 2017 Nusa Tenggara masuk Regional Sulawesi bukan masuk Regional Jawa Bagian Timur dan Bali | In 2017, Nusa Tenggara Region was included in Sulawesi Region not included in Eastern Part Java and Bali Region

Susut Jaringan

Realisasi susut jaringan mengalami perbaikan dengan nilai yang menurun dari 9,51% di tahun 2018 menjadi 9,32% di tahun 2019, yang terdiri dari susut transmisi sebesar 2,26% dan susut distribusi sebesar 7,24%. Penurunan angka susut jaringan ini disebabkan oleh sejumlah langkah investasi dan perbaikan jaringan transmisi dan distribusi berhasil menekan kenaikan susut akibat pertumbuhan beban yang dilakukan Perusahaan, antara lain: *reconductoring* saluran transmisi, *looping* transmisi, pemasangan kompensator, pemasangan gardu induk baru untuk pemotongan jaringan tegangan menengah (JTM), penarikan penyulang baru untuk membagi beban, rehabilitasi JTM, rekonektorisasi *jumper*/ sambungan, penggantian isolator, pemasangan AVR, pemasangan kapasitor, pembangunan gardu sisipan, rekonektorisasi trafo distribusi, mengefektifkan Program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), dan penggantian meter secara periodik.

Network Losses

Network losses improved with a decreasing percentage from 9.51% in 2018 to 9.32% in 2018, consisting of transmission losses of 2.26% and distribution losses of 7.24%. The decline in network losses was due to a number of investments and improvements to transmission and distribution networks such as reconductoring of transmission lines, transmission looping, compensator installation, new substation installation to cut medium voltage networks (JTM), withdrawal of new feeders for load breakers, JTM rehabilitation, reconnection of jumpers/connections, isolator replacement, AVR installation, capacitor installation, insert station construction, reconnection of distribution transformers, effectiveness of Electricity Use Control (P2TL) program, and periodic meter replacement.

Tabel: Susut Jaringan **Table: Network Losses**

Jenis Susut	2017	2018	2019	Type of Losses
	a	b	c	
Susut Transmisi	2,39%	2,32%	2,26%	Transmission Losses
Susut Distribusi	6,53%	7,37%	7,24%	Distribution Losses
Susut Jaringan	8,75%*	9,51%	9,32%	Network Losses

* Terdapat perbedaan cara perhitungan susut di tahun 2017 yang memasukkan kWH dari energi minimum. Jika menggunakan cara perhitungan susut yang sama dengan tahun 2018 dan 2019 maka angka susut jaringan tahun 2017 adalah 9,72% I
There are differences in the method of calculation of losses in 2017 that include kWH of minimum energy. If the same losses calculation method is used with 2018 and 2019 then the 2017 network loss rate is 9.72%

Realisasi susut jaringan menunjukkan hasil bervariasi pada setiap wilayah Regional. Hal ini dapat dilihat dari penjabaran tabel berikut.

The amounts of network losses showed that the results varied in each Region as described in the following table.

Tabel: Susut Jaringan per Wilayah Regional

Table: Network Losses by Region

Keterangan	2017	2018	2019	Description
	a	b	c	
Susut Jaringan - Konsolidasi	8,75%	9,51%	9,32%	Network Losses - Consolidated
Sumatera*	12,47%	12,65%	11,33%	Sumatra
Jawa Bagian Barat, Jawa Bagian Tengah, Jawa Bagian Timur, Bali & Nusa Tenggara **	7,83%	7,74%	8,66%	West Java, Central Java, East Java & Bali
Kalimantan	10,36%	11,00%	10,74%	Kalimantan
Sulawesi **	10,16%	11,23%	11,17%	Sulawesi & Nusa Tenggara
Maluku & Papua	10,71%	11,61%	10,49%	Maluku & Papua

* Termasuk Batam | Including Batam.
** Pada tahun 2017 Nusa Tenggara masuk Regional Sulawesi bukan masuk Regional Jawa Bagian Timur dan Bali |
In 2017, Nusa Tenggara Region was included in Sulawesi Region not included in Eastern Part Java and Bali Region

Tingkat Keandalan Layanan

Perusahaan mengukur tingkat keandalan layanan dengan menggunakan indeks lama gangguan (*System Average Interruption Duration Index*/SAIDI) yang menghitung lamanya pelanggan mengalami gangguan dalam satuan menit per pelanggan. Sedangkan indeks frekuensi gangguan (*System Average Interruption Frequency*/SAIFI) menghitung banyaknya jumlah gangguan per pelanggan.

Pada tahun 2019, indeks SAIDI mencapai 1.136,72 menit per pelanggan, atau meningkat 18,61% dibandingkan 958,35 menit per pelanggan pada tahun 2018. Sedangkan indeks SAIFI sebesar 11,51 kali per pelanggan, naik 16,26% dibandingkan 9,90 kali per pelanggan pada tahun 2018.

Pada tahun 2019, gangguan distribusi memiliki kontribusi terbesar, yaitu 77,7% dari total gangguan. Gangguan distribusi tersebut didominasi oleh gangguan fasilitas penyulang (56,3%) dengan kontribusi terbesar pada gangguan *unplanned* konduktor saluran udara tegangan menengah (SUTM) sebesar 42,0% dan pemadaman terencana (38,0%) dengan kontribusi terbesar adalah pemeliharaan penyulang (27,0%).

Service Reliability Level

The Company measures service reliability levels by using System Average Interruption Duration Index (SAIDI) which calculates how long the customer experiences outage, in terms of minutes per customer. Another measurement is System Average Interruption Frequency (SAIFI), which calculates the number of disruptions per customer.

In 2019, SAIDI index reached 1,136.72 minutes per customer, an increase of 18.61% compared to 958.35 minutes per customer in 2018. While SAIFI index was 11.51 times per customer, up 16.26% compared to 9, 90 times per customer in 2018.

In 2019, distribution disruptions had the largest contribution representing 77.7% of total disruptions. Distribution disruption was dominated by feeder facility disruption (56.3%) with the largest contribution from medium voltage air duct (SUTM) disruption of 42.0% and planned outages (38.0%) with the largest contribution from feeder maintenance (27.0%).

Kinerja Operasi per Segmen Usaha
Operational Performance by Business Segment

Berdasarkan wilayah regional, hampir semua indeks SAIDI menunjukkan kenaikan, kecuali pada Regional Jawa bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi. Sedangkan indeks SAIFI menurun hampir di seluruh Regional kecuali Sumatera, Jawa Bagian Tengah dan Sulawesi.

By region, almost all SAIDI indices showed an increase, except in East Java, Bali and Nusa Tenggara, Kalimantan and Sulawesi Regions. While SAIFI index declined in almost all Regions except Sumatra, Central Java and Sulawesi.

Tabel: SAIDI – SAIFI per Regional **Table: SAIDI – SAIFI by Region**

Regional	2017	2018	2019	Region
SAIDI (Menit/Pelanggan) | SAIDI (minutes/customer)				
Sumatera*	1.989,50	1.568,96	1.748,77	Sumatera*
Jawa bagian Barat	393,27	292,95	647,95	West Java
Jawa bagian Tengah	844,56	744,48	1.253,81	Central Java
Jawa bagianTimur, Bali dan Nusa Tenggara	618,13	426,86	314,56	East Java, Bali and Nusra
Kalimantan	2.303,71	2.321,04	1.562,73	Kalimantan
Sulawesi **	2.245,01	1.845,06	1.697,11	Sulawesi**
Maluku dan Papua	2.169,29	1.252,88	1.383,50	Maluku and Papua
Konsolidasi	1.159,60	958,35	1.136,72	Consolidated
SAIFI (Kali/Pelanggan) | SAIFI (times/customer)				
Sumatera*	17,87	13,89	18,93	Sumatera*
Jawa Bagian Barat	5,19	2,92	2,70	Central Java
Jawa Bagian Tengah	9,74	8,34	10,93	Central Java
Jawa bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara	7,05	4,78	3,91	East Java, Bali and Nusra
Kalimantan	28,18	27,00	25,07	Kalimantan
Sulawesi **	26,54	17,89	18,84	Sulawesi**
Maluku dan Papua	30,52	15,45	12,85	Maluku and Papua
Konsolidasi	12,65	9,90	11,51	Consolidated

- Polaritas Negatif Negative Polarity
(*) Termasuk Batam including Batam
(**) Pada Tahun 2017 Regional Sulawesi termasuk Nusa Tenggara dan Regional Jawa Bagian Timur dan Bali tidak termasuk Nusa Tenggara
In 2017 the Sulawesi Region includes Nusa Tenggara and the Java Region East and Bali do not include Nusa Tenggara

KINERJA USAHA

Kapasitas Terpasang

Kapasitas terpasang pembangkit secara nasional sampai dengan akhir tahun 2019 adalah 62.833 MW, meningkat sebesar 8,67% dibanding tahun sebelumnya sebesar 57.822 MW. Komposisi kapasitas pembangkit terpasang pada tahun 2019 adalah milik sendiri 69,8%, swasta (IPP) 27,27%, dan sewa 2,93%. Kapasitas terpasang pembangkit swasta (IPP) mengalami peningkatan signifikan di tahun 2019 karena semakin meningkatnya jumlah pembangkit IPP yang beroperasi.

BUSINESS PERFORMANCE

Installed Capacity

The national installed capacity of power plants at end of 2019 was 62,833 MW, an increase of 8.67% compared to the previous year of 57,822 MW. The composition of installed power plant capacity in 2019 for self-owned was 69.8%, private (IPP) was 27.27% and rented was 2.93%. The installed capacity of independent power producers (IPP) experienced a significant increase in 2019 due to the increasing number of operating IPP power plants.

Kapasitas Terpasang Pembangkit

Power Plant Installed Capacity

Status Kepemilikan	2017 (MW) a	2018 (MW) b	2019 (MW) c	Perubahan Change % d = (c-b)/b	Ownership Status
Milik PLN	39.652	41.697	43.857	5,2	Owned by PLN
Swasta (IPP)	13.270	13.635	17.136	25,7	Private (IPP)
Sewa	3.004	2.491	1.840	-26,1	Lease
Jumlah	55.926	57.822	62.833	8,67	Total

Produksi Listrik

PLN memproduksi tenaga listrik melalui pembangkit milik sendiri, pembangkit sewa dan pembelian tenaga listrik dari pembangkit milik swasta. Pada tahun 2019, produksi listrik mencapai 278.941 GWh, meningkat 4,4% dari 267.085 GWh pada tahun 2018. Produksi listrik tersebut berasal dari pembangkit listrik sendiri sebesar 186.457 GWh (66,84%), pembelian listrik swasta sebesar 85.398 GWh (30,62%) dan pembangkit sewa sebesar 7.086 GWh (2,54%).

Electricity Production

PLN produces electricity through self-owned power plants, rented plants and purchase of electricity from private plants. In 2019, electricity production reached 278,941 GWh, an increase of 4.4% from 267,085 GWh in 2018. The electricity produced by self-owned power plants was 186,457 GWh (66.84%), electricity purchases from private was 85.398 GWh (30.62 %) and rented plants was 7,086 GWh (2.54%).

Pembelian listrik swasta meningkat sebesar 8,9% bila dibandingkan tahun 2018 karena meningkatnya operasi pembangkit swasta dalam skema IPP.

Electricity purchases from private grew by 8.9% compared to 2018 due to the increase in operations of private plants in IPP scheme.

Tabel: Produksi Listrik **Table: Electricity Production**

Segmen Pelanggan	2017 (GWh)	2018 (GWh)	2019 (GWh)	Perubahan Change %	Customer Segment
	a	b	c	d = (c-b)/b	
Produksi Sendiri	167.978	178.194	186.457	4,6	Own Production
Sewa	13.447	10.505	7.086	-32,5	Rental
Pembelian - IPP dan Proyek	73.235	78.387	85.398	8,9	Purchase - IPP and Projects
Total Produksi Listrik	254.660	267.085	278.941	4,4	Total Electricity Production

Total produksi listrik pada tahun 2019 mencapai 278.941 GWh di tahun 2019, atau meningkat sebesar 4,4% dari 178.194 GWh di tahun 2018. Produksi pembelian tenaga listrik dan IPP meningkat signifikan sebesar 8,9% dari 78.387 GWh di tahun 2018 menjadi 85.398 GWh di tahun 2019. Pada tahun 2019, produksi listrik dari pembangkit sewa menurun secara signifikan sebesar 32,5% dari 10.505 GWh di tahun 2018 menjadi 7.086 di tahun 2019. Kondisi ini disebabkan oleh keberhasilan PLN dalam mengeksekusi dan menyelesaikan pembangunan proyek-proyek transmisi, distribusi, dan gardu induk; serta menurunkan produksi listrik dari pembangkit sewa yang kurang efisien karena menggunakan BBM.

Total electricity production in 2019 reached 278,941 GWh, or increasing by 4.4% from 178,194 GWh in 2018. Electricity purchases from IPPs increased significantly by 8.9% from 78,387 GWh in 2018 to 85,398 GWh in 2019. In 2019, electricity production from rented plants decreased significantly by 32.5% from 10,505 GWh in 2018 to 7,086 in 2019. This was due to PLN's success in executing and completing the constructions of transmissions, distributions and substations, as well as in reducing electricity production from less fuel-efficient rented plants.

Bauran Energi

PLN secara konsisten melakukan rasionalisasi bauran energi primer pembangkit dengan menurunkan porsi sumber energi bahan bakar minyak (BBM) dan pelumas dari tahun ke tahun. Angka bauran energi di tahun 2019 adalah 5,02%. Upaya menurunkan penggunaan BBM bertujuan untuk memitigasi risiko fluktuasi harga BBM. Dengan menurunkan porsi BBM, maka porsi batu bara dioptimalkan menjadi sekitar 61,69%, disusul gas 26,09% dan energi baru terbarukan (EBT) sekitar 7,25%.

Energy Mix

PLN consistently rationalizes the primary energy mix of power plants by reducing the portion of fuel (BBM) and lubricants from year to year. The energy mix in 2019 was 5.02%. The efforts to reduce the use of fuel aimed to mitigate the risk of oil price fluctuation. By reducing the fuel portion, the coal portion was optimized at around 61.69%, followed by gas 26.09%, and renewable energy (EBT) at around 7.25%.

Bauran Energi
Energy Mix

Catatan: terdapat perbedaan mekanisme perhitungan bauran energi di tahun 2019 yang tidak memperhitungkan penggunaan bahan bakar IPP.

Note: there are different mechanisms calculation of the energy mix in 2019 does not take into account the use of IPP fuel.

Tabel: Bauran Energi **Table: Energy Mix**

Jenis Pembangkit	2018 (%)	2019 (%)	Power Plant Type
BBM	5,98	5,02	Fuel
Non-BBM	94,02	94,98	Non-Fuel
Batu bara	59,91	61,69	Coal
Gas Alam	22,25	26,09	Natural Gas
Panas Bumi	5,25	2,11	Geothermal
Air	6,30	5,08	Water
Lainnya	0,31	0,0026	Others
Jumlah	**100,00**	**100,00**	**Total**

Sebagaimana disajikan pada tabel di atas, bauran energi BBM menurun karena peningkatan utilisasi pembangkit berbahan bakar batu bara dan gas alam. Sebaliknya, bauran energi panas bumi pada tahun 2019 turun dibandingkan tahun 2018. Turunnya energi panas bumi disebabkan karena gangguan yang terjadi pada PLTP Sarulla pada triwulan kedua 2019. Pembangkit berkapasitas 330 MW ini saat itu hanya mampu beroperasi pada kapasitas 145 MW. Sedangkan turunnya bauran energi air terutama karena penurunan debit air akibat variasi musim yang menyebabkan kinerja PLTA tidak optimal.

As presented in the table above, the fuel energy mix declined due to increased utilization of coal and natural gas power plants. On the contrary, the geothermal energy mix in 2019 decreased compared to 2018. The decline in geothermal energy was caused by disruption to PLTP Sarulla in the second quarter of 2019. The 330 MW power plant was at that time only able to operate at 145 MW of its capacity. While the decrease in the water energy mix was mainly due to a decrease in water discharge due to seasonal variations that caused the hydropower performance to be less than optimal.

Penurunan angka bauran energi BBM (*fuel mix*) disebabkan oleh implementasi sejumlah langkah yang dilakukan Perusahaan, yaitu:

1. Meningkatkan kesiapan operasi pembangkit non-BBM
2. Mengoptimalkan operasi pembangkit non BBM seperti PLTU Jeranjang unit 1 dan unit 2 dan PLTS IPP.
3. Meningkatkan keandalan PLTU dengan skema Asset Management Contract (AMA) pada PLTU Pangkalan Susu Unit 1 dan 2, PLTU Tenayan Unit 1 dan 2.
4. Memastikan saluran transmisi dan gardu induk yang baru dibangun dapat beroperasi sesuai jadwal terutama pada daerah teriolasi yang masih menggunakan PLTD.
5. Mengoptimalkan produksi EBT yang telah selesai konstruksi seperti PLTP Sarulla, PLTA Semangka, dan PLTP Lumut Balai.
6. Memastikan masa operasi komersial (COD) PLTU Pangkalan Susu Unit 3 dan 4 dapat beroperasi tepat waktu, serta pembangunan *jetty* PLTU Pangkalan Susu Unit 3 dan 4 dapat selesai tepat waktu.
7. Melakukan penormalan dan perbaikan gangguan PLTU dengan *boiler inspection* dan pemeliharaan berkala.
8. Mengoptimalkan operasi pembangkit ekonomis (berbahan bakar batu bara dan gas)
9. Berkoordinasi dengan UIP terkait percepatan COD pembangkit.
10. *Commissioning test* PLTU Gorontalo Unit 1, PLTU Ampana, PLTU Kendari Ext. dan PLTU IPP Kendari 3, UIKL Sulawesi.
11. Meningkatkan keandalan PLTU Holtekamp dan PLTU Tidore, serta perbaikan saluran kabel tegangan menengah (STKM) Bintuni.

Biaya Pokok Penyediaan

PLN melakukan efisiensi operasi berkesinambungan untuk menurunkan biaya pokok penyediaan tenaga listrik total (BPP) dalam memproduksi listrik. Hal ini sejalan dengan arahan pemerintah untuk mewujudkan harga listrik yang terjangkau bagi masyarakat.

Realisasi BPP tahun 2019 adalah sebesar Rp1.385,07 per kWh, turun dari Rp1.406 per kWh pada tahun 2018. Hal ini sebagai hasil dari upaya PLN memperbaiki kualitas bauran energi dan

The decrease in the fuel mix was due to implementation of a number of measures taken by the Company, included:

1. Improving readiness of the operations of non-fuel plants
2. Optimizing the operations of non-fuel plants such as PLTU Jeranjang unit 1 and unit 2 and PLTS IPP.
3. Increasing reliability of PLTU with Asset Management Contract (AMA) scheme at PLTU Pangkalan Susu Units 1 and 2, PLTU Tenayan Units 1 and 2.
4. Ensuring that the newly constructed transmission lines and substations can operate on schedule, especially in isolated areas that still use PLTD.
5. Optimizing production of EBT whose construction had been completed such as PLTP Sarulla, PLTA Semangka and PLTP Lumut Balai.
6. Ensuring that commercial operation dates (COD) of PLTU Pangkalan Susu Units 3 and 4 were on time and that jetty construction of PLTU Pangkalan Susu Units 3 and 4 were completed on time.
7. Normalizing and repairing power plant disruptions with boiler inspection and periodic maintenance.
8. Economically optimizing operations of power plants (coal and gas)
9. Coordinating with UIP related to the acceleration of power plants' COD.
10. Commissioning tests of PLTU Gorontalo Unit 1, PLTU Ampana, PLTU Kendari Ext and PLPU IPP Kendari 3, UIKL Sulawesi.
11. Improving reliability of PLTU Holtekamp and PLTU Tidore, as well as medium voltage cable lines (STKM) Bintuni.

Cost of Supply

PLN always strives to carry out operational efficiency to reduce cost of supply (BPP) in electricity production. This is in line with the government's direction to realize an affordable electricity tariff for the people.

BPP realization in 2019 amounted to Rp1,385.07 per kWh, down from Rp1,406 per kWh in 2018. This was as a result of PLN's efforts to improve the energy mix quality and to increase

meningkatkan efisiensi operasional. Penurunan BPP juga dikontribusikan dari stabilnya unsur-unsur biaya variabel seperti kurs US Dollar, harga ICP, inflasi dan Harga Batu bara Acuan (HBA) sebagai dampak penerapan *Domestic Market Obligation* (DMO) batu bara sepanjang tahun 2019. Dibandingkan dengan realisasi BPP pada tahun 2018, terjadi penurunan pada BPP *Variable Cost* dari Rp962 per kWh menjadi Rp909 per kWh. Sedangkan BPP *Fixed Cost* mengalami kenaikan dari Rp443/kWH menjadi Rp476/kWh.

operational efficiency. The decrease in BPP was also contributed by the stability of variable costs, such as USD exchange rate, ICP, inflation and Coal Price Benchmark (HBA) due to implementation of Domestic Market Obligation (DMO) of coal during 2019. Compared to the BPP in 2018, there was a decrease in Variable Costs of BPP from Rp962 per kWh to Rp909 per kWh. Whereas Fixed Costs of BPP increased from Rp443/kWh to Rp476/kWh.

Biaya Pokok Penyediaan
Cost of Supply

	2017 Audited	2018 Audited	2019 Audited
BPP Real	1.318	1.406	1.385

Untuk menekan BPP, Perusahaan melakukan efisiensi melalui peningkatan produktivitas aset maupun program penurunan BPP.

Program penurunan BPP merupakan program berkelanjutan dengan inisiatif, dan realisasi sebagai berikut:

1. Penurunan susut jaringan 9,32% (dari target 9,36%);
2. Specific fuel consumption KIT BBM Non PLTU (SFC) sebesar 0,271 liter/kWh dari target 0,280 liter per kWh;
3. Gross Plant Heat Rate (GPHR) sebesar 2.565 kcal/kWh dari target 2.586 kcal per kWh;
4. Capacity Factor (CF)pembangkit PLTU Sendiri menjadi 74,32 % dari target 70,2%;
5. Pengendalian pemakaian sendiri pembangkit sebesar 5,3 % dari target 5,5%;

Disamping itu inisiatif strategis yang dilakukan untuk mendukung pencapaian BPP tahun 2019 antara lain :

1. Melakukan zonasi batu bara;
2. Efisiensi biaya energi primer gas melalui penurunan toll fee dan penyesuaian harga gas;

To reduce the cost of supply (BPP), the Company made efficiency through increasing asset productivity and reducing the BPP program.

The BPP reduction program is a continuous program with the following initiatives and realization:

1. Decrease in network losses of 9.32% (from the target of 9.36%);
2. Specific fuel consumption of Power Plant Non PLTU (SFC) of 0.271 liters / Kwh of the target of 0.280 liters per kWh;
3. Gross Plant Heat Rate (GPHR) of 2,565 kcal / Kwh of the target of 2,586 kcal per kWh;
4. The Capacity Factor (CF) of the PLTU Generating Plant itself becomes 74.32% of the target 70.2%;
5. Control of self-use of the generator by 5.3% from the 5.5% target;

In addition, strategic initiatives undertaken to support the achievement of the BPP in 2019 include:

1. Coal Zonation;
2. Efficiency of primary gas energy costs through reducing toll fees and adjusting gas prices;

3. Optimasi modal kerja dengan menjaga level saldo material dan bahan bakar minyak pada tingkat yang optimum;
4. Penurunan piutang tunggakan; serta
5. Efisiensi biaya tetap seperti biaya pemeliharaan, sewa pembangkit, beban bunga dan lainnya.

Realisasi program penurunan BPP tahun 2019 menghasilkan efisiensi sebesar Rp 12,58 triliun dari target Rp 8,37 triliun. Efisiensi ini membantu kinerja keuangan Perusahaan. Program penurunan BPP akan terus dilanjutkan untuk mencapai tujuan jangka panjang yaitu terbangunnya budaya efisiensi diseluruh entitas perusahaan.

Tarif Tenaga Listrik

Komponen utama pendapatan PLN adalah penjualan tenaga listrik dengan dasar perhitungan Tarif Tenaga Listrik ("TTL") yang ditetapkan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). TTL digunakan sebagai dasar perhitungan jumlah tagihan rekening listrik kepada pelanggan. Besaran TTL ditinjau dan ditetapkan secara berkala dan terdiri dari berbagai kelompok tarif sesuai dengan kelompok pelanggan.

Penetapan TTL dilakukan dengan memperhitungkan kemampuan pelanggan dan mempertimbangkan daya terpasang dari masing-masing kelompok pelanggan. Semakin tinggi daya terpasang pada suatu tegangan, maka akan semakin besar pula besaran TTL yang dikenakan pada tegangan tersebut. Terdapat 13 golongan tarif yang diberlakukan mekanisme penyesuaian tarif tenaga listrik (*tariff adjustment*) sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), yaitu:

1. R-1/TR, 900 VA-RTM (rumah tangga kecil)
2. R-1/TR, 1.300 VA (rumah tangga kecil)
3. R-1/TR, 2.200 VA (rumah tangga kecil)
4. R-2/TR, 3.500 VA – 5.500 VA (rumah tangga menengah)
5. R-3/TR, 6.600 VA ke atas (rumah tangga besar)
6. B-2/TR, 6.600 VA – 200 kVA (bisnis menengah)
7. B-3/TM, di atas 200 kVA (bisnis besar)

3. Optimizing working capital by maintaining the optimum level of material and fuel oil balance;
4. Decrease in arrears receivables; and
5. Efficiency of fixed costs such as maintenance costs, generator rental, interest expenses and others.

The realization of the BPP reduction program in 2019 resulted in an efficiency of Rp 12.58 trillion from the target of Rp 8.37 trillion. This efficiency helps Company's financial performance. The BPP reduction program will continue to achieve the long-term goal of building a culture of efficiency across corporate entities.

Electricity Tariff

The main component of PLN's revenues is electricity sales, calculated based on electricity tariff ("TTL"). TTL is determined by the executive government and the House of Representatives (DPR) to be used as the basis for calculating electricity bills for customers. The TTL is reviewed and adjusted periodically and consists of a number of tariff groups for different customer groups.

The TTL is set by taking into account customer financial capability and connected power of each customer group. The higher the installed voltage, the higher the TTL imposed. Electricity tariff adjustments were applied to 13 tariff groups in accordance with Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 19 of 2019 concerning the Third Amendment to Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 28 of 2016 concerning Electricity Tariffs Provided by PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), as follows:

1. R-1/TR, 900 VA - RTM (small households)
2. R-1/TR, 1,300 VA (small households)
3. R-1/TR, 2,200 VA (small households)
4. R-2/TR, 3,500 VA - 5,500 VA (medium households)
5. R-3/TR, 6,600 VA and above (big households)
6. B-2/TR, 6,600 VA - 200 kVA (medium enterprises)
7. B-3/TM, above 200 kVA (big enterprises)

8. I-3/TM, di atas 200 kVA (industri menengah)
9. I-4/TT, 30.000 kVA ke atas (industri besar)

10. P-1/TR, 6.600 VA – 200 kVA (kantor pemerintah sedang)
11. P-2/TM, di atas 200 kVA (kantor pemerintah besar)
12. P-3/TR (penerangan jalan umum)
13. Layanan Khusus (L/TR, TM, TT)

Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, penyesuaian atas 13 golongan tarif tersebut dapat dilaksanakan setiap 3 bulan apabila terjadi perubahan atas nilai tukar mata uang Dolar AS terhadap mata uang Rupiah (kurs), indeks harga minyak bumi Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), inflasi dan harga patokan batu bara. Pada tahun 2019, pemerintah melalui Kementerian ESDM telah mengeluarkan kebijakan untuk tidak memberlakukan penyesuaian tarif demi menjaga daya beli masyarakat dan mempertahankan tingkat daya saing pelaku industri dan bisnis. Rata-rata TTL yang dikenakan terhadap pelanggan sesuai golongan tarif sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut:

8. I-3/TM, above 200 kVA (medium industries)
9. I-4/TT, 30,000 kVA and above (big industries)
10. P-1/TR, 6600 VA – 200 kVA (medium government offices)
11. P-2/TM, above 200 kVA (big government offices)
12. P-3/TR (public street lighting)
13. 12. Special Services (L/TR, TM, TT)

Based on the Ministerial Regulation, adjustments to the 13 tariff groups can be carried out every 3 months if there is a change in USD exchange rate, Indonesian Crude Price (ICP), inflation or coal price. In 2019, the government through the Ministry of Energy and Mineral Resources issued a policy not to impose tariff adjustments to maintain people's purchasing power and to maintain competitiveness of the industries and businesses. The average TTL charged to customers per tariff group during 2019 was as follows:

Realisasi Rata-rata Tarif Tenaga Listrik Tahun 2019
Realization of Average Electricity Tarif in 2019

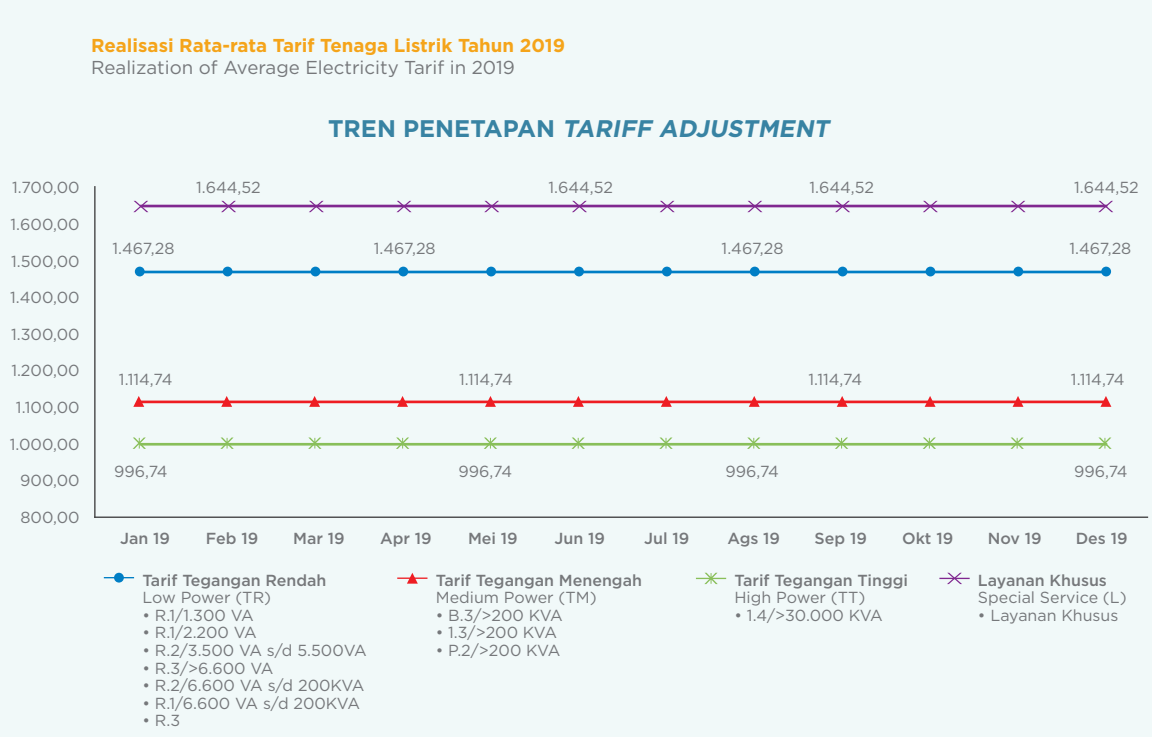

Subsidi Listrik

Subsidi listrik dihitung dari selisih negatif antara harga jual tenaga listrik rata-rata (Rp/kWh) dari masing-masing golongan tarif dikurangi BPP tenaga listrik (Rp/kWh) pada tegangan di masing-masing golongan tarif dikalikan volume penjualan (kWh) untuk setiap golongan tarif. PLN memerlukan subsidi karena rata-rata harga penjualan tenaga listrik masih berada di bawah rata-rata biaya pokok penyediaan listrik.

Electricity Subsidy

Electricity subsidies are calculated from the negative difference between the average electricity selling price (Rp/KWh) of each tariff group minus Cost of Supply (BPP) of electricity (Rp/KWh) on the voltage in each tariff group multiplied by sales volume (kWh) for each tariff group. PLN requires subsidies because the average electricity selling price is still below the average cost of electricity supply.

Tabel: Tarif Tenaga Listrik dan Besaran Subsidi per Golongan Tarif (Rp/kWh)

Table: Electricity Tariff and Subsidy Rate per Tariff Class (Rp/kWh)

Golongan Tarif Tariff Group	**Harga Jual Selling Price (Rp/kWh)**	**BPP + 7% (Rp/kWh)**	**Subsidi** Subsidy **(Rp/kWh)**
S.1/220 VA	155,09	1.526,63	-1.371,54
S.2/450 VA	324,03	1.526,63	-1.202,60
S.2/900 VA	436,66	1.526,63	-1.089,97
S.2/1.300 VA	718,92	1.526,63	-807,71
S.2/2.200 VA	770,52	1.526,63	-756,11
S.2/> 3.500 s/d 200 kVA	925,38	1.526,63	-601,25
S.3 > 200 kVA	924,33	1.311,60	-387,27
R.1/s/d 450 VA	418,05	1.526,63	-1.108,58
R.1/900 VA	569,51	1.526,63	-957,12
R.1/900 VA - RTM	1.364,06	1.526,63	-162,57
B.1/s/d 450 VA	509,07	1.526,63	-1.017,56
B.1/900 VA	607,01	1.526,63	-919,62
B.1/1.300 VA	980,35	1.526,63	-546,28
B.1/2.200 s/d 5.500 VA	1.127,76	1.526,63	-398,87
I.1/450 VA	413,81	1.526,63	-1.112,82
I.1/900 VA	474,47	1.526,63	-1.052,16
I.1/1.300 VA	938,69	1.526,63	-587,94
I.1/2.200 VA	968,48	1.526,63	-558,15
I.1/3.500 s/d 14 kVA	1.169,22	1.526,63	-357,41
I.2/> 14 kVA s/d 200 kVA	1.132,79	1.526,63	-393,84
P.1/s/d 450 VA	652,17	1.526,63	-874,46
P.1/900 VA	757,87	1.526,63	-768,76
P.1/1.300 VA	1.080,66	1.526,63	-445,97
P.1/2.200 s/d 5.500 VA	1.108,42	1.526,63	-418,21
T/> 200 kVA	851,51	1.311,60	-460,09
C/> 200 kVA	1.238,87	1.311,60	-72,73

Pada tahun 2019, pemerintah menetapkan subsidi listrik sebesar Rp51,71 triliun, naik 7,5% dibandingkan Rp48,10 triliun pada tahun 2018.

In 2019, the government announced electricity subsidy amounting to Rp51.71 trillion, up 7.5% compared to Rp48.10 trillion in 2018.

Tabel: Tren Subsidi Listrik

Table: Electricity Subsidy Trend

Keterangan	2017	2018	2019	Description
Subsidi pemerintah (dalam triliun Rp)	45,74	48,10	51,71	Government Subsidy (In Rp trillion)

Kompensasi

Pada tahun 2019, PLN membukukan pendapatan kompensasi sebesar Rp22,25 triliun, menurun 3,97% dibandingkan Rp23,17 triliun pada tahun 2018. Pada tahun 2019, terjadi penurunan pendapatan kompensasi karena perubahan indikator yang digunakan dalam perhitungan *automatic tariff adjustment* yang lebih rendah daripada nilai indikator pada tahun 2018.

Compensation

In 2019, PLN recorded compensation revenue of Rp22.25 trillion, decreased 3.97%, compared to Rp23.17 trillion in 2018. In 2019, there was a decrease in compensation income due to changes in the indicators used in the calculation of automatic tariff adjustments which were lower than the indicator value in 2018.

Pendapatan Penjualan Listrik

Pada tahun 2019, PLN membukukan pendapatan penjualan listrik sebesar Rp276,06 triliun, meningkat 4,8% dibandingkan Rp263.54 triliun pada tahun 2018. Pada tahun 2019 tidak ada kenaikan tarif listrik sehingga harga jual rata-rata penjualan tenaga listrik tetap sebesar Rp1.105 per kWh.

Electricity Sales Revenue

In 2019, PLN recorded electricity sales revenue of Rp276.06 trillion, an increase of 4.8% compared to Rp263.54 trillion in 2018. In 2019, there was no increase in electricity tariffs so that the average selling price of electricity sales remained at Rp1,105 per kWh.

Tabel: Pendapatan Penjualan Tenaga Listrik

Table: Revenue of Electricity Sales

Keterangan	2017	2018	2019	Description
Pendapatan Penjualan Listrik (Rp miliar)	246.587	263.478	276.482	Revenue of Electricity Sales (Rp billion)
Harga Jual Rata-rata (Rp/kWh)	1.105	1.127	1.130	Average Selling Price (Rp/kWh)

Uraian Kinerja Keuangan Perusahaan

Financial Review

Secara umum kinerja keuangan yang tetap positif telah menunjukan fundamental Perusahaan yang kuat menghadapi tekanan eksternal.

In general, financial performance that remained positive has shown the Company's fundamentals are strong in the face of external pressures.

Pembahasan kinerja keuangan berikut ini disusun berdasarkan data-data keuangan dari Laporan Keuangan Konsolidasian PT PLN (Persero) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia). Laporan Keuangan tersebut disajikan sesuai dengan kaidah yang tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Indonesia. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar dan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material. Seluruh angka keuangan tahun 2017, 2018 dan 2019 yang disajikan tidak menerapkan ISAK 8 Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.04/2017. Posisi keuangan berdasarkan mata uang asing disajikan dalam jumlah yang setara Rupiah dengan kurs yaitu Rp14.481 per USD dan Rp13.901 per USD pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2019.

The following financial performance discussion was prepared based on the Consolidated Financial Statements of PT PLN (Persero) for the year ended December 31, 2019 audited by Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia). The financial statements are presented in accordance with the principles set forth in the Indonesian Statement of Financial Accounting Standards (PSAK). All information in the consolidated financial statements is incorporated completely and correctly, and does not contain false material information or facts, and does not omit any material information or fact. All presented financial figures for 2017, 2018 and 2019 do not apply ISAK 8 in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 6/POJK.04/2017. Financial positions originally denominated in foreign currencies are presented in amounts equivalent to Rupiah with exchange rates of Rp14,481/USD and Rp13,901/USD as of December 31, 2018 and 2019, respectively.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

ASET

ASSETS

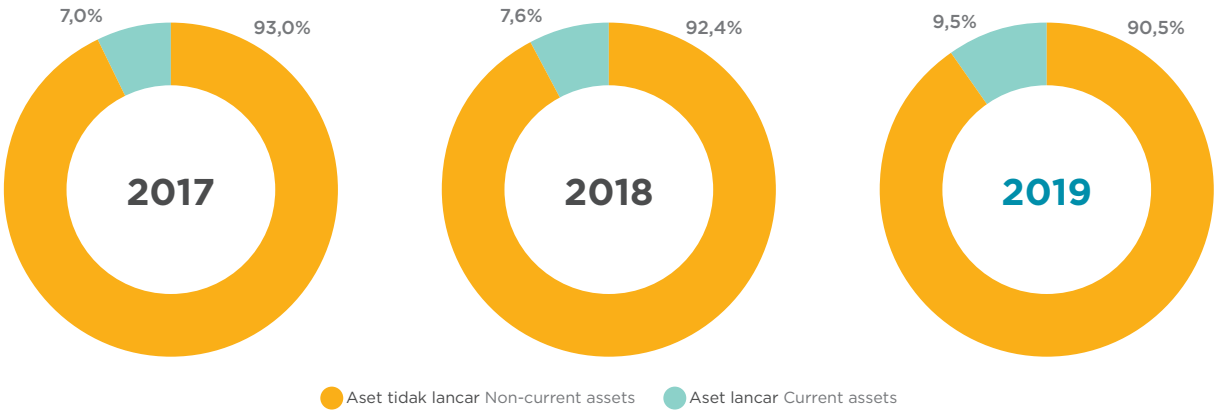

Dalam miliar Rupiah — In billion Rupiah

ASET	2017	2018	2019	Perubahan Change		ASSETS
	a	b	c	d = c-b	e = d/b	
Aset tidak lancar	1.241.160	1.379.072	1.433.688	54.616	4,0%	Non-current assets
Aset lancar	93.797	113.415	151.367	37.951	33,5%	Current assets
Total Aset	1.334.958	1.492.488	1.585.055	92.567	6,2%	TOTAL

Pada akhir tahun 2019, jumlah aset Perusahaan sebesar Rp1.585,05 triliun, meningkat 6,2% dibandingkan posisi pada akhir tahun 2018 sebesar Rp1.492,49 triliun.

At end of 2019, the Company's total assets amounted to Rp1,585.05 trillion, up 6.2% compared to the position at end of 2018 of Rp1,492.49 trillion.

Aset Tidak Lancar

Non-current Assets

Aset Tidak Lancar
Non-current Assets
(Dalam triliun Rupiah In trillion Rupiah)

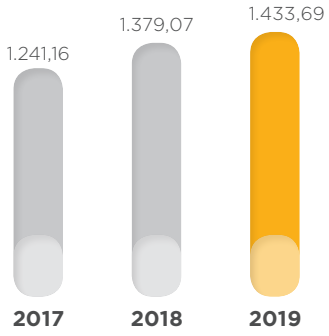

Dalam miliar Rupiah — In billion Rupiah

Aset Tidak Lancar	2017	2018	2019	Perubahan Change		Non-Current Assets
	a	b	c	d = c-b	e = d/b	
Aset tetap	1.204.568	1.336.478	1.400.685	64.207	4,8%	Property, plant and equipment
Properti investasi	4.723	5.125	5.284	158	3,1%	Investment properties
Investasi pada entitas asosiasi	2.433	3.003	3.868	865	28,8%	Investments in associates
Investasi pada ventura bersama	4.446	5.724	6.433	709	12,4%	Investments in joint ventures
Aset pajak tangguhan	9.566	7.578	2.216	-5.362	-70,8%	Deferred tax assets
Piutang pihak berelasi	237	1.031	952	-80	-7,7%	Receivables from related parties
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	7.488	5.689	5.981	292	5,1%	Restricted cash in banks and time deposits
Piutang lain-lain	635	961	824	-137	-14,2%	Other receivables
Aset tidak lancar lainnya	7.064	13.483	7.446	-6.037	-44,8%	other non-current assets
Jumlah	**1.241.160**	**1.379.072**	**1.433.688**	**54.616**	**4,0%**	**Total**

Aset tidak lancar sebesar Rp1.433,69 triliun, naik 4,0% dibandingkan Rp1.379,07 triliun pada tahun 2018. Kenaikan aset tidak lancar terutama disebabkan penambahan aset tetap sebesar Rp64,21 triliun, dan investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama yang secara total meningkat sebesar Rp1,57 triliun. Sebaliknya, aset pajak tangguhan dan aset tidak lancar lainnya turun signifikan masing-masing sebesar Rp5,36 triliun dan Rp6,04 triliun.

Non-current assets amounted to Rp1,433.69 trillion, grew by 4.0% compared to Rp1,379.07 trillion in 2018. The increase in non-current assets was mainly due to the addition of fixed assets of Rp64.21 trillion, and investments in associates and joint ventures which in total increased by Rp1.57 trillion. Conversely, deferred tax assets and other non-current assets decreased significantly by Rp5.36 trillion and Rp6.04 trillion respectively.

Komposisi terbesar aset tidak lancar adalah aset tetap yang mencapai 98% dari jumlah aset tidak lancar.

- Aset tetap naik 4,8% dari Rp1.336,48 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp1.400,68 triliun. Kenaikan aset tetap berkaitan dengan penyelesaian sejumlah kegiatan investasi infrastruktur PLN khususnya instalasi dan mesin pembangkit, transmisi, distribusi dan gardu induk sehingga status proyek meningkat menjadi aset tetap.

- Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama sebesar Rp10,30 triliun, naik 18,0% dari Rp8,76 triliun pada tahun 2018. Kenaikan ini terutama karena PLN melakukan penyertaan atas 25,5% saham PT Musi Mitra Jaya, 25,5% saham PT Sriwijaya Bara Logistik, dan 10% saham PT Sumbagsel Energi Sakti Pewali. Selain itu, ada pengakuan laba bersih atas hasil usaha Entitas Asosiasi maupun Ventura Bersama yang dilakukan PLN terutama dari PT Sumber Segara Primadaya dan PT Shenhua Guohua PJB.

- Aset pajak tangguhan sebesar Rp2,22 triliun, turun 70,8% dari Rp7,58 triliun pada tahun 2018.
- Aset tidak lancar lainnya sebesar Rp7,44 triliun, turun 44,8% dari Rp13,48 triliun pada tahun 2018 terutama karena penurunan biaya dibayar di muka pembelian gas sebesar Rp6,72 triliun. Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Listrik, maka Perusahaan menyesuaikan biaya dibayar di muka pembelian gas ke jumlah terpulihkannya sebesar Rp6,20 triliun.

The largest composition of non-current assets is fixed assets, which account for 98% of total non-current assets.

- Property, plant and equipment rose by 4.8% from Rp1,336.48 trillion in 2018 to Rp1,400.68 trillion. The increase in fixed assets is related to the completion of a number of PLN's infrastructure investment activities, especially power plants, transmission, distribution and substations installations so that the status of the project was upgraded to property, plant and equipment.
- Investment in associates and joint ventures amounted to Rp10.30 trillion, increased by 18.0% from Rp8.76 trillion in 2018. This increase was mainly due to PLN participating in a 25.5% stake in PT Musi Mitra Jaya, a 25.5% stake in PT Sriwijaya Bara Logistik, and a 10% stake in PT Sumbagsel Energi Sakti Pewali. In addition, there was an acknowledgment of net profit from the operating results of the Association and Joint Venture Entities which were carried out by PLN, especially from PT Sumber Segara Primadaya and PT Shenhua Guohua PJB.
- Deferred tax assets amounted to Rp2.22 trillion, decreased by 70.8% from Rp7.58 trillion in 2018.
- Other non-current assets amounted to Rp7.44 trillion, decreased by 44.8% from Rp13.48 trillion in 2018 mainly due to a decrease in prepaid gas purchases by Rp6.72 trillion. In regards to the issuance of Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources No. 10 of 2020 regarding the Amendment of The Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 45 of 2017 regarding the Utilization of Natural Gas for Electricity Power Plants, the Company has adjusted the prepaid expenses for gas purchased to its recoverable amount fo Rp6.20 trillion.

Aset Lancar

Current Assets

Aset Lancar
Current Assets
(Dalam triliun Rupiah In trillion Rupiah)

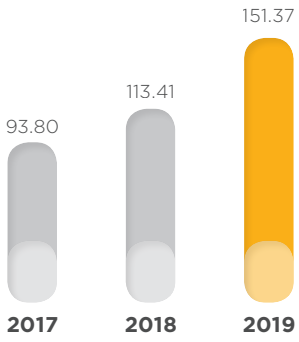

Dalam miliar Rupiah | In billion Rupiah

Aset Lancar	2017	2018	2019	Perubahan Change		Current Assets
	a	b	c	d = c-b	e = d/b	
Kas dan setara kas	42.292	33.295	46.599	13.304	40,0%	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	287	1.217	334	-883	-72,5%	Short-term investments
Piutang usaha						Trade receivables
Pihak berelasi	581	594	820	226	38,1%	Related parties
Pihak ketiga	21.886	23.209	24.311	1.102	4,7%	Third parties
Piutang subsidi listrik	7.589	-	-	-	-	Receivables in electricity subsidy
Piutang kompensasi	-	23.173	-	-23.173	-100%	Compensation receivables
Piutang lain-lain	1.672	9.508	47.451	37.943	399,1%	Other receivables
Persediaan	12.828	15.507	12.934	-2.572	-16,6%	Inventories
Pajak dibayar di muka	4.997	5.894	17.634	11.740	199,2%	Prepaid taxes
Biaya dibayar di muka dan uang muka	1.630	1.008	1.207	199	19,8%	Prepaid expenses and advances
Piutang pihak berelasi	5	6	5	-1	-20,7%	Receivables from related parties
Aset lancar lainnya	30	6	72	66	1,168,1%	Other current assets
JUMLAH	**93.797**	**113.415**	**151.367**	**37.951**	**33,5%**	**TOTAL**

Aset lancar sebesar Rp151,37 triliun, naik 33,5% dibandingkan Rp113,42 triliun pada tahun 2018. Kenaikan aset lancar terutama disebabkan adanya kenaikan piutang lain-lain sebesar Rp37,94 triliun.

Komposisi aset lancar terbesar pada tahun 2019 adalah kas dan setara kas dan piutang lain-lain yang masing-masing sebesar 31% dari jumlah aset lancar.

- Kas dan setara kas meningkat 40,0% dari Rp33,29 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp46,60 triliun. Kenaikan kas dan setara kas terutama karena kenaikan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp12,7 triliun, perolehan dari penerbitan obligasi dan KIK EBA sebesar Rp23,36 triliun, dan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp6,5 triliun.
- Piutang lain-lain naik 399,1% dari Rp9,51 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp47,45 triliun terutama berasal dari piutang dari Pemerintah sebesar Rp45,43 triliun. Piutang Pemerintah merupakan akumulasi dari piutang kompensasi atas kehilangan potensi pendapatan tenaga listrik untuk golongan tarif non-subsidi tahun 2018 sebesar Rp23,17 triliun dan tahun 2019 sebesar Rp22,25 triliun.

Current assets amounted to Rp151.37 trillion, rose by 33.5% compared to Rp113.42 trillion in 2018. The increase in current assets was mainly due to an increase in other receivables amounting to Rp37.94 trillion.

The largest composition of current assets in 2019 is cash and cash equivalents and other receivables, each of which is 31% of the total current assets.

- Cash and cash equivalents increased by 40.0% from Rp33.29 trillion in 2018 to Rp46.60 trillion. The increase in cash and cash equivalents was mainly due to an increase in cash receipts from customers of Rp12.7 trillion, acquisition of bonds and KIK EBA issuances of Rp23.36 trillion, and State Capital Participation (PMN) of Rp6.5 trillion.
- Other receivables rose by 399.1% from Rp9.51 trillion in 2018 to Rp.47.45 trillion mainly from receivables from the Government of Rp45.43 trillion. Government receivables are the accumulation of compensation receivables for potential loss of electricity income for the nonsubsidy tariff groups for the year 2018 amounting to Rp23.17 trillion and 2019 amounting to Rp22.25 trillion.

- Sebaliknya, piutang kompensasi sebesar Rp23,17 triliun pada tahun 2018 menjadi nihil di tahun 2019 sesuai persetujuan Pemerintah untuk membayar piutang kompensasi berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-360/MK.02/2020 tanggal 6 Mei 2020 dan No. S-661/MK.02/2019 tanggal 15 Agustus 2019.

- Conversely, compensation receivables amounted to Rp23.17 trillion in 2018 became nil in 2019 according to the Government's approval to reimburse compensation receivables based on the Minister of Finance Letter No. S-360/MK.02/2020 dated May 6, 2020 and No. S-661/MK.02/2019 dated August 15, 2019.

LIABILITAS / LIABILITIES

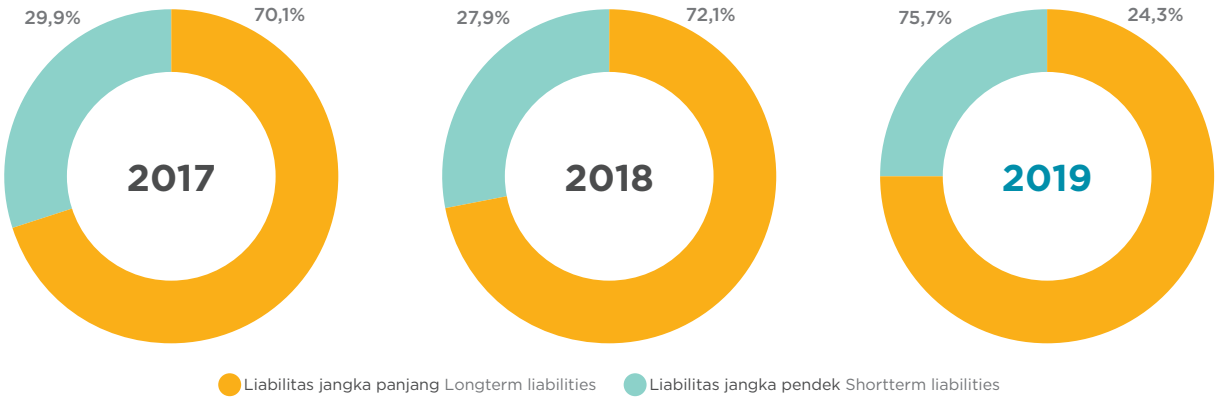

Dalam miliar Rupiah / In billion Rupiah

Liabilitas	2017	2018	2019	Perubahan Change		Liabilities
	a	b	c	d = c-b	e = d/b	
Liabilitas jangka panjang	326.466	407.178	496.376	89.198	21,9%	Non-current liabilities
Liabilitas jangka pendek	139.075	157.896	159.298	1.402	0,9%	Current liabilities
Jumlah	**465.541**	**565.074**	**655.675**	**86.511**	**16,0%**	**Total**

Pada 31 Desember 2019, jumlah liabilitas Perusahaan mencapai Rp655,67 triliun, naik 16,0% dibandingkan periode yang sama tahun 2018 sebesar Rp565,07 triliun. Sesuai dengan sifat usaha yang padat modal dan periode pengembalian investasi yang berjangka waktu panjang, mayoritas liabilitas PLN adalah liabilitas jangka panjang. Selama tiga tahun terakhir persentase liabilitas jangka panjang sangat dominan, yakni berada di kisaran 70%-76% dari jumlah liabilitas. Pada tahun 2019, komposisi liabilitas Perusahaan terdiri dari 76% liabilitas jangka panjang dan 24% liabilitas jangka pendek.

As of December 31, 2019, the Company's total liabilities reached Rp655.67 trillion, up 16.0% compared to the same period in 2018 of Rp565.07 trillion. In line with the nature of capital-intensive businesses and long-term investment return periods, the majority of PLN's liabilities are non-current. During the last three years, the percentage of non-current liabilities has been dominant, approximately 70%-76% of total liabilities. At end of 2019, the composition of the Company's liabilities consisted of 76% non-current liabilities and 24% current liabilities.

Liabilitas Jangka Panjang

Non-current Liabilities

Liabilitas Jangka Panjang
Non-current Liabilities
(Dalam triliun Rupiah In trillion Rupiah)

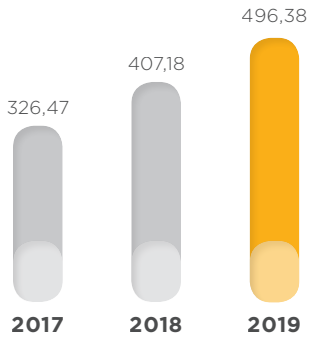

Dalam miliar Rupiah — In billion Rupiah

Liabilitas Jangka Panjang	2017	2018	2019	Perubahan Change		Non-Current Liabilities
	a	b	c	d = c-b	e = d/b	
Liabilitas pajak tangguhan	2.066	13.420	28.121	14.701	109,5%	Deferred tax liabilities
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun						Long-term liabilities - net of current portion
Penerusan pinjaman	31.485	36.105	35.252	-854	-2,4%	Two-step loans
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank	6.309	5.344	4.360	-984	-18,4%	Government and non-bank Government financial institution loans
Utang sewa pembiayaan	15.713	14.468	11.569	-2.899	-20,0%	Lease liabilities
Utang bank	116.017	152.966	184.024	31.058	20,3%	Bank loans
Utang obligasi dan sukuk ijarah	100.440	131.682	174.292	42.610	32,4%	Bond payable and sukuk ijara
Utang listrik swasta	7.026	7.116	6.431	-684	-9,6%	Electricity purchase payable
Utang KIK - EBA	2.909	2.221	1.355	-866	-39,0%	KIK - EBA loans
Utang pihak berelasi	1	1	0	1	-90,8%	Payable to related parties
Liabilitas imbalan kerja	43.559	43.760	50.838	7.078	16,2%	Employee benefits liabilities
Utang lain-lain	940	94	134	39	41,6%	Other payables
JUMLAH	**326.466**	**407.178**	**496.376**	**89.198**	**21,9%**	**TOTAL**

Liabilitas jangka panjang sebesar Rp496,38 triliun, naik 21,9% dibandingkan Rp407,18 triliun pada tahun 2018 karena PLN lebih banyak menggunakan fasilitas kredit utang bank dan penjualan obligasi untuk pembiayaan investasi. Kenaikan liabilitas jangka panjang tahun 2019 merupakan hasil realisasi penerbitan obligasi baru dan penerimaan pinjaman perbankan untuk mendukung pembangunan berbagai proyek pembangkit listrik, transmisi dan distribusi.

Non-current liabilities amounted to Rp496.38 trillion, increased by 21.9% compared to Rp407.18 trillion at end of 2018 because PLN used more bank loan facilities and sold bonds to finance its investments. The increase in non-current liabilities in 2019 was mainly as a result of new bonds issuance and receipt of bank loans to support the construction of a number of power plant, transmission and distribution projects.

Liabilitas Jangka Pendek

Current Liabilities

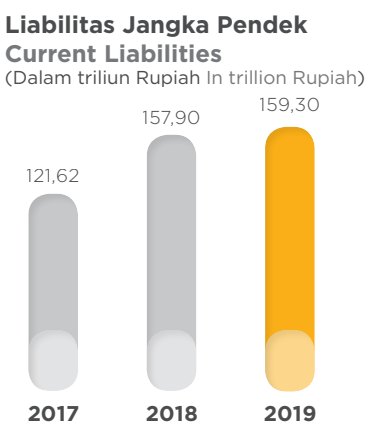

Dalam miliar Rupiah | In billion Rupiah

Liabilitas Jangka Pendek	2017	2018	2019	Perubahan Change		Current-Liabilities
	a	b	c	d = c-b	e = d/b	
Utang usaha						Trade payables
Pihak berelasi	11.215	9.044	11.815	2.770	30,6%	Related parties
Pihak ketiga	32.496	39.563	40.188	625	1,6%	Third parties
Utang pajak	2.388	2.560	2.383	-177	-6,9%	Taxes payable
Biaya masih harus dibayar	11.477	14.809	16.755	1.946	13,1%	Accrued expense
Uang jaminan langganan	12.642	13.466	14.236	770	5,7%	Customers' security deposits
Utang biaya proyek	724	316	151	-165	-52,3%	Project cots payable
Pendapatan ditangguhkan	1.218	930	1.049	119	12,8%	Deferred revenue
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun						Current maturities of long-term liabilities
Penerusan pinjaman	2.736	2.530	2.726	195	7,7%	Two-step loans
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank	1.044	1.861	1.998	138	7,5%	Government and non-bank Government financial institution loans
Utang sewa pembiayaan	4.872	2.625	2.540	-84	-3,2%	Lease liabilities
Utang bank	26.549	28.146	21.693	-6.452	-22,9%	Bank loans
Utang obligasi dan sukuk ijarah	914	2.121	6.946	4.826	227,6%	Bonds payable and sukuk ijara
Utang listrik swasta	350	394	399	5	1,3%	Eelctricity purchase payable
Utang KIK – EBA	631	687	587	-100	-14,6%	KIK – EBA loans
Liabilitas imbalan kerja	8.563	5.874	5.232	-641	-10,9%	Employee benefits liabilities
Utang lain-lain	21.255	32.971	30.599	-2.372	-7,2%	Other payables
JUMLAH	**139.075**	**157.896**	**159.298**	**1.402**	**0,9%**	**TOTAL**

Liabilitas jangka pendek sebesar Rp159,30 triliun, naik 0,9% dibandingkan Rp157,90 triliun pada tahun 2018. Komponen liabilitas jangka pendek terbesar adalah utang usaha dari pembelian tenaga listrik, bahan bakar, barang dan jasa untuk kebutuhan operasional Perusahaan, dan liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun.

Current liabilities amounted to Rp159.30 trillion, grew by 0.9% compared to Rp157.90 trillion in 2018. The largest component of current liabilities is trade payables from the purchase of electricity, fuel, goods and services for the Company's operational needs, and current maturities of non-current liabilities.

EKUITAS

EQUITY

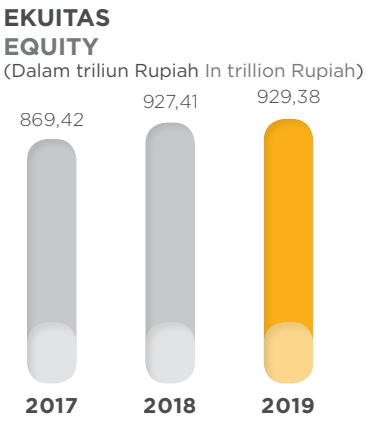

Ekuitas Perusahaan pada tahun 2019 naik 0,2% dari Rp927,41 triliun di tahun 2018 menjadi Rp929,38 triliun. Kenaikan ekuitas terutama disebabkan oleh Penyertaan Modal Negara (PMN) ke dalam modal saham Perusahaan sebesar Rp10,53 triliun mendukung penguatan struktur modal PLN agar mampu meningkatkan *leverage* Perusahaan dalam mencari tambahan dana guna memastikan realisasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dalam skema 35.000 MW.

The Company's equity in 2019 increased by 0.2% from Rp927.41 trillion in 2018 to Rp927.41 trillion. The increase in equity was mainly due to State Capital Participation into the Company''s share capital of Rp10.53 trillion to support the strengthening of PLN's capital structure in order to increase the Company's leverage in finding additional funds to ensure the realization of electricity infrastructure development in the 35,000 MW scheme.

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS

Dalam miliar Rupiah — In billion Rupiah

Laba Rugi Konsolidasian	2017	2018	2019	Perubahan Change		Consolidated Income Statements
	a	b	c	d = c-b	e = d/b	
Pendapatan usaha	255.295	272.898	285.641	12.743	4,7%	Revenues
Biaya usaha	275.474	308.189	315.441	7.252	2,4%	Operating espenses
Rugi sebelum subsidi	(20.179)	(35.291)	(29.800)	5.491	-15,6%	Operating loss before subsidy
Subsidi Pemerintah	45.738	48.102	51.712	3.610	7,5%	Government's electricity subsidy
Pendapatan kompensasi	-	23.173	22.253	-920	-4,0%	Compensation income
Laba setelah subsidi	25.559	35.984	44.165	8.181	22,7%	Operating income after subsidy
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	25.559	-16.083	-18.046	-1.962	12,2%	Other income (expenses) – net
Laba sebelum pajak		19.900	26.119	6.218	31,2%	Income before tax
Beban pajak	(17.015)	(8.325)	(21.797)	-13.472	161,8%	Tax expenses
Laba tahun berjalan	8.544	11.576	4.322	7.254	62,7%	Income for the year

Pendapatan Usaha

Revenues

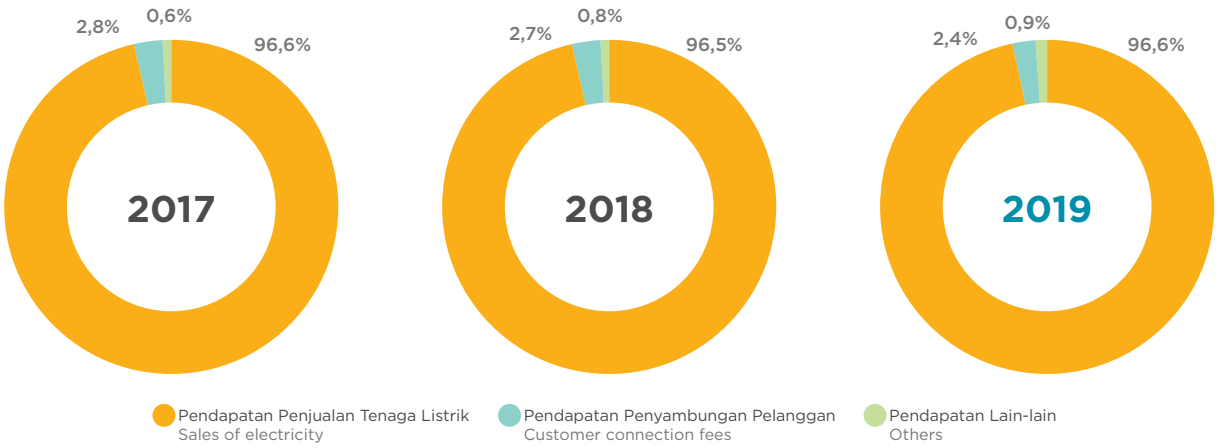

Dalam miliar Rupiah | In billion Rupiah

Pendapatan Usaha	2017	2018	2019	Perubahan Change		Revenues
	a	b	c	d = c-b	e = d/b	
Penjualan tenaga listrik	246.587	263.478	276.062	12.584	4,8%	Sales of electricity
Penyambungan pelanggan	7.113	7.309	6.935	(375)	-5,1%	Customer connection fees
Lain-lain	1.595	2.111	2.644	533	25,3%	Others
Jumlah	**255.295**	**272.898**	**285.641**	**12.743**	**4,7%**	**Total**

Pendapatan usaha Perusahaan berasal dari penjualan tenaga listrik, penyambungan pelanggan, dan lain-lain. Pendapatan usaha meningkat 4,7% dari Rp272,90 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp285,64 triliun pada tahun 2019.

a. Penjualan tenaga listrik naik 4,8% dari Rp263,48 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp276,06 triliun pada tahun 2019. Pertumbuhan penjualan ini berasal dari kenaikan volume penjualan sebesar 4,7% dari 234,62 Terra Watt hour (TWh) pada tahun 2018 menjadi 245,52 TWh. Peningkatan penjualan kWh berkorelasi dengan jumlah pelanggan yang bertambah 3,8 juta pelanggan dari 71,9 juta pelanggan pada akhir tahun 2018 menjadi 75,7 juta pelanggan pada akhir tahun 2019.

b. Pendapatan biaya penyambungan pelanggan turun 5,1% dari Rp7,31 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp6,94 triliun pada tahun 2019. Penurunan ini terutama karena adanya program-program untuk menarik pelanggan baru seperti diskon tambah daya dan penyambungan baru. Penyebab

The Company's revenues are derived from sales of electricity, customer connection fees and others. Revenues increased by 4.7% from Rp272.90 trillion in 2018 to Rp285.64 trillion in 2019.

a. Sales of electricity increased by 4.8% from Rp263.48 trillion in 2018 to Rp276.06 trillion in 2019. This sales growth came from the increase in sales volume of 4.7% from 234.62 Terra Watt hour (TWh) in 2018 to 245.52 TWh. The increase in kWh sales was correlated with the number of subscribers which increased by 3.8 million customers from 71.9 million customers at end of 2018 to 75.7 million customers at end of 2019.

b. Customer connection fees decreased by 5.1% from Rp7.31 trillion in 2018 to Rp6.94 trillion in 2019. This decline was due to the programs to attract new customers, such as power upgrade and new connection discounts. Another driver was that incremental power

lain adalah karena delta penambahan daya sampai dengan Desember tahun 2019 hanya mencapai 7.795,99 MVA, lebih rendah dari delta penambahan daya pada tahun 2018 sebesar 8.262,92 MVA.

c. Pendapatan usaha lain-lain naik 25,3% dari Rp2,11 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp2,64 triliun. Pendapatan lain-lain terutama berasal dari pendapatan atas usaha jaringan dan jasa telekomunikasi.

up to December 2019 only reached 7,795.99 MVA, lower than incremental power in 2018 of 8,262.92 MVA.

c. Other revenues increased by 25.3% from Rp2.11 trillion in 2018 to Rp2.64 trillion. Other revenues mainly came from network and telecommunications services.

Biaya Usaha

Operating Expenses

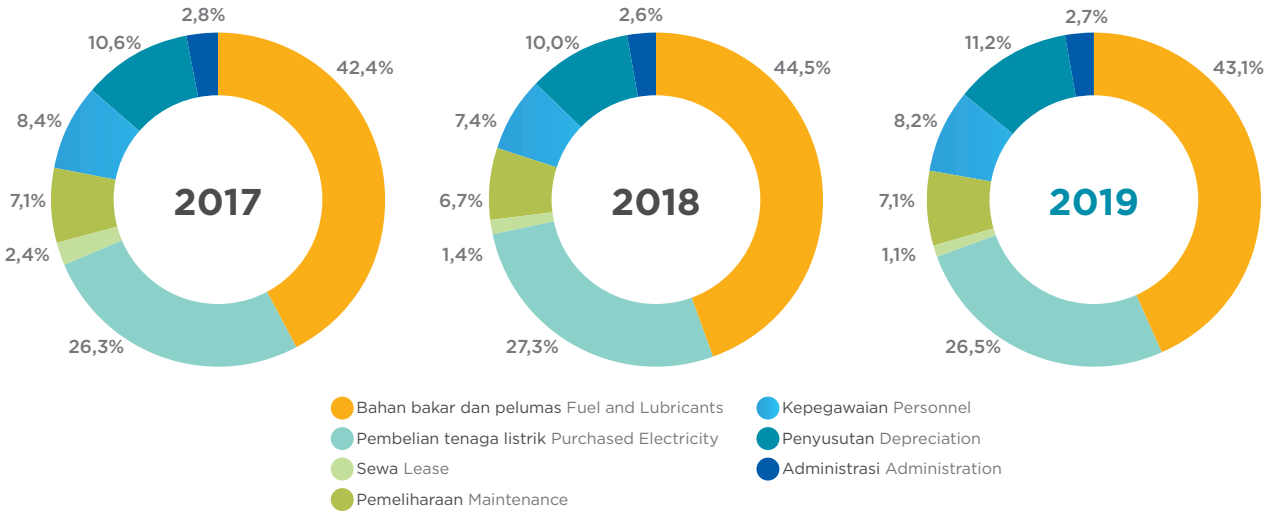

Dalam miliar Rupiah — In billion Rupiah

Beban Usaha	2017	2018	2019	Perubahan Change		Operating Expenses
	a	b	c	d = c-b	e = d/b	
Pembelian tenaga listrik	72.427	84.268	83.564	(704)	-0,8%	Purchased electricity
Sewa pembangkit	6.592	4.272	3.617	(655)	-15,3%	Generator rental
Bahan bakar dan pelumas	116.948	137.267	136.084	-1.182	-0,9%	Fuel and lubricants
Pemeliharaan	19.516	20.738	22.328	1.591	7,7%	Maintenance
Kepegawaian	23.124	22.950	25.909	2.959	12,9%	Personnel
Biaya administrasi	7.707	7.950	8.620	670	8,4%	Administration cost
Penyusutan	29.160	30.745	35.318	4.573	14,9%	Depreciation
Jumlah	**275.474**	**308.189**	**315.441**	**7.252**	**2,4%**	**Total**

Beban usaha naik 2,4% dari Rp308,19 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp315,44 triliun.

a. Beban pembelian tenaga listrik turun 0,8% dari Rp84,27 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp83,56 triliun, dengan harga rata-rata lebih rendah Rp96 per kWh dari Rp1.075 per kWh pada Desember 2018 menjadi Rp979 per kWh pada Desember 2019.
b. Sewa pembangkit turun 15,3% dari Rp4,27 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp3,62 triliun.
c. Biaya bahan bakar dan pelumas turun 0,9% dari Rp137,27 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp136,08 triliun. Penurunan biaya bahan bakar dan pelumas disebabkan oleh faktor-faktor berikut:
    - Volume pemakaian batu bara pada tahun 2019 mencapai 66,14 juta ton, naik 5,82 juta ton dibandingkan pemakaian tahun 2018 sebesar 60,32 juta ton. Penggunaan batu bara masih dominan di PLN karena produksi tenaga listrik yang dihasilkan dari pembangkit batu bara mencapai 61,8% dari total produksi PLN. Beban bahan bakar batu bara naik sebesar Rp3,11 triliun atau 6,7% dari Rp46,29 triliun menjadi Rp49,40 triliun.
    - Meskipun kurs rata-rata transaksi Rupiah terhadap Dolar AS tahun 2019 lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2018, tetapi harga gas mengalami kenaikan dari USD8,5 per MMBTU pada 2018 menjadi USD9,4 per MMBTU. Hal ini mengakibatkan harga gas rata-rata per MMBTU naik Rp11.301,9 per MMBTU dari harga rata-rata tahun 2018 sebesar Rp121.493,1 per MMBTU menjadi Rp132.795,1 per MMBTU pada tahun 2019. Sebaliknya, volume pemakaian justru mengalami penurunan sebesar 19.141 MMBTU dari 456.312 MMBTU pada tahun 2018 menjadi 437.171 MMBTU. Walaupun ada penurunan volume penggunaan bahan bakar gas, kenaikan harga gas di tahun 2019 menyebabkan kenaikan biaya pemakaian gas sebesar 4,7% dari Rp55,44 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp58,05 triliun pada tahun 2019.
    - Biaya pemakaian BBM menurun 27,47% dari sebesar Rp31.74 Triliun pada 2018 hingga menjadi Rp23,02 Triliun pada tahun 2019. Selama tahun 2019, volume pemakaian BBM sebanyak 2.654,88 ribu kilo liter dimana terdapat penurunan konsumsi 897,88 ribu kilo liter bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak 3.552,76 kilo liter.

Operating expenses up 2.4% from Rp308.19 trillion in 2018 to Rp315.44 trillion.

a. Purchase electricity down 0.8% from Rp84.27 trillion in 2018 to Rp83.56 trillion, with a lower average price at Rp96 per kWh from Rp1,075 per kWh in 2018 to Rp979 per kWh in 2019.
b. Power plant lease decreased by 15.3% from Rp4.27 trillion in 2018 to Rp3.62 trillion.
c. Fuel and lubricants slightly decreased by 0.9% from Rp137.27 trillion in 2018 to Rp136.21 trillion. The reduction in fuel and lubricants was caused by the following factors:
    - The volume of coal usage in 2019 reached 66.14 million tons, up 5.82 million tons compared to the use in 2018 of 60.32 million tons. The use of coal was still dominant in PLN since power production from coal plants reached 61.8% of PLN's total production. Coal fuel increased by Rp3.11 trillion or 6.7% from Rp46.29 trillion to Rp49.40 trillion.
    - Despite Rupiah's average exchange rate against USD in 2019 was lower than in 2018, gas price increased from USD8.5 per MMBTU in 2018 to USD9.4 per MMBTU. This caused the average gas price per MMBTU to increase by Rp11,301.99 per MMBTU from 2018 average price of Rp121,493.1 per MMBTU to Rp132,795.1 per MMBTU in 2019. On the contrary, the usage volume actually decreased by 19,141 MMBTU from 456,312 MMBTU in 2018 to 437,171 MMBTU. Although there was a decrease in gas usage volume, the increase in gas prices in 2019 drove an increase in gas usage expense by 4.7% from Rp55.44 trillion in 2018 to Rp58.05 trillion in 2019.
    - Oil consumption costs decreased by 27.47% from Rp31.74 trillion in 2018 to Rp23.02 trillion in 2019. During 2019, the volume of fuel consumption was 2,654.88 thousand kilo liters where there was a reduction in consumption of 897.88 thousand kilo liters when compared to 2018 there were 3,552.76 kilo liters.

d. Biaya pemeliharaan naik 7,7% dari Rp20,74 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp22,33 triliun. Biaya pemeliharaan terdiri dari:
   - Pemakaian material sebesar Rp5,76 triliun, naik 0,5% dari Rp5,73 triliun pada tahun 2018.
   - Jasa borongan sebesar Rp16,56 triliun, naik 10,4% dari Rp15,00 triliun pada tahun 2018.
e. Biaya pegawai naik 12,9% dari Rp22,95 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp25,91 triliun.
f. Biaya administrasi naik 8,4% dari Rp7,95 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp8,62 triliun.
g. Biaya penyusutan naik 14,9% dari Rp30,74 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp35,32 triliun. Kenaikan biaya penyusutan sebagai dampak dari surplus revaluasi asset operasi PLN yang dilakukan pada akhir 2018, selain karena bertambahnya aset tetap beroperasi dari proyek-proyek infrastruktur yang telah selesai konstruksinya.

d. Maintenance grew by 7.7% from Rp20.74 trillion in 2018 to Rp22.33 trillion. Maintenance expense consisted of:
   - Spare parts use amounted to Rp5.76 trillion, up 0.5% from Rp5.73 trillion in 2018.
   - Contractor fees amounted to Rp16.56 trillion, up 10.4% from Rp15.00 trillion in 2018.
e. Personnel rose by 12.9% from Rp22.95 trillion in 2018 to Rp24.91 trillion.
f. Administration up 8.4% from Rp7.95 trillion in 2018 to Rp8.62 trillion.
g. Depreciation increased by 14.9% from Rp30.74 trillion in 2018 to Rp35.32 trillion. The increase in depreciation costs as a result of PLN's revaluation surplus operating assets carried out at the end of 2018, in addition to the increase in fixed assets operating from infrastructure projects that have been completed construction.

Laba (Rugi) Usaha Sebelum Subsidi

Perusahaan mencatat rugi usaha sebelum subsidi sebesar Rp29,80 triliun, turun 15,6% dibandingkan Rp35,29 triliun pada tahun 2018.

Operating Loss Before Subsidy

The Company recorded an operating loss before subsidy of Rp29.80 trillion, down 15.6% from Rp35.29 trillion in 2018.

Subsidi Pemerintah

Realisasi subsidi tahun 2019 sebesar Rp51,71 triliun, meningkat 7,5% dibandingkan Rp48,10 triliun pada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan dukungan Pemerintah kepada PLN agar tetap dapat merealisasikan investasi pengembangan ketenagalistrikan di tengah kewajiban menyediakan listrik yang terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat dan untuk menjaga rasio *leverage* sesuai persyaratan yang ditentukan dalam pinjaman.

Government's Subsidy

Realization of subsidy in 2019 was Rp51.71 trillion, a growth of 7.5% compared to Rp48.10 trillion in the previous year. This showed the Government's support for PLN so as to realize investment in power development while fulfilling the obligation to provide affordable power to all citizens and maintaining the leverage ratio according to the loan covenants.

Subsidi Pemerintah
Government's electricity subsidy
(Dalam miliar Rupiah In billion Rupiah)

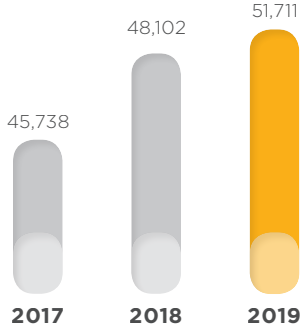

Pendapatan Kompensasi

Realisasi pendapatan kompensasi tahun 2019 sebesar Rp22,25 triliun, turun 3,98% dari Rp23,17 triliun pada tahun 2018. Pendapatan kompensasi adalah penggantian BPP dari Pemerintah atas kehilangan potensi pendapatan tenaga listrik untuk golongan tarif non-subsidi.

Compensation Income

Realization of compensation income in 2019 was Rp22.25 trillion, decreased by 3.98% from Rp23.17 trillion in 2018. Compensation income is a reimbursement of Cost of Electricity Supplies (BPP) from Government for potential loss of electricity income for nonsubsidy tariff groups.

Laba Usaha Setelah Subsidi dan Kompensasi

Perusahaan mencatat laba usaha setelah subsidi tahun 2019 sebesar Rp44,16 triliun, naik 22,7% dari Rp35,98 triliun pada tahun sebelumnya.

Operating Income After Subsidy and Compensation

The Company recorded operating income after subsidy in 2019 of Rp44.16 trillion, increased by 22.7% from Rp35.29 trillion in the previous year.

Beban Luar Usaha

Non-operating Expenses

Dalam miliar Rupiah / In billion Rupiah

Beban Luar Usaha	2017	2018	2019	Perubahan Change		Non-Operating Expenses
	a	b	c	d = c-b	e = d/b	
Penghasilan keuangan	1.066	804	755	(49)	-6,1%	Financial income
Beban bunga dan keuangan	(18.557)	(21.624)	24.619)	(2.995)	13,9%	Interest expenses and financial charges
Laba (rugi) selisih kurs	(2.935)	(10.927)	9.486	20.413	-186,8%	Gain (loss) on foreign exchange
Lain-lain bersih	3.410	15.663	-3.668	(19.331)	-123,4%	Others - net
Jumlah	**(17.015)**	**(16.083)**	**(18.046)**	**-1.962**	**12,2%**	**Total**

Beban luar usaha terdiri dari penghasilan keuangan, beban bunga dan keuangan, laba (rugi) akibat selisih kurs, dan penghasilan (beban) lain-lain – bersih. Pada tahun 2019, beban luar usaha

Non-operating expenses consisted of financial income, interest expenses and financial charges, gain (loss) on foreign exchange and other income (expenses) - net. In 2019, non-operating

naik 12,2% dari Rp16,08 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp18,04 triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya kenaikan beban bunga dan keuangan sebesar Rp2,99 triliun dan beban lain-lain bersih sebesar Rp19,33 triliun dari tahun sebelumnya.

Sebaliknya, Perusahaan memperoleh laba akibat selisih kurs sebesar Rp9,49 triliun sebagai dampak dari penguatan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS dan Euro pada 31 Desember 2019 yang masing-masing sebesar Rp13.901 per USD dan Rp15.589 per Euro, lebih rendah dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar Rp14.481 per USD dan RP16.560 per Euro pada periode yang sama tahun 2018. Pada tahun sebelumnya, Perusahaan mengalami rugi selisih kurs sebesar Rp10,93 triliun.

Laba Sebelum Pajak

Perusahaan membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp26,12 triliun pada tahun 2019, naik 31,2% dibandingkan Rp19,90 triliun pada tahun sebelumnya.

Pajak Penghasilan dan Laba Bersih

Beban pajak Perusahaan dan entitas anak pada tahun 2019 mencapai Rp21,80 triliun, meningkat 161,8% dari Rp8,32 triliun pada tahun 2018. Kenaikan beban pajak terutama karena adanya pengakuan pajak tangguhan atas akumulasi rugi fiskal sebesar Rp12,23 triliun.

Dengan demikian, Perusahaan membukukan laba bersih setelah pajak sebesar Rp4,32 triliun, turun 62,7% dibandingkan Rp11,58 triliun pada tahun 2018.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Pada tahun 2019 Perusahaan mencatat rugi komprehensif lain sebesar Rp4,29 triliun terutama karena adanya pengukuran kembali atas program imbalan pasti sebesar Rp3,77 triliun. Sedangkan pada tahun 2018 Perusahaan memperoleh penghasilan komprehensif lain sebesar Rp47,39 triliun. Dengan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp4,32 triliun, maka jumlah penghasilan komprehensif tahun 2019 sebesar Rp26,54 miliar, dibandingkan Rp58,96 triliun pada tahun 2018.

expenses increased by 12.2% from Rp16.08 trillion in 2018 to Rp18.04 trillion. This decrease was mainly due to an increase in interest and financial expenses by Rp2.99 trillion and other expenses by Rp19.33 trillion from the previous year.

Conversely, the Company recorded gain on foreign exchange of Rp9.49 trillion as a result of the strengthening of Rupiah exchange rate against USD and Euro as at December 31, 2019, which were Rp13,901 per USD and Rp15,589 per Euro, lower than their positions as at December 31, 2018 which amounted to Rp14,481 per USD and Rp16,560 per Euro. In the previous year, the Company recorded loss on foreign exchange of Rp10.93 trillion.

Income before Tax

The Company recorded an income before tax of Rp26.12 trillion in 2019, significantly increased by 31.2% compared to Rp19.90 trillion in the previous year.

Income Tax and Net Income

Tax expenses of the Company and Subsidiaries in 2019 reached Rp21.80 trillion, increased by 161.8% from Rp8.32 trillion in 2018. The increase of tax expenses was mainly due to unrecognized deferred tax on allowance of doubtful accounts and nondeductible expenses (nontaxable income) of Rp12.23 trillion.

Therefore, the Company recorded a net income after tax of Rp4.32 trillion, decreased by 62.7% compared to Rp11.58 trillion in 2018.

Total Comprehensive Income for the Year

In 2019 the Company recorded other comprehensive loss of Rp4.29 trillion mainly due to a remeasurement on defined benefit plan of Rp3.77 trillion. Whereas in 2018 the Company earned other comprehensive income of Rp47.39 trillion. With the net income for the year of Rp4.32 trillion, the total comprehensive income in 2019 was Rp26.54 billion, compared to IDR58.96 trillion in 2018.

Laba Per Saham Tahun Berjalan

Pada tahun 2019, laba tahun berjalan diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp4,27 triliun dan diatribusikan kepada kepentingan non pengendali sebesar Rp51,21 miliar. Sedangkan laba per saham pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp37.516, turun dari posisi pada tahun 2018 sebesar Rp105.332.

Earnings per Share for the Year

In 2019, income for the year attributable to the owner of the parent was Rp4.27 trillion and attributable to non-controlling interest was Rp51.21 billion. Whereas earnings per share in 2019 was Rp37,516, decreased from Rp105,332 in 2018.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan	2017	2018	2019	Income (Loss) For The Year
Laba tahun berjalan diatribusikan kepada:				**Attributable to:**
Pemilik entitas induk (triliun Rp)	4.41	11.57	4.27	Owners of the parent (Rp trillion)
Kepentingan non pengendali (miliar Rp)	18.91	7.47	51.21	Non-controlling interest (Rp billion)
Laba per saham (dalam Rupiah penuh)	50,541	105,332	37,516	Earning per share (in Rupiah full aomunt)

LAPORAN ARUS KAS

STATEMENTS OF CASH FLOWS

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi
Net cash provided by operating activities
(Dalam triliun Rupiah In trillion Rupiah)

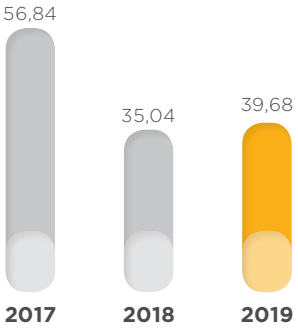

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi
Net cash used in investing activities
(Dalam triliun Rupiah In trillion Rupiah)

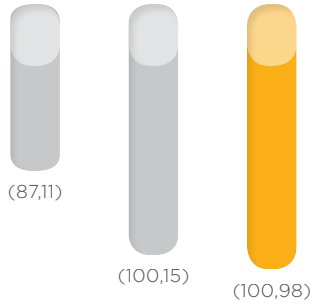

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan
Net cash provided by financing activities
(Dalam triliun Rupiah In trillion Rupiah)

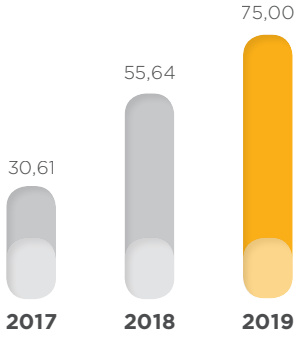

Pada tahun 2019 PLN mencatatkan kenaikan bersih kas dan setara kas sebesar Rp13,70 triliun. Perusahaan memperoleh arus kas masuk bersih dari kegiatan operasi sebesar Rp39,68 triliun, meningkat dari Rp35,04 triliun di tahun 2018. Arus kas masuk dari kegiatan operasi terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp287,89 triliun, penerimaan subsidi listrik sebesar Rp51,29 triliun, dan penerimaan bunga sebesar Rp755,10 miliar.

In 2019, PLN recorded an increase in cash and cash equivalents of Rp13.70 trillion. The Company obtained net cash inflows from operating activities of Rp39.68 trillion, up from Rp35.04 trillion in 2018. Cash inflows from operating activities mainly came from cash receipts from customers of Rp287.89 trillion, Government's subsidy received of Rp51.29 trillion and interest received of Rp755.10 billion.

Kas dari hasil operasi tersebut digunakan untuk membayar barang dan jasa kepada para pemasok sebesar Rp248,76 triliun, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp23,99 triliun, bunga pinjaman sebesar Rp23,42 triliun dan pajak penghasilan sebesar Rp3,55 triliun.

Cash from operating activities was used to pay for goods and services to suppliers of Rp248.76 trillion, cash paid to employees of Rp23.99 trillion, interest expense paid of Rp23.42 trillion and income tax paid of Rp3.55 trillion.

Kas yang digunakan untuk kegiatan investasi naik 0,8% dari Rp100,16 triliun pada akhir tahun 2018 menjadi Rp100,98 triliun. Kas digunakan untuk membiayai perolehan aset tetap dan pekerjaan dalam pelaksanaan (PDP) sebesar Rp100,43 triliun, perolehan investasi pada entitas asosiasi sebesar Rp1.118,25 miliar, akuisisi entitas anak sebesar Rp332,46 miliar dan penempatan rekening bank yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp436,08 miliar.

Cash used in investing activities increased by 0.8% from Rp100.16 trillion at the end of 2018 to Rp100.98 trillion. Cash used to finance the addition of property, plant and equipment and work-in-progress (PDP) was Rp100.43 trillion, acquisition of investments in associates and joint ventures was Rp1.118.25 billion, acquisition of subsidiaries of Rp332.46 billion and placement of restricted cash in banks and time deposits of Rp436.08 billion.

Dari kegiatan investasi, Perusahaan menerima hasil penjualan aset tidak digunakan dalam operasi sebesar Rp185,53 miliar, penerimaan dividen dari entitas asosiasi sebesar Rp224,31 miliar, dan pencairan investasi jangka pendek sebesar Rp879,54 miliar.

Dari aktivitas pendanaan, Perusahaan mencatatkan perolehan kas bersih sebesar Rp75,00 triliun, naik 34,8% dari perolehan tahun 2018 sebesar Rp55,64 triliun. Perolehan dana berasal dari penerbitan obligasi dan KIK EBA sebesar Rp54,60 triliun, Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp6,50 triliun, dan perolehan utang bank sebesar Rp77,15 triliun.

Sebaliknya, terdapat pengeluaran untuk pembayaran utang obligasi dan KIK EBA sebesar Rp3,25 triliun, pembayaran penerusan pinjaman sebesar Rp2,57 triliun, pembayaran utang kepada Pemerintah sebesar Rp1,04 triliun, pembayaran dividen sebesar Rp4,00 triliun, pembayaran utang bank sebesar Rp49,36 triliun, pembayaran utang listrik swasta sebesar Rp394,40 miliar, dan pembayaran utang sewa pembiayaan sebesar Rp2,62 triliun.

Pada tahun 2019, pengaruh perubahan kurs mata uang sebesar negatif Rp399,22 miliar, sehingga dari posisi kas dan setara kas di awal tahun sebesar Rp33,29 triliun dan kenaikan kas dan setara kas sebesar Rp13,70 triliun, maka posisi kas dan setara kas di akhir tahun sebesar Rp46,60 triliun.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Kemampuan Perusahaan dalam membayar utang, dapat dilihat dari rasio keuangan yang relevan, yakni rasio solvabilitas dan rasio likuiditas.

Rasio Solvabilitas

Rasio ini menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam melunasi seluruh utangnya. Rasio ini juga terpengaruh oleh hasil revaluasi aset yang dilakukan PLN yang membuat jumlah aset dan modal Perusahaan naik secara substansial.

From investing activities, the Company received proceeds from sale of assets not used in operations of Rp185.53 billion, proceeds from dividend of associates and joint ventures of Rp224.31 billion and withdrawal of short-term investments of Rp879.54 billion.

The Company recorded net cash provided financing activities of Rp75.00 trillion, increased by 34.8% from the net cash provided in 2018 of Rp55.64 trillion. Cash inflow was derived from proceeds from bonds payable and KIK EBA amounting to Rp54.60 trillion, State Capital Participation (PMN) of Rp6.50 trillion and disbursed bank loans of Rp77.15 trillion.

On the other hand, there were payment of bonds payable and KIK EBA of Rp2.77 trillion, payment of two-step loans of Rp3.25 trillion, payment of Government of Rp1.04 trillion, payment of dividends of Rp4.00 trillion, payment of bank loan of Rp49.36 trillion, payment of electricity purchase payables of Rp394.40 billion and payment of lease liabilities of Rp2.62 trillion.

In 2019, the effect of changes in foreign currency reached Rp399.22 billion, so that from the balance of cash and cash equivalents at the beginning of the year of Rp33.29 trillion and an increase in cash and cash equivalents of Rp13.70 trillion, the balance of cash and cash equivalents at end of the year was Rp46.60 trillion.

SOLVENCY

The Company's ability to repay its liabilities is reflected on the relevant financial ratios, namely solvency ratio and liquidity ratio.

Solvency Ratio

This ratio indicates the Company's ability to settle its liabilities. This ratio is also affected by asset revaluation conducted by PLN, which leads to a substantial increase in the Company's total assets and capital.

Liabilitas terhadap Aset (%)
Debt to Asset Ratio (%)

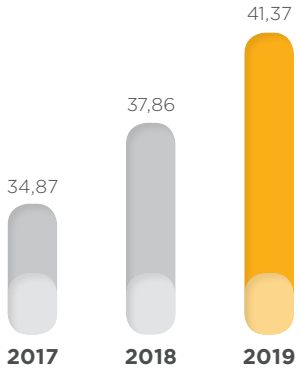

Liabilitas terhadap Ekuitas (%)
Debt to Equity Ratio (%)

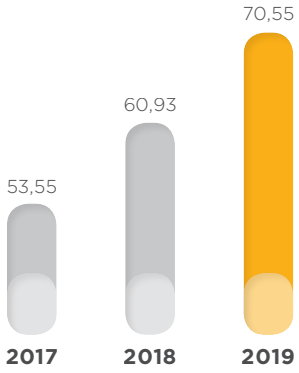

Kenaikan liabilitas Perusahaan pada tahun 2019 menyebabkan rasio liabilitas terhadap aset naik dari 37,86% menjadi 41,37%. Sedangkan rasio liabilitas terhadap ekuitas naik dari 60,93% menjadi 70,55%. Untuk menjaga tingkat solvabilitas, selain memanfaatkan utang, Perusahaan juga memperoleh Penyertaan Modal Negara (PMN) sehingga rasio liabilitas terhadap ekuitas (DER) masih relatif rendah.

Kenaikan solvabilitas PLN merupakan dampak langsung dari naiknya saldo liabilitas untuk mendukung belanja modal yang akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan di masa mendatang. Dengan menjaga rasio solvabilitas, PLN masih akan memiliki kapabilitas besar untuk menggalang dana yang dibutuhkan bagi pengembangan usaha di masa depan.

The increase in total liabilities in 2019 caused the Company's Debt to Assets Ratio to increase from 37.86% to 41.37%. While Debt to Equity Ratio grew from 60.93% to 70.55%. To maintain its solvency, in addition to debt utilization, the Company also obtained State Capital Participation (PMN) so that Debt to Equity Ratio (DER) was still relatively low.

The increase in PLN's solvency was a direct impact of the increasing liabilities to support capital expenditure that will have a positive impact on future revenue growth. By maintaining its solvency ratio, going forward, PLN still has substantial capability in raising funds to support future business development.

Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang akan jatuh tempo, berdasarkan rasio antara aset lancar dengan kewajiban lancar.

Liquidity Ratio

Liquidity ratio indicates the Company's ability to meet its maturing current liabilities, calculated by dividing the current assets by current liabilities.

Rasio Lancar (%)
Current Ratio (%)

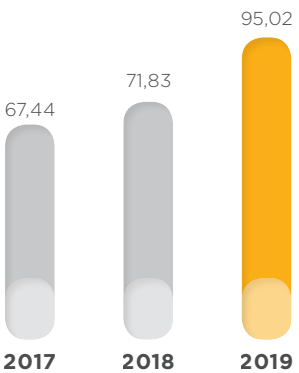

Rasio Kas (%)
Cash Ratio (%)

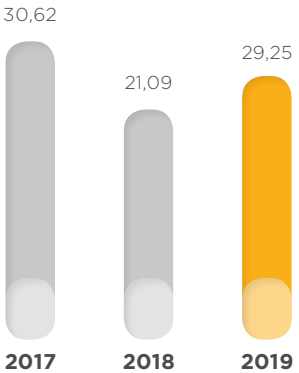

Pada tahun 2019 rasio lancar PLN sebesar 95,02%, naik dari posisi 71,83% pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan peningkatan kemampuan Perusahaan dalam menutupi kewajiban lancarnya karena aset lancar Perusahaan pada tahun 2019 tumbuh 33,5% sedangkan liabilitas jangka pendek hanya naik 0,9%. Rasio Kas pada tahun 2019 sebesar 29,46%, naik dari 21,86% pada tahun 2018. Hal ini disebabkan karena peningkatan nilai kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan sebesar 35,99% dari posisi tahun 2018 sedangkan kewajiban lancar hanya naik 0,9% sehingga tingkat likuiditas Perusahaan meningkat.

At end of 2019, PLN's current ratio was 95.02%, increased from 71.83% in 2018. This reflected an increase in the Company's ability to settle its current liabilities, due to the increase in current assets in 2019 that rose by 33.5% while current liabilities only grew by 0.9%. Cash Ratio in 2019 was 29.46%, up from 21.86% at end of 2018. This was due to an increase in the amount of cash and cash equivalents owned by the Company of 35.99% from the position at end of 2018, while current liabilities only grew by 0.9% so that the Company's liquidity improved.

Rasio Profitabilitas

Profitability Ratio

Rasio Laba terhadap Ekuitas (%)
Net Return on Ratio (%)

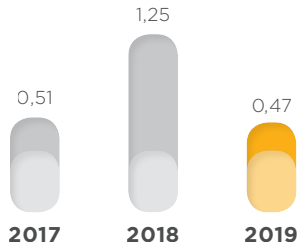

Rasio Laba terhadap Aset (%)
Net Return on Investment (%)

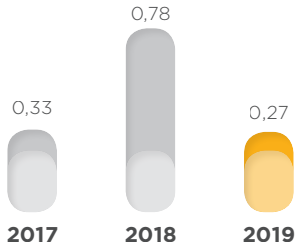

Marjin Laba Operasi (%)
Operating Profit margin (%)

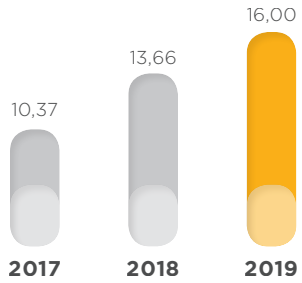

Margin laba Bersih (%)
Net Profit Margin (%)

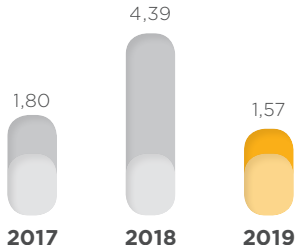

Rasio ini menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Rentabilitas terhadap ekuitas (net return on equity) di tahun 2019 mencapai 0,47%, turun dari 1,25% pada tahun 2018 seiring penurunan perolehan laba bersih Perusahaan pada tahun 2019. Rentabilitas terhadap aset (net return on asset) juga turun dari 0,78% pada 2018 menjadi 0,27%.

This ratio indicates the Company's ability to generate net income using the available resources. Net return on equity in 2019 reached 0.47%, down from 1.25% in 2018, in line with the decrease of net income in 2019. Net return on assets also decreased from 0.78% in 2018 to 0.27%.

Rasio Aktivitas

Activity Ratio

Perputaran Piutang Usaha (kali)
Receiveble Turnover (times)

Periode Pengihan (hari)
Collection Period (days)

Perputaran Aset Tetap (kali)
Fixed Assets Turnover (times)

Rasio aktivitas menunjukkan efektivitas Perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Rasio ini digunakan untuk menilai seberapa efisien Perusahaan dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan.

Activity ratio indicates the Company's effectiveness in using its assets. This ratio is used to assess how efficient a company can utilize and manage its own resources to generate revenues.

Perputaran piutang usaha menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2018. Jumlah piutang usaha Perusahaan pada tahun 2019 sebesar Rp25,13 triliun. Dari jumlah piutang usaha tersebut, hanya 7% yang melebihi masa pembayaran di atas 360 hari. Sebanyak 6,5% merupakan piutang usaha dengan masa lewat jatuh tempo kurang dari 360 hari. Sehingga, periode penagihan selama 2019 sedikit meningkat dibandingkan tahun 2018.

Trade receivables turnover showed an improvement from 2018. The Company's trade receivables at end of 2019 amounted to Rp25.13 trillion. Of the total trade receivables, only 7% were overdue for more than 360 days and 6.5% were overdue for less than 360 days. Hence, the collectibility period in 2019 was slightly improved than 2018.

Perputaran aset tetap pada tahun 2019 sebesar 0,202 kali, sedikit lebih rendah dari periode 2018 sebesar 0,207 kali. Hal ini menunjukkan bertambahnya nilai aset tetap Perusahaan (naik 4,8% dari tahun 2018) berimbas pada peningkatan penjualan (naik 4,8% dari tahun 2018) dimana Perusahaan memperoleh pendapatan penjualan yang nilainya 0,202 kali total asetnya.

Return on property, plant, and equipment in 2019 was 0.202 times, slightly lower than the 2018 period of 0.207 times. This shows that the increase in the value of the Company's fixed assets (up 4.8% from 2018) resulted in an increase in sales (up 4.8% from 2018) where the Company obtained sales revenue of 0.202 times its total assets.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL

Struktur modal PLN di tahun 2019 terdiri dari 41% liabilitas dan 59% ekuitas. Liabilitas PLN sebagian besar digunakan untuk membiayai modal investasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berupa pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi serta gardu induk, dan sebagian lainnya digunakan untuk memenuhi modal kerja. Sedangkan ekuitas seluruhnya digunakan untuk membiayai modal investasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan risiko usaha.

CAPITAL STRUCTURE AND CAPITAL STRUCTURE POLICY

PLN's capital structure in 2019 comprised 41% liabilities and 59% equity. PLN's liabilities were mostly used for investments in power infrastructure development in the form of power plants, transmission and distribution networks. The remaining liabilities were used for working capital. Meanwhile, all equity was used to finance investments in power infrastructure development and business risks.

Dalam miliar Rupiah / In billion Rupiah

Struktur Modal	2017		2018		2019		Capital Structure
Liabilitas	465.541	35%	565.074	38%	655.675	41%	Liabilities
Ekuitas	869.417	65%	927.414	62%	929.380	59%	Equity
JUMLAH	1.334.958	100%	1.492.488	100%	1.585.055	100%	TOTAL

Kebijakan Struktur Modal

Perusahaan menetapkan kebijakan struktur modal sebagai berikut:

1. Struktur modal mencerminkan keseimbangan antara risiko keuangan dan tingkat pengembalian untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan cara:
   a. Memperhitungkan penggunaan utang yang proporsional untuk menjaga kemampuan pembayaran kewajiban keuangan (tingkat bunga) dan pokok pinjaman yang sejalan dengan pengendalian likuiditas Perusahaan.
   b. Mengoptimalkan rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri.
2. Struktur modal ditinjau dengan melakukan evaluasi hubungan antara *financial leverage*, nilai Perusahaan dan biaya modal.
3. Struktur modal terdiri atas kombinasi yang optimal atas utang dan modal sendiri (ekuitas) yang dapat memaksimalkan nilai Perusahaan dan memastikan pelaksanaan program pengembangan usaha.
4. Kombinasi struktur modal yang mencakup perbandingan ekuitas terhadap likuiditas ditetapkan melalui pelaksanaan analisis sensitivitas dengan berbagai variasi asumsi inti yang paling mungkin dihadapi oleh Perusahaan.

Capital Structure Policy

The Company established its capital structure policy, as follows:

1. The capital structure reflects a balance between financial risks and returns in order to increase the Company's value by:
   a. Considering proportional debt leverage to maintain ability to cover financial costs (interest and principal), in line with the Company's liquidity management.
   b. Optimizing economic rentability and owned capital rentability.
2. Capital structure is reviewed by evaluating the correlation of financial leverage, the Company's value and capital cost.
3. Capital structure consists of an optimal combination of debt and equity to maximize the Company's value and to ensure implementation of business development programs.
4. The capital structure combination including equity to liquidity ratio is determined based on sensitivity analyses with various and highly probable core assumptions.

5. Perusahaan telah memilih kebijakan struktur modal dengan menetapkan batas pemenuhan *covenant* dari para kreditur.

Dasar Pemilihan Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal

Struktur modal ini merupakan konsekuensi dari penugasan pemerintah kepada PLN untuk membangun proyek 35.000 MW yaitu dengan menggunakan liabilitas. Liabilitas terutama digunakan untuk membangun infrastruktur listrik baik pembangkitan, transmisi dan distribusi.

MODAL KERJA BERSIH

Modal kerja bersih Perusahaan pada tahun 2019 adalah negatif Rp7,93 triliun, meningkat dibandingkan modal kerja di tahun 2018 sebesar negatif Rp44,48 triliun. Kenaikan modal kerja bersih disebabkan oleh kenaikan jumlah aset lancar Perusahaan.

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Pihak Yang Melakukan Ikatan

Untuk memenuhi kebutuhan barang modal dalam rangka menyelesaikan proses pembangunan instalasi ketenagalistrikan, Perusahaan mengadakan ikatan pengadaan peralatan utama dengan para pemasok utama yang umumnya melibatkan kreditor penyandang dana.

Tujuan Ikatan

Tujuan ikatan terutama adalah untuk memastikan proses pembangunan dan pengadaan pembangkitan, transmisi dan distribusi dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Ikatan pengadaan untuk investasi barang modal dilakukan pada saat berlangsungnya pembangunan proyek, umumnya dilakukan sebelum atau sebagai bagian dari tahap *Engineering, Procurement, and Construction* (EPC).

- **Kontrak Pembangkitan**
  Sampai akhir tahun 2019, Perusahaan telah menandatangani 37 kontrak EPC meliputi 10 pembangkit tenaga listrik dengan jumlah kapasitas 7.490 MW di Jawa-Bali dan 27 pembangkit tenaga listrik dengan jumlah kapasitas 2.489 MW di luar Jawa-Bali.

5. The Company selects a capital structure policy taking into account covenant fulfillment limits set by creditors.

Basis for Selection of Management Policies for Capital Structure

This capital structure is a consequence of the government's assignment to PLN to build 35,000 MW project using liabilities. Liabilities are mainly used to build power infrastructure for power plants, transmissions and distributions.

NET WORKING CAPITAL

The Company's net working capital at end of 2019 was a negative Rp7.93 trillion, an increase compared to the net working capital at end of 2018 which amounted to a negative Rp44.48 trillion. The increase in net working capital was mainly due to the increase in the Company's current assets.

MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL EXPENDITURES

Committing Parties

To meet the needs of capital goods in order to complete the development of power installations, the Company entered into commitments to procure primary equipment with main suppliers, generally involving credit funding.

Purposes of Commitments

The purpose of capital expenditure commitments is mainly to ensure the development process and the procurement of power plants, transmissions and distributions so that electricity needs can be met in a proper and timely manner. Procurement commitments for capital expenditures are carried out during the construction of the respective installation, typically before or during Engineering, Procurement and Construction (EPC) stage.

- **Power Plant Contracts**
  At end of 2019, the Company had signed 37 EPC contracts, including 10 power plants with a total capacity of 7,490 MW in Java-Bali and 27 power plants with a total capacity of 2,489 MW outside Java-Bali.

- **Kontrak Transmisi**
  Kontrak transmisi merupakan kontrak untuk peningkatan dan pembangunan transmisi baru dan gardu induk di Jawa dan luar Jawa. Proyek ini dibiayai melalui dana sendiri dan penarikan fasilitas kredit perbankan.
- **Kontrak Konstruksi Rutin**
  Ikatan pengadaan barang modal untuk konstruksi rutin merupakan kontrak yang telah ditandatangani untuk tambahan pembangkit listrik dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi. Proyek ini dibiayai melalui dana sendiri dan pihak luar melalui pinjaman luar negeri, bantuan dan proyek investasi sebagai bagian dari anggaran belanja negara.

- **Transmission Contracts**
  Transmission contracts are contracts to improve and develop new transmission lines and substations in Java and outside Java. The projects are funded by internal financing and bank loan facilities.
- **Routine Construction Contracts**
  Routine construction contracts are signed contracts for additional power plants and development of transmission and distribution networks. The projects are funded by internal financing and external parties through foreign loans, aids and investments as part of the state budget.

Pada tahun 2019, jumlah ikatan perolehan barang modal berdasarkan kontrak terutama sehubungan dengan pengadaan pembangkit, transmisi dan jaringan distribusi adalah senilai Rp12,87 triliun dengan perincian sebagai berikut:

In 2019, commitments for capital expenditures were primarily related to procurement of power plants, transmissions and distribution networks amounting to Rp12.87 trillion, with the following details:

Tujuan Transaksi Transaction Objectives	**Mata Uang** Currencies	**Jumlah dalam Mata Uang Asing** Amount in Foreign Currency	**Setara Rupiah (dalam Rp juta)** Rupiah Equivalent (in Rp miliion)
PROGRAM PERCEPATAN | ACCELERATION PROGRAM			
Kontrak Pembangkitan | Power Plant Contracts	USD	178.574.002	2.482.358
	EUR	14.777.789	230.365
	NZD	542.100	5.074
	JPY	12.242.937	1.567
	Rupiah		7.763.115
Sub Jumlah | Sub Total			**10.482.479**
Kontrak Transmisi | Transmission Contracts			
	USD	-	-
	Rupiah		797.796
	EUR	-	-
Sub Jumlah | Sub Total			**797.796**
KONTRAK KONSTRUKSI RUTIN | ROUTINE CONSTRUCTION CONTRACTS			
	USD	55.339.743	769.278
	EUR	9.267.399	144.466
	JPY	10.594.580.916	10.594.580.916
	Rupiah		115.001
	NZD	-	-
Sub Jumlah | Sub Total			**2.384.497**
JUMLAH | TOTAL			**12.866.976**

Sumber Dana

Berdasarkan kontrak EPC tersebut, Perusahaan diharuskan membayar uang muka sekitar 15% dari nilai kontrak dan 85% akan didanai melalui fasilitas kredit perbankan. Perusahaan telah membayar uang muka sebesar USD876,22 juta dan Rp4,79 triliun untuk 35 kontrak EPC yang dicatat sebagai pekerjaan dalam pelaksanaan. Uang muka tersebut didanai dari hasil penerbitan Obligasi Terjamin dan penarikan fasilitas kredit program percepatan.

Sources of Funding

Based on EPC contract, the Company is required to pay an advance of around 15% of the contract value and 85% will use with bank loans funding. The Company has paid an advance of USD876.22 million and Rp4.79 trillion for 35 EPC contracts recorded as construction in progress. The advance was funded using proceeds from issuance of Secured Bonds and withdrawal of loan facilities for the acceleration program.

Mata Uang yang Menjadi Denominasi dan Mitigasi Risiko Mata Uang Asing

Selain mata uang Rupiah, kontrak juga dapat menggunakan mata uang asing (USD, EUR, NZD, JPY). Untuk memitigasi risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing, Sejak tahun 2015, Perusahaan telah melakukan transaksi lindung nilai terhadap beberapa eksposur ikatan dan kontinjensi dalam mata uang asingnya. Transaksi lindung nilai tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: 09/MBU/2013 tentang Kebijakan Umum Transaksi Lindung Nilai Badan Usaha Milik Negara, beserta peraturan teknis pelaksanaan terkait. Hingga berakhirnya tahun buku 2019, total kewajiban Perusahaan dalam mata uang asing yang telah dilindungi dengan fasilitas lindung nilai mencapai Rp28,95 miliar.

Denominations and Exchange Rate Risk Mitigation

In addition to Rupiah, contracts can also be denominated in foreign currencies (USD, EUR, NZD and JPY). To mitigate exchange rate risk, since 2015, the Company has hedged transactions against several bonds and contingent exposures denominated in foreign currencies. The hedging transactions are carried out in accordance with Regulation of the Minister of SOE No. 09/MBU/2013 concerning General Policy for State-Owned Enterprises' Hedging Transactions, including the related technical regulations. At end of financial year 2019, the Company's total liabilities in foreign currencies that were protected with hedging facilities amounted to Rp28.95 billion.

REALISASI INVESTASI BARANG MODAL

REALIZATION OF CAPITAL EXPENDITURES

Tujuan Investasi Barang Modal

Investasi barang modal Perusahaan sebagian besar merupakan program investasi ketenagalistrikan sebagaimana tertuang dalam RJP Perusahaan 2018-2022 untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik dan mengembangkan sarana kelistrikan di wilayah usaha Perusahaan secara lebih efisien dan lebih baik.

Tujuan investasi yang dijalankan pada tahun 2019 adalah:

1. Memenuhi kebutuhan kapasitas dan energi listrik dengan tingkat keandalan yang diinginkan secara *least-cost*.
2. Mengatasi kekurangan pasokan tenaga listrik di beberapa daerah.
3. Menurunkan harga pasokan energi primer baik gas alam dan batu bara.

Purposes of Capital Expenditures

The Company's capital expenditures are mostly for the electricity investment programs as stipulated in the Company's 2018-2022 RJP in order to meet electricity needs and to develop electricity facilities in the Company's business areas more efficiently and better.

The purposes of investments in 2019 were:

1. To meet the capacity and electricity needs with optimal reliability at the least-cost.
2. To overcome the shortage of electricity supply in some areas.
3. To reduce the prices of primary energy supplies, including natural gas and coal.

4. Memperbaiki bauran bahan bakar (*fuel-mix*) untuk menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) yang dicerminkan oleh pengurangan penggunaan bahan bakar minyak sejalan dengan target Pemerintah (target *fuel mix* tahun 2019 4,73%)
5. Meningkatkan rasio energi baru dan terbarukan seperti energi panas bumi, air dan surya.
6. Mencapai target rasio elektrifikasi.
7. Mencapai target susut jaringan.
8. Mewujudkan keandalan dan kualitas listrik.
9. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi aset.

Jenis Investasi Barang Modal

PLN terus merealisasikan pembangunan berbagai proyek pembangkit maupun sistem transmisi dan distribusi. Proyek-proyek yang telah direalisasikan pada tahun 2019 adalah:

- Penambahan kapasitas pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan realisasi penambahan kapasitas pembangkit EBT yang sudah COD/SLO mencapai 462,89 MW pada akhir tahun 2019.
- Penambahan kapasitas pembangkit non-EBT dengan realisasi penambahan kapasitas pembangkit non-EBT yang sudah COD/SLO mencapai 4.232,55 MW.

- Penambahan kapasitas transmisi (*Transmission Line*/TL) 500 kV Jawa-Bali, T/L 150 kV untuk luar Jawa-Bali) hingga akhir tahun 2019 terealisasi sepanjang 6.222,33 kms.
- Penambahan kapasitas gardu induk sebesar 17.674 MVA.
- Peningkatan sistem teknologi informasi Perusahaan dan sistem pendukung kegiatan operasional maupun adminstrasi lainnya.

Nilai Investasi Barang Modal yang Dikeluarkan Pada Tahun 2019

Jumlah investasi yang dikeluarkan pada tahun 2019 sebesar Rp104,79 triliun yang terdiri dari APLN SLA sebesar Rp48,20 triliun, utang bank sebesar Rp52,41 triliun, dan PMN sebesar Rp4,17 triliun. Rekapitulasi investasi pembangkitan, transmisi, distribusi dan pengembangan sarana pendukung lain di tahun 2019 dan perbandingannya dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

4. To improve the fuel mix to reduce Cost of Electricity Supplies (BPP) which was reflected by reduction in oil use, in line with the Government's target (2019 fuel mix target was 4.73%).

5. To increase the ratio of new and renewable energy such as geothermal, water and solar.

6. To achieve electrification ratio target.
7. To achieve network losses target.
8. To realize power reliability and quality.
9. To increase assets productivity and efficiency.

Types of Capital Expenditure

PLN continues to realize development of various power plants and transmission and distribution systems. The realized projects 2019 were:

- Increasing the capacity of new and renewable energy (EBT) power plants with realization of additional capacity of EBT power plants that had obtained COD/SLO reaching 462.89 MW at end of 2019.
- Increasing the capacity of non new and renewable energy (non-EBT) power plants with realization of additional capacity of non-EBT power plants that had obtained COD/SLO was 4,232.55 MW.
- Increasing the capacity of transmission line (T/L) 500 kV for Java-Bali, T/L 150 kV for outside Java-Bali with realization at end of 2019 reaching 6,222.33 kms.
- Increasing the capacity of substation by 17,674 MVA.
- Enhancing the Company's information technology system and supporting systems for operations and other administrative activities.

Investment Value of Capital Expenditure in 2019

Total investments in 2019 amounted to Rp104.79 trillion consisting of PLN Budget of Rp48.20 trillion, bank loans of Rp52.41 trillion and PMN of Rp4.17 trillion. Recapitulation of investments in power plants, transmissions, distributions and development of other supporting facilities in 2019 and the comparison with 2018 are as follows:

Investasi Barang Modal Per Fungsi	Nilai Investasi (Rp miliar) Investment Value (Rp billion)		Perubahan Change	Capital Expenditure by Function
	2019	2018		
Pembangkitan PLTA	2.949,2	2.494	18,3%	Hydro Power Plant
Pembangkitan PLTU	15.375,4	16.661,6	-7,7%	Coal-Fired Power Plant
Pembangkitan PLTD	3.469,7	3.282	5,7%	Diesel Power Plant
Pembangkitan PLTG	3.805,0	7.114,1	-46,5%	Gas Turbine Power Plant
Pembangkitan PLTP	298,0	245,9	21,2%	Geothermal Power Plant
Pembangkitan PLTGU	10.781,4	12.660,6	-14,8%	Combined Cycle Power Plant
Pembangkitan PLTS	103,4	150,8	-31,4%	Solar Power Plant
Sistem Transmisi	38.967,3	44.055,8	-11,6%	Transmission System
Sistem Tele-Informasi Data	1.361,4	1.345,3	1,2%	Data Teleinformation System
Sistem Distribusi	26.696,0	24.893,1	7,2%	Distribution System
Sistem Penunjang	979,0	2.860,5	-65,8%	Supporting System
JUMLAH	104.785,8	115.763,7	-9,5%	TOTAL

REALISASI DIBANDINGKAN TARGET

PLN menyusun rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) sebagai acuan kegiatan usaha pada setiap tahun buku. RKAP tahun 2019 telah di dipresentasikan di hadapan para pemegang saham, dibahas dan disahkan melalui RUPS. Berikut adalah ringkasan capaian kinerja keuangan dan operasional pada tahun 2019 dibandingkan dengan target RKAP 2019.

COMPARISON OF REALIZATION AND TARGET

PLN prepares Corporate Work and Budget Plan (RKAP) as guidance for business activities in the next financial year. 2019 RKAP was presented to, discussed and ratified by Shareholders in GMS. The following is a summary of 2019 financial and operational performances in comparison with 2019 RKAP targets.

Keterangan	Satuan Unit	Target 2019	Realisasi Realization 2019	Pencapaian Ahievement	Description
Pendapatan usaha	Rp miliar|billion	293.425	285.641	97,3%	Revenues
Biaya usaha	Rp miliar|billion	346.333	315.441	91,1%	Operating expenses
Laba (rugi) usaha	Rp miliar|billion	-52.908	-29.800	56,3%	Operating income (loss)
Subsidi listrik Pemerintah	Rp miliar|billion	66.092	51.712	78,2%	Government's electricity subsidy
Pendapatan kompensasi	Rp miliar|billion	-	22.254	-	Compensation income
Laba setelah subsidi	Rp miliar|billion	13.184	44.165	335,0%	Operating income after subsidy
Laba bersih	Rp miliar|billion	8.020	4.322	53,9%	Net income after tax
Penjualan tenaga listrik	TWh	251.1	245.5	97,8%	Electricity sales
Penambahan pelanggan	juta pelanggan million customer	3.84	3.8	98,7%	Additional customer
Biaya Pokok Penyediaan (BPP)	Rp/kWh	1.480	1.385,07	93,6%	Cost of supply
Penambahan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT)	MW	284	462,89	163,0%	Increase capacity of New Renewable Energy (NER) power plant
Penambahan kapasitas pembangkit non-EBT	MW	2.058	4.232,55	205,7%	Increase capacity of Non-NRE power plant

Keterangan	Satuan Unit	Target 2019	Realisasi Realization 2019	Pencapaian Ahievement	Description
Penambahan kapasitas transmisi	kms	3.287	6.222,33	189,3%	Increase capacity of transmission line
Penambahan kapasitas gardu induk	MVA	10.752	17.674	164,4%	Increase capacity of substation
Susut jaringan	%	9,36	9,32	100,0%	Network losses
SAIDI (konsolidasi)	menit/pelanggan minutes/customer	993	1.136,72	114,5%	SAIDI consolidated
SAIFI (konsolidasi)	kali/pelanggan times/customer	10,96	11,51	105,0%	SAIFI consolidated
Rasio elektrifikasi PLN	%	98,57	95,75	97,1%	Electrification Ratio of PLN

TARGET-TARGET KUANTITATIF PADA TAHUN MENDATANG

PLN telah menyusun serangkaian target kuantitatif yang dituangkan dalam RKAP tahun 2020. Target-target operasional dan keuangan tahun 2020 ditetapkan dengan menggunakan asumsi makroekonomi antara lain sebagai berikut:

QUANTITATIVE TARGETS FOR THE COMING YEAR

PLN has developed a series of quantitative targets set forth in 2020 RKAP. The operational and financial targets for 2020 are set using macroeconomic assumptions, as follows:

No.	Parameter Makroekonomi Macroeconomic Parameters	Asumsi Assumption
1	JIBOR (Jakarta Inter Bank Offered Rate) 3 bulan | month	7,4%
2	JIBOR (Jakarta Inter Bank Offered Rate) 6 bulan | month	7,8%
3	LIBOR (London Inter Bank Offered Rate) 3 bulan | month	2,2%
	Pertumbuhan ekonomi | Economic growth	5,3%
4	Inflasi | Inflation rate	3,1%
5	Kurs rata-rata | Average exchange rate	Rp14.400/USD
6	Marjin usaha | Operation margin	7%
7	Harga batu bara rata-rata | Averate coal price	Rp815/kg
8	Harga gas rata-rata | Average gas price	USD9,16/MMBTU
9	ICP (Indonesia Crude Price)	USD63,0/bbl

Beberapa target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2020 dan proyeksi pertumbuhannya antara lain adalah:

Some of targets expected to be achieved in 2020 and projected growth include:

Keterangan	Satuan Unit	Realisasi Realization 2019	Target 2020	Pertumbuhan Growth	Description
Pendapatan usaha	Rp miliar|billion	285.641	301.063	105,4%	Revenues
Biaya usaha	Rp miliar|billion	315.441	348.560	110,5%	Operating expenses
Laba (Rugi) usaha	Rp miliar|billion	-29.800	-47.497	159,4%	Operating income (loss)
Subsidi listrik Pemerintah	Rp miliar|billion	51.712	56.034	108,4%	Government's electricity subsidy

Keterangan	Satuan Unit	Realisasi Realization 2019	Target 2020	Pertumbuhan Growth	Description
Pendapatan kompensasi	Rp miliar | billion	22.254	34,094	153,2%	
Laba setelah subsidi	Rp miliar | billion	44.165	42,631	96,5%	Operating income after subsidy
Laba bersih	Rp miliar | billion	4.322	7,640	176,8%	Net income after tax
Penjualan tenaga listrik	TWh	245,5	256,7	104,6%	Electricity sales
Penambahan pelanggan	juta pelanggan	3,79	3,94	104,0%	Customer growth
Biaya Pokok Penyediaan (BPP)	Rp/kWh	1.385	1.465	105,8%	Cost of supply
Penambahan kapasitas pembangkit	MW	4.695,44	4.638	98,8%	Increase capacity of power plant
Penambahan kapasitas transmisi	kms	6.222,33	5.068	81,4%	Increase capacity of transmission line
Penambahan kapasitas gardu induk	MVA	12.507	7.742	61,9%	Increase capacity of substation
Susut jaringan	%	9,32	9,15	97,8%	Network losses
SAIDI (konsolidasi)	menit/pelanggan	1.136,72	926	81,5%	SAIDI consolidated
SAIFI (konsolidasi)	kali/pelanggan	11,51	10,14	88,1%	SAIFI consolidated
Rasio elektrifikasi PLN	%	95,75	99,9	104,3%	Electrification Ratio of PLN

PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No. SK-22/MBU/01/2020 tanggal 16 Januari 2020, Murtaqi Syamsuddin diangkat sebagai Komisaris Independen dan Dudy Purwagandhi diangkat sebagai komisaris.

Pada tanggal 18 Februari 2020, Kementerian ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan keempat atas Peraturan Menteri ESDM No.28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero).

Pada tanggal 18 Februari 2020 Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2020 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

Based on the Decision Letter of the Minister of BUMN of the Republic of Indonesia No. SK- 22/MBU/01/2020 dated January 16, 2020, Murtaqi Syamsuddin was appointed as Independent Commissioner and Dudy Purwagandhi was appointed as Commissioner.

On February 18, 2020, the Ministry of ESDM issued Regulation of the Minister of ESDM No. 3 Year 2020 regarding the fourth amendment to Regulation of the Minister of ESDM No.28 Year 2016 regarding electricity tariff provided by PT PLN (Persero).

On February 18, 2020, the Company issued Shelf Regristration Bonds III Phase VI Year 2020 and Shelf Registration Sukuk Ijara III Phase VI Year 2020 with details as follows:

Keterangan	**Pokok** Principal	**Tanggal jatuh tempo** Maturity date	**Tingkat kupon imbalan ijara per tahun** Coupon rate ijara fee per annum *)	Description
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020				**Shelf Registration Bonds III PLN VI Year 2020**
Seri A	540.630	18 February/February 18, 2025	7,20%	Series A
Seri B	672.500	18 February/February 18, 2027	7,70%	Series B
Seri C	544.250	18 February/February 18, 2030	8,00%	Series C
Seri D	1.459.000	18 February/February 18, 2035	8,70%	Series D
Seri E	1.596.050	18 February/February 18, 2040	9,05%	Series E
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020				**Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN VI Year 2020**
Seri A	40.500	18 February/February 18, 2027	Rp3.119	Series A
Seri B	3.500	18 February/February 18, 2030	Rp280	Series B
Seri C	9.000	18 February/February 18, 2035	Rp783	Series C
Seri D	62.500	18 February/February 18, 2040	Rp5.656	Series D
Jumlah	**4.927.930**			**Total**

*) Imbalan ijarah per tahun disajikan dalam Rupiah penuh Ijara fee per annum are presented in Rupiah full amount

Pada tanggal 5 Maret 2020, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari MUFG Bank berjangka *offshore* sebesar JPY18.700.000.000 dan *onshore* sebesar JPY14.300.000.000 yang akan berakhir pada tanggal 5 Maret 2025. Selanjutnya, pada tanggal 13 Maret 2020, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari Mizuho Bank untuk membiayai pembangunan PLTMG Riau Peaker sebesar EUR84.597.923,78 dan akan berakhir pada tanggal 13 Maret 2032. Kedua pinjaman tersebut dikenakan tingkat bunga antara 0.98% s.d. LIBOR + 0.7% per tahun.

On March 5, 2020, the Company obtained credit facilities from MUFG offshore amounting to JPY18,700,000,000 and onshore amounting to JPY14,300,000,000, respectively and will mature on March 5, 2025. Moreover, on March 13, 2020, the Company obtained a credit facility from Mizuho Bank to fund the construction of PLTMG Riau Peaker amounting to EUR84,597,923.78 and will mature on March 13, 2032. Both of the loans bear interest rate in the range of 0.98% to LIBOR + 0.07% per annum.

Pada tanggai 11 Maret 2020 Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan penyebaran virus corona (COVID-19) sebagai pandemi global, sekaligus merekomendasikan tindakan pencegahan dan mitigasinya pada sebagian besar negara-negara, termasuk Indonesia.

On March 11, 2019, the World Health Organisation has made an announcement regarding the spread of corona virus (COVID-19) as a global pandemic, simultaneously recommending preventive actions and mitigation for some of the large countries, including Indonesia.

Pandemi Covid-19 menyebabkan sebagian besar aktivitas ekonomi terganggu seperti sektor industri, sektor pariwisata, perhotelan, perdagangan, transportasi tidak terkecuali sektor usaha kecil dan menengah. Kondisi ini berdampak terhadap penurunan kebutuhan konsumsi listrik *(demand)* dan pertumbuhan penjualan tenaga listrik. Manajemen melakukan beberapa bentuk mitigasi risiko atas kondisi

The Covid-19 pandemic has caused disruptions to most of economic activities, for instance industrial sector, tourism sector, hospitality, trading sector, transportation and without exception to small and medium enterprises. This condition has an impact in declining demands of electricity consumption. The management has done several risk mitigations regarding this condition by stopping inefficient power

tersebut dengan menghentikan kegiatan operasional pembangkit tenaga listrik yang tidak efisien serta penghematan biaya penyediaan tenaga listrik.

plants' operational activities and cost savings of electricity supplies.

Kondisi ekonomi makro juga bergerak dengan volatilitas yang sangat tinggi yang melemahkan asumsi-asumsi yang telah dibangun Perusahaan pada akhir tahun 2019 dalam perencanaan korporasi seperti inflasi, *Indonesian Crued Price*, kurs, tingkat suku bunga acuan, Harga Batu bara Acuan dan lain-lain yang akan berpengaruh pada hasil operasi Perusahaan, yaitu peningkatan biaya operasi, penurunan pertumbuhan penjualan, dan penerimaan dari pelanggan. Selain itu kondisi tersebut juga berpotensi meningkatan nilai utang dan mengganggu perolehan sumber pendanaan yang dibutuhkan Perusahaan dari pihak eksternal.

The macro economics condition has also shifted in such rapid volatility in which has weaken the preceding assumptions that has been set forth by the Company at the end of the year 2019 in the corporate planning, such as inflation, Indonesian Crued Price, exchange rate, reference interest rate, Coal Reference Price, and others in which will affect the Company's operation outcome such as an increase in operating cost, a decrease in sale growth and customer receipts. Moreover, this condition also potentially increases the amount of payables and interferes disrupts obtaining source of funds needed by the Company from external parties.

Perusahaan menyadari bahwa pelemahan nilai rupiah terhadap mata uang asing dan faktor inflasi akan mengakibatkan peningkatan biaya operasional Perusahaan, akan tetapi manajemen telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi risiko tersebut. Selain itu sesuai dengan UU No. 19 tahun 2003 dan konsep *cost plus margin*, Pemerintah akan mengganti biaya dimaksud melalui subsidi dan pendapatan kompensasi. Sebagai bagian dari *prudent risk management*, Perusahaan memitigasi risiko nilai tukar atas liabilitas mata uang asing dari liabilitas pembayaran pokok dan bunga pinjaman, tagihan IPP dan tagihan energi primer dengan melakukan lindung nilai (*hedging*) dengan berpedoman pada peraturan Bank Indonesia No. 16/21/PBI/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank dimana manajemen konsisten melakukan lindung nilai (*hedging*) minimum 25% x *net* eksposur *valas* (selisih aset *valas* – liabilitas *valas*) dan rasio likuiditas minimum (aset *valas*/liabilitas *valas*) > 70%.

The Company realizes that the weakening of rupiah rate towards foreign exchange rate and inflation factors will result in an increase of Company's operational cost, however they Management has taken several strategies to anticipate those risks. Moreover, in compliance to UU No. 19 year 2003 and cost plus margin concept, the government will replace such costs through subsidy and compensation income. As part of the prudent risk management, the Company mitigates the exchange rate risks on foreign exchange obligations over outstanding payment obligations and interest, invoices from IPPs and invoices from primary energies by hedging in accordance to Bank Indonesia regulation No. 16/21/PBI/2014 dated December 29, 2014 regarding Application of Prudential Principles in Managing Foreign Debt of Nonbank Corporations where Management consistently performs minimum hedging of 25% x foreign exchange rate net exposure (difference foreign exchange assets – foreign exchange liability) and minimum liquidity ratio of (foreign exchange assets/foreign exchange liability) > 70%.

Pemerintah melalui Presiden Republik Indonesia dan ditindaklanjuti dengan Surat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan No. 707/26/DJL.3/2020 tanggal 31 Maret 2020, memberikan kebijakan bahwa golongan pelanggan dengan daya 450 VA sebanyak 24 juta pelanggan

The Government through President of Republic of Indonesia and followed by a letter from the General Director of Electricity No.707/26/DJL.3/2020 dated March 31, 2020 provides policies in which group of customers with electricity power of 450 VA amounting to 24

dibebaskan tagihan listriknya selama 3 bulan (April - Juni 2020) dan golongan pelanggan dengan daya 900 VA sebanyak 7 juta pelanggan diberikan diskon 50%, yang selanjutnya piutang dari kedua golongan pelanggan ini akan dibayar Pemerintah kepada Perusahaan. Kebijakan Pemerintah untuk menanggung tagihan listrik pelanggan merupakan program jaring pengaman sosial untuk membantu ekonomi masyarakat yang terkena dampak COVID-19.

million customers are freed from their electricity bills for 3 months (April - June 2020) and group of customers with electricity power of 900 VA amounting to 7 million customers are given 50% discount in which the receivables occurs from both of the group of customers will be paid off by the Government to the Company. The Government regulation to bear the customers' electricity bills is part of social safety net program in order to help the economy of the community affected by COVID-19.

Perusahaan dan entitas anak belum dapat secara akurat memprediksi dan mengkuantifikasi seberapa lama atau sejauh mana wabah COVID-19 tersebut berdampak terhadap hasil operasi, posisi keuangan, dan arus kas Perusahaan dan entitas anak. Manajemen optimis bahwa dengan dukungan pemerintah dan stakeholder lainnya, serta langkah-langkah strategis internal maka operasional Perusahaan dan entitas anak akan terus berjalan dan kondisi keuangan tetap terkendali.

The Company and subsidiaries are yet to accurately predict and quantify how long or how far the COVID-19 pandemic will affect the operating results, financial position, and cash flows of the Company and subsidiaries. The Management is optimist that with the help of the government and other stakeholders, followed by internal strategic steps, the operations of the Company and subsidiaries will carry on and the financial conditions remain manageable.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 tahun 2020 ("Peraturan") telah diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2020.

Government Regulation in Lieu of Law No. 1 Year 2020 ("the Regulation") has been issued on 31 March 2020.

Peraturan ini mengatur mengenai kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan/ atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/ atau stabilitas sistem Keuangan. Peraturan ini salah satunya mengatur penyesuaian tarif PPh Badan dalam negeri menjadi sebesar 22% pada tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021, dan 20% pada tahun 2022.

The Regulation is concerning the state financial policy and financial system stability in response to the COVID-19 pandemic and/or the threats that endanger the national economy and/or financial system stability. The Regulation, among others, regulates the adjustment of domestic Corporate Income Tax rate to become 22% in the fiscal years of 2020 and 2021 and 20% in 2022 fiscal year.

Peraturan tersebut tidak berdampak kepada pengukuran aset dan kewajiban pajak kini maupun tangguhan, termasuk beban terkait, yang dilaporkan pada laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2019 dan baru berdampak pada pelaporan keuangan setelah tahun 2019. Jika Perusahaan dan entitas anak menggunakan tarif pajak 22% untuk tahun 2019, aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan yang dilaporkan oleh Perusahaan

The Regulation does no affect the measurement of the current and deferred tax assets and liabilities, including its related expenses, whick were reported in the consolidated financial statements of December 31, 2019 and would only impact the financial reporting after 2019. Had the Company and subsidiaries used the 22% tax rate in 2019, the deferred tax assets

dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2019 akan turun masing-masing sebesar Rp66.479 juta dan Rp843.646 juta.

and liabilities reported by the Company and subsidiaries as at December 31, 2019 would have decreased amounting to Rp66,479 million and Rp843,646 million, respectively.

Pada tanggal 6 Mei 2020, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap VII tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

On 6 May 2020, the Company issued Shelf Regristration Bonds III Phase VII year 2020 with details as follows:

Keterangan	**Pokok** Principal	**Tanggal jatuh tempo** Maturity date	**Tingkat kupon imbalan ijara per tahun** Coupon rate ijara fee per annum *)	Description
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VII Tahun 2020				**Shelf Registration Bonds III PLN VII Year 2020**
Seri A	316,700	6 Mei/May 6, 2023	7.92%	Series A
Seri B	99,155	6 Mei/May 6, 2025	8.25%	Series B
Seri C	312,180	6 Mei/May 6, 2027	8.55%	Series C
Seri D	1,009,100	6 Mei/May 6, 2030	9.10%	Series D

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Republik Indonesia No.SK-147/MBU/05/2020 tanggal 14 Mei 2020:

- Memberhentikan dengan hormat anggota-anggota Dewan Direksi:
  - Sripeni Inten Cahya sebagai Direktur Pengadaan Strategis 1;
  - Djoko Rahardjo Abu Manan sebagai Direktur Pengadaan Strategis 2;
  - Muhamad Ali sebagai Direktur Human Capital Management;
  - Ahmad Rofiq sebagai Direktur Bisnis Regional Maluku, Papua dan Nusa Tenggara.
- Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Dewan Direksi Perusahaan menjadi sebagai berikut:
  - Direktur Pengadaan Strategis 1 menjadi Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan;
  - Direktur Pengadaan Strategis 2 menjadi Direktur Energi Primer;
  - Direktur *Human Capital Management* menjadi Direktur *Human Capital* dan *Management;*
  - Direktur Bisnis Regional Sumatera menjadi Direktur Bisnis Regional Sumatera Kalimantan;

Based on the Decision of the Minister of BUMN of the Republic of Indonesia No.SK-147/MBU/05/2020 dated May 14, 2020:

- Honorably discharged members of the Board of Directors:
  - Sripeni Inten Cahya as Director of Strategic Procurement 1;
  - Djoko Rahardjo Abu Manan as Director of Strategic Procurement 2;
  - Muhamad Ali as Director of Human Capital Management;
  - Ahmad Rofiq as Director of Regional Business of Maluku, Papua and Nusa Tenggara.
- Changed the nomenclature position of the members of the Company's Board of Directors as follows:
  - Director of Strategic Procurement 1 became Director of Commerce and Customer Management;
  - Director of Strategic Procurement 2 became Director of Primary Energy;
  - Director of Human Capital Management became Director of Human Capital and Management;
  - Director of Regional Business of Sumatera became Director of Regional Business of Sumatera Kalimantan;

- Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Kalimantan menjadi Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara;
- Direktur Bisnis Regional Maluku, Papua dan Nusa Tenggara menjadi Direktur Mega Project.

• Mengalihkan penugasan anggota-anggota Dewan Direksi:
  - Syofvi Felienty Roekman semula Direktur Perencanaan Korporat menjadi Direktur *Human Capital* dan *Management*;
  - Wiluyo Kusdwiharto semula Direktur Bisnis Regional Sumatera menjadi Direktur Bisnis Regional Sumatera Kalimantan;
  - Syamsul Huda semula Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Kalimantan menjadi Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara.

• Mengangkat anggota-anggota Dewan Direksi:
  - Muhammad Ikbal Nur sebagai Direktur Perencanaan Korporat;
  - Bob Sahril sebagai Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan;
  - Rudy Hendra Prastowo sebagai Direktur Energy Primer;
  - M. Ikhsan Asaad sebagai Direktur Mega Project.

PROSPEK USAHA

Pada bulan Oktober 2019, Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan bahwa perekonomian global telah mengalami perlambatan secara sinkron. Penyebab utamanya adalah perdagangan global yang terganggu, dan mata rantai produksi yang telah tercerai-berai. Di akhir tahun 2019, hubungan AS-Tiongkok kembali memanas sehingga menghambat negosiasi AS-Tiongkok guna mencapai kesepakatan pertama terkait perang dagang kedua negara. Sebelumnya, AS memberi sinyal kemungkinan kesepakatan dengan Tiongkok akan menunggu hingga November 2020. Kenyataannya, dunia masih harus menunggu lebih lama lagi untuk menyaksikan penyelesaian perang dagang AS dan Tiongkok.

- Director of Regional Business of Sulawesi and Kalimantan became Director of Regional Business of Sulawesi, Maluku, Papua and Nusa Tenggara;
- Director of Regional Business of Maluku, Papua and Nusa Tenggara became Director of Mega Project.

• Transfer the assignments of the members of the Board of Directors:
  - Syofvi Felienty Roekman that was previously Director of Corporate Planning to become Director of Human Capital and Management;
  - Wiluyo Kusdwiharto that was previously Director of Regional Business of Sumatera to become Director of Regional Business of Sumatera Kalimantan;
  - Syamsul Huda that was previously Director of Regional Business of Sulawesi and Kalimantan to become Director of Regional Business of Sulawesi, Maluku, Papua and Nusa Tenggara.
• Appoint members of the Board of Directors:
  - Muhammad Ikbal Nur as Director of Corporate Planning;
  - Bob Sahril as Director of Commerce and Customer Management;
  - Rudy Hendra Prastowo as Director of Primary Energy;
  - M. Ikhsan Asaad as Director of Mega Project.

BUSINESS PROSPECTS

In October 2019, International Monetary Fund (IMF) mentioned that the global economy had experienced a synchronous slowdown. The main drivers were the disrupted global trade and the scattered production chains. At end of 2019, US-China relations heated up again, hampering US-China negotiations to reach their first agreement on the trade war between the two countries. Previously, the US signaled the possibility that an agreement with China would wait until November 2020. In fact, the world still had to wait even longer to witness the end of the US and China trade wars.

Indonesia masih mempunyai peluang pertumbuhan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peran Indonesia yang vital di kawasan Asia Tenggara menjadi modal besar untuk memperluas akses pasar memanfaatkan banyaknya relokasi dan diversifikasi investasi akibat ketidakpastian dalam perdagangan global. Negara yang mempunyai iklim investasi paling menarik akan menjadi tujuan utama relokasi dan diversifikasi itu.

Indonesia still has growth opportunities amid the global economic uncertainty. Indonesia's vital role in the Southeast Asian region is key in market access expansion to take advantage of investments relocation and diversification due to uncertainty in the global trade. The country that has the most attractive investment climate will be the main destination of relocation and diversification.

Untuk menjadi tujuan investasi, Indonesia harus melakukan deregulasi berkesinambungan untuk mendukung kemudahan berusaha dan mengakselerasi pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk meningkatkan daya tarik investasi dan mendukung pelaku usaha menjalankan kegiatan ekonomi. Pemerintah sudah berkomitmen untuk memperbaiki kondisi internal agar iklim investasi dalam negeri semakin menarik. Pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur juga telah menjadi prioritas pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.

To be an investment destination, Indonesia must carry out continuous deregulation to support the ease of doing business and to accelerate the development of quality infrastructure so as to increase investment attractiveness and to support business players in conducting economic activities. The government is committed to improving the internal conditions so that the domestic investment climate becomes more attractive. Development of human capital and infrastructure has also been a priority of the government in recent years.

Dengan laju pembangunan infrastruktur yang masif, pertumbuhan ekonomi serta kestabilan sosial-politik selama beberapa tahun terakhir, maka kebutuhan tenaga listrik Indonesia akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Di dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028, PLN memproyeksikan pertumbuhan kebutuhan listrik nasional sebesar 6,42% per tahun. Dasar penentuan meliputi data historis penjualan per segmen pelanggan hingga tahun 2017 dan estimasi penjualan 2018, serta asumsi pertumbuhan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi 10 tahun mendatang. Berdasarkan asumsi tersebut, pada tahun 2028 kebutuhan listrik nasional akan mencapai 432.713 GWh dengan proyeksi jumlah pelanggan mencapai 88,1 juta pelanggan.

With the rapid pace of infrastructure development, economic growth and socio-political stability over the past few years, Indonesia's electricity demand will continue to increase in the coming years. In PT PLN (Persero)'s 2019-2028 Electricity Supply Business Plan (RUPTL), PLN projected a national electricity demand growth of 6.42% per year. The basis for this projection includes historical data of sales by customer segment until 2017 and estimated sales for 2018, as well as assumptions of population growth, economic growth and inflation rates in the next 10 years. Based on these assumptions, in 2028, the national electricity demand will reach 432,713 GWh with a projected number of customers reaching 88.1 million.

Proyeksi kebutuhan tenaga listrik nasional untuk periode 20 tahun ke depan (2019-2038) diperkirakan sebagai berikut:

1. Rata-rata pertumbuhan kebutuhan energi listrik sekitar 6,9% per tahun;
2. Komposisi kebutuhan tenaga listrik nasional tahun 2019-2035 diperkirakan akan didominasi oleh sektor industri, diikuti oleh sektor rumah

Projected national electricity demand for the next 20 years (2019-2038) is estimated as follows:

1. Average growth in electricity demand is around 6.9% per year;
2. Composition of the national electricity demand in 2019-2035 is expected to be dominated by the industrial sector, followed

tangga, bisnis, publik, dan transportasi. Mulai tahun 2036 kebutuhan tenaga listrik sektor transportasi diperkirakan akan lebih besar daripada sektor publik;

3. Rata-rata kebutuhan tambahan kapasitas pembangkit sekitar 8,5 GW per tahun;
4. Total kebutuhan tambahan kapasitas pembangkit sekitar 170 GW yang terdiri dari PLTU/MT 51 GW, PLTP 9 GW, PLTA/M & PS 34 GW, PLTG/GU/MG 65 GW, Battery 0,3 GW, PLTD 0,1 GW, dan PLT EBT lainnya 10 GW. PLT EBT Lainnya terdiri atas Variable Renewable Energy (VRE) sekitar 6 GW dan PLT Bio sekitar 4 GW.

Dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) Tahun 2019-2038 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 143K/20/MEM/2019 tanggal 1 Agustus 2019, pemerintah telah menetapkan target bauran energi pada tahun 2025 di mana komposisi batu bara sekitar 55%, energi baru dan terbarukan (EBT) minimal 23%, gas sekitar 22%, dan bahan bakar minyak (BBM) sekitar 0,4%. Sedangkan pada tahun 2038, komposisi bauran energi menjadi: batu bara sekitar 47%, EBT minimal 28%, gas sekitar 25%, dan BBM sekitar 0,1%.

Target EBT sebesar 23% pada tahun 2035 cukup rasional mengingat potensi EBT di Indonesia seperti panas bumi, air, bioenergi, sinar matahari (surya) dan angin (bayu) sangat melimpah. Secara total, potensi EBT Indonesia mencapai 443,2 GW, sedangkan yang telah termanfaatkan saat ini baru sekitar 2% atau sebesar 8,8 GW. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi PLN untuk mengembangkan pembangkit listrik dari sumber energi bersih, murah, dan ramah lingkungan.

ASPEK PEMASARAN

Strategi Pemasaran

Aspek pemasaran produk PLN ditangani oleh Departemen Bisnis dan Pelayanan Pelanggan. Sebagai acuan dalam merancang dan mengembangkan produk layanan, Departemen Bisnis dan Pelayanan telah menyusun dokumen Rencana Strategi dan Riset Pengembangan Produk Inovatif 2019-2021.

by the household, business, public and transportation sectors. Starting in 2036, the electricity demand of the transportation sector is expected to be greater than the public sector;

3. Average additional capacity requirement is around 8.5 GW per year;
4. Total need for additional capacity of power plants is around 170 GW consisting of PLTU/MT 51 GW, PLTP 9 GW, PLTA/M & PS 34 GW, PLTG/GU/MG 65 GW, Battery 0.3 GW, PLTD 0.1 GW and other EBT PLT 10 GW. Other EBT PLT consists of Variable Renewable Energy (VRE) around 6 GW and Bio PLT around 4 GW.

In 2019-2038 General Plan for National Electricity (RUKN) stipulated in Decision of the Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) No. 143K/20/MEM/2019 dated August 1, 2019, the government has set an energy mix target by 2025 in which the composition of coal around 55%, new and renewable energy (EBT) at least 23%, gas around 22% and oil (BBM) around 0.4%. Whereas in 2038, the composition of the energy mix will be: coal around 47%, EBT at least 28%, gas around 25%, and oil around 0.1%.

EBT target of 23% by 2035 is quite rational considering the potential of EBT in Indonesia such as geothermal, water, bioenergy, solar and wind is abundant. In total, the potential of Indonesia's EBT reaches 443.2 GW, while the current utilization is only around 2% or 8.8 GW. This is an opportunity as well as a challenge for PLN to develop power plants fueled by clean, inexpensive and environmentally friendly energy sources.

MARKETING

Marketing Strategy

The marketing aspects of PLN's products are handled by the Department of Business and Customer Service. As a reference in designing and developing service products, the Department of Business and Services compiled 2019-2021 Innovative Product Development Strategy and Research Plan.

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam RUPTL, Rencana Jangka Panjang (RJP) Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), salah satu tujuan utama PLN adalah semaksimal mungkin memberikan manfaat bagi seluruh pelanggan dengan memastikan pertumbuhan Perusahaan secara berkelanjutan. Di dalam menjalankan usaha, kinerja penjualan produk PLN sangat dipengaruhi oleh parameter-parameter seperti; perkembangan kondisi makro kelistrikan, perilaku dan kebutuhan listrik konsumen, disrupsi teknologi, serta kebijakan pemerintah.

As stipulated in RUPTL, Corporate Long Term Plan (RJP) and Corporate Work Plan and Budget (RKAP), one of PLN's main objectives is to provide maximum benefits to all customers by ensuring the Company's sustainable growth. In running the business, sales performance of PLN's products is strongly influenced by several parameters, such as: macro electricity trend, electricity consumer behavior and needs, technological disruption and government policies.

Oleh karena itu, Perusahaan merancang dan mengimplementasikan berbagai strategi inovatif dalam pemasaran produk layanan dan model bisnis untuk menjawab tantangan PLN ke depan dan mencapai sasaran sebagaimana sudah digariskan dalam RUPTL dan RJP. Setiap produk layanan/model bisnis yang ditawarkan kepada masing-masing segmen pelanggan memiliki karakter yang spesifik untuk menjawab tantangan dan harapan yang ada. Mulai dari kebutuhan peningkatan penjualan, pendapatan, penguatan nilai *brand, customer loyalty* dan sebagainya. Terdapat juga produk yang sifatnya nonprofit seperti riset, pengembangan *marketing tools*, maupun produk untuk peningkatan rasio elektrifikasi.

Therefore, the Company designs and implements various innovative strategies in marketing its service products and business models to respond to the challenges going forward and to achieve the targets outlined in RUPTL and RJP. Each service product/business model offered to each customer segment has a specific character to meet their challenges and expectations, which include the need to increase sales, revenues, brand value, customer loyalty and so forth. There are also non-profit products, such as research, marketing tools development and products to increase electrification ratio.

Inovasi Produk Layanan yang Diluncurkan Pada Tahun 2019

Service Product Innovations Launched in 2019

Layanan Khusus Energi Terbarukan

Dewasa ini, popularitas, peran dan nilai energi terbarukan (*renewable energy*) di kancah kelistrikan Indonesia semakin meningkat. Di dalam RUKN 2019-2038, pemerintah telah menetapkan target pemakaian energi terbarukan hingga 23% dari bauran energi. PLN sendiri telah menargetkan untuk menambah tidak kurang dari 15.000 MW kapasitas pembangkit energi terbarukan dari sekitar 7.000 MW yang sudah beroperasi saat ini.

Renewable Energy Special Services

Today, the popularity, role and value of renewable energy in Indonesian electricity field are increasing. In 2019-2038 RUKN, the government has set a target of renewable energy use of up to 23% of the energy mix. PLN has targeted itself to add no less than 15,000 MW of renewable energy power plant capacity from around 7,000 MW that are currently operating.

Beberapa perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia saat ini bergabung di dalam komunitas Klub RE-100 (Renewable Energy 100%) yang beranggotakan lebih dari 140 perusahaan. RE-100 merupakan komunitas yang memilih penggunaan energi terbarukan sebagai bagian dari proses produksinya. Hal ini

Several multinational companies operating in Indonesia are now joining Club RE-100 (Renewable Energy 100%) community which consists of more than 140 companies. RE-100 is a community that chooses the use of renewable energy as part of its production process. This has become a new market opportunity that has been

menjadi peluang pasar baru yang telah direspons oleh PLN dengan menciptakan layanan khusus berupa komitmen mengalokasikan kapasitas tersedia dari pembangkit energi terbarukan untuk komunitas RE-100.

responded by PLN by creating a special service in the form of a commitment to allocate available capacity of its renewable energy power plants to RE-100 community.

Kapasitas Pembangkit *Renewable Energy*
Capacity of Renewable Energy Power Plant

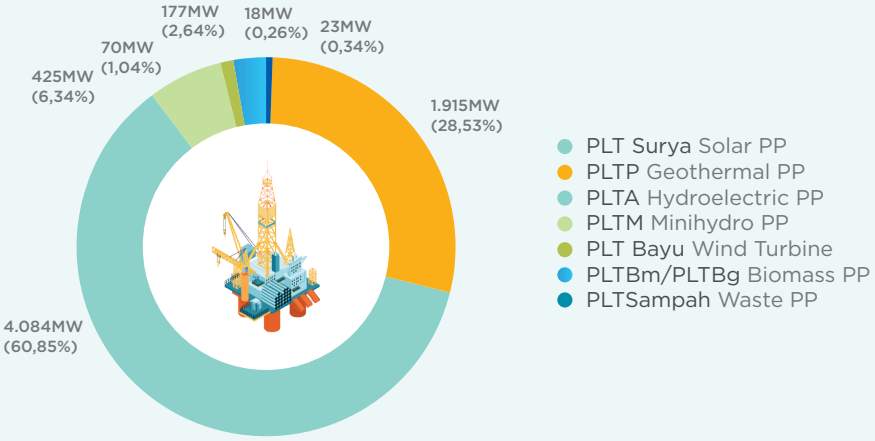

Layanan PLTS Atap

Produk layanan PLTS Atap merupakan strategi PLN untuk menangkap peluang dan memanfaatkan tantangan teknologi disruptif sekaligus merespons hadirnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap oleh Konsumen PT PLN (Persero). Produk layanan PLTS Atap sebelumnya telah ada dan dikelola secara langsung oleh PLN. Dengan terbitnya Permen ESDM tersebut, PLN menyesuaikan ketentuan-ketentuan pada produk ini dengan tetap memperhatikan aspek bisnis dan pelayanan pelanggan. Produk layanan ini dirancang bagi pelanggan semua jenis tegangan dan golongan tarif. Produk ini mulai dipasarkan pada tahun 2019 dengan harapan dapat menghadirkan aspek keadilan antara PLN dengan pelanggan pengguna PLTS Atap serta mengelola keberadaan PLTS Atap agar tidak mendistrupsi kinerja penjualan dan pendapatan tenaga listrik.

Solar Roof Power Plant Services

Solar Roof Power Plant service product is PLN's strategy to seize opportunities and take advantage of disruptive technology challenges while responding to Regulation of the Minister of ESDM (Permen) No. 49 of 2018 concerning the Use of a Solar Roof Power Plant (PLTS) System by Consumers of PT PLN (Persero). Products of Roof PLTS service previously existed and were managed directly by PLN. With the issuance of the Regulation of the Minister of ESDM, PLN amended provisions of this product while taking into account the aspects of business and customer service. This service product is designed for customers of all types of voltage and tariff groups. This product was released to the market in 2019 with the hope of bringing equality to PLN and customers of Roof PLTS as well as managing the existence of Roof PLTS so as not to disrupt electricity sales revenue.

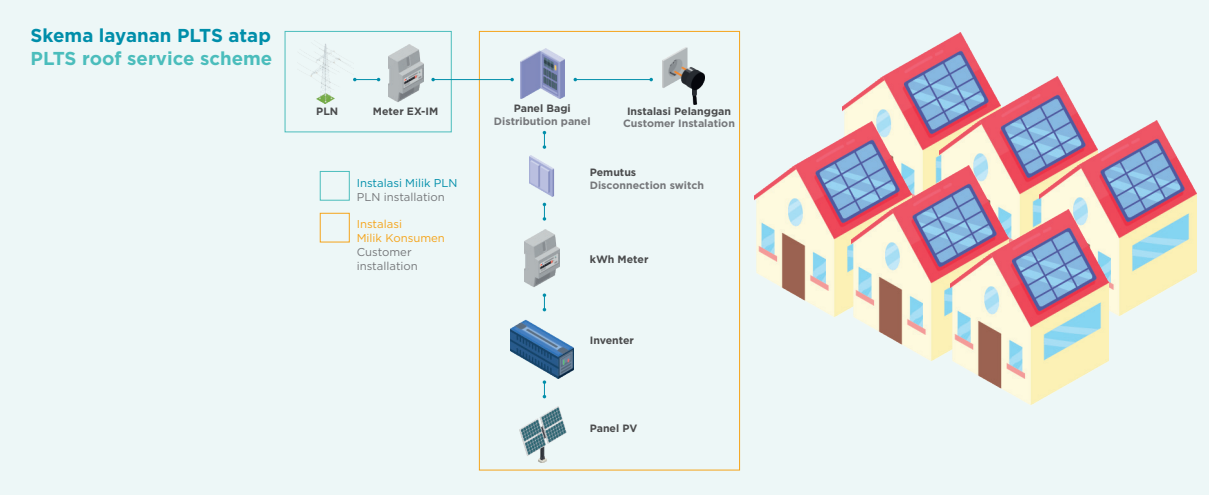

"Menembus Batas"

Program "Menembus Batas" merupakan program diskon biaya penyambungan (BP) untuk tambah daya (TD) yang dihadirkan untuk pelanggan rumah tangga tegangan rendah.

Berdasarkan evaluasi kinerja penjualan tenaga listrik tahun 2018, sebanyak 91,9% dari 71 juta pelanggan PLN merupakan pelanggan segmen rumah tangga dengan konsumsi energi listrik rata-rata hanya 4 kWh/pelanggan/hari. Konsumsi energi listrik pada segmen rumah tangga ini jauh lebih kecil dari rata-rata konsumsi energi listrik secara nasional yakni 9 kWh/pelanggan/hari.

Untuk meningkatkan konsumsi tenaga listrik pelanggan rumah tangga, PLN menghadirkan program "Menembus Batas", yaitu diskon biaya penyambungan (BP) untuk tambah daya (TD) agar pelanggan lebih leluasa menikmati kapasitas listrik yang cukup untuk peralatan-peralatan listriknya. Produk ini dipasarkan mulai triwulan I 2019.

"Breaking the Limit"

"Breaking the Limit" program is a discounted connection fees (BP) program for voltage upgrade (TD) offered to low-voltage household customers.

Based on evaluation of electricity sales performance in 2018, as many as 91.9% of 71 million PLN customers were household segment customers with an average power consumption of only 4 kWh/customer/day. The power consumption in this household segment is far less than the average national power consumption of 9 kWh/customer/day.

To increase power consumption of the household customers, PLN presented "Breaking the Line" program, which is a discounted connection fees (BP) for voltage upgrade (TD) so that customers can enjoy sufficient power capacity for their electrical equipment. This product has been offered since the first quarter of 2019.

Program "Electrifying Life Style"
Merupakan program diskon biaya penyambungan (BP) untuk tambah daya (TD) bagi pengguna kompor listrik dan kendaraan listrik. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan tenaga listrik dalam aspek kehidupan sehari-hari, mengoptimalkan kapasitas PLN yang tersedia serta mendukung program *Go Green*, PLN menyediakan program diskon BP untuk TD bagi pelanggan yang menggunakan kompor listrik atau kendaraan listrik. Produk ini diluncurkan pada triwulan I 2019 dengan durasi hingga akhir tahun 2019. Program ini diharapkan dapat mendorong minat masyarakat untuk beralih menggunakan peralatan listrik yang lebih ramah lingkungan.

"Electrifying Life Style" Program
This was a discounted connection fees (BP) program for voltage upgrade (TD) for users of electric stoves and electric vehicles. This program aimed to increase the use of electricity in daily life, to optimize PLN's available capacity and to support Go Green program. PLN offers BP discount program for TD for customers who use electric stoves or electric vehicles. This product was launched in the first quarter of 2019 and was offered up to the end of 2019. The program was expected to encourage the interest of the public to switch to using environmentally friendly electrical equipment.

"Terangi Negeri"
Merupakan program diskon BP untuk Pasang Baru (PB) yang disediakan khusus untuk masyarakat yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (BDT - TNP2K) dan/atau masyarakat di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T). Program ini sebagai salah satu realisasi komitmen PLN untuk melistriki seluruh pelosok Indonesia.

Produk ini mulai diluncurkan pada triwulan I 2019 dengan durasi hingga akhir tahun 2019. Dengan produk ini, PLN menargetkan peningkatan jumlah pelanggan, peningkatan konsumsi energi listrik, mewujudkan listrik berkeadilan, serta mempercepat pencapaian rasio elektrifikasi nasional 100%.

"Lighting the Nation"
This was a discounted BP program for New Installation (PB) that was offered specifically to people who are registered in Integrated Database of National Team for Acceleration of Poverty Eradication (BDT - TNP2K) and/or communities in the frontier, outermost and disadvantaged (3T) areas. This program was a realization of PLN's commitment to electrify all corners of Indonesia.

This product was first launched in the first quarter of 2019 and was offered until the end of 2019. With this product, PLN targeted an increase in the number of customers, an increase in power consumption, realization of equitable electricity and accelerated achievement of 100% national electrification ratio.

"Makin Produktif"
Adalah program diskon tarif luar waktu beban puncak (LWBP-1) yang disediakan bagi pelanggan industri tegangan menengah dan tinggi. Program ini merupakan bentuk dukungan PLN terhadap sektor riil sebagai sektor yang sangat berpengaruh pada perekonomian nasional. Pelanggan PLN segmen industri mencapai 21.201 pelanggan dengan konsumsi energi listrik sebesar 38,15% dari total konsumsi energi listrik nasional. Angka penyerapan kapasitas segmen industri masih belum sesuai dengan target yang diharapkan di tengah keleluasaan kapasitas dan energi PLN saat ini. Oleh karena itu, untuk memacu pertumbuhan kegiatan ekonomi bisnis dan industri, PLN menghadirkan produk diskon

"Getting Productive"
This was an off-peak time tariff discount (LWBP-1) program offered to medium and high voltage industrial customers. This program was a form of PLN's support for the real sector that is very influential on the national economy. PLN had 21,201 customers in the industrial segment with power consumption of 38.15% of the total national power consumption. The absorption rate of industrial segment capacity was still not in line with the expected target amidst PLN's current capacity and energy. Therefore, to spur growth in business and industrial economic activities, PLN offered a discounted electricity tariff (TTL)

tarif tenaga listrik (TTL) khususnya pada luar waktu beban puncak (LWBP) yang di bawah harga tarif listrik reguler. Program ini dipasarkan pada triwulan I 2019 dengan durasi hingga akhir tahun 2020.

product especially during off-peak time (LWBP) which is below the regular electricity tariff. This program was launched in the first quarter of 2019 is offered up to the end of 2020.

Diskon Tarif Rp52/kWh

Berdasarkan data tahun 2018, konsumsi energi listrik di golongan tarif rumah tangga mampu daya 900 VA (R1/900 VA RTM) mengalami pertumbuhan negatif sebesar -4%. Untuk mendorong penjualan energi listrik pada tahun 2019, PLN meluncurkan program diskon tarif tenaga listrik (TTL) Rp52/kWh khusus pelanggan golongan tarif R1/900 VA RTM yang jumlahnya sekitar 21 juta pelanggan (30% dari total pelanggan rumah tangga). Produk ini diluncurkan pada triwulan I 2019 sebagai produk temporer dengan durasi melihat kondisi pasar.

Discounted Tariff of Rp52/kWh

Based on 2018 data, power consumption in the household tariff group with 900 VA (R1/900 VA RTM) experienced a negative growth of -4%. To encourage electricity sales in 2019, PLN launched Rp52/kWh electricity tariff (TTL) discount program specifically for R1/900 VA RTM tariff group with around 21 million customers (30% of total household customers). This product was launched in the first quarter of 2019 as a temporary product with program duration depending on the market condition.

"Gemerlap Lebaran 2019 – Pelanggan Tegangan Rendah"
Adalah program diskon BP untuk TD bagi pelanggan tegangan rendah semua golongan tarif dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1440 H. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan pemakaian tenaga listrik jangka panjang dan mencapai penambahan daya tersambung tahun 2019 yang ditargetkan sebesar 8.588,2 MVA. Khusus untuk segmen rumah ibadah diberikan diskon lebih besar.

"Sparkling Eid-al-Fitr 2019 – Low Voltage Customers"
This was a discounted BP program for TD for low voltage customers of all tariff groups to celebrate Eid-al-Fitr 1440 H. This program aimed to increase growth in long-term power usage and to achieve additional connected power in 2019 that was targeted to reach 8,588.2 MVA. Houses of worship were given greater special discounts.

"Gemerlap Lebaran 2019 – Pelanggan Tegangan Menengah dan Tinggi"
Merupakan program diskon TTL bagi pelanggan tegangan menengah dan tegangan tinggi untuk golongan tarif bisnis dan industri pada periode libur Hari Raya Idul Fitri tahun 2019. Program ini bertujuan untuk mengurangi potensi *idle capacity* selama libur lebaran tanggal 1 hingga 9 Juni 2019. Libur panjang berpotensi menurunkan penggunaan beban listrik yang signifikan terutama dari pelanggan tegangan menengah dan tegangan tinggi yang memiliki porsi penjualan energi listrik yang besar. Hal ini akan menyebabkan sebagian pembangkit listrik yang *available* menjadi tidak beroperasi dan meningkatkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP). Diskon tarif diberikan untuk tambahan pemakaian kWh (Luar Waktu Beban Puncak dan Waktu Beban Puncak) di atas batas pemakaian kWh bertarif normal yang ditetapkan.

"Sparkling Eid-al-Fitr 2019 – Middle and High Voltage Customers"
This was a discounted TTL program for mid-voltage and high-voltage customers for business and industrial tariff groups during Eid al-Fitr holidays in 2019. This program aimed to reduce the potential idle capacity during Eid-al-Fitr holiday during June 1 to 9, 2019. The long holidays had the potential to significantly reduce power load especially for medium and high voltage customers that had a large portion of electricity sales. This would cause some of available power plants to become inoperative and would increase Cost of Electricity Supplies (BPP). The given discount rates for additional kWh usage (off-peak time and off-peak time) were higher than the normal kWh usage limit.

Program untuk Pelanggan yang Memiliki Mobil Listrik

Sebagai bentuk dukungan PLN terhadap program Pemerintah mengakselerasi hadirnya kendaraan listrik guna meningkatkan efisiensi dan konservasi energi pada sektor transportasi, PLN meluncurkan program diskon TTL Luar Waktu Beban Puncak (LWBP) bagi pelanggan rumah tangga yang memiliki mobil listrik. Diskon tarif diberikan untuk tambahan pemakaian kWh pada pukul 22:00-04:00 (LWBP) yang diperkirakan adalah waktu pelanggan melakukan pengisian daya mobil listriknya. Produk ini difokuskan pada pelanggan tegangan rendah dan tegangan menengah pada golongan tarif rumah tangga dan bisnis sebagai segmen dimana penggunaan mobil listrik diperkirakan akan berkembang. Dengan program ini, PLN juga akan mendapatkan data perilaku pemakaian energi listrik bagi pelanggan yang memiliki mobil listrik untuk mengembangkan inovasi lebih lanjut di pangsa pasar tersebut.

Programs for Electric Car Owners

As a form of PLN's support for the Government's program to accelerate the use of electric vehicles in order to improve energy efficiency and conservation in the transportation sector, PLN launched a discounted TTL program for Off-peak Time (LWBP) for household customers who own electric cars. The discounted rate is given for additional kWh usage during 22:00-04:00 (LWBP) which is estimated to be the time the customers charge their electric cars. This product is focused on low and medium voltage customers in the household and business tariff groups as segments that is expected to use more electric cars. With this program, PLN will also obtain data on power usage behavior of customers who have electric cars to develop further innovations in the market share.

Show Case Electric Vehicle Charging Station (*technical phase*)

PLN ikut mengambil peran dalam menyambut era tumbuhnya ekosistem kendaraan listrik. Selain karena bisnis inti PLN di bidang ketenagalistrikan, pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik membuka peluang untuk meningkatkan pendapatan Perusahaan. Saat ini PLN menawarkan Electric Vehicle Charging Station (EVCS) Shelter Showcase sebagai solusi untuk melakukan studi bisnis dalam ekosistem kendaraan listrik. Lokasi tersebut menjadi tempat inkubasi untuk bisnis *charging station* dan bisnis-bisnis turunannya. PLN akan membangun EVCS ini di 3 lokasi yaitu di kantor UID Jakarta, Jakarta Pusat, eks-kantor PLN Rayon Bandung Utara, dan kantor UP3 Denpasar, Bali Selatan. Dengan tersedianya EVCS Shelter Showcase, PLN mendapatkan manfaat bukan hanya sekedar dari sisi studi bisnis *charging station* tetapi juga peluang untuk komersialisasi lokasi-lokasi EVCS *Shelter Showcase*.

Show Case Electric Vehicle Charging Station (technical phase)

PLN took part in welcoming the era of electric vehicle ecosystem development. Apart from PLN's core business in the power sector, the growth of the electric vehicle ecosystem opens opportunities to increase the Company's revenues. PLN is currently offering Electric Vehicle Charging Station (EVCS) Shelter Showcase as a solution for conducting business studies in the electric vehicle ecosystem. The location is incubation for the charging station business and its derivatives businesses. PLN will build EVCS in 3 locations, namely UID Jakarta office, Central Jakarta, ex-office of PLN North Bandung Area and UP3 Denpasar office, South Bali. With the availability of EVCS Shelter Showcase, PLN will benefit not only from the business side of charging station business but also the opportunity to commercialize EVCS Shelter Showcase locations.

Mockup Show Case EV Charging Station
Mockup Show Case EV Charging Station

Layanan dalam genggaman: New PLN Mobile

Dalam upaya meningkatkan kepuasan pelanggan, sejak tahun 2016 PLN telah mengembangkan aplikasi PLN Mobile yang memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk mengakses berbagai produk layanan PLN. Kini PLN Mobile telah disempurnakan mengacu pada *best practice* aplikasi *mobile* yang difokuskan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan perbaikan *user interface*. Fitur-fitur yang dikembangkan di PLN Mobile tidak hanya menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna namun juga dioptimalkan agar fitur-fitur tersebut

In-hand services: New PLN Mobile

To increase customer satisfaction, since 2016, PLN has been developing PLN Mobile application which helps customers access various PLN service products. Now PLN Mobile has been refined referring to best practice mobile applications that are focused on improving user experience and interfaces. The features developed for PLN Mobile are not only adjusted to the needs of users but are also optimized so that these features can unlock other revenue potential in addition to

dapat membuka potensi pendapatan lain di luar bisnis inti PLN. Dengan demikian keberadaan PLN Mobile tidak hanya sekedar untuk kepentingan pelanggan namun juga terdapat kebutuhan PLN untuk dapat mengembangkan bisnis di luar bisnis inti PLN.

PLN's core business. Hence, PLN Mobile does not exist just for the benefit of customers but there is also a need for PLN to be able to expand beyond its core business.

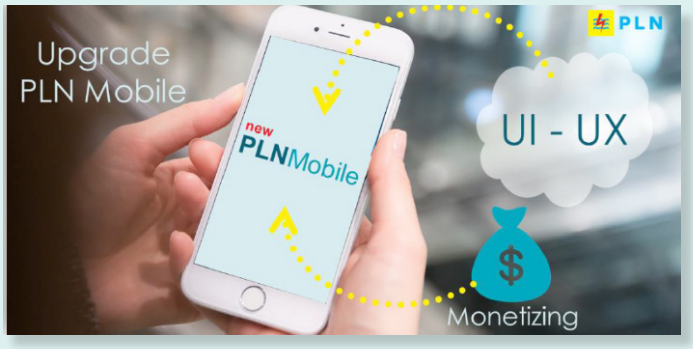

Utilisasi Contact Center PLN 123

PLN berkomitmen untuk memberikan kemudahan akses layanan tanpa batas kepada pelanggan. Komitmen PLN tersebut diwujudkan dengan menghadirkan layanan CC PLN 123.

PLN 123 dideklarasikan sebagai pintu utama pelayanan pelanggan pada tanggal 12 Desember 2012 yang selanjutnya diperkuat dengan Surat Keputusan Direksi nomor 289.K/DIR/2013 tanggal 12 April 2013 tentang Penetapan Contact Center PLN 123 sebagai Pintu Pelayanan di PT PLN (Persero). Dalam surat keputusan tersebut juga ditetapkan *branding* atas *contact center* PLN 123 adalah PLN 123

Masyarakat umum dan seluruh kelompok pelanggan semakin dipermudah untuk melakukan proses penyambungan baru (PB), perubahan daya (PD), penyambungan sementara (PS), informasi dan keluhan, serta pemulihan gangguan penyaluran tenaga listrik dengan cukup dengan mengakses CC PLN 123. CC PLN 123 ini juga untuk menghilangkan potensi korupsi berupa gratifikasi atau pungutan tambahan biaya oleh petugas dan praktik-praktik percaloan, sehingga dapat meningkatkan integritas layanan PLN kepada publik.

PLN 123 Contact Center Utilization

PLN is committed to providing customers with easy access to unlimited services. The commitment of PLN is realized by presenting PLN 123 CC services.

PLN 123 was declared as the main door of customer service on December 12, 2012 which was further strengthened by Decision of Board of Directors No. 289.K/DIR/2013 dated April 12, 2013 concerning Establishment of PLN 123 Contact Center as Service Gate of PT PLN (Persero). The Decision also stated that the branding of PLN 123 contact center is PLN 123.

The general public and all customer groups are facilitated to make new connections (PB), power upgrade (PD), temporary connections (PS), information and complaints, as well as recovery of power supply disruptions by simply accessing PLN 123 CC. PLN 123 CC also eliminates the potential for corruption in the form of gratuities or additional fees charged by officers and brokering practices, so as to improve the integrity of PLN's services to the public.

Channel pintu layanan Contact Center PLN 123
Door Channel of 123 PLN Contact Center service

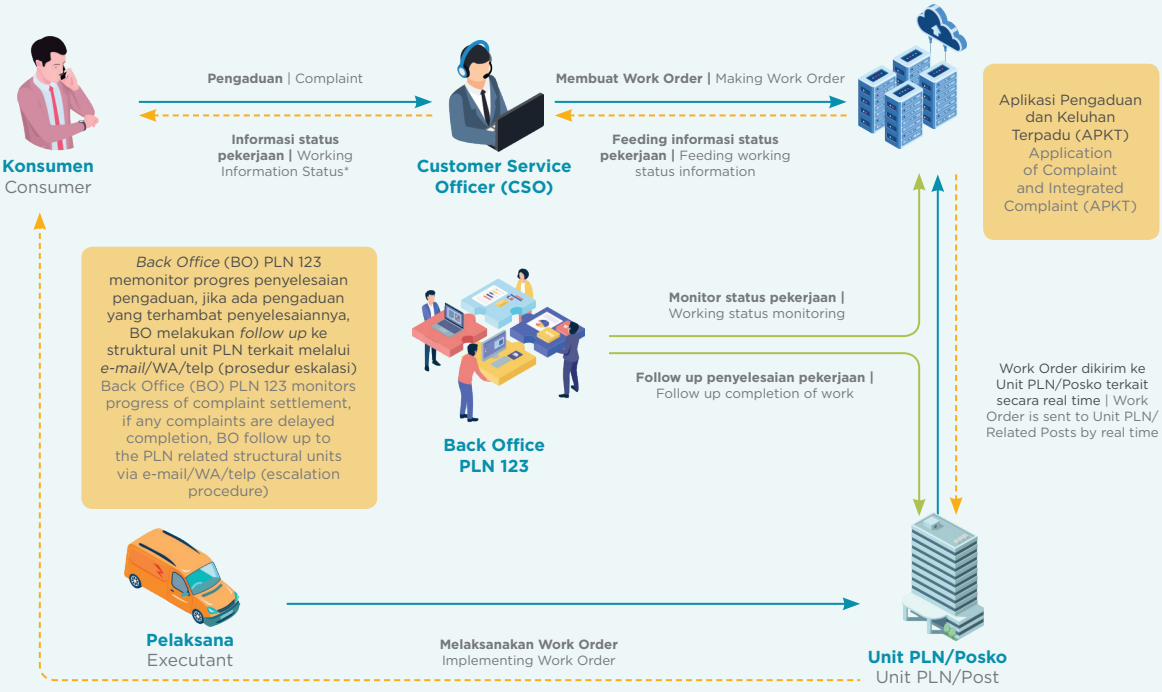

Site Contact Center saling terintegrasi siap melayani pelanggan PLN Nasional
Integrated Site Contact Center is ready to serve National PLN customers

PLN 123 Contact Center PLN 123

Masyarakat kini tidak perlu datang dan mengantri di kantor PLN apabila ingin membuat sambungan baru, melaporkan gangguan atau sekedar mencari informasi tagihan listrik. Pelanggan cukup menghubungi nomor telepon 123, kirim *e-mail* atau berkomunikasi lewat saluran media sosial Facebook dan Twitter.
Customers now do not need to come and queue at a PLN office if they want to install a new connection, report a disruption or find information on electricity bills. Customers simply need to dial 123, send an e-mail or communicate via social media such as Facebook or Twitter.

Cakupan Layanan Service Converage

- Informasi tagihan listrik | Information on electricity bills
- Pengaduan gangguan dan pelayanan teknik | Complaint handling and technical service
- Sambungan baru | New connection
- Ubah daya | Change power
- Sambungan sementara | Temporary connection
- Imigrasi ke prabayar | Migrate to prepay

Layanan Tanpa Batas
Service Without Limittaion

- Beroperasi 24 Jam | Operates 24 hours
- Tanpa calo | No brokers
- Tanpa biaya tambahan | No additional cost
- Cepat | Express
- Transparan | Transparent

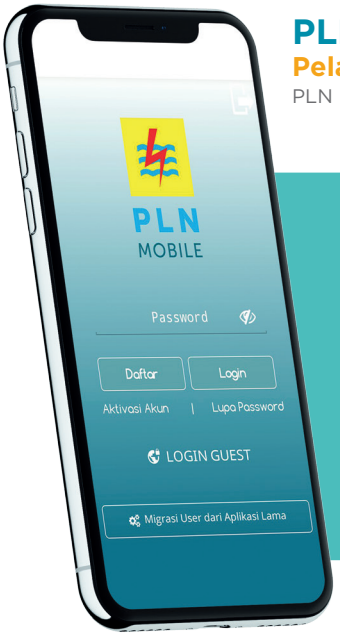

PLN MOBILE,
Pelayanan PLN dalam Genggaman

PLN MOBILE, Pelayanan PLN dalam Genggaman

Fitur:

1. Permohonan:
   - Pemasangan Baru
   - Penambahan Daya
   - Penyambungan Sementara
2. Pengaduan
   - Gangguan (Padam)
   - Keluhan
3. Informasi Progres
4. *Tracking* Petugas Penanganan Gangguan
5. Infromasi rekening atau token listrik pintar
6. Informasi pemeliharaan
7. Berita PLN

Features:

1. Application:
   - New Installation
   - Power Addition
   - Temporary connection
2. Complaint
   - Disruptions (outages)
   - Complaint
3. Progress Information
4. Tracking disruption officer
5. Account information or Smart electrical token
6. Maintenance infromation
7. PLN News

Tersedia di
Available on

Google play | Download on the App Store

Penanganan Pengaduan Pelanggan di PLN Mobile
Handling Customer Complaint at PLN Mobile

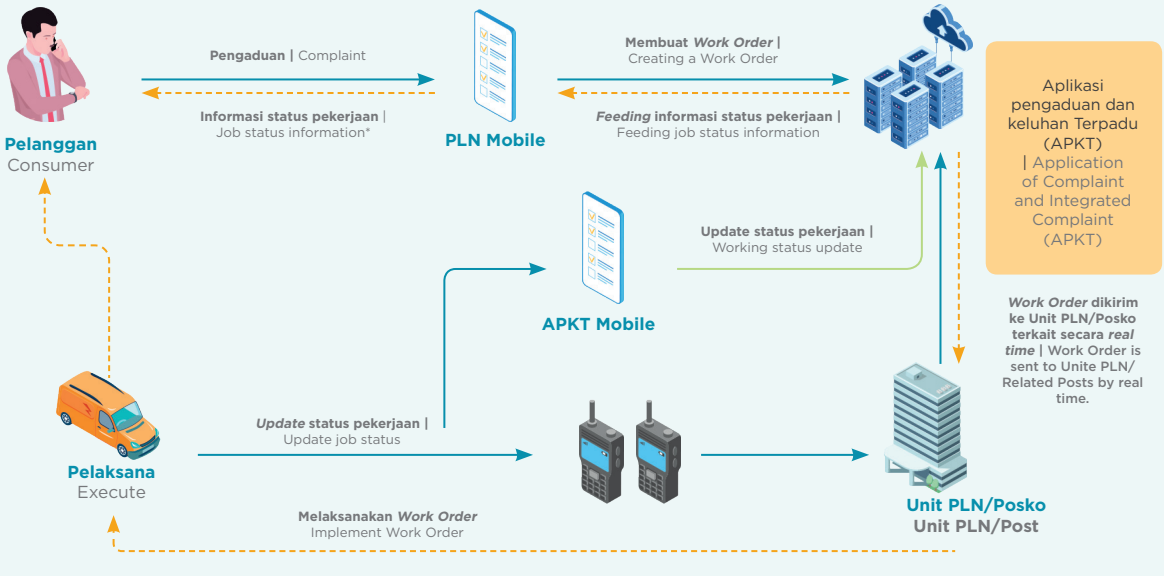

DIVIDEN DAN KEBIJAKAN DIVIDEN

Kebijakan Dividen

PLN membagikan dividen atas laba bersih, sesuai dengan keputusan pemegang saham, dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang ditetapkan berdasarkan kinerja tahun berjalan dan kebutuhan pengembangan usaha jangka panjang.

Dividen Dibagikan

Dalam beberapa tahun terakhir, PLN membagikan dividen dengan rekapitulasi sebagai berikut:

DIVIDEND AND DIVIDEND POLICY

Dividend Policy

PLN distributes dividends from net income according to decisions of shareholders in General Meeting of Shareholders (GMS), which is determined based on current year's performance and long-term business development needs.

Dividends Payout

In recent years, PLN distributed dividends with the following recapitulation:

Uraian	2017	2018	2019	Description
Jumlah dividen tunai yang dibayar dalam tahun berjalan (dalam miliar Rupiah)	2,150.84	308.72	4,000	Total cash dividend paid (in Rp billion)
Tanggal pembayaran dividen	22 Juni 2017 June 22, 2017	27 April 2018 April 27, 2018	20 Desember 2019 December 20, 2019	Dividend payout dates
Dividen per lembar saham (dalam Rp)	19,584	2,811	34,728	Dividend per share (in Rp)
Dividend pay out ratio (%)	26.39%	6.97%	34.55%	Dividend payout ratio (%)

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH PEGAWAI DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)

Sesuai dengan status Perusahaan sebagai BUMN yang 100% sahamnya dimiliki negara, PLN tidak memiliki program kepemilikan saham oleh pegawai dan/atau manajemen.

EMPLOYEE AND/OR MANAGEMENT STOCK OWNERSHIP PROGRAM (ESOP/MSOP)

In accordance with the Company's status as a State-Owned Enterprise which is 100% owned by the state, PLN does not have an employee and/or management stock ownership program.

REALISASI PENGGUNAAN DANA OBLIGASI DAN EFEK LAINNYA

Pada tahun 2019, PLN kembali menerbitkan beberapa seri obligasi lokal dan global serta sukuk ijarah untuk menghimpun dana pembiayaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Obligasi lokal dan sukuk ijarah yang diterbitkan sebanyak 32 seri dan obligasi gobal sebanyak 20 seri. Data obligasi dan sukuk ijarah yang diterbitkan selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

USE OF PROCEEDS FROM ISSUANCE OF BONDS AND OTHER SECURITIES

In 2019, PLN issued several series of local and global bonds and ijara sukuk to finance the development of electricity infrastructure. The issued securities were 32 series of local bonds and ijara sukuk and 20 series of global bonds. Information on bonds and ijara sukuk issued in 2019 was as follows:

Obligasi dan Sukuk Ijarah Lokal (Rupiah)

Local Bond and Sukuk Ijarah (Rupiah)

No.	Nama Obligasi Bond Name	Plafon Plafond (juta Rp million Rp)	Tanggal Terbit Date of Issuance	Tenor (tahun year)
1	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019 Seri A Shelf Registration Bonds III PLN Phase III Year 2019 Series A	369.000	19-Feb-19	3
2	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019 Seri B Shelf Registration Bonds III PLN Phase III Year 2019 Series B	1.212.000	19-Feb-19	5

No.	Nama Obligasi Bond Name	Plafon Plafond (juta Rp million Rp)	Tanggal Terbit Date of Issuance	Tenor (tahun year)
3	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019 Seri C Shelf Registration Bonds III PLN Phase III Year 2019 Series C	183.000	19-Feb-19	7
4	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019 Seri D Shelf Registration Bonds III PLN Phase III Year 2019 Series D	211.000	19-Feb-19	10
5	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019 Seri E Shelf Registration Bonds III PLN Phase III Year 2019 Series E	263.000	19-Feb-19	15
6	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019 Seri F Shelf Registration Bonds III PLN Phase III Year 2019 Series F	155.000	19-Feb-19	20
7	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019 Seri A Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN II Year 2019 Series A	263.000	19-Feb-19	3
8	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019 Seri B Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN II Year 2019 Series B	263.000	19-Feb-19	5
9	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019 Seri C Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN II Year 2019 Series C	204.000	19-Feb-19	7
10	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019 Seri D Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN II Year 2019 Series D	45.000	19-Feb-19	10
11	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019 Seri E Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN II Year 2019 Series E	60.000	19-Feb-19	15
12	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019 Seri F Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN II Year 2019 Series F	28.000	19-Feb-19	20
13	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri A Shelf Registration Bonds III PLN Phase IV Series A	637.000	1-Aug-19	5
14	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri B Shelf Registration Bonds III PLN Phase IV Series B	315.250	1-Aug-19	7
15	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri C Shelf Registration Bonds III PLN Phase IV Series C	549.000	1-Aug-19	10
16	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri D Shelf Registration Bonds III PLN Phase IV Series D	395.000	1-Aug-19	15
17	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri E Shelf Registration Bonds III PLN Phase IV Series E	1.057.370	1-Aug-19	20
18	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri A Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN IV Series A	274.000	1-Aug-19	5
19	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri B Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN IV Series B	368.000	1-Aug-19	7
20	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri C Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN IV Series C	20.000	1-Aug-19	10
21	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri D Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN IV Series D	49.000	1-Aug-19	15
22	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri E Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN IV Series E	539.000	1-Aug-19	20
23	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri A Shelf Registration Bonds III PLN Phase V Series A	795.700	1-Oct-19	5
24	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri B Shelf Registration Bonds III PLN Phase V Series B	445.000	1-Oct-19	7
25	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri C Shelf Registration Bonds III PLN Phase V Series C	6.200	1-Oct-19	10
26	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri D Shelf Registration Bonds III PLN Phase V Series D	166.000	1-Oct-19	15
27	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri E Shelf Registration Bonds III PLN Phase V Series E	500.000	1-Oct-19	20
28	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri A Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN V Series A	6.500	1-Oct-19	5

No.	Nama Obligasi Bond Name	Plafon Plafond (juta Rp million Rp)	Tanggal Terbit Date of Issuance	Tenor (tahun year)
29	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri B Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN V Series B	10.000	1-Oct-19	7
30	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri C Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN V Series C	92.000	1-Oct-19	10
31	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri D Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN V Series D	135.000	1-Oct-19	15
32	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri E Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN V Series E	554.000	1-Oct-19	20

Obligasi Global

Global Bond

No.	Nama Obligasi Bond Name	Plafon Plafond (juta Rp million Rp)		Tanggal Terbit Date of Issuance	Tenor (tahun year)
1	II B	USD	288.312.000	28-Jun-07	30
2	III	USD	146.441.000	7-Aug-09	10
3	IV	USD	337.636.000	6-Nov-09	10
4	GMTN 2011	USD	1.000.000.000	22-Nov-11	10
5	GMTN 2012	USD	1.000.000.000	24-Oct-12	30
6	GMTN 2017 - 10Y	USD	1.500.000.000	15-May-17	10
7	GMTN 2017 - 30Y	USD	500.000.000	15-May-17	30
8	GMTN 2018 Seri 1 - USD 10Y	USD	1.000.000.000	21-May-18	10
9	GMTN 2018 Seri 2 - USD 30Y	USD	1.000.000.000	21-May-18	30
10	GMTN 2018 Seri 3 - USD 10Y	USD	500.000.000	25-Oct-18	10
11	GMTN 2018 Seri 4 - USD 30Y	USD	500.000.000	25-Oct-18	30
12	GMTN 2018 Seri 5 - EUR 7Y	EUR	500.000.000	25-Oct-18	7
13	GMTN 2019 Seri 6 - USD 10Y	USD	700.000.000	17-Jul-19	10
14	GMTN 2019 Seri 7 - USD 30Y	USD	700.000.000	17-Jul-19	30
15	Japanese Yen Bond 2019 Seri 1 - 3Y	JPY	3.700.000.000	20-Sep-19	3
16	Japanese Yen Bond 2019 Seri 2 - 5Y	JPY	18.500.000.000	20-Sep-19	5
17	Japanese Yen Bond 2019 Seri 4 - 10Y	JPY	1.000.000.000	20-Sep-19	10
18	GMTN 2019 Seri 8 - USD 10.25Y	USD	500.000.000	5-Nov-19	10.25
19	GMTN 2019 Seri 9 - USD 30.25Y	USD	500.000.000	5-Nov-19	30.25
20	GMTN 2019 Seri 10 - EUR 12Y	EUR	500.000.000	5-Nov-19	12

Seluruh dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi/sukuk ijarah lokal serta obligasi global telah digunakan sesuai yang telah disampaikan di dalam prospektus penerbitannya, yakni untuk membiayai pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan.

All proceeds from issuance of local bonds/ijara sukuk and global bonds have been used in accordance with the issuance prospectus, to finance the development of electricity infrastructure.

DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Perusahaan tidak melakukan divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi atau restrukturisasi utang/modal di tahun 2019.

DIVESTMENT, BUSINESS COMBINATION/ MERGER, ACQUISITION OR DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING

The Company did not perform any divestment, business combination/merger, acquisition or debt/capital restructuring in 2019.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI EKSPANSI

PLN melakukan ekspansi usaha dengan menambah kapasitas daya listrik melalui pembangunan unit pembangkit sendiri, membeli daya listrik dari pembangkit swasta maupun melalui sewa pembangkit. Pembangunan pembangkit dilakukan melalui skema reguler, Fast Track Program (FTP) 1 dan FTP 2, serta yang terakhir sebagai integrasi dari seluruh program tersebut, adalah Program 35.000 MW. Selain pembangkit, PLN juga membangun jaringan transmisi dan distribusi, termasuk unit-unit gardu induk. Pada kondisi tertentu, PLN juga melakukan ekspansi kegiatan usaha terkait ketenagalistrikan dengan mendirikan entitas anak usaha.

Pada tahun 2019, PLN berhasil menyelesaikan pembangunan pembangkit dengan total kapasitas sebesar 4.232,55 MW (pembangkit EBT dan non-EBT), insfrastruktur transmisi sepanjang 6.222,33 kms, dan gardu induk sebesar 17.674 MVA. Realisasi investasi yang dikeluarkan pada tahun 2019 sebesar Rp104.79 triliun.

MATERIAL INFORMATION REGARDING EXPANSION

PLN expanded its business to increase power capacity by developing owned power plants, purchasing power from independent power producers, or renting power plants. The power plant development used a regular scheme, Fast Track Program (FTP) 1, and FTP 2 and the most recent one, to integrate all these programs was the 35,000 MW Program. In addition to power plants, PLN also developed transmission and distribution networks, including substations. In certain circumstances, PLN also expanded its power businesses by establishing subsidiaries.

In 2019, PLN managed to complete development of power plants with a total capacity of 4,232.55 MW (EBT and non-EBT power plants), 6,222.33 kms transmission lines and 17,674 MVA substations. Investment realization during 2019 amounted to Rp104,79 trillion.

TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN

Tidak ada transaksi benturan kepentingan selama periode pelaporan.

TRANSACTION WITH CONFLICT OF INTEREST

There was no transaction with conflict of interest during the reporting period.

TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan dan anak perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak yang berelasi. Seluruh transaksi signifikan dengan pihak hubungan istimewa, baik yang dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan atau tidak sama dengan pihak ketiga, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi.

RELATED PARTY TRANSACTIONS

The Company and its subsidiaries entered into certain business transactions with related parties. All significant related party transactions, whether arm's length or not, are disclosed in notes to consolidated financial statements.

Sifat Hubungan Berelasi

1. Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham Perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara.
2. Perusahaan dan entitas anak mempunyai pengaruh signifikan atas investasi pada entitas asosiasi.
3. Pengurus Koperasi Karyawan juga merupakan pegawai Perusahaan dan entitas anak.
4. Pendiri dan pengawas Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) merupakan pengurus dan karyawan Perusahaan dan entitas anak.
5. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) merupakan pemegang saham mayoritas PT Tugu Kresna Pratama.
6. Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Perusahaan dan entitas anak.

Ketentuan Transaksi Berelasi

Dalam melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi tersebut, PLN menerapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Penjualan produk dan jasa kepada pihak berelasi ditetapkan berdasarkan kontrak-kontrak penjualan, yang pada umumnya menggunakan dasar harga pasar yang berlaku ditambah margin tertentu sesuai kesepakatan.
2. Pengangkutan bahan bakar maupun suku cadang oleh pihak berelasi ditetapkan berdasarkan kontrak pengangkutan yang disepakati bersama berdasarkan hasil negosiasi dengan memperhatikan unsur-unsur biaya yang ada ditambah dengan marjin tertentu.
3. Penempatan dana dilakukan berdasarkan kebutuhan dan perjanjian yang saling menguntungkan dan memberikan benefit optimal pada Perseroan.
4. Perolehan dana pinjaman dilakukan melalui negosiasi syarat dan kondisi yang paling optimal bagi kepentingan operasional Perseroan.

Tabel berikut menginformasikan para pihak yang memiliki transaksi berelasi dengan PLN.

Nature of Relationships

1. The Government of the Republic of Indonesia is the Shareholder of the Company and State-Owned Enterprise.
2. The Company and its subsidiaries have significant influence on investment in associated entities.
3. Management of Employee Cooperatives are also employees of the Company and its subsidiaries.
4. Founder and supervisor of Education and Welfare Foundation of PT PLN (Persero) are management and employees of the Company and its subsidiaries.
5. Education and Welfare Foundation of PT PLN (Persero) is the majority shareholder of PT Tugu Kresna Pratama.
6. Board of Commissioners and Board of Directors are key management personnel of the Company and its subsidiaries.

Terms of Related Party Transactions

In conducting transactions with related parties, PLN implements the following policies:

1. Products and services are sold to related parties based on sales contracts, which typically use the prevailing market price plus a predetermined margin.
2. Fuel and spare parts are shipped by related parties based on negotiated and signed shipping contracts taking into account the cost structure plus a predetermined margin.
3. Funds are allocated in consideration of requirement, mutual agreement, and the Company's optimal benefit.
4. Loans are obtained with optimal negotiated terms and conditions for the Company's operational interest.

The following table discloses the parties that entered into related party transactions with PLN.

Pihak-pihak Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Alasan Transaksi Nature of Transaction	Kewajaran Transaksi Fairness of Transaction
Pemerintah Republik Indonesia Government of Republic of Indonesia	Pemegang saham akhir Ultimate Shareholders	Penerimaan subsidi listrik, penerimaan penerusan pinjaman, dan utang kepada pemerintah Receipt of electricity subsidy, two step loan and government loan	Wajar | Fair
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan kas dan setara kas, rekening bank dan deposito yang dibatasi penggunaannya, investasi jangka pendek, dan penerimaan utang bank Placement of cash and cash equivalents, restricted cash in bank and time deposits, short-term investment, and receipt of bank loans	Wajar | Fair
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya, kas dan setara kas, investasi jangka pendek, dan penerimaan utang bank Placement of restricted cash in bank and time deposit, cash and cash equivalents, short-term investment, and receipt of bank loans	Wajar | Fair
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya, kas dan setara kas, dan penerimaan utang bank Placement of restricted cash in bank and time deposit, cash and cash equivalents, and receipt of bank loans	Wajar | Fair
PT Bank DKI	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan kas dan setara kas dan penerimaan utang bank Placement of cash and cash equivalents and receipt of bank loans	Wajar | Fair
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan kas dan setara kas Placement of cash and cash equivalents	Wajar | Fair
PT Pertamina Geothermal Energy	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian tenaga listrik Purchase of electricity	Wajar | Fair
PT Pertamina (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar dan minyak pelumas Purchase of fuels and lubricants	Wajar | Fair
PT Tambang Batu bara Bukit Asam (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar Purchase of fuels	Wajar | Fair
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar Purchase of fuels	Wajar | Fair
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi jasa konstruksi Construction services transaction	Wajar | Fair
PT Nusantara Regas	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar Purchase of fuels	Wajar | Fair

Pihak-pihak Berelasi Related Parties	**Sifat Hubungan** Nature of Relationship	**Alasan Transaksi** Nature of Transaction	**Kewajaran Transaksi** Fairness of Transaction
PT Surveyor Indonesia (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pelayanan teknik, survei dan pengukuran batu bara Engineering services, survey and coal measurement	Wajar | Fair
PT Sucofindo (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pelayanan teknik, survei dan pengukuran batu bara Engineering services, survey and coal measurement	Wajar | Fair
PT Djakarta Lloyd (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi jasa transportasi bahan bakar dan batu bara Fuels and coals transportation services transaction	Wajar | Fair
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Asuransi bangunan, instalasi dan mesin pembangkit, perlengkapan transmisi serta kapal milik Perusahaan Insurance services for Company's buildings, installation and power plant, transmission equipment and vessels	Wajar | Fair
Perum Jasa Tirta	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian tenaga listrik Purchase of electricity	Wajar | Fair
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penerimaan utang dari lembaga keuangan pemerintah nonbank Receipt of non-bank government financial institution	Wajar | Fair
PT Geo Dipa Energi (Persero)	Entitas asosiasi Associate	Transaksi pembelian tenaga listrik Purchase of electricity	Wajar | Fair
PT Tanjung Kasam Power	Entitas asosiasi Associate	Transaksi pembelian tenaga listrik Purchase of electricity	Wajar | Fair
PT Dalle Energy Batam	Entitas asosiasi Associate	Transaksi pembelian tenaga listrik Purchase of electricity	Wajar | Fair
PT Mitra Energi Batam	Entitas asosiasi Associate	Transaksi pembelian tenaga listrik Purchase of electricity	Wajar | Fair
PT Sumber Segara Primadaya	Entitas asosiasi Associate	Transaksi pembelian tenaga listrik Purchase of electricity	Wajar | Fair
PT Bajradaya Sentranusa	Ventura bersama Joint venture	Transaksi pembelian tenaga listrik Purchase of electricity	Wajar | Fair
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	Ventura bersama Joint venture	Transaksi pembelian tenaga listrik dan pemberianpinjaman jangka panjang Purchase of electricity and issuance of long-term loan	Wajar | Fair
PT Bukit Pembangkit Innovative	Ventura bersama Joint venture	Transaksi pembelian tenaga listrik Purchase of electricity	Wajar | Fair
PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali	Ventura bersama Joint venture	Transaksi pembelian tenaga listrik Purchase of electricity	Wajar | Fair
PT Perta Daya Gas	Ventura bersama Joint venture	Pemberian pinjaman jangka panjang Issuance of long-term loan	Wajar | Fair
Dana pensiun PLN	Program imbalan pascakerja Post-employment benefit plan	Pembayaran kontribusi program manfaat pasti Payment of contribution for defined benefit plan	Wajar | Fair
PT Transportasi Gas Indonesia	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control Through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi jasa penyaluran gas Gas distribution services	Wajar | Fair

Pihak-pihak Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Alasan Transaksi Nature of Transaction	Kewajaran Transaksi Fairness of Transaction
PT Wijaya Karya Industri Energi	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control Through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi sewa mesin pembangkit Lease power plant machinery	Wajar | Fair
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control Through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi jasa konstruksi Construction services	Wajar | Fair

Tabel berikut menyajikan ringkasan saldo realisasi transaksi berelasi menurut masing-masing jenis transaksi:

The following table presents a summary of related party balances by type of transaction:

Jenis transaksi Type of transaction	Nilai transaksi (Rp miliar) Transaction value (Rp billion)		Keterangan Description	Persentase Percentage (%)	
	2018	2019		2018	2019
Piutang berelasi | Related receivables	1.037,19	956,36	Persentase terhadap total aset | Percentage to total assets	0,07	0,06
Rekening Bank & Deposito Berjangka yang dibatasi penggunaannya | Restricted Bank Accounts & Time Deposits	83,76	95,01	Persentase terhadap total aset | Percentage to total assets	0,01	0,01
Kas dan Setara Kas | Cash and Cash Equivalents	26.117,77	38.171,94	Persentase terhadap total aset | Percentage to total assets	1,76	2,40
Investasi Jangka Pendek | Short-Term Investment	1.204,51	293,90	Persentase terhadap total aset | Percentage to total assets	0,08	0,02
Piutang Usaha | Trade Receivables	596,02	823,89	Persentase terhadap total aset | Percentage to total assets	0,04	0,05
Piutang subsidi listrik | Receivables on electricity subsidy	0	0	Persentase terhadap total aset | Percentage to total assets	0,34	0,00
Total Terhadap Aset | Total to Assets	29.039,25	40.341,11	Persen terhadap Aset | Percent to Assets	1,95	2,54
Penerusan pinjaman | Two step loan	38.635,55	37.977,55	Persentase terhadap total liabilitas | Percentage to total liabilities	6,86	5,81
Utang kepada Pemerintah dan Lembaga kuangan Pemerintah non Bank | Government loan and Non-bank Government Financial Institution	7.204,28	6.358,05	Persentase terhadap total liabilitas | Percentage to total liabilities	1,13	0,97
Utang Sewa Pembiayaan | Lease Liabilities	86,47	0	Persentase terhadap total liabilitas | Percentage to total liabilities	0,02	0,00
Utang bank | Bank loans	71.586,69	79.344,09	Persentase terhadap total liabilitas | Percentage to total liabilities	12,71	12,13
Utang Pihak Berelasi | Payable to Related Parties	1,00	0,09	Persentase terhadap total liabilitas | Percentage to total liabilities	0,00	0,00
Utang usaha | Account payable	9.044,53	11.814,74	Persentase terhadap total liabilitas | Percentage to total liabilities	1,61	1,81
Biaya masih harus dibayar | Accrued expenses	932,24	857,11	Persentase terhadap total liabilitas | Percentage to total liabilities	0,16	0,13
Total Terhadap Liabilitas | Total to Liabilities	127.490,76	136.351,62	Persen terhadap Liabilitas | Percent to Liabilities	22,50	20,85
Penjualan tenaga listrik - BUMN | Sales of Electricity - SOEs	5.505,80	5.721,52	Persentase terhadap total penjualan tenaga listrik | Percentage to total sales of electricity	2,09	2,07

Jenis transaksi Type of transaction	Nilai transaksi (Rp miliar) Transaction value (Rp billion)		Keterangan Description	Persentase Percentage (%)	
	2018	2019		2018	2019
Subsidi Listrik Pemerintah | Governmentís Electricity Subsidy	48.101,75	51.711,77	Persentase terhadap total subsidi | Percentage to total subsidy	100	100
Beban bahan bakar dan pelumas | Fuel and lubricants expenses	57.393,77	55.362,69	Persentase terhadap total beban | Percentage to total expenses	33,61	40,68
Pembelian Tenaga Listrik | Purchase of Electricity	13.318,23	13.228,45	Persentase terhadap total beban | Percentage to total expenses	15,81	15,83
Beban pemeliharaan | Maintenance Expenses	225,22	223,61	Persentase terhadap total beban | Percentage to total expenses	1,09	1,00
Beban Usaha lain-lain | Other Operating Expenses	283,61	341,44	Persentase terhadap total beban | Percentage to total expenses	3,57	3,96
Beban Keuangan | Financial Cost	5.544,07	6.662,23	Persentase terhadap total beban | Percentage to total expenses	25,64	27,06

Kebiijakan Perusahaan terkait dengan Mekanisme *Review* atas Transaksi

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas setiap keputusan serta meningkatkan transparansi dan akurasi pencatatan transaksi bisnis, Perusahaan mengembangkan sistem pengendalian internal dengan menggunakan pendekatan COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission*), yang merupakan organisasi internasional yang menyediakan kerangka dan pedoman terkait manajemen risiko pengendalian internal dan pencegahan *fraud*. COSO mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang dirancang manajemen perusahaan untuk memberikan keyakinan yang memadai' (*reasonable assurance*) agar dapat mencapai tujuan organisasi yang dibagi dalam 3 kategori, yaitu:

1. Efektivitas dan efisiensi operasi (*effective and efficient operations*);
2. Pelaporan keuangan yang andal (*reliable financial reporting*); dan
3. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan (*compliance with applicable laws and regulations*).

Perusahaan mengadopsi standar COSO pada ICoFR (Internal Control over Financial Reporting). Penerapan ICoFR bertujuan untuk memenuhi kriteria COSO tentang pelaporan keuangan yang andal. Oleh karena itu, pengendalian internal atas pelaporan keuangan (ICoFR) didefinisikan sebagai suatu proses yang dirancang dan

The Company's Policies Related to Transaction Review Mechanism

In order to improve accountability of each decision as well as transparency and accuracy in recording business transactions, the Company developed internal control system with reference to COSO (Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commissions), which is an international organization that provides frameworks and guidelines for internal control risk management and fraud prevention. COSO defines internal control as a process designed by a company's management to provide reasonable assurance in order to achieve organizational goals divided into 3 categories, namely:

1. Effective and efficient operations;
2. Reliable financial reporting; and
3. Compliance with applicable laws and regulations.

The Company adopts COSO standards on ICoFR (Internal Control over Financial Reporting). ICOFR implementation aims to meet COSO criteria of reliable financial reporting. Therefore, ICoFR is defined as a process that is designed and

dilaksanakan oleh manajemen Perusahaan untuk memberikan keyakinan yang memadai berkaitan dengan keandalan laporan keuangan.

"Keandalan" dalam konteks ICoFR merupakan suatu kondisi laporan keuangan yang bebas dari salah saji yang material. Keandalan laporan keuangan diperoleh dari kelengkapan dan akurasi pencatatan transaksi, pengklasifikasian dan periode pencatatan yang tepat, serta seluruh aspek lainnya dari pengendalian pelaporan keuangan yang secara tradisional telah dilaksanakan. Penerapan ICoFR di PLN diharapkan tidak hanya membantu Perusahaan dalam mencapai keandalan laporan keuangan, tetapi untuk membuktikan bahwa proses bisnis sudah dijalankan dengan efektif.

Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Sebagai entitas yang bergerak dalam pelayanan ketenagalistrikan, PT PLN (Persero) berusaha dengan sekuat tenaga menyesuaikan standar akuntansi keuangan yang dipakai dalam penyusunan laporan keuangan mengikuti Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan International Financial Report Standard (IFRS).

Tuntutan investor dan stakeholder lainnya terhadap suatu perusahaan modern terutama kepada entitas yang sudah listing di Pasar Modal adalah agar perusahaan mengikuti ketentuan standar pelaporan keuangan internasional dengan menerapkan IFRS ataupun Standar Akuntansi Keuangan yang telah konvergen dengan IFRS dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan penerapan SAK yang dikenal secara internasional, guna meningkatkan arus investasi global melalui transparansi, menurunkan biaya modal dengan membuka peluang fund raising melalui pasar modal secara global, menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan, mutu dari laporan keuangan yang dihasilkan memiliki kredibilitas tinggi dan pengungkapan yang lebih luas, informasi keuangan yang relevan dan akurat serta dapat diperbandingkan secara internasional.

implemented by the Company's management to provide reasonable assurance regarding reliability of financial statements.

"Reliability," in terms of ICoFR, is a condition of financial statements that is free of material misstatements. The reliability of financial statements is derived from completeness and accuracy of transactions recording, classification and relevant recording period, as well as all other aspects of traditional and operable financial reporting controls. Hence, ICoFR implementation in PLN is expected not only to assist the Company in achieving financial statements reliability, but also to help provide evidence that the business process runs effectively.

Compliance with Regulations and Related Condition

As an entity engaged in electricity services, PT PLN (Persero) is trying hard to adjust financial accounting standards used in the preparation of financial reports following the Financial Accounting Standards issued by the IAI Financial Accounting Standards Board, Financial Services Authority Regulations (OJK) and International Financial Report Standard (IFRS).

The demands of investors and other stakeholders for a modern company, especially for entities that have been listed on the Capital Market, are for companies to comply with international financial reporting standards by applying IFRS or Financial Accounting Standards that have converged with IFRS in order to facilitate understanding of financial statements with the application of SAK internationally known, in order to increase global investment flows through transparency, reduce capital costs by opening up opportunities for raising funds through the global capital market, creating efficiency in preparing financial reports, the quality of the resulting financial statements has high credibility and wider disclosure, financial information relevant and accurate and can be compared internationally.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melakukan konvergensi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dengan IFRS. Sasaran Konvergensi IFRS adalah merevisi PSAK agar secara material sesuai dengan IFRS, Konvergensi PSAK terhadap IFRS di Indonesia dilakukan secara bertahap, sehingga PSAK yang berlaku saat ini juga mengalami beberapa kali revisi agar sesuai dengan IFRS terkini.

PT PLN (Persero) sebagai entitas yang sudah listing di Pasar Modal domestik maupun internasional, wajib mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia (PSAK) yang berbasis pada IFRS dan Peraturan OJK yang berlaku. Standar akuntansi keuangan yang digunakan oleh PT PLN (Perseo) dituangkan dalam bentuk Kebijakan Akuntansi. Walaupun dalam praktik penyusunan laporan keuangan telah mengadopsi PSAK yang berlaku pada saat periode pelaporan, pemutakhiran Kebijakan Akuntansi PT PLN (Persero) akan selalu dilakukan dengan berpedoman pada PSAK terkini dan peraturan-peraturan terbaru sebagai pedoman tertulis kepada para pelaku dan pelaksana penyusunan Laporan Keuangan di lingkungan PT PLN (Persero).

The Indonesian Institute of Accountants (IAI) converged the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) with IFRS. The goal of IFRS Convergence is to revise PSAK so that it is materially in accordance with IFRS, the PSAK Convergence of IFRS in Indonesia is carried out in stages, so that the current PSAK has also been revised several times to conform to the current IFRS.

PT PLN (Persero) as an entity that has been listed on the domestic and international capital markets, must follow the applicable financial accounting standards in Indonesia (PSAK) based on IFRS and OJK regulations in force. Financial accounting standards used by PT PLN (Perseo) are outlined in the form of Accounting Policies. Although in practice the preparation of financial statements has adopted the SFAS in force during the reporting period, updating the Accounting Policy of PT PLN (Persero) will always be carried out based on the latest PSAK and the latest regulations as written guidelines to the actors and executors of the preparation of Financial Statements in the environment PT PLN (Persero).

PERUBAHAN PERATURAN

Beberapa peraturan baru yang berpengaruh terhadap operasional PLN di tahun 2019 adalah:

CHANGES IN REGULATIONS

A number of new regulations that affected PLN's operations in 2019 were:

No.	Perubahan Peraturan Regulation Changes	Dampak Terhadap PLN Impact on PLN
1	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("Permen ESDM") Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah untuk Penyaluran Tenaga Listrik yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Februari 2019. Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources ("Permen ESDM") No. 2 of 2019 concerning Amendment to Permen ESDM No. 18 of 2015 concerning Free Space and Minimum Clearance on High Voltage Transmission Line, Extra High Voltage Transmission Line, and High Voltage Direct Current for Power Distribution enacted in Jakarta on February 7, 2019	Permen ESDM tersebut mengatur ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dari sumbu menara/tiang pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS merupakan batasan yang wajib dipenuhi oleh pemegang IUPTL dan pemegang IO dalam: a. Pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan SUTT, SUTET, dan SUTTAS untuk memenuhi keselamatan ketenagalistrikan; dan b. Penentuan objek kompensasi di bawah ruang bebas SUTT, SUTET, dan SUTTAS. The Permen ESDM regulates free space, minimum vertical clearance from conductor and minimum horizontal clearance from tower/pole axes on SUTT, SUTET and SUTTAS which must be met by IUPTL holders and IO holders in: a. Construction, operations and maintenance of SUTT, SUTET and SUTTAS to meet power safety; and b. Determination of compensation objects under free spaces of SUTT, SUTET and SUTTAS.

No.	Perubahan Peraturan Regulation Changes	Dampak Terhadap PLN Impact on PLN
2	Kepmen ESDM ("Kepmen ESDM") Nomor 55 Tahun 2019 tanggal 29 Maret 2019 Tentang Besaran Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2018. Decision of the Minister of ESDM No. 55 of 2019 dated Maret 29, 2019 concerning The Amount of Cost of Electricity Supplies of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)'s Power Plants in 2018.	Kepmen ESDM tersebut mengatur besaran Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Pembangkitan PLN yaitu: 1. Besaran BPP Pembangkitan PLN tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri tersebut; 2. Besaran BPP Pembangkitan PLN tahun 2018 digunakan sebagai acuan pembelian tenaga listrik oleh PLN; 3. Besaran BPP Pembangkitan PLN tahun 2018 berlaku untuk tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020, dan dalam hal sampai dengan akhir jangka waktu berakhirnya belum terdapat penetapan besaran BPP Pembangkitan terbaru, maka besaran BPP Pembangkitan PLN tahun 2018 tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya besaran BPP Pembangkitan terbaru; 4. Dalam hal terdapat lokasi tertentu yang belum terlistriki oleh PLN dan belum terdapat penetapan besaran BPP Pembangkitan, maka besaran BPP Pembangkitan ditetapkan sama dengan besaran BPP Pembangkitan tertinggi dalam BPP Pembangkitan PLN tahun 2018; 5. Dalam hal terdapat lokasi tertentu yang sudah terlistriki oleh PLN dan belum terdapat penetapan besaran BPP Pembangkitan, maka besaran BPP Pembangkitan ditetapkan sama dengan besaran BPP Pembangkitan Sub Sistem Kecil Lainnya dalam Wilayah/Distribusi/ Sistem setempat dalam BPP Pembangkitan PLN tahun 2018. The decision regulates the amount of Cost of Electricity Supplies (BPP) of PLN's Power Plants as follows: 1. Amount of BPP of Power Plants in 2018 as stated in the Attachment to the Decision; 2. Amount of BPP of Power Plants in 2018 used as a reference for PLN's purchased electricity; 3. Amount of BPP of PLN's power plants in 2018 was valid from April 1, 2019 until March 31, 2020, and in the event that until the end of the term there is no decision on the adjusted amount of BPP of power plants, the amount of BPP of PLN's power plants in 2018 will remain in force until decision is made on the adjusted amount of BPP; 4. In the event that there are certain unelectrified locations and decision is not yet made on the amount of BPP of power plants, the amount of BPP of power plants is the same as the highest amount of BPP of PLN's power plants in 2018; 5. In the event that there are certain electrified locations and decision is not yet made on the amount of BPP of power plants, the amount of BPP of power plants is the same as the amount of BPP of Other Small Sub-System Power Plant in the Local Area/Distribution/System of PLN's power plants in 2018.
3	Peraturan Menteri Keuangan ("PMK") Nomor 18/PMK.02/2019 tanggal 25 Februari 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik. Regulation of the Minister of Finance ("PMK") No. 18/PMK.02/2019 dated February 25, 2019 concerning the Second Amendment to PMK No. 44/PMK.02/2017 concerning Procedures for Provision, Calculation, Payment and Accountability of Power Subsidies.	PMK tersebut mengatur tata cara penyediaan, penghitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban subsidi listrik yaitu: 1. Tata cara dan mekanisme usulan penetapan susut jaringan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; 2. Komponen Biaya Pokok Penyediaan tenaga listrik tercantum dalam Lampiran huruf A Peraturan Menteri Keuangan tersebut; 3. Komponen Biaya Pokok Penyediaan tenaga listrik tidak termasuk biaya yang tercantum dalam Lampiran huruf B Peraturan Menteri Keuangan tersebut. The PMK regulates procedures for provision, calculation, payment and accountability of power subsidies, as follows: 1. Procedure and mechanism for proposed determination of network losses according to stipulations in the laws and regulations issued by the ministry that carries out government affairs in the field of energy and mineral resources; 2. Components of Cost of Electricity Supplies are listed in Attachment letter A of the Regulation of the PMK; 3. Components of Cost of Electricity Supplies do not include the costs listed in Appendix letter B of the PMK.

No.	Perubahan Peraturan Regulation Changes	Dampak Terhadap PLN Impact on PLN
4	Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 8 Oktober 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga. Permen ESDM No. 17 of 2019 dated October 8, 2019 concerning the Second Amendment to Permen ESDM No. 29 of 2016 concerning Mechanism of Electricity Tariff Subsidies for Households.	Permen ESDM tersebut mengatur mekanisme pemberian subsidi tarif tenaga listrik untuk rumah tangga, yaitu: 1. Konsumen rumah tangga daya 900 VA yang telah ditetapkan sebagai penerima subsidi tarif tenaga listrik di kemudian hari tidak masuk dalam Data Terpadu, konsumen tetap diberikan subsidi tarif tenaga listrik sampai dengan dikeluarkan dari data penerima subsidi tarif tenaga listrik. 2. Rumah tangga miskin dan tidak mampu yang belum menerima subsidi tarif tenaga listrik dapat menyampaikan pengaduan melalui: a. Kantor desa/kantor kelurahan; atau b. Aplikasi mobile 3. PLN wajib merestitusi selisih pembayaran tagihan tarif tenaga listrik kepada konsumen berdasarkan basil pencocokan perubahan Data Terpadu atau hasil verifikasi pengaduan. The Permen ESDM regulates mechanism of electricity tariff subsidies for households, as follows: 1. 900 VA households that are listed as recipients of electricity tariff subsidies but later are not be included in the Integrated Data, they will still receive electricity tariff subsidies until they are excluded from the list of recipients of electricity tariff subsidies. 2. Underprivileged households that have not received electricity tariff subsidies can submit their complaints through: a. Village office; or b. Mobile application 3. PLN is obliged to refund difference in the payment of electric tariff bills to customers based on results of the matching of Integrated Data changes or complaint verification.
5	Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2019 tanggal 9 Oktober 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero).	Permen ESDM tersebut mengatur tingkat mutu pelayanan dan biaya yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik oleh PLN, yaitu: 1. PLN wajib memberikan kompensasi kepada konsumen dalam hal realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik di atas besaran yang ditetapkan untuk indikator mutu pelayanan, yang diberikan dengan ketentuan: a. 50% dari biaya beban atau rekening minimum apabila lama gangguan sampai dengan 2 jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik; b. 75% dari biaya beban atau rekening minimum apabila lama gangguan lebih dari 2 jam sampai dengan 4 jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik; c. 100% dari biaya beban atau rekening minimum apabila lama gangguan lebih dari 4 jam sampai dengan 8 jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik; d. 200% dari biaya beban atau rekening minimum apabila lama gangguan lebih dari 8 jam sampai dengan 16 jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik; e. 300% dari biaya beban atau rekening minimum apabila lama gangguan lebih dari 16 jam sampai dengan 40 jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik; atau f. 500% dari biaya beban atau rekening minimum apabila lama gangguan lebih dari 40 jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik. 2. PLN dibebaskan dari kewajiban pemberian kompensasi kepada konsumen dalam hal terjadi sebab kahar, yakni sebab di luar kemampuan kendali PLN meliputi kekacauan umum, huruhara, sabotase, kerusuhan, demonstrasi dengan kekerasan, pemogokan, kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, akibat kecelakaan, bencana alam lainnya, atau perintah instansi yang berwenang.

No.	Perubahan Peraturan Regulation Changes	Dampak Terhadap PLN Impact on PLN
	Permen ESDM No. 18 of 2019 dated October 9, 2019 concerning Amendments to Permen ESDM No. 27 of 2017 concerning Service Level and Costs Related to Power Distribution by PT PLN (Persero).	The Permen ESDM regulates service level and costs related to power distribution by PLN, as follows: 1. PLN is obliged to provide compensation to customers should realization of power service level be above the service level indicator, with the following conditions: a. 50% of the minimum load or account for outage period up to 2 hours above power service level; b. 75% of the minimum load or account for outage period between 2 and 4 hours above power service level; c. 100% of the minimum load or account for outage period between 4 hours and 8 hours above power service level; d. 200% of the minimum load or account for outage period between 8 and 16 hours above power service level; e. 300% of the minimum load or account for outage period between 16 and 40 hours above power service level; or f. 500% of the minimum load or account for outage period more than 40 hours above power service level. 2. PLN is exempt from the obligation to provide compensation to customers in the event of force majeure, which is beyond PLN's ability to control, such as chaos, riots, sabotage, violent demonstrations, strikes, fires, floods, landslides, earthquakes, accidents, other natural disaster, or order from the authorized agency.
6	Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2019 tanggal 10 Oktober 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan oleh PT PLN (Persero).	Permen ESDM tersebut mengatur tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PLN, yaitu: 1. Penyesuaian tarif tenaga listrik (*tariff adjustment*) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan apabila terjadi perubahan, baik peningkatan maupun penurunan salah satu dan/atau beberapa faktor yang dapat mempengaruhi biaya pokok penyediaan tenaga listrik, yaitu: a. nilai tukar mata uang Dollar Amerika terhadap mata uang Rupiah (kurs); b. Indonesian Crude Price (ICP); c. inflasi; dan/atau d. harga patokan batu bara. 2. Penyesuaian tarif tenaga listrik (*tariff adjustment*) oleh Direksi PLN ditetapkan setelah mendapat persetujuan Menteri. 3. Permohonan persetujuan penyesuaian tarif tenaga listrik (tariff adjustment) disampaikan paling lambat 14 hari kalender sebelum penyesuaian tarif tenaga listrik (*tariff adjustment*) diberlakukan.
	Permen ESDM No. 19 of 2019 dated October 10, 2019 concerning the Third Amendment to Permen ESDM No. 28 of 2016 concerning Electricity Tariffs Imposed by PT PLN (Persero).	The Permen ESDM regulates electricity tariff imposed by PLN, as follows: 1. Electricity tariffs are adjusted every 3 (three) months if there is a change, either an increase or decrease in one and/or several factors that can affect cost of electricity supplies, as follows: a. exchange rate of USD against Rupiah; b. Indonesian Crude Price (ICP); c. inflation; and/or d. benchmark coal prices. 2. Electricity tariffs are adjusted by PLN's Board of Directors upon obtainment of approval from the Minister. 3. Request for approval of electricity tariff adjustments is submitted no later than 14 calendar days before the electricity tariff adjustments are applied.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") Baru dan Revisi, serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019

Pengesahan amandemen dan penyesuaian atas PSAK dan ISAK yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI"), berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019, adalah sebagai berikut:

- PSAK 22 (Penyesuaian 2018): Kombinasi Bisnis
- PSAK 24 (Amandemen 2018): Imbalan Kerja tentang Amandemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program
- PSAK 26 (Penyesuaian 2018): Biaya Pinjaman
- PSAK 46 (Penyesuaian 2018): Pajak Penghasilan
- PSAK 66 (Penyesuaian 2018): Pengaturan Bersama
- ISAK 33: Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka.
- ISAK 34: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") Baru dan Revisi, serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020 dan setelahnya

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 15 (Amandemen 2017): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES APPLIED IN THE CURRENT FISCAL YEAR

New and Revised Statements of Financial Accounting Standard ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standard ("ISFAS") effective for the year beginning on or after January 1, 2019

Ratification of amendments and improvements of SFAS and ISFAS issued by the Financial Accounting Standard Board of the Indonesian Institute of Accounting ("DSAK-IAI"), effective for the year beginning on January 1, 2019, are as follows:

- SFAS 22 (Improvement 2018): Business Combination
- FAS 24 (Amendment 2018): Employee Benefit regarding Plan Amendment, Curtailment or Settlement
- SFAS 26 (Improvement 2018): Borrowing Cost
- SFAS 46 (Improvement 2018): Income Taxes
- FAS 66 (Improvement 2018): Joint Arrangement
- ISFAS 33: Foreign Currency Transactions and Advance Consideration
- ISFAS 34: Uncertainty over Income Tax Treatments

The implementation of the above standards had no significant effect on the amounts reported for the current period or prior financial years.

New and Revised Statements of Financial Accounting Standard ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standard ("ISFAS") effective for the year beginning on or after January 1, 2020 and onwards

Standards and amendments to standards effective for periods beginning on or after January 1, 2020, with early adoption is permitted are:

- SFAS 15 (Amendment 2017): Investments in Associates and Joint Ventures: Long Term Interest in Associate and Joint Ventures

- PSAK 62 (Amandemen 2017): Kontrak Asuransi - Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi
- PSAK 71: Instrumen Keuangan
- PSAK 71 (Amandemen 2018): Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif
- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
- PSAK 73: Sewa
- ISAK 35: "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba"
- PSAK 1 (Amendemen 2019): "Penyajian Laporan Keuangan tentang Judul Laporan Keuangan"
- PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019): "Penyajian Laporan Keuangan"
- PPSAK 13: "Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba"
- PSAK 25 (Amandemen 2019): "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan"
- PSAK 102 (Revisi 2019): "Akuntansi Murabahah"
- PSAK 101: "Pengakuan Pendapatan Murabahah Tanggung Tanpa Risiko Signifikan terkait Kepemilikan Persediaan"
- ISAK 102: "Penurunan Nilai Piutang Murabahah"

Standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 112: Akuntansi Wakaf
- PSAK 22 (Amandemen 2019): "Kombinasi bisnis tentang definisi bisnis"

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan dan entitas anak masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amandemen standar, dan interpretasi atas standar serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak.

- SFAS 62 (Amendment 2017): Insurance Contract - Applying SFAS 71: Financial Instruments with SFAS 62: Insurance Contracts
- SFAS 71: Financial Instruments
- SFAS 71 (Amendment 2018): Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation
- SFAS 72: Revenue from Contracts with Customers
- SFAS 73: Lease
- SFAS 35: "Presentation of Non-profit oriented entity Financial Statements"
- SFAS 1 (Amendment 2019): "Presentation of Financial Statements regarding Title of Financial Statements"
- SFAS 1 (Improvement 2019): "Presentation of Financial Statements"
- RSFAS 13: "Revocation of SFAS 45: Nonprofit Entity Financial Reporting"
- SFAS 25 (Amandement 2019): "Accounting Polices, Changes in Accounting Estimatesand Errors"
- SFAS 102 (Amandement 2019): "Accounting for Murabahah"
- SFAS 101: "Revenue Recognition on Deffered Murabahah without Significant isk related to Inventories Ownership"
- SFAS 102: "Impairment of Murabahah Receivable"

Standard effective for periods beginning on or after January 1, 2021, with early adoption is permitted are:

- SFAS 112: Wakaf Accounting
- SFAS 22 (Amandement 2019): "Business combinations regarding difinition of business"

As of the authorization date of these consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries are still evaluating the potential impact of these new standards, amendments, and interpretations of standards to the Company and subsidiaries' consolidated financial statements.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Hal-Hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan pada Tahun Buku Terakhir

Di awal tahun 2019 PLN berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan listrik yang memadai dengan tarif yang terjangkau, yaitu dengan mengoptimalkan pemakaian listrik guna meningkatkan daya saing industri nasional untuk menunjang kemajuan perekonomian, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Adapun kontribusi yang diberikan Perusahaan melalui: 1) pemberlakuan tarif listrik yang kompetitif sebagai daya tarik untuk industri; 2) upaya Perusahaan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan; serta 3) dukungan infrastruktur kelistrikan.

Dengan adanya upaya yang telah dilakukan oleh Perusahaan, diharapkan sektor industri mengalami pertumbuhan yang nantinya akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Di tengah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, Perusahaan memiliki beberapa tantangan yang akan dihadapi sepanjang tahun 2019, antara lain:

1. Pembangunan kapasitas sarana ketenagalistrikan;
2. Pengamanan pasokan energi;
3. Efisiensi operasi;
4. Kemampuan keuangan untuk mendukung kebutuhan investasi tenaga listrik;
5. Kesiapan sumber daya manusia dan organisasi;
6. Regulasi dan pengelolaan pemangku kepentingan, antara lain meliputi:
   - Roadmap kebijakan energi nasional;
   - Dampak implementasi Perpres No. 14/2017 (Perubahan atas Perpres No. 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan);
   - Perubahan regulasi terkait energi baru terbarukan;
   - Kebijakan ketenagalistrikan yang meningkatkan BPP (berkaitan dengan harga EBT, *pass through* energi primer, kontrak TOP dengan IPP, penugasan pemerintah, dan lain-lain).

GOING CONCERN

Potential Matters that had Significant Effect on the Company's Going Concern in the Previous Financial Year

At the beginning of 2019, PLN committed to meeting adequate electricity needs with affordable tariffs, by optimizing the use of electricity to increase competitiveness of the national industries in order to support economic development and ultimately to improve the welfare of the Indonesian people. The contributions made by the Company included: 1) enactment of competitive electricity tariffs to attract the industries; 2) customer services improvement; and 3) electricity infrastructure support.

With the efforts made by the Company, it is expected that the industrial sectors will grow and create jobs for the Indonesian people, and ultimately improve the welfare of the Indonesian people.

In the midst of efforts to improve the welfare of the Indonesian people, the Company faced several challenges during 2019, including:

1. Capacity building of electricity facilities;
2. Safeguarding energy supplies;
3. Operating efficiency;
4. Financial capability to support electricity investment needs;
5. Readiness of human resources and organizations;
6. Regulation and management of stakeholders, including but not limited to:
   - National energy policy roadmap;
   - Impact of implementation of Perpres No. 14/2017 (Amendment to Perpres No. 4 of 2016 concerning Acceleration of Power Infrastructure Development);
   - Changes to regulations related to new renewable energy;
   - Electricity policies that increase BPP (related to EBT prices, primary energy pass-through, TOP contracts with IPP, government assignments and so forth).

PROFITABILITAS

Perusahaan membukukan pendapatan usaha tahun 2019 yang meningkat 4,8%. Di sisi lain, peningkatan bauran energi berhasil menekan biaya bahan bakar dan pelumas turun 0,86% dibandingkan tahun 2018. EBITDA yang merupakan salah satu ukuran kinerja operasi naik dari Rp68,22 triliun di tahun 2018 menjadi Rp81,66 triliun. Laba bersih Perusahaan mengalami penurunan sebesar 62,66% dari Rp11,58 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp4,32 triliun.

KONTRIBUSI KEPADA NEGARA

Pada tahun 2019 PLN memberikan kontribusi keuangan berupa pembayaran pajak sebesar Rp34,64 triliun dan dividen sebesar Rp4 triliun kepada kas negara.

PROFITABILITY

The Company's operating revenues in 2019 increased by 4.8%. On the other hand, an increase in the energy mix managed to reduce fuel and lubricant expenses by 0.86% compared to 2018. EBITDA, which is a measurement of operating performance, grew from Rp68.22 trillion in 2018 to Rp81.66 trillion. The Company's net income decreased by 62.66% from Rp11.58 trillion in 2018 to Rp4.32 trillion.

CONTRIBUTION TO THE COUNTRY

In 2019, PLN made financial contributions in the form of tax payments of Rp34.64 trillion and dividends of Rp4 trillion to the state treasury.

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

275 **PERNYATAAN TATA KELOLA**
Governance Statement

292 **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**
General Meeting of Shareholders

306 **DEWAN KOMISARIS**
Board of Commissioners

338 **ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS**
Supporting Organs of Board of Commissioners

366 **DIREKSI**
Board of Directors

396 **KOMITE DI BAWAH DIREKSI**
Committees Under Board of Directors

398 **CORPORATE SECRETARY**
Corporate Secretary

402 **UNIT AUDIT INTERNAL (SATUAN PENGAWASAN INTERN)**
Internal Audit Unit

410 **AKUNTAN PUBLIK**
Public Accountant

411 **MANAJEMEN RISIKO**
Risk Management

418 **KEPATUHAN**
Compliance

420 **SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL**
Internal Control System

423 **TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI**
Information Technology Governance

428 **PERMASALAHAN HUKUM**
Legal Cases

432 **AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN**
Access to The Company's Information Data

435 **STANDAR ETIKA PERUSAHAAN**
Code of Conduct

439 **PENGADAAN BARANG DAN JASA**
Procurement of Goods and Services

441 **PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN (ESOP/MSOP)**
Employee/Management Stock Ownership Program (ESOP/MSOP)

442 **SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)**
Whistleblowing System

446 **PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)**
Reports on Assets of State Officials (LHKPN) Management

448 **KEBIJAKAN ANTI FRAUD**
Anti Fraud Policy

449 **PENCEGAHAN GRATIFIKASI DAN Konflik KEPENTINGAN**
Prevention of Gratuity and Conflict of Interest

451 **PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA**
Corporate Governance Implementation of Public Companies

PROFILE

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Guna memperkuat implementasi GCG dan memperjelas panduan bagi manajemen dan pegawai PLN bekerja di dalam koridor GCG, selama 2019 Perusahaan mengeluarkan berbagai kebijakan dan pedoman baru maupun penyempurnaan dokumen yang sudah ada.

To strengthen GCG implementation and clarify guidelines for PLN management and employees working within the GCG corridor, during 2019 the Company issued a variety of new policies and guidelines as well as refinement of existing documents.

PERNYATAAN TATA KELOLA

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* ("GCG") merupakan salah satu prasyarat utama keberlanjutan Perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip GCG yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) yang tercermin melalui praktik GCG diharapkan dapat menghasilkan kinerja unggul, berintegritas dan berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat dan nilai tambah yang optimal bagi pemegang saham, pelanggan, pegawai, mitra kerja, dan pemangku kepentingan lainnya.

Untuk memperkuat implementasi GCG, sepanjang tahun 2019 Perusahaan mengeluarkan berbagai kebijakan dan melaksanakan kegiatan untuk memperkuat organisasi, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, dan menyempurnakan perangkat pengendalian internal sebagaimana digambarkan berikut ini.

GOVERNANCE STATEMENT

Good corporate governance ("GCG") implementation is one of the main prerequisites for the Company's sustainability. Implementation of GCG principles, namely transparency, accountability, responsibility, independence and fairness, as reflected in GCG mechanisms, is expected to generate excellent performance, to ensure integrity and sustainability that will provide optimal benefits and value added to shareholder, customers, employees, business partners and other stakeholders.

To encourage GCG implementation, during 2019, the Company issued a wide range of policies and carried out activities to strengthen the organization, to improve services to customers and to enhance internal control tools as illustrated below.

Kegiatan **GCG PLN** selama tahun **2019**

PLN's GCG Activities in 2019

1. **Penilaian GCG periode tahun 2018 oleh BPKP**
   GCG Assessment for 2018 implementation by BPKP
2. **Sosialisasi Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis serta peluncuran Tata Nilai PLN dengan tagline "PLN Terbaik."**
   Socialization of Code of Business Conduct and Ethics and launching PLN Values with the tagline "PLN Terbaik."
3. **Pembaharuan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa dengan Peraturan Direksi (Perdir) No. 0164.P/DIR/2019**
   Updating Procurement Guidelines with Board of Directors Regulation No. 0164.P/DIR/2019
4. **Pembaharuan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dengan Perdir No. 0117.P/DIR/2019 dan penetapan Perdir No. 0119.P/DIR/2019 tentang Mekanisme Penyusunan dan Pemantauan Kajian Risiko untuk Kegiatan dan Rancangan Keputusan.**
   Updating Implementation of Risk Management Guidelines with Board of Directors Regulation No. 0117.P/DIR/2019 and establishment of Board of Directors Regulation No. 0119.P/DIR/2019 Regarding Mechanisms for Preparing and Monitoring of Risk Evaluation for Activities and Decision Draft.
5. **Penetapan Perdir No.0196.P/DIR/2019 tentang Penerapan *Governance, Risk Management and Compliance* (GRC).**
   Establishment of Board of Directors Regulation No. 0196.P/DIR/2019 regarding Implementation of Governance, Risk Management and Compliance (GRC).
6. **Penetapan Perdir No. 0121.P/DIR/2019 tentang Kebijakan *Anti Fraud* di Lingkungan PT PLN (Persero).**
   Establishment of Board of Directors Regulation No. 0121.P/DIR/2019 regarding Anti Fraud Policy in PT PLN (Persero).
7. **Penetapan Pedoman Direksi No. 0122.P/DIR/2019 mengenai Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan PT PLN (Persero).**
8. **Pelaksanaan Gap Analysis SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan.**
   Implementation of SNI ISO 37001: 2016 Gap Analysis on the Anti-Bribery Management System.
9. **Perubahan atas Perdir No. 0051.P/DIR/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero).**
   Amendment to Board of Directors Regulation No. 0051.P/DIR/2018 concerning the Organization and Work Procedure of PT PLN (Persero).
10. **Perubahan Kedua atas Perdir No 0051.P/DIR/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero).**
    Second Amendment to Board of Directors Regulation No 0051.P/DIR/2018 regarding Organization and Work Procedure of PT PLN (Persero).

Milestone GCG

GCG Milestones

2016

- **Pemutakhiran Pedoman GCG dan *Board Manual***
- **Pemutakhiran kebijakan *Whistleblowing System***

- Updating GCG Guidelines and Board Manual
- Updating Whistleblowing System policy

2015

Penguatan struktur CSR
Strengthening CSR structure

2014

- **Peluncuran Program PLN Bersih (Gratifikasi, LHKPN, *Complaint Handling System*)**
- **Pembentukan Change Agent PLN Bersih**

- Launch of "PLN Bersih" Program (Gratuity, LHKPN, Complaint Handling System)
- Establishment of "PLN Bersih" Change Agent

2017

- **Pemutakhiran Internal Audit Charter**
- **Pemutakhiran *Code of Ethic* dan *Code of Conduct***
- **Pemutakhiran Pedoman Gratifikasi dan LHKPN**

- Updating Internal Audit Charter
- Updating Code of Ethics and Code of Conduct
- Updating Gratuity and LHKPN Guidelines

2018

- **Pemutakhiran komitmen Direksi dan Dewan Komisaris atas Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis Perusahaan**
- **Pemanfaatan IT untuk memperluas komitmen terhadap Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis**
- **Penguatan relasi dengan *stakeholders* lewat Edaran Direksi PT PLN (Persero) No. 8 E/DIR/2018 Tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola *Stakeholders* (Pemangku Kepentingan) di Lingkungan PT PLN (Persero)**
- **Pembentukan Divisi Compliance**
- **Pembentukan Divisi Change Management Office**
- **Pembentukan Departemen Bisnis dan Pelayanan Pelanggan**

- Updating commitment of Board of Directors and Board of Commissioners to the Company Code of Conduct and Business Ethics
- Use of IT to expand commitment to Code of Conduct and Business Ethics
- Strengthening relations with stakeholders through the Board of Directors Circular Letter No. 8E/DIR/2018 concerning Technical Guidelines for Stakeholder Governance in the PT PLN (Persero) envirentment
- Establishment of Compliance DIvision
- Establishment of Change Management Office Division
- Establishment of Business and Customer Service Department

2002

Pengukuran/analisis *gap* implementasi GCG

Measurement/analysis of GCG implementation

2003

- **Deklarasi Komitmen GCG**
- **Peluncuran Pedoman GCG**

- Declaration of GCG Commitment
- Launch of GCG Guidelines

2004

- **Peluncuran Pedoman Perilaku**
- **Peluncuran Piagam *Internal Audit Charter***
- **Peluncuran Pedoman Implementasi CSR**

- Launch of Code of Conduct
- Lauch of Internal Audit Charter
- Establishment of the Risk and Compliance Management Division
- Launch of CSR Implementation Guidelines

2012

- **Peluncuran Pedoman Gratifikasi**
- **Peluncuran Kebijakan Whistleblowing System (WBS)**
- **Pemutakhiran Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa**

- Launch of Gratuity Guidelines
- Launch of Whistleblowing System (WBS) Policy
- Updating Guidelines for Procurement of Goods and Services

2013

- **Kerja sama dengan Transparansi International Indonesia (TII) terkait Program PLN Berintegritas**
- **Implementasi sistem pengendalian internal berbasis COSO-IcoFR**

- Collaboration with Transparansi International Indonesia (TII) regarding the PLN Integrity Program
- Implementation of COSO-IcoFR-based internal control systemr Procurement of Goods and Services

2019

- **Sosialisasi Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis**
- **Pembaruan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa dengan Perdir No. 0164.P/DIR/2019**
- **Pembaruan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dengan Perdir No. 0117.P/DIR/2019 dan penetapan Perdir No. 0119.P/DIR/2019 tentang Mekanisme Penyusunan dan Pemantauan Kajian Risiko untuk kegiatan dan Rancangan Keputusan**
- **Penetapan Perdir No. 0196.P/DIR/2019 tentang Penerapan Governance, Risk Management and Compliance (GRC)**
- **Penerbitan Perdir No. 0121.P/DIR/2019 tentang Kebijakan Anti Fraud di Lingkungan PT PLN (Persero)**
- **Penerbitan Pedoman Direksi No. 0122.P/DIR/2019 mengenai Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan PT PLN (Persero)**
- **Pelaksanaan *Gap Analysis* SNI ISO 37001: 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan**
- **Perubahan atas Perdir No 0051.P/DIR/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero)**
- **Perubahan Kedua atas Perdir No 0051.P/DIR/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero)**

- Socialization of Code of Conduct and Business Ethics
- Updating Procurement of Goods and Services Guidelines with Board of Directors Regulation No. 0164.P/DIR/2019
- Updating Implementation of Risk Management Guidelines with Board of Directors Regulation No. 0117.P/DIR/2019 and establishment of Board of Directors Regulation No. 0119.P/DIR/2019 regarding Mechanisms for Preparing and Monitoring Risk Assessments for activities and Decision Draft
- Establishment of Board of Directors Regulation No. 0196.P/DIR/2019 regarding Implementation of Governance, Risk Management and Compliance (GRC)
- Establishment of Board of Directors Regulation No. 0121.P/DIR/2019 regarding Anti Fraud Policy in PT PLN (Persero)
- Establishment of Board of Directors Guidelines No. 0122.P/DIR/2019 regarding Management of Conflicts of Interest in PT PLN (Persero)
- Implementation of SNI ISO 37001: 2016 Gap Analysis on the Anti-Bribery Management System
- Amendment to Board of Directors Regulation No. 0051.P/DIR/2018 concerning the Organization and Work Procedure of PT PLN (Persero)
- Second Amendment to Board of Directors Regulation No 0051.P/DIR/2018 regarding Organization and Work Procedure of PT PLN (Persero).

PERATURAN PERUSAHAAN

Hirarki peraturan Perusahaan di PLN digambarkan sebagai berikut:

CORPORATE'S REGULATIONS

The hierarchy of regulations at PLN is described as follows:

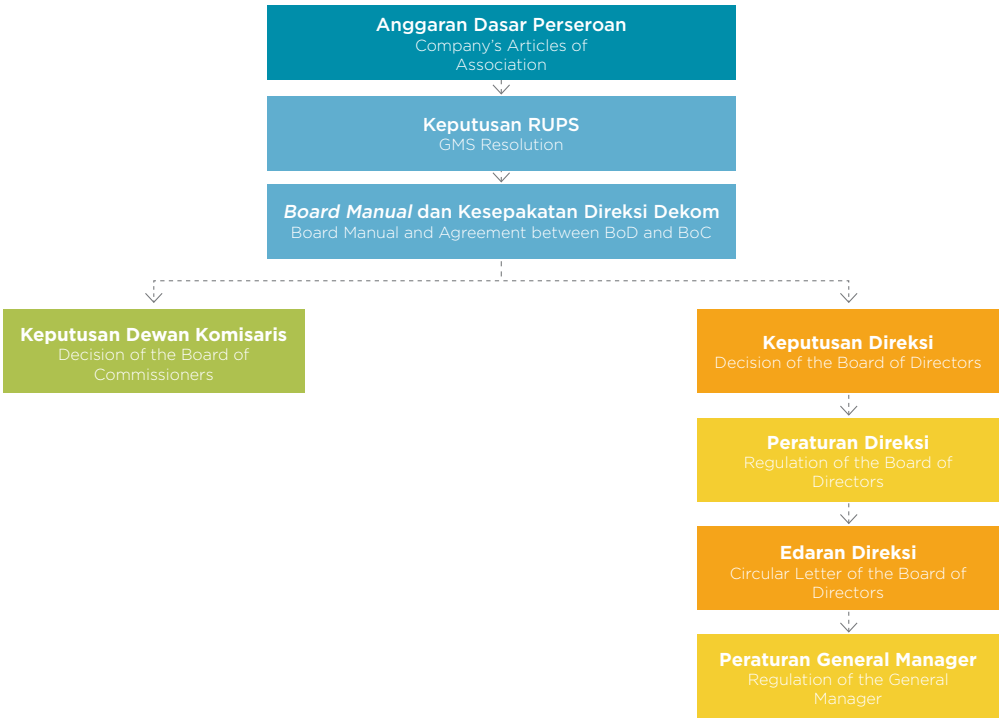

Sebagai wujud dari komitmen PLN untuk mengimplementasikan GCG secara penuh, Perusahaan telah memiliki pedoman GCG (GCG *Code*) serta berbagai kebijakan yang dimutakhirkan secara berkala untuk disesuaikan dengan praktik terbaik di lingkungan bisnis, kondisi dan perkembangan usaha Perusahaan serta perubahan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman dan kebijakan tersebut di antaranya adalah:

As a materialization of PLN's full commitment to GCG implementation, the Company established a GCG Codes and various policies that are updated regularly to be aligned with the best practices in the business environment, the condition and development of the Company's business and changes in prevailing laws and regulations. The guidelines and policies include:

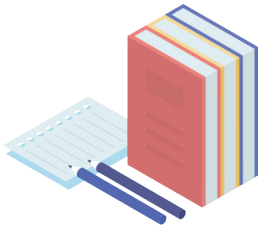

Pedoman GCG GCG Guidelines

Sebagai acuan bagi seluruh organ Perusahaan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing. Pedoman GCG difokuskan pada fungsi dan tanggung jawab organ Perusahaan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan GCG. Pedoman GCG ditinjau secara berkala sesuai kebutuhan Perusahaan dan telah diperbarui pada 28 Oktober 2016.

As a reference for all the Company's organs in carrying out their respective duties and obligations. GCG Guidelines are focused on the functions and responsibilities of the Company's organs, namely General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners and Board of Directors, as the frontliners of GCG implementation. GCG Guidelines are reviewed every three years and the latest update was on October 28, 2016.

Board Manual atau Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi
Board Manual of Board of Commissioners and Board of Directors

Sebagai panduan Dewan Komisaris dan Direksi menjadi panduan Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi Perusahaan. Board Manual yang dimiliki PLN saat ini terdiri dari Board Manual Direksi dan Dewan Komisaris (Buku 1) yang mengatur tata laksana hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi, Board Manual Direksi (Buku 2) yang mengatur tata laksana hubungan kerja di organ Direksi dan Board Manual Buku Dewan Komisaris (Buku 3) yang mengatur tata laksana kerja di organ Dewan Komisaris.

As a guideline for Board of Commissioners and Board of Directors in carrying out their respective duties to achieve the Company's vision and missions. PLN Board Manual currently consists of Board Manual of Board of Directors and Board of Commissioners (Book 1) which regulates the management of work relations between Board of Commissioners and Board of Directors, Board Manual of Board of Directors (Book 2) which regulates the management of work relations in Board of Directors and Board Manual of Board of Commissioners (Book 3) which regulates work procedures in Board of Commissioners' organs.

Piagam Pengawasan Intern Internal Audit Charter

sebagai pedoman tugas, tanggung jawab, kewenangan, dan independensi Satuan Pengawasan Intern (SPI) dalam melaksanakan kegiatan SPI. Piagam Pengawasan Intern tidak membatasi Auditor Internal untuk membuat pertimbangan profesional dan audit yang inovatif. Piagam telah diperbarui pada tahun 2019.

As guideline for duties, responsibilities, authorities and independence of the Internal Audit Unit (SPI) in carrying out its activities. The Internal Audit Charter does not limit the Internal Auditors in making professional considerations and innovative audits. The Charter was updated in 2019.

Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis Perusahaan Code of Conduct

Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis merupakan panduan bagi seluruh insan PLN untuk berperilaku sesuai dengan harapan Perusahaan, sehingga pada akhirnya akan tertanam dan menjadi perilaku khas yang membedakan PLN dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis PT PLN (Persero) telah dimutakhirkan pada tahun 2018. Sebagai upaya intenalisasi Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis kepada seluruh insan PLN dan anak perusahaan, Dewan Komisaris, Direksi dan pemimpin unit menandatangi pernyataan komitmen untuk melaksanakan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis. Penandatanganan komitmen ini dilakukan melalui media aplikasi KOMANDO. Aplikasi KOMANDO merupakan inovasi teknologi informasi di PLN yang memungkinkan proses internalisasi Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis dapat menjangkau seluruh insan PLN di seluruh Indonesia. Sosialisasi Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis yang baru secara nasional dilakukan pada tanggal 17 Agustus 2019 bertepatan dengan upacara Peringatan Hari Kemerdekaan RI. Pada acara tersebut PLN juga melakukan *Launching* Tata Nilai PLN dengan *tagline* "PLN Terbaik".

Code of Conduct is a guide for all PLN people to behave in accordance with the Company's expectations, so that it will eventually be embedded and become a unique behavior that distinguishes PLN from other companies. PT PLN (Persero)'s Code of Conduct was updated in 2018. As an effort to introduce the Code of Conduct to all personnel of PLN and subsidiaries, Board of Commissioners, Board of Directors and unit leaders signed a statement of commitment to implement the Code of Conduct. The signing of this commitment was carried out through KOMANDO application media. KOMANDO application is PLN's information technology innovation that enables internalization of the Code of Conduct to reach all PLN personnel throughout Indonesia. Socialization of the new Code of Conduct nationally was held on August 17, 2019 to coincide with commemoration of the Republic of Indonesia's Independence Day. At this event, PLN also launched PLN's belief with the tagline "PLN Terbaik".

Piagam Komite Dewan Komisaris
Board of Commissioners Committee Charter

Sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi organ-organ pendukung Dewan Komisaris yang terdiri dari Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*), Piagam Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee Charter*) dan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi (*Nomination and Remuneration Committee Charter*). Maksud dan tujuan dari penyusunan Piagam Komite Dewan Komisaris adalah sebagai pedoman agar pelaksanaan tugas Komite Dewan Komisaris dapat dilaksanakan secara efektif, transparan, kompeten, independen dan akuntabel sehingga diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

As guideline for the implementation of duties of supporting organs of Board of Commissioners consisting of Audit Committee Charter, Risk Management Committee Charter and Nomination and Remuneration Committee Charter. The purpose and objective of Board of Commissioners' Committee Charters are as a guideline for implementation of duties of Board of Commissioners' Committees to be carried out effectively, transparently, competently, independently and accountably so that their performances deemed proper by all interested parties.

Buku Pedoman Manajemen Risiko
Risk Management Guidelines

Sebagai upaya menyesuaikan perkembangan kompleksitas pengelolaan pengusahaan tenaga listrik di lingkungan internal maupun eksternal yang dihadapi Perusahaan dalam pencapaian sasarannya, maka PLN penyempurnakan penerapan manajemen risiko yang diatur dalam Keputusan Direksi Nomor: 537.K/DIR/2010 dengan menerbitkan Pedoman Umum Penerapan Manajemen Risiko No. 0117.P/DIR/2019 dan Perdir No. 0119.P/DIR/2019 tentang Mekanisme Penyusunan dan Pemantauan Kajian Risiko untuk Kegiatan dan Rancangan Keputusan di Lingkungan PT PLN (Persero) untuk memastikan kajian risiko untuk kegiatan dan rancangan keputusan telah dilakukan sesuai dengan kebijakan manajemen risiko. Selain itu, untuk melengkapi pedoman manajemen risiko tersebut, Perusahaan telah menerbitkan Petunjuk Teknis Kriteria dan Pelaksanaan Assessment Risk Maturity sebagai alat untuk mengukur tingkat kematangan implementasi pengelolaan risiko di Perusahaan.

As an effort to adjust the development of the complex management of electricity management in the internal and external environments faced by the Company in achieving its targets, PLN has perfected risk management implementation as stipulated in Decision of Board of Directors No. 537.K/DIR/2010 by issuing General Guidelines for Risk Management Implementation No. 0117.P/DIR/2019 and Regulation of Board of Directors No. 0119.P/DIR/2019 concerning Mechanism of Preparation and Monitoring of Risk Assessment for Activities and Draft Decisions within PT PLN (Persero) to ensure that risk assessments for activities and draft decisions are carried out in accordance with risk management policies. In addition, to complement the risk management guidelines, the Company issued Technical Guidelines on Criteria and Implementation of Risk Maturity Assessment as a tool to measure maturity level of risk management implementation in the Company.

Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa
Goods and Services Procurement Guidelines

Sebagai pedoman pengadaan barang dan jasa yang lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel, sesuai dengan praktik terbaik dalam proses pengadaan barang/jasa, serta memberikan solusi atas kendala-kendala yang terjadi di lapangan, maka Perusahaan melakukan penyempurnaan ketentuan pengadaan barang dan jasa dengan menerbitkan Perdir No. 0164.P/DIR/2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero). Peraturan Direksi ini juga sekaligus memuat petunjuk teknis pengadaan barang dan jasa di lingkungan PLN.

As guidelines for the procurement of goods and services that are more efficient, effective, transparent and accountable, in accordance with the best practices in the process of procurement of goods/services, as well as providing solutions to obstacles that occur in the field, the Company makes improvements to the provisions of procurement of goods and services by issuing Regulation of Board of Directors No. 0164.P/DIR/2019 concerning Guidelines for Procurement of Goods/Services of PT PLN (Persero). This Regulation of Board of Directors also includes technical instructions for procurement of goods and services within PLN's environment.

Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing System

Perusahaan telah menerapkan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) yang diatur dalam Surat Edaran Direksi Nomor: 21.E/DIR/2012 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) dan telah diperbarui melalui Surat Edaran Direksi Nomor: 0008.E/DIR/2016 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) tanggal 30 September 2016.

The Company stipulates whistleblowing system in Circular of Board of Directors No. 21.E/Dir/2012 concerning Whistleblowing System that was amended by Circular of Board of Directors No. 0008.E/DIR/2016 concerning Whistleblowing System dated September 30, 2016.

Kebijakan Pelaporan LHKPN
LHKPN Reporting Policy

Kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi para pejabat struktural di lingkungan PLN diatur dalam Peraturan Direksi Nomor: 0074.P/DIR/2017 tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan PT PLN (Persero).

Obligation to submit Reports on Assets of State Officials (LHKPN) for PLN's Officials Required is stipulated in Regulation of Board of Directors No. 0074.P/DIR/2017 concerning Guidelines for Reports on Assets of State Officials (LHKPN) in PT PLN (Persero).

Kebijakan Transaksi Keuangan Perusahaan (Kebijakan Transaksi Orang Dalam)
Financial Transaction Policy (Insider Transaction Policy)

Kebijakan ini diatur dalam Perdir No. 0054.K/DIR/2014 tentang Pedoman Transaksi Keuangan Antara PT PLN (Persero) dengan Mitra Kerja Guna Mendukung PLN Bersih. Kebijakan ini bertujuan untuk menghindarkan insan PLN dari segala bentuk penyimpangan praktik bisnis termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme.

This policy is stipulated in Regulation of Board of Directors No. 0054.K/DIR/2014 concerning Guidelines for Financial Transactions between PT PLN (Persero) and Business Partners to Support Clean PLN. This policy aims to protect PLN personnel from irregularities in business practices, including corruption, collusion and nepotism.

Kebijakan Pencegahan Gratifikasi dan Benturan Kepentingan
Prevention of Gratuities and Conflict of Interest Policy

Kebijakan pencegahan gratifikasi diatur dalam Perdir No. 0076.P/DIR/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di PLN. Kebijakan ini menjadi pedoman bagi insan PLN untuk mengambil sikap yang tegas terhadap gratifikasi untuk mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang bersih dan sehat serta bebas dari segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme. Perdir ini juga bertujuan memberikan pemahaman, arahan dan acuan bagi seluruh Insan PLN berkenaan dengan penerimaan, pemberian, dan permintaan gratifikasi di lingkungan PLN sehingga dapat mewujudkan praktis bisnis yang beretika dan mencegah timbulnya benturan kepentingan, kecurangan serta penyimpangan lainnya.

Selain itu, di tahun 2019 Perusahaan juga menerbitkan peraturan mengenai pengelolaan konflik kepentingan di Lingkungan PLN melalui Perdir No. 0122.P/DIR/2019.

Gratification prevention policy is stipulated in Regulation of Board of Directors No. 0076.P/DIR/2017 concerning Guidelines for Gratification Control in PLN. This policy is a guideline for PLN personnel to take a firm stance on gratification to realize a clean and sound management of the Company that is free from all forms of corruption, collusion and nepotism. This Regulation of Board of Directors also aims to provide understanding, direction and reference for all PLN Personnel regarding acceptance, giving, and requests for gratuities within PLN's environment so as to realize ethical business practices and to prevent conflict of interest, fraud and other irregularities.

In addition, in 2019 the Company also issued regulation regarding conflict of interest management in PLN's environment through Regulation of Board of Directors No. 0122.P/DIR/2019.

Pedoman Organisasi Organizational Guidelines

Pedoman tentang organisasi dan tata kerja diatur dalam Perdir No. 0051.P/DIR/2018 sebagai acuan re-organisasi Perusahaan yang bertujuan untuk menyesuaikan organisasi dengan kebutuhan dan tuntutan iklim bisnis yang dihadapi. Selain itu, Perusahaan juga diterbitkan Perdir No: 0049.P/DIR/2018 tentang Pedoman Penyebutan Organisasi Unit Induk, Pusat-Pusat, Unit Pelaksana, dan Unit Layanan di Lingkungan PT PLN (Persero), Perdir No. 0050.P/DIR/2018 tentang Pedoman Penyebutan Struktur Organisasi, Satuan Kerja Pada Struktur Organisasi Dan Jabatan Struktural di Lingkungan PT PLN (Persero), serta Perdir No. 0052.P/DIR/2018 tentang Kewenangan Penetapan Bidang Organisasi, serta peraturan-peraturan lain yang mendukung agar implementasi perubahan organisasi dapat berjalan dengan baik.

Menyusul perubahan susunan Direksi PT PLN (Persero) pada Desember 2019, Perusahaan menerbitkan Perdir No. 0101.P/DIR/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi No. 0051.P/DIR/2019 dan Perdir No. 0220.P/DIR/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direksi No. 0051.P/DIR/2019.

Organization and work procedure guidelines are stipulated in Regulation of Board of Directors No. 0051.P/DIR/2018 as a reference for re-organization of the Company which aims to adapt the organization to the needs and demands of the Company's business environment. Organizational Guidelines are an elaboration of Regulation of Board of Directors No. 0049.P/DIR/2018 concerning Guidelines for Organizational Nomenclature of Main Units, Centers, Operational Units and Service Units in PT PLN (Persero), Regulation of Board of Directors No. 0050.P/DIR/2018 concerning Guidelines for Organizational Structure, Work Units in Organizational Structure and Structural Positions in PT PLN (Persero) and Regulation of Board of Directors No. 0052.P/DIR/2018 concerning Authorities to Determine Organizational Divisions, as well as other regulations that support implementation of organizational changes to run properly.

Following the change in composition of Board of Directors of PT PLN (Persero) in December 2019, the Company issued Regulation of Board of Directors No. 0101.P/DIR/2019 concerning Amendment to Regulation of Board of Directors No. 0051.P/DIR/2019 and Regulation of Board of Directors No. 0220.P/DIR/2019 concerning the Second Amendment to Regulation of Board of Directors No. 0051.P/DIR/2019.

Kebijakan Manajemen Portofolio Bisnis
Business Portfolio Management Policy

Perusahaan memiliki Pedoman Manajemen Portofolio Bisnis yang diatur dalam Perdir No. 1780.P/DIR/2018 sebagai pedoman untuk menyelaraskan arah dan strategi manajemen portofolio bisnis PLN beserta anak perusahaan agar dapat memberikan nilai tambah bagi Grup PLN secara keseluruhan, memperjelas akuntabilitas interaksi antara PLN sebagai perusahaan induk dengan anak perusahaan, meningkatkan sinergi antara Grup PLN secara keseluruhan dan melakukan manajemen portofolio bisnis PLN dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG. Misi manajemen portofolio bisnis PLN dikenal dengan SOLID (*Securing Business Sustainability, Optimizing Cost Efficiency, Leading Industry Capability, Increasing Profit Contribution* dan *Developing New Edge*).

The Company has Business Portfolio Management Guidelines as stipulated in Regulation of Board of Directors No. 1780.P/DIR/2018 as a reference in determining the direction and strategy of PLN's business portfolio so as to provide added value to PLN Group as a whole, to clarify accountability of interactions between PLN as the parent company and subsidiaries, to improve synergy among PLN Group as a whole and to conduct PLN's business portfolio management while implementing the principles of GCG. The missions of PLN's business portfolio management are known as SOLID (Securing Business Sustainability, Optimizing Cost Efficiency, Leading Industry Capability, Increasing Profit Contribution and Developing New Edge).

Kebijakan Pelayanan Pelanggan Customer Services Policy

Untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan, Perusahaan memiliki sejumlah kebijakan terkait pelayanan pelanggan yaitu Kepdir No. 022.K/DIR/2012 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Penyediaan Tenaga Listrik di Lingkungan PT PLN (Persero), Edaran Direksi No. 004.E/DIR/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kompensasi Tingkat Mutu Pelayanan, Edaran Direksi No. 0001.E/DIR/2016 tentang Prosedur Percepatan Penyambungan Baru dan Perubahan Daya bagi Pelanggan Tegangan Rendah dengan Daya 100 s.d 200 kVA dan lain-lain.

To provide the best service to customers, the Company issued a number of policies related to customer service, including Decision of Board of Directors No. 022.K/DIR/2012 concerning Service Quality Level of Electricity Supplies in PT PLN (Persero), Circular of Board of Directors No. 004.E/DIR/2012 concerning Procedures for Service Quality Level Compensation and Circular of Board of Directors No. 0001.E/DIR/2016 concerning Procedures for Acceleration of New Connections and Power Upgrade for Customers with Low Voltage 100 to 200 kVA and so forth.

PENILAIAN GCG

Secara berkala PLN melaksanakan penilaian penerapan GCG (Penilaian GCG) untuk mengukur tingkat kepatuhan penerapan GCG di Perusahaan. Penilaian dilakukan oleh pihak eksternal yang independen dua tahun sekali dan di antara periode tersebut Perusahaan melakukan penilaian mandiri (*self assessment*). Hasil penilaian GCG akan memberikan gambaran terkini terkait kondisi penerapan GCG di Perusahaan.

Kriteria yang Digunakan Dalam Penilaian

Penilaian penerapan GCG di PLN mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN. Proses penilaian GCG menggunakan standar alat uji yang diatur di dalam Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S. MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN. Aspek GCG yang dinilai terangkum dalam 43 indikator dengan 153 parameter. Metode penilaian terdiri dari kegiatan reviu dokumen, kuesioner, wawancara dan observasi. Penilaian mencakup tingkat kesesuaian penerapan GCG berdasarkan pemenuhan parameter/*scorecard* pada 6 aspek, yaitu:

1. Komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan berkelanjutan;
2. Pemegang Saham dan RUPS;
3. Dewan Komisaris;
4. Direksi;
5. Pengungkapan Informasi;
6. Aspek lainnya.

GCG ASSESSMENT

PLN periodically conducts GCG Assessment to measure compliance level of GCG implementation in the Company. The assessment is carried out by an independent external party every two years and between periods, the Company conducts self-assessment. The results of GCG assessment will provide the latest description related to GCG implementation in the Company.

Assessment Criteria

Assessment of GCG implementation in PLN refers to Regulation of the Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning Good Corporate Governance Implementation in SOE. GCG assessment process applies testing instrument standards set out in Decision of Secretary of the Minister of SOE No. SK-16/S. MBU/2012 concerning Assessment and Evaluation Indicators/Parameters for Good Corporate Governance (GCG) Implementation in SOE. GCG aspects assessed are summarized in 43 indicators with 153 parameters. The assessment method consists of documents review, questionnaires, interviews and observations. The assessment covers alignment of GCG implementation based on fulfillment ofparameters/scorecards in 6 aspects, as follows:

1. Commitment to the implementation of sustainable corporate governance;
2. Shareholders and GMS;
3. Board of Commissioners;
4. Board of Directors;
5. Information Disclosure;
6. Other aspects.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Pada awal tahun 2020, penilaian GCG dilakukan untuk menilai implementasi GCG periode tahun 2019. Penilaian ini dilakukan secara *self assessment* oleh tim yang ditunjuk oleh Direktur Utama.

Assessor

In early 2020, GCG assessment was conducted to assess GCG implementation in 2019. This assessment was a self-assessment by a team appointed by President Director.

Hasil Penilaian GCG Periode Tahun 2019

Periode tahun 2019 adalah periode penilaian GCG dengan metode peniliaian mandiri (*self-assessment*) yang dititikberatkan pada evaluasi pemenuhan rekomendasi perbaikan (*Area of Improvement*/AoI) hasil penilaian GCG tahun 2018 oleh BPKP. Secara keseluruhan hasil penilaian mandiri GCG periode tahun 2019 mencapai skor 88,11 dengan skor masing-masing aspek sebagai berikut:

2019 GCG Assessment Results

2019 GCG assessment used self-assessment method which was focused on evaluation of fulfillment of Area of Improvement (AoI) revealed by 2018 GCG assessment conducted by BPKP. Overall, 2019 GCG self-assessment results reached a score of 88.11 with the scores of each aspect as follows:

No.	Aspek Penilaian Assessment Aspects	Bobot Weight	Capaian 2019 2019 Achievement		Predikat Qualification
			Skor Score	%	
1	Komitmen terhadap penerapan tata kelola berkelanjutan Commitment toward the Implementation of sustinable corporate governance	7,00	6.715	95,92	Sangat Baik Excellent
2	Pemegang Saham dan RUPS Shareholders and GMS	9,00	7.742	86,02	Sangat Baik Excellent
3	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Supervisory Board	35,00	33.527	95,79	Sangat Baik Excellent
4	Direksi Board of Directors	35,00	31.406	89,73	Sangat Baik Excellent
5	Keterbukaan Informasi dan transparansi Disclosure and transparancy	9,00	8.094	89,93	Sangat Baik Excellent
6	Aspek lainnya Other aspects	5,00	0.625	12,50	Sangat Baik Excellent
	Skor|Score Predikat|Qualification	100,00	88.108	Sangat Baik Excellent	

Keterangan: 0-50: Tidak Baik | 50-60: Kurang Baik | 60-75: Cukup Baik | 75-85: Baik | 85-100: Sangat Baik
Note: 0-50: Poor | 50-60: Fair | 60-75: Good | 75-85: Very Good | 85-100: Excellence

Hasil Penilaian GCG Aspek Dewan Komisaris

Hasil penilaian GCG periode tahun 2019 pada aspek pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris mencapai skor 33,527 dari bobot 35,00 atau 96% dengan predikat "Sangat Baik."

GCG Assessment Results on Board of Commissioners

2019 GCG assessment results on aspect of implementation of Board of Commissioners' duties and responsibilities reached a score of 33.527 of 35.00 or 96% with "Very Good" predicate.

No.	Indikator Indicators	Jumlah Parameter Number Of Parameter	Bobot Weight	Capaian Achievement	
				Skor Score	%
1	Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan. The Board of Commissioners (BOC) continuously attends training/learning programs	2	1,348	1,348	100
2	Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. The BOC implements segregation of duties and establishes required factors to support its duty execution.	4	2,127	2,086	98
3	Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi. The BOC approves the draft of long-term and annual budget and work plan delivered by the Board of Directors (BOD).	2	2,904	2,824	97
4	Dewan Komisaris memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan. The BOC provides directions to the BOD on the implementation of the Company's plan and policies.	9	9,593	9,058	94
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan. The BOC performs oversight over the BOD on the implementation of Company plans and policies.	6	6,479	6,103	94
6	Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan. The BOC performs oversight over the implementation of management policy of subsidiaries/joint ventures.	2	1,504	1,418	94
7	Dewan Komisaris berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegial) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi. The BOC takes role in the nomination of the BOD's members, assesses the BOD's performance (individual and collegial) and proposes performance bonuses/ tantiem by applicable regulation and considering the BOD's performance.	3	2,437	2,316	95
8	Dewan Komisaris melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya. The BOC takes actions on the BOC potential conflict of interest.	1	0,571	0,476	83
9	Dewan Komisaris memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. The BOC monitors and ensures that the GCG principles has been implemented in an effective and sustainable manner.	2	1,659	1,659	100
10	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang efektif dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. The BOC holds effective BOC meetings and attends the meeting as applicable rules and regulations.	3	1,348	1,264	94
11	Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris. The BOC has a Secretary to the BOC to support the secretarial duties of the BOC.	4	2,593	2,593	100
12	Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris yang efektif. The BOC has an effective BOC Committees.	5	2,437	2,383	98
	JUMLAH | TOTAL	43	35,000	33,527	96

Hasil Penilaian GCG Aspek Direksi

Hasil penilaian GCG periode tahun 2019 pada aspek pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi mencapai skor 31,41 dari bobot 35,00 atau 90% dengan predikat "Sangat Baik."

GCG Assessment Results on Board of Directors

2019 GCG assessment results on aspect of implementation of Board of Directors' duties and responsibilities reached a score of 31.41 of 35.00 or 90% with "Very Good" predicate.

No.	Indikator Indicators	Jumlah Parameter Number Of Parameter	Bobot Weight	Capaian Achievement	
				Skor Score	%
1	Direksi melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan. The BOD performs sustainable training/learning programs.	2	1,089	0,817	75
2	Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas. The BOD has a clear segregation of duties/functions, authorities, and responsibility.	3	1,867	1,789	96
3	Direksi menyusun perencanaan perusahaan. The BOD establishes Corporate Plan.	5	4,044	3,507	87
4	Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan. The BOD takes role in achieving Company's Performance goals.	11	8,089	7,390	91
5	Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan. The BOD performs operational and financial control over Company's plan and policies implementation.	4	3,266	3,072	94
6	Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar. The BOD manages company in accordance with prevailing laws and regulations and Articles of Associations.	2	0,778	0,739	95
7	Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan stakeholders. The BOD builds value added relations for the Company and stakeholders.	8	6,689	6,264	94
8	Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi. The BOD monitors and manages potential Conflict of interest of the BOD's members and management.	2	1,089	1,050	96
9	Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tepat waktu. The BOD ensures the company carries out Information disclosure and communication by prevailing laws and regulations moreover, delivery of information to the BOC and shareholders is promptly.	2	1,089	0,996	91
10	Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. The BOD holds BOD meetings and attends the meetings in accordance with prevailing laws and regulations.	5	1,556	1,012	65
11	Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif. The BOD shall perform effective and qualified internal audit.	3	1,711	1,574	92
12	Direksi menyelenggarakan fungsi Sekretaris Perusahaan yang berkualitas dan efektif. The BOD performs effective and qualified Corporate Secretary functions.	3	1,711	1,583	92
	Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. The BOD holds the annual GMOS and other GMOS by prevailing laws and regulations.	2	2,022	1,614	80
	JUMLAH | TOTAL	52	35,000	31,406	90

Rekomendasi Hasil Penilaian GCG Tahun 2019

Hasil penilaian mandiri GCG tahun 2019 menghasilkan 41 rekomendasi perbaikan (*Area of Improvement*/AoI) sebagai berikut:

Recommendations from 2019 GCG Assessment Results

2019 GCG Assessment performed by BPKP resulted in 41 Areas of Improvement (AoI) as follows:

A. ASPEK KOMITMEN COMMITMENT	
A.01	Perusahaan agar memutakhirkan *Board Manual* disesuaikan dengan kondisi terkini Perusahaan dan Peraturan yang berlaku serta Board Manual tersebut disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris. The Company to update Board Manual in accordance with the current conditions of the Company and the applicable Regulations and Board Manual to be approved by Board of Directors and Board of Commissioners.
A.02	Perusahaan agar memperbaharui Pernyataan Kepatuhan Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan terhadap *Code of Conduct* (CoC) sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan Tata Kelola Perusahaan secara berkala setiap tahun. The Company to renew Statement of Compliance of Board of Directors, Board of Commissioners and Employees with Code of Conduct (CoC) as a form of commitment to Corporate Governance implementation on an annual basis.
A.03	1. Perusahaan perlu memberikan sanksi kepada pejabat yang belum menyampaikan LHKPN. 2. Perusahaan agar menginstruksikan ketepatan waktu penyampaian LHKPN bagi seluruh Karyawan yang menjadi wajib lapor LHKPN. 1. The Company to impose sanctions on officials who have not submitted their LHKPN. 2. The Company to enforce timely LHKPN submission to all employees who are required to report LHKPN.
A.04	Perusahaan agar melakukan peninjauan dan penyempurnaan berkala terhadap perangkat pendukung pengendalian gratifikasi dan mendokumentasikannya. The Company to periodically review and improve gratification control supporting instruments and to document the process.
A.05	1. Perusahaan perlu melakukan internalisasi/sosialisasi WBS 2. Perusahaan agar menyusun mekanisme pengaturan tindak lanjut pengaduan WBS berdasarkan kategori organ perusahaan. 1. The Company to conduct WBS internalization/socialization. 2. The Company to stipulate follow-up mechanism for WBS reports by corporate organ category.
B. ASPEK PEMEGANG SAHAM SHAREHOLDER	
B.01	Pemegang Saham agar menetapkan jumlah jabatan yang boleh dirangkap Direksi dan Dewan Komisaris agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam sebuah peraturan/edaran/kebijakan. Shareholder to determine the number of positions that may be held by Board of Directors and Board of Commissioners, should there be conflict of interest in a regulation/circular/policy.
B.02	1. Pemegang Saham agar melakukan pembahasan/pengkajian terhadap rancangan RJP atau revisi RJP sebelum melakukan pengesahan RJP yang diajukan Direksi. 2. Pemegang Saham agar memberikan pengesahan/persetujuan rancangan RJP yang diajukan Direksi sesuai dengan batas waktu sebagaimana diatur dalam KEPMEN Nomor: KEP-102/MBU/2002. 1. Shareholder to discuss/review draft RJP or revised RJP prior to ratification of RJP submitted by Board of Directors. 2. Shareholder to ratify draft RJP submitted by Board of Directors in accordance with deadline stipulated in Ministrial Decision No. KEP-102/MBU/2002.
B.03	Pemegang Saham agar memberikan pengesahan RKAP paling lambat 31 Desember sebelum dimulainya tahun buku dimulai (sesuai dengan SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian GCG BUMN). Shareholder to ratify RKAP no later than December 31 prior to the beginning of the next financial year (in accordance with SK-16/S.MBU/2012 concerning GCG Assessment Indicators/Parameters in SOE).
B.04	Pemegang Saham agar menetapkan Kontrak Manajemen Direksi secara individual yang memuat sekurang-kurangnya indikator kinerja utama dalam sebuah Keputusan RUPS. Shareholder to determine Board of Directors' Individual Management Contract containing at least key performance indicators in GMS decision.
B.05	Pemegang Saham agar memberikan persetujuan secara tepat waktu (khususnya untuk persetujuan/keputusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk KSO/BOT dan maksimal 7 (tujuh) hari untuk pelepasan aset). Shareholder to give approval in a timely manner (especially for approval/decision no later than 30 (thirty) days for KSO/BOT and a maximum of 7 (seven) days for asset disposal).
B.06	Pemegang Saham agar menetapkan pedoman/kebijakan tentang penetapan dividen. Shareholder to establish guidelines/policies concerning dividends determination.
B.07	Pemegang Saham agar menetapkan Pedoman Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan mendokumentasikan pelaksanaan penelaahan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris. Shareholder to establish guidelines for Board of Commissioners Supervisory Report and to document review of Board of Commissioners Supervisory Report.
B.08	Pemegang Saham agar menyusun rencana tindak lanjut atas *Area of Improvement* (AoI) dan menindaklanjuti *Area of Improvement* (AoI) tata kelola perusahaan. Shareholder to prepare follow-up plan on Area of Improvement (AoI) and to follow up on corporate governance Area of Improvement (AoI).

B.09	Pemegang Saham agar menetapkan suatu sistem/mekanisme terkait pelaporan dan respons atas gejala penurunan kinerja Perusahaan termasuk kinerja Direksi maupun Dewan Komisaris. Shareholder to establish system/mechanism for reporting and response to symptoms of deterioration in the Company's performance including the performance of Board of Directors and Board of Commissioners.
C. ASPEK DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS	
C.01	Dewan Komisaris agar menginstruksikan kepada Direksi agar memutakhirkan *Board Manual* disesuaikan dengan kondisi terkini Perusahaan dan peraturan yang berlaku. Board of Commissioners to instruct Board of Directors to update Board Manual in accordance with the current conditions of the Company and the applicable regulations.
C.02	Dewan Komisaris agar menyusun laporan hasil kegiatan pelatihan yang diikuti oleh Dewan Komisaris dan mendokumentasikannya secara konsisten. Board of Commissioners to prepare a report on trainings participated by Board of Commissioners and to document the trainings consistently.
C.03	Dewan Komisaris agar menetapkan perencanaan pemantauan Mutu dan Pelayanan dalam RKA Dewan Komisaris dan memberikan nasihat kepada Direksi atas pelaksanaan kebijakan mutu dan pelayanan secara spesifik. Board of Commissioners to establish a plan for monitoring of Quality and Service in RKA of Board of Commissioners and to provide specific advices to Board of Directors on implementation of quality and service policies.
C.04	Dewan Komisaris agar melakukan pengawasan dan pemberian nasihat secara konsisten terhadap: 1. Pelaksanaan efektivitas pengendalian internal Perusahaan baik tingkat entitas maupun tingkat operasional/aktivitas; 2. Keluhan pemangku kepentingan; 3. Kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan; 4. Pelaksanaan sistem teknologi informasi sesuai dengan IT Master Plan Perusahaan (ITMP); 5. Pelaksanaan sistem SDM (Promosi, Mutasi, Demosi) dan organisasi; 6. Pelaksanaan kebijakan akuntasi dan pelaporan keuangan; 7. Kebijakan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaannya; 8. Efektivitas Auditor Eksternal dan Auditor Internal beserta tindak lanjut temuannya; 9. Kebijakan dan pengelolaan anak perusahaan. Board of Commissioners to consistently conduct supervision and to provide advice on: 1. Implementation of effectiveness of the Company's internal control at entity level and operational/activity level; 2. Stakeholder complaints; 3. Enterprise risk management policies and implementation; 4. Implementation of information technology Systems in accordance with Corporate IT Master Plan (ITMP); 5. Implementation of HR (Promotion, Transfer, Demotion) and organization systems; 6. Implementation of accounting and financial reporting policies; 7. Goods and services procurement policy and its implementation; 8. Effectiveness of External Auditors and Internal Auditors including follow-up on their findings; 9. Subsidiary's policies and management.
C.05	Dewan Komisaris agar senantiasa mengingatkan Direksi agar memperhatikan ketepatan waktu permohonan persetujuan RJP dan RKAP kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan *Board Manual*. Board of Commissioners to always remind Board of Directors to pay attention to timeliness of request for approval of RJP and RKAP to Board of Commissioners and Shareholders in accordance with the provisions in Board Manual.
C.06	Dewan Komisaris agar mencantumkan nilai nominal *fee audit* atas rekomendasi KAP yang disampaikan kepada Pemegang Saham/RUPS. Board of Commissioners to state the nominal value of audit fee in KAP recommendation submitted to Shareholder/GMS.
C.07	Dewan Komisaris agar memperhatikan batas waktu (7-14 hari) terhadap usulan Direksi yang memerlukan persetujuan/ tanggapan Dewan Komisaris. Board of Commissioners to pay attention to deadline (7-14 days) of Board of Directors' proposals that require Board of Commissioners' Approval/Response.
C.08	Dewan Komisaris agar melakukan telaahan atas kontrak manajemen Korporat dan KPI Direksi secara Individu serta dituangkan secara eksplisit dalam Tanggapan Dewan Komisaris terhadap Laporan Manajemen yang disampaikan kepada Direksi dan Pemegang Saham. Board of Commissioners to review individual Corporate Management contract and KPI of Board of Directors and be explicitly state the results in Board of Commissioners Response to Management Report delivered to Board of Directors and Shareholder.
C.09	Dewan Komisaris agar membuat risalah rapat atas setiap rapat yang telah dilaksanakan baik rapat internal maupun rapat konsultasi secara konsisten. Board of Commissioners to prepare Minutes of each Meeting including internal Meetings and Consultation Meetings consistently.
C.10	Dewan Komisaris agar melaporkan pengangkatan Komite Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham. Board of Commissioners to report appointment of Board of Commissioners' Committees to Shareholder.
C.11	Dewan Komisaris agar memutakhirkan Piagam Komite Dewan Komisaris. Board of Commissioners to update Board of Commissioners' Committee Charters.

D. ASPEK DIREKSI BOARD OF DIRECTORS	
D.01	Direksi agar menyusun rencana, melaksanakan dan membuat laporan terkait dengan pelatihan yang dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan kebutuhan Perusahaan secara konsisten. Board of Directors to plan, implement and report trainings participated by Board of Directors according to the Company's needs consistently.
D.02	Corporate Secretary perlu menyelenggarakan program pengenalan secara sistematis kepada Direktur dan Komisaris yang baru diangkat untuk mempercepat pemahaman terkait proses bisnis dan tata kelola perusahaan. Corporate Secretary to conduct a systematic induction program to newly appointed Directors and Commissioners to accelerate understanding of business process and corporate governance.
D.03	Direksi melalui Corporate Secretary perlu menyelenggarakan rapat Direksi sesuai dengan tata kelola perusahaan yang telah disepakati, yaitu: 1. Menyelenggarakan rapat Direksi minimal 1 bulan sekali sesuai dengan *Board Manual.* 2. Mengagendakan evaluasi atas pelaksanaan hasil rapat sebelumnya dalam rapat Direksi. 3. Validasi pengesahan risalah rapat sesuai batasan waktu sebagaimana diatur dalam *Board Manual.* 4. Mencantumkan *disenting opinion* (apabila ada) dan dinamika rapat. Board of Directors through Corporate Secretary to hold Board of Directors Meetings according to the established Corporate Governance, including: 1. Board of Directors meeting at least once a month according to Board Manual. 2. Schedule an evaluation of results of the previous meeting in Board of Directors Meeting. 3. Validate minutes of meeting according to time limit stipulated in Board Manual. 4. Incorporate dissenting opinion (if any) and meeting dynamics.
D.04	Direksi agar meningkatkan rasio kehadiran dalam rapat Direksi maupun rapat Konsultasi. Board of Directors to increase attendance ratio in Board of Directors meetings and consultation meetings.
D.05	Direksi agar menginstruksikan kepada SPI untuk melakukan evaluasi/penilaian atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat operasional dan tingkat entitas yang mencakup komponen pengendalian intern secara terintegrasi. Board of Directors to instruct SPI to conduct evaluation/assessment of the effectiveness of internal control at operational level and entity level that covers integrated internal control components.
D.06	Direksi agar meningkatkan kompetensi SDM Satuan Pengawasan Internal melalui program sertifikasi pada setiap level jabatan. Board of Directors to enhance competence of SPI's HC through certification program at every position level.
D.07	Direksi agar menginstruksikan kepada SPI untuk melakukan evaluasi sejauh mana pencapaian sasaran, tujuan dan kegiatan operasi sejalan. dengan tujuan organisasi (evaluasi yang bersifat makro strategis). Board of Directors to instruct SPI to evaluate alignment of achievement of operational targets, objectives and activities with organization's objectives (macro strategic evaluation).
D.08	Direksi agar menyampaikan rancangan RJP kepada Dewan Komisaris dan RUPS sesuai dengan *Board Manual* dan melaksanakan sosialisasi atas RJP yang telah disahkan kepada seluruh karyawan Perusahaan. Board of Directors to submit draft RJP to Board of Commissioners and GMS in accordance with Board Manual and carry out socialization on ratified RJP to all employees of the Company.
D.09	Direksi agar menyampaikan rancangan RKAP kepada Dewan Komisaris dan RUPS sesuai dengan *Board Manual* dan RKAP yang disusun mengacu pada RJP yang sudah diformalkan. Board of Directors to submit draft RKAP to Board of Commissioners and GMS in accordance with Board Manual and to prepare RKAP in accordance with formalized RJP.
D.10	Direksi agar menyampaikan kinerja Direksi secara individu/direktorat kepada Dewan Komisaris dalam Laporan Manajemen secara konsisten. Board of Directors to submit individual/directorate performance of Board of Directors to Board of Commissioners in Management Report consistently.
D.11	Direksi agar mempercepat proses penandatanganan PKB dan menetapkan jenis kebijakan yang harus melibatkan karyawan dalam perumusannya. Board of Directors to accelerate PKB signing and to determine the types of policies that require employee involvement in their formulation.
D.12	Direksi agar menyampaikan Laporan Manajemen Risiko kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham yang memuat profil risiko dan pelaksanaan program manajemen risiko secara berkala. Board of Directors to submit Risk Management Report to Board of Commissioners and Shareholder containing risk profile and implementation of risk management program on a regular basis.
D.13	Direksi agar dapat menyusun Kebijakan Perusahaan sebagai Penjamin (*Avalist*) bagi para kreditur. Board of Directors to formulate Corporate Policy as an Avalist for creditors.
D.14	Direksi agar menjaga kepatuhan penyelesaian Laporan Keuangan kepada Regulator. Board of Directors to maintain compliance with completion of Financial Statements to Regulators.

E. ASPEK PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI INFORMATION DISCLOSURE AND TRANSPARENCY	
E.01	Perusahaan agar senantiasa menjaga penyediaan informasi yang relevan, memadai dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala pada website www.pln.co.id (Informasi terkini, LHKPN, Gratifikasi, CSR dan Laporan-Laporan untuk pemangku kepentingan). The Company to maintain disclosure of relevant, adequate and reliable information in a timely and periodic manner on website www.pln.co.id (Latest information, LHKPN, Gratification, CSR and Reports for Stakeholders).
E.02	Perusahaan agar meningkatkan kualitas penyusunan *Annual Report* dan *Sustainability Report* sehingga dapat lebih bersaing dan mendapat penghargaan dalam Annual Report Award. The Company to improve quality of preparation of Annual Report and Sustainability Report to be more competitive and to receive Annual Report Award.

Penilaian GCG oleh Lembaga Penilai Lainnya

Selain melaksanakan *self-assessment* berdasarkan PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN dan Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S. MBU/2012, PLN juga mengikuti penilaian penerapan GCG berdasarkan kriteria Corporate Governance Perception Index (CGPI). Penilaian dilakukan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). Hasil penilaian CGPI tahun 2019, PLN meraih predikat Perusahaan "TERPERCAYA" dengan skor 84,85. pencapaian ini lebih tinggi dari skor tahun 2018 sebesar 84,52. Pada tahun 2019, CGPI mengusung tema "Penguatan Platform Bisnis dengan Kerangka GCG".

GCG Assessment by Other Assessors

In addition to self-assessment based on PER-01/MBU/2011 concerning Good Corporate Governance Implementation in SOE and Decision of Secretary of the Minister of SOE No. SK-16/S. MBU/2012, PLN participated in GCG assessment based on Corporate Governance Perception Index (CGPI). The assessment is conducted by Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). In 2019 CGPI assessment, PLN was recognized as "TRUSTED" company with its score improving from 84.52 in 2018 to 84.85. In 2019, CGPI brought the theme "Strengthening Business Platform with GCG Framework".

Penilaian dilakukan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)
The assessment was conducted by The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)

Pada tahun 2019, PLN juga turut berpartisipasi dalam ajang Annual Report Award (ARA) 2018. ARA 2018 merupakan ajang penilaian terhadap Laporan Tahunan Perusahaan yang diselenggarakan atas kerja sama antara Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian BUMN, Direktorat Jenderal Pajak, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas informasi dan tata kelola melalui Annual Report atau buku laporan tahunan perusahaan. Tema ARA 2018 adalah "Keakuratan Informasi untuk Kinerja Perusahaan Secara Berkelanjutan dengan Memenangkan dukungan Stakeholders". Dalam kesempatan kali ini PLN berhasil meraih peringkat A+ dan masuk ke dalam nominasi finalis untuk kategori BUMN Keuangan Non Listed dengan skor 90,01 atau meningkat 27,19% dari skor 70,77 yang diraih pada periode penilaian ARA sebelumnya.

In 2019, PLN also participated in 2018 Annual Report Award (ARA). 2018 ARA is an assessment of Corporate Annual Report organized in cooperation among National Committee on Governance Policy (KNKG), Financial Services Authority (OJK), the Ministry of SOE, Directorate General of Taxes, Bank Indonesia, Indonesia Stock Exchange and Indonesian Institute of Accountants, which aims to improve the quality of information and governance through Annual Report. The theme of ARA 2018 was "Information Accuracy for Sustainable Corporate Performance by Winning Stakeholders Support". On this occasion, PLN succeessfully achieved A+ rating and was included in the finalist nomination for Non-Listed Financial SOE category with a score of 90.01, up 27.19% from 70.77 score achieved in the previous ARA assessment period.

Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") adalah organ Perusahaan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang tersebut di antaranya mencakup mengangkat dan memberhentikan Direktur dan Komisaris, memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara Direktur, meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi atas pengelolaan Perusahaan, merubah permodalan, mengubah Anggaran Dasar, merencanakan penggunaan laba, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perusahaan, serta pembentukan anak perusahaan. Di PT PLN (Persero), Menteri BUMN bertindak selaku RUPS karena seluruh saham Perusahaan dimiliki sepenuhnya oleh Negara. Menteri BUMN dapat memberikan kuasa dengan hak subsitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS.

Berdasarkan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar Perusahaan, RUPS terdiri atas:

1. RUPS Tahunan, yaitu RUPS yang bersifat rutin diselenggarakan tiap tahun, yang terdiri dari RUPS Tahunan tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan,

The General Meeting of Shareholders ("GMS") is a corporate organ that has the authorities not granted to Board of Commissioners or Board of Directors within the scope specified in the Articles of Association and prevailing laws and regulations. These authorities include appointment and dismissal of Directors and Commissioners, assignment of management duties and authorities among Directors, holding the Board of Commissioners and Board of Directors accountable for the management of the Company, change in equity, amending the Articles of Association, planning the use of income, mergers, consolidations, acquisitions and dissolution of the Company, as well as the establishment of subsidiaries. In PT PLN (Persero), the Minister of SOE acts as GMS as all shares of the Company are owned by the State. The Minister of SOE may grant authorty with right of substitution to individuals or legal entities as representatives in a GMS.

According to the Law of Limited Liability Companies and the Company's Articles of Association, the GMS consists of:

1. Annual GMS, held on an annual basis, consisting of Annual GMS on Annual Report Approval and Financial Statements

serta RUPS Tahunan tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
2. RUPS Luar Biasa (RUPSLB), yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu apabila dipandang terdapat hal-hal tertentu yang memerlukan pembahasan dan pengambilan keputusan yang sifatnya mendesak dan signifikan.

Pelaksanaan RUPS dapat diusulkan oleh Direksi dan atau Dewan Komisaris dan atau Pemegang Saham. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS sesuai dengan permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau Pemegang Saham.

Selain RUPS yang dilakukan dengan kehadiran seluruh Organ Perusahaan secara fisik, dikenal juga RUPS yang tidak memerlukan pelaksanaan secara fisik atau yang dikenal sebagai RUPS Sirkuler. RUPS Sirkuler memiliki kekuatan hukum yang sama dengan RUPS yang diselenggarakan secara fisik.

PEMEGANG SAHAM

Pemegang Saham tidak mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku.

PLN merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karenanya, tata cara dan prosedur pelaksanaan RUPS yang diselenggarakan mengacu pada keputusan Kementerian BUMN sebagai Pembina seluruh BUMN di Indonesia dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Kepemilikan saham di PT PLN (Persero) per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Ratification, and Annual GMS on Corporate Work Plan and Budget Ratification.
2. Extraordinary GMS (EGMS), held on an ad hoc basis, if deemed necessary, for certain matters that require approval as well as urgent and significant decisions.

An EGMS can be proposed by the Board of Directors and/or Board of Commissioners and/or Shareholder. Board of Directors must hold EGMS upon written request from the Board of Commissioners or Shareholder.

In addition to an EGMS with the physical presence of all Corporate Organs, an EGMS can also be conducted without physical presence, known as a Circular GMS. A Circular GMS has similar legality as a physical GMS.

SHAREHOLDER

The Shareholder is not involved in the Company's operational activities, which are the responsibility of the Board of Directors in accordance with the provisions in the Articles of Association and the applicable laws and regulations.

PLN is a State-Owned Enterprise (BUMN) which is 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia. Therefore, the procedures for GMS implementation are carried out referring to Decision of the Ministry of SOE as the Adviser of all SOE in Indonesia and the Articles of Association.

Shareholding structure in PT PLN (Persero) as of December 31, 2019 is as follows:

100%

Saham dimiliki Pemerintah Republik Indonesia

Share owned by Government of the Republic of Indonesia

Nama Pemegang Saham Shareholders Name	Jumlah Saham (Lembar)* Total Shares (Share)*	Persentase Percentage
Pemerintah Republik Indonesia The Government of the Republic of Indonesia	115.181.002	100%

* Satu lembar saham senilai Rp1.000.000 | One share as Rp1.000.000

HAK DAN TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM

Pemegang Saham sebagai pemilik modal, memiliki hak dan tanggung jawab atas Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan. Pemegang Saham sebagai pemilik Perusahaan memiliki kepentingan terhadap peningkatan keuntungan Perusahaan, peningkatan nilai Perusahaan dan bagaimana Perusahaan dikelola.

Pemegang Saham melalui RUPS memiliki tanggung jawab untuk:

1. Memberikan persetujuan dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
2. Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan, Laporan Kinerja dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.

INFORMASI MENGENAI PENYELENGGARAAN RUPS TAHUN 2019

Pada tahun 2019 Perusahaan menyelenggarakan 2 kali RUPS Tahunan dan 8 kali RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan yang diselenggarakan adalah RUPS Tahunan tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 dan RUPS Tahunan tentang Persetujuan Laporan Tahunan Tahun 2018 sebagai berikut:

1. RUPS Tahunan tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 dilaksanakan tanggal 7 Januari 2019.
2. RUPS Tahunan tentang Persetujuan Laporan Tahunan Tahun 2018 dilaksanakan tanggal 29 Mei 2019.

Sedangkan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. RUPSLB tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara pada tanggal 28 Februari 2019.

RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF THE SHAREHOLDERS

The Shareholder, as capital owner, has the rights and responsibilities in accordance with the Articles of Association and laws and regulations. The Shareholder, as owner of the Company, has an interest in increasing the Company's income, growing the value of the Company and how the Company is managed.

The Shareholder, through General Meeting of Shareholders, has the responsibilities for:

1. Approving and ratifying the Corporate Work Plan.
2. Approving the Annual Report and ratifying Financial Statements, Performance Reports and Supervisory Report of Board of Commissioners.

INFORMATION REGARDING 2019 GMS

In 2019, the Company held 2 Annual GMS and 8 Extraordinary GMS. Annual GMS held were for Ratification of 2019 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) and for Approval of 2018 Annual Report, as follows:

1. Annual GMS on Ratification of 2019 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) was held on January 7, 2019.
2. Annual GMS on Approval for 2018 Accountability Report was held on May 29, 2019.

While Extraordinary GMS (EGMS) held in 2019 were as follows:

1. EGMS for Dismissal and Appointment of Members of Board of Commissioners of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) on February 28, 2019.

2. RUPSLB tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara pada tanggal 29 Mei 2019.
3. RUPSLB tentang Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara pada tanggal 2 Agustus 2019.
4. RUPSLB tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara pada tanggal 30 Agustus 2019.
5. RUPSLB tentang Pemberhentian Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara pada tanggal 17 Oktober 2019.
6. RUPSLB tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris, serta Penetapan Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara pada tanggal 23 Desember 2019.
7. RUPSLB tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara pada tanggal 23 Desember 2019.
8. RUPSLB tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara pada tanggal 26 Desember 2019.

KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DALAM RUPS RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUNAN

Pelaksanaan RUPS Tahunan tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat pada saat Rapat tersebut diselenggarakan, yaitu:

2. EGMS for Dismissal, Transfer of Tasks and Appointment of Members of Board of Directors of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) on May 29, 2019.
3. EGMS for Dismissal of Members of Board of Directors of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) on August 2, 2019.
4. EGMS for Dismissal and Appointment of Members of Board of Commissioners of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) on August 30, 2019.
5. EGMS for Dismissal of Independent Commissioner of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) on October 17, 2019.
6. EGMS for Dismissal and Appointment of Members of Board of Commissioners and Independent Commissioner of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) on December 23, 2019.
7. EGMS for Dismissal, Changes in Nomenclature and Appointment of Members of Board of Directors of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) on December 23, 2019.
8. EGMS for Dismissal and Appointment of Members of Board of Commissioners of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) on December 26, 2019.

ATTENDANCE OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS IN GMS ON ANNUAL CORPORATE WORK PLAN AND BUDGET AND GMS ON ACCOUNTABILITY FOR ANNUAL REPORT

Annual GMS on Ratification of 2019 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) was attended by members of Board of Commissioners and Board of Directors serving in the particular term of office, as follows:

	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Kehadiran Attendance	
			RUPS RKAP 2019 EGM of CWPB* **7 Januari 2019** January 7, 2019	**RUPS LPT 2018** EGM of Company's Annual Report **29 Mei 2019** May 29, 2019
1.	Ilya Avianti	Plt. Komisaris Utama dan Komisaris | Caretaker President Commissioner and Commissioner	√	√
2.	Oegroseno	Komisaris Independen | Independent Commissioner	√	√
3.	Darmono	Komisaris Independen | Independent Commissioner	√	√
4.	Budiman	Komisaris | Commissioner	√	√
5.	Aloysius Kiik Ro	Komisaris | Commissioner	√	√
6.	Rionald Silaban	Komisaris | Commissioner	√	√
7.	Darmawan Prasodjo	Komisaris | Commissioner	√	√
8.	Andy Noorsaman Sommeng	Komisaris | Commissioner	√	√

	Direksi Board of Directors		Kehadiran Attendance	
			RUPS RKAP 2019 EGM of CWPB* **7 Januari 2019** January 7, 2019	**RUPS LPT 2018** EGM of Company's Annual Report **29 Mei 2019** May 29, 2019
1.	Sofyan Basir	Direktur Utama dan Plt. Direktur Pengadaan Strategis | President Director and Caretaker Director of Strategic Procurement	√	√
2.	Sarwono Sudarto	Direktur Keuangan | Director of Finance	√	√
3.	Supangkat Iwan Santoso	Direktur Pengadaan Strategis 2 | Director of Strategic Procurement 2	√	√
4.	Muhamad Ali	Direktur Human Capital Management | Director of Human Capital Management	√	√
5.	Syofvi Felienty Roekman	Direktur Perencanaan Korporat | Director of Corporate Planning	√	√
6.	Amir Rosidin	Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah | Regional Business Director of Central Part Java	√	√
7.	Haryanto WS	Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat | Regional Business Director of Western Part Java	√	√
8.	Djoko R. Abumanan	Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara | Regional Business Director of Eastern Part Java, Bali and Nusa Tenggara	√	√
9.	Machnizon	Direktur Bisnis Regional Kalimantan | Regional Business Director of Kalimantan	√	√
10.	Syamsul Huda	Direktur Bisnis Regional Sulawesi | Regional Business Director of Sulawesi	√	√
11.	Ahmad Rofik	Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua | Regional Business Director of Maluku and Papua	√	√
12.	Wiluyo Kusdwiharto	Direktur Bisnis Regional Sumatera | Regional Business Director of Sumatera	√	√

Keterangan:
*Company's Work Plan and Budget

KEPUTUSAN DAN REALISASI RUPS 2019

A. Hasil RUPS Tahunan 2019 dan Realisasi

RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2019 dilaksanakan pada hari Senin, 7 Januari 2019 dengan agenda dan keputusan sebagai berikut:

RESOLUTIONS AND REALIZATION OF 2019 GMS

A. Resolutions and Realization of 2019 Annual GMS

Annual GMS on Ratification of 2019 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) was held on January 7, 2019 with the following agenda and resolutions:

No.	Mata Acara Agenda	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
1	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 Ratification of 2019 Corporate Work Plan and Budget (RKAP)	Mengesahkan RKAP Tahun Buku 2019 Ratified 2019 RKAP	Telah terealisasi Realized
2	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL) Tahun 2019 Ratification of 2019 Partnership and Community Development Work Plan and Budget (RKA PKBL)	Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan program Bina Lingkungan Tahun Buku 2019 Ratified 2019 RKA PKBL	Telah terealisasi Realized
3	Penetapan *Key Performance Indicators* (KPI) 2019 yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2019 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Determination of 2019 Key Performance Indicators (KPI) stipulated in 2019 Management Contract between Board of Directors and Board of Commissioners with Shareholder	Menyetujui dan menetapkan *Key Performance Indicators* (KPI) 2019 yang tertuang dalam Kontrak Manajemen 2019 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Approved and determined 2019 Key Performance Indicators (KPI) stipulated in 2019 Management Contract between Board of Directors and Board of Commissioners with Shareholder	Telah terealisasi Realized
4	Penetapan *Key Performance Indicators* (KPI) 2019 yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2019 antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham. Determination of 2019 Key Performance Indicators (KPI) stipulated in 2019 Management Contract between Board of Commissioners and Shareholder	Menyetujui dan menetapkan *Key Performance Indicators* (KPI) 2019 yang tertuang dalam Kontrak Manajemen 2019 antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Approved and determined 2019 Key Performance Indicators (KPI) stipulated in 2019 Management Contract between Board of Commissioners and Shareholder	Telah terealisasi Realized

B. Hasil RUPS Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2018 dan Realisasi

RUPS Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2018 dilaksanakan pada hari Rabu, 29 Mei 2019 dengan agenda dan keputusan sebagai berikut:

B. Resolutions and Realization of Annual GMS on 2018 Accountability Report

Annual GMS on 2018 Accountability Report was held on May 29, 2019 with the following agenda and resolutions:

No.	Mata Acara Agenda	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2018, serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2018.	Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2018 yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00620/2.1030/AU.1/02/0499-3/1/V/2019 tangga 18 Mei 2019 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya *(volledig acquit et de charge)* kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan tercermin pada buku-buku laporan Perusahaan.	Telah terealisasi
	Approval of Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for Financial Year 2018, including Supervisory Report of Board of Commissioners for Financial Year 2018.	Approved 2018 Annual Report including Supervisory Report of Board of Commissioners and ratified the Company's Financial Statements for Financial Year 2018 audited by KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners in their report No.00620/2.1030/AU.1/02/0499-3/1/V/2019 dated May 18, 2019 with "unqualified" opinion, as well as granted volledig acquit et de charge to Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for management and supervisory measures performed in Financial Year ended December 31, 2018, to the extent such measures were not criminal and disclosed in the Company's reports.	Realized
2	Persetujuan dan pengesahan Laporan PKBL Tahun Buku 2018.	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana laporannya Nomor: 00101/2.1030/AU.2/12/0499-3/I/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 dengan opini "wajar dalam semua hal yang material" dan sesuai dengan hasil pembahasan risalah nomor: RIS-51/D7.MBU.3/512019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya *(volledig acquit et de charge)* kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut.	Telah terealisasi
	Approval and ratification of PKBL Report for Financial Year 2018.	Approve and ratified Annual Report of Partnership and Community Development Program (PKBL) for Financial Year 2018 including Financial Statements of Partnership and Community Development Program (PKBL) ended December 31, 2018 audited by KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners in their report No. 00101/2.1030/AU.2/12/0499-3/I/III/2019 dated March 4, 2019 with "unqualified" opinion and in accordance with minutes No. RIS-51/D7.MBU.3/512019 and granted volledig acquit et de charge to Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervisory measures in Partnership and Community Development Program for Financial Year 2018, to the extent such measures were not criminal and disclosed in the Company's reports.	Realized

No.	Mata Acara Agenda	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
3	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2018.	Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2018 sebesar Rp11.568.286 juta seluruhnya dimasukkan sebagai cadangan perusahaan. Di kemudian hari terdapat Perubahan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PLN (Persero) lewat Surat dari Menteri BUMN No. S-941/MBU/12/2019 dimana diputuskan keputusan RUPS tentang persetujuan penggunaan laba bersih menjadi berbunyi: "Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2018 sebesar Rp11.568.286.000.000 (sebelas triliun lima ratus enam puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) untuk dividen sebesar Rp4.000.000.000.000 (empat triliun rupiah) dan untuk cadangan perusahaan sebesar Rp7.568.286,000,000 (tujuh triliun lima ratus enam puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh enam juta rupiah).	Telah terealisasi
	Determination of the Use of the Company's Consolidated Net Income for Financial Year 2018.	Approved determination of the use of net income attributable to Owner of the Parent for Financial Year 2018 amounting of Rp11,568,286 million, which was entirely recorded as a reserve. Subsequently, the Resolution of General Meeting of Shareholders (GMS) of PT PLN (Persero) was amended by Letter of the Minister of SOE No. S-941/MBU/12/2019 which stated that GMS resolution regarding approval of the use of net income was amended to read: "To approve determination of the use of net income attributable to Owner of Parent for Financial Year 2018 amounting to Rp11,568,286,000,000 (eleven trillion five hundred sixty eight billion two hundred eighty-six million rupiah) for dividends amounting to Rp4,000,000,000,000 (four trillion rupiahs) and for reserve amounting to Rp7,568,286,000,000 (seven trillion five hundred sixty eight billion two hundred eighty-six million rupiah).	Realized
4	Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Tahun 2019 serta tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja Tahun Buku 2018.	Menetapkan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Tahun Buku 2019 serta tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja Tahun Buku 2018, akan ditetapkan secara tersendiri.	Telah terealisasi
	Determination of salary/honorarium including other facilities and allowances for Board of Directors and Board of Commissioners of the Company in 2019 and tantiem for Board of Directors and Board of Commissioners for their performances in Financial Year 2018.	Determined salary/honorarium including other facilities and allowances for Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for Financial Year 2019 and tantiem for Board of Directors and Commissioners for their performances in Financial Year 2018, to be determined separately.	Realized

No.	Mata Acara Agenda	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
5	Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Laporan Keuangan PKBL untuk Tahun Buku 2019.	a. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagai auditor untuk melakukan pekerjaan: 1) Audit atas Laporan Keuangan Perusahaan; 2) Audit Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL); 3) Audit atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku; 4) Audit atas Kepatuhan terhadap Pengendalian Internal; 5) Evaluasi Kinerja Perusahaan; Evaluasi capaian *Key Performance Indicator* (KPI); untuk Tahun Buku yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2019 b. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbal jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar untuk pelaksanaan pekerjaan audit sebagaimana ketentuan yang berlaku.	Telah terealisasi
	Appointment of Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Consolidated Financial Statements and PKBL Financial Statements for Financial Year 2019.	a. Appointed Public Accountant Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners as auditors to do the works of: 1) Audit of the Company's Financial Statements; 2) Audit of Financial Statements of Partnership and Community Development Program (PKBL); 3) Audit of Compliance with the Applicable Laws and Regulations; 4) Audit of Compliance with Internal Control; 5) Corporate Performance Evaluation; Evaluation of Key Performance Indicator (KPI) achievements; for Financial Year ended December 31, 2019 b. Delegated authority to Board of Commissioners to determine the amount of audit fees, to extend the scope of work required and other reasonable requirements for carrying out audit work according to the applicable regulations.	Realized
6	Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2016 untuk Tahun Buku 2018.	Mengesahkan laporan realisasi penggunaan tambahan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berasal dari APBN Tahun 2016 sebesar Rp23.560 miliar sebagaimana Surat Plt. Komisaris Utama dan Direktur Utama Nomor: 0574/KEU.02.02/DIRUT/2019 tanggal 31 Januari 2019 untuk periode Tahun Buku 2018 dengan ketentuan: a. Sepanjang tindakan penggunaan dana tambahan PMN tersebut tidak melanggar ketentuan/prosedur hukum yang berlaku; b. Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/06/2015 dan PER-11/MBU/09/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana PMN.	Telah terealisasi
	Ratification of Accountability Report for Realization of the Use of Additional State Capital Participation (PMN) in 2016 for Financial Year 2018.	Ratified report on realization of the use of additional State Capital Participation (PMN) originating from 2016 State Budget amounting to Rp23,560 billion as stated in Letter of Acting. President Commissioner and President Director No. 0574/KEU.02.02/DIRUT/2019 dated January 31, 2019 for Financial Year 2018 with following provisions: a. To the extent the use of the additional PMN funds did not violate the provisions/applicable legal procedures; b. In accordance with Regulation of the Minister of SOE No. PER-08/MBU/06/2015 and PER-11/MBU/09/2015 concerning Guidelines for Reporting of Realization of the Use of Additional PMN Funds.	Realized

C. Hasil RUPS Luar Biasa dan Realisasi

C. Resolutions and Realization of Extraordinary GMS

No.	Mata Acara Agenda	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
1	RUPSLB tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara pada tanggal 28 Februari 2019.	Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara: 1. Sdr. Oegroseno-sebagai Komisaris Independen; 2. Sdr. Andy Noorsaman Sommeng-sebagai Komisaris; yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-211/MBU/10/2014 tanggal 17 Oktober 2014 dan SK-128/MBU/07/2017 tanggal 12 Juli 2017, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatannya tersebut.	Telah terealisasi
	EGMS on Dismissal and Appointment of Members of Board of Commissioners of of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) on February 28, 2019.	Honorably dismissed the following names as Members of Board of Commissioners of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero): 1. Mr. Oegroseno – as Independent Commissioner; 2. Mr. Andy Noorsaman Sommeng – as Commissioner; who were appointed respectively based on Decision of the Minister of SOE No. SK-211/MBU/10/2014 dated October 17, 2014 and SK-128/MBU/07/2017 dated July 12, 2017, with appreciation for their contributions and thoughts during their terms.	Realized
		Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara: 1. Sdr. Deden Juhara-sebagai Komisaris Independen; 2. Sdr. Rida Mulyana-sebagai Komisaris.	Telah terealisasi
		Appointed the following names as Members of Board of Commissioners of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero): 1. Mr. Deden Juhara – as Independent Commissioner; 2. Mr. Rida Mulyana – as Commissioner.	Realized
2	RUPSLB tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara pada tanggal 29 Mei 2019.	Memberhentikan Sdr. Sofyan Basir sebagai Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan usaha Milik Negara Nomor: SK-272/MBU/12/2014 tanggal 23 Desember 2014, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.	Telah terealisasi
	EGMS on Dismissal, Transfer of Duties and Appointment of Members of Board of Directors of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) on May 29, 2019.	Dismissed Mr. Sofyan Basir as President Director of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) who was appointed based on Decision of the Minister of SOE No. SK-272/MBU/12/2014 dated December 23, 2014, with appreciation for his contributions and thoughts during his term.	Realized
		Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT perusahaan Listrik Negara: 1. Sdr. Supangkat Iwan Santoso, semula sebagai Direktur Pengadaan Strategis 2 menjadi Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara; 2. Sdr. Djoko Rahardjo Abumanan, semula sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara menjadi Direktur Pengadaan Strategis 2; yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-272/MBU/12/2014 tanggal 23 Desember 2014 dan Nomor SK-211/MBU/10/2015 tanggal 30 Oktober 2015, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dimaksud.	Telah terealisasi

No.	Mata Acara Agenda	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
		Transferred assignment of the following names as Members of Board of Directors of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero): 1. Mr. Supangkat Iwan Santoso, previously Strategic Procurement Director 2 to become Regional Business Director of East Java, Bali and Nusa Tenggara; 2. Mr. Djoko Rahardjo Abumanan, previously Regional Business Director of East Java, Bali and Nusa Tenggara to become Strategic Procurement Director 2; who were appointed respectively based on Decision of the Minister of SOE No. SK-272/MBU/12/2014 dated December 23, 2014 and No. SK-211/MBU/10/2015 dated October 30, 2015, with terms continuing the remaining terms according to Decision of the Minister of SOE referred to.	Realized
		Menugaskan Sdr.Djoko Rahardjo Abumanan untuk menjalankan tugas sebagai Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara selain menjalankan tugasnya sebagai Direktur Pengadaan Strategis 2, sampai dengan diangkatnya Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik negara yang definitif.	Telah terealisasi
		Assigned Mr.Djoko Rahardjo Abumanan to carry out his duties as President Director of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) in addition to carrying out his duties as Strategic Procurement Director 2, until appointment of definitive Director of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).	Realized
		Mengangkat Sdr. Sripeni Inten Cahyani sebagai Direktur pengadaan Strategis 1 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.	Telah terealisasi
		Appointed Ms. Sripeni Inten Cahyani as Director of Strategic Procurement 1 of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).	Realized
3	RUPSLB tentang Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara pada tanggal 2 Agustus 2019.	Memberhentikan dengan hormat Sdr. Machnizon sebagai Direktur Bisnis Regional Kalimantan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-21 1/MBU/10/2015 tanggal 30 Oktober 2015 jo. SK-138/MBU/07/2017 tanggal 24 Juli 2017 dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.	Telah terealisasi
	EGMS on Dismissal of Members of Board of Directors of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) on August 2, 2019.	Honorably dismissed Mr. Machnizon as Regional Business Director of Kalimantan at PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) who was appointed based on Decision of the Minister of SOE No. SK-211/MBU/10/2015 dated October 30, 2015 jo. SK-138/MBU/07/2017 dated July 24, 2017 with appreciation for his contributions of and thoughts during his term.	Realized
		Menugaskan Sdr. Sripeni Inten Cahyani untuk menjalankan tugas sebagai Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara selain menjalankan tugasnya sebagai Direktur Pengadaan Strategis 1, sampai dengan diangkatnya Direktur Utama Perusahaan perseroan (persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang definitif.	Telah terealisasi
		Assigned Ms. Sripeni Inten. Cahyani to carry out her duties as President Director of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) in addition to her duties as Strategic Procurement Director 1, untilappointment of President Director of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).	Realized
		Menugaskan Sdr. Syamsul Huda untuk menjalankan tugas sebagai Direktur Bisnis Regional Kalimantan Perusahaan perseroan (persero) PT Perusahaan Listrik Negara selain menjalankan tugasnya sebagai Direktur Bisnis Regional Sulawesi, sampai dengan diangkatnya Direktur Bisnis Regional Kalimintan Perusahaan Perseroan (Persero) PT perusahaan Listrik Negara yang definitif.	Telah terealisasi
		Assigned Mr. Syamsul Huda to carry out his duties as Regional Business Director of Kalimantan of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) in addition to his duties as Regional Business Director of Sulawesi, until definitive appointment of Regional Business Director of Kalimintan of PT Perusahaan Negara (Persero).	Realized

No.	Mata Acara Agenda	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
4	RUPSLB tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara pada tanggal 30 Agustus 2019.	Memberhentikan dengan hormat Sdr. Rionald Silaban sebagai Komisaris perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan usaha Milik Negara Nomor: SK-41/MBU/02/2017 tanggal 28 Februari 2017, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.	Telah terealisasi
	EGMS on Dismissal and Appointment of Members of Board of Commissioners of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) on August 30, 2019.	Honorably dismissed Mr. Rionald Silaban as Commissioner of PT Perusahaan Listrik Negara who was appointed based on Decision of the Minister of SOE No: SK-41/MBU/02/2017 dated February 28, 2017, with appreciation for his contributions and thoughts during his term.	Realized
		Mengangkat Sdr. Sumiyati sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.	Telah terealisasi
		Appointed Ms.Sumiyati as Commissioner of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).	Realized
5	RUPSLB tentang Pemberhentian Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara pada tanggal 17 Oktober 2019.	Memberhentikan dengan hormat Sdr. Darmono sebagai Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-211/MBU/10/2014 pada tanggal 17 Oktober 2014, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatannya tersebut.	Telah terealisasi
	EGMS on Dismissal of Independent Commissioner of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) on October 17, 2019.	Honorably dismissed Mr. Darmono as Independent Commissioner of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) who was appointed based on Decision of the Minister of SOE No. SK-211/MBU/10/2014 on October 17, 2014, with appreciation for his contributions and thoughts during his term.	Realized
6	RUPSLB tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris, serta Penetapan Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara pada tanggal 23 Desember 2019.	Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara: 1. Sdr. Sarwono Sudarto sebagai Direktur Keuangan; 2. Sdr. Amir Rosidin sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah; 3. Sdr. Supangkat Iwan Santoso sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-272/MBU/12/2014 tanggal 23 Desember 2014 jo. Nomor: SK-138/MBU/07/2017 tanggal 24 Juli 2017, Nomor: SK-272/MBU/12/2014 tanggal 23 Desember 2014 jo. Nomor: SK-138/MBU/07/2017 tanggal 24 Juli 2017, Nomor: SK-272/MBU/12/2014 tanggal 23 Desember 2014 jo. Nomor: SK-138/MBU/07/2017 tanggal 24 Juli 2017 jo. Nomor: SK-109/MBU/05/2019 tanggal 29 Mei 2019, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.	Telah terealisasi
	EGMS on Dismissal and Appointment of Members of Board of Commissioners and Appointment of Independent Commissioner of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) on December 23, 2019.	Honorably dismissed the following names as Members of Board of Directors of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero): 1. Mr. Sarwono Sudarto as Director of Finance; 2. Mr. Amir Rosidin as Regional Business Director of Central Java; 3. Mr. Supangkat Iwan Santoso as Regional Business Director of East Java, Bali and Nusa Tenggara who were respectively appointed based on Decision of the Minister of SOE No. SK-272/MBU/12/2014 dated December 23, 2014 jo. No. SK-138/MBU/07/2017 dated July 24, 2017, No. SK-272/MBU/12/2014 December 23, 2014 jo. No. SK-138/MBU/07/2017 dated July 24, 2017, No. SK-272/MBU/12/2014 December 23, 2014 jo. No. SK-138/MBU/07/2017 dated July 24, 2017 jo. No. SK-109/MBU/05/2019 dated May 29, 2019, with appreciation for contributions and thoughts during their terms.	Realized

No.	Mata Acara Agenda	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
		Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara sebagai berikut; 1. Semula tidak ada menjadi Wakil Direktur Utama; 2. Semula Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat menjadi Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali; 3. Semula Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara menjadi Tidak Ada; 4. Semula Direktur Bisnis Regional Sulawesi menjadi Direktur Bisnis Regional Sulawesi Kalimantan; 5. Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua menjadi Direktur Bisnis Regional Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara.	Telah terealisasi
		Changed the nomenclature of Members of Board of Directors of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), as follows; 1. New position of Vice President Director; 2. Previously Regional Business Director of West Java to become Regional Business Director of Java, Madura and Bali; 3. Omitted position of Regional Business Director of East Java, Bali and Nusa Tenggara; 4. Previously Regional Business Director of Sulawesi to become Regional Business Director of Kalimantan and Sulawesi; 5. Regional Business Director of Maluku and Papua to become Regional Business Director of Maluku, Papua and Nusa Tenggara.	Realized
		Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara: 1. Sdr. Haryanto WS semula Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat menjadi Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali; 2. Sdr. Syamsul Huda semula Direktur Bisnis Regional Sulawesi menjadi Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Kalimantan; 3. Sdr. Ahmad Rofiq semula Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua menjadi Direktur Bisnis Regional Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-211/MBU/10/2015 tanggal 30 Oktober 2015, Nomor: SK-138/MBU/07/2017 tanggal 24 Juli 2017, dan Nomor: SK-138/MBU/07/2017 tanggal 24 Juli 2017, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatannya sebagaimana Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tersebut.	Telah terealisasi
		Transferred assignments of the following members of Board of Directors of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero): 1. Mr. Haryanto WS previously Regional Business Director of West Java to become Regional Business Director of Java, Madura and Bali; 2. Mr. Syamsul Huda previously Regional Business Director of Sulawesi to become Regional Business Director of Sulawesi and Kalimantan; 3. Mr. Ahmad Rofiq previously Regional Business Director of Maluku and Papua to become Regional Business Director of Maluku, Papua and Nusa Tenggara. who were appointed respectively based on Decision of the Minister of SOE No. SK-211/MBU/10/2015 dated October 30, 2015, No. SK-138/MBU/07/2017 dated July 24, 2017 and No. SK-138/MBU/07/2017 dated July 24, 2017, with terms continuing the remaining terms according to Decision of the Minister of SOE referred to.	Realized
		Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara: 1. Sdr. Zulkifli Zaini-sebagai Direktur Utama; 2. Sdr. Darmawan Prasodjo-sebagai Wakil Direktur Utama; 3. Sdr. Sinthya Roesly-sebagai Direktur Keuangan.	Telah terealisasi
		Appointed the following names as Members of Board of Directors of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero): 1. Mr. Zulkifli Zaini – as President Director; 2. Mr. Darmawan Prasodjo – as Vice President Director; 3. Ms. Sinthya Roesly – as Director of Finance.	Realized

No.	Mata Acara Agenda	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
7	RUPSLB tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara pada tanggal 23 Desember 2019.	Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Aloysius Kiik Ro sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-183/MBU/09/2015 tanggal 25 September 2015, terhitung sejak tanggal 18 November 2019, serta memberhentikan dengan hormat Sdr. Sumiyati sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-189/MBU/08/2019 pada tanggal 30 Agustus 2019, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran masing-masing selama memangku jabatan-jabatan tersebut.	Telah terealisasi
	EGMS on Termination, Amendment of Nomenclature and Appointment of Members of Board of Directors of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) on December 23, 2019.	Affirmed honorable dismissal of Mr. Aloysius Kiik Ro as Commissioner of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) who was appointed based on Decision of the Minister of SOE No. SK-183/MBU/09/2015 dated September 25, 2015, effective from November 18, 2019, and honorably dismissed Ms. Sumiyati as Commissioner of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) who was appointed based on Decision of the Minister of SOE No. SK-189/MBU/08/2019 dated August 30, 2019, with appreciation for contributions of and thoughts during their terms.	Realized
8	RUPSLB tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara pada tanggal 26 Desember 2019.	Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Darmawan Prasodjo sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-224/MBU/08/2018 tanggal 6 Agustus 2018, terhitung sejak tanggal 23 Desember 2019, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan-jabatan tersebut.	Telah terealisasi
	EGMS on Dismissal and Appointment of Members of Board of Commissioners of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) on December 26, 2019.	Affirmed honorable dismissal of Mr. Darmawan Prasodjo as Commissioner of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) who was appointed based on the Minister of SOE Decision No. SK-224/MBU/08/2018 dated August 6, 2018, effective from December 23, 2019, with appreciation for contributions and thoughts during his term.	Realized
		Mengangkat Sdr. Mohamad Ikhsan sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.	Telah terealisasi
		Appointed Mr. Mohamad Ikhsan as Commissioner of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).	Realized

INFORMASI MENGENAI KEPUTUSAN RUPS TAHUN SEBELUMNYA YANG DIREALISASIKAN PADA TAHUN BUKU ATAU BELUM DIREALISASIKAN

Seluruh Keputusan RUPS tahun 2018 telah direalisasikan dengan baik pada tahun 2018. Tidak ada Keputusan RUPS tahun 2018 yang direalisasikan pada tahun buku 2019 atau belum direalisasikan.

INFORMATION ON RESOLUTIONS OF GMS IN THE PREVIOUS YEAR THAT WERE REALIZED OR NOT REALIZED IN CURRENT YEAR

All 2018 GMS resolutions have been properly realized in 2018. No 2018 GMS Resolutions were realized in financial year 2019 or have not been realized.

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan, baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan Direksi, serta memberi nasihat kepada Direksi.

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DASAR HUKUM PENUNJUKAN

Pada tahun 2019 terjadi perubahan komposisi Dewan Komisaris PLN berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT PLN (Persero) No. SK-55/MBU/02/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang pemberhentian dengan hormat Oegroseno dari jabatannya sebagai Komisaris Independen dan Andi Noorsaman Sommeng sebagai Komisaris, serta pengangkatan Deden Juhara sebagai Komisaris Independen dan pengangkatan Ridha Mulyana sebagai Komisaris Perusahaan;
2. Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT PLN (Persero) No. SK-189/MBU/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang pemberhentian Rionald Silaban dari jabatannya sebagai Komisaris Perusahaan, sekaligus mengangkat Sumiyati sebagai Komisaris Perusahaan;
3. Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT PLN (Persero) No. SK-221/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang pemberhentian dengan hormat Darmono dari jabatannya sebagai Komisaris Independen;
4. Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT PLN (Persero) No. SK-326/MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang pemberhentian dengan hormat Aloysius Kiik Ro dan Sumiyati dari jabatannya sebagai Komisaris Perusahaan serta pengangkatan Amien Sunaryadi sebagai Komisaris Utama dan Suahasil Nazara sebagai Wakil Komisaris Utama Perusahaan;
5. Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT PLN (Persero) No. SK-334/MBU/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang pemberhentian dengan hormat Darmawan Prasodjo dari jabatannya sebagai Komisaris dan pengangkatan Mohamad Ikhsan sebagai Komisaris Perusahaan.

Board of Commissioners is the Company's organ that is responsible for supervision of management policies and measures, regarding the Company and its business carried out by Board of Directors as well as providing advices to Board of Directors.

COMPOSITION OF BOARD OF COMMISSIONERS AND LEGALITY OF APPOINTMENT

In 2019, there were changes in composition of Board of Commissioners based on the followings:

1. Decision of the Minister of SOE as GMS of PT PLN (Persero) No. SK-55/MBU/02/2019 dated February 28, 2019 concerning honorable dismissal of Oegroseno from his position as Independent Commissioner and Andi Noorsaman Sommeng as Commissioner and appointment of Deden Juhara as Independent Commissioner and Ridha Mulyana as Commissioner;
2. Decision of the Minister of SOE as GMS of PT PLN (Persero) No. SK-189/MBU/08/2019 dated August 30, 2019 concerning dismissal of Rionald Silaban from his position as Commissioner, and appointed Sumiyati as Commissioner;
3. Decision of the Minister of SOE as GMS of PT PLN (Persero) No. SK-221/MBU/10/2019 dated October 17, 2019 concerning honorable dismissal of Darmono from his position as Independent Commissioner;
4. Decision of the Minister of SOE as GMS of PT PLN (Persero) No. SK-326/MBU/12/2019 dated December 23, 2019 concerning honorable dismissal of Aloysius Kiik Ro and Sumiyati from their positions as Commissioners and appointment of Amien Sunaryadi as President Commissioner and Suahasil Nazara as Vice President Commissioner;
5. Decision of the Minister of SOE as GMS of PT PLN (Persero) No. SK-334/MBU/12/2019 dated December 26, 2019 concerning honorable dismissal of Darmawan Prasodjo from his position as Commissioner and appointment of Mohamad Ikhsan as Commissioner.

Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris PLN per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Accordingly, composition of PLN's Board of Commissioners as at December 31, 2019 was as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Akhir Masa Jabatan End of Term of Office
Amien Sunaryadi	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	Keputusan Menteri (Kepmen) BUMN selaku RUPS PT PLN (Persero) No. SK-326/MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 Ministry of SOEs' Decree as GMS No. SK-326/MBU/12/2019 dated December 23, 2019	23 Desember 2024 December 23, 2024
Suahasil Nazara	Wakil Komisaris Utama Vice President Commissioner	Kepmen BUMN selaku RUPS PT PLN (Persero) No. SK-326/MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 Ministry of SOEs' Decree as GMS No. SK-326/MBU/12/2019 dated December 23, 2019	23 Desember 2024 December 23, 2024
Ilya Avianti	Komisaris Commissioner	Kepmen BUMN selaku RUPS PT PLN (Persero) No. SK-145/MBU/07/2017 tanggal 28 Juli 2017 Ministry of SOEs' Decree as GMS No. SK-145/MBU/07/2017 dated Juli 28, 2017	28 Juli 2022 July 28, 2022
Deden Juhara	Komisaris Independen Independent Commissioner	Kepmen BUMN selaku RUPS PT PLN (Persero) No. SK-55/MBU/02/2019 tanggal 28 Februari 2019 Ministry of SOEs' Decree as GMS No. SK-55/MBU/02/2019 dated February 28, 2019	28 Februari 2024 February 28, 2024
Rida Mulyana	Komisaris Commissioner	Kepmen BUMN selaku RUPS PT PLN (Persero) No. SK-55/MBU/02/2019 tanggal 28 Februari 2019. Ministry of SOEs' Decree as GMS No. SK-55/MBU/02/2019 dated February 28, 2019	28 Februari 2024 February 28, 2024
Mohamad Ikhsan	Komisaris Commissioner	Kepmen BUMN selaku RUPS PT PLN (Persero) No. SK-334/MBU/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 Ministry of SOEs' Decree as GMS No. SK-334/MBU/12/2019 dated December 26, 2019	26 Desember 2024 December 26, 2024

Catatan Note:
Setelah periode pelaporan tahun 2019, RUPS mengangkat Murtaqi Syamsuddin sebagai Komisaris Independen dan Dudy Purwagandhy sebagai Komisaris pada 16 Januari 2020.
Subsequent to 2019 reporting period, GMS appointed Murtaqi Syamsuddin as Independent Commissioner and Dudy Purwagandhy as Commissioner on January 16, 2020

INFORMASI MENGENAI KOMISARIS INDEPENDEN

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perusahaan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Kriteria penentuan Komisaris Independen merujuk pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, Pasal 13 ayat 3 dan 4.

INDEPENDENT COMMISSIONER

Determination Criteria for Independent Commissioners

Independent Commissioners are members of Board of Commissioners who do not have financial, management, share ownership and/or family relations with other members of Board of Commissioners, members of Board of Directors and/or Controlling Shareholders or relations with the Company, which may affect their ability to act independently. The criteria for determining Independent Commissioners refer to Minister of SOE Regulation No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 on Implementation of Good Corporate Governance in SOE, Article 13 paragraphs 3 and 4.

Komposisi dan Dasar Hukum Penunjukan

Perusahaan memiliki 3 (tiga) orang Komisaris Independen yaitu Amien Sunaryadi yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-326/MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019; Deden Juhara yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-55/MBU/02/2019 tanggal 28 Februari 2019; dan Murtaqi Syamsuddin yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-22/MBU/02/2020. Komposisi Komisaris Independen PT PLN (Persero) telah memenuhi 30% dari total anggota Dewan Komisaris atau telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Perdagangan Efek. Profil Komisaris Independen disajikan di bagian Profil Dewan Komisaris.

Composition and Legality of Appointment

The Company has 3 (three) Independent Commissioners namely Amien Sunaryadi who was appointed based on Minister of SOE Decision No. SK-326/MBU/12/2019 dated December 23, 2019; Deden Juhara who was appointed based on Minister of SOE Decision No. SK-55/MBU/02/2019 dated February 28, 2019; and Murtaqi Syamsuddin who was appointed based on Minister of SOE Decision No. SK-22/MBU/02/2020. The composition of Independent Commissioners of PT PLN (Persero) has fulfilled 30% of the total members of Board of Commissioners or has met the Financial Services Authority Regulation No. 57/POJK.04/2017 Regarding the Implementation of Governance of Securities Companies Conducting Business Activities as Underwriters and Brokers. The profiles of Independent Commissioners are presented in Profiles of Board of Commissioners section.

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Komisaris Independen berkomitmen untuk menjunjung tinggi independensi, objektivitas dan keadilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dengan menghindari adanya keputusan dan kebijakan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan atau preferensi terhadap kepentingan salah satu pihak. Komisaris Independen turut mempertahankan reputasi Perusahaan dengan menjalankan prinsip GCG yang benar sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku, yang tercermin dalam sikap, perbuatan dan segala kebijakan yang diambil, baik secara individual dan mufakat.

Independence Statement of Independent Commissioners

Independent Commissioners are committed to upholding independence, objectivity and fairness in carrying out their duties and responsibilities, by avoiding decisions and policies that have the potential to cause conflict of interest or preferences towards the interests of other parties. Independent Commissioners also maintain the Company's reputation by implementing GCG principles in accordance with the applicable guidelines and regulations, as reflected in the attitudes, measures and policies made, both individually and by consensus.

MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris mengacu pada Pasal 28 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badang Usaha Milik Negara, yaitu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk melakukan penggantian sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

OFFICE TERM OF BOARD OF COMMISSIONERS

Office term of Board of Commissioners is in accordance with Article 28 Paragraph 3 of Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, which is for 5 years and the member may be reappointed for another office term, with due regards to GMS' right to make changes at any time if deemed necessary before the office term ends.

PANDUAN TATA LAKSANA KERJA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki panduan tata laksana kerja Dewan Komisaris yang disebut "Board Manual Dewan Komisaris (Buku 3)" sebagai panduan yang menjelaskan tahapan aktivitas yang terstruktur, sistematis, dan mudah dipahami sehingga dapat menjadi acuan bagi Direksi melaksanakan tugasnya untuk mencapai visi, misi dan tujuan perusahaan. Panduan ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktik-praktik terbaik (*best practices*) GCG.

BOARD MANUAL FOR BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners has work procedures for Board of Commissioners called "Board Manual (Book 3)" as guidelines that explain activities in a structured, systematic and easy to understand manner so that they serve as a reference for the Board of Commissioners in performing their duties to achieve the Company's vision, missions and goals. The guidelines were prepared based on the principles of corporate law, provisions in the Articles of Association, applicable laws and regulations, advice of the Shareholder and GCG best practices.

KEBIJAKAN TERKAIT PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS APABILA TERLIBAT DALAM KEJAHATAN KEUANGAN

Apabila dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris terlibat dalam kejahatan keuangan, maka proses tindak lanjut yang dilakukan Perusahaan akan didasarkan pada Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

POLICIES RELATED TO RESIGNATION OF COMMISSIONERS DUE TO INVOLVEMENT IN FINANCIAL CRIME

Should, in performing his/her duties, a Commissioner be engaged in financial crime, then the Company shall follow up the case according to the Articles of Association and prevailing laws and regulations.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris mengacu pada UUPT, Anggaran Dasar, dan *Board Manual*, antara lain adalah:

1. Melakukan pengawasan terhadap pengurusan Perusahaan yang dilakukan Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan Perusahaan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Melaksanakan kepentingan Perusahaan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS;

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF BOARD OF COMMISSIONERS

Duties, responsibilities and authorities of Board of Commissioners refer to the Law on Limited Liability Companies, the Articles of Association, and Board Manual, include:

1. Supervising the Company's management policies carried out by the Board of Directors and providing advice to the Board of Directors on Company development plan, work and budget plan, as well as implementation of provisions in the Articles of Association, resolutions of General Meetings of Shareholders and prevailing laws and regulations;
2. Performing duties, authorities and responsibilities, in accordance with the Articles of Association, GMS Resolutions and prevailing laws and regulations;
3. Fulfilling the Company interest by taking into consideration the interests of the Shareholder, and being accountable to the GMS;

4. Meneliti dan menalaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut;
5. Mengambil alih tugas dan tanggung jawab operasional selayaknya Direksi pada kondisi Perusahaan tidak memiliki satu pun Direktur;
6. Mewakili Perusahaan dalam hal seluruh Direksi memiliki benturan kepentingan;
7. Melakukan proses penunjukan auditor eksternal Perusahaan untuk ditetapkan oleh RUPS.

WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Dewan Komisaris berwenang untuk:

1. Secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu berhak:
   - Memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perusahaan; dan
   - Memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain, surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Membentuk komite-komite yang berfungsi sebagai penunjang tugas pengawasan Dewan Komisaris atau menunjuk tenaga ahli;
3. Meminta penjelasan tentang segala hal kepada Direksi dan Direksi wajib memberikan penjelasan;
4. Meminta Direksi dan/atau pejabat Perusahaan dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris;
5. Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
6. Mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris;
7. Memberhentikan sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi.

4. Examining and reviewing the Annual Report prepared by Board of Directors and signing the respective report;
5. Taking over operational duties and responsibilities of the Board of Directors in the event that the Company does not have any Director at all;
6. Representing the Company in the event that the Board of Directors has a conflict of interest;
7. Organizing appointment of the External Auditor of the Company to be determined by the GMS.

AUTHORITIES OF BOARD OF COMMISSIONERS

In performing its supervisory duties, Board of Commissioners is authorized to:

1. Collectively or individually, at all times:
   - Enter buildings, yards and locations used by or owned by the Company; and
   - Examine books, evidence, papers, inventories, examine and check cash position for verification and other purposes, examine securities and acknowledge any measure taken by Board of Directors.
2. Establish committees that support the supervisory duties of the Board of Commissioners or appoint experts;
3. Inquire for explanation on any matters from Board of Directors, to which the Board of Directors must provide explanation;
4. Inquire of Directors and/or other officials of the Company as acknowledged by the Board of Directors, to attend meetings of the Board of Commissioners;
5. Attend meetings of Board of Directors and provide opinions on the discussed matters;
6. Appoint a Secretary of the Board of Commissioners;
7. Temporarily dismiss one or more members of the Board of Directors.

PEMBAGIAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugas, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretariat Dewan Komisaris dan tiga komite yang terdiri dari Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Dewan Komisaris membagi tugas dan wewenang di antara anggota Dewan Komisaris dalam bentuk penetapan Komisaris sebagai ketua maupun anggota pada komite-komite tersebut. Per 31 Desember 2019 anggota Dewan Komisaris yang bertugas di Komite Dewan Komisaris adalah:

SEGREGATION OF DUTIES OF BOARD OF COMMISSIONERS

In performing its duties, Board of Commissioners is assisted by the Secretary of the Board of Commissioners and three committees, namely Audit Committee, Risk Management Committee, and Nomination and Remuneration Committee. The Board of Commissioners also segregates the duties and authorities of Commissioners by designating Commissioners as Chairman or members in the aforementioned Committees. As of December 31, 2019, member of Board of Commissioners assigned in Board of Commissioners Committee as as follows:

Komite Audit Audit Committee	**Komite Manajemen Risiko** Risk Management Committee	**Komite Nominasi & Remunerasi** Nomination & Remuneration Committee
Amien Sunaryadi (Ketua Chairman)	Suahasil Nazara (Ketua Chairman)	Deden Juhara (Ketua Chairman)
Ilya Avianti (Anggota Member)	Rida Mulyana (Anggota Member)	
	Mohamad Ikhsan (Anggota Member)	

INDEPENDENSI, HUBUNGAN AFILIASI DAN KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Independensi

Anggota Dewan Komisaris menandatangani Pakta Integritas di setiap awal tahun untuk menyatakan status independensinya dan pada setiap akhir tahun untuk menyatakan apakah dalam satu tahun tersebut terdapat situasi benturan kepentingan oleh Dewan Komisaris atas tindakan yang dilakukan. Sekretaris Dewan Komisaris bertugas untuk memastikan praktik ini telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip GCG.

Pada tahun 2019, seluruh anggota Dewan Komisaris telah menandatangani Pakta Integritas yang berisi butir-butir berikut:

INDEPENDENCE, AFFILIATE RELATIONSHIP AND SHARE OWNERSHIP OF MEMBER OF BOARD OF COMMISSIONERS

Independence

Each member of Board of Commissioners signs an Integrity Pact at the beginning of each year to declare his/her independence and at the end of each year makes a statement whether during the year there had been any conflict of interests of the Board of Commissioners for the measures taken. The Secretary of the Board of Commissioners shall ensure that this practice is carried out in accordance with GCG principles.

In 2019, all members of Board of Commissioners signed the Integrity Pact which contains the following matters:

Pakta Integritas Dewan Komisaris Integrity Pact of Board of Commissioners	Amien Sunaryadi	Suahasil Nazara	Ilya Avianti	Deden Juhara	Rida Mulyana	Mohamad Ikhsan
1. Sanggup mengemban amanah atas dasar kepercayaan. Willing to have the fiduciary duty.	√	√	√	√	√	√
2. Mengupayakan capaian kinerja Perusahaan secara maksimal dengan mengindahkan prinsip-prinsip GCG. Striving for Company's maximum performance by adhering to GCG principles.	√	√	√	√	√	√
3. Bersikap dan mengambil keputusan dengan penuh kehati-hatian atau *prudent*. Being careful and prudent in making decisions (duty of care).	√	√	√	√	√	√
4. Berani mengambil tanggung jawab penuh atas jalannya Perusahaan. Taking full responsibility for the Company.	√	√	√	√	√	√
5. Secara konsisten mendahulukan yang terbaik bagi kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi. Consistently prioritizing the Company's best interests over personal interests (duty of loyalty).	√	√	√	√	√	√
6. Menjauhi segala bentuk benturan kepentingan baik potensi maupun aktual. Steering clear of any potential or actual conflict of interest (Conflict of Interest Rule).	√	√	√	√	√	√
7. Mematuhi semua ketentuan perundangan yang berlaku. Comply with all applicable laws and regulations (accountability).	√	√	√	√	√	√
8. Selama menjabat, tidak akan memanfaatkan posisi pada Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga dan saudara, maupun golongan tertentu. During their tenure, they will not take advantage of the Company's position, directly or indirectly, for their personal, family, or relative's interests, or those of other groups.	√	√	√	√	√	√

Hubungan Afiliasi

Dalam rangka menjaga independensi, menghindari adanya benturan kepentingan dan menjaga akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan dan dalam penyelenggaraan kegiatan operasional, Perusahaan memiliki aturan melarang adanya hubungan afiliasi maupun hubungan keluarga langsung maupun tidak langsung di antara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

Aturan tersebut dipegang teguh oleh seluruh anggota Dewan Komisaris sehingga antar anggota Dewan Komisaris yang menjabat saat ini tidak memiliki hubungan keuangan ataupun hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan anggota Direksi baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Affiliate Relationship

In order to uphold independence, to avoid conflict of interest and to maintain accountability in all decision-making and implementation of operational activities, the Company prohibits any direct or indirect affiliate relationships among members of Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholder.

These rules are firmly upheld by all members of the Board of Commissioners so that the current members of the Board Commissioners do not have any financial or family relations up to the third degree with other Commissioners or Directors either horizontally or vertically, including via marital relationships.

Kepemilikan Saham

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai kepemilikan saham di Perusahaan baik secara pribadi maupun anggota keluarganya, dan tidak mempunyai kepemilikan saham pada perusahaan lain baik secara pribadi maupun keluarganya.

Share Ownership

All Commissioners do not have shares of the Company either owned personally or by their family members and do not have shares in other companies either owned personally or by their family members.

RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Beberapa anggota Dewan Komisaris Perusahaan memiliki jabatan pada beberapa institusi lain. Namun demikian perangkapan jabatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana ditetapkan dalam kriteria Dewan Komisaris Perusahaan. Rangkap Jabatan dari anggota Dewan Komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

CONCURENT POSITIONS OF BOARD OF COMMISSIONERS

Several members of the Company's Board of Commissioners have concurrent positions in other institutions. However, the concurrent positions are not prohibited as stipulated in criteria of the Company's Board of Commissioners. The concurrent positions held by Commissioners are as follows:

Nama Name	**Jabatan di PLN** Position in PLN	**Jabatan Di Instansi/Perusahaan Lain** Position In Other Institutions/Companies	**Nama Instansi/Perusahaan Lain** Name Of The Other Institutions/ Companies
Amien Sunaryadi	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner	• Partner • Senior Advisor • Partner • Senior Advisor	• Firma Hukum Assegaf Hamzah and Patners/AHP (2019-sekarang) • PT Integra Solusi Optima/ISO (2019-sekarang)
Suahasil Nazara	Wakil Komisaris Utama Vice President Commissioner	• Wakil Menteri Keuangan Vice Minister of Finance • Guru Besar Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Professor in Economics at the Faculty of Economics and Business, University of Indonesia (FEB UI) • Anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional (KEN) Member of National Economics Committee (KEN)	• Kementerian Keuangan Ministry of finance • Universitas Indonesia University of Indonesia
Ilya Avianti	Komisaris Commissioner	Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran (2007-Sekarang) Professor of the University's Faculty of Economics Padjadjaran (2007-Present)	
Deden Juhara	Komisaris Independen Independent Commissioner	Tidak memiliki jabatan rangkap He does not have concurrent position	
Rida Mulyana	Komisaris Commissioner	Direktur Jendral Ketenagalistrikan Director General of Electricity	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ministry of Energy and Mineral Resources
Mohamad Ikhsan	Komisaris Commissioner	• Anggota Dewan Penasihat Member of Advisory Board • Staf Khusus Menteri BUMN Special Staff of the Minister of SOEs • Anggota Penasihat Kebijakan Member of Policy Advisory • Anggota Masyarakat Ekonomi Statistik Member of Economic Statistics Society • Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Professor at the Faculty of Economics and Business, University of Indonesia (FEB UI)	• Mandiri Institute • Kementerian BUMN Ministry of SOEs • Asian Development Bank (ADB) Institute, Tokyo, Jepang ADB Institute, Tokyo, Japan • Badan Pusat Statistik & Bappenas Statistics Indonesia & Bappenas • Universitas Indonesia University of Indonesia

PROGRAM PENGENALAN UNTUK KOMISARIS BARU

Program Pengenalan ditujukan bagi Komisaris yang baru pertama kali diangkat agar Komisaris tersebut dapat segera mengenal proses bisnis Perusahaan, termasuk seluruh permasalahan yang telah, sedang dan akan dihadapi sehingga dapat bekerja dengan optimal untuk kepentingan Perusahaan. Pada tahun 2019 terdapat 5 (lima) Komisaris yang baru pertama kali diangkat dan semuanya telah mendapatkan program pengenalan perusahaan untuk Komisaris baru.

INDUCTION PROGRAM FOR COMMISSIONERS

The Induction Program is intended for newly appointed Commissioners to be able to immediately familiar with the Company's business processes, including all previous, current and potential problems in order to work optimally in the interest of the Company. There were 5 (five) Commissioners who were appointed for the first time in 2019 and all of them had obtained a company introduction program for new Commissioners.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris telah mengikuti program pengembangan kompetensi dengan mengikuti seminar, *workshop*, *benchmarking*, pelatihan/diklat, dan kunjungan kerja, sebagai berikut:

COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAMS OF BOARD OF COMMISSIONERS

During 2019, Commissioners participated in competency development programs by attending seminars, workshops, benchmarking, trainings and work visits, as follows:

Nama Name	**Tanggal** Date	**Program Pengembangan** Development Program
Ilya Avianti	16 Januari January 16	Kunjungan kerja ke PLN Puslitbang, Pusenlis dan Pusertif, Jakarta Work visit to PLN Puslitbang, Pusenlis and Pusertif, Jakarta
	6-8 Februari January 6-8	Kunjungan kerja ke PLN Batam Work visit to PLN Batam
	17-19 Februari February 17-19	Kunjungan kerja ke PLN Area Bengkulu Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu Work visit to PLN Area of Bengkulu, Region of South Sumatra, Jambi and Bengkulu
	11-13 Maret March 11-13	Kunjungan kerja ke PLN Wilayah Sumatera Utara Work visit to PLN Region of North Sumatra
	24-26 Maret March 24-16	Kunjungan kerja ke PLN Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat Work visit to PLN Region of South Sulawesi, Southeast Sulawesi and West Sulawesi
	12-14 April April 12-14	Kunjungan kerja ke PLN Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Work visit to PLN Distribution of Central Java and D.I. Yogyakarta
	24-25 Juni June 24-25	Kunjungan kerja ke PLN Distribusi Jawa Barat Work visit to PLN Distribution of West Java
	12 Agustus August 12	Kunjungan kerja ke PLN Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Work visit to PLN Distribution of Central Java and D.I. Yogyakarta
	14-16 Agustus August 14-16	Kunjungan kerja ke PLN UIT JBTB dan PLN UIP JBTB 1 Work visit to PLN UIT JBTB and PLN UIP JBTB 1
	26-28 Agustus August 26-28	Kunjungan kerja ke PLN Distribusi Bali Work visit to PLN Distribution of Bali
	1-3 Oktober October 1-3	Kunjungan kerja ke PLN Wilayah Aceh Work visit to PLN Region of Aceh
	4-7 Oktober October 4-7	Kunjungan kerja ke PLN Area Kupang & Labuan Bajo Work visit to PLN Area of Kupang & Labuan Bajo
	9-11 Oktober October 9-11	Kunjungan kerja ke PLN Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo Work visit to PLN Region of North Sulawesi, Central Sulawesi and Gorontalo
	13-22 Oktober October 13-22	Konferensi Internal Audit - European Confederation of Institute of Internal Auditing (ECIIA) 2019 – Luxembourg Internal Audit Conference – European Confederation of Institute of Internal Auditing (ECIAA) 2019 - Luxembourg

Nama Name	Tanggal Date	Program Pengembangan Development Program
	30 Oktober-1 November October 31-November 1	Kunjungan kerja ke PLN Wilayah Kalimantan Barat Work visit to PLN Region of West Kalimantan
	28-29 November November 28-29	Kunjungan kerja ke PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur Work visit to PLN Region of East Nusa Tenggara
	4-6 Desember December 4-6	Kunjungan kerja ke PLN Wilayah Kalimantan Timur dan Utara Work visit to PLN Region of East and North Kalimantan
	18-20 Desember December 18-20	Kunjungan kerja ke PLN Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Work visit to PLN Distribution of Central Java and D.I. Yogyakarta
Deden Juhara	11-13 Maret March 11-13	Kunjungan kerja ke PLN Wilayah Sumatera Utara Work visit to PLN Region of North Sumatera
	24-26 Maret March 24-26	Kunjungan kerja ke PLN Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat Work visit to PLN Region of South Sulawesi, Southeast Sulawesi and West Sulawesi
	12-14 April April 12-14	Kunjungan kerja ke PLN Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Work visit to PLN Distribution of Central Java and D.I. Yogyakarta
	24-25 Juni June 24-25	Kunjungan kerja ke PLN Distribusi Jawa Barat Work visit to PLN Distribution of West Java
	24-25 Juli July 24-25	Kunjungan kerja ke PLN Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat Work visit to PLN Region of South Sulawesi, Southeast Sulawesi and West Sulawesi
	14-16 Agustus August 14-16	Kunjungan kerja ke PLN UIT JBTB dan PLN UIP JBTB 1 Work visit to PLN UIT JBTB and PLN UIP JBTB 1
	26-28 Agustus August 26-28	Kunjungan kerja ke PLN Distribusi Bali Work visit to PLN Distribution of Bali
	1-3 Oktober October 1-3	Kunjungan kerja ke PLN Wilayah Aceh Work visit to PLN Region of Aceh
	30 Oktober-1 November October 30-November 1	Kunjungan kerja ke PLN Wilayah Kalimantan Barat Work visit tu PLN Region of West Kalimantan
	28-29 November November 28-29	Kunjungan kerja ke PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur Work visit to PLN Region of East Nusa Tenggara
	18-20 Desember December 18-20	Kunjungan kerja ke PLN Distribusi Jawa Tengah & DI. Yogyakarta Work visit to PLN Distribution of Central Java & D.I. Yogyakarta

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

Prosedur penetapan dan besaran remunerasi Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Gaji Direksi dan Dewan Komisaris BUMN beserta perubahannya yang terakhir Nomor: 01/MBU/05/2019, Tunjangan dan fasilitas lain disesuaikan dengan berpedoman pada Permen BUMN Nomor Per-04/MBU/2014 beserta perubahannya. Sesuai Peraturan Menteri tersebut, besaran remunerasi Dewan Komisaris adalah: honorarium Komisaris

REMUNERATION OF BOARD OF COMMISSIONERS

Procedure for Determining Remuneration for Board of Commissioners

Procedure for determination and amount of remuneration for Board of Commissioners refers to Minister of SOE Regulation No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determination of Remuneration for Board of Directors and Board of Commissioners, and its latest amendment No. 01/MBU/05/2019. The allowances and other facilities are adjusted to be guided by Permen BUMN No. Per-04/MBU/2014 along with their changes. In accordance with these Regulations, the amount of remuneration

Utama sebesar 45% dari gaji Direktur Utama, Wakil Komisaris Utama sebesar 42,5% dari gaji Direktur Utama dan Komisaris lainnya sebesar 90% dari honorarium Komisaris Utama.

for the Board of Commisioners is: honorarium for President Commissioner is 45% of the salary of President Director, Vice President Commissioner is 42.5% of the salary of President Director, and for other Commissioners is 90% of the honorarium of President Commissioner.

Struktur dan Besaran Remunerasi Dewan Komisaris

Besaran remunerasi Dewan Komisaris disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penetapan besaran remunerasi tersebut menerapkan Faktor Penyesuaian Industri yang mempertimbangkan sektor industri sejenis yang terukur (*benchmark*), kondisi persaingan usaha (*competitiveness*), kompleksitas usaha, serta kelangkaan sumber daya manusia. Remunerasi yang diterima Dewan Komisaris terdiri dari honorarium, tunjangan dan tantiem dengan perincian sebagai berikut:

Structure and Amount of Remuneration for Board of Commissioners

Remuneration for the Board of Commissioners is aligned with the Company's financial conditions and capability and shall not be contrary to the laws and regulations. Determination of the amount of honorarium applies Industrial Adjustment Factor, taking into account benchmark in similar industries, business competitiveness or complexity and scarcity of human resources. The remuneration received by the Board of Commissioners consists of honorarium, benefits and bonuses with the following details:

No.	Jenis Remunerasi Type of Remuneration	Keterangan Description
1	**Honorarium | Honorarium**	a. Komisaris Utama: 45% gaji Direktur Utama President Commissioner: 45% of President Director's salary b. Wakil Komisaris Utama: 42,5% gaji Direktur Utama Vice President Commissioner: 42,5% of President Director's salary c. Komisaris: 90% honorarium Komisaris Utama Commissioner: 90% of President Commissioner's Honorarium
2	**Tunjangan | Allowances**	
	Tunjangan hari raya keagamaan Religious holiday allowance	1 (satu) bulan honorarium 1 (one) month honorarium
	Tunjangan transportasi Transportation allowance	20% dari Honorarium 20% of Honorarium
	Asuransi purna jabatan Post-tenure insurance	Premi yang ditanggung 25% dari honorarium dalam satu tahun Premium covers 25% of annual honorarium
3	**Fasilitas | Facilities**	
	Fasilitas kesehatan Medical facilities	1 istri dan 3 orang anak usia maksimum 25 tahun One wife and three children with
	Fasilitas bantuan hukum Legal assistance	Diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Provided in accordance with prevailing laws and regulations
	Fasilitas keanggotaan klub bisnis Club membership facility	1 (satu) keanggotaan klub bisnis 1 (one) business club membership
	Pakaian Seragam Uniform	2 (dua) stel setiap 1 (satu) tahun 2 (two) sets every 1 (one) year

Secara total, remunerasi Dewan Komisaris yang diterima pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

In total, remuneration of the Board of Commissioners received in 2019 is as follows:

Jenis Remunerasi *	Jumlah Total	Besaran (juta Rp) Amount (million Rp)	Remuneration Type
Remunerasi		**58.596**	**Remuneration**
Honorarium	12	15.276	Honorarium
Tantiem Dipotong Pajak	14	43.320	Tantium Cut Taxes
Tunjangan		**3.824**	**Allowance**
Tunjangan Transportasi	12	3.055	Transportation Allowance
Tunjangan Hari Raya	7	769	Religious Day Allowance
JUMLAH|Total		**62.420**	

*Termasuk mantan anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya berakhir sebelum akhir tahun 2019
Including former members of the Board of Commissioners whose term ends before the end of 2019.

Pengungkapan Bonus Kinerja, Bonus Non-kinerja, dan/atau Opsi Saham yang Diterima Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menerima bagian dari keuntungan Perusahaan (tantiem) sebagaimana diatur dalam Permen BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Gaji Direksi dan Dewan Komisaris BUMN beserta perubahannya yang terakhir Nomor: 01/MBU/05/2019. Besaran tantiem juga mempertimbangkan capaian *key performance indicator* (KPI) dan tingkat kesehatan perusahaan (TKP). Pada tahun 2019 jumlah tantiem yang diterima anggota Dewan Komisaris (14 orang) sebesar Rp43,3 miliar.

Disclosure of Performance Bonuses, Non-performance Bonuses, and/or Stock Option Received by Board of Commissioners

Board of Commissioners receives a share of the Company's profits (tantiem) as stipulated in Regulation of the Minister of SOE No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determination of Salaries for Board of Directors and Board of Commissioners of SOE and its latest amendment No. 01/MBU/05/2019. The amount of tantiem also considers achievement of key performance indicators (KPI) and soundness level (TKP). In 2019, the amount of tantiem received by members of Board of Commissioners (14 Commissioners) was Rp43.3 billion.

Perusahaan tidak memiliki program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan Perusahaan (Employee Stock Ownership Program/Management Stock Ownership Program) karena Perusahaan tidak memiliki saham yang dijual ke publik.

The Company does not have Employee Stock Ownership Program/Management Stock Ownership Program because the Company's shares are not sold to the public.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris telah melakukan 20 kali rapat internal dengan tingkat kehadiran dan agenda rapat sebagai berikut:

MEETINGS OF BOARD OF COMMISSIONERS

During 2019, Board of Commissioners held 20 meetings with with attendance and meeting agenda as follows:

No.	Tanggal Rapat dan Kehadiran Meeting Date and Presence	Agenda Rapat	Meeting Agenda
1	9 Januari | January 9		
	Hadir|Present: 1. Ilya Avianti 2. Darmono 3. Oegroseno 4. Andy Noorsaman Someng 5. Budiman 6. Aloysius Kiik Ro 7. Rionald Silaban 8. Darmawan Prasodjo Tidak hadir|Absent: - Kuorum|Quorum: 100%	1. *Monitoring* tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris terdahulu 2. Penghapusan ATTB 3. Tambahan modal disetor ke anak perusahaan 4. Lain-lain: • Presentasi Komite Nominasi dan Remunerasi, • Rencana Kunjungan kerja Dewan Komisaris	1. Monitoring the follow up of Board of Commissioners' previous meeting 2. Elimination of ATTB 3. Additional capital paid to subsidiary companies 4. Others: • Nomination and Remuneration Committee Presentation • Work visit plan of Board of Commissioners
2	23 Januari | January 23		
	Hadir|Present: 1. Ilya Avianti 2. Darmono 3. Oegroseno 4. Andy Noorsaman Someng 5. Budiman 6. Aloysius Kiik Ro 7. Rionald Silaban 8. Darmawan Prasodjo Tidak hadir|Absent: - Kuorum|Quorum: 100%	1. *Monitoring* tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris terdahulu 2. *Review* tindaklanjut pemeriksaan BPK tahun 2005-2017 3. Permohonan Yayasan Mama-Mama Papua 4. Laporan RJPP 2019-2023 di Bandung 5. Laporan Kunjungan kerja ke Pusat-Pusat dan Proyek PLTD Minyak 110 MW Senayan, penugasan PLN kepada PT IP	1. Monitoring the follow up of Board of Commissioners' previous meeting 2. Reviewing the follow up of BPK examination from 2005-2017 3. Proporal from Mama-Mama Papua Foundation 4. Report of Long-Term Corporate Plan 2019-2023 in Bandung 5. Report of work visit to Centers and PLTD Minyak 110 MW Senayan Project, assignment of PLN to PT IP
3	6 Februari | February 6		
	Hadir|Present: 1. Ilya Avianti 2. Darmono 3. Oegroseno 4. Andy Noorsaman Someng 5. Budiman 6. Aloysius Kiik Ro (kuasa kepada Rionald Silaban). 7. Rionald Silaban Tidak hadir|Absent: Darmawan Prasodjo Kuorum|Quorum: 87,5%	1. *Monitoring* tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris terdahulu 2. Laporan Kunjungan kerja ke NTT 3. Laporan pembahasan SOP 4. Penyerapan PMN 2016 untuk triwulan IV 2019 5. Rekomendasi ATTB atas Tanah tersebar	1. Monitoring the follow up of Board of Commissioners' previous meeting. 2. Report of work visit to NTT 3. Report of SOP discussion 4. Absorption of PMN 2016 for Q4 of 2019 5. Recommendations for ATTB on Scattered Land
4	20 Februari | February 20		
	Hadir|Present: 1. Ilya Avianti 2. Darmono 3. Oegroseno 4. Budiman 5. Aloysius Kiik Ro 6. Rionald Silaban Tidak hadir|Absent: 1. Andy Noorsaman Sommeng 2. Darmawan Prasodjo Kuorum|Quorum: 75%	1. *Monitoring* tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris terdahulu 2. Peningkatan modal dasar PT PLN Batu bara dan tambahan modal disetor PT PLN Gas dan Geothermal 3. Presentasi Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) 4. Wawancara Dewan Komisaris dalam rangka penilaian GCG oleh BPKP 5. Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan	1. Monitoring the follow up of Board of Commissioners' previous meeting 2. Increase the authorized capital of PT PLN Batu bara and additional paid-up capital to PT PLN Gas and Geothermal 3. Presentation of Nomination and Remuneration Committee (KNR) 4. Interview of Board of Commissioners for GCG Assessment by BPKP 5. Acceleration of electricity infrastructure

No.	Tanggal Rapat dan Kehadiran Meeting Date and Presence	Agenda Rapat	Meeting Agenda
5	27 Februari | February 27		
	Hadir|Present: 1. Ilya Avianti 2. Darmono 3. Oegroseno 4. Andy Noorsaman Sommeng 5. Budiman 6. Aloysius Kiik Ro Tidak hadir|Absent: 1. Oegroseno 2. Rionald Silaban Kuorum|Quorum: 75%	1. *Monitoring* tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris terdahulu 2. Kajian harga gas PT PLN (Persero) oleh BLU Lemigas 3. SOP Dewan Direksi PT PLN dalam rangka percepatan Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan 4. Presentasi KNR	1. Monitoring the follow up of Board of Commissioners' previous meeting. 2. Gas price review of PT PLN (Persero) by BLU Lemigas 3. SOP of PLN Board of Directors in the context to accelerate electricity infrastructure. 4. KNR Presentation
6	20 Maret | March 20		
	Hadir|Present: 1. Ilya Avianti 2. Darmono 3. Deden Juhara 4. Budiman 5. Rida Mulyana 6. Rionald Silaban (kuasa kepada Darmono). Tidak hadir|Absent: 1. Aloysius Kiik Ro 2. Darmawan Prasodjo Kuorum|Quorum: 75%	1. *Monitoring* tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris terdahulu 2. Rekomendasi aktiva tetap tidak beroperasi (ATTB) dan piutang ragu-ragu (PRR) 3. Tambahan modal disetor (TMD) dan peningkatan modal dasar PT PLN Batu bara 4. Lain-lain: • Presentasi KNR • Kunjungan kerja ke Palu dan Makassar • Penyaluran dana Program Kemitraan (PK) melalui BUMN • Laporan Manajemen (LM) 2019 • RUPS 2019	1. Monitoring the follow up of Board of Commissioners' previous meeting. 2. Recomendation of non-operating fixed assets (ATTB) and doubtful account receivables (PRR) 3. Additional paid-up capital (TMD) and increase authorized capital of PT PLN Coal 4. Others: • KNR Presentation • Work visit to Palu and Makassar • Distribution of Partnership Program (PK) funds through SOE • 2019 Management Report • 2019 GMS
7	27 Maret | March 27		
	Hadir|Present: 1. Ilya Avianti 2. Darmono 3. Deden Juhara 4. Budiman 5. Rida Mulyana 6. Aloysius Kiik Ro Tidak hadir|Absent: 1. Rionald Silaban 2. Darmawan Prasodjo Kuorum|Quorum: 75%	1. *Monitoring* tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris terdahulu 2. Penyaluran Dana PK melalui BUMN Khusus 3. Pendapat Dewan Komisaris atas LM 2019 dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris tahun 2019 4. Skenario RUPS tahun 2019 5. Presentasi KNR	1. Monitoring the follow up of Board of Commissioners' previous meeting. 2. Distribution of Partnership Program (PK) funds through SOE 3. Board of Comissioners' opinion on 2019 Management Report and 2019 Board of Comissioners Supervisory report. 4. 2019 GMS scenario 5. KNR presentation
8	10 April | April 10		
	Hadir|Present: 1. Ilya Avianti 2. Darmono 3. Deden Juhara 4. Budiman (kuasa kepada|giving power of attorney to Darmono) 5. Rionald Silaban (kuasa kepada|giving power of attorney to Ilya Avianti) 6. Darmawan Prasodjo (kuasa kepada|giving power of attorney to Deden Juhara) Tidak hadir|Absent: 1. Rida Mulyana 2. Aloysius Kiik Ro Kuorum|Quorum: 75%	1. *Monitoring* tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris terdahulu 2. Penghapusan PRR Regional Sumatera 3. Pembahasan pendanaan 4. Lain-lain	1. Monitoring the follow up of Board of Commissioners' previous meeting. 2. PRR disposal of Regional of Sumatera 3. Company Funding 4. Others

No.	Tanggal Rapat dan Kehadiran Meeting Date and Presence	Agenda Rapat	Meeting Agenda
9	2 Mei | May 2		
	Hadir|Present: 1. Ilya Avianti 2. Darmono 3. Deden Juhara 4. Budiman 5. Aloysius Kiik Ro 6. Rionald Silaban 7. Darmawan Prasodjo 8. Rida Mulyana Tidak hadir|Absent: - Kuorum|Quorum: 100%	1. *Monitoring* tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris terdahulu 2. Pembahasan pendanaan 3. Laporan Pelaksanaan Pelatihan *Quality Audit* 4. Lain-lain	1. Monitoring the follow up of Board of Commissioners' previous meeting. 2. Company Funding 3. Report of of Audit Quality Training 4. Others
10	15 Mei | May 15		
	Hadir|Present: 1. Ilya Avianti 2. Darmono 3. Deden Juhara 4. Budiman 5. Aloysius Kiik Ro 6. Darmawan Prasodjo 7. Rida Mulyana Tidak hadir|Absent: Rionald Silaban Kuorum|Quorum: 87,5%	1. *Monitoring* tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris terdahulu 2. Laporan Pelaksanaan pelatihan *Quality Audit* 3. Laporan Hasil Audit KAP atas Laporan Keuangan 2019 4. Laporan pencapaian target pada Laporan Manajemen triwulan I 2019 5. Lain-lain	1. Monitoring the follow up of Board of Commissioners' previous meeting. 2. Report of Audit Quality Training 3. Report of Audit Result from Public Accounting Firm on 2019 Financial Report 4. Report of target achievement on Q1 2019 Management report 5. Others
11	19 Juni | June 19		
	Hadir|Present: 1. Ilya Avianti 2. Darmono 3. Deden Juhara 4. Budiman 5. Aloysius Kiik Ro, Tidak hadir|Absent: 1. Rida Mulyana 2. Rionald Silaban 3. Darmawan Prasodjo Kuorum|Quorum: 62,5%	1. *Monitoring* tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris terdahulu 2. Progres penyelesaian pekerjaan konstruksi Regional Jawa Bagian Barat; 3. Pembahasan anak perusahaan	1. Monitoring the follow up of Board of Commissioners' previous meeting 2. Progress of construction works in Regional of Western Part Java. 3. DIscussion about subsidiary company
12	3 Juli | July 3		
	Hadir|Present: 1. Ilya Avianti 2. Darmono 3. Rida Mulyana 4. Rionald Silaban 5. Darmawan Prasodjo Hadir|Absent: 1. Deden Juhara 2. Budiman 3. Aloysius Kiik Ro Kuorum|Quorum: 62,5%	1. *Monitoring* tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris terdahulu 2. Laporan hasil audit tematik pendapatan 3. Pembahasan pendanaan 4. Pembahasan anak perusahaan 5. Presentasi KNR	1. Monitoring the follow up of Board of Commissioners' previous meeting 2. Report of income thematic audit result 3. Company funding 4. Discussion about subsidiary company 5. KNR presentation

No.	Tanggal Rapat dan Kehadiran Meeting Date and Presence	Agenda Rapat	Meeting Agenda
13	17 Juli | July 17		
	Hadir|Present: 1. Ilya Avianti 2. Darmono 3. Deden Juhara (kuasa kepada Rida Mulyana) 4. Budiman (kuasa kepada Budiman) 5. Rida Mulyana 6. Darmawan Prasodjo Tidak hadir|Absent: 1. Aloysius Kiik Ro 2. Rionald Silaban Kuorum|Quorum: 75%	1. *Monitoring* tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris terdahulu 2. Pembahasan terkait organisasi 3. Pembahasan terkait anak perusahaan 4. Pembahasan tentang pendanaan 5. Presentasi KNR	1. Monitoring the follow up of Board of Commissioners' previous meeting 2. Discussion related to the organization 3. Discussion regarding subsidiaries 4. Discussion about funding 5. Presentation of KNR
14	7 Agustus | August 7		
	Hadir|Present: 1. Ilya Avianti 2. Darmono 3. Deden Juhara 4. Budiman 5. Aloysius Kiik Ro 6. Rionald Silaban 7. Darmawan Prasodjo Tidak hadir|Absent: Rida Mulyana Kuorum|Quorum: 87,5%	1. *Monitoring* tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris terdahulu 2. Laporan Manajemen triwulan II 2019 3. Kinerja KPI Semester I (Gabungan triwulan I dan triwulan II 2019) 4. Kunjungan Kerja ke PLN Jawa Barat dan Makassar 5. Lain-lain	1. Monitoring the follow up of Board of Commissioners' previous meeting 2. Management report QII 2019 3. KPI Performanc H1 (Q1 and Q2 2019) 4. Work visit to PLN West Java and Makassar 5. Others
15	22 Agustus | August 22		
	Hadir|Present: 1. Ilya Avianti 2. Darmono 3. Deden Juhara 4. Budiman 5. Rida Mulyana 6. Aloysius Kiik Ro 7. Rionald Silaban Tidak hadir|Absent: Darmawan Prasodjo Kuorum|Quorum: 87,5%	1. *Monitoring* tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris terdahulu 2. Laporan pembahasan RJP tahun 2019-2023 3. Laporan perkembangan meter AMI dan Neraca kWh 4. Perubahan Piagam Komite Audit 5. Kunjungan kerja ke Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (modifikasi energi primer Paiton PJB, Kontrak Paiton Swasta/IPP, kabel bawah laut Jawa Bali dan *Routing Bali Crossing* dan PLTGU Grati/PMN) 6. Lain-lain	1. Monitoring the follow up of Board of Commissioners' previous meeting 2. Discussion on 2019-2020 Long-term Plan 3. Progress on AMI meter and kWh balance development 4. Change of Audit Committee Charter 5. Work visit to Regional of Eastern Part Java, Bali and Nusa Tenggara (primary energy modification of Paiton PJB, contract of Private Paiton/IPP, Java Bali submarine cable and Routing Bali Crossing and State Capital Participation for Grati Combined Cycle Power Plant) 6. Others
16	4 September | September 4		
	Hadir|Present: 1. Ilya Avianti 2. Darmono 3. Deden Juhara 4. Budiman 5. Rida Mulyana 6. Darmawan Prasodjo Tidak hadir|Absent: 1. Aloysius Kiik Ro 2. Sumiyati Kuorum|Quorum: 75%	1. *Monitoring* tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris terdahulu 2. Diskusi kebijakan pemerintah terkait lingkungan 3. Presentasi KNR 4. Laporan perkembangan meter AMI dan Neraca kWh 5. Perubahan Piagam Komite Audit 6. Kunjungan kerja Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (modifikasi energi primer Paiton PJB, Kontrak Paiton Swasta/IPP, kabel bawah laut Jawa Bali dan *routing* Bali *crossing* dan PLTGU Grati/PMN)	1. Monitoring the follow up of Board of Commissioners' previous meeting 2. Discussion of government policies related to the environment 3. KNR presentation 4. Progress on AMI meter and kWh balance development 5. Change of Audit Committee Charter 6. Work visit to Regional of Eastern Part Java, Bali and Nusa Tenggara (primary energy modification of Paiton PJB, contract of Private Paiton/IPP, Java Bali submarine cable and Routing Bali Crossing and State Capital Participation for Grati Combined Cycle Power Plant)

No.	Tanggal Rapat dan Kehadiran Meeting Date and Presence	Agenda Rapat	Meeting Agenda
17	26 September | September 26		
	Hadir|Present: 1. Ilya Avianti 2. Darmono 3. Deden Juhara 4. Budiman 5. Rida Mulyana 6. Aloysius Kiik Ro 7. Darmawan prasodjo 8. Sumiyati Tidak hadir|Absent: - Kuorum|Quorum: 100%	1. *Monitoring* tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris terdahulu 2. Penetapan Penggunaan PMN Tahun 2019 3. Persetujuan dan Perkembangan PRR 4. Progres Pembangunan Pembangkit Listrik berbasis EBT 5. Perkembangan meter AMI dan Neraca kWh	1. Monitoring the follow up of Board of Commissioners' previous meeting 2. Determining the use of 2019 PMN 3. PRR aproval and progress 4. Progress of construction of new renewable energy based power plants 5. Progress on AMI meter and kWh balance development
18	30 Oktober | October 30		
	Hadir|Present: 1. Ilya Avianti 2. Darmono 3. Deden Juhara 4. Budiman 5. Rida Mulyana 6. Darmawan prasodjo 7. Sumiyati Tidak hadir|Absent: Aloysius Kiik Ro Kuorum|Quorum: 87,5%	1. *Monitoring* tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris terdahulu 2. Persetujuan PRR dan ATTB 3. Pendanaan perusahaan 4. Pemeriksaan kepatuhan periode 2017 dan Semester 1 2019 5. Kunjungan kerja ke PLTA Peusangan dan UIW Aceh, Wilayah Kupang, Labuan Bajo, Wilayah Suslutenggo, Miangas 6. Presentasi KNR	1. Monitoring the follow up of Board of Commissioners' previous meeting. 2. Approval on PRR and ATTB 3. Company fundings 4. Compliance surveilance period of 2017 and H1 of 2019 5. Work visit to PLTA Peusangan and Parent Unit of Regional of Aceh, ULP of Kupang, ULP of Labuan Bajo, Regional of Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo, and Miangas Island 6. KNR presentation
19	20 November | November 20		
	Hadir|Present: 1. Ilya Avianti 2. Deden Juhara 3. Budiman 4. Rida Mulyana 5. Aloysius Kiik Ro 6. Darmawan prasodjo Tidak hadir|Absent: Sumiyati Kuorum|Quorum: 86%	1. *Monitoring* tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris terdahulu 2. Permohonan rekomendasi penghapusan ATTB 3. Pembahasan KPI Korporat tahun 2020 dan revisi Board Manual di Surabaya 4. Kriteria anak perusahaan strategis di lingkungan PT PLN (Persero) 5. Kunjungan Kerja ke PLN Pontianak Kalimantan Barat 6. Lain-lain: • KNR • Laporan Realisasi PMN rtiwulan III 2019	1. Monitoring the follow up of Board of Commissioners' previous meeting 2. Request for recommendation of ATTB disposal 3. Discussion of 2020 Coorporate KPI and revision on Board Manual in Surabaya 4. Criteria of strategic subsidiaries in PT PLN (Persero) 5. Work visit to PLN Pontianak, West Kalimantan 6. Others • KNR • Report on PMN Realization QIII 2019
20	11 Desember | December 11		
	Hadir|Present: 1. Ilya Avianti 2. Deden Juhara 3. Budiman 4. Rida Mulyana 5. Aloysius Kiik Ro 6. Darmawan prasodjo Tidak hadir|Absent: Aloysius Kook Ro Kuorum|Quorum: 86%	1. *Monitoring* tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris terdahulu 2. Laporan klarifikasi UID Lampung tentang usulan PRR 3. Laporan mengenai *monitoring* persediaan gas 4. Kunjungan kerja ke PLN Kupang, PLN Kalimantan Timur dan Utara (Kaltimra) 5. Lain-lain	1. Monitoring the follow up of Board of Commissioners' previous meeting 2. Report of UID Lampung clarification regarding PRR proposal 3. Report of gas inventory monitoring 4. Work visit to PLN Kupang, PLN Regional of East Kalimantan and North (Kaltimra) 5. Others

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Rapat Gabungan adalah rapat Dewan Komisaris yang dihadiri Direksi atau rapat Direksi yang dihadiri Dewan Komisaris. Rapat dapat berlangsung atas inisiatif Dewan Komisaris maupun Direksi. Rapat konsultasi dilaksanakan untuk mendapatkan kesatuan pandangan dan keselarasan tindakan antara Dewan Komisaris sebagai pengawas, dengan Direksi sebagai pelaksana operasional. Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan rapat sebanyak 17 kali dengan tingkat kehadiran dan agenda rapat sebagai berikut:

JOINT MEETINGS OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Joint Meetings are attended by both the Board of Commissioners and Board of Directors. Meetings can be initiated by the Board of Commissioners or Board of Directors. The meetings are held to align the perspectives of Board of Commissioners as the supervisor and of Board of Directors as the executive. Throughout 2019, Board of Commissioners and Board of Directors have held 17 meetings with the level of attendance and meeting agenda as follows:

No.	Tanggal Rapat dan Kehadiran Meeting Date and Presence		Agenda Rapat	Meeting Agenda
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	**Direksi** Board of Directors		
1	23 Januari | January 23			
	Hadir|Present: 1. Ilya Avianti 2. Darmono 3. Oegroseno 4. Budiman 5. Andy N Sommeng Tidak hadir|Absent: 1. Aloysius K. Ro 2. Rionald Silaban 3. Darmawan Prasodjo	Hadir|Present: 1. Syofvi Felienty Roekman 2. Supangkat Iwan Santoso 3. Djoko Rahardjo Abumanan 4. Machnizon 5. Ahmad Rofik Tidak hadir|Absent: 1. Sofyan Basir 2. Sarwono Sudarto 3. Amir Rosidin 4. Wiluyo Kusdwiharto 5. Syamsul Huda	1. Informasi terkini 2. Pemaparan SOLID 3. Pembahasan tentang anak perusahaan dan PLN Group. 4. Lain-lain	1. Information update 2. SOLID presentation 3. Discussion on subsidiaries and PLN Group. 4. Others
2	15 Januari | January 15			
	Hadir|Present: 1. Ilya Avianti 2. Darmono 3. Oegroseno 4. Andy N Someng 5. Budiman 6. Aloysius K. Ro 7. Rionald Silaban Tidak hadir|Absent: Darmawan Prasodjo	Hadir|Present: 1. Syofvi Felienty Roekman 2. Muhamad Ali 3. Haryanto W.S 4. Djoko R. Abumanan 5. Amir Rosidin 6. Iwan Agung Firstantara 7. Cucu Kurnia 8. Henky H Basudewo	1. Informasi terkini 2. Pengembangan pembangkit listrik	1. Information update 2. Development of power plants
3	6 Maret | March 6			
	Hadir|Present: 1. Ilya Avianti 2. Darmono 3. Deden Juhara 4. Budiman 5. Rionald Silaban (Kuasa kepada|Giving attorney to Darmono) 6. Darmawan 7. Rida Mulyana Tidak hadir|Absent: Aloysius K. Ro	Hadir|Present: 1. Sarwono Sudarto 2. Syofvi Felienty Roekman 3. Supangkat Iwan Santoso 4. Haryanto WS 5. Amir Rosidin 6. Djoko R. Abumanan 7. Wiluyo Kusdwiharto 8. Machnizon 9. Syamsul Huda 10. Ahmad Rofik Tidak hadir|Absent: 1. Sofyan Basir 2. Muhamad Ali	1. Informasi terkini 2. kesiapan PLN menghadapi Pemilu 2019 3. Update mitigasi risiko 4. Lain-lain	1. Information update 2. PLN readiness to face general election 3. Risk mitigation update 4. Others

No.	Tanggal Rapat dan Kehadiran Meeting Date and Presence		Agenda Rapat	Meeting Agenda
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	**Direksi** Board of Directors		
4	8 April | April 8			
	Hadir|Present: 1. Ilya Avianti 2. Darmono 3. Deden Juhara 4. Budiman 5. Aloysius Kiik Ro 6. Rida Mulyana Tidak hadir|Absent: 1. Rionald Silaban 2. Darmawan Prasodjo	Hadir|Present: 1. Sarwono Sudarto 2. Syofvi Felienty Roekman 3. Supangkat Iwan Santoso Tidak hadir|Absent: 1. Sofyan Basir 2. Muhamad Ali 3. Haryanto WS 4. Amir Rosidin 5. Djoko R. Abumanan 6. Wiluyo Kusdwiharto 7. Syamsul Huda 8. Ahmad Rofik	1. Informasi terkini 2. Diskusi terkait anak perusahaan	1. Information update 2. Discussion on subsidiary company
5	24 April | April 24			
	Hadir|Present: 1. Ilya Avianti (kuasa kepada|giving attorney to Darmono) 2. Darmono 3. Deden Juhara 4. Budiman 5. Aloysius Kiik Ro 6. Rionald Silaban (kuasa kepada|giving attornet to Aloysius Kiik Ro) 7. Darmawan Prasodjo 8. Rida Mulyana Tidak hadir|Absent: -	Hadir|Present: 1. Sarwono Sudarto 2. Syofvi Felienty Roekman 3. Muhamad Ali 4. Haryanto W.S 5. Djoko R. Abumanan 6. Wiluyo Kusdwiharto 7. Syamsul Huda 8. Ahmad Rofik Tidak hadir|Absent: 1. Sofyan Basir 2. Supangkat Iwan Santoso 3. Amir Rosidin 4. Machnizon	1. Informasi terkini 2. Update mitigasi risiko	1. Information update 2. Risk mitigation updates
6	2 Mei | May 2			
	Hadir|Present: 1. Ilya Avianti 2. Darmono 3. Deden Juhara 4. Budiman 5. Aloysius Kiik Ro 6. Darmawan Prasodjo 7. Rida Mulyana Tidak hadir|Absent: -	Hadir|Present: 1. Syovfy Felienty Roekman 2. Muhamad Ali 3. Haryanto WS 4. Wiluyo Kusdwiharto 5. Machnizon 6. Syamsul Huda 7. Ahmad Rifik 8. Sarwono Sudarto 9. Supangkat Iwan Santoso 10. Amir Rosidin 11. Djoko Rahardjo Abumanan Tidak hadir|Absent: Sofyan Basir	Informasi terkini	Information update

No.	Tanggal Rapat dan Kehadiran Meeting Date and Presence		Agenda Rapat	Meeting Agenda
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	**Direksi** Board of Directors		
7	15 Mei | May 15			
	Hadir|Present: 1. Ilya Avianti 2. Darmono 3. Deden Juhara 4. Budiman 5. Aloysius Kiik Ro 6. Darmawan Prasodjo 7. Rida Mulyana Tidak hadir|Absent: Rionald Silaban	Hadir|Present: 1. Syovfy Felienty Roekman 2. Muhamad Ali 3. Haryanto WS 4. Wiluyo Kusdwiharto 5. Machnizon 6. Syamsul Huda 7. Ahmad Rifik Tidak hadir|Absent: 1. Sofyan Basir 2. Sarwono Sudarto 3. Supangkat Iwan Santoso 4. Amir Rosidin 5. Djoko Rahardjo Abumanan	1. Informasi terkini dari Direksi 2. Pendanaan perusahaan 3. Penjelasan Direksi atas RUPS pertanggungjawaban keuangan PT PLN (Persero) Tahun 2019	1. Information update from Board of Directors 2. Company fundings 3. Explanation from Board of Directors regarding Annual GMS on 2019 financial report of PT PLN (Persero)
8	19 Juni | June 19			
	Hadir|Present: 1. Ilya Avianti 2. Darmono 3. Deden Juhara 4. Budiman 5. Rida Mulyana Tidak hadir|Absent: 1. Aloysius Kiik Ro 2. Rionald Silaban 3. Darmawan Prasodjo	Hadir|Present: 1. Djoko Rahardjo Abumanan 2. Sarwono Sudarto 3. Syovfi Felienty Roekman 4. Muhamad Ali 5. Haryanto WS 6. Amir Rosidin 7. Supangkat Iwan Santoso 8. Wiluyo Kusdwiharto 9. Syamsul Huda 10. Ahmad Rofik Tidak hadir|Absent: Ahmad Rofik	1. Informasi terkini dari Direksi 2. Laporan Keuangan 3. Rencana pendanaan 4. Transmisi Jawa Bali 5. Cascasing KPI 6. Revisi RJP 7. Lain-lain	1. Information update from the Board of Directors 2. Financial report 3. Funding plan 4. Transmission of Java Bali 5. Cascasing KPIs 6. Revised RJP 7. Others
9	7 Agustus | August 7			
	Hadir|Present: 1. Ilya Avianti 2. Darmono 3. Deden Juhara 4. Budiman 5. Aloysius Kiik Ro 6. Rionald Silaban 7. Darmawan Prasodjo Tidak hadir|Absent: Rida Mulyana	Hadir|Present: 1. Sripeni Inten Cahyani 2. Djoko Rahardjo Abumanan 3. Sarwono Sudarto 4. Muhamad Ali 5. Haryanto WS 6. Amir Rosidin 7. Supangkat Iwan Santoso 8. Wiluyo Kusdwiharto 9. Syamsul Huda 10. Ahmad Rofik Tidak hadir|Absent: Syofvi Felienty Roekman	1. Informasi terkini dari Direksi 2. Penjelasan Direksi atas Surat Dewan Komisaris 3. Lain-lain	1. Information update from the Board of Directors 2. Explanation from the Board of Directors regarding Board of Comissioners Letter 3. Others
10	22 Agustus | August 22			
	Hadir|Present: 1. Ilya Avianti 2. Darmono 3. Deden Juhara 4. Budiman 5. Aloysius Kiik Ro 6. Rionald ilaban 7. Rida Mulyana Tidak hadir|Absent: Darmawan Prasodjo	Hadir|Present: 1. Sripeni Inten Cahyani 2. Muhamad Ali 3. Suovfy Felienty Roekman 4. Haryanto WS 5. Amir Rosidin 6. Supangkat Iwan Santoso 7. Wiluyo Kusdwiharto 8. Syamsul Huda 9. Ahmad Rofik Tidak hadir|Absent: 1. Djoko Rahardjo Abumanan 2. Sarwono Sudarto	1. Informasi terkini dari Direksi 2. Penjelasan Direksi atas Surat Dewan Komisaris 3. Lain-lain	1. Information update from Director 2. Explanation from the Board of Directors regarding Board of Comissioners Letter 3. Others

No.	Tanggal Rapat dan Kehadiran Meeting Date and Presence		Agenda Rapat	Meeting Agenda
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	**Direksi** Board of Directors		
11	12 September | September 22			
	Hadir|Present: 1. Ilya Avianti 2. Deden Juhara 3. Budiman 4. Aloysius Kiik Ro 5. Darmawan Prasodjo 6. Rida Mulyana 7. Darmawan Prasodjo Tidak hadir|Absent: Darmono	Hadir|Present: 1. Djoko Rahardjo Abumanan 2. Sarwono Sudarto 3. Muhamad Ali 4. Suovfy Felienty Roekman 5. Haryanto WS 6. Amir Rosidin 7. Wiluyo Kusdwiharto 8. Ahmad Rofik Tidak hadir|Absent: 1. Syovfy Felienty Roekman 2. Supangkat Iwan Santoso 3. Syamsul Huda	1. Informasi terkini dari Direksi 2. Diskusi SDM 3. Struktur Organisasi 4. Mengenai RJPP 5. Lain-lain	1. Information update from the Board of Directors 2. HR discussion 3. Organizational structure 4. Corporate Long-term Plan 5. Others
12	1 Oktober | October 1			
	Hadir|Present: 1. Ilya Avianti 2. Deden Juhara 3. Budiman 4. 4Aloysius Kiik Ro 5. Darmawan Prasodjo 6. Rida Mulyana 7. Darmawan Prasodjo Tidak hadir|Absent: 1. Darmono 2. Sumiyati	Hadir|Present: 1. Sripeni Inten Cahyani 2. Djoko Rahardjo Abumanan 3. Sarwono Sudarto 4. Muhamad Ali 5. Suovfy Felienty Roekman 6. Haryanto WS 7. Amir Rosidin 8. Supangkat Iwan Santoso 9. Wiluyo Kusdwiharto 10. Syamsul Huda 11. Ahmad Rofik Tidak hadir|Absent: -	1. Informasi terkini dari Direksi 2. Realisasi APLN 3. Realisasi PMN 4. Diskusi tentang organisasi	1. Information update from the Board of Directors 2. Realization of APLN 3. Realization of PMN 4. Discussion of organizations
13	16 Oktober | October 16			
	Hadir|Present: 1. Ilya Avianti 2. Deden Juhara 3. Budiman 4. Darmawan Prasodjo Tidak hadir|Absent: 1. Aloysius Kiik Ro 2. Rida mulyana 3. Simuyati	Hadir|Present: 1. Sripeni Inten Cahyani 2. Djoko Rahardjo Abumanan 3. Sarwono Sudarto 4. Muhamad Ali 5. Suovfy Felienty Roekman 6. Haryanto WS 7. Amir Rosidin 8. Supangkat Iwan Santoso 9. Wiluyo Kusdwiharto 10. Syamsul Huda 11. Ahmad Rofik Tidak hadir|Absent: -	1. Temu Pisah Komisaris Independen Darmono, Komisaris Rionald Silaban dan Komisaris Sumiyati 2. Informasi terkini dari Direksi 3. Diskusi SDM 4. Lain-lain	1. Farewell of Independent Commissioner Darmono, Comissioner Rionald Silaban and Comissioner Sumiyati 2. Information update from the Board of Directors 3. HR discussion 4. Others
14	5 November | November 5			
	Hadir|Present: 1. Ilya Avianti 2. Budiman 3. Darmawan Prasodjo 4. Rida Mulyana 5. Sumiyati Tidak hadir|Absent: 1. Deden Juhara 2. Aloysius Kiik Ro	Hadir|Present: 1. Sripeni Inten Cahyani 2. Djoko Rahardjo Abumanan 3. Sarwono Sudarto 4. Muhamad Ali 5. Suovfy Felienty Roekman 6. Haryanto WS 7. Amir Rosidin 8. Supangkat Iwan Santoso 9. Wiluyo Kusdwiharto 10. Syamsul Huda Tidak hadir|Absent: Ahmad Rofik	1. Informasi terkini dari Direksi 2. RJP 2020-2024 3. RKAP 2020 4. Pendanaan perusahaan 5. Lain-lain	1. Information update from the Board of Directors 2. 2020-2024 Long-term Plan 3. 2020 Work Plan and Budget 4. Company fundings 5. Others

No.	Tanggal Rapat dan Kehadiran Meeting Date and Presence		Agenda Rapat	Meeting Agenda
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	**Direksi** Board of Directors		
15	20 November | November 20			
	Tanggal 20 November 2019 Komisaris yang hadir: 1. Ilya Avianti 2. Deden Juhara 3. Rida Mulyana 4. Darmawan Prtasodjo Tidak hadir|Absent: 1. Budiman 2. Aloysius Kiik Ro Sumiyati	Hadir|Present: 1. Sripeni Inten Cahyani 2. Djoko Rahardjo Abumanan 3. Sarwono Sudarto 4. Muhamad Ali 5. Suovfy Felienty Roekman 6. Haryanto WS 7. Supangkat Iwan Santoso 8. Wiluyo Kusdwiharto 9. Syamsul Huda 10. Ahmad Rofik Tidak hadir|Absent: Amir Rosidin	1. Informasi terkini dari Direksi 2. KPI Korporat tahun 2020, Direktorat serta Unit-Unit 3. Pembahasan tentang anak perusahaan 4. Lain-lain	1. Information update from the Board of Directors 2. Corporate KPI 2020, Directorate and units 3. Discussion about subsidiaries 4. Others
16	11 Desember | December 11			
	Hadir|Present: 1. Ilya Avianti 2. Deden Juhara 3. Budiman 4. Darmawan Prtasodjo Tidak hadir|Absent: 1. Aloysius Kiik Ro 2. Rida Mulyana 3. Sumiyati	Hadir|Present: 1. Sripeni Inten Cahyani 2. Djoko Rahardjo Abumanan 3. Sarwono Sudarto 4. Muhamad Ali 5. Sovfy Felienty Roekman 6. Haryanto WS 7. Amir Rosidin 8. Supangkat Iwan Santoso 9. Wiluyo Kusdwiharto 10. Ahmad Rofik Tidak hadir|Absent: 1. Supangkat Iwan Santoso 2. Syamsul Huda	1. Informasi terkini dari Direksi 2. Diskusi energi primer 3. Diskusi terkait anak perusahaan 4. Lain-lain	1. Current information from Director 2. Discussion of primary energy 3. Discussions related to subsidiaries 4. Others
17	17 Desember | December 17			
	Hadir|Present: 1. Ilya Avianti 2. Deden Juhara 3. Rida Mulyana 4. Sumiyati Tidak hadir|Absent: 1. Budiman 2. Aloysius Kiik Ro 3. Darmawan Prasodjo	Hadir|Present: 1. Sripeni Inten Cahyani 2. Djoko Rahardjo Abumanan 3. Muhamad Ali 4. Amir Rosidin 5. Supangkat Iwan Santoso 6. Wiluyo Kusdwiharto 7. Syamsul Huda 8. Ahmad Rofik Tidak hadir|Absent: 1. Sarwono Sudarto 2. Syofvi Felienty Roekman 3. Haryanto WS	1. Informasi terkini dari Direksi terkait RKAP tahun 2020 2. kondisi Keuangan tw 4 2019 3. Update profil risiko tahun 2020 4. kesiapan memori jabatan bagi Direksi yang akan purna tugas 5. Penjelasan Direksi mengenai realisasi konsep "Solid" 6. Pending Maters SDM, HCR, OCR, K3L, mitra kerja alih daya dan analisis jenjang karir 7. Lain-lain:	1. Information update from the Board of Directors regarding Work Plan and Budget of 2020 2. Financial condition in Q4 2019 3. Risk profile update for 2020 4. Readiness of end of term memorandum for Directors who will end the term of office 5. Explanation from Board of Directors regarding realization of "Solid" 6. Pending matters on HR, HCR, OCR, HSE, outsourcing partners and career path analysis 7. Others

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama atau *Key Performance Indicators* (KPI) Dewan Komisaris yang telah disetujui oleh Pemegang Saham. KPI Dewan Komisaris disusun dengan memperhatikan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan Kementerian BUMN.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF BOARD OF COMMISSIONERS

Performance assessment of Board of Commissioners is conducted by Shareholder refers to Key Performance Indicators (KPI) of Board of Commissioners approved by Shareholder. KPI of Board of Commissioners are compiled by taking into account duties and responsibilities of the Board of Commissioners, according to the Articles of Association and regulations of the Ministry of SOE.

No.	Program Kerja Work Program	Uraian Description	KPI 2019			
			Sasaran Target	Bobot Portion	Realisasi Realization	Bobot Portion
Dewan Komisaris dengan Direksi | BOC and BOD				**54**		**54**
1	*Review* dan tanggapan rencana Perusahaan Review and feedback on Company's plan	Pembahasan, saran dan atau persetujuan atas RKAP, KPI, dan RJP Discussion, suggestions, and/or approval of Work budget and plan, KPI, and Company's long-term plan	2 kali setahun Two times a year	7	3 kali 3 times	7
		Ketepatan waktu pemberian tanggapan setelah draft diperoleh dari Direksi dengan data yang akurat Timeliness of response after draft with accurate data received from the BOD	14 hari kerja 14 working days	3	Rata-rata 3 hari kerja Average 3 workdays	3
2	*Review* dan tanggapan kinerja Perusahaan Review and feedback on Company's performance	Pembahasan, tanggapan dan persetujuan atas: - LM dan KPI PLN Triwulanan - LM dan KPI PLN Tahunan - KPI Direktorat Discussion, feedback, and approval of: - Management report and PLN's KPI quarterly - Management report and PLN's KPI annually - Annual Directors' KPI	5 kali setahun 5 times a year	9	5 kali setahun 5 times a year	9
		Ketepatan waktu pemberian tanggapan setelah draf diperoleh dari Direksi dengan data yang akurat Timeliness of response after draft with accurate data received from the BOD	14 hari kerja 14 working days	3	Rata-rata 7 hari kerja Average 7 workdays	3
3	*Review* tindak lanjut hasil/ temuan audit internal/ eksternal Review of followup results/findings of internal/ external audit	Pembahasan dan tanggapan/saran atas efektivitas pemeriksaan internal dan *monitoring* tindak lanjut temuan auditor Discussion and feedback/advice on the effectiveness of internal inspections and follow-up monitoring of the auditor's findings	6 kali setahun 6 times a year Laporan BOC BOC Report	10	10 kali 10 times	10

No.	Program Kerja Work Program	Uraian Description	KPI 2019			
			Sasaran Target	Bobot Portion	Realisasi Realization	Bobot Portion
4	Memberi tanggapan tertulis/ persetujuan/ nasehat/saran/ teguran kepada Direksi Provide a written response/ approval/ counsel/ advice/warning to the Board of Directors	Pembahasan dan pemberian tanggapan tertulis/ persetujuan atas permintaan Direksi setelah data lengkap Discussion and provision of written response/ approval at the request of the BOD after complete data has been obtained	Usulan Direksi ditanggapi Proposal of the Board of Directors is responded	15	96%	15
		Ketepatan waktu pemberian tanggapan setelah usulan diperoleh dari Direksi dengan data dan dokumen pendukung yang lengkap Timeliness of response following a proposal from the BOD's data with complete supporting data and documents	14 hari kerja 14 working days	3	Rata-rata 13 hari kerja Average 13 workdays	3
		Pemberian nasehat/saran/teguran Provide advice/recommendation/warning	4 kali 4 times	4	23 kali 23 times	4
Dewan Komisaris dengan RUPS | Board of Commissioners and GMS				**20**		**19**
1	Menyampaikan program kerja dan KPI Dewan Komisaris tahunan Delivering the work program and annual KPI of BOC	Rencana kerja dan KPI Dewan Komisaris tahunan BOC Work plan and annual KPI	1 paper 1 paper	3	1 paper 1 paper	3
		Ketepatan waktu penyampaian Timely submission	Sebelum RUPS Before GMS	2	21 hari kerja sebelum RUPS 21 workdays before GMS	2
2	Menyampaikan pendapat/ usul Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham/RUPS Delivering opinion/ proposal of BOC to the Shareholders/ GMS	Pendapat atas: - RJP - RKAP - LM & KPI PLN Tahunan Menyampaikan: - Usulan penetapan kantor akuntan publik (KAP) - Usulan remunerasi Opinion on: - RJP - RKAP - Annual management report and PLN's KPI To deliver: - Proposed appointment of public accounting firm (KAP) - Remuneration proposal	4 pendapat atau usulan 4 opinions or proposals	4	4 pendapat/usul 4 opinions/ proposals	4
		Ketepatan waktu penyampaian Timely Submission	Sebelum RUPS Before GMS	2	Rata-rata 8 hari kerja sebelum RUPS Average 8 workdays before GMS	2

No.	Program Kerja Work Program	Uraian Description	KPI 2019			
			Sasaran Target	Bobot Portion	Realisasi Realization	Bobot Portion
3	Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan Dewan Komisaris Delivering report about the supervisory duty of the BOC	Laporan terdiri atas: - Laporan progres KPI semesteran - Laporan pengawasan dan KPI tahunan The report consists of: - KPI progress report per semester - Annual supervisory report and KPI	2 Laporan setahun 2 reports a year	4	2 Laporan 2 reports	4
		Ketepatan waktu penyampaian: Timely submission of: - Laporan KPI semesteran - Semester KPI Report	30 hari kerja sejak berakhirnya periode 30 workdays after the end of period	1	16 hari kerja sejak berakhirnya periode 16 workdays prior to end of period	0
		- Laporan Pengawasan Tahunan - Annual Supervisory Report	Sebelum RUPS Prior to EGM	2	2 hari kerja sebelum RUPS 2 workdays ripor to EGM	2
4	RUPS GMS	Kehadiran Dewan Komisaris kuorum pada: - RUPS RKAP - RUPS Tahunan/LPT The quorum presence of BOC: - GMS of RKAP - Annual GMS/Annual Calculation Report (LPT)	2 kali setahun 2 times a year	2	Kuorum pada RUPS - RKAP 2019 - LPT 2019 Quorum at EGM - RKAP 2019 - LPT 2019	2
Internal Dewan Komisaris | Internal of the Board of Commissioners				**26**		**26**
1	Rapat Dewan Komisaris	Rapat Dewan Komisaris terdiri dari: Rapat internal dan rapat konsultasi dengan Direksi BOC meetings consist of internal meetings and consultation meetings	24 kali setahun 24 times a year	20	41 kali 41 times	20
2	Pengenalan/ Induksi/ peningkatan kompetensi Introduction/ Induction/ competence development	- Mengikuti seminar/*workshop* di luar negeri maupun dalam negeri. - Attending seminar/workshop abroad and domestic - Induksi jika ada Komisaris baru - Induction for new Commissioner	3 kali setahun 3 times a year	2	3 kali 3 times	2
3	Pengelolaan GCG GCG management	Penunjukan *assessor* GCG Appointment of GCG Assessor	1 kali setahun Once a year	1	1 kali Once	1
		Pencapaian skor *assessment* GCG Dewan Komisaris GCG assessment score of BOC	Capaian skor minimum 75% Minimum score of 75%	3	94,14% untuk tahun 2019 94.14% in 2019	3
JUMLAH NILAI | TOTAL SCORE				**100**		**99**

RENCANA KERJA DEWAN KOMISARIS TAHUN 2019

Rencana Kerja Dewan Komisaris tahun 2019 disusun berdasarkan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang terdiri atas:

1. Aspek pengarahan dan pengawasan
   a. *Review* atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
   b. *Review* dan pemberian tanggapan atas kinerja Perusahaan;
   c. *Review* tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal;
   d. Rapat Dewan Komisaris;
   e. Memberi tanggapan, persetujuan, teguran, nasihat dan saran kepada Direksi.

2. Aspek Pelaporan
   a. Menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan;
   b. Menyampaikan laporan/pendapat kepada Pemegang Saham/RUPS;
   c. Menyampaikan laporan tugas pengawasan.
3. Aspek Dinamis
   a. Program pengenalan/induksi;
   b. Program peningkatan kompetensi;
   c. Pengesahan RKAP dan LPT (RUPS).

PELAKSANAAN PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2019

Dewan Komisaris telah menjalankan tugas fungsi pengawasan dan penasihatan dengan melakukan penelaahan, pembahasan dan pemberian nasihat atas pengendalian internal Perusahaan, yaitu seluruh sistem dan proses yang terdapat di dalam Perusahaan yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan Perusahaan, khususnya dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut kegiatan Dewan Komisaris dalam rangka tugas pengawasan sepanjang tahun 2019.

1. Pengawasan atas Efektivitas dan Efisiensi Operasi dan Investasi terdiri atas:
   a. Pengawasan atas efektitivitas pengelolaan organisasi dan SDM
      Pengawasan dilaksanakan untuk menilai efektivitas organisasi dan tata kerja,

BOARD OF COMMISSIONERS' 2019 WORK PLAN

Board of Commissioners' 2019 Work Plan was prepared according duties and responsibilities of Board of Commissioners that consisted of:

1. Advisory and supervisory
   a. Review the Company's Work Plan and Budget;
   b. Review and provide responses to the Company's performance;
   c. Review follow-up on internal and external audit findings;
   d. Board of Commissioners' Meetings;
   e. Provide responses, approvals, reprimands, advices and recommendations to Board of Directors.
2. Reporting
   a. Prepare and deliver an annual work program;
   b. Submit reports/opinions to Shareholder/ GMS;
   c. Submit supervisory report.
3. Dynamics
   a. Induction program;
   b. Competence development program;
   c. RKAP and LPT ratification (RUPS).

IMPLEMENTATION OF SUPERVISION OF BOARD OF COMMISSIONERS IN 2019

Board of Commissioners performed its supervisory and advisory duties by conducting reviews, discussions and providing advices on the Company's internal control, including all systems and processes in the Company that are designed to provide adequate confidence in achieving the Company's objectives, particularly in improving operational effectiveness and efficiency, reliability of financial reporting, as well as compliance with the applicable laws and regulations. The following are activities of Board of Commissioners in performing its supervisory duties during 2019.

1. Supervision on Effectiveness and Efficiency of Operations and Investment
   a. Supervision on effectiveness of organization and HC management
      Supervision was conducted to assess effectiveness of organization and work

antara lain: efektivitas implementasi struktur organisasi dan pengelolaan jabatan strategis serta manajemen SDM. Pengawasan dilakukan melalui pembahasan dan pemberian pendapat/ persetujuan Dewan Komisaris atas usulan Direksi terkait struktur organisasi, pengisian jabatan satu tingkat di bawah Direksi, Direksi anak perusahaan, dan Kepala SPI.

procedures, including organizational structure and management of strategic positions and HC. Supervision was performed by discussing and providing advices/approval by Board of Commissioners on matters proposed by Board of Directors.

b. Pengawasan atas usulan RKAP Tahun 2019 yang diajukan oleh Direksi
   - Memastikan bahwa rencana kerja yang tertuang dalam RKAP telah disusun sesuai dengan visi, misi dan tujuan Perusahaan serta penugasan dari pemerintah;
   - Sasaran yang ditetapkan dalam usulan RKAP dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien.

b. Supervision on 2019 RKAP proposal prepared by Board of Directors
   - Ensured that work plans in RKAP were prepared in accordance with the Company's vision, missions and objectives, as well as the government's assignments;
   - The objectives set out in the proposed RKAP could be achieved more effectively and efficiently.

c. Pengawasan atas Pelaksanaan RKAP dan KPI 2019
   Pengawasan atas pelaksanaan RKAP dan KPI Tahun 2019 dilakukan melalui penelaahan dan pembahasan laporan pelaksanaan RKAP, hambatan dalam pelaksanan RKAP serta langkah-langkah yang dilakukan oleh Direksi untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelahaan dan pembahasan dilakukan berdasarkan Laporan Manajemen Triwulanan dan Laporan Manajemen Tahunan serta Laporan Pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI). Selain itu juga dilakukan pembahasan tersendiri untuk permasalahan tertentu.

c. Supervision on Implementation of 2019 RKAP and KPI.
   Supervision on implementation of 2019 RKAP and KPI was conducted by reviewing and discussing RKAP implementation reports, obstacles in implementation of RKAP and measures taken by Board of Directors to overcome such obstacles. Review and discussion were based on Quarterly Management Report, Annual Management Report and KPI Achievement Report. There were also separate discussions on other matters.

d. Pengawasan atas pengelolaan risiko
   - Melakukan telaahan atas analisis risiko yang dilakukan Direksi terutama yang terkait dengan permintaan rekomendasi atau persetujuan Dewan Komisaris atas rencana tindakan Direksi tertentu (aksi korporasi) dengan mengkaji apakah analisis risiko yang dilakukan telah memadai sesuai ketentuan manajemen risiko di lingkungan Perusahaan;

d. Supervision of Risk Management
   - Reviewed risk assessment conducted by Board of Directors, particularly related to requests for recommendation or approvals from Board of Commissioners for certain measures (action plans) of Board of Directors, by examining whether risk analysis was conducted adequately, in accordance with risk management provisions within the Company;

- Melakukan telaahan atas risiko dengan level tinggi dan ekstrem serta mengingatkan proses *monitoring* terhadap mitigasi yang dilakukan serta memberikan saran-asaran atas risiko yang mungkin belum teridentifikasi.

2. Pengawasan atas keandalan informasi/ pelaporan keuangan
   Pengawasan atas keandalan sistem informasi dilakukan dengan menelaah, membahas dan memberikan nasihat atas:
   a. Prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi dan sistem informasi yang telah berjalan serta memastikan bahwa program pengembangan teknologi informasi berjalan sesuai rencana;
   b. Temuan audit oleh KAP atas Laporan Keuangan Perusahaan, kelemahan sistem pengendalian intern, serta kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti temuan tersebut.

3. Pengawasan atas pelaksanaan RKAP melalui Laporan Manajemen dan realisasi *Key Performance Indicators* (KPI) Korporat
   Melakukan penelaahan atas Laporan Manajemen dan Realisasi KPI triwulanan dan tahunan guna memastikan akurasi dan keandalan data/informasi yang disajikan dalam Laporan Manajemen tersebut.

   Selain itu juga dilakukan pengawasan atas pelaksanaan audit PT PLN (Persero) Tahun 2019 oleh KAP yang meliputi: Laporan Keuangan Perusahaan, Laporan Keuangan PKBL Perusahaan, kinerja dan kepatuhan Perusahaan, dan laporan-laporan lainnya sesuai dengan perjanjian/kontrak kerja.

4. Pengawasan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
   a. Pengawasan atas efektivitas audit internal
      - Pengawasan dilakukan dengan pertemuan secara regular dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI).
      - Penelaahan laporan hasil audit internal untuk ditindaklanjuti oleh manajemen.
      - Penelaahan atas pelaksanaan Program Kerja Pemeriksaan Audit Tahunan (PKPT) SPI.

- Reviewed high and extreme risks, encouraged risk mitigation monitoring and provided advice on potential risks.

2. Supervision on reliability of Financial Information/reporting
   Supervision on reliability of information systems was performed by reviewing, discussing, and providing advice on:
   a. Procedure for preparation of consolidated financial statements and information system, as well as ensuring that information technology development program ran according to plan;
   b. Findings of Public Accounting Firm pertaining to weaknesses in the Company's information system and ensuring that Board of Directors had followed-up on the findings.

3. Supervision on RKAP Implementation Report in Management Report and Corporate KPI Realization
   Reviewed Management Report and realization of quarterly and annual KPI to ensure accuracy and reliability of data/information presented in Management Report.

   In addition, supervision was also conducted on audit of PT PLN (Persero) in 2019 by KAP which included: the Company's Financial Statements, the Company's PKBL Financial Statements, the Company's performance and compliance, as well as other deliverables in accordance with work agreement/contract.

4. Supervision on Compliance with the Applicable Laws and Regulations
   a. Supervision on effectiveness of internal auditing
      - Regular meetings with Internal Audit Unit (SPI).
      - Review of internal audit reports to be followed up by management.
      - Review of implementation of SPI's Annual Audit Work Program (PKPT).

b. Pengawasan atas tindak lanjut temuan hasil audit eksternal
Pengawasan dilakukan melalui penelaahan, pembahasan dan pemberian nasihat untuk memastikan bahwa rekomendasi hasil temuan audit oleh KAP dan BPK telah ditindak lanjuti oleh Direksi.

c. Pengawasan atas penerapan unsur GCG
Pengawasan atas penerapan unsur GCG (misalnya: transaksi tidak terdapat benturan kepentingan, obyektivitas transaksi, prinsip kehati-hatian) dilakukan dengan memastikan bahwa semua usulan yang diajukan Direksi kepada Dewan Komisaris yang meminta persetujuan maupun rekomendasi telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Pengawasan atas pengelolaan PKBL
Pembahasan dan penelahaan dilakukan atas langkah-langkah yang telah dilakukan Perusahaan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PKBL.

6. Nasihat dan teguran
Dewan Komisaris telah memberikan nasihat dan peringatan kepada Direksi berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil evaluasi dalam kunjungan kerja yang dilakukan serta dari penyampaian surat-surat yang ditujukan kepada Dewan Komisaris, baik dari pihak internal maupun eksternal Perusahaan.

7. Kinerja Direksi
Penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui pembahasan dan pemberian pendapat atas Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan yang juga mencantumkan realisasi KPI Triwulanan dan Tahunan.

PRODUK PENGAWASAN

Dewan Komisaris memberikan rekomendasi dan pendapatnya atas permintaan Direksi terkait rencana tindakan yang memerlukan rekomendasi atau persetujuan Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar. Produk pengawasan Dewan Komisaris berupa: (1) Surat persetujuan atau penolakan sepanjang menjadi kewenangan Dewan Komisaris; (2) Surat rekomendasi kepada

b. Supervision on follow-up on external audit findings
Review, discussion and provision of advice to ensure that recommendations of audit findings issued by KAP and BPK had been followed-up by Board of Directors.

c. Supervision on implementation of GCG elements
Supervision on implementation of GCG elements (such as transactions with conflict of interest, transaction objectivity, prudence principle) was conducted by ensuring that all proposals of Board of Directors for approval and recommendation from Board of Commissioners were in accordance with the applicable laws and regulations.

5. Supervision on PKBL management
Discussed and reviewed measures taken by the Company to improve transparency and accountability in PKBL management.

6. Advices and reprimands
Board of Commissioners provided advice and reprimands to Board of Directors based on information obtained from site visit evaluation results and letters addressed to Board of Commissioners, both from internal and external parties.

7. Performance of Board of Directors
Performance assessment of Board of Directors was conducted through discussion on and response to quarterly and annual management reports including realizations of quarterly and annual KPI.

SUPERVISORY PRODUCTS

Board of Commissioners provided recommendations and opinions at request of Board of Directors regarding action plans that required Board of Commissioners' recommendations or approval in accordance with the Articles of Association. Board of Commissioners' supervisory products were in the form of: (1) Letters of approval or rejection

Menteri BUMN selaku pemegang saham dalam hal di luar kewenangan Dewan Komisaris; (3) Pendapat; (4) Surat Perintah melakukan sesuatu.

Selama tahun 2019, produk Dewan Komisaris terdiri atas:

Persetujuan:
- Penghapusan piutang ragu-ragu;
- Penghapusan Aktiva Tetap Tidak Beroperasi (ATTB) yang umurnya lima tahun atau kurang;
- Perolehan pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri;
- Penunjukan Direksi/Komisaris anak perusahaan;
- Struktur Organisasi.

Rekomendasi:
- Penghapusan Aktiva Tetap Tidak Beroperasi (ATTB) dengan nilai di atas kewenangan;
- Perolehan pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri dengan nilai di atas kewenangan;
- Penunjukan Sekretaris Perusahaan;
- Tantiem Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2018 dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2019;

- Pembagian laba Perusahaan tahun 2018;
- Penunjukan KAP untuk Audit Laporan Keuangan dan PKBL 2019;
- RKAP tahun 2020;
- Penambahan modal dasar dan modal disetor anak perusahaan;

Pendapat:
- Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan tahun 2019;
- Laporan Pencapaian KPI Triwulanan dan Tahunan tahun 2019;

Perintah melakukan sesuatu:
- Tindak lanjut temuan hasil audit eksternal dan internal;
- Tindak lanjut atas langkah-langkah pencegahan terulangnya kembali *black-out* tanggal 4 Agustus 2019.

according to scope of authority of Board of Commissioners; (2) Letters of recommendation to the Minister of SOE as shareholder for matters beyond authority of Board of Commissioners; (3) Opinion; (4) An order to perform certain action.

During 2019, supervisory products of Board of Commissioners consisted of:

Approvals:
- Writing-off of doubtful accounts;
- Writing-off of Non-operating Property, Plant, and Equipment (ATTB) that aged 5 years or less;
- Loans granted by domestic and foreign financial institutions;
- Appointment of Directors/Commissioners of subsidiaries;
- Organizational Structure.

Recommendations:
- Writing-off of Property, Plant, and Equipment (ATTB) above the authorized amount;
- Loans granted by domestic and foreign financial institutions above the authorized amount;
- Appointment of Corporate Secretary;
- 2018 tantiem for Board of Commissioners and Board of Directors and 2019 remuneration for Board of Commissioners and Board of Directors;
- 2018 income allocation;
- Appointment of KAP to Audit 2019 Financial Statements and PKBL;
- 2020 RKAP;
- Additional authorized capital and paid-in capital of subsidiaries;

Opinions:
- 2019 Quarterly and Annual Management Reports;
- 2019 Quarterly and Annual KPI Achievement Reports;

Order:
- Follow-up on findings of external and internal audits;
- Follow-up on measures to prevent recurrence of black-out on August 4, 2019.

Tanggapan/Laporan Dewan Komisaris yang Disampaikan Kepada RUPS

- Rencana Kerja dan KPI Dewan Komisaris tahun 2019;
- Laporan perkembangan realisasi KPI Dewan Komisaris triwulan II 2019;
- Laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan realisasi KPI Dewan Komisaris tahun 2019;
- Rekomendasi tantiem Dewan Komisaris dan Direksi tahun buku 2018 dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2019;
- Rekomendasi penggunaan laba bersih tahun buku 2018;
- Usulan KAP untuk audit Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2019;
- Pendapat Dewan Komisaris terhadap Laporan Manajemen tahun 2019;
- Rekomendasi dan pendapat Dewan Komisaris atas RKAP tahun 2019.

Responses/Reports of Board of Commissioners Submitted to GMS

- 2019 Work Plan and KPI of Board of Commissioners;
- KPI Realization Report of Board of Commissioners for the second quarter of 2019;
- 2019 Supervisory Report and KPI Realization of Board of Commissioners;
- Proposed 2018 tantiem and 2019 remuneration for Board of Commissioners and Board of Directors;
- Proposed allocation of Net Income for 2018;
- Proposed Public Accounting Firm to Audit PT PLN (Persero) for Financial Year 2019;
- Opinion of Board of Commissioners on 2019 Management Reports;
- Recommendation and opinion of Board of Commissioners on 2019 RKAP.

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI ANTAR ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM

Anggota Dewan Komisaris Perusahaan tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara keuangan maupun kekeluargaan antar satu sama lain, serta antara Dewam Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham.

DISCLOSURE OF AFFILIATION AMONG MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS AND/OR SHAREHOLDER

Members of the Company's Board of Commissioners do not have financial or family affiliations with each other, as well as among Board of Commissioners, Board of Directors and/or Shareholder.

Nama Name	**Hubungan Keluarga dengan** Family Relationship with						**Hubungan Keuangan dengan** Financial Relationship with					
	Anggota Dewan Komisaris BOC Members		**Anggota Direksi** BOD Members		**Pemegang Saham** Shareholders		**Anggota Dewan Komisaris** BOC Members		**Anggota Direksi** BOD Members		**Pemegang Saham** Shareholders	
	Ya Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No
Amien Sunaryadi		√		√		√		√		√		√
Suahasil Nazara		√		√		√		√		√		√
Deden Juhara		√		√		√		√		√		√
Rida Mulyana		√		√		√		√		√		√
Mohamad Ikhsan		√		√		√		√		√		√

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris ditunjukkan dengan keberagaman keahlian dan pengalaman yang mencakup berbagai bidang seperti ekonomi/keuangan, hukum, dan kelistrikan, serta keberagaman gender seperti terlihat pada tabel berikut:

DIVERSITY IN COMPOSITION OF BOARD OF COMMISSIONERS

Diversity in composition of Board of Commissioners is reflected on diversity of expertise and experience covering various fields such as economics/finance, law and electricity, as well as gender diversity as shown in the following table:

Nama Name	**Jenis Kelamin** Gender	**Usia Per 31 Des. 2019** Age as of Dec. 31, 2019 **(tahun** years old**)**	**Pendidikan Terakhir** Education*			**Keahlian** Expertise		
			S1	**S2**	**S3**	**Ekonomi/ Keuangan** Economics/ Finance	**Hukum** Law	**Kelistrikan** Electrical Engineering
Amien Sunaryadi	Laki-laki Male	59		√		√		
Suahasil Nazara	Laki-laki Male	49			√	√		
Ilya Avianti	Perempuan Female	60			√	√		
Rida Mulyana	Laki-laki Male	56		√				√
Deden Juhara	Laki-laki Male	58	√				√	
Mohamad Ikhsan	Laki-laki Male	57			√	√		

Organ Pendukung Dewan Komisaris

Supporting Organs of Board of Commissioners

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretaris Dewan Komisaris diangkat oleh Dewan Komisaris untuk memimpin dan menjalankan fungsi Sekretariat Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris berasal dari luar Perusahaan dan memiliki masa jabatan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris diatur di dalam Board Manual, yakni sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan kegiatannya, antara lain:
   a. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris;
   b. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan;
   c. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
   d. Menyusun rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
   e. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris;
   f. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.
2. Memastikan bahwa Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya senantiasa mematuhi perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG.
3. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris.
4. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris.
5. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.
6. Memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan Dewan Komisaris tersimpan dengan baik di Perusahaan.

SECRETARY OF BOARD OF COMMISSIONERS

Secretary of Board of Commissioners is appointed by Board of Commissioners to lead and perform functions of Secretariat of Board of Commissioners. Secretary of Board of Commissioners is from outside the Company and has an office term stipulated by Board of Commissioners.

Duties and Responsibilities

Duties and responsibilities of Secretary of Board of Commissioners are regulated in Board Manual, as follows:

1. Assisting Board of Commissioners in carrying out its activities, including:
   a. Preparing meetings, including Board of Commissioners briefing sheet;
   b. Preparing minutes of Board of Commissioners' meeting in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association;
   c. Administering Board of Commissioners' documents, including incoming and outgoing letters, minutes of meetings and other documents;
   d. Preparing draft Work Plan and Budget of Board of Commissioners;
   e. Preparing draft reports of Board of Commissioners;
   f. Performing other duties assigned by Board of Commissioners.
2. Ensuring that Board of Commissioners in carrying out its duties always in compliance with the applicable laws and regulations and implements GCG principles.
3. Providing information required by Board of Commissioners.
4. Coordinating Committee members, if needed in order to expedite duties of Board of Commissioners.
5. Being a liaison officer for Board of Commissioners with other parties.
6. Ensuring that documentation of Board of Commissioners' activities are archived properly in the Company.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Profile of Secretary of Board of Commissioners

Djoko Hastowo
Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of the Board of Commissioners

Usia Age	65 tahun, per 31 Desember 2019	65 years old, as of December 31, 2019
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	Indonesia
Riwayat Pendidikan History of Education	S1 Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (1979)	Bachelor of Electrical Engineering, Bandung Institute of Technology (1979)
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	SK Dewan Komisaris No. 30/SK/DK-PLN/2015 tanggal 4 September 2015 dan diangkat kembali berdasarkan SK Dewan Komisaris No. 7/SK/DK-PLN/2018 tanggal 20 Mei 2018	Board of Commissioners' Decree No. 30/SK/DK-PLN/2015 dated September 4, 2015 and reappointed based on Board of Commissioners'Decree No. 7/SK/DK=PLN/2018 dated May 20, 2018
Pengalaman Kerja Working Experience	• Kepala Dinas Operasi dan Pemeliharaan pada Divisi Penyaluran PLN P3B (1996-2001) • Manajer Bidang Teknik pada PLN P3B (2001-2004) • Deputi Direktur Pembinaan Transmisi pada PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2004-2008) • General Manajer PT PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi (2008-2009) • Deputi Direktur Pengembangan SDM dan Talenta pada PLN Kantor Pusat (2009) • Direktur Utama PT Indonesia Power (2009-2014) • Komisaris Utama PT Comestoarra Bentarra Noesantarra (2013) • Advisor PT Enviromate Technology Internasional (2014)	• Head of Department of Operations and Maintenance on Distribution Division of PLN P3B (1996-2001) • Manager of Engineering at PLN P3B (2001-2004) • Deputy Director of Transmission Development at PT PLN (Persero) Head Office (2004-2008) • General Manager of PT PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi (2008-2009) • Deputy Director of Human Resource Development and Talents at PLN Head Office (2009) • President Director of PT Indonesia Power (2009-2014) • President Commissioner of PT Comestoarra Bentarra Noesantarra (2013) • Advisor of PT Enviromate Technology International (2014)
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	Tidak memiliki jabatan rangkap sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 terkait Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN	Does not have concurrent positions as stipulated in State Minister of SOEs Regulation No. PER-12/MBU/2012 on the Supporting Organs of the SOEs Board of Commissioners/ Board of Trustees
Pendidikan dan Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi Education and Training for Competence Development	Mengkoordinasikan dan mengikuti kunjungan kerja Dewan Komisaris tahun 2019 ke Pusat-Pusat dan Unit-Unit PLN sebagai berikut: • PLN Puslitbang, Pusenlis dan Pusertif Jakarta (16 Januari) • PT PLN Batam (6-8 Februari) • PLN Area Bengkulu Wilayah Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu (17-19 Februari) • PLN Wilayah Sumatera Utara (11-13 Maret) • PLN Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (24-26 Maret) • PLN Distribusi Jawa Barat (24-25 Juni) • PLN Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (24-25 Juli) • PLN UIT JBTB dan PLN UIP JBTB 1 (14-16 Agustus) • PLN Distribusi Bali (26-28 Agustus) • PLN Wilayah Aceh (1-3 Oktober) • PLN Wilayah Kupang - Labuan Bajo (4-7 Oktober) • PLN Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo (9-11 Oktober) • PLN Wilayah Kalimantan Barat (30 Oktober-1 November) • PLN Wilayah Kalimantan Timur dan Utara (6 Desember) • PLN Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta (18-20 Desember)	Coordinating and attending Board of Commissioners' working visit throughout 2019 to PLN Centers and Units as follows: • PLN Center for Research and Development, Pusenlis and Pusertif Jakarta (January 16) • PT PLN Batam (February 6-8) • PLN Bengkulu Area, Region of South Sumatra, Jambi and Bengkulu (February 17-19) • PLN Region of North Sumatra (March 11-13) • PLN Region of South Sulawesi, Southeast Sulawesi and West Sulawesi (March 24-26) • PLN Distribution of West Java (June 24-25) • PLN Region of South Sulawesi, Southeast Sulawesi and West Sulawesi (July 24-25) • PLN UIT JBTB and PLN UIP JBTB 1 (August 14-16) • PLN Distribution of Bali (August 26-28) • PLN Region of Aceh (1-3 October) • PLN Region Kupang-Labuan Bajo (October 4-7) • PLN Region of Suluttenggo (9-11 October) • PLN Region of West Kalimantan (October 30-November 1) • PLN Region of East and North Kalimantan (December 6) • PLN Distribution of West Java and DIY (December 18-20)

KOMITE AUDIT

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dengan memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris terkait dengan laporan dan informasi keuangan yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan para pemangku kepentingan lainnya serta tentang efektivitas dari pengendalian internal Perusahaan. Lebih lanjut, PLN membentuk Komite Audit guna memenuhi prinsip akuntabilitas pada perusahaan BUMN sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan di Indonesia.

Komposisi Komite Audit

Komite Audit terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua, 2 (dua) orang Komisaris sebagai anggota, dan dua atau lebih anggota dari pihak luar yang independen dengan keahlian dan pengalaman sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Keanggotaan Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

Anggota Komite Non Komisaris dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisaris, baik dari calon-calon yang mengajukan lamaran kepada Dewan Komisaris maupun calon-calon yang diusulkan oleh anggota Dewan Komisaris.

Anggota Komite Non Komisaris harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang baik.
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan.
3. Memiliki kecukupan waktu untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
4. Mempunyai kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan yang baik.
5. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang industri/bisnis Perusahaan.
6. Bagi anggota Komite Audit, maka salah seorang anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan/keahlian bidang akuntansi.
7. Berasal dari luar Perusahaan.

AUDIT COMMITTEE

Audit Committee is a committee established by Board of Commissioners to assist implementation of duties and functions of Board of Commissioners, by providing professional and independent opinion to Board of Commissioners related to financial statements and information submitted by Board of Directors to Board of Commissioners and other stakeholders, as well as on effectiveness of the Company's internal control. Furthermore, PLN established Audit Committee in order to meet the principle of accountability in SOE in accordance with the applicable laws and regulations in Indonesia.

Composition of Audit Committee

Audit Committee consists of 1 (one) Independent Commissioner as Chairman, 2 (two) Commissioners as members and two or more independent members from external parties with expertise and experience according to the required qualifications. Membership of Audit Committee is appointed and dismissed by Board of Commissioners.

Non-Commissioner members of Audit Committee are selected and appointed in Board of Commissioners meeting, both for candidates applying to Board of Commissioners and nominees proposed by Board of Commissioners.

Non-Commissioner members of Audit Committee shall have the following qualifications:

1. Demonstrate good integrity.
2. Not have personal interest/relations that may cause negative impact and/or conflict of interest;
3. Have sufficient time to perform his/her duties.
4. Have the ability to communicate and coordinate effectively.
5. Have adequate knowledge of the Company's industry/business;
6. Specifically for Audit Committee members, one of the members must have educational background/expertise in accounting.
7. Come from outside the Company.

Susunan Komite Audit selama periode tahun 2019 adalah:

Compositions of Audit Committee during the 2019 period were:

Jabatan Position	**Periode 1 Januari-30 Juni** Period of January 1-June 30	**Periode 1 Juli-31 Desember** Period of July 1-December 31
Ketua merangkap Anggota Chairman and Member	Darmono	Darmono/Amien Sunaryadi
Anggota Member	Ilya Avianti	Ilya Avianti
Anggota Member	Rionald Silaban	Sumiyati/-
Anggota Member	Achmad Wahjudi	Achmad Wahjudi
Anggota Member	Krisna Simbaputra	Krisna Simbaputra
Anggota Member	Nizam Burhanudin	Nizam Burhanudin

Profil Anggota Komite Audit Non Komisaris

Profile of Non-Commissioner Members of Audit Committee

Achmad Wahjudi
Anggota Komite Audit
Member of Audit Committee

Usia Age	55 tahun, per 31 Desember 2019	55 years old, as of December 31, 2019
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	Indonesia
Riwayat Pendidikan History of Education	1. S1 Ekonomi dari Universitas Airlangga (1986) 2. Sertifikasi CPA	1. Bachelor of Economics from Airlangga University (1986) 2. CPA Certification
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	SK Dewan Komisaris No. 03/SK/DK-PLN/2016	Board of Commissioners' Decree No. 03/SK/DK-PLN/2016
Pengalaman Kerja Working Experience	1. Anggota Komite Manajemen Risiko PT PLN (Persero) (1 Maret -1 Agustus 2016) 2. Konsultan mandiri di bidang akuntansi, keuangan, dan perpajakan (2014-sekarang) 3. Direktur Keuangan Susi Air (2011-2013) 4. Akuntan publik, sekaligus konsultan manajemen dan perpajakan (1992-2010) 5. Konsultan di Hadori & Co, auditor internal di Mercedez Benz Grup, dan staf akuntansi dan keuangan perusahaan pertambangan Australia, New Hope (1986-1992)	1. Members of Risk Management Committee of PT PLN (Persero) (March 1 -August 1, 2016) 2. Independent consultant in accounting, finance and taxation (2014-present) 3. Director of Finance at Susi Air (2011-2013) 4. Public accountant and management and taxation consultant (1992-2010) 5. Consultant at Hadori & Co, internal auditor at Mercedez Benz Group, and accounting and financial staff of an Australian mining company, New Hope (1986-1992)
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	Tidak memiliki jabatan rangkap sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 terkait Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN	Does not have concurrent positions as stipulated in State Minister of SOEs Regulation No. PER-12/MBU/2012 on the Supporting Organs of the SOEs Board of Commissioners/ Board of Trustees
Pendidikan dan Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi Education and Training for Competence Development	• Workshop dengan tema Holding Company tanggal 23 Februari di Bandung • Workshop dengan tema Integrated GRC & Financial Crime Conference tanggal 27 – 28 Juni di Bali • Konferensi yang diselenggarakan oleh European Confederation Of Institute of Internal Auditing (ECIIA) Conference 2019 di Luxembourg tanggal 13 -22 Oktober • Workshop Expand Leadership Programe yang diadakan oleh Corporate Leadership Development Institute (CLDI) dengan tema "Memimpin Transformasi Digital Yang Efektif Untuk Memenangkan Era Disrupsi Melalui Pengembangan Digital Mastery" tanggal 28 & 29 November di Bali	• Workshop with the theme of Holding Company on February 23 in Bandung • Workshop with the theme Integrated GRC & Financial Crime Conference on June 27-28 in Bali • Conference held by the European Confederation of Institute of Internal Auditing (ECIIA) Conference 2019 in Luxembourg on October 13-22 • Expand Leadership Program Workshop held by the Corporate Leadership Development Institute (CLDI) with the theme "Leading Effective Digital Transformation to Win the Disruption Era Through Digital Mastery Development" November 28 & 29 in Bali

Krisna Simbaputra
Anggota Komite Audit
Member of Audit Committee

Usia Age	58 tahun, per 31 Desember 2019	58 years old, as of December 31, 2019
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	Indonesia
Riwayat Pendidikan History of Education	1. S2 Information Management, Sheffield University, UK (1995) 2. S1 Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung (1985)	1. Master of Information Management, Sheffield University, UK (1995) 2. Bachelor of Electrical Engineering, Bandung Institute of Technology (1985)
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	SK Dewan Komisaris No. 16/SK/DK-PLN/2017	Board of Commissioners' Decree No. 16/SK/DK-PLN/2017
Pengalaman Kerja Working Experience	1. Kepala Divisi Manajemen Risiko & Kepatuhan (2013-2017) 2. General Manager Wilayah Sumatera Utara (2011-2013) 3. General Manager Wilayah Sumatera Barat (2010-2011) 4. Manager Bidang Distribusi Jatim (2009) 5. Manager Bidang Operasi P3B Jawa Bali (2008-2009) 6. Manager Bidang Perencanaan Wilayah Kalimantan Timur (2006-2008) 7. Manajer Area Cimahi (2000-2006)	1. Head of Risk Management & Compliance Division, PLN Head Office (2013-2017) 2. General Manager of PLN Region of North Sumatra (2011-2013) 3. General Manager of PLN Region of West Sumatra (2010-2011) 4. Manager of PLN Distribution of East Java (2009) 5. Manager of Operations of PLN P3B Java Bali (2008-2009) 6. Manager of Planning of PLN Region of East Kalimantan (2006-2008) 7. Manager of PLN Area of Cimahi (2000-2006)
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	Tidak memiliki jabatan rangkap sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 terkait Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN	Does not have concurrent positions as stipulated in State Minister of SOEs Regulation No. PER-12/MBU/2012 on the Supporting Organs of the SOEs Board of Commissioners/ Board of Trustees
Pendidikan dan Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi Education and Training for Competence Development	• Pelatihan Key Risk Indicator, 27 Februari - 1 Maret, di Bandung • Workshop dengan tema Integrated GRC & Financial Crime Conference tanggal 27 – 28 Juni di Bali • Konferensi yang diselenggarakan oleh European Confederation Of Institute of Internal Auditing (ECIIA) Conference 2019 di Luxembourg tanggal 13 -22 Oktober • Workshop Expand Leadership Programe yang diadakan oleh Corporate Leadership Development Institute (CLDI) dengan tema "Memimpin Transformasi Digital Yang Efektif Untuk Memenangkan Era Disrupsi Melalui Pengembangan Digital Mastery" tanggal 28 & 29 November di Bali	• Key Risk Indicator Training, February 27 - March 1, in Bandung • Workshop with the theme Integrated GRC & Financial Crime Conference on June 27-28 in Bali • Conference held by the European Confederation of Institute of Internal Auditing (ECIIA) Conference 2019 in Luxembourg on October 13-22 • Expand Leadership Program Workshop held by the Corporate Leadership Development Institute (CLDI) with the theme "Leading Effective Digital Transformation to Win the Disruption Era Through Digital Mastery Development" November 28 & 29 in Bali

Nizam Burhanudin
Anggota Komite Audit
Member of Audit Committee

Usia Age	61 tahun, per 31 Desember 2019	61 years old, as of December 31, 2019
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	Indonesia
Riwayat Pendidikan History of Education	1. S3 Ilmu Hukum, Universiti Kebangsaan Malaysia (2011) 2. S2 Ilmu Hukum, Universitas Indonesia (1997) 3. S1 Ilmu Hukum, Universitas Muhamadiyah Jakarta (1986)	1. Doctor of Law, Universiti Kebangsaan Malaysia (2011) 2. Master of Law, University of Indonesia (1997) 3. Bachelor of Law, Muhamadiyah University Jakarta (1986)
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	SK Dewan Komisaris No. 6/SK/DK-PLN/2019 tanggal 27 Maret 2019	Board of Commissioners' Decree No. 16/SK/DK-PLN/2017
Pengalaman Kerja Working Experience	Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Keuangan Negara BPK (2000)	Head of Principal Directorate of Mentoring and Development of Law in State Financial Audit BPK (2000)
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	Dosen Ilmu Hukum, Universitas Muhamadiyah Jakarta	Lecturer in Law, Muhammadiyah University Jakarta
Pendidikan dan Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi Education and Training for Competence Development	Workshop Expand Leadership Programe yang diadakan oleh Corporate Leadership Development Institute (CLDI) dengan tema "Memimpin Transformasi Digital Yang Efektif Untuk Memenangkan Era Disrupsi Melalui Pengembangan Digital Mastery" tanggal 28 & 29 November di Bali	Expand Leadership Program Workshop held by the Corporate Leadership Development Institute (CLDI) with the theme "Leading Effective Digital Transformation to Win the Era of Disruption through the Development of Digital Mastery" November 28 & 29 in Bali

Periode dan Masa Jabatan Anggota Komite Audit

Masa tugas anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris mengikuti masa jabatannya sebagai Komisaris. Sedangkan jabatan Komite Audit non Dewan Komisaris adalah 3 tahun dan dapat diperpanjang sekali lagi dengan masa jabatan 2 tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris memberhentikannya sewaktu-waktu.

Pernyataan Independensi Komite Audit

Sesuai dengan peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011, maka salah satu dari kriteria menjadi anggota Komite Audit adalah independen dan bebas dari benturan kepentingan sehingga dapat bersikap objektif dalam memberikan pendapat terhadap permasalahan yang dihadapi. Hal lain yang ditekankan kepada seluruh anggota Komite adalah agar bersikap profesional di dalam melaksanakan tugas dan dalam memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris.

Period and Office Term of Audit Committee Members

The office term of Committee members who come from the Board of Commissioners follows his tenure as a Commissioner. While office term of non-Board of Commissioners Audit Committee is 3 years and can be extended for another term of 2 years with due regards to the right of Board of Commissioners to dismiss at any time.

Independence Statement

In line with Regulation of the Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011, one of the criteria to be a member of Audit Committee is independence and freedom from conflict of interest so that the members can act objectively in providing opinion on any encountered problems. Another required characteristic of Audit Committee members is being professional in performing duties and in providing opinions to Board of Commissioners. Independence of Audit Committee is measured

Pengukuran terhadap Independensi Komite Audit dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi sebagaimana yang dimaksud yaitu:

by referring to Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015 concerning Establishment of and Guidelines for Audit Committees. All members of the Company's Audit Committee meet the independence criteria as referred to in POJK 55/2015, as follows:

Kriteria Independensi Independence Criteria	Darmono	Amien Sunaryadi	Ilya Avianti	Sumiyati	Achmad Wahjudi	Krisna Simbaputra	Nizam Burhanudin
Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik, atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada PLN dalam 6 bulan terakhir. Shall not be an employee in the Public Accountants Firm, Legal Consultant Office, Public Appraiser Service Office, or any other party providing Insurance Services, Non-Insurance Services, Appraisers, and/or other Consulting Services to PLN within the last 6 months.	√	√	√	√	√	√	√
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan atau mengawasi kegiatan PLN dalam 6 bulan terakhir. Shall not be a person who is employed or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the PLN activities within the last 6 months.	√	√	√	√	√	√	√
Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung di PLN. Shall have no direct or indirect shares in PLN.	√	√	√	√	√	√	√
Keluarga tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung di PLN. His/her family shall have no direct or indirect shares in PLN.	√	√	√	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama PLN. Shall not have affiliations with Commissioners, Directors, or the Shareholder of PLN.	√	√	√	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PLN. Shall have no direct or indirect business relationship related to PLN business activities.	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau merupakan calon atau menjabat sebagai kepala/wakil kepala pemerintahan daerah. Shall not serve as a party official and/or candidate/legislative member and/or a candidate or serving as head/deputy head of local government.	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terkait dengan jabatan di PLN. Shall not have other positions that may cause a conflict of interest related to the position at PLN.	√	√	√	√	√	√	√

PIAGAM KOMITE AUDIT

Komite Audit memiliki Piagam Komite Audit yang menjabarkan tugas, tanggung jawab dan kewajiban Komite Audit. Piagam Komite Audit diberlakukan melalui keputusan Dewan Komisaris. Salah satu tugas utama Komite Audit adalah melakukan pengawasan (*oversight*) terhadap proses pelaporan keuangan termasuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap

AUDIT COMMITTEE CHARTER

Audit Committee has an Audit Committee Charter that describes duties, responsibilities and obligations of the Audit Committee. The Audit Committee Charter is enacted in accordance with decision of the Board of Commissioners. One of the Audit Committee's main duties is to supervise the financial reporting process, including monitoring and evaluating the independence of

independensi dari auditor independen, di luar tanggung jawab atas isi laporan keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen.

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana dijabarkan di dalam Piagam Komite Audit adalah:

1. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Audit;
2. Melakukan telaah atas efektivitas pelaksanaan tugas dan hasil audit eksternal oleh kantor akuntan publik termasuk memberikan rekomendasi kantor akuntan publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perusahaan;
3. Melakukan telaah atas efektivitas pelaksanaan dan hasil audit internal yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI);
4. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap informasi keuangan yang dikeluarkan Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada Laporan Keuangan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan Laporan Manajemen;
5. Melakukan telaah atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG);
6. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris, antara lain:
   a. Telaah dan tanggapan atas usulan penghapusan piutang, penghapusan persediaan, penghapusan aktiva tidak beroperasi dan penghapusan aset lainnya yang disampaikan Direksi;
   b. Tugas-tugas khusus lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris;
8. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Dewan Komisaris guna kelancaran pelaksanaan tugas Komite;
9. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas triwulanan Komite kepada Dewan Komisaris.

the independent auditor, excluding responsibility for content of the Financial Statements which is the responsibility of the management.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Duties and responsibilities of the Audit Committee as described in Audit Committee Charter are as follows:

1. Preparing Audit Committee's annual work plan and budget;
2. Reviewing work effectiveness and results of external audit conducted by public accounting firms, including providing recommendation to the public accounting firm that will audit the Company's financial statements;
3. Reviewing work effectiveness and results of internal audit conducted by Internal Audit Unit (SPI);
4. Ensuring that satisfactory evaluation procedures are in place for issuance of financial information by the Company, including but not limited to Financial Statements, Corporate Work Plan and Budget and Management Report;
5. Reviewing the Company's compliance with capital market regulations and other regulations relating to the Company's activities in accordance with the principles of good corporate governance (GCG);
6. Performing other tasks assigned by Board of Commissioners, including to:
   a. Review and response to the proposed write-off of accounts receivable, write-off of inventories, write-off of non-operating assets and write-off of other assets submitted by Board of Directors;
   b. Other specific tasks in accordance with the applicable laws and regulations;
7. Identifying matters that require attention of the Board of Commissioners;
8. Coordinating with the Secretary of the Board of Commissioners for smooth implementation of Committee duties;
9. Submitting the Committee's Quarterly Duty Implementation Report to the Board of Commissioners.

URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE AUDIT TAHUN BUKU

Selama tahun 2019, Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Pedoman Kerja Komite Audit Tahun 2019. Realisasi pelaksanaan tugas Komite Audit di tahun 2019 di antaranya:

1. Me*review* proses penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit laporan keuangan perusahaan untuk tahun 2019;
2. Me*review* progres dan hasil akhir pekerjaan KAP sebelum disajikan dalam laporan keuangan;
3. Menelaah dan memberikan tanggapan terhadap surat Direksi perihal permintaan persetujuan dan/atau rekomendasi penghapusan ATTB & PRR;
4. Terkait dengan persetujuan penghapusan PRR dan ATTB;
5. Komite Audit telah menyampaikan *monitoring* aktivitas SPI yang signifikan selama tahun 2019 beserta pembinaannya sebagai berikut:
   a. *Monitoring* Pelaksanaan PKPT SPI Tahun 2019 Dan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit.
   b. Kegiatan *Monitoring* Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.
   c. Kegiatan Peningkatan Kompetensi SPI
6. Melakukan penelaahan Laporan Manajemen tahun 2018 Audited dengan catatan parameter-parameter RKAP yang tidak tercapai (*exception basis*);
7. Melakukan telaahan Laporan Manajemen triwulan I, triwulan II, dan triwulan III tahun 2019, serta menyusun surat tanggapan atas laporan manajemen masing-masing yang di dalamnya antara lain berisi dan saran dan arahan Dewan Komisaris kepada Direksi;
8. Melakukan telahaan terhadap RKAP 2020.

RAPAT KOMITE AUDIT

Sepanjang tahun 2019, Komite Audit melaksanakan rapat 95 kali rapat melampaui rencana 61 kali rapat yang terdiri antara lain dari rapat yang dihadiri anggota komite unsur Komisaris sebanyak 37 kali dan 12 kali rapat yang hanya dihadiri anggota komite unsur non komisaris. Rapat lainnya sebanyak 46 kali dilaksanakan dengan mengundang para pihak

DESCRIPTION OF AUDIT COMMITTEE'S ACTIVITIES IN THE FINANCIAL YEAR

During 2019, Audit Committee conducted its duties and responsibilities in accordance with Audit Committee's Work Guidelines for 2019. Realization of Audit Committee's duties in 2019 included:

1. Reviewed selection process of Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's financial statements for 2019;
2. Reviewed progress and final results of KAP work before they are presented in the financial statements;
3. Reviewed and responded to Board of Directors letters regarding requests for approval and/or recommendations for written-off ATTB & PRR;
4. Related to agreement on written-off PRR and ATTB;
5. Audit Committee submitted monitoring of significant SPI activities and development during 2019, as follows:
   a. Monitoring Implementation of 2019 PKPT SPI and Completion of Follow-Ups on Audit Recommendations.
   b. Monitoring Activities on Completion of Follow-Ups on Recommendations of BPK Audit Results.
   c. SPI Competence Development Activities.
6. Reviewed 2018 Audited Management Report with notes for unachieved RKAP parameters (exception basis);
7. Reviewed Management Reports for the first, second and third quarters of 2019, and prepared a response letter to each management report which contains advices and guidance from Board of Commissioners to Board of Directors;
8. Reviewd 2020 RKAP.

AUDIT COMMITTEE MEETING

Throughout 2019, Audit Committee held 95 meetings, exeeding the planned 61 meetings, which included 37 meetings attended by committee members and 12 meetings only attended by non-commissioner committee members. Other 46 meetings were held by inviting related parties according to the purpose

yang berkepentingan sesuai tuntutan tugas dan tanggung jawab Komite Audit yakni Satuan Pengawasan Intern, Auditor Eksternal dan Manajemen Perusahaan.

of Audit Committee's duties and responsibilities, namely Internal Audit Unit, External Auditor and the Company's Management.

No.	Uraian Description	Jumlah Total
1.	Rapat internal Komite Audit dan staf Dewan Komisaris Internal meetings of Audit Committee and Board of Commissioners staff	12
2.	Rapat Komite Audit dengan Dewan Komisaris Meetings of Audit Committee and Board of Commissioners	37
3.	Rapat pembahasan dengan direktorat terkait (pembahasan RKAP, Laporan Manajemen dan permasalahan dengan masing-masing direktorat) Meetings with relevant directorates (discussion on RKAP, Management Report and issues with each directorate)	11
4.	Rapat dengan SPI Meetings with Internal Audit Unit	8
5.	Rapat dengan kantor akuntan publik Meetings with public accounting firm	5
6.	Mengikuti kunjungan kerja Dewan Komisaris dan rapat dengan pimpinan Unit PLN setempat Participating in work visit of Board of Commissioners and meeting with PLN Regional/Unit Managers	12
7.	Pembahasan dengan manajemen untuk menelaah permohonan penghapusan atas ATTB, PRR, aktiva lainnya, piutang macet lainnya yang diajukan Direksi Discussion with management to review write-off of ATTB, PRR, other assets, non-performing receivables proposed by the Board of Directors	10
	Jumlah Rapat Total of Meetting	**95**

Selain itu, Komite Audit juga melaksanakan rapat internal Komite Audit dan rapat dengan komite-komite Dewan Komisaris lainnya (rapat lintas Komite) untuk membahas beberapa permasalahan tertentu secara lebih mendalam dan komprehensif.

In addition, Audit Committee also held internal Audit Committee meetings and meetings with other Board of Commissionets' committees (cross-Committee meetings) to discuss certain issues in more depth and comprehensively.

KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) KOMITE AUDIT

Penilaian kinerja Komite Audit dilakukan dengan mekanisme *self-assessment*. Hasil pencapaian KPI Komite Audit di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) OF AUDIT COMMITTEE

Audit Committee's performance evaluation is carried out using a self-assessment mechanism. KPI achievement results.

Program Kerja Work Program	Uraian Description	Kuantitas/Tolok Ukur Quantity/Benchmark		Nilai Perolehan Score	
		Setahun A Year	Bobot Weight		
1. Menyampaikan Rencana Kerja dan KPI Komite Submit Committee Work Plan and KPI	Rencana Kerja dan KPI Komite tahun 2019 Committee Work Plan and KPI 2019	2 paper 2 papers	4	2 Paper 2 papers	4
	Ketepatan waktu penyampaian Timeliness of submission	Maret 2019 March 2019	3	28 Maret 2019 March 28, 2019	3

Program Kerja Work Program	**Uraian** Description	**Kuantitas/Tolok Ukur** Quantity/Benchmark		**Nilai Perolehan** Score	
		Setahun A Year	**Bobot** Weight		
2. Menelaah usulan Direksi tentang RKAP 2019 Review Board of Directors (BOD) proposal regarding 2019 RKAP	Menelaah dan menyampaikan hasil telaah atas permintaan Direksi setelah data lengkap Review and submit the result of BOD proposal after after completed data	usulan Direksi ditanggapi Respond BOD proposal	10	satu usulan one proposal	10
	Ketepatan waktu pemberian telaah Timeliness of review	14 hari kerja 14 working days	6	Di bawah 14 hari Below 14 days	6
3. Menelaah Laporan Manajemen Review of Management Report	Menelaah dan menyampaikan hasil telaah Review and submit the result	4 kali setahun 4 times a year	8	- TW IV 2018, - TW I, II, dan III 2019 - Q4 2018 - Q1, 2, and 3 2019	8
	Ketepatan waktu penyampaian Timeliness of submission	14 hari kerja 14 working days	3	Di bawah 14 hari kerja Below 14 working days	3
4. Menelaah usulan Direksi tentang usulan penghapusan ATTB dan PRR 2019 Review BOD proposal on ATTB and PRR write-off in 2019	Menelaah dan menyampaikan hasil telaah Review and submit the result	usulan Direksi ditanggapi BOD proposal responded	8	- Tahun 2017, - TW I, II,dan III 2019 - Year 2017 - Q1, 2 and 3 2019	8
	Ketepatan waktu penyampaian Timeliness of submission	14 hari kerja 14 working days	4	Rata-rata 14 hari (ada yg lebih 14 hari) Average 14 days (there are more than 14 days)	3
5. Menyampaikan laporan kegiatan dan realisasi KPI Komite triwulanan dan tahunan Submit Committee activity and KPI realization reports in quarterly and annualy basis	Laporan Kegiatan dan realisasi KPI Komite triwulan dan tahunan Committee activities and KPI realization report in quarterly and annually basis	4 kali setahun 4 times a year	6	- Tahun 2018 - Triwulan I, II dan III 2019.	6
	Ketetapan waktu Timeliness of submission	30 hari sejak berakhirnya periode 30 days since the end of period	4	Rata-rata 28 hari sejak berakhirnya periode Average 28 days since the end of period	4
6. Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners (BOC) meeting	Menghadiri rapat Dewan komisaris Attending BOC meeting	24 kali setahun 24 time a year	15	37 kali 37 times	15
7. Rapat internal Komite Committee internal meeting	Menghadiri rapat internal Komite Attending Committee internal meeting	12 kali setahun 12 time a year	15	12 kali 12 times	15
8. Kunjungan kerja ke unit Work visit to units	Melakukan kunjungan kerja ke unit/ anak perusahaan Conducting work visit to units/ subsidiaries	8 kali setahun 8 times a year	5	12 kali 12 times	5
9. Pengenalan/ induksi/peningkatan kompetensi Orientation/induction/ competence development	Mengikuti seminar/*workshop* Attending seminar/workshop	2 kali setahun 2 times a year	5	5 kali 5 times	5
10. *Self-Assessment* GCG Komite GCG self-assessment for Committee	Pemenuhan kriteria GCG untuk Komite Fulfillment of GCG criteria for Committee	Charter Komite Committee Charter	4	1 paper 1 paper	4
Jumlah|Total			**100**		**99**

REMUNERASI KOMITE AUDIT

Remunerasi Komite Audit diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Penghasilan anggota Komite Audit berupa honorarium maksimal sebesar 20% dari gaji Direktur Utama Perusahaan dengan ketentuan pajak ditanggung Perusahaan dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko ("Komite MR") adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dengan memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris terkait pelaksanaan sistem dan kebijakan, evaluasi manajemen risiko dan pemantauan kesesuaian potensi risiko di Perusahaan.

KOMPOSISI KOMITE MR

Komite MR terdiri dari 1 orang Komisaris Independen sebagai ketua, 2 orang Komisaris sebagai anggota, dan dua atau lebih anggota dari pihak luar yang independen dengan keahlian dan pengalaman sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Keanggotaan Komite MR diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

Anggota Komite non Komisaris harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang baik.
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan.
3. Memiliki kecukupan waktu untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
4. Mempunyai kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan yang baik.
5. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang industri/bisnis Perusahaan.
6. Berasal dari luar Perusahaan.

REMUNERATION FOR AUDIT COMMITTEE

Remuneration for Audit Committee is stipulated in Minister of SOE Regulation No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs of Board of Commissioners/Board of Trustees of SOE. Remuneration for members of the Audit Committee is an honorarium at a maximum amount of 20% of the Company's President Director's salary, provided that the tax is liable to the Company and the member is not allowed to receive any other income other than the honorarium.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Risk Management Committee ("RM Committee") is a committee established by Board of Commissioners to assist implementation of duties and functions of Board of Commissioners, by providing professional and independent opinions to Board of Commissioners related to implementation of system and policy, evaluation of risk management, as well as monitoring of potential risks within the Company.

COMPOSITION OF RM COMMITTEE

RM Committee consists of 1 Independent Commissioner as Chairman, 2 Commissioners as members and two or more independent members from external parties with expertise and experience according to the required qualifications. Membership of RM Committee is appointed and dismissed by Board of Commissioners.

Non-Commissioner Members of the Committee shall have the following qualifications:

1. Demonstrate good integrity.
2. Not have personal interest/relations that may cause negative impact and conflict of interest;
3. Have sufficient time to perform his/her duties.
4. Have the ability to communicate and coordinate effectively.
5. Have adequate knowledge of the Company's industry/business;
6. Come from outside the Company.

Susunan Komite Manajemen Risiko selama periode tahun 2019 adalah:

Compositions of RM Committee during the 2019 period were:

Jabatan Position	**Periode 1 Januari-30 Juni** Period of January 1-June 30	**Periode 1 Juli-31 Desember** Period of July 1-December 31
Ketua merangkap Anggota Chairman and Member	Oegroseno/Deden Juhara	Deden Juhara/Suahasil Nazara
Anggota Member	Andy Nursaman Sommeng	Rida Mulyana
Anggota Member	Aloysius K. Ro	Aloysius K. Ro/Mohamad Ikhsan
Anggota Member	Darmawan Prasodjo	-
Anggota Member	Marlius Alrobin Bachtiar	Marlius Alrobin Bachtiar
Anggota Member	Bambang Purwo Handoko	Bambang Purwo Handoko
Anggota Member	Firman Dini	Firman Dini

Profil Anggota Komite MR Non Komisaris

Profile of Non-Commissioner Members of RM Committee

Marlius Alrobin Bachtiar
Anggota Komite MR
RM Committee member

Usia Age	60 tahun, per 31 Desember 2019	60 years old, as of December 31, 2019
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	Indonesia
Riwayat Pendidikan History of Education	1. S2 Manajemen dari Universitas Sumatera Utara (1999) 2. S1 Ekonomi dari Universitas Trisakti (1986)	1. Master of Management from University of North Sumatera (1999) 2. Bachelor of Economics from Trisakti University (1986)
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	SK Dewan Komisaris No. 12/SK/DK-PLN/2015	Board of Commissioners Decree No. 12/SK/DK-PLN/2015
Pengalaman Kerja Working Experience	1. Vice President Departemen Head Corporate Risk Bank Mandiri (2008-2015) 2. Vice President Special Project Officer Credit Recovery, Bank Mandiri (2008) 3. Vice President Regional Recovery Manager Bank Mandiri (2007-2008) 4. Assistant Vice President Senior Credit Recovery Manager, Bank Mandiri (2002-2007)	1. Vice President Department Head Corporate Risk at Bank Mandiri (2008-2015) 2. Vice President Special Project Officer Credit Recovery at Bank Mandiri (2008) 3. Vice President Regional Recovery Manager at Bank Mandiri (2007-2008) 4. Assistant Vice President Senior Credit Recovery Manager at Bank Mandiri (2002-2007)
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	Tidak memiliki jabatan rangkap sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 terkait Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN	Does not have concurrent positions as stipulated in State Minister of SOEs Regulation No. PER-12/MBU/2012 on the Supporting Organs of the SOEs Board of Commissioners/ Board of Trustees
Pendidikan dan Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi Education and Training for Competence Development	• Workshop dan Diskusi "Merger, Akuisisi, Spin-Off dan Pengelolaan Holding Company ", Bandung, 23 Februari 2019; • Seminar, Conference & Workshop "Risks Beyond 2019 International Conference on ERM", Bali, 4 – 7 Desember 2019.	• Workshop and Discussion "Mergers, Acquisitions, Spin-Offs and Holding Company Management", Bandung, February 23, 2019; • Seminar, Conference & Workshop "Risks Beyond 2019 International Conference on ERM", Bali, 4 - 7 December 2019.

Bambang Purwo Handoko
Anggota Komite MR
RM Committee Member

Usia Age	63 tahun, per 31 Desember 2019	63 years old, as of December 31, 2019
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	Indonesia
Riwayat Pendidikan History of Education	1. S2 Hukum, Universitas Indonesia (2005) 2. Notariat (Sp1), Universitas Diponegoro (2000) 3. S1 Hukum, Universitas Negeri Djember (1980)	1. Master of Law, University of Indonesia (2005) 2. Notariat (Sp1), Diponegoro University, Semarang, (2000) 3. Bachelor of Law, State University of Djember (1980)
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	SK Dewan Komisaris No. 21/SK/DK-PLN/2016	Board of Commissioners' Decree No. 21/SK/DK-PLN/2016
Pengalaman Kerja Working Experience	1. Instruktur pada Udiklat Cibogo (2012-2015) 2. Konsultan Jasa Manajemen Konstruksi (2013-2015) 3. VP Hukum, PT Indonesia Power (2002-2012) 4. Ahli Kinerja merangkap Deputy Manager Kepegawaian PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang (2000-2002)	1. Instructor at PLN Education and Training Unit Cibogo (2012-2015) 2. Construction Management Consultant (2013-2015) 3. VP Legal, PT Indonesia Power (2002-2012) 4. Performance Expert and Deputy Manager Personnel PLN Distribution of Jakarta Raya and Tangerang (2000-2002)
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	Tidak memiliki jabatan rangkap sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 terkait Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN	Does not have concurrent positions as stipulated in State Minister of SOEs Regulation No. PER-12/MBU/2012 on the Supporting Organs of the SOEs Board of Commissioners/ Board of Trustees
Pendidikan dan Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi Education and Training for Competence Development	• Integrated Governance Risk & Compliance and Financial Crime Conference, 26-29 Juni 2019 di Bali • Enterprise Risk Management International Conference and Workshop Risk Beyond 2019, 4-7 Desember 2019 di Bali	• Integrated Governance Risk & Compliance and Financial Crime Conference, June 26-29, 2019 in Bali • International Enterprise Risk Management Conference and Workshop Beyond 2019, December 4-7, 2019 in Bali

Firman Dini
Anggota Komite MR
RM Committee Member

Usia Age	62 tahun, per 31 Desember 2019	62 years old, as of December 31, 2019
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	Indonesia
Riwayat Pendidikan History of Education	S1 Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung (1983)	Bachelor of Electrical Engineering, Bandung Institute of Technology (1983)
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	SK Dewan Komisaris No. 10/SD/DK-PLN/2017	Board of Commissioners' Decree No. 10/SD/DK-PLN/2017
Pengalaman Kerja Working Experience	1. Assessor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik pada PT ELESKA IATKI, Bandung (2015-sekarang) 2. Project Advisor pada PT Multi Daya Lestari (2014-sekarang) 3. Komisaris Utama PT Artha Daya Coalindo (2012-2014) 4. Komisaris PT Rekadaya Elektrika (2012-2014) 5. Anggota Badan Pengawas Harian STT-PLN (2012-2014) 6. Anggota Badan Pengawas Harian Dana Pensiun PLN (2010-2013) 7. Direktur SDM PT Indonesia Power (2009-2013)	1. Assessor in Electricity Power Generation at PT ELESKA IATKI, Bandung (2015-present) 2. Project Advisor at PT Multi Daya Lestari (2014-present) 3. President Commissioner of PT Artha Daya Coalindo (2012-2014) 4. Commissioner of PT Rekadaya Elektrika (2012-2014) 5. Members of the STT-PLN Daily Oversight Board (2012-2014) 6. Member of Supervisory Board of PLN Pension Fund (2010-2013) 7. HR Director of PT Indonesia Power (2009-2013)
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	Tidak memiliki jabatan rangkap sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 terkait Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN	Does not have concurrent positions as stipulated in State Minister of SOEs Regulation No. PER-12/MBU/2012 on the Supporting Organs of the SOEs Board of Commissioners/ Board of Trustees
Pendidikan dan Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi Education and Training for Competence Development	• Workshop dan Diskusi "Merger, Akuisisi, Spin-Off dan Pengelolaan Holding Company ", Bandung, 23 Februari 2019. • Seminar, Conference & Workshop "Saatnya Memberdayakan Masyarakat Indonesia Untuk Menjadi Produsen Energi Terbarukan Demi Mewujudkan Kemandirian Energi Nasional", Bali, 28 – 29 Agustus 2019. • Seminar, Conference & Workshop "Risks Beyond 2019 International Conference on ERM", Bali, 4 – 7 Desember 2019.	• Workshop and Discussion "Mergers, Acquisitions, Spin-Offs and Holding Company Management", Bandung, February 23, 2019. • Seminars, Conferences & Workshops "Time to Empower Indonesian Communities to Become Renewable Energy Producers for the Establishment of National Energy Independence", Bali, August 28-29, 2019. • Seminar, Conference & Workshop "Risks Beyond 2019 International Conference on ERM", Bali, December 4-7, 2019.

Periode dan Masa Jabatan Anggota Komite MR

Masa tugas anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris mengikuti masa jabatannya sebagai Komisaris. Sedangkan masa tugas Anggota Komite Non Komisaris yang lain berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk menghentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.

Period and Office Term of RM Committee Members

The office term of Committee members who come from the Board of Commissioners follows his tenure as a Commissioner. While office term of other Non-Commissioner members of the Committee is 3 years and can be extended for a maximum of 2 years with due regards to the right of Board of Commissioners to terminate at any time.

PERNYATAAN INDEPENDENSI

Salah satu kriteria menjadi anggota Komite MR adalah independen dan bebas dari benturan kepentingan sehingga dapat bersikap objektif dalam memberikan pendapat terhadap permasalahan yang dihadapi. Hal lain yang ditekankan kepada seluruh anggota Komite adalah agar bersikap profesional di dalam melaksanakan tugas dan dalam memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris.

Seluruh anggota Komite MR telah memenuhi kriteria independensi sebagai berikut:

INDEPENDENCE STATEMENT

One of the criteria to be a member of the RM Committee is independence and freedom from conflict of interest so that the members can act objectively in providing opinion on any encountered problems. Another required characteristic from members of the Risk Management Committee is being professional in performing duties and in providing opinions to Board of Commissioners.

All members of the Company's Risk Management Committee meet the independence criteria, as follows:

Kriteria Independensi Independence Criteria	Oegroseno	Deden Juhara	Suahasil Nazara	Andy Nursaman Sommeng	Rida Mulyana	Aloysius K Ro	Mohamad Ikhsan	Darmawan Prasodjo	Marlius Alrobin Bachtiar	Bambang Purwo Handoko	Firman Dini
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama PLN. Shall not have Affiliations with Commissioners, Directors, or theShareholder of PLN.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PLN Shall have no direct or indirect business relationship related to PLN business activities.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau merupakan calon atau menjabat sebagai kepala/wakil kepala pemerintahan daerah. Shall not serve as a party official and/or candidate/legislative member and/or a candidate or serving as head/deputy head of local government.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terkait dengan jabatan di PLN. Shall not have other positions that may cause a conflict of interest related to a position at PLN.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

PIAGAM KOMITE MR

Komite MR memiliki Piagam Komite Manajemen Risiko yang menjabarkan tugas, tanggung jawab dan kewajiban Komite MR. Piagam Komite Manajemen Risiko diberlakukan melalui keputusan Dewan Komisaris. Salah satu tugas utama Komite MR adalah menjalankan fungsi sebagai penilai independen dalam melakukan penelaahan terhadap kebijakan strategis Perusahaan, yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, dan telah dilengkapi dengan hasil kajian manajemen risiko untuk

RM COMMITTEE CHARTER

Risk Management Committee has Risk Management Committee Charter that describes duties, responsibilities and obligations of the Risk Management Committee. The Risk Management Committee Charter is enacted in accordance with decision of Board of Commissioners. One of the Risk Management Committee's main duties is to function as an independent appraiser in reviewing the Company's strategic policies submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners, accompanied with results of risk management studies of the Company's

kegiatan Perusahaan yang memiliki potensi risiko yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan; serta kegiatan lain yang masuk ke dalam lingkup tugas pengawasan Dewan Komisaris.

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab Komite MR sebagaimana dijabarkan di dalam Piagam Komite Manajemen Risiko adalah:

1. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Komite;
2. Mendapatkan pemahaman atas manajemen risiko Perusahaan yang mencakup berbagai risiko yang dihadapi Perusahaan, strategi, sistem dan kebijakan manajemen risiko Perusahaan, pengendalian intern Perusahaan, termasuk kebijakan, metodologi dan infrastruktur;
3. Melakukan evaluasi terhadap model pengukuran risiko yang digunakan Perusahaan dan memberikan rekomendasi penyempurnaan lebih lanjut;
4. Memantau kesesuaian berbagai potensi risiko yang dihadapi Perusahaan;
5. Mengevaluasi berbagai kebijakan manajemen risiko perusahaan;
6. Melakukan koordinasi implementasi dan pengawasan keberadaan dan tingkat efektivitas masing-masing komponen dari Enterprise Risk Management (ERM) dalam Perusahaan;
7. Mengukur efektivitas masing-masing komponen dari ERM yang telah ditetapkan di Perusahaan;
8. Mengevaluasi hasil kajian risiko dan dokumen lainnya yang disampaikan oleh Direksi sebagai kelengkapan atas usulan rencana investasi/pendanaan/transaksi dan kegiatan operasional lainnya yang berdampak besar terhadap Perusahaan serta memberikan tanggapan kepada Dewan Komisaris terhadap usulan Direksi tersebut;
9. Mengawasi dan memantau bahwa mitigasi risiko terhadap kegiatan investasi dan operasional Perusahaan yang berdampak besar telah dilaksanakan secara konsisten;
10. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris;
11. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

activities that detail risks which may affect the Company's performance; and other activities within the scope of the Board of Commissioners supervisory duties.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Duties and responsibilities of RM Committee as stated in Risk Management Committee Charter are:

1. Preparing the Committee's Annual Work Plan and Budget;
2. Gaining an understanding of the Company's risk management, that includes various risks encountered by the Company, risk management strategies, systems and policies, internal controls, including policies, methodologies and infrastructure;
3. Evaluating various risk measurement models utilized by the Company and providing recommendations for further improvement;
4. Monitoring conformity of various risks encountered by the Company;
5. Evaluating the Company's risk management policies;
6. Coordinating implementation and supervision of the presence and effectiveness of each component of Enterprise Risk Management within the Company;
7. Assessing effectiveness of each ERM component in the Company;
8. Reviewing risk assessment results and other documents submitted by the Board of Directors as complementary to the proposed investment/funding/transaction plan and other operational activities that have significant impact on the Company, as well as responding to the Board of Commissioners on such proposals of the Board of Directors;
9. Supervising and monitoring risk mitigation on Company investments and operational activities that have significant impact;
10. Identifying matters that require attention of the Board of Commissioners;
11. Performing other tasks assigned by the Board of Commissioners in accordance with the applicable laws;

12. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Dewan Komisaris guna kelancaran pelaksanaan tugas Komite;
13. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas triwulanan Komite kepada Dewan Komisaris.

12. Coordinating with the Secretary of the Board of Commissioners for smooth implementation of Committee duties;
13. Submitting the Committee's Quarterly Duty Implementation Report to the Board of Commissioners.

RAPAT KOMITE MR

Sepanjang tahun 2019 Komite MR melaksanakan rapat sebanyak 104 kali, yang terdiri dari rapat dengan mengundang para pihak yang berkepentingan sesuai tuntutan tugas dan tanggung jawab Komite MR. Di samping itu, Komite MR juga melaksanakan rapat internal Dewan Komisaris.

RM COMMITTEE MEETING

During 2019, RM Committee held 104 meetings, consisting of meetings with relevant parties according to duties and responsibilities of RM Committee. In addition, RM Committee also conducted internal meetings with Board of Commissioners.

No.	Uraian Description	Jumlah Total
1	Rapat internal Komite MR dan staf Dewan Komisaris Internal meetings of RM Committee and Board of Commissioners staff	9
2	Rapat Komite MR dengan Dewan Komisaris Meetings of RM Committee and Board of Commissioners	37
3	Rapat pembahasan dengan direktorat terkait (pembahasan RKAP, Laporan Manajemen dan permasalahan dengan masing-masing direktorat) Meetings with relevant directorates (discussion on RKAP, Management Report and issues with each directorate)	44
4	Mengikuti kunjungan kerja Dewan Komisaris dan rapat dengan pimpinan Unit PLN setempat Participating in work visit of Board of Commissioners and meeting with PLN Regional/Unit Managers	14
5	Pembahasan dengan manajemen antara lain untuk menelaah permohonan persetujuan atau rekomendasi pendanaan *) Discussions with management, among other, to review application for approval or funding recommendation *)	22
	JUMLAH TOTAL	**104**

*) Tercakup dalam butir 3| Included in point 3

KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) KOMITE MR

Penilaian kinerja Komite MR dilakukan dengan mekanisme *self-assessment*. Hasil pencapaian KPI Komite MR pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) OF RM COMMITTEE

RM Committee's performance evaluation is carried out using a self-assessment mechanism. KPI achievement results of RM Committee in 2019 is as follows:

Program Kerja Work Program	Uraian Description	Kuantitas/Tolok Ukur Quantity/Benchmark		Nilai Perolehan Score	
		Setahun A Year	Bobot Weight		
1. Menyampaikan Rencana Kerja dan KPI Komite Summission of Committee Work Plan and KPI	Rencana Kerja dan KPI Komite 2019 Committee Annual Work Plan and KPI 2019	1 paper 1 papers	5	1 Paper 1 papers	5
	Ketepatan waktu penyampaian Timeliness of submission	Maret 2019 March 2019	4	Januari 2020 January 2020	4

Program Kerja Work Program	**Uraian** Description	**Kuantitas/Tolok Ukur** Quantity/Benchmark		**Nilai Perolehan** **Score**	
		Setahun A Year	**Bobot** Weight		
2. Menelaah usulan Direksi tentang rencana pinjaman atau pendanaan Review BOD proposal regarding loan or funding plans	Menelaah dan menyampaikan hasil telaah atas permintaan Direksi setelah data lengkap Review and submit the results of BOD proposal after completed data	Usulan Direksi ditanggapi Respond BOD proposal	11	satu usulan one proposal	11
	Ketepatan waktu pemberian telaah Timeliness of review	14 hari kerja 14 working days	8	Rata-rata 14 hari (ada yg lebih 14 hari) Average 14 days (there are more than 14 days, 2 proposal)	6
3. Menyampaikan usulan terkait manajemen risiko Provide rekomendations related to risk management	Menelaah dan menyampaikan hasil telaah Review and submit the result	Usulan Direksi ditanggapi Respond BOD proposal	10	1 usulan 1 proposal	10
	Ketepatan waktu penyampaian Timeliness of submission	14 hari kerja 14 working days	4	Di bawah14 hari kerja Below 14 working days	4
4. Menyampaikan laporan kegiatan dan realisasi KPI Komite triwulanan dan tahunan Submit Committee activity and KPI realization reports in quarterly and annualy basis	Laporan Kegiatan dan realisasi KPI Komite triwulan dan tahunan Providing Committee activity and KPI realization report quarterly and annually	4 kali setahun 4 times a year	8	- Tahun 2018 - Triwulan I, II dan III 2019 - Year 2018 - Q2 and Q3 2019	8
	Ketetapan waktu Timeliness of submission	30 hari sejak berakhirnya periode 30 days since the end of period	6	Rata-rata 28 hari sejak berakhirnya periode Average 28 days since the end of period	6
5. Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners (BOC) meeting	Menghadiri rapat Dewan komisaris Attending BOC meeting	24 kali setahun 24 time a year	15	32 kali 32 times	15
6. Rapat internal Komite Committee internal meeting	Menghadiri rapat internal Komite Attending Committee internal meeting	24 kali setahun 24 time a year	15	44 kali 44 times	15
7. Kunjungan kerja ke unit Work visit to units	Melakukan kunjungan kerja ke Unit/ AP Conducting work visit to units/ subsidiaries	12 kali setahun 12 times a year	6	14 kali 14 times	6
8. Pengenalan/ Induksi/peningkatan kompetensi Orientation/Induction/ competency improvement	Mengikuti seminar/workshop Attending seminar/workshop	2 kali setahun 2 times a year	5	4 kali 4 times	5
9. Self Assessment GCG Komite GCG self assessment for Committee	Pemenuhan kriteria GCG untuk Komite Fulfillment of GCG criteria for Committee	Charter Komite Committee Charter	4	1 paper 1 paper	4
Jumlah Total			**100**		**99**

REMUNERASI KOMITE MR

Remunerasi Komite MR diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Penghasilan anggota Komite MR berupa honorarium maksimal sebesar 20% dari gaji Direktur Utama Perusahaan dengan ketentuan pajak ditanggung Perusahaan dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi ("Komite NR"), adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris terkait pengusulan seseorang untuk ditempatkan dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris (Nominasi) dan imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Anggota Komite Non Komisaris dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisaris, baik dari calon-calon yang mengajukan lamaran kepada Dewan Komisaris maupun calon-calon yang diusulkan oleh Anggota Dewan Komisaris.

Anggota Komite NR non Komisaris harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang baik;
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan;
3. Memiliki kecukupan waktu untuk melaksanakan tugas-tugasnya;
4. Mempunyai kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik;
5. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang industri/bisnis Perusahaan;
6. Salah seorang anggota Komite berasal dari manajemen PLN yang menangani SDM.

REMUNERATION FOR RM COMMITTEE

Remuneration for RM Committee is stipulated in Minister of SOE Regulation No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs of Board of Commissioners/Board of Trustees of SOE. Remuneration for members of RM Committee is an honorarium at a maximum amount of 20% of the Company's President Director's salary, provided that the tax is liable to the Company and the member is not allowed to receive any other income other than the honorarium.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Nomination and Remuneration Committee ("NR Committee") is a committee established by and reports to Board of Commissioners to assist implementation of duties and functions of Board of Commissioners related to nomination of a candidate as a member of the Board of Directors or Board of Commissioners (Nomination), and remuneration determined for and provided to members of the Board of Directors and Board of Commissioners with due regards to their positions and roles, according to their duties, authorities and responsibilities. Non-Commissioner Members of the Committee shall be elected and appointed in meetings of the Board of Commissioners, both for candidates applying to the Board of Commissioners or nominees proposed by the Board of Commissioners.

Non-Commissioner Members of NR Committee shall have the following qualifications:

1. Demonstrate good integrity;
2. Not have personal interest/relations that may cause negative impact and conflict of interest;
3. Have sufficient time to perform his/her duties;
4. Have the ability to communicate and coordinate effectively;
5. Have adequate knowledge of the Company's industry/business;
6. One of members of the Committee comes from PLN management who handles HC.

KOMPOSISI KOMITE NR

Komposisi Komite Komite NR selama periode tahun 2019 adalah:

COMPOSITION OF NR COMMITTEE

Compositions of NR Committee during 2019 were as follows:

Jabatan Position	**Periode 1 Januari-30 Juni** Period of January 1-June 30	**Periode 1 Juli-31 Desember** Period of July 1-December 31
Ketua merangkap Anggota Chairman and Member	Budiman	Budiman/Deden Juhara
Anggota Member	Aloysius K. Ro	Aloysius K. Ro
Anggota Member	Karyawan Adji	Karyawan Adji
Anggota Member	Roikhan	Roikhan

Profil Anggota Komite NR Non Komisaris

Profile of Non-Commissioner Members of NR Committee

Karyawan Aji
Anggota Komite NR
NR Committee Member

Usia Age	53 tahun, per 31 Desember 2019	53 years old, as of December 31, 2019
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	Indonesia
Riwayat Pendidikan History of Education	1. S2 Teknik Elektro, Curtin University of Technology (2009) 2. S1 Teknik Nuklir, Universitas Gadjah Mada (1992)	1. Master of Electrical Engineering, Curtin University of Technology (2009) 2. Bachelor of Nuclear Engineering, Gadjah Mada University (1992)
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	SK Dewan Komisaris No. 03/SK/DK-PLN/2018	Board of Commissioners Decree No. 03/SK/DK-PLN/2018
Pengalaman Kerja Working Experience	1. Kepala Divisi Pengembangan Talenta PLN Kantor Pusat (2018- Sekarang) 2. Kepala Divisi Pengembangan Organisasi (2017-2018) 3. General Manager PLN Wilayah Nusa Tenggara Barat (2016-2017)	1. Head of Talent Development Division, PT PLN Head Office (2018-present) 2. Head of Organization Development Division (2017-2018) 3. General Manager of PLN Region of West Nusa Tenggara (2016-2017)
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	Tidak memiliki jabatan rangkap sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 terkait Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN	Does not have concurrent positions as stipulated in State Minister of SOEs Regulation No. PER-12/MBU/2012 on the Supporting Organs of the SOEs Board of Commissioners/Board of Trustees

Roikhan
Anggota Komite NR
NR Committee Member

Usia Age	59 tahun, per 31 Desember 2019	59 years old, as of December 31, 2019
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	Indonesia
Riwayat Pendidikan History of Education	1. S2 Manajemen Industri, Institut Teknologi Bandung (1998) 2. S1 Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung (1986)	1. Master of Industrial Management, Bandung Institute of Technology (1998) 2. Bachelor of Electrical Engineering, Bandung Institute of Technology (1986)
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	SK Dewan Komisaris No. 18/SK/DK-PLN/2018	Board of Commissioners Decree No. 18/SK/DK-PLN/2018
Pengalaman Kerja Working Experience	1. Direktur SDM PT Indonesia Power (2013-2018) 2. Expert Manajemen SDM pada Direktorat SDM dan Umum Kantor Pusat (2013) 3. Kepala Divisi Pengembangan SDM dan Talenta PLN Kantor Pusat	1. Director of HR, PT Indonesia Power (2013-2018) 2. Expert on HR Management at Directorate of HR and General Affair, PLN Head Office (2013) 3. Head of HR and Talent Development, PLN Head Office
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	Tidak memiliki jabatan rangkap sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 terkait Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN	Does not have concurrent positions as stipulated in State Minister of SOEs Regulation No. PER-12/MBU/2012 on the Supporting Organs of the SOEs Board of Commissioners/ Board of Trustees
Pendidikan dan Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi Education and Training for Competence Development	Seminar, Conference & Workshop "Saatnya Memberdayakan Masyarakat Indonesia Untuk Menjadi Produsen Energi Terbarukan Demi Mewujudkan Kemandirian Energi Nasional", Bali, 8 – 9 Agustus	Seminars, Conferences & Workshops "Time to Empower Indonesian Communities to Become Renewable Energy Producers for the Establishment of National Energy Independence", Bali, August 8 - 9, 2019

PERIODE DAN MASA JABATAN ANGGOTA KOMITE NR

Masa tugas anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris mengikuti masa jabatannya sebagai Komisaris. Sedangkan masa tugas Anggota Komite Non Komisaris yang lain berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk menghentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.

PERIOD AND OFFICE TERM OF NR COMMITTEE MEMBERS

The office term of Committee members who come from the Board of Commissioners follows his tenure as a Commissioner. While office term of other Non-Commissioner members of the Committee is 3 years and can be extended for a maximum of 2 years with due regards to the right of Board of Commissioners to terminate at any time.

PERNYATAAN INDEPENDENSI

Salah satu kriteria menjadi anggota Komite NR adalah independen dan bebas dari benturan kepentingan sehingga dapat bersikap objektif dalam memberikan pendapat terhadap permasalahan yang dihadapi. Hal lain yang ditekankan kepada seluruh anggota Komite adalah agar bersikap profesional di dalam melaksanakan tugas dan dalam memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris.

INDEPENDENCE

One of the criteria to be a member of NR Committee is independence and freedom from conflict of interest so that the member can act objectively in providing opinion on any encountered problems. Another required characteristic from members of Committee member is being professional in performing duties and in providing opinions to Board of Commissioners.

Seluruh anggota Komite NR telah memenuhi kriteria independensi sebagai berikut:

All members of the Company's NR Committee meet the independence criteria, as follows:

Kriteria Independensi Independence Criteria	Budiman	Deden Juhara	Aloysius K Ro	Karyawan Aji	Roikhan
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama PLN. Shall not have affiliations with any Commissioners, Directors, or the Shareholder of PLN.	√	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PLN Shall have no direct or indirect business relationship related to PLN business activities.	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau merupakan calon atau menjabat sebagai kepala/wakil kepala pemerintahan daerah. Shall not serve as a party official and/or candidate/legislative member and/or a candidate or serving as head/deputy head of local government.	√	√	√	√	√
Tidak memiliki jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terkait dengan jabatan di PLN. Shall not have other positions that may cause a conflict of interest related to a position at PLN.	√	√	√	√	√

PEDOMAN KERJA KOMITE NR

Pedoman kerja Komite NR diatur di dalam Board Manual Dewan Komisaris. Pedoman kerja mencakup struktur keanggotaan, persyaratan keanggotaan, kewenangan dan fungsi Komite NR.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab Komite NR sebagaimana dijabarkan di dalam Board Manual Dewan Komisaris adalah:

1. Menelaah dan memantau untuk memastikan bahwa Direksi telah menetapkan sistem nominasi dan remunerasi, proses rekrutmen dan pengembangan karir di Perusahaan secara benar sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
2. Membantu merumuskan kebijakan remunerasi berupa gaji dan honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap serta insentif dan tantiem yang bersifat variabel bagi Dewan Komisaris dan Direksi;
3. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya;
4. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris;
5. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Dewan Komisaris guna kelancaran pelaksanaan tugas Komite;
6. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.

WORK GUIDELINES FOR NR COMMITTEE

Work guidelines for NR Committee are set out in the Board Manual for Board of Commissioners. Work guidelines include membership structure, membership requirements, authorities and functions of the NR Committee.

DUTIES AND RESPONSINBILITIES

Duties and responsibilities of the NR Committee as described in the Board Manual for Board of Commissioners are:

1. Reviewing and monitoring to ensure that the Board of Directors properly establishes a nomination and remuneration system, recruitment process and career development in the Company in accordance with predetermined provisions;
2. Assisting in formulation of remuneration policy in terms of fixed salary and honorarium, allowances and facilities, as well as variable incentives and tantiems for the Board of Commissioners and Board of Directors;
3. Identifying matters that require attention of the Board of Commissioners and other duties of the Board of Commissioneres;
4. Performing other tasks assigned by the Board of Commissioners;
5. Coordinating with the Secretary of the Board of Commissioners for smooth implementation of Committee duties;
6. Submitting the Committee's Duty Implementation Report to the Board of Commissioners.

PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE NR TAHUN 2019

Komite telah melakukan telaahan persetujuan Direksi anak perusahaan PLN, anggota Komite Dewan Komisaris anak perusahaan, laporan kunjungan kerja dan kesekretariatan, sebagai berikut:

- Menelaah usulan calon Direksi PLN, serta BoD-1: SEVP Bisnis dan Pelayanan, Sekretaris Perusahaan, dan SEVP Pengelolaan Aset;
- Menelaah usulan calon Dewan Komisaris Anak Perusahaan, yaitu PT Indonesia Power, PT Bahtera Adiguna (BAG), PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) dan PT Icon+;
- Menelaah usulan calon Direksi anak perusahaan, yaitu PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa Bali, PT PLN, Batam, PT Icon+, PT Bahtera Adiguna (BAG) termasuk menelaah status Direksi anak perusahaan yang masih Pelaksana Tugas (Plt) agar mejadi definitif.
- Rencana Kerja dan KPI Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2019.

RAPAT KOMITE NR

Sepanjang tahun 2019 Komite NR mengadakan rapat sebanyak 15 kali dengan agenda membahas organisasi staf Sekretariat Dewan Komisaris, Pembahasan BOD-1, dan Pembahasan calon Direksi PLN. Daftar rapat dan agenda rapat Komite NR tahun 2019 adalah sebagai berikut:

ACTIVITIES OF NR COMMITTEE IN 2019

The Committee reviewed approval of Boards of Directors of PLN's subsidiaries, the Committee members of Board of Commissioners of subsudiaries, site visit and secretariat reports, as follows:

- Reviewed Proposed Candidates for PLN Directors and BoD-1: SEVP Business and Service, Corporate Secretary and SEVP Asset Management;
- Reviewed Proposed Candidates for Board of Commissioners of Subsidiaries, namely PT Indonesia Power, PT Bahtera Adiguna (BAG), PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) and PT Icon +;
- Reviewed Proposed Candidates for Board of Directors of Subsidiaries, namely PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa Bali, PT PLN, Batam, PT Icon+, PT Bahtera Adiguna (BAG), including status of Acting Directors of Subsidiaries to be definitive.
- 2019 Work Plan and KPI of Nomination and Remuneration Committee.

NR COMMITTEE MEETING

During 2019, NR Committee held 15 meetings with the agenda discussing staff organization of Secretariat of Board of Commissioners, BOD-1 and candidates for PLN's Directors. List of 2019 meetings and agenda of Nomination and Remuneration Committee is as follows:

No.	Uraian Description	Jumlah Total
1	Rapat internal Komite NR dan staf Dewan Komisaris Internal meetings of NR Committee and Board of Commissioners staff	6
2	Rapat pembahasan BOD-1 Meeting to discuss BOD-1	8
3	Rapat pembahasan calon Direksi PLN Meeting to discuss candidate of PLN BOD	1
	JUMLAH TOTAL	**15**

KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Key Performance Indicator (KPI) Komite Nominasi dan Remunerasi disusun berdasarkan KPI Dewan Komisaris dengan memperhatikan tugas dan kewajiban Komite.

KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Key Performance Indicators (KPI) of NR Committee are based on KPI of Board of Commissioners by taking into account duties and obligations of the Committee.

Program Kerja Work Program	**Uraian** Description	**Kuantitas/Tolok Ukur** Quantity/Benchmark		**Nilai Perolehan** **Score**	
		Setahun A Year	**Bobot** Weight		
1. Menyampaikan Rencana Kerja dan KPI Komite Summission of Committee Work Plan and KPI	Rencana Kerja dan KPI Komite Tahun 2019 Committee Annual Work Plan and KPI 2019	1 paper 1 papers	5	1 Paper 1 papers	5
	Ketepatan waktu penyampaian Timeliness of submission	Maret 2019 March 2019	4	28 Maret 2019 March 28, 2019	4
2. Menelaah usulan Direksi tentang Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan Review BOD proposals regarding BOD and BOC of subsidiaries	Menelaah dan menyampaikan hasil telaah atas permintaan Direksi setelah data lengkap Review and submit the results of BOD proposals after completed data	Usulan Direksi ditanggapi Respond BOD proposals	11	100% usulan 100% proposals	11
	Ketepatan waktu pemberian telaah Timeliness of review	14 hari kerja 14 working days	8	Rata-rata 10 hari kerja Average 10 working days	8
3. Menyampaikan usulan remunerasi dan tantiem BOD dan BOC Provide recommendation for BOD and BOC remuneration and bonus	Menelaah dan menyampaikan hasil telaah remunerasi atas permintaan Direksi setelah data lengkap Review and submit the result of remuneration review as BOD request after completed data	Usulan Direksi ditanggapi Respond BOD proposal	10	1 usulan 1 proposal	10
	Ketepatan waktu penyampaian Timeliness of submission	14 hari kerja 14 working days	4	Di bawah 14 hari kerja Below 14 working days	4
4. Menyampaikan laporan kegiatan dan realisasi KPI Komite triwulanan dan tahunan Submit Committee activity and KPI realization reports in quarterly and annualy basis	Laporan Kegiatan dan realisasi KPI Komite triwulan dan tahunan Providing Committee activity and KPI realization report quarterly and annually	2 kali setahun 2 times a year	8	- Semester 1 2019 - Tahunan 2018 - H1 2019 - Year 2018	8
	Ketetapan waktu Timeliness of submission	30 hari sejak berakhirnya periode 30 days since the end of period	6	Rata-rata 28 hari sejak berakhirnya periode Average 28 days since the end of period	6
5. Rapat Dewan Komisaris BOC meeting	Menghadiri rapat Dewan komisaris Attending BOC meeting	24 kali setahun 24 time a year	15	32 kali 32 times	15
6. Rapat internal Komite Committee internal meeting	Mengadakan rapat internal Komite Conducting Committee internal meeting	12 kali setahun 12 time a year	15	15 kali 15 times	15
7. Kunjungan kerja ke unit Work visit to units	Melakukan kunjungan kerja ke Unit/ AP Conducting work visit to units/ subsidiaries	6 kali setahun 6 times a year	5	9 kali 9 times	5

Program Kerja Work Program	Uraian Description	Kuantitas/Tolok Ukur Quantity/Benchmark		Nilai Perolehan Score	
		Setahun A Year	Bobot Weight		
8. Pengenalan/ Induksi/peningkatan kompetensi Orientation/Induction/ competency improvement	Mengikuti seminar/*workshop* Attending seminar/workshop	2 kali setahun 2 times a year	5	9 kali 9 times	5
9. *Self-Assessment* GCG Komite GCG self-assessment for Committee	Pemenuhan kriteria GCG untuk Komite Fulfillment of GCG criteria for Committee	Charter Komite Committee Charter	4	1 paper 1 paper	4
Jumlah|Total			**100**		**97,5**

REMUNERASI KOMITE NR

Remunerasi Komite NR diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Penghasilan anggota Komite NR berupa honorarium maksimal sebesar 20% dari gaji Direktur Utama Perusahaan dengan ketentuan pajak ditanggung Perusahaan dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.

REMUNERATION FOR NR COMMITTEE

Remuneration for the NR Committee is stipulated in Minister of SOE Regulation No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs of Board of Commissioners/Board of Trustees of SOE. Remuneration for members of the NR Committee is an honorarium at a maximum amount of 20% of the Company's President Director's salary, provided that the tax is liable to the Company and the member is not allowed to receive any other income other than the honorarium.

KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI

Untuk mempersiapkan kader-kader pimpinan masa depan, Perusahaan menyelenggarakan program *Talent Management*. Kader-kader potensial yang masuk ke dalam talent pool akan menjalani serangkaian program pelatihan dengan muatan utama adalah peningkatan kapabilitas di bidang manajemen, strategi pengembangan usaha, evaluasi rencana strategis dan sejenisnya. Pada saatnya pergantian kepemimpinan, Perusahaan akan mengajukan kandidat internal melalui pemilihan yang dilakukan oleh panitia adhoc dan difasilitasi oleh Dewan Komisaris melalui Komite NR. Hasil pemilihan kandidat internal tersebut kemudian diajukan kepada Kementerian BUMN untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan.

POLICY OF BOARD OF DIRECTORS SUCCESSION

In an attempt to prepare future executive cadres, the COmpany organizes a Talent Management program. Potential cadres who join the Talent Pool will participate in a series of training programs with the main subjects consisting of capability improvement in management, business development strategy, strategic plan evaluation and other similar subject matters. When the time comes for leadership succession, PLN will propose individuals from within the Company as candidates through selection process conducted by an ad-hoc committee and facilitated by the Board of Commissioners. The selected candidates will then be proposed to the Ministry of SOE to undergo a fit and proper test.

Ketentuan suksesi Direksi adalah sebagai berikut:

1. Calon Direktur yang diangkat oleh RUPS berasal dari calon-calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham dan dari internal Perusahaan;
2. Pengangkatan Direktur dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) calon Direktur oleh Kementerian BUMN atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Kementerian BUMN;
3. Komposisi Direksi harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan Perusahaan sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat;
4. Calon Direktur dilarang memangku jabatan rangkap sebagai Direktur atau Komisaris di BUMN/BUMD/Perusahaan swasta lain atau jabatan lainnya di Perusahaan lain, baik swasta maupun milik negara, yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, kecuali apabila mendapatkan persetujuan dari RUPS.

TATA LAKSANA HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Perusahaan memiliki panduan tata laksana hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris atau disebut "*Board Manual* Direksi dan Dewan Komisaris (Buku 1)", yaitu perangkat atau aturan yang menjadi dasar tata laksana hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi yang disusun dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Board Manual* Buku 1 adalah panduan bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami, dan dapat dijalankan dengan konsisten, sehingga dapat menjadi acuan bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-masing secara profesional, transparan dan efisien.

The provisions of the Board of Directors succession are as follows:

1. Prospective Directors appointed by GMS shall be candidates proposed by the Shareholder and come from inside the Company;
2. Appointment of Directors is conducted through a fit and proper test on prospective Directors by the Ministry of SOE or a third party assigned by the Ministry of SOE;
3. Composition of the Board of Directors shall always be adjusted to the Company's needs and development, thus enabling effective, proper and prompt decision making;
4. Prospective Directors are forbidden to hold concurrent position as Director or Commissioner in other SOE/Regional-Owned Enterprises/Private-Owned Enterprises/other private company or other positions in other companies, either private or state-owned, which may result in a conflict of interest, unless approved by the GMS.

WORK PROCEDURES FOR BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The Company has Work Procedure Guidelines for the Board of Directors and Board of Commissioners called "Board Manual of Board of Directors and Board of Commissioners (Book 1)", which is a tool or rule that forms the basis of the working relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors, compiled in accordance with prevailing laws and regulations. Board Manual Book 1 is a guideline for the Board of Directors and Board of Commissioners that explain the stages of activities in a structured, systematic, and easy to understand way and can be carried out consistently, so that they can serve as a reference for the Board of Directors and Board of Commissioners in performing their duties professionally, transparently and efficiently.

Board Manual Buku 1 antara lain mengatur:
- Prinsip-prinsip hubungan kerja Direksi dengan Dewan Komisaris,
- Tata laksana kerja terkait jabatan,
- Tata laksana kerja terkait batas kewenangan,
- Tata laksana kerja terkait pelaksanaan dan pengawasan operasional perusahaan,
- Kewenangan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan kewanangan Direksi yang memerlukan persetujuan RUPS setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.

Board Manual Book 1 includes:
- Principles of the work relationship between the Board of Directors and Board of Commissioners,
- Work procedures related to positions,
- Work procedures related to authority limitations,
- Work procedures related to implementation and supervision of the Company's operations,
- Authorities of the Board of Directors which require approval of the Board of Commissioners and authorities of the Board of Directors which require approval of GMS upon written response from the Board of Commissioners.

Direksi

Board of Directors

Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Perusahaan.

KOMPOSISI DIREKSI DAN DASAR HUKUM PENUNJUKAN

Pada tahun 2019 terjadi perubahan komposisi Direksi PLN berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan Dewan Komisaris PT PLN (Persero) No. 7/SK/DK-PLN/2019 tanggal 24 April 2019 tentang Pemberhentian Sementara dan Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama oleh Dewan Komisaris PT PLN (Persero) berupa pemberhentian sementara Sofyan Basir sebagai Direktur Utama dan penugasan Muhamad Ali sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero);
2. Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT PLN (Persero) No. SK-109/MBU/05/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Perseroan) PT Perusahaan Listrik Negara berupa pemberhentian Sofyan Basir sebagai Direktur Utama, Penunjukan Djoko Rahardjo Abumanan menjadi Pelaksana Tugas Direktur Utama, dan Pengangkatan Sripeni Inten Cahyani sebagai Direktur Pengadaan Strategis 1; serta Penugasan Supangkat Iwan Santoso menjadi Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara dan Djoko Rahardjo Abu Manan menjadi Direktur Pengadaan Strategis 2;
3. Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT PLN (Persero) No. SK-169/MBU/08/2019 tanggal 2 Agustus 2019 tentang Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara berupa Pemberhentian Machnizon sebagai Direktur Bisnis Regional Kalimantan,

Board of Directors is the Company's organ authorized and responsible for the daily management on behalf of the Company's interests to accomplish its purposes and objectives and represents the Company both inside and outside the Company.

COMPOSITION OF BOARD OF DIRECTORS AND LEGALITY OF APPOINTMENT

In 2019, there were changes in composition of Board of Directors based on the followings:

1. Decision of Board of Commissioners of PT PLN (Persero) No. 7/SK/DK-PLN/2019 dated April 24, 2019 concerning Temporary Dismissal and Appointment of Acting President Director by Board of Commissioners of PT PLN (Persero), namely temporary dismissal of Sofyan Basir as President Director and assignment of Muhamad Ali as President Director of PT PLN (Persero);
2. Decision of the Minister of SOE as GMS of PT PLN (Persero) No. SK-109/MBU/05/2019 dated May 29, 2019 concerning Dismissal, Duty Transfer and Appointment of Members of Board of Directors of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), namely dismissal of Sofyan Basir as President Director, Appointment of Djoko Rahardjo Abumanan as Acting President Director and Appointment of Sripeni Inten Cahyani as Strategic Procurement Director 1; and Assignment of Supangkat Iwan Santoso to become Regional Business Director of East Java, Bali and Nusa Tenggara and Djoko Rahardjo Abu Manan as Strategic Procurement Director 2;
3. Decision of Minister of SOE as GMS of PT PLN (Persero) No. SK-169/MBU/08/2019 dated August 2, 2019 concerning Dismissal of Members of Board of Directors of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), namely Dismissal of Machnizon as Regional Business

Penugasan Sripeni Inten Cahyani sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama, dan Penugasan Syamsul Huda sebagai Pelaksana Tugas Direktur Bisnis Regional Kalimantan;

4. Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT PLN (Persero) No. SK-325/MBU/12/2019 tanggal 23 Desember tentang Pemberhentian Sarwono Sudarto sebagai Direktur Keuangan, Amir Rosidin sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah, dan Supangkat Iwan Santoso sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara; Pengangkatan Zulkifli Zaini sebagai Direktur Utama, Darmawan Prasodjo sebagai Wakil Direktur Utama, dan Sinthya Roesly sebagai Direktur Keuangan; serta Penetapan Haryanto WS sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura, dan Bali, Syamsul Huda sebagai Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Kalimantan, dan Ahmad Rofik sebagai Direktur Bisnis Regional Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara.

Director of Kalimantan, Assignment of Sripeni Inten Cahyani as Acting President Director and Assignment of Syamsul Huda as Acting Regional Business Director of Kalimantan;

4. Decision of the Minister of SOE as GMS of PT PLN (Persero) No. SK-325/MBU/12/2019 dated December 23, concerning Dismissal of Sarwono Sudarto as Finance Director, Amir Rosidin as Regional Business Director of Central Java and Supangkat Iwan Santoso as Regional Business Director of East Java, Bali and Nusa Tenggara; Appointment of Zulkifli Zaini as President Director, Darmawan Prasodjo as Vice President Director and Sinthya Roesly as Finance Director; and Determination of Haryanto WS as Regional Business Director of Java, Madura, and Bali, Syamsul Huda as Regional Business Director of Sulawesi and Kalimantan and Ahmad Rofik as Regional Business Director of Maluku, Papua and Nusa Tenggara.

Dengan demikian, komposisi Direksi PLN per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Accordingly, composition of PLN's Board of Directors as at December 31, 2019 was as follows:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Dasar Pengangkatan** Appointment Basis	**Akhir Masa Jabatan** End of Term of Office
Zulkifli Zaini	Direktur Utama President Director	Keputusan Menteri (Kepmen) BUMN selaku RUPS No. SK-325/MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 Ministry of SOEs' Decree as GMS No. SK-325/MBU/12/2019 dated December 23, 2019	23 Desember 2024 December 23, 2024
Darmawan Prasodjo	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Keputusan Menteri (Kepmen) BUMN selaku RUPS No. SK-325/MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 Ministry of SOEs' Decree as GMS No. SK-325/MBU/12/2019 dated December 23, 2019	23 Desember 2024 December 23, 2024
Sinthya Roesly	Direktur Keuangan Director of Finance	Kepmen BUMN selaku RUPS No. SK-325/MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 Ministry of SOEs' Decree as GMS No. SK-325/MBU/12/2019 dated December 23, 2019	23 Desember 2024 December 23, 2024
Syofvi Felienty Roekman	Direktur Perencanaan Korporat Director of Corporate Planning	Kepmen BUMN selaku RUPS No. SK-138/MBU/2017 tanggal 24 Juli 2017 Ministry of SOEs' Decree as GMS No. SK-138/MBU/2017 dated July 24, 2017	24 Juli 2022 July 24, 2022
Sripeni Inten Cahyani	Direktur Pengadaan Strategis 1 Director of Strategic Procurement 1	Kepmen BUMN selaku RUPS No. SK-109/MBU/05/2019 tanggal 29 Mei 2019 Ministry of SOEs' Decree as GMS No. SK-109/MBU/05/2019 dated May 29, 2019	29 Mei 2024 May 29, 2024
Djoko R. Abumanan	Direktur Pengadaan Strategis 2 Director of Strategic Procurement 2	Kepmen BUMN selaku RUPS No. SK-211/MBU/10/2015 tanggal 30 Oktober 2015 Ministry of SOEs' Decree as GMS No. SK-211/MBU/10/2015 dated October 30, 2015	30 Oktober 2020 October 30, 2020
Muhamad Ali	Direktur Human Capital Management Director of Human Capital Management	Kepmen BUMN selaku RUPS No. SK-211/MBU/10/2015 tanggal 30 Oktober 2015 Ministry of SOEs' Decree as GMS No. SK-211/MBU/10/2015 dated October 30, 2015	30 Oktober 2020 October 30, 2020

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Akhir Masa Jabatan End of Term of Office
Wiluyo Kusdwiharto	Direktur Bisnis Regional Sumatera Regional Business Director of Sumatra	Kepmen BUMN selaku RUPS No. SK-138/MBU/2017 tanggal 24 Juli 2017 Ministry of SOEs' Decree as GMS No. SK-138/MBU/2017 dated July 24, 2017	24 Juli 2022 July 24, 2022
Haryanto WS	Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura, & Bali Regional Business Director of Java, Madura & Bali	Kepmen BUMN selaku RUPS No. SK-211/MBU/10/2015 tanggal 30 Oktober 2015 Ministry of SOEs' Decree as GMS No. SK-211/MBU/10/2015 dated October 30, 2015	30 Oktober 2020 October 30, 2020
Syamsul Huda	Direktur Bisnis Regional Sulawesi & Kalimantan Regional Business Director of Sulawesi & Kalimantan	Kepmen BUMN selaku RUPS No. SK-138/MBU/2017/ tanggal 24 Juli 2017 Ministry of SOEs' Decree as GMS No. SK-138/MBU/2017 dated July 24, 2017	24 Juli 2022 July 24. 2022
Ahmad Rofik	Direktur Bisnis Regional Maluku, Papua & Nusa Tenggara Regional Business Director of Maluku, Papua & Nusa Tenggara	Kepmen BUMN selaku RUPS No. SK-138/MBU/2017/ tanggal 24 Juli 2017 Ministry of SOEs' Decree as GMS No. SK-138/MBU/2017 dated July 24, 2017	24 Juli 2022 July 24. 2022

Catatan:
Setelah periode laporan pada 14 Mei 2020, RUPS melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK-147/MBU/05/2020 memberhentikan dengan hormat Sripeni Inten Cahyani sebagai Direktur Pengadaan Strategis 1, Djoko Rahardjo Abu Manan sebagai Direktur Pengadaan Strategis 2, Muhamad Ali sebagai Direktur Human Capital Management, dan Ahmad Rofik sebagai Direktur Bisnis Regional Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Selanjutnya, mengalihkan penugasan Syofvi Felienty Roekman semula Direktur Perencanaan Korporat menjadi Direktur Human Capital dan Management, Wiluyo Kusdwiharto semula Direktur Bisnis Regional Sumatera menjadi Direktur Bisnis Regional Sumatera Kalimantan, dan Syamsul Huda semula Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Kalimantan menjadi Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. RUPS juga mengangkat Muhammad Ikbal Nur sebagai Direktur Perencanaan Korporat, Bob Saril sebagai Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan, Rudy Hendra Prastowo sebagai Direktur Energi Primer, dan M Ikhsan Asaad sebagai Direktur Mega Project.

Note:
After the annual report period, on May 14, 2020, the General Meeting of Shareholders through Minister of SOE Decree No. SK-147/MBU/05/2020 dismissed with respect Sripeni Inten Cahyani as Director of Strategic Procurement 1, Djoko Rahardjo Abu Manan as Director of Strategic Procurement 2, Muhamad Ali as Director of Human Capital Management, and Ahmad Rofik as Regional Business Director of Maluku, Papua and Nusa Tenggara. Furthermore, shift assignment of Syofvi Felienty Roekman was originally the Director of Corporate Planning as the Director of Human Capital and Management, Wiluyo Kusdwiharto was originally the Regional Business Director of Sumatra to be the Regional Business Director of Sumatra Kalimantan, and Syamsul Huda was originally the Regional Business Director of Sulawesi and Kalimantan as the Regional Business Director of Sulawesi, Maluku, Papua and Nusa Tenggara. The AGM also appointed Muhammad Ikbal Nur as Director of Corporate Planning, Bob Saril as Director of Commerce and Customer Management, Rudy Hendra Prastowo as Director of Primary Energy, and M Ikhsan Asaad as Director of Mega Project.

MASA JABATAN DIREKSI

Masa jabatan anggota Direksi mengacu pada Pasal 28 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badang Usaha Milik Negara, yaitu 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk melakukan penggantian sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

TENURE OF THE BOARD OF DIRECTORS

Tenure of the member of Board of Directors refers to Article 28 Paragraph 3 of Act Number 19 of 2003 concerning State Owned Business Entities, which is 5 years and can be reappointed for 1 term of office, without prejudice to the right of GMS to replace at any time before his/her tenure ends.

PANDUAN TATA LAKSANA KERJA DIREKSI

Direksi memiliki panduan tata laksana kerja Direksi yang disebut "Board Manual Direksi (Buku 2)" sebagai panduan yang menjelaskan tahapan aktivitas yang terstruktur, sistematis, dan mudah dipahami sehingga dapat menjadi acuan bagi Direksi melaksanakan tugasnya untuk mencapai visi, misi dan tujuan perusahaan. Panduan ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktik-praktik terbaik (*best practices*) GCG.

BOARD MANUAL FOR BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors has work procedures for Board of Directors called "Board of Directors Manual (Book 2)" as guidelines that explain activities in a structured, systematic and easy to understand manner so that they serve as a reference for the Board of Directors in performing their duties to achieve the Company's vision, missions and goals. The guidelines were prepared based on the principles of corporate law, provisions in the Articles of Association, applicable laws and regulations, advice of the Shareholder and GCG best practices.

KEBIJAKAN TERKAIT PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA DIREKSI APABILA TERLIBAT DALAM KEJAHATAN KEUANGAN

Apabila dalam menjalankan tugasnya, Direksi terlibat dalam kejahatan keuangan, maka proses tindak lanjut yang dilakukan Perusahaan akan didasarkan pada Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

POLICIES RELATED TO RESIGNATION OF DIRECTORS DUE TO INVOLVEMENT IN FINANCIAL CRIME

Should, in performing his/her duties, a Director be engaged in financial crime, then the Company shall follow up the case according to the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi mengacu pada UUPT, Anggaran Dasar dan Board Manual, antara lain adalah:

1. Menetapkan kebijaksanaan dalam memimpin dan mengurus Perusahaan;
2. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian termasuk penetapan gaji, pensiun dan jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan RUPS;
3. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain atau badan lain; dan

DUTIES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITY OF BOARD OF DIRECTORS

Duties, responsibilities and authority of the Directors refer to Limited Liabilities Company Law, Articles of Association and Board Manual, which include:

1. Establish discretion in leading and managing the Company;
2. Arrange provisions on employment of employers including the determination of salaries, pensions and old-age pens and other income for the Company's employees under applicable laws and regulations and resolutions of GMS;
3. Appoint and dismiss the Company's employees based on Company employment regulations and applicable laws and regulations;
4. Arrange the transfer of power of the Board of Directors to represent the Company in and out of court to a person or several members of the Board of Directors specifically appointed to it, or to one or more employees of the company either individually or jointly or to other persons or bodies; and

5. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Direksi berkewajiban untuk:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
2. Menyiapkan pada waktunya rencana pengembangan perusahaan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan termasuk rencana–rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan perusahaan dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk selanjutnya dibahas di dalam RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
3. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi perusahaan sesuai dengan kelazimannya yang berlaku bagi suatu perusahaan;
4. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
5. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan berupa laporan tahunan termasuk perhitungan tahunan kepada RUPS;
6. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta Pemegang Saham;
7. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya;
8. Menyiapkan neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Carry out other acts both on management and ownership in accordance with the provisions set forth in the Articles of Association and adopted by the GMS, pursuant to the prevailing laws and regulations.

In performing its main duties, the Board of Directors is obligated to:

1. Strive and ensure the implementation of business and activities of the Company in accordance with the intent and purpose and business activities;
2. Prepare for timely corporate development plans, work plans, and annual budgets including other plans relating to the implementation of the company's business and activities, and submit them to the Board of Commissioners and Shareholders to be submitted to the General Meeting of Shareholders for approval;
3. Perform and maintain the Company's books and administration in accordance with the prevailing rules for a company;
4. Develop accounting system in accordance with the financial accounting standards and based on the principles of internal control, especially the functions of handling, recording, storage, and supervision;
5. Provide accountability and all information regarding the circumstances and the Company's business in the form of annual reports, including annual calculations to the GMS;
6. Provide periodic reports in the manner and time in accordance with the applicable provisions and other reports each time requested by the Shareholders;
7. Prepare the Company's organizational structure in details with the job descriptions;
8. Prepare balance sheets and income statement for the Minister of Law and Human Rights of Indonesia which have been ratified in the GMS based on laws and regulations; and
9. Perform other obligations based on provisions stated in the Articles of Association and ratified in the GMS according to laws and regulations.

PEMBAGIAN TUGAS DIREKSI

Direksi mengatur pembagian tugas masing-masing anggota Direksi untuk memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya berjalan optimal. Aturan pembagian tugas Direksi sebagai berikut:

1. Pembagian tugas anggota Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS dan dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Direksi.
2. Penjabaran tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota Direksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero) yang mengatur mengenai kewenangan setiap anggota Direksi.

Pembagian tugas, ruang lingkup dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi PLN adalah sebagai berikut:

Direktur Utama

Tanggung jawab Direktur Utama adalah memimpin, membina dan mengelola Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan dan senantiasa meningkatkan kinerja Perusahaan untuk mencapai Visi, serta menguasai, memelihara dan mengelola kekayaan Perusahaan dengan tugas pokok:

a. Memastikan bahwa arah pengelolaan Perusahaan berjalan dengan benar menuju terwujudnya Visi, Misi, dan Tujuan Perusahaan;
b. Memastikan bahwa Perusahaan dikelola sesuai dengan kaidah bisnis dan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance);
c. Memastikan bahwa Perusahaan terus berkembang dan memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan;
d. Melaksanakan fungsi corporate leader untuk memastikan keterikatan seluruh anggota Perusahaan sekaligus sebagai inspirator dan motivator yang mengarahkan semua sumberdaya Perusahaan melangkah mencapai Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan.

DIVISION OF DUTIES OF BOARD OF DIRECTORS

Board of Directors regulates the division of duties of each member of Board of Directors to ensure that the implementation of their duties and responsibilities runs optimally. Rules for division of duties of Board of Directors are as follows:

1. The duties delegated to each member of Board of Directors are determined by the Resolutions of the GMS. If the GMS does not do so, delegation is determined following a meeting of the Board of Directors.
2. The description of duties, authorities, and responsibilities of the members of Board of Directors is stipulated in Board of Directors' Regulations on Organization and Work Procedures of PT PLN (Persero) stipulating the authority of each member.

Division of duties, authorities and responsibilities of Board of Directors are as follows:

President Director

Responsibility of President Director is to lead, direct and manage the Company in accordance with the aims and objectives of the Company and to continuously improve the Company's performance in order to achieve the Vision, as well as to control, safeguard and manage the Company's assets with the following main duties:

a. To ensure that the managerial direction of the Company is based on its Vision, Missions and Objectives;
b. To ensure that the Company is managed in accordance with Good Corporate Governance principles;
c. To ensure that the Company maintains growth and provides added value to Stakeholders;
d. To perform corporate leader functions to ensure engagement of all members of the Company. President Director also inspires and motivates the Company's resources to achieve the Company's Vision, Missions and Objectives.

Wakil Direktur Utama

Tanggung jawab Wakil Direktur Utama adalah memimpin dan membina Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) meliputi fungsi perencanaan dan pengembangan listrik perdesaan, serta memastikan Perusahaan mampu berkembang menuju terwujudnya Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan, dengan tugas pokok:

a. Menetapkan dan memastikan adanya perencanaan dan kebijakan yang efektif, efisien, tepat sasaran yang meliputi aspek penyiapan program ketenagalistrikan, investasi ketenagalistrikan, kerja sama ketenagalistrikan, data dan informasi ketenagalistrikan, terkait dengan pengembangan listrik perdesaan;
b. Menetapkan dan memastikan tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria yang meliputi aspek penyiapan program ketenagalistrikan, investasi ketenagalistrikan, kerja sama ketenagalistrikan, data dan informasi ketenagalistrikan, terkait dengan pengembangan listrik perdesaan;
c. Menetapkan dan memastikan terlaksananya perencanaan dan kebijakan yang meliputi aspek penyiapan program ketenagalistrikan, investasi ketenagalistrikan, kerja sama ketenagalistrikan, data dan informasi ketenagalistrikan, terkait dengan pengembangan listrik perdesaan;
d. Menetapkan dan memastikan terlaksananya pemberian bimbingan teknis dan supervisi yang meliputi aspek penyiapan program ketenagalistrikan, investasi ketenagalistrikan, kerja sama ketenagalistrikan, data dan informasi ketenagalistrikan, terkait dengan pengembangan listrik perdesaan;
e. Menetapkan dan memastikan terlaksananya evaluasi dan pelaporan yang meliputi aspek penyiapan program ketenagalistrikan, investasi ketenagalistrikan, kerja sama ketenagalistrikan, data dan informasi ketenagalistrikan, terkait dengan pengembangan listrik perdesaan;
f. Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengendalian dan pengawasan yang meliputi aspek penyiapan program ketenagalistrikan, investasi ketenagalistrikan, kerja sama ketenagalistrikan, data dan informasi ketenagalistrikan, terkait dengan pengembangan listrik perdesaan.

Vice President Director

Responsibilities of Vice President Director is to lead, direct and manage Electricity Project Executive Unit (UP2K) covering functions of rural electricity planning and development, as well as to ensure that the Company is able to achieve the Company's Vision, Missions and Objectives, with the following main duties:

a. To determine and ensure effective and efficient planning and policies, including the aspects of electricity program preparation, investment, cooperation, data and information, which are related to rural electricity development;
b. To establish and ensure that norms, standards, procedures and criteria are in place, including the aspects of electricity program preparation, investment, cooperation, data and information, which are related to rural electricity development;
c. To establish and ensure implementation of planning and policies, including the aspects of electricity program preparation, investment, cooperation, data and information, which are related to rural electricity development;
d. To establish and ensure implementation of technical guidance and supervision, including the aspects of electricity program preparation, investment, cooperation, data and information, which are related to rural electricity development;
e. To establish and ensure implementation of evaluation and reporting, including the aspects of electricity program preparation, investment, cooperation, data and information, which are related to rural electricity development;
f. To establish and ensure implementation of control and supervision, including the aspects of electricity program preparation, investment, cooperation, data and information, which are related to rural electricity development.

Direktur Perencanaan Korporat

Tanggung jawab Direktur Perencanaan Korporat adalah memimpin, membina dan mengelola Direktorat Perencanaan Korporat meliputi fungsi perencanaan korporat, perencanaan sistem, portofolio bisnis, transaksi tenaga listrik, manajemen Risiko serta Kepatuhan, untuk memastikan Perusahaan mampu berkembang menuju terwujudnya Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan, dengan tugas pokok:

a. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam mencapai Visi melalui perencanaan dan pengembangan energi ketenagalistrikan serta pengembangan bisnis Perusahaan;
b. Menetapkan dan memastikan terlaksananya strategi korporat dalam memenuhi Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) serta dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), termasuk didalamnya merencanakan proyeksi keuangan Perusahaan dan merancang pendanaannya;
c. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat terkait fungsi enjiniring dan pengembangan teknologi ketenagalistrikan, termasuk didalamnya penelitian dan pengembangan ketenagalistrikan serta standarisasi sistem ketenagalistrikan dan non ketenagalistrikan;
d. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengelolaan portofolio bisnis, pengelolaan transaksi tenaga listrik, pengembangan kemitraan bisnis serta pengembangan Anak Perusahaan dan Usaha Patungan;
e. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam manajemen Risiko;
f. Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengembangan proses bisnis dan pengelolaan Risiko pada Direktorat Perencanaan Korporat, melakukan pembinaan dan pengembangan Anak Perusahaan dan Usaha Patungan, pembinaan dan pengembangan Regional dan Unit di bawah Direktorat Perencanaan Korporat;
g. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengelolaan kepatuhan Perusahaan terhadap regulasi, termasuk pengelolaan kepatuhan Anak Perusahaan, Regional dan Unit.

Corporate Planning Director

Responsibility of Corporate Planning Director is to lead, direct and manage Corporate Planning Directorate covering functions of corporate planning, system planning, business portfolio, electricity transactions, risk management and compliance, to ensure that the Company is able to achieve the Company's Vision, Missions and Objectives, with the following main duties:

a. To establish and ensure implementation of corporate policies and strategies to achieve the Company's Vision by planning and developing power system and business development plan;
b. To establish and ensure implementation of corporate strategies to meet General Plan of Electricity Supply (RUPTL), Long-term Corporate Plan (RJPP) and Corporate Work Plan and Budget (RKAP) including the Company's financial projection and funding plan;
c. To establish and ensure implementation of corporate policies and strategies related to functions of electricity technology engineering and development, including electricity research and development, as well as electricity and non-electricity system standardization;
d. To establish and ensure implementation of corporate policies and strategies in business portofolio management, electricity transaction management, business partnership development and development of Subsidiaries and Joint Ventures;
e. To establish and ensure implementation of corporate policies and strategies in risk management;
f. To establish and ensure implementation of business process and risk management development under Corporate Planning Directorate, development and growth of Subsidiaries and Joint Ventures, development and growth of Regions and Units under Corporate Planning Directorate;
g. To establish and ensure implementation of corporate policies and strategies in management of the Company's compliance with the applicable regulations, including compliance management of Subsidiaries, Regions and Units.

Direktur Pengadaan Strategis 1

Tanggung jawab Direktur Pengadaan Strategis 1 adalah memimpin, membina dan mengelola Direktorat Pengadaan Strategis 1 meliputi fungsi perencanaan pengadaan strategis, pengadaan strategis, supply chain management (manajemen rantai pasok), Project Management, dan energi baru terbarukan untuk memastikan Perusahaan mampu berkembang menuju terwujudnya Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan, dengan tugas pokok:

a. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi perencanaan dan pengadaan barang dan jasa korporat, terlaksananya pembinaan pengadaan barang dan jasa kepada Regional dan Unit, serta pengelolaan administrasi pengadaan barang/ jasa dan kontrak korporat;
b. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi pengadaan korporat dalam penyediaan material operasi melalui pengelolaan supply chain management dan pengelolaan sistem korporat;
c. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi pengelolaan aplikasi pengadaan barang dan jasa secara online serta melakukan integrasi proses dan pemusatan pengadaan korporat;
d. Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengelolaan *data base* dan administrasi proyek, pengelolaan Project Management Information System (PMIS), pengelolaan anggaran proyek,dan melaksanakan integrasi dan pembinaan pelaksanaan konstruksi;
e. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam perencanaan, pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT);
f. Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengembangan proses bisnis dan pengelolaan Risiko pada Direktorat Pengadaan Strategis 1 serta pembinaan dan pengembangan Unit di bawah Direktorat Pengadaan Strategis 1.

Direktur Pengadaan Strategis

Tanggung jawab Direktur Pengadaan Srategis 2 adalah memimpin, membina dan mengelola Direktorat Pengadaan Strategis 2 meliputi fungsi pengadaan *Independent Power Producer* (IPP), pengadaan batu bara, serta pengadaan gas dan BBM, serta perijinan dan pertanahan, untuk

Strategic Procurement 1 Director

Responsibilities of Strategic Procurement 1 Director is to lead, direct and manage Strategic Procurement 1 Directorate covering the functions of strategic procurement planning, strategic procurement, supply chain management, project management and new renewable energy to ensure that the Company is able to achieve the Company's Vision, Missions and Objectives, with the following main duties:

a. To establish and ensure implementation of policies and strategies in corporate goods and services procurement, advisory on goods and services procurement for Regions and Units, as well as administration of goods and services procurement and corporate contracts;
b. To establish and ensure implementation of policies and strategies in operational material procurement through supply chain management and corporate system management;
c. To establish and ensure implementation of policies and strategies in on-line procurement applications for goods and services, as well as corporate procurement integration and centralization;
d. To establish and ensure implementation of project database and administration management, Project Management Information System (PMIS), project budget management, as well as construction integration and development;
e. To establish and ensure implementation of corporate policies and strategies in planning, developing and utilizing new and renewable energy (EBT);
f. To establish and ensure implementation of business process development and risk management in Strategic Procurement 1 Directorate and development of Units under Strategic Procurement 1 Directorate.

Strategic Procurement 2 Director

Responsibility of Strategic Procurement 2 Director is to lead, direct and manage Strategic Procurement 2 Directorate covering the functions of procurement of Independent Power Producer (IPP), coal, gas and fuel, as well as licensing and land to ensure that the Company is able

memastikan Perusahaan mampu berkembang menuju terwujudnya Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan, dengan tugas pokok:

a. Menetapkan dan memastikan tersedianya regulasi, kebijakan dan strategi pengadaan IPP dan Energi Primer untuk kebutuhan Korporat, terlaksananya pengadaan IPP dan energi primer strategis, terlaksananya pembinaan pengadaan energi primer kepada Regional dan Unit, serta pengelolaan administrasi pengadaan IPP dan energi primer dan kontrak korporat;
b. Menetapkan dan memastikan terlaksananya strategi integrasi dalam pembangunan IPP dan transmisi swasta dengan sistem kelistrikan PLN;
c. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi pengelolaan penyediaan batu bara termasuk perencanaan pengadaan batu bara, pengelolaan aplikasi dan logistik batu bara untuk kebutuhan batu bara jangka pendek dan panjang;
d. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi pengelolaan penyediaan gas dan BBM termasuk perencanaan pengadaan gas dan BBM, pengelolaan aplikasi dan logistik gas dan BBM untuk kebutuhan korporat jangka pendek dan panjang;
e. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi pengelolaan aplikasi pengadaan energi primer (batu bara, gas dan BBM) secara online serta melakukan integrasi proses dan pemusatan pengadaan korporat;
f. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengelolaan perijinan, pengadaan tanah, serta penyediaan tanah bagi penduduk yang terkena dampak kegiatan Perusahaan;
g. Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengembangan proses bisnis dan pengelolaan Risiko pada Direktorat Pengadaan Strategis 2 serta pembinaan dan pengembangan Unit dan Anak Perusahaan terkait pengelolaan fungsi pengadaan IPP dan energi primer.

to achieve the Company's Vision, Missions and Objectives, with the following main duties:

a. To establish and ensure availability of IPP and Primary Energy procurement regulations, policies and strategies for corporate needs, IPP and primary energy strategic procurement, implementation of primary energy procurement for regional and unit, as well as administration of IPP and primary energy procurement and corporate contracts;
b. To establish and ensure implementation of integration strategy in construction of IPP and private transmission with PLN's electricity system;
c. To establish and ensure implementation of policies and strategies in coal supply management, including coal procurement planning, coal applications and logistics management for short and long-term coal needs;
d. To establish and ensure implementation of policies and strategies in gas and fuel supply management, including gas and oil procurement planning, applications and logistics management for short and long-term corporate needs;
e. To establish and ensure implementation of policies and strategies in management of on-line primary energy (coal, gas and fuel) procurement application, as well as process integration and centralization of corporate procurement;
f. To establish and ensure implementation of corporate policies and strategies in managing permits, land acquisition, and provision of land for residents affected by the Company's activities;
g. To establish and ensure implementation of business process development and risk management in Strategic Procurement 2 Directorate as well as development of Units and Subsidiaries related to IPP and primary energy procurement management.

Direktur Human Capital Management

Tanggung jawab Direktur Human Capital Management adalah memimpin, membina dan mengelola Direktorat Human Capital Management meliputi fungsi Organization Development, Human Capital Management System, Talent Development, Health, Safety, Security And Environment, Corporate Communication and Corporate Social Responsibility, General Affairs untuk memastikan Perusahaan mampu berkembang menuju terwujudnya Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan,dengan tugas pokok:

a. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengembangan organisasi dan sumber daya manusia meliputi antara lain poses bisnis, perencanaan tenaga kerja, sistem rekrutmen, sistem pendidikan dan pelatihan, pengelolaan sistem knowledge management, pengembangan sistem Human Capital Management, sistem manajemen kinerja pegawai, sistem remunerasi dan pemberian penghargaan, sistem administrasi SDM, administrasi disiplin pegawai serta pengembangan sistem informasi SDM;
b. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi dalam pengelolaan hubungan industrial dan pengelolaan tenaga kerja alih daya;
c. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi dalam pengelolaan pelayanan umum di Kantor Pusat;
d. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengelolaan kesehatan, keselamatan kerja, keamanan dan pengelolaan lingkungan;
e. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam fungsi komunikasi korporat meliputi fungsi komunikasi Perusahaan, public relation, hubungan dengan media, hubungan komunikasi pihak internal dan eksternal, Corporate Social Responsibility (CSR), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);
f. Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengembangan proses bisnis dan pengelolaan Risiko pada Direktorat Human Capital Management, serta melakukan pembinaan dan pengembangan Unit di bawah Direktorat Human Capital management.

Human Capital Management Director

Responsibility of Human Capital Management Director is to lead, direct and manage Human Capital Management Directorate covering the functions of Organization Development, Human Capital Management System, Talent Development, Health, Safety, Security and Environment, Corporate Communication and Corporate Social Responsibility, General Affairs to ensure that the Company is able to achieve the Company's Vision, Missions and Objectives, with the following main duties:

a. To establish and ensure implementation of corporate policies and strategies in organizational and human capital development including business process, manpower planning, recruitment system, education and training system, knowledge management system, Human Capital Management system development, employee performance management, remuneration and recognition system, HC administration system, employee discipline administration and HC information system development;
b. To establish and ensure implementation of corporate policies and strategies in industrial relations and outsourcing management;
c. To establish and ensure implementation of corporate policies and strategies in general services at Head Office;
d. To establish and ensure implementation of corporate policies and strategies in occupational health, safety and environmental management;
e. To establish and ensure implementation of corporate policies and strategies in corporate communications, including corporate communications, public relations, media relations, internal and external communications, Corporate Social Responsibility (CSR), Partnership and Community Development Program (PKBL);
f. To establish and ensure implementation of business process development and Risk management in Human Capital Management Directorate, as well as development of Regions and Units under Human Capital Management Director.

Direktur Keuangan

Tanggung jawab Direktur Keuangan adalah memimpin, membina dan mengelola Direktorat Keuangan meliputi fungsi keuangan korporat, anggaran, perbendaharaan (*treasury*), akuntansi, pajak, asuransi, pengelolaan sistem dan teknologi informasi, serta memastikan Perusahaan mampu berkembang menuju terwujudnya Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan, dengan tugas pokok:

a. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam penyediaan dan pengelolaan keuangan, kebutuhan pendanaan, pengelolaan pinjaman dan pemenuhan terhadap kewajiban serta covenant Perusahaan;
b. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengelolaan anggaran untuk mendukung Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
c. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengelolaan perbendaharaan (*treasury*), kepemilikan saham, pengelolaan kas dan likuiditas, pengelolaan pendapatan dan aset liability management, pengelolaan piutang, pengelolaan akuntansi, serta pegelolaan pajak dan asuransi;
d. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam hal pengelolaan sistem dan teknologi informasi, pemusatan serta integrasi sistem dan aplikasi teknologi informasi korporat;
e. Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengembangan proses bisnis dan pengelolaan Risiko pada Direktorat Keuangan.

Direktur Bisnis Regional

Tanggung jawab Direktur Bisnis Regional adalah memimpin, membina dan mengelola Direktorat Bisnis Regional dengan wilayah kerja sesuai yang ditetapkan, meliputi fungsi perencanaan dan pengembangan bisnis regional, konstruksi regional, operasi pembangkit, transmisi, distribusi dan pelayanan pelanggan di regionalnya, serta memastikan Perusahaan mampu berkembang menuju terwujudnya Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan, dengan tugas pokok:

Finance Director

Responsibility of Finance Director is to lead, direct and manage Finance Directorate covering the functions of corporate finance, budgeting, treasury, accounting, taxes, insurance, information system and technology management, as well as to ensure that the Company is able to achieve the Company's Vision, Missions and Objectives, with the following main duties:

a. To establish and ensure implementation of corporate policies and strategies in funding and financial management, funding allocation, loan management and adherence to the Company's obligations and covenants;
b. To establish and ensure implementation of corporate policies and strategies in budget management to support Corporate Work Plan and Budget (RKAP);
c. To establish and ensure implementation of corporate policies and strategies in treasury management, share ownership, cash and liquidity management, income and asset liability management, debt servicing, accounting practices, as well as tax and insurance management;
d. To establish and ensure implementation of corporate policies and strategies in information and technology systems, as well as centralization and integration of corporate information technology systems and applications;
e. To establish and ensure implementation of business process development and risk management in Finance Directorate.

Regional Business Director

Responsibility of Regional Business Director is to lead, direct and manage Regional Business Directorate with predetermined work area, covering the functions of regional business planning and development, regional construction, power plant operations, transmission, distribution and customer service in the respective region, as well as to ensure that the Company is able to achieve the Company's Vision, Missions and Objectives, with the following main duties:

a. Menetapkan dan memastikan terlaksananya perencanaan, pengembangan dan pengendalian bisnis regional serta melakukan evaluasi dan pengelolaan kinerja regional;
b. Menetapkan dan memastikan terlaksananya konstruksi pembangkit, transmisi/gardu induk dan distribusi regional, terlaksananya pembangunan IPP sampai dengan COD, serta mengelola kontrak dan administrasi konstruksi di regionalnya;
c. Menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi dalam pengelolaan operasi dan pemeliharaan aset pembangkit, transmisi/gardu induk dan distribusi,serta merencanakan dan mengelola kebutuhan suku cadang di regionalnya;
d. Menetapkan dan memastikan terlaksananya pembelian tenaga listrik dari IPP dan mengelola pendapatan dan biaya operasi di regionalnya;
e. Menetapkan dan memastikan terlaksananya pengembangan proses bisnis dan pengelolaan Risiko pada Direktorat Bisnis Regional, serta melakukan pembinaan dan pengembangan Regional dan Unit di bawah Direktorat Bisnis Regional.

INDEPENDENSI, HUBUNGAN AFILIASI DAN KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI

Independensi

Anggota Direksi menandatangani Pakta Integritas di setiap awal tahun untuk menyatakan status independensinya dan pada setiap akhir tahun untuk menyatakan apakah dalam satu tahun tersebut terdapat situasi benturan kepentingan oleh Direksi atas tindakan yang dilakukan. Corporate Secretary bertugas untuk memastikan praktik ini telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip GCG.

Pada tahun 2019, seluruh anggota Direksi telah menandatangani Pakta Integritas yang berisi butir-butir berikut:

a. To establish and ensure implementation of planning, development and control of regional businesses, as well as evaluation and management of regional performance;
b. To establish and ensure implementation of the construction of power plants, transmissions, substations and regional distributions, implementation of IPP up to COD development, as well as management of contracts and construction administrations in the respective region;
c. To establish and ensure implementation of policies and strategies in operations management and maintenance of power plants, transmissions, substations and distributions, as well as management and planning of spare parts in the respective region;
d. To establish and ensure implementation of purchased power from IPP, to manage operating revenues and expenses in the respective region;
e. To establish and ensure implementation of business process development and risk management in Regional Business Directorate, as well as development of Regions and Units under Regional Business Directorate.

INDEPENDENCE OF MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS

Independence

Each member of Board of Directors signs an Integrity Pact at the beginning of each year to declare his/her independence and at the end of each year makes a statement whether during the year there had been any conflict of interests of the Board of Directors for the measures taken. The Corporate Secretary shall ensure that this practice is carried out in accordance with GCG principles.

In 2019, all members of Board of Directors signed the Integrity Pact which contains the following matters:

Pakta Integritas Direksi Integrity Pact of Board of Directors	Zulkifli Zaini	Darmawan Prasodjo	Sinthya Roesly	Syofvi Felienty Roekman	Sripeni Inten Cahyani	Djoko R. Abumanan	Muhamad Ali	Wiluyo Kusdwiharto	Haryanto WS	Syamsul Huda	Ahmad Rofik
1. Sanggup mengemban amanah atas dasar kepercayaan. Willing to have the fiduciary duty.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2. Mengupayakan capaian kinerja Perusahaan secara maksimal dengan mengindahkan prinsip-prinsip GCG. Striving for Company's maximum performance by adhering to GCG principles.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3. Bersikap dan mengambil keputusan dengan penuh kehati-hatian atau *prudent*. Being careful and prudent in making decisions (duty of care).	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4. Berani mengambil tanggung jawab penuh atas jalannya Perusahaan. Taking full responsibility for the Company.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5. Secara konsisten mendahulukan yang terbaik bagi kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi. Consistently prioritizing the Company's best interests over personal interests (duty of loyalty).	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6. Menjauhi segala bentuk benturan kepentingan baik potensi maupun aktual. Steering clear of any potential or actual conflict of interest (Conflict of Interest Rule).	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
7. Mematuhi semua ketentuan perundangan yang berlaku. Comply with all applicable laws and regulations (accountability).	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
8. Selama menjabat, tidak akan memanfaatkan posisi pada Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga dan saudara, maupun golongan tertentu. During their tenure, they will not take advantage of the Company's position, directly or indirectly, for their personal, family, or relative's interests, or those of other groups.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Hubungan Afiliasi

Dalam rangka menjaga independensi, menghindari adanya benturan kepentingan dan menjaga akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan dan dalam penyelenggaraan kegiatan operasional, Perusahaan memiliki aturan melarang adanya hubungan afiliasi maupun hubungan keluarga langsung maupun tidak langsung di antara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham.

Aturan tersebut dipegang teguh oleh seluruh anggota Direksi sehingga antar anggota Direksi yang menjabat saat ini tidak memiliki hubungan keuangan ataupun hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga dengan anggota Direksi lainnya dan anggota Dewan Komisaris baik

Affiliate Relationship

In order to uphold independence, to avoid conflict of interest and to maintain accountability in all decision-making and implementation of operational activities, the Company prohibits any direct or indirect affiliate relationships among members of Board of Commissioners, Board of Directors and Shareholders.

These rules are firmly upheld by all members of the Board of Directors so that the current members of the Board Directors do not have any financial or family relations up to the third degree with other Directors or Commissioners either

menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

horizontally or vertically, including via marital relationships.

Kepemilikan Saham

Seluruh anggota Direksi tidak mempunyai kepemilikan saham di Perusahaan baik secara pribadi maupun anggota keluarganya, dan tidak mempunyai kepemilikan saham pada perusahaan lain baik secara pribadi maupun keluarganya.

Share Ownership

All Directors do not have shares of the Company either owned personally or by their family members and do not have shares in other companies either owned personally or by their family members.

PROGRAM PENGENALAN PERUSAHAAN UNTUK DIREKTUR BARU

Program Pengenalan ditujukan bagi Direktur yang baru pertama kali diangkat agar Direktur tersebut dapat segera mengenal proses bisnis Perusahaan, termasuk seluruh permasalahan yang telah, sedang dan akan dihadapi sehingga dapat bekerja dengan optimal untuk kepentingan Perusahaan. Pada tahun 2019 terdapat 4 (empat) Direktur yang baru pertama kali diangkat dan semuanya telah mendapatkan program pengenalan perusahaan untuk Direktur baru.

INDUCTION PROGRAM FOR DIRECTORS

The Induction Program is intended for newly appointed Directors to be able to immediately familiar with the Company's business processes, including all previous, current and potential problems in order to work optimally in the interest of the Company. In 2019 there were 4 (four) Directors who were first appointed and all of them have received a company introduction program for new Directors.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Sepanjang tahun 2019, Direksi telah mengikuti program pengembangan kompetensi dengan mengikuti seminar, *workshop*, *benchmarking*, pelatihan/diklat, dan kunjungan kerja, sebagai berikut:

COMPETENCE DEVELOPMENT OF DIRECTORS

Throughout 2019, the Directors have participated in a competency development program by attending seminars, workshops, benchmarking, training/training, and work visits, as follows:

Nama Name	**Tanggal** Date	**Program Pengembangan** Development Program
Zulkifli Zaini	24-25 Oktober	Refresher Program "PSAK 71 Impairment Deep Dive in Risk Management Perspective" - Jakarta
Darmawan Prasodjo	28 Januari	Wisuda Program Operation and Maintenance Papua Technician Apprentice - Batch 1 – Jawa Barat Graduation of Operation and Maintenance Program Papua Technician Apprentice - Batch 1 – West Java
	6 agustus	Indosterling Forum ke 7: "Mengukur infrastruktur: Sejauh mana pembangunan infrastruktur menstimulasi ekonomi daerah – Jakarta 7th Indosterling Forum: "Measuring infrastructure: How Far infrastructure development stimulates the regional economy - Jakarta
	4-6 September	Konvensi & Pameran IPA ke-43 Jakarta, Talent leadership session theme: lets talk about people 43rd IPA Convention & Exhibition Jakarta, Talent leadership session theme: lets talk about people
	3 Oktober	Advancing Accountable Resource Governance in Asia Pasific Legal and fiscal framework, which is a part of getting a good deal – Yogyakarta

Nama Name	**Tanggal** Date	**Program Pengembangan** Development Program
Sripeni Inten Cahyani	25 September	*Workshop* Peningkatan GCG dalam Pengelolaan BUMN di Lingkup Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri strategis dan Media - Banten Workshop on GCG Improvement in SOE Management in the scope of Deputy for Mining Business, Strategic Industries and Media - Banten
	11 Oktober	*Sharing* dalam Workshop Destination Statement - Jakarta Sharing in the Destination Statement Workshop - Jakarta
	19 September	*Sharing* di acara KOL Academy - Jakarta Sharing in KOL Academy event - Jakarta
	6 September	Narasumber acara Internalisasi Tata Nilai PLN Terbaik - Jakarta Keynote Speaker for Internalization of Best PLN Values - Jakarta
	16 Juli	Narasumber pada Renewable Energy Technology Workshop Indonesia – Austria, Austria Keynote Speaker on Renewable Energy Technology Workshop Indonesia – Austria, Austria
Sinthya Roesly	2015	International Director Programme, INSEAD, France
	2012	International Leadership Workshop, Aspen Institute, Colorado
	2011	Infrastucture in Market Economy, Harvard JFK School of Government, Boston
	2009	Global Leadership Management Workshop, Cambridge university
Syofvi Felienty Roekman	30 Januari	Kuliah Umum BOD oleh Wakil Menteri ESDM - Jakarta BOD Public Lecture by Vice Minister of Energy and Mineral Resources - Jakarta
	24 Februari-3 Maret	JP Morgan Global Emerging Market Corporate Conference dan benchmarking ke CAISO dan ASU Arizona – Amerika Serikat JP Morgan Global Emerging Market Corporate Conference and benchmarking to CAISO and ASU Arizona - USA
	6-16 Juli	*Roadshow* GMTN 2019 – Inggris dan Eropa 2019 GMTN Roadshow – UK and Europe
	17 Juli	*Assessment* Kompetensi BUMN - Jakarta SOE Competence Assessment - Jakarta
	26 Juli	*Sharing Session* Perencanaan Strategis & Pengelolaan AP bersama KEPCO - Jakarta Sharing Session on Strategic Planning & Subsidiaries Management with KEPCO - Jakarta
	8 Oktober	*Workshop Lesson Learned Blackout System by* USAID - Jakarta
	10 Oktober	IJEF by DELRI "Developing Electricity Infrastructure Capacity" - Bali
Haryanto WS	8 Januari	Asesmen Kompetensi BUMN BUMN Competency Assessment
	30 Januari	Kuliah umum Direksi oleh Wakil Menteri ESDM Public lecture of the Directors by the Deputy Minister of ESDM
	14-20 Juli	Diskusi dan Studi Banding SKTT 150 kV di Italia Discussion and Comparative Study on HV Underground Cable 150 kV in Italy
	September	Workshop Lesson Learned Blackout System by KEPCO, Jepang Lesson Learned Blackout System Workshop by KEPCO, Japan
	18 September	CIGRE, Jakarta CIGRE, Jakarta
	25-28 September	Management Level Discussion and Shipment Turbine PLTGU Muara Karang di Jepang Management Level Discussion and Shipment of Turbine to CCPP Muara Karang
	1-4 Oktober	ICHVEPS, Sanur-Bali ICHVEPS, Sanur-Bali
	8 Oktober	Workshop Lesson Learned Blackout System by Usaid Lesson Learned Blackout System Workshop by Usaid
Wiluyo Kusdwiharto	30 Januari	Narasumber perihal "Pasokan Listrik dan Sumber Bioenergi Dalam Mendorong Percepatan Pengembangan Listrik" Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman - Palembang Keynote Speaker on "Electricity Supply and Bioenergy Sources in Encouraging Accelerated Electricity Development" at Coordinating Ministry for Maritime Affairs - Palembang
	24-29 Maret	Invitation of Nuclear Energy Public Understanding Course and Hydrogen Energy Understanding Course in Japan – Tokyo, Jepang
	25-26 September	Penandatanganan MoU antara Tenaga Nasional BHD dan PT PLN – Malaysia MoU Agreement Signing Ceremony Between Tenaga Nasional BHD & PT PLN _ Malaysia

Nama Name	**Tanggal** Date	**Program Pengembangan** Development Program
Syamsul Huda	8 Juli	*Assessment* Kompetensi BUMN - Jakarta SOE Competence Assessment - Jakarta
	19 Juli	*Executive Briefing* KPKU oleh Quality Assurance BUMN - Jakarta KPKU Executive Briefing by SOE Quality Assurance - Jakarta
	22 Juli	*Opening Meeting* dan Wawancara Direksi oleh Asesor KPKU BUMN - Jakarta Opening Meeting and Interview of Board of Directors by SOE KPKU Assessors - Jakarta
	23 Juli	Kunjungan Kerja Bersama Komisi VII DPR RI ke ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) & MASDAR – Abu Dhabi Work Visit with Commission VII of Indonesian Parliament to ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) & MASDAR – Abu Dhabi
	1 Agustus	*Sharing Session* pada Senior Leader dan Change Agent oleh Menteri ESDM - Jakarta Sharing Session on Senior Leader and Change Agent by Minister of Energy and Mineral resources - Jakarta
	14 September	*Collaboration Program* with the Private Sector for Disseminating Japanese Technology For Energy Management System for Micro Grid in Indonesia - Jepang
Ahmad Rofik	8 Juli	*Assessment* Kompetensi BUMN - Jakarta SOE Competence Assessment - Jakarta
	18-20 Juni	*Executive Exchange* dan Technical Meeting Tentang Teknologi Circulating Fluidized Bed (CFB) Boiler - Jepang dan Korea Selatan Executive Exchange and Technical Meeting on Circulating Fluidized Bed (CFB) Boiler Technology - Japan and South Korea
Djoko R. Abumanan	30 Januari	Kuliah Umum BOD oleh Wakil Menteri ESDM - Jakarta BOD Public Lecture by Vice Minister of Energy and Mineral Resources - Jakarta
	25 Maret	Pembicara pada National Steering Committee CIGRE – Nusa Dua, Bali Keynote Speaker on CIGRE National Steering Committee – Nusa dua, Bali
	13-18 Juni	Delegasi Kementerian ESDM dalam G20 Ministerial Meeting of Energy Transition - Jepang Delegation of Ministry of Energy and Mineral Resources in G20 Ministerial Meeting of Energy Transition - Japan
	07-14 Juli	*Roadshow* GMTD 2019 – Amerika Serikat 2019 GMTN Roadshow - USA
	15-16 Juli	PLN Outlook 2019 - Jakarta
	17 Juli	*Assessment* Kompetensi BUMN - Jakarta SOE Competence Assessment - Jakarta
	31 Juli	Gas Indonesia Summit - Jakarta
	17 September	Diskusi Infrastruktur Mini LNG Pembangkit Skala Kecil di wilayah Indonesia Timur - Jakarta Discussion on LNG Mini Infrastructure Small Scale Power Plant in Eastern Indonesia - Jakarta
	25 September	*Workshop* Peningkatan GCG dalam Pengelolaan BUMN - Tangerang Workshop on GCG Improvement in SOE Management - Tangerang
	21 Oktober	FGD "The Future of moblity and its implications for Indonesia" - Jakarta
	27 November	*Opening Speech* pada Indonesia Power Generation Convention & Exhibition 2019: "PLN Strategic Outlook Coping the Industrialization 4.0 & Indonesia's Future Power Market" - Jakarta
Muhamad Ali	29 Juni-5 Juli	Kunjungan kerja ke Perguruan Tinggi untuk penandatangan MoU – Belanda, Austria, Skotlandia Work visit to Universities for MoU Signing – Netherlands, Austria, Scotland
	14 November	Menerima Award "Brand of The Year" Brand Energy Power – London, Inggris Received "Brand of The Year" Award from Brand Energy Power – London, UK
	21 November	*Workshop* Big Data Analysis - Jakarta
	27 November	Narasumber FGD "Tantangan SDM Sektor Ketenagalistrikan Periode 2019-2014" - Jakarta FGD Keynote Speaker on "The Challenges of Electricity Sector Human Resources in 2019-2014" - Jakarta

REMUNERASI DIREKSI

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi

Prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Gaji Direksi dan Dewan Komisaris BUMN beserta perubahannya yang terakhir Nomor: 01/MBU/05/2019, Tunjangan dan fasilitas lain disesuaikan dengan berpedoman pada Permen BUMN Nomor Per-04/MBU/2014 beserta perubahannya.

Struktur dan Besaran Remunerasi Direksi

Besaran remunerasi Direksi disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penetapan besaran remunerasi tersebut menerapkan Faktor Penyesuaian Industri yang mempertimbangkan sektor industri sejenis yang terukur (*benchmark*), kondisi persaingan usaha (*competitiveness*), kompleksitas usaha, serta kelangkaan sumber daya manusia. Remunerasi yang diterima Direksi terdiri dari gaji, tunjangan dan tantiem dengan perincian sebagai berikut:

REMUNERATION FOR BOARD OF DIRECTORS

Procedure of Determinating Remuneration for Board of Directors

Procedure for determination and amount of remuneration for Board of Directors refers to Minister of SOE Regulation No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determination of Remuneration for Board of Directors and Board of Commissioners of SOE, and its latest amendment No. 01/MBU/05/2019. Allowances and other facilities are adjusted to be guided by Minister or SOE Regulation No. Per-04/MBU/2014 along with their changes.

Structure and Amount of Remuneration for Board of Directors

Remuneration for the Board of Directors is aligned with the Company's financial conditions and capability and shall not be contrary to the laws and regulations. Determination of the amount of remuneration applies Industrial Adjustment Factor, taking into account benchmark in similar industries, business competitiveness or complexity and scarcity of human resources. The remuneration received by the Board of Directors consists of salary, benefits and bonuses with the following details:

No.	Jenis Remunerasi Type of Remuneration	Keterangan Description
1	**Gaji | Salary**	a. Direktur Utama: 100% President Director: 100% b. Wakil Diretur Utama: 95% dari gaji Direktur Utama Vice President Director: 95% from President Director's Salary c. Direktur HCM: 90% dari gaji Direktur Utama Director of HCM; 90% from President Director salary d. Direktur lainnya: 85% dari gaji Direktur Utama Other Directors: 85% from President Director salary
2	**Tunjangan | Allowances**	
	Tunjangan hari raya keagamaan| Religious holiday allowance	1 (satu) bulan gaji 1 (one) month salary
	Tunjangan Perumahan Housing allowance	Diberikan berupa uang jika tidak tersedia rumah dinas yang besarnya sesuai dengan PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN Provided in the form of money if there is no official residence of which the amount is in accordance with PER-04 / MBU / 2014 concerning Guidelines for Determination of Income of the SOE's Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board
	Asuransi purna jabatan Post-tenure insurance	Premi yang ditanggung 25% dari gaji dalam satu tahun Premium covers 25% of annual salary

No.	Jenis Remunerasi Type of Remuneration	Keterangan Description
3	**Fasilitas | Facilities**	
	Fasilitas Kendaraan Dinas Vehicle Facility	1 (satu) unit 1 (one) unit
	Fasilitas kesehatan Medical facilitiy	1 istri dan 3 orang anak usia maksimum 25 tahun One wife and three children with maximum age of 25 years old
	Fasilitas bantuan hukum Legal assistance	Diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Provided in accordance with prevailing laws and regulations
	Fasilitas keanggotaan klub Club membership facility	2 (dua) keanggotaan klub untuk klub bisnis dan olah raga 2 (two) club membership for business and sport club
	Fasilitas kartu kredit korporat Corporate credit card facility	1 (satu) kartu kredit untuk keperluan menjamu tamu Perusahaan atau biaya representasi kedinasan lainnya 1 (one) credit card for entertaining Company guests or other official represntation expenses
	Pakaian Seragam Uniform	2 (dua) stel setiap 1 (satu) tahun 2 (two) sets every 1 (one) year

Secara total, remunerasi Direksi yang diterima pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

In total, remuneration of the Board of Directors received in 2019 is as follows:

Jenis Remunerasi *	Jumlah Total	Besaran (juta Rp) Amount (million Rp)	Remuneration Type
Remunerasi		**172.900**	**Remuneration**
Gaji	13	46.110	Salary
Tantiem Dipotong Pajak	12	126.790	Tantium Cut Taxes
Tunjangan		**6.161**	**Allowance**
Tunjangan Transportasi	8	2.157	Transportation Allowance
Tunjangan Hari Raya	12	4.004	Religious Day Allowance
Jumlah|Total		**179.061**	

*Termasuk mantan anggota Direksi|Including former members of the Board of Directors

Pengungkapan Bonus Kinerja, Bonus Non-kinerja, dan/atau Opsi Saham yang Diterima Direksi

Direksi menerima bagian dari keuntungan Perusahaan (tantiem) sebagaimana diatur dalam Permen BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Gaji Direksi dan Dewan Komisaris BUMN beserta perubahannya yang terakhir Nomor: 01/MBU/05/2019. Besaran tantiem juga mempertimbangkan capaian *key performance indicator* (KPI) dan tingkat kesehatan perusahaan (TKP). Pada tahun 2019 jumlah tantiem yang diterima anggota Direksi (12 orang) sebesar Rp126,8 miliar.

Disclosure of Performance Bonuses, Non-performance Bonuses, and/or Stock Options Received by Board of Directors

Board of Directors receives a share of the Company's profits (tantiem) as stipulated in Regulation of the Ministry of SOE No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determination of Salaries for Board of Directors and Board of Commissioners of SOE and the latest amendment No. 01/MBU/05/2019. The amount of tantiem also takes into account achievement of key performance indicators (KPI) and soundness level (TKP). In 2019, the amount of tantiem received by members of Board of Directors (12 Directors) was Rp126.8 billion.

Perusahaan tidak memiliki program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan Perusahaan (*Employee Stock Ownership Program/Management Stock Ownership Program*) karena Perusahaan tidak memiliki saham yang dijual ke publik.

The Company does not have Employee Stock Ownership Program/Management Stock Ownership Program because the Company's shares are not sold to the public.

RAPAT DIREKSI

Sepanjang tahun 2019, Direksi telah melakukan 29 kali rapat internal. Rapat direksi juga dihadiri Direksi anak perusahaan, EVP, GM atau jajaran manajemen terkait sesuai dengan agenda yang dibahas. Tingkat kehadiran Direksi dan agenda rapat adalah sebagai berikut:

BOARD OF DIRECTORS MEETING

During 2019, Board of Directors held 29 internal meetings. Board of Directors meetings were also attended by Board of Directors of subsidiaries, EVP, GM or relevant management according to the discussed agenda. Attendance rate of Board of Directors and the meeting agenda were as follows:

No.	Tanggal Rapat dan Kehadiran Meeting Date and Presence	Agenda Rapat	Meeting Agenda
1	3 Januari|January 3		
	Hadir|Present: 1. Sofyan Basir 2. Sarwono Sudarto 3. Supangkat Iwan Santoso 4. Syofvi Felienty Roekman 5. Muhamad Ali 6. Wiluyo Kusdwiharto 7. Haryanto WS 8. Amir Rosidin 9. Syamsul Huda 10. Ahmad Rofik Kuorum|Quorum: 84,61%	1. Persiapan RUPS RKAP Anak Perusahaan 2. Laporan rencana pengadaan 3. Program Loyalitas Pelanggan	1. Preparation of RUPS RKAP Subsidiary 2. Procurement plan report 3. Customer Loyalty Program
2	11 Januari|January 11		
	Hadir|Present: 1. Sofyan Basir 2. Sarwono Sudarto 3. Supangkat Iwan Santoso 4. Syofvi Felienty Roekman 5. Muhamad Ali 6. Wiluyo Kusdwiharto 7. Haryanto WS 8. Amir Rosidin 9. Djoko R Abumanan 10. Machnizon 11. Syamsul Huda 12.Ahmad Rofik Kuorum|Quorum: 100%	1. *Review progress* proyek pembangkit 2. Laporan rencana pengadaan 3. Rencana operasi sistem	1. Review the progress of the power plant project 2. Procurement plan report 3. System operation plan
3	17 Januari|January 17		
	Hadir|Present: 1. Sofyan Basir 2. Sarwono Sudarto 3. Supangkat Iwan Santoso 4. Syofvi Felienty Roekman 5. Muhamad Ali 6. Wiluyo Kusdwiharto 7. Haryanto WS 8. Djoko R Abumanan 9. Machnizon 10. Syamsul Huda 11. Ahmad Rofik Kuorum|Quorum: 92,3%	1. Evaluasi suplai material konstruksi 2. *Review progress* proyek pembangkit 3. *Review* anak usaha 4. Reposisi struktur organisasi	1. Evaluation of construction materials supplies. 2. Review the progress of the power plant project 3. Review of subsidiary companies 4. Reposition the organizational structure

No.	Tanggal Rapat dan Kehadiran Meeting Date and Presence	Agenda Rapat	Meeting Agenda
4	31 Januari|January 31		
	Hadir|Present: 1. Sofyan Basir 2. Sarwono Sudarto 3. Supangkat Iwan Santoso 4. Syofvi Felienty Roekman 5. Muhamad Ali 6. Wiluyo Kusdwiharto 7. Haryanto WS 8. Amir Rosidin 9. Machnizon 10. Syamsul Huda 11. Ahmad Rofik Kuorum|Quorum: 92,3%	1. *Progress* pengadaan proyek pembangkit 2. RUPTL 2019 3. Pengadaan energi primer 4. Pembahasan organisasi	1. Progress on power plant procurement 2. RUPTL 2019 3. Primary energy supply 4. Discussion of the organization
5	1 Februari|February 1		
	Hadir|Present: 1. Sofyan Basir 2. Sarwono Sudarto 3. Supangkat Iwan Santoso 4. Syofvi Felienty Roekman 5. Muhamad Ali 6. Wiluyo Kusdwiharto 7. Haryanto WS 8. Amir Rosidin 9. Machnizon 10. Syamsul Huda 11. Ahmad Rofik Kuorum|Quorum: 92,3%	Pengadaan energi primer	Primary Energy Supplies
6	7 Februari|February 7		
	Hadir|Present: 1. Sofyan Basir 2. Sarwono Sudarto 3. Supangkat Iwan Santoso 4. Syofvi Felienty Roekman 5. Muhamad Ali 6. Wiluyo Kusdwiharto 7. Haryanto WS 8. Amir Rosidin 9. Djoko R Abumanan 10. Machnizon 11. Syamsul Huda 12.Ahmad Rofik Kuorum|Quorum: 100%	1. Pendanaan proyek 2. RUPTL 2019 3. Operasi sistem Jawa Bali 4. Proses Pengadaan Pembangkit EBT 5. Pembahasan SDM	1. Project funding 2. RUPTL 2019 3. Operating the Java-Bali system 4. EBT Generating Process 5. Discussion of HR
7	14 Maret|March 14		
	Hadir|Present: 1. Sofyan Basir 2. Sarwono Sudarto 3. Supangkat Iwan Santoso 4. Syofvi Felienty Roekman 5. Muhamad Ali 6. Wiluyo Kusdwiharto 7. Haryanto WS 8. Amir Rosidin 9. Djoko R Abumanan 10. Machnizon 11. Syamsul Huda 12.Ahmad Rofik Kuorum|Quorum: 100%	1. Perencanaan pembangkit listrik 2. Rencana Forum Bisnis 2019 3. Kehandalan sistem 4. Pembinaan organisasi 5. Pembahasan energi primer 6. Kajian kelayakan proyek 7. Aset properti	1. Power plant planning 2. 2019 Business Forum 3. System reliability 4. Organizational Development 5. Discussion of primary energy 6. Project feasibility study 7. Property assets

No.	Tanggal Rapat dan Kehadiran Meeting Date and Presence	Agenda Rapat	Meeting Agenda
8	9 Mei|May 9		
	Hadir|Present: 1. Sarwono Sudarto 2. Supangkat Iwan Santoso 3. Syofvi Felienty Roekman 4. Wiluyo Kusdwiharto 5. Haryanto WS 6. Amir Rosidin 7. Djoko R Abumanan 8. Machnizon 9. Syamsul Huda 10. Ahmad Rofik Kuorum|Quorum: 76,92%	1. Pengoperasian pembangkit 2. Evaluasi proyek pembangkit listrik 3. Jaringan transmisi Jawa Bali	1. Power plant operation 2. Evaluation of power plant projects 3. Java-Bali transmission network
9	21 Mei|May 21		
	Hadir|Present: 1. Supangkat Iwan Santoso 2. Syofvi Felienty Roekman 3. Wiluyo Kusdwiharto 4. Haryanto WS 5. Amir Rosidin 6. Djoko R Abumanan 7. Ahmad Rofik Kuorum|Quorum: 53,84%	1. Pembahasan anak perusahaan 2. Pembahasan proyek transmisi 3. Pembahasan energi primer	1. Discussion of subsidiaries 2. Discussion of transmission projects 3. Discussion of primary energy
10	28 Mei|May 28		
	Hadir|Present: 1. Sarwono Sudarto 2. Supangkat Iwan Santoso 3. Syofvi Felienty Roekman 4. Muhamad Ali 5. Wiluyo Kusdwiharto 6. Haryanto WS 7. Amir Rosidin 8. Djoko R Abumanan 9. Syamsul Huda 10. Ahmad Rofik Kuorum|Quorum: 76,92%	1. Pembahasan SDM 2. Laporan Keuangan 2018 Audited	1. Discussion of HR 2. 2018 Audited Financial Statements
11	11 Juni|June 11		
	Hadir|Present: 1. Sarwono Sudarto 2. Supangkat Iwan Santoso 3. Syofvi Felienty Roekman 4. Wiluyo Kusdwiharto 5. Haryanto WS 6. Amir Rosidin 7. Djoko R Abumanan 8. Sripeni Inten Cahyani Kuorum|Quorum: 69,23%	Rencana RUPS Laporan Tahunan Anak Perusahaan	Discussion about Annual General Meeting of Shareholders of Subsidiary Company
12	21 Juni|June 21		
	Hadir|Present: 1. Sarwono Sudarto 2. Supangkat Iwan Santoso 3. Syofvi Felienty Roekman 4. Muhamad Ali 5. Wiluyo Kusdwiharto 6. Haryanto WS 7. Machnizon 8. Syamsul Huda 9. Ahmad Rofik 10. Sripeni Inten Cahyani Kuorum|Quorum: 76,92%	Gasifikasi pembangkit	Power plant gasification

No.	Tanggal Rapat dan Kehadiran Meeting Date and Presence	Agenda Rapat	Meeting Agenda
13	2 Juli|July 2		
	Hadir|Present: 1. Djoko R Abumanan 2. Sarwono Sudarto 3. Supangkat Iwan Santoso 4. Syofvi Felienty Roekman 5. Wiluyo Kusdwiharto 6. Haryanto WS 7. Amir Rosidin 8. Syamsul Huda 9. Ahmad Rofik 10. Sripeni Inten Cahyani Kuorum|Quorum: 84,61%	1. Pembangunan dan material jaringan transmisi 2. Kebijakan pembelian listrik EBT	1. Construction and materials of transmission network 2. New renewable electricity purchase policy
14	19 Juli|July 19		
	Hadir|Present: 1. Djoko R Abumanan 2. Sarwono Sudarto 3. Syofvi Felienty Roekman 4. Wiluyo Kusdwiharto 5. Amir Rosidin 6. Syamsul Huda 7. Ahmad Rofik 8. Sripeni Inten Cahyani Kuorum|Quorum: 69,23%	1. Evaluasi anggaran 2. Program sistem kelistrikan Maluku dan Papua 3. Penugasan anak perusahaan 4. Pembahasan tarif 5. Pembahasan aset	1. Budget evaluation 2. Maluku and Papua electricity system program 3. Assignment of a subsidiary company 4. Discussion of rates 5. Discussion of assets
15	6 Agustus|August 6		
	Hadir|Present: 1. Sripeni Inten Cahyani 2. Sarwono Sudarto 3. Supangkat Iwan Santoso 4. Wiluyo Kusdwiharto 5. Haryanto WS 6. Amir Rosidin 7. Ahmad Rofik Kuorum|Quorum: 61,53%	Pembahasan kejadian *blackout* 4 Agustus 2019	Discussion of blackout incident on August 4, 2019
16	20 Agustus|August 20		
	Hadir|Present: 1. Sripeni Inten Cahyani 2. Sarwono Sudarto 3. Supangkat Iwan Santoso 4. Muhamad Ali 5. Wiluyo Kusdwiharto 6. Haryanto WS 7. Amir Rosidin Kuorum|Quorum: 61,53%	1. *Update* kebijakan lingkungan 2. Aset properti 3. kWH meter two ways	1. Update environmental policies 2. Property assets 3. kWH meter two ways
17	29 Agustus|August 29		
	Hadir|Present: 1. Sripeni Inten Cahyani 2. Sarwono Sudarto 3. Supangkat Iwan Santoso 4. Syofvi Felienty Roekman 5. Wiluyo Kusdwiharto 6. Haryanto WS 7. Amir Rosidin 8. Syamsul Huda 9. Ahmad Rofik Kuorum|Quorum: 84,61%	1. Pembahasan ibu kota baru 2. Rencana realokasi investasi 3. Pembahasan energi primer 4. Pembahasan sistem kelistrikan 5. Kesiapan listrik untuk PON 6. Hari pelanggan nasional	1. Discussion of the new capital 2. Investment reallocation plan 3. Discussion of primary energy 4. Discussion of the electrical system 5. Electric readiness for PON 6. National customer day

No.	Tanggal Rapat dan Kehadiran Meeting Date and Presence	Agenda Rapat	Meeting Agenda
18	3 September |September 3		
	Hadir|Present: 1. Sripeni Inten Cahyani 2. Djoko R Abumanan 3. Sarwono Sudarto 4. Supangkat Iwan Santoso 5. Syofvi Felienty Roekman 6. Muhamad Ali 7. Wiluyo Kusdwiharto 8. Haryanto WS 9. Amir Rosidin 10. Syamsul Huda 11. Ahmad Rofik Kuorum|Quorum: 100%	1. LRT Palembang 2. Penundaan proyek pembangkit listrik 3. Progres proyek pembangkit listrik	1. LRT Palembang 2. Penundaan proyek pembangkit listrik 3. Progres proyek pembangkit listrik
19	5 September|September 5		
	Hadir|Present: 1. Sripeni Inten Cahyani 2. Djoko R Abumanan 3. Sarwono Sudarto 4. Supangkat Iwan Santoso 5. Syofvi Felienty Roekman 6. Muhamad Ali 7. Wiluyo Kusdwiharto 8. Haryanto WS 9. Amir Rosidin 10. Syamsul Huda 11. Ahmad Rofik Kuorum|Quorum: 100%	1. Pembahasan nilai kinerja organisasi 2. Pembahasan SDM 3. Pengamanan jaringan transmisi 4. Kebijakan pengadaan barang jasa 5. kWH meter two ways 6. Pembahasan energi primer 7. Spesifikasi material transmisi	1. Discussion of organization performance score 2. Discussion of HR 3. Security of the transmission network 4. Policy on procurement of service goods 5. kWH meter two ways 6. Discussion of primary energy 7. Transmission material specifications
20	11 September|September 11		
	Hadir|Present: 1. Sripeni Inten Cahyani 2. Djoko R Abumanan 3. Sarwono Sudarto 4. Syofvi Felienty Roekman 5. Muhamad Ali 6. Wiluyo Kusdwiharto 7. Haryanto WS 8. Amir Rosidin Kuorum|Quorum: 69,23%	1. Anggaran kas investasi 2. PLTS Terapung Cirata	1. Investment cash budget 2. Cirata Floating Solar Powerplant
21	17 September|September 17		
	Hadir|Present: 1. Sripeni Inten Cahyani 2. Djoko R Abumanan 3. Sarwono Sudarto 4. Supangkat Iwan Santoso 5. Syofvi Felienty Roekman 6. Muhamad Ali 7. Haryanto WS 8. Amir Rosidin 9. Syamsul Huda 10. Ahmad Rofik Kuorum|Quorum: 92,3%	1. Penyelesaian hasil audit 2. Pembahasan RJP	1. Completion of audit findings 2. Discussion on Long-term Plan

No.	Tanggal Rapat dan Kehadiran Meeting Date and Presence	Agenda Rapat	Meeting Agenda
22	1 Oktober|October 1		
	Hadir|Present: 1. Sripeni Inten Cahyani 2. Djoko R Abumanan 3. Sarwono Sudarto 4. Supangkat Iwan Santoso 5. Syofvi Felienty Roekman 6. Muhamad Ali 7. Haryanto WS 8. Amir Rosidin 9. Syamsul Huda 10. Ahmad Rofik Kuorum|Quorum: 92,3%	1. Paparan kajian blackout 2. Pembahasan pengadaan PLTMG 3. Investasi dan perbaikan pola operasi sistem	1. Presentation of the blackout study 2. Discussion on the procurement of PLTMG 3. Investment and improvement of system operating patterns
23	15 Oktober | October 15		
	Hadir | Present: 1. Sripeni Inten Cahyani 2. Djoko R Abumanan 3. Supangkat Iwan Santoso 4. Syofvi Felienty Roekman 5. Muhamad Ali 6. Wiluyo Kusdwiharto 7. Haryanto WS 8. Amir Rosidin 9. Syamsul Huda 10. Ahmad Rofik Kuorum | Quorum: 92,31%	1. Pembahasan Kontrak Kerjasama 2. Pembahasan RKAP 2020 3. Penandatanganan MoU PLTSa 4. Pembahasan Proyek PLTU, Persetujuan hasil Negosiasi dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penyediaan Tenaga Listrik MPP dan Peninjauan Proses Penugasan untuk PPA Internal PLN Group 5. Pembahasan PLTP 6. Pembahasan Meter Two Ways	1. Discussion on Cooperation Contracts 2. Discussion on RKAP 2020 3. Signing of Waste Power Plant MoU 4. Discussion on Coal Power Plant Project, Approval of Negotiation Results and Signing of Cooperation Agreement for MPP Electricity Supply and Review of Assignment Process for PLN Group Internal PPA 5. Discussion of Geothermal Power Plant 6. Discussion of Meter Two Ways
24	22 Oktober | October 22		
	Hadir | Present: 1. Sripeni Inten Cahyani 2. Djoko R Abumanan 3. Sarwono Sudarto 4. Supangkat Iwan Santoso 5. Syofvi Felienty Roekman 6. Muhamad Ali 7. Wiluyo Kusdwiharto 8. Haryanto WS 9. Amir Rosidin 10. Syamsul Huda Kuorum | Quorum: 92,31%	1. Pembahasan Rencana Sewa Lahan 2. Kebijakan Pengamanan Aset Ketenagalistrikan dan Tata Kelola 3. Pembahasan Paket Transmisi 4. Permohonan Persetujuan Setoran Modal PLN ke Anak Perusahaan 5. Pembahasan RKAP 2020 6. Progress Proyek EBT	1. Discussion of Land Lease Plans 2. Electricity Asset Security Policy and SOP Good Governance 3. Discussion on Transmission Packages 4. Application for Approval of PLN's Capital Deposit to a Subsidiary 5. Discussion on RKAP 2020 6. RE Project Progress
25	29 Oktober | October 29		
	Hadir | Present: 1. Sripeni Inten Cahyani 2. Djoko R Abumanan 3. Sarwono Sudarto 4. Supangkat Iwan Santoso 5. Syofvi Felienty Roekman 6. Muhamad Ali 7. Wiluyo Kusdwiharto 8. Haryanto WS 9. Syamsul Huda 10. Ahmad Rofik Kuorum | Quorum: 92,31%	1. Pembahasan Kendaraan Listrik 2. Persetujuan Demand Forecast untuk RUPTL 2020 - 2029 3. Lanjutan Pembahasan Kontrak PLN-KIIC 4. Progress Kontrak dengan Perusahaan Gas 5. Rencana Konversi Pembangkit Listrik Menggunakan	1. Discussion of Electric Vehicles 2. Demand Forecast Approval for RUPTL 2020 - 2029 3. Continuation of PLN-KIIC Contract Discussion 4. Contract Progress with Gas Companies 5. Conversion Plan for Using Power Plants
26	5 November | November 5		
	Hadir | Present: 1. Sripeni Inten Cahyani 2. Djoko R Abumanan 3. Sarwono Sudarto 4. Supangkat Iwan Santoso 5. Syofvi Felienty Roekman 6. Muhamad Ali 7. Wiluyo Kusdwiharto 8. Haryanto WS 9. Amir Rosidin 10. Syamsul Huda 11. Ahmad Rofik Kuorum | Quorum: 100%	1. Pembahasan Standarisasi Pola Operasi pada Transmisi 2. Pembahasan Koordinasi Sistem Operasi dan Telekomunikasi 3. Rencana Implementasi RAS dan Gangguan 4. Mitigasi gangguan kelistrikan 5. Strategi 3T dengan Pembangkit EBT dan Listrik Kerakyatan 6. Kelanjutan Proses Pengadaan PLTMG	1. Discussion on Standardization of Operational Patterns in Transmissions 2. Discussion on Operations and Telecommunications System Coordination 3. RAS Implementation Plan and Disturbances 4. Electricity Mitigation Mitigation 5. 3T Strategy with RE Power Planrts and People Electricity 6. Continuation of the Combine Cycle Procurement Process

No.	Tanggal Rapat dan Kehadiran Meeting Date and Presence	Agenda Rapat	Meeting Agenda
27	19 November | November 19		
	Hadir | Present: 1. Sripeni Inten Cahyani 2. Djoko R Abumanan 3. Sarwono Sudarto 4. Supangkat Iwan Santoso 5. Muhamad Ali 6. Wiluyo Kusdwiharto 7. Haryanto WS 8. Amir Rosidin 9. Syamsul Huda 10. Ahmad Rofik Kuorum | Quorum: 92,31%	1. Pembahasan Sumbang Pikiran untuk Direksi PT PLN (Persero) dari IKPLN Pusat 2. Pembahasan Kelistrikan di Halmahera 3. Tindaklanjut Proyek PLTMG 4. Kelanjutan Penyediaan Pembangkit di Regional Maluku Papua	1. Discussion on Contribution to the Directors of PT PLN (Persero) from the National IKPLN 2. Discussion on Electricity in Halmahera 3. Follow up on the Combine Cycle Project 4. Continuation of power plant provision in the Maluku Papua Region
28	25 November | November 25		
	Hadir | Present: 1. Sripeni Inten Cahyani 2. Djoko R Abumanan 3. Sarwono Sudarto 4. Supangkat Iwan Santoso 5. Muhamad Ali 6. Wiluyo Kusdwiharto 7. Haryanto WS 8. Amir Rosidin 9. Syamsul Huda 10. Ahmad Rofik Kuorum | Quorum: 92,31%	1. Pembahasan Sponsor dan Pemegang Saham (Shareholder), serta Divestasi Saham Mitra 2. Kebijakan Pengadaan EPC Pembangkit Terintegrasi O&M	1. Discussion on Sponsors and Shareholders, and Divestment of Partner's Shares 2. O&M Integrated Power Plant EPC Procurement Policy
29	13 Desember | December 13		
	Hadir | Present: 1. Sripeni Inten Cahyani 2. Djoko R Abumanan 3. Supangkat Iwan Santoso 4. Syofvi Felienty Roekman 5. Muhamad Ali 6. Wiluyo Kusdwiharto 7. Amir Rosidin 8. Syamsul Huda Kuorum | Quorum: 83,33%	1. Pengembangan PLTP	1. Geothermal Development

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris dibantu oleh komite Dewan Komisaris. Dasar penilaian kinerja Direksi adalah *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi/KPI Korporat yang telah ditetapkan bersama-sama dengan Dewan Komisaris pada awal periode kepengurusan. KPI tersebut pada dasarnya adalah besaran kualitatif maupun kuantitatif dari RKAP yang menjadi tujuan penyusunan dan pelaksanaan anggaran kegiatan.

Evaluasi atas pencapaian kinerja Perusahaan dilakukan oleh Satuan Pengendalian Kinerja Korporat. Hasil pencapaian KPI Direksi disampaikan kepada RUPS dimana Direksi dan

PERFORMANCE ASSESSMENT OF BOARD OF DIRECTORS

Performance assessment of the Board of Directors is conducted by the Board of Commissioners assisted by Board of Commissioners committee. Performance assessment of the Board of Directors refers to Key Performance Indicators (KPI) of the Board of Directors/Corporate that are predetermined jointly with Board of Commissioners at the beginning of management period. The KPI are basically qualitative and quantitative measurements in reference to RKAP which is the purpose of the preparation and implementation of the activity budget.

Evaluation of the Company's performance is carried out by Corporate Performance Control Unit. The achievement results of the Board of Directors' KPI are submitted to GMS where Board

Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan raihan kinerja KPI Korporat pada tahun operasional. Dalam pertanggungjawaban tersebut, Direksi harus mampu menjabarkan kaitan raihan KPI dengan kondisi lapangan dan respons operasional yang dijalankan oleh Direksi. Adapun Dewan Komisaris memberi penjelasan dan mempertanggungjawabkan aspek pengawasan dan pemberian nasihat yang telah dilaksanakan selama tahun pelaporan.

Mengacu pada Risalah RUPS PT PLN (Persero) tanggal 7 Januari 2019 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2019, penilaian Tingkat Kesehatan PT PLN (Persero) tahun 2019 meliputi 6 perspektif KPI berbasis Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) sesuai Kontrak Manajemen.

Hasil capaian KPI Direksi secara lengkap adalah sebagai berikut:

of Directors and Board of Commissioners are held accountable for the achievement of Corporate KPI performance in the operational year. In this accountability, Board of Directors must be able to explain the correlation between KPI achievement and the realization and operational responses carried out by Board of Directors. Board of Commissioners explains and held accountable for the aspects of supervision and advisory performed during the operational year.

Referring to Minutes of AGMS of PT PLN (Persero) dated January 7, 2019 concerning Ratification of the Company's 2019 Work Plan and Budget, evaluation of Soundness Level of PT PLN (Persero) in 2019 included 6 KPI perspectives based on Excellent Performance Assessment Criteria (KPKU) in accordance with the Management Contract.

The complete KPI achievements of the Board of Directors are as follows:

No	Perspektif Perspective	Satuan Unit	Bobot Weight	Target Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement	Nilai Score
I	**Fokus Pelanggan** Customer Focus						
1.1	Rasio Elektrifikasi PLN PLN Electrifitation Ratio	%	5	98,57	95,75	97,14%	4,86
1.2	Penjualan Tenaga Listrik Pelanggan Non Subsidi Electricity Sales to Non-subsidy Customers						
a.	Pelanggan Rumah Tangga Household Customers	TWh	4	70,69	70,34	99,50%	3,98
b.	Pelanggan Non Rumah Tangga Non-household Customers	TWh	4	123,10	118,79	3,86	3,86
1.3	Keandalan Jaringan System Reability						
a.	SAIDI (System Average Interruption Duration Index)	menit/plg Min/cust.	3	993	1.136,72	85,53%	2,57
b.	SAIFI (System Average Interruption Frequency Index)	kali/plg times/cust.	4	10,96	11,51	94,98%	3,80
II	**Efektivitas Produk dan Proses** Product and Process Effectiveness						
2.1	Penambahan Kapasitas Infrastruktur Tenaga Listrik Additional Electricity Infrastructure						
a.	Penambahan Kapasitas Pembangkit Additional Power Plant Capacity						
-	Energi Baru Terbarukan New Renewable Energy (NRE)	GW	2	0,28	0,46	100,0%	2,00
-	Non Energi Baru Terbarukan Non NRE	GW	2	2,06	4,23	100,0%	2,00
b.	Penambahan Kapasitas Transmisi Addtitional Transmission Capacity	Kms	2	3.287	6.222,33	100,0%	2,00
c.	Penambahan Kapasitas Gardu Induk Additional Substation Capacity	MVA	1	10.752	17.674,00	100,0%	1,00
2.2	Plant Capacity Utilization Rate Pembangkit PLTU Batu bara PLN PCUR of PLN Coal Fired Power Plant	%	4	67,36	74,33	100,0%	4,00
2.3	Fuel Mix BBM (termasuk Bio) Fuel Mix (included Biofuel)	%	2	4,73	5,02	93,87%	1,88
2.4	Susut Jaringan Network Losses	%	5	9,36	9,32	100,0%	5,00

No	Perspektif Perspective		Satuan Unit	Bobot Weight	Target Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement	Nilai Score
III	**Fokus Tenaga Kerja Employment Focus**							
	3.1	*Human Capital Readiness*	Level	5	4,20	4,31	100,0%	5,00
	3.2	*Organization Capital Readiness*	Level	5	4,20	4,34	100,0%	5,00
	3.3	Produktivitas Pegawai Employee Productivity	MWh/ Pegawai MWh/ employee	5	5.052	5.440,83	100,0%	5,00
IV	**Keuangan dan Pasar Finance and Market**							
	4.1	Biaya Pokok Penyediaan Cost of Supply	Rp/kWh	6	1.480	1.378,97	100,0%	6,00
	4.2	EBITDA Margin	%	5	12,55	22,71	100,0%	5,00
	4.3	*Consolidated Interest Coverage Ratio (CICR)*	kali times	5	2,0	3,11	100,0%	5,00
	4.4	Pencapaian Investasi Investment Realization	%	6	100	93,63	93,63%	5,62
V	**Kepemimpinan dan Tata Kelola Leadership and Governance**							
	5.1	Pencapaian Skor KPKU KPKU Assessment Score	skor score	2	680	671	98,68%	1,97
	5.2	Pencapaian GCG GCG Assessment	Skor score	2	87,5	88,11	100,0%	2,00
	5.3	Pemenuhan Portal BUMN SOEs Portal Compliance	%	2	100	100	100,0%	2,00
	5.4	Penyelesaian Temuan Auditor BPK Completion of BPK Auditor's Findings	%	2	100	100	100,0%	2,00
	5.5	Penyaluran dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Dusbursement of Partnership Program and Community Development Program						
		a. Pembinaan Program Kemitraan Fostering of Partnership Program	Skor score	1	2,0	3,70	100,0%	1,00
		b. Efektivitas Penyaluran Bina Lingkungan Effectivity of Community Development Fund Disbursement	Skor score	1	2,0	4,00	100,0%	1,00
		c. Efektivitas Pelaporan Sustainability Report	Skor score	1	2,0	3,50	100,0%	1,00
	5.6	Optimalisasi Aset Berbasis IT IT Based Asset Optimization						
		a. Pembangunan Sistem Pengukuran Neraca Energi Terpusat Development of a Centralized Energy Balance Measurement System	%	2	100	75	75%	1,5
		b. Implementasi Enterprise Asset Management (EAM) Implementation of EAM	unit unit	1	7	8,00	100,0%	1,00
		c. Implementasi Advanced Metering Infrastructure (AMI) Implementation of AMI	pelanggan customer	1	1.000.000	0,00	0,0%	0,00
VI	**Agen Pembangunan Development Agent**							
	6.1	Sinergi Antar BUMN SOEs Synergy	Rp triliun	4	240	474,52	100,0%	4,00
	6.2	Penugasan Pemerintah Government Assignment						
		a. Desa Berlistrik Electified Village	%	2	95	99,48	100,0%	2,00
		b. *National Capacity Building*	%	2	100	68,96	68,96%	1,38
		c. Penggunaan CPO sebagai Bahan Bakar Pembangkit CPO for Power Plant Fuel	Kontrak contract	2	1	1	100,0%	2,00
Jumlah Nilai Total Score				**100**				**96,41**

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI ANTAR ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM

Anggota Direksi Perusahaan tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara keuangan maupun kekeluargaan antar satu sama lain, serta antara Dewam Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham.

DISCLOSURE OF AFFILIATION AMONG MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS AND/OR SHAREHOLDER

Members of the Company's Board of Directors do not have financial or family affiliations with each other, as well as among Board of Commissioners, Board of Directors and/or Shareholder.

Nama Name	**Hubungan Keluarga Dengan** Family Relationship With						**Hubungan Keuangan Dengan** Financial Relationship With					
	Anggota Dewan Komisaris BOC Members		**Anggota Direksi** BOD Members		**Pemegang Saham** Shareholders		**Anggota Dewan Komisaris** BOC Members		**Anggota Direksi** BOD Members		**Pemegang Saham** Shareholders	
	Ya Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No
Zulkifli Zaini		√		√		√		√		√		√
Darmawan Prasodjo		√		√		√		√		√		√
Sinthya Roesly		√		√		√		√		√		√
Syofvi Felienty Roekman		√		√		√		√		√		√
Sripeni Inten Cahyani		√		√		√		√		√		√
Djoko R. Abumanan		√		√		√		√		√		√
Muhamad Ali		√		√		√		√		√		√
Wiluyo Kusdwiharto		√		√		√		√		√		√
Haryanto WS		√		√		√		√		√		√
Syamsul Huda		√		√		√		√		√		√
Ahmad Rofik		√		√		√		√		√		√

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DIREKSI

Dalam menentukan komposisi Direksi, Pemegang Saham, atas usulan Dewan Komisaris, telah mempertimbangkan aspek keahlian tertentu untuk jabatan dan tugas strategis. Secara garis besar Perusahaan membagi tugas Direksi ke dalam dua bagian besar, yaitu tugas-tugas korporasi yang dilakukan oleh Direktur yang membidangi keuangan, perencanaan, pengadaan, dan sumber daya manusia, dan tugas-tugas operasional yang dilakukan oleh Direktur Bisnis Regional yang terbagi dalam 4 regional, yaitu Bisnis Regional Sumatera, Bisnis Regional Jawa Madura dan Bali, Bisnis Regional Sulawesi dan Kalimantan, dan Bisnis Regional Maluku, Papua dan Nusa Tenggara.

DIVERSITY OF COMPOSITION OF BOARD OF DIRECTORS

In determining composition of Board of Directors, Shareholders, as proposed by Board of Commissioners, have considered certain aspects of expertise for strategic positions and duties. In general, the Company divides Board of Directors duties into two major parts, namely corporate duties carried out by the Directors in charge of finance, planning, procurement and human resources, and operational duties carried out by Directors of Regional Business assigned to 4 regions, namely Sumatra; Java, Madura and Bali; Sulawesi and Kalimantan; and Maluku, Papua and Nusa Tenggara.

Seluruh anggota Direksi yang saat ini menjabat, telah memenuhi komposisi dan keberagaman keahlian kolegial maupun individu yang dipersyaratkan agar kepengurusan Perusahaan berlangsung profesional, efektif, dan akuntabel sehingga dapat menjalankan tugas yang diberikan dengan optimal dan mampu memenuhi harapan para pemangku kepentingan. Keberadaan anggota Direksi yang merupakan pegawai karir dengan pengalaman penugasan yang lengkap di lingkungan PT PLN (Persero) menunjukkan bahwa sistem *talent management* dan pembinaan karir di Perusahaan telah berjalan dengan baik.

All members of Board of Directors on duty have fulfilled the composition and diversity of collegial and individual expertise required so that the management of the Company is performed professionally, effectively and accountably so that the Board of Directors can carry out its duties optimally and is able to meet the stakeholders' expectations. The presence of Board of Directors members who are career employees with extensive assignment experience within PT PLN (Persero) shows that the talent management and career development in the Company is running properly.

Nama Name	**Jenis Kelamin** Gender	**Usia Per 31 Des. 2019** Age as of Dec. 31, 2019 **(tahun** years old**)**	**Pendidikan Terakhir** Education*			**Keahlian** Expertise		
			S1	**S2**	**S3**	**Ekonomi/ Keuangan** Economics/ Finance	**Hukum** Law	**Kelistrikan** Electrical Engineering
Zulkifli Zaini	Laki-laki Male	63		√		√		
Darmawan Prasodjo	Laki-laki Male	49			√	√		
Sinthya Roesly	Perempuan Female	50		√		√		√
Syofvi Felienty Roekman	Perempuan Female	48		√		√		√
Sripeni Inten Cahyani	Perempuan Female	51			√	√		√
Djoko R. Abumanan	Laki-laki Male	59		√				√
Muhamad Ali	Laki-laki Male	58	√				√	
Wiluyo Kusdwiharto	Laki-laki Male	48		√				√
Haryanto WS	Laki-laki Male	60		√				√
Syamsul Huda	Laki-laki Male	52		√				√
Ahmad Rofik	Laki-laki Male	52	√					√

Komite Di Bawah Direksi

Committees Under Board of Directors

KOMITE DIREKSI

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab operasional, Direksi membentuk komite yang beranggotakan para Direktur yang berjumlah 8 komite. Ruang lingkup Komite dan keanggotaannya adalah sebagai berikut:

COMMITTEES OF BOARD OF DIRECTORS

In order to support effectiveness in performing operational duties and responsibilities, PLN established committees under Board of Directors with members of the Board of Directors as members. There are 8 Committees of Board of Directors, with the scope and membership as follows:

Komite Direktur Directors' Committee	**Ruang Lingkup Pembahasan** Scope Of Discussion	**Keanggotaan Direktur** Membership
Komite IPP dan Kerja Sama Kemitraan IPP Committee and Partnership Cooperation	Pembelian tenaga listrik dari IPP, *excess power*, kemitraan dan kerja sama komersial lainnya. Purchase of electricity from IPP, excess power, partnership, and other commercial cooperation.	1. Direktur Utama 2. Direktur Perencanaan Korporat 3. Direktur Pengadaan 4. Direktur Keuangan 5. Direktur Regional terkait 1. President Director 2. Director of Corporate Planning 3. Director of Procurement 4. Director of Finance 5. Director of Related Regions
Komite energi Primer Primary energy committee	Pengadaan gas, batu bara, BBM, uap panas bumi dan air. Purchase of gas, coal, fuel, geothermal, and hydro.	1. Direktur Utama 2. Direktur Perencanaan Korporat 3. Direktur Pengadaan 4. Direktur Keuangan 5. Direktur Regional terkait 1. President Director 2. Director of Corporate Planning 3. Director of Procurement 4. Director of Finance 5. Director of Related Regions
Komite Investasi dan Pendanaan Investment and Financing Committee	Proyek pembangkit baru, pembangkit *existing, repowering, refurbishment* dan konversi. New generation project, existing power plant, repowering, refurbishment, and conversion.	1. Direktur Utama 2. Direktur Perencanaan Korporat 3. Direktur Pengadaan 4. Direktur Keuangan 5. Direktur Regional terkait 1. President Director 2. Director of Corporate Planning 3. Director of Procurement 4. Director of Finance 5. Director of Related Regions
Komite Niaga Commerce Committee	Mekanisme dan aspek komersial transaksi tenaga listrik khusus, tarif tenaga listrik, subsidi serta aspek komersial lainnya. Mechanisms and commercial aspects of electric power special transactions, electric power rates, subsidies, and other commercial aspects	1. Direktur Utama 2. Direktur Perencanaan Korporat 3. Direktur Keuangan 4. Direktur Regional terkait 1. President Director 2. Director of Corporate Planning 3. Director of Finance 4. Director of Related Regions
Komite SDM dan Organisasi HR and Organization Committee	Sistem manajemen SDM, remunerasi, suksesi manajerial unit bisnis dan anak perusahaan/afiliasi, perubahan organisasi, pengembangan/penyederhanaan organisasi. HR system, remuneration, managerial succession at business unit, and subsidiaries/affiliates, organizational change, organizational development/simplification	1. Direktur Utama 2. Direktur Human Capital Management 3. Direktur Keuangan 4. Direktur Regional terkait Direktur 1. President Director 2. Director of Human Capital Management 3. Director of Finance 4. Director of Related Regions

Komite Direktur Directors' Committee	**Ruang Lingkup Pembahasan** Scope Of Discussion	**Keanggotaan Direktur** Membership
Komite Anak Perusahaan dan Afiliasi Subsidiaries and Affiliates Committee	Pembentukan anak perusahaan (AP), akuisisi perusahaan menjadi AP, penyertaan atau pelepasan modal pada AP/afiliasi, penggabungan, pemisahan, peleburan dan pembubaran AP/afiliasi, pembentukan yayasan, pembebanan biaya Perusahaan yang bersifat tetap untuk yayasan/organisasi, perkumpulan. Subsidiaries formation, company acquisitions into subsidiaries, subscription or waiver capital of subsidiaries/affiliates, merger, separation, dissolution, and liquidation of subsidiaries/affiliates, formation of foundation, charging the Company that is fixed to the foundation/society organization.	1. Direktur Utama 2. Direktur Perencanaan Korporat 3. Direktur Human Capital Management 4. Direktur Keuangan 5. Direktur Regional terkait 1. President Director 2. Director of Corporate Planning 3. Director of Human Capital Management 4. Director of Finance 5. Director of Related Regions
Komite Penghapusan dan Pelepasan Aset Committee on the Elimination and Disposal of Assets	Penghapusan ATTB, PRR, piutang macet, persediaan atau material, pelepasan dan penghapusan aktiva tetap (kecuali aktiva beroperasi) dengan umur ekonomis s/d 5 tahun. Elimination of ATTB, PRR, loss account receivable, inventory or materials, discharge and elimination of fixed assets (except operating assets) with economical age up to 5 years.	1. Direktur Utama 2. Direktur Keuangan 3. Direktur Human Capital Management 4. Direktur Regional terkait 1. President Director 2. Director of Finance 3. Director of Human Capital Management 4. Director of Related Regions
Komite Operasional Operating Committee	Sewa pembangkit, transmisi, distribusi, sistem *grid code* dan sistem operasional tenaga listrik Lainnya. Lease of power plant, transmission, distribution, system grid code, and other electricity operating systems.	1. Direktur Utama 2. Direktur Keuangan 3. Direktur Perencanaan Korporat 4. Direktur Regional terkait 1. President Director 2. Director of Finance 3. Director of Corporate Planning 4. Director of Related Regions

Penilaian Kinerja Komite Direksi

Komite Direksi dibentuk sebagai sarana pengambilan keputusan dengan batasan kewenangan pengambilan keputusan yang diatur dalam Keputusan Direksi Nomor: 304.K/DIR/2009 dan perubahannya. Dalam pelaksanaanya, seluruh Keputusan yang diambil dalam Komite Direksi diangkat kembali dalam Rapat Direksi dan menjadi keputusan Rapat Direksi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Direksi memandang bahwa kinerja Komite Direksi telah berjalan dengan efektif. Komite-komite telah menghasilkan kajian yang komprehensif sebagai masukan yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Direksi dalam mengambil keputusan dan kebijakan strategis pengembangan usaha Perusahaan.

Performance Assessment of Committees under Board of Directors

Committees of Board of Directors were established to support decision making within the authority limits stipulated in Board of Directors' Decision No. 304.K/DIR/2009 and its amendments. In its implementation, all Decisions made in the Committees of Board of Directors are further discussed and decided in the Board of Directors Meetings. Based on this consideration, the Board of Directors views that its Committees' performance is effective. The Committees produced comprehensive reviews as consideration for the Board of Directors in making strategic decisions and policies on the Company's business development.

Corporate Secretary

Corporate Secretary

Corporate Secretary merupakan nomenklatur jabatan fungsi Sekretaris Perusahaan di PT PLN (Persero). Tugas utama Corporate Secretary adalah sebagai *liaison officer* yang menjembatani kepentingan Perusahaan dengan pihak eksternal, serta memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Corporate Secretary is a position nomenclature of Corporate Secretary function in PT PLN (Persero). Corporate Secretary mainly serves as a liaison officer who bridges the interests of the Company with external parties and ensures the Company's compliance with the applicable laws and regulations in the capital market.

PROSES PENETAPAN/PEMBERHENTIAN CORPORATE SECRETARY

Corporate Secretary bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Pengangkatan dan pemberhentian Corporate Secretary berdasarkan Keputusan Direksi dengan dasar mekanisme internal yang disetujui oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Proses pengangkatan dan pemberhentian Corporate Secretary digambarkan dalam diagram alir berikut:

APPOINTMENT/DISMISSAL OF CORPORATE SECRETARY

Corporate Secretary reports directly to President Director. Appointment and dismissal of Corporate Secretary is based on Decision of Board of Directors with internal mechanism approved by Board of Commissioners and reported to Financial Services Authority (OJK). Appointment and dismissal mechanism of Corporate Secretary is illustrated in the following flow chart:

Penyampaian usulan pengangkatan/ Pemberhentian *Chief Audit Executive* kepada Dewan Komisaris

Submission of proposals for appointment/dismissal of The Chief Audit Executive to the Board of Commissioners

Persetujuan Dewan Komisaris

Approval of the Board of Commissioners

Penetapan pengangkatan/ pemberhentian melalui Keputusan Direksi.

Determination of Appointment through the Board of Directors' Degree

Menyampaikan laporan mengenai pengangkatan/ pemberhentian Corporate Secretary kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI)

Delivering report on the appointment/ dismissal of Chief Audit Executive to OJK and Bursa Efek Indonesia (BEI)

Profil Corporate Secretary

Corporate Secretary Profile

Adi Setiawan
Corporate Secretary

Usia Age	55 tahun, per 31 Desember 2019	55 years old, as of December 31, 2019
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Riwayat Pendidikan History of Education	Magister Teknik Mesin, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (2009)	Master of Mechanical Engineering, Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Keputusan Direksi No. 0913.K/SDM.00.03/DIR/2019	Board of Directors Decree No. No. 0913.K/SDM.00.03/DIR/2019
Pengalaman Kerja Working Experience	• Kepala Satuan Kinerja dan Pengembangan Sistem Manajemen PT PJB (2018-2019) • Direktur SDM & Administrasi PT PJBS (2012-2018) • Senior Manager Perencanaan SDM & Fasilitas PJB (2011) • Sub Direktorat O&M PT PJBS (2010) • Sub Direktorat Marketing PT PJBS (2007-2010)	• Head of Performance and Management System Development Unit (2018-2019) • Director of HR & Administrative-PT PJBS (2012-2018) • Senior Manager of HR & Facilities Planning – PT PJBS (2011) • O&M Sub Directorate-PT PJBS (2010) • Sub Directorate of Marketing-PT PJBS (2007-2010)
Pendidikan dan Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi Education and Training for Competence Development	• Legal Risk Management, PLN Udiklat Jakarta (12-13 Februari) • Japan Non-deal Roadshow, Jepang (24-28 Juli) • Seminar Nasional GCG PLN Grup, Batam (28-30 Agustus) • Qualified Risk Governance Professional – LSP MKS, Jakarta (24-25 September) • Workshop Asesor KPKU-PLN Udiklat Jakarta (9-10 Oktober) • Workshop Nasional Good Corporate Governance – Pusat Institut Manajemen Nasional, Jakarta (6-7 Februari)	• Legal Risk Management, PLN Udiklat Jakarta (February 12-13) • Japan Non-deal Roadshow, Japan (July 24-28) • PLN Group National Seminar on GCG, Batam (August 28-30) • Qualified Risk Governance Professional-LSP MKS, Jakarta (September 24-25) • KPKU Accessors Workshop-PLN Udiklat Jakarta (October 9-10) • National Workshop on Good Corporate Governance-Central Institute of National Management, Jakarta (February 6-7)

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB CORPORATE SECRETARY

Tugas dan tanggung jawab Corporate Secretary diatur dalam Peraturan Direksi No. 0051.P/DIR/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja sebagai berikut:

1. Memastikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dan strategi hubungan dengan investor, menyediakan informasi pasar modal, dan memastikan Perusahaan memenuhi ketentuan regulasi pasar modal.
2. Memastikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan GCG, memastikan Perusahaan memiliki perangkat dan pedoman GCG serta melakukan pemantauan dan implementasi GCG.
3. Memastikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan kesekretariatan Perusahaan, termasuk di dalamnya protokoler dan integrasi kegiatan

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF CORPORATE SECRETARY

Duties and responsibilities of Corporate Secretary are stipulated in Regulation of Board of Directors No. 0078.P/DIR/2017 concerning Organization and Work Procedures of PT PLN (Persero) as follows:

1. Ensuring planning, implementation and evaluation of policies and strategies in investor relations, capital market information disclosure and the Company's compliance with the capital market regulations.
2. Ensuring planning, implementation and evaluation of policies and strategies in good corporate governance (GCG) management, GCG tools and guidelines, as well as GCG monitoring and implementation.
3. Ensuring planning, implementation and evaluation of policies and strategies in corporate secretarial management, including protocol and integration of activities of

Direksi, Dewan Komisaris, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan pemangku kepentingan lainnya.
4. Memastikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan hubungan kelembagaan, termasuk di dalamnya hubungan dengan lembaga-lembaga negara, dan hubungan dengan pembuat kebijakan ketenagalistrikan.
5. Memastikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi tersedianya informasi Perusahaan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan, melalui tetapi tidak terbatas pada media elektronik, media cetak dan media audio visual.
6. Memastikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi tersedianya informasi dan laporan manajemen, laporan tahunan, statistik Perusahaan, dan laporan Perusahaan lainnya.

PELAKSANAAN TUGAS CORPORATE SECRETARY TAHUN 2019

Selama tahun 2019 Corporate Secretary melaksanakan tugas antara lain sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan RUPS RKAP tahun buku 2019 dan RUPS LPT tahun buku 2018.
2. Melaksanakan dokumentasi risalah RUPS, akta RUPS dan lain-lain berkenaan dengan RUPS.
3. Membuat risalah rapat Direksi dan mendokumentasikannya.
4. Mengkoordinasikan rapat-rapat yang dihadiri oleh Direksi, seperti: Rapat dengan Dewan Komisaris, Rapat Dengar Pendapat dengan DPR, dan lain-lain.
5. Menyusun laporan korporat di antaranya: Laporan Manajemen, Laporan Statistik, Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan.
6. Melaksanakan penilaian GCG periode tahun 2018.
7. Ikut serta dalam ajang Corporate Governance Perception Index.
8. Ikut serta dalam ajang Annual Report Award.
9. Melaksanakan gap analysis SNI ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan ruang lingkup di PT PLN (Persero) Kantor Pusat.
10. Melaksanakan pembahasan pemutakhiran Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*).

Board of Directors, Board of Commissioners, General Meeting of Shareholders (GMS) and other stakeholders.
4. Ensuring planning, implementation and evaluation of policies and strategies in institutional relations, including relations with government institutions and electricity policymakers.
5. Ensuring planning, implementation and evaluation of availability of corporate information that can be accessed by stakeholders, through, but not limited to, electronic, print and audio-visual media.
6. Ensuring planning, implementation and evaluation of availability of management information and reports, annual reports, statistics and other corporate reports.

IMPLEMENTATION OF DUTIES OF CORPORATE SECRETARY IN 2019

During 2019, Corporate Secretary performed the following duties:
1. Organized GMS on RKAP for Financial Year 2019 and GMS on 2018 Accountability.
2. Organized GMS documentation, including minutes of meetings, deeds and so forth.
3. Prepared and documented Minutes of Board of Directors Meetings.
4. Coordinated meetings attended by Board of Directors, such as: Meetings with the Board of Commissioners, Hearings with DPR and so forth.
5. Prepared corporate reports including: Management Reports, Statistics Reports, Annual Report and Sustainability Report.
6. Conducted 2018 GCG assessment.
7. Participated in Corporate Governance Perception Index.
8. Participated in Annual Report Award.
9. Conducted gap analysis of SNI ISO 37001: 2016 Anti-Bribery Management System with scope covering Head Office of PT PLN (Persero).
10. Organized discussion on updating Board Manual.

11. Melaporkan setiap informasi material kepada Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan OJK.
12. Melakukan pengkinian informasi yang ada di dalam situs *web* Perusahaan.
13. Berpartisipasi dalam *non-deal roadshow*.
14. Melakukan korespondensi dengan para pemangku kepentingan dari lembaga keuangan.
15. Menerima kunjungan investor dan analis terkait *update* informasi Perusahaan periode triwulanan.
16. Mengelola hubungan dengan lembaga negara dan pemangku kepentingan lainnya.
17. Mendukung kelancaran tugas Direksi dan Dewan Komisaris dari sisi keprotokolan di lingkungan PLN dan kegiatan kelistrikan strategis PLN (peresmian, peletakan batu pertama, dan peninjauan proyek kelistrikan strategis PLN).

11. Reported any material information to Indonesia Stock Exchange ("IDX") and OJK.
12. Updated information disclosure on the Company's website.
13. Participated in non-deal roadshows.
14. Organized correspondence with financial institutions.
15. Accepted investor and analyst visits regarding quarterly update on corporate information.
16. Manage relationships with government institutions and other stakeholders.
17. Facilitated activities of Board of Directors and Board of Commissioners in terms of protocol in PLN's environment and PLN's strategic electricity activities (launching, commencement and PLN's strategic electricity project visit).

Unit Audit Internal (Satuan Pengawasan Intern)

Internal Audit Unit

Fungsi Audit Internal di PLN dijalankan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI). SPI dipimpin oleh Kepala SPI yang bertanggung jawab untuk memimpin, menyusun rencana, melaksanakan, mengevaluasi, dan melakukan pembinaan fungsi SPI yang tidak terbatas hanya pada fungsi audit internal, audit khusus dan kegiatan konsultasi, tetapi juga dalam rangka pelaksanaan GCG berbasis risiko.

PLN's Internal Audit Function is carried out by Internal Audit Unit (SPI). SPI is led by a Chief Audit Executive who is responsible for leading, planning, implementing, evaluating and conducting training on Internal Audits, including but not limited to internal and special audits and consultation, in order to implementation of risk-based GCG.

PROSES PENETAPAN/PEMBERHENTIAN CHIEF AUDIT EXECUTIVE

Berdasarkan Peraturan Direksi No. 0051.P/DIR/2018, tanggal 6 Juni 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan, nomenklatur jabatan Kepala SPI adalah Chief Audit Executive ("CAE"). CAE diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Setiap pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian CAE diberitahukan kepada OJK. Alur pengangkatan dan pemberhentian CAE digambarkan pada diagram alir berikut:

APPOINTMENT/DISMISSAL OF CHIEF AUDIT EXECUTIVE

According to Regulation of Board of Directors No. 0051.P/DIR/2018, dated June 6, 2018 concerning Organization and Work Procedures of PT PLN (Persero), nomenclature of Head of SPI is Chief Audit Executive. Chief Audit Executive ("CAE") is appointed and dismissed by the President Director, with approval of Board of Commissioners. Every appointment, replacement or dismissal of CAE is reported to Financial Services Authority (OJK). Appointment and dismissal mechanism of CAE is illustrated in the following flow chart:

Penyampaian Usulan Pengangkatan dan Pemberhentian Corporate Secretary oleh Direksi kepada Dewan Komisaris

Submission of proposals for appointment/ dismissal of the Head of the Internal Audit Unit to the Board of Commissioners

Persetujuan Dewan Komisaris

Approval of the Board of Commissioners

Penetapan pengangkatan/ pemberhentian melalui Keputusan Direksi.

Determination of Appointment through the Board of Directors' Degree

Menyampaikan Laporan mengenai Pengangkatan/ Pemberhentian Corporate Secretary kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia

Menyampaikan Laporan mengenai Pengangkatan/ Pemberhentian Corporate Secretary kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia

Profil Chief Audit Executive

Chief Audit Executive Profile

Ali Mudin
Chief Audit Executive

Usia Age	62 tahun, per 31 Desember 2019	62 years old, as of December 31, 2019
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Riwayat Pendidikan History of Education	• Sarjana Hukum, Universitas Padjadjaran • Magister Ekonomi Manajemen, Universitas Padjadjaran	• Bachelor of Law, Padjadjaran University • Master of Economic Management, Padjadjaran University
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	• Keputusan Dewan Komisaris No. 156/DK/PLN/2015-R tanggal 27 Agustus 2015 • Keputusan Direksi No. 1158.K/SDM.00.02/DIR/2015 tanggal 31 Agustus 2015	• Board of Commissioners Decree No. 156/DK/PLN/2015-R dated August 27, 2015 • Board of Directors Decree No. 1158.K/SDM.00.02/DIR/2015 dated August 31, 2015
Pengalaman Kerja Working Experience	• Kepala Audit Bank BRI Kantor Pusat (2008-2015) • Kepala Divisi Logistik Bank BRI Kantor Pusat (2005-2008) • Pemimpin kantor Wilayah Bank BRI Banda Aceh (2004-2005)	• Head of Audit, Bank BRI Head Office (2008-2015) • Head of Logistics, Bank BRI Head Office (2005-2008) • Head of Bank BRI Banda Aceh Regional Office (2004-2005)
Kualifikasi/ Sertifikasi profesi Qualification/ certification of profession	• Sertifikasi Qualified Risk Governance Profesional (QRGP) (2019) • Asesor Kompetensi Manajemen Risiko Perbankan Level IV (2011)	• Qualified Risk Governance Professional (QRGP) (2019) • Banking Risk Management Compentency Assessor Level IV (2011)
Pendidikan dan Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi Education and Training for Competence Development	ECIIA Conference: Embrace, Change and Innovation in Internal Audit yang diselenggarakan oleh Institute of Internal Auditors Luxembourg (2019)	ECIIA Conference: Embrace, Change and Innovation in Internal Audit organized by the Institute of Internal Affairs Auditors Luxembourg (2019)

KEDUDUKAN SPI DALAM STRUKTUR PERUSAHAAN

CAE bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Struktur organisasi SPI berdasarkan Peraturan Direksi No. 0051.P/DIR/2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan adalah sebagai berikut:

SPI POSITION IN ORGANIZATIONAL STRUCTURE

CAE directly reports to the President Director. The organizational structure of SPI refers to Regulation of Board of Directors No. 0051.P/DIR/2018 concerning Organization and Work Procedures of PT PLN (Persero) as follows:

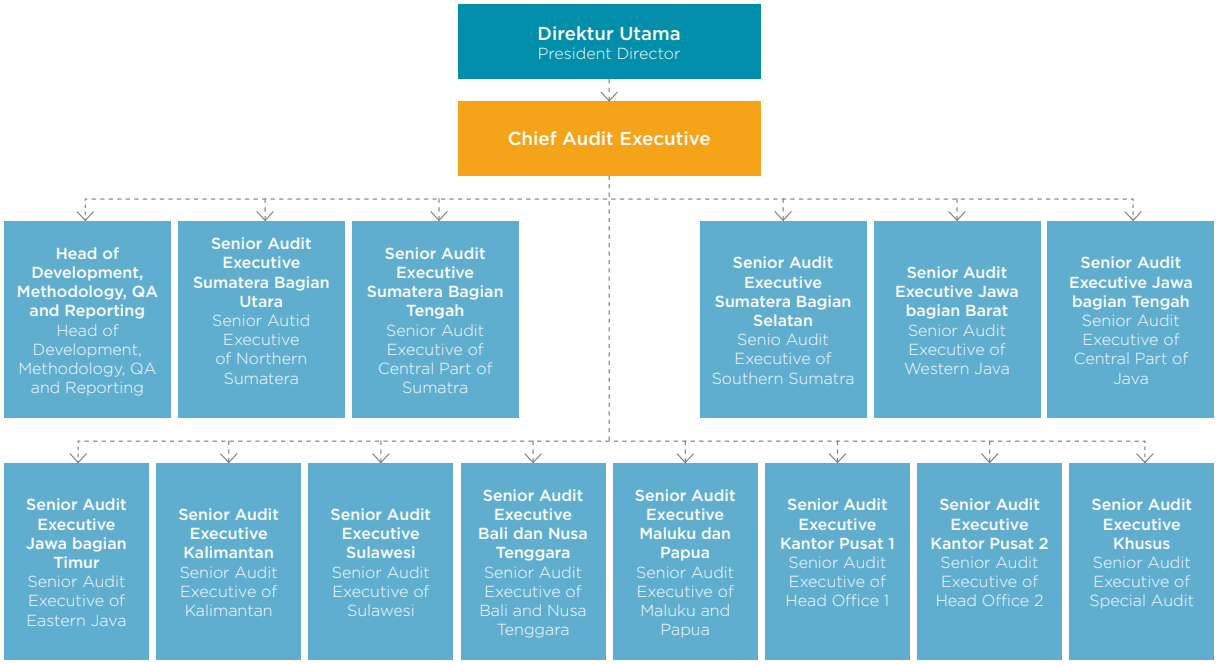

Sampai dengan 31 Desember 2019, jumlah pegawai SPI sebanyak 1.048 orang yang terdiri dari:

As of December 31, 2019, SPI had 1,048 employees consisting of:

Uraian	Jumlah Total	Description
Chief Audit Executive (CAE)	1	Chief Audit Executive (CAE)
Senior Audit Executive (SAE) (di luar Kantor Pusat)	12	Senior Audit Executive (SAE) (outside the Head Office)
Head Of Development Methodology, Quality Assurance, And Reporting (HoD MQAR)	-	Head of Development Methodology, Quality Assurance, And Reporting (HoD MQAR)
Group Head/Head Of Division (di lingkungan Kantor Pusat)	9	Group Head/Head of Division (in the Head office)
Group Head (di luar Kantor Pusat)	30	Group Head (outside the Head Office)
Deputy Group Audit/Manager	126	Deputy Group Head/Manager
Residen Audit	0	Audit Resident
Auditor Senior	76	Senior Auditor
Auditor Fresh Graduate	794	Fresh Graduate Auditor
Jumlah	1.048	Total

SERTIFIKASI PROFESI AUDIT INTERNAL

Per akhir tahun 2019, sebanyak 1.500 pegawai SPI telah memiliki sertifikasi profesi auditor internal dari berbagai lembaga sertifikasi dengan perincian sebagai berikut:

INTERNAL AUDIT PROFESSIONAL CERTIFICATION

At end of 2019, as many as 1,500 SPI employees had obtained professional internal auditor certification from various certification agencies with the following details:

No	Sertifikasi Sertification	Dikeluarkan Oleh Issued by	Jumlah Pemegang Sertifikasi Number of Certification Holder
1	Qualified Internal Audit	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) Jakarta Internal Audit Education Foundation (YPIA) Jakarta	Basic: 1038 Intermediate: 242 Advance (QIA): 193
2	Certified Risk Management Professional (CRMP)	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) Jakarta Risk Management Professional Certification Agency (LSPMR) Jakarta	1
3	Dunamis Certified Human Capital Management (CHCM)	HCMS Alignment Certification	1
4	Certified Hacking Forensic Investigator (CHFI)	INIXINDO Bandung	13
5	Certified Human Resource Professional (CHRP)	Udiklat PLN Jakarta PLN Corporate University Jakarta	3
6	DF 120 – Foundations In Digital Forensic with Encase Forensic	Bounga Solusi Informatika	2
7	Certified Oxygen Forensic Detective Expert User	Bounga Solusi Informatika	3
8	Qualified Risk Governance Professional (QRGP)	LSP MKS (Lembaga Sertifikasi Profesi- Mitra Kalyana Sejahtera)	4
Jumlah Total			**1.500**

PIAGAM PENGAWASAN INTERN

SPI memiliki Piagam Pengawasan Intern yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Piagam Pengawasan Intern dibuat untuk menjelaskan mandat dan kewenangan yang diberikan kepada SPI sebagai landasan tanggung jawab, kewenangan, independensi dan pelaporan kegiatan SPI. Piagam ini tidak membatasi Auditor Internal membuat pertimbangan profesional dan audit yang inovatif. Piagam Pengawasan Intern ditetapkan oleh Direksi dan disetujui Dewan Komisaris dan telah diperbaharui pada tahun 2019.

Piagam Pengawasan Intern dirancang untuk memberikan nilai tambah bagi kegiatan operasi Perusahaan dalam mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan terukur dalam mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas operasi, pengelolaan risiko, pengendalian dan proses tata kelola dengan mengedepankan sikap profesionalisme sesuai dengan prinsip GCG.

INTERNAL AUDIT CHARTER

SPI has an Internal Audit Charter, which serves as guideline for its duties and responsibilities. Internal Audit Charter was compiled to describe the mandate and authority given to SPI and as the basis for responsibility, authority, independence and reporting of SPI activities. This Charter does not limit Internal Auditors from making innovative professional and audit considerations. Internal Audit Charter was issued by Board of Directors and approved by Board of Commissioners and the latest update was in 2019.

Internal Audit Charter is designed to provide value added to the Company's operations in achieving its objectives through a systematic and measurable approach in evaluating and improving operational effectiveness, risk management, control and governance processes by promoting professionalism in accordance with GCG principles.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB CAE

CAE bertanggung jawab untuk memastikan terlaksananya program audit internal dengan tugas pokok:

1. Memastikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan audit internal, standar audit, metodologi audit, sistem dan teknologi informasi audit Perusahaan, termasuk di dalamnya meningkatkan kualitas audit Perusahaan;
2. Memastikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program audit internal yang berbasis risiko di seluruh regional dan unit Perusahaan, termasuk di dalamnya mengevaluasi, memberikan rekomendasi hasil audit internal, dan memonitor tindak lanjut penyelesaiannya;
3. Memastikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program audit khusus (investigasi/ fraud) di seluruh regional dan unit Perusahaan, termasuk di dalamnya mengevaluasi, memberikan rekomendasi hasil audit khusus dan memonitor tindak lanjut penyelesaiannya;
4. Memastikan perencanaan, pembinaan, dan evaluasi pengelolaan audit Perusahaan pada fungsi korporat, bisnis regional dan unit, dalam rangka meminimalkan Risiko dan meningkatkan kualitas pengelolaan Perusahaan dan regional dan unit;
5. Memastikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hubungan kerja dengan auditor eksternal termasuk di dalamnya Badan Pemeriksa Keuangan dan kantor akuntan publik;
6. Memastikan terlaksananya evaluasi dan melakukan koordinasi audit pada anak perusahaan dan usaha patungan dan memberikan rekomendasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF CAE

CAE is responsible for ensuring implementation of internal audits with the following duties:

1. Ensuring planning, implementation and evaluation of policies and strategies in internal audit management, standards, methodology, system and information technology, including improvement of the Company's overall audit quality;
2. Ensuring planning, implementation and evaluation of risk-based internal audit programs in all Regions and Units, including evaluation, provision of internal audit recommendations and monitoring of follow-up actions;
3. Ensuring planning, implementation and evaluation of special (investigation/fraud) audit programs in all Regions and Units, including evaluation, provision of internal audit recommendations and monitoring of follow-up actions;
4. Ensuring planning, implementation and evaluation of the Company's audit management on corporate, regional business and unit functions, in order to minimize risks and to improve management quality of the Company, Regions and Units;
5. Ensuring planning, implementation and evaluation of work relations with external auditors, including the Audit Board and Public Accounting Firm;
6. Ensuring audit evaluation and coordinaton on subsidiaries and joint ventures and provision of recommendations in accordance with the applicable regulations.

KODE ETIK AUDITOR INTERNAL

Integritas
Integrity

Membangun kepercayaan yang menjadi dasar berpijak auditor yang profesional, dengan:
- Melakukan pekerjaan audit internal dengan jujur, produktif, profesional dan bertanggung jawab.
- Mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan Perusahaan yang berlaku.
- Tidak ikut serta dalam kegiatan yang tidak legal atau melakukan kegiatan yang dilarang oleh profesi auditor.
- Menghormati dan berkontribusi pada tujuan hukum dan etika yang ditetapkan PLN.

Objektivitas
Objectivity

Mempraktekkan perilaku obyektif dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas/kegiatan yang sedang diaudit. Auditor internal membuat penilaian secara bebas (independen) dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sendiri atau pendapat orang lain dalam memberikan pendapat profesionalnya, dengan:
- Tidak berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat mempengaruhi penilaian auditor.
- Tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
- Mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya dalam melaksanakan tugasnya dan jika tidak dilaporkan dapat merugikan Perusahaan.

CODE OF ETHICS OF INTERNAL AUDITORS

Kerahasiaan
Confidentiality

- Menghargai nilai dari informasi yang diterima dan kepemilikan informasi serta tidak membocorkan informasi yang diperoleh tanpa mendapat kuasa kecuali demi hukum dan profesi.
- Bijaksana dalam menggunakan dan melindungi informasi yang didapat dalam melakukan pekerjaan, dengan tidak menggunakan informasi yang diperoleh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan sendiri dengan cara yang tidak legal atau tidak sejalan dengan tujuan hukum dan etika di PLN.

Kompetensi
Competency

Menggunakan ketrampilan, pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dimiliki dalam melaksanakan audit.

Hanya melakukan audit pada obyek audit yang sesuai dengan ketrampilan, pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dimiliki dalam melaksanakan audit, dengan:
- Melaksanakan audit sesuai dengan Piagam dan Pedoman Audit Intern PLN yang sejalan dengan Standar Profesi Auditor Internal.
- Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan profesional berkelanjutan untuk tujuan peningkatan kualitas dan efisiensi kerja.

Building trust as the basis of professional auditors, by:
- Performing internal audit with honesty, productivity, professionalism, and responsibility.
- Complying with applicable internal laws and the Company's regulations.
- Not participating in any unauthorized activity or conducting activities that are prohibited by the Auditor's profession.
- Respecting and contributing to the legal and ethical goals set by PLN.

Practicing objective behavior in collecting, evaluating, and communicating information about the audited activities. The internal auditor makes the judgment freely (independently) and is not affected by the personal interest or opinion of others in providing his/her professional opinion, by:
- Not participating in activities that may affect the Auditor's judgment.
- Not accepting anything in any form that may affect his/her professional judgment.
- Disclosing all the important facts in carrying out his/her duties, which, if not reported may cause harm to the Company.

- Appreciating the value of the information received and the ownership of information and not divulging information obtained without power unless it is for the sake of law and profession.
- Being wise in using and protecting information obtained in his/her work, by not using the information obtained in performing its duties for his/her own sake in a way that is not legal or inconsistent with the legal and ethical purposes of PLN.

Using the skills, knowledge, expertise, and experience owned in performing the audit.

Auditing the audit object in accordance with the skills, knowledge, expertise, and experience owned in performing the audit, by:
- Performing audit in line with the PLN's Internal Audit Guidelines and Charter, in accordance w the Internal Auditor Profession Standard.
- Increasing competence through continuous professional education for the purpose of improving the quality and work efficiency.

PELAKSANAAN TUGAS SPI TAHUN 2019

Pada tahun 2019, SPI telah melaksanakan pemeriksaan/audit yang meliputi:

1. Pemeriksaan operasional dan audit pendalaman atas hasil pemeriksaan operasional.
2. Pemeriksaan khusus *whistleblowing system* (WBS).
3. Pemeriksaan penugasan khusus dan penugasan lainnya dari Dewan Komisaris, Direksi, divisi/satuan, dan unit induk/ pelaksana.
4. Melaksanakan pemeriksaan penghapusan ATTB, Uji Petik PRR dan pemeriksaan/ verifikasi status *mothballed* dan *retired* unit Pembangkit memenuhi permintaan unit.
5. Memberikan layanan konsultasi bagi manajemen.
6. Melaksanakan kegiatan *quality assurance* fungsi SPI.

Metode audit yang dilakukan sejak tahun 2015 adalah audit berbasis risiko (*risk-based internal audit*). Di tahun 2019, SPI mengembangkan jumlah *audit universe* menjadi 491 *auditee* yang terdiri dari 43 direktorat/satuan Kantor Pusat, 56 unit induk, 19 anak perusahaan dan 373 unit pelaksana yang ditangani oleh 12 Inspektorat Audit, 1 Inspektorat Audit Khusus, 24 Group Head Bidang Audit, 1 Group Head Audit Khusus dan 1 Group Head TI. Jumlah *audit universe* mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

IMPLEMENTATION OF SPI DUTIES IN 2019

In 2019, SPI conducted the following audits:

1. Operational audits and in-depth audits on operational results.
2. Special audits on Whistleblowing System (WBS).
3. Special audit and other assignments from Board of Commissioners, Board of Directors, Divisions/Units and Parent/Implementing Units.
4. Performed sample test for ATTB and PRR write-offs and audit/verification of status of mothballed and retired power plants as requested by units.
5. Provided consultancy services to Management.
6. Performed SPI quality assurance.

Since 2015, a risk-based internal audit method has been used. In 2019, SPI developed an audit universe of 491 auditees, consisting of 43 directorates/units of Head Office, 56 parent units, 19 subsidiaries and 373 executive units within the authority of 12 Audit Inspectorates, 1 Special Audit Inspectorate, 24 Audit Group Heads, 1 Special Audit Group Head and 1 IT Group Head. The breadth of the audit universe has been increasing from year to year.

No.	Audit Universe	2017	2018	2019
1	Direktorat/Satuan Directorate/Unit	18	35	41
2	Unit Induk Parent Unit	55	56	56
3	Unit Pelaksana Business Unit	328	359	373
4	Anak Perusahaan Subsidiaries	9	18	19
Jumlah Total		**410**	**468**	**491**

Pada tahun 2019, Rencana Pemeriksaan Operasional (RPO) meningkat sebesar 1,7% bila dibandingkan dengan tahun 2018 yang terdiri dari: pemeriksaan operasional sebanyak 41 kali di direktorat/satuan PLN Pusat, 62 kali di unit induk, 361 kali di unit pelaksana dan 18 kali di anak perusahaan.

In 2019, the Company increased its Operational Audit Plan (RPO) by 1.7% compared to 2018 consisting of: 41 operational audits on Directorates/Units in PLN Head Office, 62 in parent units, 361 in executive units and 18 in subsidiaries.

Pemeriksaan Operasional

Realisasi pemeriksaan tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018, yaitu pemeriksaan operasional meningkat 1,7%, audit *Whistleblowing System* (WBS) meningkat 340% dan layanan konsultasi meningkat 502% seperti diperlihatkan pada tabel berikut:

Operational Audit

Realization of audits in 2018 improved compared to 2018, operational audits increased by 1.7%, whistleblowing system (WBS) audits increased by 340%, and consulting services increased by 502%, as shown in the following table:

No.	Uraian Description	Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Audit Plan and Realization of Audit								
		2017			2018			2019		
		Target	Realisasi Realization		Target	Realisasi Realization		Target	Realisasi Realization	
			Jumlah Total	%		Jumlah Total	%		Jumlah Total	%
1	Pemeriksaan Operasional Operational Audit	413	434	105,08	474	474	100	482	482	100,00
2	Audit Khusus Special Audit	70	70	100	40	64	160	40	42	105,00
3	Uji Petik ATTB/PRR ATTB/PRR Sampling Tests	-	89		-	66	-	88	47	53,41
4	Audit *Whistle Blowing System* (WBS)	-	27		-	42	-	50	185	370,00
5	Pemeriksaan Penugasan Khusus & Penugasan Lainnya dari Dekom, Direksi, Divisi/Satuan dan Unit Induk/Pelaksana Special Audit Assignment and Other Assignments from Board of Commissioners, Directors, Divisions/Units, and Parent/Business Units.	-	378		-	204	-	69	146	211,59
6	Layanan Konsultasi Consultancy Services	-	10		-	126		671	759	113,11
Jumlah Total		**483**	**1.008**		**563**	**979**		**1.400**	**1.661**	

Akuntan Publik

Public Accountant

Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 29 Mei 2019, Perusahaan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, anggota jaringan RSM untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan tahun buku 2019 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan tahun buku 2019. Nilai jasa audit tahun 2019 adalah sebesar Rp14,85 miliar.

Based on Annual GMS decision dated May 29, 2019, the Company appointed Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners, a member of RSM network, to audit Consolidated Financial Statements for financial year 2019 and Financial Statements of Partnership and Community Development Program for financial year2019. Audit fees in 2019 amounted to Rp14.85 billion.

Informasi Akuntan Publik Perusahaan

Information of the Company's Public Accountant

Nama Name	KAP RSM Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (KAP RSM AAJ)
Alamat Address	Plaza Asia Lantai 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta 12190

Jasa yang Diberikan | Services	**Biaya** | Fees
Audit Umum atas Laporan Keuangan General Audit of Financial Statements	Rp12,16 miliar | billion
Audit atas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Audit on Partnership and Community Development Programs (PKBL)	Rp145,04 juta | million
Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern Compliance Audit with the Laws and Regulations and Internal Control	Rp581,89 juta | million
Review atas Laporan Evaluasi Kinerja Review on Performance Evaluation Report	Rp288,57 juta | million
Review atas Laporan KPI per Direktorat Review on Directorate KPI Report	Rp 274,99 juta | million
Atestasi atas Laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian Attest the Activity Report on the Application of Prudential Principles	Rp75,54 juta | million
Audit atas Pekerjaan dalam Pelaksanaan Work-in-progress Audit	Rp188,82 juta | million
Audit atas Project Financial Statement Audit on Project Financial Statements	Rp490,42 juta | million
Audit atas Financial Covenant Ratio Audit on Financial Covenant Ratio	Rp553,27 juta | million
Atestasi atas perhitungan Consolidated Interest Coverage Ratio (CICR) Attest the calculation of Consolidated Interest Coverage Ratio (CICR)	Rp48,66 juta | million
Audit atas Laporan Portofolio Investasi dan Hasil Dana Pensiun PLN Audit on the Investment Portfolio Report and PLN Pension Fund Results	Rp38,69 juta | million
Total	**Rp14,85 miliar | billion**
Periode | Period	**2019**

Jumlah Periode Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Dalam Melakukan Audit Laporan Keuangan Tahunan.

Periods of Public Accountant and Public Accounting Firms (KAP) in Conducting Annual Financial Statements Audit.

Data mengenai kantor akuntan publik dan akuntan publik yang mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan dalam 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Data regarding public accounting firms and public accountants that audited the Company's Financial Statements in the last 5 years are as follows:

Tahun Buku Fiscal Year	**Kantor Akuntan Publik** Public Accountant Firm	**Akuntan Publik** Public Accountant
2019	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (KAP RSM AAJ)	Dedy Sukrisnadi
2018	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (KAP RSM AAJ)	Saptoto Agustomo
2017	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (KAP RSM AAJ)	Saptoto Agustomo
2016	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (KAP RSM AAJ)	Saptoto Agustomo
2015	Tanudiredja, Wibisana & Rekan (Pricewaterhousecoopers Indonesia)	Haryanto Sahari

Manajemen Risiko

Risk Management

KEBIJAKAN

Kebijakan penerapan manajemen risiko diatur dalam Keputusan Direksi No. 537.K/DIR/2010 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Direksi No. 0117.P/DIR/2019. Pembaruan kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu Perusahaan dalam mengantisipasi perubahan dan perkembangan lingkungan internal dan eksternal.

POLICY

Risk management policy is stipulated in Decision of Board of Directors No. 537.K/DIR/2010 which was amended by Decision of Board of Directors No. 0355.K/DIR/2014. The amended policy is expected to support the Company in anticipating changes and development in internal and external environments.

Kebijakan Pengelolaan Risiko

Risk Management Policies

SASARAN
Objectives

INTERNAL → ← **EKSTERNAL**

RISK MANAGEMENT
MANAJEMEN RISIKO
Korporat, Anak Perusahaan, Unit
Corporate, Subsidiaries, Units
GO or NOT

Fungsi Risk Based Analysis (RBA) SPI
Internal Auditor's RBA Function

INTERNAL

- **Meningkatnya *uncertainty* di lingkungan perusahaan**
- **Permasalahan, kegagalan dan hambatan program strategis PLN**
- **Tantangan dan tuntutan yang dihadapi perusahaan ke depan semakin tinggi**

- Increased uncertainty in the company's environment
- Issues, failures and obstacles of PLN strategic program
- Increasing challenges and demands encountered by the company in the future

EXTERNAL

- **PERMEN BUMN No.PER-01/ MBU/2011 tentang GCG**
- **Board Manual 2013**
- **PERDIR No.0117.P/DIR/2019 tentang Pedoman Umum penerapan Manajemen Risiko di PLN**
- **ISO31000:2018**
- **COSO ERM 2004**

- PERMEN BUMN No.PER-01/ MBU/2011 on GCG
- Board Manual 2013
- BOD Regulation No. 0117.P/ DIR/2019 on the Guidance of ERM Implementation on PLN
- ISO31000:2018
- COSO ERM 2004

SISTEM MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

Perusahaan mengembangkan sistem manajemen risiko berbasis web, yang disebut dengan eRMAP, yang digunakan untuk pemantauan serta update status pengelolaan risiko dan juga sebagai media pelaporan untuk Direksi dalam bentuk *dashboard executive summary* secara *real time*.

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT SYSTEM

The Company developed web-based risk management system, called eRMAP, which is used to monitor and update the status of risk management and also as to report the results to Board of Directors through dashboard executive summary in real time.

Sasaran Penerapan eRMAP

eRMAP Implementation Target

- **Menumbuhkan budaya manajemen risiko (preventif) dalam setiap pengelolaan Perusahaan**
  Growing a culture of risk management (preventive) in the Company's management
- **Memastikan setiap pemilik risiko dalam Perusahaan mampu mengelola risikonya secara efektif dan efisien**
  Ensuring that each risk owner in the Company is able to manage the risks effectively and efficiently
- **Meningkatkan keterpaduan dalam pengelolaan risiko dalam pencapaian visi, misi dan rencana strategis Perusahaan (jangka panjang maupun pendek)**
  Increasing integration in risk management in achieving the Company's vision, mission, and strategic plan (long-term and short-term)
- **Mendorong perbaikan (*improvement*) segenap proses bisnis dengan mengintegrasikan (*embedding*) manajemen risiko ke dalam proses bisnis tersebut**
  Encouraging the improvement of all business processes by integrating (embedding) risk management into the business process
- **Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan**
  Improving decision-making quality

Aplikasi eRMAP berbasis *web based client server* yang aman untuk menyimpan basis data risiko dan mitigasi. Aplikasi ini dapat memantau dan melaporkan pelaksanaan mitigasi risiko dari divisi/satuan dan unit per triwulan dan semester. Dalam eRMAP terdapat fungsi *risk analytics* yang memanfaatkan basis data risiko yang ada untuk pengambilan keputusan manajemen (*Decision Support System*-DSS).

eRMAP application is a secure web based client server to store risk and mitigation database. This application is able to monitor and report risk mitigation of divisions/units every quarter and semester. In eRMAP, there is risk analytics function utilizing the existing risk database for management decision making (Decision Support System-DSS).

Fitur eRMAP

eRMAP Feature

Menampilkan *dashboard* yang terintegrasi untuk memonitor risiko di seluruh lingkungan perusahaan
Displaying an integrated dashboard to monitor risk throughout the Company's environment

Sebagai alat untuk mengidentifikasi dan memonitor progres pengelolaan risiko perusahaan, menilai tingkat efektivitas kontrol, progres mitigasi risiko dan *Key Risk Indicator*
As a tool to identify and monitor the progress of the COmpany's risk management, assess effectivity of control, risk mitigation progress and Key Risk Indicators
Mengintegrasikan kinerja perusahaan dengan manajemen risiko
Integrating Company's performance with risk managemen

Meningkatkan keterpaduan dalam pengelolaan risiko dalam pencapaian visi, misi dan rencana strategis Perusahaan (jangka panjang maupun pendek)
Increasing integration in risk management in achieving the Company's vision, mission and strategic plan (long-term and short-term)

Mendorong perbaikan (*improvement*) segenap proses bisnis dengan mengintegrasikan (*embedding*) manajemen risiko ke dalam proses bisnis tersebut
Encouraging the improvement of all business processes by integrating (embedding) risk management into the business process

Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan
Improving decision-making quality

RISIKO-RISIKO UTAMA PERUSAHAAN

Divisi Risk Management secara berkala melakukan evaluasi efektivitas sistem manajemen risiko korporat dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Direksi. Profil risiko tersebut meliputi laporan pengelolaan risiko strategis, keuangan, operasional dan proyek, serta penilaian atas perbaikan kontrol dan upaya penanganan risiko.

Risiko-risiko utama PLN pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

KEY RISKS

Risk Management Division periodically evaluates effectiveness of corporate risk management system and submits risk profile report to Board of Directors. The risk profile includes strategic, financial, operational, project and compliance risk reports, as well as assessments of internal control and risk mitigation improvements.

PLN's 2019 key risks were as follows:

No.	Tipe Risiko Risk Type	Risiko Utama Major Risk	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
1	Pelaksanaan Proyek Project Construction	Keterlambatan penyelesaian proyek ketenagalistrikan Delay in completion of electricity projects	1. Menyusun prioritas proyek skala nasional dan daerah dengan mempertimbangkan dampak proyek dalam menurunkan biaya pokok produksi, menurunkan susut transmisi, meningkatkan peluang penjualan, memperbaiki keandalan sistem, serta proyek penyaluran yang terkait dengan evakuasi daya proyek pembangkit tertentu. 2. Melakukan pemantauan melalui aplikasi proyek secara berkala. 3. Menyusun dan memperbarui Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Meningkatkan jumlah SDM pelaksana proyek dari eksternal melalui kerja sama pelatihan dengan PLN Udiklat dan Balai Latihan Kerja. 5. Memastikan ketersediaan bahan bakar untuk pembangkit baru sebelum dilakukan komisioning. 1. Arranging national and regional scale project priorities by considering the impact of project in reducing production cost, reducing transmission losses, increasing sales opportunities, improving system reliability and projects related to power evacuation from certain power plant project. 2. Monitoring periodically through project applications. 3. Compiling and updating the List of Selected Providets (DPT) in accordance with applicable regulations. 4. Increasing the number of project officers from external through collaboration with PLN Udiklat and Vocational Training Centers. 5. Ensuring the availability of fuel for new power plants befor commissioning.

No.	Tipe Risiko Risk Type	Risiko Utama Major Risk	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
2	Harga energi primer	Kenaikan biaya bahan bakar utama	1. Zonasi penyediaan batu bara sesuai rute terdekat, optimasi alat angkut, Pembangunan *Coal Processing Plant*/CPP 2. Mengembangkan teknologi pengering batu bara (*Coal Upgrading*) 3. Berkoordinasi dengan pemerintah tentang pengamanan DMO (*Domestic Marketing Obligation*) Batu bara 4. Optimalisasi spesifikasi batu bara untuk PLTU 5. *Clustering* penyediaan gas
	Primary energy price	Increase in primary power plant fuel cost	1. Zoning coal supply zoning according to closest route, optimizing transport equipment, construction of Coal Processing Plant/CPP. 2. Developing coal upgrading technology. 3. Coordinating with the government to securing DMO of coal. 4. Optimizing coal specifications for Coal-fired Power Plant (CFPP). 5. Clustering gas supply.
3	Energi Primer	Hambatan pada Pasokan Bahan Bakar Utama	1. Optimalisasi pengelolaan stok batu bara. 2. Optimalisasi infrastruktur *unloading facilities* PLTU yang ada dan PLTU baru. 3. Melakukan pemantauan perjanjian jual beli gas yang ada dan amandemen perpanjangan apabila diperlukan. 4. Pengembangan infrastruktur LNG dan CNG untuk pembangkit listrik berbahan bakar gas 5. Pembelian *spot* LNG untuk pengamanan pasokan jika diperlukan 6. Mempersiapkan alternatif suplai bahan bakar lain apabila terjadi kekurangan pasokan gas
	Power Plant Fuel (Primary Energy)	Obstacle in primary fuel supply	1. Optimizing coal stock management. 2. Optimizing infrastructure of unloading facilities for existing CFPP and new CFPP. 3. Monitoring existing gas sales and purchase agreement and amendment to extension if necessary. 4. Developing LNG and CNG infrastructure for Gas-fired Power Plants. 5. Purchasing LNG spot to secure supply if needed. 6. Preparing alternative fuel supply if there is a shortage of gas supply.
4	Aspek Legal	Regulasi Ketenagalistrikan kurang Mendukung Bisnis Perusahaan	1. Program pengadministrasian dan pendokumentasian regulasi eksternal dan internal terkait bisnis Perusahaan. 2. Program penyelarasan pemahaman regulasi eksternal terkait bisnis Perusahaan. 3. Pendampingan penyusunan regulasi dengan regulator guna menghindari disharmonisasi regulasi. 4. Peningkatan manajemen pemangku Kepentingan. 5. Peningkatan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum melalui pembuatan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berhubungan dengan proses ketenagalistrikan.
	Legal Risk	Elektricity Regulations Lacking Support for PLN Business	1. Program of administration and documentation of external and internal regulations related to the Company's business. 2. Alignment program for understanding external regulations related to the Company's business. 3. Assistance the preparation of regulations with regulators to avoid disharmony regulation. 4. Improving stakeholders management. 5. Increasing coordination with Law Enforcement Officers through the establishment of Memorandum of Understanding and Cooperation Agreements (PKS) relating to the electricity process.
5	Aspek Legal	Kecelakaan Kerja	1. Implementasi *Contractor Safety Management System* (CSMS). 2. Menunjuk Pengawas Pekerjaan yang berkompeten dan diberi kewenangan untuk menghentikan pekerjaan apabila kondisi yang tidak memenuhi kaidah K3. 3. Memastikan seluruh instalasi ketenagalistrikan dalam kondisi aman 4. Memastikan SOP tersedia dan dipahami oleh pekerja. 5. Memastikan alat kerja dan APD tersedia dan digunakan oleh pekerja. 6. Melakukan mitigasi potensi bahaya kebakaran dan inspeksi alat proteksi kebakaran di seluruh instalasi gudang, gedung, instalasi pembangkit dan instalasi ketenagalistrikan. 7. Mengembangkan budaya *safety* dan pengukuran faktor *higiene*.

No.	Tipe Risiko Risk Type	Risiko Utama Major Risk	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
	Legal Risk	Work Accident	1. Implementation of Contractor Safety Management System (CSMS) 2. Appointing certified project supervisors and give authority to stop work when safety rules are not met. 3. Ensuring that all electricity installations are safe. 4. Ensuring that standard operating procedures are available and understood by workers 5. Ensuring that work tools and personal protective equipment are available and used by workers. 6. Mitigating potential fire hazard and inspecting fire protection equipment in all warehouse, buildings, power plant, and other electricity installations. 7. Developing safety culture and measuring of Hygiene factor.
6	Pembangkitan	Performa pembangkitan tenaga listrik tidak sesuai target	1. Memastikan pasokan bahan bakar beserta kesiapan fasilitas dan perangkat pendukungnya. 2. Membuat laboratorium pengujian kualitas batu bara di PLTU sesuai standar dan tersertifikasi. 3. Menyusun *roadmap* untuk mengoptimalkan *net plant heat rate* (NPHR). 4. Melaksanakan pemeliharaan pembangkit sesuai *manual book*. 5. Melakukan *reverse engineering* untuk *spare part* yang sulit didapatkan.
	Power Generation	Power plant performance below target	1. Ensuring fuel supply and the readiness of facilities and supporting devices. 2. Creating a certified coal quality testing laboratory at CFPP site in accordance with the standards. 3. Developing roadmap to optimize net plant heat rate (NPHR). 4. Implementing power plant maintenance according to manual book. 5. Performing reverse engineering for spare parts that are difficult to obtain.
7	Penyaluran	Performa sistem penyaluran tenaga listrik di bawah target	1. Menyediakan suku cadang trafo dan material strategis lainnya. 2. Meningkatkan keandalan transmisi dengan melaksanakan program rekonduktoring dan penggantian SKTT, penggantian trafo dan material transmisi utama berdasarkan hasil asesmen, dan memperbaiki tegangan *drop* dengan kapasitor. 3. Rekonfigurasi sistem transmisi, gardu induk, dan gardu distribusi sehingga memenuhi persyaratan N-1. 4. Rekonfigurasi penyulang tegangan menengah sehingga bila terjadi gangguan dapat dimanuver dari sumber lain (*zero down time*). 5. Pemeliharaan transmisi dan distribusi sesuai ketentuan yang berlaku. 6. Melaksanakan program penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) untuk memitigasi pencurian listrik.
	Power Transmission	Power transmission and distribution system performance below target	1. Providing transformer spare parts and other critical material for backup. 2. Improving transmission reliability by reconductoring programs and replacing HV transmission line, replacing transformers and main transmission materials based on assessment results, and improving voltage drops with capacitors. 3. Reconfiguring transmission, substation, and distribution system to meet N+1 requirements. 4. Reconfiguring medium voltage feeder so that if interference occurs, it can be maneuvered from another source (zero down time). 5. Maintenance of transmission and Distribution system in accordance to applicable regulations. 6. Implementing electricity control (P2TL) to mitigate electricity theft.
8	Teknologi	Terganggunya sistem pelayanan pelanggan terpusat	1. Implementasi sistem keamanan TI seperti prosedur pengamanan komputer, *firewall*, dan antivirus. 2. Memastikan keandalan jaringan komunikasi TI sesuai *service level agreement* (SLA). 3. Memastikan kecukupan pasokan daya pada *server* dan *data center* 4. Memastikan kapabilitas SDM IT melalui pelatihan pengembangan IT dan keamanan IT. 5. Memastikan pemulihan sistem berjalan dengan baik.
	Technological Risk	Disruption in centralized customer service system	1. Implementing IT security systems such as computer security procedures, firewalls, and antivirus. 2. Ensuring the reliability of IT communication network according to the service level agreement (SLA). 3. Ensuring the adequacy of power supply on the server and data center. 4. Ensuring the capabilities of IT human resources through training in IT development and security. 5. Ensuring system recovery goes well.

No.	Tipe Risiko Risk Type	Risiko Utama Major Risk	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
9	Pasar	Kenaikan nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah	1. Implementasi kewajiban penggunaan Rupiah pada kontrak valuta asing sesuai UU Mata Uang dan Peraturan Direksi PLN terkait kewajiban penggunaan Rupiah. 2. Melaksanakan pembelian valuta asing secara bertahap. 3. Melakukan pinjaman dalam bentuk *multi currency*. 4. Mengurangi penggunaan valuta asing untuk proyek melalui penjadwalan ulang proyek-proyek yang tidak menjadi prioritas. 5. Meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam kegiatan operasi dan investasi. 6. Memonitor pergerakan harga atau kurs di pasar dengan mempertimbangkan faktor teknis dan fundamental secara harian.
	Market Risk	Increase in foreign exchange rates against Rupiah	1. Implementing the obligation to use Rupiah in foreign currency contracts in accordance with the Foreign Currency Law and PLN Board of Directors' Regulation. 2. Purchasing foreign exchange gradually. 3. Performing multi-currency loans. 4. Reducing foreign exchange projects through rescheduling of low proiority projects. 5. Increasing the level of domestic components (TKDN) in operation and investment activities. 6. Monitoring exchange rate price movements in the market by considering technical and fundamental factors on a daily basis.
10	SDM	Kapasitas dan kapabilitas SDM tidak terpenuhi	1. Merumuskan *grand design human capital* yang disesuaikan dengan perubahan kondisi dan isu yang terkini. 2. Memastikan perencanaan tenaga kerja yang lebih optimal dan mempertimbangkan segala aspek dan variabel yang komprehensif. 3. Melakukan tinjauan dan analisis efektivitas terhadap perubahan dan pengembangan struktur organisasi yang ada. 4. Menyiapkan dan menyelaraskan sistem human capital management dalam rangkaian sinergi *platform* di *holding* dan anak perusahaan dengan membuat tahapan implementasi terkait kesiapan anak perusahaan. 5. Pengembangan sistem manajemen kinerja pegawai yang integrasi dengan sistem manajemen operasi dan Pengembangan *Integrated Productivity Measure*.
	Human Capital	Employee capacity and capability below standard	1. Formulating human capital grand design that is adaptable to the changing conditions and current issues. 2. Ensuring more optimal workforce planning by considering comprehensive aspects and variables. 3. Reviewing and analyzing the effectiveness of changes and the development of existing organizational structures. 4. Preparing and harmonizing human capital management system in a series of platform synergies in holding and subsidiaries by making implementation stages related to the readiness of subsidiaries. 5. Developing employee performance management systems integrated with operation management system and Development of Integrated Productivity Measures.

REVIEW EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Penilaian tingkat kematangan sistem manajemen risiko pada Perusahaan bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dari implementasi manajemen risiko secara berkesinambungan pada suatu waktu tertentu dan berdasarkan metodologi yang disusun dan disepakati bersama. Hasil rata-rata nilai kematangan manajemen risiko dari seluruh unit induk pada semester II tahun 2019 adalah 2,35 dari skala 5. Nilai yang berada di level 2 menunjukkan makna *repeatable* yang menandakan bahwa kebijakan manajemen

REVIEW ON EFFECTIVENESS OF RISK MANAGEMENT SYSTEM

Maturity level assessment of the Company's risk management system aims to determine achievement of risk management implementation on an ongoing basis at a certain time and based on a methodology prepared and agreed upon. The average risk management maturity level of all parent units was 2.35 from scale of 5 for the second semester of 2019. A score at level 2 indicates repeatable meaning that risk management policy

risiko sudah ada dan pelaksanaannya juga sudah dilakukan secara berulang namun masih cukup tergantung pada personel.

Dalam upaya meningkatkan kematangan manajemen risiko di Perusahaan, manajemen mengupayakan berbagai pendekatan, di antaranya dengan melakukan pengembangan kapasitas manajemen risiko secara masif bekerja sama dengan PLN Pusdiklat. Diklat manajemen risiko telah menjadi diklat wajib dalam kurikulum diklat kepemimpinan baik level *supervisory* maupun manajerial.

Pendekatan lainnya adalah dengan menargetkan unit untuk meningkatkan level maturitasnya melalui kaderisasi, serta kewajiban mengintegrasikan manajemen risiko ke seluruh proses bisnis dan sistem manajemen, dan dalam melaksanakan suksesi jabatan. Di tingkat pengambilan keputusan strategis, Direksi dan Dewan Komisaris juga sangat mendukung manajemen risiko. Dukungan tersebut diwujudkan dengan persyaratan adanya kajian risiko dalam pengambilan keputusan strategis dan aksi korporasi Perusahaan sebagaimana yang tercantum dalam Pedoman GRC (*Governance, Risk Management* dan *Compliance*) serta *Board Manual* Dewan Komisaris dan Direksi.

UPAYA PENINGKATAN BUDAYA RISIKO

Untuk mencapai efektivitas manajemen risiko yang optimal, Divisi Risk Management melakukan sosialisasi budaya risiko korporat di seluruh proses bisnis. Di antaranya melalui inisiasi pengelolaan risiko dengan pendekatan KPI dan RKAP khususnya implementasi penyusunan RKAP berbasis risiko perusahaan, mengeluarkan dokumen petunjuk teknis implementasi Enterprise Risk Management (ERM), melakukan audit manajemen risiko oleh auditor internal, melakukan review implementasi dan penilaian kematangan risiko oleh pihak independen, serta pemantauan dan pelaporan kepada pemangku kepentingan.

is in place and its implementation has also been carried out repeatedly but is still quite dependent on personnel.

In an effort to improve the maturity of risk management in the Company, management strived for various approaches, including massive capacity building for risk management in collaboration with PLN Pusdiklat. Risk management training is mandatory training in leadership training curriculum at supervisory and managerial levels.

Another approach is setting target for units to increase their maturity level through caderization, as well as obligation to integrate risk management into all business processes, management systems and succession. At the level of strategic decision making, Board of Directors and Board of Commissioners strongly support risk management. This support is realized with requirement for risk assessment in making strategic decisions and corporate actions as stipulated in GRC (Governance, Risk Management and Compliance) Guidelines and Board Manual.

RISK CULTURE IMPROVEMENT

In order to achieve optimal effectiveness of risk management, Risk Management Division strived to encourage corporate risk culture in all business processes by, among others, initiating risk management with KPI and RKAP approaches, especially implementation of RKAP Drafting based on risk, issuing technical guidance for Enterprise Risk Management (ERM), conducting risk management audit by internal auditors, reviewing implementation and assessment of risk maturity by independent parties, as well as monitoring and reporting to stakeholders.

Kepatuhan

Compliance

Untuk memastikan kepatuhan dan integritas insan Perusahaan, diperlukan sistem, regulasi/kebijakan dan proses bisnis yang tidak rentan terhadap korupsi/fraud. Hal ini menjadi dasar dari pembentukan Divisi Compliance berdasarkan Peraturan Direksi No. 0101.P/DIR/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi No. 0051.P/DIR/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja dan Peraturan Direksi No. 0103.P/DIR/2018 tanggal 30 Juni 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi No. 0065.P/DIR/2018 tentang Susunan Organisasi dan Formasi Jabatan Pada Direktorat Perencanaan Korporat. Peraturan Direksi tersebut juga mengubah nomenklatur Divisi Kepatuhan (DIV KPT) menjadi Divisi Compliance (DIV CMP). Divisi Compliance dipimpin oleh Excecutive Vice President Compliance (EVP CMP).

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIVISI COMPLIANCE

1. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha;
2. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Perusahaan untuk melakukan mitigasi risiko kepatuhan;
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap komitmen yang dibuat dan atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

PELAKSANAAN TUGAS DIVISI COMPLIANCE TAHUN 2019

Pada tahun 2019, Divisi Compliance memiliki beberapa program unggulan, yakni menyusun Kebijakan Anti *Fraud* dan Kebijakan Pengelolaan Konflik Kepentingan, membuat Rancang Bangun

To ensure compliance and integrity of its personnel, the Company needs systems, regulations/policies and business processes that are not susceptible to corruption/fraud. This was the rationale for establishment of Compliance Division according to Regulation of Board of Directors No. 0101.P/DIR/2019 dated May 29, 2019 concerning Amendment to Regulation of Board of Board of Directors No. 0051.P/DIR/2018 concerning Organization and Work Procedures and Regulation of Board of Directors No. 0103.P/DIR/2018 dated June 30, 2019 concerning Amendment to Regulation of Board of Directors No. 0065.P/DIR/2018 concerning Organizational Structure and Position Formation in Directorate of Corporate Planning. The Regulation of Board of Directors also changed nomenclature of Compliance Division (DIV KPT) to Compliance Division (DIV CMP). Compliance Division is led by Executive Vice President Compliance (EVP CMP).

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF COMPLIANCE DIVISION

1. Realizing implementation of compliance culture at all organizational levels and in business activities;
2. Managing compliance risks faced by the Company to mitigate compliance risks;
3. Ensuring that policies, rules, systems, procedures and business activities carried out by the Company are in accordance with the applicable laws and regulations;
4. Ensuring the Company's compliance with its commitments and with other authorized regulators.

IMPLEMENTATION OF DUTIES OF COMPLIANCE DIVISION IN 2019

In 2019, Compliance Division conducted a number of flagship programs, including compilation of Anti Fraud Policy and Conflict of Interest Management Policy, Compliance Design,

Kepatuhan, menyusun *Fraud Risk Assessment* dan *Fraud Risk Profil*, memonitor LHKPN, mengevaluasi *Compliance Online System*, menyusun kajian *due diligence* integritas calon mitra/mitra kerja, menyusun kajian *corruption impact analysis*, serta tugas-tugas lainnya di luar KPI yang telah disepakati seperti pendampingan program efisiensi ketenagalistrikan KPK, pendampingan divisi untuk *review* proses bisnis yang dijalankan, serta penugasan-penugasan khusus dari Direksi.

Fraud Risk Assessment and Fraud Risk Profile, LHKPN monitoring, Compliance Online System evaluation, integrity due diligence of prospective partners/business partners, corruption impact analysis and other tasks not included in KPI that were agreed upon, such as assisting KPK for electricity efficiency program, assisting divisions for business process review and special assignments from Board of Directors.

Produk Divisi Compliance berupa Kajian Kepatuhan dapat berbentuk:

1. Kajian Kepatuhan (Direksi)
2. Memberikan masukan, masukan, saran dan pertimbangan atas suatu kebijakan/regulasi yang akan diputuskan oleh Direksi dan belum memenuhi aspek GRC.
3. *Review* Kepatuhan (Direksi)
   Memberikan masukan, saran dan pertimbangan atas suatu kebijakan/regulasi yang sudah diputuskan namun mengalami kendala dalam implementasi sehingga dilakukan *review* oleh Divisi Compliance.
4. Tanggapan Kepatuhan (Direksi, EVP, GM)
   Memberikan tanggapan atau ulasan singkat terkait permasalahan yang diajukan oleh user baik bersifat strategis maupun operasional.

Compliance Division's products in the form of Compliance Review include:

1. Compliance Examination (Board of Directors)
2. Providing input, advice, recommendation and consideration on policy/regulation that will be decided by Board of Directors and does not meet GRC aspects.
3. Compliance Review (Board of Directors)
   Providing input, recommendation and consideration on policy/regulation that has been decided but experiences difficulties in implementation so that a review is conducted by Compliance Division.
4. Compliance Response (Board of Directors, EVP, GM)
   Providing response or a brief review related to strategic and operational issues raised by users.

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN

Sistem pengendalian internal merupakan mekanisme internal dari setiap unit kerja atau unit organisasi, agar dalam setiap pengambilan keputusan pelaksanaan transaksi telah melalui mekanisme yang dapat memastikan bahwa keputusan transaksi tersebut telah berlangsung dengan benar, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengendalian internal melibatkan Dewan Komisaris, Direksi dan anggota manajemen lainnya serta seluruh personel Perusahaan, untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Sistem pengendalian internal tersebut mencakup:
1. Lingkungan pengendalian internal di dalam Perusahaan yang disiplin dan terstruktur;
2. Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha;
3. Aktivitas pengendalian;
4. Sistem informasi dan komunikasi; dan
5. Monitoring, yang secara operasional dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai kebijakan berupa pedoman, petunjuk operasional, maupun instruksi kerja.

KESESUAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DENGAN KERANGKA YANG DIAKUI SECARA INTERNASIONAL (COSO)

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas setiap keputusan serta meningkatkan transparansi dan akurasi pencatatan transaksi bisnis, Perusahaan mengembangkan sistem pengendalian internal dengan menggunakan pendekatan COSO (Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission), yang merupakan organisasi internasional yang menyediakan kerangka dan pedoman terkait manajemen risiko pengendalian internal dan pencegahan *fraud*. COSO mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang dirancang manajemen perusahaan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) agar dapat mencapai tujuan organisasi yang dibagi dalam 3 kategori, yaitu:

INTERNAL CONTROL SYSTEM

Internal control system is an internal mechanism of each work unit or organizational unit, so that every transaction goes through a mechanism to ensure that decision related to the respective transaction is made correctly, fairly and accountably. Internal control involves Board of Commissioners, Board of Directors, other management members and all the Company's personnel, to provide fair assurance of operational effectiveness and efficiency, reliability of financial reporting and compliance with the applicable laws and regulations.

Internal control system includes:
1. A disciplined and structured internal control environment within the Company;
2. Business risks assessment and management;
3. Control activities;
4. Information and communication system; and
5. Monitoring, in terms of operations, is further described as policies in the form of guidelines, operational procedures and work instructions.

CONFORMITY OF INTERNAL CONTROL SYSTEM WITH INTERNATIONALLY RECOGNIZED FRAMEWORK (COSO)

In order to improve accountability of each decision as well as transparency and accuracy in recording business transactions, the Company developed internal control system with reference to COSO (Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commissions), which is an international organization that provides frameworks and guidelines for internal control risk management and fraud prevention. COSO defines internal control as a process designed by a company's management to provide reasonable assurance in order to achieve organizational goals divided into 3 categories, namely:

1. Efektivitas dan efisiensi operasi (*effective and efficient operations*);
2. Pelaporan keuangan yang andal (*reliable financial reporting*); dan
3. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan (*compliance with applicable laws and regulations*).

Perusahaan mengadopsi standar COSO pada ICoFR (Internal Control over Financial Reporting). Penerapan ICoFR bertujuan untuk memenuhi kriteria COSO tentang pelaporan keuangan yang andal. Oleh karena itu, pengendalian internal atas pelaporan keuangan (ICoFR) didefinisikan sebagai suatu proses yang dirancang dan dilaksanakan oleh manajemen Perusahaan untuk memberikan keyakinan yang memadai berkaitan dengan keandalan laporan keuangan.

1. Effective and efficient operations;
2. Reliable financial reporting; and
3. Compliance with applicable laws and regulations.

The Company adopts COSO standards on ICoFR (Internal Control over Financial Reporting). ICOFR implementation aims to meet COSO criteria of reliable financial reporting. Therefore, ICoFR is defined as a process that is designed and implemented by the Company's management to provide reasonable assurance regarding reliability of financial statements.

Manfaat ICoFR bagi PLN

Benefit of ICoFR for PLN

- **Mencegah salah saji material dalam pelaporan keuangan**
  Preventing misstatement of material in financial reporting
- **Mencegah terjadinya *fraud***
  Preventing fraud
- **Menumbuhkan budaya peduli terhadap risiko dan kontrol**
  Encouraging culture that cares about risk and control
- **Memperbaiki/ menyempurnakan proses bisnis**
  Improving/refinering business process
- **Mengurangi jurnal-jurnal penyesuaian (*adjustment*)**
  Reducing adjustment journals
- **Meningkatkan integritas data dan informasi operasional**
  Improving data integrity & operational information
- **Meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan**
  Improving decision-making process quality
- **Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan**
  Improving financial accountability and transparency

"Keandalan" dalam konteks ICoFR merupakan suatu kondisi laporan keuangan yang bebas dari salah saji yang material. Keandalan laporan keuangan diperoleh dari kelengkapan dan akurasi pencatatan transaksi, pengklasifikasian dan periode pencatatan yang tepat, serta seluruh aspek lainnya dari pengendalian pelaporan keuangan yang secara tradisional telah dilaksanakan. Penerapan ICoFR di PLN diharapkan tidak hanya membantu Perusahaan dalam mencapai keandalan laporan keuangan, tetapi untuk membuktikan bahwa proses bisnis sudah dijalankan dengan efektif.

"Reliability" in terms of ICoFR, is a condition of financial statements that is free of material misstatements. The reliability of financial statements is derived from completeness and accuracy of transactions recording, classification and relevant recording period, as well as all other aspects of traditional and operable financial reporting controls. Hence, ICoFR implementation in PLN is expected not only to assist the Company in achieving financial statements reliability, but also to help provide evidence that the business process runs effectively.

Roadmap Pengembangan ICoFR

Roadmap ICoFR Development

Penyesuaian Rancangan ICOFR as-is
Adjustment of ICOFR as-is Design

Menyesuaikan rancangan *piloting* ICOFR sesuai dengan struktur organisasi baru.
Adjustment of ICOFR ploting design accordance with the new organization structure.

a

Prototipe rancangan ICOFR dan *roll-out* ke seluruh unit PLN
Prototypes of ICOFR design and roll-out to all PLN Units

b

Otomatisasi pelaporan ICOFR GRC *application program*
Automation of ICOFR GRC application program reporting

Roll-out rancangan ICOFR
Roll-out of ICOFR Design

***Roll-out* implementasi ICOFR ke Unit seluruh Indonesia.**
Roll-out ICOFR implementation to units Across Indonesia.

Proses Pengelolaan dan Pelaporan ICOFR
ICOFR Management and Reporting Process

CSA perlu dilakukan secara efektif dan efisien dengan pelaporan yang mudah untuk dilaksanakan. Tantangannya antara lain:
Effective and efficient CSA is necessary with easy reporting implementation. The challenges are among others:

- Pengelolaan dokumen manual (*hardcopy*) pendukung *test of controls*
  Manual document (hardcopy) management supporting the test of controls
- Melaporkan informasi status efektivitas kontrol dari seluruh wilayah ke Kantor dengan mudah dan cepat
  Easy and fast reporting on control effectiveness status information from all regions to the Office

HASIL *REVIEW* ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TAHUN 2019

Evaluasi efektivitas sistem pengendalian internal dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI). Hasil evaluasi menjadi salah satu dasar bagi manajemen untuk menentukan perbaikan dan penyempurnaan sistem ataupun kebijakan yang memungkinkan manajemen menjalankan kegiatan operasional Perusahaan dengan cara yang lebih efektif. Pelaksanaan evaluasi efektivitas sistem pengendalian internal telah dilakukan oleh SPI terdiri dari:

1. Penilaian efektivitas sistem pengendalian intern menggunakan COSO yang dilakukan pada setiap pemeriksaan operasional.
2. Evaluasi pengendalian intern yang dilakukan oleh bidang Konsultasi SPI.

EVALUATION OF EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROL SYSTEM IN 2019

Evaluation of effectiveness of internal control system is performed by Internal Audit Unit (SPI). The evaluation results are used by the management to determine improvement for systems or policies to allow management to conduct operational activities in a more effective manner. Evaluation of effectiveness of internal control system carried out by SPI consisted of:

1. Evaluation of effectiveness of internal control system using COSO in each operational inspection.
2. Evaluation of internal control conducted by SPI Consultation.

Tata Kelola Teknologi Informasi

Information Technology Governance

PLN terus mengembangkan sistem teknologi informasi (*Information Technology*/"IT") untuk mendukung pelaksanaan proses bisnis agar lebih efektif dan efisien, mampu memberikan nilai tambah serta mendukung proses pengambilan keputusan manajemen dalam waktu yang relatif singkat.

Agar pengembangan dan pemanfaatan IT dapat dilakukan secara optimal, terukur, terarah dan memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/GCG), Perusahaan menyusun tata kelola teknologi informasi (Tata Kelola IT/IT *Governance*) dan rencana induk pengembangan teknologi informasi (IT *Master Plan*) sebagai panduan dalam setiap rencana pengembangan IT di Perusahaan.

STRUKTUR KEBIJAKAN TATA KELOLA IT

Perusahaan telah menyusun struktur yang menggambarkan posisi kebijakan dan prosedur operasi standar (SOP) yang menjadi dasar pengelolaan sumber daya IT, baik dari segi anggaran, aplikasi, infrastruktur, maupun sumber daya manusia (SDM) IT.

PLN continues to develop information technology ("IT") system to support the implementation of business processes to be more effective and efficient, to be able to provide value added and to support a prompt management decision-making process.

For IT development and utilization to be carried out in an optimal, measurable and targeted manner, as well as to apply the GCG principles, the Company has prepared an IT Governance and IT Master Plan as guidance for all IT development plans in the Company.

IT GOVERNANCE POLICY STRUCTURE

The Company established a structure that describes the position of policy and standard operating procedures (SOP) that form the basis of IT resource management in terms of budget, application, infrastructure and IT human capital (HC).

TATA KELOLA KEAMANAN IT

Untuk melindungi sistem IT Perusahaan dari berbagai risiko yang terkait dengan *cyber security* dan *disaster recovery,* Perusahaan berpedoman pada 3 prinsip keamanan IT, yaitu: *Confidentiality, Integrity* dan *Availability.* Sistem keamanan IT di PLN mengacu pada kerangka kerja National Institute of Standards and Technology (NIST), Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001 serta INDEKS KAMI. Kerangka kerja keamanan IT di PLN dapat dilihat pada gambar berikut:

IT SECURITY GOVERNANCE

To protect the Company's IT system from various risks associated with cyber security and disaster recovery, the Company refers to 3 IT security principles, which are: Confidentiality, Integrity and Availability. The IT security system at PLN is in accordance with National Institute of Standards and Technology (NIST) framework, ISO 27001 Information Security Management and INDEKS KAMI. PLN's IT security framework is described in the following figure:

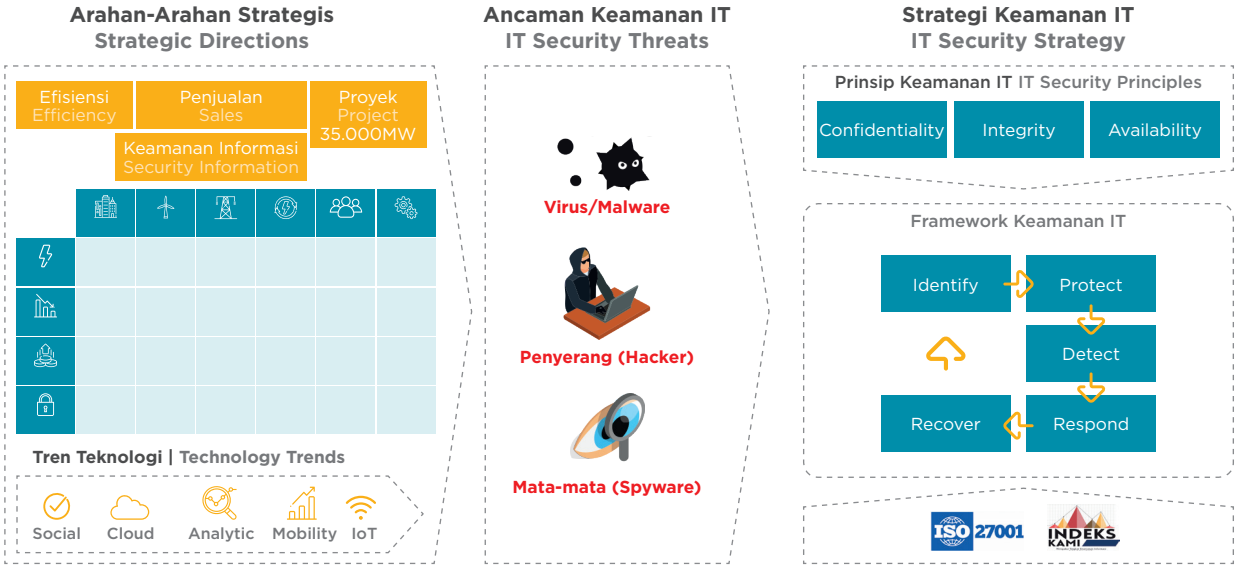

Kerangka Kerja Keamanan IT
IT Security Framework

IDENTIFY

Proses membangun pemahaman organisasi dalam melakukan pengelolaan risiko terkait dengan pengamanan siber yang berdampak ke sistem, aset, data, dan kapabilitas bisnis.
The process of building organizational understanding in managing risks related to cyber security that affect systems, assets, data and business capabilities.

PROTECT

Proses melakukan implementasi *safeguard* untuk menjamin keberlangsungan layanan bisnis Perusahaan.
The process of implementing safeguards to ensure sustainability of the Company's business services.

DETECT

Proses membangun dan mengimplementasikan aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk melakukan *monitoring* terkait dengan kejadian keamanan siber.
The process of building and implementing activities aimed at monitoring cyber security events.

RESPONS

Proses membangun dan mengimplementasikan aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai jika terdeteksi adanya serangan atau gangguan keamanan siber.
The process of building and implementing activities aimed at appropriate actions should there be detected cyber attacks or security threats.

RECOVER

Proses membangun dan mengimplementasikan aktivitas-aktivitas yang yang sesuai untuk menjaga perencanaan ketahanan siber dan untuk mengembalikan kapabilitas atau layanan yang terganggu akibat serangan siber.
The process of building and implementing appropriate activities to maintain cyber security planning and to restore capabilities or services disrupted by cyber attacks.

Fokus utama layanan IT di PLN adalah menyediakan perlindungan sistem IT terhadap ancaman *cyber security*. Kegiatan *security asesssment* dan *penetration test* dilakukan secara proaktif terutama untuk memastikan keamanan terkait *revenue assurance* pada aplikasi Pengelolaan dan Pengawasan Arus Pendapatan Terpusat (P2APST) dan Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat (AP2T).

The main focus of IT services in PLN is to provide IT system protection against cyber security threats. Security assessment and penetration tests are carried out proactively to ensure security related to revenue assurance in the Centralized Revenue Flow Management and Monitoring (P2APST) application and the Centralized Customer Service Application (AP2T).

Berdasarkan hasil pengujian keamanan atas kegiatan tersebut, tim IT telah memberikan rekomendasi perbaikan pada aplikasi untuk menjaga keandalan sistem keamanan IT. Perusahaan juga menerapkan *Secure Sockets Layer* (SSL) pada aplikasi korporat yang bersifat kritikal sehingga aman diakses dari jaringan internet. Pada lapisan fisik, Perusahaan melakukan pemisahan jaringan untuk kepentingan unit kerja PLN melalui jaringan dengan sistem teleproteksi atau SCADA.

Based on the results of security testing of these activities, the IT team provided improvement recommendations to the applications to maintain IT security system reliability. The Company also applies Secure Sockets Layer (SSL) to critical corporate applications so that they are securely accessable from the internet. At the physical layer, the Company separates the network for PLN work units through teleprotection, or a SCADA network.

STRATEGI PENGEMBANGAN IT

Pengembangan sistem IT di PLN harus mampu berperan sebagai pendukung strategi utama bisnis PLN yang dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2019-2023, rasio elektrifikasi, proyek 35.000 MW, optimalisasi aset dan peningkatan keunggulan operasi. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, terdapat 6 strategi pengembangan IT untuk mendukung strategi utama PLN.

IT DEVELOPMENT STRATEGY

The development of IT systems in PLN must be able to play a role in supporting PLN's main business strategy as outlined in 2019-2023 Corporate Long-Term Plan (RJPP), electrification ratio, 35,000 MW project, asset optimization and increased operational excellence. To meet these demands, there are 6 IT development strategies to support PLN's main strategies.

Strategi Utama Bisnis PLN
PLN Main Business Strategies

- Optimalisasi Kapasitas — Capacity Optimization
- Efisiensi & Produktivitas — Efficiency and Productivity
- Peningkatan Pendapatan — Revenue Increase
- Peningkatan Kapabilitas — Capability Enhancement

Tren Teknologi
Technology Trends

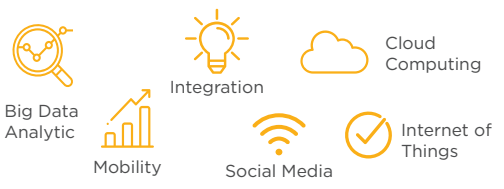

Strategi IT Mendukung Strategi Utama
IT Strategies to Support the Main Strategies

1. Enabler proses bisnis di Domain Pembangunan, Pembangkitan, Transmisi, Distribusi, Niaga/Ritel dan Koporasi
2. Optimalisasi aplikasi bisnis melalui standardisasi, sentralisasi, konsolidasi dan integrasi
3. Integrasi informasi eksternal dan internal untuk analisis dan pemngambilan keputusan bisnsi dan operasional
4. Pemangaatan interet of Things (IoT) di era Industri 4.0 untuk konvergensi Operation Technology (OT) seperti teknologi SCADA dengan Information Technology (IT) seperti *Artifical Intelligence* (AI) dalam mendukung pengoperasian dan pemeliharan aset perusahaan
5. Infrastruktur dan Teknologi yang mendukung *agility*, keandalan, ketersediaan dan keamanan layanan TI
6. Model Operasi TI mendukung bisnis perusahaan yang semakin kompleks dan luas cakupannya

1. Business process enablers in the domains of Development, Power Plant, Transmission, Distribution, Commerce/Retail and Corporation
2. Optimization of business applications through standardization, centralization, consolidation and integration
3. Integration of external and internal information for business and operational analysis and decision-making
4. Internet of Things (IoT) utilization in the Industry 4.0 era for the convergence of Operation Technology such as SCADA technology with information technology (for example Artificial Intelligence/AI) in supporting the operations and maintenance of the Company's assets
5. Infrastructure and technology that supports agility, reliability, availability and security of IT services
6. IT operations model that supports the Company's business which is increasingly complex and broad in scope

Pengembangan IT di Perusahaan dalam kerangka kerja Tata Kelola IT menerapkan *IT guiding principles* seperti *IT business alignment, IT financial management, IT service continuity, information management, application management, technology management, IT policies & standard, IT responsibilities dan IT talent management* agar senantiasa sesuai dengan kaidah GCG. Dengan demikian, kebutuhan bisnis yang mengarah kepada penguatan proses bisnis, optimalisasi aplikasi bisnis, integrasi informasi, dan penguatan infrastruktur dapat terpenuhi.

IT Development in the Company within IT Governance framework applies IT guiding principles including IT business alignment, IT financial management, IT service continuity, information management, application management, technology management, IT policies & standards, IT responsibilities and IT talent management in order to always comply with GCG rules. Thus, business needs that lead to business process re-engineering, business applications optimization, information integration or infrastructure development can be met.

Permasalahan Hukum

Legal Issues

PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI PERUSAHAAN DAN ANAK PERUSAHAAN

Berikut ini adalah informasi tentang perkara hukum yang sedang dihadapi Perusahaan dan anak perusahaan:

LEGAL ISSUES INVOLVING THE COMPANY AND SUBSIDIARIES

The following is information on legal cases involving the Company and its subsidiaries:

No.	Perkara Hukum	Litigation
1	Pokok Perkara: Pada tahun 2001, Perusahaan menghadapi gugatan perdata perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Pangemanan Nelwan dan kawan-kawan sebagai ahli waris dari Hendrik Meinder Nelwan terhadap tanah yang telah dipergunakan Perusahaan sebagai PLTA Tonsealama dengan tuntutan ganti rugi di Pengadilan Negeri Manado. Dalam proses berperkara, mulai dari Tingkat Pertama sampai dengan Tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, Perusahaan kalah. Pada saat akan dilakukan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Manado, Perusahaan melakukan Gugatan Perlawanan Ketiga atas Eksekusi (Derden Verzet) tanah tersebut mengingat Perusahaan merupakan *bezitter* yang baik dengan menguasai tanah serta mengoperasikan PLTA Tonsealama selama lebih dari 50 tahun, namun Gugatan Perlawanan tersebut ditolak. Perusahaan melaporkan perbuatan tindak pidana pemalsuan dokumen terhadap Hendrik Meinder Nelwan (Penggugat) atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Tahun 2018 perkara pidana tersebut telah diputus pada tingkat Kasasi dengan amar putusan Hendrik Meinder Nelwan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menggunakan dokumen palsu dalam perkara perdata PLTA Tonsealama. Pada bulan Agustus 2018, berdasarkan novum tahun 2018 putusan pidana pemalsuan dokumen perkara PLTA Tonsealama, Perusahaan telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap Perkara Perdata Pangemanan Nelwan dan kawan-kawan di Mahkamah Agung. Status Penyelesaian: Perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung. Dampak Terhadap Perusahaan: Tidak berpengaruh secara material terhadap status, kedudukan, dan kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan. Nilai Nominal Tuntutan/Gugatan: Rp54 miliar.	Substance of the Case: In 2001, Pangemanan Nelwan and co-claimants as heirs of Hendrik Meinder Nelwan filed claims for compensation over the land rights that has been utilized by the Company as hydroelectric power plant PLTA Tonsealama, which demanded compensation in the District Court of Manado. In the process of court trial from District Court to Review in the Supreme Court, the Company lost. In the preparation of execution by District Court of Manado, the Company filed a Third Resistance of the Execution (Derden Verzet) regarding the land rights considering the Company is a good bezitter that has been effectively controlling and operating PLTA Tonsealama for more than 50 years, but the Resistance of the Execution was later denied. The Company has filed claims for criminal action regarding document forgery in the name of Hendrik Meinder Nelwan (the Plaintiff) that were used as evidence materials against the Company for civil action. On 2018, The Supreme Court of the Republic of Indonesia has ruled that Hendrik Meinder Nelwan is proven and reassured of doing a criminal action by using false documents in the civil case of PLTA Tonsealama. In August 2018, based on the 2018 novum of the criminal verdict regarding document forgery of PLTA Tonsealama, the Company filed for a Civil Case Review against Pangemanan Nelwan and co-claimants in the Supreme Court. As of the date of the issuance of this report, the case is currently still on process in the Supreme Court. Status of Settlement: The case is currently on process in the Supreme Court. Impact on the Company: Does not materially affect the status, position and business sustainability of the Company. Value of Claim: Rp54 billion.

No.	Perkara Hukum	Litigation
2	Pokok Perkara: Pada tanggal 20 September 2017 Perusahaan menghadapi gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PT Putera Daya Perkasa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait aset Perusahaan berupa Gardu Induk 150 kV yang terletak di Kawasan Industri Pasar Kemis. Pada tanggal 4 April 2019 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan perkara ini dengan amar putusan menolak ganti kerugian dan sewa yang dituntut oleh Penggugat. Penggugat mengajukan banding atas putusan tersebut ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Status Penyelesaian: Perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Jakarta. Dampak Terhadap Perusahaan: Tidak berpengaruh secara material terhadap status, kedudukan, dan kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan. Nilai Nominal Tuntutan/Gugatan: Rp86,19 miliar.	Substance of the Case: On September 20, 2017, the Company faced a lawsuit filed by PT Putera Daya Perkasa in District Court of South Jakarta regarding the Company assets in the form of Substations 150 kV which is located in the Industrial Estate of Pasar Kemis. On April 4, 2019 the District Court of South Jakarta has decided with a verdict to deny the lawsuit. The plaintiff has filed for an appeal in the High Court of Jakarta. Status of Settlement: The case is currently still in process in the High Court of Jakarta. Impact on the Company: Does not materially affect the status, position and business sustainability of the Company. Value of Claim: Rp86.19 billion.
3	Pokok Perkara: Pada tanggal 17 November 2017 Perusahaan mengajukan permohonan arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”) Jakarta terhadap Konsorsium PT Mega Eltra, PT Sakti Mas Mulia, dan Zibo Sangte Power Equipment Co. Ltd terkait pengembalian uang muka yang telah dibayarkan kepada konsorsium akibat wanprestasi pembangunan proyek PLTU Bau-Bau 2x10 MW dengan tuntutan ganti rugi. Konsorsium Mega Eltra mengajukan pembatalan putusan BANI Jakarta ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan tetapi ditolak pengadilan negeri Jakarta Selatan. Konsorsium Mega Eltra mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan tetapi terhadap kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung. Status Penyelesaian: Putusan Mahkamah Agung telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht). Dampak Terhadap Perusahaan: Tidak berpengaruh secara material terhadap status, kedudukan, dan kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan. Nilai Nominal Tuntutan/Gugatan: Rp51,97 miliar.	Substance of the Case: On November 17, 2017, the Company filed an arbitration request to the Indonesian National Arbitration Board (“BANI”) Jakarta against Consortium PT Mega Eltra, PT Sakti Mas Mulia and Zibo Sangte Power Equipment Co. Ltd regarding the refund of the down payment that has been paid to the consortium due to the defaults on the construction of the PLTU Bau-Bau 2x10 MW which demanded compensation. Consortium Mega Eltra filed for the annulling of the BANI verdict in the Distrcit Court of Jakarta Selatan and the request has been rejected. Consortium Mega Eltra filed for a Cassasion to the Supreme Court regarding the verdict and the request has been rejected. Status of Settlement: The Supreme Court verdict is final, binding and executable (inkracht). Impact on the Company: Does not materially affect the status, position and business sustainability of the Company. Value of Claim: Rp51.97 billion.
4	Pokok Perkara: Pada tanggal 29 Maret 2018 Perusahaan menghadapi gugatan perdata perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Ronny Rotinsulu Tumengkol di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait tanah PLTA Tonsealama. Pada tanggal 24 Juni 2019 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan perkara ini dengan amar putusan menolak ganti kerugian yang dituntut oleh Penggugat. Penggugat telah mengajukan banding. Status Penyelesaian: Perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Jakarta. Dampak Terhadap Perusahaan: Tidak berpengaruh secara material terhadap status, kedudukan, dan kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan. Nilai Nominal Tuntutan/Gugatan: Rp119,80 miliar	Substance of the Case: On March 29, 2018, the Company faces a lawsuit filed by Ronny Rotinsulu Tumengkol in the District Court of South Jakarta regarding the land compensation of PLTA Tonsealama. On June 24, 2019 the District Court of South Jakarta has decided with a verdict to deny the lawsuit. The Plaintiff has filed for an appeal. Status of Settlement: The case is currently still in process in the High Court of Jakarta. Impact on the Company: Does not materially affect the status, position and business sustainability of the Company. Value of Claim: Rp119.80 billion

No.	Perkara Hukum	Litigation
5	Pokok Perkara: Pada tanggal 8 Mei 2018 Perusahaan menghadapi gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Ahli Waris Tjotjong bin Runah (Halimah binti Sairih dan kawan-kawan) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait aset Perusahaan berupa tanah seluas 4.096 Ha yang terletak di Kawasan PLTGU Muara Tawar Blok 5 Tahap 2. Status Penyelesaian: Perkara masih dalam proses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dampak Terhadap Perusahaan: Tidak berpengaruh secara material terhadap status, kedudukan, dan kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan. Nilai Nominal Tuntutan/Gugatan: Rp54,20 miliar.	Substance of the Case: On May 8, 2018, the Company faces a lawsuit filed by the heir of Tjotjong bin Runah (Halimah binti Sairih and co-claimants) in the District Court of South Jakarta regarding the Company asset with land of 4,096Ha located in PLTGU Muara Tawar Block 5 Phase 2. Status of Settlement: The case is currently still in process in District Court of South Jakarta. Impact on the Company: Does not materially affect the status, position and business sustainability of the Company. Value of Claim: Rp54.20 billion.
6	Pokok Perkara: Pada tanggal 29 Agustus 2018, Perusahaan menghadapi Permohonan Arbitrase yang diajukan oleh PT Kalimantan Jawa Gas sebagai Pemohon melawan PC Muriah Ltd (PCML) dan Perusahaan di International Court of Commerce (ICC) terkait kekurangan pembayaran atas biaya Gas Transport ke PLTGU Tambak Lorok. Status Penyelesaian: Perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di International Court of Commerce (ICC). Dampak Terhadap Perusahaan: Tidak berpengaruh secara material terhadap status, kedudukan, dan kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan. Nilai Nominal Tuntutan/Gugatan: USD29,46 juta.	Substance of the Case: On August 29, 2018, the Company faced an Arbitration Request filed by PT Kalimantan Jawa Gas as the Applicant against PC Muriah Ltd (PCML) and the Company in the International Court of Commerce (ICC) regarding the shortage of payments for Transport Gas to PLTGU Tambak Lorok. Status of Settlement: The case is currently still in process in the International Court of Commerce (ICC). Impact on the Company: Does not materially affect the status, position and business sustainability of the Company. Value of Claim: USD29.46 million.
7	Pokok Perkara: Pada 27 Mei 2019, Perusahaan menghadapi gugatan dari Konsorsium Hubei Hongyuan Power Engineering, Co.Ltd dan PT Bagus Karya terkait pembayaran biaya pekerjaan pembangunan PLTU Sulawesi Selatan di BANI Jakarta. Pemohon menuntut Perusahaan membayar biaya Pekerjaan Load Rejection (FCB) dan Denitrolic System sementara Perusahaan menyatakan secara kontraktual tidak termasuk *scope* pekerjaan. Status Penyelesaian: Perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di BANI Jakarta. Dampak Terhadap Perusahaan: Tidak berpengaruh secara material terhadap status, kedudukan, dan kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan. Nilai Nominal Tuntutan/Gugatan: Rp123,44 miliar.	Substance of the Case: On May 27, 2019 the Company faced an arbitration request filed by Consortium of Hubei Hongyuan Power Engineering, Co.Ltd and PT Bagus Karya regarding the Contract Payment of Coal Fired Steam Power Plant Project PLTU Sulawesi Selatan in BANI Jakarta. The Plaintiff demanded the Company to pay the works of Load Rejection (FCB) and Denitrolic System, that contractually not included in the scope of works. Status of Settlement: The case is currently still on process in BANI Jakarta. Impact on the Company: Does not materially affect the status, position and business sustainability of the Company. Value of Claim: Rp123.44 billion.
8	Pokok Perkara: Pada 22 Agustus 2019, Perusahaan menghadapi gugatan dari PT Boskalis Internasional Indonesia terkait klaim pekerjaan pembangunan kabel bawah laut Jawa-Bali Sirkit #3 dan #4 akibat perbedaan spesifikasi dalam izin prinsip pekerjaan dengan spesifikasi dalam kontrak. Hal tersebut disebabkan adanya perubahan regulasi tentang kedalaman pemendaman kabel bawah laut setelah para pihak menandatangani kontrak. Pada gugatan tersebut Pemohon menuntut dalam 5 klaim. Status Penyelesaian: Perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di BANI Jakarta. Dampak Terhadap Perusahaan: Tidak berpengaruh secara material terhadap status, kedudukan, dan kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan. Nilai Nominal Tuntutan/Gugatan: EUR8,52 juta.	Substance of the Case: On August 22, 2019, The Company faced an arbitration Request filed PT Boskalis Internasional Indonesia regarding Claim installation Java Bali Submarine Cable Circuit #3 and #4 due to differentiation between specification in Principal Permit and specification in contract. It is caused by change of law about submarine cable burial depth after the parties signing the contract. In this Arbitration request, the Plaintiff demanded 5 claims. Status of Settlement: The case is currently still on process in BANI Jakarta. Impact on the Company: Does not materially affect the status, position and business sustainability of the Company. Value of Claim: EUR8.52 million.

PERMASALAHAN HUKUM YANG MELIBATKAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Pada tahun 2019, terdapat permasalahan hukum yang melibatkan mantan Direktur Utama Bapak Sofyan Basir dengan dugaan suap terkait proyek PLTU Riau-1. Perkara ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Juli 2018 terhadap mantan anggota DPR RI Eni Maulani Saragih dan pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo yang kemudian juga menyeret nama mantan Menteri Sosial Idrus Marham. Pada tanggal 23 April 2019, Bapak Sofyan Basir ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dengan dugaan turut serta membantu Eni Maulani Saragih mendapatkan suap dari Johanes Budisutrisno Kotjo serta turut menerima janji berupa *commitment fee*. Setelah menjalani serangkaian persidangan, pada tanggal 4 November 2019 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memutuskan Bapak Sofyan Basir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dakwaan pertama dan kedua sehingga bebas dari semua dakwaan dan tuduhan. Terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Kasasi dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung.

Pada tahun 2019, terdapat permasalahan hukum yang melibatkan mantan Direktur Utama Bapak Nur Pamudji terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan BBM High Speed Diesel (HSD) Lot II PLTGU Tambak Lorok dan Lot IV PLTGU Belawan pada tahun 2010. Perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan pada September 2019 dan sampai dengan saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

SANKSI ADMINISTRATIF OLEH REGULATOR

Pada tahun 2019, Perusahaan mendapat sanksi administratif dari OJK berupa teguran karena keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2018 *Audited*. Keterlambatan ini disebabkan karena dalam perhitungan pendapatan kompensasi Perusahaan membutuhkan persetujuan dari 3 menteri, yaitu Menteri BUMN, Menteri Keuangan dan Menteri ESDM yang baru diperoleh secara lengkap pada tanggal 29 Mei 2019.

LEGAL ISSUES INVOLVING BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

In 2019, there was a legal issue involving the former President Director Mr. Sofyan Basir with alleged bribery related to PLTU Riau-1 project. This case was a development of sting operations (OTT) conducted by Corruption Eradication Commission (KPK) in July 2018 against former DPR RI member Eni Maulani Saragih and businessman Johanes Budisutrisno Kotjo who later also dragged the name of former Social Minister Idrus Marham. On April 23, 2019, Mr. Sofyan Basir was named a suspect by KPK for allegedly participating in helping Eni Maulani Saragih get a bribe from Johanes Budisutrisno Kotjo and also received a promise for a commitment fee. After undergoing a series of trials, on November 4, 2019, Panel of Judges of Jakarta Corruption Court's verdict stated that Sofyan Basir was not legally and convincingly proven as the first and second charges so that he was free from all charges and accusations. With respect to this decision, the Public Prosecutor submitted a cassation remedy and is currently still in the process of being examined by the Supreme Court.

In 2019, there were legal issues involving former Managing Director Mr. Nur Pamudji regarding alleged corruption in the procurement process of the High Speed Diesel Fuel (HSD) Lot II Tambak Lorok PLTGU and Lot IV Belawan PLTGU in 2010. The case was handed over to the court in court September 2019 and up to now are still being investigated at the Jakarta Corruption Court.

ADMINISTRATIVE SANCTION IMPOSED BY REGULATOR

In 2019, OJK imposed administrative sanction on the Company in the form of a warning due to the delay in submission of 2018 Audited Financial Statements. This delay was caused by calculation of the Company's compensation income requiring approval of 3 ministers, namely the Minister of SOE, the Minister of Finance and the Minister of Energy and Mineral Resources which was only obtained in full on May 29, 2019.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Access to The Company's Information and Data

Perusahaan secara berkala memperbarui informasi dan memberikan kemudahan akses informasi mengenai aktivitas dan kinerja Perusahaan kepada para pemangku kepentingan agar mengetahui kondisi Perusahaan secara transparan dan komprehensif. PLN memiliki berbagai sarana yang berfungsi sebagai saluran pengungkapan informasi, di antaranya adalah:

RUPS

Sarana komunikasi Perusahaan dengan pemegang saham untuk penyampaian informasi mengenai perusahaan dan pengambilan keputusan yang memerlukan persetujuan pemegang saham.

SITUS *WEB*

Melalui situs http://www.pln.co.id, para pemangku kepentingan dapat menemukan berbagai informasi terkini Perusahaan, seperti profil Perusahaan, struktur organisasi, inovasi dan sertifikasi, informasi kegiatan Perusahaan, tata kelola perusahaan, Pedoman Perilaku, *Whistleblowing System*, rilis media, laporan dan presentasi termasuk Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, dan Laporan Keuangan. Publikasi informasi yang tersedia di situs *web* Perusahaan telah mengacu pada Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs *Web* Emiten atau Perusahaan Publik.

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka menerapkan prinsip GCG terutama prinsip transparansi, serta sebagai implementasi Undang Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perusahaan berusaha meningkatkan transparansi perusahaan dan membentuk perangkat pelayanan informasi publik. Perusahaan menunjuk Corporate Secretary di tingkat PLN Pusat dan manajer senior/manajer bidang terkait di unit sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Melalui pelayanan informasi publik ini hak masyarakat mendapatkan informasi mengenai perusahaan, layanan perusahaan, laporan

The Company periodically updates the information and provides easy access to information on the Company's activities and performance to all stakeholders in order to be transparent and comprehensive about the Company's condition. PLN has various facilities that serve as channels of information disclosure, as follows:

GMS

The Company's communication with the Shareholder for information disclosure on the Company and decision-making that requires shareholder approval.

WEBSITE

On website http://www.pln.co.id, the stakeholders can find the Company's latest information, such as company profile, organizational structure, innovation and certification, corporate action, corporate governance, Code of Conduct, whistleblowing system, media release, reports and presentations including Annual Report, Sustainability Report and Financial Statements. Publication of information available on the Company's website refers to OJK Regulation No. 8/POJK.04/2015 concerning Website of Issuer or Public Listed Company.

PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE

In order to implement GCG principles, especially transparency principle, as well as implementation of Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure, the Company seeks to improve corporate transparency and to provide public information service tools. The Company appoints a Corporate Secretary at PLN Head Office and senior managers/related field managers at units as Information and Documentation Management Officers (PPID). Through this public information service, the public's right to obtain information about the Company, the Company's services, financial

keuangan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan informasi terkait lainnya dapat terpenuhi.
Pada tahun 2019, Perusahaan mendapat penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik dari Komisi Informasi Pusat dengan kualifikasi "Cukup Informatif". Penghargaan ini memacu Perusahaan untuk lebih informatif kepada masyarakat dengan tetap menjaga hal-hal yang menjadi rahasia Perusahaan. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi, dapat mengunjungi situs *web* www.pln.co.id; e-mail: infopublik@pln.co.id; atau dapat mengirimkan surat ke Perusahaan dalam rangka mendapatkan informasi sesuai dengan Daftar Informasi Publik yang ada di Perusahaan.

E-MAIL

Perusahaan membuka alamat *e-mail* resmi pln123@pln.co.id bagi pemangku kepentingan yang ingin menyampaikan saran, keluhan dan meminta informasi mengenai kondisi Perusahaan terkini.

MEDIA KOMUNIKASI LAINNYA

Media komunikasi Perusahaan lainnya, antara lain:

1. Media Internal PLN
   Media internal yang berfungsi sebagai sarana informasi, edukasi dan sosialisasi kebijakan manajemen untuk seluruh pegawai dan dipublikasikan dalam bentuk Majalah Internal Fokus, Newsletter PLNKita, Portal Internal PLNKita (portalkita.pln.co.id), Facebook Closed Group PLNKita (https://www.facebook.com/groups/plnkita/).
2. Media Aplikasi Mobile
   Perusahaan memiliki Aplikasi PLN Mobile untuk aplikasi Android dan IOS.

MEDIA SOSIAL

Perusahaan memiliki akun media sosial untuk pelayanan dan informasi perusahaan:

Pelayanan atau Contact Center PLN 123:
Twitter: @pln_123
Facebook Fanpage: PLN 123
Instagram: @pln123_official

statements, corporate social responsibility and other related information can be fulfilled.
In 2019, the Company received Public Agency's Information Disclosure award of Central Information Commission with "Informative" qualification. This award encouraged the Company to be more informative to the public while maintaining the Company's confidentiality. For people who wish to obtain information, they can visit the website www.pln.co.id; e-mail: infopublik@pln.co.id; or send a letter to the Company in order to obtain information in accordance with the Company's List of Public Information.

E-MAIL

The Company provides official e-mail address pln123@pln.co.id for stakeholders to submit suggestions, complaints, and/or information request on the Company's current condition.

OTHER COMMUNICATION MEDIA

The Company's other communication media include:

1. PLN Internal Media
   Internal media that serves as a means of information, education and socialization of management policies for all employees and published in the form of PLN Kita Fokus Intenal Magazine, Newsletter PLNKita, Internal Portal PLNKita (portalkita.pln.co.id), Facebook Closed Group PLNKita (https://www.facebook.com/groups/plnkita/).
2. Mobile Application
   The Company provides PLN Mobile application for Android and iOS.

SOCIAL MEDIA

The company has a social media account for company services and information:

Services or Contact Center PLN 123:
Twitter: @ pln_123
Facebook Fanpage: PLN 123
Instagram: @ pln123_official

Informasi Korporat:
Twitter: @_pln_id
Facebook Fanfage: PLN.id
Instagram: @pln_id
Youtube: PLN

Media Contact Center PLN 123 lainnya:
Telepon: 123
Handphone: (kode area) 123
E-mail: pln123@pln.co.id

Corporate Information:
Twitter: @_pln_id
Facebook Fanfage: PLN.id
Instagram: @pln_id
Youtube: PLN

Other PLN 123 Media Contact Centers:
Telephone: 123
Mobile: (area code) 123
E-mail: pln123@pln.co.id

Standar Etika Perusahaan

Code Of Conduct

Pada tahun 2005, Perusahaan menerbitkan Standar Etika Perusahaan atau Pedoman Perilaku/*Code of Conduct* (CoC) sebagai panduan bagi seluruh insan PLN dalam berperilaku secara profesional dan menjunjung tinggi integritas di lingkungan kerjanya. Pedoman Perilaku mengatur aspek kepemimpinan di Perusahaan, keanggotaan yang bertanggung jawab, hubungan profesional antar anggota dan hubungan dengan pihak eksternal. Selain itu, Pedoman Perilaku merupakan sarana untuk menciptakan hubungan yang harmonis, sinergis dan saling menguntungkan di antara seluruh pemangku kepentingan Perusahaan.

In 2005, the Company issued Code of Conduct (CoC) as a guide for all PLN personnel to always behave professionally and to uphold integrity in their work environment. Code of Conduct regulates aspects of leadership, responsible membership, professional relationship and relationship with external parties. In addition, Code of Conduct is a means to create harmonious, synergic and mutually beneficial relationships among all the Company's stakeholders.

Pada tahun 2010, melalui Keputusan Direksi No. 548A/K/DIR/2010 tentang Buku Pedoman Perilaku, Perusahaan memperbarui butir-butir ketentuan dalam Pedoman Perilaku, untuk menyesuaikan dengan Pedoman GCG dan proses bisnis Perusahaan yang telah berkembang semakin kompleks.

In 2010, with Decision of Board of Directors No. 548A/K/DIR/2010 concerning Code of Conduct Book, the Company updated the provisions in Code of Conduct, to adjust to GCG Guidelines and business practices that have become increasingly complex.

Pedoman Perilaku dibuat dalam bentuk buku saku yang ringkas agar mudah dibawa saat beraktivitas. Melalui berbagai bentuk sosialisasi dan internalisasi, Perusahaan mendorong komitmen kepatuhan seluruh insan PLN terhadap standar etika dan mewajibkan seluruh pimpinan untuk memastikan bahwa Pedoman Perilaku dipatuhi dan dijalankan dengan baik di jajarannya masing-masing.

Code of Conduct is issued in the form of a compact pocket book for easy carrying when on the move. Through various forms of socialization and internalization, the Company encourages the compliance commitment of all PLN personnel to ethical standards and requires all leaders to ensure that Code of Conduct is obeyed and implemented properly in their respective ranks.

Di akhir tahun tahun 2018, telah dilakukan pembaruan terhadap Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis yang diseminasinya dilakukan pada Tahun 2019.

At end of 2018, the Company's Code of Conduct and Business Ethics were updated and disseminated to all employees in 2019.

POKOK-POKOK STANDAR ETIKA PERUSAHAAN

Standar Etika Perusahaan mengatur sejumlah aspek penting seperti kepemimpinan Perusahaan, keanggotaan yang bertanggung jawab, hubungan profesional antar anggota, dan hubungan dengan pihak eksternal.

CODE OF CONDUCT STANDARDS

Code of Conduct Standards contains a number of key elements, such as PLN leadership, responsible membership, professional relationship and relationship with external parties.

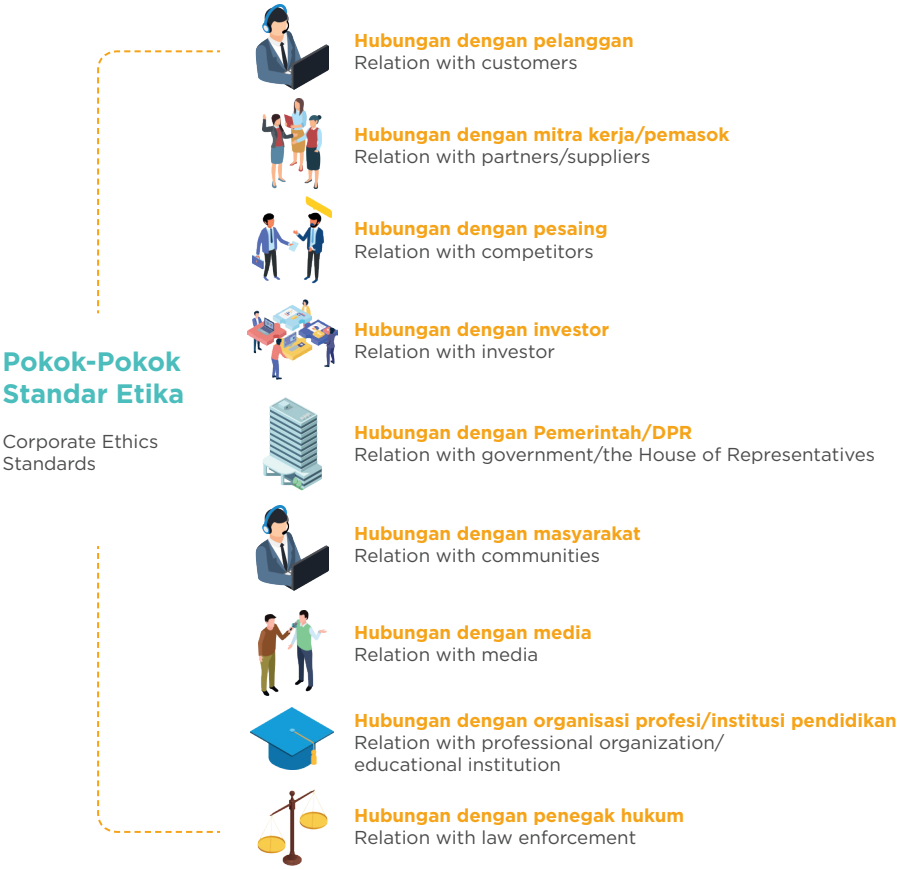

PEMBERLAKUAN STANDAR ETIKA DI SELURUH LEVEL ORGANISASI DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Standar Etika Perusahaan wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh:

1. Seluruh insan PLN di segala tingkatan termasuk Dewan Komisaris, Direksi dan organ pendukung Dewan Komisaris;
2. Direksi, Dewan Komisaris serta pegawai anak perusahaan dan afiliasi di bawah pengendalian;
3. Investor Perusahaan (kreditur, pemegang obligasi, dan lain-lain);
4. Para pemangku kepentingan Perusahaan seperti pelanggan, mitra kerja/pemasok, pesaing, investor, Pemerintah/DPR, masyarakat, media, organisasi, profesi/ institusi pendidikan, penegak hukum.

ENFORCEMENT OF ETHICAL STANDARDS AT ALL LEVELS OF THE ORGANIZATION AND STAKEHOLDERS

The Company's Ethical Standards must be obeyed and implemented by:

1. All PLN personnel at all levels including Board of Commissioners, Board of Directors and supporting organs of Board of Commissioners;
2. Board of Directors, Board of Commissioners and employees of subsidiaries and affiliates under control;
3. Corporate Investors (creditors, bondholders and so forth);
4. The Company's stakeholders such as customers, business partners/suppliers, competitors, investors, the Government/ Parliament, public, media, organizations, professional/educational institutions, law enforcement.

PENYEBARLUASAN STANDAR ETIKA PERUSAHAAN

Perusahaan terus melakukan sosialisasi Standar Etika Perusahaan untuk memberikan pemahaman dan menumbuhkan kesadaran seluruh insan PLN agar senantiasa menegakkan Standar Etika Perusahaan. Sepanjang tahun 2019, sosialisasi dilakukan baik secara langsung ke unit bisnis maupun melalui situs *web* PLN yang dikenal dengan *website* KOMANDO (budaya.pln.co.id).

Sejak tahun 2016, penyampaian Standar Etika Perusahaan telah menjadi bagian dalam indikator kinerja utama (KPI) masing-masing divisi/unit/unit bisnis. Hal ini diimplementasikan dengan mengadakan *sharing session* Standar Etika Perusahaan rutin setiap minggu.

Seluruh insan PLN wajib menandatangani komitmen mematuhi Standar Etika Perusahaan. Penandatanganan komitmen dilakukan setiap tahun secara *online* melalui portal internal PLN sehingga lebih efisien waktu dan biaya serta lebih mudah untuk didokumentasikan. Pada tahun 2019, persentase penandatanganan komitmen Standar Etika Perusahaan mencapai 99% dari seluruh pegawai Perusahaan.

SANKSI PELANGGARAN STANDAR ETIKA PERUSAHAAN

Perusahaan menetapkan sanksi bagi pelanggaran Standar Etika Perusahaan sebagai berikut:

1. Mitra kerja PLN: sanksi sesuai dengan peraturan dan keputusan Perusahaan;
2. Insan PLN: tindakan-tindakan disipliner berupa teguran lisan maupun tulisan, peringatan keras dengan skorsing sampai pemutusan hubungan kerja;
3. Apabila mengakibatkan pelanggaran hukum, pemasalahan dapat diproses lebih lanjut kepada pihak yang berwajib.

Selama tahun 2019, sanksi atas pelanggaran telah diberikan dengan mengacu pada ketentuan internal Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

SOCIALIZATION OF CODE OF CONDUCT

PLN continues to disseminate the Company's Code of Conduct in order to instill in-depth understanding to all PLN personnel to uphold the Company's ethical standards. During 2019, socialization was carried out both directly to the business units and through PLN website known as KOMANDO website (budaya.pln.co.id).

Since 2016, socialization of the Company's Code of Conduct has become part of Key Performance Indicators (KPI) of each division/unit/business unit. This has been implemented by conducting weekly Code of Conduct sharing session.

All PLN personnel must sign a commitment to comply with the Company's Ethical Standards. The commitment is signed every year online through PLN's internal portal so that it is more time and cost efficient and easier to document. In 2019, the percentage of signing of the Company's Ethics Standards commitment reached 99% of all employees.

SANCTION FOR VIOLATION OF CODE OF CONDUCT

The Company imposes sanctions for violation of Code of Conduct as follows:

1. PLN partners, sanctions in accordance with the Company's regulations and decisions;
2. PLN personnel: disciplinary actions in the form of oral and written reprimands, strong warning with suspension and employment termination;
3. In case of violation of laws, the issue may be further processed by the authorities.

In 2019, sanctions for violation have been imposed with reference to the Company's internal provisions and Collective Labor Agreement (PKB).

JUMLAH PELANGGARAN STANDAR ETIKA DAN SANKSI PELANGGARAN TAHUN 2019

Dalam rangka penegakkan disiplin pegawai di lingkungan PLN, Perusahaan telah mengambil tindakan tegas berupa penjatuhan sanksi disiplin sesuai dengan Peraturan Disiplin Pegawai yang berlaku.

VIOLATIONS OF CODE OF CONDUCT AND SANCTIONS IN 2019

In order to enforce employee discipline within PLN environment, the Company takes strict action by imposing disciplinary sanctions in accordance with the applicable Employee Discipline Regulation.

Jenis Pelanggaran Type of Violation	**Jumlah Kasus** Number of Cases	**Sanksi sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB)** Sanction in Accordance with the Collective Labor Agreement (PKB)
Berat (15) Portion	15	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Termination of employment (PHK)
Sedang Moderate (76)	41	Peringatan tertulis pertama yang berlaku selama 6 bulan dengan kriteria talenta perlu penyesuaian (PPS) First written warning that is valid for 6 months with the criteria of talent is in need of adjustment (PPS)
	0	Peringatan tertulis kedua yang berlaku selama 12 bulan dengan kriteria talenta maksimal perlu penyesuaian (PPS) Second written warning that is valid for 12 months with the criteria of talent is in maximal need of adjustment (PPS)
	0	Peringatan tertulis ketiga dan terakhir yang berlaku selama 12 bulan dengan kriteria talenta sangat perlu perhatian (SPP) Third and final written warning that is valid for 12 months with the criteria of talent is in need of special attention (SPP)
	3	Peringatan tertulis kedua dan terakhir yang berlaku selama 12 bulan dengan kriteria talenta sangat perlu perhatian (SPP) Second and last written warning that is valid for 12 months with the criteria of talent is in need of attention (SPP)
	32	Peringatan tertulis pertama dan terakhir yang berlaku selama 12 bulan dengan kriteria talenta sangat perlu perhatian (SPP) dan penurunan 1 *grade* First and last written warning that is valid for 12 months with the criteria of talent is very necessary need of attention (SPP) and 1 grade demotion
Ringan Mild (29)	9	Teguran lisan tercatat yang berlaku selama 3 bulan Verbal warning recorded that is valid for 3 months
	20	Peringatan tertulis yang berlaku selama 6 bulan Written Warning that is valid for 6 months
Jumlah Total	**120**	

Pengadaan Barang dan Jasa

Procurement of Goods and Services

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Perusahaan memiliki pedoman pengadaan barang dan jasa yang mengacu pada Peraturan Direksi No. 0164.P/DIR/2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa. Pedoman pengadaan barang dan jasa tersebut antara lain mengatur: ketentuan umum, perencanaan pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya, pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya, perencanaan dan pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi, pengadaan khusus, perjanjian/kontrak, pengadaan barang/jasa melalui media elektronik PLN (*e-Procurement* PLN), serta Pengendalian dan Pengawasan.

Perusahaan mengadakan pertemuan dengan pemasok untuk mensosialisasikan penggunaan Sistem *e-Procurement* (e-Proc) PLN dan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku di Perusahaan. Dalam berbagai kesempatan, Perusahaan juga melakukan sosialisasi Peraturan Direksi No. 0076.P/DIR/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi kepada pemasok untuk menegaskan bahwa seluruh Insan PLN berkomitmen untuk tidak menerima hadiah atau imbalan dari pihak manapun termasuk dari pemasok.

ETIKA PERUSAHAAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Hubungan Perusahaan dan pemasok berdasarkan pada prinsip- prinsip praktik usaha yang *value for money* untuk kualitas, kuantitas, tempat, waktu, tujuan sosial ekonomi, dan harga sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Perusahaan berharap agar setiap penyedia barang jasa selalu menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses pengadaan barang dan jasa.

POLICY ON PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

The Company has guidance for procurement of goods and services, which refers to Regulation of Board of Directors No. 0620.K/DIR/2013 concerning Guideline for Procurement of Goods/Services. The procurement guidelines regulate, among others: general provisions, procurement planning for goods/construction services/other services, procurement of goods/construction services/other services, planning and procurement of consulting services, special procurement, agreements/contracts, procurement of goods/services through PLN's electronic media (e-Procurement PLN), as well as Control and Supervision.

The Company holds meetings with suppliers to socialize the use of PLN's e-Procurement (e-Proc) System and Procurement Guidelines for Goods and Services applied in the Company. On various occasions, the Company also socializes Regulation of Board of Directors No. 0076.P/DIR/2017 concerning Guidance for Gratuity Control to suppliers so as to affirm that all PLN Personnel are committed not to receive any gifts or rewards from any parties, including suppliers.

CODE OF CONDUCT IN PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

Relationship between the Company and suppliers is based on the principle of value for money for quality, quantity, place, time, socio-economic objectives and price, in accordance with GCG principles. The Company expects that every service provider always upholds the applicable laws and regulations in the procurement process of goods and services.

Standar Etika

1. Menjaga dan mengutamakan kepentingan Perusahaan;
2. Menilai secara objektif, transparan, dan akuntabel;
3. Membuat perjanjian kerja yang saling menguntungkan;
4. Menjalin komunikasi secara jujur dan efektif dengan tetap menjaga kerahasiaan data dan informasi;
5. Memberi sanksi apabila tidak memenuhi kontrak kerja.

Ethical Standard

1. Maintaining and prioritizing the Company's interests;
2. Assessing objectively, transparently, and accountably;
3. Establishing a mutually beneficial work agreement;
4. Establishing honest and effective communication, while maintaining confidentiality of data and information;
5. Imposing sanctions if contract is not fulfilled.

Kriteria dan Proses Seleksi Pemasok

Kriteria dan seleksi pemasok secara rinci terdapat dalam situs *web* Perusahaan pada menu *e-Proc website* pln.co.id yang dapat dengan mudah diakses oleh publik. Bagi masyarakat umum yang ingin menjadi rekanan Perusahaan sebagai penyedia barang dan jasa dapat mendaftar melalui eproc.pln.co.id. Panduan untuk menjadi mitra kerja Perusahaan dapat diperoleh dengan mengunduh Terms of Condition Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) secara Elektronik yang terdapat pada menu e-Procurement.

Suppliers Criteria and Selection Process

Suppliers criteria and selection process are described in the Company's website at eproc.pln.co.id, which is easily accessed by the public. For the general public who wish to become PLN's suppliers, they can register at eproc.pln.co.id. Guidance for supplier registration can be obtained by downloading PT PLN (Persero)'s Terms of Condition of Goods/Services Procurement Procedures electronically in e-Procurement menu.

Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan Dan/Atau Manajemen Yang Dilakukan Perusahaan (ESOP/MSOP)

Employee/Management Stock Ownership Program (ESOP/MSOP)

Pada tahun 2019, Perusahaan tidak melakukan kebijakan *Employee Stock Ownership Program/ Management Stock Ownership Program* (ESOP/ MSOP). Hal ini disebabkan PLN adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

In 2019, the Company did not implement Employee Stock Ownership Program (ESOP/ MSOP). This was because PLN is a State-Owned Enterprise (BUMN) whose shares are 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia.

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)

Whistleblowing System

Perusahaan telah mengimplementasikan sistem pelaporan pelanggaran atau *Whistleblowing System* ("WBS") sebagai salah satu cara yang dinilai paling efektif untuk mencegah dan memerangi praktik korupsi, suap, dan praktik-praktik kecurangan lainnya yang bertentangan dengan kaidah GCG.

PEDOMAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Sejak tahun 2012, PLN bekerja sama dengan lembaga yang kompeten untuk membuat kajian dan merancang sistem pelaporan pelanggaran yang sesuai dengan kondisi dan budaya Perusahaan, untuk diterapkan di seluruh jajaran bisnis Perusahaan, baik di unit bisnis maupun di anak usaha.

Pada tanggal 20 Desember 2012, Perusahaan secara resmi memberlakukan sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) di seluruh jajaran bisnis PLN melalui Surat Edaran Direksi No. 021.E/DIR/2012 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*). Surat Edaran Direksi tersebut juga mengatur mekanisme pelaporan, perlindungan pelapor dan tindak lanjut dan Pedoman *Whistleblowing System* telah dimutakhirkan pada Tahun 2016 melalui Surat Edaran Direksi No. 008.E/DIR/2016 tanggal 30 September 2016.

PIHAK PENGELOLA *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Penanggung jawab pelaksanaan mekanisme WBS adalah Satuan Pengawasan Intern (SPI) melalui penetapan Surat Edaran Direksi No. 008.E/DIR/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Sistem Pelaporan. Setelah menerima laporan pengaduan, Direktur Utama akan meneruskan laporan pengaduan tersebut kepada *Chief Audit Executive* (CAE) untuk melakukan investigasi di lapangan melalui Tim Investigasi Audit Khusus. Petugas *database* WBS akan mendokumentasikan laporan pengaduan tersebut dan hasil investigasinya. Hasil investigasi

The Company implements a whistleblowing system as the most effective method to prevent and eradicate corruption, bribery and other fraudulent practices, which are contrary to GCG principles.

WHISTLEBLOWING SYSTEM GUIDELINES

Since 2012, PLN has been cooperating with competent institutions to review and design a whistleblowing system according to the Company's conditions and culture, to be applied throughout the Company's business lines, in all business units and subsidiaries.

On December 20, 2012, the Company officially implemented a whistleblowing system in all PLN business lines by issuing Circular of Board of Directors No. 21.E/Dir/2012 concerning Whistleblowing System. The Circular of Board of Directors stipulates reporting mechanism, whistleblower protection and follow-up. Whistleblowing System Manual was updated in 2016 with Circular of Board of Directors No. 008.E/DIR/2016 dated September 30, 2016.

WHISTLEBLOWING SYSTEM MANAGING PARTY

WBS is managed by Internal Audit Unit (SPI) in accordance with Circular of Board of Directors No. 008.E/DIR/2016 dated September 30, 2016 concerning Whistleblowing System. Upon receipt of a whistleblowing report, President Director will forward such report to Chief Audit Executive (CAE) to conduct an investigation through Special Audit Investigation Team. WBS database officer will document the report and the respective investigation results. The investigation results prepared by the Investigation Team are then reported to CAE which subsequently

Tim Investigasi dilaporkan kepada CAE yang selanjutnya melaporkan kepada Direktur Utama dan Executive Vice President Human Capital Management System (EVP HCMS).

PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

Pihak pelapor (internal maupun eksternal PLN) diwajibkan menyampaikan pengaduan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan agar laporan dapat dibuktikan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Pelanggaran yang dilaporkan disebutkan secara singkat dan jelas,
- Pihak terlapor dan terlibat disebutkan dengan jelas nama dan unit kerjanya,
- Waktu dan tempat terjadinya pelanggaran disebutkan dengan,
- Kronologi kejadian diuraikan secara jelas dan lengkap. Lampiran bukti-bukti pelanggaran akan membantu mempercepat proses investigasi.

PENANGANAN PENGADUAN

Mekanisme Penyampaian *Whistleblowing System* adalah sebagai berikut.

reports them to President Director and Executive Vice President of Human Capital Management System (EVP HCMS).

WHISTLEBLOWING SUBMISSION

The whistleblower (PLN internal or external) is required to submit a clear and accountable report to be proven, taking into account the following matters:

- To mention the reported violation briefly and clearly,
- To mention the name and work unit of the reported and involved persons,
- To state the clear timing and place of the violation,
- To state the clear clear and complete chronology of the events, if necessary, to attach evidence of violation to accelerate investigation.

WHISTLEBLOWING HANDLING

The mechanism for delivering Whistleblowing System is as follows.

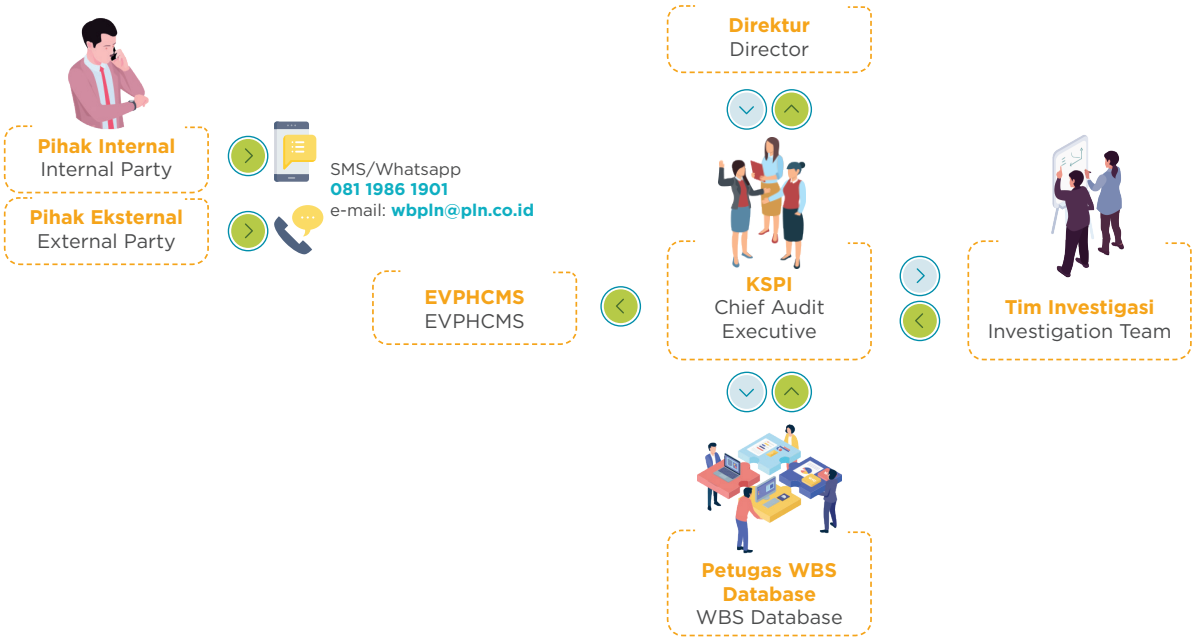

1. Laporan disampaikan melalui saluran khusus: telepon, *short message service* (SMS), atau Whatsapp ke nomor 08119861901, *e-mail* ke wbpln@pln.co.id, dan surat kepada Direktur Utama;
2. Direktur Utama menerima pengaduan pelanggaran dan menetapkan tindak lanjut terhadap pengaduan yang telah diterima;
3. Direktur Utama menyampaikan setiap pengaduan pelanggaran kepada CAE dan diteruskan ke petugas WBS yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi data dan pengumpulan bukti awal yang cukup dan memadai serta menatakerjakan laporan penerimaan pengaduan;
4. Tim investigasi melaksanakan kegiatan investigasi secara menyeluruh dan menyampaikan hasil investigasi kepada CAE untuk diteruskan ke Direktur Utama yang akan menetapkan putusan atas pengaduan tersebut.

   Beberapa putusan yang dapat diterapkan antara lain:
   1. Diberhentikan dan dinyatakan selesai apabila hasil audit atau hasil konfirmasi/keterangan/penjelasan menyatakan bahwa pengaduan tersebut tidak benar atau tidak terbukti;
   2. Meneruskan ke Divisi HCMS untuk proses lebih lanjut pengenaan hukuman disiplin perusahaan apabila terbukti terjadi pelanggaran disiplin;
   3. Dengan pertimbangan Direksi, kasus pelanggaran yang merugikan Perusahaan dapat diserahkan kepada yang berwenang untuk proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan PLN dan hukum yang berlaku. Dalam hal ini akan dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan Tim dari Satuan Hukum Korporat guna memastikan bahwa bukti-bukti yang telah dikumpulkan dinyatakan cukup untuk disampaikan kepada pihak yang berwenang.

PERLINDUNGAN BAGI *WHISTLEBLOWER*

Perusahaan dalam hal ini SPI sebagai penanggung jawab WBS memberikan jaminan perlindungan bagi pelapor pelanggaran sebagai berikut:

1. Reports are submitted via special channels: telephone, short massage service (SMS), or Whatsapp to number 08119861901, e-mail to wbpln@pln.co.id, and a letter to the President Director;
2. The President Director receives complaints of violations and establishes follow-up actions on complaints that have been received;
3. Managing Director forwarded every complaint of violation to CAE and forwarded to the WBS officer appointed to verify data and gathering sufficient initial evidence and adequate and manage reports on receipt of complaints;

4. The investigation team conducts a thorough investigation and submits the investigation results to Chief Audit Executive to be forwarded to President Director for ruling on the report.

   Some decisions that can be applied include:
   1. Dismissed and declared finished if the results of the audit or the results of confirmation/information/explanation state that the complaint is incorrect or not proven;

   2. Forward to the HCMS Division for further processing of disciplinary action if the disciplinary violation is proven;

   3. With the consideration of the Directors, cases of violations that harm the Company can be submitted to the authorities for further processing in accordance with the provisions of PLN and applicable law. In this case communication and coordination will be carried out with the Team of the Corporate Law Unit to ensure that the evidence that has been collected is declared sufficient to be submitted to the authorities.

WHISTLEBLOWER PROTECTION

The Company, in this case SPI, as the managing party of WBS guarantees whistleblower protection as follows:

1. Melindungi kerahasiaan identitas pelapor (nama, alamat, nomor telepon, faksimili, *e-mail*, unit kerja, dan lain-lain). Komunikasi dengan pelapor dilakukan menggunakan media komunikasi e-mail di luar pengelolaan perusahaan (bukan alamat e-mail pln.co.id);
2. Perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor/lembaga pelapor;
3. Perlindungan dari tindakan internal PLN:
   a. Tekanan;
   b. Penundaan kenaikan pangkat/jabatan;
   c. Pemecatan;
   d. Gugatan hukum;
   e. Harta benda hingga tindakan fisik;
   f. Pelindungan yang diberikan tidak hanya berlaku bagi pelapor tetapi dapat diperluas kepada anggota keluarga pelapor.

SANKSI DAN TINDAK LANJUT TAHUN 2019

Selama tahun 2019 Tim WBS menerima 185 laporan pengaduan yang terdiri dari 369 item pengaduan disampaikan melalui media WBS (*e-mail*, surat dan WhatsApp). Dari laporan tersebut, sebanyak 112 pengaduan yang terdiri dari 245 item pengaduan telah selesai dilakukan pemeriksaan dan dibuat Laporan Hasil Audit (LHA). Dari 112 LHA (245 item pengaduan) terdapat 74 item pengaduan (30%) yang terbukti dan 171 item pengaduan (70%) yang tidak terbukti. Mayoritas pengaduan yang terbukti adalah terkait dengan kasus dugaan penyalahgunaan wewenang/jabatan dan fasilitas/asset yaitu 23 laporan pengaduan. Terhadap kasus-kasus yang terbukti SPI telah melaporkan kepada direktur utama untuk diproses tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi *Whistleblowing System* dapat dilihat pada Bagian Pelanggaran Standar Etika dan Sanksi Pelanggaran Tahun 2019.

SOSIALISASI WBS

Setiap tahun, Perusahaan menyelenggarakan sosialisasi WBS kepada para pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Pada tahun 2019, Perusahaan telah melakukan sosialisasi baik secara langsung, melalui portal internal dan situs *web* Perusahaan. Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang sistem pelaporan pelanggaran PLN yang dikelola secara profesional.

1. Whistleblower identity (name, address, phone number, fax, e-mail, work unit and others) is kept confidential. Communication with the whistleblower uses external e-mail (not pln.co.id e-mail);
2. Protection from reprisals from the reported person/institution;
3. Protection from PLN internal measures, such as:
   a. Pressure;
   b. Delay in promotion;
   c. Employment termination;
   d. Lawsuit;
   e. Seizure or physical action;
   f. Protection applies not only to the whistleblower but may be extended to family members of the whistleblower.

SANCTIONS AND FOLLOW-UPS IN 2019

During 2019, WBS Team received 185 reports consisting of 369 items submitted through WBS media (e-mail, letter and WhatsApp). From the report, as many as 112 complaints consisting of 245 complaint items have been completed and examined an Audit Report (LHA). Of the 112 LHA (245 complaint items) there were 74 complaint items (30%) that were proven and 171 complaint items (70%) which were not proven. The majority of proven complaints were related to alleged abuse of authority/position and facilities/assets, representing 23 complaint reports. Proven cases were reported by SPI to President Director for further action in accordance with the applicable regulations. Whistleblowing System sanctions are disclosed in Violations of Code of Conduct and Violations Sanctions in 2019 Section.

WBS SOCIALIZATION

On an annual basis, the Company conducts socialization to the Company's internal and external stakeholders. In 2019, the Company conducted socialization directly, through internal portal and website. The socialization aimed to provide an understanding of the professionally managed PLN's whistleblowing system.

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Reports on Assets of State Officials (LHKPN) Management

KEBIJAKAN

Kebijakan mengenai Penyampaian Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) diatur dalam Peraturan Direksi No. 0074.P/DIR/2017 tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan PT PLN (Persero).

Wajib Lapor LHKPN

Berdasarkan Peraturan Direksi tersebut, pejabat di lingkungan Perusahaan yang wajib menyampaikan LHKPN PLN adalah:

1. Dewan Komisaris dan Direksi,
2. Manajemen Atas (MA),
3. Manajemen Menengah (MM),
4. Manajemen Dasar (MD),
5. Fungsional I, II, III,
6. Pejabat Perencana Pengadaan,
7. Pejabat Pelaksana Pengadaan,
8. Supervisor Atas.

Pengelola LHKPN

1. Perusahaan menunjuk pengelola LHKPN sebagai berikut:
   Koordinator Pelaksana LHKPN adalah Executive Vice President (EVP) Compliance dengan tugas:
   a. Menyiapkan infrastruktur, kebijakan, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program pelaporan LHKPN,
   b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan program pelaporan LHKPN.
2. Admin e-LHKPN yang berada di Kantor Pusat dan unit-unit PLN dengan tugas:
   a. Melakukan pemutakhiran data Wajib Lapor LHKPN di lingkungan PLN pada aplikasi e-LHKPN;
   b. Sebagai *Helpdesk* aplikasi E-LHKPN,
   c. Melakukan *monitoring* progres pelaporan LHKPN.

POLICY

Policy on Report on Assets of State Officials (LHKPN) Form Submission is stipulated in Regulation of Board of Directors No. 0074.P/DIR/2017 concerning Report on Assets of State Officials (LHKPN) Guideline for PT PLN (Persero).

State Officials Required to Submit LHKPN

According to the Regulation of Board of Directors, PLN officials that are required to submit LHKPN include:

1. Board of Commissioners and Directors,
2. Senior Management (MA),
3. Middle Management (MM),
4. Junior Management (MD),
5. Functonal I, II, III,
6. Procurement Planning Officer,
7. Procurement Officer,
8. Senior Supervisor.

LHKPN Managers

1. The Company assigns LHKPN managers as follows:
   LHKPN Coordinator is Executive Vice President (EVP) Compliance with the following duties:
   a. Preparing infrastructure, policies and facilities for LHKPN reporting program,
   b. Monitoring implementation of LHKPN reporting program.
2. e-LHKPN Admin at PLN Head Office and units with the following duties:
   a. Updating data of PLN Officials Required to Submit LHKPN in E-LHKPN application,
   b. Acting as Helpdesk of E-LHKPN application,
   c. Monitoring progress of LHKPN reporting program.

Penyampaian LHKPN Tahun 2019
Pada tahun 2019, tingkat kepatuhan pelaporan mencapai 100% dari 7.974 Wajib Lapor.

Publikasi LHKPN
Perusahaan telah mempublikasikan LHKPN dalam situs *web* www.pln.co.id.

2019 LHKPN Submission
In 2019, the reporting compliance rate reached 100% of 7,974 Officials Required.

LHKPN Publication
The Company publishes LHKPN on website www.pln.co.id.

Kebijakan Anti *Fraud*

Anti Fraud Policy

KEBIJAKAN ANTI *FRAUD*

Kebijakan *Anti Fraud* yang ditetapkan pada tahun 2019 berupa Peraturan Direksi merupakan bentuk komitmen Direksi dalam mendukung peningkatan integritas sebagai bagian dari nilai-nilai budaya Perusahaan, yang menjadi landasan dari strategi dan program-program *Anti Fraud*, baik berupa kebijakan, pedoman, prosedur, petunjuk pelaksanaan, dan ketentuan internal Perusahaan lainnya, sehubungan dengan upaya pemetaan potensi *fraud*, pencegahan, pendeteksian, serta respon terhadap risiko dan kejadian *fraud* di lingkungan PLN.

ANTI FRAUD POLICY

Anti Fraud Policy established in 2019 in the form of Regulation of Board of Directors is a commitment of Board of Directors in supporting encouragement of integrity as part of the Company's cultural values, which forms the basis of Anti-Fraud strategies and programs, including policies, guidelines, procedures, implementation instructions and other internal provisions of the Company, with respect to map potential fraud, prevention, detection, and response to fraud risks and incidents in the PLN environment.

Pencegahan Gratifikasi dan Konflik Kepentingan

Prevention of Gratuity and Conflict of Interest

Perusahaan telah berkomitmen untuk mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang bersih, sehat, dan bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Salah satu perangkat untuk mendukung komitmen tersebut adalah kebijakan mengenai gratifikasi dan konflik kepentingan yang diatur dalam Peraturan Direksi No. 0076.P/DIR/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Peraturan Direksi No. 122.P/DIR/2019 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan

PLN is committed to realizing a corporate management of clean, healthy and free of all forms of Corruption, Collusion and Nepotism (KKN). One of the tools to support this commitment is the policy on gratuity and conflict of interest stipulated in Regulation of Board of Directors No. 0076.P/DIR/2017 concerning Guidelines for Gratuity Control and Regulation of Board of Directors No. 122.P/DIR/2019 concerning Management of Conflict of Interest.

Pedoman Pengendalian Gratifikasi mengatur secara jelas beragam penafsiran mengenai gratifikasi, legal dan illegal yang bertujuan untuk memperkuat posisi Perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya, memaksimalkan nilai Perusahaan secara berkelanjutan serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.

Guidelines for Gratuity Control clearly set various interpretations of legal and illegal gratuities within the Company to strengthen its position in facing business competition, to improve efficiency and effectiveness of resource management, to maximize the Company's value in a sustainable manner and to increase the trust of stakeholders.

Pedoman pengelolaan konflik kepentingan bertujuan sebagai pedoman bagi insan PLN untuk memahami, mencegah, dan mengambil sikap yang tegas terhadap konflik kepentingan di lingkungan Perusahaan. Dengan adanya pengelolaan konflik kepentingan, diharapkan tidak terjadi adanya segelintir orang yang menikmati keuntungan, tetapi akan dicapai persamaan kepentingan menuju perusahaan yang tumbuh dan berkembang, sehingga tujuan perusahaan akan tercapai dan kesejahteraan pegawai meningkat

Management of Conflict of Interest is intended as a guideline for PLN people to understand, prevent, and take a firm attitude towards conflict of interest within the Company. With the management of conflicts of interest, it is expected that certain people will not enjoy the benefits, but an equality of interest will be achieved towards a company that is growing and developing, so that the Company's goals will be achieved and employee welfare will be improved.

PENGAWASAN GRATIFIKASI

Setiap bentuk gratifikasi yang diterima maupun ditolak, wajib disampaikan dan dilaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi yang ditetapkan oleh Direksi. Pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan Perusahaan yang berlaku.

GRATUITY CONTROL

Any form of gratuity received or rejected, must be submitted and reported to Gratuity Control Unit established by PLN's Board of Directors. Violations shall be liable to sanctions in accordance with the applicable laws and regulations as well as the Company's regulations.

ETIKA GRATIFIKASI

Dalam menjalankan kegiatannya, setiap insan PLN wajib menjunjung tinggi komitmen untuk menjalankan usaha yang bebas dengan segala bentuk kecurangan (*fraud*) dan tindakan korupsi dengan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Semua insan PLN dilarang menawarkan atau memberikan suap dan gratifikasi dalam bentuk apapun.
2. Semua insan PLN dilarang meminta atau menerima gratifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari pemangku kepentingan, mitra kerja dan/atau pihak ketiga karena jabatannya, dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
3. Semua insan PLN wajib berpartisipasi untuk menyukseskan program pencegahan korupsi di lingkungan Perusahaan.
4. Semua insan PLN wajib melakukan penolakan secara sopan terhadap segala bentuk pemberian yang tidak sesuai dengan ketentuan pedoman gratifikasi.
5. Semua insan PLN harus melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi atas penerimaan, permintaan, dan/atau penolakan gratifikasi yang dilakukan.

PELAPORAN GRATIFIKASI

Perusahaan membuka saluran untuk melaporkan gratifikasi dalam bentuk aplikasi Compliance Online System yang dapat diakses oleh seluruh insan PLN melalui http://cos.pln.co.id.

PUBLIKASI PELAPORAN GRATIFIKASI

Perusahaan telah mempublikasikan rekap pelaporan Gratifikasi dalam situs web www.pln.co.id

ETHICS RELATED TO GRATUITY

In carrying out their activities, every PLN personnel must uphold a commitment to run a business free of all forms of fraud and corruption by complying with the following provisions:

1. All PLN personnel are prohibited from offering or giving bribes and gratuities, in any form.
2. All PLN personnel are prohibited from directly or indirectly requesting or receiving gratuity from stakeholders, partners and/or third parties for their positions, and as contrary to their obligations or duties.
3. All PLN personnel are required to participate in corruption prevention programs within the Company.
4. All PLN personnel are required to reject courteously against gratuity that is not in accordance with the provisions of the gratuity guidelines.
5. All PLN personnel must report to Gratuity Control Unit on any receipt, request, and/or rejection of gratuity.

GRATUITY REPORTING

The Company provides channels to report gratuity in form of Compliance Online System application that can be accessed by all PLN personnel on http://cos.pln.co.id.

GRATUITY REPORTING PUBLICATION

The Company publishes Gratification reporting file on website www.pln.co.id.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Corporate Governance Implementation of Public Companies

Sesuai dengan Peraturan Jasa Keuangan (POJK) No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, dalam penerapan 5 aspek, 8 prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta 25 rekomendasi yang disampaikan oleh OJK, penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan pendekatan "*comply or explain*" oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

Pursuant to OJK Regulation Number 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of Corporate Governance in Listed Companies and OJK Circular Letter Number 32/SEOJK.04/2015 concerning Corporate Governance Guidelines for Listed Companies, the implementation of 5 (five) aspects, 8 (eight) principles of good corporate governance, and 25 (twenty five) recommendations are required by OJK. The Company hereby submits its responses regarding the implementation of the aspects and principles of good corporate governance based on "comply or explain" approach as follows:

Aspek Aspects	**Prinsip** Principles	**Rekomendasi** Recommendations	**Pelaksanaan** Implementations
A. Hubungan perusahaan terbuka dengan pemegang saham dalam menjamin hak-hak pemegang saham.	Prinsip 1: Meningkatkan nilai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	1.1. Perusahaan terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.	**Terpenuhi** Perusahaan telah memiliki prosedur teknis pengumpulan suara Pemegang Saham (*voting*) dalam pelaksanaan RUPS sebagaimana tertera dalam Tata Tertib RUPS dan sesuai dengan Anggaran Dasar dan *Board Manual* Perusahaan dengan mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham.
A. Relationship between public companies and shareholders in assuring the rights of shareholders.	1st Principle Increase the value of General Meeting of Shareholders.	1.1. Public company has the options or technical procedures of open and closed voting, observing independency and the interests of the Shareholder.	**Complied** The Company already has the voting procedures for the Shareholder in the GMS execution, as stipulated in the GMS Code of Conduct and in accordance with the Articles of Association and Board Manual, by prioritizing the independence and interest of the Shareholder.
		1.2. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perusahaan terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	**Terpenuhi** Dalam setiap pelaksanaan RUPS, Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris hadir sebagaimana tertera dalam Risalah RUPS Tahunan Perusahaan.
		1.2. All members of the BOC and BOD of public company attend the AGMS.	**Complied** In every GMS, all BOD and BOC members are present as stipulated in the Minutes of Annual GMS of the Company.
		1.3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs *web* perusahaan terbuka paling sedikit selama 1 tahun.	**Terpenuhi** Ringkasan Risalah RUPS setiap tahun telah dimuat dalam Laporan Tahunan Perusahaan bagian GCG dan tersedia dalam *website* menu *Stakeholder* bagian Laporan Tahunan.

Aspek Aspects	**Prinsip** Principles	**Rekomendasi** Recommendations	**Pelaksanaan** Implementations
		1.3. GMS minutes available on the website of a public company for at least 1 year.	**Complied** Laporan Tahunan Perusahaan bagian GCG dan tersedia dalam website menu Stakeholder bagian Laporan Tahunan. Summary of Minutes of GMS is published in the Companyís Annual Report of the GCG Section, and is available on the Website on the Stakeholder menu, Annual Report section.
	Prinsip 2: Meningkatkan kualitas komunikasi perusahaan terbuka dengan pemegang saham atau investor.	2.1. Perusahaan terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	**Terpenuhi** Perusahaan telah mempunyai kebijakan terkait komunikasi dengan Pemegang Saham atau investor. Adapun kebijakannya sebagai berikut: Kebijakan Hubungan & Komunikasi dengan Pihak Eksternal & Internal Perusahaan melalui Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0119.P/DIR/2017 tentang Pedoman Tata Kelola *Stakeholder*, Kebijakan Proses Hubungan dengan Investor dan Pemegang Saham melalui Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0002.P/DIR/2018 tentang Kebijakan Pendanaan Melalui Pinjaman, *Board Manual* PT PLN (Persero) serta Kebijakan Pengungkapan Informasi Perusahaan melalui Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 0008.P/DIR/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Komunikasi Perusahaan.
	2nd Principles: Enhancing quality of communications between the public companies with shareholders or investors.	2.1. Public company has communications policy concerning its interaction with the Shareholder or investors.	**Complied** The Company has a policy related to communication with the Shareholder or Investors. The policy is as follows: Policy on Relationship & Communication with Companyís External & Internal Parties through Board Directors Regulation No. 0119.P/DIR/2017 on Stakeholders Governance, Guideline Policy on Relationship with Investors and Shareholder through Board of Directors Regulation No. 0002.P/DIR/2018 on Financing Policy Through Loans,Board Manual and Policy on Disclosure of Company Information through Board of Directors Decision No. 0008.P/DIR/2017 on Corporate Communication Guidelines.
		2.2. Perusahaan terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi perusahaan terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs *web*.	**Terpenuhi** Kebijakan terkait komunikasi dengan Pemegang Saham atau investor terdapat dalam *website* Perusahaan pada Menu Layanan Informasi Publik pada Bagian Mekanisme Pelayanan Informasi Publik. Selain itu di dalam *website* Perusahaan juga tersedia Menu *Request for Meeting* yang memudahkan investor dalam menghubungi kami.
		2.2. Public company discloses its communications policy with the Shareholder or investors via website.	**Complied** Policy related to communication with the Shareholder or investors is on the Companyís website on the Public Information Services Menu in the Public Information Services Mechanism Section. In addition, the Request for Meeting menu is also available on the Companyís website to facilitate the investors to contact us.
B. Fungsi dan peran Dewan Komisaris.	Prinsip 3: Memperkuat keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris.	3.1. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi perusahaan terbuka.	**Terpenuhi** Perusahaan telah memenuhi ketentuan yang berlaku bagi Perusahaan sebagai Perusahaan Terbuka sebagaimana Peraturan OJK No. POJK No.33/POJK.04/2014 Pasal 20 Ayat 1 yaitu Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 orang anggota Dewan Komisaris. Penentuan jumlah Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dan telah mempertimbangkan kondisi Perusahaan, yang mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan.
B. Function and role of the BoC	3rd Principle: Strengthen the BoC membership and composition.	3.1. The determination of number of the BOC members considers the condition of public company.	**Complied** The Company complies with the applicable requirements as a Public Company, as stipulated in the OJK Regulation No. POJK No.33/POJK.04/2014 Article 20 Paragraph 1, i.e. BOC must consist of at least 2 members of BOC. The number of Board of Commissioners is determined by the GMS with due regards to the Companyís condition, which is in accordance with the prevailing laws and regulations and the Companyís Articles of Association.

Aspek Aspects	**Prinsip** Principles	**Rekomendasi** Recommendations	**Pelaksanaan** Implementations
		3.2. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan.	**Terpenuhi** Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dan telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Hal ini juga mengacu pada *Board Manual* dan berdasarkan latar belakang keahlian dan riwayat pekerjaan anggota Dewan Komisaris. Komposisi anggota Dewan Komisaris merupakan hak dari RUPS. Selama Tahun 2019, Dewan Komisaris PLN memiliki latar belakang keahlian yang mencakup bidang keuangan/ekonomi, hukum dan kelistrikan.
		3.2. The BOC composition considers diversity of skills and knowledge.	**Complied** GMS determines the composition of BOC, taking into account the skills diversity, knowledge, and experienced needed. This also refers to the Board Manual and is based on the expertise and history of the work of members of BOC. The composition of the members of BOC is the right of the GMS. During 2019, PLNs BOC has a background of expertise which covers the areas of finance/economics, law, and electricity.
	Prinsip 4: Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.	4.1. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	**Terpenuhi** Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris yang diungkap dalam Laporan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris PT PLN (Persero) Tahun 2019
	4th Principle: Enhance the quality of the BoC duties and responsibilities performance.	4.1. The BOC has a self-assessment policy to measure the Boardís performance.	**Complied** BOC has their own self-assessment policy to evaluate the BOC performance, which is disclosed in the PT PLN (Persero) Supervisory Report of the BOC 2019.
		4.2. Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui laporan tahunan perusahaan terbuka.	**Terpenuhi** Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris yang tercantum dalam *Board Manual* Dewan Komisaris telah diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan bagian Tata Kelola Perusahaan.
		4.2 Self-assessment policy to appraise the BOC performance is disclosed in the annual report of a public company.	**Complied** Self-assessment policy to evaluate BOC performance, which is stipulated in the Board Manual of BOC, is disclosed in the Companyís Annual Report in the Corporate Governance chapter.
		4.3. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	**Terpenuhi** Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan *Board Manual*.
		4.3. The BOC has policy concerning membersí resignation in the event that a member is involved in financial crimes.	**Complied** BOC has their own policy related to resignation of member of BOC if involved in financial crime, which is stated in the Articles of Association and Board Manual.

Aspek Aspects	**Prinsip** Principles	**Rekomendasi** Recommendations	**Pelaksanaan** Implementations
		4.4. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi.	**Terpenuhi** Perusahaan telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR). Salah satu tugas Komite NR adalah memastikan Direksi telah melaksanakan proses rekrutmen, pengembangan karier, nominasi dan remunerasi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Komite NR akan menyeleksi kandidat internal dan hasil pemilihan kandidat internal tersebut kemudian diajukan kepada Kementerian BUMN untuk proses suksesi Direksi dan menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi Perusahaan yang diatur dalam *Board Manual* yang telah mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER 03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.
		4.4. The BOC or committee that exercises the nomination and remuneration function develop succession policy in the process of Directors nomination.	**Complied** The Company has Nomination and Remuneration Committee (KNR). One of the duties of Nomination and Remuneration Committee is to carry out the recruitment process, career development, nomination and remuneration, in accordance with the provisions that have been set. Nomination and Remuneration Committee will select the internal candidate and the result of the selection of the internal candidate is then submitted to the Ministry of SOEs for the succession process of BOD and to undertake the fit and proper test. Succession policy in the Nomination process of members of BOD is governed by the Board Manual, which refers to the Minister of SOEs Regulation No. PER-03/MBU/02/2015 on the Requirements and Procedures to Appoint and Dismiss Members of BOD of State-Owned Enterprises.
C. Fungsi dan peran Direksi.	Prinsip 5: Memperkuat keanggotaan dan komposisi Direksi.	5.1. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi perusahaan terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.	**Terpenuhi** Perusahaan telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai Perusahaan Terbuka sebagaimana Peraturan OJK No. POJK No.33/POJK.04/2014 Pasal 2 Ayat 1 yaitu Direksi Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 orang anggota Direksi. Penentuan jumlah Direksi ditetapkan oleh RUPS dan telah mempertimbangkan kondisi Perusahaan, yang mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan.
C. BoD function and role.	5th Principle: Strengthen the BoD membership and composition.	5.1. In identifying number of the BOD members, public company considers its condition and decision making effectiveness.	**Complied** The Company complies with the applicable requirements as a Public Company, as stipulated in the OJK Regulation No. POJK No.33/POJK.04/2014 Article 2 Paragraph 1, i.e. The Directors of Issuers or Public Company must at least consist of 2 members of BOD. The number of BOD is determined by the GMS with due regards to the Companyís condition, which is in accordance with the prevailing laws and regulations and the Companyís Articles of Association.
		5.2. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman, keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	**Terpenuhi** Penentuan komposisi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Hal ini juga mengacu pada *Board Manual* dan berdasarkan latar belakang keahlian dan riwayat pekerjaan anggota Direksi. Komposisi anggota Direksi merupakan hak dari RUPS. Selama tahun 2019, Direksi PLN memiliki latar belakang keahlian yang mencakup bidang ekonomi/keuangan, hukum, dan kelistrikan.
		5.2. The BOD composition reflects necessary diversity of skills, knowledge, and experience.	**Complied** GMS determines the composition of BOD, taking into account the skills diversity, knowledge, and experienced needed. This also refers to the Board Manual and is based on the expertise and history of the work of members of BOD. The composition of the members of BOD is the right of the GMS. During 2019, PLNís BOD has a background of expertise which covers the areas of finance/economics, law, and electricity.

Aspek Aspects	**Prinsip** Principles	**Rekomendasi** Recommendations	**Pelaksanaan** Implementations
		5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	**Terpenuhi** Direktur Keuangan Perusahaan adalah seorang ahli keuangan yang berpengalaman di bidang Keuangan. Direktur Keuangan berpengalaman sebagai Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dan Lembaga Pembiayaan Expor Indonesia. Direktur Keuangan memiliki latar belakang pendidikan Magister Manajemen dari IPMI dan MBA dari Monash University.
		5.3. The BOD members responsible for accounting or finance have relevant expertise and knowledge.	**Complied** The Companyís Director of Finance is an experienced financial expert in finance industry. She was the President Director of PT Penjaminan Infrastucture Indonesia and Indonesia Exim Bank. She graduate master degree from IPMI and MOnash University..
	Prinsip 6: Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung Jawab Direksi.	6.1. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi.	**Terpenuhi** Perusahaan memiliki penilaian sendiri untuk menilai kinerja Direksi melalui Kinerja Unggul (KPKU) dan Key Performance Indicator (KPI) masing-masing Direktorat selama tahun 2019.
	6th Principle: Enhance the quality of the BoD duties and responsibilities performance.	6.1. The BOD has a self-assessment policy to measure BoD performance.	**Complied** The Company has its own assessment to assess BOD performance through Superior Performance (KPKU) and Key Performance Indicator (KPI) of each Directorate in 2019.
		6.2. Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan perusahaan terbuka.	**Terpenuhi** Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi telah tercantum dalam Laporan Tahunan PLN.
		6.2. Self-assessment policy to appraise the BOD performance is disclosed in annual report of the public company.	**Complied** Self-assessment policy to evaluate BOD performance is stated in PLN Annual Report.
		6.3. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	**Terpenuhi** Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan *Board Manual*.
		6.3. The BOD has a policy concerning member resignation in the event that a member is involved in financial crimes.	**Complied** BOD has their own policy related to resignation of member of BOD if involved in financial crime, which is stated in the Company Articles of Association and Board Manual.
D. Partisipasi pemangku kepentingan.	Prinsip 7: Meningkatkan aspek tata kelola perusahaan melalui partisipasi pemangku kepentingan.	7.1. Perusahaan terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*.	**Terpenuhi** Tercantum dalam Kebijakan Transaksi Keuangan Perusahaan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0054.K/DIR/2014 tentang Pedoman Transaksi Keuangan antara PT PLN (Persero) dengan Mitra Kerja guna Mendukung PLN Bersih.
D. Stakeholder participation	7th Principle: Enhance corporate governance through stakeholders participation.	7.1. Public company has in place the policy to prevent insider tradings.	**Complied** Listed in the Companyís Financial Transaction Policy, which is stipulated based on the PT PLN (Persero) Board of Directors Regulation No. 0054.K/DIR/2014 on Financial Transactions Guideline between PT PLN (Persero) and Partners to Support PLN Bersih.

Aspek Aspects	**Prinsip** Principles	**Rekomendasi** Recommendations	**Pelaksanaan** Implementations
		7.2. Perusahaan terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan *anti fraud*.	**Terpenuhi** Tercantum dalam Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT PLN (Persero) dan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0076.P/DIR/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di PT PLN (Persero). Perusahaan juga telah memiliki Peraturan Direksi No. 0121.P/DIR/2019 tentang Kebijakan *Anti Fraud* di Lingkungan PT PLN (Persero).
		7.2. Public company has in place the anti-corruption and anti-fraud policies.	**Complied** Listed in the PT PLN (Persero) Code of Conduct and PT PLN (Persero) Board of Directors Regulation No. 0076.P/DIR/2017 on Gratuity Control Guidelines at PT PLN (Persero). PT PLN (Perseo) also has the Board of Directors Regulation No. 0121.P/DIR/2019 on Anti Fraud Guidelines at PT PLN (Persero).
		7.3. Perusahaan terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	**Terpenuhi** Proses seleksi pemasok tercantum dalam Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 0164.P/DIR/2019Tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero). Dalam pelaksanaan Proses Pengadaan, Perusahaan menggunakan Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) dimana daftar tersebut diperbaharui setiap tahun. Pemasok atau Vendor dapat setiap saat mengajukan untuk menjadi DPT, di samping itu Perusahaan senantiasa melakukan peningkatan kemampuan vendor melalui pertemuan dengan pemasok dan melakukan survei terhadap kualitas Pemasok serta survei Pemasok kepada Perusahaan.
		7.3. Public company has in place the policy on suppliers or vendors selection and capability.	**Complied** The supplier selection process is listed in the Policy on Procurement of Goods/Services, based on the PT PLN (Persero) Board of Directors No. 0164.P/DIR/2019 on Guideline of Procurement of Goods/Services at PT PLN (Persero). In the Procurement Process, the Company uses a List of Selected Providers (DPT), and the list is updated annually. Supplier or Vendor may at any time propose to become DPT. In addition, the Company continuously improves the vendorsí capability through gathering with suppliers and conducting surveis on Supplier quality and surveis on Supplier to Company.
		7.4. Perusahaan terbuka memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-hak kreditur.	**Terpenuhi** Tercantum dalam Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0119.P/DIR/2017 tentang Pedoman Tata Kelola Stakeholder dan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0002.P/DIR/2018 tentang Kebijakan Pendanaan melalui Pinjaman.
		7.4. Public company has in place the policy to fulfill the rights of creditors.	**Complied** Listed in the PT PLN (Persero) Board of Directors Regulation No. 0119.P/DIR/2017 on Stakeholder Governance Guidelines and PT PLN (Persero) Board of Directors Regulation No. 0002.P/DIR/2018 on Financing Policy through Loans.
		7.5. Perusahaan terbuka memiliki kebijakan sistem *whistleblowing*.	**Terpenuhi** Kebijakan WBS berdasarkan Surat Edaran Direksi PT PLN (Persero) No. 0008.E/DIR/2016 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang dikeluarkan pada tanggal 30 September 2016 dan dipublikasikan di Laporan Tahunan.
		7.5. Public company has in place the whistleblowing system policy.	**Complied** WBS Policy is based on PT PLN (Persero) Board of Directors Circular Letter No. 0008.E/DIR/2016 on Whistleblowing System, which is issued on September 30, 2016, and published on the Annual Report.

Aspek Aspects	**Prinsip** Principles	**Rekomendasi** Recommendations	**Pelaksanaan** Implementations
		7.6. Perusahaan terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	**Terpenuhi** Mengacu kepada Keputusan RUPS berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya. Sedangkan untuk karyawan, kebijakan tersebut terdapat dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 379.K/DIR/2010 Tentang Human Capital Management System.
		7.6 Public company has in place a policy of long term incentives for the directors and employees.	**Complied** Referring to the GMS Resolution, based on the Minister of SOEs Regulation No. PER-04/MBU/2014 on Guidelines for Remuneration of Directors, Board of Commissioners, and Board of Trustees of State-Owned Enterprise and its amendment. As for employees, the policy is set forth in the PT PLN (Persero) Board of Directors Decision No. 379.K/DIR/2010 on Human Capital Management System.
E. Keterbukaan informasi.	Prinsip 8: Meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi.	8.1. Perusahaan terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs *web* sebagai media keterbukaan informasi.	**Terpenuhi** Selain *website*, Perusahaan memanfaatkan teknologi informasi dan aplikasi media sosial lainnya seperti melalui Aplikasi *Mobile, E-mail*, Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, Call Center. Aplikasi Android & IOS: PLN Mobile Twitter: @pln_123 Facebook: PLN 123 Instagram: @plnkita Youtube: PT PLN (Persero) Call Centre: 123
E. Information transparency.	8th Principle: Enhance information disclosure implementation.	8..1. Public company utilises range of information technology platforms other than website as channels of information disclosure.	**Complied** In addition to the website, the Company utilizes information technology and other social media applications, such as through Mobile Application, E-mail, Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, and Call Center. Android & iOS Applications: PLN Mobile, Twitter: @pln_123, Facebook: PLN 123, Instagram: @plnkita, Youtube: PT PLN (Persero), Call Centre: 123
		8.2. Laporan tahunan perusahaan terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka paling sedikit 5%, selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	**Terpenuhi** Dalam laporan Tahunan 2019 ini, telah diungkapkan bahwa 100% kepemilikan saham dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, sehingga tidak ada pemegang saham lain yang mempunyai kepemilikan saham lebih dari 5%.
		8.2. Annual report of public company discloses the ultimate beneficiaries of at least 5% shareholding in the public company, in addition to the disclosures of ultimate beneficiaries of shareholding in a public company through majority and controlling Shareholder.	**Complied** In this Annual Report 2019, it has been disclosed that 100% of the shares are owned by the Republic of Indonesia. Thus, there are no other shareholders who own more than 5% of share ownership.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

462 **TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL**
Corporate Social Responsibility Governance

463 **Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)**
The Commitment and Policies on Corporate Social Responsibility (CSR)

465 **Perumusan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**
Formulation of Corporate Social Responsibility

469 **Perencanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**
Corporate Social Responsibility Planning

473 **Uraian Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial**
Description of the Implementation of Social Responsibility Programs

475 **Pengukuran Capaian Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**
Measurement of the Achievement of Corporate Social Responsibility Implementation

478 **TANGGUNG JAWAB SOSIAL YANG TERKAIT ASPEK OPERASI YANG ADIL**
Corporate Social Responsibility Related to Fair Operations

490 **PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL YANG TERKAIT ASPEK HAK ASASI MANUSIA**
Social Responsibilities Program Related to Human Rights Aspects

500 **PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL YANG TERKAIT DENGAN KETENAGAKERJAAN**
Social Responsibility Program Related to Employment

514 **PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL YANG TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN HIDUP**
Corporate Social Responsibility Related to The Environment

540 **PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL YANG TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN**
Corporate Social Responsibility on Social and Community Development

556 **PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT DENGAN TANGGUNG JAWAB KEPADA KONSUMEN**
Customer-Oriented Social Responsibility Program

SAVE THE PLANET
STOP POLLUTION
PLASTIC
PAPER
ORGANIC
METAL

Tanggung Jawab Sosial

Corporate Social Responsibility

Eksistensi bisnis PLN di bidang ketenagalistrikan bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan mendorong kegiatan ekonomi bangsa. Sesuai dengan prinsip *Triple Bottom Lines*, tujuan tersebut diupayakan dengan menyelaraskan kinerja di aspek ekonomi, sosial maupun lingkungan.

The existence of PLN's business in the electricity sector aims to improve the quality of people's lives and encourage the economic activities of the nation. In accordance with the principle of Triple Bottom Lines, this goal is pursued by harmonizing performance in economic, social and environmental aspects.

PLN sebagai perusahaan yang bergerak di industri ketenagalistrikan memiliki rantai nilai yang sangat luas, meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi dan jasa lain terkait kelistrikan. Aktivitas operasional Perusahaan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia tentu berpotensi memberikan eskalasi dampak, baik positif maupun negatif pada tatanan sosial masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Jika dampak tersebut tidak dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan risiko yang lebih besar terhadap aktivitas operasional Perusahaan. Sebaliknya, penerimaan dan dukungan masyarakat atas keberadaan Perusahaan di lingkungannya menjadi salah satu kunci keberhasilan Perusahaan dalam mencapai keberlanjutan usaha jangka panjang.

Oleh karena itu, Perusahaan senantiasa membina hubungan yang baik dan saling memberi manfaat kepada para pemangku kepentingan utama dengan menunjukkan empati dan tanggung jawab yang tinggi terhadap kondisi sosial masyarakat dan lingkungan hidup sekitar. Melalui penerapan program-program tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* ("CSR") berbasis ISO 26000 yang berkualitas dan berkelanjutan, Perusahaan berupaya berbagi manfaat untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat serta menjaga kelestarian alam.

As a company engaging in the electricity industry, PLN has a very broad value chain, including power generation, transmission, distribution and other services related to electricity. With operational areas spread throughout Indonesia, PLN's activities likely will lead to an escalation of impacts, both positive and negative, on the social fabric of the community and on the well being of surrounding environment. Unless the impact is properly managed, they may pose a greater risk to the Company's operations. On the hand, the community acceptance and support for the presence of the Company in their neighborhood is the one key to securing the Company's success in achieving long-term business sustainability.

Therefore, the Company continues to foster good relations that are mutually beneficial with the key stakeholders, among others by extending its empathy and high responsibility towards the social conditions of the community and the surrounding environment. the Company seeks to share benefits from its activities through the implementation of quality and sustainable ISO 26000-based Corporate Social Responsibility ("CSR") programs, with the objective of enhancing the economic independence of the community and preserving the nature.

Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial

Corporate Social Responsibility Governance

Tujuan pelaksanaan program CSR adalah mewujudkan misi Perusahaan sekaligus menciptakan pertumbuhan yang berkualitas dan memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

The purpose of implementing the CSR program is to realize the Company's mission while creating quality growth and meeting the expectations of all stakeholders while maintaining environmental sustainability.

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR)

Komitmen

PLN memahami bahwa keberlanjutan usaha jangka panjang tidak akan tercapai hanya melalui pemenuhan target-target operasional dan finansial saja. Perusahaan harus menjaga keseimbangan antara capaian kinerja ekonomi dengan kinerja sosial dan lingkungan. Nilai ekonomi yang diperoleh Perusahaan dari kegiatan usaha selayaknya juga memberi manfaat bagi masyarakat sekitar, lingkungan, pegawai dan pelanggan, melalui program-program CSR yang berkualitas dan berkelanjutan.

Kebijakan

CSR adalah program Perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh PLN untuk menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan.

Sasaran CSR adalah kepada pemangku kepentingan agar proses operasional Perusahaan dapat berjalan maju dan sukses secara berdampingan sejalan dengan kesuksesan Perusahaan. Selain itu, CSR juga untuk membantu kelancaran operasional bisnis Perusahaan dan nilai-nilai dari semua pemangku kepentingan, yang terdiri dari pelanggan, pemasok barang dan jasa, investor, karyawan serta masyarakat lingkungan yang ada di sekitar lokasi Perusahaan.

Manfaat CSR

1. Mengurangi biaya risiko proses beroperasinya Perusahaan (manajemen risiko);
2. Menurunkan tekanan dari pihak luar;
3. Meningkatkan kepuasan pegawai;
4. Memperbaiki citra, mutu dan produktivitas Perusahaan;
5. Meningkatkan loyalitas pelanggan;
6. Mempermudah akses dana/modal.

Visi dan Misi CSR

Setiap program CSR dirancang dengan melibatkan para pihak dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan CSR sebagaimana dirumuskan dalam visi dan misi CSR yang telah disetujui oleh Direksi Perusahaan untuk diterapkan secara konsisten.

THE COMMITMENT AND POLICIES ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Commitment

PLN truly understands that achieving long-term business sustainability requires more than meeting operational and financial targets. The company must also be able to maintain a balance between the achievement of economic performance with social and environmental performance. The economic value obtained by the Company from business activities should also benefit the surrounding community, the environment, employees and customers, through quality and sustainable CSR programs.

Policy

CSR is a program run by PLN as a form of social and environmental responsibility, as well as to establish good relations with stakeholders.

CSR targets are stakeholders so that the Company's operational processes can progress and succeed, alongside the Company's success. In addition, CSR is also to help the smooth running of the Company's business operations and create values for all stakeholders, consisting of customers, suppliers of goods and services, investors, employees and the community around the Company's location.

Benefits of CSR

1. Reducing the risk costs of the Company's operations process (risk management);
2. Reducing pressure from outside parties;
3. Increase employee satisfaction;
4. Improve the company's image, quality and productivity;
5. Increase customer loyalty;
6. Facilitate access to funds/capital.

CSR Vision and Mission

Each CSR program is designed by involving many parties in designing, implementing, and evaluating CSR activities as formulated in the CSR vision and mission that has been approved by the Company's Board of Directors, to be applied consistently.

Visi
Vision

Menjadikan program TJSL dan PKBL PT PLN (Persero) terdepan dalam meningkatkan kebutuhan kelistrikan dengan tetap memperhatikan keharmonisan seluruh pemangku kepentingan dan lingkungan.

To make the PT PLN (Persero) social and environmental responsibility and Partnership & Community Development programs as the foremost in increasing electricity needs while continue to pay attention to the harmony of all stakeholders and the environment.

Misi
Mission

Melaksanakan kegiatan sosial untuk membantu menjembatani semua kepentingan pemangku kepentingan Perusahaan agar dapat berlangsung secara sinergis demi memajukan citra Perusahaan.

To carry out social activities for bridging all the Company's stakeholders interests so that they can be held synergistically in order to increase the Company's image.

Tujuan CSR

Tujuan pelaksanaan program CSR adalah mewujudkan misi Perusahaan sekaligus menciptakan pertumbuhan yang berkualitas dan memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan yang meliputi pelanggan, mitra kerja, pemerintah, pegawai, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, media massa serta masyarakat sekitar, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

CSR Purposes

The purpose of implementing the CSR program is to realize the Company's mission while creating quality growth and meeting the expectations of all stakeholders including customers, business partners, government, employees, non-governmental organizations, mass media and surrounding communities, while maintaining environmental sustainability.

Tujuan Kegiatan TJSL
Objectives of TJSL Activities

The objectives of implementing PLN TJSL activities are:

1. Mewujudkan hubungan yang harmonis antara Perusahaan dengan masyarakat.
2. Membantu tumbuh dan berkembangnya usaha kecil dan koperasi yang mandiri, tangguh dan berdaya saing dengan pengelolaan yang profesional.
3. Mengembangkan pola pembinaan usaha kecil dan koperasi, dengan mengedepankan aspek pemerataan, kemandirian, profesional, dan etika.
4. Memelihara kelestarian lingkungan hidup, serta membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.

The objectives of implementing PLN TJSL activities are:

1. Realizing a harmonious relationship between the Company and the communities.
2. To grow and develop small businesses and cooperatives that are independent, resilient and competitive with professional management.
3. To develop a fostering pattern of small businesses and cooperatives, by prioritizing aspects of equity, independence, professionalism and ethics.
4. To maintain environmental preservation, and to improve the communities' quality of life which includes education, health and welfare aspects.

Organisasi Pengelola CSR

Di dalam struktur organisasi PLN, Bidang *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dipimpin oleh VP CSR merupakan subordinat dari Divisi Corporate Communication and CSR yang berada di bawah Direktorat Human Capital Management. VP CSR membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Manager yaitu:

1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan CSR dan PKBL,
2. Sub Bidang Program CSR dan PKBL, dan
3. Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan.

PERUMUSAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Melakukan Uji Tuntas terhadap Tanggung Jawab Sosial Terkait Dampak Kegiatan Perusahaan pada Pemangku Kepentingan dan Pembangunan Berkelanjutan

Proses uji tuntas terhadap tanggung jawab sosial terkait dampak kegiatan Perusahaan pada pemangku kepentingan dan pembangunan berkelanjutan tercantum dalam Rencana Jangka Panjang (RJP) PT PLN (Persero). Proses uji tuntas dimulai dengan melakukan analisis lingkungan mencakup identifikasi pemangku kepentingan yang terdampak dan ekspektasinya, RUPTL, Rencana Strategis BUMN, PESTEL, dan *Porter's Five Forces,* termasuk juga dengan melakukan analisa pada kinerja, kompetensi, SDM, keuangan dan proses bisnis. Setelah melakukan analisis lingkungan, tahapan berikutnya adalah *Scenario Planning, Strategic Direction, Strategic Objective, Strategy Map, Strategic Initiative*, Proyeksi Keuangan, Analisa Risiko hingga proses *Review Final*.

Pendekatan yang Dilakukan Dalam Mengenali dan Merumuskan Tanggung Jawab Sosial dan Pemangku Kepentingan Penting Perusahaan

Sejak tahun 2018, PLN melakukan *gap analysis* kinerja CSR Perusahaan menurut ISO 26000 Social Responsibility (SR). Standar ISO 26000 SR merupakan panduan tanggung jawab sosial untuk meningkatkan dampaknya pada pegawai, lingkungan dan komunitas. Pengukuran praktik tanggung jawab sosial PLN berbasis ISO 26000 memperoleh indeks sebesar 88,68% dan dikategorikan sudah sesuai (*conformity*) dengan ISO 26000.

CSR Management Organization

Within the PLN organizational structure, Corporate Social Responsibility (CSR), which is headed by VP CSR, is under the Corporate Communication and CSR Division, which is under the Directorate of Human Capital Management. CSR VP is in charge of 3 (three) Subdivisions, each of which is led by a Manager, namely:

1. Sub Division of CSR and PKBL Planning and Development,
2. Sub Division of CSR and PKBL Programs, and
3. Sub Division of Monitoring and Reporting.

FORMULATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Conduct Due Diligence on Social Responsibility related to the Impact of Corporate Activities on Stakeholders and Sustainable Development

The due diligence process on social responsibility related to the impact of the Company's activities on stakeholders and sustainable development has been stated in PT PLN (Persero) 's Long Term Plan (RJP). The due diligence process begins with conducting an environmental analysis including identification of affected stakeholders and their expectations, RUPTL, BUMN Strategic Plan, PESTEL, and Porter's Five Forces, including by analyzing performance, competence, human resources, finance and business processes. After conducting an environmental analysis, the next steps are Scenario Planning, Strategic Direction, Strategic Objectives, Strategy Maps, Strategic Initiatives, Financial Projections, Risk Analysis to the Final Review process.

Approach Taken in Recognizing and Formulating Social Responsibility and Important Stakeholders of the Company

Since 2018, PLN has conducted a gap analysis of the Company's CSR performance according to ISO 26000 Social Responsibility (SR). The ISO 26000 SR standard is a guide to social responsibility in increasing impact on employees, the environment and the community. The measurement of PLN social responsibility practices based on ISO 26000 obtained an index of 88.68% and was categorized in conformity with ISO 26000.

Menurut ISO 26000, tanggung jawab sosial adalah tanggung jawab organisasi terhadap dampak keputusan dan kegiatan organisasi tersebut pada manusia dan lingkungan, berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, memperhitungkan harapan pemangku kepentingan, bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma perilaku internasional, dan terintegrasi di seluruh organisasi serta dipraktekkan dalam hubungannya dengan berbagai pihak. Maka, kegiatan CSR Perusahaan tidak hanya berupa kegiatan pelibatan dan pengembangan masyarakat tetapi lebih luas lagi adalah tanggung jawab Perusahaan atas dampak bisnis kepada pemangku kepentingan (internal dan eksternal) dan lingkungan, serta berbagai kontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan.

According to ISO 26000, social responsibility is the responsibility of the organization for the impact of the decisions and activities of the organization on people and the environment, which contribute to the goals of sustainable development, including public health and welfare, taking into account stakeholder expectations, acting in accordance with applicable law and consistent with norms of international behavior, and integrated throughout the organization and practiced in relation to various parties. Thus, the Company's CSR activities are not only in the form of community engagement and development activities but more broadly is the Company's responsibility for the impact of the business on stakeholders (internal and external) and the environment, as well as various contributions to sustainable development goals.

Pada dasarnya, kegiatan CSR PLN sangat berkaitan dengan aktivitas usaha Perusahaan. Sebagai BUMN, selain sebagai entitas bisnis yang berorientasi profit, PLN juga menjalankan fungsi sebagai agen pembangunan, melayani kepentingan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan listrik. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat menjadi nilai utama pengembangan bisnis PLN. Hal ini sesuai dengan salah satu *core subject* ISO 26000 yaitu pemenuhan tanggung jawab korporasi terhadap pelanggan.

Basically, PLN's CSR activities are closely related to the Company's business activities. As an SOE, aside from being a profit-oriented business entity, PLN must also function as an agent of development, serving the interests of the community in meeting electricity needs. Fulfillment of community needs becomes the main value of PLN's business development. This is in accordance with one of the core subjects of ISO 26000, namely the fulfillment of corporate responsibility towards customers.

Dampak Penting yang Terkait Secara Langsung atau Tidak Langsung Aktivitas dan Keputusan Perusahaan

Dengan area operasional yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, PLN memiliki interaksi yang luas dengan pemasok dan mitra kerja. Interaksi tersebut berdampak positif pada kinerja Perusahaan dan menciptakan lapangan kerja, yang pada akhirnya akan memacu pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional.

Significant Impacts that are Directly or Indirectly Related to the Company Activities and Decisions

With operational areas covering all parts of Indonesia, PLN has extensive interactions with suppliers and business partners. This interaction has a positive impact on the Company's performance and creates jobs, which in turn will spur local and national economic growth.

Jumlah mitra kerja yang terlibat dalam operasional Perusahaan cukup besar tergantung pada skala unit bisnis dan kompleksitas pekerjaan di wilayah regional masing-masing. Hubungan Perusahaan dengan para mitra kerja berdasar pada asas profesionalisme, dengan mempertimbangkan berbagai persyaratan termasuk standar mutu, manajemen lingkungan serta manajemen

The number of partners involved in the Company's operations is quite large depending on the scale of the business units and the complexity of the work in each regional area. The Company's relationship with partners is based on the principle of professionalism, taking into account various requirements including quality standards, environmental management and occupational

keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Pada beberapa proyek pembangunan dan operasional pembangkit skala besar, PLN juga mengharuskan pemenuhan aspek Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pembangunan pembangkit, saluran transmisi dan distribusi maupun kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh para mitra kerja.

safety and health (K3) management. In several large scale power plant development and operation projects, PLN also requires the fulfillment of human rights aspects in the construction of plants, transmission and distribution channels as well as in the procurement of goods and services by working partners.

Penjelasan Perusahaan Telah Melakukan *Review* terhadap Seluruh Regulasi Isu-Isu Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan secara berkala melakukan *review* atas seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait aspek pengabdian masyarakat dan atau lingkungan, mulai dari UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 19/2003 tentang BUMN, Peraturan Menteri (Permen) BUMN No.PER/MBU/2007 tentang PKBL hingga perubahan terbarunya Permen No. PER-02/MBU/04/2020, Panduan Implementasi CSR ISO 26000 dan sebagai. Berdasarkan hasil *review* tersebut, PLN memperbarui atau merevisi regulasi internal untuk disesuaikan dengan regulasi di atasnya. Pada tahun 2019, PLN menerbitkan dua Peraturan Direksi (Perdir) terbaru terkait CSR yaitu Perdir No. 138/P/DIR/2019 tentang Pedoman *Corporate Social Responsibility* (CSR) Berbasis ISO 26000 dan Perdir No. 1035.P/DIR/2019 tentang Standard Operation Procedure (SOP) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di Lingkungan PT PLN (Persero).

Explanation that the Company has Conducted a Review of All Regulations on Social Responsibility Issues

The Company regularly reviews all laws and regulations relating to community service and/or environmental aspects, starting from Law no. 40/2007 concerning Limited Liability Companies, Law No. 19/2003 concerning SOEs, SOE Ministerial Regulation (Permen) No.PER/MBU/2007 concerning PKBL until the latest amendment to Permen No. PER-02/MBU/04/2020, ISO 26000 CSR Implementation Guidelines and so on. Based on the results of the review, PLN then updates or revises internal regulations to match the regulations above. In 2019, PLN issued the two latest Board of Directors Regulations (Perdir) related to CSR namely Perdir No. 138/P/DIR/2019 concerning Guidelines for ISO 26000-Based Corporate Social Responsibility (CSR) and Perdir No. 1035.P/DIR/2019 concerning Standard Operation Procedure (SOP) for the Partnership and Community Development Program (PKBL) within PT PLN (Persero).

PLN telah mengintegrasikan aspek pengelolaan lingkungan hidup ke dalam strategi bisnis dan operasi Perusahaan dengan menetapkan aspek lingkungan sebagai salah satu unsur penilaian dalam kinerja unit bisnis PLN di seluruh Indonesia. Dengan demikian, Perusahaan dapat mengevaluasi kinerja pemenuhan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan untuk meminimalisasi dampak aktivitas unit bisnis terhadap lingkungan secara terukur.

PLN has integrated the aspects of environmental management into the Company's business strategy and operations by establishing environmental aspects as one of the assessment elements in the performance of PLN's business units throughout Indonesia. As such, the Company can evaluate compliance performance with environmental legislation in order to minimize the measurable impact of business unit activities on the environment.

Informasi dan Uraian Singkat tentang Mekanisme Merumuskan Isu-Isu Penting Tanggung Jawab Sosial

Dalam mengelola bisnis kelistrikan, PLN tidak hanya harus menjaga keandalan layanan, aspek finansial dan investasi, tetapi juga harus mampu menjawab tantangan sosial, ekonomi dan lingkungan yang timbul dari aktivitas Perusahaan.

Information and Brief Description of the Mechanism for Formulating Important Issues of Social Responsibility

In managing the electricity business, PLN must not only maintain service reliability, financial and investment aspects, but must also be able to respond to social, economic and environmental challenges arising from the Company's activities.

PLN berkomitmen untuk mengelola dampak lingkungan dari setiap aktivitas, produk dan jasa yang disediakan.

Sebagai perusahaan ketenagalistrikan, PLN dapat berperan penting dalam isu perubahan iklim Indonesia. Di dalam RUPTL 2019-2028, Perusahaan telah menargetkan untuk meningkatkan bauran energi primer yang memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT) hingga mencapai 23% dari total energi primer yang dipakai pada tahun 2025. Hal tersebut merupakan inisiatif penting dari PLN untuk memastikan ketersediaan energi untuk pembangunan dengan emisi yang lebih rendah. Selain pengurangan emisi gas rumah kaca, PLN secara maksimal telah berupaya mengurangi kontaminasi ke tanah, air dan udara sebagai dampak dari kegiatan Perusahaan.

Informasi Mekanisme Merumuskan Risiko yang Mungkin Terjadi dari Kegagalan Menerapkan Tanggung Jawab Sosial

Perumusan program CSR melibatkan Divisi Risk Management yang pemetaan risiko untuk setiap Rencana Kerja dan Anggaran PKBL dan CSR Perusahaan. Fungsi pengawasan kegiatan dilakukan oleh Divisi Monitoring dan Pelaporan dan setiap laporan kegiatan akan diaudit oleh SPI, akuntan publik, BPK dan BPKP.

Informasi Mekanisme Pengenalan dan Perumusan Ekspektasi Pemangku Kepentingan Tentang Peran Sosial Perusahaan

PLN memiliki beberapa kelompok pemangku kepentingan yang berpengaruh dominan terhadap keberlanjutan usaha Perusahaan. Untuk itu, PLN melakukan identifikasi dan analisis yang seksama agar dapat mengelola pelibatan pemangku kepentingan secara optimal. Secara berkala, PLN menyelenggarakan dialog dan menjalin komunikasi sesuai dengan karakteristik dan harapan yang melekat pada masing-masing kelompok pemangku kepentingan tersebut. Prinsip PLN dalam pengelolaan pemangku kepentingan adalah menghormati hak pemangku kepentingan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian yang dibuat oleh PLN dengan setiap kelompok pemangku kepentingan seperti: pegawai, pelanggan, mitra kerja, kreditur, masyarakat sekitar unit bisnis, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

PLN is committed to managing the environmental impact of each activity, product and service.

As an electricity company, PLN can play an important role in the issue of Indonesia's climate change. In the 2019-2028 RUPTL, the Company has targeted to increase the primary energy mix that utilizes new renewable energy (EBT) to reach 23% of the total primary energy used by 2025. This is an important initiative of PLN to ensure the availability of energy for development with lower emissions. In addition to reducing greenhouse gas emissions, PLN has maximally sought to reduce contamination to land, water and air as a result of the Company's activities.

Information on Mechanisms for Formulating Possible Risks from Failure to Implement Social Responsibility

The formulation of CSR programs involves a Risk Management Division that maps risks for each Work Plan and Budget of the PKBL and Corporate CSR. The activity monitoring function is carried out by the Monitoring and Reporting Division and each activity report will be audited by SPI, public accountants, BPK and BPKP.

Information on the Mechanism for the Introduction and Formulation of Stakeholder Expectations about the Corporate Social Role

PLN has several stakeholder groups that have a dominant influence on the sustainability of the Company's business. For this reason, PLN conducts careful identification and analysis in order to optimally manage stakeholder engagement. Periodically, PLN conducts dialogues and establishes communication in accordance with the characteristics and expectations inherent in each of the stakeholder groups. The principle of PLN in managing stakeholders is to respect stakeholder rights based on laws and regulations and/or agreements made by PLN with each stakeholder group such as: employees, customers, business partners, creditors, the community surrounding the business unit, and parties other interests.

Pemangku Kepentingan PLN
PLN Stakeholder

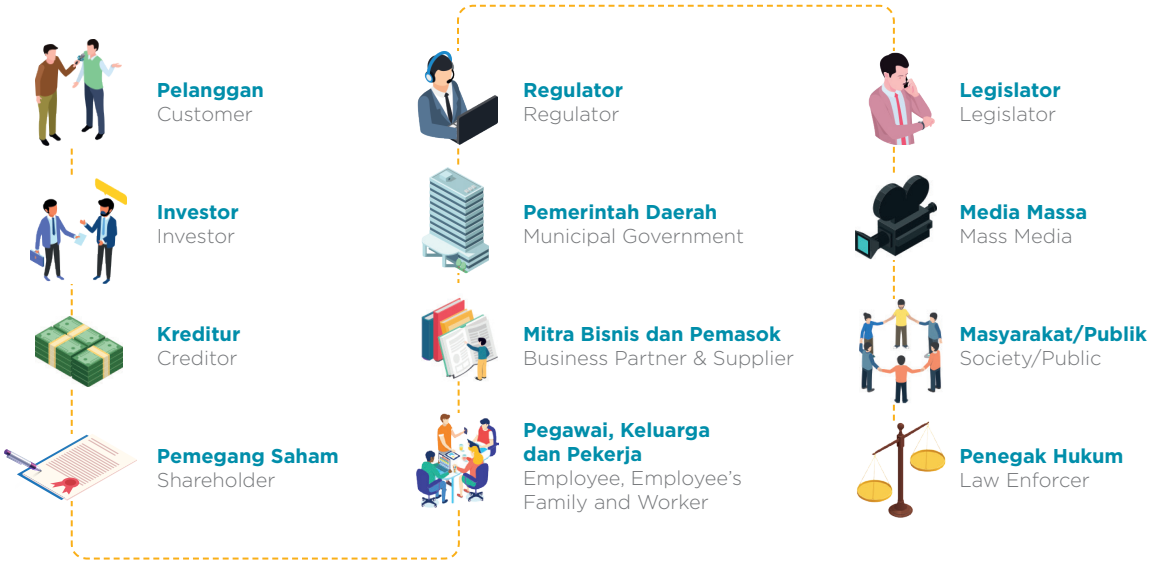

PERENCANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Informasi Tentang Strategi dan Perencanaan Strategis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Perencanaan program CSR umumnya diawali dengan usulan dari pemangku kepentingan baik di unit (masyarakat, pemerintah daerah setempat), pusat maupun level nasional. Setiap usulan/proposal yang masuk dilakukan evaluasi *on-desk* dilanjutkan dengan kunjungan ke lapangan untuk melakukan verifikasi, validasi dan survei kelayakan untuk mengeksekusi program. *Output* dari evaluasi *on-desk* dan survei lapangan adalah *scoring* yang akan menentukan apakah program layak dilaksanakan atau tidak. Usulan dengan skor dinyatakan layak diajukan untuk mendapatkan persetujuan secara berjenjang. Persetujuan Direksi diperlukan untuk program dengan tingkat pembiayaan tertentu. Setelah program selesai dilaksanakan, dibuat laporan pertanggungjawaban. Selanjutnya ada proses *monitoring* dan audit baik aspek keuangan maupun performa. Proses audit dilakukan oleh SPI, Akuntan Publik, BPK dan BPKP.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PLANNING

Information about Strategic and Strategic Planning for Corporate Social Responsibility

Generally, CSR program planning begins with proposals from stakeholders, both at the unit (community, local government), central and national level. Each proposal/proposal submitted is evaluated on-desk and followed up by a field visit for verification, validation and a feasibility survei to execute the program. The output of the on-desk evaluation and field survei is scoring which will determine the feasibility of the program to be carried out or not. Proposals that are declared feasible will be submitted for approval in stages. Board of Directors approval is required for programs with a certain level of financing. After the program is finished, an accountability report is made. Then there is the process of monitoring and auditing both financial and performance aspects. The audit process is carried out by SPI, Public Accountants, BPK and BPKP.

Perencanaan strategis CSR dirumuskan melalui suatu rapat teknis sebelum tahun berjalan. Risalah rapat teknis tersebut akan menjadi lampiran buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai dokumen pendukung justifikasi anggaran program CSR di RKAP. Prosedur yang sama dilakukan untuk merumuskan rencana strategis CSR jangka panjang dimana strategi CRS jangka panjang menjadi bagian dari Rencana Jangka Panjang (RJP) Perusahaan.

CSR strategic planning is formulated through a technical meeting before the current year. The minutes of the technical meeting will be attached to the Work Plan and Corporate Budget (RKAP) book as a supporting document for the CSR program budget justification in the RKAP. The same procedure is carried out to formulate a long-term CSR strategic plan whereby the CRS long-term strategy becomes part of the Company's Long-Term Plan (RJP).

Informasi yang mencerminkan Upaya Menurunkan Dampak dari Berbagai Keputusan dan Kegiatan Perusahaan

Dalam upaya menurunkan dampak dari berbagai keputusan dan kegiatan yang dilaksanakan Perusahaan, setiap pemilik proses bisnis mulai dari unit paling bawah sampai atas melakukan berbagai kajian yang dibutuhkan untuk memastikan keputusan yang diambil atau kegiatan yang dilaksanakan tidak berdampak merugikan baik bagi Perusahaan maupun pemangku kepentingan terkait. Perusahaan menerapkan *governance, risk management and compliance* (GRC) sebelum pengambilan keputusan sesuai dengan batasan kewenangan sehingga diharapkan setiap keputusan dan kegiatan telah sesuai dengan aspek tata kelola perusahaan yang baik, memitigasi dan mengelola setiap risiko yang mungkin timbul serta patuh terharap peraturan dan etika yang berlaku.

Information that reflects Efforts to Reduce the Impact of Various Decisions and Activities of the Company

In an effort to reduce the impact of various decisions and activities carried out by the Company, every business process owner, starting from the lowest unit to the top, conducts various studies needed to ensure the decisions taken or the activities carried out do not have a detrimental impact on the Company or related stakeholders.. The Company implements governance, risk management and compliance (GRC) before making decisions in accordance with authority limits so that it is expected that each decision and activity is in accordance with aspects of good corporate governance, mitigating and managing any risks that may arise and adhering to the expected rules and ethics applicable.

Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berisikan Upaya Menciptakan Manfaat bagi Perusahaan, Pemangku Kepentingan dan Pembangunan Berkelanjutan

PLN melaksanakan program-program CSR secara terencana, terarah, dan berkesinambungan, dengan tujuan menciptakan pertumbuhan yang berkualitas dan memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan yang meliputi pelanggan, mitra kerja, pemerintah, pegawai, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, media massa serta masyarakat sekitar, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Kontribusi PLN terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat juga dilakukan melalui jalinan kerja sama dengan mitra kerja lokal di wilayah operasional sebagai

Information on Corporate Social Responsibility Containing Efforts to Create Benefits for the Company, Stakeholders and Sustainable development

PLN implements CSR programs in a planned, targeted, and sustainable manner, with the aim of creating quality growth and meeting the expectations of all stakeholders including customers, business partners, government, employees, non-governmental organizations, mass media and surrounding communities, with while preserving the environment.

PLN's contribution to improving the social and economic well-being of the community is also done through cooperation with local partners in the operational area as potential partners.

mitra kerja potensial. Selain itu, PLN juga menerapkan ketentuan penggunaan komponen lokal bagi kegiatan investasi pembangunan pembangkit listrik dan saluran transmisi dan distribusi, dengan harapan dapat mendorong tumbuhnya industri kelistrikan dalam negeri yang mampu menyerap tenaga kerja.

Pernyataan misi PLN jelas menyebutkan bahwa eksistensi bisnis PLN di bidang ketenagalistrikan antara lain ditujukan untuk membantu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan mendorong kegiatan ekonomi bangsa. Tujuan ini selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang membawa 5 prinsip-prinsip mendasar yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, yaitu 1) *People* (manusia), 2) *Planet* (bumi), 3) *Prosperity* (kemakmuran), 4) *Peace* (perdaiaman), dan 5) *Partnership* (kerja sama). Kelima prinsip dasar ini dikenal dengan istilah 5P dan menaungi 17 butir Tujuan dan 169 Sasaran yang tidak dapat dipisahkan, saling terhubung, dan terintegrasi satu sama lain guna mencapai kehidupan manusia yang lebih baik.

Informasi Mekanisme dan Pendekatan Perusahaan dalam Menyusun Strategi Tanggung Jawab Sosial

PLN memiliki hubungan erat dengan masyarakat di daerah operasi melalui pelibatan masyarakat serta kontribusi terhadap pengembangan masyarakat. Pelibatan masyarakat meliputi identifikasi dan pembinaan hubungan dengan masyarakat terkait dengan dampak yang ditimbulkan oleh Perusahaan, serta dukungan dan pembinaan hubungan dengan mereka. Kontribusi dalam pengembangan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dalam menentukan prioritas kegiatan sosial dan pengembangan komunitas, Perusahaan berkonsultasi dengan perwakilan kelompok komunitas. Perhatian khusus diberikan kepada kelompok rentan, terdiskriminasi, terpinggirkan, tidak terwakili dan kurang terwakili. Berdasarkan SOP PKBL, pemanfaatan dana PKBL dan CSR harus berdasarkan keinginan dan kebutuhan sebagian besar masyarakat di mana perwakilan

In addition, PLN also applies provisions on the use of local components for investment activities in the construction of power plants and transmission and distribution lines, with the hope of encouraging the growth of the domestic electricity industry that is capable of absorbing labor.

The PLN mission statement clearly states that the existence of PLN's business in the electricity sector is aimed, among others, at helping improve the quality of life of the people and encourage the nation's economic activities. This goal is aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs) which carry 5 fundamental principles that balance the economic, social and environmental dimensions, namely 1) People, 2) Planet, 3) Prosperity, 4) Peace, and 5) Partnership. These five basic principles are known as 5 P and shelter 17 Goals and 169 Targets that cannot be separated, connected, and integrated with each other in order to achieve a better human life.

Information on Corporate Mechanisms and Approaches in Formulating Social Responsibility Strategies

PLN has a close relationship with the community in the area of operation through community involvement and contribution to community development. Community involvement includes identifying and fostering relationships with the community related to the impacts caused by the Company, as well as supporting and fostering relationships with them. Contribution in community development aims to improve the level of community welfare.

In setting priorities for social activities and community development, the Company consults with community group representatives. Special attention is given to vulnerable, discriminated, marginalized, under-represented and under-represented groups. Based on the PKBL SOP, the utilization of PKBL and CSR funds must be based on the desires and needs of the majority of the community where as much as possible

masyarakat semaksimal mungkin ikut serta dalam perencanaan sampai pelaksanaannya.

Siklus pengelolaan PKBL dan CSR merupakan suatu siklus dari manajemen proyek berupa partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang mencakup:

a. Identifikasi lingkungan sosial dan identifikasi program
   1) Pemetaan sosial/Potensi masyarakat.
   2) Identifikasi program-program yang akan ditetapkan.

b. Perencanaan Program
   1) Tujuan program harus mencakup kebutuhan komunitas lokal dan pendatang.
   2) Aktivitas yang akan dilakukan.
   3) Hasil yang diharapkan.
   4) Sumber daya yang akan digunakan.

c. Penilaian Program
   1) Pagu dana yang akan disesuaikan antara kebutuhan dan kesetersediaan.
   2) Keterkaitan usulan program dengan kebutuhan masyarakat.
   3) Keterwakilan keterlibatan masyarakat.

d. Diskusi unit atau tim PKBL dan CSR dengan unsur pemangku kepentingan.

e. Pelaksanaan program/implementasi
   1) Bentuk kerja sama dalam pengembangan masyarakat lokal.
   2) NGO, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kepolisian, masyarakat dan lainnya.

Informasi Mengenai Keterlibatan atau Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Merumuskan Strategi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Perusahaan menerima usulan/permintaan/proposal dari berbagai kelompok pemangku kepentingan yang berasal dari wilayah kerja unit-unit (kelompok masyarakat dan pemerintah daerah), pemangku kepentingan tingkat nasional termasuk program unggulan pemerintah/Kementerian BUMN (seperti program rasio elektrifikasi, desa berlistrik, dan lainnya), ataupun usulan legislatif ke Kementerian BUMN yang diserahkan ke PLN untuk direalisasikan.

community representatives participate in the planning until the implementation.

The cycle of managing PKBL and CSR is a cycle of project management in the form of participation, transparency and accountability which includes:

a. Identify the social environment and identify the program
   1) Social mapping/Community potential.
   2) Identification of programs to be determined.

b. Program Planning
   1) Program objectives must include the needs of local communities and migrants.
   2) Activities to be carried out.
   3) Expected Results.
   4) Resources to be used.

c. Program Assessment
   1) Fund ceiling to be adjusted between needs and availability.
   2) The relevance of the proposed program with the needs of the community.
   3) Representation of community involvement.

d. Discussion between PKBL and CSR units/teams with stakeholder elements.

e. Program implementation
   1) Form of cooperation in the development of local communities.
   2) NGOs, Central Government, Local Government, Police, community and others.

Information Regarding Stakeholder Engagement in Formulating Corporate Social Responsibility Strategies

The Company receives proposals/requests from various stakeholder groups coming from the work area of the units (community groups and local governments), national level stakeholders including excellent programs of the government/Ministry of SOE (such as electrification ratio programs, electrified villages, etc.), or legislative proposals to the Ministry of SOE, submitted to PLN to be realized.

Di tingkat daerah, umumnya unit-unit PLN dilibatkan dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Musrenbang merupakan wujud dari pelibatan partisipasif seluruh pemangku kepentingan dalam membahas dan mengembangkan rencana pembangunan.

URAIAN PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Pelaksanaan program CSR yang diselenggarakan oleh PLN melalui kordinasi Bidang CSR Divisi Corporate Communication and CSR dilakukan melalui dua kegiatan utama, yaitu:

1. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)
   TJSL adalah bentuk kegiatan dengan penerimaan manfaat para pemangku kepentingan sebagai pelaksanaan amanat UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

   Program TJSL PLN diprioritaskan untuk mendukung kegiatan operasional Perusahaan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya untuk kelancaran Program 35.000 MW. Program-program TJSL dirancang agar dapat memberikan manfaat atau nilai tambah bagi masyarakat yang terdampak atas aktivitas pembangunan infrastruktur kelistrikan dan operasional PLN. Selain itu, melalui pelaksanaan TJSL Perusahaan juga berupaya memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dan komunitas utama Perusahaan yang dapat membantu kelancaran proses bisnis.

   Ruang lingkup program TJSL adalah:
   a. Program yang berorientasi pada kemanfaatan untuk kepentingan kelancaran aktivitas/operasional PLN serta untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan pemangku kepentingan/ komunitas penting PLN.
   b. Program bantuan kemasyarakatan seperti:
      - Bantuan korban bencana alam, yang dialokasikan untuk aksi kemanusiaan jika terjadi bencana dan sosialisasi/ pelatihan tanggap darurat bencana

At the regional level, PLN units are generally involved in the Development Planning Consultation Forum (Musrenbang) in the preparation of regional development plans. Musrenbang is a form of participatory involvement of all stakeholders in discussing and developing development plans.

DESCRIPTION OF THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAMS

The implementation of the CSR program organized by PLN through coordination in the CSR Division of the Corporate Communication and CSR Division is carried out through two main activities, namely:

1. Social and Environmental Responsibility Program (TJSL)
   TJSL is a form of activity with the benefit of stakeholders as the implementation of the mandate of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Government Regulation Number 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies.

   The PLN TJSL program is prioritized to support the Company's operational activities throughout Indonesia, specifically the 35,000 MW Program. The TJSL programs are designed to be able to provide benefits or added value to the people affected by the electricity infrastructure and operational activities of PLN. In addition, through the implementation of TJSL the Company also seeks to meet the needs of stakeholders and the Company's main community who can help smooth business processes.

   The scope of the TJSL program is:
   a. Benefits-oriented program for the sake of smooth running of PLN's activities/ operations and for establishing harmonious relations with key stakeholders/ communities of PLN.

   b. Community assistance programs such as:
      - Assistance for victims of natural disasters, which are allocated for humanitarian action in the event of a disaster and socialization/training in

sebagai upaya mitigasi di daerah-daerah potensi bencana;
- Bantuan pendidikan, pelatihan, atau sosialisasi, meliputi pendidikan formal dan informal, pelatihan untuk kegiatan pemberdayaan sosial, ekonomi masyarakat, sosialisasi dan kesepahaman, dan penelitian untuk peningkatan kualitas pendidikan;
- Bantuan pelestarian budaya nasional;
- Bantuan peningkatan kesehatan;
- Bantuan pengembangan prasarana dan atau sarana umum;
- Bantuan sarana ibadah dan kegiatan keagamaan;
- Bantuan pelestarian alam, meliputi upaya penyelamatan lingkungan (penanaman pohon, pembuatan biopori, konservasi alam), dan pelestarian flora dan fauna langka;
- Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

2. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
   Sebagai BUMN, PLN berkewajiban melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Pelaksanaan PKBL merupakan bentuk lain dari aktivitas CSR yang dilakukan PLN. Kegiatan pengembangan sosial dan kemasyarakatan PLN dan khususnya Program PKBL merupakan bagian dari realisasi kegiatan CSR PLN yang dilaksanakan dengan tujuan:
   a. Membantu pengembangan kemampuan masyarakat,
   b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat,
   c. Mencerdaskan masyarakat melalui pendidikan,
   d. Mendorong tersedianya tenaga listrik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,
   e. Pengembangan desa mandiri energi, dan
   f. Menjaga kesinambungan lingkungan melalui pelestarian alam.

   Kegiatan-kegiatan CSR, baik TJSL maupun PKBL, dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah,

disaster response as a mitigation effort in potential disaster areas;
- Educational assistance, training, or outreach, including formal and informal education, training for social empowerment activities, community economy, outreach and understanding, and research to improve the quality of education;
- Assistance for the preservation of national culture;
- Assistance for health improvement;
- Assistance with the development of infrastructure and or public facilities;
- Assistance for religious facilities and religious activities;
- Assistance for nature conservation, including efforts to save the environment (tree planting, biopore manufacturing, nature conservation), and preservation of rare flora and fauna;
- Social assistance in the context of poverty alleviation.

2. Partnership and Community Development Program (PKBL)
   As SOE, PLN is obliged to implement the Partnership and Community Development Program (PKBL). The PKBL implementation is another form of CSR activities carried out by PLN. PLN's social and community development activities and specifically the PKBL Program are part of the realization of PLN's CSR activities carried out with the aim of:
   a. Help develop community capacity,
   b. Increase community empowerment,
   c. Educating the community through education,
   d. Encourage the availability of electricity to improve the quality of life of the community,
   e. Energy independent village development, and
   f. Maintain environmental sustainability through nature conservation.

   CSR activities, both TJSL and PKBL, are carried out by involving all stakeholders, in collaboration with various parties including the government, non-governmental

lembaga swadaya masyarakat, organisasi massa, dan pemangku kepentingan lainnya.

Program Tanggung Jawab Sosial yang Melebihi Tanggung Jawab Minimal Perusahaan yang Relevan dengan Bisnis yang Dijalankan

Di antara berbagai program CSR PLN, salah satu program CSR Perusahaan yang melebihi tanggung jawab minimal Perusahaan adalah program penyambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu dan warga di wilayah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal). Pada tahun 2019, PLN telah menyelesaikan pemasangan listrik gratis kepada 42.981 keluarga melalui Unit Induk Distribusi (UID) dan Unit Induk Wilayah (UIW) di seluruh Indonesia.

PENGUKURAN CAPAIAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Capaian pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan dengan mengukur maturity level pada masing-masing aspek. Sebagai contoh terkait tanggung jawab sosial Perusahaan kepada konsumen diukur melalui mekanisme survei kepuasan pelanggan, lalu terkait tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap pegawai Perusahaan melaksanakan *employee engagement survei*. Selain itu Perusahaan juga mengikutsertakan aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam berbagai penilaian eksternal untuk mengukur tingkat kematangan sekaligus posisi saing Perusahaan dibandingkan dengan Perusahaan lainnya yang setara.

Informasi tentang Organisasi yang Mengelola Koordinasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial

Implementasi CSR berbasis ISO 26000 terdiri dari 7 subjek yang melibatkan lintas divisi dan direktorat di PLN. Divisi PLN yang mengelola ketujuh subjek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tata kelola perusahaan dikoordinir oleh Divisi Sekretariat Perusahaan,
2. Hak asasi manusia, hak dasar pegawai, dukungan atas aktivitas tenaga kerja, hubungan antar pegawai, perlindungan kesehatan, keamanan kerja dan SDM dikelola oleh Divisi Human Capital Management System, Divisi Talenta dan Divisi Organization Developmet,

organizations, mass organizations, and other stakeholders.

Social Responsibility Programs that Exceed Minimum Corporate Responsibility Relevant to Company Business

Among PLN's various CSR programs, one of the Company's CSR programs that exceeds the Company's minimum responsibility is the free electricity connection program for the underprivileged and residents in the 3T region (frontier, outermost and least developed). In 2019, PLN has completed the free electricity installation for 42,981 families through the Parent Distribution Unit (UID) and Regional Parent Unit (UIW) throughout Indonesia.

MEASUREMENT OF THE ACHIEVEMENT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IMPLEMENTATION

The achievement of the implementation of corporate social responsibility is measured by the maturity level in each aspect. For example, related to corporate social responsibility to consumers is measured through the mechanism of customer satisfaction surveis, then related to corporate social responsibility towards Company employees carrying out employee engagement surveis. In addition the Company also includes activities carried out in various external assessments to measure the level of maturity as well as the Company's competitive position compared to other equal companies.

Information on Organizations that Manage the Coordination of Social Responsibility Implementation

The implementation of CSR based on ISO 26000 consists of 7 subjects involving cross divisions and directorates at PLN. The PLN division that manages the seven subjects is as follows:

1. Corporate governance is coordinated by the Corporate Secretariat Division,
2. Human rights, basic employee rights, support for workforce activities, employee relations, health protection, job security and human resources are managed by the Human Capital Management System Division, Talent Division and Organization Development Division,

3. Lingkungan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dikelola oleh Divisi HSSE,
4. Aktivitas operasi yang adil, anti korupsi dan anti suap, kompetisi yang adil. Promosi tanggung jawab sosial melalui rantai pasok, perhatian pada Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dikelola oleh Divisi Compliance,
5. Isu konsumen, pemasaran yang adil, perlindungan keamanan, kesehatan, pengembangan produk, layanan konsumen, perlindungan data konsumen dikelola oleh divisi-divisi pada Departemen Bisnis dan Pelayanan Pelanggan,
6. Proses pengadaan barang dan jasa, hubungan dengan mitra kerja, dikelola oleh divisi-divisi pada Direktorat Pengadaan Strategis 1 dan Direktorat Pengadaan Strategis 2,
7. Program kontribusi masyarakat pada pengembangan sosial, ekonomi, edukasi (program TJSL dan PKBL) dikelola oleh Divisi COM & CSR.

Untuk efektivitas pelaksanaan CSR berbasis ISO 26000 yang melibatkan lintas divisi tersebut, Perdir No. 0138.P/DIR/2019 mengamanatkan untuk membentuk komite koordinasi di bawah kendali Direktur HCM yang ditetapkan oleh Direktur Utama. Hingga akhir tahun 2019, pembentukan komite tersebut belum terealisasi.

Informasi tentang Keterlibatan Manajemen dalam M*ereview* dan Meningkatkan Kredibilitas Inisiatif dan Laporan CSR

Keterlibatan manajemen dalam kegiatan CSR dimulai sejak tahap perencanaan. Setiap tahun, Perusahaan mengajukan rencana kerja dan anggaran (RKA) CSR dan PKBL untuk dibahas bersama Kementerian BUMNsebagai pemegang saham. Selanjutnya setelah pelaksanaan kegiatan, laporan kegiatan diaudit dan dipertanggungjawabkan kepada Kementerian BUMN. Dalam rapat evaluasi dan pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan oleh Direktur HCM selaku Direktur yang membidangi CSR.

3. The Environment and Occupational Safety and Health (K3) is managed by the HSSE Division,
4. Fair operating activities, anti-corruption and anti-bribery, fair competition. Promotion of social responsibility through supply chains, attention to Intellectual Property Rights (IPR) is managed by the Compliance Division,
5. Consumer issues, fair marketing, security protection, health, product development, customer service, consumer data protection are managed by divisions in the Department of Business and Customer Service,
6. The process of procurement of goods and services, relationships with business partners, managed by divisions in the Directorate of Strategic Procurement 1 and the Directorate of Strategic Procurement 2,
7. Community contribution programs on social, economic, education development (TJSL and PKBL programs) are managed by the COM & CSR Division.

For the effectiveness of the implementation of ISO 26000-based CSR involving cross-divisions, Perdir No. 0138.P/DIR/2019 mandates the establishment of a coordinating committee under the control of the HCM Director established by the Managing Director. Until the end of 2019, the formation of the committee had not been realized.

Information on Management Involvement in Reviewing and Improving the Credibility of CSR Initiatives and Reports

Management involvement in CSR activities starts at the planning stage. Every year, the Company submits CSR and PKBL work plans and budgets (RKA) to be discussed with the Ministry of SOEs as shareholders. Furthermore, after the implementation of the activity, the activity report is audited and accounted to the Ministry of SOEs. In the evaluation and accountability meeting carried out by the Director of HCM as the director in charge of CSR.

Informasi Keterlibatan dan Pelibatan Pemangku Kepentingan Relevan dalam Inisiatif CSR Perusahaan

Proyek ketenagalistrikan yang dikembangkan di berbagai daerah tentu memberikan dampak terhadap masyarakat setempat dan lingkungan. Masyarakat terdampak di sekitar pembangkit listrik merupakan prioritas sasaran program CSR Perusahaan khususnya program pemberdayaan masyarakat.

Perusahaan melalui unit-unit melakukan pemantauan dan analisis dinamika sosial kemasyarakatan. Melalui mekanisme ini Perusahaan mendapat masukan, aspirasi, keluhan atau hal-hal lain yang terjadi di masyarakat yang berpotensi mempengaruhi kegiatan operasional Perusahaan. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah, meminimalisir dan menyelesaikan dengan cepat potensi masalah yang mungkin terjadi dalam hubungan Perusahaan dengan masyarakat.

Information on Relevant Stakeholder Engagement and Engagement in the Company's CSR Initiative

Electricity projects developed in various regions certainly have an impact on the local community and the environment. Affected communities around the power plant are priority targets of the Company's CSR programs, especially community empowerment programs.

The Company, through units, monitors and analyzes social dynamics. Through this mechanism the Company gets input, aspirations, complaints or other things that occur in the community that have the potential to influence the Company's operational activities. This activity aims to prevent, minimize and quickly resolve potential problems that may occur in the Company's relations with the community.

Tanggung Jawab Sosial Yang Terkait Aspek Operasi Yang Adil

Corporate Social Responsibility Related to Fair Operations

URAIAN MENGENAI KEBIJAKAN DAN KOMITMEN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT OPERASI YANG ADIL

Kebijakan, Komitmen dan Upaya Perusahaan terkait Anti Korupsi, Persaingan yang Adil, Menghormati Hak Kekayaan Intelektual, Lobi, Kontribusi Politik dan Keterlibatan Politik, serta Patuh Pada Hukum dan Regulasi

Perusahaan berkomitmen untuk mewujudkan pengelolaan operasi perusahaan yang adil. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka menjalankan operasi yang adil di antaranya adalah:

DESCRIPTION OF POLICY AND COMMITMENT OF SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO FAIR OPERATIONS

The Company's Policy, Commitment and Efforts Related to Anti-Corruption, Fair Competition, Respect for Intellectual Property Rights, Lobbying, Political Contributions and Political Involvement and Compliance with Laws and Regulations

The Company is committed to achieving fair operations management. The efforts that have been made in the context of carrying out fair operations include:

1. Pencegahan korupsi (*anti corruption*).
2. Menghindari perilaku pelanggaran hukum, terutama dengan menggunakan pengaruh politik (*Responsible political involvement*): Dalam menjalankan usaha, Perusahaan mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan sehingga terhindar dari perilaku pelanggaran hukum.
3. Berkompetisi secara jujur dan adil (*fair competition*): Perusahaan berkomitmen menciptakan praktik bisnis yang bersih dan menjauhi segala bentuk kecurangan. Perusahaan menjadikan persaingan usaha yang sehat sebagai budaya dan menjalankan etika bisnis untuk menjaga iklim bisnis yang kondusif.
4. Mempromosikan program tanggung jawab sosial di wilayah-wilayah yang terkena dampak aktivitas operasi Perusahaan (*promoting social responsibility in the sphere of influence*).
5. Menghormati hak-hak kekayaan intelektual seperti hak paten, hak cipta dan lain sebagainya (*respect for property rights*).

Dalam rangka menerapkan GCG, Perusahaan menimbang perlu melibatkan seluruh pihak, baik internal maupun eksternal, dan seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu Perusahaan menerbitkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) ("Perdir") Nomor: 0060.K/DIR/2014 Tentang Pedoman PLN Bersih.

Kebijakan tersebut menjadi Pedoman bagi Direksi, pejabat, pegawai dan pemangku kepentingan di lingkungan PLN untuk meningkatkan budaya perusahaan (*corporate culture*) yang sehat di lingkungan PLN dan menciptakan PLN sebagai entitas bisnis yang tangguh (profesional dan tahan goncangan/ godaan), unggul (mengutamakan sistem, mutu, dan inovasi) serta bermartabat (bersih dari segala bentuk penyimpangan dan kecurangan termasuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk mendukung keberhasilan program PLN Bersih, Perusahaan memiliki sejumlah pedoman dan kebijakan, seperti:

a. Sosialisasi Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis serta peluncuran Tata Nilai PLN dengan tagline "PLN Terbaik."

1. Anti-corruption.
2. Avoiding unlawful behavior, especially with responsible political involvement: In conducting business, the Company complies with the laws and regulations so as to avoid unlawful behavior.
3. Fair competition: The Company is committed to creating clean business practices and avoiding all forms of fraud. The Company makes fair business competition a culture and applies Code of Conduct to maintain conducive business climate.
4. Promoting social responsibility in the sphere of influence.
5. Respect for intellectual property rights such as patents, copyrights and others.

In order to implement GCG, the Company considers it necessary to involve all parties, both internal and external, and all stakeholders. Therefore, the Company issued Regulation of Board of Directors of PT PLN (Persero) ("Perdir") No. 0060.K/DIR/2014 concerning Guidelines for Clean PLN.

The policy serves as a guide for Board of Directors, officers, employees and stakeholders within PLN to promote a healthy corporate culture within PLN and create PLN as a business entity that is robust (professional and resilient to shocks/temptations), excellent (prioritizing system, quality and innovation) and dignified (clean of all irregularities and fraud including Corruption, Collusion and Nepotism (KKN).

To support the success of Clean PLN program, the Company has a number of guidelines and policies, including:

a. Dissemination of Code of Conduct and the launch of PLN's Values with tagline "The Best PLN."

b. Penerbitan Perdir No. 0076/DIR/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di PLN.

c. Penerbitan Perdir No. 0121.P/DIR/2019 tentang Kebijakan Anti Fraud di Lingkungan PT PLN (Persero).
d. Penerbitan Pedoman Direksi No. 0122.P/DIR/2019 mengenai Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan PT PLN (Persero).

e. Kebijakan lainnya terkait penerapan prinsip GCG yang diuraikan lebih rinci di segmen Tata Kelola Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Pada tahun 2019 PLN berinisiatif meningkatkan kualitas tata kelola dengan menerapkan Governance, Risk, dan Compliance (GRC) secara terintegrasi di PLN Group. Direksi PLN telah mengeluarkan Perdir No. 0196.P/DIR/2019 tanggal 20 November 2019 tentang Penerapan Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) di Lingkungan PT PLN (Persero). Penerapan GRC akan mendorong pencapaian kondisi kinerja berprinsip (*principled performance*) sehingga PLN dapat mencapai tujuan perusahaan, mengatasi ketidakpastian, dan bertindak secara berintegritas. Untuk mendukung terlaksananya proses bisnis yang bersih dan berintegritas, PLN juga telah menginisiasi penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016. Upaya-upaya memperkuat tata kelola secara konsisten dan berkelanjutan menghasilkan peningkatan penilaian penerapan GCG yang terus meningkat dari tahun.

URAIAN MENGENAI PERUMUSAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT OPERASI YANG ADIL

Informasi Bahwa Perusahaan Telah Melakukan Uji Tuntas terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tentang Operasi yang Adil pada Rantai Nilainya

PLN melakukan uji tuntas untuk meyakinkan bahwa mitra kerja di dalam rantai nilainya (baik individu maupun korporasi) yang akan bekerja sama adalah pihak yang memiliki komitmen antikorupsi, kredibilitas dan rekam jejak yang baik. Dengan melakukan uji tuntas, PLN dapat mengetahui potensi risiko yang dapat berdampak negatif dalam hubungan kerja sama

b. Issuance of Perdir No. 0076/DIR/2017 concerning Guidelines for Gratification Control in PLN.
c. Issuance of Perdir No. 0121.P/DIR/2019 concerning Anti-Fraud Policy in the Environment of PT PLN (Persero).
d. Issuance of Guidelines of Board of Directors No. 0122.P/DIR/2019 concerning Management of Conflict of Interest in the Environment of PT PLN (Persero).
e. Other policies related to implementation of GCG principles are outlined in more detail in Corporate Governance segment in this Annual Report.

In 2019, PLN took the initiative to improve the quality of governance by implementing integrated Governance, Risk and Compliance (GRC) in PLN Group. Board of Directors of PLN issued Perdir No. 0196.P/DIR/2019 dated November 20, 2019 concerning Implementation of Governance, Risk Management and Compliance (GRC) in the Environment of PT PLN (Persero). GRC implementation will encourage the achievement of principled performance so that PLN can achieve corporate goals, overcome uncertainties and act with integrity. To support the implementation of clean and integrated business processes, PLN has also initiated application of ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System. Efforts to strengthen governance in a consistent and sustainable manner have improved assessment result of GCG implementation from year to year.

DESCRIPTION OF FORMULATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO FAIR OPERATIONS

Information on Due Diligence Conducted by the Company on Corporate Social Responsibility related to Fair Operations in its Value Chain

PLN conducted due diligence to ensure that business partners in the value chain (individuals and corporations) that will cooperate are those who have a commitment to anti-corruption, credibility and good track record. By conducting due diligence, PLN can identify potential risks that may have negative impact on working relations with the respective business partners. In addition,

dengan mitra. Selain itu, dengan melakukan uji tuntas, PLN dapat mengidentifikasi hal-hal lain seperti: strategi komunikasi yang sesuai dengan mitra, pelatihan/sosialisasi yang diperlukan dan mitigasi risiko yang diperlukan.

Informasi Pendekatan yang Digunakan Dalam Mengenali dan Merumuskan Tanggung Jawab Sosial dan Pemangku Kepentingan Penting Perusahaan Tentang Operasi yang Adil

Dengan ada kebijakan Direksi untuk menerapkan GRC di seluruh PLN Group, maka setiap kebijakan harus melalui analisis kajian kepatuhan, kajian aspek hukum dan manajemen risiko. Di dalam melakukan kajian analisis kepatuhan, PLN menggunakan tiga pendekatan untuk mengenali potensi pelanggaran di lingkungan Perusahaan, yaitu:

1. Menggunakan perangkat "Corruption Impact Analysis" CIA) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menguji apakah sebuah aturan atau kebijakan yang akan dikeluarkan manajemen memiliki potensi dampak korupsi.
2. Melakukan *Fraud Risk Assessment* (FRA) untuk memetakan potensi terjadinya fraud di dalam sebuah proses bisnis aktivitas, kegiatan, proyek, dan/atau kebijakan dan membuat rekomendasi mitigasi kepatuhan.
3. Menguji adanya konflik kepentingan di dalam pengambilan keputusan dengan melakukan pemetaan mengenai individu atau pihak-pihak yang akan diuntungkan dari keputusan tersebut.

Informasi Dampak Penting Langsung atau Tidak Langsung Aktivitas dan Keputusan Perusahaan tentang Potensi Pelanggaran Operasi yang Adil

Penerapan GRC (Governance, Risk, dan Compliance) mensyaratkan adanya kajian kepatuhan atas seluruh kebijakan dan keputusan manajemen yang dilakukan oleh Divisi Compliance. Output dari kajian adalah rekomendasi kepada pengambil keputusan mengenai syarat-syarat regulasi atau tindakan tambahan yang harus dipenuhi sebelum keputusan tersebut dikeluarkan. Keputusan persetujuan suatu proyek akan melalui kajian dari Corruption Impact Analysis, potensi *Fraud Risk Assessment* dan potensi benturan kepentingan.

by conducting due diligence, PLN can also identify other matters, such as: communication strategies that are appropriate to the business partners, required training/socialization needed and necessary risk mitigation.

Information on Approaches Used in Recognizing and Formulating Corporate Social Responsibility and Key Stakeholders Related to Fair Operations

With Board of Directors' policies to implement GRC throughout PLN Group, each policy must go through an analysis of compliance review, legal review and risk management. In conducting compliance analysis review, PLN uses three approaches to identify potential violations within the Company, as follows:

1. Using "Corruption Impact Analysis" CIA tool from Corruption Eradication Commission (KPK) to test whether a rule or policy to be issued by management has potential corruption impact.
2. Conducting Fraud Risk Assessment (FRA) to map the potential for fraud in a business process activities, projects, and/or policies and make compliance mitigation recommendations.
3. Testing conflict of interest in decision making by mapping individuals or parties who will benefit from the decision.

Information on Significant Direct or Indirect Impacts of the Company's Activities and Decisions related to the Potential Violation of Fair Operations

Implementation of GRC (Governance, Risk and Compliance) requires compliance review of all policies and management decisions to be conducted by Compliance Division. Output of the review is recommendation to the decision maker regarding regulatory requirements or additional actions that must be met prior to issuance of the decision. Decision to approve a project will go through Corruption Impact Analysis, potential for Fraud Risk Assessment and potential conflicts of interest. In addition to Compliance Division, Legal Division and Risk Management

Selain Divisi Compliance, Divisi Hukum dan Divisi Risk Management juga memberikan rekomendasi dari perspektif bidang masing-masing, sebelum Direksi mengambil keputusan.

Penegakan aspek kepatuhan juga mencakup pengujian atas seluruh proses bisnis di PLN, termasuk kepatuhan atas pelaporan LHKPN, regulasi anti gratifikasi, kode etik dan sebagainya. Ke pihak eksternal, PLN meminta vendor dan kontraktor untuk membuat peraturan internal mengenai anti gratifikasi atau anti penyuapan.

PLN belum melakukan analisis atau survei mengenai dampak penting langsung atau tidak langsung dari aktivitas dan keputusan Perusahaan tentang potensi pelanggaran operasi yang adil. Tetapi sejalan dengan tujuan penerapan GRC yaitu untuk mencapai kondisi kinerja berprinsip (*principled performance*) sehingga PLN dapat mencapai tujuan perusahaan, mengatasi ketidakpastian, dan bertindak secara berintegritas, maka diharapkan seluruh insan PLN akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan melaksanakan proses bisnis.

Informasi Bahwa Perusahaan Telah Melakukan Review terhadap Seluruh Regulasi terkait Isu-Isu Operasi yang Adil

Secara umum, setiap regulasi akan melalui analisis kajian kepatuhan dan kajian hukum untuk mengenali potensi pelanggaran di lingkungan Perusahaan dengan menggunakan pendekatan Corruption Impact Analysis (CIA). Ada diskusi dengan pemilik proses bisnis mengenai potensi korupsi, fraud dan benturan kepentingan serta regulasi-regulasi yang harus dipenuhi.

Pihak eksternal, dalam hal ini KPK, ikut mengawal PLN dalam bentuk pembuatan kajian efisiensi ketenagalistrikan diantaranya adalah kajian operasional pembangkit,kajian kontrak IPP, kajian pengelolaan batubara, serta kajian penggunaan EBT seperti pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa).

Division also provide recommendations from the perspective of their respective fields, before Board of Directors makes decisions.

Enforcement of compliance aspects also includes testing of all business processes in PLN, consisting of compliance with LHKPN reporting, anti-gratuity regulations, codes of ethics and so forth. As for external parties, PLN asks vendors and contractors to establish internal regulations regarding anti-gratuity or anti-bribery.

PLN has not conducted an analysis or survey of significant direct or indirect impacts of the Company's activities and decisions on potential violations of fair operations. However, in line with the goal of GRC implementation, which is to achieve principled performance so that PLN can achieve corporate goals, overcome uncertainties and act with integrity, it is expected that all PLN personnel will be more careful in making decisions and performing business processes.

Information on the Company's Review of All Regulations related to Fair Operations Issues

Generally, each regulation will go through an analysis of compliance review and legal review to identify potential violations within the Company using Corruption Impact Analysis CIA. There were discussions with business process owners regarding potential for corruption, fraud, conflict of interest and regulations that must be met.

External parties, in this case KPK, participated in overseeing PLN in the form of making electricity efficiency studies including studies of plant operations, studies of IPP contracts, studies of coal management, as well as studies of the use of EBT such as power plant waste (PLTSa).

Informasi dan Uraian Singkat tentang Isu-Isu Penting Tanggung Jawab Sosial Bidang Operasi yang Adil dan Relevan dengan Bisnis Perusahaan

Isu penting terkait operasi yang adil adalah potensi korupsi, fraud dan konflik kepentingan dari kebijakan dan proses bisnis di PLN. Untuk itu pada tahun 2014 Perusahaan telah menerbitkan Perdir No. 0060.K/DIR/2014 Tentang Pedoman PLN Bersih dan berbagai pedoman dan kebijakan turunan sebagai pendukungnya.

Pada tahun 2019 PLN membentuk Divisi Compliance untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta proses bisnis di PLN telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memastikan kepatuhan setiap pegawai PLN terhadap komitmen dan regulasi yang telah dibuat dan diberlakukan di lingkungan PLN Group. Divisi Compliance membawahi 3 bidang yaitu: Fraud Risk Management, Integrity Management dan Regulatory and Policy Affairs.

Dalam melaksanakan tugasnya, Divisi Compliance memiliki hubungan konsultasi dengan KPK untuk mendapatkan berbagai perangkat pengujian dalam rangka membangun PLN menjadi korporasi yang bersih.

Information and Brief Description on Crucial Issues of Social Responsibility Related to Fair and Relevant Operations with the Company's Business

Crucial issues related to fair operations are potential corruption, fraud and conflict of interest of the policies and business processes in PLN. Therefore, in 2014, the Company issued Perdir No. 0060.K/DIR/2014 concerning Guidelines for Clean PLN and a number of derivative guidelines and policies as supporters.

In 2019, PLN established a Compliance Division to ensure that policies, provisions, systems and procedures, as well as business processes in PLN are in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, and to ensure that compliance of each PLN employee with commitments and regulations are imposed and enforced within the environment of PLN Group. Compliance Division is in charge of 3 areas, namely: Fraud Risk Management, Integrity Management and Regulatory and Policy Affairs.

In carrying out its duties, Compliance Division has consultative relationship with KPK to obtain various testing instruments in order to build PLN as a clean corporation.

Informasi Risiko Terkait Operasi yang Adil, Baik Risiko Bagi Perusahaan Maupun Pemangku Kepentingan

Perusahaan telah melakukan pemetaan risiko terkait operasi yang adil yang antara lain meliputi kecurangan, suap dan fasilitasi, dan konflik kepentingan. Untuk memitigasi risiko-risko yang ada, PLN menerbitkan sejumlah regulasi seperti Pedoman Pengendalian Gratifikasi di PLN, Kebijakan Anti Fraud, dan Pengelolaan Konflik Kepentingan.

Sebagai sosialisasi kepada pihak eksternal (vendor), PLN memasukkan berbagai *tools* ke dalam maturity level di unit-unit dan mengadakan kegiatan collective action yang dihadiri rekanan dari unit tersebut. Ketidakpatuhan terhadap operasi yang adil di PLN dapat merugikan Perusahaan dan pemangku kepentingannya tidak hanya dari sisi finansial tetapi juga hilangnya kepercayaan pemangku kepentingan, rusaknya reputasi, dan risiko hukum.

Information on Risks Related to Fair Operations, Both for the Company and Stakeholders

The Company performs risk mapping related to fair operations which includes fraud, bribery and facilitation and conflict of interest. To mitigate the existing risks, PLN issued a number of regulations, such as Guidelines for Gratuity Control in PLN, Anti-Fraud Policy and Conflict of Interest Management.

As socialization to external parties (vendors), PLN adopts various tools into maturity level of its units and holds collective actions attended by partners of the respective unit. Noncompliance with fair operations in PLN can be detrimental to the Company and its stakeholders not only financially but also loss of stakeholder confidence, damage to reputation and legal risks.

PLN memiliki sistem untuk menguji calon penyedia barang dan jasa yang mendaftar dalam seleksi pengadaan barang dan jasa. Selain persyaratan dokumen administrasi dan usaha sesuai peraturan yang berlaku, calon vendor harus memenuhi persyaratan-persyaratan terkait reputasi perusahaan tersebut, antara lain:

a. Reputasi perusahaan vendor dalam menjalankan bisnis dan rekam jejaknya jika memiliki kasus tindak pidana korupsi, pencucian uang, atau pelanggaran peraturan perundangan lain.
b. Data kepemilikan (*beneficial ownership*) dari perusahaan vendor dan potensi terjadinya konflik kepentingan dengan pengambil keputusan di PLN.
c. Komitmen pimpinan perusahaan vendor terhadap pencegahan korupsi dan suap dalam bisnis.
d. Keterkaitan perusahaan vendor dengan pejabat/penyelenggara negara dan/atau partai politik yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Informasi Ekspektasi Pemangku Kepentingan tentang Peranan Perusahaan dalam Penanganan Isu-Isu Operasi yang Adil

Ekspektasi pemangku kepentingan tentang peran PLN dalam penanganan isu-isu operasi yang adil antara lain berasal dari KPK sebagai salah satu pemangku kepentingan. Ekspektasi KPK disampaikan dalam bentuk kerja sama penyusunan berbagai rencana aksi untuk mengevaluasi proses bisnis di PLN. Pada tahun 2019, Divisi Compliance bersama KPK menyusun rencana aksi untuk melakukan evaluasi proses operasi pembangkit, evaluasi proses efisiensi ketenagalistrikan, dan sebagainya. Pemangku kepentingan lainnya seperti Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, masing-masing memiliki ekspektasi sehubungan dengan kinerja PLN yang dikomunikasikan melalui berbagai forum.

PLN melalui unit-unit berkomunikasi dengan mitra kerja untuk menyampaikan ekspektasi timbal balik antara Perusahaan dengan mitra kerja. Salah satu forum yang telah diadakan adalah Collective Action sebagai forum kolaborasi antikorupsi yang dibangun dari kerja sama antar pemangku kepentingan.

PLN has a system to test potential vendors of goods and services who register in the selection of goods and services procurement. In addition to administrative and business document requirements, in accordance with the applicable laws and regulations, potential vendors must meet the requirements related to the Company's reputation, including:

a. Reputation of vendor in conducting business and its track record if it has a criminal case of corruption, money laundering, or violation of other laws and regulations.
b. Beneficial ownership of vendor and potential conflict of interest with PLN's decision makers.
c. Commitment of the leadership of vendor to prevention of corruption and bribery in business.
d. Relationship between vendor and state officials/administrators and/or political parties that may lead to conflict of interest.

Information on Stakeholder Expectations on the Role of the Company in Handling Fair Operations Issues

Stakeholder expectations on the role of PLN in handling fair operations issues include expectation of KPK as one of the stakeholders. KPK's expectations were conveyed in the form of cooperation in preparation of various action plans to evaluate business processes in PLN. In 2019, Compliance Division and KPK compiled an action plan to evaluate the process of power plant operations, electricity efficiency and so forth. Other stakeholders, such as the Ministry of Finance, the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM), the Ministry of SOE, each of them have expectations from PLN's performance which are communicated through various forums.

PLN, through its units, communicates with business partners to convey mutual expectations between the Company and business partners. One of the forums is Collective Action as an anti-corruption collaboration that was built in cooperation among stakeholders.

Tujuan Collective Action di antaranya adalah:
a. Memperkuat komitmen antikorupsi antar pemangku kepentingan,
b. Menghindari penyuapan dan korupsi dalam transaksi dan mengeliminasi pelanggaran oleh individu,
c. Menghindari korupsi yang dilakukan oleh individu dalam Perusahaan.

Selain forum Collective Action, forum lain untuk mensosialisasikan komitmen dan regulasi PLN dan menyampaikan ekspektasi timbal balik antara PLN dengan pemangku kepentingannya antara lain adalah Forum Stakeholder Management yang dihadiri oleh instansi Kepolisian, Kejaksaan, TNI, dan sebagainya.

URAIAN MENGENAI PERENCANAAN CSR BIDANG OPERASI YANG ADIL

Target/Rencana Kegiatan Pada Tahun 2019 yang Ditetapkan Manajemen

Pada tahun 2019, Manajemen menyusun rencana kegiatan terkait operasi yang adil yang dilaksanakan oleh Divisi Compliance sebagai berikut:
- Menyusun Kebijakan Anti Fraud dan Kebijakan Pengelolaan Konflik Kepentingan,
- Membuat rancang bangun kepatuhan,
- Menyusun *Fraud Risk Assesment* dan *Fraud Risk Profil*,
- Memonitor LHKPN,
- Mengevaluasi *Compliance Online System*,
- Menyusun kajian *due diligence* integritas calon mitra/mitra kerja,
- Menyusun kajian *corruption impact analysis*,
- Tugas-tugas lainnya di luar KPI yang telah disepakati seperti pendampingan program efisiensi ketenagalistrikan KPK, pendampingan divisi untuk review proses bisnis yang dijalankan, serta penugasan-penugasan khusus dari Direksi.

Pada Program Utama yang Dilakukan Terdapat Informasi Berisikan Deskripsi Upaya Menciptakan Manfaat Bersama Operasi yang Adil bagi Pemangku Kepentingan dan Perusahaan

Dalam menyelenggarakan proses pengadaan, PLN mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi melalui sarana e-*Procurement*.

Objectives of Collective Action are as follows:
a. To strengthen anti-corruption commitment among stakeholders,
b. To avoid bribery and corruption in transactions and to eliminate violations by individuals,
c. To avoid corruption committed by individuals in the Company.

In addition to Collective Action forum, another forum to socialize PLN's commitment and regulations and to convey mutual expectations between PLN and its stakeholders is Stakeholder Management Forum attended by the Police, Attorney General's Office, TNI and others.

DESCRIPTION OF CSR PLANNING RELATED TO FAIR OPERATIONS

2019 Targets/Plans Set by the Management

In 2019, the Management compiled activity plans related to fair operations carried out by Compliance Division as follows:

- Compiling Anti-Fraud Policy and Conflict of Interest Management Policy,
- Designing compliance blueprint,
- Compiling Fraud Risk Assessment and Fraud Risk Profile,
- Monitoring LHKPN,
- Evaluating Compliance Online System,
- Compiling due diligence review of integrity of prospective partners/business partners,
- Compiling corruption impact analysis review,
- Other non-KPI tasks that have been agreed upon including assistance for KPK's electricity efficiency program, assistance for divisions to review business processes carried out and special assignments from Board of Directors.

The Implemented Main Programs Contain Description of Efforts to Create Fair Mutual Benefits of Fair Operations for Stakeholders and the Company

In carrying out procurement process, PLN puts forward the principles of fairness and transparency through e-Procurement. The procurement

Proses pengadaan diatur dalam Perdir No. 0164.P/DIR/2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) yang antara lain berisi ketentuan umum, perencanaan pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya, pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya, perencanaan dan pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi, pengadaan khusus, perjanjian/ kontrak, pengadaan barang/jasa melalui media elektronik PLN (e-Procurement PLN), serta Pengendalian dan Pengawasan.

Hubungan Perusahaan dan mitra kerja berdasarkan pada prinsip- prinsip praktik usaha *value for money* untuk kualitas, kuantitas, tempat, waktu, tujuan sosial ekonomi, dan harga sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Perusahaan berharap agar setiap penyedia barang jasa selalu menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Terdapat Informasi yang Berisikan Mekanisme dan Prosedur Menghadapi Konflik Terkait Operasi yang Adil

PLN menjunjung tinggi prinsip transparansi dan pengungkapan keterbukaan informasi yang tepat waktu dan berimbang dalam penyelenggaraan kegiatan usaha sehari-hari untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis. Untuk itu, Perusahaan menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Salah satu sikap yang harus dilakukan oleh Perusahaan kepada pelanggan adalah menjalin komunikasi edukatif yang sehat, ramah, adil, jujur, dan tidak menyesatkan. Setiap keluhan pelanggan dan pihak eksternal lainnya dapat disampaikan melalui berbagai sarana informasi seperti website resmi Perusahaan: www.pln.co.id, layanan contact center PLN 123, dan media sosial seperti Twitter dan Facebook.

Secara internal, potensi konflik dapat terjadi ketika sebuah kebijakan yang menerapkan sanksi menimbulkan resistensi. Perusahaan mengutamakan pendekatan persuasif dalam menerapkan kebijakan baru yang berpotensi menimbulkan dinamika di kalangan internal tanpa mengorbankan prinsip-prinsip kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

process is regulated in Perdir No. 0164.P/DIR/2019 concerning Guidelines for Procurement of Goods/ Services of PT PLN (Persero) which, among others, contain general provisions, planning of procurement of goods/services for construction/ other services, implementation of procurement of goods/services for construction/other services, planning and implementation of procurement of consulting services, special procurement, agreements/contracts, procurement of goods/ services through PLN's electronic media (PLN's e-Procurement), as well as Control and Monitoring.

The relationship between the Company and its partners is based on the principles of business practice of value for money in terms of quality, quantity, place, time, socioeconomic objectives and prices in accordance with GCG principles. The Company expects that each good/service provider always upholds the applicable laws and regulations in goods and services procurement process.

Information on Mechanism and Procedure for Handling Conflict Related to Fair Operations

PLN upholds the principles of transparency and information disclosure in a timely and balanced manner in carrying out daily business activities so as to maintain objectivity in conducting business. Therefore, the Company provides material and relevant information in a way that is easily accessible and understood by stakeholders. An approach that must be taken by the Company to customers is to establish educative communication that is healthy, friendly, fair, honest and not misleading. Every complaint of customers and other external parties can be submitted through various information facilities, including the Company's official website: www.pln.co.id, PLN 123 contact center service and social media, such as Twitter and Facebook.

Internally, potential conflict may occur when a policy that applies sanction raises resistance. The Company prioritizes persuasive approach in implementing new policy that has potential to cause internal dynamics without compromising the principles of compliance with the applicable laws and regulations.

Dalam hal perundingan bipartit gagal mencapai kesepakatan, maka penyelesaian perselisihan akan mengacu pada tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

In the event that bipartite negotiation fails to reach an agreement, the dispute resolution will refer to procedure for resolving industrial relations dispute as stipulated in Law No. 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Dispute.

Terdapat Informasi Tentang Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Berbagai Kegiatan Mendorong Operasi yang Adil pada Rantai Nilai Perusahaan

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian "Informasi Ekspektasi Pemangku Kepentingan tentang Peranan Perusahaan dalam Penanganan Isu-Isu Operasi yang Adil", proses pelibatan pemangku di dalam kegiatan mendorong operasi yang adil dapat melalui berbagai forum yang diselenggarakan PLN, di antaranya adalah forum Collective Action dan Stakeholder Management.

Information on Stakeholder Engagement in Various Activities Encouraging Fair Operations in the Company's Value Chain

As explained in "Information on Stakeholder Expectations on the Role of the Company in Handling Fair Operations Issues" section, stakeholders can be involved in various forums organized by PLN that encourage fair operations, including Collective Action forum and Stakeholder Management.

Terdapat Deskripsi Upaya Perusahaan Dengan Memanfaatkan Pengaruh Perusahaan Untuk Pencegahan, Penurunan dan Perbaikan kualitas Operasi yang Adil

Salah satu upaya yang dilakukan PLN adalah melalui maturity level yang disampaikan kepada unit-unit agar menyelenggarakan forum Collective Action untuk mitra kerja. Dalam forum tersebut PLN dapat memanfaatkan pengaruhnya kepada mitra kerja untuk membuat kebijakan-kebijakan terkait korupsi, fraud, gratifikasi, konflik kepentingan dan sebagainya.

Description of the Company's Efforts by Using Its Influence to Prevent, Decrease and Improve the Quality of Fair Operations

An effort made by PLN is through maturity level assigned to the units to hold Collective Action forum for working partners. In such forum, PLN can use its influence on business partners to establish policies related to corruption, fraud, gratuity, conflict of interest and so forth.

URAIAN MENGENAI PELAKSANAAN CSR BIDANG OPERASI YANG ADIL

DESCRIPTION OF CSR IMPLEMENTATION RELATED TO FAIR OPERATIONS

Terdapat Informasi Tentang Berbagai Upaya Pelibatan Direksi/Manajemen/Karyawan Dalam Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Tentang Operasi yang Adil

PLN bertanggung jawab untuk menyediakan produk dan jasa yang aman bagi pengguna dan orang lain, bagi barang milik mereka serta lingkungan sekitar. Komitmen tanggung jawab ini diatur di dalam Perdir No. 0252.P/DIR/2016 Tentang Pedoman Keselamatan Umum Di Lingkungan PT PLN (Persero).

Information on Various Efforts to Involve Board of Directors/Management/Employees in Social Responsibility Related to Fair Operations

PLN is responsible for providing products and services that are safe for users and others, for their properties and the surrounding environment. This commitment of responsibility is stipulated in Perdir No. 0252.P/DIR/2016 concerning Guidelines for Public Safety in the Environment of PT PLN (Persero).

Tujuan peraturan tersebut adalah untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi, aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya serta ramah lingkungan. Ruang lingkup dari Pedoman Keselamatan Umum tersebut adalah peraturan keselamatan bagi masyarakat umum yang tinggal di sekitar instalasi, masyarakat umum yang menjadi tamu Perusahaan, dan masyarakat umum yang melaksanakan kegiatan di sekitar instalasi milik Perusahaan, dengan cara memberikan pencegahan, perlindungan, pengamanan, dan penyelesaian terhadap terjadinya kecelakaan masyarakat umum.

The objectivea of this regulation are to create reliable and safe condition for installation, safe from danger to humans and other living creatures and environmentally friendly. The scope of this Public Safety Guidelines are safety regulations for the general public living around the installation, the general public who are guests of the Company and the general public carrying out activities around the Company's installation, by providing prevention, protection, security and settlement to accident involving the public.

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

Program Tanggung Jawab Sosial Yang Terkait Aspek Hak Asasi Manusia

Social Responsibilities Program Related to Human Rights Aspects

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT HAK ASASI MANUSIA

Hak asasi manusia ("HAM") adalah kumpulan hak yang melekat pada setiap manusia. Secara umum terdapat dua kategori besar, yaitu hak-hak sipil dan politik (hidup merdeka, kesetaraan di hadapan hukum, kebebasan berpendapat), serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (bekerja, mendapatkan pangan yang layak, standar kesehatan tertinggi, pendidikan, keamanan sosial). Pemerintah memiliki tugas untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM warganya, sementara Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menghormati setiap aspek HAM di seluruh ruang pengaruhnya (*sphere of influence*).

SOCIAL RESPONSIBILITY COMMITMENT AND POLICIES REGARDING HUMAN RIGHTS

The Human Rights are all the rights inherent to all human beings. In general, there are two classes of human rights, namely civil and political rights (freedom of living, equality before the law, freedom of opinion), as well as economic, social and cultural rights (work, food, highest attainable level of health, education, social security). The Government has the duty to respect, protect, and fulfill the human rights of its citizens, while the Company has the responsibility to respect every aspect of human rights in its sphere of influence.

PLN memberi perhatian serius atas dampak aktivitas operasional Perusahaan terhadap potensi pelanggaran HAM. Perlindungan HAM menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan operasional Perusahaan sehari-hari dan dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.

Aspek HAM diintegrasikan di dalam berbagai kebijakan PLN, meliputi praktik anti diskriminasi, pemenuhan hak pegawai, penghormatan hak pemangku kepentingan termasuk privasi pelanggan, dan sebagainya. Kebijakan dasar pengelolaan Sumber Daya Manusia ("SDM") di Perusahaan sejalan dengan prinsip dan standar praktik HAM terbaik yang diakui secara universal, antara lain:

- Membina hubungan baik dengan pegawai berlandaskan kerja sama timbal balik.
- mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- Memberlakukan sistem pengupahan berbasis kinerja yang diterapkan dengan adil, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Menjunjung tinggi hak pegawai untuk berserikat maupun tidak berserikat sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.
- Menyiapkan program peningkatan kompetensi pegawai untuk meningkatkan kinerja individu, kelompok dan pada akhirnya kinerja korporasi.
- Menerapkan kesetaraan jenjang karir.
- Menerapkan kesetaraan gender.

PERUMUSAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT HAM

Informasi Bahwa Perusahaan Telah Melakukan Uji Tuntas Terhadap Tanggung Jawab Sosial Terkait HAM

Dalam menjalin kerja sama dengan mitra kerja (vendor), PLN mengharapkan mitra kerja menjalankan prinsip-prinsip bisnis yang sejalan dengan prinsip yang berlaku di PLN. Perseroan melarang adanya praktik diskriminasi, pengupahan yang tidak layak, pemaksaan waktu bekerja dan pekerja anak, serta berkomitmen untuk menciptakan kondisi kerja yang aman, sehat dan menghargai martabat individu.

PLN has a serious concern to the impact of the Company's operational activities on potential human rights violations. Human rights protection is an inseparable part of the Company's daily operational activities and in interacting with stakeholders, both internal and external.

The human rights aspect is integrated into various PLN policies, including anti-discrimination practices, fulfillment of employee rights, respect for stakeholder rights including customer privacy, and so on. The basic human resource management ("HR") policies in the Company are in line with the principles and standards of universally recognized human rights best practices, including:

- Fostering good relations with employees based on mutual cooperation.
- Complying with legislation in the field of employment.
- Implementing performance-based remuneration system that is applied fairly, transparently and can be accounted for.
- Upholding the rights of employees to associate or not associate in accordance with Law No. 21 of 2000 concerning Trade Unions.
- Preparing employee competency improvement program to improve the performance of individuals, groups and ultimately corporate performance.
- Implementing equality in career paths.
- Implementing gender equality.

FORMULATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY REGARDING HUMAN RIGHTS

Information That the Company Has Done Due Diligence on Social Responsibility Regarding Human Rights

In establishing cooperation with partners (vendors), PLN expects partners to carry out business principles that are in line with the principles that apply at PLN. The Company prohibits discriminatory practices, improper remuneration, forced work and child labor, and is committed to creating safe, healthy working conditions and respecting individual dignity.

Oleh karena itu PLN mensyaratkan pemenuhan aspek HAM oleh mitra kerja kontraktor dan pemasok dalam proyek pembangunan dan operasional Perusahaan. Uji tuntas aspek HAM di dalam proses bisnis Perusahaan dilakukan di seluruh unit PLN. Aspek penilaian HAM yang yang diuji adalah aspek pokok seperti: 1) keadaan yang berisiko HAM, 2) menghindari *complicity*, 3) isu diskriminasi dan perlindungan kelompok rentan, 4) hak sipil dan politik, 5) hak ekonomi, sosial dan budaya, dan 6) hak fundamental di tempat kerja.

Untuk menjamin kualitas dan kontinuitas proses evaluasi, Perusahaan memiliki kebijakan "Prosedur dan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa", yang melibatkan mekanisme pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) dan menggunakan prosedur *e-procurement*. Secara berkala Perusahaan mengevaluasi kinerja para mitra kerja. Evaluasi dilakukan baik pada tahapan proses kerja hingga akhir kontrak kerja, sebagai dasar penilaian untuk proses seleksi penetapan daftar rekanan kerja yang dilakukan secara transparan dan akuntabel melalui mekanisme SLA *(Service Level Agreement)* yang disepakati dalam kontrak kerjasama dengan para mitra. Salah satu contoh SLA yang diterapkan Perusahaan untuk menjamin aspek HAM dijalankan adalah dengan memastikan bahwa mitra kerja secara disiplin membayarkan hak-hak pekerja sesuai dengan jumlah dan waktu yang dijanjikan, seperti gaji, uang seragam, tunjangan hari raya, BPJS, penyediaan perangkat kerja dan alat pelindung diri (APD) dan lain-lain.

Informasi Pendekatan yang digunakan untuk Mengenali dan Merumuskan Tanggung Jawab Sosial dan Pemangku Kepentingan Perusahaan Berdasarkan HAM

Perusahaan mengenali dan merumuskan tanggung jawab sosial Perusahaan berdasarkan HAM lewat komitmen untuk menghormati standar HAM yang diakui secara nasional dan internasional melalui kepatuhan terhadap berbagai aturan yang berlaku serta fokus pada isu-isu penting berikut ini:

1. Menghormati HAM di tempat kerja bagi pegawai Perusahaan dan mitra kerja serta mempromosikan prinsip-prinsip HAM di dalam rantai pasokan PLN.

Therefore PLN requires its business partners, the contractors and suppliers in the construction and operational projects of the Company, to uphold the human rights aspects. Due diligence in the aspects of human rights in the Company's business processes is carried out in all PLN units. The human rights assessment that were tested are the main aspects such as: 1) human rights risk situations, 2) avoiding complicity, 3) issues of discrimination and protection of vulnerable groups, 4) civil and political rights, 5) economic, social and cultural rights, and 6) fundamental rights at work.

To guarantee the quality and continuity of the evaluation process, the Company has a policy of "Procedures for Procurement of Goods and Services", which involves a supervisory mechanism by the Internal Control Unit (SPI) and uses e-procurement. The Company periodically evaluates the performance of its partners. Evaluation is carried out during the work process until the end of the work contract, as a basis for evaluating the selection process in establishing the list of business partners, carried out transparently and accountably according to the SLA (Service Level Agreement) mechanism agreed in the contract of cooperation with partners. One example of SLAs implemented by the Company to ensure that human rights aspects are carried out is by ensuring that partners work discipline in paying workers' rights in accordance with the promised amount and time, such as salaries, uniform money, holiday allowances, BPJS, provision of work tools and equipment personal protective equipment (PPE) and others.

Information Approach used to Identify and Formulate Social Responsibility and Corporate Stakeholders Based on Human Rights

The Company recognizes and formulates its corporate social responsibility based on human rights through its commitment to respect human rights standards that are recognized nationally and internationally through compliance with various applicable regulations and focus on the following important issues:

1. Respect human rights at work for Company employees and partners and promote human rights principles in the PLN supply chain.

2. Menangani potensi dampak dari operasi Perusahaan pada masyarakat lokal, khususnya berkaitan dengan hak atas standar hidup yang layak, hak atas tersedianya air bersih dan lingkungan yang layak, dan menyediakan akses untuk memitigasi dampak merugikan yang tidak dapat dihindari karena operasi PLN.
3. Memastikan bahwa keamanan pegawai dan fasilitas Perusahaan dikelola dengan cara yang bertanggung jawab.

Perusahaan mendasarkan setiap keputusannya pada tanggung jawab untuk menghormati HAM, sambil turut berkontribusi untuk mendorong dan mempertahankan pemenuhan HAM secara menyeluruh. Berdasarkan Pedoman GCG, setiap proses dan mekanisme pengelolaan Perusahaan harus berlandaskan prinsip-prinsip GCG. Maka setiap organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan harus berlandaskan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Informasi Dampak Penting Langsung dan Tidak Langsung Aktivitas dan Keputusan Perusahaan tentang Potensi Pelanggaran HAM

Sebagai salah satu BUMN terbesar di Indonesia, PLN harus mampu memberikan manfaat positif sebesar-besarnya bagi seluruh pemangku kepentingan dengan cara-cara yang sesuai dengan kaidah bisnis maupun praktik sosial dan lingkungan yang berlaku global. Melalui produknya PLN tidak menyediakan barang atau jasa yang berpotensi digunakan untuk pelanggaran HAM, justru melalui produknya berupa energi listrik PLN menyajikan salah bentuk satu hak azazi yang mendasar bagi masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. Upaya menghadirkan listrik termasuk di daerah-daerah 3T membuktikan komitmen PLN untuk pemerataan hak dalam mengakses energi listrik yang akan bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, termasuk mengakses informasi dan kesempatan belajar.

2. Address the potential impact of the Company's operations on the local community, especially with regard to the right to an adequate standard of living, the right to the availability of clean water and an adequate environment, and to provide access to mitigate the adverse effects that cannot be avoided due to PLN's operations.
3. Ensure that employee security and Company facilities are managed in a responsible manner.

The Company based its every decision on the responsibility to respect human rights, while also contributing to encouraging and maintaining the full fulfillment of human rights. Based on GCG Guidelines, every process and mechanism of the Company's management must be based on GCG principles. Then every organ of the Company in making decisions and carrying out actions must be based on high moral values and compliance with laws and regulations.

Information on Important Direct and Indirect Impacts of Company Activities and Decisions regarding the Potential of Human Rights Violations

As one of the biggest SOEs in Indonesia, PLN is required to provide maximum positive benefits for all stakeholders in ways that are consistent with business rules and social and environmental practices that apply globally. PLN does not provide goods or services that have the potential to be used for violating human rights, instead through its products in the form of electricity, PLN presents a form of fundamental rights for people throughout Indonesia. Efforts to bring electricity, including in 3T areas, proved PLN's commitment to upholding equal rights in accessing electricity that will be useful to advance the welfare of the community, including accessing information and learning opportunities.

Informasi Perusahaan Telah Melakukan Review terhadap Seluruh Regulasi terkait Isu-Isu HAM

PLN memastikan bahwa hak-hak pegawai telah memenuhi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003). Seluruh hak dan kewajiban pegawai dituangkan di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2010-2012 yang telah diperpanjang dengan addendum 2013-2014. Saat ini belum ada review PKB kembali menunggu kesiapan tim perunding dari serikat pekerja. Pemenuhan hak-hak pegawai yang diatur di PKB secara keseluruhan berada di atas persyaratan minimal yang diatur di UU 13/2003.

Untuk menangani isu HAM di lingkungan eksternal, salah satu regulasi yang menjadi acuan PLN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur hak dan kewajiban PLN sebagai pelaku usaha dan pelanggannya.

Pada prinsipnya, Perusahaan melakukan kajian seluruh regulasi terkait isu-isu HAM dan menerima masukan dari semua pihak; serikat pekerja, pegawai, pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya jika terdapat regulasi baru atau perubahan yang menyangkut isu-isu HAM.

Informasi dan Uraian Singkat tentang Isu-Isu Penting Tanggung Jawab Sosial Bidang HAM

Perusahaan memiliki sejumlah isu strategis dalam penanganan tanggung jawab sosial di bidang HAM, di antaranya adalah upaya menghindari situasi berisiko HAM dan menghindari pelanggaran HAM di lingkungan kerja PLN, penanganan keluhan masyarakat, adanya praktik diskriminasi dan kelompok rentan, hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, serta prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja.

Informasi Risiko terkait HAM, Baik Risiko Bagi Perusahaan Maupun Pemangku Kepentingan

Dalam sistem manajemen risiko Perusahaan, saat ini PLN memiliki 9 risiko utama dimana dua di antaranya memiliki kaitan dengan aspek HAM yaitu risiko kecelakaan kerja (hak untuk hidup, hak lingkungan kerja yang aman) dan risiko

Information That Company Has Reviewed All Regulations relating to Human Rights Issues

PLN ensures that the rights of employees have complied with Law Number 13 of 2003 concerning Manpower (Law 13/2003). All employee rights and obligations are outlined in the 2010-2012 Collective Labor Agreement (PKB) which has been extended with the 2013-2014 addendum. At present there is no review on the PKB, still waiting for the readiness of the negotiating team from the union. Fulfillment of employee rights regulated in the PKB as a whole is above the minimum requirements stipulated in Law 13/2003.

To deal with the issue of human rights in the external environment, one of the regulations referred to by PLN is Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which regulates the rights and obligations of PLN as business actors and customers.

In principle, the Company reviews all regulations relating to human rights issues and receives input from all parties; trade unions, employees, customers and other stakeholders if there are new regulations or changes concerning human rights issues.

Information and Brief Description of Important Issues of Social Responsibility in the Field of Human Rights

The Company has a number of strategic issues in handling social responsibility in the field of human rights, including efforts to avoid risky human rights situations and avoid violations of human rights in the PLN work environment, handling public complaints, the existence of discriminatory practices and vulnerable groups, civil and political rights, economic rights, social and cultural, as well as basic principles and rights at work.

Information On Risks Related To Human Rights, Both For Companies And Stakeholders

In the Company's risk management system, PLN currently has 9 main risks where two of them are related to human rights aspects, namely the risk of work accidents (right to life, rights to safe working environment) and HR capacity and

kapasitas dan kapabilitas SDM tidak terpenuhi (hak mengembangkan diri).

capability risks not fulfilled (the right to develop themselves).

No.	Tipe Risiko Risk Type	Risiko Utama Major Risk	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
1	Aspek Legal	Kecelakaan Kerja	1. Implementasi *Contractor Safety Management System* (CSMS). 2. Menunjuk Pengawas Pekerjaan yang berkompeten dan diberi kewenangan untuk menghentikan pekerjaan apabila kondisi yang tidak memenuhi kaidah K3. 3. Memastikan seluruh instalasi ketenagalistrikan dalam kondisi aman 4. Memastikan SOP tersedia dan dipahami oleh pekerja. 5. Memastikan alat kerja dan APD tersedia dan digunakan oleh pekerja. 6. Melakukan mitigasi potensi bahaya kebakaran dan inspeksi alat proteksi kebakaran di seluruh instalasi gudang, gedung, instalasi pembangkit dan instalasi ketenagalistrikan. 7. Mengembangkan budaya safety dan pengukuran faktor higiene.
	Legal Risk	Work Accident	1. Implementation of Contractor Safety Management System (CSMS) 2. Appointing certified project supervisors and give authority to stop work when safety rules are not met. 3. Ensuring that all electricity installations are safe. 4. Ensuring that standard operating procedures are available and understood by workers 5. Ensuring that work tools and personal protective equipment are available and used by workers. 6. Mitigating potential fire hazard and inspecting fire protection equipment in all warehouse, buildings, power plant, and other electricity installations. 7. Developing safety culture and measuring of Hygiene factor.
2	SDM	Kapasitas dan kapabilitas SDM tidak terpenuhi	1. Merumuskan grand design human capital yang disesuaikan dengan perubahan kondisi dan isu yang terkini. 2. Memastikan perencanaan tenaga kerja yang lebih optimal dan mempertimbangkan segala aspek dan variabel yang komprehensif. 3. Melakukan tinjauan dan analisis efektivitas terhadap perubahan dan pengembangan struktur organisasi yang ada. 4. Menyiapkan dan menyelaraskan sistem human capital management dalam rangkaian sinergi platform di holding dan anak perusahaan dengan membuat tahapan implementasi terkait kesiapan anak perusahaan. 5. Pengembangan sistem manajemen kinerja pegawai yang integrasi dengan sistem manajemen operasi dan Pengembangan Integrated Productivity Measure.
	Human Capital	Employee capacity and capability below standard	1. Formulating human capital grand design that is adaptable to the changing conditions and current issues. 2. Ensuring more optimal workforce planning by considering comprehensive aspects and variables. 3. Reviewing and analyzing the effectiveness of changes and the development of existing organizational structures. 4. Preparing and harmonizing human capital management system in a series of platform synergies in holding and subsidiaries by making implementation stages related to the readiness of subsidiaries. 5. Developing employee performance management systems integrated with operation management system and Development of Integrated Productivity Measures.

Informasi Ekspektasi Pemangku Kepentingan tentang Peran Perusahaan dalam Penanganan Isu-Isu HAM

Para pemangku kepentingan internal dan eksternal Perusahaan memiliki ekspektasi masing-masing untuk dapat menangani isu penting di bidang HAM. Ekspektasi pemangku kepentingan internal mengenai hak-hak pegawai disampaikan kepada serikat pekerja untuk dirundingkan dengan manajemen dan hasil perundingan dituangkan di dalam PKB. Sementara ekspektasi

Information on Stakeholder Expectations on the Role of the Company in Managing Human Rights Issues

The internal and external stakeholders of Company have their own expectations regarding how to address important issues of human rights. Internal stakeholder expectations regarding employee rights are conveyed to the union to be negotiated with Management of the Company and the results of the negotiations are outlined in the Collective Labor Agreement. While the

pemangku kepentingan eksternal seperti: pemerataan penyambungan listrik, isu kesehatan lingkungan disampaikan melalui berbagai saluran seperti media massa, pemerintah daerah, LSM dan lain-lain. Dalam penanganan isu-isu tersebut PLN mengutamakan dialog untuk mencapai kesepahaman, melakukan survei dan perencanaan untuk upaya penyelesaian isu-isu tersebut.

PERENCANAAN KEGIATAN CSR BIDANG HAM

Informasi Deskripsi yang Mencerminkan Upaya Menurunkan Dampak HAM Pada Program CSR Pentung Perusahaan

PLN memberikan perhatian serius atas dampak aktivitas operasional Perusahaan terhadap potensi pelanggaran HAM. Perlindungan terhadap aspek HAM menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari operasional Perusahaan sehari-hari dan dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan, mulai dari pegawai, pelanggan, hingga masyarakat sekitar.

Komitmen Perusahaan terhadap perlindungan HAM dilakukan dalam bentuk:

1. Bertanggung jawab, memitigasi dan mengelola semua risiko yang mungkin terjadi akibat situasi kerja di Perusahaan yang berisiko melanggar HAM.
2. Menyelesaikan keluhan pemangku kepentingan terkait HAM (*resolving grievances*).
3. Mengantisipasi hal-hal yang bersifat diskriminatif dan penanganan kelompok-kelompok rentan (*discrimination and vulnerable groups*).
4. Menghormati hak-hak sipil dan politik yang dimiliki masing-masing individu (*civil and political rights*)
5. Menghormati hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat (*economic, social and cultural rights*), dan
6. Menghormati hak dasar pegawai ketika berada di tempat kerja (*fundamental rights at work*).

Dalam pengelolaan SDM, PLN mematuhi UU 13/2003 dan menentang segala jenis diskriminasi dan memegang prinsip kemanusiaan serta menghormati hak-hak pegawai.

expectations of external stakeholders such as: equitable distribution of electricity, environmental health issues, are conveyed through various channels such as mass media, local governments, NGOs and others. In adressing such issues, PLN prioritizes dialogue to reach understanding, as well as surveying and planning efforts to resolve these issues.

PLANNING CSR ACTIVITIES IN THE FIELD OF HUMAN HIGHTS

Information on Descriptions that Reflect Efforts to Reduce the Impact of Human Rights on the Company's CSR Key Program

PLN pays serious attention to the impact of the Company's operational activities on potential human rights violations. Protection of human rights aspects is an inseparable part of the Company's daily operations and in interacting with stakeholders, ranging from employees, customers, to the surrounding community.

The Company's commitment to human rights protection is carried out by:

1. Being responsible, mitigating and managing all risks that may occur due to work situations in the Company that risk violating human rights.
2. Resolving stakeholder complaints related to human rights (resolving grievances).
3. Anticipating discriminatory matters and handling discrimination and vulnerable groups.
4. Respecting civil and political rights of each individual (civil and political rights)
5. Respecting the economic, social and cultural rights of the people, and
6. Respect the fundamental rights of employees at work place.

In managing human resources, PLN complies with Law 13/2003 and opposes all types of discrimination and holds humanitarian principles and respects the rights of employees.

Upaya Menciptakan Manfaat Bersama Inisiatif Bidang HAM Perusahaan

Menikmati aliran listrik merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh masyarakat tanpa terkecuali, termasuk masyarakat di daerah pelosok dan terpencil. Dengan pemahaman tersebut, PLN berupaya agar setiap warga masyarakat, di manapun berada, dapat menikmati listrik. Salah satu inisiatif PLN adalah Program Desa Mandiri Energi –yaitu membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di desa-desa yang relatif terpencil, sulit diakses oleh jaringan listrik secara ekonomis, tetapi memiliki sumber air dengan debit yang baik dan hutan yang memadai untuk menjamin kesinambungan pasokan air. Keberadaarn PLTMH selain memberi manfaat penerangan, juga mengedukasi masyarakat agar memelihara kelestarian lingkungan untuk menjaga sumber air.

Efforts to Create Joint Benefits Initiatives in the Company's Human Rights Sector

Enjoying the electricity is one of the human rights owned by the community without exception, including people in remote and remote areas. With this understanding, PLN strives so that every citizen, wherever located, can enjoy electricity. One of PLN's initiatives is the Energy Independent Village Program - which is to build Micro Hydro Power Plants (PLTMH) in villages that are relatively remote, difficult to access by the electricity network economically, but have water sources with good discharge and adequate forests to guarantee sustainability of water supply. The existence of PLTMH in addition to providing lighting benefits, also educates the community to preserve the environment to protect water sources.

Informasi Berisi Mekanisme dan Prosedur Menghadapi Keadaan Darurat dan/atau Konflik terkait HAM

Konflik atau tuntutan ketidakpuasan atas hak-hak pegawai dapat diselesaikan melalui Lembaga Kerja Sama Bipartit (LKS Bipartit). LKS Bipartit merupakan forum komunikasi dan konsultasi antara manajemen dan perwakilan pegawai/serikat pekerja. Melalui LKS Bipartit, para pihak dapat mencari solusi atas masalah ketenagakerjaan yang terjadi atau meminimalisir potensi terjadinya masalah ketenagakerjaan. Perusahaan menetapkan keberadaan LKS Bipartit di seluruh unit sebagai KPI dalam Organization Capital Readiness (“OCR”) tahun 2019, sehingga seluruh unit PLN dan anak perusahaan telah memiliki LKS Bipartit.

Information Contains Mechanisms and Procedures in Dealing with Emergencies and/or Conflicts related to Human Rights

Conflicts or demands for dissatisfaction with employee rights can be resolved through the Bipartite Cooperation Institutes (LKS Bipartit). LKS Bipartit is communication and consultation forums between management and employee/union representatives. Through the Bipartite Institution, the parties can find solutions to employment problems that occur or minimize the potential for employment problems. The company determines the existence of LKS Bipartit in all units as KPI in Organization Capital Readiness ("OCR") in 2019, so that all PLN units and subsidiaries already have LKS Bipartit.

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG HAM

IMPLEMENTATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE FIELD OF HUMAN RIGHTS

Menghormati Kehidupan Individu

PLN menempatkan kehidupan pribadi terpisah dengan pekerjaan, yang antara lain diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk menjalankan kegiatan inidividu pada saat libur kerja dan memberikan cuti pada saat karyawan menjalankan ibadah besar seperti ibadah haji.

Respect for Individual Life

PLN places personal life separate from work, which among others is realized by providing opportunities for employees to carry out individual activities during work breaks and give time off when employees perform large religious services such as the pilgrimage.

Perusahaan memiliki mekanisme bagi pegawai untuk mengajukan usulan perbaikan, pendapat, atau kritik membangun bagi perbaikan pola operasional atau kesejahteraan, melalui: a) serikat pekerja b) Lembaga Kerja Sama Bipartit (LKS Bipartit) c) acara bincang dengan Direksi, d) email, dan e) *online chat* dengan Direksi. Interaksi tersebut penting untuk melibatkan pegawai dalam setiap proses perencanaan pengembangan dan pengambilan keputusan.

The Company has a mechanism for employees to submit proposals for improvement, opinion, or constructive criticism for improving operational or welfare patterns, through: a) trade unions b) Bipartite Cooperation Institution (LKS Bipartit) c) talking with the Board of Directors, d) emails, and e) online chat with the Board of Directors. This interaction is important to involve employees in every process of development planning and decision making.

Hak Cuti Pegawai

Kebijakan mengenai cuti pegawai diatur di dalam Peraturan Direksi No. 1003.K/DIR/2011 Tentang Cuti dan Ijin Tidak Masuk Kerja. Pemberian cuti dan ijin tidak masuk kerja kepada pegawai bertujuan agar pegawai dapat memiliki waktu khusus untuk keluarga atau untuk beristirahat sehingga diharapkan dapat memulihkan kesegaran fisik dan mental yang dapat berdampak pada peningkatan kinerja.

Employee Leave Rights

The policy on employee leave is regulated in the Board of Directors' Regulation No. 1003.K/DIR/2011 Regarding Leave and Absence. The granting of leave and permission to employees is intended to allow employees to have special time with family or to rest in order to restore physical and mental freshness which can have an impact on improving performance.

Hak cuti pegawai juga diatur di dalam PKB, antara lain:

- Pasal 30: Hak cuti tahunan diberikan kepada pegawai yang telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun terus-menerus mulai tanggal diangkat dalam masa percobaan dengan lama cuti 12 hari setahun.
- Pasal 31: Hak cuti besar diberikan kepada pegawai yang telah bekerja selama 6 tahun terus-menerus. Cuti besar disertai dengan tunjangan cuti sebesar 4 kali penghasilan tetap dengan lama cuti besar adalah 3 bulan.
- Pasal 35: Cuti bersalin bagi pegawai wanita diberikan selama tiga bulan dengan menerima penghasilan penuh.
- Pasar 36: Pegawai wanita yang anaknya masih menyusu harus diberikan kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja dengan ketentuan dilaksanakan di lingkungan tempat kerja.

The employees rights for leave are also regulated in PKB, which include:

- Article 30: The right of annual leave is granted to employees with at least 1 (one) year of continuous service, starting from the date of appointment on probation, with 12 days of leave a year.
- Article 31: The rights for sabbatical leave is granted for employees with more then 6 years of continuous service, with four month fully paid and a sabatical leave of 3 months.
- Article 35: The rights to have a three months fully paid maternity leave granted for female employees.
- Article 36: Female employees whose children are still breastfeeding should be granted appropriate time to breastfeed their children, shall it must be done during working time, provided that it is done in the workplace environment.

Ijin Pegawai

Berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 1003.K/DIR/2011 tentang Cuti dan Ijin Tidak Masuk Kerja, Perusahaan juga memberikan ijin untuk tidak bekerja dalam kurun waktu tertentu

Employee Permission

Based on the Decree of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 1003.K/DIR/2011 concerning Leave and Permission, the Company also gives employee permission to not to go to

setelah memenuhi persyaratan tertentu, anatara lain:

- Ijin haid dan gugur kandungan dimana pegawai wanita tidak boleh diwajibkan bekerja pada hari pertama dan hari kedua waktu haid dan pegawai wanita yang mengalami gugur kandungan dapat diberikan istirahat paling lama 1,5 bulan dengan menerima penghasilan penuh.
- Ijin karena alasan Penting berupa:
  - Pegawai yang bersangkutan melangsungkan pernikahan;
  - Anak pegawai melangsungkan pernikahan;
  - Istri pegawai melahirkan;
  - Anak pegawai dikhitan;
  - Anak pegawai dibaptis;
  - Saudara kandung Pegawai menikah atau meninggal dunia;
  - Orang tua, mertua, dan menantu pegawai meninggal dunia;
  - Istri, suami, dan anak Pegawai meninggal dunia;
  - Melaksanakan Ibadah haji yang pertama kali.

work in a certain period of time after fulfilling certain requirements, among other things:

- Menstruation and Miscarriage Permission, in which female employees must not be required to work on the first and second days of menstruation and female employees suffering from miscarriage are entitled to have a maximum of 1.5 months of rest fully paid.
- Absence due to important reasons in the form of:
  - The employee get marriage;
  - The employee marries his/her child off
  - The employee's wife gives birth;
  - The employee's son is circumcised;
  - The employee's child is baptized;
  - The employee's siblings get married or passed away;
  - The employees parents, parents in-laws, and son/daughter-in-law passed away;
  - The employee's spouse and child passed away;
  - Performing Hajj for the first time.

Kesempatan yang Adil Untuk Menduduki Posisi Penting di Perusahaan

Setiap jabatan dihargai dengan *grade* atau level kompetensi sebagai dasar pembinaan imbal jasa secara seimbang dan wajar sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya. Penempatan pegawai ditentukan berdasarkan kebutuhan Perusahaan sesuai dengan formasi jabatan dan formasi tenaga kerja yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan kompetensi jabatan dengan kompetensi pegawai.

Fair Opportunities to Hold Important Positions in the Company

Each position is valued with the grade or level of competency as the basis for a balanced and fair compensation in accordance with its obligations and responsibilities.Employee placement is determined based on the needs of the Company in accordance with the position formation and workforce formation that has been determined by taking into account the suitability between the position competency needs and employee competency.

CAPAIAN DAN PENGHARGAAN INISIATIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG HAM

Pada tanggal 10 April 2019, Perusahaan menerima penghargaan HR Excellence Award 2019 dari dari SWA Media & Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi pada 2 kategori, yaitu *Recruit Strategic* dan *Learning and Development Strategy*.

ACHIEVEMENTS AND AWARDS OF THE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVE IN THE FIELD OF HUMAN RIGHTS

On April 10, 2019, the Company received the 2019 HR Excellence Award from SWA Media & Management Institute of the Faculty of Economics in 2 categories, namely Recruit Strategic and Learning and Development Strategy.

Program Tanggung Jawab Sosial Yang Terkait Dengan Ketenagakerjaan

Social Responsibility Program Related to Employment

KEBIJAKAN DAN KOMITMEN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT KETENAGAKERJAAN

Penyataan dan Kebijakan yang Menunjukkan Tidak Ada Diskriminasi Hak dan Kewajiban di Tempat Kerja (Suku, Ras, Agama, Gender, dan Difable)

Perusahaan berupaya mengoptimalkan potensi SDM yang dimiliki dengan tetap memperhatikan kepentingan pegawai. Kebijakan dasar pengelolaan SDM dituangkan dalam Kepdir No. 032.K/DIR/2009 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi.

POLICIES AND COMMITMENTS ON SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO EMPLOYMENT

Statements and Policies that Demonstrate No Discrimination of Rights and Obligations at Work (Ethnic, Racial, Religion, Gender, and Difable)

The company seeks to optimize the potential of its human resources while still taking into account the interests of employees. The basic policy of HR management is stated in BOD Regulation No. 032.K/DIR/2009 concerning Competency Based Human Resource Management Systems.

PLN menerapkan prinsip keterbukaan, kewajaran, kesetaraan dan keadilan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan dan gender dalam seluruh proses bisnis Perusahaan. Penerapan praktik anti-diskriminasi dalam pengelolaan SDM dimulai sejak proses rekrutmen pegawai, penilaian kinerja, remunerasi, hingga pengembangan kompetensi dan jenjang karir.

Pada tahun 2019, jumlah pegawai PLN berjumlah 54.129 orang yang terdiri dari 45.061 pegawai *holding* dan 9.068 pegawai anak perusahaan. Jumlah pegawai *holding* tersebut terdiri dari 36.559 pegawai laki-laki (81%) dan 8.502 pegawai perempuan (19%). Komposisi pegawai laki-laki yang lebih banyak daripada pegawai perempuan semata-mata karena mayoritas bidang pekerjaan di Perusahaan berupa pelayanan yang berlangsung di lapangan selama 24 jam seperti pengoperasian pembangkit listrik, pemeliharaan jaringan transmisi dan distribusi serta pelayanan pelanggan. Hal ini menyebabkan kebutuhan pegawai laki-laki menjadi lebih dominan.

Perusahaan menerapkan prinsip kesetaraan gender sebagai bagian dari kebijakan non-diskriminasi. Setiap pegawai mempunyai peluang yang sama untuk mencapai jenjang karir tertinggi. Hal ini terbukti dari keberadaan 3 Direktur perempuan pada komposisi Direksi PLN. Ketiga Direktur tersebut merupakan pejabat karir dengan masa kerja lebih dari 15 tahun di lingkungan PLN Group.

Kebijakan Lainnya yang Dapat Mendukung Partisipasi Kerja Kaum Perempuan Seperti Pengaturan Waktu Bekerja Fleksible dan *Telecomuting*

Sebagai implementasi prinsip kesetaraan gender dan non-diskriminasi, PLN tidak menerapkan kebijakan waktu kerja fleksibel maupun *telecomuting* yang dikhususkan untuk pegawai perempuan.

Kebijakan dan Komitmen Perusahaan untuk Menghormati Hak Pekerja atas Fasilitas Sosial Khusus seperti Hak untuk Pekerja Difabel, Ibu Menyusui dan Lainnya

Perusahaan menghormati hak-hak dasar kaum perempuan sebagaimana diatur di dalam UU 13/2003. Setiap pegawai perempuan mendapat

PLN applies the principles of openness, fairness, equality and justice regardless of ethnicity, religion, race, class and gender in all of the Company's business processes. The application of anti-discrimination practices in HR management starts from the process of employee recruitment, performance appraisal, remuneration, to the development of competencies and career paths.

In 2019, there were 54,129 PLN employees consisting of 45,061 holding employees and 9,068 subsidiary employees. The number of holding employees consists of 36,559 male employees (81%) and 8,502 female employees (19%). The composition of male employees is more than female employees solely because the majority of work in the Company is a 24-hour field service such as the operation of power plants, maintenance of transmission and distribution networks and customer service. This causes the needs of male employees to be greater than female employees.

The Company applies the principle of gender equality as part of its non-discrimination policy. Every employee has the same opportunity to achieve the highest career path. This is evident from the existence of 3 female Directors in the composition of the PLN's Board of Directors. The three Directors are career officials with a service of more than 15 years within the PLN Group.

Other Policies that Can Support Women's Participation such as Flexible Timing and Telecomuting

As an implementation of the principles of gender equality and non-discrimination, PLN does not implement a flexible working time or telecomuting policy specifically for female employees.

Company Policies and Commitments to Respect Workers' Rights to Special Social Facilities such as the Right to Disabled Workers, Lactating Mothers and Others

The Company recognizes the basic rights of female worker as regulated in Law 13/2003. Every female employee has the right to menstrual

hak ijin haid, cuti melahirkan, ijin gugur kandungan, dan memberikan kesempatan untuk menyusui bayi dengan menyediakan ruang menyusui di kantor. Lebih dari itu, di Kantor Pusat PLN dan beberapa unit tertentu telah tersedia ruang bermain anak (*day care*) dilengkapi dengan petugas pengasuhnya sehingga para ibu dapat fokus bekerja tanpa harus meninggalkan anaknya di rumah.

permission, maternity leave, miscarriage permission, and provide accommodations for breastfeeding mothers at work. More than that, PLN Head Office and a number of units have been equipped with day care units, along with the caregivers, so that mothers can focus on working without leaving their children at home.

PLN tidak menutup kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berkarya sebagai pegawai PLN. Tetapi saat ini belum ada kandidat dari penyandang disabilitas yang lolos seleksi kompetensi sesuai kualifikasi yang ditetapkan.

PLN does not close opportunities for persons with disabilities to work as PLN employees. But currently, there are no disables passed the competency test according to the specified qualifications.

Komitmen untuk Patuh Pada Hukum dan Regulasi

Komitmen PLN untuk mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain dinyatakan di dalam salah satu tujuan Pedoman Good Corporate Governance PLN yaitu untuk mendorong setiap organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan berlandaskan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan.

Commitment to Comply with Law and Regulation

PLN's commitment to comply with all applicable laws and regulations, among others, is stated in one of the objectives of the PLN Good Corporate Governance Guidelines, which is to encourage each of the Company's organs in making decisions and carrying out actions based on high moral values and compliance with laws and regulations, and awareness of the Company's social responsibility towards stakeholders and environmental sustainability around the Company.

PLN selalu melakukan *legal review* atas setiap regulasi baru untuk menyesuaikan Peraturan Direksi dan peraturan internal turunannya agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan aspek HAM, Perusahaan telah mengkaji aspek-aspek HAM di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan berkomitmen untuk menghormati HAM di dalam setiap proses bisnis.

PLN always conducts a legal review of each new regulation to adjust the Board of Directors' Regulation and its internal regulations so that they do not conflict with applicable laws and regulations. With regard to human rights aspects, the Company has reviewed human rights aspects in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights and is committed to respecting human rights in every business process.

Di dalam Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis disebutkan bahwa dalam menjalankan bisnisnya, PLN bertekad bekerja dengan semangat untuk selalu menghasilkan produk dan pelayanan yang terbaik serta memperlakukan pelanggan, mitra usaha, dan pemasok dengan adil tanpa membeda-bedakan. Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis telah mengatur sebagian besar pokok-pokok persamaan dan penghormatan pada HAM, hubungan dengan pemasok dan pelanggan,

The Code of Business Conduct and Ethics states that in conducting its business, PLN is determined to work with passion to always produce the best products and services, and treat customers, business partners and suppliers fairly without discrimination. The Code of Conduct and Business Ethics has governed most of the points of equality and respect for human rights, relationships with suppliers and customers,

hubungan dengan pesaing, hubungan dengan masyarakat sekitar, perilaku etis dengan sesama pegawai, kepatuhan terhadap hukum serta kesempatan kerja yang adil.

Perusahaan juga melakukan adopsi atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.13/PPU-XV2017 untuk menghapus SK 025.K/DIR/2011 tentang Perkawinan Antar Pegawai. Perusahaan telah merevisi ketentuan SK 025, sehingga saat ini Pernikahan Pegawai diperbolehkan di lingkungan Perusahaan.

LINGKUP DAN PERUMUSAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

Lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang ketenagakerjaan difokuskan pada peningkatan produktivitas pegawai melalui promosi, peningkatan kompetensi, peningkatan kesejahteraan, kompensasi dan benefit yang kompetitif dan berbasis kinerja, menciptakan hubungan industrial dan suasana kerja yang harmonis melalui serikat pekerja, LKS Bipartit, PKB dan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Informasi Bahwa Perusahaan Telah Melakukan *Due Dilligence* di Bidang Ketenagakerjaan

Perusahaan berkomitmen untuk membangun hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan menghargai hak-hak pegawai untuk berorganisasi dan membentuk serikat pekerja. Hubungan industrial di PLN dilaksanakan melalui sarana serikat pekerja, PKB, LKS Bipartit, pembinaan hubungan industrial dan penegakan peraturan disiplin pegawai. Hubungan Perusahaan dengan pegawai berdasarkan pada asas profesionalisme dengan mengacu pada kesepakatan hak-hak dan kewajiban di dalam PKB.

Untuk memastikan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan dan mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, Perusahaan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

relationships with competitors, relations with surrounding communities, ethical behavior with fellow employees, compliance with law and fair employment opportunities.

The Company also adopted the decision of the Constitutional Court (MK) No.13/PPU-XV2017 to revoke the SK 025.K/DIR/2011 regarding Inter-Staff Marriage. The Company has revised the SK 025, so that now Inter Employee Marriage is allowed within the Company.

SCOPE AND FORMULATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY IN EMPLOYMENT SECTOR

The scope and formulation of social responsibility in the field of employment is focused on increasing employee productivity through promotion, competency enhancement, welfare improvement, compensation and benefits that are competitive and merit-based, creating harmonious industrial relations and working atmosphere through unions, LKS Bipartit, PKB and Industrial Relations Dispute Settlement Institution

Information that the Company Has Conducted Due Diligence in the Field of Labor

The Company is committed to building harmonious, dynamic and fair industrial relations as mandated in the applicable laws and regulations. The Company respects the employees rights of association and form trade unions. Industrial relations at PLN is implemented through the means of trade unions, PKB, LKS Bipartit, industrial relations development and enforcement of employee discipline regulations. The Company's relationship with employees is based on the principle of professionalism with reference to the agreement of rights and obligations in the Collective Labor Agreement.

To ensure the fulfillment of labor rights in accordance with laws and regulations and to create harmonious, dynamic and fair industrial relations, the Company has taken the following actions:

a. Menetapkan pembinaan hubungan industrial di seluruh unit PLN sebagai salah satu KPI dalam target kinerja OCR tahun 2019. Tujuannya adalah untuk mengedukasi pegawai di seluruh unit agar memiliki pemahaman terkait ketentuan hubungan industrial dan dapat mengimplementasikan ketentuan kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Memberikan pendidikan dan pelatihan hubungan industrial di lingkungan PLN untuk mempercepat penyelarasan persepsi terhadap pengetahuan tentang hubungan industrial.
c. Melakukan studi banding (*benchmarking*) ke beberapa perusahaan untuk mendapatkan *best practices* pengelolaan hubungan industrial.
d. Melakukan supervisi terhadap unit-unit PLN baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menyikapi kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh manajemen. Supervisi yang dilakukan pada tahun 2019 berkaitan dengan pembinaan hubungan industrial, pelanggaran disiplin pegawai khususnya tentang SPPD, dan lain-lain.

a. Determining industrial relations development in all PLN units as one of the KPIs in the 2019 OCR performance target, aiming at educating employees in all units to have an understanding of industrial relations provisions and be able to implement staffing requirements in accordance with applicable regulations.
b. Providing industrial relations education and training within the PLN environment to accelerate the alignment of perceptions of knowledge about industrial relations.

c. Benchmarking) to several companies to learn about best practices in managing industrial relations.

d. Supervising PLN units, both directly and indirectly, in response to policies issued by management. Supervision conducted in 2019 is related to industrial relations development, violation of employee discipline, especially regarding SPPD, and others.

Informasi Pendekatan yang Dilakukan dalam Mengenali dan Merumuskan Tanggung Jawab Sosial di Bidang Ketenagakerjaan

Salah satu pendekatan yang dilakukan Perusahaan untuk mengenali dan merumuskan tanggung jawab sosial di bidang ketenagakerjaan adalah melalui *Employee Engagement Survei* (EES) yang dilakukan setiap tahun. Pendekatan lainnya adalah mereview ketentuan-ketentuan baru dari pemerintah mengenai ketenagakerjaan dan menerima masukan dari serikat pekerja untuk merumuskan penyempurnaan kebijakan Perusahaan di bidang kepegawaian.

Information on Approach Taken in Recognizing and Formulating Social Responsibility in the Field of Employment

One of the approaches taken by the Company to recognize and formulate social responsibility in the field of employment is through the Employee Engagement Survey (EES) which is conducted annually. Another approach is to review the new provisions of the government regarding employment and to receive input from trade unions to formulate improvements to the Company's policies in the area of employment.

Informasi Dampak Penting Langsung Ataupun Tidak Langsung Aktivitas dan Keputusan Perusahaan Terkait Ketenagakerjaan

Seluruh kebijakan Perusahaan mengenai ketenagakerjaan pada dasarnya bertujuan untuk membangun hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan dan menciptakan situasi kondusif dan lingkungan kerja yang nyaman bagi seluruh pegawai PLN.

Information on Important Direct and Indirect Impacts of Company Activities and Decisions Regarding Employment

All of the Company's policies regarding employment are basically aimed at building harmonious and fair industrial relations and creating a conducive situation and a comfortable work environment for all PLN employees.

Informasi Perusahaan telah Melakukan Review Terhadap Seluruh Regulasi di Bidang Ketenagakerjaan

Setiap regulasi baru di bidang ketenagakerjaan direview oleh Direktorat HCM dengan melibatkan lintas divisi seperti Divisi Kepatuhan, Divisi Hukum Korporat dan Divisi Risk Management apabila regulasi baru tersebut mengharuskan adanya penyesuaian kebijakan internal.

Information that Company Has Conducted a Review of All Labor Regulations

Every new regulation in the field of employment is reviewed by the Directorate of HCM by involving cross-divisions such as the Compliance Division, the Corporate Legal Division and the Risk Management Division if the new regulation requires adjustments to internal policies.

Informasi dan Uraian Singkat tentang Isu-Isu Penting Ketenagakerjaan dan Relevan dengan Bisnis Perusahaan

Perusahaan mengidentifikasi isu-isu penting ketenagakerjaan yang relevan dengan bisnis Perusahaan antara lain meliputi aspek-aspek remunerasi, jaminan kesehatan dan sosial, jaminan keselamatan kerja, pelatihan dan pengembangan kompensi, serta jenjang karir.

Hingga akhir tahun 2019, tidak terdapat isu-isu penting ketenagakerjaan di lingkungan Perusahaan. Hak dan kewajiban pegawai telah diatur di dalam PKB berdasarkan kesepakatan bersama. Perusahaan memastikan bahwa hak-hak pegawai yang diberikan Perusahaan telah melebihi ketentuan minimal yang diatur di dalam UU 13/2003. Selain itu, kebijakan remunerasi yang diberikan kepada pegawai jauh melebihi ketentuan Upah Minimum Regional (UMR), Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Sektoral (UMS).

Information and Brief Description of Important Issues on Employment that are Relevant with the Company Business

The Company identifies important employment issues that are relevant to the Company's business including aspects of remuneration, health and social security, work safety assurance, training and competency development, and career path.

Until the end of 2019, there were no important labor issues in the Company. Employees' rights and obligations are regulated in the Collective Labor Agreement based on mutual agreement. The Company ensures that employee rights granted by the Company have exceeded the minimum provisions stipulated in Law 13/2003. In addition, the remuneration policy provided to employees far exceeds the Regional Minimum Wage (UMR), Provincial Minimum Wage (UMP) and Sectoral Minimum Wage (UMS) requirements.

Informasi Risiko Bidang Ketenagakerjaan Baik Bagi Perusahaan Maupun Pemangku Kepentingan

Risiko terkait bidang ketenagakerjaan terutama adalah tidak terpenuhinya hak-hak karyawan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam PKB. Risiko-risiko tersebut dimitigasi dengan membuka forum dialog seluas-luasnya dengan pegawai, serikat pekerja, LKS Bipartit, maupun komunikasi dengan pemangku kepentingan eksternal.

Information on Employment Risk, Both for Companies and Stakeholders

The risks related to the employment sector are mainly the non-fulfillment of employee rights as stipulated in the Collective Labor Agreement. These risks are mitigated by forming a dialogue forum with employees, trade unions, LKS Bipartit, and communication with external stakeholders.

Informasi Ekspektasi Pemangku Kepentingan tentang Peran Perusahaan dalam Penanganan Isu Ketenagakerjaan

Isu-isu ketenagakerjaan yang muncul di kalangan internal Perusahaan apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan permasalahan yang dapat

Information on Stakeholder Expectations on the Role of the Company in Managing Labor Issues

Labor issues arising in the internal of the Company if properly addressed will cause problems that can interfere with the continued

mengganggu kesinambungan kinerja pelayanan ketenagalistrikan kepada pelanggan. Hal ini tentu tidak diharapkan oleh pelanggan karena pelanggan sebagai pemangku kepentingan eksternal utama menginginkan jaminan ketersediaan listrik yang berkualitas, bebas dari pemadaman dan gangguan penyaluran.

PERENCANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

Target/Rencana Kegiatan pada Tahun 2019 yang Ditetapkan Manajemen di Bidang Ketenagakerjaan

Secara garis besar, target dan strategi PLN di bidang ketenagakerjaan pada tahun 2019 adalah meningkatkan keunggulan pengelolaan organisasi dan SDM *(improving organization and HCM excellence)* antara lain dengan memperkuat organisasi fungsi korporat, fungsi bisnis regional dan unit, mengembangkan *Human Capital Management Integrated System* (HCMIS), serta kesiapan SDM (*Human Capital Readiness/*HCR).

Terdapat 4 program peningkatan produktivitas SDM yang tertuang di dalam KPI Direksi tahun 2019 yaitu:

1. Meningkatkan pemanfaatan Knowledge Management (KM) untuk mencapai kinerja Perusahaan melalui program 1) PLN Outlook, 2) Knowledge Sharing di lingkungan PLN, 3) Knowledge Capturing, 4) Peningkatan Keterlibatan Pegawai dalam Community of Practices dan Pengembangan Inovasi, 5) Implementasi OCR Teamwork dengan melibatkan peran Senior Leader, 6) Asistensi KM, 7) Manajerial Skill.
2. Meningkatkan keselarasan antara strategi Perusahaan dengan *strategic map* yang diterjemahkan ke dalam KPI individu melalui implementasi OCR *alignment* dalam HCR OCR unit.
3. Optimalisasi program retensi pegawai,
4. Implementasi pengukuran produktivitas dan pengembangan lanjutan SI Produktivitas Terintegrasi.

performance of electricity services to customers. It is not something that customer expect, since as the main external stakeholder, they wants a guaranteed availability of electricity, free from blackouts and disruption.

PLANNING FOR SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO EMPLOYMENT

Targets/Activity Plans for 2019 Set by Management in the Field of Employment

In general, PLN's targets and strategies in the field of employment in 2019 are to improve HR organizational and management excellence, among others by strengthening the organization of corporate functions, regional business functions and units, developing the Integrated Human Capital Management System (HCMIS), as well as the readiness of HR (Human Capital Readiness/HCR).

There are 4 HR productivity improvement programs set out in the 2019 KPI Directors:

1. Increasing the use of Knowledge Management (KM) to achieve company performance through: 1) PLN Outlook, 2) Knowledge Sharing in PLN environment, 3) Knowledge Capturing, 4) Increased Employee Involvement in Community of Practices and Innovation Development, 5) Implementation of OCR Teamwork by involving the role of Senior Leader, 6) KM Assistance, 7) Managerial Skills.
2. Improving the alignment between the Company's strategy and the strategic map which is translated into individual KPIs through the implementation of OCR alignment in the HCR OCR unit.
3. Optimization of employee retention programs,
4. Implementation of productivity measurements and the continued development of SI Integrated Productivity.

Informasi Deskripsi yang Mencerminkan Upaya Menurunkan Dampak Operasional Perusahaan pada Ketenagakerjaan

Kunci utama dari hubungan Industrial yang harmonis adalah membangun dialog sosial yang efektif dan produktif antara pegawai dan manajemen sehingga dapat mencegah terjadinya konflik internal serta mencari solusi untuk pencegahannya. Terciptanya hubungan industrial (HI) yang harmonis diukur melalui 2 indikator, yaitu terlaksananya LKS Bipartit dan pembinaan HI secara terstruktur di tingkat unit induk maupun unit pelaksana. Perusahaan melakukan monitoring terhadap kegiatan LKS Bipartit dan Pembinaan HI di unit-unit setiap bulan. Pada tahun 2019, sudah dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan serta eviden pelaksanaan LKS Bipartit serta perencanaan Pembinaan HI di unit dengan pencapaian skor 4.00 dari target skor 3.75.

Information on Description that Reflects Efforts to Reduce the Impact of Company Operations on Employment

The main key to harmonious industrial relations is to build effective and productive social dialogue between employees and management so as to prevent internal conflicts and find solutions to prevent them. The creation of harmonious industrial relations (HI) is measured through 2 indicators, namely the implementation of LKS Bipartit and structured HI coaching at the level of the parent unit and the implementing unit. The Company monitors the LKS Bipartit activities and Industrial Relation development in units on monthly basis. In 2019, an assessment of the implementation and evidence of the implementation of the LKS Bipartit and planning of HI Coaching in the unit have been carried out with the achievement of a score of 4.00 out of the target score of 3.75.

Informasi Berisikan Deskripsi Upaya Menciptakan Manfaat Bersama Ketenagakerjaan Bagi Pemangku Kepentingan

PLN menyelenggarakan program-program Manajemen Pengetahuan atau *Knowledge Management* ("KM") untuk membangun organisasi pembelajar (*learning organization*). KM diharapkan menjadi sarana transfer pengetahuan *best practice* di antara pegawai PLN sehingga menciptakan insan-insan PLN yang kompeten, produktif, inovatif, dan responsif terhadap perkembangan bisnis termasuk isu-isu ketenagakarjaan.

Information Contains Description of Efforts to Create Joint Employment Benefits for Stakeholders

PLN conducts Knowledge Management ("KM") programs to build learning organizations. KM is expected to become a means of transferring knowledge on best practices among PLN employees so as to create PLN people who are competent, productive, innovative, and responsive to business development.

Mekanisme dan Prosedur Menghadapi Keadaan Darurat Keselamatan Kerja dan/ atau Konflik di Bidang Ketenagakerjaan

Pedoman keselamatan Kerja mencakup ketentuan keselamatan ketenagalistrikan bagi pegawai, pekerja outsourcing, masyarakat umum yang tinggal di sekitar instalasi, masyarakat umum yang menjadi tamu Perusahaan dan masyarakat umum yang melaksanakan kegiatan di sekitar instalasi milik Perusahaan.

Setiap terjadi kecelakaan, pejabat penanggung jawab instalasi PLN segera setelah menerima informasi terjadinya kecelakaan membuat Laporan Kecelakaan untuk disampaikan kepada

Mechanisms and Procedures for dealing with emergencies in Work Safety and/or Conflict in Employment Aspect

The safety guidelines cover the provisions on electricity safety for employees, outsourced workers, the nearby communities who live around the Company's power plants, visitors in general, and any other person who does activities near the Company's installations.

If a work-related accident happens, the person in charge of PLN installation will, soon after he or she is informed, make an Accident Report to be further submitted to the Head of the Company

Pimpinan Unit Perusahaan dengan tembusan Ketua Tim P2K3 Unit dan Pejabat K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan). Selanjutnya Tim P2K3 Unit meneruskan informasi adanya kecelakaan di unitnya kepada Divisi HSSE dengan tembusan Ketua Tim P2K3 Kantor Pusat. Investigasi penyebab kecelakaan dilakukan oleh Tim P2K3 unit pelaksana dan Tiim P2K3 unit induk.

Sedangkan konflik atau tuntutan ketidakpuasan atas hak-hak pegawai yang terjadi di Perusahaan dapat diselesaikan melalui LKS Bipartit sebagai forum komunikasi dan konsultasi antara manajemen dan perwakilan pegawai/serikat pekerja. Melalui LKS Bipartit, para pihak dapat mencari solusi atas masalah ketenagakerjaan yang mungkin dan/atau telah terjadi atau meminimalisir potensi terjadinya masalah ketenagakerjaan. Perusahaan menetapkan keberadaan LKS Bipartit di seluruh unit sebagai KPI dalam Organization Capital Readiness ("OCR") tahun 2019, sehingga seluruh unit PLN dan anak perusahaan telah memiliki LKS Bipartit.

Deskripsi Upaya Perusahaan dengan Memanfaatkan Pengaruh Perusahaan untuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial di Bidang Ketenagakerjaan

Secara berkala, Perusahaan menyelenggarakan *employee gathering* dan *family gathering* yang diikuti oleh seluruh pegawai, sesuai dengan divisi/unit masing-masing. Tujuannya adalah untuk membangun keakraban antara pegawai dan keluarga, menumbuhkan kebersamaan dan kegembiraan. Perusahaan juga menyediakan fasilitas olahraga dan hiburan baik yang dibangun atau diadakan sendiri maupun bekerja sama dengan pihak lain. Penyediaan fasilitas olahraga bertujuan untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan pegawai yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja individu pegawai.

Demografi pegawai di PLN saat didominasi oleh generasi muda. Perusahaan memahami bahwa mereka membutuhkan keseimbangan dalam kehidupan pekerjaan maupun di luar pekerjaan. Oleh karena untuk untuk meningkatkan *engagement* pegawai, Perusahaan mendukung dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan "extrakurikuler" pegawai. Bentuk kegiatan *work-life balance* tersebut antara lain adalah:

Unit with a copy to the Head of the P2K3 Unit Team and the K2 (Electricity Safety) Officer. The P2K3 Unit Team will then inform the accident their unit to the HSSE Division with a copy to the Head of the P2K3 Head Office Team. A subsequent investigation of the incident cause will be made by the P2K3 implementing unit team and P2K3 master unit team.

Meanwhile, any conflict or dissatisfaction claim on employee rights is resolved through the Bipartite LKS as a communication and consultation forum for the Management and employee/union reps. Through the Bipartite LKS, disputing parties can settle or minimize employment issues that may be and/or may have been encountered. The Company has regulated Bipartite LKS in all units as KPI in Organization Capital Readiness ("OCR") in 2019, so now all units of PLN and its subsidiaries already have Bipartite LKS.

Description of the Company's efforts to use its Influence for the Implementation of Social Responsibility in Employment Field

Periodically, the Company holds employee and family gatherings that are attended by all employees, in accordance with their respective divisions/units. The objective is to build intimacy between employees and families, foster togetherness and share moments of joy. The Company also provides sports and entertainment facilities, either built or held solely, or in collaboration with other parties. With these facilities, the Company aims to improve employee fitness and health, which in turn will improve the performance of individual employees.

By demography, the younger generation dominates PLN employees. The Company understands that this young workforce needs a work and life balance. Therefore, in order to increase employee engagement, the Company supports and facilitates employee "extracurricular" activities. The work and life balance activities take the forms of:

Olah Raga
Sport

Fasilitas seperti *gym*, karate, zumba, yoga, basket, tenis, golf, renang, selam dan lain-lain.

Facilities such as gym, karate, zumba, yoga, basketball, tennis, golf, swimming, diving, etc.

Seni
Art

Kegiatan paduan suara, menari, fotografi dan lain-lain. Membolehkan divisi-divisi untuk merancang kenyamanan ruang kerja mereka sendiri. Beberapa Unit bahkan memiliki ruang untuk bermusik.

Choir activities, dancing, photography and others. Allow divisions to design the comfort of their own workspace. Some units even have a music room.

Kegiatan Sosial
Social Event

Mendukung program volunter untuk menyalurkan naluri karyawan dalam berkegiatan sosial. Para volunter dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan donasi sosial buka puasa dengan anak yatim, PLN mengajar, menanam terumbu karang, ekspedisi Papua terang, tanggap bencana dan lain sebagainya.

Support voluntary programs to channel employee instincts in social activities. Volunteers are involved in social donation activities, such as: to break fasting with orphans, PLN teaches, planting coral reefs, bright Papuan expeditions, disaster response and so forth.

Ibu dan Anak
Mother and Child

Menyediakan ruang laktasi dan penitipan anak.

Provide lactation room and day care center.

Informasi Biaya yang dikeluarkan Perusahaan Terkait Inisiatif di Bidang Ketenagakerjaan

Biaya yang dikeluarkan untuk bidang ketenagakerjaan yang mencakup biaya jasa produksi dan insentif prestasi kerja, imbalan kerja, gaji, tunjangan dan lainnya pada tahun 2019 sebesar Rp25.908,77 miliar, naik 13% dibandingkan Rp22.950,09 miliar pada tahun 2018.

Information on Costs incurred by the Company Related to Employment Initiatives

Costs incurred in the field of employment that included production service costs and work performance incentives, employee benefits, salaries, benefits and others in 2019 amounted to Rp25,908.77 billion, up 13% compared to Rp22,950.09 billion in 2018.

PELAKSANAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

Promosi

Perusahaan menerapkan sistem manajemen karir berbasis kompetensi. Pengangkatan/promosi pegawai dalam jabatan dilakukan berdasarkan penilaian kinerja, formasi jabatan dan formasi tenaga kerja yang telah ditetapkan oleh Perusahan. Setiap jabatan dihargai dengan grade atau level kompetensi sebagai dasar pembinaan

IMPLEMENTATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE FIELD OF EMPLOYMENT

Promotion

The Company applies a competency-based career management system. The appointment/promotion of employees is carried out based on performance appraisals, job formations and workforce formations that have been determined by the Company. Each position is valued with a grade or level of competence as a basis for

imbal jasa secara seimbang dan wajar sesuai kewajiban dan tanggung jawabnya.

fostering a fair and balanced service in accordance with its obligations and responsibilities.

Pengembangan Kompetensi

Pengelolaan SDM di PLN pada dasarnya adalah menyelaraskan tugas-tugas PLN sebagai penyedia jasa ketenagalistrikan dengan keahlian inti yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas tersebut. Dalam rangka pengelolaan dan pengembangan SDM yang efektif, efisien dan tepat tujuan, PLN telah telah mengidentifikasi jenis-jenis kompetensi dasar maupun lanjutan yang diperlukan, menentukan jenis sertifikasi keahlian yang relevan, serta menyusun program pelatihan terintegrasi yang dituangkan dalam Learning and Development Roadmap PLN.

Perusahaan mengembangkan sistem pembelajaran berjenjang sesuai kebutuhan organisasi. Jenis pelatihan terbagi atas beberapa jenjang mulai dari pelatihan khusus operasional hingga pelatihan manajerial. Jenis pendidikan dan pelatihan meliputi:

1. Pembelajaran calon pegawai baru;
2. Program pembelajaran profesi dan sertifikasi;
3. Program pembelajaran kepemimpinan;
4. Program pembelajaran inisiatif stratejik korporat;
5. Program pembelajaran penunjang;
6. Program pembelajaran masa purna bakti.

Competency Development

HR management at PLN is basically aligning PLN's duties as an electricity service provider with the core expertise needed to carry out these tasks. In the context of effective and efficient management and development of human resources, PLN has identified the types of basic and advanced competencies needed, determined the relevant types of certification of expertise, and compiled an integrated training program as outlined in the PLN Learning and Development Roadmap.

The cCmpany develops a stages learning system according to the needs of the organization. This type of training is divided into several stages ranging from specialized operational training to managerial training. Types of education and training include:

1. Learning for new employees;
2. Profession and certification learning programs;
3. Leadership learning program;
4. Corporate strategic Initiative learning program;
5. Supporting learning programs;
6. Post-service learning program.

Remunerasi Pegawai

Penjelasan terkait remunerasi pegawai telah dijelaskan pada Bab Profil Perusahaan.

Employee Remuneration

Explanations regarding employee remuneration have been explained in the Company Profile Chapter.

Penghargaan

Perusahaan menetapkan sistem pemberian penghargaan dengan tujuan untuk memberikan imbal jasa atas kontribusi, kompetensi individu, tanggung jawab, dan prestasi kerja bagi setiap pegawai Perusahaan. Pemberian penghargaan diharapkan dapat menarik, memelihara dan memotivasi pegawai untuk memberikan kontribusi yang optimal kepada Perusahaan dalam mendukung peningkatan kinerja dan pencapaian target usaha.

Appreciation

The Company established an awarding system with the aim of providing compensation for contributions, individual competencies, responsibilities and work performance for each employee of the Company. The awarding is expected to attract, maintain and motivate employees to make optimal contributions to the company in supporting improved performance and achieving business targets.

CAPAIAN YANG MEMBERIKAN GAMBARAN MANFAAT UNTUK PERUSAHAAN BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG

Dampak Kuantitatif atas Kegiatan Terkait Praktik Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Tingkat kecelakaan kerja yang terjadi hingga akhir tahun 2019 menunjukkan bahwa implementasi K3 di PLN belum mencapai tingkat konsistensi memuaskan. Berdasarkan evaluasi kecelakaan kerja yang terjadi sepanjang tahun 2019, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kecelakaan kerja tahun 2019 sebanyak 61 kasus, dengan mayoritas korban adalah pekerja dari mitra kerja yaitu 66 orang dan 11 orang pegawai dari Grup PLN.
2. Total Angka korban meninggal dunia (fatality) dikarenakan kecelakaan kerja yaitu 27 korban jiwa, yang diantaranya 20 Korban jiwa pada bidang Distribusi, 2 Korban jiwa pada bidang Transmisi, 5 Korban pada bidang Konstruksi dan Nihil korban jiwa pada bidang pembangkit.
3. Frequency Rate (FR) tahun 2019 adalah 0,08 kali kecelakaan/1 juta jam orang/tahun.
4. Severity Rate (SR) tahun 2019 adalah 480 hari kerja hilang/1 juta jam orang/tahun.

Dampak Kuantitatif pada Tingkat *Turnover* Karyawan

Pada tahun 2019, tingkat turnover pegawai sebesar 0,22% atau sebanyak 99 orang yang keluar atas kemauan sendiri (bukan terkait PHK). Perusahaan telah melakukan *exit meeting* dengan hasil kesimpulan mayoritas alasan berhenti karena lokasi tugas harus terpisah dengan keluarga. Sekitar 70% memilih untuk berkumpul dengan keluarga dan menjadi ibu rumah tangga. Sisanya merasa kurang puas dan ingin pindah ke perusahaan lain atau melanjutkan sekolah. Tingkat *turnover* masih berada di bawah 1% sehingga tidak berdampak material terhadap kegiatan operasional Perusahaan.

Dampak pada Penurunan Biaya Pengelolaan Ketenagakerjaan

Tidak terdapat penurunan biaya pengelolaan ketenagakerjaan. Biaya yang dikeluarkan untuk bidang ketenagakerjaan pada tahun 2019 mengalami kenaikan 13% dari Rp22.950,09 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp25.908,77 miliar.

ACHIEVEMENTS THAT PROVIDE DESCRIPTION OF BENEFITS FOR THE COMPANY BOTH DIRECTLY AND INDIRECTLY

Quantitative Impacts on Activities Related to Occupational Health and Safety Practices

The level of work accidents that occur until the end of 2019 shows that the implementation of OHS in PLN has not yet reached a satisfactory level of consistency. Based on the evaluation of work accidents that occur throughout 2019, it can be explained as follows:

1. There were 61 work accidents in 2019, with the majority of victims being workers from business partners, namely 66 persons and 11 employees from the PLN Group.
2. Total fatality due to workplace accidents is 27 fatalities, including 20 fatalities in the distribution sector, 2 fatalities in the transmission field, 5 victims in the construction field and zero fatalities in the power plant sector.
3. Frequency Rate (FR) in 2019 is 0.08 times accidents/1 million hours of people/year.
4. The Severity Rate (SR) of 2019 is 480 missing work days/1 million hours of people/year.

Qualitative Impact on Employee Turnover Rates

In 2019, employee turnover was 0.22% or 99 persons resigned on their own volition (not related to layoffs). The Company has conducted an exit meeting with the conclusion of the majority of reasons for resigning was due to the location of duties forced them to be separated from the family. About 70% choose to gather with family and become housewives. The rest are not satisfied and want to move to another company or continue their education. The turnover rate is still below 1% so it does not have a material impact on the Company's operational activities.

Impact on Reducing Labor Management Costs

There is no reduction in labor management costs. Costs incurred for the field of employment in 2019 increased by 13% from Rp22,950.09 billion in 2018 to Rp25,908.77 billion.

URAIAN CAPAIAN INISIATIF DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

Informasi Capaian Inisiatif Bidang Ketenagakerjaan yang Memberikan Gambaran Manfaat untuk Pemangku Kepentingan

Sehubungan dengan ketentuan yang mewajibkan perusahan untuk mendaftarkan karyawannya dalam program asuransi kesehatan BPJS Kesehatan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, PLN telah mendaftarkan seluruh pegawai untuk mengikuti program BPJS Kesehatan. Kepesertaan pegawai dalam program PBJS Kesehatan menggunakan skema pembayaran iuran sesuai Perpres Nomor 75 Tahun 2019.

Per 31 Desember 2019, Perusahaan telah mendaftarkan 44.124 pegawai pada program JKN KIS BPJS Kesehatan. Iuran Pemberi Kerja yang dibayarkan PLN untuk program BPJS Kesehatan pada tahun 2019 sebesar Rp16.066.411.851. Sejak April 2018, Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan telah terdaftar pada program BPJS Kesehatan. Meskipun pegawai PLN telah menjadi peserta BPJS Kesehatan, Perusahaan tidak menghapus fasilitas pemeliharaaan kesehatan internal yang sejak lama telah diberikan kepada pegawai dan keluarganya.

Perusahaan juga telah mendaftarkan seluruh pegawai pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Sejak Maret 2018, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan telah terdaftar pada program jaminan ketenagakerjaan dengan sertifikat kepesertaan Nomor 180000000407008. Di sisi lain, PLN tetap memberikan jaminan pensiun bagi pegawai yang dikelola oleh Dana Pensiun PLN (DP PLN) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

DESCRIPTION OF ACHIEVEMENTS OF INITIATIVE IN THE FIELD OF EMPLOYMENT

Information on Achievements in the Field of Employment that Provides an Image of Benefits to Stakeholders

In connection with the provisions requiring companies to register their employees in the BPJS Health insurance program as mandated by Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Organizing Agency, PLN has registered all employees in the BPJS Health program. Employee participation in the Health PBJS program uses a contribution payment scheme in accordance with Presidential Regulation Number 75 of 2019.

As of December 31, 2019, the Company had registered 44,124 employees in the JKN KIS Health BPJS program. Employer contributions paid by PLN for the Health BPJS program in 2019 amounted to Rp16,066,411,851. Since April 2018, the Company's Board of Directors and Board of Commissioners have registered with the BPJS Health program. Although PLN employees have become BPJS Health participants, the Company has not removed internal health care facilities that have long been provided to employees and their families.

The Company has also registered all employees in the Employment Social Security Program organized by the BPJS Employment which includes Work Accident Insurance (JKK), Death Insurance (JKM), Old Age Security (JHT) and Pension Insurance (JP) programs. Since March 2018, all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company have been registered with the employment guarantee program with membership certificate Number 180000000407008. On the other hand, PLN continues to provide pension guarantees to employees managed by the PLN Pension Fund (DP PLN) and the Pension Fund of Financial Institutions (DPLK).

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

Program Tanggung Jawab Sosial Yang Terkait Dengan Lingkungan Hidup

Corporate Social Responsibility Related to The Environment

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN

Sejalan dengan salah satu pernyataan misi Perusahaan yaitu "Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan", PLN selalu berusaha memperhatikan aspek lingkungan dalam menjalankan setiap kegiatannya. PLN berkomitmen untuk menjalankan aktivitas usaha yang berwawasan lingkungan dan sadar sepenuhnya bahwa bisnis pembangkitan tenaga listrik memiliki dampak langsung terhadap lingkungan hidup.

ENVIRONMENTAL COMMITMENT AND POLICY

In line with one of the Company's missions, which is "Operating an environmentally friendly business." In line with this mission, PLN is always concerned about environmental aspect in carrying out its activities. PLN is committed to carrying out environmentally friendly business and is fully aware that power plant business has a direct impact to the environment.

PERUMUSAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Informasi bahwa Perusahaan Telah Melakukan Uji Tuntas terhadap Tanggung Jawab Sosial Bidang Lingkungan Hidup

Uji tuntas tanggung jawab Perusahaan di bidang lingkungan antara lain dilakukan dengan melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang dilaporkan dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) atau dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam Izin Lingkungan yang dimiliki oleh setiap unit PLN. Proses monitoring dilakukan secara berkala sesuai periode pemantauan yaitu setiap 6 bulan sekali untuk memastikan kualitas lingkungan baik air, udara, tanah, maupun aspek sosial masyarakat.

Disamping itu, unit-unit yang dalam kegiatannya menghasilkan dampak lingkungan yang berpengaruh terhadap komunitas setempat, setiap tahun melakukan pemetaan sosial untuk mengetahui kondisi dan masalah lingkungan yang bersinggungan dengan aspek sosial. Hasil dari pemetaan sosial menjadi dasar bagi Perusahaan untuk merencanakan mitigasi berupa program-program lingkungan. Secara internal, PLN membuat program lingkungan untuk mengendalikan dampak operasi terhadap lingkungan. Sedangkan secara eksternal PLN membuat program tanggung jawab sosial yang diinisiasi oleh Divisi Corporate Communication and CSR.

Informasi Pendekatan yang Dilakukan dalam Mengenali dan Merumuskan Tanggung Jawab Sosial dan Pemangku Kepentingan Penting Perusahaan

Kegiatan CSR PLN di bidang lingkungan terutama dilaksanakan oleh unit-unit PLN di daerah yang lebih mengetahui mengenai kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan di daerahnya. Dengan area operasi yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, PLN memiliki interaksi yang luas dengan pemangku kepentingan penting Perusahaan yaitu pemerintah daerah, masyarakat, pemasok dan mitra kerja. Interaksi

FORMULATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY TOWARDS ENVIRONMENT

Information on Due Diligence Conducted by the Company on Social Responsibility towards Environment

Due diligence on the Company's responsibility towards environment, among others, is carried out by monitoring and managing the environment as reported in Environmental Management Plan and Environmental Monitoring Plan (RKL-RPL) or Environmental Management Efforts and Environmental Monitoring Efforts (UKL-UPL) according to stipulation in Environmental Permit obtained by each PLN unit. The monitoring process is carried out periodically every 6 months to ensure the quality of the environment including water, air, land and social aspects of the community.

In addition, the units whose activities produce environmental impacts that affect the local communities, annually conduct social mapping to determine the environmental conditions and issues that intersect with the social aspects. The social mapping result serves as the basis for the Company to prepare mitigation plan in the form of environmental programs. Internally, PLN designed environmental programs to control the impact of operations on the environment. Meanwhile, externally, PLN prepared social responsibility programs which were initiated by Corporate Communication and CSR Division.

Information on Approach Used in Recognizing and Formulating Corporate Social Responsibility and Key Stakeholders

PLN's CSR activities towards environment were mainly carried out by PLN units in the regions that were more aware of the local social, economic and environmental conditions in their respective areas. Given operational area that covers all over Indonesia, PLN has extensive interaction with the Company's key stakeholders, including local governments, communities, suppliers and business partners. This interaction is very helpful

tersebut sangat membantu PLN dalam mengenali dan merumuskan program-program tanggung jawab sosial yang tepat guna, tepat sasaran dan menghasilkan dampak berkelanjutan.

Pemerintah Daerah umumnya melibatkan unit-unit PLN di dalam forum pembahasan Musrenbang untuk merencanakan kegiatan sosial dan lingkungan yang diselaraskan dengan rencana pembangunan daerah. Di forum tersebut juga dilakukan uji tuntas yang meliputi identifikasi dampak sosial, lingkungan dan ekonomi yang aktual dan komprehensif.

Informasi Dampak Penting Langsung atau Tidak Langsung Aktivitas dan Keputusan Perusahaan terhadap Lingkungan Hidup

Kegiatan CSR PLN di bidang lingkungan sangat berkaitan dengan dampak aktivitas operasi PLN. Kegiatan ketenagalistrikan baik dari operasi pembangkit, transmisi, maupun distribusi mempunyai potensi menghasilkan emisi dan atau limbah yang dapat berpengaruh pada lingkungan, antara lain:

- Emisi gas rumah kaca (GRK) dari hasil pembakaran pembangkit thermal,
- Limbah B3 padat seperti *Fly Ash & Bottom Ash* (FABA), aki bekas, majun, bahan terkontaminasi B3, dan sebagainya.
- Limbah non B3 baik organik maupun non organik.

Informasi bahwa Perusahaan Telah Melakukan *Review* terhadap Seluruh Regulasi Terkait Lingkungan Hidup

PLN mengkaji setiap regulasi baru di bidang lingkungan. Kajian atas regulasi bidang lingkungan dilakukan oleh Divisi HSSE yang mengidentifikasi, menginformasikan dan mensosialisasikan adanya perubahan atau ketentuan baru sehingga divisi/bidang/unit terkait dapat melakukan perencanaan dan penyesuaian yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan regulasi tersebut. Tantangan bagi PLN adalah perkembangan peraturan bidang lingkungan yang semakin ketat. Peraturan di bidang lingkungan sangat dinamis karena mengikuti tren dan juga isu global dimana Indonesia berperan secara aktif dengan meratifikasi berbagai konvensi internasional tentang lingkungan.

for PLN in recognizing and formulating effective social responsibility programs that are right on target and produce sustainable impacts.

Local governments generally involve PLN units in Musrenbang discussion forums to plan social and environmental activities that are aligned with regional development plans. In the forum, due diligence is also carried out covering identification of actual and comprehensive social, environmental and economic impacts.

Information on Significant Direct or Indirect Impacts of the Company's Activities and Decisions on the Environment

PLN's CSR towards environmental ie closely related to the impact of PLN's operations. Electricity activities, including operations of power plant, transmission and distribution have the potential to produce emissions and or wastes that can affect the environment, including:

- Greenhouse gas (GRK) emissions from combustion of fossil fuel power plants,
- Solid B3 wastes, such as Fly Ash & Bottom Ash (FABA), used batteries, dustbills, B3 contaminated materials and others.
- Non-hazardous waste both organic and non-organic.

Information on the Company's Review of All Environmental Regulations

PLN reviews each new environmental regulation. The review of environmental regulations is carried out by HSSE Division that identifies, informs and to socialize changes or new provisions so that the relevant divisions/fields/units can make the necessary planning and adjustments to meet the regulations. The challenge for PLN is the development of increasingly stringent environmental regulations. Regulation in the environmental field is very dynamic because it follows the trends and also global issues where Indonesia plays an active role by ratifying various international conventions on the environment.

Pada tahun 2019, terdapat regulasi baru yang dikeluarkan pemerintah terkait lingkungan, antara lain Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal (Permen LHK P.15/2019). PLN melakukan review atas Permen LHK tersebut karena berpengaruh signifikan pada bisnis PLN dari sector pembangkitan baik yang sudah beroperasi maupun yang sedang dalam tahap perencanaan pembangunan dimana dalam dokumen teknis masih mengacu pada regulasi sebelumnya. Secara internal, pembahasan dilakukan oleh semua bidang terkait guna Menyusun rencana tindak pemenuhan regulasi baik jangka pendek maupun jangka Panjang dibawah monitoring dewan Direksi. Secara eksternal, PLN berkomunikasi dengan Kementerian LHK, Direktorat Jendral Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan pemangku kepentingan lain mengenai kondisi yang dihadapi PLN dalam memenuhi regulasi baru tersebut dengan memaparkan hasil kajian pendukung.

Informasi dan Uraian Singkat tentang Isu-Isu Penting Tanggung Jawab Sosial Bidang Lingkungan Hidup dan Relevan dengan Bisnis Perusahaan

Isu-isu penting di bidang lingkungan yang relevan dengan bisnis Perusahaan umumnya berkaitan dengan operasi pembangkit termal berbahan bakar batu bara. Saat ini, ada 4 isu strategis yang mengemuka terkait aspek lingkungan, yaitu:

- Kendala pemenuhan regulasi baru baku mutu emisi pembangkit termal. PLN sedang melakukan kajian komprehensif untuk menentukan komitmen kesiapan PLN memenuhi regulasi baru terutama untuk pembangkit-pembangkit lama baik dari aspek operasional, keandalan sistem, biaya yang harus dikeluarkan, kemampuan finansial dan kelayakan investasi alat pengendali, perbaikan teknologi, dan program-program mitigasi lingkungan.

  Pengelolaan limbah B3 Fly Ash & Bottom Ash (FABA) di PLTU. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, FABA termasuk limbah B3 sumber spesifik khusus.

In 2019, there are new regulations issued by the government related to the environment, including Minister of Environment and Forestry Regulation (Permen LHK) No. P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 concerning Emission Quality Standards for Thermal Power Plants (LHK Regulation P.15/2019). PLN conducts a review of the LHK Ministerial Regulation because it has a significant effect on PLN's business in the generation sector, both those that are already operating and those in the development planning stage, where the technical documents still refer to previous regulations. Internally, discussions were carried out by all related fields in order to prepare action plans for compliance with regulations both short and long term under the monitoring of the Board of Directors. Externally, PLN communicates with the Ministry of Environment and Forestry, the Directorate General of Electricity of the Ministry of Energy and Mineral Resources and other stakeholders regarding the conditions faced by PLN in meeting the new regulations by presenting the results of supporting studies.

Information and Brief Description on Issues of Social Responsibility towards Environment that are Crucial and Relevant to Company's Business

Crucial environmental issues relevant to the Company's business generally relate to the operations of coal-fired thermal plants. Currently, there are 4 strategic issues raised related to environmental aspects, as follows:

- Obstacles to fulfilling new regulations on thermal emission quality standard. PLN is conducting comprehensive study to determine PLN's readiness commitment to meet new regulations, especially for old power plants in terms of operational aspects, system reliability, incurred costs, financial capability and investment feasibility of controlling equipment, technological enhancement and environmental mitigation programs.

  B3 Fly Ash & Bottom Ash (FABA) waste management at PLTU. In accordance with Government Regulation (PP) No. 101 of 2014 concerning Management of Hazardous and Toxic Waste, FABA is included in B3 waste

Pengelolaan FABA menjadi tantangan karena menjadi isu penting bagi lingkungan sekitar, di sisi lain pengelolaannya harus melibatkan pihak ketiga yang memiliki izin dari Kementerian LHK untuk pengangkutan dan pemanfaatannya.

with specific sources. FABA management is a challenge because it is crucial issue for the surrounding environment. On the other hand, its management must involve a third party who obtained a permit from the Ministry of Environment and Forestry for its transportation and utilization.

- Saat ini Kementerian LHK sedang membangun forum diskusi antar pemangku kepentingan, termasuk PLN, untuk membahas rencana program nasional penghapusan *Polychlorinated Biphenyls* (PCB) dan pelaksanaan penanganan limbah dan pengelolaan peralatan yang terkontaminasi PCB secara ramah lingkungan. Jika regulasi tentang PCB diundangkan, maka akan berdampak signifikan bagi operasi PLN sebagai pengguna trafo yang cukup banyak di dalam kegiatan operasi khususnya di transmisi, distribusi dan sektor pembangkitan. Perlu waktu untuk mengganti miyak trafo dengan minyak yang *free*-PCB.

- Currently, the Ministry of Environment and Forestry is creating a forum for discussion among stakeholders, including PLN, to discuss the national program plan for elimination of Polychlorinated Biphenyls (PCBs) and environmentally handling of waste and management of equipment that is contaminated by PCB. If PCB regulation is enacted, it will have a significant impact on PLN's operations because a large number of trafo users in operations, especially in the transmission, distribution and power plant. It takes time to replace trafo oil with free-PCB oil.

- PLN mendukung penuh target pemerintah untuk meningkatkan pembangkit listrik energi baru dan terbarukan (EBT). PLN berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas produksi listrik yang berasal dari pembangkit-pembangkit EBT dan mulai mengurangi kontribusi dari pembangkit-pembangkit termal. Tetapi Indonesia masih membutuhkan energi listrik berbiaya murah (dari pembangkit batubara) karena perhitungan BPP masih mengacu pada proses internal di pembangkit. Selain itu, pengembangan EBT terkendala oleh Isu Konservasi dikarenakan sebagian besar potensi EBT berada di Lokasi dengan kualitas lingkungan hidup (Biodiversity) yang masih baik.

- PLN fully supports the government's target to increase new and renewable energy (EBT) power plants. PLN is committed to continue to increase the capacity of electricity production from EBT plants and start reducing the contribution of thermal plants. But Indonesia still needs low-cost electricity (from coal plants) because BPP calculations still refer to internal processes at the plant. In addition, the development of EBT is constrained by Conservation Issues because most of the potential of EBT is in a location with good environmental quality (Biodiversity).

Informasi Risiko terkait Lingkungan Hidup, Baik Risiko bagi Perusahaan Maupun Pemangku Kepentingan

Setiap kebijakan terkait lingkungan hidup baik eksternal maupun internal selalu melibatkan Divisi HSSE, selanjutnya Divisi HSSE akan memetakan dampak kegiatan terhadap aspek lingkungan hidup dan berkordinasi dengan Divisi Risk Management dalam pemetaan risiko yang selanjutnya membuat check-list risiko yang akan

Information on Environmental Risks, both for the Company and Stakeholders

Every policy related to the environment, both external and internal, always involves the HSSE Division, then the HSSE Division will map the impact of activities on environmental aspects and coordinate with the Risk Management Division in risk mapping, which then makes a risk check-list that will be followed up by the related

ditindaklanjuti oleh Bidang/unit terkait. Check-list risiko mencakup risiko bagi PLN maupun bagi pemangku kepentingan penerima manfaat kegiatan.

Fields/Units. The risk check-list includes risks for PLN as well as for the beneficiary stakeholders of the activity.

Informasi Ekspektasi Pemangku Kepentingan tentang Peranan Perusahaan dalam Penanganan Isu-Isu Lingkungan Hidup yang Relevan

Kelompok pemangku kepentingan PLN antara lain meliputi masyarakat setempat, pemerintah pusat dan daerah, Kementerian (BUMN, ESDM, LHK) dan Legislatif. Ekspektasi pemangku kepentingan disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi berdasarkan karakteristik masing-masing kelompok pemangku kepentingan dan metode pelibatannya. Pemenuhan ekspektasi pemerintah dapat dilakukan dengan mematuhi regulasi lingkungan, masukan dan persetujuan Kementerian BUMN dalam pembahasan RKAP, RJP, Kontrak Manajemen, dan sebagainya. Harapan dari masyarakat sekitar unit-unit PLN umumnya disampaikan melalui proporsal yang akan ditindaklanjuti secara langsung atau berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk sinkronisasi dengan program pembangunan melalui forum Musrenbang.

Information on Stakeholder Expectations from the Company's Role in Handling Relevant Environmental Issues

PLN's stakeholder groups include the local communities, central and regional governments, Ministries (SOE, ESDM, LHK) and Legislative. Stakeholder expectations are conveyed through various communication channels based on the characteristics of each stakeholder group and the method of engagement. Fulfillment of government expectations can be done by complying with environmental regulations, input and approval of the Ministry of SOE in discussions of RKAP, RJP, Management Contract and so on. Expectations of the community around PLN units are generally conveyed through proposals that will be followed up directly or in coordination with the local government to synchronize with the development program through Musrenbang forum.

Setiap rencana proyek infrastruktur PLN akan melibatkan masyarakat melalui forum konsultasi publik. Di dalam forum tersebut masyarakat akan mendapat penjelasan lengkap mengenai rencana kegiatan dan dapat mengemukakan pendapat dan harapannya. Proses pelibatan masyarakat merupakan salah satu prasyarat mendapatkan dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan yang mengacu pada Permen LHK Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan.

Every PLN infrastructure project plan will involve the community through public consultation forum. In the forum, the community will get a full explanation of the planned activities and can express their opinions and expectations. The process of community involvement is one of the prerequisites for obtaining AMDAL and Environmental Permit that refer to Permen LHK No. 17 of 2012 concerning Guidelines for Community Involvement in AMDAL Process and Environmental Permit.

PERENCANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dalam upaya menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan yang berwawasan lingkungan, PLN melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung dan memenuhi ketentuan atau peraturan lingkungan yang berlaku. Program kegiatan ini berfokus pada pemenuhan peraturan serta peningkatan kualitas dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan sehingga dapat

PLANNING OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TOWARDS ENVIRONMENT

In an effort to run an environmentally sound power business, PLN carries out activities that can support and fulfill the applicable environmental regulations. These activities focus on meeting regulations and improving quality in environmental planning and management so as to foster a positive image of the Company in the perception of all stakeholders. In addition,

menumbuhkan citra positif Perusahaan di persepsi seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, juga untuk mendukung upaya Pemerintah mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Target/Rencana Kegiatan Tahun 2019 yang Ditetapkan Manajemen

Pada tahun 2019, target Perusahaan di bidang lingkungan mencakup tapi tidak terbatas pada kegiatan sebagai berikut:

1. **Target PROPER**
   Pada tahun 2019 PLN menargetkan mendapat 77 PROPER Biru, 5 PROPER Emas dan 18 PROPER Hijau. Target 5 PROPER Emas tercapai yang diperoleh PLTU Tanjung Jati B, PLTU Paiton Unit 1-2, PLTGU Gresik, PLTDG Pesanggaran, PLTP Kamojang Darajat. Target 18 PROPER Hijau tidak tercapai dan 1 unit yang mendapat PROPER Merah (dari target nol). Tidak ada unit PLN yang mendapatkan PROPER Hitam.

2. **Pengawasan Kesesuaian Kelengkapan Dokumen Lingkungan, Izin Lingkungan, dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**
   Pada tahun 2019 Divisi HSSE melakukan kegiatan *monitoring* dan verifikasi kesesuaian dan kelengkapan Dokumen Lingkungan, Izin Lingkungan, dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di seluruh kegiatan ketenagalistrikan dan kegiatan penunjang di unit-unit PLN setiap triwulan.

   Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, setiap kegiatan ketenagalistrikan (pembangkit, transmisi, dan distribusi) dan kegiatan penunjang (gedung kantor, gudang) wajib memiliki Dokumen Lingkungan dan Izin PPLH untuk kegiatan yang mengeluarkan limbah ke lingkungan. Program ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan ketenagalistrikan telah memenuhi ketentuan, memonitor *progress* penyelesaian, dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Divisi HSSE akan mengevaluasi, melakukan pembinaan kepada unit, serta pendampingan ke pemangku kepentingan sehingga kendala dan permasalahan yang terjadi dapat

it is also to support the Government's efforts to achieve sustainable development goals.

2019 Activity Target/Plan Set by the Management

In 2019, the Company's environmental targets included but not limited to the following activities:

1. **PROPER Target**
   In 2019 PLN is targeting to get 77 Blue PROPERS, 5 Gold PROPERS and 18 Green PROPERS. The target of 5 Golden PROPER is achieved which is obtained by PLTU Tanjung Jati B, PLTU Paiton Unit 1-2, PLTGU Gresik, PLTDG Pesanggaran, PLTP Kamojang Darajat. Target 18 of Green PROPER is not achieved and 1 unit that gets Red PROPER (from zero target). There is no PLN unit that gets Black PROPER.

2. **Monitoring of Fulfilment of Environmental Documents, Environmental Permits and Environmental Protection and Management (PPLH) Permits**
   In 2019, HSSE Division conducted monitoring and verification of fulfilment and completeness of Environmental Documents, Environmental Permits, and Environmental Protection and Management (PPLH) Permits in all electricity and supporting activities in PLN units on a quarterly basis.

   In accordance with the provisions of the environmental laws and regulations, each electricity activity (power plant, transmission and distribution) and supporting activity (office building, warehouse) are required to obtain Environmental Document and PPLH Permit for activities that release waste to the environment. This program is carried out to ensure that all electricity activities have fulfilled the requirements, to monitor completion progress and to identify obstacles encountered. HSSE Division evaluates, provides guidance to the units and mentoring to stakeholders, in order to overcoming the obstacles and problems

teratasi serta memenuhi ketentuan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara periodik setiap triwulan ini dilaksanakan melalui *video conference* dengan seluruh Pejabat Pengendali K3L, Pejabat Operasional Lingkungan, serta staf terkait di seluruh unit PLN.

3. *Capacity Building*

Untuk memenuhi dan meningkatkan kapasitas serta kompetensi pegawai di bidang lingkungan, Divisi HSSE menyelenggarakan program *capacity building* dengan bekerja sama baik dengan internal PLN seperti Pusdiklat maupun pihak eksternal seperti Kementerian ESDM, dan lembaga internasional seperti Asian Development Bank (ADB), World Bank, dan KfW (Bank Pembangunan Jerman). Selain pendidikan dan pelatihan yang disediakan melalui Divisi HSSE, unit PLN secara mandiri juga mengikuti program pelatihan reguler yang diselenggarakan oleh Pusdiklat PLN.

Selama tahun 2019, Divisi HSSE telah menyelenggarakan beberapa kegiatan *capacity building*, antara lain:

a. *Workshop Modul Environment* pada aplikasi *Project Management Office* (PMO). *Workshop* ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman administrator PMO Unit terkait modul *environment process* pada Aplikasi PMO dan menyelesaikan *pending project* atau kendala-kendala unit pada *Workflow Environment Process*.
b. Diklat Audit Internal Sistem Manajemen Tingkat Dasar. Diklat ini bertujuan untuk mempersiapkan/*set-up* dokumen SMT dan memenuhi sertifikasi SMT Divisi HSSE dan unit terpilih.
c. Peningkatan pemahaman pemulihan kontaminasi dan tanggap darurat limbah B3 kepada seluruh unit pembangkit.
d. *Workshop* Evaluasi PROPER Hijau dan Emas. *Workshop* ini dilakukan untuk mempersiapkan unit peserta PROPER calon kandidat Hijau dan Emas. Narasumber dari Kementerian LHK melakukan *review*, evaluasi, dan memberikan rekomendasi

and to meet the applicable regulations. The quarterly monitoring is carried out through video conference with all OHS Controlling Officers, Environmental Operational Officers and related staff in all PLN units.

3. Capacity Building

To meet and improve employee capacity and competence in environmental field, HSSE Division organizes capacity building programs by collaborating with both internal PLN such as Education and Training Center and external parties such as the Ministry of ESDM, and international institutions including Asian Development Bank (ADB), World Bank and KfW (German Development Bank). In addition to education and training provided by HSSE Division, PLN units also independently attend regular training programs organized by PLN Training Center.

During 2019, HSSE Division conducted a number of capacity building activities, including:

a. Environment Module Workshop on Project Management Office (PMO) application. This workshop aimed to improve understanding of PMO Unit administrators related to environment process module in PMO Application and to complete pending project or unit's constraints on Workflow Environment Process.
b. Basic Management System Internal Audit. This training aimed to prepare/set-up SMT documents and to meet SMT certification of HSSE Division and selected units.
c. Improved understanding of contamination recovery and emergency response to B3 waste to all power plant units.
d. Green and Gold PROPER Evaluation Workshop. This workshop was conducted to prepare PROPER participant units for Green and Gold candidates. Keynote speakers from the Ministry of Environment and Forests conducted review and

konten dokumen Hijau maupun DRKPL yang sudah disusun oleh masing-masing unit.

e. *Workshop Life Cycle Assessment. Workshop* berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian, Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan Kementerian HLK No. P.14/PPKL/SET/DIK.0/9/2018 tentang Materi Pelatihan Penilaian Daur Hidup Untuk PROPER sebagai syarat tambahan dalam kriteria PROPER Hijau.
f. *Workshop* peningkatan pemahaman mekanisme pengawasan dan sanksi administrasi serta tindak pidana dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
g. *Capacity* PLN *Safeguards System*. Pelatihan yang diselenggarakan atas kerja sama Divisi HSSE, PLN Pusdiklat dan Asian Development Bank (ADB). Pelatihan ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada unit PLN mengenai Standar Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup ADB yang kemudian akan diinternalisasi oleh PLN. Pelatihan ini merupakan bagian dari penyiapan penerapan PLN Safeguards System untuk proyek-proyek yang didanai oleh ADB.
h. *Capacity Building Environmental and Social Safeguards Program Request Based Lending* (RBL) Pendanaan ADB dan World Bank. Capacity building dilaksanakan untuk membahas detail petunjuk teknis penyusunan laporan (data dan dokumen pendukung) RBL, perbaikan laporan, dan penyampaian laporan serta *evidence* yang dibutuhkan.
i. Bimbingan Teknis APPLE Gatrik. Pelatihan ini berlangsung atas kerja sama dengan Direktorat Jendral Ketengalistrikan ESDM dengan Divisi HSSE untuk mendukung unit pembangkit dalam pengisian/input data dalam aplikasi APPLE Gatrik yang akan digunakan dalam perhitungan emisi gas rumah kaca (GRK).

4. Pengendalian Pemenuhan Perizinan Lingkungan melalui Aplikasi *Project Management Office* (PMO).

Dalam kurun waktu satu tahun, PLN dapat menjalankan ribuan proyek infrastruktur

evaluation and provided recommendation on the content of Green and DRKPL documents prepared by each unit.

e. Life Cycle Assessment Workshop. Workshop with reference to Regulation of Director General of Environmental Control, Pollution and Damage of the Ministry of LKH No. P.14/PPKL/SET/DIK.0/9/2018 concerning Life Cycle Assessment Training Material for PROPER as additional requirement in Green PROPER criteria.
f. Workshop to improve understanding of supervision mechanism, administrative sanctions and criminal acts in environmental protection and management.
g. PLN Safeguards System Capacity. The training was held in collaboration with HSSE Division, PLN Pusdiklat and Asian Development Bank (ADB). This training aimed to introduce ADB Environmental Management and Protection Standards to PLN units which would then be internalized by PLN. This training was part of preparation of the implementation of PLN Safeguards System for projects funded by ADB.
h. Environmental and Social Safeguards Program Request Based Lending (RBL) Capacity Building for Funding from ADB and World Bank. Capacity building was carried out to discuss detailed technical guidelines for preparation of reports (data and supporting documents) for RBL, report revision, report submission and required evidence.
i. APPLE Gatrik Technical Guidance. This training was held in collaboration with Directorate General of Electricity of ESDM with HSSE Division to support power plant units in entering/inputting data in APPLE Gatrik application that will be used in measurement of GRK emission.

4. Control of fulfillment of environmental permits through Project Management Office (PMO) application.

Within one year, PLN could run thousands of power infrastructure projects that have long

ketenagalistrikan yang memiliki tahapan proses yang panjang serta melibatkan banyak divisi. Untuk memantau dan mengkoordinasikan proyek-proyek tersebut PLN menjalankan aplikasi PMO untuk menjembatani dan melakukan sinkronisasi proyek-proyek agar tujuan proyek maupun program keseluruhan dapat tercapai.

process stages and involve many divisions. To monitor and coordinate these projects, PLN ran PMO application to bridge and synchronize projects so that overall project and program objectives could be achieved.

Setiap usaha ketenagalistrikan yang akan dibangun harus dilengkapi dengan Dokumen Lingkungan, Izin Lingkungan, dan Izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Pada aplikasi PMO ini proses lingkungan (*environment process*) menjadi salah satu fitur yang wajib dilewati sehingga setiap unit PLN yang ingin membangun kegiatan ketenagalistrikan dapat terkendali dan terpantau dalam pemenuhan Dokumen Lingkungan dan Perizinan Lingkungan.

Every electricity business that will be built must be equipped with Environmental Document, Environmental Permit and Environmental Control and Management Permit (PPLH). In this PMO application, environment process is one of the features that must be passed so that each PLN unit that wants to run electricity business can be controlled and monitored in compliance with Environmental Document and Environmental Permit.

Dalam aplikasi PMO, Divisi HSSE berperan untuk mengetahui proyek apa saja yang sedang berjalan, dan memberikan *approval* jika proyek tersebut telah memiliki Dokumen Lingkungan dan Izin Lingkungan. Pada tahun 2019, Divisi HSSE telah menjalankan *environment process* untuk 873 proyek dan beberapa isu strategis yang sedang dihadapi unit.

In PMO application, HSSE Division's role is to find out what projects are running and to provide approval if the project already obtained Environmental Document and Environmental Permit. In 2019, HSSE Division ran environmental process for 873 projects and several strategic issues encountered by the units.

5. Penerapan PLN Safeguards System

Komitmen PLN untuk meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup diwujudkan dengan mengadopsi sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berstandar internasional. PLN telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama antara PLN, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan ADB tentang Penggunaan PLN Safeguards System. Sebagai tindak lanjut dari MoU tersebut, PLN menerbitkan Peraturan Direksi terkait Penerapan PLN Safeguards System (PLN SS).

5. Application of PLN Safeguards System

PLN's commitment to improving the quality of environmental management was realized by adopting international standard system of environmental protection and management. PLN signed a memorandum of understanding (MoU) for cooperation among PLN, the Ministry of National Development Planning (Bappenas) and ADB on the Use of PLN Safeguards System. As a follow-up on the MoU, PLN issued Regulation of Board of Directors concerning Application of PLN Safeguards System (PLN SS).

Dengan adanya Peraturan Direksi tersebut, PLN berharap dapat mengefektifkan proses penyiapan pendanaan luar negeri sehingga meningkatkan investasi di bidang ketenagalistrikan khususnya untuk mendorong pengembangan energi baru terbarukan.

With this Regulation of Board of Directors, PLN expects to streamline the process of foreign funding preparation so as to increase investment in electricity especially to encourage development of new and renewable energy.

6. **Pemantauan Emisi GRK**

Dalam upaya memantau emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di setiap unit pembangkit, PLN melakukan pengisian data emisi GRK secara daring melalui aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM (APPLE-Gatrik). Setiap unit pembangkit menginput konsumsi bahan bakar per tahun beserta dengan karakteristiknya pada aplikasi tersebut. Selanjutnya, aplikasi akan menghitung emisi GRK secara otomatis dengan metodologi IPCC (International Panel on Climate Change).

Hasil pemantauan menjadi acuan dalam menentukan kebijakan dalam mengurangi emisi GRK di level pembangkit. Berdasarkan data konsumsi bahan bakar pembangkit, perhitungan emisi GRK tahun 2019 sebesar 157.693.198 ton CO_2e.

7. **Program Sertifikasi Sistem Manajemen Terintegrasi**

Pada tahun 2019, PLN melaksanakan program percontohan Sertifikasi Sistem Manajemen Terintegrasi (SMT) yang mencakup Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) di beberapa unit pembangkit terpilih (dengan jenis pembangkit yang berbeda-beda) sebagai upaya perbaikan dan merancang tata kelola manajemen mutu dan pengelolaan lingkungan terintegrasi. Enam unit yang memperoleh SMT adalah PLTGU Belawan, PLTA Batang Agam, PLTD Lombok, PLTU Asam-Asam, PLTD/G Tello, dan PLTP Lahendong.

Informasi Deskripsi yang Mencerminkan Upaya Menurunkan Dampak Lingkungan Hidup pada Program-Program CSR Penting Perusahaan

Setiap infrastruktur ketenagalistrikan yang akan dibangun harus dilengkapi dengan Dokumen Lingkungan, Izin Lingkungan, dan Izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Pengawasan dan pengendalian kelengkapan dokumen-dokumen tersebut di seluruh proyek/unit PLN dilakukan oleh Divisi HSSE melalui aplikasi Project Management Office (PMO). Secara berkala, Divisi HSSE melakukan kegiatan monitoring dan verifikasi kesesuaian dan kelengkapan dokumen lingkungan setiap triwulan.

6. **GHG Emissions Monitoring**

In an effort to monitor Greenhouse Gas (GHG) emission in each generating unit, PLN filled in GHG emission data online through an application developed by Directorate General of Electricity of the Ministry of ESDM (APPLE-Gatrik). Each power plant unit input fuel consumption per year including the characteristics in the application. The application would then automatically measure GHG emissions using International Panel on Climate Change (IPCC) methodology.

The monitoring results became a reference in determining policies to reduce GHG emissions at power plant level. Based on power plant fuel consumption data, measurement of GHG emissions in 2019 was 157,693,198 tons of CO_2e.

7. **Integrated Management System Certification Program**

In 2019, PLN implemented a pilot program on Integrated Management System (IMS) which included Quality Management System (QMS) and Environmental Management System (EMS) in several selected power plant units (with different types of plants) as an effort to improve and design the quality management governance and integrated environmental management. The six units that obtained IMT were PLTGU Belawan, PLTA Batang Agam, PLTD Lombok, PLTU Asam-Asam, PLTD/G Tello and PLTP Lahendong.

Information on Description Reflecting Efforts to Reduce Environmental Impacts in the Company's Flagship CSR Programs

Every power infrastructure that will be built must be equipped with Environmental Document, Environmental Permit and Environmental Control and Management (PPLH) Permit. Supervision and control of completeness of these documents in all PLN projects/units are carried out by HSSE Division through Project Management Office (PMO) application. Periodically, HSSE Division carries out quarterly monitoring and verification of fulfilment and completeness of environmental documents.

PLN melakukan upaya-upaya yang terukur untuk mengendalikan pencemaran tanah, air dan udara oleh zat-zat polutan termasuk pengurangan emisi gas rumah kaca dalam semua kegiatan penyediaan listrik baik pada instalasi pembangkit, transmisi/gardu induk dan distribusi, serta aktivitas operasional anak perusahaan. Untuk mendukung upaya tersebut, PLN telah menetapkan aspek lingkungan sebagai salah satu unsur penilaian dalam kinerja unit bisnis PLN di seluruh Indonesia. Melalui penilaian kinerja ini, Perusahaan dapat terus-menerus mengevaluasi pemenuhan komitmennya di bidang lingkungan.

PLN makes measured efforts to control the pollution of soil, water and air by pollutants, including reduction of greenhouse gas emissions in all power supply activities at power plant installation, transmission/substation and distribution, as well as operations of the subsidiaries. To support these efforts, PLN determined environmental aspects as part of performance assessment elements of PLN business units all over Indonesia. Through this performance assessment, the Company can continuously evaluate fulfillment of its commitment to the environment.

Pada Program Utama yang Dilakukan Terdapat Informasi Berisikan Deskripsi Upaya Menciptakan Manfaat Bersama Inisiatif Bidang Lingkungan Hidup bagi Pemangku Kepentingan dan Perusahaan

Berikut ini adalah program-program lingkungan yang dilaksanakan unit-unit PLN yang menghasilkan manfaat bersama bagi pemangku kepentingan dan Perusahaan:

The Main Programs Contains Description of Efforts to Create Joint Benefits of Environmental Initiatives for Stakeholders and the Company

The following are environmental programs carried out by PLN units that generated mutual benefits for stakeholders and the Company:

No.	Unit	Program	Program
1	PLTGU Indralaya CCPP Indralaya	• Budi daya indukan ikan belida • Konservasi pohon trembesi dan penghijauan pohon mahoni • Pelatihan daur ulang sampah organik dan anorganik kelompok LSM Desa Payakabung • Pelatihan daur ulang kertas dan sampah Komunitas Jasa Sampah Online (JSO)	• Cultivation of belida fish broodstock • Conservation of trembesi trees and greening of mahogany trees • Training on organic and inorganic waste recycling by Payakabung Village NGO group • Paper and waste recycling training by Komunitas Jasa Sampah Online (JSO)
2	PLTU Indramayu CFPP Indramayu	• Pemanfaatan FABA menjadi *paving block* • Konservasi *mangrove* Catatan: Seluruh limbah B3 FABA pada tahun 2019 di PLTU Indramayu sebanyak 11,63 ton telah dimanfaatkan menjadi *Paving Block*	• The use of FABA for making paving block • Mangrove conservation Note: All FABA waste in 2019 in PLTU Indramayu amounted to 11.63 tons has been utilized as Paving Block
3	PLTU Paiton 9	• Konservasi *mangrove* di area *outfall* PLTU Paiton 9 • *Monitoring* terumbu karang alami di Utara Mercusuar • *Monitoring* keragaman flora fauna di perairan PLTU • Pendidikan kepedulian lingkungan siswa SD dan TK Sinar Jaya Desa Binor • Transplantasi terumbu karang dan kubus berongga • Normalisasi sumber mata air kokap dan renovasi dam penahan air sumber mata air manting untuk irigasi sawah seluas ± 38 hektar	• Mangrove conservation in outfall area of Paiton 9 CFPP • Monitoring natural coral reefs in Northern side of the Lighthouse • Monitoring the diversity of flora and fauna in the CFPP waters • Environment care education for Sinar Jaya Elementary and Kindergarten students in Binor Village • Transplanting coral reefs and hollow cubes • Normalization of kokap spring and renovation of water catchment dam of manting spring for rice field irrigation covering an area of ± 38 hectares
4	PLTU Labuan	• Pemanfaatan FABA menjadi patako, *paving block*, dan *readymix*	• Utilization of FABA to make patako, paving blocks, and ready mix

No.	Unit	Program	Program
5	PLTGU Pemaron	• Program konservasi penyu hijau (*chelomia mydas*) dan penyu lekang (*lepidochelys olivacea*) dengan penangkaran tukik di Pantai Penimbangan Bakti Seraga Buleleng • Program pengembangan *hexadome IP nemesis* II sebagai media konservasi biota laut di Pantai Penimbangan Bakti Seraga Buleleng • Program konservasi pohon endemik cemara geseng (*casuaria ungguniawa Miq*) di Bukit Cemara Geseng Desa Silangjana Buleleng • Program pompa air tenaga surya untuk mengatasi krisis air di Desa Bukti • Program pengelolaan sampah terpadu (TPST) Desa Pemaron	• Green turtle (chelomia mydas) and lepidoch (lepidochelys olivacea) conservation program by caring turtle hatchling in Penimbangan Beach, Baktiseraga, Buleleng • Hexadome IP nemesis II development program as a media for the conservation of marine life in Penimbangan Beach, Baktiseraga, Buleleng • Conservation of endemic casuarina tree (Casuarina junghuhniana Miq.) in Bukit Cemara Geseng, Silangjana Village, Buleleng • Solar water pump program to resolve water crisis in Bukti Village • Integrated Waste Management (TPST) Program in Pemareon Village
6	PLTU Lontar	• Program konservasi *mangrove* area pantai PLTU Banten 3 Lontar • Perluasan populasi *mangrove* dengan penyebaran propagul (buah *mangrove* yang sudah berkecambah) dari area konservasi	• Mangrove conservation program in the coastal area of Banten 3 CFPP Lontar • Extention of mangrove population by spreading propagules (germinated mangroves) from the conservation area
7	PLTU Suralaya (Unit 1-7)	• Pengembangan Ecopark Suralaya • Enrichment Planting di Area PLTU Suralaya • Bank Bibit Penghijauan PLTU Suralaya • Transplantasi Terumbu Karang • Budidaya 7 Spesies Tanaman Langka di Taman Kehati PLTU Suralaya	• Development of Ecopark Suralaya • Enrichment Planting in Suralaya Power Plant Area • Suralaya Power Plant Seedling Bank • Coral Reef Transplantation • Cultivation of 7 Endangered Plant Species at the Suralaya Power Plant Park
8	PLTU Banten 1 Suralaya	• Program Kebun Raya Mini • Program revitalisasi dan pembangunan Hutan Kota Cilegon • Koleksi tumbuhan langka Indonesia melalui Bank Bibit di PT Indonesia Power UJP Banten 1 Suralaya	• Mini Botanical Garden Program • Revitalization and development program of Cilegon City Forest • Collection of rare Indonesian plants through the Seed Bank at PT Indonesia Power UJP Banten 1 Suralaya
9	PLTGU Grati	• Pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati Provinsi Jawa Timur • Penghijauan kawasan terbuka hijau area PLTGU Grati - Hutan Sinergi • Penanaman pohon daerah aliran sungai (DAS) Rejoso di kawasan konservasi sumber mata air Desa Panditan • Penanaman cemara laut di kawasan konservasi Desa Wates (Dusun Nangger) • Desa Konservasi Energi (Biogas Desa Balunganyar)	• Development of Biodiversity Park in East Java Province • Greening of green open area at Grati CCPP - Sinergi Forest • Rejoso's watershed tree planting in spring water conservation area of Panditan Village • Planting of Casuarina equisetifolia in the conservation area of Wates Village (Nangger Sub-village) • Energy Conservation Village (Biogas Balunganyar Village)
10	PLTU Pelabuhan Ratu	• Program konservasi penyu hijau dan rehabilitasi lingkungan (KOPI HIDEUNG) • Program HERANG (Hejokeun PLTU Urang)	• Green turtle conservation and environmental rehabilitation program (KOPI HIDEUNG) • HERANG Program (Hejokeun PLTU Urang)
11	PLTP Gunung Salak	• Penanaman dan pemeliharaan 10.000 pohon enedemik • Konservasi pohon di area PLTP Gunung Salak (rasamala, hulu, saninten, puspa) • Pelepasliaran elang jawa • Konservasi 3 satwa kunci Gunung Salak Catatan: Capaian program keanekaragaman hayati yang telah dilakukan PLTP Gunung Salak selama tahun 2015-2019 antara lain 11 ekor elang jawa, 101 ekor owa jawa, dan 13 ekor macan tutul jawa yang merupakan satwa terancam punah IUCN Red List.	• Planting and maintaining 10,000 enedemic trees • Tree conservation in Gunung Salak GPP area (rasamala, hulu, saninten, puspa) • Releasing Javan hawk- eagle into the wild • Conservation of 3 key animals of Mount Salak Note: The achievement of biodiversity program carried out by Gunung Salak GPP during 2015-2019 included 11 Javanese eagles, 101 Javan gibbons and 13 Javan leopards which are endangered IUCN Red List animals.

Informasi Mengenai Mekanisme dan Prosedur Menghadapi Keadaan Darurat dan/atau Konflik terkait Lingkungan Hidup

Setiap unit PLN memiliki prosedur/instruksi kerja yang berkaitan dengan penanggulangan darurat. Kriteria keadaan darurat disesuaikan dengan unit kerja atau kegiatannya masing-masing. Keadaan darurat pada kegiatan transmisi akan berbeda dengan di kegiatan distribusi dan pembangkitan. Sistem manajemen lingkungan ISO 14001, SMK3 dan sistem manajemen pengamanan (SMP) juga mengatur mengenai prosedur penanganan keadaan darurat. SMP terutama diterapkan pada unit PLN yang termasuk kategori objek vital nasional (Obvitnas).

Keluhan masyarakat terkait masalah lingkungan (pencemaran, tumpahan, kebocoran dan sebagainya) umumnya dimediasi oleh perangkat desa/kelurahan setempat. Beberapa unit PLN menyediakan form keluhan di kantor kelurahan yang akan ditindaklanjuti oleh petugas bagian Kehumasan atau Sosial.

Information on Mechanism and Procedure for Dealing with Emergencies and/or Conflicts Regarding the Environment

Each PLN unit has procedure/work instruction related to emergency response. The criteria of emergency are tailored to each work unit or activity. Emergency in transmission activities will be different from in distribution and power plant activities. Environmental management system ISO 14001, SMK3 and security management system (SMP) also regulate emergency handling procedure. SMP is mainly applied to PLN units which are categorized as national vital objects (Obvitnas).

Community complaints related to environmental issues (pollution, spillage, leakage and others) are generally mediated by the local village officials. Several PLN units provide complaint forms at village office that will be followed up by Public Relations or Social Affairs officers.

Informasi tentang Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Berbagai Kegiatan Lingkungan Hidup yang dilakukan Perusahaan

Program-program lingkungan hidup yang dilakukan PLN selalu melibatkan pemangku kepentingan. Program-program pengembangan keanekaragaman hayati, program Bersih Ciliwung, konservasi ekosistem laut dan sebagainya, akan melibatkan masyarakat, komunitas penggiat lingkungan, Kementerian, serta Dinas Lingkungan Hidup dan dinas terkait lainnya.

Information on Stakeholder Engagement in Various Environmental Activities Carried Out by the Company

Environmental programs carried out by PLN always involve stakeholders. Biodiversity development, Clean Ciliwung, conservation of marine ecosystems and so forth involved the community, environmental activists, Ministries, Offices of the Environment and other relevant agencies.

Informasi Upaya Perusahaan dengan Memanfaatkan Pengaruh Perusahaan untuk Pencegahan, Penurunan, Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup (Mendorong Pemasok, Pelanggan, Nasabah dll)

Mendukung Penggunaan PLTS Atap

Upaya PLN memanfaatkan pengaruh untuk meningkatkan kualitas lingkungan adalah mendorong pelanggan untuk menggunakan energi bersih. Salah satu upayanya adalah mengakomodir pelanggan yang ingin menggunakan pembangkit listrik tenaga surya/fotofoltaik atau PLTS Atap dengan menerbitkan

Information on the Company's Effort to Use the Company's Influence for Prevention, Decrease, Improvement of Environmental Quality (Encouraging Suppliers, Customers, etc.)

Supporting the Use of Solar Roof Power Plant

PLN's effort to use its influence to improve environmental quality is by encouraging customers to use clean energy. The effort included accommodating customers who were willing to use solar roof/photofoltaik power plant by issuing Perdir No. 0049.P/DIR/2019 concerning Guidelines for Power Services for Solar Roof

Peraturan Direksi No. 0049.P/DIR/2019 Tentang Pedoman Layanan Listrik Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh PT PLN (Persero). Perdir tersebut mengatur keamanan pelanggan yang menggunakan PLTS Atap, meningkatkan persyaratan administrasi dan teknis bagi pelanggan yang ingin berlangganan Layanan PLTS Atap, dan menawarkan skema finansial yang saling menguntungkan pelanggan PLTS Atap dan PLN.

Power Plant System by PT PLN (Persero). This regulation sipulates security for customers using Solar Roof Power Plant, improves administrative and technical requirements for customers who were willing to subscribe Solar Roof Power Plant Services and offers mutually beneficial financial scheme for Solar Roof Power Plant customers and PLN.

Mengembangkan Ekosistem Kendaraan Listrik

PLN mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Untuk Transportasi Jalan. Saat ini PLN telah menandatangani 20 MoU dengan mitra strategis baik dari pihak swasta maupun BUMN dan Kementerian untuk bersinergi membangun ekosistem kendaraan listrik. Penggunaan KBL akan mengurangi konsumsi bahan bakar fosil, mengurangi emisi gas karbon dan mempercepat implementasi energi hijau.

Developing Electric Vehicle Ecosystem

PLN supports implementation of Presidential Regulation No. 55 of 2019 concerning Acceleration of Battery Electric Vehicle (KBL) Program for Road Transportation. Currently, PLN has signed 20 MoUs with strategic partners, from the private sector and BUMN, and the Ministry to synergize to develop electric vehicle ecosystem. The use of KBL will reduce fossil fuel consumption, reduce carbon gas emission and accelerate green energy implementation.

Hingga akhir tahun 2019, PLN telah menyediakan 9 titik stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) *showcase* di 6 lokasi dari target 34 titik di 20 lokasi di 10 kota. Penyediaan SPKLU *showcase* dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat pengguna KBL untuk mengisi ulang daya di *charging station* terdekat. PLN, melalui skema kerja sama bisnis, menargetkan membangun 4.200 SPKLU pada 2025 atau sekitar 10% dari populasi mobil listrik pada tahun 2025 yang diperkirakan akan mencapai 42 ribu unit.

At end of 2019, PLN provided 9 public electric vehicle charging station (SPKLU) showcases in 6 locations out of the targeted 34 points in 20 locations in 10 cities. SPKLU showcases are intended to ease KBL users to recharge at the nearest charging stations. PLN, through business cooperation scheme, is targeting to build 4,200 SPKLU by 2025 or around 10% of electric car population in 2025 which is estimated to reach 42 thousand units.

Di tahun 2019, PLN juga meluncurkan program pemberian insentif tarif tenaga listrik (TTL) bagi rumah tangga pemilik KBL. Diskon tarif sebesar 30% dikenakan atas tambahan pemakaian pada pukul 22.00 - 04.00 bagi pelanggan Rumah Tangga dengan daya di atas 1.300 VA dan Bisnis di atas 6.600 VA yang memiliki KBL. Program ini berlaku hingga 31 Desember 2019.

In 2019, PLN also launched electricity tariff (TTL) incentive program for households owning KBL. A discounted rate of 30% was imposed for additional usage during 22:00 - 04:00 for Household customers with power above 1,300 VA and Businesses above 6,600 VA owning KBL. This program was valid until December 31, 2019.

Informasi Rencana Biaya untuk Inisiatif Lingkungan

Program lingkungan di PLN mencakup kegiatan sangat beragam dan luas cakupannya. Setiap pengelola aset/unit-unit memiliki program pemantauan lingkungan yang berhubungan dengan pengendalian dampak operasi. Kegiatan tersebut dapat berupa pengelolaan limbah cair, padat dan B3, investasi alat pengendali emisi, serta kegiatan modifikasi dan penggantian peralatan yang lebih efisien dan ramah lingkungan, yang semuanya bertujuan untuk memenuhi peraturan lingkungan atau menjaga kualitas baku mutu yang telah ditetapkan pemerintah. Keseluruhan program tertuang dalam rencana kerja baik pusat maupun unit yang teruang setiap tahunnya dalam RKAP.

PLN belum memiliki data yang mengakumulasi biaya inisiatif lingkungan yang terkait dengan kegiatan operasi mengingat *cost center* yang tersebar di setiap Unit Bisnis dan menjadi bagian dari biaya operasi. Biaya inisiatif lingkungan yang dapat disajikan adalah ada CSR bidang lingkungan yang terdiri dari program Bina Lingkungan dan TJSL. Total biaya program CSR bidang lingkungan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp12,8 miliar.

Information on Budget for Environmental Initiatives

PLN's environmental programs included very diverse activities with broad scope. Each asset manager/unit has environmental monitoring program related to operating impact control. These activities took the form of liquid, solid and hazardous wastes management, investment in emission control equipment, as well as more efficient and environmentally friendly equipment modification and replacement; all of which aimed to meet environmental regulations or to maintain the quality standards set by the government. The entire program is contained in the work plan of both the center and the units which are set out annually in the RKAP.

PLN has not compiled data of accumulative costs of environmental initiatives related to operations given the cost centers that are scattered in each Business Unit and become part of the operating expenses. The costs of environmental initiatives that can be presented are CSR data in the environmental field which consists of Community Development and TJSL programs. The total costs of environmental CSR programs in 2019 were Rp12.8 billion.

No	Program	Realisasi 2019 2019 Realization (Rp)
1	Program TJSL untuk pelestarian alam/peduli Lingkungan TJSL program for nature conservation/environmental care	5,402,215,450
2	Program BL untuk pelestarian alam/peduli lingkungan BL program for nature conservation/enviromental care	7,431,878,200
	Jumlah | Total	12,834,093,650

URAIAN MENGENAI PELAKSANAAN CSR BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Informasi Keterlibatan dan/atau Pelibatan Pemangku Kepentingan Relevan dalam Inisiatif CSR Perusahaan Bidang Lingkungan Hidup

PLN menjalankan Program Penggiat Lingkungan yang dilakukan seluruh unit minimal satu kali dalam setahun. Program Penggiat Lingkungan adalah kegiatan karyawan di unit PLN yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan

DESCRIPTION OF ENVIRONMENTAL CSR IMPLEMENTATION

Information on Engagement and/or Involvement of Relevant Stakeholders in Environmental CSR Initiatives

PLN runs Environmental Activist Program carried out by all units at least once a year. The Environmental Activist Program is employee activity in PLN units that has positive impact on the environment and improvement of community

dan peningkatan penghidupan masyarakat, seperti konservasi terumbu karang, konservasi wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), peningkatan keanekaragaman hayati (flora dan/atau fauna), program bank sampah, dan sebagainya. Dalam menjalankan programnya, unit PLN melibatkan pemangku kepentingan yaitu elemen masyarakat dan pemerintah daerah setempat sehingga kegiatan yang dilakukan dapat menghasilkan dampak yang lebih besar, terorganisasi, dan berkesinambungan.

Informasi tentang Berbagai Upaya Pelibatan Direksi/Manajemen/Karyawan dalam Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Hidup

Program Penggiat Lingkungan
Program Penggiat Lingkungan melibatkan seluruh karyawan di unit-unit PLN untuk memberikan kontribusi nyata mereka dalam upaya melestarikan lingkungan hidup dan memberdayakan masyarakat.

Selama tahun 2019, seluruh unit secara aktif telah melakukan Program Penggiat Lingkungan sesuai dengan kebutuhan dan kandungan lokal masing-masing unit, yang memiliki manfaat baik untuk lingkungan maupun masyarakat.

Program Penggiat Lingkungan yang dilaksanakan unit di antaranya adalah:
- Pembuatan tanaman hidroponik (*vertical garden*) di atap kantor,
- Penanaman/konservasi hutan *mangrove*.
- Pembuatan *EcoBricks* dari sampah plastik.
- Pembuatan *paving block* dari sampah plastik.

CAPAIAN INISIATIF CSR BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Informasi Berbagai Capaian Inisiatif CSR Lingkungan Hidup Perusahaan
Program CSR bidang lingkungan yang dilaksanakan unit-unit PLN tahun 2019 antara lain adalah:

1. **Bantuan Pengembangan Konservasi Penyu Laskar Turtle Camp**
   Pelaksana Kegiatan:
   PLN UIW Sumatera Barat (Pelaksanaan kegiatan tahun 2017-2019)

welfare, such as coral reef conservation, watershed conservation (DAS), biodiversity (flora and/or fauna) enhancement, waste bank and so forth. In carrying out its programs, PLN units involved stakeholders, including elements of the community and local government so that the activities carried out could have a greater, organized and sustainable impact.

Information on Various Efforts to Involve Directors/Management/Employees in Environmental Social Responsibility Activities

Environmental Activist Program
Environmental Activist Program involves all employees in PLN units to make their real contribution in efforts to protect the environment and to empower the community.

During 2019, all units actively carried out Environmental Activist Program according to the needs and local content of each unit, which benefited the environment and the community.

Environmental Activist Program implemented by the unit included:
- Hydroponic planting (vertical garden) on the roof of the office,
- Mangrove forest planting/conservation.
- Making EcoBricks from plastic waste.
- Making paving blocks from plastic waste.

ACHIEVEMENT OF ENVIRONMENTAL CSR INITIATIVES

Information on Achievements of Environmental CSR Initiatives
Environmental CSR programs implemented by PLN units in 2019 included:

1. **Donation for Development of Turtle Warriors Conservation Camp**
   Event Organizer:
   PLN UIW West Sumatera (Activity in 2017-2019)

Latar Belakang Kegiatan:
Kabupaten Pesisir Selatan di pantai barat Sumatera memiliki 47 pulau dan hampir di semua pulau tersebut menjadi tujuan penyu untuk bersarang dan bertelur. Salah satunya adalah Pantai Ampuang Parak di Kecamatan Sutera. Sekelompok Pemuda Nagari yang tergabung dalam kelompok peduli lingkungan "Laskar Turtle Camp" berinisiatif melakukan kegiatan perlindungan bagi penyu dari gangguan manusia dan alam sehingga dapat menetaskan telurnya dan anak penyu (tukik) kembali ke laut dengan aman.

Bentuk Kegiatan:
PLN UIW Sumatera Barat melaksanakan program Peduli PLN Konservasi Penyu di Nagari Ampiang Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir selatan dalam bentuk perbaikan sarana dan prasarana penunjang kegiatan konservasi seperti pembuatan rumah penyu, mushola dan toilet untuk pengunjung, gerbang dan papan nama/informasi, motor sampah, gedung *Mini Amphiteater*, pondok diskusi, rehabilitasi sarana galeri, peralatan *monitoring tracking* penyu, media interpretasi dan edukasi, dan pembuatan *website*.

Dampak Kegiatan:
- Pemberdayaan masyarakat sekitar tempat konservasi.
- Membuka peluang ekonomi baru.
- Menjadi tempat tujuan wisata lokal dan sarana edukasi.
- Membuka lapangan kerja (UMKM).
- Sebagai sarana informasi bagi program-program PLN.

"Kabupaten Pesisir Selatan ini banyak sekali potensi alamnya. Jika terus dibenahi dapat menjadi destinasi wisata baru yang tak kalah menariknya dengan tempat lain yang sudah lebih dahulu terkenal. Terima kasih kepada PLN atas kepeduliannya. Ini bukan yang pertama kali PLN menunjukkan kepeduliannya pada daerah kami sehingga kami sangat merasakan manfaat dari kehadiran PLN di sini." (Emirda Zizwati, Asisten II Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan)

Activity Background:
Pesisir Selatan Regency on the west coast of Sumatra has 47 islands and almost all of them become turtle destinations for nesting and laying eggs. One of them is Ampuang Parak Beach in Sutera District. A group of Nagari Youth who were members of environmental activists group "Turtle Camp Warriors" took the initiative to protect the turtles from human and natural disruption so that they could hatch their eggs and the hatchlings returned to the sea safely.

Forms of Activity:
PLN UIW West Sumatra carried out PLN Care Program for Turtle Conservation in Nagari Ampiang Parak, Sutera District, Pesisir Selatan Regency in the form of facilities and infrastructure renovation to support conservation activities, such as construction of turtle nests, prayer rooms and toilets for visitors, gates and signages/ information boards, trash motorcycles, Mini Amphitheater, discussion huts, rehabilitation of gallery facilities, turtle tracking monitoring equipment, media interpretation and education, as well as website creation.

Impacts of Activity:
- Empowerment of communities around conservation area.
- New economic opportunities.
- Local tourist destination and educational facilities.
- Employment (MSME) opportunities.
- As a means of information for PLN programs.

"Pesisir Selatan Regency has a lot of natural potentials. If the development continues, it can become a new tourism destination that is no less interesting than other places that are already famous. We thank PLN for its caring. This is not the first time PLN shows its concern about our region so we really feel the benefits of PLN's presence here." (Emirda Zizwati, Assistant II of Pesisir Selatan Regency Government)

2. PLN Membiru – Menuju Desa Mandiri Energi

Pelaksana Kegiatan:
PLN UID Lampung (Pelaksanaan kegiatan November 2018 – Februari 2019)

Latar Belakang Kegiatan:
Berdasarkan data tahun 2016, Provinsi Lampung memiliki potensi 665.712 rumah tangga peternak sapi yang dapat dikonversi menjadi lebih dari 300 ribu unit reaktor biogas bagi rumah tangga. Sejak tahun 2012, Yayasan Rumah Energi sebagai pemegang mandat program Biogas Rumah (BIRU) bekerja sama dengan mitra lokal telah mengembangkan sektor biogas di Provinsi Lampung dan membangun 511 reaktor biogas. Biogas sebagai sumber energi alternatif terbarukan dapat digunakan untuk memasak dan penerangan. Ampas dari biogas (*bio-slurry*) dapat dimanfaatkan kembali menjadi bahan pupuk organik, campuran pakan lele dan *vermin compost*. Tetapi kendala terbesar bagi petani peternak adalah tidak ada biaya untuk membangun reaktor biogas.

Bentuk Kegiatan:
PLN UID Lampung berinisiatif mengembangkan program CSR pengembangan biogas bekerja sama dengan Yayasan Rumah Energi melalui program BIRU. Targetnya adalah membangun reaktor biogas untuk 40 petani/peternak di Kabupaten Lampung Tengah. Kegiatan terdiri dari pembuatan reaktor biogas, pembangunan Unit Produksi Cacing dan Kascing, pelatihan pengguna dalam hal pemggunaan dan perawatan, dan pelatihan pemanfaatan *bio-slurry* sebagai pupuk dan pestisida alami.

Dampak Kegiatan:
- Mengurangi biaya pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi gas elpiji rata-rata Rp75 ribu per bulan.
- Mendapat manfaat ekonomi tambahan dari pengolahan *bio-slurry* sebagai bahan pupuk organik, campuran pakan lele dan *vermin compost*. Penggunaan *bio-slurry* terbukti mengurangi biaya produksi pertanian hingga 30% dan meningkatkan produksi rata-rata 20%.

2. PLN Membiru – Towards Energy Independent Village

Event Organizer:
PLN UID Lampung (Activity in November 2018 – February 2019)

Activity Background:
Based on 2016 data, Lampung Province has a potential of 665,712 cattle ranch households that can be converted into more than 300 thousand units of biogas reactors for households. Since 2012, Rumah Energi Foundation as the mandate holder of Home Biogas (BIRU) program in collaboration with local partners has developed the biogas sector in Lampung Province and has built 511 biogas reactors. Biogas as a renewable alternative energy source can be used for cooking and lighting. The waste from biogas (bio-slurry) can be reused as organic fertilizer, mixture of catfish feed and vermin compost. However, the main obstacle for breeders was lack of fund to build biogas reactor.

Forms of Activity:
PLN UID Lampung took the initiative to develop CSR program for biogas development in collaboration with Rumah Energi Foundation through BIRU program. The target was to build biogas reactor for 40 farmers/breeders in Central Lampung Regency. The activities consisted of construction of biogas reactors, Worm and Kascing Production Unit, training for users on the use and maintenance, as well as training on the use of bio-slurry as natural fertilizer and pesticide.

Impacts of Activity:
- Less household expenses for LPG consumption by an average of Rp75 thousand per month.
- Additional economic benefits from bio-slurry processing into organic fertilizer, a mixture of catfish feed and vermin compost. The use of bio-slurry has been proven to reduce agricultural production costs by up to 30% and increase production by an average of 20%.

- Desa Mandiri Energi menjadi ikon PLN dalam mengkampanyekan energi terbarukan kepada pelanggan.
- Menjadi percontohan bagi daerah lain yang memiliki potensi biogas.

- Energy Independent Village became PLN icon in renewable energy campaign.
- Pilot project for other regions with biogas potential.

Capaian Memberikan Gambaran Manfaat untuk Pemangku Kepentingan

Salah satu program CSR bidang lingkungan yang dapat memberikan gambaran manfaat bagi pemangku kepentingan adalah Program Penguatan Pengelolaan Bank Sampah Rosella yang dilaksanakan oleh PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Kalimantan Barat.

Sejak tahun 2014, Lembaga Bank Sampah Rosella di Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, sudah merintis pembuatan barang-barang kerajinan yang memanfaatkan bahan baku sampah. Di Bank Sampah Rosella, sampah dipilah untuk sebagian dijual kepada pengepul dan sebagian dibuat kerajinan yang memiliki nilai ekonomi. Keberadaan Bank sampah ini tidak hanya membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, tetapi pemasukan yang diperoleh juga dapat digunakan untuk mendukung operasional PAUD Sekolah Alam Genematrik (Generasi Hemat Listrik) yang dikelola Lembaga Rosella.

PLN UIW Kalimantan Barat melihat potensi untuk mengembangkan kapasitas Bank Sampah Rosella untuk mewujudkan lingkungan yang bersih sekaligus memberdayakan masyarakat untuk peningkatan ekonomi. Pada tahun 2016 Lembaga Rosella mendapatkan bantuan Bina Lingkungan dari PLN UIW Kalimantan Barat. Bantuan PLN antara lain berupa mesin pencacah plastik, pelatihan manajemen keuangan sederhana dan bahan pendukung pembuatan kerajinan.

Manfaat bagi pemangku kepentingan:
- Menciptakan lingkungan bersih dan sehat,
- Menyediakan lapangan kerja,
- Ikut membantu operasional PAUD dari hasil penjualan kerajinan sampah,
- Meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar.

Achievements Provided an Overview of Benefits to Stakeholders

One Environmental CSR program that can provide an overview of benefits to stakeholders is Rosella Waste Bank Management Strengthening Program implemented by PLN Regional Main Unit (UIW) West Kalimantan.

Since 2014, Rosella Waste Bank Institute in Siantan Tengah Village, North Pontianak District, Pontianak City, has pioneered the manufacture of handicraft products that utilize wastes as raw materials. At Rosella Waste Bank, wastes are sorted, some are sold to collectors and some are used to produce handicrafts that have economic value. This waste bank provides not only employment for the surrounding community, the revenues obtained can also be used to support the operations of PAUD School of Nature Genematrik (Power Saving Generation) managed by Rosella Institute.

PLN UIW West Kalimantan sees the potential to develop the capacity of Rosella Waste Bank to create clean environment while empowering the community to improve their economy. In 2016, Rosella Institute received donation from Community Development Program of PLN UIW West Kalimantan. PLN's donation included plastic shredder machine, basic financial management training and supporting materials for handicrafting.

Benefits for stakeholders:
- Clean and healthy environment,
- Employment,
- Support for PAUD operations from the sale of handicrafts,
- Improved economy of the surrounding community.

Capaian Memberikan Gambaran Manfaat untuk Perusahaan Baik Langsung Maupun Tidak Langsung Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Pelaksanan CSR pada Pemegang Saham

Pemenuhan PROPER Pembangkit di PLN dan Anak Perusahaan

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Kementerian LHK (PROPER) merupakan kegiatan evaluasi ketaatan dan kinerja melebihi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Pada tahun 2019, jumlah unit Grup PLN yang berhasil meraih peringkat PROPER Emas meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu dari 2 PROPER Emas pada tahun 2018 menjadi 5 PROPER Emas. Unit PLN yang meraih PROPER Emas adalah PLTU Tanjung Jati B yang dikelola oleh PLN, PLTP Kamojang dan PLTG Pesanggaran yang dikelola oleh PT Indonesia Power serta PLTGU Gresik dan PLTU Paiton yang dikelola oleh PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB).

Achievements Provided an Overview of Direct and Indirect Benefits to the Company as Accountability of CSR Implementation to Shareholders

PROPER Fulfillment of Power Plants of PLN and Subsidiaries

Program for Evaluation and Rating of the Company Performance on Environmental Management (PROPER) of the Ministry of LHK is an evaluation of compliance and performance beyond compliance of the responsible party of business and/or activity in the field of pollution control and/or environmental damage, as well as management of hazardous and toxic waste (B3).

In 2019, the number of PLN Group units that obtained Gold PROPER rating increased from the previous year, from 2 Gold PROPER in 2018 to 5 Gold PROPER. PLN units that received Gold PROPER were CFPP Tanjung Jati B managed by PLN, GPP Kamojang and GPP Pesanggaran managed by PT Indonesia Power and CCPP Gresik and CFPP Paiton managed by PT Pembangkit Jawa Bali (PT PJB).

PROPER Emas merupakan penilaian tertinggi atas kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan terutama dalam aspek efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan keanekaragaman hayati, serta praktik pemberdayaan masyarakat melalui program CSR. Selain PROPER Emas, Grup PLN juga meraih peringkat PROPER Hijau yaitu sebanyak 16 (enam belas) unit, dan PROPER Biru sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) unit.

Gold PROPER is the highest rating for the Company's performance in environmental management, especially in the aspect of efficient use of natural resources and enhancing biodiversity, as well as the practice of community empowerment through CSR programs. In addition to Gold PROPER, PLN Group also received Green PROPER for 16 (sixteen) units and Blue PROPER for 98 (ninety eight) units.

Unit Perserta PROPER	Hasil Penilaian PROPER					
	Periode Period 2013-2014	Periode Period 2014-2015	Periode Period 2015-2016	Periode Period 2016-2017	Periode Period 2017-2018	Periode Period 2018-2019
Jumlah Peserta (PLN dan Anak Perusahaan) Number of Participants (PLN and Subsidiaries)	79	84	91	97	100	120
Emas|Gold	0	0	0	1	2	5
Hijau|Green	6	10	14	15	16	16
Biru|Blue	35	55	76	81	82	98
Merah|Red	31	23	6	0	0	1
Hitam|Black	1	0	0	0	0	0

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari program-program persiapan yang dilakukan Perusahaan dalam menghadapi penilaian PROPER, antara lain:

a. Mengevaluasi hasil penilaian PROPER Hijau dan Emas tahun 2018 dengan melibatkan seluruh Unit PROPER Grup PLN dalam mempersiapkan penilaian PROPER tahun 2019.
b. Mengevaluasi kepesertaan PROPER unit-unit pembangkit di PLN ke Direktorat Jendral Ketenagalistrikan (DJK).
c. Menyelenggarakan bimbingan teknis bagi seluruh unit peserta PROPER dalam rangka persiapan penilaian PROPER periode 2018-2019.
d. Melaksanakan *capacity building* bagi seluruh unit PROPER kandidat Hijau terkait *Life Cycle Assessment* (LCA).

This achievement was supported by preparatory programs carried out by the Company in PROPER assessment, including:

a. Evaluated the results of 2018 Green and Gold PROPER assessment by involving all PROPER Units within PLN Group in preparing 2019 PROPER assessment.
b. Evaluated membership of PROPER power plant units of PLN to Directorate General of Electricity (DJK).
c. Provided technical guidance to all PROPER participant units for preparation of 2018-2019 PROPER assessment.
d. Conducted capacity building for all Green PROPER candidate units related to Life Cycle Assessment (LCA).

Capaian Memberikan Gambaran Manfaat Langsung atau Tidak Langsung pada Pembangunan Berkelanjutan

Tabel berikut memberikan gambaran aktivitas Perusahaan di bidang lingkungan yang mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan baik secara langsung maupun tidak langsung:

Achievements Provided an Overview of Direct or Indirect Benefits of Sustainable Development

The following table provides an overview of the Company's activities in the environmental field that supported achievements of Sustainable Development Goals both directly and indirectly:

Tujuan Global Yang Terkait Global Goals Related	Inisiatif PLN	PLN Initiatives
 Akses Air Bersih dan Sanitasi **Access to Clean Water and Sanitation**	Program Sekolah Sungai (Pelestarian lingkungan DAS sebagai wahana pendidikan untuk menjaga kelestarian fungsi sungai dan alam sekitarnya) 1. UID DKI Jakarta; Sekolah Sungai Ciliwung. 2. UP3 DI Yogyakarta; Sekolah Sungai Siluk dan Sekolah Sungai Mudal. 3. UID Jawa Tengah dan DI Yogyakarta; Sekolah Sungai Sengkarang dan Sekolah Sungai Pandansari. 4. UID Jawa Timur; Sekolah Sungai Gununganyar Tambak.	River School Program (Preservation of watershed environment as education tools for river preservation and its natural surroundings) 1. UID DKI Jakarta; Ciliwung River School. 2. UP3 DI Yogyakarta;Siluk River School and Mudal River School. 3. UID Central Java and DI Yogyakarta; Sengkarang River School and Pandansari River School. 4. UID East Java; Gununganyar Tambak River School.
 Energi Bersih dan Terjangkau **Clean and Affordable Energy**	1. Melakukan perbaikan kualitas bauran energi dalam proses pembangkitan listrik dengan meningkatkan proporsi penggunaan energi baru terbarukan, terutama PLTP, PLTA dan PLTB dalam komposisi seluruh pembangkit listrik kelolaan yang dituangkan RUPTL 2019-2029 dengan target pencapaian minimal 23% di tahun 2025. 2. Menyertakan hasil pengelolaan PLTP dan PLTA yang telah beroperasi ke dalam skema mekanisme pembangunan bersih (*Clean Development Mechanism*/CDM) dan *Verified Carbon Standard* (VCS). 3. Memperoleh 5 PROPER Emas dan 16 PROPER Hijau dari Kementerian LHK untuk unit-unit pembangkit PLN dan tidak ada unit pembangkit yang mendapat PROPER Hitam. 4. Menggunakan teknologi terkini yang semakin ramah lingkungan dalam pembangunan pembangkit-pembangkit berskala besar sehingga PLN dapat turut berperan serta menjaga ekosistem di darat dari pencemaran limbah abu pembakaran batu bara maupun dari emisi CO_2. 5. Penggunaan pembangkit berbahan bakar BBM semakin berkurang dari 6,83% pada tahun 2018 menjadi 5,02% pada tahun 2019. Hal ini selaras dengan komitmen PLN dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan dan memitigasi dampak lingkungan dari emisi gas rumah kaca. 6. Mengoperasikan WTE SETIP (*Waste to Energy* Solusi Energi Terbarukan) menggunakan gasifier berbahan baku pelet sampah domestik untuk pembangkit listrik pemakaian sendiri di fasilitas penunjang (PLTDG Pesanggaran). 7. Pemanfaatan listrik *gasifier* dari sampah organik untuk listrik pompa air di peternakan kambing masyarakat Pesanggaran (PLTDG Pesanggaran). 8. Meningkatkan persentase penggunaan sumber energi primer yang lebih ramah lingkungan, yakni gas, air, dan sumber energi baru terbarukan (EBT) seperti energi bayu, energi panas bumi dan energi surya. 9. Melakukan pengukuran dan pemantauan indikator utama emisi pada area sekitar instalasi, baik instalasi PLTD, PLTU, PLTG, dan PLTGU, dan menjalankan program perbaikan kualitas dan pengelolaan lingkungan melalui kegiatan penanganan limbah B3, perbaikan IPAL, pemasangan *Continuos Emission Monitoring System* (CEMS) dan inisiatif lainnya sebagai upaya perbaikan kualitas lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. 10. Melaksanakan Program Penggiat Lingkungan di seluruh unit. Program Penggiat Lingkungan adalah kegiatan unit PLN yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan dan peningkatan penghidupan masyarakat, seperti konservasi terumbu karang, konservasi wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), peningkatan keanekaragaman hayati (flora dan/atau fauna), program bank sampah, dan sebagainya.	1. Improving the energy mix quality in electricity generation process by increasing the proportion of new renewable energy, particularly GPP, HPP (Hydro) and Wind turbine in the composition of all managed power plants as outlined in 2019-2028 RUPTL with a minimum target of 23% in 2025. 2. Enclosing the management result of GPP and HPP have been operated in the Clean Development Mechanism (CDM) and Verified Carbon Standard (VCS). 3. Obtaining 5 Gold PROPER and 16 Green PROPER from the Ministry of Envoronment and Forestry for PLN generating units and no there was no Black PROPER. 4. Utilizing latest environmentally friendly technology in large-scale power plants construction so that PLN can participate and protecting land ecosystem from pollution of coal combustion and emission of CO2. 5. Reducing the use of fuel-fired power plants from 6.83% in 2018 to 5.02% in 2019. This is in line with PLN's commitment to support environmental preservation and mitigate the environmental impact of GHG emission. 6. Operating WTE SETIP (Waste to Energy Renewable Energy Solution) using gasifier fueled by domestic waste pellets for self-use power plant in supporting facilities (PLTDG Pesanggaran). 7. Utilizing gasifier-based power generation from organic waste for electric water pump in goat farm of Pesanggaran community (Pesanggaran DGPP). 8. Increasing the use percentage of environmentally friendly primary energy sources namely gas, water, and new renewable energy sources such as wind, geothermal and solar energy. 9. Measuring and monitoring the main indicators of emission in surrounding area of installation, included installation of DPP, CFPP, GPP, and CCPP, and running quality improvement and environmental management programs through B3 waste handling activities, repairing WWTPs, installing Continuos Emission Monitoring System (CEMS) and other initiatives to improve environment quality and mitigate climate change. 10. Implementing Program Penggiat Lingkungan Environmental Activist Program) in all units. Program Penggiat Lingkungan is a PLN unit activities that has a positive impact on the environment and improvement of people's livelihoods, such as coral reef conservation, watershed conservation, increased biodiversity (flora and/or fauna), waste bank programs, and so on.
 Penanganan Perubahan Iklim **Handling Climate Change**		

Tujuan Global Yang Terkait Global Goals Related	Inisiatif PLN	PLN Initiatives
 Menjaga Ekosistem Laut **Safeguarding Marine Ecosystems**	1. Transplantasi Terumbu Karang Perairan Pulau Panjang dengan APR (Artificial Patch Reef) 2. Transplantasi Lamun Perairan Pulau Panjang dengan Metode Jangkar 3. Penanaman pohon *mangrove* di Kawasan Ekowisata Mangrove Pulau Sicanang (PLTGU Belawan) 4. Konservasi mangrove/penanaman 10.000 bibit mangrove (PLTGU Muara Tawar)	1. Transplantation of Panjang Island Coral Reef with APR (Artificial Patch Reef) 2. Transplantation of Panjang Island Waters Seagrass by Anchor Method 3. Planting mangrove trees in Sicanang Island Mangrove Ecotourism Area (Belawan CCPP) 4. Mangrove conservation/planting of 10,000 mangrove seedlings (Muara Tawar CCPP)
 Menjaga Ekosistem Darat **Safeguarding Land Ecosystems**	1. Pembangunan *Arboretum* sebagai pusat keanekaragaman hayati pohon asli dan buah tropis Indonesia berbasis pondok pesantren di daerah aliran sungai (DAS) Citarum, DAS Cikapundung, DAS Cimanuk dan DAS Citanduy, Jawa Barat, bekerja sama dengan 5 lembaga pesantren (PLN UID Jawa Barat). 2. Pelestarian burung Jalak/Curik Bali (PLN UID Bali). 3. Konservasi Penyu di Nagari Ampiang Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan (PLN UIW Sumatera Barat). 4. Penangkaran Rusa Timor. 5. Budi daya indukan belida (PLTGU Indralaya)	1. Development of Arboretum as a center for biodiversity of Indonesia native trees and tropical fruits with Islamic boarding schools in Citarum watershed (DAS), Cikapundung watershed, Cimanuk watershed and Citanduy watershed, West Java, in collaboration with 5 pesantren institutions (PLN UID West Java). 2. Conservation of Bali Starling/Curik (PLN UID Bali). 3. Turtle Conservation in Nagari Ampiang Parak, Sutera District, Pesisir Selatan Regency (PLN UIW West Sumatra). 4. Timor Deer Breeding. 5. Belida broodstock cultivation (Indralaya CCPP)

Sertifikasi di Bidang Lingkungan Hidup

Hingga tahun 2019, sebanyak 72 unit PLN telah memiliki sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan SNI ISO 14001:2015 atau ISO 14001:2014.

Pada tahun 2019, PLN melaksanakan program sertifikasi Sistem Manajemen Terintegrasi (SMT) yang mencakup Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) di lingkup Perusahaan dan beberapa unit terpilih. Perusahaan menugaskan Pusdiklat, dalam hal ini Unit Sertifikasi, untuk membantu menyiapkan dokumen SMT dan kebutuhan pendukung lainnya. Perusahaan juga menugaskan Pusertif untuk melakukan sertifikasi SMT (mencakup SMM dan SML) sesuai lingkup yang telah ditentukan.

Perusahaan telah melakukan perbaikan dan merancang tata kelola dalam manajemen mutu dan pengelolaan lingkungan. Pada perayaan Hari Listrik Nasional (HLN) ke-74, sertifikat SMT telah diterbitkan Pusertif dan diserahkan secara simbolis kepada Dewan Komisaris, Direktur Utama, Direktur Human Capital Management, dan EVP HSSE. Unit PLN yang mengikuti sertifikasi SMT adalah sebagai berikut:

Certificates in Environmental Field

Until 2019, 72 PLN units have obtained Environmental Management System certifications ISO 14001:2015 or ISO 14001:2014.

In 2019, PLN implemented Integrated Management System (IMS) certification program that included Quality Management System (AMS) and Environmental Management System (EMS) within the Company and selected units. The Company assigned Pusdiklat, in this case the Certification Unit, to help prepare IMS documents and other supporting needs. The Company also assigned Pusertif to conduct IMS certification (including QMS and EMS) according to the specified scope.

The Company has made improvements and designed governance in quality management and environmental management. At the 74th National Electricity Day (HLN) celebration, IMS certificate was issued by Pusertif and symbolically given to Board of Commissioners, President Director, Human Capital Management Director and EVP HSSE. PLN units participating in IMS certification were as follows:

No.	Unit Pembangkit Generation Unit	Unit Induk Parent Unit
1	PLTGU Belawan, UPK Belawan	UIK SBU
2	PLTA Batang Agam, UPDK Bukittinggi	UIK SBS
3	PLTD Lombok, UPK Lombok	UIW NTB
4	PLTU Asam-asam, UPDK Asam-asam	UIKL Kalimantan
5	PLTD/G Tello, UPDK Tello	UIKL Sulawesi
6	PLTP Lahendong, UPDK Minahasa	UIKL Sulawesi

Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup yang Dimiliki

Pada tahun 2019, Perusahaan memperoleh penghargaan terkait lingkungan hidup sebagai berikut:

Awards Received in Environmental Field

In 2019, the Company received the following environmental awards:

No.	Waktu Date	Penghargaan Awards	Jumlah Penghargaan Quantity	Pemberi Penghargaan Award Giver	Kategori Category
1	6 September September 6	Indonesia Sustainable Development Goals Award (ISDA) 2019	10	Corporate Forum for Community Development (CFCD) bersama Bappenas dan Kementerian/ Lembaga terkait Corporate Forum for Community Development (CFCD) with Bappenas and related Ministries/ Institutions	• Grand Silver: PT PLN (Persero) • Platinum Kategori Tujuan 4 - Pendidikan Berkualitas: PLN Pusdiklat • Platinum Kategori Tujuan 8 - Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi: PLN UID Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta • Platinum Kategori Tujuan 12 - Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan: PLN UID Jawa Timur • Gold Kategori Tujuan 1 - Tanpa Kemiskinan: PLN UIW Bangka Belitung • Gold Kategori Tujuan 4 - Pendidikan Berkualitas: PLN UIT JBT • Gold Kategori Tujuan 6 - Air Bersih dan Sanitasi Layak: PLN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat • Gold Kategori Tujuan 11 - Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan: PLN UIW Nusa Tenggara Barat • Gold Kategori Tujuan 15 - Ekosistem Daratan: PLN UIK SBS • Silver Kategori Tujuan 7 - Energi Bersih dan Terjangkau: PLN UID Jawa Barat • Grand Silver: PT PLN (Persero) • Platinum in Category Goal 4 - Quality Education: PLN Pusdiklat • Platinum in Category Goal 8 - Decent Work and Economic Growth: PLN UID Central Java and D.I. Yogyakarta • Platinum in Category Goal 12 – Responsible Consumption and Production: PLN UID East Java • Gold inr Category Goal 1 - No Poverty: PLN UIW Bangka Belitung • Gold in Category Goal 4 - Quality Education: PLN UIT JBT • Gold in Category Goal 6 - Clean Water and Sanitation: PLN South, Southeast and West Sulawesi • Gold in Category Goal 11 - Sustainable Cities and Communities: PLN UIW West Nusa Tenggara • Gold in Category Goal 15 – Life on Land: PLN UIK SBS • Silver in Category Goal 7 – Affordable and Clean Energy: PLN UID West Java

No.	Waktu Date	Penghargaan Awards	Jumlah Penghargaan Quantity	Pemberi Penghargaan Award Giver	Kategori Category
2	6 September September 6	ASEAN Coal Awards 2019 - Bangkok Thailand	3	ASEAN Centre for Energy (ACE)	• 1st Winner Kategori Clean Coal Use and Technology Utilization – Sub Kategori Power Generation – Large Scale untuk Unit Pembangkit Suralaya • 1st Runner Up Kategori Clean Coal Use and Technology Utilisation – Sub Kategori Power Generation – Small Scale untuk Unit Jasa Pembangkitan Jeranjang • 2nd Runner Up Kategori Clean Coal Use and Technology Utilisation – Sub Kategori Power Power Generation – Medium Scale untuk Unit Jasa Pembangkitan Lontar • 1st Winner in Clean Coal Use and Technology Utilization Category - Power Generation - Large Scale Sub Category for Generating Unit of Suralaya • 1st Runner Up Clean Coal Use and Technology Utilization Category - Power Generation - Small Scale Sub Category for Generation Service Unit of Jeranjang • 2nd Runner Up Clean Coal Use and Technology Utilization Category - Power Power Generation - Medium Scale Sub Category for Generation Services Unit of Lontar
3	8 Januari 2020 January 8, 2020	PROPER Emas Glod PROPER	5	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ministry of Environment and Forestry	5 unit pembangkit meraih PROPER Emas: 1) PLTU Tanjung Jati B, 2) PLTU Paiton Unit 1 & 2 Probolinggo (PT PJB), 3) PLTGU Gresik (PT PJB), 4) PLTDG Pesanggrahan (PT Indonesia Power), dan 5) PLTP Kamojang Darajat (PT Indonesia Power) 5 generating units won Gold PROPER: 1) CFPP Tanjung Jati B, 2) CFPP Paiton Unit 1 & 2 Probolinggo (PT PJB), 3) Combined Cycle PP Gresik (PT PJB), 4) Diesel and Gas Turbine PP Pesanggrahan (PT Indonesia Power), and 5) Geothermal PP Kamojang Darajat (PT Indonesia Power)

Program Tanggung Jawab Sosial Yang Terkait Dengan Pengembangan Sosial Dan Kemasyarakatan

Coporate Social Responsibilities On Social And Community Development

KEBIJAKAN DAN KOMITMEN TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Perusahaan berkomitmen untuk ikut berperan dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperluas lapangan kerja melalui program-program tanggung jawab sosial di bidang sosial dan kemasyarakatan. Program-program yang tepat guna, tepat sasaran dan memenuhi harapan pemangku kepentingan akan menumbuhkan interaksi positif antara PLN dengan masyarakat. Perusahaan berharap masyarakat mempunyai rasa memiliki dan ikut menjaga keberadaan instalasi PLN yang berada atau berdekatan di wilayah permukiman masyarakat. Kegiatan di bidang sosial dan kemasyarakatan diimplementasikan ke dalam

POLICIES AND COMMITMENTS OF SOCIAL RESPONSIBILITY ON SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

The Company is committed to playing a role in the efforts to improve the living standard of the community and expand employment oppportunities by implementing social responsibility programs in the social and community fields. Programs that are effective, right on target and meet the expectations of stakeholders will foster positive interactions between PLN and the community. The Company wishes that the community builds a sense of ownership and helps maintain the existence of PLN installations that are located or close to residential areas. Activities in the social and community fields are implemented into the Partnership and

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L/TJSL).

Informasi Perusahaan Melakukan Uji Tuntas di Bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Proses uji tuntas terhadap tanggung jawab sosial di bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan dimulai dengan melakukan analisis lingkungan mencakup identifikasi pemangku kepentingan yang terdampak dan ekspektasinya, RUPTL, Rencana Strategis BUMN, PESTEL, dan *Porter's Five Forces,* termasuk juga dengan melakukan analisa pada kinerja, kompetensi, SDM, keuangan dan proses bisnis. Setelah melakukan analisis lingkungan, tahapan berikutnya adalah merumuskan perencanaan skenario, menyusun arahan strategisn memetakan strategi, merumuskan inisiatif strategis, membuat proyeksi keuanga, membuat analisa risiko hingga proses *Review Final*.

Pemerintah Daerah umumnya melibatkan unit-unit PLN di dalam forum pembahasan Musrenbang untuk merencanakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang diselaraskan dengan rencana pembangunan daerah. Di forum tersebut juga dilakukan uji tuntas yang meliputi identifikasi dampak sosial, lingkungan dan ekonomi yang aktual dan komprehensif.

Pendekatan yang Dilakukan dalam Mengenali dan Merumuskan Tanggung Jawab Sosial di Bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Pada dasarnya, kegiatan CSR PLN sangat berkaitan dengan aktivitas usaha Perusahaan. Sebagai BUMN, selain sebagai entitas bisnis yang berorientasi profit, PLN juga menjalankan fungsi sebagai agen pembangunan, melayani kepentingan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan listrik. PLN telah berkomitmen menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, dan mengupayakan tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.

Saat ini, setidaknya masih terdapat 433 desa tertinggal yang sama sekali masih belum teraliri listrik tersebar di 4 provinsi terutama di daerah

Community Development Program (PKBL) and the Environmental Empowerment Participation Program (P3L/TJSL).

Information on Due Diligence in the Field of Social and Community Development

The due diligence process on social responsibility in the field of social and community development begins with conducting an environmental analysis including identification of affected stakeholders and their expectations, RUPTL, SOE Strategic Plan, PESTEL, and Porter's Five Forces, including analyzing performance, competence, HR, finance and business processes. After conducting an environmental analysis, the next step is to formulate scenarios, compile strategic directions, map out strategies, formulate strategic initiatives, make financial projections, make risk analyzes up to the Final Review process.

Local governments generally involve PLN units in the "Musrenbang" discussion forum to plan social community activities that are aligned with regional development plans. In the forum, due diligence was also carried out which included identification of actual and comprehensive social, environmental and economic impacts.

Approach Taken in Recognizing and Formulating Social Responsibility in the Field of Social and Community Development

Basically, PLN's CSR activities are closely related to the Company's business activities. As a SOE, aside from being a profit-oriented business entity, PLN also functions as a development agent, serving the interests of the community in meeting electricity needs. PLN has committed to making electricity as a medium to improve the quality of people's lives, and strive for electricity to be a driver of economic activity.

At present, there are at least 433 underdeveloped villages spread across 4 provinces, especially in the 3T areas that are difficult to access, which

3T yang sulit diakses. Hal ini menyebabkan indikator *electricity access population* Indonesia masih berada di peringkat 95, masih tertinggal dibandingkan Malaysia di peringkat 87, Vietnam peringkat 84, serta Singapura, Thailand, Tiongkok, dan Korea Selatan yang berada di peringkat 2.

Selain karena kendala lokasi desa yang sulit dijangkau, sebagain besar masyarakat yang belum merasakan aliran listrik di rumahnya adalah golongan masyarakat prasejahtera yang tidak mampu menanggung biaya penyambungan listrik. Oleh karena itu, untuk mendukung pencapaian target rasio elektrifikasi 100%, PLN merancang program-program sambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu melalui berbagai skema kegiatan CSR seperti Program PLN Peduli, OMOH *(One Man One Home)* yang melibatkan partisipasi dan kepedulian pegawai PLN, serta Program Sinergi BUMN. Salah satu program yang telah diselesaikan pada tahun 2019 adalah Program Sambung Gratis untuk 11.000 KK di Nusa Tenggara Timur.

PLN meyakini, dengan adanya listrik yang dapat dinikmati dan diakses oleh masyarakat terutama yang berada di lapisan bawah, akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan produktivitas ekonomi. Dengan adanya listrik anak-anak juga dapat belajar di malam hari dengan penerangan lampu yang cukup sehingga kualitas pendidikan semakin meningkat.

Dampak Penting Langsung atau Tidak Langsung Aktivitas dan Keputusan Perusahaan di Bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Dampak penting dari aktivitas dan keputusan PLN di bidang penembangan sosial dan kemasyarakatan dapat dilihat melalui kontribusi aktivitas PLN pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). PLN telah mengidentifikasi berbagai inisiatif Perusahaan yang dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian SDGs seperti telah diuraikan pada bagian “Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berisikan Upaya Menciptakan Manfaat Bagi Perusahaan, Pemangku Kepentingan dan Pembangunan Berkelanjutan” dan “Capaian Memberikan Gambaran Manfaat Langsung atau Tidak Langsung pada Pembangunan Berkelanjutan.”

are still without electricity at all. This causes the electricity access population indicator for Indonesia to be ranked 95th, still lagging behind Malaysia at 87th, Vietnam at 84th, and Singapore, Thailand, China and South Korea, which are 2nd.

Apart from the village location being difficult to reach, the majority of people who have not yet enjoyed electricity in their homes are underprivileged who are unable to bear the costs of connecting electricity. Therefore, to support the achievement of the 100% electrification ratio target, PLN has designed free electricity connection programs for underprivileged communities through various CSR activities schemes such as the PLN Care Program, OMOH (One Man One Home) which involves the participation and care of PLN employees, and the BUMN Synergy Program. One program that has been completed in 2019 is the Free Connect Program for 11,000 households in East Nusa Tenggara.

PLN believes, with electricity that can be enjoyed and accessed by people, especially those in the lower strata, will provide added value for increasing economic productivity. With electricity, children can also study at night with sufficient lighting so that the quality of education increases.

Direct or Indirect Significant Impacts of Company Activities and Decisions in the Field of Social and Community Development

The significant impact of PLN's activities and decisions in the field of social and community development can be seen through the contribution of PLN's activities to the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). PLN has identified various initiatives that can contribute to the achievement of SDGs as outlined in the section "Corporate Social Responsibility Information Contains Efforts to Create Benefits for Companies, Stakeholders and Sustainable Development" and "Achievements Provide a Picture of Direct or Indirect Benefits of Sustainable Development. "

Informasi Perusahaan telah Melakukan *Review* atas Seluruh Regulasi di Bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Perusahaan secara berkala melakukan review atas seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Di antaranya me*review* Peraturan Menteri (Permen) BUMN No.PER/MBU/2007 tentang PKBL dan perubahan-perubahannya hingga yang terakhir Permen BUMN No. PER-02/MBU/04/2020.

Information that the Company has Reviewed All Regulations in the Field of Social and Community Development

The Company periodically reviews all laws and regulations in the field of social and community development. Among them are reviewing Minister of SOE Regulations (Permen) No.PER/MBU/2007 concerning PKBL and amendments to the latest SOE Regulation No. PER-02/MBU/04/2020.

Informasi dan Uraian Singkat tentang Isu-Isu Penting Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan yang Relevan dengan Bisnis Perusahaan

Pembangunan pembangkit listrik dan saluran transmisi PLN yang lokasinya tersebar di seluruh Indonesia banyak menemui kendala yang berisiko membuat jadwal penyelesaian proyek tidak tepat waktu. Dari aspek sosial, penyebab proyek tidak selesai tepat waktu antara lain karena adanya resistensi masyarakat dengan berbagai alasan. Salah satu upaya Perusahaan untuk mengatasi kendala sosial adalah melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat setempat dengan melibatkan pejabat pemerintah daerah setempat, TNI/POLRI, tokoh masyarakat dan tokoh keagamaan. Selain itu, PLN melalui program CSR dan PKBL berupaya membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi, pendidikan, maupun sarana-prasarana yang mereka butuhkan.

Information and Brief Description of Important Social and Community Development Issues Relevant to Company Business

The construction of PLN power plants and transmission lines, whose locations are spread all over Indonesia, encounter many obstacles and can make projects unable to be completed on time. From the social aspect, the cause of the project could not be completed on time, partly because of community resistance for various reasons. One of the Company's efforts to overcome social barriers is to approach the community, and through socialization involving local government officials, the TNI/POLRI, community leaders and religious leaders. In addition, PLN through its CSR and PKBL programs strives to help the community to improve the quality of economic life, education and the infrastructure they need.

Informasi Risiko terkait Bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan Baik Risiko bagi Perusahaan maupun Pemangku Kepentingan

Setiap kegiatan pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan telah melalui analisa dan kajian yang komprehensif termasuk di dalamnya kajian risiko baik terhadap Perusahaan sendiri maupun terhadap para pemangku kepentingan.

Information on Risk related to the Social and Community Development Sector, Both for Companies and Stakeholders

Every decision making and implementation of activities in the field of social and community development has been through a comprehensive analysis and study, including a risk assessment both of the Company itself and of its stakeholders.

Informasi Ekspektasi Pemangku Kepentingan tentang Peran Perusahaan dalam Penanganan Isu Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Kelompok kepentingan PLN antara lain meliputi masyarakat setempat, pemerintah pusat dan

Information on Stakeholder Expectations regarding the Role of the Company in Handling Social and Community Development Issues

PLN's groups of stakeholders include the community, the central government and

daerah, Kementerian BUMN, dan Legislatif. Ekspektasi pemangku kepentingan disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi berdasarkan karakteristik masing-masing kelompok pemangku kepentingan. Harapan dari masyarakat sekitar unit-unit PLN umumnya disampaikan melalui proporsal yang akan ditindaklanjuti secara langsung atau berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk sinkronisasi dengan program pembangunan melalui forum Musrenbang.

Dalam menangani isu pengembangan sosial dan kemasyarakatan, pada prinsipnya bantuan PLN bersifat stimulan, bertujuan membangkitkan pemberdayaan masyarakat dengan mendorong potensi ekonomi yang mereka miliki melalui program-program pelatihan, pendampingan dan membuka saluran pemasaran produk sehingga penerima manfaat menjadi lebih mandiri. Beberapa program CSR PLN juga membantu merevitalisasi potensi pariwisata daerah setempat sehingga mendorong munculnya peluang-peluang ekonomi baru.

PERENCANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Target/Rencana Kegiatan pada Tahun 2019 yang Ditetapkan Manajemen

Sebagai BUMN, PLN berkewajiban melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang mempunyai dasar hukum sebagai berikut:

a. Peraturan Menteri (Permen) BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Permen ini menggantikan Permen BUMN sebelumnya perihal yang sama.
b. Permen BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Perubahan atas Permen BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 16 Desember 2016.
c. Permen BUMN No. Per-02/MBU/07/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Perubahan atas Permen BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 16 Desember 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permen No. PER-09/

regional governments, the SOE Ministry, and the Legislature. Stakeholder expectations are conveyed through various communication channels based on the characteristics of each stakeholder group. Expectations from the community around PLN units are generally conveyed through proposals that will be followed up directly, or through coordination with local governments to be synchronized with the development program through the Musrenbang forum.

In dealing with social and community development issues, in principle PLN's assistance is stimulant, aimed at generating community empowerment by encouraging their economic potential through training programs, mentoring and opening product marketing channels so that beneficiaries become more independent. Several of PLN's CSR programs have also helped revitalize the tourism potential of the local area so as to encourage the emergence of new economic opportunities.

SOCIAL RESPONSIBILITY PLANNING IN SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

Targets/Activity Plans for 2019 Set by the Management

As an SOE, PLN is obliged to implement the Partnership and Community Development Program (PKBL) which has the following legal basis:

a. Minister of SOE Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 dated 3 July 2015 concerning the Partnership Program of State-Owned Enterprises with Small Businesses and the Community Development Program. This regulation replaces the previous Minister of SOE Regulation regarding the same.
b. Minister of SOE Regulation No. PER-03/MBU/12/2016 dated 16 December 2016 concerning Amendment to Minister of SOE Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 dated 16 December 2016.
c. Minister of SOE Regulation No. Per-02/MBU/07/2017 dated July 5, 2017 concerning Amendments to the Minister of SOE Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 dated 16 December 2016 concerning the Second

MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN.

Amendment to Ministerial Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 concerning BUMN Partnership and Community Development Program.

Petunjuk pelaksanaan PKBL diatur di dalam Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 135.P/DIR/2019 tanggal 28 Agustus 2019 tentang *Standard Operation Procedure* (SOP) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di Lingkungan PT PLN (Persero), serta Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0138.P/DIR/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Pedoman Corporate Social Responsibility (CSR) Berbasis ISO 26000.

The instructions for implementing PKBL are regulated in the Regulation of the Directors of PT PLN (Persero) No. 135.P/DIR/2019 dated 28 August 2019 concerning Standard Operation Procedure (SOP) of the Partnership and Community Development Program (PKBL) within PT PLN (Persero), as well as PT PLN (Persero) Board of Directors' Regulation No. 0138.P/DIR/2019 dated 29 August 2019 concerning Guidelines for ISO 26000 Based Corporate Social Responsibility (CSR).

Sumber dana program PKBL tahun 2019 dianggarkan berdasarkan:

1. Risalah RUPS Pengesahan RKAP No.RIS-07/D2.MBU/01/2019, tanggal 07 Januari 2019, perihal Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2019.

2. Risalah Rapat Rencana Kerja dan Anggaran PKBL Tahun 2019, No. RIS-68/D7.MBU.3/12/2018, tanggal 15 November 2018, menyatakan bahwa mengusulkan alokasi dana baru ditambah dengan saldo dana tersedia di awal tahun, sedangkan untuk PK tidak ada alokasi tambahan dana.

The funding sources for the 2019 PKBL program are based on:

1. Minutes of RUPS for RKAP Ratification No.RIS-07/D2.MBU/01/2019, dated January 7, 2019, concerning Ratification of the Work Plan and Budget of the Company (RKAP) in 2019.
2. Minutes of PKBL Work Plan and Budget Meeting 2019, No. RIS-68/D7.MBU.3/12/2018, dated 15 November 2018, stated that proposing the allocation of new funds plus the balance of funds available at the beginning of the year, whereas for PK there was no additional allocation of funds.

Sumber dana TJSL berasal dari anggaran operasional Perusahaan, sehingga prosedur perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya sama dengan proses perusahaan yang lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator keberhasilan program bukan dinilai dari besaran penyerapan anggaran tetapi berdasarkan indikator keberhasilan berdasarkan perhitungan yang telah ditetapkan. Rencana anggaran TJSL tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp200 miliar dengan realisasi sebesar Rp179,65 miliar untuk melaksanakan program TJSL terutama di wilayah sekitar unit pembangkitan, penyaluran, transmisi, proyek kelistrikan dan unit jasa.

The source of TJSL funds comes from the Company's operational budget, so the planning, budgeting, implementation and accountability procedures are the same as other company processes in accordance with applicable regulations. Indicators of program success are not judged by the amount of budget absorption but based on indicators of success based on predetermined calculations. The TJSL budget plan for 2019 is set at Rp200 billion with the realization of Rp179.65 billion to implement the TJSL program, especially in the areas around the power generation, distribution, transmission, electricity projects and service units.

Informasi Deskripsi yang Mencerminkan Upaya Menurunkan Dampak Operasional Perusahaan pada Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Program CSR Perusahaan di bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan terutama ditujukan kepada masyarakat di sekitar unit-unit PLN terutama kelompok masyarakat terdekat yang terdampak langsung kegiatan operasional Perusahaan. Upaya menurunkan dampak operasional Perusahaan dilakukan melalui pelaksanaan program CSR yang terdiri dari Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan dan Program TJSL. Alokasi anggaran program disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Informasi Deskripsi Upaya Menciptakan Manfaat Bersama Tanggung Jawab Sosial di Bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan bagi Pemangku Kepentingan

Program Kemitraan (PK) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar menjadi wirausaha yang tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana Program Kemitraan yang sudah dialokasikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PKBL setiap tahunnya. PK menyalurkan dana dalam bentuk:

1. Pinjaman modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan,
2. Pinjaman tambahan untuk menambah modal kerja jangka pendek untuk memenuhi pesanan yang diterima oleh mitra binaan,
3. Beban Pembinaan, yang hanya dapat digunakan kepada atau untuk kepentingan mitra binaan:
   a. Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas mitra binaan serta untuk kegiatan pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan PK.
   b. Untuk dana hibah yang besarnya maksimal 20% dari dana PK yang disalurkan pada tahun berjalan.

Information on Description Reflecting Efforts to Reduce the Impact of Company Operations on Social and Community Development

The Company's CSR program in the field of social and community development is primarily aimed at the communities surrounding the PLN units, especially the nearest community groups directly affected by the Company's operational activities. Efforts to reduce the impact of the Company's operations are carried out through the implementation of CSR programs consisting of the Partnership Program, Community Development Program and TJSL Program. The program budget allocation is adjusted to the applicable regulations.

Information on Description of Efforts to Create Joint Social Responsibility Benefits in the Field of Social and Community Development for Stakeholders

The Partnership Program aims to improve the ability of micro, small and medium enterprises (MSMEs) to become strong and independent entrepreneurs through the utilization of Partnership Program funds that have been allocated in the PKBL Work and Budget Plan (RKA) each year. PK channeled funds in the form of:

1. Working capital loans and/or fixed asset purchases in order to increase production and sales,
2. Additional loans to increase short-term working capital to fulfill orders received by the fostered partners,
3. Development Charges, which can only be used to or for the interests of the fostered partners:
   a. To finance education, training, apprenticeship, marketing, promotion and other matters relating to increasing the productivity of fostered partners and for assessment/research activities related to PK.
   b. For grant funds, a maximum of 20% of the PK funds channeled in the current year.

Sedangkan pelaksanaan kegiatan program Bina Lingkungan ditujukan untuk 7 sektor bantuan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Bantuan bencana alam untuk tanggap darurat bagi korban kerusuhan di Wamena, pemasangan instalasi listrik pada rumah hunian sementara korban banjir di desa sumur Pandeglang Banten, korban dampak asap Riau, korban bencana alam di Bengkulu, korban bencana banjir di Lebak, korban bencana alam gempa bumi Halmahera Selatan tahap 2 dan korban gempa di provinsi Maluku.

2. Bantuan pelestarian alam/peduli lingkungan untuk program pemulihan daerah aliran sungai (DAS) Lokomboro, pembuatan taman listrik, pembangunan bank sampah dan pengelolaan sampah berbasis komunitas, pengembangan konservasi penyu lascar di *Turtle Camp Vessel,* dan program Sekolah Sungai.

3. Bantuan pendidikan dan pelatihan untuk pembangunan sarana dan prasarana aula pondok pesantren Aqidah Usymuni, pembangunan laboratoriun *citizenship* FISIPOL UGM, pemeriksaan instalasi dan pemasangan *grounding* untuk lembaga pendidikan non-komersial, serta pengembangan prasarana dan sarana kampus STITEK Bilik Diwa.
4. Bantuan pengembangan sarana umum untuk pembangunan *skatepark* terbuka hijau pada taman pintar Banjarbaru, program ruang terbuka ramah keluarga dan anak, dan bantuan 5 unit halte koridor 4 jalan *by pass* kota Padang.
5. Bantuan peningkatan kesehatan untuk program bantuan penanganan *stunting* dan gizi buruk di daerah perbatasan, pembuatan MCK untuk masyarakat di Aceh, mobil ambulans, dan pembangunan sarana air bersih.
6. Bantuan sarana ibadah dan kegiatan keagamaan untuk program bingkisan Ramadhan, toilet dan tempat wudhu MAN Insan Cendekia di Padang, perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, pembangunan rumah ibadah (di Aceh, Sumbar, Riau, Banten, Jawa Barat, Bali, Sulawesi Tengah, dan Papua), dan bantuan sarana ibadah lainnya.

The activities of the Community Development program are aimed at 7 sectors with the following activities:

1. Natural disaster assistance, for emergency response for victims of riots in Wamena, installation of electricity installations in temporary residential houses for flood victims in Sumur Pandeglang village, Banten, victims of smoke disasters in Riau, victims of natural disasters in Bengkulu, victims of floods in Lebak, victims the second phase of the South Halmahera earthquake disaster and earthquake victims in Maluku province.
2. Assistance for nature conservation/ environmental care for the Lokomboro watershed recovery program (DAS), the creation of an electric park, construction of a garbage bank and community-based waste management, development of the conservation of sea turtles in the Turtle Camp Vessel, and the River School program.
3. Educational assistance and training for the construction of facilities and infrastructure of the Aqidah Usymuni boarding school hall, the construction of the UGM FISIPOL citizenship laboratory, inspection of the installation and installation of grounding for non-commercial educational institutions, and the development of infrastructure and facilities at the STITEK Bilik Diwa campus.
4. Assistance for the development of public facilities for the construction of a green open skatepark at the Banjarbaru smart park, a family and child friendly open space program, and the assistance of 5 units of corridor shelter 4 streets by pass city of Padang.
5. Assistance for health improvement for assistance in handling stunting and malnutrition programs in the border areas, building public toilets in Aceh, ambulances, and building clean water facilities.

6. Assistance for religious facilities and religious activities for the Ramadan gift program, toilets and places of ablution in MAN Insan Scholar in Padang, Christmas celebration 2019 and New Year 2020, construction of houses of worship (in Aceh, West Sumatra, Riau, Banten, West Java, Bali, Central Sulawesi and Papua), and other religious facilities assistance.

7. Bantuan sosial dan pengetasan kemiskinan untuk program sambung listrik gratis bagi rumah tangga kurang mampu sebanyak 2.000 rumah di kabupaten Sumenep dan Provinsi NTT, berbagi bingkisan Ramadhan, hewan kurban hari raya Idul Adha 1440 H sebanyak 35 ekor sapi, bedah rumah IKPLN tahun 2019, dan berbagi sembako.

Program TJSL dilaksanakan terutama di wilayah sekitar unit pembangkitan, penyaluran, transmisi, proyek kelistrikan dan unit jasa (*Ring* 1). Pada tahun 2019, kegiatan CSR yang dilaksanakan di antaranya adalah:

1. Program pelestarian terumbu karang Dusun Sebalang dan pelatihan Desa Mandiri Energi di Yayasan RE, serta bantuan pelestarian alam lainnya.
2. Program sosial dan pengetasan kemiskinan berupa pengadaan barang atau jasa program mudik PLN 2019, Sembako PLN, Yayasan BUMN Hadir untuk negri 2019 dan BUMN Peduli, serta kegiatan lainnya.
3. Program bantuan bencana alam berupa perumahan tahan gempa di NTB dan bantuan bencana tsunami di Selat Sunda Banten serta kegiatan lainnya.
4. Program pendidikan/pelatihan berupa beasiswa pendidikan D3 untuk warga asli Papua, pengembangan inkubator bisnis Universitas Pattimura, pembangunan SMK Yay Mahisa Agni Yogyakarta, pendidikan vokasi, magang bersertifikat serta kegiatan lainnya.
5. Program peningkatan kesehatan berupa bantuan mobil ambulans sebanyak 6 unit, pembuatan gedung Posyandu di desa Sumur Adem dan mengadakan cek kesehatan gratis serta kegiatan lainnya.
6. Program pengembangan sarana umum berupa pembuatan fasilitas Universitas Muhamadiyah, pembangunan Masjid Mariliyyah Islamic Center di UGM, pembuatan Masjid Sriwedari di Surakarta serta kegiatan lainnya.

Informasi Mengenai Mekanisme dan Prosedur Pengaduan dan Menghadapi Konflik dengan Masyarakat

PLN memiliki saluran komunikasi untuk menerima berbagai pengaduan dan keluhan masyarakat

7. Social assistance and poverty alleviation for the free electricity connection program for 2,000 underprivileged households in Sumenep district and NTT Province, sharing Ramadan gifts, 35 Eid al-Adha 1440 H sacrifices, 35 cows, IKPLN house renovation in 2019, and distribution of staple foods.

The TJSL program is carried out mainly in the area around the generation, distribution, transmission, electricity projects and service units (Ring 1) units. In 2019, the CSR activities carried out by the Company include:

1. Coral reef conservation program in Sebalang Village and training for Energy Independent Villages at RE Foundation, as well as assistance for other nature conservation activities.
2. Social programs and poverty alleviation through procurement of goods, or PLN homecoming program in 2019, PLN's main staples, 'BUMN Hadir untuk Negeri 2019' Foundation and SOE Care, and other activities.
3. Natural disaster relief program in the form of earthquake resistant housing in NTB and tsunami disaster assistance in the Sunda Strait of Banten and other activities.
4. Education/training programs in the form of D3 education scholarships for indigenous Papuans, the development of Pattimura University business incubator, the construction of Yay Mahisa Agni Yogyakarta Vocational School, vocational education, certified apprenticeships and other activities.
5. Health improvement program in the form of donating 6 ambulance units, building a Posyandu building in the Sumur Adem village and conducting free health checks and other activities.
6. Public facilities development program, in the form of Muhamadiyah University facilities, construction of the Mariliyyah Islamic Center mosque at UGM, construction of the Sriwedari mosque in Surakarta and other activities.

Information Regarding the Mechanism and Procedure for Complaints and Conflict with the Community

PLN has a communication channel to receive various complaints and grievances from the

terkait seluruh aspek kinerja Perusahaan melalui "Call Centre PLN 123", email: pln123@pln.co.id, website: www.pln.co.id, Twitter: @pln_123, Facebook: PLN 123, dan aplikasi PLN Mobile.

public regarding the Company's performance through the "PLN Call Center 123", email: pln123@pln.co.id, website: www.pln.co.id, Twitter: @pln_123, Facebook: PLN 123, and the PLN Mobile application.

Informasi mengenai Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Berbagai Kegiatan Pengembangan Masyarakat

PLN memiliki beberapa kelompok pemangku kepentingan yang berpengaruh dominan terhadap keberlanjutan usaha Perusahaan. Untuk itu, PLN melakukan identifikasi dan analisis yang seksama agar dapat mengelola pelibatan pemangku kepentingan secara optimal. Secara berkala, PLN menyelenggarakan dialog dan menjalin komunikasi sesuai dengan karakteristik dan harapan yang melekat pada masing-masing kelompok pemangku kepentingan tersebut. Prinsip PLN dalam pengelolaan pemangku kepentingan adalah menghormati hak pemangku kepentingan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian yang dibuat oleh PLN dengan setiap kelompok pemangku kepentingan seperti: pegawai, pelanggan, mitra kerja, kreditur, masyarakat sekitar unit bisnis, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

Information Regarding Stakeholder Engagement in Various Community Development Activities

PLN has several stakeholder groups that have a dominant influence on the sustainability of the Company's business. For this reason, PLN conducts careful identification and analysis in order to optimally manage stakeholder engagement. Periodically, PLN conducts dialogues and establishes communication in accordance with the characteristics and expectations inherent in each of the stakeholder groups. The principle of PLN in managing stakeholders is to respect the rights of stakeholders based on laws and regulations and/or agreements made by PLN with each stakeholder group such as employees, customers, business partners, creditors, communities surrounding the business unit, and parties other interests.

Upaya Perusahaan dengan Memanfaatkan Pengaruh Perusahaan untuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial di Bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Dalam pelaksanaan Program Sambungan Listrik Gratis, PLN mengajak kontraktor/instalatir setempat untuk berpartisipasi. Keberhasilan program elektrifikasi di berbagai wilayah terpencil tidak akan tercapai tanpa kontribusi mitra kerja PLN setempat yang telah bersedia untuk bekerja sama. sebaliknya, PLN memberikan pembinaan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di daerah agar memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagai mitra kerja PLN.

Company Efforts by Utilizing Company Influence for the Implementation of Social Responsibility in the Field of Social and Community Development

In implementing the Free Electricity Connection Program, PLN invites local contractors/installers to participate. The success of the electrification program in various remote areas would not have been achieved without the contribution of local PLN partners who were willing to work together. on the contrary, PLN provides coaching for small and medium enterprises (SMEs) in the regions to meet their qualifications and competencies as PLN's working partners.

Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Perusahaan terkait Inisiatif CSR

Pada tahun 2019, Perusahaan merealisasikan biaya tanggung jawab sosial di bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan dalam 3 bentuk, yaitu:

Information Regarding Expenses Incured by the Company Regarding CSR Initiatives

In 2019, the costs incurred by the Company for social responsibility activities in the field of social and community development in 3 forms, namely:

A. Program TJSL

Rencana anggaran TJSL tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp200 miliar dengan realisasi sebesar Rp179,65 miliar untuk melaksanakan program TJSL terutama di wilayah sekitar unit pembangkitan, penyaluran, transmisi, proyek kelistrikan dan unit jasa. Perincian biaya program per sektor adalah sebagai berikut:

A. TJSL Program

The TJSL budget plan for 2019 is set at Rp200 billion with the realization of Rp179.65 billion to implement the TJSL program, especially in the area around the power generation, distribution, transmission, electricity projects and service units. The breakdown of program costs per sector is as follows:

No	**Sektor** Sector	**Realisasi 2019** 2019 Realization **(Rp)**
1	Bantuan Pelestarian Alam/Peduli Lingkungan | Assistance for the preservation of Nature	5.402.215.450
2	Bantuan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan | Assistance for Social Community and Poverty Eradication	52.231.408.139
3	Bantuan Bencana Alam | Assistance for victims of Natural Disasters	1.988.146.448
4	Bantuan Pendidikan/Pelatihan | Assistance for Education/Training	48.427.082.635
5	Bantuan Peningkatan Kesehatan | Assistance for Health Improvement	5.669.925.200
6	Bantuan Pengembangan Sarana Umum | Assistance for public Facility Development	32.830.058.433
7	Bantuan Sarana Ibadah dan Kegiatan Keagamaan | Assistance for Place of Worship and Religious Acticities	30.225.909.168
8	Administrasi dan Operasional | Administration and Operation Fee	2.879.870.030
Jumlah | Total		179.654.615.503

B. Program Kemitraan

Penyaluran dana PK tahun 2019 berdasarkan bidang usaha mitra binaan adalah sebagai berikut:

B. Partnership Program

The distribution of PK funds in 2019 based on the business of the fostered partners is as follows:

Bidang Usaha Line of Business	**Realisasi 2019** 2019 Realization **(Rp)**
Industri | Industry	248.274.000
Perdagangan | Commerce	171.073.000
Jasa | Service	60.000.000
Perikanan | Fisheries	15.000.000
Penyaluran melalui BUMN Khusus | Distribution through special SOE	35.100.000.000
Penyaluran Dana Pembinaan (Hibah) | Distribution of Development Funds (Grants)	95.250.000
Jumlah | Total	35.689.597.000

C. Program Bina Lingkungan

Berdasarkan Risalah RUPS PT PLN (Persero) No. RIS-68/D7.MBU.3/12/2018 tanggal 15 November 2018, alokasi anggaran Program Bina Lingkungan adalah sebesar Rp60 miliar. Realisasi program Bina Lingkungan tahun 2019 berdasarkan sektor bantuan adalah sebagai berikut:

C. Environmental Development Program

Based on the GMS of PT PLN (Persero) No. RIS-68/D7.MBU.3/12/2018 dated 15 November 2018, the budget allocation for the Community Development Program is Rp60 billion. The realization of the Community Development Program in 2019 based on the aid sector is as follows:

No	Sektor Sector	Realisasi 2019 2019 Realization (Rp)
1	Bantuan Bencana Alam | Assistance for victims of natural disaster	1.945.375.840
2	Bantuan Pelestarian Alam/Peduli Lingkungan | Assistance for the Preservation of Nature	7.431.878.200
3	Bantuan Pendidikan/Pelatihan | Assistance for Education/Training	8.022.661.853
4	Bantuan Pengembangan Sarana Umum | Assistance for Public Infrastructure	14.052.802.605
5	Bantuan Peningkatan Kesehatan | Assistance for Health Improvement	1.835.670.000
6	Bantuan Sarana Ibadah dan Kegiatan Keagamaan | Assistance for Place of Worship and Religious Activity	7.161.646.740
7	Bantuan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan | Assistance for Social Community and Poverty Eradication	20.125.884.632
Jumlah | Total		60.575.819.870

URAIAN MENGENAI PELAKSANAAN KEGIATAN CSR TERKAIT PELIBATAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Informasi mengenai Keterlibatan Manajemen dalam Me*review* dan Meningkatkan Kredibilitas Inisiatif dan Laporan CSR

Dalam melaksanakan program CSR berbasis ISO 26000 yang melibatkan lintas divisi, PLN mengeluarkan Perdir No. 0138.P/DIR/2019 yang mengamanatkan untuk membentuk komite koordinasi di bawah kendali Direktur HCM yang ditetapkan oleh Direktur Utama. Hal ini menunjukkan keterlibatan manajemen hingga ke level Kepala Divisi hingga Direksi untuk memastikan kualitas program CSR dan kredibilitas pelaporannya.

Keterlibatan manajemen dalam kegiatan CSR dimulai sejak pengajuan rencana kerja dan anggaran (RKA) CSR dan PKBL untuk dibahas bersama Kementerian BUMN yang dihadiri oleh Direktur HCM. Selanjutnya setelah pelaksanaan kegiatan, laporan kegiatan diaudit dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Divisi Corporate Communication dan CSR ke Kementerian BUMN. Direktur HCM akan hadir di dalam rapat evaluasi dan pertanggungjawaban tersebut.

Informasi Keterlibatan dan Pelibatan Pemangku Kepentingan Relevan dalam Inisiatif CSR Perusahaan

PLN memiliki berbagai kelompok pemangku kepentingan yang berpengaruh dominan terhadap keberlanjutan usaha Perusahaan. Untuk itu, PLN melakukan identifikasi dan analisis yang seksama agar dapat mengelola pelibatan pemangku kepentingan secara optimal.

DESCRIPTION OF THE IMPLEMENTATION OF CSR ACTIVITIES IN RELATION WITH COMMUNITY ENGAGEMENT AND DEVELOPMENT

Information on the management engagement in reviewing and improving the credibility of initiatives and CSR reports

In implementing the ISO 26000-based CSR programs that engage cross-divisions, PLN issued BoD Decree No.0138.P/DIR/2019, mandating that a coordinating committee under the HCM Director shall be established. This shows the engagement of management up to Division Head or even BoD levels to ensure the quality of CSR programs and the credibility of their reporting.

Management engagement in CSR activities begins when CSR and PKBL work plans and budgets (RKA) are proposed to be discussed with the Ministry of SOEs with HCM Director present as the Company's rep. After all activities are completed, the activity report will be audited and accounted for by the Head of the Corporate Communication and CSR Division to the Ministry of SOEs. The HCM Director will be present at the evaluation and accountability meeting.

Relevant Information on Stakeholder Engagement and Shareholder-Engaging information in the Company's CSR initiatives

PLN has various stakeholder groups that have a dominant influence on its business sustainability. For this reason, PLN makes careful identification and analysis in order to optimally manage stakeholder engagement.

Secara berkala, PLN menyelenggarakan dialog dan menjalin komunikasi sesuai dengan karakteristik dan harapan yang melekat pada masing-masing kelompok pemangku kepentingan tersebut. Prinsip PLN dalam pengelolaan pemangku kepentingan adalah menghormati hak pemangku kepentingan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian yang dibuat oleh PLN dengan setiap kelompok pemangku kepentingan seperti: pegawai, pelanggan, mitra kerja, kreditur, masyarakat sekitar unit bisnis, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

Informasi Tentang Upaya Pelibatan Direksi/Manajemen/Pegawai dalam Kegiatan Tanggung Jawab Sosial

Pada tahun 2019, insan PLN dan anak perusahaan sepakat mengusung gerakan sosial menggalang dana sukarela untuk membantu biaya pasang baru listrik bagi keluarga tidak mampu. Gerakan ini diberi nama OMOH *(One Man One Hope)*, yang menggambarkan keinginan setiap insan PLN untuk mewujudkan harapan para keluarga Indonesia yang ingin menikmati listrik namun tidak mampu membayar biaya penyambungan listrik.

Hingga akhir tahun 2019, dana yang telah terkumpul mencapai Rp5,56 miliar yang digunakan untuk membiayai pasang baru listrik daya 450 VA bagi 7.571 rumah tangga. Sebarannya meliputi 2.836 rumah tangga di Sumatera, 2.829 rumah tangga di Jawa, 1.374 rumah tangga di Bali dan Nusa Tenggara, 188 rumah tangga di Kalimantan, 205 rumah tangga di Sulawesi, dan 139 rumah tangga di Maluku dan Papua. Proses penyambungan listrik masih terus bergulir, sebanyak 2.380 rumah tangga di seluruh Indonesia saat ini telah menikmati listrik dari program OMOH, dan 5.191 rumah tangga masih dalam proses penyambungan. Penerimaan donasi program OMOH masih terus dilakukan hingga 31 Oktober 2020 melalui aplikasi LinkAJA.

Periodically, PLN holds dialogues and makes communication in accordance with the characteristics and expectations inherent in each of the stakeholder groups. PLN holds the principle that in managing stakeholders, it must respect the rights of all stakeholder groups based on laws and regulations or on agreements entered into by PLN and each of the groups i.e. employees, customers, business partners, creditors, the communities near its business units, and all other groups

Information on efforts to Engage BoD members/the management/employees in social responsibility activities

In 2019, the employees of both PLN and its subsidiaries agreed to raise social movement voluntary funds to help poor families pay electricity installation costs. This movement was named OMOH (One Man One Hope), which illustrates the desire of every PLN employee to realize the hope of Indonesian families who seek the convenience of using electricity but still cannot afford the installation cost.

By year-end 2019, PLN had raised Rp.5.56 billion to pay for new electricity installations of 450 VA for 7,571 households. This fund will be allocated to help 2,836 households in Sumatra, 2,829 in Java, 1,374 in Bali and Nusa Tenggara, 188 in Kalimantan, 205 in Sulawesi, and 139 in Maluku and Papua. The electricity connection is still in process where 2,380 households across Indonesia have enjoyed the convenience of using electricity thanks to the OMOH program, while the connection process for the remaining 5,191 households is still in the process. The OMOH program is still accepting donations through the LinkAJA application, and will be closed on October 31, 2020.

CAPAIAN INSIATIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN BIDANG PELIBATAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL

Informasi Berbagai Capaian Inisiatif CSR Bidang Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat

PLN memiliki sejumlah program andalan dalam rangka mewujudkan komitmen melayani masyarakat. Setiap unit PLN melaksanakan program tanggung jawab sosial unggulan yang antara lain berupa program penyambungan listrik gratis bagi masyarakat pra-sejahtera dan warga wilayah 3T, pengelolaan sampah menjadi bernilai ekonomi, pemberdayaan potensi ekonomi desa, konservasi flora dan fauna, pendidikan vokasi, dan sebagainya.

A. Penyambungan listrik gratis di 6 Unit Induk Distribusi (UID) kepada 27.158 KK.
B. Program pengelolaan sampah di 6 Unit Induk.
C. Program pemberdayaan desa wisata, desa unggulan dan produk di 16 Unit Induk.
D. Program konservasi flora dan fauna di 3 Unit Induk.
E. Program pendidikan dan edukasi
F. Program sekolah sungai di 4 Unit Induk
G. Kepesertaan PLN dalam Program BUMN untuk Negeri dan Rumah Kreatif BUMN

Capaian Memberikan Gambaran Manfaat untuk Perusahaan Baik Langsung atau Tidak Langsung sebagai Bentuk Tanggung Jawab Pelaksanaan CSR kepada Pemegang Saham

Salah satu target menantang yang dihadapi PLN adalah mencapai target Rasio Elektrifikasi (RE) 100% di 2020 adalah melistriki wilayah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) yang tidak terjangkau jaringan listrik (*grid*), terutama di wilayah kepulauan. Tetapi PLN tetap menjalankan komitmennya untuk membangun dan menghadirkan infrastruktur kelistrikan hingga ke pelosok negeri untuk membantu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia. Pada tahun 2019, PLN mengoptimalkan potensi sumber energi lokal dengan membangun pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) di berbagai wilayah seperti Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) dan Pembangkit

ACHIEVEMENTS OF INITIATIVES IN ENVIRONMENTAL SOCIAL RESPONSIBILITY IN SOCIAL ENGAGEMENT AND DEVELOPMENT ASPECTS

Information on the many Achievements of CSR initiatives in Community Engagement and Development Aspects

PLN has many excellent programs to realize its commitment to serving the community. Each PLN unit runs leading social responsibility programs which include free electricity connection for underprivileged people and 3T residents, the management of waste into salable items, the empowerment of economic potentials of villages, flora and fauna conservation, vocational education, and many other.

A. Penyambungan listrik gratis di 6 Unit Induk Distribusi (UID) kepada 27.158 KK.
B. Program pengelolaan sampah di 6 Unit Induk.
C. Program pemberdayaan desa wisata, desa unggulan dan produk di 16 Unit Induk.
D. Program konservasi flora dan fauna di 3 Unit Induk.
E. Program pendidikan dan edukasi
F. Program sekolah sungai di 4 Unit Induk
G. Kepesertaan PLN dalam Program BUMN untuk Negeri dan Rumah Kreatif BUMN

Achievements that Provide a Description of Benefits for the Company, Either Directly or Indirectly, As A Form of Responsibility For Implementing CSR To Shareholders

One of the challenging targets faced by PLN is to reach the target of 100% Electrification Ratio (RE) in 2020, which is electrifying 3T areas (frontier, outermost and lagging) that are not reached by the grid (mainly), especially in the islands. But PLN continues to carry out its commitment to build and bring electricity infrastructure to all corners of the country to help improve the quality of life of the people of Indonesia. In 2019, PLN will optimize the potential of local energy sources by building new renewable energy-based power plants (EBT) in various regions such as Minihydro Power Plants (PLTMH), Biomass Power Plants (PLTBm) and Communal Solar Power Plants (PLTS). In addition, PLN also provides free electricity connection services (through

Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal. Selain itu, PLN juga memberikan layanan sambung listrik gratis (melalui program Sinergi BUMN, OMOH, atau CSR) sehingga masyarakat tidak mampu dapat segera menikmati daya listrik yang sudah tersedia.

the BUMN, OMOH, or CSR Synergy program) so that people are unable to immediately enjoy the available electricity.

Penghargaan di Bidang Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat yang Dimiliki

Pada tahun 2019, Perusahaan mendapat penghargaan atas pelaksanaan program CSR, yaitu:

Award in the Field of Community Engagement and Development

In 2019, the Company received an award for the implementation of CSR programs, namely:

Satuan Unit	**Nama Program** Program Name	**Kategori** Category
Indonesia Green (IGA) Award 2019		
PLN Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B PLN Parent Unit of Generation of Tanjung Jati B	Upaya pemanfaatan kotoran ternak melalui Program Biogas Tabung Dotuman Utilizing livestock dung through Dotuman Tube Biogas program	Eksekutif Milenium Millennium Executive
PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya PLN Parent Unit of Distribution of Jakarta Raya	*Power bank* energi biru Blue energy power bank	Mempelopori Pencegahan Polusi Pioneer on Pollution Prevention
PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur PLN Parent Unit of Distribution of East Java	Sampah plastik di tangan perempuan Plastic trash in women hands	Penanganan Sampah Plastik Plastic Waste Handling
PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah PLN Parent Unit of Distribution of Central Java	Menjaga air Siluk untuk kehidupan Preserving Siluk water for life	Penyelamatan Sumber Daya Air Water Resource Conservation
PLN Unit Induk Wilayah Bangka Belitung PLN Parent Unit of Region of Bangka Belitung	Program konversi BBM solar ke CPO pada PLTD Bangka Belitung Conversion of diesel fuel to CPO in Diesel Power Plant of Bangka Belitung	Mengembangkan Rekayasa Teknologi Energi Baru Developing New Energy Technology
PLN Unit Induk Wilayah Bangka Belitung PLN Parent Unit of Region of Bangka Belitung	Pengembangan teknologi PLTD hybrid PLTS untuk menghemat konsumsi BBM Developing Diesel Power Plant hybrid Solar Power Plant technology to reduce fuel consumption	Rekayasa Teknologi Dalam Menghemat Energi Technology in Energy Saving
PLN Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat PLN Parent Unit of Region of South, Southeast and West Sulawesi	Pengelolaan sampah terpadu "Karuwusi" "Karuwusi" integrated wast management	Pengelolaan Sampah Terpadu Integrated Waste Management
PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan PLN Parent Unit of Generation of Southern Part Sumatra	Mendulang asa di Sebalang Rising hope in Sebalang	Mengembangkan Keanekaragaman Hayati Developing Biodiversity
PLN Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B PLN Parent Unit of Generation of Tanjung Jati B	*Liquid biogas* Dotuman, solusi pencegah polusi Dotuman liquid biogas, solution of pollution prevention	Mempelopori Pencegahan Polusi Pioneer in Pollution Prevention

Satuan Unit	Nama Program Program Name	Kategori Category
Indonesia Sustainable Development Goals Award (ISDA) 2019		
PT PLN (Persero) Kantor Pusat PT PLN (Persero) Head Office		Grand Silver Grand Silver
PLN Pusdiklat PLN Center of Education and Training	Generasi penerus bangsa The lighters nation's generation	Platinum Kategori Tujuan 4 - Pendidikan Berkualitas Platinum in Category Goal 4 - Quality Education
PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta PLN Parent Unit of Distribution of Central Java and DI Yogyakarta	Geliat ekonomi di tepian Sungai Sengkarang Increasing economy on Sengkarang Riverside	Platinum Kategori Tujuan 8 - Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Platinum in Category Goal 8 - Decent Work and Economic Growth
PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur PLN Parent Unit of Distribution of East Java	Listrik untuk sang Naga Electricity for the Dragon	Platinum Kategori Tujuan 12 - Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan Platinum in Category Goal 12 – Responsible Consumption and Production
PLN Unit Induk Wilayah Bangka Belitung PLN Parent Unit of Region of Bangka Belitung	Program pengembangan Desa Wisata Terong Development program of Terong Tourism Village	Gold Kategori Tujuan 1 - Tanpa Kemiskinan Gold in Category Goal 1 - No Poverty
PLN UIT JBT PLN Parent Unit of Transmission of Central Part Java	Semangat belajar dari Gunung Suling The spirit of learning from Mount Suling	Gold Kategori Tujuan 4 - Pendidikan Berkualitas Gold in Category Goal 4 - Quality Education
PLN Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat|PLN Parent Unit of Region of South, Southeast and West Sulawesi	Air bersih untuk Rappolemba Gowa Clean water for Rappolemba Gowa	Gold Kategori Tujuan 6 - Air Bersih dan Sanitasi Layak Gold in Category Goal 6 - Clean Water and Sanitation
PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat PLN Parent Unit of West Nusa Tenggara	Kawasan wisata kreatif sampah Kebon Lelang Waste creative tourism Kebon Lelang	Gold Kategori Tujuan 11 - Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan Gold in Category Goal 11 - Sustainable Cities and Communities
PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan PLN Parent Unit of Generation of Southern Part Sumatra	Menjaga puspa langka di Bumi Raflesia Preserving rare flowes in Rafflesia Land	Gold Kategori Tujuan 15 - Ekosistem Daratan Gold in Category Goal 15 – Life on Land
PLN UID Jawa Barat PLN Parent Unit of Distribution of West Java	UKM Astana Hilir Mandiri Energi Small and Medium Enterprises Astana Hilir Mandiri Energi	Silver Kategori Tujuan 7 - Energi Bersih dan Terjangkau|Silver in Category Goal 7 – Affordable and Clean Energy

Program Tanggung Jawab Sosial Terkait Dengan Tanggung Jawab Kepada Konsumen

Customer-Oriented Social Responsibility Programs

KOMITMEN, KEBIJAKAN DAN DESKRIPSI LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL KEPADA KONSUMEN

Informasi Komitmen pada Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada Konsumen

Komitmen PLN untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Menjamin ketersediaan listrik yang berkualitas, bebas dari pemadaman dan gangguan penyaluran.
2. Menjamin akurasi pencatatan meter pemakaian dan perhitungan tagihan.
3. Memberikan pelayanan pelanggan dan menyelesaikan keluhan pelanggan dengan cepat dan akurat.

COMMITMENT, POLICY, AND SCOPE OF CUSTOMER-ORIENTED SOCIAL RESPONSIBILITY

Information on Customer-Oriented Corporate Social Responsibility Commitment

PLN's commitment to deliver the finest services to its customers is built on the following principles:

1. Guaranteeing reliable power supply free from power outages and transmission interruptions.
2. Guaranteeing accurate meter readings of power usage and billing calculations.
3. Providing customer services and resolving customer complaints in a fast and accurate manner.

4. Pengoptimalan upaya perbaikan citra perusahaan dan pembangunan *corporate brand* perusahaan.
5. Peningkatan keandalan pembangkit, transmisi dan distribusi untuk menekan SAIDI dan SAIFI.
6. Pemantauan terhadap angka penyambungan secara rutin.
7. Pengoptimalan penggunaan teknologi informasi guna mendukung *customer relationship management system*, perbaikan proses bisnis pelayanan pelanggan serta layanan korporat lainnya secara terpusat setara perusahaan sejenis kelas dunia.

PERUMUSAN LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KONSUMEN

Informasi bahwa Perusahaan Telah Melakukan Uji Tuntas terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Konsumen

Perusahaan melakukan uji tuntas terhadap tanggung jawab sosial di bidang konsumen melalu dua pendekatan, yaitu Survei Kepuasan Pelanggan (SKP) dan pengukuran Tingkat Mutu Pelayanan (TMP).

A. Survei Kepuasan Pelanggan

Survei Kepuasan Pelanggan (SKP) diselenggarakan secara berkala setiap tahun. SKO mengukur 7 parameter kepuasan pelanggan, yaitu:

1. Indeks Kepuasan Pelanggan,
2. Indeks Ketidakpuasan Pelanggan,
3. Indeks Loyalitas Pelanggan,
4. Indeks Keterikatan Pelanggan,
5. Indeks Kepedulian Pelanggan,
6. Indeks Efektivitas Pintu Layanan, dan
7. Indeks Kepuasan Pelanggan Relatif Terhadap Pesaing.

Hasil SKP menjadi acuan untuk memperbaiki kualitas layanan dan merumuskan program-program baru berdasarkan ekspektasi pelanggan. Sebaliknya, indeks efektivitas pintu layanan yang dapat menunjukkan seberapa besar tingkat efektivitas pintu layanan yang tersedia dan pintu layanan mana yang paling diminati pelanggan dapat digunakan sebagai sarana pemasaran yang

4. Optimizing efforts to improve corporate image and build the corporate brand.
5. Increasing the reliability of power plants, as well as transmission and distribution networks to reduce SAIDI and SAIFI.
6. Monitoring connection points on a regular basis.
7. Optimizing the use of information technology to support the customer relationship management system, improve business processes for customer and other corporate services in a centralized manner on par with world-class power companies.

DETERMINING THE SCOPE OF CUSTOMER-ORIENTED CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Information on the Company's Conduct of Due Diligence on Customer-Oriented Corporate Social Responsibility

The Company performs due diligence on customer-oriented social responsibility initiatives through two approaches: Customer Satisfaction Survei (CSS) and Service Quality Level (SQL).

A. Customer Satisfaction Survei

Customer Satisfaction Survei (CSS) is conducted on an annual basis. It measures 7 key parameters of customer satisfaction:

1. Customer Satisfaction Index,
2. Customer Dissatisfaction Index,
3. Customer Loyalty Index,
4. Customer Engagement Index,
5. Customer Care Index,
6. Contact Center Effectiveness Index, and
7. Customer Satisfaction Index Relative to Competitors.

CSS results inform service quality improvements and new program development based on customer expectation. On the other hand, the contact center effectiveness index that indicates the level of effectiveness of existing contact centers, and pinpoints which contact center is mostly preferred by customers, can be used as an effective marketing tool for reaching out to customers.

efektif dalam menjangkau pelanggan. Pada saat PLN meluncurkan produk layanan baru, dapat memanfaatkan pintu layanan yang paling disukai pelanggan tersebut untuk sosialisasi produk baru.

When launching a new service product, PLN can therefore take full advantage of the most preferred contact centers to build product awareness.

Hasil SKP tahun 2019 dan perbandingannya dengan SKP 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The results of the 2019 CSS in comparison to the survei in 2017 and 2018 are provided below:

No	Indeks Survei Survei Index	2017	Realisasi Realization		Keterangan Description
			2018	2019	
1	Indeks Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction Index	88,52%	89,16%	91,09%	1,93% Membaik Improved
2	Indeks Ketidakpuasan Pelanggan Customer Dissatisfaction Index	0,48%	0,23%	0,14%	0,09% Membaik Improved
3	Indeks Loyalitas Pelanggan Customer Loyalty Index	95,17%	90,29%	97,28%	6,99% Membaik Improved
4	Indeks Keterikatan Pelanggan Customer Engagement Index	96,06%	82,96%	92,36%	9,40% Membaik Improved
5	Indeks Kepedulian Pelanggan Customer Care Index	96,06%	90,29%	95,11%	4,82% Membaik Improved
6	Indeks Efektivitas Pintu Layanan (*contact center*) Index of Effectiveness of Service Doors	86,59%	88,50%	91,14%	2,64% Membaik Improved
7	Indeks Kepuasan Pelanggan Relatif terhadap Pesaing The Customer Satisfaction Index is Relative to Competitors	1,55	1,23	1,61	0,38 Membaik Improved

B. Tingkat Mutu Pelayanan

Pengukuran Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) bertujuan untuk memberikan jaminan kualitas layanan bagi pelanggan. Hasil pencapaian TMP menjadi dasar bagi PLN untuk menyusun strategi peningkatan keandalan layanan. Parameter pengukuran TMP adalah sebagai berikut:

1. Tegangan di titik pemakaian
2. Frekuensi di titik pemakaian
3. Lama gangguan yang dialami pelanggan
4. Kecepatan layanan Pasang Baru (PB) Tegangan Menengah (TM)
5. Kecepatan layanan Pasang Baru (PB) Tegangan Rendah (TR):
   - Dengan perluasan jaringan
   - Tanpa perluasan jaringan
   - Dengan penambahan Trafo
6. Kecepatan layanan Penyambungan Sementara (PD) Tegangan Menengah (TM)
7. Kecepatan layanan Penyambungan Sementara (PD) Tegangan Rendah (TR):

B. Service Quality Level

Measuring Service Quality Level (SQL) is necessary to provide quality assurance of services delivered to customers. SQL forms the basis for devising the right strategy that will allow PLN improve service reliability. The parameters for measuring SQL include the following:

1. Voltage at usage points
2. Frequency at usage points
3. Duration of interruption that customers experience
4. Speed of Medium-Voltage (MV) New Installation (NI) service
5. Speed of Low-Voltage (LV) New Installation (NI) service:
   - With network expansion
   - Without network expansion
   - With additional transformers
6. Speed of Medium-Voltage (MV) Temporary Connection (TC) service
7. Speed of Low-Voltage (LV) Temporary Connection (TC) service:

- Dengan perluasan jaringan
- Tanpa perluasan jaringan
- Dengan penambahan Trafo

8. Kecepatan menanggapi pengaduan gangguan
9. Kesalahan pembacaan kWh meter yang dialami pelanggan
10. Waktu koreksi kesalahan rekening

- With network expansion
- Without network expansion
- With additional transformers

8. Speed of response to complaints on power interruptions
9. Error in kWh meter reading that customers experience
10. Time needed to correct billing errors

Pendekatan yang Dilakukan dalam Mengenali dan Merumuskan Tanggung Jawab Sosial dan Pemangku Kepentingan Penting Perusahaan di Bidang Konsumen

Dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, PLN menggunakan pendekatan yang berbeda pada setiap kelompok pelanggan. Kelompok pelanggan rumah tangga, bisnis dan industri akan memiliki karakteristik kebutuhan spesifik masing-masing. Oleh karenanya, dengan program pemasaran yang berorientasi pelanggan, PLN secara proaktif menggali dan berupaya memahami rencana kebutuhan pelanggan atau calon pelanggan, untuk membantu membuat skema bisnis yang selaras dengan kebutuhan pelanggan.

Untuk kelompok pelanggan industri dan bisnis, PLN merancang program-program khusus untuk mengetahui, mengerti dan berusaha memenuhi kebutuhan spesifik mereka, seperti layanan premium untuk memberikan pasokan listrik yang andal, *account officer* untuk menyediakan kemudahan mendapatkan pelayanan listrik, akses informasi perbaikan jaringan listrik, akses keluhan pelanggan, kemudahan pembayaran tagihan dan sebagainya.

Untuk masyarakat tidak mampu, PLN merancang program penyambungan baru tanpa biaya agar mereka merasakan kehadiran listrik di rumahnya. Program penyambungan baru gratis dapat menggunakan berbagai skema pembiayaan, seperti program CSR, BUMN Peduli, dan program OMOH *(One Man One Hope)* yaitu program yang menghimpun donasi pegawai PLN untuk membiayai pemasangan listrik bagi masyarakat prasejahtera. Program lainnya yang memberikan kemudahan bagi kebutuhan pelanggan mencakup program diskon biaya penyambungan maupun tarif, program tabung listrik (Talis) untuk daerah-daerah terisolasi, dan sebagainya.

Approach to Understanding and Determining Customer-Oriented Social Responsibility and Company's Key Stakeholders

In delivering services to its customers, PLN adopts different approaches for different customer segments. The household, business and industrial segments each have specific characteristics and needs. In view of this, with a customer-oriented marketing program, PLN proactively learns to anticipate and identify the needs of current or prospective customers in order to develop a business scheme that caters to customer needs.

For its industrial and business customer segments, PLN has designed programs dedicated to understanding, identifying and meeting their specific needs, such as premium services offering reliable power supply, account officers for easy access to power services, access to information on power line repairs, access to customer complaints mechanisms, ease of bill payment, and others.

For low-income households, PLN offers new power connections for free so that they can also enjoy the use of these services in their homes. This free of charge connection scheme is made possible through various financing schemes, such as CSR programs, BUMN Peduli, and OMOH (One Man One Hope), an initiative that collects donations from PLN employees to finance power supply installations for underprivileged families. Other schemes that make it easier for customers to access electricity include connection fee and tariff discounts, *talis* or power bank program for isolated regions, and others.

- **Program One Man One Hope (OMOH)**
  Program OMOH adalah gerakan sosial korporasi berupa penggalangan donasi dari pegawai dan mengalokasikannya untuk penyambungan listrik bagi calon pelanggan golongan Rumah Tangga Miskin dan Tidak Mampu. Penggalangan dana dimulai pada 1 Agustus 2019 dengan dana terkumpul sebanyak Rp5.561.367.953. Seluruh dana tersebut telah mewujudkan harapan masyarakat untuk menikmati sambungan listrik sebanyak 7.572 rumah.

- **Program Terangi Negeri dan Program Lebih Nyaman**
  Program Terangi Negeri merupakan program promo pemberian diskon 50% Pasang Baru (PB) untuk pelanggan yang termasuk di dalam Basis Data Terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (BDT TNP2K) Kementerian Sosial dan masyarakat di wilayah 3T (berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri). Tujuan program adalah: 1) mendorong pertumbuhan ekonomi terutama untuk masyarakat tidak mampu yang belum mendapatkan sambungan listrik, 2) mempercepat pencapaian Rasio Elektrifikasi nasional 100%, 3) meningkatkan jumlah pelanggan baru, dan 4) meningkatkan kWh jual.

  Program Lebih Nyaman merupakan program promo pemberian diskon Rp52 khusus pelanggan tarif R1M (Rumah Tangga Mampu) 900 VA. Pelanggan R1M adalah pelanggan yang tidak masuk dalam BDT TNP2K sehingga tidak mendapatkan subsidi listrik. Tujuan program adalah: 1) sebagai insentif pencabutan subsidi untuk rumah tangga yang tidak masuk BDT TNP2K, 2) menurunkan BPP Fixed Cost, 3) meningkatkan kWh jual khususnya pelanggan golongan tarif R1 900 VA RTM (pertumbuhan negatif di tahun 2018), 4) meningkatkan pertumbuhan konsumsi energi listrik, dan 5) meningkatkan efisiensi pembangkit.

- **One Man One Hope (OMOH) Program**
  OMOH is a corporate social movement to collect donations from employees to be allocated for providing electricity connections to prospective customers who fall under the Poor and Underprivileged Household category. Since fundraising started on 1 August 2019, a total of Rp 5,561,367,953 in donations have been collected. From this fundraising initiative, some 7,572 homes now have electricity.

- ***Terangi Negeri* Program and *Lebih Nyaman* Program**
  Terangi Negeri Program is a 50% discount program for new installations for customers included in the Integrated Database of the National Team for Accelerating Poverty Eradication (BDT TNP2K) under the Ministry of Social Affairs, and for communities living in 3T (frontier, outermost, underdeveloped) regions (based on data from the Ministry of Home Affairs). The program aims to: 1) stimulate economic growth, especially for underprivileged communities with no access to electricity, 2) speed up the achievement of 100% electrification ratio nationwide, 3) increase the number of new customers, and 4) increase kWh sales.

  Lebih Nyaman Program is a Rp 52 discount program for non-subsidized 900 VA households (RTM). RTM are customers who are not included in the BDT TNP2K list, and therefore ineligible for power subsidy. The program aims to: 1) serve as incentive for households not included in the BDT TNP2K database where subsidy is removed, 2) reduce BPP Fixed Cost, 3) increase kWh sales, especially among customers who fall within the 900 VA RTM category (negative growth in 2018), 4) increase growth of energy consumption, and 5) increase power plant efficiency.

Pencapaian program promo diskon pada akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Milestones achieved in the discount programs by late 2019 are as follows:

Uraian Deskription	Program Terangi Negeri		Program Lebih Nyaman	
	2018	2019	2018	2019
Pelanggan Customer	713.086	1.233.642	20.869.109	22.155.640
KWh Jual KWh Sold		300.278.037	20.269.299.500	21.028.106.604
Pendapatan Revenue (Rp)		187.211.085.421	27.365.974.308.059	27.312.900.193.211

- **Program Tabung Listrik**
  Program tabung listrik (Talis) merupakan hasil kerja sama PLN dengan Universitas Indonesia (UI). Perangkat Talis dapat menyimpan daya listrik yang bisa digunakan masyarakat untuk menerangi rumah atau desanya. Sebuah Talis berbobot sekitar 5 kilogram bisa menampung daya listrik 300 watt hour (Wh) hingga 1.000 Wh. Penggunaannya pun cukup mudah, pemilik hanya tinggal memilih sistem AC atau DC dan tinggal menghubungkannya dengan kabel lampu. Jika daya listriknya sudah habis, pemilik bisa mengisi ulang di PLTS, mikrohidro, pikkohidro, PLTA atau pembangkit listrik biomassa.

  Program Talis diterapkan di daerah-daerah terisolasi yang belum memungkinkan dibangun infrastruktur jaringan listrik. Realisasi Talis sebanyak 212 buah (kapasitas 300 Wh sebanyak 146 unit dan 500 Wh sebanyak 66 unit) telah dibagikan di daerah terisolasi di Papua secara gratis melalui skema CSR.

- ***Tabung Listrik* Program**
  Tabung Listrik (*Talis*) Program is a joint initiative between PLN and the University of Indonesia (UI). The *talis* device can store electrical power that people can use to illuminate their homes or villages. A *talis* weighs 5 kilograms with the ability to contain 300 to 1,000 watt hours (Wh) of electrical power. It is also easy to use. The user only needs to choose between the AC or DC system before connecting the device to a light socket. If it runs out of power, the user can recharge the device at a PLTS, micro hydro generator, pico hydro generator, PLTA or biomass power plant.

  The *Talis* Program is rolled out to remote areas where the construction of an electrical network infrastructure may not be feasible at the moment. No less than 212 *talis* units (146 units with 300 Wh capacity and 66 units with 500 Wh) have been distributed to the remote areas of Papua for free through a CSR scheme.

Dampak Penting Langsung atau Tidak Langsung Aktivitas dan Keputusan Perusahaan pada Konsumen

Setiap kebijakan Perusahaan yang berkaitan dengan pelanggan menghasilkan berbagai dampak positif baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak penting dari kebijakan-kebijakan Perusahaan kepada pelanggan di antaranya adalah:

- Menjaga kualitas daya (*power quality*) bagi pelanggan khusus tidak hanya mencakup aspek keandalan sistem (kontinuitas pasokan), tetapi juga stabilitas tegangan (*power stability*) dengan mencegah risiko deviasi dan harmonisa frekuensi, tegangan turun (*voltage dip*), lonjakan tegangan (*voltage spike*)

Significant Direct or Indirect Impact of Corporate Activities and Decisions on Customers

Every corporate policy relating to customers has generated positive impacts both directly and indirectly. The significant impacts of corporate policies on customers include the following:

- Power quality is maintained for special customers, not only in regard to system reliability (supply continuity), but also voltage or power stability by preventing the risk of frequency deviation and harmonization, voltage dip, voltage spike, and others (impact on increasing service reliability and

dan sebagainya (dampak meningkatkan keandalan dan kualitas layanan, meningkatkan daya saing dan produktivitas industri).

- Menerapkan program Diskon Tarif di Luar Waktu Beban Puncak (LWBP) untuk industri. PLN memberikan diskon 30% untuk pemakaian listrik LWBP (jam 22.00-08.00) bagi pelanggan industri dengan kriteria tertentu (dampak meningkatkan daya saing dan produktivitas industri). Selain berdampak pada pelanggan, strategi program ini juga berdampak positif bagi PLN seperti meratakan pemakaian beban pelanggan dari WBP ke LWBP (dampak mengoptimalkan kapasitas pembangkit)dan mengoptimalkan pemakaian KWh pelanggan besar (dampak meningkatkan pendapatan).
- Memangkas prosedur pelayanan mendapatkan sambungan baru dari 4 langkah menjadi 2 langkah terutama untuk pelanggan segmen bisnis dan industri sampai dengan 100 kVA. Kebijakan ini merupakan strategi untuk meningkatkan indeks kemudahan mendapatkan listrik *(Getting Electricity)* sehingga mendukung kemudahan berinvestasi di Indonesia.
- Program Berhenti Sementara dan Program Turun Daya Sementara yang ditawarkan bagi pelanggan industri dan bisnis tegangan tinggi dan tegangan menengah yang sedang mengalami penurunan kinerja usaha. PLN memberikan keringanan untuk berhenti sementara atau turun daya sementara dan bila kondisi pelanggan sudah membaik dan ingin kembali ke daya semula hanya dikenakan biaya penyambungan antara 2-6% dari biaya BP standar (dampak membantu sektor usaha dan stabilitas perekonomian).
- Peraturan Direksi No. 0017 yang memberikan keringanan membayar biaya PB dan UJL (Uang Jaminan Langganan) secara mencicil tanpa bunga untuk semua segmen pelanggan yang mengajukan permohonan (dampak menjaga daya beli masyarakat).
- Program-program CSR yang telah dijelaskan sebelumnya yang menghasilkan dampak peningkatan Rasio Elektrifikasi dan mendorong perekonomian di daerah 3T dan terisolasi.

quality, and industry competitiveness and productivity).

- The launching of an Off-Peak Tariff Discount (LWBP) program for industrial customers. PLN offers 30% percent discount for off-peak usage (10 p.m. – 8 a.m.) for industrial customers that meet certain criteria (impact on increasing industry competitiveness and productivity). Apart from its impact on customers, the program also has a positive effect on PLN, such as the ability to even out and shift usage away from peak to off-peak hours (impact on optimizing power plant capacity) and to optimize kWh usage by big energy consumers (impact on increasing income).
- The procedure for getting electricity is simplified from 4 to 2 steps, especially for the business and industrial segments for up to 100 kVA. This is a strategy for increasing the Getting Electricity Index, and therefore facilitating ease of doing business in Indonesia.
- Temporary Disconnection Program and Temporary Downgrade Program are offered to high and medium voltage business and industrial customers experiencing a decline in their business performance. PLN provides relief for temporary disconnection or downgrade, and when businesses have come around and customers wish to return to the original electric power capacity they will only be charged a connection fee of 2-6% from standard BP cost (impact on assisting the business sector and economic stability).
- Board of Directors Regulation No. 0017 provides relief in payment of PB and UJL (Customer Deposit) through interest-free installments for all customer segments who submit an application (impact on sustaining consumer buying power).
- The CSR programs explained earlier have led to an increase in the electrification ratio, and helped stimulate the economy in 3T regions and far-flung areas.

Informasi Bahwa Perusahaan telah Melakukan *Review* atas Seluruh Regulasi terkait Isu-Isu Bidang Konsumen

Sepanjang tahun 2019, PLN telah mereview sejumlah regulasi yang berkaitan dengan isu-isu pelayanan pelanggan. Di antaranya adalah:

1. Regulasi Tingkat Mutu Pelayanan.
   Me*review* seluruh *Standard Operating Procedures* (SOP) Perusahaan terkait tingkat mutu layanan terhadap regulasi baru yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
2. Pedoman Tata Usaha Konsumen
   Penerbitan Peraturan Direksi No. 0133.P/DIR/2019 Tentang Pedoman Tata Usaha Konsumen di Lingkungan PT PLN (Persero). Dampak dari aturan tersebut antara lain memudahkan unit dalam melayani konsumen dan sebagai panduan pedoman tata usaha konsumen.
3. PLTS Atap (PV Rooftop)
   Penerbitan Peraturan Direksi No. 0049.P/DIR/2019 Tentang Pedoman Layanan Listrik Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh PT PLN (Persero). Dampak dari peraturan tersebut antara lain:
   - Meningkatkan keamanan pelanggan yang menggunakan PLTS Atap karena sudah tersedia diagram instalasi PLTS Atap dan perangkat PLTS Atap yang digunakan wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia, standar internasional maupun standar PLN.
   - Meningkatkan persyaratan administrasi dan teknis bagi pelanggan yang ingin berlangganan Layanan PLTS Atap sehingga keamanan dan keandalan operasi jaringan listrik PLN tetap terjaga.
   - Skema finansial yang saling menguntungkan antara pelanggan dan PLN baik dari segi perhitungan ekspor (Pelanggan PLTS Atap memasok energi listrik ke sistem jaringan PLN) dan impor (Pelanggan PLTS Atap menerima energi listrik dari sistem jaringan PLN), maupun dari komponen biaya lainnya.

Information on the Company's Review of All Consumer-Related Regulations

In 2019, PLN has reviewed regulations pertaining to customer service, which are as follows:

1. Regulation on Service Quality Level
   Reviewed all Corporate Standard Operating Procedures (SOP) relating to service quality level against the newly issued ESDM (Energy and Mineral Resources) Ministerial Regulation No. 18/2019 on Amendments to ESDM Ministerial Regulation No. 27/2017 on Service Quality Level and Costs that Relate to Power Transmission by PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
2. Guidelines on Consumer Administration
   Issuance of Board of Directors Regulation No. 0133.P/DIR/2019 on Guidelines for Consumer Administration in PT PLN (Persero). With this regulation in place, it has become easier for units to serve customers, and provides guidance for consumer administration.
3. Rooftop PV
   Issuance of Board of Directors Regulation No. 0049.P/DIR/2019 on Guidelines for Energy Services of Rooftop PV Power Station by PT PLN (Persero). The impact of this regulation are as follows:
   - Increases safety and security for customers using a rooftop PV system as an installation diagram is provided, and the necessary equipment for the system must meet national, international and PLN standards.
   - Tightens administrative and technical requirements for customers who wish to subscribe to the rooftop PV power services, and therefore ensuring that the security and reliability of PLN's power grid operations is maintained.
   - A mutually rewarding financial scheme for customers and PLN in terms of export (rooftop PV customers supplying electrical power to PLN's grid system) and import calculations (rooftop PV customers receiving electrical power from PLN's grid system), as well as other cost components.

4. Penerbitan SOP-SOP Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpadu (AP2T) yang berdampak ke konsumen.

Informasi dan Uraian Singkat tentang Isu-Isu Penting Konsumen dan Relevan dengan Bisnis Perusahaan

PLN menggali isu-isu penting, harapan dan kebutuhan pelanggan melalui survei Kepuasan Pelanggan (SKP) dan berbagai saluran komunikasi dengan pelanggan. Hasil dari SKP memberikan gambaran mengenai masukan, harapan dan kebutuhan pelanggan yang harus ditindaklanjuti.

PLN, baik di Pusat maupun di unit-unit menyelenggarakan *Customer Gathering* yang mengundang pelanggan potensial atau calon pelanggan. Pada forum tersebut diadakan *sharing session* berupa diskusi panel atau dialog interaktif antara pelanggan dengan petugas PLN untuk bertukar informasi layanan spesifik apa yang dibutuhkan pelanggan dan pilihan layanan apa yang tersedia di PLN untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. *Customer Gathering* juga menjadi forum dialog dengan pelanggan industri yang tergabung di dalam asosiasi seperti asosiasi produsen semen, besi baja, makanan-minuman, dan sebagainya. Dari forum tersebut PLN dapat mengetahui isu-isu penting di industri yang spesifik.

Pendekatan lain untuk menggali kebutuhan pelanggan dapat melalui laporan Contact Center PLN 123, laporan APKT, dan hasil pemetaan *(probing)* pelanggan besar yang diperoleh dari pendekatan yang dilakukan oleh Tim Key Account Marketing (KAM).

Informasi Risiko terkait Bidang Konsumen Baik Risiko bagi Perusahaan Maupun bagi Pemangku Kepentingan

Setiap produk baru yang akan diajukan untuk mendapatkan persetujuan Direksi atau Komite Niaga, harus dilengkapi dengan dokumen pendukung antara lain dokumen GRC yang berisi kajian batasan kewenangan, kajian risiko, kajian kepatuhan dan kajian *Fraud Risk Assessment* (FRA). Kajian risiko diuji oleh Divisi Risk Management di Korporat, lalu diunggah di Aplikasi Q-Radar. Aplikasi Q-Radar adalah bank

4. Issuance of SOPs on Integrated Customer Service Application (AP2T) that impact on customers.

Information and Overview of Key Customer-Related Issues Relevant to the Company's Business

PLN explores important customer-related issues, as well as their expectations and needs through a Customer Satisfaction Survei (CSS) and various communication channels with the customers. The CSS provides valuable insights into customer feedback, expectations and needs that should be followed up.

PLN, at the central and unit level, holds Customer Gatherings with invitations sent also to prospective customers. The forum involves sharing sessions in the form of panel discussion or interactive dialogue between customers and PLN officers to exchange information on specific services that customers need, and the available service options that PLN has to offer in meeting customer needs. These gatherings also serve as a dialogue forum with industrial customers who are members of business associations in the cement, steel, food and beverage sectors, among others. From this forum, PLN can learn more about key industry-specific issues.

Another approach to exploring customer needs is through reports lodged at the PLN 123 Contact Center and APKT, and probing of major customers conducted by the Key Account Marketing (KAM) Team.

Information on Consumer-Related Risks both to the Company and Stakeholders

Any new product proposed for approval from the Board of Directors or Commerce Committee must be accompanied with supporting document such as GRC that contains a review of remit boundaries, risks, compliance and Fraud Risk Assessment (FRA). Risk reviews are examined by the Company's Risk Management Division before uploaded in the Q-Radar Application. Q-Radar Application is a data bank developed by the Risk

data yang dibangun oleh Divisi Risk Management berisi semua data kajian risiko dari setiap produk atau kajian risiko dari setiap *risk owner* di masing-masing divisi. Kajian risiko di*review* oleh Divisi Risk Management dan hasilnya dilaporkan kepada Direksi.

Setiap produk yang dibuat memiliki kajian risiko disertai dengan mitigasinya. Setiap 3 bulan, mitigasi risiko tersebut diuji efektivitasnya dan dilaporkan ke Divisi Risk Management.

1. **Informasi Bahaya Listrik**
   Risiko: Pelanggan belum sepenuhnya memahami ancaman bahaya dari penggunaan peralatan listrik yang tidak sesuai ketentuan.

   Mitigasi: Melakukan penyuluhan tata cara penggunaan peralatan listrik yang aman kepada pelanggan melalui sosialisasi langsung atau sebaran informasi melalui media sosial.

Management Division, containing all data of the risk review of every product or of every risk owner in the respective division. The risk review will be assessed by the Risk Management Division, and the results reported to the Board of Directors.

Every product introduced shall undergo a risk review along with its mitigation. Every 3 months, the effectiveness of risk mitigation is tested and reported to the Risk Management Division.

1. **Information on Electrical Hazards**
   Risk: Customers do not fully understand about the dangers of electrical tools and equipment when not used according to instructions.

   Mitigation: Educate customers on how to safely use electrical equipment by directly providing information or through social media.

2. **Informasi penanganan kondisi banjir**
   Risiko: Konsumen belum sepenuhnya memahami potensi bahaya jika peralatan listrik terendam air pada saat terjadi bencana banjir.

   Mitigasi: Melakukan pemutusan aliran listrik dari sistem jaringan listrik terpusat dan melakukan penyuluhan kepada pelanggan mengenai bahaya peralatan listrik yang terendam air.

2. **Information on Dealing with Floods**
   Risk: Customers do not fully understand the potential danger of electrical equipment submerged in flood water.

   Mitigation: Cut off electrical supply from the centralized power grid system, and educate customers on the dangers of submerged electrical equipment.

3. Risiko Pelanggan Menunggak Pembayaran

Risiko: Terdapat pelanggan yang menunggak pembayaran tagihan listriknya karena berbagai faktor antara lain masalah ekonomi. Risiko ini dapat menyebabkan PLN mengalami kesulitan arus kas dalam membiayai kegiatan operasi. Untuk pelanggan sendiri, menunggak pembayaran listrik berisiko mengalami pemutusan aliran listrik, terkena denda keterlambatan serta dihentikan sebagai pelanggan dan perlu untuk melakukan pendaftaran kembali untuk penyambungan listrik dengan tetap melunasi tunggakan sebelumnya.

Mitigasi: melakukan sosialisasi pentingnya membayar tagihan listrik tepat melalui berbagai media, petugas pelayanan PLN mendatangi pelanggan untuk mengingatkan tagihan listriknya, dan melakukan pemutusan aliran listrik kepada pelanggan yang tidak membayar tagihan listrik dua bulan berturut-turut.

3. Risk of Customers in Arrears

Risk: Customers are in arrears with utility bills for different reasons, one of which is economic. This risk may cause PLN to face cash flow difficulties for financing their operational activities. As for the customer, an overdue electricity bill may mean disconnection of the service, charged a late payment penalty, and termination of service, therefore re-registration is necessary for power connection, and the obligation to pay off past due amounts remains.

Mitigation: Educate on the importance of timely payment of utility bills through various media, PLN customer service representatives calling on customers to remind them of their electricity bills, and shutting off the service for customers who fall behind on payments for two consecutive months.

4. Risiko Pencurian Listrik

Risiko: Terdapat kasus-kasus pencurian listrik dengan berbagai faktor penyebab, di antaranya masalah ekonomi dan ketidakpahaman mengenai penyambungan listrik secara tidak benar/ilegal.

Mitigasi: 1) Melakukan sosialisasi terhadap penggunaan listrik yang tidak sesuai dengan standar keamanan agar pelanggan tidak melakukan perubahan atau modifikasi apapun terhadap alat meter listrik milik PLN, 2) Melakukan analisis atas kewajaran pemakaian energi listrik pelanggan untuk mengidentifikasi indikasi pencurian listrik, 3) Melakukan pemeriksaan kWh meter secara berkala, dan 4) Melaksanakan kegiatan P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik), dan 5) Memberikan sanksi kepada pelanggan yang terbukti melakukan pencurian listrik.

4. Risk of Power Theft

Risk: There are many causal factors of electricity theft, including economic reasons, and unawareness of illegal/unauthorized power connections.

Mitigation: 1) Raise awareness on electrical usage that do not meet safety standards so that customers do not make any changes or modifications to PLN's power meters, 2) Analyze on the reasonableness of electrical usage, which can help detect power theft, 3) Regularly inspect kWh meters, 4) Implement P2TL (Controlling Electrical Usage), and 5) Impose sanctions against customers proven to have stolen electricity.

Informasi Ekspektasi Pemangku Kepentingan tentang Peran Perusahaan dalam Penanganan Isu-Isu Konsumen

PLN menerima dan menangani keluhan, harapan dan kebutuhan pelanggan melalui berbagai saluran komunikasi, di antaranya adalah:

1. Menangani keluhan pelanggan terhadap tingkat mutu layanan mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Information on Stakeholder Expectations of Company's Role in Handling Consumer-Related Issues

PLN accommodates and addresses customer complaints, expectations and needs through various communication channels, including:

1. The handling of customer complaints on service quality refers to ESDM Ministerial Regulation No. 18/2019 on Amendments to ESDM Ministerial Regulation No. 27/2017 on Service Quality Level and Costs that Relate to Power Transmission by PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

2. Aplikasi Pengaduan dan Keluhan Terpadu (APKT), yaitu aplikasi yang digunakan untuk mengelola operasional jaringan distribusi, pencatatan, penanganan dan pemulihan gangguan dan keluhan yang prosesnya dilakukan secara *real-time online* dan terintegrasi di lingkungan PLN.

3. Pada tahun 2019 PLN menyelenggarakan Forum Bisnis dengan mengundang pelanggan Industri yang tergabung di dalam asosiasi besi baja, asosiasi semen, asosiasi makanan minuman, dan asosiasi kimia. Forum Bisnis menghasilkan matriks kondisi riil dan harapan pelanggan sebagai bahan evaluasi bagi PLN untuk meningkatkan pelayanan.

2. Integrated Complaints and Reporting Application (APKT) is used for managing the operationalization of distribution networks, as well as the recording and handling of complaints and power service interruptions, and the necessary repairs, all of which are real-time online processes integrated company-wide.

3. In 2019, PLN organized a Business Forum by inviting industrial customers who are members of trade associations for the steel, cement, food and beverage, and chemicals industries. From the Business Forum, a matrix is produced on the real situation and customer expectation as the basis for evaluation in order to help PLN improve service delivery.

Pelanggan Customer	**Harapan** Expectancy
Asosiasi Semen Asosiasi Besi dan Baja Asosiasi Makanan dan Minuman Pertamina Pupuk Indonesia Group Konsumen Tegangan Tinggi (KTT) Jawa Barat (Gunung Garuda, Fajar Surya, Juishin, Pindodeli) KTT Jawa TImur (Semen, Ispatindo, Cheiljedang, Hanijaya) KTT Banten (Indah Kiat Pul, Sulfido, Samator, HPM)	Energi listrik yang: Stabil Andal Tanpa kedip No Dip Voltage -> Pertamina, Indah Kiat Pulp, Sulfindo Informasi proaktif terkait kondisi *under voltage*, penyebab gangguan, durasi dan penanganan gangguan.
Cement Association Iron and Steel Association Food and Beverage Association Pertamina Pupuk Indonesia Group HV Customers of West Java (Gunung Garuda, Fajar Surya, Juishin, Pindodeli) HV Customers of East Java (Semen, Ispatindo, Cheiljedang, Hanijaya) HV Customers of Banten (Indah Kiat Pul, Sulfido, Samator, HPM)	Electricity quality: Stable Reliable Without Voltage sag & dip -> Pertamina, Indah Kiat Pulp, Sulfindo Proactive information related to under voltage conditions, causes of disruptions., duration and handling of disruptions.

Pelanggan Customer	**Harapan** Expectancy
Asosiasi Besi dan Baja Asosiasi Makanan dan Minuman Juishin, Pindodeli KTT Jatim (Haniljaya) KTT Banten (Indah Kiat Pulp, Sulfido, Samator)	Mengevaluasi kembali penetapan *baseline* program promo LWBP: *Baseline* jadi lebih rendah Pemberian diskon bukan berdasarkan tambahan pemakaian melainkan total pemakaian LWBP Program promo LWBP-1 tidak hanya pada pukul 23:00 s.d 08:00 WIB tetapi menjadi 24 jam. Usulan PLN menghilangkan beban puncak untuk industri dalam rangka memperbaiki daya saing industri dan daya tarik bagi investor Kesiapan PLN untuk penambahan energi terbarukan dan insentif untuk pengembangan RE.
Iron and Steel Association Food and Beverage Association Juishin, Pindodeli HV Customers of East Java (Haniljaya) HV Customers of Banten (Indah Kiat Pulp, Sulfido, Samator)	Re-evaluate the baseline determination of LWBP discount program: Reduce baseline Tariff discount not based on the additional usage but total LWBP usage The LWBP-1 discount program not only at 23:00 to 08:00 WIB but 24 hours. PLN's proposal to remove peak load in industry to improve industry competitiveness and to attract investors. PLN's readiness to increase renewable energy source and incentives for RE development.

4. Selain menyelenggarakan forum, PLN melalui Tim Key Account Marketing (KAM) dari Kantor Pusat dan tim dari unit-unit mengunjungi pelanggan potensial atau calon pelanggan (termasuk pemilik *captive Power*, industri yang menggunakan sumber pembangkit listrik sendiri).

RENCANA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL KEPADA KONSUMEN TAHUN 2019 YANG DITETAPKAN MANAJEMEN

Program-program yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada konsumen meliputi:

1. Peningkatan kapasitas dan perbaikan kualitas infrastruktur kelistrikan untuk dapat menyalurkan energi listrik yang berkualitas kepada pelanggan.
2. Penyediaan *account officer* dan *official account* untuk pelanggan-pelanggan utama maupun pelanggan bisnis dan komersial utama.
3. Pengembangan sistem penagihan dan penyambungan, yakni Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpadu (AP2T) dan Pengelolaan dan Pengawasan Arus Pendapatan Secara Terpusat (P2APST).
4. Pengembangan pelayanan *borderless*, yang meliputi:

4. Apart from such forums, through its Key Account Marketing (KAM) Team at the Main Office, and unit-level teams, PLN pays visits to potential customers (including captive power owners, energy self-sufficient companies).

MANAGEMENT'S CUSTOMER-ORIENTED SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM PLAN IN 2019

Programs that have been implemented for increasing the quality of customer service are as follows:

1. Building the capacity and improving the quality of electric power infrastructure to ensure first-rate electric power service to customers.
2. Providing account officers and official accounts for key customers as well as major business and commercial clients.
3. Developing a connection and billing system, i.e., Integrated Customer Service Application (AP2T) and Centralized Income Flow Management and Supervision (P2APST).
4. Developing borderless services, which cover:

Call Center PLN 123 via Telepon
Call Center PLN 123 by Telephone

pln123@pln.co.id

www.pln.co.id

@pln_123

PLN 123

PLN Mobile Apps

Target/Rencana Kegiatan pada Tahun 2019 yang Ditetapkan Manajemen

Produk-produk atau kegiatan yang diluncurkan pada tahun 2019 terutama ditargetkan untuk menghasilkan dampak pada pertambahan jumlah pelanggan, percepatan waktu penyambungan pelanggan, dan usulan perbaikan indikator

Management's Activity Target/Plan in 2019

Products or activities launched in 2019 specifically serve the purpose of generating impact in terms of increased number of customers, faster power connection, and improvement to indicators on ease of getting electricity (directly to customers).

kemudahan mendapatkan listrik atau *getting electricity* (yang langsung ke pelanggan). Secara kuantitatif, sebagian target dan pencapaian kegiatan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

In quantitative terms, activity targets and outcomes in 2019 are as follows:

Uraian Deskription	**Target**	**Pencapaian** Achievement
Jumlah produk inovatif Number of innovative products	8	8
Perbaikan peringkat kemudahan mendapatkan listrik (getting electricity) Improved ranking of the ease of getting electricity	29	33
Pemenuhan Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) Fulfillment of Service Quality Level	100,00%	93,37%

Informasi Deskripsi yang Mencerminkan Upaya Menurunkan Dampak pada Konsumen dalam Program CSR Penting Perusahaan

Upaya menurunkan dampak pada konsumen dalam program CSR Perusahaan antara lain dilakukan melalui inisiatif berikut:

1. Efesiensi biaya Contact Center 123 dengan memasang perangkat *Session Initiation Protocol* (SIP) *Trunk* pada beberapa lokasi untuk mengarahkan komunikasi telepon berbasis IP sehingga mengefisienkan biaya regionalisasi Telkom.
2. Menambah alternatif media Instagram untuk mengurangi antrian ketika pelanggan menelepon Contact Center.
3. Pemanfaatkan fasilitas *Live Chat* dan VOIP PLN Mobile bebas biaya untuk menghubungi Contact Center.
4. Menutup pengoperasian loket pengaduan di unit-unit untuk mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas pengaduan *online*.

Descriptive Information that Reflects Efforts to Reduce Impact on Customers in Company's Key CSR Programs

Measures taken to reduce impact on customers in the Company's CSR programs cover the following:

1. Cost efficiency of Contact Center 123 by installing the Session Initiation Protocol (SIP) Trunk in several locations for IP-based telephone communication in order to achieve cost efficient Telkom regionalization.
2. Increasing alternative media such as Instagram to reduce call queuing time at the Contact Center.
3. Using PLN Mobile Live Chat and VOIP available free of charge to reach the Contact Center.
4. Close down complaints desk in units to optimize the use of online complaints facilities.

Pada Program Utama yang Dilakukan Terdapat Informasi Berisikan Deskripsi Upaya Menciptakan Manfaat Bersama Inisiatif CSR Bidang Konsumen bagi Pemangku Kepentingan dan Perusahaan

Manfaat bersama yang dihasilkan dari inisiatif CSR dan program-program di bidang pelayanan pelanggan telah diuraikan sebelumnya terkait pelaksanaan program CSR Penyambungan Listrik Gratis, Program One Man One Hope (OMOH), Program Terangi Negeri (Diskon biaya Penyambungan Baru untuk Basis Data Terpadu TNP2K), Program Lebih Nyaman (Diskon tarif sebesar Rp. 52 untuk R1 900 VA RTM), Program Talis (Tabung Listrik) Untuk daerah-daerah terisolasi, dan sebagainya.

Key Programs Provide Descriptive Information on Efforts to Create Mutual Benefit in Customer-Related CSR Initiatives for Stakeholders and Company

The mutual benefit derived from CSR initiatives and customer service programs has been explained earlier, specifically in relation to the implementation of CSR programs that include Free Power Connection, One Man One Hope (OMOH), *Terangi Negeri* (New Connection Fee Discount for TNP2K's Integrated Database), *Lebih Nyaman* (Rp 52 Tariff Discount for RTM R1 900 VA), *Talis* (Electrical Tube) for remote areas, and others.

Informasi Mekanisme dan Prosedur Pengaduan Keluhan dan/atau Konflik terkait Konsumen

Perusahaan memonitor penyelesaian keluhan pelanggan secara harian, mingguan, dan bulanan dengan menugaskan supervisor, asisten manajer dan manajer unit pelaksana melalui "Call Centre PLN 123", e-mail: pln123@pln.co.id, *website*: www.pln.co.id, Twitter: @pln_123, Facebook: PLN 123, dan aplikasi PLN Mobile.

Untuk menjamin penyelesaian keluhan secara tuntas, maka penanganan keluhan pelanggan dicatat pada jurnal (*logbook*) pelayanan. Dengan demikian seluruh data keluhan pelanggan akan tercatat dalam *database*. PLN telah memasukan kriteria penyelesaian keluhan pelanggan sebagai target kinerja unit untuk memastikan tindak lanjut penanganan keluhan pelanggan. Standar waktu pelayanan per jenis gangguan pada unit pelaksana, adalah:

- Kedatangan petugas: 30 menit.
- Penanganan gangguan trafo: 4 jam.
- Penanganan gangguan jaringan tegangan rendah (JTR): 1,5 jam.
- Gangguan saluran rumah (SR): 30 menit.

A. Pengembangan Aplikasi Pengaduan Keluhan Terpadu (APKT)

Information on Customer Complaints and/or Conflict Mechanism and Procedure

The Company monitors the process for resolving customer complaints on a daily, weekly, and monthly basis by assigning supervisors, assistant managers and implementing unit managers, through "PLN 123 Call Centre", e-mail: pln123@pln.co.id, website: www.pln.co.id, Twitter: @pln_123, Facebook: PLN 123, and PLN Mobile application.

To make sure that complaints are fully resolved, customer grievances are recorded in a service logbook. All data on customer complaints are therefore stored in a database. PLN has included customer complaint resolution as part of a unit's performance target to ensure that complaints are followed up. The average time needed to provide service for each type of interruption by an implementing unit is as follows:

- Arrival of officer: 30 minutes.
- Repairing transformer failure: 4 hours.
- Repairing low voltage network interruption: 1.5 hours.
- Home powerline interruption: 30 minutes.

A. Development of Integrated Complaints Application (APKT)

Aplikasi Pengaduan & Keluhan Terpadu (APKT)
Integrated Complain Handling Aplication (APKT)

Fitur:

1 Mencatat pengaduan gangguan (padam 1 persil atau padam meluas) dan keluhan (pelayanan non teknis) konsumen melalui PLN 123 atau PLN Mobile
2. Mencatat setiap progres atas tindak lanjut pengaduan pelanggan
3. Laporan-laporan:
   - Respons dan *Recovery Time*
   - Volume per jenis Tipe Permasalahan baik gangguan ataupun keluhan
   - Volume gangguan dan keluhan per unit PLN

Implementasi:

1. Terimplementasi di seluruh unit PLN
2. Telah dikembangkan modul APKT Mobile sehingga petugas lapangan dapat meng-*update* status pekerjaan melalui gadget dan lokasi petugas lapangan dapat terpantau oleh unit PLN
3. Terintegrasi oleh Konsumen PLN sehingga progres dapat dipantau oleh *gadget* konsumen

Features:

1 Recording blackout disruption (2 persil or expansion outage) and customer complaint (non-technical service) both through PLN 123 and PLN Mobile
2. Recording progress of follow-up of each customer complain

3. Reports:
   - Responses and recovery time
   - Volume per type of problems (both disruption and complaints)
   - Volume of disruption and problems per PLN's unit

Implementation:

1. Implemented in all PLN's units
2. APKT Mobile to enable the field officer to update the status of work through gadget. Thus, the location of field officer is monitored by PLN's unit

3. Integrated with PLN Mobile application so the PLN's consumers can utilize it to monitor the progress

B. Pengembangan Program Optimalisasi Pengelolaan Proses Bisnis *Back Office*

Pengembangan sistem operasional berbasis teknologi informasi selain dapat meningkatkan kecepatan layanan dan efisiensi operasional, juga dapat mengurangi peluang terjadinya tindakan *fraud* akibat kontak langsung dengan pelanggan.

Selain peningkatan kualitas layanan tersebut, PLN melakukan upaya-upaya lain untuk memenuhi tanggung jawab terhadap konsumen. Upaya tersebut meliputi: pengurangan frekuensi gangguan pemadaman dan lama pemadaman, kestabilan tegangan, dan pengembangan kapasitas pembangkitan untuk memenuhi kecukupan pasokan listrik.

C. Kinerja Contact Center PLN 123 Tahun 2019

Kinerja pelayanan Contact Center PLN 123 diukur melalui 3 aspek, yaitu:

- Kemudahan akses,
- Tingkat kualitas pelayanan CSO PLN 123,
- Rasio penyelesaian permasalahan pelanggan pada kontak yang pertama.

Informasi tentang Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Berbagai Inisiatif CSR di Bidang Konsumen

Salah satu cara PLN untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam berbagai inisiatif CSR di bidang pelanggan adalah melalui Survei Kepuasan Pelanggan (SKP). SKP menjadi media bagi pelanggan untuk ikut terlibat di dalam upaya meningkatkan kualitas layanan PLN.

Pelaksanaan SKP oleh konsultan independen untuk memastikan bahwa hasil survei benar-benar mewakili suara pelanggan. Survei dilakukan dengan menggunakan sampel acak dari masing-masing unit usaha PLN, untuk mengukur kinerja layanan unit-unit dimaksud, sekaligus mengukur rata-rata kinerja layanan PLN secara nasional. Tujuan akhir dari pelaksanaan survei adalah menghasilkan rekomendasi perbaikan kualitas layanan dan kinerja PLN.

B. Development of Back Office Business Process Management Optimization Program

An information technology-based operational system will not only help increase the speed of service delivery and operational efficiency, but also minimize the risk of fraud arising from direct contact with customers.

In addition to measures for improving service quality, PLN also takes other necessary steps to fulfill its responsibilities to customers. These efforts include reducing the frequency and duration of power failures, voltage stability, and increasing power plant capacity for adequate power supply.

C. Performance of PLN 123 Contact Center in 2019

The service performance of PLN 123 Contact Center is measured from the following 3 dimensions:

- Ease of access,
- Service quality level of PLN 123 CSO,
- Customer complaint resolution ratio at first contact.

Information on Stakeholder Engagement in Customer-Oriented CSR Initiatives

One of the ways in which PLN engages with stakeholders in various customer-oriented CSR initiatives is through the Customer Satisfaction Survei (CSS). The Survei serves as a medium for customers to contribute towards improving PLN's service quality.

CSS is conducted by an independent consultant to ensure that survei results truly represent the voices of consumers. The survei draws a sample randomly from each PLN business unit to measure their individual service performance, and PLN's average national-scale service performance. The ultimate purpose of the survei is to generate recommendations for improving PLN's service quality and performance.

Upaya Perusahaan dengan Memanfaatkan Pengaruh Perusahaan dalam Melindungi Konsumen

Pada tahun 2019, PLN melakukan sejumlah langkah di bidang pelayanan pelanggan sebagai berikut:

1. Mendorong penggunaan pintu layanan yang bersifat *online* untuk segala kebutuhan pelanggan, baik dalam mencari informasi maupun untuk pengaduan dengan cara melakukan sosialisasi di media elektronik dan PLN aktif di media sosial.
2. Meningkatkan intensitas kampanye program atau produk-produk PLN melalui petugas PLN, *banner*, *baliho*, dan media elektronik untuk menarik minat pelanggan.
3. Mempertahankan tingkat kepuasan Pelanggan Perusahaan Besar I4 dengan menjaga mutu listrik.
4. Bekerja sama dengan perbankan untuk mengembangkan sistem *auto debit* sebagai alternatif pembayaran listrik PLN untuk Pelanggan Bisnis, Industri, dan Layanan Khusus.
5. Menyediakan nomor Whatsapp Business sebagai salah satu pintu layanan PLN.

Informasi Biaya yang dikeluarkan Perusahaan terkait Inisiatif CSR Bidang Pelayanan Pelanggan

Pada tahun 2019, biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas pelayanan pelanggan oleh Divisi administrasi Niaga adalah sebesar Rp3,26 triliun, yang digunakan untuk pengelolaan pelanggan, pembacaan meter, biaya penagihan, biaya pemutusan dan penyambungan kembali, biaya P2TL, biaya penyisihan piutang, biaya teknologi informasi dan biaya pemasaran.

Uraian mengenai Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Bidang Konsumen

- **Informasi tentang Keterlibatan Manajemen dalam Me*review* dan Meningkatkan Kredibilitas Inisiatif dan Laporan CSR**
  Manajemen terlibat dalam kegiatan *review* dan meningkatkan kredibilitas inisiatif kegiatan tanggung jawab sosial bidang konsumen sesuai dengan batas kewenangannya masing-masing. Dan untuk setiap kegiatan perlu dilengkapi dengan kajian-kajian penunjang seperti kajian kelayakan, kajian risiko, kajian

Corporate Measures to Capitalize on Corporate Influence for Consumer Protection

In 2019, PLN undertook various customer service initiatives:

1. Promoting the use of online service points for all customer needs, whether for searching information or filing complaints, through electronic media where PLN is an active social media user.
2. Intensifying PLN program or product campaigns through PLN officers, banners, billboards, and electronic media to attract customer interest.
3. Maintaining the satisfaction levels of I4 major corporate clients by maintaining power quality.
4. Partnering with banking institutions to develop an auto debit system as an alternative payment mechanism for PLN power service for Business, Industrial, and Special Service Customers.
5. Providing a WhatsApp Business number as a PLN service point.

Information on Costs Expended by the Company for Customer-Oriented CSR Initiatives

In 2019, the costs incurred by the Business Administration Division for customer service-related activities amounted to Rp3.26 trillion, which were expended for customer management, meter readings, billing fees, power supply disconnection and reconnection, P2TL, allowance for doubtful accounts, information technology, and marketing.

Description on Implementation of Customer-Oriented Social Responsibility

- **Information on Management's Involvement in Reviewing and Increasing the Credibility of CSO Initiatives and Report**
  Management is involved in reviewing and increasing the credibility of customer-oriented social responsibility initiatives and activities in accordance with their respective power and authority. For each activity, this must be backed by supporting reviews on feasibility, risks, legal aspects, and compliance

legal dan kajian kepatuhan untuk memastikan inisiatif yang diambil akan memberi manfaat dari sisi bisnis, memberi manfaat kepada pelanggan dan tetap berada dalam karangka aturan yang berlaku.

- **Informasi Keterlibatan dan/atau Pelibatan Pemangku Kepentingan Relevan dalam Inisiatif CSR Perusahaan**
  PLN melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam melaksanakan inisiatif tanggung jawab sosial di bidang konsumen. Mulai dari anak perusahaan serta vendor-vendor yang menyediakan jasa seperti pembacaan meter, penagihan rekening, *call center*, petugas penyambungan dan pemutusan dan lain-lain. PLN juga menggandeng aparat dalam melaksanakan kegiatan P2TL dan pengamanan jaringan listrik. PLN juga bekerja sama dengan asosiasi seperti Konsuil dan PPILN yang menerbitkan sertifikat laik operasi terhadap instalasi listrik milik pelanggan, serta berbagai pemangku kepentingan relevan lainnya.

- **Informasi tentang Berbagai Upaya Pelibatan Direksi/Manajemen/Karyawan dalam Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Bidang Konsumen**
  Direksi terlibat dan bertanggung jawab penuh atas setiap kegiatan tanggung jawab sosial Perusahaan di bidang konsumen. Manajemen dan karyawan juga terlibat aktif dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada konsumen. Contohnya dalam program One Man One Hope (OMOH) merupakan wujud kepedulian pegawai PLN untuk membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan sambungan listrik.

Informasi Kegiatan dan Capaian Kegiatan Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial kepada Konsumen

- **Informasi Berbagai Capaian Inisiatif CSR Bidang Konsumen**
  Capaian PLN dalam inisiatif tanggung jawab sosial bidang konsumen terbukti lewat capaian PLN dalam BUMN Marketer Awards 2019, capaian dalam Indonesia Sustainable Development Goals Award (ISDA) 2019 dimana melalui PLN UID Jawa Barat meraih

to make sure that the proposed initiatives are beneficial to business and customers, and remain consistent with the applicable regulatory framework.

- **Information on Stakeholder Engagement and/or Participation Relevant to the Company's CSR Initiatives**
  PLN engages with multiple stakeholders in implementing customer-oriented social responsibility initiatives. From subsidiaries to vendors providing services, such as meter reading, billing, call center, connection and disconnection officers, and others. PLN also works with the authorities for conducting P2TL activities, and electrical network security measures. PLN collaborates with associations such as Konsuil and PPILN that issues commissioning certificates for customer electrical installations, and with other relevant stakeholders.

- **Information on Efforts to Ensure Board of Directors/Management/Employee Engagement in Customer-Oriented Social Responsibility Activities**
  The Board of Directors are fully involved and responsible for every CSR activity that relates to customers. Management and employees are also actively involved in implementing customer-oriented social responsibility programs. The One Man One Hope (OMOH) program for example demonstrates the commitment of PLN employees in helping underprivileged families have access to power supply.

Information on Customer-Oriented Social Responsibility Activities and Outcomes

- **Information on the Outcomes of Customer-Oriented CSR Initiatives**
  The milestones achieved by PLN in regard to its customer-oriented social responsibility initiatives are demonstrated in the Company's accomplishments as the recipient of the BUMN Marketer Award 2019, Indonesia Sustainable Development Goals Award (ISDA) 2019 where

Silver Award untuk kategori Energi Bersih dan Terjangkau serta terpilihnya Contact Center PLN sebagai The Best Contact Center Indonesia 2019 dari ICCA.

- **Capaian yang Memberikan Gambaran Manfaat Untuk Pemangku Kepentingan**
  Dalam pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial di bidang konsumen, para pemangku kepentingan yang bekerja sama dengan PLN mendapatkan manfaat ekonomi, misal untuk kegiatan pembacaan meter telah terserap biaya sebesar Rp1,6 triliun, untuk kegiatan pemutusan dan penyambungan kembali menyerap biaya sebesar Rp96,6 miiar.

- **Capaian yang Memberikan Manfaat untuk Perusahaan Baik Langsung atau Tidak Langsung sebagai Bentuk Tanggung Jawab Pelaksanaan CSR pada Pemegang Saham**
  Dengan terus mengembangkan layanan kepada pelanggan, merupakan bentuk Perusahaan dalam menjalankan amanah Pemegang Saham untuk meningkatkan rasio elektrifikasi nasional serta melistriki masyarakat pedesaan dan masyarakat di daerah 3 T (tertinggal, terluar dan terdepan).

- **Capaian yang Memberikan Gambaran Manfaat Langsung atau Tidak Langsung pada Pembangunan Berkelanjutan**
  Upaya-upaya yang dilakukan Perusahaan dalam bidang tanggung jawab sosial di bidang konsumen secara langsung maupun tidak langsung telah berikontribusi dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya untuk tujuan menyediakan energi bersih dan terjangkau serta berkontribusi pada penyediaan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini terbukti bahwa dengan menggunakan energi listrik masyarakat bisa menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan, harga listrik PLN yang diupayakan untuk tetap terjangkau juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjaga daya beli masyarakat dan daya saing industri, kegiatan tanggung jawab sosial PLN di bidang konsumen juga melibatkan para pekerja dari mitra-mitra PLN seperti para pencatat meter, petugas pelayanan teknik,

PLN UID East Java earned the Silver Award for the Clean and Affordable Energy category, and the recognition bestowed to PLN Contact Center as The Best Contact Center Indonesia 2019 from ICCA.

- **Outcomes Beneficial to Stakeholders**

  In implementing PLN's customer-oriented social responsibility activities, stakeholders working with the Company enjoy economic benefits. Meter readings for example absorbed Rp 1.6 trillion in costs, while disconnection and reconnection activities absorb costs to the tune of Rp 96.6 billion.

- **Outcomes Beneficial to the Company, Directly and Indirectly, as Part of Accountability to Shareholders on CSR Implementation**
  The continuous improvements to customer service is one of the ways in which the Company fulfils its mandate to Shareholders in an effort to increase national electrification ratio, and to provide electricity to communities living in rural areas and 3T regions (underdeveloped, outermost and frontiers).

- **Outcomes Contributing Directly or Indirectly to Sustainable Development**

  The Company's customer-oriented social responsibility activities have both directly and indirectly contributed to sustainable development, especially the goal on clean and affordable energy, and have helped create job opportunities, and stimulate economic growth. This is evidenced in the fact that by using electricity people are relying on more environmentally friendly energy, the cost of PLN power services are kept at an affordable level, and drive economic growth further upwards by maintaining the people's buying power and industry's competitiveness, and that PLN customer-oriented social responsibility activities also involve workers from PLN partners, such as meter readers, technicians, electrical contractors, and

para kontraktor listrik dan lain-lain sehingga membuka lapangan kerja.

- **Data dan Deskripsi Kualitatif Dampak dari Inisiatif Perusahaan Terkait Tanggung Jawab Produk, Seperti Kesehatan dan Keselamatan Konsumen, Informasi Produk, Sarana, Jumlah dan Penanggulangan atas Pengaduan Konsumen dan lain-lain**
  Dalam menyediakan produknya berupa energi listrik, PLN berupaya untuk menjaga produknya untuk tetap berada pada rentang kualitas yang dijanjikan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan jaringan listrik PLN sendiri serta menjaga kualitas peralatan listrik pelanggan sehingga tetap dapat bekerja baik. Contoh: Untuk pelanggan tegangan rendah PLN menjaga tegangan listrik 220 V tetap berada pada rentang yang dijanjikan. Untuk menjaga kualitas tegangan tersebut PLN senantiasa merawat peralatan dan jaringan listrik yang ada serta menambah jaringan dan peralatan listrik baru seperti trafo distribusi jika yang jaringan dan peralatan yang tersedia sudah tidak memadai lagi dibanding pertumbuhan jumlah dan kebutuhan pelanggan. PLN juga berupaya memastikan keselamatan konsumen dengan memelihara jaringan listriknya, misalnya: mengganti kabel listrik yang sudah getas/terkelupas, mengganti dan merotasi trafo distribusi yang sudah kelebihan beban, mengganti tiang listrik besi dengan tiang beton, melakukan pengecekan induksi listrik, melakukan pemangkasan pohon yang mengenai jaringan listrik, membersihkan layang-layang serta secara aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga ROW jaringan PLN selain untuk menjaga kontinuitas aliran listrik juga menjaga keamanan masyarakat di sekitar jaringan tersebut. PLN juga menyediakan saluran pengaduan listrik baik melalui contact *center, website*, dan media sosial. Dampaknya, dari survei kepuasan pelanggan, didapati kepuasan pelanggan PLN terkait efektivitas pintu layanan mengalami kenaikan dari 88,5% di 2018 menjadi 91,14% di tahun 2019.

others, thereby opening up employment opportunities.

- **Qualitative Data and Description on the Impact of Corporate Product Responsibility Initiatives, such as Customer Health and Safety, Product Information, Facilities, Number of and Response to Customer Complaints and Others**
  In making its product, i.e., electrical power, available, PLN strives to make sure that its product remains within the quality levels as promised. This is aimed at maintaining the safety of PLN's own power grid and the quality of the customer's electrical equipment to ensure that they work properly. For example, for low voltage customers, PLN makes sure that the 220V voltage remains within the levels promised. To maintain voltage quality, PLN regularly ensures the maintenance of electrical equipment and networks, and increases the number of new power networks and electrical equipment, such as distribution transformers, if the existing networks and equipment are no longer adequate given the growth in the number of customers and their needs. PLN also works toward ensuring customer safety by maintaining its power networks. For example, replacing electrical wires that have peeled off or turned brittle, replacing and rotating overloaded distribution transformers, replacing electric poles from iron to concrete, checking electrical induction, trimming trees that touch power lines, removing entangled kites, and actively educating the public on the importance of maintaining PLN's network ROW, not only for maintaining power supply continuity, but also the safety of communities living near powerlines. PLN also has complaints mechanisms in place, either through the contact center, website or social media. As a result, the satisfaction level of PLN customers, as revealed in a customer satisfaction survei, concerning the effectiveness of service points, have increased from 88.5% in 2018 to 91.14% in 2019.

Sertifikasi terkait Konsumen yang Dimiliki Perusahaan

PLN telah memiliki sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 sebagai jaminan bahwa kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan mengacu pada standar global.

Penghargaan di Bidang Konsumen yang Dimiliki

Pada tahun 2019, layanan Contact Center PLN 123 yang dikelola anak perusahaan PT ICON+ meraih penghargaan The Best Contact Center Indonesia 2019 dari Indonesian Contact Center Association (ICCA) untuk 9 kategori, yaitu:

1. GOLD Award untuk kategori The Best Customer Experience (Korporat)
2. SILVER Award untuk kategori The Best Technology Innovation (Korporat)
3. SILVER Award untuk kategori The Best People Development (Korporat)
4. BRONZE Award untuk kategori The Best Business Contribution (Korporat)
5. PLATINUM Award untuk kategori Agen Badan Publik atas nama Qudsiyah (Individu)
6. SILVER Award untuk kategori Supervisor Kecil atas nama atas Tony Wahyu Praditya (Individu)
7. SILVER Award untuk kategori Quality Assurance Kecil atas nama Heri Firmansyah (Individu)
8. BRONZE Award untuk kategori Quality Assurance Besar atas nama Ridwan Effendi (Individu)
9. BRONZE Award untuk kategori Agen Inbound Menengah atas nama Ketut Adi Putra (Individu)

Customer-Related Certification that the Company Holds

PLN has earned the ISO 9001:2008 Quality Management System certification, providing guarantee that the quality of services offered to customers adheres to global standards.

Awards Received Relating to Customers

In 2019, the PLN 123 Contact Center managed by subsidiary PT ICON+ earned the Best Contact Center Indonesia 2019 award from Indonesian Contact Center Association (ICCA) for 9 categories:

1. GOLD Award for the Best Customer Experience Category (Corporate)
2. SILVER Award for The Best Technological Innovation Category (Corporate)
3. SILVER Award for The Best People Development Category (Corporate)
4. BRONZE Award for The Best Business Contribution Category (Corporate)
5. PLATINUM Award for Public Institution Agent Category for Qudsiyah (Individual)
6. SILVER Award for Small Supervisor Category for Tony Wahyu Praditya (Individual)
7. SILVER Award for Small Quality Assurance Category for Heri Firmansyah (Individual)
8. BRONZE Award for Large Quality Assurance Category for Ridwan Effendi (Individual)
9. BRONZE Award for Medium Inbound Agent Category for Ketut Adi Putra (Individual)

Laporan Keuangan 2019

Financial Report 2019

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK*/AND SUBSIDIARIES*

Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Daftar Isi	**Halaman/ *Pages***	***Table of Contents***
Surat Pernyataan Direksi		***Directors' Statement Letter***
Laporan Auditor Independen		***Independent Auditor's Report***
Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018		***Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2019 and 2018***
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	*Consolidated Statements of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	4	*Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	6	*Consolidated Statements of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas Konsolidasian	7	*Consolidated Statements of Cash Flows*
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	8	*Notes to the Consolidated Financial Statements*

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 AND 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 AND 2018

DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY
ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2019 AND 2018,
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019 AND 2018

Kami yang bertanda tangan dibawah ini/*We, the undersigned:*

1.	Nama/*Name*	:	ZULKIFLI ZAINI
	Alamat kantor/*Office address*	:	PT PLN (PERSERO) Jl. Trunojoyo Blok M I/135 Jakarta Selatan
	Alamat domisili sesuai KTP atau kartu indentitas lain/*Domicile as stated in ID Card*	:	Jl.Aditiawarman No.11 RT 007 RW 001 Selong, Kebayoran Baru Jakarta Selatan
	Nomor telepon/*Phone number*	:	(021) 7261122
	Jabatan/*Position*	:	DIREKTUR UTAMA / *PRESIDENT DIRECTOR*
2.	Nama/*Name*	:	SINTHYA ROESLY
	Alamat kantor/*Office address*	:	PT PLN (PERSERO) Jl. Trunojoyo Blok M I/135 Jakarta Selatan
	Alamat domisili sesuai KTP atau kartu indentitas lain/*Domicile as stated in ID Card*	:	APT Taman Rasuna TWR 17-14 D RT 003 RW 010 Menteng Atas, Setiabudi Jakarta Pusat
	Nomor telepon/*Phone number*	:	(021) 7392038
	Jabatan/*Position*	:	DIREKTUR KEUANGAN / *FINANCE DIRECTOR*

menyatakan bahwa/*state that:*

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian;
2. Laporan Keuangan Konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan Keuangan Konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Perusahaan dan Entitas Anak.

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements;*
2. *The Consolidated Financial Statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Generally Accepted Accounting Principles;*
3. a. *All information contained in the Consolidated Financial Statements is complete and correct;*
   b. *The Consolidated Financial Statements do not contain misleading material information or facts and do not omit material information and facts;*
4. *We are responsible for the Company and its Subsidiaries Internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 18 Mei 2020 / May 18, 2020

ZULKIFLI ZAINI	SINTHYA ROESLY
Direktur Utama / *President Director*	Direktur Keuangan / *Finance Director*

Jl. Trunojoyo Blok M/135 Kebayoran Baru Jakarta 12160
T (021) 7261875, 7261122, 7262234, 7251234, 7250550
F (021) 7221330, 7397150 W www.pln.co.id

Paraf

RSM

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Nomor/*Number* : 00584/2.1030/AU.1/02/0645-1/1/V/2020

Laporan Auditor Independen/ *Independent Auditor's Report*

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Shareholder, Board of Commissioners and Directors

Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Perusahaan Listrik Negara

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ("Perusahaan") dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (the "Company") and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2019, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian
Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's responsibility for the consolidated financial statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Generally Accepted Accounting Principles, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor
Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on the consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan is a member of the RSM network. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Licence: KMK No.477/KM.1/2015
Registered at the Indonesia
Financial Services Authority (OJK)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara and its subsidiaries as of December 31, 2019, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Generally Accepted Accounting Principles.

Penekanan hal - hal

Kami membawa perhatian ke Catatan 2.a atas laporan keuangan konsolidasian terlampir yang menjelaskan bahwa Perusahaan mengubah kebijakan akuntansi untuk transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik dengan menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6 POJK.04/2017 secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai 1 Januari 2016. Dampak perubahan kebijakan akuntansi ini diungkapkan dalam Catatan 57 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Emphasis of matters

We draw attention to Note 2.a to the accompanying consolidated financial statements which explains that the Company changed its accounting policy for transactions based on power purchase agreements by applying the Financial Services Authority Regulation No.6 POJK.04/2017 prospectively for the annual period beginning on January 1, 2016. The effect of such change in accounting policy is disclosed in Note 57 to the accompanying consolidated financial statements.

Kami juga membawa perhatian pada Catatan 58e atas laporan keuangan konsolidasian yang menjelaskan tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap bisnis dan operasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dan entitas anaknya serta asesmen manajemen bahwa tidak

We also draw attention to Note 58e to the consolidated financial statements which describes impact of the Covid-19 pandemic on the business and operations Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara and its subsidiaries and the management assessment that there were no

terdapat dampak negatif dalam jangka pendek. Meskipun demikian terdapat ketidakpastian dampak dari situasi ini dalam jangka panjang.

negative impacts in the short term. However there is uncertainty in the impact of this situation in the longer term.

Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal-hal tersebut.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Dedy Sukrisnadi
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0645/
Public Accountant License Number: AP.0645

Jakarta, 18 Mei/ *May 18,* 2020

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN / ***CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION***
31 Desember 2019 dan 2018 / *December 31, 2019 and 2018*
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) / *(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

	Catatan/ *Notes*	2019 Rp	2018 Rp	
ASET				***ASSETS***
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Aset tetap	6	1,400,685,118	1,336,478,233	*Property, plant and equipment*
Properti investasi	7	5,283,708	5,125,448	*Investment properties*
Investasi pada entitas asosiasi	8	3,868,060	3,002,665	*Investments in associates*
Investasi pada ventura bersama	8	6,432,705	5,723,674	*Investments in joint ventures*
Aset pajak tangguhan	48	2,215,963	7,578,386	*Deferred tax assets*
Piutang pihak berelasi	9	951,643	1,031,237	*Receivables from related parties*
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	10	5,980,703	5,688,712	*Restricted cash in banks and time deposits*
Piutang lain-lain	17	824,545	961,377	*Other receivables*
Aset tidak lancar lain	11	7,445,895	13,482,762	*Other non-current assets*
Jumlah Aset Tidak Lancar		**1,433,688,340**	**1,379,072,494**	***Total Non-current Assets***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	12	46,598,783	33,294,560	*Cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	13	334,153	1,216,886	*Short-term investments*
Piutang usaha				*Trade receivables*
Pihak berelasi	14	819,836	593,646	*Related parties*
Pihak ketiga	14	24,310,702	23,209,017	*Third parties*
Piutang subsidi listrik	15	--	--	*Receivables on electricity subsidy*
Piutang kompensasi	16	--	23,173,464	*Compensation receivables*
Piutang lain-lain	17	47,451,084	9,507,768	*Other receivables*
Persediaan	18	12,934,233	15,506,567	*Inventories*
Pajak dibayar di muka	19	17,634,137	5,894,120	*Prepaid taxes*
Biaya dibayar di muka dan uang muka	20	1,206,785	1,007,572	*Prepaid expenses and advances*
Piutang pihak berelasi	9	4,719	5,954	*Receivables from related parties*
Aset lancar lain	56	72,241	5,697	*Other current assets*
Jumlah Aset Lancar		**151,366,673**	**113,415,251**	***Total Current Assets***
JUMLAH ASET		**1,585,055,013**	**1,492,487,745**	***TOTAL ASSETS***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan / *The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole*

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/ *AND SUBSIDIARIES*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2019 Rp	2018 Rp	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
EKUITAS				***EQUITY***
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				*Equity attributable to owners of the parent*
Modal saham - nilai nominal Rp1 per saham				*Capital stock - par value of Rp1 per share*
Modal dasar - masing-masing 439.000.000 saham				*Authorized - 439,000,000 shares, respectively*
Modal ditempatkan dan disetor penuh - masing-masing 115.181.002 saham dan 109.826.526 saham per 31 Desember 2019 dan 2018	21	115,181,002	109,826,526	*Subscribed and paid-up 115,181,002 shares and 109,826,526 shares as of December 31, 2019 and 2018, respectively*
Tambahan modal disetor	22	9,919,958	20,179,333	*Additional paid-in capital*
Penyertaan modal Negara dalam proses penerbitan saham	21	10,528,230	--	*Stock subscription from Government in issuance process*
Saldo laba				*Retained earnings*
Ditentukan penggunaannya	21	60,334,896	52,766,610	*Appropriated*
Tidak ditentukan penggunaannya	21	70,997,731	78,251,316	*Unappropriated*
Penghasilan komprehensif lain		661,509,952	665,849,322	*Other comprehensive income*
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		928,471,769	926,873,107	*Equity attributable to owners of the parent*
Kepentingan non-pengendali		908,644	540,750	*Non-controlling interests*
Jumlah Ekuitas		**929,380,413**	**927,413,857**	***Total Equity***
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas pajak tangguhan	48	28,121,540	13,420,136	*Deferred tax liabilities*
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun				*Long-term liabilities - net of current portion*
Penerusan pinjaman	24	35,251,741	36,105,279	*Two-step loans*
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank	25	4,359,569	5,343,629	*Government and non-bank Government financial institution loans*
Utang sewa pembiayaan	26	11,569,377	14,468,336	*Lease liabilities*
Utang bank	27	184,023,820	152,965,997	*Bank loans*
Utang obligasi dan sukuk ijarah	28	174,292,298	131,681,821	*Bonds payable and sukuk ijara*
Utang listrik swasta	29	6,431,448	7,115,916	*Electricity purchase payable*
Utang KIK - EBA	28	1,354,642	2,221,167	*KIK - EBA loans*
Utang pihak berelasi	30	92	1,000	*Payable to related parties*
Liabilitas imbalan kerja	50	50,838,258	43,760,226	*Employee benefits liabilities*
Utang lain-lain	32	133,662	94,427	*Other payables*
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		**496,376,447**	**407,177,934**	***Total Non-current Liabilities***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2019 Rp	2018 Rp	
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha				*Trade payables*
Pihak berelasi	31	11,814,735	9,044,530	*Related parties*
Pihak ketiga	31	40,188,048	39,563,144	*Third parties*
Utang pajak	33	2,383,288	2,560,128	*Taxes payable*
Biaya masih harus dibayar	34	16,754,640	14,809,018	*Accrued expenses*
Uang jaminan langganan	35	14,235,879	13,465,735	*Customers' security deposits*
Utang biaya proyek	36	150,664	315,828	*Project cost payable*
Pendapatan ditangguhkan	23	1,049,231	929,947	*Deferred revenue*
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun				*Current maturities of long-term liabilities*
Penerusan pinjaman	24	2,725,805	2,530,273	*Two-step loans*
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank	25	1,998,476	1,860,649	*Government and non-bank Government financial institution loans*
Utang sewa pembiayaan	26	2,540,107	2,624,629	*Lease liabilities*
Utang bank	27	21,693,338	28,145,737	*Bank loans*
Utang obligasi dan sukuk ijarah	28	6,946,478	2,120,612	*Bonds payable and sukuk ijara*
Utang listrik swasta	29	399,458	394,403	*Electricity purchase payable*
Utang KIK - EBA	28	586,620	686,819	*KIK - EBA loans*
Liabilitas imbalan kerja	50	5,232,467	5,873,558	*Employee benefits liabilities*
Utang lain-lain	32	30,598,919	32,970,944	*Other payables*
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		**159,298,153**	**157,895,954**	***Total Current Liabilities***
JUMLAH LIABILITAS		**655,674,600**	**565,073,888**	***TOTAL LIABILITIES***
JUMLAH EKUITAS DAN LIABILITAS		**1,585,055,013**	**1,492,487,745**	***TOTAL EQUITY AND LIABILITIES***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/ *AND SUBSIDIARIES*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2019 Rp	2018 Rp	
PENDAPATAN USAHA				***REVENUES***
Penjualan tenaga listrik	37	276,061,925	263,477,551	*Sale of electricity*
Penyambungan pelanggan	23	6,934,597	7,309,172	*Customer connection fees*
Lain-lain	39	2,644,067	2,111,019	*Others*
Jumlah Pendapatan Usaha		285,640,589	272,897,742	*Total Revenues*
BEBAN USAHA				***OPERATING EXPENSES***
Bahan bakar dan pelumas	40	136,084,482	137,266,678	*Fuel and lubricants*
Pembelian tenaga listrik	41	83,563,991	84,267,611	*Purchased electricity*
Sewa	42	3,617,376	4,272,082	*Lease*
Pemeliharaan	43	22,328,178	20,737,601	*Maintenance*
Kepegawaian	44	25,908,771	22,950,087	*Personnel*
Penyusutan	6	35,318,071	30,744,712	*Depreciation*
Lain-lain	45	8,620,069	7,950,118	*Others*
Jumlah Beban Usaha		315,440,938	308,188,889	*Total Operating Expenses*
RUGI USAHA SEBELUM SUBSIDI		**(29,800,349)**	**(35,291,147)**	***OPERATING LOSS BEFORE SUBSIDY***
Subsidi listrik Pemerintah	38	51,711,774	48,101,754	*Government's electricity subsidy*
Pendapatan kompensasi	16	22,253,517	23,173,464	*Compensation income*
LABA USAHA SETELAH SUBSIDI		**44,164,942**	**35,984,071**	***OPERATING INCOME AFTER SUBSIDY***
Penghasilan (beban) lain-lain - bersih	47	(3,667,666)	15,663,363	*Other income (expense) - net*
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih		9,486,326	(10,926,741)	*Gain (loss) on foreign exchange - net*
Penghasilan keuangan		755,103	804,321	*Financial income*
Beban keuangan	46	(24,619,495)	(21,624,176)	*Financial cost*
LABA SEBELUM PAJAK		**26,119,210**	**19,900,838**	***INCOME BEFORE TAX***
BEBAN PAJAK	**48**	**(21,797,080)**	**(8,325,082)**	***TAX EXPENSES***
LABA TAHUN BERJALAN		**4,322,130**	**11,575,756**	***INCOME FOR THE YEAR***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2019 Rp	2018 Rp	
LABA TAHUN BERJALAN		**4,322,130**	**11,575,756**	***INCOME FOR THE YEAR***
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan				***Other comprehensive income for the year***
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that may be reclassified subsequently to profit or loss:*
Bagian penghasilan (beban) komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama	8	(286,917)	255,493	*Share of other comprehensive income (expenses) from associates and joint venture*
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that will not be reclassified to profit or loss:*
Perubahan surplus revaluasi aset tetap	6	(1,183,109)	48,336,627	*Changes in property, plant and equipment revaluation surplus*
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	50	(3,775,959)	4,319,690	*Remeasurement on defined benefit plans*
Manfaat pajak terkait	48	950,394	(5,524,764)	*Related income tax benefits*
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak		**(4,295,591)**	**47,387,046**	***Other comprehensive income for the year after tax***
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**26,539**	**58,962,802**	***TOTAL COMPREHENSIVE (LOSS) INCOME FOR THE YEAR***
Laba tahun berjalan diatribusikan kepada:				*Income for the year attributable to:*
Pemilik entitas induk		4,270,922	11,568,286	*Owner of the parent*
Kepentingan non-pengendali		51,208	7,470	*Non-controlling interest*
Jumlah		**4,322,130**	**11,575,756**	***Total***
Jumlah penghasilan komprehesif tahun berjalan diatribusikan kepada:				*Total comprehensive income for the year attributable to:*
Pemilik entitas induk		(24,669)	58,955,332	*Owner of the parent*
Kepentingan non-pengendali		51,208	7,470	*Non-controlling interest*
Jumlah		**26,539**	**58,962,802**	***Total***
LABA PER SAHAM DASAR (Dalam Rupiah penuh)	49	37,516	105,332	*BASIC EARNINGS PER SHARE (In Rupiah full amount)*

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY

For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Subscribed and paid-up capital stock* Rp	Penyertaan modal Negara dalam proses penerbitan saham/ *Stock subscription from Government in issuance process* Rp	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital* Rp	Saldo laba/ *Retained earnings*		Penghasilan komprehensif lain/ *Other comprehensive income*			Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ *Equity attributable to owner of the parent* Rp	Kepentingan non-pengendali/ *Non-controlling interests* Rp	Jumlah ekuitas/ *Total equity* Rp	
					Ditentukan penggunaannya/ *Appropriated* Rp	Tidak ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated* Rp	Surplus revaluasi aset tetap/ *Property, plant and equipment revaluation surplus* Rp	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti/ *Remeasurement on defined benefit plans* Rp	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama/ *Share of other comprehensive income from associates and joint ventures* Rp				
Saldo per 31 Desember 2017		**109,826,526**	**--**	**20,871,265**	**48,665,115**	**71,093,240**	**631,174,366**	**(13,201,656)**	**489,566**	**868,918,422**	**498,182**	**869,416,604**	***Balance as of December 31, 2017***
Penambahan (pengurangan) tahun berjalan	22	--	--	(691,932)	--	--	--	--	--	(691,932)	--	(691,932)	*Additions (deduction) during the year*
Cadangan umum tahun berjalan	21	--	--	--	4,101,495	(4,101,495)	--	--	--	--	--	--	*Appropriation during the year*
Penambahan modal dan kenaikan nilai wajar porsi kepentingan non-pengendali		--	--	--	--	--	--	--	--	--	36,200	36,200	*Capital addition and fair value increasement from non-controlling interest*
Dividen	21	--	--	--	--	(308,715)	--	--	--	(308,715)	(1,102)	(309,817)	*Dividends*
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan		--	--	--	--	11,568,286	43,907,005	3,239,767	240,274	58,955,332	7,470	58,962,802	*Total comprehensive income for the year*
Saldo per 31 Desember 2018		**109,826,526**	**--**	**20,179,333**	**52,766,610**	**78,251,316**	**675,081,371**	**(9,961,889)**	**729,840**	**926,873,107**	**540,750**	**927,413,857**	***Balance as of December 31, 2018***
Reklasifikasi dari tambahan modal disetor	22	5,354,476	4,028,230	(9,382,706)	--	--	--	--	--	--	--	--	*Reclassification from additional paid-in capital*
Penambahan (pengurangan) tahun berjalan	22	--	6,500,000	(876,669)	--	--	--	--	--	5,623,331	319,424	5,942,755	*Additions (deduction) during the year*
Cadangan umum tahun berjalan	21	--	--	--	7,568,286	(7,568,286)	--	--	--	--	--	--	*Appropriation during the year*
Dividen	21	--	--	--	--	(4,000,000)	--	--	--	(4,000,000)	(2,738)	(4,002,738)	*Dividends*
Reklasifikasi surplus revaluasi aset tetap ke saldo laba		--	--	--	--	43,779	(43,779)	--	--	--	--	--	*Reclassification of property, plant and equipment revaluation surplus to retained earnings*
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan		--	--	--	--	4,270,922	(1,183,109)	(2,831,969)	(280,513)	(24,669)	51,208	26,539	*Total comprehensive income for the year*
Saldo per 31 Desember 2019		**115,181,002**	**10,528,230**	**9,919,958**	**60,334,896**	**70,997,731**	**673,854,483**	**(12,793,858)**	**449,327**	**928,471,769**	**908,644**	**929,380,413**	***Balance as of December 31, 2019***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/ *AND SUBSIDIARIES*

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2019 Rp	2018 Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari pelanggan	287,895,794	275,178,934	*Cash receipts from customers*
Pembayaran kas kepada pemasok	(248,764,095)	(255,587,400)	*Cash paid to suppliers*
Pembayaran kas kepada karyawan	(23,989,254)	(20,897,306)	*Cash paid to employees*
Kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	15,142,445	(1,305,772)	*Cash provided by (used in) operations*
Penerimaan subsidi listrik	51,288,854	56,507,588	*Government subsidy received*
Pembayaran utang kepada pemerintah	(816,849)	--	*Government loan paid*
Penerimaan bunga	755,105	804,321	*Interest received*
Pembayaran bunga	(23,419,701)	(19,730,285)	*Interest expense paid*
Penerimaan restitusi pajak penghasilan	279,394	444,367	*Income tax restitution received*
Pembayaran pajak penghasilan	(3,546,743)	(1,678,194)	*Income tax paid*
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	**39,682,505**	**35,042,025**	***Net cash provided by operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Hasil penjualan aset tidak digunakan dalam operasi	185,527	88,550	*Proceeds from sale of assets not used in operations*
Akuisisi entitas anak	(332,462)	(144,800)	*Acquisition of subsidiary*
Perolehan aset tetap	(100,431,833)	(100,273,650)	*Addition of property, plant and equipment*
Perolehan dividen dari entitas asosiasi dan ventura bersama	224,314	220,734	*Proceeds from dividend of associates and joint ventures*
Perolehan investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	(1,118,251)	(640,737)	*Acquisition of investments in associates and joint ventures*
Pembayaran (penerimaan) kembali atas pinjaman kepada pihak berelasi - bersih	47,596	(719,276)	*Repayments (reception) of loans from related parties - net*
Penarikan (penempatan) rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	(436,079)	2,244,558	*Withdrawal (placement) of restricted cash in banks and time deposits*
Penarikan (penempatan) investasi jangka pendek	879,536	(930,976)	*Withdrawal (placement) of short-term investments*
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	**(100,981,652)**	**(100,155,597)**	***Net cash used in investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Perolehan penyertaan modal Pemerintah dalam proses penerbitan saham	6,500,000	--	*Proceeds from Government for stock subscription in issuance process*
Pembayaran dividen	(4,000,000)	(308,715)	*Payment of dividends*
Pembayaran dividen kepada kepentingan non-pengendali	(2,738)	(1,102)	*Payment of dividends to non-controlling interest*
Pembayaran penerusan pinjaman	(2,566,661)	(2,950,612)	*Payment of two-step loans*
Pembayaran utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank	(1,043,793)	(1,043,793)	*Payment of Government and non-bank Government financial institution loans*
Perolehan utang bank - jatuh tempo dalam satu tahun	24,736,661	44,210,450	*Proceeds from bank loans - current maturities*
Perolehan utang bank - jangka panjang	52,410,478	49,181,404	*Proceeds from bank loans - long-term*
Pembayaran utang bank - jatuh tempo dalam satu tahun	(33,745,952)	(43,881,381)	*Payment of bank loans - current maturities*
Pembayaran utang bank - jangka panjang	(15,617,536)	(13,704,479)	*Payment of bank loans - long-term*
Perolehan utang obligasi	54,597,702	31,236,379	*Proceeds from bonds payable*
Pembayaran utang obligasi	(2,279,812)	(914,000)	*Payment of bonds payable*
Pembayaran utang KIK-EBA	(966,724)	(630,600)	*Payment of KIK-EBA*
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(2,624,629)	(5,186,938)	*Payments of lease liabilities*
Pembayaran utang listrik swasta	(394,405)	(368,142)	*Payments of electricity purchase payable*
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	**75,002,591**	**55,638,471**	***Net cash provided by financing activities***
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**13,703,444**	**(9,475,101)**	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	(399,221)	477,702	*Effect of changes in foreign currency*
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**33,294,560**	**42,291,959**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**46,598,783**	**33,294,560**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR***

Tambahan informasi transaksi non kas disajikan di catatan 51.

Additional information of non cash transaction of presented in note 51.

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum / *1. General*

a. Pendirian dan Informasi Umum

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN" atau "Perusahaan") didirikan pada tahun 1961 dalam bentuk Jawatan di dalam lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga. Perusahaan merupakan kelanjutan usaha beberapa perusahaan listrik Belanda yang diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah"). Perusahaan listrik Belanda tersebut meliputi: NV ANIEM, NV SEM, NV OJEM, NV EMS, NV EMBALOM, NV GEBEO, NV OGEM dan NV WEMI. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1965, status Perusahaan berubah menjadi perusahaan yang berbadan hukum. Selanjutnya ditetapkan menjadi Perusahaan Umum (Perum) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1970 yang dipertegas dengan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1972. Kemudian berdasarkan akta No. 169 tanggal 30 Juli 1994 dari Sutjipto, S.H., notaris di Jakarta, status badan hukum Perusahaan berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Listrik Negara disingkat PT PLN (Persero). Akta perubahan ini disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-11.519.HT.01.01.Th.94 tanggal 1 Agustus 1994, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 13 September 1994, Tambahan No.6731.

Anggaran dasar Perusahaan terakhir diubah berdasarkan akta notaris No. 39 tanggal 30 Mei 2017 dari Lenny Janis Ishak, S.H., notaris di Jakarta.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dan memiliki 56 unit pelaksana yang tersebar di wilayah Indonesia. Kantor Pusat Perusahaan beralamat di Jl. Trunojoyo Blok M I No. 135, Jakarta.

a. Establishment and General Information

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN" or "the Company") was established in 1961 as a unit of the Ministry of Energy and Public Works. The Company is a business continuation of several Dutch electricity companies which have been taken over by the Government of the Republic of Indonesia ("the Government"). The Dutch electricity companies include among others: NV ANIEM, NV SEM, NV OJEM, NV EMS, NV EMBALOM, NV GEBEO, NV OGEM and NV WEMI. Based on Government Regulation No. 19 year 1965, the Company's status was changed to a legal entity. Subsequently, based on Government Regulation No. 30 year 1970, as amended by Government Regulation No. 18 year 1972, the Company became a Perusahaan Umum (Perum). Based on the notarial deed of Sutjipto, S.H., notary in Jakarta, No. 169 dated July 30, 1994, the Company's status was changed to Limited Liability Company and it was named Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Listrik Negara or PT PLN (Persero). This change was approved by the Minister of Justice in his decision letter No. C2-11.519.HT.01.01.Th.94 dated August 1, 1994 and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 73 dated September 13, 1994, Supplement No.6731.

The articles of association of the Company were recently amended by notarial deed No. 39 dated May 30, 2017 of Lenny Janis Ishak, S.H., notary in Jakarta.

The Company is domiciled in Jakarta, with 56 business unit offices spread all over Indonesia. The Company's Head Office is located at Jl. Trunojoyo Blok M I No. 135, Jakarta.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

In accordance with article 3 of the Company's articles of association, the scope of its activities is to run an electricity business for public use, which must be satisfactory both in quantity and quality and also to earn profit and perform Government's assignment in electricity business in order to support the development with the application of the principles of Limited Liability Companies.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang "Badan Usaha Milik Negara ("BUMN")", Pemerintah wajib memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN termasuk *margin* yang diharapkan kepada BUMN yang diberikan penugasan khusus. Perusahaan merupakan BUMN yang sedang melaksanakan penugasan khusus berupa penyediaan tenaga listrik bersubsidi kepada masyarakat (Catatan 38).

Based on Law No. 19 year 2003, regarding "State-Owned Enterprises ("BUMN")", the Government is obliged to provide compensation to these BUMN, which were appointed to perform special assignments, for all expenses which they have incurred, including expected return (margin). The Company is a BUMN, which performs a special assignment of providing subsidized electricity to the public (Note 38).

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak masing-masing 54.129 karyawan (tidak diaudit) dan 54.124 karyawan (tidak diaudit). Jumlah karyawan tidak termasuk karyawan dari PT Haleyora Powerindo yang bergerak dibidang jasa tenaga kerja. PT Haleyora Powerindo adalah entitas anak dari PT Haleyora Power, entitas anak Perusahaan.

As of December 31, 2019 and 2018 the Company and its subsidiaries had a total number of employees of 54,129 (unaudited) and 54,124 (unaudited), respectively. The total employees do not include employees of PT Haleyora Powerindo whose nature of business is manpower services. PT Haleyora Powerindo is a subsidiary of PT Haleyora Power, the Company's subsidiary.

b. Penawaran Umum Efek Utang Perusahaan

Perusahaan telah beberapa kali menerbitkan Obligasi dan Surat Utang PLN, sebagai berikut:

b. The Company's Public Offering of Bonds

The Company has issued several PLN Bonds and Notes, as follows:

	Tanggal efektif/ *Effective date*	Bursa pencatatan/ *Listed in*)*	Tanggal pencatatan/ *Listed date*	Jumlah yang ditawarkan/ *Offered amount* Rp	
Obligasi Rupiah					*Rupiah Bonds*
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019	*29 Juni 2018/ June 29, 2018*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia stock exchange*	01 Oktober, *2019 October 01, 2019*	1,912,900	*Shelf Registration Bonds III PLN Phase V Year 2019*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019	*29 Juni 2018/ June 29, 2018*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia stock exchange*	01 Oktober, *2019 October 01, 2019*	797,500	*Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN Phase V Year 2019*
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019	*29 Juni 2018/ June 29, 2018*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia stock exchange*	01 Agustus 2019/ *August 01, 2019*	2,953,620	*Shelf Registration Bonds III PLN Phase IV Year 2019*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019	*29 Juni 2018/ June 29, 2018*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia stock exchange*	01 Agustus 2019/ *August 01, 2019*	1,250,000	*Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN Phase IV Year 2019*

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tanggal efektif/ *Effective date*	Bursa pencatatan/ *Listed in*)*	Tanggal pencatatan/ *Listed date*	Jumlah yang ditawarkan/ *Offered amount* Rp	
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019	*29 Juni 2018/ June 29, 2018*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia stock exchange*	19 Februari 2019/ *February 19, 2019/*	2,393,000	*Shelf Registration Bonds III PLN Phase III Year 2019*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019	*29 Juni 2018/ June 29, 2018*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia stock exchange*	19 Februari 2019/ *February 19, 2019/*	863,000	*Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN Phase III Year 2019*
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018	10 Oktober 2018/ *October 10, 2018*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia stock exchange*	10 Oktober 2018/ *October 10, 2018*	832,000	*Shelf Registration Bonds III PLN Phase II Year 2018*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018	10 Oktober 2018/ *October 10, 2018*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia stock exchange*	10 Oktober 2018/ *October 10, 2018*	224,000	*Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN Phase II Year 2018*
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018	29 Juni 2018/ *June 29, 2018*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia stock exchange*	10 Juli 2018/ *July 10, 2018*	1,278,500	*Shelf Registration Bonds III PLN Phase I Year 2018*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018	29 Juni 2018/ *June 29, 2018*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia stock exchange*	10 Juli 2018/ *July 10, 2018*	750,000	*Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN Phase I Year 2018*
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018	21 Juni 2017/ *June 21, 2017*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia stock exchange*	23 Februari 2018/ *February 23, 2018/*	2,535,000	*Shelf Registration Bonds II PLN Phase III Year 2018*
Sukuk Ijara Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018	21 Juni 2017/ *June 21, 2017*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia stock exchange*	23 Februari 2018/ *Februari 23, 2018*	698,500	*Shelf Registration Sukuk Ijara II PLN Phase III Year 2018*
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017	21 Juni 2017/ *June 21, 2017*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia stock exchange*	2 November 2017/ *November 2, 2017*	2,545,500	*Shelf Registration Bonds II PLN Phase II Year 2017*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017	21 Juni 2017/ *June 21, 2017*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia stock exchange*	2 November 2017/ *November 2, 2017*	694,500	*Shelf Registration Sukuk Ijara II PLN Phase II Year 2017*
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017	21 Juni 2017/ *June 21, 2017*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia stock exchange*	12 Juli 2017/ *July 12, 2017*	1,600,000	*Shelf Registration Bonds II PLN Phase I Year 2017*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017	21 Juni 2017/ *June 21, 2017*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia stock exchange*	12 Juli 2017/ *July 12, 2017*	400,000	*Shelf Registration Sukuk Ijara II PLN Phase I Year 2017*
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013	27 Juni 2013/ *June 27, 2013*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia stock exchange*	11 Desember 2013/ *December 11, 2013*	1,244,000	*Shelf Registration Bonds I PLN Phase II Year 2013*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013	27 Juni 2013/ *June 27, 2013*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia stock exchange*	11 Desember 2013/ *December 11, 2013*	429,000	*Shelf Registration Sukuk Ijara I PLN Phase II Year 2013*
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013	27 Juni 2013/ *June 27, 2013*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia stock exchange*	8 Juli 2013/ *July 8, 2013*	879,000	*Shelf Registration Bonds I PLN Phase I Year 2013*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013	27 Juni 2013/ *June 27, 2013*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia stock exchange*	8 Juli 2013/ *July 8, 2013*	121,000	*Shelf Registration Sukuk Ijara I PLN Phase I Year 2013*
Obligasi PLN XII Tahun 2010	30 Juni 2010/ *June 30, 2010*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia stock exchange*	9 Juli 2010/ *July 9, 2010*	2,500,000	*PLN XII Bonds Year 2010*
Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010	30 Juni 2010/ *June 30, 2010*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia stock exchange*	9 Juli 2010/ *July 9, 2010*	500,000	*Sukuk Ijara V PLN Year 2010*
Obligasi PLN XI Tahun 2010	31 Desember 2009/ *December 31, 2009*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia stock exchange*	13 Januari 2010/ *January 13, 2010*	2,703,000	*PLN XI Bonds Year 2010*
Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010	31 Desember 2009/ *December 31, 2009*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia stock exchange*	13 Januari 2010/ *January 13, 2010*	297,000	*Sukuk Ijara IV PLN Year 2010*
Obligasi PLN X Tahun 2009	31 Desember 2008/ *December 31, 2008*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia stock exchange*	12 Januari 2009/ *January 12, 2009*	1,440,000	*PLN X Bonds Year 2009*
Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009	31 Desember 2008/ *December 31, 2008*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia stock exchange*	12 Januari 2009/ *January 12, 2009*	760,000	*Sukuk Ijara III PLN Year 2009*
Obligasi PLN IX Tahun 2007	29 Juni 2007/ *June 29, 2007*	Bursa Efek Surabaya/ *Surabaya stock exchange*	11 Juli 2007/ *July 11, 2007*	2,700,000	*PLN IX Bonds Year 2007*
Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007	29 Juni 2007/ *June 29, 2007*	Bursa Efek Surabaya/ *Surabaya stock exchange*	11 Juli 2007/ *July 11, 2007*	300,000	*Sukuk Ijara II PLN Year 2007*
Obligasi PLN VIII Tahun 2006	12 Juni 2006/ *June 12, 2006*	Bursa Efek Surabaya/ *Surabaya stock exchange*	22 Juni 2016/ *June 22, 2016*	2,200,100	*PLN VIII Bonds Year 2006*
Sukuk Ijarah PLN I Tahun 2006	12 Juni 2006/ *June 12, 2006*	Bursa Efek Surabaya/ *Surabaya stock exchange*	22 Juni 2016/ *June 22, 2016*	200,000	*Sukuk Ijara I PLN Year 2006*
Obligasi PLN VII Tahun 2004	3 November 2004/ *November 3, 2004*	Bursa Efek Surabaya/ *Surabaya stock exchange*	12 November 2004/ *November 12, 2004*	1,500,000	*PLN VII Bonds Year 2004*
Obligasi PLN VI Tahun 1997	27 Juni 1997/ *June 27, 1997*	Bursa Efek Surabaya/ *Surabaya stock exchange*	12 Agustus 1997/ *August 12, 1997*	600,000	*PLN VI Bonds Year 1997*

	Tanggal efektif/ *Effective date*	Bursa pencatatan/ *Listed in*)*	Tanggal pencatatan/ *Listed date*	Jumlah yang ditawarkan/ *Offered amount* Rp	
Obligasi PLN V Tahun 1996	28 Juni 1996/ *June 28, 1996*	Bursa Efek Surabaya/ *Surabaya stock exchange*	28 Agustus 1996/ *August 28, 1996*	1,000,000	*PLN V Bonds Year 1996*
Obligasi PLN IV Tahun 1995	30 Juni 1995/ *June 30, 1995*	Bursa Paralel Indonesia/ *Indonesia Parallel exchange*	4 September 1995/ *September 4, 1995*	680,000	*PLN IV Bonds Year 1995*
Obligasi PLN III Tahun 1995	30 Januari 1995/ *January 30, 1995*	Bursa Paralel Indonesia/ *Indonesia Parallel exchange*	18 April 1995/ *April 18, 1995*	318,430	*PLN III Bonds Year 1995*
Obligasi PLN II Tahun 1993	28 September 1993/ *September 28, 1993*	Bursa Paralel Indonesia/ *Indonesia Parallel exchange*	8 November 1993/ *November 8, 1993*	600,000	*PLN II Bonds Year 1993*
Obligasi PLN I Tahun 1992	25 September 1992/ *September 25, 1992*	Bursa Paralel Indonesia/ *Indonesia Parallel exchange*	10 November 1992/ *November 10, 1992*	300,000	*PLN I Bonds Year 1992*
Jumlah				**42,999,550**	***Total***

*) Pada tanggal 22 Juli 1995 Bursa Paralel Indonesia diakuisisi oleh Bursa Efek Surabaya.

Pada tanggal 30 Oktober 2007 Bursa Efek Surabaya melakukan merger dengan melebur ke dalam Bursa Efek Jakarta yang selanjutnya berganti nama menjadi Bursa Efek Indonesia.

*) *On July 22, 1995 Indonesia Parallel Exchange was acquired by Surabaya Stock Exchange.*

On October 30, 2007 Surabaya Stock Exchange was officially merged to Jakarta Stock Exchange, which then changed its name to Indonesia Stock Exchange.

	Tanggal Efektif/ *Effective Date*	Bursa Pencatatan/ *Listed In*	Tanggal Pencatatan/ *Listed date*	Jumlah Yang Ditawarkan/ *Offered Amount *)* US$	
Surat Utang Jangka Menengah Global - US$					*Global Medium Term Notes - US$*
Penerbitan tahun 2019	05 November 2019/ *November 05, 2019*	Bursa Efek Singapura/ *Singapore Stock Exchange*	7 November 2019/ *November 7, 2019*	1,000,000,000	*Issued in 2019*
	17 Juli 2019/ *July 17, 2019*	Bursa Efek Singapura/ *Singapore Stock Exchange*	18 Juli 2019/ *July 18, 2019*	1,400,000,000	
Penerbitan tahun 2018	25 Oktober 2018/ *October 25, 2018*	Bursa Efek Singapura/ *Singapore Stock Exchange*	26 Oktober 2018/ *October 26, 2018*	1,000,000,000	*Issued in 2018*
	21 Mei 2018/ *May 21, 2018*	Bursa Efek Singapura/ *Singapore Stock Exchange*	16 Mei 2017/ *May 16, 2017*	2,000,000,000	
Penerbitan tahun 2017	15 Mei 2017/ *May 15, 2017*	Bursa Efek Singapura/ *Singapore Stock Exchange*	16 Mei 2017/ *May 16, 2017*	2,000,000,000	*Issued in 2017*
Penerbitan tahun 2012	24 Oktober 2012/ *October 24, 2012*	Bursa Efek Singapura/ *Singapore Stock Exchange*	25 Oktober 2012/ *October 25, 2012*	1,000,000,000	*Issued in 2012*
Penerbitan tahun 2011	22 November 2011/ *November 22, 2011*	Bursa Efek Singapura/ *Singapore Stock Exchange*	23 November 2011/ *November 23, 2011*	1,000,000,000	*Issued in 2011*
Jumlah				**9,400,000,000**	***Total***
Surat Utang Jangka Menengah Global - EUR					*Global Medium Term Notes - EUR*
Penerbitan tahun 2019	5 November 2019/ *November 5, 2019*	Bursa Efek Singapura/ *Singapore Stock Exchange*	7 November 2019/ *November 7, 2019*	500,000,000	*Issued in 2019*
Penerbitan tahun 2018	25 Oktober 2018/ *October 25, 2018*	Bursa Efek Singapura/ *Singapore Stock Exchange*	26 Oktober 2018/ *October 26, 2018*	500,000,000	*Issued in 2018*
Jumlah				**1,000,000,000**	***Total***
Surat Utang Jangka Menengah Global - JPY					*Global Medium Term Notes - JPY*
Penerbitan tahun 2019	20 September 2019/ *September 20, 2019*	Tidak tercatat/ *Not listed*	N/A	23,200,000,000	*Issued in 2019*
Jumlah				**23,200,000,000**	***Total***

*) Dalam jumlah penuh/ *In full amount*

Majapahit Holding B.V., Belanda, entitas anak yang bertujuan khusus yang sepenuhnya milik Perusahaan, menerbitkan Obligasi Terjamin, sebagai berikut:

Majapahit Holding B.V., Netherlands, a wholly-owned special-purpose subsidiary of the Company, issued Guaranteed Notes, as follows:

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tanggal Efektif/ *Effective Date*	Bursa Pencatatan/ *Listed In*	Tanggal Pencatatan/ *Listed date*	*Amount *)* US$	
Obligasi Terjamin - US$					*Guaranteed Notes - US$*
Penerbitan 2009	6 November 2009/ *November 6, 2009*	Bursa Efek Singapura/ *Singapore Stock Exchange*	9 November 2009/ *November 9, 2009*	1,250,000,000	*Issued in 2009*
Penerbitan 2009	7 Agustus 2009/ August 7, 2009	Bursa Efek Singapura/ *Singapore Stock Exchange*	11 Agustus 2009/ *August 11, 2009*	750,000,000	*Issued in 2009*
Penerbitan 2007	*28 Juni 2007/ June 28, 2007*	Bursa Efek Singapura/ *Singapore Stock Exchange*	29 Juni 2007/ *June 29, 2007*	1,000,000,000	*Issued in 2007*
Penerbitan 2006	16 Oktober 2006/ *October 16, 2006*	Bursa Efek Singapura/ *Singapore Stock Exchange*	17 Oktober 2006/ *October 17, 2006*	1,000,000,000	*Issued in 2006*
Jumlah				**4,000,000,000**	***Total***

*) Dalam jumlah penuh/ *In full amount*

Sebagian obiligasi terjamin yang diterbitkan pada tahun 2009 dan 2007 telah dilakukan pembayaran pokok dipercepat pada tanggal 21 Mei 2018 melalui penerbitan Surat Utang Menengah Global tahun 2018 (Catatan 28).

Partial portion of guaranteed notes issued in 2009 and 2007 have been accelerated repaid on May 21, 2018, through the issuance of 2018 Global Medium Term Notes (Note 28).

c. Susunan Pengurus dan Informasi Lain
Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, susunan pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut:

c. Management and Other Information
As of December 31, 2019 and 2018, the Company's management consists of the following:

	2019	2018	
Dewan Komisaris			***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	Amien Sunaryadi	-	*President Commissioner*
Pelaksana Tugas Komisaris Utama	-	Ilya Avianti	*Acting as President Commissioner*
Wakil Komisaris Utama	Suahasil Nazara	-	*Vice President Commissioner*
Komisaris	Rida Mulyana Ilya Avianti Mohamad Ikhsan	Rionald Silaban Ilya Avianti Andy Noorsaman Sommeng Darmawan Prasodjo Aloysius Kiik Ro Budiman	*Commissioners*
Komisaris Independen	Amien Sunaryadi Deden Juhara	Oegroseno Darmono	*Independent Commissioners*
Direksi			***Board of Directors***
Direktur Utama	Zulkifli Zaini	Sofyan Basir	*President Director*
Wakil Direktur Utama	Darmawan Prasodjo	-	*Vice President Director*
Direktur Keuangan	Sinthya Roesly	Sarwono Sudarto	*Director of Finance*
Direktur Perencanaan Korporat	Syofvi Felienty Roekman	Syofvi Felienty Roekman	*Director of Coorporate Planning*
Direktur *Human Capital Management*	Muhamad Ali	Muhamad Ali	*Director of Human Capital Management*
Direktur Pengadaan Strategis 1	Sripeni Inten Cahyani	-	*Director of Strategic Procurement 1*
Pelaksana Tugas Direktur Pengadaan Strategis 1	-	Sofyan Basir	*Acting as Director of Strategic Procurement 1*
Direktur Pengadaan Strategis 2	Djoko Rahardjo Abu Manan	Supangkat Iwan Santoso	*Director of Strategic Procurement 2*
Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali	Haryanto W.S	-	*Director of Regional Business of Java, Madura and Bali*
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat	-	Haryanto W.S	*Director of Regional Business of West Part of Java*
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah	-	Amir Rosidin	*Director of Regional Business of Central Side of Java*
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara	-	Djoko Rahardjo Abu Manan	*Director of Regional Business of East Side of Java, Bali and Nusa Tenggara*
Direktur Bisnis Regional Sumatera	Wiluyo Kusdwiharto	Wiluyo Kusdwiharto	*Director of Regional Business of Sumatera*
Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Kalimantan	Syamsul Huda	-	*Director of Regional Business of Sulawesi and Kalimantan*
Direktur Bisnis Regional Kalimantan	-	Machnizon	*Director of Regional Business of Kalimantan*
Direktur Bisnis Regional Sulawesi	-	Syamsul Huda	*Director of Regional Business of Sulawesi*
Direktur Bisnis Regional Maluku, Papua dan Nusa Tenggara	Ahmad Rofik	-	*Director of Regional Business of Maluku, Papua and Nusa Tenggara*
Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua	-	Ahmad Rofik	*Director of Regional Business of Maluku and Papua*

	2019	2018	
Komite Audit			***Audit Committee***
Ketua	Amien Sunaryadi	Darmono	*Chairman*
Anggota	Achmad Wahyudi Nizam Burhanudin Ilya Avianti Krisna Simbaputra	Achmad Wahyudi Rionald Silaban Ilya Avianti Krisna Simbaputra	*Members*
Sekretaris Perusahaan			***Corporate Secretary***
Sekretaris Perusahaan	Adi Setiawan	Bambang Dwiyanto	*Corporate Secretary*

Berdasarkan Surat Keputusan ("SK") Menteri BUMN Republik Indonesia No. SK-211/MBU/10/2014 tanggal 16 Oktober 2014, Oegroseno dan Darmono diangkat sebagai Komisaris Independen.

Based on the Decision Letter of the Minister of BUMN of the Republic of Indonesia No. SK-211/MBU/10/2014 dated October 16, 2014, Oegroseno and Darmono were appointed as Independent Commissioners.

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No. KEP-273/MBU//12/2014 tanggal 23 Desember 2014, Budiman diangkat sebagai Komisaris.

Based on the Decision Letter of the Minister of BUMN of the Republic of Indonesia No. KEP-273/MBU//12/2014 dated December 23, 2014, Budiman were appointed as Commissioner.

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No. SK-183/MBU/09/2015 tanggal 25 September 2015, Aloysius Kiik Ro diangkat sebagai Komisaris.

Based on the Decision Letter of the Minister of BUMN of the Republic of Indonesia No. SK-183/MBU/09/2015 dated September 25, 2015, Aloysius Kiik Ro was appointed as Commissioner.

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No. SK-41/MBU/02/2017 tanggal 28 Februari 2017, Rionald Silaban diangkat sebagai Komisaris. Kemudian pada tanggal 7 Maret 2017, Rionald Silaban diangkat sebagai Komite Audit berdasarkan SK Komisaris Perusahaan No. 01/SK/DK-PLN/2017.

Based on the Decision Letter of the Minister of BUMN of the Republic of Indonesia No. SK-41/MBU/02/2017 dated February 28, 2017, Rionald Silaban was appointed as Commissioner. Later on March 7, 2017, Rionald Silaban was appointed as Audit Commitee based on Decision Letter of Commissioner No. 01/SK/DK-PLN/2017.

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No. SK-128/MBU/07/2017 tanggal 12 Juli 2017, Andy Noorsaman Sommeng diangkat sebagai Komisaris.

Based on the Decision Letter of the Minister of BUMN of the Republic of Indonesia No. SK-128/MBU/07/2017 dated July 12, 2017, Andy Noorsaman Sommeng was appointed as Commissioner.

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No. SK-145/MBU/07/2017 tanggal 28 Juli 2017, Ilya Avianti diangkat sebagai Komisaris kemudian pada tanggal 8 Agustus 2017, Ilya Avianti diangkat sebagai Komite Audit berdasarkan SK Komisaris Perusahaan No. 8/SK/DK-PLN/2017.

Based on the Decision Letter of the Minister of BUMN of the Republic of Indonesia No. SK-145/MBU/07/2017 dated July 28, 2017, Ilya Avianti was appointed as Commissioner later on August 8, 2017, Ilya Avianti was appointed as Audit Commitee based on Decisison Letter of Commissioner No. 8/SK/DK-PLN/2017.

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No. SK-224/MBU/08/2018 tanggal 6 Agustus 2018, Darmawan Prasodjo diangkat sebagai Komisaris, Ilya Avianti ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Utama, dan memberhentikan dengan hormat Hasan Bisri sebagai Komisaris.

Based on the Decision Letter of the Minister of BUMN of the Republic of Indonesia No. SK-224/MBU/08/2018 dated August 6, 2018, Darmawan Prasodjo was appointed as Commissioner, Ilya Avianti was assigned as Acting President Commissioner, and Hasan Bisri was honorably discharged as Commissioner.

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No. SK-272/MBU/12/2014 tanggal 23 Desember 2014, Sofyan Basir diangkat sebagai Direktur Utama Perusahaan, dan Sarwono Sudarto, Supangkat Iwan Santoso dan Amir Rosidin, diangkat sebagai Direktur Perusahaan.

Based on the Decision Letter of the Minister of BUMN of the Republic of Indonesia No. SK-272/MBU/12/2014 dated December 23, 2014, Sofyan Basir was appointed as the Company's President Director, and Sarwono Sudarto, Supangkat Iwan Santoso and Amir Rosidin, were appointed as the Company's Directors.

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No. SK-211/MBU/10/2015 tanggal 30 Oktober 2015, Muhamad Ali, Djoko Rahardjo Abu Manan, Machnizon dan Haryanto W.S diangkat sebagai Direktur Perusahaan.

Based on the Decision Letter of the Minister of BUMN of the Republic of Indonesia No. SK-211/MBU/10/2015 dated October 30, 2015, Muhamad Ali, Djoko Rahardjo Abu Manan, Machnizon and Haryanto W.S were appointed as the Company's Directors.

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No. SK-138/MBU/07/2017 tanggal 24 Juli 2017, Syofvi Felienty Roekman, Syamsul Huda, Ahmad Rofik dan Wiluyo Kusdwiharto diangkat sebagai Direktur Perusahaan.

Based on the Decision Letter of the Minister of BUMN of the Republic of Indonesia No. SK-138/MBU/07/2017 dated July 24, 2017, Syofvi Felienty Roekman, Syamsul Huda, Ahmad Rofik and Wiluyo Kusdwiharto were appointed as the Company's Director.

Berdasarkan Keputusan Direksi No. 108/DIR/2017, Sofyan Basir ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Direktur Pengadaan Strategis 1.

Based on Directors Decision No. 108/DIR/2017, Sofyan Basir appointed as Acting Director of Strategic Procurement 1.

Berdasarkan SK Komisaris Perusahaan No. 198/SK/DK-PLN/2015 tanggal 16 Oktober 2015, Darmono diangkat sebagai Ketua Komite Audit. Kemudian berdasarkan SK Komisaris Perusahaan No. 19/SK/DK-PLN/2016 tanggal 28 Juli 2016 Achmad Wahyudi, diangkat sebagai anggota Komite Audit.

Based on Decision Letter of the Company's Board of Commissioners No. 198/SK/DK-PLN/2015 dated October 16, 2015, Darmono was appointed as the Chairman. Later based on the Company's Board of Commissioners SK No. 19/SK/DK-PLN/2016 dated July 28, 2016, Achmad Wahyudi, was appointed as member of the Audit Committee.

Berdasarkan SK Dewan Komisaris Perusahaan No.16/SK/DK-PLN/2017 tanggal 20 September 2017, Krisna Simbaputra diangkat sebagai anggota Komite Audit.

Based on Decision Letter of the Company's Board of Commissioners No. 16/SK/DK-PLN/2017 dated September 20, 2017, Krisna Simbaputra was appointed as a member of the Audit Committee.

Berdasarkan Keputusan Direksi No. 3210.K/SDM.00.03/DIR/2016 tanggal 30 Desember 2016, Bambang Dwiyanto diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan.	*Based on the Decree of the Board of Directors No. 3210.K/SDM.00.03/DIR/2016 dated December 30, 2016, Bambang Dwiyanto was appointed as Corporate Secretary.*
Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No. SK-55/MBU/02/2019 tanggal 28 Februari 2019, Deden Juhara diangkat sebagai Komisaris Independen, Rida Mulyana diangkat sebagai Komisaris, memberhentikan dengan hormat Oegroseno sebagai Komisaris Independen dan memberhentikan dengan hormat Andy Noorsaman Sommeng sebagai Komisaris.	*Based on the Decision Letter of the Minister of BUMN of the Republic of Indonesia No. SK-55/MBU/02/2019 dated February 28, 2019, Deden Juhara was appointed as Independent Commissioner, Rida Mulyana was appointed as Commissioner, Oegroseno was honorably discharged as Independent Commissioner and Andy Noorsaman Sommeng was honorably discharged as Commissioner.*
Berdasarkan Keputusan Direksi No. 0913.K/SDM.00.03/DIR/2019 tanggal 4 Maret 2019, Adi Setiawan diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan.	*Based on the Decree of the Board of Directors No.0913.K/SDM.00.03/DIR/2019 dated March 4, 2019, Adi Setiawan was appointed as Corporate Secretary.*
Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 6/SK/DK-PLN/2019 tanggal 27 Maret 2019, Nizam Burhanudin diangkat sebagai Anggota Komite Audit.	*Based on the Decree of the Board of Commissioners No. 6/SK/DK-PLN/2019 dated March 27, 2019, Nizam Burhanudin was appointed as a member of Audit Committee.*
Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No.7/SK/DK-PLN/2019 tanggal 24 April 2019, Sofyan Basir diberhentikan sementara sebagai Direktur Utama dan Pelaksana Tugas Direktur Pengadaan Strategis 1 dan Muhamad Ali ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama.	*Based on Decision Letter of the Company's Board of Commissioners No.7/SK/DK-PLN/ 2019 dated on April 24, 2019, Sofyan Basir was temporarily discharged as President Director and Acting Director of Strategic Procurement 1 and Muhamad Ali was appointed as Acting President Director.*
Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No. SK-109/MBU/05/2019 tanggal 29 Mei 2019, memberhentikan Sofyan Basir sebagai Direktur Utama, mengangkat Supangkat Iwan Santoso semula sebagai Direktur Pengadaan Strategis 2 menjadi Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara, dan mengangkat Djoko Rahardjo Abu Manan semula sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara menjadi Direktur Pengadaan Strategis 2 dan Pelaksana Tugas Direktur Utama, serta mengangkat Sripeni Inten Cahyani sebagai Direktur Pengadaan Strategis 1.	*Based on the Decision Letter of the Minister of BUMN of the Republic of Indonesia No. SK-109/MBU/05/2019 dated May 29, 2019, Sofyan Basir was discharged as President Director, Supangkat Iwan Santoso that previously as Director of Strategic Procurement 2 appointed as Director of Regional Business of East Side of Java, Bali and Nusa Tenggara, and Djoko Rahardjo Abu Manan that previously as Director of Regional Business of East Side of Java, Bali and Nusa Tenggara appointed as Director of Strategic Procurement 2 and Acting President Director, and Sripeni Inten Cahyani was appointed as Director of Strategic Procurement 1.*

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No.SK-169/MBU/08/19 tanggal 2 Agustus 2019, memberhentikan dengan hormat Machnizon sebagai Direktur Bisnis Regional Kalimantan dan Syamsul Huda ditunjuk sebagai Direktur Bisnis Regional Kalimantan dan Sripeni Inten Cahyani diangkat sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama.

Based on Decision Letter of the Minister of BUMN of the Republic Indonesia No.SK-169/MBU/08/19 dated on August 2, 2019, Machnizon was honorably discharged as Director of Regional Business of Kalimantan and Syamsul Huda was appointed as Director of Regional Business of Kalimantan and Sripeni Inten Cahyani was appointed as Acting President Director.

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No.SK-189/MBU/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019 memberhentikan dengan hormat Rionald Silaban sebagai Komisaris Perusahaan dan Sumiyati diangkat sebagai Komisaris Perusahaan.

Based on Decision Letter of the Minister of BUMN Republic Indonesia No.SK- 189/MBU/08/2019 dated on August 30, 2019, Rionald Silaban was discharged as Commisioner of the Company and Sumiyati was appointed as Commisioner of the Company.

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No.SK-221 MBU/10/19 tanggal 17 Oktober 2019, memberhentikan dengan hormat Darmono sebagai Komisaris Independen Perusahaan.

Based on Decision Letter of the Minister of BUMN of the Republic Indonesia No.SK-221 MBU/10/19 dated on October 17, 2019, Darmono was honorably discharged as Independent Commissioners of the Company.

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No.SK-325 MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019, dinyatakan sebagai berikut:

Based on Decision Letter of the Minister of BUMN Republic Indonesia No.SK-325 MBU/12/2019 dated on December 23, 2019, stated as follows:

- Memberhentikan dengan hormat Sarwono Sudarto sebagai Direktur Keuangan, Amir Rosidin sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah, Supangkat Iwan Santoso sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara.

- *Honorably discharged Sarwono Sudarto as Finance Director, Amir Rosidin as Director of Regional Business of Central Part of Java, Supangkat Iwan Santoso as Director of Regional Business of East Side of Java, Bali and Nusa Tenggara.*

- Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perusahaan menjadi sebagai berikut:
  Menambahkan jabatan Wakil Direktur Utama; Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat menjadi Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali; Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara dihapuskan; Direktur Bisnis Regional Sulawesi menjadi Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Kalimantan; Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua menjadi Direktur Bisnis Regional Maluku, Papua dan Nusa Tenggara.

- *Changed the nomenclature position of the members of the Company's Directors as follows:*
  Added position of Vice President Director; Director of Regional Business of West Part of Java became Director of Regional Business of Java, Madura and Bali; Director of Regional Business of East Side of Java, Bali and Nusa Tenggara abolished; Director of Regional Business of Sulawesi became Director of Regional Business of Sulawesi and Kalimantan; Director of Regional Business of Maluku and Papua became Director of Regional Business of Maluku, Papua and Nusa Tenggara.

- Mengangkat Haryanto W.S sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali, Syamsul Huda sebagai Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Kalimantan, Ahmad Rofik sebagai Bisnis Regional Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara, dan mengangkat Zulkifli Zaini sebagai Direktur Utama, Darmawan Prasodjo sebagai Wakil Direktur Utama dan Sinthya Roesly sebagai Direktur Keuangan.

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No.SK-326 MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019, memberhentikan dengan hormat Aloysius Kiik Ro dan Sumiyati sebagai Komisaris Perusahaan dan mengangkat Amien Sunaryadi sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen, serta Suahasil Nazara sebagai Wakil Komisaris Utama.

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No.SK-334 MBU/12/2019 tanggal 26 Desember 2019, memberhentikan dengan hormat Darmawan Prasodjo sebagai Komisaris Perusahaan dan mengangkat Mohamad Ikhsan sebagai Komisaris Perusahaan.

Berdasarkan SK Dewan Komisaris Perusahaan No. 19/SK/D-PLN/2019 tanggal 30 Desember 2019, Amien Sunaryadi ditetapkan sebagai Ketua Komite Audit

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No. SK-22/MBU/01/2020 tanggal 16 Januari 2020, Budiman dihentikan dengan hormat sebagai komisaris efektif pada tanggal 23 Desember 2019.

- *Appointed Haryanto W.S as Director of Regional Business of Java, Madura and Bali, Syamsul Huda as Director of Regional Business of Sulawesi and Kalimantan, Ahmad Rofik as Director of Regional Business of Maluku, Papua, and Nusa Tenggara, and appointed Zulkifli Zaini as President Director, Darmawan Prasodjo as Vice President Director and Sinthya Roesly as Finance Director.*

Based on Decision Letter of the Minister of BUMN of the Republic Indonesia No.SK-326 MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019, Aloysius Kiik Ro and Sumiyati were honorably discharged as Independent Commissioners of the Company and appointed Amien Sunaryadi as President Commissioner and Independent Commissioner, and Suahasil Nazara as Vice President Commissioner.

Based on Decision Letter of the Minister of BUMN Republic Indonesia No.SK-334 MBU/12/2019 dated on December 26, 2019, Darmawan Prasodjo was discharged as Commisioner of the Company and Mohamad Ikhsan was appointed as Commisioner of the Company.

Based on Decision Letter of the Company's Board of Commissioners No. 19/SK/D-PLN/2019 dated December 30, 2019, Amien Sunaryadi was apponited as the Chairman of Audit Committee.

Based on the Decision Letter of the Minister of BUMN of the Republic of Indonesia No. SK- 22/MBU/01/2020 dated January 16, 2020, Budiman was honorably discharged as Commissioner of the Company effective at December 23, 2019.

2. Penerapan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia ("PABU")

a. Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.04/2017 tentang Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ("POJK No.6")

Perusahaan dan entitas anak mengadakan perjanjian jual beli tenaga listrik, yakni Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ("PPA") dan Kontrak Penjualan Energi ("ESC"),

2. Implementation of Indonesian Generally Accepted Accounting Principles ("GAAP")

a. Implementation of Financial Services Authority Regulation No.6/POJK.04/2017 regarding Accounting Treatment for Transactions Based on Power Purchase Agreements ("POJK No.6")

The Company and its subsidiaries entered into power purchase agreements namely Power Purchase Agreements ("PPA") and Energy Sales Contracts ("ESC"), with

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

dengan Penyedia dan Pengembang Tenaga Listrik Swasta ("IPP"). IPP tersebut merupakan pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum, yang dapat diserahkan kepada entitas usaha lain dengan tanggung jawab untuk menghasilkan tenaga listrik guna kepentingan umum.

Independent Power Producers ("IPPs"). Those IPPs are holders of Electricity Business License for public use, which may be granted to other business entities with responsibility to generate electricity for public use.

Sebelum 1 Januari 2016, Perusahaan dan entitas anak menerapkan ISAK 8: Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa ("ISAK 8") dalam mengevaluasi apakah PPA dan ESC dengan IPP mengandung unsur sewa (Catatan 3.l).

Before January 1, 2016, the Company and its subsidiaries applied ISFAS 8: Determining Whether an Arrangement Contain a Lease ("ISFAS 8") in evaluating whether PPAs and ESCs with IPPs contain a lease (Note 3.l).

Pada tanggal 1 Maret 2017, Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") menerbitkan POJK No.6 yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik. Berdasarkan POJK No.6, transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik diperlakukan sebagai transaksi jual beli, meskipun perjanjian jual beli tenaga listrik tersebut mengandung substansi selain jual beli. POJK No.6 berlaku secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai sejak 1 Januari 2017 dan mengijinkan perlakuan lebih awal sejak 1 Januari 2016. POJK No.6 berlaku sampai akhir periode tahun buku berakhirnya penugasan untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berdasarkan Peraturan Presiden.

On March 1, 2017, Financial Services Authority ("FSA") issued POJK No.6 which is applicable for listed and public companies. Based on POJK No.6, transactions based on a power purchase agreement are treated as sale and purchase transactions, even though the power purchase agreements contain substances other than of a sale and purchase. POJK No.6 applies prospectively for the year beginning on January 1, 2017 and early implementation is allowed for the year beginning on January 1, 2016. POJK No.6 is valid until the end of the assignment on acceleration of electricity infrastructures development in accordance with Presidential Regulation.

Perusahaan memutuskan untuk menerapkan lebih awal POJK No.6 secara prospektif sejak 1 Januari 2016. Oleh karena itu transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik yang mengandung sewa (Catatan 3.l), mulai 1 Januari 2016 disajikan sebagai pembelian tenaga listrik dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Pada tanggal 1 Januari 2016 Perusahaan dan entitas anak telah melakukan penyesuaian atas aset dan liabilitas terkait.

The Company decided to early implement POJK No.6 prospectively beginning on January 1, 2016. Therefore, the electricity sale and purchase transactions based on power purchase agreement which contains a lease (Note 3.l), since January 1, 2016 are presented as purchased electricity in the statement of profit or loss and other comprehensive income when incurred. On January 1, 2016, the Company and its subsidiaries have adjusted the related assets and liabilities.

Jumlah bersih penyesuaian atas aset dan liabilitas terkait sebesar Rp43.428.454 telah dicatat sebagai penyesuaian saldo laba pada tanggal 1 Januari 2016, dengan rincian sebagai berikut:

The net adjustments on related assets and liabilities amounting to Rp43,428,454 are recorded as adjustment to retained earnings on January 1, 2016, the details of which are as follows:

	1 Januari sebelum penyesuaian/ *January 1, Before adjustment* 2016 Rp	Penyesuaian saldo awal/ *Beginning balance adjusment* Rp	1 Januari setelah penyesuaian/ *January 1, After adjustment* 2016 Rp	
Aset tetap	1,187,879,590	(72,227,600)	1,115,651,990	*Property, plant and equipment*
Aset pajak tangguhan	29,088,271	(14,787,769)	14,300,502	*Deferred tax assets*
	1,216,967,861	(87,015,369)	1,129,952,492	
Liabilitas jangka panjang				*Non-current liabilities*
Utang listrik swasta	7,093,280	755,783	7,849,063	*Electricity purchase payable*
Utang sewa pembiayaan	149,621,763	(128,065,144)	21,556,619	*Lease Liabilities*
Liabilitas jangka pendek				*Current liabilities*
Utang sewa pembiayaan	6,759,138	(3,313,534)	3,445,604	*Lease liabilities*
Biaya masih harus dibayar	10,627,055	(2,216,084)	8,410,971	*Accrued expenses*
Utang listrik swasta	311,196	9,968	321,164	*Electricity purchase payable*
Utang usaha				*Trade payables*
Pihak berelasi	8,910,438	380,409	9,290,847	*Related parties*
Pihak ketiga	17,715,563	1,998,142	19,713,705	*Third parties*
Utang lain-lain	20,188,608	6,637	20,195,245	*Other payables*
	221,227,041	(130,443,823)	90,783,218	
Dampak penerapan POJK No.6 terhadap saldo laba awal		43,428,454		*The effect of POJK No.6 appplication on beginning retained earnings*

Entitas anak yang memiliki transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik, yaitu PT Pelayanan Listrik Nasional Batam ("PLN Batam") dan PT Indonesia Power ("IP"), bukan merupakan emiten atau perusahaan publik sehingga POJK No.6 tidak diterapkan oleh entitas anak tersebut.

The subsidiaries that have transactions based on power purchase agreement, namely PT Pelayanan Listrik Nasional Batam ("PLN Batam") and PT Indonesia Power ("IP"), who are not listed or public companies, therefore POJK No.6 is not applied for those subsidiaries.

Untuk tujuan konsolidasi, laporan keuangan PLN Batam dan IP disesuaikan agar kebijakan akuntansi untuk transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik sesuai dengan POJK No.6.

For consolidation purposes, adjustments are made on the financial statements of PLN Batam and IP to bring their accounting policy for transactions based on power purchase agreement in accordance with POJK No.6.

b. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") Baru dan Revisi, serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019

Pengesahan amandemen dan penyesuaian atas PSAK dan ISAK yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI"), berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019, adalah sebagai berikut:

b. New and Revised Statements of Financial Accounting Standard ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standard ("ISFAS") effective for the year beginning on or after January 1, 2019

Ratification of amendments and improvements of SFAS and ISFAS issued by the Financial Accounting Standard Board of the Indonesian Institute of Accounting ("DSAK-IAI"), effective for the year beginning on January 1, 2019, are as follows:

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- PSAK 22 (Penyesuaian 2018): Kombinasi Bisnis;
- PSAK 24 (Amandemen 2018): Imbalan Kerja tentang Amandemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program;
- PSAK 26 (Penyesuaian 2018): Biaya Pinjaman;
- PSAK 46 (Penyesuaian 2018): Pajak Penghasilan;
- PSAK 66 (Penyesuaian 2018): Pengaturan Bersama;
- ISAK 33: Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka;
- ISAK 34: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

c. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") Baru dan Revisi, serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020 dan setelahnya

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 15 (Amandemen 2017): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- PSAK 62 (Amandemen 2017): Kontrak Asuransi - Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi;
- PSAK 71: Instrumen Keuangan;
- PSAK 71 (Amandemen 2018): Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif;
- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan;
- PSAK 73: Sewa;
- ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba;

- *SFAS 22 (Improvement 2018): Business Combination;*
- *SFAS 24 (Amendment 2018): Employee Benefit regarding Plan Amendment, Curtailment or Settlement;*
- *SFAS 26 (Improvement 2018): Borrowing Cost;*
- *SFAS 46 (Improvement 2018): Income Taxes;*
- *SFAS 66 (Improvement 2018): Joint Arrangement;*
- *ISFAS 33: Foreign Currency Transactions and Advance Consideration;*
- *ISFAS 34: Uncertainty over Income Tax Treatments.*

The implementation of the above standards had no significant effect on the amounts reported for the current period or prior financial years.

c. New and Revised Statements of Financial Accounting Standard ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standard ("ISFAS") effective for the year beginning on or after January 1, 2020 and onwards

Standards and amendments to standards effective for periods beginning on or after January 1, 2020, with early adoption is permitted are:

- *SFAS 15 (Amendment 2017): Investments in Associates and Joint Ventures: Long Term Interest in Associate and Joint Ventures;*
- *SFAS 62 (Amendment 2017): Insurance Contract - Applying SFAS 71: Financial Instruments with SFAS 62: Insurance Contracts;*
- *SFAS 71: Financial Instruments;*
- *SFAS 71 (Amendment 2018): Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation*
- *SFAS 72: Revenue from Contracts with Customers;*
- *SFAS 73: Lease;*
- *SFAS 35: Presentation of Non-profit oriented entity Financial Statements;*

- PSAK 1 (Amandemen 2019): Penyajian Laporan Keuangan tentang Judul Laporan Keuangan;
- PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019): Penyajian Laporan Keuangan;
- PPSAK 13: Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba;
- PSAK 25 (Amandemen 2019): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan;
- PSAK 102 (Revisi 2019): Akuntansi Murabahah;
- PSAK 101: Pengakuan Pendapatan Murabahah Tanggung Tanpa Risiko Signifikan terkait Kepemilikan Persediaan;
- ISAK 102: Penurunan Nilai Piutang Murabahah.

Standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:
- PSAK 112: Akuntansi Wakaf;
- PSAK 22 (Amandemen 2019): Kombinasi bisnis tentang definisi bisnis.

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan dan entitas anak masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amandemen standar, dan interpretasi atas standar serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak.

- *SFAS 1 (Amendment 2019): Presentation of Financial Statements regarding Title of Financial Statements;*
- *SFAS 1 (Improvement 2019): Presentation of Financial Statements;*
- *RSFAS 13: Revocation of SFAS 45: Nonprofit Entity Financial Reporting;*
- *SFAS 25 (Amandement 2019): Accounting Polices, Changes in Accounting Estimatesand Errors;*
- *SFAS 102 (Amandement 2019): Accounting for Murabahah;*
- *SFAS 101: Revenue Recognition on Deffered Murabahah without Significant Risk related to Inventories Ownership;*
- *ISFAS 102: Impairment of Murabahah Receivable.*

Standard effective for periods beginning on or after January 1, 2021, with early adoption is permitted are:

- *SFAS 112: Wakaf Accounting;*
- *SFAS 22 (Amandement 2019): Business combinations regarding difinition of business.*

As of the authorization date of these consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries are still evaluating the potential impact of these new standards, amendments, and interpretations of standards to the Company and subsidiaries' consolidated financial statements.

3. Kebijakan Akuntansi Penting / *3. Significant Accounting Policies*

a. Pernyataan Kepatuhan / *a. Statement of Compliance*

Sejak 1 Januari 2016, laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia ("PABU"), yang mencakup:

(a) Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI"), yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK").

Since January 1, 2016, the consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Generally Accepted Accounting Principles ("GAAP"), which cover:

(a) Financial Accounting Standards issued by the Financial Accounting Standard Board - Indonesian Institute of Accountant ("DSAK-IAI"), which covers Indonesian Statements Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretation of Financial Accounting Standards ("ISFAS").

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

(b) Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah - Ikatan Akuntan Indonesia (”DSAS-IAI”).
(c) Ketentuan akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh OJK, terdiri dari Peraturan No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal – Lembaga Keuangan (”Bapepam-LK”) No. KEP-347/BL/2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan OJK No.6 POJK.04/2017 tentang Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.

Sebelum 1 Januari 2016, laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Standar akuntansi keuangan tersebut mencakup:
(a) Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh DSAK-IAI, yang meliputi PSAK dan ISAK.
(b) Ketentuan akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh OJK, termasuk Peraturan No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Dasar Penyusunan
Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian adalah dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah (“Rp”), yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan entitas anak. Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha dan dengan pengukuran nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

(b) Financial Accounting Standards issued by the Indonesian Sharia Accounting Standard Board - Indonesian Institute of Accountant (”DSAS-IAI”).
(c) Applicable Capital Market Regulations as stated by FSA including Regulation No. VIII.G.7 regarding Guidance for the Presentation of Financial Statements, Decree of Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Board (“CM-FISB”) No. KEP-347/BL/2012 regarding Presentation and Disclosure of Financial Statements of Listed or Public Company, and FSA Regulation No.6 POJK.04/2017 regarding Accounting Treatment for Transactions Based on Power Purchase Agreements.

Prior to January 1, 2016, the consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. Those financial accounting standards cover:
(a) Financial Accounting Standards issued by DSAK-IAI, which covers SFAS and ISFAS.
(b) Applicable Capital Market Regulations as stated by FSA including Regulation No. VIII.G.7 regarding Guidance for the Presentation of Financial Statements, Decree of Chairman of CM-FISB No. KEP-347/BL/2012 regarding Presentation and Disclosure of Financial Statements of Listed or Public Company.

b. Basis of Preparation
The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared on the accrual basis of accounting. The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is the Indonesian Rupiah (“Rp”), which is also the functional currency of the Company and its subsidiaries. The preparation and presentation of the consolidated financial statements are based on going concern assumption and measurement basis is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

c. Dasar Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak (termasuk entitas bertujuan khusus) yang dikendalikan oleh Perusahaan atau entitas anak. Pengendalian dianggap ada ketika Perusahaan memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan suatu entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut.

c. Basis of Consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and its subsidiaries (including special purpose entities) controlled by the Company or its subsidiaries. Control is achieved when the Company is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity.

Hasil entitas anak yang diakuisisi atau dijual selama periode berjalan termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sejak tanggal efektif akuisisi dan sampai dengan tanggal efektif penjualan.

The results of subsidiaries acquired or disposed of during the period are included in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income from the effective date of acquisition or up to the effective date of disposal, as appropriate.

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi yang digunakan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Perusahaan.

When necessary, adjustments are made to the financial statements of the subsidiaries to bring the accounting policies used in line with those used by the Company.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha dieliminasi secara penuh.

A parent prepares consolidated financial statements using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. All intragroup transactions, balances, income, expenses and cash flows relating to transactions between entities of the group are eliminated in full.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Perusahaan dan entitas anak pada entitas anak masing-masing yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Nilai tercatat kepentingan Perusahaan dan entitas anak dan kepentingan non-pengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian kepemilikannya atas entitas anak. Setiap

Changes in the Company's and its subsidiaries' interests in the respective subsidiaries that do not result in a loss of control are accounted for as equity transactions. The carrying amount of the Company and its subsidiaries' interest and the non-controlling interests are adjusted to reflect the changes in their relative interests in the subsidiaries. Any difference between the amount by which

perbedaan antara jumlah kepentingan non-pengendali disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the parent.

Jika Perusahaan kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka Perusahaan:

(a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
(b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan non-pengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan non-pengendali);
(c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima, jika ada, dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
(d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
(e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;
(f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

If the Company losses control over the subsidiary, the Company:

(a) Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control ceases;
(b) Derecognizes the carrying amounts of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control ceases (including any components of other comprehensive income attributable to them);
(c) Recognizes the fair value of the consideration received, if any, from the transaction, event or circumstance that resulted in the cessation of control;
(d) Recognizes any investment retained in the former subsidiary at its fair value at the date when control ceases;
(e) Reclassifies to profit or loss, or directly transfer to retained earnings if required by other Financial Accounting Standards, the amounts recognized in other comprehensive income in relation to the former subsidiary;
(f) Recognizes any resulting difference as a gain or loss attributable to the owners of the parent.

d. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain dimana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Perusahaan dan entitas anak, liabilitas

d. Business Combinations

Business combination is a transaction or other events in which an acquirer obtains control of one or more businesses. Business combination is accounted for using the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition-date fair values of the assets transferred by the Company and its subsidiaries, liabilities incurred by the

yang diakui oleh Perusahaan dan entitas anak kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dan entitas anak dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui di dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Company and its subsidiaries to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Company and its subsidiaries in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized in profit or loss as incurred.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan standar yang relevan.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant standards.

Goodwill diukur sebagai selisih lebih dari nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan, jumlah kepentingan non-pegendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada) atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih pada tanggal akuisisi. Jika, setelah penilaian kembali, jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih pada tanggal akuisisi melebihi jumlah imbalan yang dialihkan, jumlah dari setiap kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak akuisisi (jika ada), selisih lebih diakui segera dalam laba rugi sebagai keuntungan pembelian dengan diskon.

Goodwill is measured as the excess of the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interest in the acquiree, and the fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquire (if any) over the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and the liabilities assumed. If, after the reassessment, the net of the acquisition-date amounts of the indentifiable assets acquired and liabilities assumed exceeds the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquire (if any), the axcess is recognized immediately in profit or loss as a bargain purchase gain.

Kepentingan non-pengendali yang menyajikan bagian kepemilikan dan memberikan mereka hak atas bagian proposional dari aset neto entitas dalam hal terjadi likuidasi pada awalnya diukur baik pada nilai wajar ataupun pada bagian proporsional kepemilikan kepentingan non-pengendali atas aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Pilihan dasar pengukuran dilakukan atas dasar transaksi. Kepentingan non-pengendali jenis lain diukur pada nilai wajar atau, jika berlaku, pada dasar pengukuran lain yang ditentukan oleh standar akuntansi lain.

Non-controlling interests that are present ownership interests and entitles their holders to a proportionate share of the entity's net assets in the event of liquidation may be initially measured either at fair value or at the non-controlling interests' proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. The choice of measurement basis is made on a transaction-by-transaction basis. Other types of non-controlling interests are measured at fair value or, when applicable, on the basis specified in another accounting standard.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Bila imbalan yang dialihkan oleh Perusahaan dan entitas anak dalam suatu kombinasi bisnis termasuk aset atau liabilitas yang berasal dari pengaturan imbalan kontinjen (*contingent consideration arrangement*), imbalan kontinjen tersebut diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan termasuk sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis. Perubahan dalam nilai wajar atas imbalan kontinjen yang memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap *goodwill*. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang berasal dari informasi tambahan yang diperoleh selama periode pengukuran (yang tidak melebihi satu tahun sejak tanggal akuisisi) tentang fakta-fakta dan kondisi yang ada pada tanggal akuisisi.

When the consideration transferred by the Company and its subsidiaries in a business combination includes assets or liabilities resulting from a contingent consideration arrangement, the contingent consideration is measured at its acquisition-date fair value and included as part of the consideration transferred in a business combination. Changes in the fair value of the contingent consideration that qualify as measurement period adjustments are adjusted retrospectively, with corresponding adjustments against goodwill. Measurement period adjustments are adjustments that arise from additional information obtained during the measurement period (which cannot exceed one year from the acquisition date) about facts and circumstances that existed at the acquisition date.

Perubahan selanjutnya dalam nilai wajar atas imbalan kontinjen yang tidak memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran tergantung pada bagaimana imbalan kontinjen tersebut diklasifikasikan. Imbalan kontinjen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali pada tanggal sesudah tanggal pelaporan dan penyelesaian selanjutnya dicatat dalam ekuitas. Imbalan kontinjen yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas diukur kembali setelah tanggal pelaporan sesuai dengan standar akuntansi yang relevan, dengan diakui keuntungan atau kerugian terkait dalam laba rugi atau dalam penghasilan komprehensif lain.

The subsequent accounting for changes in the fair value of the contingent consideration that do not qualify as measurement period adjustments depends on how the contingent consideration is classified. A contingent consideration that is classified as equity is not remeasured at subsequent reporting dates and its subsequent settlement is accounted for within equity. A contingent consideration that is classified as an asset or liability is remeasured subsequent to the reporting dates in accordance with the relevant accounting standards, as appropriate, with the corresponding gain or loss being recognized in profit or loss or in other comprehensive income.

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Perusahaan dan entitas anak atas pihak terakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugiannya, jika ada, diakui di dalam laba rugi. Jumlah yang berasal dari kepemilikan sebelum tanggal akuisisi yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi dimana perlakuan tersebut akan sesuai ketika kepemilikannya dilepas/ dijual.

When a business combination is achieved in stages, the Company and its subsidiaries' previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or loss. Amounts arising from interests in the acquiree prior to the acquisition date that have previously been recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss where such treatment would be appropriate when those interests were disposed of.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Perusahaan dan entitas anak melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

If the initial accounting for a business combination is incompleted by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Company and its subsidiaries report provisional amounts for the items for which the accounting is incompleted. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period, or additional assets or liabilities are recognized, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have affected the amount recognized as of that date.

e. Transaksi dan Penjabaran Mata Uang Asing

Pembukuan Perusahaan dan entitas anak, kecuali Majapahit Holding B.V. ("MH") dan Majapahit Finance B.V. ("MF") diselenggarakan dalam mata uang Rupiah, mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsionalnya). Transaksi-transaksi selama periode berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laba rugi, kecuali selisih kurs mata uang asing yang dikapitalisasi sebagai biaya pinjaman.

Kegiatan usaha MH dan MF merupakan bagian integral dari kegiatan usaha Perusahaan, dengan demikian pembukuan MH dan MF yang diselenggarakan dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dengan Perusahaan.

e. Foreign Currency Transactions and Translation

The accounts of the Company and its subsidiaries, except for Majapahit Holding B.V. ("MH") and Majapahit Finance B.V. ("MF"), are maintained in Indonesian Rupiah, the currency of the primary economic environment in which the entity operates (its functional currency). Transactions during the period involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the rates of exchange prevailing at that date. The resulting gains or losses are credited or charged to profit or loss, except those foreign exchange differences which are capitalized as borrowing costs.

The operating activities of MH and MF are an integral part of the Company's activities; hence the accounts of MH and MF, which are maintained in foreign currency, are translated into Rupiah using the same accounting policy adopted by the Company.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, kurs konversi yang digunakan Perusahaan dan entitas anak sebagai berikut:

The conversion rates used by the Company and its subsidiaries on December 31, 2019 and 2018 are as follows:

	2019 Kurs tengah/ *Middle rate* Rp *)	2018 Kurs tengah/ *Middle rate* Rp *)	
Mata uang			*Currency*
GBP	18.250	18.373	*GBP*
EUR	15.589	16.560	*EUR*
CHF	14.366	14.710	*CHF*
US$	13.901	14.481	*US$*
AUD	9.739	10.211	*AUD*
NZD	9.360	9.718	*NZD*
JPY	128	131	*JPY*

*) dalam jumlah penuh/ *in full amount*

f. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan dan entitas anak (entitas pelapor):

(a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

(b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);

f. Transactions with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the Company and its subsidiaries (the reporting entity):

(a) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
   i. has control or joint control over the reporting entity;
   ii. has significant influence over the reporting entity; or
   iii. a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

(b) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions apply:
   i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
   ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint ventures of a member of a group of which the other entity is a member);

iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

iii. Both entities are joint ventures of the same third party;
iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity); or
viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh Pemerintah. Pemerintah mengacu kepada Pemerintah, instansi Pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

A government related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by a government. Government refers to government, government agencies and similar bodies whether local, national or international.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Government related entity can be an entity which is controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance or Local Government being the shareholders of the entity or an entity controlled by the Government of Republic of Indonesia, represented by the Ministry of BUMN as shareholder's representative.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

g. Aset Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Aset keuangan Perusahaan dan entitas anak diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, dan yang tersedia untuk dijual.

i. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL")
Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

g. Financial Assets

Initial Recognition and Measurement

All financial assets are recognized and derecognized on the trade date where the purchase or sale of a financial asset is under a contract whose terms require delivery of the financial asset within the time frame established by the market concerned and are initially measured at fair value plus transaction costs, except for those financial assets classified as a fair value through profit or loss, which are initially measured at fair value.

Subsequent Measurement of Financial Assets

The Company and its subsidiaries' financial assets are classified into the following specified categories: financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, and available-for-sale.

i. Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss ("FVTPL")
Financial assets at FVTPL are financial assets held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial asset classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

After initial recognition, financial assets at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value of financial assets are recognized in profit or loss.

ii. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang
Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:
(a) pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
(b) pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau
(c) pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

iii. Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual ("AFS")
AFS aset keuangan adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan baik sebagai AFS atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan pada FVTPL.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam pengasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

ii. Loans and Receivables
Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

(a) those that intends to sell immediately or in the near term and upon initial recognition designated as at fair value through profit or loss;

(b) those that upon initial recognition designated as available for sale; or

(c) those for which the holder may not recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration.

After initial recognition, loans and receivables are measured at amortized cost using the effective interest method.

iii. Available-for-Sale Financial Assets ("AFS")
AFS financial assets are non-derivative financial assets that are either designated as AFS or are not classified as loans and receivables, held to maturity investments or financial assets at FVTPL.

On subsequent measurement, the AFS are carried at fair value, with gains or losses recognized in other comprehensive income, except for impairment losses and foreign exchange gain and losses, until they are derecognized. At that time, the cummulative gain or losses previously recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as reclassification adjustment.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen ekuitas yang tidak tercatat di pasar aktif dengan menggunakan teknik penilaian berdasarkan asumsi yang wajar. Dalam keadaan tertentu dimana kisaran estimasi nilai wajar yang realistis cukup signifikan dan probabilitas berbagai estimasi tidak dapat dinilai secara wajar, maka Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen AFS tersebut pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai.

The Company measures the fair value of non-listed equity instruments by applying valuation techniques based on reasonable assumptions. In the limited case where the range of reasonable fair value measurements is significantly wide and the probabilities of the various estimates cannot be reasonably assessed, the Company records such AFS instruments at cost less impairment.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak tercatat di bursa dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, serta derivative yang terkait dengan dan harus diselesaikan melalui penyerahan instrumen ekuitas tersebut diklasifikasikan sebagai AFS, diukur pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai.

Investments in unlisted equity instruments that are not quoted in an active market and whose fair value cannot be reliably measured and derivatives that are linked to and must be settled by delivery of such unquoted equity investments are also classified as AFS, measured at cost less impairment.

Dividen atas instrumen ekuitas AFS, jika ada, diakui pada laba rugi pada saat hak Perusahaan dan entitas anak untuk memperoleh pembayaran dividen ditetapkan.

Dividends on AFS equity instruments, if any, are recognized in profit or loss when the Company and its subsidiaries' rights to receive the dividends are established.

Metode Suku Bunga Efektif
Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Effective Interest Method
The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial instrument and of allocating interest income over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and other forms paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or, where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan.

Income is recognized on an effective interest basis for financial instruments.

Penurunan Nilai Aset Keuangan
Aset keuangan dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang pada nilai wajar dari investasi ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti objektif penurunan nilai.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:
- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.
- terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual tetapi penurunan secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Perusahaan dan entitas anak atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan *default* atas piutang.

Impairment of Financial Assets
Financial assets are assessed for indicators of impairment at the end of each reporting date. Financial assets are impaired where there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset and the estimated future cash flows of the investment have been affected.

For listed and unlisted equity investments classified as AFS, a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is considered to be objective evidence of impairment.

For all other financial assets, objective evidence of impairment could include:
- *significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or*
- *breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments; or*
- *it becomes probable that the borrower will enter bankruptcy or financial re-organization.*
- *observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a group of financial assets since the initial recognition, such as adverse changes in the payment status of borrowers or economic condition that correlate with defaults.*

For certain categories of financial asset, such as receivables, assets that are assessed not to be impaired individually are, in addition, assessed for impairment on a collective basis. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could include the Company and its subsidiaries' past experiences of collecting payments, an increase in the number of delayed payments in the portfolio past the average credit period, as well as observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

For financial assets carried at amortized cost, the amount of the impairment is the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial asset's original effective interest rate.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Perubahan nilai tercatat akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang diakui dalam laba rugi.

The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception of receivables, where the carrying amount is reduced through the use of an allowance account. When a receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognized in profit or loss.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas dicatat ke laba rugi.

When an AFS financial asset is considered to be impaired, cumulative gains previously recognized in equity are recognized in profit or loss.

Pengecualian dari instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan dapat dikaitkan secara objektif dengan sebuah peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan melalui laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

With the exception of AFS equity instruments, if in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed through profit or loss to the extent that the carrying amount of the investment at the date the impairment is reversed does not exceed what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi tidak boleh dipulihkan melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke penghasilan komprehensif lain.

In respect of AFS equity, impairment losses previously recognized in profit or loss are not reversed through profit or loss. Any increase in fair value subsequent to an impairment loss is recognized directly in other comprehensive income.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan
Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Perusahaan dan entitas anak mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan dan entitas anak tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan dan entitas anak mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan dan entitas anak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan dan entitas anak masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Perusahaan dan entitas anak masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Perusahaan dan entitas anak mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi

Derecognition of Financial Assets
The Company and its subsidiaries derecognize a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when they transfer the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Company and its subsidiaries neither transfer nor retain substantially all the risks and rewards of ownership and continue to control the transferred asset, the Company and its subsidiaries recognize their retained interest in the asset and an associated liability for amounts they may have to pay. If the Company and its subsidiaries retain substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Company and its subsidiaries continue to recognize the financial asset and also recognize a collateralized borrowing for the proceeds received.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the assets carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity is recognized in profit or loss.

On derecognition of a financial asset other than in its entirety (e.g., when the Company and its subsidiaries retain an option to repurchase part of a transferred asset), the Company and its subsidiaries allocate the previous carrying amount of the financial asset between the part they continue to recognize under continuing involvement and the part they no longer recognize on the basis of the relative fair values of those parts on the date of the transfer. The difference between the carrying amount allocated to the part that is no longer recognized and the sum of the consideration received for the part no longer recognized and any cumulative gain or loss allocated to it that had been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss.

diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

A cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income is allocated between the part that continues to be recognized and the part that is no longer recognized on the basis of the relative fair values of those parts.

Reklasifikasi

Perusahaan dan entitas anak tidak mereklasifikasi instrumen derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Perusahaan dan entitas anak sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Perusahaan dan entitas anak dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat. Perusahaan dan entitas anak tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

Reclassification

The Company and its subsidiaries shall not reclassify a derivative instrument out of the fair value through profit or loss category while it is held or issued and not reclassify any financial instrument out of the fair value through profit or loss category if upon initial recognition it was designated by the Company and its subsidiaries as at fair value through profit or loss. The Company and its subsidiaries may reclassify the financial asset out of the fair value through profit or loss category if it is no longer held for the purpose of selling or repurchasing it in the near term. The Company and its subsidiaries shall not reclassify any financial instrument into the fair value through profit or loss category after initial recognition.

Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan Perusahaan dan entitas anak, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, terjadi setelah seluruh jumlah pokok telah diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau telah diperoleh pelunasan dipercepat; atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.

If, as a result of a change in the Company and its subsidiaries' intention or ability, it is no longer appropriate to classify an investment as held-to-maturity investments, it shall be reclassified to available-for–sale investments and remeasured at fair value. Whenever sales or reclassification of more than insignificant amount of held-to-maturity investments, any remaining held-to-maturity investments shall be reclassified as available for sale, other than sale or reclassification that are so close to maturity or the financial asset's call date, occur after all the financial asset's original principal has been collected substantially through scheduled payments or prepayments, or are attributable to an isolated event that is beyond control, non-recurring, and could not have been reasonably anticipated.

Pengukuran Nilai Wajar
Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabillitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:
(i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);
(ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2);
(iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Perusahaan dan entitas anak sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Perusahaan dan entitas anak menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hirarki nilai wajar diakui oleh Perusahaan dan entitas anak pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

Lindung nilai
Dalam bisnis normal, Perusahaan dan entitas anak terekspos risiko nilai tukar dan tingkat bunga. Untuk melindungi dari risiko-risiko ini sesuai dengan kebijakan treasuri

Fair Value Measurement
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The fair value of financial assets and financial liabilities is estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Fair values are categorized into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:
(i) Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1);
(ii) Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2);

(iii) Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Company and its subsidiaries use market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Company and its subsidiaries use valuation techniques that are appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognized by the Company and its subsidiaries at the end of the reporting period during which the change occurred.

Hedging
In the normal course of business, the Company and its subsidiaries are exposed to currency and interest rate risks. In order to hedge these risks in

tertulis dari manajemen, Perusahaan dan entitas anak menggunakan derivatif dan instrumen lindung nilai lainnya. PSAK 55 memperbolehkan tiga jenis hubungan lindung nilai:

- Lindung nilai atas nilai wajar;
- Lindung nilai atas arus kas;
- Lindung nilai atas investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri.

Perusahaan dan entitas anak menggunakan akuntansi lindung nilai hanya jika seluruh kondisi berikut ini terpenuhi pada saat dimulainya lindung nilai:

- Instrumen lindung nilai dan item yang dilindung nilai diidentifikasi dengan jelas;
- Terdapat penetapan dan pendokumentasian formal atas hubungan lindung nilai. Dokumentasi lindung nilai mencakup strategi lindung nilai dan metode yang digunakan untuk menilai efektivitas lindung nilai; dan
- Efektivitas hubungan lindung nilai diperkirakan sangat tinggi di sepanjang masa dari lindung nilai.

Dokumentasi di atas selanjutnya dimutakhirkan pada setiap periode pelaporan untuk menilai apakah lindung nilai tetap diperkirakan akan sangat efektif di sepanjang sisa masa lindung nilai.

Lindung nilai atas arus kas
Bagian dari keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai yang ditetapkan sebagai lindung nilai yang efektif diakui (setelah pajak) dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam cadangan lindung nilai, dan bagian yang tidak efektif atas keuntungan atau kerugian dari instrumen lindung nilai tersebut diakui dalam laba rugi.

Tidak dilakukan penyesuaian atas item yang dilindung nilai.

Jika suatu lindung nilai atas prakiraan transaksi yang kemudian menimbulkan pengakuan suatu aset keuangan atau liabilitas keuangan, maka keuntungan atau kerugian terkait yang sebelumnya diakui

accordance with the management's written treasury policies, the Company and its subsidiaries use derivatives and other hedging instruments. SFAS 55 allows three types of hedging relationships:

- *Fair value hedge;*
- *Cash flow hedge;*
- *Hedge of a net investment in a foreign operation.*

The Company and its subsidiaries use hedge accounting only when the following conditions at the inception of the hedge are satisfied:

- *The hedging instrument and the hedged item are clearly identified;*
- *Formal designation and documentation of the hedging relationship is in place. Such hedge documentation includes the hedge strategy and the method used to assess the hedge's effectiveness; and*
- *The hedge relationship is expected to be highly effective throughout the life of the hedge.*

The above documentation is subsequently updated at each reporting date in order to assess whether the hedge is still expected to be highly effective over its remaining life.

Cash flow hedge
The portion of the gain or loss on the hedging instrument that is determined to be an effective hedge is recognized (net after tax) in other comprehensive income and accumulated under hedging reserve, and the ineffective portion of the gain or loss on the hedging instrument is recognized in profit or loss.

No adjustment is made to the hedged item.

If a hedge of a forecast transaction subsequently results in the recognition of a financial asset or a financial liability, the associated gains or losses that were recognized in other comprehensive

dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada periode yang sama pada saat lindung nilai atas prakiraan arus kas mempengaruhi laba rugi.

Jika suatu lindung nilai atas prakiraan transaksi yang kemudian menimbulkan pengakuan aset non-keuangan atau liabilitas non-keuangan, atau jika suatu lindung nilai atas prakiraan transaksi atas aset non-keuangan atau liabilitas non-keuangan menjadi komitmen pasti dimana akuntansi lindung nilai atas nilai wajar diterapkan, maka Perusahaan mereklasifikasi keuntungan dan kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

income are reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment in the same period or periods during which the hedged forecast cash flows affects profit or loss.

If a hedge of a forecast transaction subsequently results in the recognition of a non-financial asset or a non-financial liability, or a forecast transaction for a non-financial asset or non-financial liability becomes a firm commitment for which fair value hedge accounting is applied, then the Company reclassifies the associated gains and losses that were previously recognized in other comprehensive income to profit or loss as a reclassification adjustment.

h. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi Sebagai Liabilitas atau Ekuitas
Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dan entitas anak diklasifikasikan sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen Ekuitas
Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan dan entitas anak setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Liabilitas Keuangan
Penerusan pinjaman, utang kepada Pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah non-bank, utang bank dan surat utang jangka menengah, utang obligasi (tidak termasuk sukuk ijarah), utang listrik swasta dan pinjaman lainnya pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif.

h. Financial Liabilities and Equity Instruments

Classification as Liabilities or Equity
Financial liabilities and equity instruments issued by the Company and its subsidiaries are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Equity Instruments
An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of the Company and its subsidiaries after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recorded as the proceeds received, net of direct issue costs.

Financial Liabilities
Two-step loans, Government and non-bank Government Financial Institution loans, bank loans and medium term notes, bonds payable (excluding sukuk ijara), electricity purchase payable and other borrowings are initially measured at fair value, net of transaction costs and are subsequently measured at amortized cost, using the effective interest rate method, with interest expense recognized on an effective yield basis.

Selisih antara hasil emisi (setelah dikurangi biaya transaksi) dan penyelesaian atau pelunasan pinjaman diakui selama jangka waktu pinjaman menggunakan metode suku bunga efektif.

Sukuk Ijarah
Sukuk ijarah diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk ijarah. Sukuk ijarah diakui sebesar nilai nominal disesuaikan dengan premium atau diskonto dan biaya transaksi terkait dengan penerbitannya.

Setelah pengakuan awal, jika jumlah tercatat berbeda dengan nilai nominal disebabkan penyesuaian premium atau diskonto, maka perbedaan tersebut diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk ijarah.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan
Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan dan entitas anak telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

i. Saling Hapus Antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan
Aset dan liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anak saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika:
- saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan
- berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the settlement or redemption of borrowings is recognized over the term of the borrowings using the effective interest rate method.

Sukuk Ijara
Sukuk ijara are recognized when the entity becomes a parts bound by the provisions of the issuance of sukuk ijara. Sukuk ijara are recognized at the nominal value adjusted with premium or discount and transaction cost related to the issuance.

After initial recognition, if the carrying amount is different from the nominal value caused by the premium or discount, then the difference is amortized on straight-line basis over the period of the sukuk ijara.

Derecognition of Financial Liabilities

The Company and its subsidiaries derecognize financial liabilities, when and only when the Company and its subsidiaries' obligations are discharged, cancelled or expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the considerations paid and payable is recognized in profit or loss.

i. Netting of Financial Assets and Financial Liabilities
The Company and its subsidiaries only offset financial assets and liabilities and present the net amount in the statement of financial position where they:
- *currently have a legal enforceable right to set off the recognized amount; and*
- *Intend either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.*

j. Aset Tetap - Pemilikan Langsung

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan dan entitas anak melakukan perubahan kebijakan akuntansi atas kelas-kelas aset berikut ini dari model biaya menjadi model revaluasi:

- Tanah;
- Bangunan umum, waduk dan prasarana;
- Instalasi dan mesin pembangkit;
- Perlengkapan transmisi;
- Perlengkapan distribusi;
- Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik; dan
- Material cadangan utama.

Perubahan kebijakan akuntansi tersebut diterapkan secara prospektif sesuai dengan PSAK 25 (Revisi 2015).

Kelas aset di atas, disajikan sebesar nilai wajar dikurangi penyusutan dan penurunan nilai. Tanah tidak disusutkan. Penilaian terhadap aset-aset tersebut dilakukan oleh penilai independen eksternal yang terdaftar di OJK. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya. Aset yang tidak mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan wajib direvaluasi paling kurang

j. Property, Plant and Equipment - Direct Acquisition

Fixed assets are initially recognize at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

When applicable, the cost may also comprises the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.

On December 31, 2015, the Company and its subsidiaries changed their accounting policy for the following classes of assets from the cost model to the revaluation model:

- *Land;*
- *Buildings, reservoir and infrastructure;*
- *Installations and power plant;*
- *Transmission equipment;*
- *Distribution equipment;*
- *Telecommunication and data processing equipment used for electricity supply; and*
- *Major spare parts.*

That change in accounting policy is applied prospectively in accordance with SFAS 25 (Revised 2015).

The classes of asset above, are shown at fair value less subsequent depreciation and impairment losses. Land is not depreciated. Valuation of those assets is performed by external independent valuers which are registered with the FSA. Valuations are performed with sufficient regularity to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount. Assets that do not change significantly in fair value are mandatory to be re-evaluate at least every

setiap 3 (tiga) tahun. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap nilai tercatat bruto aset, dan nilai netonya disajikan kembali sebesar nilai revaluasian aset tetap.

3 (three) years. Any accumulated depreciation at the date of revaluation is eliminated against the gross carrying amount of the asset and the net amount is restated to the revalued amount of the property, plant and equipment.

Aset tetap lainnya disajikan sebesar harga perolehan dikurangi dengan penyusutan dan kerugian penurunan nilai. Harga perolehan termasuk pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset tersebut.

All other property, plant and equipment are stated at historical cost less depreciation and impairment losses. Historical cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the items.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi aset tetap yang menggunakan model revaluasi dikreditkan pada "surplus revaluasi aset" sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain. Penurunan yang menghapus nilai kenaikan sebelumnya atas aset yang sama dibebankan terhadap "surplus revaluasi aset" sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain; penurunan lainnya dibebankan pada laba rugi.

Increases in the carrying amount arising on revaluation of property, plant and equipment that use revaluation model are credited to "asset revaluation surplus" as part of other comprehensive income. Decreases that offset previous increases of the same asset are debited against "asset revaluation surplus" as part of other comprehensive income; all other decreases are charged to profit or loss.

Biaya awal untuk mendapatkan hak atas tanah diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah dan biaya-biaya tersebut tidak disusutkan. Aset, kecuali tanah, disusutkan hingga mencapai estimasi nilai sisa dengan menggunakan metode garis lurus hingga mencapai estimasi nilai sisa selama masa manfaatnya sebagai berikut:

Initial costs incurred to obtain land are recognized as part of the acquisition cost of the land and these costs are not depreciated. Assets, except land, are depreciated to their residual value using the straight-line method to their residual values over their expected useful life as follows:

	2019 dan/ *and* 2018 (Tahun/ *Years*)	
Bangunan umum, waduk, dan prasarana	10-50	*Buildings, reservoir, and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	12-40	*Installations and power plant*
Perlengkapan transmisi	40	*Transmission equipment*
Perlengkapan distribusi	40	*Distribution equipment*
Perlengkapan umum	5	*General equipment*
Kendaraan bermotor	5	*Motor vehicle*
Material cadangan utama	10-50	*Major spare parts*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	10	*Telecommunications and data processing equipment used for electricity supply*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya	10	*Other telecommunication and data processing equipment*
Kapal dan perlengkapan	10-47	*Vessel and equipment*

Aset sewa pembiayaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset yang dimiliki sendiri atau jika lebih pendek, disusutkan selama periode masa sewa ketika tidak ada kepastian yang memadai bahwa Perusahaan dan entitas anak akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.

Assets held under finance leases are depreciated over their expected useful lives on the same basis as owned assets or where shorter, the term of the relevant leases where there is no reasonable certainty that the Company and its subsidiaries will obtain ownership at the end of the lease term.

Masa manfaat ekonomis, nilai sisa dan metode penyusutan dievaluasi setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap diakui sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

The costs of maintenance and repairments are charged to profit or loss as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of property, plant and equipment, are recognized as assets if and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laba rugi.

When property, plant and equipment are retired or otherwise disposed of, their carrying values are removed from the accounts. Any resulting gain or loss is reflected in profit or loss.

Aset yang untuk sementara waktu tidak digunakan dalam operasi dicatat sebagai bagian dari aset tetap. Aset yang sementara waktu tidak digunakan dalam operasi disusutkan dengan metode dan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap.

Assets that are temporarily not used in operations are recorded as part of property, plant and equipment. Assets not used in operations are depreciated using the same method and based on the economic useful lives of the property, plant and equipment.

k. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan
Aset yang diamortisasi atau disusutkan dikaji untuk penurunan nilai jika terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat kemungkinan tidak dapat dipulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui sebesar kelebihan jumlah tercatat aset atas jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang lebih tinggi antara

k. Impairment of Non-Financial Assets
Assets that are subject to amortization or depreciation are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognized for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of

nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Dalam rangka menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah (unit penghasil kas). Aset non-keuangan yang mengalami penurunan nilai, ditelaah untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pembalikan penurunan nilai, pada setiap tanggal pelaporan.

Pembalikan rugi penurunan nilai, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi. Pembalikan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset melebihi biaya perolehan didepresiasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pembalikan dilakukan.

an asset's fair value less cost to sell and its value-in-use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest level for which there are separately identifiable cash flows (cash generating units). Non-financial assets that have suffered an impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

Reversal on impairment loss for assets would be recognized if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal on impairment losses will be immediately recognized in profit or loss. The reversal will not result in the carrying amount of an asset that exceeds what the depreciated cost would have been had the impairment not been recognized at the date at which the impairment was reversed.

I. Sewa / *I. Leases*

Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa

Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2016
ISAK 8: Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa ("ISAK 8") memberikan panduan untuk menentukan apakah suatu perjanjian merupakan sewa atau mengandung sewa sehingga harus diperlakukan sesuai dengan PSAK 30 (Revisi 2011): Sewa ("PSAK 30").

Penyelenggaraan usaha tenaga listrik di Indonesia dikendalikan oleh Pemerintah dan dilaksanakan oleh Perusahaan sebagai BUMN selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan setiap pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum harus memastikan ketersediaan tenaga listrik di setiap wilayah operasinya.

Perusahaan dan entitas anak mengadakan perjanjian jual beli tenaga listrik, yakni PPA dan ESC, dengan IPP. IPP tersebut

Determining Whether an Arrangement Contains a Lease

Accounting treatment before January 1, 2016
ISFAS 8: Determining Whether an Arrangement Contains a Lease ("ISFAS 8") provides guidance in determining whether an arrangement is in substance a lease that should be accounted for in accordance with SFAS 30 (Revised 2011): Leases ("SFAS 30").

The electric power business in Indonesia is controlled by the Government and carried out by the Company as a BUMN, which serves as the holder of an Electricity Business Proxy. The holder of an Electricity Business Proxy and each holder of an Electricity Business License for public use must ensure the adequacy of electric power supply in each of their operating areas.

The Company and its subsidiaries entered into power purchase agreements namely PPA and ESC, with IPPs. Those IPPs are

merupakan pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum, yang dapat diserahkan kepada entitas usaha lain dengan tanggung jawab untuk menghasilkan tenaga listrik guna kepentingan umum.

holders of Electricity Business License for public use, which may be granted to other business entities with responsibility to generate electricity for public use.

Berdasarkan surat Ketua Bapepam-LK yang kemudian bergabung menjadi bagian dari OJK, No. S-2366/BL/2009 tertanggal 30 Maret 2009, perjanjian penyediaan tenaga listrik oleh IPP kepada Perusahaan dan entitas anak yang termasuk dalam kategori perjanjian pelaksanaan jasa publik ke swasta, dikecualikan dari penerapan ISAK 8 sampai DSAK–IAI menerbitkan interpretasi standar akuntansi yang spesifik mengatur transaksi tersebut.

Based on letter No. S-2366/BL/2009 dated March 30, 2009 from the Chairman of CM-FISB, which has subsequently been merged into the FSA, power supply arrangements by IPPs to the Company and its subsidiaries that are categorized as public-to-private consession arrangements, are exempted from the application of ISFAS 8, until DSAK-IAI has issued an accounting interpretation that can specifically address such transactions.

Manajemen mengevaluasi dampak dari ISAK 16: Perjanjian Konsesi Jasa ("ISAK 16") (efektif berlaku tanggal 1 Januari 2012) terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Perusahaan dan entitas anak dengan IPP dan menetapkan bahwa transaksi tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup Interpretasi, yang berisi perlakuan akuntansi untuk operator atas perjanjian konsesi jasa publik ke swasta. Selanjutnya, sesuai dengan surat manajemen tanggal 22 Desember 2011 kepada Ketua Bapepam-LK, manajemen memutuskan untuk menerapkan ketentuan ISAK 8, sesuai dengan PSAK 30, terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik mulai tanggal 1 Januari 2012.

Management assessed the impact of ISFAS 16: Service Concession Arrangements ("ISFAS 16") (effective January 1, 2012) on the Company's and its subsidiaries' Power Supply Contracts with IPPs and determined that such transactions do not qualify under the scope of the Interpretation, which addresses the accounting of the operators of public-to-private concession arrangements. Subsequently, on its letter dated December 22, 2011 to the Chairman of CM-FISB, management decided to apply the provisions of ISFAS 8, in accordance with SFAS 30, on its Power Supply Contracts since January 1, 2012.

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2016
Pada tanggal 1 Maret 2017 OJK menerbitkan POJK No.6/POJK.04/2017 tentang Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ("POJK No.6") yang diterapkan secara prospektif. Penerapan POJK tersebut mengakibatkan seluruh transaksi berdasarkan PPA dan ESC dengan IPP diperlakukan sebagai transaksi jual beli, meskipun dalam transaksi tersebut mengandung substansi selain jual beli, sehingga evaluasi apakah PPA dan ESC dengan IPP mengandung sewa tidak dilakukan (Catatan 2.a).

Accounting treatment since January 1, 2016
On March 1, 2017, FSA issued POJK No.6/POJK.04/2017 regarding Accounting Treatment on Transactions based on Power Purchase Agreement ("POJK No.6") which is applied prospectively. The application of the POJK resulted in all transactions based on PPAs and ESCs with IPPs are treated as sale and purchase transactions, regardless those transactions contain substances other than sale and purchase, therefore evaluation on whether PPAs and ESCs with IPPs contain a lease is not performed (Note 2.a).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Klasifikasi Sewa Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset kepada *lessee*. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi.	*Lease Classification* *Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards related to ownership of an asset to the lessee. All other leases are classified as operating leases.*
Pembayaran sewa harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pengurangan dari liabilitas sewa sehingga mencapai suatu tingkat bunga konstan atas saldo liabilitas. Rental kontinjen dibebankan pada periode terjadinya.	*Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Contingent rents are recognized as expenses in the periods in which they are incurred.*
Pembayaran sewa operasi (dikurangi dengan insentif yang diterima dari *lessor*) diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Rental kontinjen diakui dalam sewa operasi sebagai beban di dalam periode terjadinya.	*Operating lease payments (net of any incentives received from the lessor) are recognized as expenses on a straight-line basis over the lease term, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed. Contingent rents arising under operating leases are recognized as expenses in the period in which they are incurred.*
Di tahun 2015 Perusahaan dan entitas anak menetapkan bahwa beberapa perjanjian pembelian tenaga listrik dan perjanjian pembelian energi dengan Penghasil Listrik Independen IPP memenuhi persyaratan sebagai sewa dengan dasar bahwa Perusahaan dan entitas anak dan IPP memiliki perjanjian *take or pay*, dimana Perusahaan dan entitas anak mengambil hampir seluruh listrik dan energi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik. Jenis perjanjian ini ditetapkan sebagai sewa pembiayaan dimana porsi signifikan dari risiko dan manfaat atas sejumlah pembangkit listrik telah dialihkan ke Perusahaan dan entitas anak dengan dasar bahwa masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset dan terdapat opsi beli pada akhir masa sewa.	*In 2015, the Company and its subsidiaries determined that certain power purchase agreements and energy sales contracts with IPPs qualify as leases on the basis that the Company and its subsidiaries and the IPPs have take or pay arrangements where the Company and its subsidiaries are taking substantially all electricity and energy output from the power plants. This type of arrangement is determined to be a finance lease where a significant portion of the risks and rewards of ownership of certain power plants have been transferred to the Company and its subsidiaries on the basis that the lease term is for the major part of the economic life of the assets and there is a bargain purchase option at the end of the lease term.*
m. Pekerjaan Dalam Pelaksanaan Pekerjaan dalam pelaksanaan merupakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan pembangunan aset tetap.	***m. Construction in Progress*** *Construction in progress represents costs directly related to the construction of property, plant and*

Pekerjaan dalam pelaksanaan dinyatakan sebesar biaya perolehan, termasuk biaya pinjaman selama masa pembangunan dari pinjaman yang digunakan untuk pembangunan, beban penyusutan aset tetap yang digunakan dalam pekerjaan pembangunan dan biaya pengujian ketika aset dapat berfungsi setelah dikurangi penjualan listrik ketika masa uji coba. Pekerjaan dalam pelaksanaan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

equipment. Construction in progress is stated at cost, which includes borrowing costs during construction on debts incurred to finance the construction, depreciation of property, plant and equipment that were used in the construction and cost of testing whether the asset is functioning properly after deducting sales of electricity during commissioning period. Construction in progress is transferred to the respective property, plant and equipment account when completed and ready for use.

n. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian, merupakan aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan atau dijual, ditambahkan pada biaya perolehan aset tersebut, sampai dengan saat selesainya aset secara substansial siap untuk digunakan atau dijual.

Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusikan secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi terhadap jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh aset kualifikasian. Tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang biaya pinjaman yang dibagi dengan jumlah pinjaman yang tersedia selama periode, selain pinjaman yang secara spesifik diambil untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasian.

Biaya pinjaman dikapitalisasi yang berasal dari rugi selisih kurs dibatasi sedemikian rupa sehingga jumlah dikapitalisasi tidak melebihi jumlah biaya pinjaman yang mungkin terjadi jika pinjaman tersebut dilakukan dengan menggunakan mata uang fungsional pada periode tersebut.

Penghasilan investasi diperoleh atas investasi sementara dari pinjaman yang secara spesifik belum digunakan untuk pengeluaran aset kualifikasian dikurangi dari biaya pinjaman yang dikapitalisasi.

n. Borrowing Costs

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, are assets that necessarily take a substantial period of time to get ready for their intended use or sale, to be added to the cost of those assets, until such time as the assets are substantially ready for their intended use or sale.

For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined by applying a capitalization rate to the amount expensed on the qualifying assets. The capitalization rate is the weighted average of the total borrowings cost applicable to the total borrowings outstanding during the period, other than borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset.

Borrowing costs are capitalized from foreign exchange losses to an extent by which the capitalized amount does not exceed the amount of borrowing costs which may have been incurred had the loan been denominated in the functional currency.

Investment income is earned from the temporary investment of specific borrowings pending their expenditure on qualifying assets is deducted from the borrowing costs eligible for capitalization.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Semua biaya pinjaman lainnya diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

All other borrowing costs are recognized in profit or loss in the period in which they are incurred.

o. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

o. Investment Properties

Investment properties are properties (land or a building or part of a building or both) held by the owner or the lessee under a finance lease to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes; or sale in the daily business activities.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Investment property is recognized as an asset when, and only when it is probable that the future economic benefits that are associated with the investment property will flow to the entity; and the cost of the investment property can be measured reliably.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

An investment property shall be measured initially at its cost, comprises its purchase price and any directly attributable expenditure (professional fees for legal services, property transfer taxes and other transaction costs). Transaction costs are included in the initial measurement.

Setelah pengakuan awal, Perusahaan dan entitas anak memilih menggunakan model nilai wajar dan mengukur seluruh properti investasi berdasarkan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

After initial recognition, the Company and its subsidiaries choose to use fair value model and measure all of its investment property at fair value. Any gain or loss arising from a change in the fair value of investment property is recognized in profit or loss for the period in which it arises.

Penentuan nilai wajar investasi didasarkan pada penilaian oleh penilai independen yang mempunyai kualifikasi profesional yang telah diakui dan relevan seta memiliki pengalaman terkini di lokasi dan kategori properti investasi yang dinilai.

The fair value of investment property is based on a valuation by an independent valuer who holds a recognized and relevant professional qualification and has recent experience in the location and category of the investment property being valued.

Pengalihan ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik dan dimulainya sewa operasi kepada pihak lain.

Transfer to investment property made when, and only when, there is a change in use, evidenced by end of owner-occupation and commencement of an operating lease to another party.

Pengalihan dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik dan dimulainya pengembangan untuk dijual.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

Transfer from investment property made when, and only when, there is a change in use, evidenced by commencement of owner-occupation and commencement of development with a view to sale.

An investment property is derecognized on disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. Gains or losses arising from the retirement or disposal are determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset, and are recognized in profit or loss in the period of the retirement or disposal.

p. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

p. *Investments in Associates and Joint Ventures*

Investasi pada Entitas Asosiasi
Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Perusahaan dan entitas anak memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas. Sesuai metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya, dan nilai tercatat akan meningkat atau menurun untuk mengakui bagian investor atas laba rugi. Di dalam investasi Perusahaan dan entitas anak atas entitas asosiasi termasuk *goodwill* yang diidentifikasi ketika akuisisi.

Investments in Associates
Associates are all entities over which the Company and its subsidiaries have significant influence but not control, generally accompanying a shareholding of between 20% and 50% of the voting rights. Investments in associates are accounted for using the equity method of accounting. Under the equity method, the investment is initially recognized at cost and the carrying amount is increased or decreased to recognize the investor's share of the profit or the loss of the investee after the date of acquisition. The Company and its subsidiaries investment in associates includes goodwill identified on acquisition.

Penghasilan dan aset dan liabilitas dari entitas asosiasi digabungkan dalam laporan keuangan konsolidasian dicatat dengan mengunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, sesuai PSAK 58 (Revisi 2009), Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan. Dalam menerapkan metode ekuitas, bagian Perusahaan dan entitas anak atas laba rugi entitas asosiasi setelah perolehan diakui dalam laba rugi, dan bagian perusahaan atas penghasilan komprehensif lainnya setelah tanggal perolehan diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya. Perubahan dan

The results of operations and assets and liabilities of associates are incorporated in these consolidated financial statements using the equity method of accounting, except when investment is classified as held for sale, in which case, in accordance with SFAS 58 (Revised 2009), Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations. In applying the equity method of accounting, the Company and its subsidiaries' share of its associate's post-acquisition profits or losses is recognized in profit or loss and its share of post-acquisition other comprehensive income is recognized in other comprehensive income. These post-

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

penerimaan distribusi dari entitas asosiasi setelah tanggal perolehan disesuaikan terhadap nilai tercatat investasi. Bagian Perusahaan dan entitas anak atas kerugian entitas asosiasi yang melebihi nilai tercatat dari investasi (yang mencakup semua kepentingan jangka panjang, secara substansi, merupakan bagian dari Perusahaan dan nilai investasi bersih entitas anak dalam entitas asosiasi) diakui hanya sebatas bahwa Perusahaan dan entitas anak telah mempunyai kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif atau melakukan pembayaran atas kewajiban entitas asosiasi.

acquisition movements and distributions received from an associate are adjusted against the carrying amounts of the investment. Losses of the associates in excess of the Company and its subsidiaries' interests in those associates (which includes any long-term interests that, in substance, form part of the Company and its subsidiaries' net investment in the associate) are recognized only to the extent that the Company and its subsidiaries have incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate.

Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antara Perusahaan dan entitas anak dengan entitas asosiasi dieliminasi sebesar bagian Perusahaan dan entitas anak dalam entitas asosiasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi akan disesuaikan, apabila diperlukan, agar konsisten dengan kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak.

Unrealized gains on transactions between the Company and its subsidiaries with associates, are eliminated to the extent of the Company and its subsidiaries interests in the associate. Unrealized losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of impairment of the assets transferred. The accounting policies of the associates have been changed when necessary to ensure consistency with the accounting policy adopted by the Company and its subsidiaries.

Pada setiap tanggal pelaporan Perusahaan dan entitas anak menentukan apakah ada bukti objektif bahwa terdapat indikasi penurunan nilai untuk menentukan apakah perlu untuk mengakui penurunan nilai sehubungan dengan investasi pada entitas asosiasi Perusahaan dan entitas anak. Jika terdapat indikasi penurunan nilai, jumlah tercatat investasi yang tersisa (termasuk *goodwill*) diuji penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48 (Revisi 2014), Penurunan Nilai Aset, sebagai suatu aset tunggal dengan membandingkan antara jumlah terpulihkan (mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual) dengan jumlah tercatatnya. Rugi penurunan nilai yang diakui pada keadaan tersebut tidak dialokasikan pada setiap aset yang membentuk bagian dari nilai tercatat investasi pada entitas asosiasi. Setiap pembalikan dari penurunan nilai diakui sesuai dengan PSAK 48 sepanjang jumlah terpulihkan dari investasi tersebut kemudian meningkat.

The Company and its subsidiaries determine at each reporting date whether there is any objective evidence that impairment indicators exist to determine whether it is necessary to recognize any impairment loss with respect to the Company and its subsidiaries' investment in an associate. If impairment indicators exist, the entire carrying amount of the investment (including goodwill) is tested for impairment in accordance with SFAS 48 (Revised 2014), Impairment of Assets, as a single asset by comparing its recoverable amount (higher of value in use and fair value less costs to sell) with its carrying amount. Any impairment loss recognized forms part of the carrying amount of the investment. Any reversal of that impairment loss is recognized in accordance with SFAS 48 to the extent that the recoverable amount of the investment subsequently increases.

Perusahaan dan entitas anak menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut:
(a) jika investasi menjadi entitas anak;

(b) jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka Perusahaan dan entitas anak mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar; dan
(c) ketika Perusahaan dan entitas anak menghentikan penggunaan metode ekuitas, Perusahaan dan entitas anak mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika *investee* telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.

Ketika Perusahaan dan entitas anak melakukan transaksi dengan entitas asosiasi, keuntungan dan kerugian dieliminasi sebesar kepentingan mereka dalam entitas asosiasi.

Bagian partisipasi dalam ventura bersama
Menurut PSAK 66 (Revisi 2015), pengaturan bersama diklasifikasikan sebagai operasi bersama atau ventura bersama bergantung pada hak dan kewajiban kontraktual para investor. Perusahaan dan entitas anak telah menilai sifat dari pengaturan bersama dan menentukan pengaturan tersebut sebagai ventura bersama.

Hasil operasi, aset dan liabilitas dari ventura bersama disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian menggunakan metode ekuitas. Dalam menerapkan metode ekuitas, bagian Perusahaan dan entitas anak atas laba rugi ventura bersama setelah perolehan diakui dalam laba rugi, dan bagian Perusahaan atas penghasilan komprehensif lain setelah tanggal perolehan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Perubahan dan penerimaan distribusi dari ventura bersama setelah tanggal perolehan disesuaikan terhadap nilai tercatat investasi.

The Company and its subsidiaries discontinue the use of the equity method from the date when its investment ceases to be an investment in associate as follows:
(a) if the investment becomes a subsidiary;
(b) if the retained interest in the former associate is a financial asset, the Company and its subsidiaries measure the retained interest at fair value; and
(c) when the Company and its subsidiaries discontinue the use of the equity method, the Company and its subsidiaries account for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that investment on the same basis as would have been required if the investee had directly disposed of the related assets or liabilities.

When the Company and its subsidiaries transact with an associate, profits and losses are eliminated to the extent of their interest in the relevant associate.

Interest in joint ventures Under SFAS 66 (Revised 2015), investments in joint arrangements are classified as either joint operations or joint ventures depending on the contractual rights and obligations of each investor. The Company and its subsidiaries have assessed the nature of its joint arrangements and determined them to be joint ventures.

The result of operations, assets and liabilities of joint ventures are presented in these consolidated financial statements using the equity method. In applying the equity method of accounting, the Company and its subsidiaries' share of its joint ventures post-acquisition profits or losses is recognized in profit or loss and its share of post-acquisition other comprehensive income is recognized in other comprehensive income. These post-acquisition movements and distributions received from a joint venture are adjusted against the carrying amounts of the investment.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Jika bagian Perusahaan dan entitas anak atas rugi ventura sama dengan atau melebihi kepentingannya pada ventura bersama, termasuk piutang tidak lancar tanpa jaminan, maka perusahaan menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut, kecuali Perusahaan dan entitas anak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atau telah melakukan pembayaran atas nama ventura bersama.

When the Company and its subsidiaries' share of the losses of a joint ventures equals or exceeds its interest in the joint ventures, including any other unsecured non-current receivables, the Company does not recognize further losses, unless it has obligations to make or has made payments on behalf of the joint ventures.

Penyesuaian dibentuk terhadap laporan keuangan konsolidasian untuk mengeliminasi bagian Perusahaan dan entitas anak atas keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atas transaksi antara Perusahaan dan entitas anak dan ventura bersama. Ventura bersama dicatat dengan menggunakan metode ekuitas sampai dengan tanggal dimana Perusahaan dan entitas anak kehilangan pengaturan bersama atas entitas yang diatur bersama.

Adjustments are made in the consolidated financial statements to eliminate the Company and its subsidiaries' share of unrealized gains and losses on transactions between the Company and its subsidiaries and the joint ventures. The joint ventures are carried at equity method until the date on which the Company and its subsidiaries cease to have joint arrangements over the joint ventures.

Kebijakan akuntansi ventura bersama telah diubah jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dari kebijakan yang diterapkan oleh Perusahaan dan entitas anak.

Accounting policies of the joint ventures have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Company and its subsidiaries.

Perusahaan dan entitas anak mengukur dan mengakui sisa investasi pada nilai wajar setelah hilangnya pengendalian dan ventura bersama tidak menjadi entitas anak atau entitas asosiasi. Selisih antara nilai tercatat atas hilangnya ventura bersama dengan agregat nilai wajar sisa investasi dan hasil pelepasan diakui pada laba rugi. Ketika sisa investasi mempunyai pengaruh yang signifikan, investasi tersebut dicatat sebagai investasi pada entitas asosiasi.

The Company and its subsidiaries measure and recognize the remaining investment at fair value upon loss of control, provided the joint ventures do not become subsidiaries or associates. Any difference between the carrying amount of the joint ventures upon loss of control and the aggregate of the fair value of the remaining investment and proceeds from disposal is recognized in profit or loss. When the remaining investment constitutes significant influence, it is accounted for as investment in an associate.

q. Aset Takberwujud

i. Biaya Pengembangan Piranti Lunak
Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan kepada desain dan

q. Intangible Assets

i. Software Development Cost
Costs associated with maintaining computer software programs are recognized as an expense as incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software

pengujian produk piranti lunak yang dapat diidentifikasi dan unik yang dikendalikan oleh Perusahaan dan entitas anak diakui sebagai aset takberwujud.

products controlled by the Company and its subsidiaries are recognized as intangible assets.

ii. Biaya Legal Terkait Pembaruan Hak Atas Tanah
Biaya legal terkait dengan pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud.

ii. Legal Costs to Renew Land Rights

Legal costs related to renewal of land rights are recognized as intangible assets.

Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Umur manfaat aset takberwujud dinilai apakah terbatas atau tidak terbatas.

After initial recognition, intangible asset is carried at cost less any accumulated amortization and any accumulated impairment loss. The useful life of intangible asset is assessed to be either finite or indefinite.

Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas
Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi selama umur manfaat ekonomi dengan metode garis lurus (atau metode lainya sepanjang mencerminkan pola manfaat ekonomik masa depan yang diperkirakan dikonsumsi oleh entitas).

Intangible asset with finite useful life

Intangible asset with finite life is amortized over the economic useful life by using a straight-line method (or other method as it reflects the pattern in which the asset's future economic benefits are expected to be consumed by the entity).

Biaya Pengembangan Piranti Lunak diamortisasi dengan tingkat amortisasi sebesar 20% dengan metode garis lurus.

Software Development Cost is amortized with amortization rate of 20% using straight-line method.

Biaya legal terkait pembaruan hak atas tanah diamortisasi sepanjang mana yang lebih pendek antara masa berlaku hukum hak atau umur ekonomi tanah.

Legal costs to renew land rights are amortized over the validity period of the legal rights or the economic life of the land, whichever the shorter.

Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah setidaknya setiap akhir tahun buku.

The amortization period and the amortization method for an intangible asset with a finite useful life are reviewed at least at each financial year end.

Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas
Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi. Umur manfaat aset takberwujud yang tidak diamortisasi ditelaah setiap tahun untuk menentukan apakah peristiwa dan keadaan dapat terus mendukung penilaian bahwa umur manfaat tetap tidak terbatas. Jika tidak, perubahan umur manfaat dari tidak terbatas menjadi terbatas diterapkan secara prospektif.

Intangible asset with indefinite useful life

Intangible asset with indefinite useful life is not amortized. The useful life of an intangible asset that is not being amortized is reviewed annually to determine whether events and circumstances continue to support an indefinite useful life assessment for that asset. If they do not, the change in the useful life assessment from indefinite to finite is accounted for on a prospective basis.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan kapanpun terdapat suatu indikasi bahwa aset takberwujud mungkin mengalami penurunan nilai.

Intangible asset with indefinite useful life is tested for impairment annually and whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired.

r. Biaya Dibayar Dimuka
Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

r. Prepaid Expenses
Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

s. Kas dan Setara Kas
Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Untuk kebijakan akuntansi pinjaman yang diberikan dan piutang, lihat Catatan 3.g.

s. Cash and Cash Equivalents
For cash flow presentation purposes, cash and cash equivalents consist of cash in hand and in banks and all unrestricted investments with maturities of three-months or less from the date of placement.

Restricted cash in banks and time deposits are classified as loans and receivables. Refer to Note 3.g for the accounting policy on loans and receivables.

t. Persediaan
Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata bergerak.

Di dalam penentuan nilai realisasi bersih, Perusahaan dan entitas anak tidak menurunkan nilai persediaan yang digunakan untuk produksi tenaga listrik apabila Perusahaan dan entitas anak mampu memperoleh pendapatan penjualan tenaga listrik di atas biaya perolehan persediaan tersebut.

t. Inventories
Inventories are stated at cost or net realizable value, whichever is lower. Cost is determined using the moving average method.

In determining the net realizable values, the Company and its subsidiaries do not write down inventories held in use for production of electricity below their costs when the Company and its subsidiaries are able to sell electricity above the costs of inventories.

u. Pinjaman dan Utang Obligasi (Termasuk Sukuk Ijarah)
Pinjaman dan utang obligasi diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan. Kebijakan akuntansi untuk liabilitas keuangan dijelaskan dalam Catatan 3.h.

u. Borrowings and Bonds Payable (Including Sukuk Ijara)
Borrowings and bonds payable are classified as financial liabilities. Refer to Note 3.h for the accounting policy on financial liabilities.

v. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Penjualan Tenaga Listrik
Pendapatan penjualan listrik diakui berdasarkan pemakaian energi listrik (kWh). Beban diakui pada saat terjadinya (dasar akrual).

Subsidi Listrik Pemerintah
Subsidi listrik Pemerintah yang diberikan melalui Perusahaan diakui sebagai pendapatan atas dasar akrual yang dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 44/PMK.02/2017 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 174/PMK.02/2019 dan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ("ESDM") No. 28 Tahun 2016 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero) yang terakhir diperbaharui dengan Peraturan Menteri ESDM No. 19 Tahun 2019.

Pendapatan Kompensasi
Kompensasi dari Pemerintah atas penggantian Biaya Pokok Penyediaan ("BPP") tenaga listrik beberapa golongan pelangan yang tarif penjualan tenaga listriknya lebih rendah dibandingkan BPP, dan belum diperhitungkan dalam subsidi diakui sebagai pendapatan atas dasar akrual.

Biaya Penyambungan Pelanggan
Perusahaan mencatat biaya penyambungan yang diterima dari pelanggan untuk memperoleh atau membangun aset tetap yang digunakan untuk menghubungkan pelanggan ke jaringan listrik Perusahaan sebagai pendapatan pada saat Perusahaan menyelesaikan kewajiban atas jasa koneksi tersebut.

Pendapatan Usaha Lainnya
Pendapatan usaha lainnya merupakan pendapatan yang berasal dari pelayanan jaringan dan jasa telekomunikasi, sewa trafo dan jasa-jasa administratif lainnya. Pendapatan lainnya diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian transaksi tersebut pada tanggal pelaporan.

v. Revenue and Expense Recognition

Sale of Electricity
Revenue from the sale of electricity is recognized based on electricity usage (kWh). Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

The Government's Electricity Subsidy
The Government's electricity subsidy is recognized as revenue on an accrual basis which is computed in accordance with the provisions stipulated in the prevailing Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 44/PMK.02/2017 which has been amended by Regulation of The Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 174/PMK.02/2019 and Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources ("ESDM") No. 28 Year 2016 regarding electricity tariff provided by PT PLN (Persero) with the latest amendment by Regulation of the Minister of ESDM No. 19 Year 2019.

Compensation Income
Compensation from Government for reimbursement of Electricity Production Cost ("BPP") of several categories of customers whose tariffs for selling electricity are lower than BPP, and not yet calculated in subsidies is recognized as income on an accrual basis.

Customers Connection Fees
The Company recognizes connection fees received from customers that are used to construct or acquire property, plant and equipment to connect the customers to its network as revenues when the Company completes the connection service.

Other Revenues
Other revenues consist of telecommunication network and services, transformer rental and other administrative services. Other revenue is recognized with reference to the stage of completion of the transaction at the reporting date.

Pendapatan Bunga
Pendapatan bunga diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual, dengan acuan jumlah pokok terutang dan tingkat bunga yang berlaku.

Beban
Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

w. Pembelian Tenaga Listrik
Dalam PPA dan ESC dengan IPP, Perusahaan dan entitas anak membayar pasokan tenaga listrik yang disediakan oleh IPP sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan formula pembayaran. Pembayaran tersebut mencakup komponen biaya berbeda yaitu komponen kapasitas dan energi untuk PPA, komponen sumber daya dan pembangkitan untuk ESC, komponen operasional dan pemeliharaan yang tergantung pada tingkat pasokan energi serta variabel lain yang ditentukan dalam perjanjian.

Sebelum 1 Januari 2016, Perusahaan dan entitas anak menerapkan ISAK 8 dan mengevaluasi apakah PPA dan ESC dengan IPP mengandung unsur sewa. Apabila terdapat unsur sewa, maka Perusahaan dan entitas anak melakukan kajian untuk menentukan apakah sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaaan atau sewa operasi (Catatan 3.l). Jika PPA dan ESC dengan IPP tidak mengandung sewa, maka biaya pembelian tenaga listrik dari IPP diakui pada saat terjadinya dan disajikan sebagai beban pembelian tenaga listrik dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2016
Penerapan POJK No.6 secara prospektif sejak 1 Januari 2016, mengakibatkan seluruh transaksi berdasarkan PPA dan ESC dengan IPP diperlakukan sebagai transaksi jual beli, meskipun dalam transaksi tersebut mengandung substansi selain jual beli. Biaya pembelian tenaga listrik dari IPP diakui pada saat terjadinya dan disajikan sebagai beban pembelian tenaga listrik dalam laporan laba

Interest Income
Interest income is recognized as in incurred on an accrual basis, by reference to the principal outstanding and at the applicable interest rate.

Expenses
Expenses are recognized as incurred on an accrual basis.

w. Purchase of Electricity
Under PPAs and ESCs with IPPs, the Company and its subsidiaries pay the IPP for the supply of energy at an amount determined in accordance with the payment formula in which payment for different cost components, such as capacity and energy components for the PPA, resource and generation components for the ESC, as well as operations and maintenance components, depends on the level of energy supplied and other variables stipulated in the agreement.

Before January 1, 2016, the Company and its subsidiaries implemented ISFAS 8 and evaluated whether PPAs and ESCs with IPPs contain a lease. When a lease is identified, the Company and its subsidiaries perform assessment on whether such lease is classified as finance lease or operating lease (Note 3.l). If PPA and ESC with IPP does not contain a lease, the cost of electricity purchases from IPPs are recognized when incurred as purchased electricity expense and presented in consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Accounting treatment since January 1, 2016
The prospective implementation of POJK No.6 since January 1, 2016 resulted in all transactions based on PPAs and ESCs with IPPs are treated as sale and purchase transactions, regardless those transactions contain substances other than sale and purchase. The cost of electricity purchases from IPPs are recognized when incurred as purchased electricity expense and

rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian (Catatan 2.a).

presented in consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income (Note 2.a).

x. Imbalan Kerja

Imbalan Pascakerja
Perusahaan dan entitas anak menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetap yang memenuhi syarat. Perusahaan dan entitas anak juga memberikan imbalan pascakerja lain tanpa pendanaan kepada karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebijakan Perusahaan dan entitas anak.

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris yang independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah (dikarenakan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi) yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi.

Imbalan Kerja Jangka Panjang
Perhitungan imbalan kerja jangka panjang ditentukan dengan menggunakan *Projected Unit Credit.* Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi. Perusahaan dan entitas anak mengakui keuntungan dan kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

x. Employee Benefits

Post-employment Benefits
The Company and its subsidiaries have established a defined benefit pension plan covering all of their eligible permanent employees. The Company and its subsidiaries also provide other unfunded defined post-employment benefit plans for their qualifying employees based on the Company and its subsidiaries' policies.

The liability recognized in the statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the Projected Unit Credit Method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of Government Bonds (considering currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension obligation.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

Past-service costs are recognized immediately in profit or loss.

Long-term Benefits
Long-term benefits are determined using the Projected Unit Credit Method. Past service costs are recognized immediately in profit or loss. The Company and its subsidiaries recognized gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan when the curtailment or settlement occurs. The gain or loss on a

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lain periode terjadinya.

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan kerja jangka panjang di laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan nilai kini liabilitas imbalan kerja pasti.

curtailment or settlement of a defined benefit plan is recognized in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions charged to other comprehensive income in the periode in which they occur.

The long-term employee benefits liabilities recognized in the consolidated statement of financial position represents the present value of the defined benefit obligation.

y. Provisi

Provisi diakui ketika Perusahaan dan entitas anak memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Perusahaan dan entitas anak diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik dari pertimbangan yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

y. Provisions

Provisions are recognized when the Company and its subsidiaries have a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event and it is probable that the Company and its subsidiaries will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

z. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

z. Income Tax

Tax expense is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax. Current tax expense is determined based on the taxable profit for the year computed using the prevailing tax rates.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui, diluar laba rugi (baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laporan laba rugi atau yang timbul dari akuntansi awal atau kombinasi bisnis. Dalam kasus kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

Current and deferred taxes are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside profit or loss, or where they arise from the initial accounting for a business combination. In the case of a business combination, the tax effect is included in the accounting for the business combination.

Untuk pendapatan yang menjadi subjek pajak penghasilan final, beban pajak diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan akuntansi yang diakui dan disajikan dalam sebagai bagian dari akun beban operasional pada tahun berjalan dikarenakan pajak tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai pajak penghasilan.

For income which is subject to final tax, tax expenses are recognized proportionally with the accounting revenue recognized and presented as part of the operating expenses account in the current year as such tax does not satisfy the criteria of income tax.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognized as a liability. If the amounts already paid in respect of current and prior periods exceed the amounts due for those periods, the excess shall be recognized as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carry forward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan,

A deferred tax liability shall be recognized for all taxable temporary differences,

kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:
a) pengakuan awal *goodwill*; atau
b) pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan dan entitas anak ekspektasikan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus, jika dan hanya jika, ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset

except to the extent that the deferred tax liability arises from:
a) the initial recognition of goodwill;
b) or the initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the consolidated financial statement carrying amounts of assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable income will be available in future periods against which the deductible temporary differences can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.

The measurement of deferred tax assets and deferred tax liabilities reflects the consequences that would follow from the manner in which the Company and its subsidiaries expect, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of their assets and liabilities.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are offset, if and only if, when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and

pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan ketika liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama serta Perusahaan dan entitas anak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

when they relate to income taxes levied by the same taxation authority and the Company and its subsidiaries intend to settle their current tax assets and current tax liabilities on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

aa. Aset Donasi dari Pemerintah

Aset donasi dari Pemerintah, dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham Perusahaan, diakui sebagai transaksi ekuitas dengan pemegang saham. Aset yang didonasikan tersebut dicatat sesuai dengan nilai transaksi yang telah disepakati dengan Pemerintah. Perusahaan mencatat aset donasi dari Pemerintah sebagai penambahan aset tetap dan peningkatan tambahan modal disetor oleh pemegang saham.

aa. Government Contributed Assets

Assets contributed by the Government, in their capacity as a shareholder of the Company, are accounted for as an equity transaction with the shareholder. The assets are recorded at the transaction costs agreed with the Government. The Company records the Government contributed asset as an addition to property, plant and equipment with a corresponding increase to additional payment in capital by the shareholder.

bb. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Aset Pengampunan Pajak dan Liabilitas Pengampunan Pajak diakui pada saat Surat Keterangan Pengampunan Pajak ("SKPP") diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan tidak diakui secara neto (saling hapus). Selisih antara Aset Pengampunan Pajak dan Liabilitas Pengampunan Pajak diakui sebagai Tambahan Modal Disetor.

Aset Pengampunan Pajak pada awalnya diakui sebesar nilai yang disetujui dalam SKPP.

Liabilitas Pengampunan Pajak pada awalnya diakui sebesar nilai kas dan setara kas yang masih harus dibayarkan oleh Perusahaan sesuai kewajiban kontraktual atas perolehan Aset Pengampunan Pajak.

Uang tebusan yang dibayarkan oleh Perusahaan untuk memperoleh pengampunan pajak diakui sebagai beban pada periode dimana SKPP diterima oleh Perusahaan.

bb. Tax Amnesty Assets and Liabilities

Tax Amnesty Assets and Liabilities are recognized upon the issuance of Tax Amnesty Approval Letter ("TAAL") by the Minister of Finance of Republic of Indonesia, and they are not recognized as net amount (offset). The difference between Tax Amnesty Assets and Tax Amnesty Liabilities are recognized as Additional Paid-in Capital.

Tax Amnesty Assets are initially recognized at the value stated in TAAL.

Tax Amnesty Liabilities are initially measured at the amount of cash or cash equivalents to be settled by the Company according to the contractual obligation with respect to the acquisition of respective Tax Amnesty Assets.

The compensation paid by the Company to obtain the tax amnesty is recognized as expense in the period in which the Company receives TAAL.

Setelah pengakuan awal, Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak diukur sesuai dengan SAK yang relevan sesuai dengan klasifikasi masing-masing Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak.

Sehubungan dengan Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak yang diakui, Perusahaan dan entitas anak telah mengungkapkan dalam laporan keuangannya:
a. Tanggal SKPP;
b. Jumlah yang diakui sebagai Aset Pengampunan Pajak sesuai SKPP; dan
c. Jumlah yang diakui sebagai Liabilitas Pengampunan Pajak.

After initial recognition, Tax Amnesty Assets and Liabilities are measured in accordance with respective relevant FAS according to the classification of each Tax Amnesty Assets and Liabilities.

With respect to Tax Amnesty Assets and Liabilities recognized, the Company and its subsidiaries have disclosed the following in its financial statements:

a. The date of TAAL;
b. Amount recognized as Tax Amnesty Assets in accordance with TAAL; and
c. Amount recognized as Tax Amnesty Liabilities.

cc. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan menyesuaikan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif yang dimiliki perusahaan. Perusahaan tidak memiliki efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

cc. Earnings per Share

Basic earnings per share are computed by dividing income for the year attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share are calculated by adjusting the weighted average number of ordinary shares outstanding to assume conversion of all dilutive potential ordinary shares owned by the Company. The Company does not have any dilutive potential ordinary shares.

dd. Segmen Operasi

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Perusahaan dan entitas anak yang secara regular direviu oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen yang dilaporkan adalah segmen operasi individual atau suatu grup segmen operasi yang informasi segmennya harus dilaporkan secara terpisah. Penggabungan satu atau lebih segmen operasi diperbolehkan ketika memenuhi kriteria tertentu, kriteria utama yang harus dipenuhi adalah segmen operasi harus memiliki karakteristik ekonomis yang sejenis (contoh margin keuntungan, persebaran, tingkat pertumbuhan penjualan, dll). Pertimbangan

dd. Operating Segment

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Company and its subsidiaries and are regularly reviewed by the "chief operating decision maker" in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

Reportable segments are individual operating segments or a group of operating segments for which segment information must be separately reported. Aggregation of one or more operating segments into a single reportable segment is permitted (but not required) where certain conditions are met, the principal condition being that the operating segments should have similar economic characteristics (for example profit margin, spreads, sales growth rates, etc). Whether

signifikan diperlukan ketika menentukan penggabungan segmen operasi.	*multiple operating segments can be aggregated into a single reportable segment is a matter of significant judgement.*
Wilayah Jawa Bagian Barat, Jawa Bagian Tengah dan Jawa Bagian Timur digabungkan sebagai satu segmen operasi dikarenakan memiliki karakteristik konsumen yang sejenis.	*West Part of Java Area, Central Part of Java Area and East Part of Java Area is aggregated as a single reportable segment due to similarity the consumer's characteristic.*
Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka dikategorikan berdasarkan lokasi geografis di mana penjualan tenaga listrik dilakukan.	*Information reported to the chief operating decision maker for the purposes of resource allocation and assessment of their performance is grouped based on the geographical location of where electricity sales are made.*

4. Pertimbangan Kritis Akuntansi dan Estimasi Akuntansi yang Signifikan / *4. Critical Accounting Judgments and Significant Accounting Estimates*

Dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak, sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen diharuskan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang nilai aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut.

In the application of the Company and its subsidiaries' accounting policies, which are described in Note 3, the management is required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

Estimasi dan asumsi yang mendasari direviu secara berkelanjutan. Revisi terhadap estimasi akuntansi akan diakui pada periode dimana estimasi tersebut direvisi, jika revisi tersebut hanya berpengaruh terhadap periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode berikutnya jika revisi tersebut mempengaruhi periode tersebut.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi
Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 3, Perusahaan dan entitas anak telah menentukan hal-hal berikut yang memerlukan pertimbangan signifikan:

Critical Judgments in Applying Accounting Policies
In the process of applying the accounting policies described in Note 3, the Company and its subsidiaries have identified the following matters under which significant judgments are made:

Nilai Wajar Pembangkit Listrik Di Dalam Sewa Pembiayaan
Sejumlah aset tetap dicatat berdasarkan sewa pembiayaan menurut PSAK 30. Pada saat dimulainya sewa, Perusahaan mengakui aset

Fair Value of Power Plants Held Under Finance Leases
A number of property, plant and equipment are recorded based on finance lease arrangement, in accordance with SFAS 30. At the

dan liabilitas sewa pembiayaan sebesar nilai wajar pembangkit listrik yang disewa atau, jika lebih rendah, nilai kini dari pembayaran sewa minimum, yang ditentukan pada awal masa sewa.

commencement of the lease, the Company recognizes the finance leased asset and liability at an amount equal to the fair value of the power plant or, if lower, the present value of the minimum lease payments, determined at the inception of the lease.

Perusahaan menetapkan nilai wajar dari pembangkit listrik yang disewa dengan menerapkan teknik penilaian yang sesuai dan asumsi-asumsi yang memadai, termasuk estimasi biaya yang perlu dikeluarkan untuk membangun pembangkit listrik terkait, suku bunga implisit dalam sewa dan nilai sisa aset pada masa akhir kontrak. Perubahan-perubahan selanjutnya atas asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar pada awal masa sewa tidak akan merubah nilai aset pembiayaan di masa mendatang.

The Company determined the fair value of the finance leased power plant by applying the appropriate valuation techniques and assumptions, including the expected cost to build the power plant, the implicit interest rate of the lease and the residual value of the asset at the end of the contract. Any subsequent changes to the assumptions used to measure fair value at inception do not affect the subsequent measurement amount of the leased asset.

Biaya Penyambungan Pelanggan
Perusahaan dan entitas anak mempertimbangkan semua fakta dan kondisi yang relevan untuk menentukan pengakuan pendapatan terkait biaya penyambungan pelanggan. Untuk itu, Perusahaan perlu menentukan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerimaan biaya penyambungan dari pelanggan.

Revenues from Customers' Connection Fees
The Company and its subsidiaries have considered all relevant facts and circumstances to determine the exact timing of revenue recognition pertaining to connection fees paid by customers. To do so, the Company needs to determine what performance obligations it has as a result of receiving connection fees.

Perusahaan dan entitas anak mempertimbangkan fakta bahwa kewajiban untuk menyediakan tenaga listrik secara berkelanjutan diatur dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan tahun 2009 dan semua pelanggan dikenakan tarif listrik yang telah ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk penggunaan tenaga listrik (terlepas dari jumlah biaya penyambungan yang dibayarkan). Oleh karena itu, penerimaan biaya penyambungan tidak menimbulkan kewajiban terpisah bagi Perusahaan dan entitas anak untuk menyediakan akses listrik secara berkelanjutan kepada pelanggan.

The Company and its subsidiaries considered the facts that the obligation to provide ongoing supply of electricity is regulated by the 2009 Electricity Law and that the Company charges all customers the same regulated tariff for electricity usage prescribed by the Government of Republic of Indonesia (regardless of the amount of connection fees paid by the customers). Therefore, the receipt of connection fees does not create a separate performance obligation for the Company and its subsidiaries to provide ongoing electricity supply to its customers.

Perusahaan dan entitas anak menyimpulkan bahwa menghubungkan pelanggan ke jaringan listrik Perusahaan merupakan jasa yang diberikan untuk mendapatkan biaya penyambungan dari pelanggan. Jasa koneksi diserahkan kepada pelanggan dan merepresentasikan nilai yang berdiri sendiri (*stand-alone value)* untuk pelanggan tersebut. Sebagai hasilnya, Perusahaan dan entitas

The Company and its subsidiaries conclude that connecting the customers to its network is the only service to be delivered in exchange for the connection fees. A service connection is delivered to the customer and represents stand-alone value for that customer. Consequently, the Company and its subsidiaries recognize connection fees received from customers that are used to

anak mencatat biaya penyambungan yang diterima dari pelanggan untuk memperoleh atau membangun aset tetap yang digunakan untuk menghubungkan pelanggan ke jaringan listrik Perusahaan sebagai pendapatan pada saat Perusahaan menyelesaikan kewajiban atas jasa koneksi terkait.

construct or acquire property, plant and equipment to connect the customers to its network as revenues when the Company completes the connection services.

Kepentingan dalam Pengaturan Bersama
Pertimbangan diperlukan untuk menentukan ketika Perusahaan dan entitas anak memiliki pengendalian bersama, yang membutuhkan penilaian mengenai aktivitas yang relevan dan ketika keputusan yang berkaitan dengan aktivitas tersebut membutuhkan persetujuan dengan suara bulat. Perusahaan dan entitas anak menentukan bahwa aktivitas yang relevan untuk pengaturan bersama adalah aktivitas yang berkaitan dengan operasi dan pengambilan keputusan dalam pengaturan tersebut.

Interest in Joint Arrangements
Judgement is required to determine when the Company and its subsidiaries have joint control, which requires an assessment of the relevant activities and when the decisions in relation to those activities require unanimous consent. The Company and its subsidiaries' have determined that the relevant activities for its joint arrangements are those relating to the operating and capital decisions of the arrangement.

Pertimbangan juga diperlukan untuk mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai pengendalian bersama atau ventura bersama. Pengklasifikasian pengaturan tersebut mengharuskan Perusahaan dan entitas anak untuk menilai hak dan kewajiban yang timbul dari pengaturan tersebut. Secara khusus, Perusahaan dan entitas anak mempertimbangkan:

Judgement is also required to classify a joint arrangement as either a joint operation or a joint venture. Classifying the arrangement requires the Company and its subsidiaries to assess its rights and obligations arising from the arrangement. Specifically, it considers:

- Struktur dari pengaturan bersama - apakah dibentuk melalui kendaraan terpisah;
- Ketika pengaturan tersebut terstruktur melalui kendaraan terpisah, Perusahaan dan entitas anak juga mempertimbangkan hak dan kewajiban yang timbul dari:
  - Bentuk legal dari kendaraan terpisah;
  - Persyaratan dari perjanjian kontraktual; dan
  - Fakta dan kondisi lain (ketika relevan).

- *The structure of the joint arrangement - whether it is structured through a separate vehicle;*
- *When the arrangement is structured through a separate vehicle, the Company and its subsidiaries also consider the rights and obligations arising from:*
  - *The legal form of the separate vehicle;*
  - *The terms of the contractual arrangement; and*
  - *Other facts and circumstances (when relevant).*

Penilaian ini sering membutuhkan pertimbangan yang signifikan dan kesimpulan yang berbeda mengenai pengendalian bersama dan apakah pengaturan tersebut merupakan operasi bersama atau ventura bersama, dapat memiliki dampak material terhadap akuntansi.

This assessment often requires significant judgement and a different conclusion on joint control and also whether the arrangement is a joint operation or a joint venture, may materially impact the accounting.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Perusahaan dan entitas anak memiliki pengaturan bersama yang terstruktur melalui ventura bersama, yaitu PT Rajamandala Electric Power, PT Perta Daya Gas, PT Bajradaya Sentranusa, PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali, PT Bukit Pembangkit Innovative, PT Rekind Daya Mamuju, PT Unelec Indonesia, PT Crompton Prima Switchgear Indonesia, PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali, PT Guohua Taidian Pembangkitan Jawa Bali, PT GCL Indotenaga, PT Sumbagsel Energi Sakti Pewali, PT North Sumatera Hydro Energy dan PT Indo Raya Tenaga. Struktur dan persyaratan dari perjanjian kontraktual mengindikasikan bahwa Perusahaan dan entitas anak memiliki hak atas aset bersih dari pengaturan bersama tersebut. Perusahaan dan entitas anak menilai fakta dan kondisi lain yang berkaitan dengan pengaturan ini dan kesimpulan final dari penilaian yang dilakukan adalah pengaturan tersebut merupakan ventura bersama (Catatan 8).

The Company and its subsidiaries have joint arrangements which are structured through joint ventures, namely PT Rajamandala Electric Power, PT Perta Daya Gas, PT Bajradaya Sentranusa, PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali, PT Bukit Pembangkit Innovative, PT Rekind Daya Mamuju, PT Unelec Indonesia, PT Crompton Prima Switchgear Indonesia, PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali, PT Guohua Taidian Pembangkitan Jawa Bali, PT GCL Indotenaga, PT Sumbagsel Energi Sakti Pewali, PT North Sumatera Hydro Energy and PT Indo Raya Tenaga. These structure and the terms of the contractual arrangement indicate that the Company and its subsidiaries have rights to the net assets of the arrangements. The Company and its subsidiaries also assessed the other facts and circumstances relating to these arrangements and the final conclusions were that the arrangement was joint ventures (Note 8).

Sumber Ketidakpastian Estimasi
Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

Sources of Estimation Uncertainty
The key assumptions concerning future and other key sources of estimation at the end of the reporting period, which have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are discussed below:

Rugi Penurunan Nilai Pinjaman Diberikan dan Piutang
Perusahaan dan entitas anak menilai penurunan nilai pinjaman diberikan dan piutang pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen membuat penilaian, apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian telah terjadi. Manajemen juga membuat penilaian atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang direviu secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya. Nilai tercatat pinjaman diberikan dan piutang diungkapkan dalam Catatan 14 dan 17.

Impairment Loss on Loans and Receivables

The Company and its subsidiaries assess their loans and receivables for impairment at each reporting date. In determining whether an impairment loss should be recorded in profit or loss, management makes a judgement as to whether there is an objective evidence that the loss event has occurred. Management also makes judgement as to the methodology and assumptions for estimating the amount and timing of future cash flows which are reviewed regularly to reduce any difference between loss estimate and actual loss. The carrying amount of loans and receivables are disclosed in Notes 14 and 17.

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap

Masa manfaat setiap aset tetap, Perusahaan dan entitas anak ditentukan berdasarkan periode kegunaan yang diharapkan dari aset

Estimated Useful Lifes of Property, Plant and Equipment
The useful life of each item of the Company's and it's subsidiaries properties, plant, and equipment, is estimated based on the period

tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan beban yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similiar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and update if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, howover, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan nilai tercatat aset tetap.

A change in the estimated useful life of any item of property, plant and equipment would affect the recorded depreciation expense and the carrying values of property, plant and equipment.

Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 6.

The carrying amounts of property, plant and equipment are disclosed in Note 6.

Nilai Wajar Aset Tetap dan Properti Investasi yang Menggunakan Model Revaluasi

Fair Value of Property, Plant and Equipment and Investment Properties That Use Revaluation Model

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan dan entitas anak melakukan perubahan kebijakan akuntansi dari model biaya menjadi model revaluasi untuk kelas aset tertentu. Pelaksanaan revaluasi aset tetap tersebut dilakukan oleh penilai publik independen.

On December 31, 2015, the Company and its subsidiaries changed their accounting policy from cost model to revaluation model for certain class of assets. The property, plant and equipment revaluation was performed by an independent public valuer.

Dalam proses penilaian, manajemen, dengan bantuan penilai publik independen, menentukan data dan asumsi, menelaah metode penilaian serta berdiskusi dengan penilai. Pendekatan dan metode yang digunakan dalam melakukan revaluasi tergantung pada kelas aset. Walaupun data dan asumsi Perusahaan dan entitas anak dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada data input atau asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap nilai aset yang menggunakan model revaluasi.

Management, with the assistance of independent public valuer, determines the data inputs and assumption, assesses valuation method and hold discussions with the valuers as part of the valuation process. The approaches and methods used in the revaluation depend on the assets class. While it is believed that the Company and its subsidiaries' data and assumptions are reasonable and appropriate, significant changes in data inputs or significant changes in assumptions may materially affect the value of assets that use revaluation model.

Rincian dari pendekatan dan data input signifikan yang digunakan dalam melakukan revaluasi aset tetap dan properti investasi diungkapkan masing-masing dalam Catatan 6 dan 7.

Detail of valuation approach and significant data input used in the revaluation property, plant and equipment and investment properties are disclosed in Notes 6 and 7, respectively.

Imbalan Pascakerja
Penentuan liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Perusahaan dan entitas anak diakumulasi dan diamortisasi selama periode mendatang dan akibatnya akan berpengaruh terhadap jumlah biaya serta liabilitas yang diakui di masa mendatang. Walaupun asumsi Perusahaan dan entitas anak dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan pascakerja Perusahaan dan entitas anak.

Asumsi yang digunakan untuk perhitungan liabilitas imbalan pascakerja diungkapkan dalam Catatan 50.

Post-employment Benefits
The determination of the post-employment benefits is dependent on the selection of certain assumptions used by actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from the Company and its subsidiaries' assumptions are accumulated and amortized over future periods and therefore, generally affect the recognized expense and liabilities recorded in such future periods. While it is believed that the Company and its subsidiaries' assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the Company and its subsidiaries' post-employment benefit.

Assumptions used in the calculation of post-employment benefit are disclosed in Note 50.

Pajak Penghasilan
Perhitungan beban pajak penghasilan Perusahaan dan entitas anak memerlukan pertimbangan dan asumsi dalam menentukan pengurangan beban tertentu selama proses pengestimasian. Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ("DJP"). Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Perusahaan dan entitas anak, melalui negosiasi dengan otoritas pajak yang relevan dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi fiskal dan perbedaan temporer, diakui apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Asumsi atas pembentukan laba kena pajak sangat dipengaruhi oleh estimasi dan asumsi manajemen atas tingkat penjualan dan biaya-

Income Taxes
The calculations of income tax expense for the Company and its subsidiaries require judgements and assumptions in determining the deductibility of certain expenses during the estimation process. All judgement and estimates made by management may be challenged by the Directorate General of Taxation ("DGT"). As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. The resolution of tax positions taken by the Company and its subsidiaries, through negotiations with the relevant tax authorities can take several years to complete and in some cases it is difficult to predict the ultimate outcome. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax provision in the year in which this determination is made.

Deferred tax assets, including those arising from tax losses carried forward and temporary differences, are recognized only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which is dependent on the generation of sufficient future taxable profits. The assumptions about the generation of future taxable profits are heavily affected by management's estimates of the expected sales

biaya terkait yang terdapat risiko ketidakpastian, sehingga ada kemungkinan perubahan estimasi dan asumsi tersebut akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

level and the associated costs which are subject to risk and uncertainty and hence there is a possibility that changes in circumstances will alter the projected future taxable profits.

5. Entitas Anak / *5. Subsidiaries*

Perusahaan memiliki saham entitas anak baik langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:

The Company has ownership interests, directly or indirectly, in the following subsidiaries:

Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Domisili/ *Domicile*	Jenis usaha/ *Nature of business*	Persentase pemilikan/ *Percentage of ownership* 2019 %	Persentase pemilikan/ *Percentage of ownership* 2018 %	Tahun operasi komersial/ *Year of commercial operation*	Jumlah aset sebelum eliminasi **)/ *Total assets before elimination* **) 2019 Rp	Jumlah aset sebelum eliminasi **)/ *Total assets before elimination* **) 2018 Rp
PT Indonesia Power (IP) dan entitas anak/ *and subsidiaries*	Jakarta	Pembangkitan tenaga listrik/ *Power generation*	99.99	99.99	1995	189,705	196,133
PT Cogindo DayaBersama (CDB) *)	Jakarta	*Cogeneration* , pemasok energi, jasa pelayanan dan manajemen/ *Cogeneration, energy distribution, energy service and management*	99.99	99.99	1999	1,214	1,177
PT Artha Daya Coalindo (ADC) *)	Jakarta	Perdagangan batu bara/ *Coal trading*	80.00	80.00	1998	454	157
PT Indo Ridlatama Power (IRP) *)	Kutai	Pembangkitan tenaga listrik/ *Power generation*	90.00	90.00	2018	1,650	1,719
PT Indo Tenaga Hijau (ITH) *) (d/h PT Tangkuban Paharu Geothermal Power)	Jakarta	Pengembangan energi baru dan terbarukan/ *Development of new and renewable energy*	95.21	95.21	***)	102	96
PT Putra Indotenaga (PIT) dan entitas anak/ *and its subsidiary* *)	Jakarta	Ketenagalistrikan dan energi/ *Electricity and energy*	99.99	99.99	2016	1,533	870
PT Suralaya Indo Tenaga (SIT) dan entitas anak/ *and its subsidiary* ***)	Jakarta	Ketenagalistrikan dan energi/ *Electricity and energy*	99.99	--	**)	522	--
PT Putra Suralaya Indo Tenaga (PSI) ***)	Jakarta	Ketenagalistrikan dan energi/ *Electricity and energy*	99.99	--	**)	522	--
PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) dan entitas anak/ *and subsidiaries*	Surabaya	Pembangkitan tenaga listrik/ *Power generation*	99.99	99.99	1995	173,223	174,391
PT PJB Services (PJBS) *) dan entitas anak/ *and subsidiaries*	Surabaya	Jasa/ *Service*	98.00	98.00	2001	1,185	1,277
PT Mitra Karya Prima (MKP) *)	Surabaya	Jasa/ *Service*	92.00	92.00	2013	105	87
PT Sertifikasi Kompetensi Pembangkitan Tenaga Listrik *)	Jakarta	Jasa/ *Service*	95.00	95.00	2015	8	5
PT Rekadaya Elektrika (RE) *) dan entitas anak/ *and subsidiary*	Jakarta	Jasa listrik dan enjiniring/ *Electricity and engineering*	98.90	98.90	2004	2,135	1,513
PT Rekadaya Elektrika Consult (REC) *)	Jakarta	Supervisi dan konsultasi/ *Supervision and consultation*	99.80	99.80	2011	156	172
PT Navigat Innovative Indonesia (NII) *)	Palembang	Perdagangan, konstruksi, pertambangan dan pertanian/ *Trading, construction, mining and agriculture*	72.97	72.97	***)	304	307
PT PJB Investasi (PJBI) *)	Jakarta	Ketenagalistrikan/ *Electricity*	99.99	99.99	2016	4,651	4,444
PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PLN Batam) dan entitas anak/ *and subsidiary*	Batam	Penyedia tenaga listrik/ *Electricity supplier*	99.99	99.99	2000	20,002	20,035
PT Pelayanan Energi Batam (PEB)	Batam	Pembangunan pipa gas dan energi lainnya/ *Construction of gas pipeline and other energy sector*	99.99	99.99	2016	835	881
PT Indonesia Comnets Plus (ICON)	Jakarta	Jasa penyedia jaringan telekomunikasi/ *Telecommunication provider*	99.99	99.99	2000	3,674	3,098

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018 (In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Domisili/ *Domicile*	Jenis usaha/ *Nature of business*	Persentase pemilikan/ *Percentage of ownership* 2019 %	Persentase pemilikan/ *Percentage of ownership* 2018 %	Tahun operasi komersial/ *Year of commercial operation*	Jumlah aset sebelum eliminasi **)/ *Total assets before elimination* **)* 2019 Rp	Jumlah aset sebelum eliminasi **)/ *Total assets before elimination* **)* 2018 Rp
PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (PLNE) dan entitas anak/ *and subsidiary*	Jakarta	Jasa enjiniring, pengadaan dan konstruksi/ *Engineering, procurement and construction*	99.99	99.99	2003	1,185	1,245
PT Prima Power Nusantara (PPN)	Jakarta	Jasa enjiniring, pengadaan dan konstruksi/ *Engineering, procurement and construction*	99.99	99.99	2017	279	260
PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan (PLN Tarakan) dan entitas anak/ *and subsidiary*	Tarakan	Jasa pemeliharaan dan operasi/ *Maintenance and operation*	99.97	99.97	2004	471	355
PT Paguntaka Cahaya Nusantara (PCN) *)	Balikpapan	Jasa pemeliharaan dan operasi/ *Maintenance and operation*	99.96	99.96	2018	31	3
Majapahit Holding B.V. (MH) dan entitas anak/ *and its subsidiary*	Belanda/ *The Netherlands*	Lembaga keuangan/ *Finance*	100.00	100.00	2006	9,678	13,173
Majapahit Finance B.V. (MF) *)	Belanda/ *The Netherlands*	Lembaga keuangan/ *Finance*	100.00	100.00	2006	34,998	36,458
PT PLN Batubara (PLN Batubara) dan entitas anak/ *and subsidiaries*	Jakarta	Perdagangan batu bara/ *Coal trading*	99.99	99.99	2009	7,904	5,977
PT Jambi Prima Coal (JPC)	Jambi	Pertambangan batu bara/ *Coal mining*	60.00	60.00	2010	242	175
PT PLN Batubara Investasi (BBI) dan entitas anak/ *and subsidiaries*	Jakarta	Investasi/ *Investment*	99.96	99.96	2018	1,890	240
PT Bangun Persada Jambi Energi (BPJE)*)	Jambi	Pertambangan batu bara/ *Coal mining*	80.00	80.00	***)	54	50
PT Mahakarya Abadi Prima (MAP)*)	Jambi	Pertambangan batu bara/ *Coal mining*	80.00	80.00	***)	5	5
PT Bayan Koalindo Lestari *)	Palembang	Pertambangan batu bara/ *Coal mining*	51.00	--	2018	489	--
PT Prima Bara Indonesia *)	Kalimantan Tengah/ *Central Kalimantan*	Pertambangan batu bara/ *Coal mining*	51.00	--	***)	104	--
PT PLN Batubara Niaga (BBN)	Jakarta	Perdagangan batu bara/ *Coal trading*	100.00	--	***)	50	--
PT Pengembang Listrik Nasional Gas Dan Geothermal (PLN Gas & Geothermal)	Jakarta	Pembangkitan tenaga listrik/ *Power generation*	99.99	99.99	2010	280	147
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (BAG)	Jakarta	Pelayaran/ *Shipping*	100.00	100.00	2011	1,773	1,431
PT Haleyora Power (HP) dan entitas anak/ *and subsidiary*	Jakarta	Jasa pemeliharaan dan operasi/ *Maintenance and operation*	99.99	99.99	2013	967	825
PT Haleyora Powerindo (HPI) *)	Jakarta	Jasa/ *Service*	95.00	90.00	2013	458	408
PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (PLN SC) *)	Jakarta	Perdagangan barang dan jasa enjiiring *supply chain* dan konsultasi dibidang ketenagalistrikan/ *Operation and services trading, engineering supply chain and consultation in the electricity sector*	100.00	100.00	2018	287	197

*) Pemilikan tidak langsung/ *Indirect ownership*
**) Dalam miliaran Rupiah/ *Stated in billions of Rupiah*
***) Dalam tahap pengembangan/ *Under development stage*

Pada tanggal 19 Januari 2018, PLN Batubara, entitas anak, mendirikan BBI dengan penyertaan saham sebesar Rp2.499 yang merupakan 99,96% kepemilikan saham di BBI.

Pada tanggal 20 Desember 2018, BBI, entitas anak PLN Batubara, melakukan akuisisi 80% saham BPJE dan MAP dengan biaya perolehan sebesar Rp66.500 dan Rp78.300.

In January 19, 2018, PLN Batubara, a subsidiary, established BBI with share ownership amounted to Rp2,499 equivalent to 99.96% share ownership in BBI.

In December 20, 2018, BBI, a subsidiary of PLN Batubara, acquired 80% equity ownership of BPJE and MAP at acquisition cost of Rp66,500 and Rp78,300.

Pada tahun 2019, BBI, entitas anak PLN Batubara, melakukan akuisisi 51% saham PT Prima Bara Indonesia ("PBI") dengan biaya perolehan sebesar Rp43.000.

In 2019, BBI, a subsidiary of PLN Batubara, acquired 51% of the shares of PT Prima Bara Indonesia ("PBI") at acquisition cost Rp43,000.

Pada tanggal 8 Januari 2019, BBI, entitas anak PLN Batubara, melakukan akuisisi atas 51% saham PT Banyan Koalindo Lestari ("BKL") dengan biaya perolehan sebesar Rp332.462.

On January 8, 2019, BBI, a subsidiary of PLN Batubara, acquired 51% of the shares of PT Banyan Koalindo Lestari ("BKL") at acquisition cost amounting to Rp332,462.

Pada tanggal 2 Agustus 2019, PLN Batubara, entitas anak, mendirikan PT PLN Batubara Niaga ("BBN") dengan penyertaan saham sebesar Rp50.000 yang merupakan 100% kepemilikan saham di BBN.

On August 2, 2019, PLN Batubara, a subsidiary, established PT PLN Batubara Niaga ("BBN") with an equity participation of Rp50,000, representing 100% of the share ownership in BBN.

Pada tahun 2019 dan 2018, IP, entitas anak, menambah penyertaan saham di PIT masing-masing sebesar Rp567.088 dan Rp119.562 tanpa mengubah persentase kepemilikan.

In 2019 and 2018, IP, a subsidiary, increased additional shares to PIT amounted to Rp567,088 and Rp119,562, respectively, without changes in percentage of ownership.

Berdasarkan akta notaris No. 172 tanggal 17 Desember 2019 dari Jimmy Tanal. S.H., M.kn. notaris di Jakarta Selatan, IP, entitas anak, mengalihkan 6.950.000 lembar saham setara 95,2% kepemilikan ITH kepada PIT dengan nilai US$3.398.550 (setara dengan Rp47.715).

Based on notarial deed No. 172 date December 17, 2019 from Jimmy Tanal. S.H., M.kn. notary in South Jakarta, IP, a subsidiary, transferred 6,950,000 shares equivalent to 95.2% of ITH ownership to PIT with a value of US$3,398,550 (equivalent to Rp47,715).

Pada tanggal 15 November 2019, PIT, entitas anak IP, mendirikan PT Suralaya Indo Tenaga ("SIT") dengan penyertaan saham sebesar Rp499 yang merupakan 99,99% kepemilikan saham di SIT.

On November 15, 2019, PIT, a subsidiary of IP, established PT Suralaya Indo Tenaga ("SIT") with share ownership amounted to Rp499 equivalent to 99.99% share ownership in SIT.

Pada tanggal 15 November 2019, PIT, entitas anak IP, mendirikan PT Putra Suralaya Indotenaga ("PSI") dengan penyertaan saham sebesar Rp499 yang merupakan 99,99% kepemilikan saham di PSI.

On November 15, 2019, PIT, a subsidiary of IP, established PT Putra Suralaya Indotenaga ("PSI") with share ownership amounted to Rp499 equivalent to 99.99% share ownership in PSI.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") PSI tanggal 6 Desember 2019, menyetujui pengalihan saham PIT di PSI ke SIT sebesar 51%.

Based on General Stockholders' Meeting ("RUPS") PSI dated December 6, 2019, approved the transfer of PIT shares in PSI to SIT amounted to 51%.

Pada tahun 2019, HP, entitas anak, menambah penyertaan saham di HPI sebesar Rp12.816. Penambahan penyertaan ini merubah kepemilikan HP di HPI menjadi 95%.

In 2019, HP, a subsidiary, increased its share ownership in HPI amounted to Rp12,816. This share increment has changed HP presented in HPI to 95%.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. Aset Tetap / *6. Property, Plant and Equipment*

	2019						
	Saldo awal/ *Beginning balance* Rp	Penambahan/ *Additions* Rp	Pengurangan/ *Deductions* Rp	Penurunan nilai/ *Impairment* Rp	Reklasifikasi/ *Reclassifications* Rp	Saldo akhir/ *Ending balance* Rp	
Biaya perolehan							***At cost***
Pemilikan langsung							*Direct acquisitions*
Tanah	151,573,418	21,032	--	--	1,939,392	153,533,842	*Land*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	64,230,060	594,723	--	--	9,299,233	74,124,016	*Buildings, reservoir and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	557,483,539	1,927,471	--	--	26,883,369	586,294,379	*Installation and power plant*
Perlengkapan transmisi	124,821,717	102,758	--	--	41,323,198	166,247,673	*Transmission equipment*
Perlengkapan distribusi	195,642,535	125,635	--	--	25,654,407	221,422,577	*Distribution equipment*
Perlengkapan umum	13,862,471	342,853	--	--	2,420,169	16,625,493	*General equipment*
Kendaraan bermotor	1,775,137	79,828	--	--	392,658	2,247,623	*Motor vehicles*
Material cadangan utama	2,219,524	130,137	--	--	1,882,026	4,231,687	*Major spare parts*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	4,544,728	28,441	--	--	1,656,156	6,229,325	*Telecommunication and data processing equipment used for electricity supply*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya	2,433,494	3,891	--	--	591,472	3,028,857	*Others telecommunication and data processing equipment*
Kapal dan perlengkapan	1,228,083	172,360	--	--	--	1,400,443	*Vessels and equipment*
Subjumlah	1,119,814,706	3,529,129	--	--	112,042,080	1,235,385,915	*Subtotal*
Aset sewaan							*Leased assets*
Tanah	276,355	--	--	--	--	276,355	*Land*
Instalasi dan mesin pembangkit	41,384,497	--	--	--	(414,232)	40,970,265	*Installation and power plant*
Subjumlah	41,660,852	--	--	--	(414,232)	41,246,620	*Subtotal*
Pekerjaan dalam pelaksanaan	199,179,007	97,849,952	--	--	(114,320,918)	182,708,041	*Construction in progress*
Aset tidak digunakan dalam operasi	9,766,775	--	(297,509)	--	2,939,556	12,408,822	*Assets not used in operation*
Jumlah	1,370,421,340	101,379,081	(297,509)	--	246,486	1,471,749,398	*Total*
Akumulasi penyusutan/ akumulasi penurunan nilai							***Accumulated depreciation/ accumulated impairment***
Pemilikan langsung							*Direct acquisitions*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	--	2,428,168	--	--	114,430	2,542,598	*Buildings, reservoir and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	--	17,776,329	--	--	289,714	18,066,043	*Installation and power plant*
Perlengkapan transmisi	--	3,920,200	--	--	114,657	4,034,857	*Transmission equipment*
Perlengkapan distribusi	--	7,002,878	--	--	(12,169)	6,990,709	*Distribution equipment*
Perlengkapan umum	10,631,907	1,337,235	--	--	(6,478)	11,962,664	*General equipment*
Kendaraan bermotor	1,215,393	233,123	--	--	(5,310)	1,443,206	*Motor vehicles*
Material cadangan utama	--	110,194	--	--	28,113	138,307	*Major spare parts*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	--	794,917	--	--	21,008	815,925	*Telecommunication and data processing equipment used for electricity supply*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya	1,639,503	239,894	--	--	(6,733)	1,872,664	*Others telecommunication and data processing equipment*
Kapal dan perlengkapan	457,798	97,812	--	--	--	555,610	*Vessels and equipment*
Subjumlah	13,944,601	33,940,750	--	--	537,232	48,422,583	*Subtotal*
Aset sewaan							*Leased assets*
Instalasi dan mesin pembangkit	13,327,621	1,486,468	--	--	(66,099)	14,747,990	*Installation and power plant*
Aset tidak digunakan dalam operasi	6,460,780	247,615	(297,509)	--	1,272,518	7,683,404	*Assets not used in operation*
Jumlah	33,733,002	35,674,833	(297,509)	--	1,743,651	70,853,977	*Total*
Penyisihan penurunan nilai	210,105	--	--	--	198	210,303	*Provision for impairment*
Jumlah Tercatat	**1,336,478,233**					**1,400,685,118**	***Net Carrying Value***

	2018							
	Saldo awal/ *Beginning balance* Rp	Penambahan/ *Additions* Rp	Pengurangan/ *Deductions* Rp	Penurunan nilai/ *Impairment* Rp	Reklasifikasi/ *Reclassifications* Rp	Selisih penilaian kembali/ *Increase arising on revaluation* Rp	Saldo akhir/ *Ending balance* Rp	
Biaya perolehan								***At cost***
Pemilikan langsung								*Direct acquisitions*
Tanah	118,995,469	18,468	--	--	756,210	31,803,271	151,573,418	*Land*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	61,859,190	167,940	--	--	2,993,049	(790,119)	64,230,060	*Buildings, reservoir and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	607,283,907	1,105,497	--	--	15,232,064	(66,137,929)	557,483,539	*Installation and power plant*
Perlengkapan transmisi	101,635,932	18,091	--	--	10,933,050	12,234,644	124,821,717	*Transmission equipment*
Perlengkapan distribusi	175,139,301	272,388	--	--	25,004,621	(4,773,775)	195,642,535	*Distribution equipment*
Perlengkapan umum	12,244,185	462,321	--	--	1,155,965	--	13,862,471	*General equipment*
Kendaraan bermotor	1,519,782	76,307	--	--	179,048	--	1,775,137	*Motor vehicles*
Material cadangan utama	1,240,090	423,148	--	--	683,789	(127,503)	2,219,524	*Major spare parts*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	4,350,037	102,735	--	--	1,139,992	(1,048,036)	4,544,728	*Telecommunication and data processing equipment used for electricity supply*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya	2,091,899	2,051	--	--	339,544	--	2,433,494	*Others telecommunication and data processing equipment*
Kapal dan perlengkapan	1,166,918	61,165	--	--	--	--	1,228,083	*Vessels and equipment*
Subjumlah	1,087,526,710	2,710,111	--	--	58,417,332	(28,839,447)	1,119,814,706	*Subtotal*
Aset sewaan								*Leased assets*
Tanah	276,355	--	--	--	--	--	276,355	*Land*
Instalasi dan mesin pembangkit	41,325,730	--	--	--	58,767	--	41,384,497	*Installation and power plant*
Subjumlah	41,602,085	--	--	--	58,767	--	41,660,852	*Subtotal*
Pekerjaan dalam pelaksanaan	145,296,494	113,011,653	--	--	(59,129,140)	--	199,179,007	*Construction in progress*
Aset tidak digunakan dalam operasi	16,311,885	--	(1,111,469)	--	(5,433,641)	--	9,766,775	*Assets not used in operation*
Jumlah	1,290,737,174	115,721,764	(1,111,469)	--	(6,086,682)	(28,839,447)	1,370,421,340	*Total*
Akumulasi penyusutan/ akumulasi penurunan nilai								***Accumulated depreciation/ accumulated impairment***
Pemilikan langsung								*Direct acquisitions*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	3,696,613	1,753,538	--	--	(249,105)	(5,201,046)	--	*Buildings, reservoir and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	31,971,794	17,391,337	--	--	(222,640)	(49,140,491)	--	*Installation and power plant*
Perlengkapan transmisi	4,821,695	2,686,037	--	--	20,041	(7,527,773)	--	*Transmission equipment*
Perlengkapan distribusi	9,143,419	5,616,206	--	--	(25,284)	(14,734,341)	--	*Distribution equipment*
Perlengkapan umum	9,460,642	1,139,582	--	--	31,683	--	10,631,907	*General equipment*
Kendaraan bermotor	1,060,893	160,235	--	--	(5,735)	--	1,215,393	*Motor vehicles*
Material cadangan utama	166,841	59,581	--	--	5,932	(232,354)	--	*Major spare parts*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	1,005,064	531,666	--	--	(11,529)	(1,525,201)	--	*Telecommunication and data processing equipment used for electricity supply*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya	1,454,810	190,048	--	--	(5,355)	--	1,639,503	*Others telecommunication and data processing equipment*
Kapal dan perlengkapan	369,658	88,062	--	--	78	--	457,798	*Vessels and equipment*
Subjumlah	63,151,429	29,616,292	--	--	(461,914)	(78,361,206)	13,944,601	*Subtotal*
Aset sewaan								*Leased assets*
Instalasi dan mesin pembangkit	11,831,265	1,143,691	--	--	352,665	--	13,327,621	*Installation and power plant*
Aset tidak digunakan dalam operasi	11,186,051	301,965	(1,111,189)	907,039	(4,823,086)	--	6,460,780	*Assets not used in operation*
Jumlah	86,168,745	31,061,948	(1,111,189)	907,039	(4,932,335)	(78,361,206)	33,733,002	*Total*
Penyisihan penurunan nilai	--	--	--	--	--	210,105	210,105	*Provision for impairment*
Jumlah Tercatat	**1,204,568,429**						**1,336,478,233**	***Net Carrying Value***

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense was allocated to the following:

	2019 Rp	2018 Rp	
Beban usaha	35,318,071	30,744,712	*Operating expenses*
Pekerjaan dalam pelaksanaan	109,147	15,271	*Construction in progress*
Beban lain-lain	247,615	301,965	*Others*
Jumlah	**35,674,833**	**31,061,948**	***Total***

Perusahaan dan entitas anak memiliki beberapa bidang tanah dengan hak legal berupa Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan

The Company and its subsidiaries own several pieces of land with Rights to Use and Building Use Rights ("HGB"). Rights to Use have no

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

("HGB"). Hak Pakai tidak mempunyai jangka waktu sedangkan HGB Perusahaan jatuh tempo antara tahun 2019 sampai dengan 2051, tetapi dapat diperpanjang. Perusahaan dan entitas anak juga mempunyai beberapa bidang tanah yang sedang dalam proses perpanjangan HGB dan pengurusan balik nama menjadi atas nama Perusahaan dan entitas anak.

expiration date while HGB will expire from 2019 to 2051, but they are renewable by the Company. The Company and its subsidiaries also have several pieces of building use, which are still in an extension process and in the process of transfer of certificate to the name of the Company and its subsidiaries.

Bangunan, instalasi dan mesin pembangkit, perlengkapan transmisi, perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya serta kapal diasuransikan kepada beberapa perusahaan asuransi yaitu PT Asuransi Jasa Indonesia, pihak berelasi, sebagai penanggung utama, PT Asuransi Dayin Mitra Tbk dan PT Asuransi Tugu Kresna Pratama, terhadap risiko kebakaran dan kemungkinan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar US$25.573.250.637 (setara dengan Rp334.779.551) dan Rp1.592.587 pada tanggal 31 Desember 2019. Aset sewaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap ("PLTU") Tanjung Jati B 4x660 MW diasuransikan kepada PT Asuransi Mitsui Sumitomo Indonesia terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar JPY440.301.219.075 (setara dengan Rp56.343.849) dan US$4.320.000 (setara dengan Rp56.553) pada tanggal 31 Desember 2019.

Building, installation and power plant, transmission equipment, other telecommunication and data processing equipments and vessels were insured to several insurance companies, with PT Asuransi Jasa Indonesia, a related party, acting as the lead insurer, PT Asuransi Dayin Mitra Tbk and PT Asuransi Tugu Kresna Pratama, against fire and other possible risks with insurance coverage of US$25,573,250,637 (equivalent to Rp334,779,551) and Rp1,592,587 as of December 31, 2019. Leased assets of Tanjung Jati B Steam Power Plant ("PLTU") 4x660 MW were insured to PT Asuransi Mitsui Sumitomo Indonesia against fire and other possible risks with insurance coverage of JPY440,301,219,075 (equivalent to Rp56,343,849) and US$4,320,000 (equivalent to Rp56,553), respectively, as of December 31, 2019.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan. Perusahaan dan entitas anak tidak mengasuransikan aset tetap selain bangunan, instalasi dan mesin pembangkit, perlengkapan transmisi, perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya serta kapal.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured. The Company and its subsidiaries do not insure property, plant and equipment other than building, installation and power plant, transmission equipment, other telecommunication and data processing equipments and vessels.

Jumlah tercatat bruto dari aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp9.846.820 dan Rp9.872.249.

The gross carrying amount of property, plant and equipment that have been fully depreciated and still in use as of December 31, 2019 dan 2018 amounted to Rp9,846,820 and Rp9,872,249, respectively.

Pada tahun 2019, perubahan surplus revaluasi aset tetap adalah sebesar Rp1.183.109 yang terutama merupakan penyesuaian ke nilai terpulihkan aset tetap.

In 2019, changes in revaluation surplus of property, plant and equipment amounting to Rp1,183,109 was mainly consist of adjustment to recoverable amount of property, plant and equipment.

Manajemen mengkategorikan beberapa aset tetap menjadi aset tidak digunakan dalam operasi berdasarkan pertimbangan tingkat efisiensi dan keekonomisan aset tersebut. Nilai aset tersebut telah disesuaikan ke nilai terpulihkan. Penyesuaian ke nilai terpulihkan atas aset yang menggunakan model revaluasi dan tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan mengurangi jumlah akumulasi surplus revaluasi dalam ekuitas.

Management categorizes several property, plant and equipment into assets not used in operations based on the consideration of the efficiency and the economy of the assets. The amount of the assets were adjusted to its recoverable amount. Adjustment for property, plant and equipment using revaluation model and does not exceed its surplus revaluation is recognized in other comprehensive income and reduces the amount of accumulated of surplus revaluation in the equity.

Reklasifikasi dalam mutasi aset tetap merupakan jumlah neto atas penambahan dan pengurangan di akun aset tetap dan akun lain terutama terdiri dari perpindahan pekerjaan dalam pelaksanaan ke aset tetap beroperasi, perpindahan aset tetap beroperasi ke aset tetap tidak beroperasi, dan reklasifikasi antar jenis aset tetap.

Reclassification in the property, plant and equipment movements is the net amount over addition and deduction in the property, plant and equipment accounts and other accounts consist mainly from the construction in progress to operational property, plant and equipment, reclassification from property, plant and equipment to asets not used in operation, and reclassification between types in the property, plant and equipment.

Mutasi surplus revaluasi aset tetap adalah sebagai berikut:

The movements of property, plant and equipment revaluation surplus are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Saldo awal tahun	**675,081,371**	**631,174,366**	***Balance at beginning of year***
Penyesuaian ke nilai wajar aset tetap	--	49,521,759	*Adjustment to fair value of property, plant, and equipment*
Penyesuaian ke nilai terpulihkan/ penghapusan aset tetap	(1,183,109)	(1,185,132)	*Adjustment to recoverable amount/ Demolishment of property, plant, and equipment*
Subjumlah	(1,183,109)	48,336,627	*Subtotal*
Reklasifikasi surplus revaluasi aset tetap ke saldo laba	(43,779)	--	*Reclassification of property, plant and equipment revaluation surplus*
Penyesuaian pajak tangguhan	--	(4,429,622)	*Deferred tax adjustment*
Jumlah mutasi tahun berjalan	(1,226,888)	43,907,005	*Movement during the year*
Saldo akhir tahun	**673,854,483**	**675,081,371**	***Balance end of the year***

Penyesuaian ke nilai terpulihkan atas aset yang menggunakan model biaya, dan penyesuaian ke nilai terpulihkan atas aset tetap yang menggunakan model revaluasi dan melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset tetap tersebut dicatat sebagai beban lain-lain yang merupakan bagian dari penghasilan (beban) lain-lain - bersih.

Adjustment to recoverable amount of property, plant and equipment using cost model, and adjustment to recoverable amount of property, plant and equipment using revaluation model and excess revaluation surplus for property, plant and equipment are recorded as other expense classified in other income (expense) - net.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan dan entitas anak melakukan penilaian kembali atas nilai wajar aset tetap, yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Rekan ("KJPP RHR") dalam laporan No. 00073/2.0012-00/PI/02/0006/1/III/2019 tanggal 4 Maret 2019, penilai independen yang telah terdaftar di Kementerian Keuangan dengan nomor izin usaha No. 2.09.0012 dan OJK.

On December 31, 2018, the Company and its subsidiaries performs revaluation of the fair value of its property, plant, and equipment which is performed by Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Rekan ("KJPP RHR") in the report No. 00073/2.0012-00/PI/02/0006/1/III/2019 dated March 4, 2019, an independent valuer registered in the Ministry of Finance, with license permit No. 2.09.0012 and FSA.

Standar Penilaian yang digunakan adalah Standar Penilaian Indonesia edisi VI - 2015, dengan menggunakan pendekatan penilaian berikut ini:

The valuation standard used is Indonesian Valuation Standards edition VI - 2015, with following valuation approaches:

1. Pendekatan Pasar
   Pendekatan ini mempertimbangkan penjualan dari aset sejenis atau pengganti dan data pasar yang terkait, serta menghasilkan estimasi nilai melalui proses perbandingan. Pada dasarnya, properti yang dinilai (obyek penilaian) dibandingkan dengan properti yang sebanding, baik dari transaksi yang telah terjadi maupun properti yang masih dalam tahap penawaran penjualan dari suatu proses jual beli.

   Pendekatan pasar digunakan untuk kelas aset tanah.

1. *Market Approach*
   This approach considers the sales of similar assets or replacement assets and related market information, which provides value estimation by a comparison process. Basically, the properties being valued (object being appraised) are compared to other similar properties that either have been transacted or offered for sale in a sale and purchase transaction.

   The market approach is applied to the asset class of land rights.

2. Pendekatan Pendapatan
   Pendekatan ini mempertimbangkan pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan aset yang dinilai dan mengestimasikan nilai melalui proses kapitalisasi. Kapitalisasi menghubungkan pendapatan (umumnya pendapatan bersih) dengan suatu definisi jenis nilai melalui konversi pendapatan menjadi estimasi nilai. Proses ini dapat menggunakan metode kapitalisasi langsung atau metode Arus Kas Terdiskonto, atau keduanya.

   Pendekatan pendapatan digunakan untuk kelas aset tanah dengan peruntukan komersial atau tanah dengan skala pengembangan.

2. *Income Approach*
   This approach considers the income and costs related to the assets being valued and estimates value through a capitalization process. Capitalization connects income (generally net income) with certain definition of value through conversion of income into the estimated value. This process uses the direct capitalization method or the Discounted Cash Flow method or both.

   The income approach is applied to the asset class of commercial land rights or land rights with development scale.

3. Pendekatan Biaya
   Pendekatan ini berdasarkan prinsip bahwa harga dimana pembeli di pasar akan membayar atas aset yang sedang dinilai tidak akan lebih dari biaya untuk membeli atau mengkonstruksi aset modern yang ekuivalen, tanpa mempertimbangkan biaya

3. *Cost Approach*
   This approach is based on a principle that the price that a buyer in the market would pay for the asset being valued would not be more than the cost to purchase or construct a modern equivalent asset, without taking into consideration unduetime and overtime

akibat penundaan waktu dan biaya keterlambatan. Untuk aset yang tidak baru, pendekatan biaya memperhitungkan estimasi depresiasi termasuk penyusutan fisik dan keusangan lainnya (fungsional dan eksternal). Biaya konstruksi dan depresiasi ditentukan oleh hasil analisis dari perkiraan biaya konstruksi dan depresiasi sesuai dengan kelaziman yang ada di pasar atau dalam praktek penilaian.

charges. For assets which are not new, the cost approach includes depreciation estimation including physical depreciation and other obsolescence (functional and external). Construction cost and depreciation should be determined from analysis of the construction cost and estimation of depreciation according to the prevalence in the market or in valuation practice.

Pendekatan biaya digunakan untuk kelas aset bangunan umum, waduk dan prasarana, jalan sepur samping, instalasi dan mesin pembangkit, perlengkapan transmisi, perlengkapan distribusi, material cadangan utama, perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik.

The cost approach is applied to asset classes of buildings, reservoir and infrastructure, installation and power plants, transmission equipments, distribution equipments, major spare parts and telecommunications and data processing equipments used for electricity supply.

Informasi mengenai penilaian kembali aset tetap pada tanggal 31 Desember 2018 untuk Kelompok Aset yang Direvaluasi adalah sebagai berikut:

Information on the revaluation of assets as at December 31, 2018 for Class of Revalued Assets is as follows:

	Jumlah tercatat sebelum revaluasi/ *Net carrying value before revaluation* 31 Desember/ *December 31,* 2018	**Surplus (rugi) revaluasi/ *Profit (loss) revaluation***	**Nilai wajar/ *Fair value* 31 Desember/ *December 31,* 2018**	
Nilai revaluasi				*Revalued amount*
Pemilikan langsung				*Direct acquisition*
Tanah	119,770,147	31,803,271	151,573,418	*Land rights*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	65,020,179	(790,119)	64,230,060	*Buildings, reservoir and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	623,621,468	(66,137,929)	557,483,539	*Installation and power plant*
Perlengkapan transmisi	112,587,073	12,234,644	124,821,717	*Transmission equipment*
Perlengkapan distribusi	200,416,310	(4,773,775)	195,642,535	*Distribution equipment*
Material cadang utama	2,347,027	(127,503)	2,219,524	*Major spare parts*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	5,592,764	(1,048,036)	4,544,728	*Telecommunication and data processing equipments used for electricity supply*
Sub jumlah	**1,129,354,968**	**(28,839,447)**	**1,100,515,521**	***Sub total***
Akumulasi penyusutan				*Accumulated depreciation*
Pemilikan langsung				*Direct acquisition*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	(5,201,046)	5,201,046	--	*Buildings, reservoir and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	(49,140,491)	49,140,491	--	*Installation and power plant*
Perlengkapan transmisi	(7,527,773)	7,527,773	--	*Transmission equipment*
Perlengkapan distribusi	(14,734,341)	14,734,341	--	*Distribution equipment*
Material cadang utama	(232,354)	232,354	--	*Major spare parts*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	(1,525,201)	1,525,201	--	*Telecommunication and data processing equipments used for electricity supply*
Sub jumlah	**(78,361,206)**	**78,361,206**	**--**	***Sub total***
Jumlah Tercatat	**1,050,993,762**	**49,521,759**	**1,100,515,521**	***Net Carrying Value***

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tahun 2018, total kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi Kelompok Aset yang Direvaluasi dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap" adalah sebesar Rp49.521.759.

In 2018, total increase in the carrying amounts of the class of Revalued Assets is recorded as "Property, Plant and Equipment Revaluation Surplus" amounting to Rp49,521,759.

Surplus revaluasi, dikurangi dengan penghasilan pajak tangguhan terkait dan pajak final atas revaluasi aset tetap dikreditkan pada penghasilan komprehensif lain dan disajikan sebagai Surplus Revaluasi Aset Tetap pada penghasilan komprehensif lain.

The revaluation surplus, net of applicable deferred income taxes and final tax on property, plant and equipment revaluation, is credited to other comprehensive income and presented in property, plant and equipment Revaluation Surplus in other comprehensive income section.

Analisa aset non-keuangan yang dicatat pada Nilai Wajar berdasarkan Hierarki Nilai Wajar sesuai dengan PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar. Perbedaan level Nilai Wajar dijelaskan sebagai berikut:

- Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Level 1);
- Input selain dari harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (Level 2);
- Input untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 3).

Analysis non-financial assets recorded at fair value, based on Fair Value Hierarchy in SFAS 68: Fair Value Measurement. The different levels of Fair Value are defined as follows:

- *Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1);*
- *Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly (Level 2);*
- *Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data, neither directly or indirectly (Level 3).*

	Tingkat pengukuran nilai wajar 31 Desember 2018 menggunakan/ *Level fair value measurement at December 31, 2018 using*				
	Tingkat 1/ *Level 1*	**Tingkat 2/ *Level 2***	**Tingkat 3/ *Level 3***	**Jumlah/ *Total***	
Pengukuran nilai wajar berulang					*Recurring fair value measurement*
Tanah	--	21,912,134	129,661,284	151,573,418	*Land rights*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	--	1,967,422	62,262,638	64,230,060	*Buildings, reservoir and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	--	--	557,483,539	557,483,539	*Installation and power plant*
Perlengkapan transmisi	--	--	124,821,717	124,821,717	*Transmission equipment*
Perlengkapan distribusi	--	--	195,642,535	195,642,535	*Distribustion equipment*
Material cadang utama	--	--	2,219,524	2,219,524	*Major spare parts*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	--	--	4,544,728	4,544,728	*Telecommunication and data processing equipment used for electricity supply*
	--	**23,879,556**	**1,076,635,965**	**1,100,515,521**	

Tidak terdapat aset tetap yang bisa digolongkan ke dalam Nilai Wajar level 1.

There were no property, plant and equipment which could be classified as the level 1 Fair Value.

Nilai Wajar level 2 dari tanah dihitung dengan menggunakan pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan, sedangkan untuk bangunan menggunakan pendekatan biaya. *Input* yang diperoleh dari pasar yaitu antara lain:
a. Harga jual atau harga sewa per meter persegi;
b. Tingkat hunian;
c. Tingkat pertumbuhan;
d. Tingkat diskonto dan kapitalisasi;
e. Biaya pembuatan baru per meter persegi;
f. Depresiasi, keusangan fungsional dan eksternal.

The level 2 Fair Value of land rights is calculated using the market approach and income approach, while building value is calculated using the cost approach. Data inputs were obtained from the market that consists of among others:
a. Sale or rental price per square meter;
b. Occupancy rate;
c. Growth rate;
d. Discount and capitalization rate;
e. Replacement cost new per square meter;
f. Depreciation, functional and external obsolescence.

Penyesuaian dilakukan berdasarkan ukuran, lokasi, bentuk dan spesifikasi, hak atas tanah dan elemen perbandingan lainnya.

Adjustments were made based on size, location, shapes and specifications, land rights and other comparison elements.

Penyesuaian dilakukan berdasarkan ukuran, kapasitas, usia, lokasi, bentuk dan spesifikasi, hak atas tanah dan elemen perbandingan lainnya.

Adjustments were made based on size, capacity, age, location, shapes and specifications, land rights and other comparison elements.

Informasi mengenai pengukuran nilai wajar yang menggunakan informasi signifikan yang tidak dapat diobservasi (Level 3) adalah sebagai berikut:

Information about fair value measurements using significant unobservable inputs (Level 3) are as follows:

	Nilai wajar pada 31 Desember 2018/ *Fair value at December 31, 2018*	Teknik penilaian/ *Valuation technique*	Informasi yang tidak dapat diobservasi/ *Unobservable Input*	Kisaran input yang tidak dapat diobservasi/ *Range of unobservable Input*	Hubungan informasi yang tidak dapat diobservasi terhadap nilai wajar/ *Relationship of unobservable inputs to fair value*	
Tanah	**129,661,284**					***Land***
Tapak tower	76,742,361	Pendekatan pasar dengan metode/*Market approach with Across the Fence ("ATF") method*	Kompensasi/Compensation *Right of Way ("ROW")*	15%	Semakin tingi kompensasi ROW maka semakin tinggi nilai wajar/*The higher the ROW compensation, the higher the fair value*	*Land for tower site*
Tanah gardu dan kantor	23,316,948	Pendekatan pendapatan dengan metode pendekatan lahan/*Income approach with the land approach method*	- Perubahan peruntukan/ *Zoning changes* - Penyesuaian parameter pengembangan/ *Adjustment of parameter development*	0.30 - 3.00	Semakin tinggi Koefisien Luas Bangunan ("KLB") maka semakin tinggi nilai wajar/*The higher the KLB, the higher the fair value*	*Land for substation and office building*
Tanah pembangkit	29,601,975	Pendekatan pendapatan dengan metode pendekatan lahan/*Income approach with the land approach method*	- Perubahan peruntukan/ *Zoning changes* - Penyesuaian parameter pengembangan/ *Adjustment of parameter development*	0.30 - 3.00	Semakin tinggi Koefisien Luas Bangunan ("KLB") maka semakin tinggi nilai wajar/*The higher the KLB, the higher the fair value*	*Land for power plant*
		Pendekatan pasar dengan metode/*Market approach with Across the Fence ("ATF") method*	Biaya pembebasan lahan/ *Soft cost*	5.00 - 10.00	Semakin tinggi biaya pembebasan lahan maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher the soft cost, the higher the fair value*	

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Nilai wajar pada 31 Desember 2018/ *Fair value at December 31, 2018*	Teknik penilaian/ *Valuation technique*	Informasi yang tidak dapat diobservasi/ *Unobservable Input*	Kisaran input yang tidak dapat diobservasi/ *Range of unobservable Input*	Hubungan informasi yang tidak dapat diobservasi terhadap nilai wajar/ *Relationship of unobservable inputs to fair value*	
Bangunan	**62,262,638**					***Building***
Bangunan umum	26,793,835	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	Penyusutan fisik/ *Physical depreciation*	0.00% - 90.00%	Semakin besar penyusutan fungsional maka semakin rendah nilai wajar/*The higher the functional depreciation, the lower the fair value*	*Buildings*
Waduk dan prasarana	35,468,803	Trending/*Trending*	Penyusutan fungsional/ *Functional depreciation*	0.00% - 6.00%	Semakin besar penyusutan fungsional maka semakin rendah nilai wajar/*The higher the functional depreciation, the lower the fair value*	*Reservoir and infrastructure*
			Indeks/*Index*	1.00	Semakin besar tingkat indeks maka semakin besar nilai wajar/ *The higher the index rate, The higher the fair value*	
Instalasi dan mesin pembangkit	557,483,539	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	Penyusutan fungsional/ *Functional depreciation*	1.00% - 10.00%	Semakin besar penyusutan fungsional maka semakin rendah nilai wajar/*The higher the functional depreciation rate, the lower the fair value*	*Installation and power plant*
			Indeks/*Index*	1,005 - 3,866	Semakin besar tingkat indeks maka semakin besar nilai wajar/ *The higher the index rate, The higher the fair value*	
Perlengkapan transmisi	124,821,717	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	Indeks/*Index*	1.00% - 10.00%	Semakin besar tingkat indeks maka semakin besar nilai wajar/ *The higher the index rate, The higher the fair value*	*Transmission equipment*
			Indeks/*Index*	1.00 - 1.66	Semakin besar tingkat indeks maka semakin besar nilai wajar/ *The higher the index rate, The higher the fair value*	
Perlengkapan distribusi	195,642,535	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	Indeks/*Index*	1.00 - 1.49	Semakin besar tingkat indeks maka semakin besar nilai wajar/ *The higher the index rate, The higher the fair value*	*Distribution equipment*
Material cadangan utama	2,219,524	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	Indeks/*Index*	1.00 - 1.16	Semakin besar tingkat indeks maka semakin besar nilai wajar/ *The higher the index rate, The higher the fair value*	*Major spare parts*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	4,544,728	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	Indeks/*Index*	1.00 - 1.49	Semakin besar tingkat indeks maka semakin besar nilai wajar/ *The higher the index rate, The higher the fair value*	*Telecomunication and data processing equipments used for electricity supply*

Perusahaan dan entitas anak juga melakukan penilaian kembali atas aset tetap untuk tujuan perpajakan. Pada bulan Februari 2016, Perusahaan menerima surat No. KEP-331/WPJ.10/2016 dari Direktorat Jenderal Pajak yang berisi persetujuan penilaian kembali aset tetap untuk tujuan perpajakan per tanggal 1 Januari 2016.

The Company and its subsidiaries also performed revaluation of property, plant and equipment for tax purposes. On February 2016, the Company received letter No. KEP-331/WPJ.10/2016 from Directorate General of Tax Regulation as approval for revaluation on its property, plant and equipment for taxation purpose effective on January 1, 2016.

Jika Perusahaan dan entitas anak tidak menerapkan model revaluasi, nilai tercatat bersih aset tetap Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing masing sebesar Rp551.093.554 dan Rp470.836.453.

If the Company and its subsidiaries does not apply revaluation model, net carrying value for property, plant and equipment as of December 31, 2019 and 2018 are amounted to Rp551,093,554 and Rp470,836,453, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2019, manajemen Perusahaan dan entitas anak berpendapat bahwa nilai wajar aset tetap tidak berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya sehingga tidak melakukan revaluasi aset tetap.

As of December 31, 2019, the Companys and its subsidiaries' management believe that the fair value of property, plant and equipment is not materially different with its carrying amount, hence did not revalue its property, plant and equipment.

Selain yang menggunakan model revaluasi, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai wajar aset tetap dengan nilai tercatatnya.

There is no significant difference between the fair value and carrying value of property, plant, and equipment other than assets that have applied the revaluation model.

Pekerjaan Dalam Pelaksanaan
Akun ini merupakan biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan pembangunan dan renovasi/ perbaikan sarana kelistrikan, sebagai berikut:

Construction In Progress
This account represents costs incurred in relation to the construction and renovation/ betterment of power supply facilities, as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Proyek penugasan - program percepatan:			*Mandatory project - fast track program:*
Pembangkitan	11,261,116	11,372,601	*Power plants*
Transmisi	5,475,876	6,675,455	*Transmission*
Subjumlah	16,736,992	18,048,056	*Subtotal*
Konstruksi rutin:			*Regular constructions:*
Pembangkitan	61,905,927	67,707,162	*Power plants*
Transmisi	89,018,365	96,831,203	*Transmission*
Distribusi	14,665,891	14,763,414	*Distribution*
Perlengkapan	380,866	1,829,172	*Equipment*
Subjumlah	165,971,049	181,130,951	*Subtotal*
Jumlah	**182,708,041**	**199,179,007**	***Total***

(i) Program percepatan

Program percepatan (*fast track program*) merupakan proyek yang ditugaskan Pemerintah kepada Perusahaan. Pekerjaan dalam pelaksanaan program percepatan termasuk pembayaran uang muka kepada kontraktor, biaya pinjaman serta pengeluaran lain yang dikapitalisasi.

Pembangkitan

Program percepatan pekerjaan dalam pelaksanaan pembangkitan terutama merupakan PLTU 1 Kalimantan Barat - Parit Baru 2x50 MW dan PLTU 2 Kalimantan Barat – Bengkayang 2x27,5 MW.

Transmisi

Program percepatan pekerjaan dalam pelaksanaan transmisi terutama terdiri dari proyek Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi 500 kV New Rawalo (Kesugihan), *Underground Cable* (UGC) 150 kV Gunung Sahari - Kemayoran - Paket 1.

(i) Fast track program

The fast track program represents projects which are mandated by the Government to the Company. Construction in progress under the fast track program includes advance payments made to the contractors, borrowing costs and other capitalized expenditures.

Power plants

The fast track program of power plants under construction consists mainly of PLTU 1 Kalimantan Barat - Parit Baru 2x50 MW and PLTU 2 Kalimantan Barat – Bengkayang 2x27.5 MW.

Transmission

The fast track program of transmission under construction mainly consists of project Extra High Voltage Substations 500 kV New Rawalo (Kesugihan), Underground Cable (UGC) 150 kV Gunung Sahari - Kemayoran - Package 1.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

(ii) Konstruksi rutin

Pembangkitan
Pekerjaan dalam pelaksanaan pembangkitan terutama merupakan PLTU Lontar Extension 1x315 MW, PLTU Kalselteng 2 2x100 MW dan PLTA Peusangan 2x88 MW.

Transmisi
Pekerjaan dalam pelaksanaan transmisi terutama merupakan proyek jaringan transmisi 500 kV untuk Sumatera, Jawa - Bali, 150 kV untuk luar Sumatera, Jawa - Bali, proyek gardu induk 150 kV serta proyek interkoneksi jaringan.

Distribusi
Pekerjaan dalam pelaksanaan distribusi terutama merupakan proyek jaringan distribusi tegangan menengah dan rendah 20 kV serta proyek gardu distribusi.

Perlengkapan
Perlengkapan pekerjaan dalam pelaksanaan termasuk materi dan perlengkapan khusus yang digunakan untuk menunjang fungsi pembangkitan dan distribusi listrik.

Pekerjaan dalam pelaksanaan ini diperkirakan selesai antara tahun 2020 dan 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2019, estimasi persentase jumlah tercatat pekerjaan dalam pelaksanaan Perusahaan terhadap nilai kontrak adalah sebagai berikut:

(ii) Regular constructions

Power plants
Power plants under construction consist mainly of PLTU Lontar Extension 1x315 MW, PLTU Kalselteng 2 2x100 MW and PLTA Peusangan 2x88 MW.

Transmission
Transmission under construction consists mainly of projects of transmission lines of 500 kV in Sumatera, Java - Bali, 150 kV outside Sumatera, Java - Bali, substations 150 kV and interconnection of transmission projects.

Distribution
Distribution under construction consists mainly of projects of mid and low voltage distribution lines of 20 kV and distribution substation projects.

Equipment
Equipment under construction consists of specialised materials and equipment used to support the generation and distribution of electricity.

These Constructions in progress are expected to be completed between 2020 and 2022.

As of December 31, 2019, the estimated percentage of completion of the Company's construction in progress projects are as follows:

Nama proyek/ *Project name*	Nilai pekerjaan dalam pelaksanaan/ *Value of construction in progress* Rp	Persentase penyelesaian/ *Percentage of completion* %
PLTU Lontar Extension 1x315 MW	7,927,284	95%
PLTU Kalselteng 2 (2x100 MW)	5,009,192	71%
PLTA Peusangan 2x88 MW	4,086,082	87%
PLTGU Muara Karang Peaker	3,455,274	92%
PLTA Jatigede 2x55 MW	2,416,267	75%
PLTMG Bangkanai 2 140 MW	2,069,357	76%
PLTU 1 Kalimantan Barat - Parit Baru 2x50 MW	1,921,916	86%
PLTU 2 Kalimantan Barat - Bengkayang 2x27.5 MW	923,510	86%
PLTU Gorontalo 2x25 MW	517,350	97%
PLTU 2 NTB - Lombok 2x25 MW	478,391	93%
Transmisi lainnya/ *Various transmission lines*	94,494,241	2%-98%
Pembangkitan lainnya/ *other power plants*	44,362,420	2%-98%
Lainnya/ *Others*	15,046,757	2%-98%
Jumlah/ *Total*	**182,708,041**	

Pada tanggal 31 Desember 2018, estimasi persentase jumlah tercatat pekerjaan dalam pelaksanaan konstruksi Perusahaan terhadap nilai kontrak adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2018, the estimated percentages of completion of the Company's construction in progress projects were as follows:

Nama proyek/ *Project name*	Nilai pekerjaan dalam pelaksanaan/ *Value of construction in progress* Rp	Persentase penyelesaian/ *Percentage of completion* %
PLTU Lontar Extension 1x315 MW	6,433,108	86%
PLTU Pangkalan Susu Unit 3 dan/ *and* 4 2x200 MW	5,420,982	93%
PLTGU Jawa 1x800 MW	4,544,438	99%
PLTA Peusangan 2x88 MW	3,849,246	84%
PLTGU Grati Peaker 1x450 MW	2,987,032	99%
PLTU 3 Kalimantan Barat Site Bangkayang 2x50 MW	2,671,217	94%
PLTU 1 Kalimantan Barat - Parit Baru 2x50 MW	1,861,916	86%
PLTA Jatigede 2x55 MW	1,668,565	51%
PLTGM Arun 2x185 MW	1,561,900	99%
PLTU 2 Kalimantan Barat - Bengkayang 2x27.5 MW	853,787	85%
Transmisi lainnya/ *Various transmission lines*	103,506,657	2%-98%
Pembangkitan lainnya/ *other power plants*	47,227,574	2%-98%
Lainnya/ *Others*	16,592,585	2%-98%
Jumlah/ *Total*	**199,179,007**	

Informasi mengenai persentase penyelesaian yang disajikan dalam tabel di atas menggambarkan estimasi kemajuan tahap *engineering, procurement* dan *construction*. Selanjutnya, masih perlu dilakukan sejumlah pengujian-pengujian sebelum proyek pekerjaan dalam pelaksanaan menerima Sertifikat Laik Operasi.

The information about the percentages of completion which presented in the table above indicate the estimated progress during the engineering, procurement and construction phases. There are still number of tests that need to be performed during the commissioning phase before the projects are Certified For Operations.

Biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke pekerjaan dalam pelaksanaan adalah sebagai berikut:

Borrowing costs which were capitalized to construction in progress are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Program percepatan			*Fast track program*
Bunga pinjaman termasuk amortisasi biaya emisi obligasi	131,402	196,661	*Interest expense including amortization of bonds issuance*
Kerugian kurs mata uang asing	–	22,482	*Loss on foreign exchange*
Jumlah	131,402	219,143	*Total*
Konstruksi rutin			*Regular constructions*
Bunga pinjaman	6,316,296	5,879,130	*Interest expense*
Kerugian kurs mata uang asing	89,600	1,026,926	*Loss on foreign exchange*
Jumlah	6,405,896	6,906,056	*Total*
Jumlah	**6,537,298**	**7,125,199**	***Total***

Biaya pinjaman dikapitalisasi pada tingkat bunga rata-rata tertimbang dari pinjaman umum yaitu masing-masing sebesar 8,20% dan 4,42% pada tahun 2019 dan 2018.

Borrowing costs were capitalized at the weighted average rate of general borrowings of 8.20% and 4.42% in 2019 and 2018, respectively.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Aset Tidak Digunakan Dalam Operasi
Aset tidak digunakan dalam operasi meliputi aset tetap akan direlokasi, sementara belum digunakan dalam operasi serta aset akan diperbaiki.

Kerugian penurunan nilai dari aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp247.615 dan Rp301.965 dicatat sebagai beban lain-lain yang merupakan bagian dari penghasilan (beban) lain – lain – bersih (Catatan 47).

Aset tertentu yang tidak digunakan dalam operasi dijual seharga Rp185.527 tahun 2019 dan Rp88.550 tahun 2018. Nilai buku aset yang dijual tersebut telah nihil, sehingga hasil penjualan aset seluruhnya merupakan keuntungan penjualan aset tertentu yang tidak digunakan dalam operasi (Catatan 47).

Manajemen berpendapat bahwa percepatan penyusutan atas aset yang tidak digunakan dalam operasi memadai untuk menutup risiko kerugian penurunan nilai yang mungkin timbul dari aset tersebut.

Assets Not Used In Operations
Assets not used in operations comprised of those to be relocated, those temporarily not in use in operations, and assets to be repaired.

Loss on impairment of assets not used in operations for year ended December 31, 2019 and 2018 amounted to Rp247,615 and Rp301,965, respectively and were recorded as other expense classified in other income (expense) - net (Note 47).

Certain assets not used in operations were sold with a selling price of Rp185,527 in 2019 and Rp88,550 in 2018. The carrying value of such assets was nil, hence all the proceeds from the sale of certain assets represented a gain on the sale of assets not used in operations (Note 47).

Management believes that accelerated depreciation on assets not used in operations is adequate to cover possible loss on impairment on the value of such assets.

7. Properti Investasi / *7. Investment Properties*

	2019					
	Saldo awal/ *Beginning balance* Rp	Kenaikan nilai wajar/ *Increase in fair value* Rp	Pengurangan/ *Deductions* Rp	Reklasifikasi/ *Reclassifications* Rp	Saldo akhir/ *Ending balance* Rp	
Pemilikan langsung						*Direct acquisitions*
Tanah	5,125,448	165,453	--	(7,193)	5,283,708	*Land*

	2018					
	Saldo awal/ *Beginning balance* Rp	Kenaikan nilai wajar/ *Increase in fair value* Rp	Pengurangan/ *Deductions* Rp	Reklasifikasi/ *Reclassifications* Rp	Saldo akhir/ *Ending balance* Rp	
Pemilikan langsung						*Direct acquisitions*
Tanah	4,723,070	421,760	--	(19,382)	5,125,448	*Land*

Akun ini merupakan tanah milik Perusahaan dan entitas anak, yaitu IP, PJB dan PLN Batam yang terletak di Pademangan - Jakarta Utara, Paiton - Jawa Timur, Bekasi - Jawa Barat, Pluit - Jakarta Utara, Asahan - Sumatera Utara dan Kramatwatu – Serang dengan hak legal berupa HGB berjangka waktu dari 7 sampai 40 tahun,

This account represents pieces of land owned by the Company and its subsidiaries composed of IP, PJB and PLN Batam, located in Pademangan – North Jakarta, Paiton - East Java, Bekasi - West Java, Pluit - North Jakarta, Asahan - North Sumatera and Kramatwatu – Serang with HGB for periods between 7 to 40

jatuh tempo pada 2032, yang disewakan kepada PT Paiton Energy, PT Jawa Power, PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, PT Nusantara Regas, PT Bajradaya Sentranusa, PT Karya Semesta Gemilang, PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali dan beberapa aset tanah yang disewakan ke pihak ketiga.

years until 2032, which are leased to PT Paiton Energy, PT Jawa Power, PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, PT Nusantara Regas, PT Bajradaya Sentranusa, PT Karya Semesta Gemilang, PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali and several assets that are leased to third parties.

Penghasilan sewa yang diperoleh dari properti investasi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp43.842 dan Rp49.705.

Rent income earned from investment properties for the years ended December 31, 2019 and 2018 amounted to Rp43,842 and Rp49,705, respectively.

Tidak terdapat kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun dan mengembangkan properti investasi termasuk dalam rangka perbaikan, pemeliharaan ataupun peningkatan.

There is no contractual obligation to purchase, build and develop investment properties including for repair, maintenance or upgrading purpose.

Tidak terdapat pembatasan atas realisasi properti investasi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

There is no restriction in realization of investment properties as of December 31, 2019 and 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan dan entitas anak melakukan penilaian kembali atas nilai wajar properti investasi, yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan ("KJPP MBPRU") dalam laporan No.0155/MBPRU-JKT/E/MTQ/II/2020 tanggal 24 Februari 2020, penilai independen yang telah terdaftar di Kementerian Keuangan dengan nomor izin usaha No. 2.09.0027 dan OJK.

As of December 31, 2019, the Company and its subsidiaries performs revaluation of the fair value of its property investment which is performed by Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan ("KJPP MBPRU") in the report No.0155/MBPRU-JKT/E/MTQ/II/2020 dated February 24, 2020, an independent valuer registered in the Ministry of Finance, with license permit No. 2.09.0027 and FSA.

Standar Penilaian yang digunakan adalah Standar Penilaian Indonesia edisi VI - 2015, dengan menggunakan pendekatan penilaian berikut ini:

The valuation standard used is Indonesian Valuation Standards edition VI - 2015, with following valuation approaches:

1. Pendekatan Pasar
   Pendekatan ini mempertimbangkan penjualan dari properti sejenis atau pengganti dan data pasar yang terkait, serta menghasilkan estimasi nilai melalui proses perbandingan. Pada umumnya, properti yang dinilai (objek penilaian) dibandingkan dengan transaksi properti yang sebanding, baik dari yang telah terjadi maupun properti yang masih dalam tahap penawaran penjualan dari suatu proses jual beli.

1. *Market Approach*
   This approach considers the sales of similar or replacement properties and related market data, which provides value estimation by a comparison process. Generally, the properties being valued (object being appraised) are compared to similar properties transaction that either have been transacted or offered for sale in a sale and purchase transaction.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. Pendekatan Pendapatan
   Pendekatan ini mempertimbangkan pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan properti yang dinilai dan mengestimasikan nilai melalui proses kapitalisasi. Kapitalisasi menghubungkan pendapatan (umumnya pendapatan bersih) dengan suatu definisi jenis nilai melalui konversi pendapatan menjadi estimasi nilai. Proses ini dapat menggunakan metode kapitalisasi langsung atau metode arus kas terdiskonto, atau keduanya.

3. Pendekatan Biaya
   Pendekatan ini menetapkan nilai properti dengan mengestimasi biaya perolehan tanah dan biaya pengganti pengembangan baru (sesuatu yang dibangun) di atasnya dengan utilitas yang sebanding atau mengadaptasi properti lama dengan penggunaan yang sama, tanpa mempertimbangkan antara lain biaya akibat penundaan waktu pengembangan dan biaya lembur. Untuk properti yang lebih tua, pendekatan biaya memperhitungkan estimasi depresiasi termasuk penyusutan fisik dan keusangan lainnya (fungsional dan eksternal). Biaya konstruksi dan depresiasi seharusnya ditentukan oleh hasil analisis dari perkiraan biaya konstruksi dan depresiasi sesuai dengan kelaziman yang ada di pasar atau dalam praktik penilaian.

Tidak terdapat properti investasi yang digolongkan ke dalam nilai wajar level 1 dan level 3.

Nilai wajar properti investasi diklasifikasikan sebagai level 2 dalam hirarki nilai wajar.

Nilai wajar level 2 dari tanah dihitung dengan menggunakan pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan. Input yang diperoleh dari pendekatan pasar yaitu:
a. Harga jual atau harga sewa per meter persegi
b. Tingkat hunian
c. Tingkat pertumbuhan
d. Tingkat diskonto dan kapitalisasi.

Penyesuaian dilakukan berdasarkan ukuran, lokasi, bentuk dan spesifikasi, hak atas tanah dan elemen perbandingan lainnya.

2. Income Approach
This approach considers the income and costs related to the properties being valued and estimates value through a capitalization process. Capitalization connects income (generally net income) with certain definition of value through conversion of income into the estimated value. This process uses the direct capitalization method or the discounted cash flow method or both.

3. Cost Approach
This approach establishes the value of the properties by estimating the acquisition of land and the cost of replacing the new development (something built) on it with comparable utility or adapting the old property with the same usage, without considering the costs due to development delays and overtime costs. For an older property, the cost approach includes depreciation estimation including physical depreciation and other obsolescence (functional and external). Construction cost and depreciation should be determined from analysis of the construction cost and estimation of depreciation according to the prevalence in the market or in valuation practice.

There were no investment properties which could be classified as the level 1 and level 3 fair value.

The fair values of investment properties are within level 2 of the fair value hierarchy.

The level 2 fair value of land is calculated using the market approach and income approach. Data inputs were obtained from the market approach that consists of:
a. sale or rental price per square meter
b. Occupancy rate
c. Growth rate
d. Discount and capitalization rate.

Adjustments were made based on size, location, shapes and specifications, land rights and other comparison elements.

8. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / *Investments in Associates and Joint Ventures*

Rincian investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut:

Details of investments in associates and joint ventures are as follows:

Entitas/ *Entity*	Domisili/ *Domicile*	Jenis usaha/ *Nature of business*	Tahun operasi komersial/ *Commercial operations*	Persentase penyertaan/ *Percentage of ownership* 2019 %	2018 %
Entitas asosiasi/ *Associates*					
PT Geo Dipa Energi ("GDE")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2002	6.67	6.67
PT Mitra Energi Batam ("MEB")	Batam	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2004	30.00	30.00
PT Indo Pusaka Berau ("IPB")	Berau	Perdagangan batu bara/ *Coal trading*	2005	46.53	46.53
PT Sumber Segara Primadaya ("S2P")	Cilacap	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2006	49.00	49.00
PT Dalle Energy Batam ("DEB")	Batam	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2013	20.00	20.00
PT Tanjung Kasam Power ("TJK")	Batam	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2012	10.00	10.00
PT Energi Pelabuhan Indonesia ("EPI")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2013	45.00	45.00
PT PBM Adhiguna Putera ("PBM AP")	Jakarta	Pelayaran/ *Shipping*	1987	25.00	25.00
PT Musi Mitra Jaya ("MMJ")	Palembang	Transportasi Batubara/ *Coal Transportation*	2011	25.50	--
PT Sriwijaya Bara Logistic ("SBL")	Musi Banyuasin	Transportasi Batubara/ *Coal Transportation*	2014	25.50	--
Ventura bersama/ *Joint ventures*					
PT Unelec Indonesia ("Unindo")	Jakarta	Penunjang penyedia tenaga listrik/ *Electricity supports*	1988	32.35	32.35
PT Bajradaya Sentranusa ("BDSN")	Asahan	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2010	36.61	36.61
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali ("Komipo PJB")	Jepara	Operasi dan pemeliharaan/ *Operational and maintenance*	2010	49.00	49.00
PT Crompton Prima Switchgear Indonesia ("CPSI")	Jakarta	Peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik/ *Electricity controller and distribution*	2014	49.00	49.00
PT Bukit Pembangkit Innovative ("BPI")	Palembang	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2015	37.25	37.25
PT Perta Daya Gas ("PDG")	Jakarta	Transportasi dan penyimpanan LNG/ *Transportation and storage of LNG*	2015	35.00	35.00
PT Rajamandala Electric Power ("REP")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2019	51.00	51.00
PT Rekind Daya Mamuju ("RDM")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2018	10.00	10.00
PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali ("SGPJB")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2019	30.00	30.00
PT GCL Indotenaga ("GCL")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	*)	35.00	35.00
PT Guohua Taidian Pembangkitan Jawa Bali ("GTPJB")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2019	30.00	30.00
PT North Sumatra Hydro Energy ("NSHE")	Sumatera Utara	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	*)	25.00	25.00
PT Indo Raya Tenaga ("IRT")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2017	51.00	51.00
PT Sumbagsel Energi Sakti Pewali ("SS Pewali")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	*)	10.00	--

*) Tahap pengembangan/ *Development stage*

Seluruh entitas asosiasi dan ventura bersama dicatat oleh Perusahaan dan entitas anak dengan menggunakan metode ekuitas. Seluruh entitas adalah entitas tertutup dan tidak terdapat harga pasar yang dikutip yang tersedia untuk sahamnya.

All the associates and joint ventures are recorded by the Company and its subsidiaries using the equity method. They are private entities and there is no quoted market price available for its share.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Per 31 Desember 2019 dan 2018, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat pembatasan dan risiko signifikan yang terkait dengan investasi pada asosiasi dan ventura bersama.

As of December 31, 2019 dan 2018, management believes that there is no restriction and significant risk regarding the investments in associates and joint ventures.

Mutasi investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut:

Changes in investments in associates and joint ventures are as follows:

	Jumlah tercatat 1 Januari 2019/ *Carrying amount January 1, 2019* Rp	Penambahan/ *Additions* Rp	Dividen/ *Dividend* Rp	Bagian atas laba (rugi) bersih/ *Share of profit (loss)* Rp	Bagian atas penghasilan komprehensif lainnya/ *Share of other comprehensive income* Rp	Jumlah tercatat 31 Desember 2019/ *Carrying amount December 31, 2019* Rp	
Entitas asosiasi							***Associates***
PT Geo Dipa Energi	104,009	--	--	10,765	(316)	114,458	*PT Geo Dipa Energi*
PT Mitra Energi Batam	124,603	--	(7,500)	6,757	--	123,860	*PT Mitra Energi Batam*
PT Sumber Segara Primadaya	2,388,686	--	(145,542)	388,865	--	2,632,009	*PT Sumber Segara Primadaya*
PT Dalle Energy Batam	98,511	--	--	2,743	--	101,254	*PT Dalle Energy Batam*
PT Indo Pusaka Berau	117,579	--	--	3,520	--	121,099	*PT Indo Pusaka Berau*
PT Energi Pelabuhan Indonesia	46,912	--	--	6,813	--	53,725	*PT Energi Pelabuhan Indonesia*
PT Tanjung Kasam Power	91,693	--	--	7,023	(7,337)	91,379	*PT Tanjung Kasam Power*
PT PBM Adhiguna Putera	30,672	--	--	8,927	--	39,599	*PT PBM Adhiguna Putera*
PT Musi Mitra Jaya	--	257,841	--	53	--	257,894	*PT Musi Mitra Jaya*
PT Sriwijaya Bara Logistik	--	332,698	--	85	--	332,783	*PT Sriwijaya Bara Logistik*
Subjumlah	3,002,665	590,539	(153,042)	435,551	(7,653)	3,868,060	*Subtotal*
Ventura bersama							***Joint ventures***
PT Unelec Indonesia	75,902	--	--	(23,526)	--	52,376	*PT Unelec Indonesia*
PT Bajradaya Sentranusa	796,051	--	(47,448)	116,012	(69,729)	794,886	*PT Bajradaya Sentranusa*
PT Bukit Pembangkit Innovative	1,292,688	--	--	82,207	(92,895)	1,282,000	*PT Bukit Pembangkit Innovative*
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	38,509	--	(23,824)	18,796	--	33,481	*PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali*
PT Rekind Daya Mamuju	57,375	--	--	1,329	--	58,704	*PT Rekind Daya Mamuju*
PT Indo Raya Tenaga	--	489,141	--	33,029	--	522,170	*PT Indo Raya Tenaga*
PT Perta Daya Gas	19,768	--	--	33,840	(10,346)	43,262	*PT Pertadaya Gas*
PT Rajamandala Electric Power	124,493	--	--	1,498	(2,865)	123,126	*PT Rajamandala Electric Power*
PT Crompton Prima Switchgear Indonesia	26,910	--	--	(10,560)	--	16,350	*PT Crompton Prima Switchgear Indonesia*
PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali	1,837,495	--	--	284,174	(79,938)	2,041,731	*PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali*
PT GCL Indotenaga	419,530	12,280	--	(4,954)	--	426,856	*PT GCL Indotenaga*
PT Guohua Taidian Pembangkitan Jawa Bali	2,022	--	--	10	(87)	1,945	*PT Guohua Taidian Pembangkitan Jawa Bali*
PT North Sumatera Hydro Energy	1,032,931	--	--	--	(23,404)	1,009,527	*PT North Sumatera Hydro Energy*
PT Sumbaksel Energi Sakti Pewali	--	26,291	--	--	--	26,291	*PT Sumbaksel Energi Sakti Pewali*
Subjumlah	5,723,674	527,712	(71,272)	531,855	(279,264)	6,432,705	*Subtotal*
Jumlah	**8,726,339**	**1,118,251**	**(224,314)**	**967,406**	**(286,917)**	**10,300,765**	***Total***

	Jumlah tercatat 1 Januari 2018/ *Carrying amount January 1, 2018* Rp	Penambahan/ *Additions* Rp	Dividen/ *Dividend* Rp	Bagian atas laba (rugi) bersih/ *Share of profit (loss)* Rp	Bagian atas penghasilan komprehensif lainnya/ *Share of other comprehensive income* Rp	Jumlah tercatat 31 Desember 2018/ *Carrying amount December 31, 2018* Rp	
Entitas asosiasi							***Associates***
PT Geo Dipa Energi	92,661	--	--	11,344	4	104,009	*PT Geo Dipa Energi*
PT Mitra Energi Batam	113,276	--	(6,000)	17,327	--	124,603	*PT Mitra Energi Batam*
PT Sumber Segara Primadaya	1,881,671	--	(135,633)	642,648	--	2,388,686	*PT Sumber Segara Primadaya*
PT Dalle Energy Batam	90,490	--	(527)	8,548	--	98,511	*PT Dalle Energy Batam*
PT Indo Pusaka Berau	111,656	--	(1,242)	7,165	--	117,579	*PT Indo Pusaka Berau*
PT Energi Pelabuhan Indonesia	42,522	--	(2,293)	6,683	--	46,912	*PT Energi Pelabuhan Indonesia*
PT Tanjung Kasam Power	75,789	--	--	15,904	--	91,693	*PT Tanjung Kasam Power*
PT PBM Adhiguna Putera	24,765	--	(2,746)	8,653	--	30,672	*PT PBM Adhiguna Putera*
Subjumlah	2,432,830	--	(148,441)	718,272	4	3,002,665	*Subtotal*
Ventura bersama							***Joint ventures***
PT Unelec Indonesia	55,018	--	--	20,884	--	75,902	*PT Unelec Indonesia*
PT Bajradaya Sentranusa	687,856	--	(45,665)	94,612	59,248	796,051	*PT Bajradaya Sentranusa*
PT Bukit Pembangkit Innovative	1,095,535	--	--	81,008	116,145	1,292,688	*PT Bukit Pembangkit Innovative*
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	41,313	--	(26,628)	23,824	--	38,509	*PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali*
PT Rekind Daya Mamuju	54,604	--	--	2,771	--	57,375	*PT Rekind Daya Mamuju*
PT Indo Raya Tenaga	320	--	--	(320)	--	--	*PT Indo Raya Tenaga*
PT Perta Daya Gas	3,129	--	--	15,524	1,115	19,768	*PT Pertadaya Gas*
PT Rajamandala Electric Power	108,574	--	--	8,544	7,375	124,493	*PT Rajamandala Electric Power*
PT Crompton Prima Switchgear Indonesia	32,040	--	--	(5,130)	--	26,910	*PT Crompton Prima Switchgear Indonesia*
PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali	1,291,950	254,293	--	219,642	71,610	1,837,495	*PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali*
PT GCL Indotenaga	327,221	99,597	--	(7,288)	--	419,530	*PT GCL Indotenaga*
PT Guohua Taidian Pembangkitan Jawa Bali	2,024	--	--	2	(4)	2,022	*PT Guohua Taidian Pembangkitan Jawa Bali*
PT North Sumatera Hydro Energy	746,084	286,847	--	--	--	1,032,931	*PT North Sumatera Hydro Energy*
Subjumlah	4,445,668	640,737	(72,293)	454,073	255,489	5,723,674	*Subtotal*
Jumlah	**6,878,498**	**640,737**	**(220,734)**	**1,172,345**	**255,493**	**8,726,339**	***Total***

Berikut ini adalah ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi dan ventura bersama pada 31 Desember 2019 dan 2018 yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

The following table contains the summarized financial information for associates and joint ventures as of December 31, 2019 dan 2018, which are accounted using the equity method.

Entitas asosiasi/ *Associates*

	2019					
	PT Mitra Energi Batam Rp	PT Sumber Segara Primadaya Rp	PT Tanjung Kasam Power Rp	Lainnya/ *Others* Rp	Jumlah/ *Total* Rp	
Lancar						*Current*
Kas dan setara kas	29,559	685,351	112,075	523,260	1,350,245	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	126,733	2,765,852	153,548	1,126,340	4,172,473	*Other current assets (excluding cash)*
Jumlah aset lancar	156,292	3,451,203	265,623	1,649,600	5,522,718	*Total of current assets*
Liabilitas keuangan						*Financial liabilities*
Utang usaha	2,576	1,255,764	16,180	441,431	1,715,951	*Trade payables*
Liabilitas lancar lainnya	31,359	3,535,064	139,819	967,217	4,673,459	*Other current liabilities*
Jumlah liabilitas lancar	33,935	4,790,828	155,999	1,408,648	6,389,410	*Total current liabilities*
Tidak lancar						*Non-current*
Aset	564,096	23,121,443	2,483,609	4,815,943	30,985,091	*Assets*
Liabilitas						*Liabilities*
Liabilitas keuangan	225,320	7,179,540	1,039,795	494,489	8,939,144	*Financial liabilities*
Liabilitas lainnya	48,037	11,691,649	639,651	348,096	12,727,433	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas tidak lancar	273,357	18,871,189	1,679,446	842,585	21,666,577	*Total of non-current liabilities*
Aset bersih	413,096	2,910,629	913,787	4,214,310	8,451,822	*Net assets*
% kepemilikan efektif	**30%**	**49%**	**10%**	**6,67% - 46,80%**	**--**	***% of effective ownership***
Bagian atas aset bersih asosiasi	123,929	1,426,208	91,379	559,232	2,200,748	*Share of the net assets of associates*
Penyesuaian metode ekuitas	(69)	1,205,801	--	461,580	1,667,312	*Adjustments of equity method*
Jumlah tercatat	123,860	2,632,009	91,379	1,020,812	3,868,060	*Total carrying value*
Pendapatan	171,378	6,432,671	422,888	1,168,148	8,195,085	*Revenue*
Beban pokok penjualan	(63,509)	(3,685,950)	(99,998)	(685,194)	(4,534,651)	*Cost of good sold*
Depresiasi dan amortisasi	--	--	--	(16,386)	(16,386)	*Depreciation and amortization*
Pendapatan keuangan	--	13,707	--	3,049	16,756	*Interest income*
Beban keuangan	(17)	(1,148,378)	(89,064)	(12,816)	(1,250,275)	*Interest expense*
Beban operasi	(57,823)	(753,594)	(141,172)	(291,940)	(1,244,529)	*Operating expense*
Pendapatan (beban) lain-lain, bersih	(19,006)	1,413 --	986	20,892	2,872	*Other income (charges) - net*
Beban pajak penghasilan	(8,501)	(66,266)	(23,410)	(61,360)	(159,537)	*Income tax expense*
Laba tahun berjalan	22,522	793,603	70,230	124,393	1,010,748	*Profit for the year*
% kepemilikan efektif	**30%**	**49%**	**10%**	**6,67% - 46,80%**	**--**	***% of effective ownership***
Bagian laba asosiasi tahun berjalan	6,757	388,865	7,023	32,906	435,551	*Share of the profit for the year of associates*
Laba (rugi) komprehensif lain	--	--	(73,370)	(4,738)	(78,108)	*Other comprehensive income (loss)*
Bagian laba (rugi) komprehensif asosiasi	--	--	(7,337)	(316)	(7,653)	*Share of other comprehensive income (loss) of associates*
Dividen yang diterima dari perusahaan asosiasi	(7,500)	(145,542)	--	--	(153,042)	*Dividend received from associates*

	2018					
	PT Mitra Energi Batam Rp	PT Sumber Segara Primadaya Rp	PT Tanjung Kasam Power Rp	Lainnya/ *Others* Rp	Jumlah/ *Total* Rp	
Lancar						*Current*
Kas dan setara kas	117,277	778,313	83,532	476,405	1,455,527	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	134,501	1,825,590	181,597	540,672	2,682,360	*Other current assets (excluding cash)*
Jumlah aset lancar	251,778	2,603,903	265,129	1,017,077	4,137,887	*Total of current assets*
Liabilitas keuangan						*Financial liabilities*
Utang usaha	20,664	1,024,885	84,297	165,844	1,295,690	*Trade payables*
Liabilitas lancar lainnya	40,603	2,548,754	29,247	351,791	2,970,395	*Other current liabilities*
Jumlah liabilitas lancar	61,267	3,573,639	113,544	517,635	4,266,085	*Total current liabilities*
Tidak lancar						*Non-current*
Aset	545,678	19,773,962	2,665,885	3,979,314	26,964,839	*Assets*
Liabilitas						*Liabilities*
Liabilitas keuangan	286,320	7,866,475	1,426,538	727,289	10,306,622	*Financial liabilities*
Liabilitas lainnya	35,833	8,068,457	473,998	206,398	8,784,686	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas tidak lancar	322,153	15,934,932	1,900,536	933,687	19,091,308	*Total of non-current liabilities*
Aset bersih	414,036	2,869,294	916,934	3,545,069	7,745,333	*Net assets*
% kepemilikan efektif	**30%**	**49%**	**10%**	**6,67% - 46,80%**	**--**	***% of effective ownership***

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018 (In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2018					
	PT Mitra Energi Batam Rp	PT Sumber Segara Primadaya Rp	PT Tanjung Kasam Power Rp	Lainnya/ *Others* Rp	Jumlah/ *Total* Rp	
Bagian atas aset bersih asosiasi	124,211	1,405,954	91,693	424,115	2,045,973	*Share of the net assets of associates*
Penyesuaian metode ekuitas	392	982,732	--	(26,432)	956,692	*Adjustments of equity method*
Jumlah tercatat	124,603	2,388,686	91,693	397,683	3,002,665	*Total carrying value*
Pendapatan	188,475	7,055,191	443,069	907,640	8,594,375	*Revenue*
Beban pokok penjualan	(30,683)	(4,590,602)	(100,181)	(557,784)	(5,279,250)	*Cost of good sold*
Depresiasi dan amortisasi	--	(939,286)	--	10,520	(928,766)	*Depreciation and amortization*
Pendapatan keuangan	--	3,860	--	34,663	38,523	*Interest income*
Beban keuangan	(22,793)	(1,071,049)	(92,157)	(19,698)	(1,205,697)	*Interest expense*
Beban operasi	(72,406)	927,124	(40,926)	(89,854)	723,938	*Operating expense*
Pendapatan (beban) lain-lain, bersih	13,700	1,462	--	13,261	28,423	*Other income (charges) - net*
Beban pajak penghasilan	(18,536)	(75,173)	(50,765)	(21,014)	(165,488)	*Income tax expense*
Laba tahun berjalan	57,757	1,311,527	159,040	277,734	1,806,058	*Profit for the year*
% kepemilikan efektif	**30%**	**49%**	**10%**	**6,67% - 46,80%**	**--**	***% of effective ownership***
Bagian laba asosiasi tahun berjalan	17,327	642,648	15,904	42,393	718,272	*Share of the profit for the year of associates*
Laba (rugi) komprehensif lain	--	--	--	40	40	*Other comprehensive income (loss)*
Bagian laba (rugi) komprehensif asosiasi	--	--	--	4	4	*Share of other comprehensive income (loss) of associates*
Dividen yang diterima dari perusahaan asosiasi	(6,000)	(135,633)	--	(6,808)	(148,441)	*Dividend received from associates*

Ventura bersama/ *Joint ventures*

	2019					
	PT Unelec Indonesia Rp	PT Bajradaya Sentranusa Rp	PT Bukit Pembangkit Innovative Rp	Lainnya/ *Others* Rp	Jumlah/ *Total* Rp	
Lancar						*Current*
Kas dan setara kas	11,653	451,788	183,883	2,728,772	3,376,096	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	979,894	196,677	236,446	837,331	2,250,348	*Other current assets (excluding cash)*
Jumlah aset lancar	991,547	648,465	420,329	3,566,103	5,626,444	*Total of current assets*
Liabilitas keuangan						*Financial liabilities*
Utang usaha	373,389	239,934	125,548	117,224	856,095	*Trade payables*
Liabilitas lancar lainnya	588,232	173,017	829,185	1,605,584	3,196,018	*Other current liabilities*
Jumlah liabilitas lancar	961,621	412,951	954,733	1,722,808	4,052,113	*Total current liabilities*
Tidak lancar						*Non-current*
Aset	99,897	5,476,554	5,558,163	33,820,456	44,955,070	*Assets*
Liabilitas						*Liabilities*
Liabilitas keuangan	--	2,302,046	1,113,770	19,635,169	23,050,985	*Financial liabilities*
Liabilitas lainnya	38,570	869,108	696,234	830,765	2,434,677	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas tidak lancar	38,570	3,171,154	1,810,004	20,465,934	25,485,662	*Total of non-current assets*
Aset bersih	91,253	2,540,914	3,213,755	15,197,817	21,043,739	*Net assets*
% kepemilikan efektif	**32.35%**	**36.61%**	**37.25%**	**10% - 51%**	**--**	***% of effective ownership***
Bagian atas aset bersih ventura bersama	29,520	930,305	1,197,124	4,737,824	6,894,773	*Share of the net assets of joint ventures*
Penyesuaian metode ekuitas	22,856	(135,419)	84,876	(434,381)	(462,068)	*Adjustments of equity method*
Jumlah tercatat	52,376	794,886	1,282,000	4,303,443	6,432,705	*Total carrying value*
Pendapatan	790,954	666,916	1,028,801	3,440,269	5,926,940	*Revenue*
Beban pokok penjualan	(744,803)	(27,282)	(450,349)	(1,945,590)	(3,168,024)	*Cost of good sold*
Depresiasi dan amortisasi	--	(406)	--	(45,191)	(45,597)	*Depreciation and amortization*
Pendapatan keuangan	--	(1,239)	2,497	4,865	6,123	*Interest income*
Beban keuangan	(39,551)	(216,179)	(113,264)	(562,982)	(931,976)	*Interest expense*
Beban operasi	(33,850)	(43,788)	(131,947)	(98,034)	(307,619)	*Operating expense*
Pendapatan (beban) lain-lain, bersih	(45,474)	3,996	(21,633)	97,215	34,104	*Other income (charges) - net*
Beban pajak penghasilan	--	(65,159)	(93,414)	(129,797)	(288,370)	*Income tax expense*
Laba periode berjalan	(72,724)	316,859	220,691	760,755	1,225,581	*Profit for the period*
% kepemilikan efektif	**32.35%**	**36.61%**	**37.25%**	**10% - 51%**	**--**	***% of effective ownership***
Bagian atas laba tahun berjalan ventura bersama	(23,526)	116,012	82,207	357,162	531,855	*Share of the profit for the year of joint ventures*
Laba komprehensif lain	--	(190,449)	(249,383)	1,382,723	942,891	*Other comprehensive income*
Bagian atas laba komprehensif ventura bersama	--	(69,729)	(92,895)	(116,640)	(279,264)	*Share of other comprehensive income of joint ventures*
Dividen yang diterima dari perusahaan ventura bersama	--	(47,448)	--	(23,824)	(71,272)	*Dividend received from joint ventures*

	2018					
	PT Unelec Indonesia Rp	PT Bajradaya Sentranusa Rp	PT Bukit Pembangkit Innovative Rp	Lainnya/ *Others* Rp	Jumlah/ *Total* Rp	
Lancar						*Current*
Kas dan setara kas	18,674	381,296	287,262	1,665,227	2,352,459	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	946,795	187,297	193,914	681,328	2,009,334	*Other current assets (excluding cash)*
Jumlah aset lancar	965,469	568,593	481,176	2,346,555	4,361,793	*Total of current assets*
Liabilitas keuangan						*Financial liabilities*
Utang usaha	268,839	61,537	437,369	83,463	851,208	*Trade payables*
Liabilitas lancar lainnya	568,902	70,883	794,314	1,403,663	2,837,762	*Other current liabilities*
Jumlah liabilitas lancar	837,741	132,420	1,231,683	1,487,126	3,688,970	*Total current liabilities*
Tidak lancar						*Non-current*
Aset	113,713	3,545,454	5,974,154	27,858,867	37,492,188	*Assets*
Liabilitas						*Liabilities*
Liabilitas keuangan	--	2,851,963	1,587,371	15,293,919	19,733,253	*Financial liabilities*
Liabilitas lainnya	42,350	105,132	772,360	410,667	1,330,509	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas tidak lancar	42,350	2,957,095	2,359,731	15,704,586	21,063,762	*Total of non-current assets*
Aset bersih	199,091	1,024,532	2,863,916	13,013,710	17,101,249	*Net assets*
% kepemilikan efektif	**32.35%**	**36.61%**	**40.25%**	**10% - 51%**	**--**	***% of effective ownership***
Bagian atas aset bersih ventura bersama	64,406	375,081	1,266,059	3,699,770	5,405,316	*Share of the net assets of joint ventures*
Penyesuaian metode ekuitas	11,496	420,970	26,629	(140,737)	318,358	*Adjustments of equity method*
Jumlah tercatat	75,902	796,051	1,292,688	3,559,033	5,723,674	*Total carrying value*
Pendapatan	1,197,402	800,051	972,887	4,480,974	7,451,314	*Revenue*
Beban pokok penjualan	(1,021,225)	--	(325,552)	(3,202,389)	(4,549,166)	*Cost of good sold*
Depresiasi dan amortisasi	--	(385)	--	44,155	43,770	*Depreciation and amortization*
Pendapatan keuangan	--	729	455	165	1,349	*Interest income*
Beban keuangan	(31,742)	(447,633)	(144,392)	(198,644)	(822,411)	*Interest expense*
Beban operasi	(29,686)	(59,121)	(168,426)	3,082	(254,151)	*Operating expense*
Pendapatan (beban) lain-lain, bersih	(13,013)	(35,209)	12,598	(162,583)	(198,207)	*Other income (charges) - net*
Beban pajak penghasilan	(37,180)	--	(146,307)	(127,101)	(310,588)	*Income tax expense*
Laba periode berjalan	64,556	258,432	201,263	837,659	1,361,910	*Profit for the period*
% kepemilikan efektif	**32.35%**	**36.61%**	**40.25%**	**10% - 51%**	**--**	***% of effective ownership***
Bagian atas laba tahun berjalan ventura bersama	20,884	94,612	81,008	257,569	454,073	*Share of the profit for the year of joint ventures*
Laba komprehensif lain	--	161,836	288,559	256,346	706,741	*Other comprehensive income*
Bagian atas laba komprehensif ventura bersama	--	59,248	116,145	80,096	255,489	*Share of other comprehensive income of joint ventures*
Dividen yang diterima dari perusahaan ventura bersama	--	(45,665)	--	(26,628)	(72,293)	*Dividend received from joint ventures*

Investasi pada entitas di atas diperoleh terutama untuk tujuan potensi pertumbuhan jangka panjang, karena seluruh entitas tersebut bergerak dalam industri ketenagalistrikan yang sama dengan industri Perusahaan dan entitas anak.

The investments in the above entities are held primarily for long-term growth potential, since these entities are engaged in the same electricity industry as the Company and its subsidiaries.

GDE

GDE didirikan untuk melanjutkan pembangunan pembangkit tenaga listrik Dieng dan Patuha yang sebelumnya dimiliki Himpurna California Energy Limited dan Patuha Power Limited.

Perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan berdasarkan kemampuan Perusahaan untuk mengarahkan operasional GDE.

GDE

GDE was established to continue the development of the Dieng and Patuha power plant projects previously owned by Himpurna California Energy Limited and Patuha Power Limited.

The Company has significant influence the significant influence which indicated by the Company's ability to drive GDE operation.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

MEB
Pada tahun 2019 dan 2018, PLN Batam, entitas anak, memperoleh dividen dari MEB masing-masing sebesar Rp7.500 dan Rp6.000.

S2P
Pada tahun 2019 dan 2018, PJB, entitas anak, memperoleh dividen dari S2P masing-masing sebesar US$10.192.000 (ekuivalen Rp145.542) dan US$9.212.002 (ekuivalen Rp135.633).

DEB
Pada tahun 2018, PLN Batam, entitas anak, memperoleh dividen dari DEB sebesar Rp527.

IPB
Pada tahun 2018, IP, entitas anak, memperoleh dividen dari IPB sebesar Rp1.242.

EPI
Pada tahun 2018, HP, entitas anak, memperoleh dividen dari EPI sebesar Rp2.293.

TJK
PLN Batam, entitas anak, mempunyai pengaruh signifikan di TJK dengan mempertimbangkan adanya keterwakilan PLN Batam pada susunan Direksi TJK.

MMJ
Pada tanggal 8 Januari 2019, BBI, entitas anak PLN Batubara, melakukan penyertaan atas 25,5% saham PT Musi Mitra Jaya ("MMJ") dengan biaya perolehan sebesar Rp257.841.

SBL
Pada tanggal 8 Januari 2019, PLN BBI, entitas anak PLN Batubara, melakukan penyertaan atas 25,5% saham PT Sriwijaya Bara Logistic ("SBL") dengan biaya perolehan sebesar Rp332.698.

SS Pewali
Pada tahun 2019, PJBI, entitas anak PJB, melakukan investasi pada SS Pewali dengan melakukan penyertaan saham sebesar US$1.860.000 (ekuivalen Rp26.291) setara dengan kepemilikan saham sebesar 10%.

MEB
In 2019 dan 2018, PLN Batam, a subsidiary, received dividends from MEB amounting to Rp7,500 and Rp6,000, respectively.

S2P
In 2019 dan 2018, PJB, a subsidiary, received dividends from S2P amounting to US$10,192,000 (equivalent to Rp145,542) and US$9,212,002 (equivalent to Rp135,633) respectively.

DEB
In 2018, PLN Batam, a subsidiary, received dividends from DEB amounting to Rp527.

IPB
In 2018, IP, a subsidiary, received cash dividends from IPB amounting to Rp1,242.

EPI
In 2018, HP, a subsidiary, received dividends from EPI amounting to Rp2,293.

TJK
PLN Batam, a subsidiary, has significant influence over TJK by considering its representation in TJK's Directors.

MMJ
On January 8, 2019, BBI, a subsidiary of PLN Batubara, acquired 25.5% of the shares of PT Musi Mitra Jaya ("MMJ") at a cost of Rp257,841.

SBL
On January 8, 2019, PLN BBI, a subsidiary of PLN Batubara, acquired 25,5% of the shares of PT Sriwijaya Bara Logistic ("SBL") at a cost of Rp332,698.

SS Pewali
In 2019, PJBI, a subsidiary of PJB, made investment to SS Pewali through purchase of shares amounting to US$1,860,000 (equivalent to Rp26,291) equivalent to 10% ownership share.

BDSN
Pada tahun 2019 dan 2018, PJB, entitas anak, memperoleh dividen dari BDSN masing-masing sebesar US$3,333,442 (ekuivalen Rp47.448) dan US$3.163.779 (ekuivalen Rp45.665).

BDSN
In 2019 and 2018, PJB, a subsidiary, received dividend from BDSN amounting to US$3,333,442 (equivalent to Rp47,448) and US$3,163,779 (equivalent to Rp45,665) respectively.

Komipo PJB
Pada tahun 2019 dan 2018, PJB, entitas anak, memperoleh dividen dari Komipo PJB masing-masing sebesar Rp23.824 dan Rp26.628.

Komipo PJB
In 2019 and 2018, PJB a subsidiary, received dividend from Komipo PJB amounting to Rp23,824 and Rp26,628, respectively.

SGPJB
Selama tahun 2018, PJBI, entitas anak PJB menambah investasi sebesar US$17.033.467 (ekuivalen Rp254.293) tanpa mengubah presentase kepemilikan.

SGPJB
During 2018, PJBI, a subsidiary of PJB added investment amounting US$17,033,467 (equivalent to Rp254,293), without changes in percentage of ownership.

GCL
Pada tahun 2019 dan 2018, PIT, entitas anak IP, melakukan tambahan investasi masing-masing sebesar US$875.000 (setara dengan Rp12.280) dan US$7.000.000 (setara dengan Rp99.597), tanpa mengubah persentase kepemilikan.

GCL
In 2019 and 2018, PIT, a subsidiary of IP, made additional investments amounting to US$875,000 (equivalent to Rp12,280) and US$7,000,000 (equivalent to Rp99,597), respectively, without changes in percentage of ownership.

IRT
Berdasarkan akta notaris No. 22 tanggal 12 Desember 2019 dari Muhammad Hanafi. S.H., Notaris di Jakarta, PIT melakukan inbreng saham IRT ke PSI sebesar Rp510 yang merupakan 51% kepemilikan saham di IRT.

Pada tahun 2019, PSI, entitas anak PIT, melakukan tambahan Investasi sebesar Rp489.141 tanpa mengubah persentase kepemilikan.

IRT
Based on notarial deed No. 22 dated December 12, 2019 from Muhammad Hanafi. S.H., Notary in Jakarta, PIT exchange of IRT shares to PSI for Rp510, which represents 51% ownership in IRT.

In 2019, PSI, a subsidiary of PIT, made additional investments amounting to Rp489,141 without changes in percentage of ownership.

NSHE
Selama tahun 2018, PJBI, entitas anak PJB, menambah investasi sebesar US$20.831.307 (ekuivalen Rp286.847) tanpa merubah presentase kepemilikan.

NSHE
During 2018, PJBI, a subsidiary of PJB, added investment amounting US$20,831,307 (equivalent to Rp286,847) without percentage changes in percentage of ownership.

BAG
Pada tahun 2018, BAG, entitas anak, mendapatkan dividen dari PBM AP sebesar Rp2.746.

BAG
In 2018, BAG, a subsidiary, received dividends from PBM AP amounting to Rp2,746.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

9. Piutang Pihak Berelasi / *9. Receivables from Related Parties*

	2019 Rp	2018 Rp	
PT Shenhua Guohua PJB (SGPJB)	785,639	830,188	*PT Shenhua Guohua PJB (SGPJB)*
PT Perta Daya Gas (PDG)	168,878	199,576	*PT Perta Daya Gas (PDG)*
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali (Komipo PJB)	--	5,582	*PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali (Komipo PJB)*
PT Mitra Energi Batam (MEB)	1,845	1,845	*PT Mitra Energi Batam (MEB)*
Jumlah	956,362	1,037,191	*Total*
Dikurangi bagian jangka pendek	**4,719**	**5,954**	***Less current portion***
Bagian jangka panjang	**951,643**	**1,031,237**	***Long-term portion***

SGPJB
Pada tanggal 20 November 2018, PJBI, entitas anak PJB, memberikan pinjaman jangka panjang sebesar US$56.516.733 kepada SGPJB dengan suku bunga LIBOR 6 bulan + 4%. Pinjaman akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2033. Pelunasan pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal 15 Januari dan 15 Juli dan cicilan pertama pokok piutang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2021. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo piutang masing-masing sebesar US$56.516.733 (setara dengan Rp785.639) dan US$56.516.733 (setara dengan Rp818.419). Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 piutang lainnya masing-masing sebesar nihil dan Rp11.769.

SGPJB
On November 20, 2018, PJBI, a PJB subsidiary, granted a long-term loan amounting to to SGPJB amounted US$56,516,733 with interest rate of LIBOR 6 month +4%. The loan will mature on December 15, 2033. The interest will be due every January 15 and July 15 and the first installment of principal payment will be on December 15, 2021. As of December 31, 2019 and 2018 the receivable amounted to US$56,516,733 (equivalent to Rp785,639) and US$56,516,733 (equivalent to Rp818,419), respectively. As of December 31, 2019 and 2018, other receivables amounting to nil and Rp11,769, respectively.

PDG
Pada tanggal 12 Juni 2013, IP, entitas anak, memberikan pinjaman jangka panjang sebesar US$18.837.112 kepada PDG, ventura bersama, untuk membiayai proyek *Compressed Natural Gas* ("CNG") di PLTU Tambak Lorok, Semarang. Pada tanggal 30 November 2015, IP melakukan amandemen atas pinjaman jangka panjang yang diberikan kepada PDG sehingga jumlah pinjaman berubah menjadi US$18.191.529 sesuai dengan jumlah seluruh pencairan hingga tanggal terakhir yakni 9 Januari 2014 dan jangka waktu pinjaman berubah menjadi delapan tahun yang akan jatuh tempo pada 1 Desember 2023. Pemberian pinjaman ini dikenakan bunga 6,5% per tahun. Jumlah bunga atas pokok pinjaman terutang selama masa pembangunan proyek (*Interest During Construction*) dihitung sejak tanggal pencairan dana sampai tanggal 30 Mei 2014 dan dibayarkan secara penuh pada tanggal

PDG
On June 12, 2013, IP, a subsidiary, granted a long-term loan amounting to US$18,837,112 to PDG, a joint venture, for financing the Compressed Natural Gas ("CNG") project in PLTU Tambak Lorok, Semarang. On November 30, 2015, IP made an amendment to the long term loan given to PDG which resulted in the revision of the total loan granted to become US$18,191,529 in accordance with the fund transferred up to January 9, 2014 and the tenor of the loan was revised to eight years and due on December 1, 2023. This loan bears interest of 6.5% per annum. The total interest on the principal during the construction of the project (Interest During Construction) is effective from the date of cash withdrawal until May 30, 2014 and paid-in full on June 1, 2016. The principal shall be collected every 6 months from date June 1, 2016 until December 1, 2023. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding principal and accrued interest

1 Juni 2016. Pokok pinjaman akan ditagihkan setiap 6 bulan dari tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan 1 Desember 2023. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo piutang masing-masing terdiri dari pokok dan bunga sebesar US$11.941.878 (setara dengan Rp166.004) dan US$13.498.180 (setara dengan Rp195.467). Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 piutang lainnya sebesar Rp2.874 dan Rp4.109 merupakan piutang yang antara lain, piutang bunga dan biaya relokasi pegawai.

of the receivables amounted to US$11,941,878, (equivalent to Rp166,004) and US$13,498,180 (equivalent to Rp195,467). As of December 31, 2019 and 2018, other receivables amounting to Rp2,874 and Rp4,109, respectively represent interest receivables and costs of relocation of employees.

Komipo PJB
Pada tanggal 29 Desember 2010, PJB, entitas anak, menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada Komipo PJB dalam bentuk *shareholder loan* dengan suku bunga 14% per tahun. Pinjaman ini bertujuan untuk memberikan Komipo PJB dana cadangan untuk memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Pengembangan Operasi dan Pemeliharaan dengan PJB, dimana Komipo PJB berkewajiban untuk memiliki dana cadangan selama berlakunya perjanjian untuk enam bulan operasi dan pemeliharaan pembangkit. Pada tanggal 29 Desember 2014, PJB melakukan amandemen atas pinjaman yang diberikan kepada Komipo PJB sehingga jangka waktu pinjaman akan jatuh tempo pada tanggal 29 Desember 2019. Pelunasan pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal 29 Desember dan cicilan pertama pokok piutang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2012. Pinjaman ini sudah dilunasi pada tanggal 29 Desember 2019.

Komipo PJB
On December 29, 2010, PJB, a subsidiary, agreed to provide loans to Komipo PJB, in the form of a shareholder loan with annual interest of 14% per annum. The purpose of this loan is to provide cash reserves for Komipo PJB in order to comply with the contractual obligations stipulated in the Expansion Operation and Maintenance Agreement with PJB, which requires Komipo PJB to, at any time of the contract term, maintain the cash reserves for six-months operation and maintenance of power plant. On December 29, 2014, PJB made an amendment on loan agreement to Komipo PJB to extend the due date to December 29, 2019. The interest will be due every December 29 and the first installment of principal payment was on December 29, 2012. This loans has been fully paid on December 29, 2019.

MEB
Piutang ini merupakan piutang atas denda kontrak penyediaan tenaga listrik.

MEB
These receivables represent receivables on penalty of power purchase contracts.

Manajemen Perusahaan dan entitas anak berpendapat bahwa piutang pihak berelasi dapat tertagih.

Managements of the Company and its subsidiaries consider these receivables from related parties are collectible.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. Rekening Bank dan Deposito Berjangka Dibatasi Penggunaannya / *10. Restricted Cash in Banks and Time Deposits*

	2019 Rp	2018 Rp	
Angsuran sewa pembiayaan dan jaminan operasi			***Lease installments and operation guarantee***
Rekening bank			*Cash in bank*
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapura			*Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore*
JPY	5,092,574	4,844,193	*JPY*
US$	681,164	690,780	*US$*
Bank Bukopin - Rupiah	792	267	*Bank Bukopin - Rupiah*
Jaminan bank garansi			***Bank guarantee***
Rekening bank - Rupiah			*Cash in banks - Rupiah*
Pihak berelasi:			*Related parties:*
Bank Mandiri	86,032	82,412	*Bank Mandiri*
Bank Negara Indonesia	8,979	1,348	*Bank Negara Indonesia*
Pihak ketiga:			*Third parties:*
Bank CIMB Niaga	94,223	67,293	*Bank CIMB Niaga*
Bank Bukopin	16,939	--	*Bank Bukopin*
Bank Woori Saudara	--	2,419	*Bank Woori Saudara*
Jumlah	**5,980,703**	**5,688,712**	***Total***
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun			*Interest rate per annum on time deposits*
Rupiah	6.00% - 6.70%	6.00% - 6.75%	*Rupiah*
US$	1.70% - 2.40%	1.25 % - 1.37 %	*US$*
Jangka waktu			*Maturity*
Rupiah	1-12 Bulan/ *Months*	4-6 Bulan/ *Months*	*Rupiah*
US$	3-6 Bulan/ *Months*	1 Tahun/ *Year*	*US$*

Perusahaan menempatkan dana cadangan pada Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapura sebesar JPY39.796.118.675 dan US$49.001.061 pada tanggal 31 Desember 2019 dan sebesar JPY36.946.110.237 dan US$47.702.501 pada tanggal 31 Desember 2018 untuk memenuhi persyaratan *Financial Lease Agreement* ("FLA").

The Company established a reserve account with Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore amounting to JPY39,796,118,675 and US$49,001,061 as of December 31, 2019 and amounting to JPY36,946,110,237 and US$47,702,501 as of December 31, 2018 to fulfill the requirement of the Financial Lease Agreement ("FLA").

Rincian rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

Details of restricted cash in bank and time deposits in foreign currencies are as follows:

	2019		2018		
	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen/ *Equivalent* Rp	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen/ *Equivalent* Rp	
JPY	39,796,118,675	5,092,574	36,946,110,237	4,844,193	*JPY*
US$	49,001,061	681,164	47,702,501	690,780	*US$*
Jumlah		**5,773,738**		**5,534,973**	***Total***

*) Dalam jumlah penuh/ *In full amount*

11. Aset Tidak Lancar Lain / *11. Other Non-Current Assets*

	2019 Rp	2018 Rp	
Biaya ditangguhkan	397,074	352,344	*Deferred charges*
Biaya dibayar di muka			*Prepaid expenses*
Pembelian gas	297,207	7,017,236	*Gas purchased*
Lain-lain	708,601	141,623	*Others*
Subjumlah	1,402,882	7,511,203	*Subtotal*
Uang muka			*Advances*
Pengembangan proyek	3,429,466	3,077,867	*Project development*
Pembelian batubara	128,342	874,422	*Purchased of coal*
Subjumlah	3,557,808	3,952,289	*Subtotal*
Aset takberwujud			*Intangible assets*
Piranti lunak	583,859	727,921	*Software*
Biaya legal terkait perpanjangan hak atas tanah	114,377	230,042	*Legal costs for renewal landrights*
Subjumlah	698,236	957,963	*Subtotal*
Properti pertambangan	1,779,601	1,056,556	*Mining properties*
Investasi saham tidak terdaftar di bursa	7,368	4,751	*Investment in non-listed shares*
Jumlah	**7,445,895**	**13,482,762**	***Total***

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri ESDM No. 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM No. 45 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik, maka Perusahaan menyesuaikan biaya dibayar di muka pembelian gas ke jumlah terpulihkannya sebesar Rp6.200.000 (Catatan 47).

In regards to the issuance of Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources No.10 year 2020 regarding the Amendment of The Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 45 Year 2017 regarding the Utilization of Natural Gas for Electricity Power Plants, the Company has adjusted the prepaid expenses for gas purchased to its recoverable amount of Rp6,200,000 (Note 47).

Amortisasi aset takberwujud
Beban amortisasi aset takberwujud tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp240.817 dan Rp221.851, dicatat sebagai beban usaha.

Amortization of intangible assets
Amortization of intangible assets in 2019 dan 2018 were amounted to Rp240,817 and Rp221,851, respectively, are recorded as operating expenses.

12. Kas dan Setara Kas / *12. Cash and Cash Equivalents*

	2019 Rp	2018 Rp	
Kas	5,747	9,662	*Cash on hand*
Bank			*Cash in banks*
Pihak berelasi			*Related parties*
Bank Rakyat Indonesia			*Bank Rakyat Indonesia*
Rupiah	5,478,064	5,747,560	*Rupiah*
US$	4,870,738	2,991,865	*US$*
EUR	1,896,613	1,278,887	*EUR*
JPY	744,137	204,061	*JPY*
Bank Mandiri			*Bank Mandiri*
Rupiah	6,684,169	3,771,647	*Rupiah*
US$	1,541,966	1,355,590	*US$*
EUR	1,894,410	182,933	*EUR*
JPY	402,453	11,228	*JPY*
Bank Negara Indonesia			*Bank Negara Indonesia*
Rupiah	7,965,754	5,452,526	*Rupiah*
US$	3,056,389	1,946,655	*US$*
JPY	361,417	241,461	*JPY*
EUR	18,150	20,922	*EUR*
MYR	2,062	--	*MYR*
Bank Tabungan Negara			*Bank Tabungan Negara*
Rupiah	959,389	1,001,303	*Rupiah*

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2019 Rp	2018 Rp	
Bank DKI			*Bank DKI*
Rupiah	616,233	318,382	*Rupiah*
US$	39,549	45,449	*US$*
JPY	973	997	*JPY*
Jumlah pihak berelasi	36,532,466	24,571,466	*Total related parties*
Pihak ketiga			*Third parties*
Bank Bukopin			*Bank Bukopin*
Rupiah	4,670,371	3,223,061	*Rupiah*
US$	1,585,473	960,820	*US$*
JPY	325,353	170,402	*JPY*
Bank Internasional Indonesia			*Bank Internasional Indonesia*
Rupiah	2,660	1,479	*Rupiah*
US$	--	3	*US$*
Bank Danamon			*Bank Danamon*
Rupiah	435,361	242,387	*Rupiah*
Bank Central Asia			*Bank Central Asia*
Rupiah	40,704	260,947	*Rupiah*
US$	--	25,479	*US$*
Lain-lain (masing-masing dibawah 5% dari jumlah)			*Others (each below 5% of total)*
Rupiah	922,923	1,821,303	*Rupiah*
US$	70,498	86,738	*US$*
EUR	5,041	--	*EUR*
Jumlah pihak ketiga	8,058,384	6,792,619	*Total third parties*
Jumlah kas dan bank	**44,596,597**	**31,373,747**	***Total cash on hand and in banks***
Setara kas - deposito berjangka			*Cash equivalents - time deposits*
Pihak berelasi			*Related parties*
Bank Negara Indonesia			*Bank Negara Indonesia*
Rupiah	1,055,000	966,238	*Rupiah*
US$	94,524	7,241	*US$*
Bank Mandiri			*Bank Mandiri*
Rupiah	35,353	330,442	*Rupiah*
Bank Rakyat Indonesia			*Bank Rakyat Indonesia*
Rupiah	357,290	242,380	*Rupiah*
US$	97,307	--	
Jumlah pihak berelasi	1,639,474	1,546,301	*Total Related parties*
Pihak ketiga			*Third parties*
Bank Bukopin	302,000	329,000	*Bank Bukopin*
Lain-lain (masing-masing dibawah 5% dari jumlah)	60,712	45,512	*Others (each below 5% of total)*
Jumlah pihak ketiga	362,712	374,512	*Total third parties*
Jumlah deposito berjangka	**2,002,186**	**1,920,813**	***Total time deposits***
Jumlah Kas dan Setara Kas	**46,598,783**	**33,294,560**	***Total Cash and Cash Equivalents***
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun			*Interest rate per annum on time deposits*
Rupiah	5.75% - 6%	5.75% - 6%	*Rupiah*
US$	0.80%	0.80%	*US$*
Jangka waktu	1 Bulan / *Month*	1 Bulan / *Month*	*Maturity*

Rincian kas dan setara kas dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

Details of cash and cash equivalents in foreign currencies are as follows:

	2019		2018		
	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen/ *Equivalent* Rp	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen/ *Equivalent* Rp	
US$	816,951,292	11,356,444	668,605,846	7,419,840	*US$*
EUR	244,679,781	3,814,214	89,538,915	1,482,742	*EUR*
JPY	14,334,466,962	1,834,333	4,790,819,800	628,149	*JPY*
Lain-lain **)	148,335	2,062	--	--	*Others **)*
Jumlah		**17,007,053**		**9,530,731**	***Total***

*) Dalam jumlah penuh
**) Kas dan setara kas dalam mata uang asing lainnya disajikan dalam jumlah setara US$, menggunakan kurs tanggal pelaporan.

*) *In full amount*
***) Cash and cash equivalent in other currencies are presented in US$ equivalent using the exchange rate prevailing at reporting date.*

13. Investasi Jangka Pendek / *13. Short-Term Investments*

	2019 Rp	2018 Rp	
Deposito berjangka			*Time deposits*
Pihak berelasi - Rupiah			*Related parties - Rupiah*
Bank Rakyat Indonesia			*Bank Rakyat Indonesia*
Rupiah	260,000	1,184,511	*Rupiah*
US$	13,901	--	*US$*
Bank Mandiri			*Bank Mandiri*
Rupiah	20,000	20,000	*Rupiah*
Jumlah pihak berelasi	293,901	1,204,511	*Total related parties*
Pihak ketiga			*Third parties*
Lain-lain (masing-masing dibawah 5% dari jumlah)	33,000	--	*Others (each below 5 % of total)*
Investasi lain-lain			*Other investments*
Rupiah	7,252	12,375	*Rupiah*
Jumlah investasi jangka pendek	**334,153**	**1,216,886**	***Total short-term investments***
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun			*Interest rate per annum on time deposits*
Rupiah	4.00% - 7.25%	6.50% - 7.25%	*Rupiah*
US$	2.50%	--	*US$*
Jangka waktu			*Maturity*
Rupiah	6 Bulan/ *Months*	6 - 12 Bulan/ *Months*	*Rupiah*
US$	1 Bulan/ *Month*	--	*US$*

Risiko kredit pada aset keuangan tersebut dianggap dapat diabaikan, sebab pihak lawan merupakan bank terkemuka dengan peringkat kredit eksternal berkualitas tinggi.

The credit risk on these financial assets is considered negligible, since the counterparties are reputable banks with high quality external credit ratings.

14. Piutang Usaha / *14. Trade Receivables*

a. Berdasarkan langganan / *a. By debtor*

	2019 Rp	2018 Rp	
Pihak berelasi			*Related parties*
Badan Usaha Milik Negara	823,893	596,016	*State-Owned Enterprises*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4,057)	(2,370)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah pihak berelasi - bersih	819,836	593,646	*Total of related parties - net*
Pihak ketiga			*Third parties*
Umum	24,076,371	22,747,315	*Public*
TNI dan Polri	807,915	499,429	*Indonesian Armed Forces*
Institusi lainnya	1,379,073	1,248,971	*Other institutions*
Subjumlah	26,263,359	24,495,715	*Subtotal*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,952,657)	(1,286,698)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah pihak ketiga - bersih	24,310,702	23,209,017	*Total of third parties - net*
Bersih	**25,130,538**	**23,802,663**	***Net***

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

b. Berdasarkan umur piutang usaha yang belum diturunkan nilainya

b. By age category of receivables that are not impaired

	2019 Rp	2018 Rp	
Belum jatuh tempo	23,432,282	21,628,281	*Not yet due*
Lewat jatuh tempo			*Past due*
1 s/d 90 hari	1,248,157	1,424,523	*1 to 90 days*
91 s/d 360 hari	505,665	708,925	*91 to 360 days*
Lebih dari 360 hari	1,901,148	1,330,002	*More than 360 days*
Jumlah	**27,087,252**	**25,091,731**	***Total***
Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai			*Changes in the allowance for impairment losses*
Saldo awal tahun	(1,289,068)	(1,177,650)	*Balance at beginning of year*
Penambahan	(703,019)	(213,327)	*Additions*
Penghapusan	35,373	101,909	*Write-off*
Saldo akhir tahun	**(1,956,714)**	**(1,289,068)**	***Balance at end of year***

Piutang usaha Perusahaan dan PLN Batam dijamin dengan uang jaminan langganan jika terjadi kegagalan pembayaran (Catatan 35).

Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk secara kolektif untuk seluruh piutang yang telah lewat jatuh tempo.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang adalah cukup. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah piutang Perusahaan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai adalah sebesar Rp23.432.282. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada risiko kredit kualitas yang buruk karena Perusahaan memiliki jumlah pelanggan yang besar, tersebar mencakupi segmen pasar dan area geografis yang luas di seluruh Indonesia. Kesimpulan ini didukung juga oleh data historis kolektibilitas Perusahaan atas piutang usaha yang baik selama beberapa tahun.

The Company and PLN Batam trade receivables are secured by the customers' security deposits in case of default (Note 35).

Allowance for impairment losses were made collectively for all trade receivables which are past due.

Management believes that the allowances for impairment losses are adequate. As of December 31, 2019, the Company's receivables balance that is neither past due nor impaired amounted to Rp23,432,282. Management believes there is no heightened risk of poor credit quality of accounts receivable because it has a broad customer base, dispersed across varying market segments and geographic locations throughout Indonesia. This assessment is also supported by the Company's good historical collection rate of trade receivable across the years.

15. Piutang Subsidi Listrik / *15. Receivables on Electricity Subsidy*

Pada tahun 2019 dan 2018, Perusahaan menerima kelebihan subsidi masing-masing sebesar Rp954.683 dan Rp816.856 (Catatan 38). Saldo kelebihan penerimaan subsidi listrik dicatat sebagai utang kepada Pemerintah (Catatan 25).

In 2019 and 2018, the Company collected excess receipt of electricity subsidy for budget year 2019 amounted to Rp954,683 and Rp816,856 (Note 38). Balance of excess receipt of electricity subsidy is recorded as Government Loan (Note 25).

16. Piutang Kompensasi / *16. Compensation Receivables*

Piutang kompensasi merupakan piutang atas kompensasi dari Pemerintah atas penggantian Biaya Pokok Penyediaan ("BPP") tenaga listrik beberapa golongan pelanggan yang tarif penjualan tenaga listriknya lebih rendah dibandingkan BPP, dan belum diperhitungkan dalam subsidi yang diakui sebagai pendapatan atas dasar akrual.

Compensation receivables represents compensation from Government for reimbursement of Electricity Production Cost ("BPP") of several categories of customers whose tariffs for selling electricity are lower than BPP, and not yet calculated in subsidy is recognized as income on an accrual basis.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, piutang kompensasi Perusahaan adalah sebesar nihil dan Rp23.173.464.

As of December 31, 2019 and, 2018, the Company's compensation receivables is amounted nil and Rp23,173,464.

17. Piutang Lain-Lain / *17. Other Receivables*

	2019 Rp	2018 Rp	
Pihak berelasi			***Related party***
Piutang dari Pemerintah	45,426,981	7,456,452	*Receivable from the Government*
Subjumlah	45,426,981	7,456,452	*Subtotal*
Pihak Ketiga			***Third Parties***
Karyawan	518,418	376,212	*Employees*
Lain-lain	2,330,230	2,636,481	*Others*
Subjumlah	2,848,648	3,012,693	*Subtotal*
Jumlah	48,275,629	10,469,145	*Total*
Dikurangi bagian jangka pendek	47,451,084	9,507,768	*Less current portion*
Bagian jangka panjang	**824,545**	**961,377**	***Long-term portion***

Piutang dari Pemerintah

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-360/MK.02/2020 tanggal 6 Mei 2020 Pemerintah menyetujui penggantian Biaya Pokok Penyediaan ("BPP") dalam bentuk kompensasi dari Pemerintah atas kehilangan potensi pendapatan tenaga listrik untuk golongan tariff non-subsidi tahun 2019 sebesar Rp22.253.517.

Receivable from the Government

Based on the letter from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. S-360/MK.02/2020 dated May 6, 2020, The Government has approved reimbursement of Cost of Electricity supplies ("CCE") in the form of Government compensation for potential loss of electricity income for nonsubsidy tariff groups for the year 2019 amounting to Rp22,253,517.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-661/MK.02/2019 tanggal 15 Agustus 2019, Pemerintah menyetujui penggantian BPP dalam bentuk kompensasi dari Pemerintah atas kehilangan potensi pendapatan tenaga listrik untuk golongan tariff non-subsidi tahun 2018 sebesar Rp23.173.464.

Based on the letter from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. S-661/MK.02/2019 dated August 15, 2019, The Government has approved reimbursement of CCE in the form of Government compensation for potential loss of electricity income for nonsubsidy tariff groups for the year 2018 amounting to Rp23,173,464.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018 (In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-440/MK.02/2018 tanggal 28 Juni 2018, Pemerintah menyetujui penggantian BPP tenaga listrik atas beberapa golongan pelanggan yang tarif penjualan tenaga listriknya lebih rendah dibandingkan dengan BPP, dan belum diperhitungkan dalam subsidi listrik tahun 2017, sebesar Rp7.456.452 (Catatan 47).

Based on the letter from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. S-440/MK.02/2018 dated June 28, 2018, the Government has approved the Compensation of CCE on several categories of customers whose electricity sales rates were set lower than CCE, and has not been calculated in the electricity subsidy for the year 2017 amounting to Rp7,456,452 (Note 47).

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Pencatatan dan Penyajian Piutang Kompensasi Tarif Tenaga Listrik Tahun 2018 dan 2019 No. 0313.BA/KEU.02.04/A010600/2020 tanggal 15 Mei 2020 antara Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Perusahaan, disepakati mengenai pencatatan dan penyajian piutang lancar sebesar Rp45.426.981.

Based on Minutes of Reconciliation of Record and Presentation of the Electricity Tariff Compensation Receivables Year 2018 and 2019 No. 0313.BA/KEU.02.04/A010600/2020 dated May 15, 2020 between the Directorate General of Budget, the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and the Company, has been agreed on the recording and presentation of current receivables amounting to Rp45,426,981.

Berdasarkan Surat No. S-828/AG/2020 tanggal 15 Mei 2020 perihal Penyampaian Klasifikasi Utang Kompensasi Bahan Bakar Minyak dan Listrik pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat ("LKPP")/ Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara ("LKBUN") 2019 Audited, dinyatakan bahwa dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara, terhadap utang kompensasi listrik, dalam jangka pendek tahun 2020 direncanakan untuk dibayar kepada PLN sebesar Rp45.426.981.

Based on Letter No. S-828/AG/2020 dated May 15, 2020 concerning The Submission of Classification of the Fuel and Electricity Compensation Payable on LKPP/LKBUN Audited 2019, with respect to the financial capability of the State, electricity compensation payable that is planned to be paid to the Company amounted to Rp45,426,981 in the short term year 2020.

Sesuai dengan Berita Acara Verifikasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia No.BA-19/AG.6.3/2019 tanggal 31 Desember 2019, dinyatakan bahwa pembayaran kewajiban Pemerintah terhadap kebijakan tarif listrik tahun anggaran 2017 dilakukan melalui mekanisme set-off dengan liabilitas pajak Perusahaan kepada Pemerintah sebesar Rp7.456.452.

In accordance with the Verification Minutes of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No.BA-19/AG.6.3/2019 dated December 31, 2019, stated that the payment of government's liabilities towards electricity tariff policies on budget year 2017 was through a set-off mechanism with the Company's tax liabilities to the Government amounting to Rp7,456,452.

Karyawan
Piutang karyawan merupakan pinjaman kepemilikan rumah. Pelunasan piutang dilakukan melalui pemotongan gaji.

Employees
Account receivables from employees represent housing loans, which are paid monthly through salary deduction.

Tidak ada kerugian penurunan nilai yang dicatat sehubungan dengan piutang di atas. Tidak ada jumlah yang diklasifikasikan sebagai lewat jatuh tempo sehubungan dengan piutang tersebut. Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa piutang tersebut dapat tertagih.

No impairment loss has been recorded in relation to the receivables mentioned above. No amounts in relation to these receivables are classified as past due. The Company's management considers these receivables to be collectible.

18. Persediaan / *18. Inventories*

	2019 Rp	2018 Rp	
Batubara, bahan bakar dan pelumas	8,607,095	9,751,303	*Coal, fuel and lubricants*
Persediaan umum	2,519,385	2,935,361	*General supplies*
Switchgear dan jaringan	1,163,941	1,643,804	*Switchgear and network*
Alat ukur, pembatas dan kontrol	600,747	1,042,662	*Meter recording device and control equipment*
Transformator	93,702	139,098	*Transformers*
Kabel	91,942	136,156	*Wire*
Jumlah	13,076,812	15,648,384	*Total*
Penyisihan penurunan nilai	(142,579)	(141,817)	*Allowance for decline in value*
Bersih	**12,934,233**	**15,506,567**	***Net***
Mutasi penyisihan penurunan nilai			*Movement in allowance for declining in value*
Saldo awal tahun	(141,817)	(121,037)	*Balance at beginning of year*
Pemulihan (penambahan)	(762)	(20,780)	*Recovery (addition)*
Saldo akhir tahun	**(142,579)**	**(141,817)**	***Balance at end of year***

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan yang ditetapkan memadai untuk menutup risiko penurunan nilai persediaan.

Management believes that the allowance is adequate to cover possible losses on the decline in value of inventories.

Perusahaan dan entitas anak tidak mengasuransikan persediaan untuk menutup risiko atas kemungkinan kerugian yang timbul pada persediaan.

The Company and its subsidiaries do not have any insurance to cover the possible losses in inventories.

Jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp80.239.687 dan Rp84.908.100.

The total amount of inventories recognized as expenses during 2019 and 2018 amounted to Rp80,239,687 and Rp84,908,100, respectively.

19. Pajak Dibayar di Muka / *19. Prepaid Taxes*

	2019 Rp	2018 Rp	
Pajak penghasilan badan lebih bayar			*Overpayment of corporate income tax*
Perusahaan			*The Company*
2019	210,827	--	*2019*
2018	174,702	174,702	*2018*
Entitas anak			*Subsidiaries*
2019	762,348	--	*2019*
2018	992,952	992,952	*2018*
2017	521,690	521,690	*2017*
2016	716,827	716,827	*2016*
Bea materai	68,218	48,370	*Stamp duty*
Pajak pertambahan nilai	2,396,809	918,877	*Value added tax*
Pembayaran dimuka atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar	11,789,764	2,520,702	*Prepayment of Tax Assessment Letter for Underpayment*
Jumlah	**17,634,137**	**5,894,120**	***Total***

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Lihat Catatan 48 untuk informasi mengenai beban pajak penghasilan dan surat ketetapan pajak.

Refer to Note 48 for income tax expense information and tax assessment letters.

20. Biaya Dibayar Di Muka dan Uang Muka / *20. Prepaid Expenses and Advances*

	2019 Rp	2018 Rp	
Biaya dibayar di muka			*Prepaid expenses*
Sewa	151,285	115,158	*Rent*
Premi asuransi	5,357	9,628	*Insurance*
Subjumlah	156,642	124,786	*Subtotal*
Uang muka			*Advances*
Pembelian barang	58,228	65,452	*Purchases*
Lain-lain	991,915	817,334	*Others*
Subjumlah	1,050,143	882,786	*Subtotal*
Jumlah	**1,206,785**	**1,007,572**	***Total***

21. Modal Saham dan Saldo Laba / *21. Capital Stock and Retained Earnings*

Modal saham
Seluruh saham Perusahaan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan mempunyai modal dasar masing-masing sebesar Rp439.000.000 yang terbagi atas 439.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1 per saham.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa tanggal 18 Juli 2001, sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 43 tanggal 26 Oktober 2001 dari Haryanto, S.H., notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui antara lain:

- Melakukan konversi utang Perusahaan kepada Pemerintah sebesar Rp28.781.355, yang berasal dari tunggakan bunga dan denda penerusan pinjaman menjadi tambahan penyertaan modal Pemerintah. Konversi utang menjadi penyertaan modal telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai surat No. S-352/MK.06/2001 tanggal 20 Juni 2001.

Capital stock
The Company's shares of stock are fully owned by the Government of the Republic of Indonesia.

As of December 31, 2019 and 2018, the Company has authorized capital amounted to Rp439,000,000, consisting of 439,000,000 shares, with par value of Rp1 per share.

Based on the Extraordinary Stockholders' General Meeting ("RUPS") dated July 18, 2001, as stated in Deed No. 43 dated October 26, 2001 of Haryanto, S.H., notary in Jakarta, the stockholders approved among other items as follows:

- *Convert the Company's liability to the Government amounted Rp28,781,355, arising from overdue interest and penalty on two-step loans into Government Equity Participation. The conversion was approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in its decision letter No. S-352/MK.06/2001 dated June 20, 2001.*

- Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp28.781.354, sehingga modal ditempatkan dan disetor Perusahaan menjadi sebesar Rp46.107.154, terbagi atas 46.107.154 saham dengan nilai nominal Rp1 per saham.

Pada tanggal 1 Agustus 2001, tambahan penyertaan modal Pemerintah tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.61 tahun 2001.

Pada tanggal 4 Maret 2011, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2011 sehubungan dengan tambahan penyertaan modal Pemerintah pada Perusahaan sebanyak 90.226 saham atau sebesar Rp90.226. Tambahan penyertaan modal Pemerintah tersebut dilakukan dengan cara mengalihkan seluruh saham milik Pemerintah pada PT Pelayaran Bahtera Adhiguna.

Berdasarkan keputusan pemegang saham Perusahaan di luar Rapat Umum Pemegang Saham No. KEP-118/MBU/2011 tanggal 27 Mei 2011, sebagaimana tercantum dalam akta notaris No. 4 tanggal 5 Agustus 2011 dari Lenny Janis Ishak, S.H., notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui pengeluaran saham baru Perusahaan untuk diambil bagian oleh Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp90.226 atau sebanyak 90.226 saham. Penambahan penerbitan saham kepada Pemerintah Republik Indonesia berasal dari pengalihan 21.674 saham milik Pemerintah Republik Indonesia pada PT Pelayaran Bahtera Adhiguna kepada Perusahaan. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan akta pengalihan saham PT Pelayaran Bahtera Adhiguna dari Pemerintah Republik Indonesia kepada Perusahaan di tahun 2011.

- *Increase the subscribed and paid-up capital by Rp28,781,354, resulting in the Company's total subscribed and paid-up capital amounting to Rp46,107,154 consisting of 46,107,154 shares with par value of Rp1 per share.*

On August 1, 2001, the additional equity participation from Government has been stated in Government Regulation No.61 year 2001.

On March 4, 2011, the Government of the Republic of Indonesia issued Government Regulation No. 20 year 2011 relating to the increase in the Government's equity participation in the Company, consisting of 90,226 shares or an equivalent of Rp90,226. The increase in the Government's equity participation in the Company is through the transfer of the Government's share in PT Pelayaran Bahtera Adhiguna.

Based on the decision of the Company's shareholders at the General Shareholders Meeting No. KEP-118/MBU/2011, dated May 27, 2011, as stated in Deed No. 4, dated August 5, 2011 of Lenny Janis Ishak, S.H., notary in Jakarta, the stockholders approved the new issuance of the Company's shares as stocks to the Government of Republic of Indonesia in the amount of Rp90,226, equivalent to 90,226 shares. The additional issuance of shares to the Government of the Republic of Indonesia came from the transfer of 21,674 shares of the Government of the Republic of Indonesia in PT Pelayaran Bahtera Adhiguna to the Company. The Decision has been effective since the date the Company received the Deed of Transfer of PT Pelayaran Bahtera Adhiguna shares of the Government of the Republic of Indonesia to the Company in 2011.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Berdasarkan surat Menteri BUMN No. S-82/MBU/01/2016 tanggal 25 Januari 2016, sebagaimana tercantum dalam akte notaris No. 12 tanggal 22 Februari 2016, pernyataan Keputusan Menteri BUMN sebagai RUPS menyetujui hal-hal sebagai berikut:
- Peningkatan modal dasar menjadi sebesar Rp204.000.000.
- Penambahan penyertaan modal Negara sebesar 9.468.627 lembar saham dengan nilai Rp9.468.627 sehingga meningkatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi Rp55.666.007.

Based on letter of Minister of BUMN No. S-82/MBU/01/2016 dated January 25, 2016, as stated in notarial deed No. 12 dated February 22, 2016, the decision of Minister of BUMN as RUPS approved items as following:
- *Increase of authorized capital stock to Rp204,000,000.*
- *Additional Government's equity participation of 9,468,627 shares amounted to Rp9,468,627, increase in subscribed and paid-up capital to Rp55,666,007.*

Berdasarkan surat Menteri BUMN No. S-271/MBU/05/2017 tanggal 4 Mei 2017, pernyataan Keputusan Menteri BUMN sebagai RUPS menyetujui hal-hal sebagai berikut:
- Peningkatan modal dasar menjadi sebesar Rp439.000.000.
- Penambahan penyertaan modal negara sebesar 54.160.519 lembar saham dengan nilai Rp54.160.519 sehingga meningkatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi Rp109.826.527, dengan rincian sebagai berikut:
  - Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 dan No. 17 tahun 2016 tanggal 25 Mei 2016, sebesar masing-masing Rp8.860.208 dan Rp11.159.688.
  - Sebesar Rp10.580.623 berasal dari Penambahan Modal Negara Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2016 tanggal 8 Agustus 2016.
  - Sebesar Rp23.560.000 berasal dari Penambahan Modal Negara Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 91 tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016.

Based on letter of Minister of BUMN No. S-271/MBU/05/2017 dated May 4, 2017, the decision of Minister of BUMN as RUPS approved items as following:
- *Increase of authorized capital stock to Rp439,000,000.*
- *Additional Government's equity participation of 54,160,519 shares amounted to Rp54,160,519, increase in subscribed and paid-up capital to Rp109,826,527, with details as follows:*
  - *Based on Government Regulation No. 16 and No. 17 year 2016 dated May 25, 2016, amounting to Rp8,860,208 and Rp11,159,688, respectively.*
  - *Amounting to Rp10,580,623 were from Government's Equity Participation, based on Government Regulation No. 33 year 2016 dated August 8, 2016.*
  - *Amounting to Rp23,560,000 were from Government's Equity Participation, based on Government Regulation No. 91 year 2016 dated December 30, 2016.*

Berdasarkan surat Menteri BUMN No. S-220/MBU/04/2019 tanggal 12 April 2019, pernyataan Keputusan Menteri BUMN sebagai RUPS menyetujui Penambahan penyertaan modal Negara sebesar 5.354.476 saham dengan nilai Rp5.354.476 sehingga meningkatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi Rp115.181.002, dengan rincian sebagai berikut:

Based on letter of Minister of BUMN No. S-220/MBU/04/2019 dated April 12, 2019, the statement of the Decree of Minister of BUMN as RUPS approved additional Government's equity participation of 5,354,476 shares amounted to Rp5,354,476, thereby increasing the subscribed and paid-up capital to Rp115,181,002, with details as follows:

- Sebesar Rp132.967 berasal dari Penambahan Modal Negara Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2018 tanggal 8 Mei 2018.
- Sebesar Rp5.221.509 berasal dari Penambahan Modal Negara Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018.

Atas persetujuan Penyertaan Modal Negara tersebut, maka penyertaan modal Negara dalam proses penerbitan saham direklasifikasi ke modal ditempatkan dan disetor.

Saldo laba
Saldo laba terdiri dari:

i. Saldo laba yang ditentukan penggunaannya
Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perusahaan diharuskan untuk membuat penyisihan cadangan wajib hingga sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

Berdasarkan RUPS tahun 2017 No. RIS-01/D2.MBU/04/2018 pada tanggal 11 April 2018, terdapat saldo laba tahun 2017 yang ditetapkan sebagai cadangan umum sebesar Rp4.101.495.

Berdasarkan RUPS tahun 2018 No. RIS-45/D2.MBU/05/2019 pada tanggal 29 Mei 2019, terdapat saldo laba tahun 2018 yang ditetapkan sebagai cadangan umum sebesar Rp11.568.286.

Berdasarkan surat Menteri BUMN No.S-941/MBU/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Perubahan Keputusan RUPS PT PLN (Persero) tanggal 29 Mei 2019 menyetujui penetapan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2018 sebesar Rp11.568.286 untuk dividen sebesar Rp4.000.000 dan untuk cadangan perusahaan sebesar Rp7.568.286.

- *Amounting to Rp132,967 were from Government's Equity Participation, based on Government Regulation No. 15 year 2018 dated May 8, 2018.*
- *Amounting to Rp5,221,509 were from Government's Equity Participation, based on Government Regulation No. 58 year 2018 dated December 31, 2018.*

Following the approval for the Government Participation, therefore the stock subscription from Government in issuance process has been reclassified to subscribed and paid-up capital.

Retained earnings
Retained earnings consist of:

i. Appropriated retained earnings

Under Indonesian Limited Company Law, the Company is required to establish a statutory reserve amounting to at least 20% of the Company's subscribed and paid-up capital.

Based on RUPS for the year 2017 No. RIS-01/D2.MBU/04/2018 dated April 11, 2018, there is an allocation of appropriated from 2017 retained earnings amounting to Rp4,101,495.

Based on RUPS for the year 2018 No. RIS-45/D2.MBU/05/2019 dated May 29, 2019, there is an allocation of appropriated from the 2018 retained earnings amounting to Rp11,568,286.

Based on letter of Minister of BUMN No.S- 941/MBU/12/2019 dated December 20, 2019 regarding Amendment RUPS PT PLN (Persero) dated Mei 29, 2019, approved the allocation of net income attributable to the owner of the parent for fiscal year 2018 Rp11,568,286 for dividend Rp4,000,000 and Rp7,568,286 for retained earnings.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Saldo laba yang dicadangkan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp60.334.896 atau 52% dan Rp52.766.610 atau 48% dari jumlah modal Perusahaan yang ditempatkan dan disetor penuh.

The balance of the appropriated retained earnings as of December 31, 2019 and 2018 amounted to Rp60,334,896 or 52% and Rp52,766,610 or 48% of the Company's subscribed and paid-up capital.

ii. Saldo laba yang tidak ditentukan penggunaannya
Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo laba yang tidak ditentukan penggunaannya masing-masing sebesar Rp70.997.731 dan Rp78.251.316.

ii. Unappropriated retained earnings

On December 31, 2019 and 2018 the balance of the unappropriated retained earnings amounted to Rp70,997,731 and Rp78,251,316, respectively.

Dividen per lembar saham
Pada tahun 2019 dan 2018, Perusahaan membagikan total dividen kas untuk tahun 2018 dan 2017 masing-masing sejumlah Rp4.000.000 (nilai penuh) per lembar saham dan Rp308.715 (nilai penuh) per lembar saham.

Dividends per share
In 2019 and 2018, the Company paid a total cash dividend for 2018 and 2017 amounted to Rp4,000,000 (full amount) per share and Rp308,715 (full amount) per share, respectively.

22. Tambahan Modal Disetor dan Penyertaan Modal Negara dalam Proses Penerbitan Saham / *22. Additional Paid-In Capital and Stock Subscription from Government in Issuance Process*

a. Tambahan modal disetor / *a. Additional paid-in capital*

Tambahan modal disetor terdiri dari tambahan penyertaan modal Pemerintah yang diterima Perusahaan yang statusnya belum ditetapkan dan sebagai akibat keikutsertaan Perusahaan dalam pengampunan pajak, dengan rincian sebagai berikut:

Additional paid-in capital consists of the Government's additional equity participation received by the Company of which the status has not been determined and as a result of the Company's participation in tax amnesty program with the following details:

	2019 Rp	2018 Rp	
Bantuan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya :			*Government's participation which status has not been determined :*
Bantuan proyek	1,241,253	2,117,922	*Project aid*
Daftar isian pelaksanaan anggaran	8,537,341	17,920,047	*List of project fund*
Subjumlah	9,778,594	20,037,969	*Subtotal*
Pengampunan pajak :			*Tax amnesty :*
Aset pengampunan pajak	141,364	141,364	*Tax amnesty assets*
Jumlah	**9,919,958**	**20,179,333**	***Total***

Bantuan proyek merupakan bantuan luar negeri untuk bidang kelistrikan yang diteruskan Pemerintah Republik Indonesia kepada Perusahaan.

Project aid represents overseas aid for electricity projects, which was channelled by the Government of the Republic of Indonesia to the Company.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ("DIPA") merupakan penerimaan dari Pemerintah Republik Indonesia dalam bentuk proyek kelistrikan melalui Kementrian ESDM.

The List of Project Fund ("LFP") represents electricity projects received from the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of ESDM.

Bantuan Pemerintah daerah antara lain berupa tanah dan jaringan listrik yang disumbangkan kepada Perusahaan.

Local Government participation represents land and electricity equipment donated by the Local Government to the Company.

b. Penyertaan Modal Negara dalam proses penerbitan saham

Pada tanggal 28 Desember 2015, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2015 dan No. 125 tahun 2015 sehubungan dengan penambahan modal saham (Penyertaan Modal Pemerintah) sejumlah masing-masing Rp4.468.627 dan Rp5.000.000. Sejumlah Rp5.000.000 merupakan setoran tunai, sedangkan Rp4.468.627 merupakan reklasifikasi dari tambahan modal disetor.

b. Stock subscription from Government in issuance process

On December 28, 2015, the Government of Republic of Indonesia issued Regulation No. 42 year 2015 and No. 125 year 2015 regarding additional capital stock (Government's equity participation) amounting to Rp4,468,627 and Rp5,000,000, respectively. An amount of Rp5,000,000 was in cash, whereas Rp4,468,627 was reclassified from additional paid-in capital.

Per tanggal 31 Desember 2016, sesuai dengan akta notaris dari Lenny Janis Ishak, S.H., No. 12 tanggal 22 Februari 2016, akun ini telah direklasifikasi ke modal ditempatkan dan disetor.

As of December 31, 2016, based on notarial deed of Lenny Janis Ishak, S.H., No. 12 dated February 22, 2016, this account has been reclassified to subscribed and paid-up capital.

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 16, No. 17, dan No. 33 tahun 2016 sehubungan dengan penambahan modal saham (Penyertaan Modal Negara) sebesar masing-masing Rp8.860.208, Rp11.159.688 dan Rp10.580.623 yang merupakan reklasifikasi dari tambahan modal disetor.

The Government of Republic of Indonesia issued Government Regulation No. 16, No. 17 and No. 33 year 2016 regarding additional capital stock (Government's Equity Participation) amounting to Rp8,860,208, Rp11,159,688 and Rp10,580,623, respectively, which was resclassified from additional paid-in-capital.

Pada tangggal 30 Desember 2016, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 91 tahun 2016 sehubungan dengan penambahan modal saham (Penyertaan Modal Negara) sebesar Rp23.560.000.

On the December 30, 2016, the Government of Republic of Indonesia issued Government Regulation No. 91 year 2016 regarding additional capital stock (Government's Equity Participation) amounting to Rp23,560,000.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Berdasarkan surat Menteri BUMN No. S-271/MBU/05/2017 tanggal 4 Mei 2017, dilakukan reklasifikasi dari pernyataan modal negara dalam proses penerbitan saham ke modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp54.160.519.

Based on the Minister of BUMN's letter No. S-271/MBU/05/2017 dated May 4, 2017, the Company reclassified from stock subscription from Government in issuance process to subscribed and paid-up capital stock amounting to Rp54,160,519.

Berdasarkan surat Menteri BUMN No. S-220/MBU/04/2019 tanggal 12 April 2019, dilakukan reklasifikasi dari tambahan modal disetor ke modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp5.354.476.

Based on letter of Minister of BUMN's No. S-220/MBU/04/2019 dated April 12, 2019, the Company reclassified from additional paid-in capital to subscribed and paid-up capital stock amounting to Rp5,354,476.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2019 tanggal 19 Juli 2019 tentang penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan, menetapkan penambahan penyertaan modal Negara sebesar Rp6.500.000.

Based on Government Regulation No. 51 year 2019 dated July 19, 2019 regarding additional government's equity participation in to the Company's capital stock, established an addition of Government's equity amounting to Rp6,500,000.

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2019 tanggal 12 September 2019 sehubungan dengan penambahan modal saham (Penyertaan Modal Negara) sebesar Rp4.028.230 yang merupakan reklasifikasi dari tambahan modal disetor.

The Government of Republic of Indonesia issued Government Regulation No. 60 year 2019 dated September 12, 2019 regarding additional capital stock (Government's Equity Participation) amounting to Rp4,028,230 which was resclassified from additional paid-in-capital.

23. Pendapatan Ditangguhkan / *23. Deferred Revenue*

Akun ini merupakan penerimaan dari pelanggan yang mana jasa penyambungan terkait belum diselesaikan oleh Perusahaan. Rincian pendapatan ditangguhkan adalah sebagai berikut:

This account represents connection fees received from customers for which the connection services have not been completed by the Company. Details of the deferred revenue are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Saldo awal tahun	929,947	1,218,400	*Balance at beginning of year*
Penerimaan tahun berjalan	7,053,881	7,020,719	*Addition during the year*
Diakui sebagai pendapatan tahun berjalan	(6,934,597)	(7,309,172)	*Recognized as revenue during the year*
Saldo akhir tahun	**1,049,231**	**929,947**	***Balance at end of year***

24. Penerusan Pinjaman / *24. Two-Step Loans*

Akun ini merupakan pinjaman luar negeri Pemerintah Republik Indonesia yang tidak diikat jaminan dan diteruskan kepada Perusahaan untuk membiayai proyek-proyek Perusahaan. Rincian penerusan pinjaman adalah sebagai berikut:

This account represents overseas, collateral-free loans of the Government of the Republic of Indonesia which are passed on to the Company to finance its projects. The details of the two-step loans are as follows:

	2019				
	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen/ *Equivalent* Rp	Bagian jatuh tempo dalam satu tahun/ *Current maturities* Rp	Bagian jangka panjang/ *Long-term portion* Rp	Periode/ *Period **)*
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)					
US$					
IBRD - 4712 dan/*and* 7758 IND - 1165	29,365,457	408,209	134,964	273,245	2004 - 2023
IBRD - 7905 IND - 1235	18,273,292	254,017	11,709	242,308	2010 - 2034
IBRD - 7940 IND - 1238	177,079,036	2,461,576	116,756	2,344,820	2011 - 2034
IBRD - 8057 IND - 1244	34,989,545	486,390	10,794	475,596	2012 - 2035
IBRD 8280 ID - 1256	90,168,417	1,253,431	--	1,253,431	2014 - 2034
Asian Development Bank (ADB)					
US$					
ADB - 1982 INO - 1170	101,871,765	1,416,119	122,663	1,293,456	2004 - 2027
ADB - 1983 INO - 1171	69,193,360	961,857	83,315	878,542	2004 - 2027
ADB - 2619 INO - 1236	35,555,191	494,253	14,319	479,934	2010 - 2035
ADB 3015 INO - 1255	42,771,654	594,569	45,024	549,545	2014 - 2033
ADB 3083 INO - 1257	16,613,833	230,949	12,644	218,305	2014 - 2033
ADB 8276 INO - 1258	1,839,347	25,569	1,400	24,169	2014 - 2033
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau, Jerman (KFW)					
EUR					
KFW - 95.65.136 - 934a	1,081,944	16,866	16,866	--	1996 - 2020
KFW - 26180 - 1262	12,424,583	193,681	30,069	163,612	2019 - 2029
Japan Bank for International Cooperation (d/h The Export-Import Bank of Japan)					
JPY					
JBIC IP 512 - 1163	36,980,832,000	4,732,311	338,022	4,394,289	2004 - 2033
JBIC IP 513 - 1164	11,286,436,000	1,444,286	103,163	1,341,123	2004 - 2033
JBIC IP 515 - 1177	40,031,774,000	5,122,730	353,292	4,769,438	2004 - 2034
JBIC IP 516 - 1196	448,497,000	57,393	2,343	55,050	2004 - 2044
JBIC IP 517 - 1178	3,883,299,000	496,933	20,283	476,650	2004 - 2044
JBIC IP 525 - 1197	13,434,420,000	1,719,157	67,418	1,651,739	2005 - 2045
JBIC IP 526 - 1198	566,350,158	72,474	2,842	69,632	2005 - 2045
JBIC IP 527 - 1211	8,730,372,000	1,117,196	60,389	1,056,807	2007 - 2037
JBIC IP 532 - 1214	4,288,559,651	548,793	171	548,622	2006 - 2048
JBIC IP 537 - 1220	58,135,000	7,439	425	7,014	2009 - 2037
JBIC IP 538 - 1221	20,493,142,435	2,622,438	109,153	2,513,285	2009 - 2047
JBIC IP 539 - 1222	8,576,610,000	1,097,519	62,715	1,034,804	2009 - 2037
JICA IP 555 - 1231	1,383,331,089	177,020	24,257	152,763	2013 - 2039
JICA IP 556 - 1249	1,706,628,617	218,392	118,040	100,352	2013 - 2040
JICA - IP 560- 1253	3,617,210,597	462,882	--	462,882	2013 - 2053

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2019				
	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen/ *Equivalent* Rp	Bagian jatuh tempo dalam satu tahun/ *Current maturities* Rp	Bagian jangka panjang/ *Long-term portion* Rp	Periode/ *Period **)*
JBIC - 1243	966,529,998	123,684	49,481	74,203	2012 - 2022
JBIC LA No 1 - 1216	308,733,524	39,508	39,508	--	2008 - 2020
JBIC LA No 3 - 1233	2,623,547	336	336	--	2010 - 2020
JBIC LA No 5 - 1218	695,462,318	88,996	88,996	--	2008 - 2020
JBIC - LA 043190-004 -1250	483,540,047	61,877	26,422	35,455	2013 - 2025
JICA - IP 561- 1252	700,020,682	89,579	--	89,579	2013 - 2053
JICA - IP 572- 1256	225,060,444	28,800	--	28,800	2016 - 2055
Midland Bank Public Limited Company					
Rupiah					
Midland Bank - 798	--	14,936	14,936	--	1995 - 2020
Midland Bank - 818	--	686	686	--	1995 - 2020
Banque Paribas					
GBP					
Banque Paribas - 1063	3,036,348	55,413	18,471	36,942	1998 - 2022
EUR					
Banque Paribas - 1158	1,716,163	26,753	26,753	--	2002 - 2020
Calyon and BNP Paribas					
EUR					
BNP Paribas dan/*and* Calyon 1206	2,571,419	40,085	40,085	--	2006 - 2020
Kingdom of Belgium / Kerajaan Belgia - EUR					
Kerajaan Belgia - 1185	1,581,424	24,652	1,761	22,891	2005 - 2033
Efic Australia - AUD 1071	3,606,364	35,123	14,049	21,074	1997 - 2022
China Exim Bank 1248 - US$	86,463,792	1,201,933	141,503	1,060,430	2013 - 2027
China Exim Bank 1260 -US$	228,273,900	3,173,236	159,780	3,013,456	2015 - 2029
China Exim Bank 1261-US$	259,321,571	3,604,829	152,525	3,452,304	2015 - 2029
AG Francaise 101901F - 1237 - US$	9,121,875	126,803	23,055	103,748	2010 - 2035
AFD - 1254 - US$	31,333,055	435,560	51,242	384,318	2013 - 2028
AFD CID 1039 01H - 1259 - US$	7,935,255	110,308	13,180	97,128	2014 - 2026
Jumlah/*Total*		**37,977,546**	**2,725,805**	**35,251,741**	

*) Dalam jumlah penuh/ *In full amount*
**) Termasuk masa tenggang pembayaran/ *Include grace periods in terms of payments*

	2018				
	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen/ *Equivalent* Rp	Bagian jatuh tempo dalam satu tahun/ *Current maturities* Rp	Bagian jangka panjang/ *Long-term portion* Rp	Periode/ *Period **)*
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)					
US$					
IBRD - 4712 dan/*and* 7758 IND - 1165	38,906,916	563,411	138,170	425,241	2004 - 2023
IBRD - 7905 IND - 1235	18,718,505	271,800	5,882	265,918	2010 - 2034
IBRD - 7940 IND - 1238	166,482,040	2,415,121	52,315	2,362,806	2011 - 2034
IBRD - 8057 IND - 1244	35,591,153	507,035	--	507,035	2012 - 2035
IBRD 8280 ID - 1256	72,053,689	1,037,507	--	1,037,507	2014 - 2034

	2018				
	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen/ *Equivalent* Rp	Bagian jatuh tempo dalam satu tahun/ *Current maturities* Rp	Bagian jangka panjang/ *Long-term portion* Rp	Periode/ *Period **)*
Asian Development Bank (ADB)					
US$					
ADB - 1982 INO - 1170	109,873,094	1,591,072	115,867	1,475,205	2004 - 2027
ADB - 1983 INO - 1171	74,628,025	1,080,688	78,699	1,001,989	2004 - 2027
ADB - 2619 INO - 1236	36,489,489	528,404	13,530	514,875	2010 - 2035
ADB 3015 INO - 1255	35,424,077	512,976	21,290	491,686	2014 - 2033
ADB 3083 INO - 1257	14,728,088	213,277	9,367	203,910	2014 - 2033
ADB 8276 INO - 1258	1,631,254	23,622	1,036	22,586	2014 - 2033
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau, Jerman (KFW)					
EUR					
KFW - 95.65.136 - 934a	2,163,887	35,834	17,917	17,917	1996 - 2020
KFW - 26180 - 1262	12,378,655	204,988	--	204,988	2019 - 2029
Japan Bank for International Cooperation (d/h The Export-Import Bank of Japan)					
JPY					
JBIC IP 512 - 1163	39,622,320,000	5,195,084	346,339	4,848,745	2004 - 2033
JBIC IP 513 - 1164	12,092,610,000	1,585,524	105,702	1,479,822	2004 - 2033
JBIC IP 515 - 1177	42,792,586,000	5,610,754	361,984	5,248,770	2004 - 2034
JBIC IP 516 - 1196	466,803,000	61,205	2,400	58,805	2004 - 2044
JBIC IP 517 - 1178	4,041,801,000	529,941	20,782	509,159	2004 - 2044
JBIC 1187	125,143,532	16,408	16,408	--	2004 - 2019
JBIC IP 525 - 1197	13,961,260,000	1,830,532	69,077	1,761,455	2005 - 2045
JBIC IP 526 - 1198	588,559,968	77,169	2,912	74,257	2005 - 2045
JBIC IP 527 - 1211	9,202,319,639	1,206,563	61,482	1,145,081	2007 - 2037
JBIC IP 532 - 1214	111,191,486	14,579	175	14,404	2006 - 2048
JBIC IP 537 - 1220	61,457,000	8,058	436	7,622	2009 - 2037
JBIC IP 538 - 1221	18,128,726,201	2,376,950	111,839	2,265,111	2009 - 2047
JBIC IP 539 - 1222	9,066,702,000	1,188,782	64,258	1,124,523	2009 - 2037
JICA IP 555 - 1231	1,572,977,089	206,232	24,857	181,376	2013 - 2039
JICA IP 556 - 1249	1,706,628,617	223,765	--	223,765	2013 - 2040
JICA - IP 560- 1253	3,354,338,164	439,804	--	439,804	2013 - 2053
JBIC - 1243	1,353,197,998	177,425	50,698	126,727	2012 - 2022
JBIC LA No 1 - 1216	1,364,159,524	178,862	138,382	40,480	2008 - 2020
JBIC LA No 3 - 1233	165,579,547	21,710	21,366	344	2010 - 2020
JBIC LA No 4 - 1234	473,215,100	67,294	62,046	--	2010 - 2020
JBIC LA No 5 - 1218	1,425,168,318	186,861	95,675	91,186	2008 - 2020
JBIC - LA 043190-004 -1250	513,239,344	62,046	40,608	26,686	2013 - 2025
JICA - IP 561- 1252	589,748,083	77,325	--	77,325	2013 - 2053
JICA - IP 572- 1256	132,973,744	17,435	--	17,435	2016 - 2055
Midland Bank Public Limited Company					
Rupiah					
Midland Bank - 798	--	29,873	14,936	14,936	1995 - 2020
Midland Bank - 818	--	2,058	1,372	686	1995 - 2020
Banque Paribas					
Banque Paribas 1063- GBP	4,048,465	74,380	18,595	55,786	1998 - 2022
EUR					
Banque Paribas - 1158	3,576,215	59,221	30,802	28,419	2002 - 2020
Calyon and BNP Paribas					
EUR					
BNP Paribas dan/*and* Calyon 1206	7,714,256	127,747	85,164	42,582	2006 - 2020

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2018				
	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen/ *Equivalent* Rp	Bagian jatuh tempo dalam satu tahun/ *Current maturities* Rp	Bagian jangka panjang/ *Long-term portion* Rp	Periode/ *Period **)*
Kingdom of Belgium / Kerajaan Belgia - EUR					
Kerajaan Belgia - 1185	1,694,383	28,059	1,871	26,188	2005 - 2033
Efic Australia - AUD 1071	5,048,910	51,556	14,730	36,826	1997 - 2022
China Exim Bank 1248 - US$	96,703,626	1,399,608	147,407	1,252,202	2013 - 2027
China Exim Bank 1260 -US$	198,538,284	2,851,331	--	2,851,330	2015 - 2029
China Exim Bank 1261-US$	194,328,655	2,800,762	--	2,800,762	2015 - 2029
AG Francaise 101901F - 1237 - US$	14,121,875	204,499	72,405	132,094	2010 - 2035
AFD - 1254 - US$	36,283,055	525,415	71,681	453,734	2013 - 2028
AFD CID 1039 01H - 1259 - US$	9,427,154	135,000	19,811	115,189	2014 - 2026
Jumlah/*Total*		**38,635,552**	**2,530,273**	**36,105,279**	

*) Dalam jumlah penuh/ *In full amount*
**) Termasuk masa tenggang pembayaran/ *Include grace periods in terms of payments*

	2019	2018	
Tingkat suku bunga per tahun			***Interest rate per annum***
Rupiah	8.37%	7.50%	*Rupiah*
US$	2.7305% - 5.92%	2.105 % - 5.92%	*US$*
JPY	0.012% - 4.82%	0.012% - 4.82%	*JPY*
EUR	0.35% - 5.67%	0.35% - 5.67%	*EUR*
AUD	3.85%	3.85%	*AUD*
GBP	3.693%	3.693%	*GBP*

Perusahaan melakukan pembayaran pokok dan bunga penerusan pinjaman sesuai dengan jadwal pembayaran dan memenuhi pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam perjanjian penerusan pinjaman.

The Company made payments of principal and interest on the two-step loans in accordance with the schedule of payment and complied with the restrictions specified within the agreements of the two-step loans.

Rincian penerusan pinjaman dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

Details of the two-step loans in foreign currencies are as follows:

	2019		2018		
	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen/ *Equivalent* Rp	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen/ *Equivalent* Rp	
US$	1,240,170,346	17,239,608	1,150,578,646	16,661,529	*US$*
JPY	158,867,568,117	20,329,743	162,912,639,354	21,360,307	*JPY*
EUR	19,375,532	302,037	27,527,396	455,848	*EUR*
Lain-lain **)	6,512,892	90,536	8,696,746	125,938	*Others **)*
Jumlah		**37,961,924**		**38,603,622**	***Total***

*) Dalam jumlah penuh
**) Penerusan pinjaman dalam mata uang asing lainnya disajikan dalam jumlah setara US$ menggunakan kurs tanggal pelaporan

*) *In full amount*
**) *Two-step loans denominated in other foreign currencies are presented as US$ equivalents using the exchange rates prevailing at the reporting date*

Beberapa perjanjian penerusan pinjaman dengan IBRD, ADB, dan beberapa kreditur lain mensyaratkan bahwa Perusahaan wajib memenuhi beberapa pembatasan keuangan

Several two-step loans agreements with IBRD, ADB and several others creditor requires the Company to comply with certain financial covenants, which consist of the minimum

tertentu, antara lain, jumlah minimal *debt sevice coverage ratio*, jumlah maksimal *debt to equity ratio*, dan jumlah minimal *self financing ratio*.

amount of debt service coverage ratio, the maximum amount of debt to equity ratio, and the minimum amount of self financing ratio.

25. Utang Kepada Pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah Non-bank / *25. Government and Non-Bank Government Financial Institution Loans*

	2019 Rp	2018 Rp	
PT Sarana Multi Infrastruktur	5,115,204	5,827,238	*PT Sarana Multi Infrastruktur*
Pengembalian subsidi tahun anggaran 2018 (Catatan 15)	--	816,856	*Refund of subsidy budget years 2018 (Note 15)*
Pengembalian subsidi tahun anggaran 2019 (Catatan 15)	954,683	--	*Refund of subsidy budget years 2019 (Note 15)*
Rekening Dana Investasi No. RDI-393/DP3/2001	288,158	560,184	*Investment Fund Account No. RDI-393/DP3/2001*
Jumlah	6,358,045	7,204,278	*Total*
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	1,998,476	1,860,649	*Less current maturities*
Bagian jangka panjang	**4,359,569**	**5,343,629**	***Long-term portion***

Tingkat suku bunga per tahun			***Interest rate per annum***
Rupiah	4.00% - 5.25%	4.00% - 5.25%	*Rupiah*

Rekening Dana Investasi No. RDI-393/DP3/2001 / *Investment Fund Account No. RDI-393/DP3/2001*

	2019 Rp	2018 Rp	
Pokok pinjaman	293,793	587,585	*Principal*
Perbedaan nilai wajar	(5,635)	(27,401)	*Fair value difference*
Jumlah	**288,158**	**560,184**	***Total***

Sesuai Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-352/MK.06/2001, pada tanggal 20 Juni 2001 Perusahaan dan Pemerintah Republik Indonesia menyetujui restrukturisasi tunggakan angsuran pokok penerusan pinjaman sebesar Rp5.288.268 menjadi pinjaman berjangka waktu 20 tahun sampai dengan 30 Juli 2021. Pinjaman ini dibayar secara angsuran setiap semester sebesar Rp146.896.

As stated on the letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. S-352/MK.06/2001, on June 20, 2001 the Company and the Government of the Republic of Indonesia agreed to restructure the overdue principal of the two-step loans amounting to Rp5,288,268 to become 20 years period matured on July 30, 2021. The loan paid-in semi-annual installments of Rp146,896.

PT Sarana Multi Infrastruktur / *PT Sarana Multi Infrastruktur*

	2019 Rp	2018 Rp	
Pokok pinjaman	5,250,000	6,000,000	*Principal*
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(12,794)	(16,434)	*Unamortized transaction cost*
Perbedaan nilai wajar	(122,002)	(156,328)	*Fair value difference*
Jumlah	**5,115,204**	**5,827,238**	***Total***

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tanggal 13 Desember 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman lunak dari Pusat Investasi Pemerintah ("PIP") Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebesar Rp7.500.000.

On December 13, 2011, the Company obtained soft loan facility from the Government Investment Center ("PIP") under the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia amounting to Rp7,500,000.

Pinjaman ini digunakan untuk membiayai pengadaan dan penggantian trafo, instalasi perlengkapan transmisi dan distribusi serta investasi lainnya.

This loan was used to finance the procurement and replacement of transformers, the equipment installation of transmission and distribution and also other capital expenditures.

Pada tanggal 23 Desember 2015, telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian pengalihan antara PIP dan PT Sarana Multi Infrastruktur ("SMI") yang mengalihkan seluruh hak dan kewajiban PIP kepada SMI pada saat ini maupun pada masa yang akan datang yang meliputi kepentingan dan tanggungjawab dalam perjanjian investasi Perusahaan.

On December 23, 2015, PIP and PT Sarana Multi Infrastruktur ("SMI") has signed a novation agreement which transfers all current and future rights and obligations of PIP to SMI, including interest and responsibility in the Company's investment agreement.

Sehubungan dengan fasilitas pinjaman tersebut Perusahaan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian-perjanjian tersebut.

In relation to this loan facility, the Company has complied with the covenants in the borrowing agreement.

Utang kepada Pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah non-bank berdasarkan jadwal pembayaran pokok, adalah sebagai berikut:

Government and non-bank Government Financial Institution Loans by installment schedules at nominal amount, are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Dibayarkan:			*Payable to:*
Dalam satu tahun	1,998,476	1,860,649	*Within one year*
Pada tahun kedua	750,000	1,043,792	*In the second year*
Pada tahun ketiga	750,000	750,000	*In the third year*
Pada tahun keempat	750,000	750,000	*In the fourth year*
Setelah lima tahun	2,250,000	3,000,000	*After five years*
Jumlah	**6,498,476**	**7,404,441**	***Total***

26. Utang Sewa Pembiayaan / *26. Lease Liabilities*

Akun ini terdiri dari utang Perusahaan kepada PT Central Java Power ("CJP") dalam rangka Perjanjian Sewa Pembiayaan atas pengadaan pembangkitan tenaga listrik 4x660MW Tanjung Jati B Unit A, B, C, D, dan beberapa kontrak sewa sehubungan dengan pembangunan kompresor gas di berbagai daerah.

This account represents the Company's liabilities to PT Central Java Power ("CJP") in relation to the Financial Lease Agreement 4x660MW on the acquisition of Tanjung Jati B Unit A, B, C, D, and several lease contracts in relation to the construction of gas compressors and gas pipes with the Build, Operate and Transfer mechanism at the various locations.

Sehubungan dengan Perjanjian Sewa Pembiayaan CJP, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapura bertindak sebagai *Escrow Agent* dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo bertindak sebagai *Security Agent*. Untuk memenuhi persyaratan *Financial Lease Agreement* ("*FLA*"), Perusahaan telah membentuk dana cadangan pada *Escrow Agent* untuk jaminan pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan pengadaan bahan bakar serta untuk angsuran sewa pembiayaan (Catatan 10).

In relation to the CJP Finance Lease Agreement, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore acts as the Escrow Agent and Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo acts as the Security Agent. In order to fulfill the requirements of Financial Lease Agreement ("FLA"), the Company established a reserve account to an Escrow Agent for guarantee of operations, maintenance and fuel procurement and for lease payments (Note 10).

Nilai tunai pembayaran minimum atas utang sewa pembiayaan tersebut pada tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The present value of minimum lease payments for such lease liabilities in 2019 and 2018 are as follows:

Berdasarkan jatuh tempo / ***By due date***

	2019 Rp	2018 Rp	
Pembayaran jatuh tempo dalam waktu:			*Minimum lease payments due:*
Tidak lebih dari satu tahun	4,007,615	4,406,094	*Not later than one year*
Antara lebih dari satu tahun sampai lima tahun	12,810,838	16,775,304	*Later than one year and not later than five years*
Lebih dari lima tahun	2,079,912	2,607,402	*Later than five years*
Jumlah pembayaran minimum sewa pembiayaan	18,898,365	23,788,800	*Total minimum lease payments*
Dikurangi bunga	4,788,881	6,695,835	*Less interest*
Nilai tunai pembayaran minimum sewa pembiayaan masa datang	14,109,484	17,092,965	*Present value of future minimum lease payments*
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	2,540,107	2,624,629	*Less current maturity*
Bagian jangka panjang	**11,569,377**	**14,468,336**	***Long-term portion***

Berdasarkan pemberi sewa / ***By lessor***

	2019 Rp	2018 Rp	
Pihak berelasi			*Related party*
PT Wijaya Karya Industri Energi - Rupiah	--	86,466	*PT Wijaya Karya Industri Energi- - Rupiah*
Pihak Ketiga			*Third parties*
PT Central Java Power - JPY	13,262,625	15,865,228	*PT Central Java Power - JPY*
PT Batam Trans Gasindo - US$	779,844	825,477	*PT Batam Trans Gasindo - US$*
PT Enviromate Technology International - Rupiah	67,015	86,504	*PT Enviromate Technology International - Rupiah*
PT Eramas Persada Energy - US$	--	123,942	*PT Eramas Persada Energy - US$*
PT Muba Daya Pratama - Rupiah	--	105,348	*PT Muba Daya Pratama - Rupiah*
Subjumlah	14,109,484	17,006,499	*Subtotal*
Jumlah	14,109,484	17,092,965	*Total*
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	2,540,107	2,624,629	*Less current maturity*
Bagian jangka panjang	**11,569,377**	**14,468,336**	***Long-term portion***
Tingkat suku bunga per tahun:			*Interest rate per annum:*
Rupiah	8.18% - 22.43%	8.18% - 22.43%	*Rupiah*
US$	14.01% - 18.75%	14.01% - 18.75%	*US$*
JPY	7.60% - 11.00%	7.60% - 11.00%	*JPY*

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018 (In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Rincian utang sewa pembiayaan dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

Details of the lease liabilities in foreign currencies are as follows:

	2019		2018		
	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen/ *Equivalent* Rp	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen/ *Equivalent* Rp	
JPY	103,641,300,467	13,262,625	121,002,299,155	15,865,228	*JPY*
US$	56,099,845	779,844	65,563,142	949,419	*US$*
Jumlah		**14,042,469**		**16,814,647**	***Total***

*) Dalam jumlah penuh

*) *In full amount*

Beban bunga dan keuangan terkait sewa pembiayaan pada tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp4.903.022 dan Rp4.221.779 (Catatan 46).

Interest expense and financial charges related to finance leases in 2019 dan 2018 amounted to Rp4,903,022 and Rp4,221,779, respectively, (Note 46).

27. Utang Bank / *27. Bank Loans*

	2019 Rp	2018 Rp	
Pinjaman terkait program percepatan			***Loans related to fast track program***
Pihak berelasi			***Related parties***
Bank Negara Indonesia	2,099,968	2,766,949	*Bank Negara Indonesia*
Bank DKI	1,827,679	2,078,962	*Bank DKI*
Bank Rakyat Indonesia	149,547	686,744	*Bank Rakyat Indonesia*
Bank Mandiri	--	373,287	*Bank Mandiri*
Jumlah pihak berelasi	**4,077,194**	**5,905,942**	***Total related parties***
Pihak ketiga			***Third parties***
The Export-Import Bank of China	8,884,062	11,139,687	*The Export-Import Bank of China*
Barclays Bank Plc and China Development Bank	5,098,127	6,691,520	*Barclays Bank Plc and China Development Bank*
Bank of China Limited	4,121,210	6,223,761	*Bank of China Limited*
Bank Bukopin	608,270	917,523	*Bank Bukopin*
Bank Central Asia	--	146,535	*Bank Central Asia*
Jumlah pihak ketiga	**18,711,669**	**25,119,026**	***Total third parties***
Subjumlah	**22,788,863**	**31,024,968**	***Subtotal***
Pinjaman tidak terkait program percepatan			***Loans not related to fast track program***
Pihak berelasi			***Related parties***
Bank Rakyat Indonesia	33,902,610	22,584,320	*Bank Rakyat Indonesia*
Bank Mandiri	23,650,000	24,525,000	*Bank Mandiri*
Bank Negara Indonesia	16,214,286	17,571,429	*Bank Negara Indonesia*
Bank DKI	--	1,000,000	*Bank DKI*
Bank Tabungan Negara	1,500,000	--	*Bank Tabungan Negara*
Jumlah pihak berelasi	**75,266,896**	**65,680,749**	***Total related parties***

	2019 Rp	2018 Rp	
Pihak ketiga			***Third parties***
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	25,511,253	23,813,161	*Sumitomo Mitsui Banking Corporation*
Bank Central Asia	16,000,000	17,000,000	*Bank Central Asia*
Asian Development Bank	14,114,874	11,561,041	*Asian Development Bank*
Bank DBS Indonesia	9,730,700	--	*DBS Bank Indonesia*
Japan Bank for International Cooperation	9,631,014	5,489,422	*Japan Bank for International Cooperation*
Bank CIMB Niaga	7,500,000	8,000,000	*Bank CIMB Niaga*
International Bank for Reconstruction and Development	6,427,389	4,888,397	*International Bank for Reconstruction and Development*
Export Development Canada	4,952,231	5,701,894	*Export Development Canada*
Bank Maybank Indonesia	4,300,000	4,300,000	*Bank Maybank Indonesia*
Credit Agricole CIB Paris	1,662,264	208,287	*Credit Agricole CIB Paris*
Standard Chartered Bank	1,616,977	1,932,432	*Standard Chartered Bank*
Islamic Development Bank	1,464,828	288,129	*Islamic Development Bank*
Tokyo Mitsubishi Bank	1,390,100	--	*Tokyo Mitsubishi Bank*
Mizuho Bank	906,165	--	*Mizuho Bank*
Korea Exim Bank	904,723	916,845	*Korea Exim Bank*
Kreditanstalt fur Wiederaufbau	626,464	19,323	*Kreditanstalt fur Wiederaufbau*
BNP Paribas SA	579,271	--	*BNP Paribas SA*
Servizi Assicurativi del Commercio Estero	522,910	605,987	*Servizi Assicurativi del Commercio Estero*
Agence Francaise De Development	456,272	375,849	*Agence Francaise De Development*
Export Guarantee and Insurance Corporation	216,790	208,676	*Export Guarantee and Insurance Corporation*
Bank Gospodarstwa Kratowego	33,130	--	*Bank Gospodarstwa Kratowego*
Jumlah pihak ketiga	**108,547,355**	**85,309,443**	***Total third parties***
Subjumlah	**183,814,251**	**150,990,192**	***Subtotal***
Jumlah	**206,603,114**	**182,015,160**	***Total***
Biaya transaksi belum diamortisasi	(885,956)	(903,426)	*Unamortized transaction cost*
Jumlah bersih	**205,717,158**	**181,111,734**	***Total net***
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun			***Less current maturities***
Pinjaman terkait program percepatan			***Loans related to fast track program***
Pihak berelasi			***Related parties***
Bank Negara Indonesia	349,995	666,981	*Bank Negara Indonesia*
Bank DKI	317,857	354,881	*Bank DKI*
Bank Rakyat Indonesia	149,547	537,197	*Bank Rakyat Indonesia*
Bank Mandiri	--	373,287	*Bank Mandiri*
Jumlah pihak berelasi	**817,399**	**1,932,346**	***Total related parties***
Pihak ketiga			***Third parties***
Bank of China Limited	1,853,274	1,930,599	*Bank of China Limited*
The Export-Import Bank of China	1,809,453	1,884,950	*The Export-Import Bank of China*
Barclays Bank Plc and China Development Bank	1,325,381	1,380,681	*Barclays Bank Plc and China Development Bank*
Bank Bukopin	309,253	309,253	*Bank Bukopin*
Bank Central Asia	--	146,535	*Bank Central Asia*
Jumlah pihak ketiga	**5,297,361**	**5,652,018**	***Total third parties***
Subjumlah	**6,114,760**	**7,584,364**	***Subtotal***
Pinjaman tidak terkait program percepatan			***Loans not related to fast track program***
Pihak berelasi			***Related parties***
Bank Rakyat Indonesia	3,214,286	7,227,178	*Bank Rakyat Indonesia*
Bank Negara Indonesia	2,642,858	1,357,143	*Bank Negara Indonesia*
Bank Mandiri	2,589,286	875,000	*Bank Mandiri*
Bank DKI	--	1,000,000	*Bank DKI*
Jumlah pihak berelasi	**8,446,430**	**10,459,321**	***Total related parties***

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2019 Rp	2018 Rp	
Pihak ketiga			***Third parties***
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	4,170,300	4,344,300	*Sumitomo Mitsui Banking Corporation*
CIMB Niaga	--	4,000,000	*CIMB Niaga*
Bank Central Asia	1,000,000	1,000,000	*Bank Central Asia*
Export Development Canada	521,287	543,037	*Export Development Canada*
Japan Bank for International Corporation	835,038	--	*Japan Bank for International Corporation*
Standard Chartered Bank	202,122	214,715	*Standard Chartered Bank*
Kreditanstalt fur wiederaufbau	128,916	--	*Kreditanstalt fur wiederaufbau*
Korean Exim Bank	82,248	--	*Korean Exim Bank*
Servizi Assicurativi del Commercio Estero	47,537	--	*Servizi Assicurativi del Commercio Estero*
Export Guarantee and Insurance Corporation	19,708	--	*Export Guarantee and Insurance Corporation*
Agence Francaise De Development	9,196	--	*Agence Francaise De Development*
Mizuho Bank	115,796	--	*Mizuho Bank*
Jumlah pihak ketiga	**7,132,148**	**10,102,052**	***Total third parties***
Subjumlah	**15,578,578**	**20,561,373**	***Subtotal***
Jumlah bagian jatuh tempo dalam satu tahun	21,693,338	28,145,737	*Total current maturities*
Bagian jangka panjang	**184,023,820**	**152,965,997**	***Long-term portion***

	2019	2018	
Tingkat suku bunga per tahun			***Interest rate per annum***
Rupiah	6.3654% - 10.17%	6.2019% - 9.96%	*Rupiah*
US$	2.41255% - 6.7209%	1.90583% - 6.7209%	*US$*
JPY	1.58% - 1.74%	1.58% - 1.74%	*JPY*
EUR	0.00% - 2.20%	0.00% - 2.20%	*EUR*

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, rincian utang bank dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2019 and 2018, details of bank loans in foreign currency are as follows:

	2019		2018		
	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen/ *Equivalent* Rp	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen/ *Equivalent* Rp	
US$	6,292,235,622	87,468,367	5,043,916,295	73,040,952	*US$*
EUR	304,144,617	4,741,188	177,151,348	2,933,591	*EUR*
JPY	51,897,893,380	6,641,197	31,192,959,687	4,089,868	*JPY*
Jumlah		**98,850,752**		**80,064,411**	***Total***

*) Dalam jumlah penuh

*) *In full amount*

Pinjaman terkait program percepatan
Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari beberapa bank untuk membiayai 85% dari nilai kontrak *Engineering Procurement and Construction* ("EPC") untuk program percepatan. Pinjaman ini sepenuhnya dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Perpres No. 91 Tahun 2007, pengganti dari Perpres No. 86 Tahun 2006, tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara. Sehubungan dengan pinjaman ini, Perusahaan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan umum sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian pinjaman.

Loans related to fast track program
The Company obtained loan facilities from several banks to finance 85% of the value of Engineering Procurement and Construction ("EPC") contracts for its fast track program. These loans are fully guaranteed by the Government of the Republic of Indonesia in accordance with Perpres No. 91 Year 2007, which superseded Perpres No. 86 Year 2006, regarding the Grant of Government Guarantee for Construction of a Coal-Fired Power Plant. In connection with these loans, the Company is restricted by general rules as described in the loan agreements.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, rincian fasilitas pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2019 and 2018, details of such loan facilities are as follows:

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek/ *Creditor and project funded*	Fasilitas maksimum/ *Maximum facility* US$ *)	Fasilitas maksimum/ *Maximum facility* Rp	Pembayaran kembali/ *Repayment* 2019 Rp	Pembayaran kembali/ *Repayment* 2018 Rp	Premi asuransi/ *Insurance premium* US$ *)	Tanggal jatuh tempo/ *Date of maturity*
1	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank of China Limited/ PLTU 1 Indramayu, Jawa Barat/ *West Java*	592	--	779,169	785,255	55	27 Mei 2021/ *May 27, 2021*
2	The Export/ Import Bank of China/ PLTU 2 Paiton, Jawa Timur/ *East Java*	331	--	344,331	335,422	32	30 Januari 2023/ *January 30, 2023*
3	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Negara Indonesia/ PLTU 2 Labuan, Banten	--	2,741,298	--	195,807	--	23 Juli 2018/ *July 23, 2018*
4	The Export Import Bank of China/ PLTU 1 Suralaya, Banten	284	--	335,965	327,272	27	30 Januari 2023/ *January 30, 2023*
5	Barclays Capital, The Investment Banking Division of Barclays Bank PLC and China Development Bank/ PLTU 1 Rembang, Jawa Tengah/ *Central Java*	262	--	370,944	374,767	--	3 Desember 2021/ *December 3, 2021*
6	Bank DKI/ PLTU Naganraya PLTU 2 Nusa Tenggara Timur PLTU 1 Nusa Tenggara Barat PLTU Sumatera Barat PLTU 2 Kalimantan Barat PLTU 4 Bangka Belitung PLTU Maluku Utara PLTU Sulawesi Tengah PLTU 1 Nusa Tenggara Timur PLTU 2 Sulawesi Utara PLTU Gorontalo PLTU 2 Nusa Tenggara Timur PLTU 1 Nusa Tenggara Barat PLTU 4 Bangka Belitung PLTU 2 Nusa Tenggara Barat PLTU 1 Kalimantan Tengah PLTU Maluku Utara	--	4,732,000	37,024	295,737	--	24 April 2019/ *April 24, 2019*
7	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Rakyat Indonesia PLTU Sulawesi Selatan/ *South Sulawesi* PLTU 3 Bangka Belitung PLTU 2 Papua PLTU Kalimantan Selatan/ *South Kalimantan*	--	2,074,739	--	193,903	--	30 Januari 2019/ *January 30, 2019*
8	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Mandiri/ PLTU 1 Rembang, Jawa Tengah/ *Central Java*	--	1,911,480	--	68,267	--	18 April 2018/ *April 18, 2018*
9	Bank Mega/ PLTU 2 Pelabuhan Ratu, Jawa Barat/ *West Java*	--	1,874,315	--	257,663	--	29 Juli 2018/ *July 29, 2018*
10	Bank Bukopin/ PLTU 3 Teluk Naga, Banten	--	1,606,612	178,512	178,512	--	29 Juli 2021/ *July 29, 2021*

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek/ *Creditor and project funded*	Fasilitas maksimum/ *Maximum facility*		Pembayaran kembali/ *Repayment*		Premi asuransi/ *Insurance premium*	Tanggal jatuh tempo/ *Date of maturity*
		US$ *)	Rp	2019 Rp	2018 Rp	US$ *)	
11	Bank Mega/ PLTU 2 Nusa Tenggara Barat PLTU Gorontalo PLTU 2 Sulawesi Utara, Manado PLTU Kep Riau, Tanjung Balai Karimun PLTU 1 Nusa Tenggara Timur, Ende PLTU Sulawesi Tenggara 2 PLTU 1 Kalimantan Tengah	--	1,498,513	--	195,418	--	29 Juli 2018/ *July 29, 2018*
12	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Negara Indonesia/ PLTU 1 Indramayu, Jawa Barat/ *West Java*	--	1,272,913	--	41,106	--	23 Februari 2018/ *February 23, 2018*
13	Bank Mega/ PLTU Lampung, Lampung PLTU 2 Sumatera Utara, Medan	--	1,240,661	--	115,154	--	29 Juli 2018/ *July 29, 2018*
14	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Central Asia/ PLTU 2 Labuan, Banten	--	1,077,578	--	75,543	--	18 April 2018/ *April 18, 2018*
15	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Rakyat Indonesia/ PLTU Sulawesi Selatan/ *South Sulawesi* PLTU 3 Bangka Belitung PLTU 2 Papua PLTU Kalimantan Selatan/ *South Kalimantan*	--	1,151,005	41,107	164,429	--	30 Januari 2019/ *January 30, 2019*
	Bank Bukopin/ PLTU 1 Pacitan, Jawa Timur/ *East Java*	--	1,045,924	130,741	130,741	--	29 Juli 2021/ *July 29, 2021*
17	Bank Mega/ PLTU 1 Suralaya Baru, Banten	--	735,387	--	61,151	--	18 April 2018/ *April 18, 2018*
	Bank Mega/ PLTU 2 Paiton, Jawa Timur/ *East Java*	--	600,635	--	42,800	--	18 April 2018/ *April 18, 2018*
19	The Export Import Bank of China/ PLTU Pelabuhan Ratu	482		665,997	648,766	46	*21 Januari 2025/* *January 21, 2025*
	PLTU NAD	124		153,434	149,464	12	*21 Juli 2024/* *July 21, 2024*
20	Bank of China Limited/ PLTU Teluk Naga	455	--	607,678	628,421	46	4 Mei 2022/ *May 4, 2022*
21	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Negara Indonesia/ PLTU Tanjung Awar-awar	--	1,155,352	41,263	165,050	--	30 Januari 2019/ *January 30, 2019*
22	The Export Import Bank of China/ PLTU Pacitan	293	--	359,255	349,960	29	2 Juli 2025/ *July 2, 2025*
23	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Rakyat Indonesia/ PLTU Lampung PLTU Sumatera Utara/ *North Sumatera*	--	3,941,772	346,543	346,543	--	14 Oktober 2019/ *October 14, 2019*
24	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Mandiri/ Transmisi/ *Transmission*	--	2,613,012	373,287	373,287	--	14 Desember 2019/ *December 14, 2019*
25	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Central Asia/ Transmisi/ *Transmission*	--	327,195	46,742	46,742	--	14 Desember 2019/ *December 14, 2019*

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek/ *Creditor and project funded*	Fasilitas maksimum/ *Maximum facility* US$ *)	Fasilitas maksimum/ *Maximum facility* Rp	Pembayaran kembali/ *Repayment* 2019 Rp	Pembayaran kembali/ *Repayment* 2018 Rp	Premi asuransi/ *Insurance premium* US$ *)	Tanggal jatuh tempo/ *Date of maturity*
26	China Development Bank/ PLTU Adipala, Cilacap	625	--	805,295	827,926	--	14 Oktober 2022/ *October 14, 2022*
27	China Development Bank/ PLTU Sumbar	138	--	174,192	173,739	--	14 Oktober 2022/ *October 14, 2022*
28	Bank of China/ PLTU Tanjung Awar0Awar	372	--	505,422	504,516	34	14 Desember 2022/ *December 14, 2022*
29	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Negara Indonesia/ Transmisi/ *Transmission*	--	1,930,063	275,723	275,723	--	14 Desember 2019/ *December 14, 2019*
30	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Central Asia/ PLTU Riau dan/ *and* PLTU Kalbar	--	1,080,598	99,793	99,793	--	14 Desember 2019/ *December 14, 2019*
31	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Rakyat Indonesia/ Transmisi/ *Transmission*	--	1,067,684	149,547	149,547	--	27 Desember 2020/ *December 27, 2020*
32	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank DKI/ PLTU Riau Tenayan	--	2,225,000	317,857	79,464	--	12 November 2025/ *November 12, 2025*
33	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ *Syndicated loan coordinated by* Bank Negara Indonesia/ PLTU Kalimantan Timur/ *East Kalimantan*	--	2,449,963	349,995	--	--	17 Desember 2025/ *December 17, 2025*
	Jumlah/*Total*	**3,958**	**40,353,700**	**7,489,816**	**8,657,888**	**281**	

*) Dalam jutaan/*In million*

Pinjaman tidak terkait program percepatan

Bank Mandiri

Pinjaman Perusahaan 2011
Pada tanggal 27 Desember 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi yang dikoordinasikan oleh Bank Mandiri sebesar Rp7.000.000, dengan jatuh tempo tanggal 23 Oktober 2021. Jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp875.000. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp1.750.000 dan Rp2.625.000.

Pinjaman Perusahaan 2016
Pada tanggal 19 Desember 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi sebesar Rp12.000.000 yang dikoordinasikan oleh Bank Mandiri. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 19 Desember 2026. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat

Loans not related to fast track program

Bank Mandiri

Corporate Loan 2011
On December 27, 2011, the Company obtained a syndicated investment credit facility coordinated by Bank Mandiri amounting to Rp7,000,000, with maturity date on October 23, 2021. The principal loan repayment as of December 31, 2019 and 2018 is amounted to Rp875,000, respectively. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of this facility amounted to Rp1,750,000 and Rp2,625,000, respectively.

Corporate Loan 2016
On December 19, 2016, the Company obtained a syndicated investment credit facility amounting to Rp12,000,000 coordinated by Bank Mandiri. This credit facility will mature on December 19, 2026. As of December 31, 2019 and 2018, there is no principal loan repayment. As of

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018 (In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp12.000.000.

Pinjaman Perusahaan 2018
Pada tanggal 21 Agustus 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi sebesar Rp9.900.000 yang dikoordinasikan oleh Bank Mandiri. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 21 Agustus 2023. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp9.900.000.

Bank Rakyat Indonesia ("BRI")

Kredit Modal Kerja 2011
Pada bulan Juni 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja sindikasi yang dikoordinasikan oleh BRI sebesar Rp15.000.000, dengan jatuh tempo pada 21 Juni 2012. Pinjaman ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada tanggal 8 Juli 2015, fasilitas kredit ini diubah menjadi Rp9.000.000 dengan jatuh tempo diperpanjang sampai 21 Juni 2016. Perubahan di tahun 2016 terjadi pada tanggal 21 Juni 2016 yaitu perubahan jumlah fasilitas kredit menjadi Rp15.000.000 dengan jatuh tempo diperpanjang sampai 21 Juni 2017. Perubahan berikutnya terjadi pada tanggal 9 September 2016, yaitu perubahan fasilitas kredit menjadi Rp20.000.000. Perubahan terakhir di tahun 2016 pada tanggal 17 November 2016 yaitu perubahan fasilitas kredit menjadi Rp28.000.000. Pada 23 Juli 2018 fasilitas ini diperpanjang jatuh temponya menjadi 21 Juni 2019 Pada tanggal 19 Juli 2019, tanggal jatuh tempo pinjaman diperpanjang menjadi sampai dengan tanggal 21 Juni 2020. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp23.735.602 dan Rp34.014.081. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar nihil dan Rp4.012.892.

December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of this facility amounted to Rp12,000,000.

Corporate Loan 2018
On August 21, 2018, the Company obtained a syndicated investment credit facility amounting to Rp9,900,000 coordinated by Bank Mandiri. This credit facility will mature on August 21, 2023. As of December 31, 2019 and 2018, there is no principal loan repayment. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of this facility amounted to Rp9,900,000.

Bank Rakyat Indonesia ("BRI")

Working Capital Loan 2011
In June 2011, the Company obtained a syndicated working capital loan facility coordinated by BRI amounting to Rp15,000,000, with maturity date on June 21, 2012. This loan facility has been amended several times. On July 8, 2015, the credit facility was changed to Rp9,000,000 with maturity date was extended to June 21, 2016. Amendment during 2016 was first occurred on June 21, 2016 with changes on the amount of credit facility to become Rp15,000,000 with maturity date was extended until June 21, 2017. Futher amendment was occurred on September 9, 2016 where the credit facility was amended to Rp20,000,000. The latest amendment was on November 17, 2016 where the credit facility was amended to Rp28,000,000. On July 23, 2018 the credit facility maturity date was extended to June 21, 2019 On July 19, 2019, the maturity date of the principal has been ammanded to June 21, 2020. As of December 31, 2019 and 2018, the principal loan repayment amounted to Rp23,735,602 and Rp34,014,081, respectively. As of December 31 2019 and 2018, the outstanding balance of this facility amounted to nil and Rp4,012,892, respectively.

Arus kas penarikan dan pembayaran utang Bank Rakyat Indonesia tahun 2019 dan 2018 sebagai berikut:

Cash flows of withdrawal and payment of the Bank Rakyat Indonesia loan in 2019 and 2018 are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Penarikan	19,722,711	25,069,650	*Withdrawal*
Pembayaran	(23,735,602)	(34,014,081)	*Payment*
Bersih	**(4,012,891)**	**(8,944,431)**	***Net***

Pinjaman Perusahaan 2012
Pada tanggal 21 Desember 2012, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi dikoordinasikan oleh BRI sebesar Rp8.500.000. Tanggal jatuh tempo pokok pinjaman adalah 23 November 2022. Jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.214.286. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp3.642.857 dan Rp4.857.143.

Corporate Loan 2012
On December 21, 2012, the Company obtained a syndicated investment credit facility coordinated by BRI amounting to Rp8,500,000. The maturity date of the principal is on November 23, 2022. The principal loan repayment as of December 31, 2019 and 2018, is amounted to Rp1,214,286, respectively. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of this facility amounted to Rp3,642,857 and Rp4,857,143, respectively.

Pinjaman Perusahaan 2014
Pada tanggal 17 Desember 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi dari BRI sebesar Rp2.000.000 dengan jatuh tempo pokok pinjaman pada tanggal 17 Desember 2024. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp285.714. Jumlah pinjaman atas fasilitas ini pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp1.428.572 dan Rp1.714.286.

Corporate Loan 2014
On December 17, 2014, the Company obtained an investment credit facility from BRI amounting to Rp2,000,000, with maturity date on December 17, 2024. As of December 31, 2019 and 2018, the principal loan repayment amounted to Rp285,714, respectively. The outstanding balance of this facility as of December 31, 2019 and 2018 amounted to Rp1,428,572 and Rp1,714,286, respectively.

Pinjaman Perusahaan 2015
Pada tanggal 17 Desember 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi yang dikoordinasikan oleh BRI sebesar Rp12.000.000 Tanggal jatuh tempo pokok pinjaman adalah 17 Desember 2025. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp1.714.286 dan nihil. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp10.285.714 dan Rp12.000.000.

Corporate Loan 2015
On December 17, 2015, the Company obtained a syndicated investment credit facility coordinated by BRI amounting to Rp12,000,000. The maturity date of the principal is on December 17, 2025. As of December 31, 2019 and 2018, the principal loan repayment amounted to Rp1,714,286 and nil, respectively. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of this facility amounted to Rp10,285,714 and Rp12,000,000, respectively.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pinjaman Perusahaan 2016
Pada tanggal 23 Mei 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit sindikasi dikoordinasi oleh BRI melalui skema tripartit dengan PT Waskita Karya (Persero) sebesar Rp4.402.500 dengan jatuh tempo pada tanggal 23 Mei 2023. Pada tanggal 31 Desember 2019 fasilitas pinjaman tersebut dialihkan dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk ke Perusahaan seiring dengan terpenuhinya syarat pengalihan utang yang salah satunya adalah telah berakhirnya periode penarikan, sehingga debitur pinjaman berubah dari semula PT Waskita Karya (Persero) Tbk menjadi Perusahaan. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp3.977.388 dan nihil.

Corpoate Loan 2016
On May 23, 2016, the Company obtained a syndicated credit facility coordinated by BRI through a three-partu shceme with PT Waskita Karya (Persero) amounting to Rp4,402,500, with maturity date on May 23, 2023. On December 31, 2019, the loan facility has been transferred to the Company as the loan transfer requirements were met, ie. the loan withdrawal period has ended, therefore the debtor has changed from PT Waskita Karya (Persero) Tbk to the Company. As of December 31, 2019, the principal loan repayment amounted to nil. As of December 31, 2019 and 2018 the outstanding balance of this facility amounted to Rp Rp*3,977,388 and nil.*

Pinjaman Sindikasi 2018
Pada tanggal 14 November 2018, Perusahaan memperoleh pinjaman sindikasi dari BRI sebesar Rp4.506.787 dengan tanggal jatuh tempo 14 November 2028. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar sebesar Rp1.318.079 dan nihil.

Syndicated Loan 2018
On November 14, 2018, the Company obtained syndicated loan from BRI amounted Rp4,506,787 with maturity date on November 14, 2028. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of this facility amounted to Rp1,318,079 and nil, respectively.

Pinjaman Perusahaan 2019
Pada tanggal 23 April 2019, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi dari BRI sebesar Rp13.250.000 dengan jatuh tempo pokok pinjaman pada tanggal 23 April 2029. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar nihil. Pada tanggal 31 Desember 2019 jumlah pinjaman atas fasilitas ini sebesar Rp13.250.000.

Corpoate Loan 2019
On April 23, 2019, the Company obtained an investment credit facility from BRI amounting to Rp13,250,000, with will mature on April 23, 2029. As of December 31, 2019, the principal loan repayment amounted to nil. As of December 31, 2019 the outstanding balance of this facility amounted to Rp13,250,000.

Bank Negara Indonesia ("BNI")

Pinjaman Perusahaan 2014
Pada tanggal 18 Desember 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi sebesar Rp6.500.000 yang dikoordinasikan oleh BNI. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 18 Desember 2024. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp928.571. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp4.642.857 dan Rp5.571.429.

Bank Negara Indonesia ("BNI")

Corporate Loan 2014
On December 18, 2014, the Company obtained a syndicated investment credit facility amounting to Rp6,500,000 coordinated by BNI. This credit facility will mature on December 18, 2024. As of December 31, 2019 and 2018, the principal loan repayment amounted to Rp928,571, respectively. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of this facility amounted to Rp4,642,857 and Rp5,571,429, respectively.

Pinjaman Perusahaan 2016
Pada tanggal 9 September 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi sebesar Rp12.000.000 yang dikoordinasikan oleh BNI. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 9 September 2026. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp428.571 dan nihil. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp11.571.429 dan Rp12.000.000.

Corporate Loan 2016
On September 9, 2016, the Company obtained a syndicated investment credit facility amounting to Rp12,000,000 coordinated by BNI.. This credit facility will mature on September 9, 2026. As of December 31, 2019 and 2018, the principal loan repayment amounted to Rp428,571 and nil, respectively. As of December 31 2019 and 2018, the outstanding balance of this facility amounted to Rp11,571,429 and Rp12,000,000, respectively.

Bank DKI

Pada tanggal 8 Juni 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja bilateral dari Bank DKI sebesar Rp1.000.000 dengan jatuh tempo pada tanggal 8 Juni 2019. Pada tanggal 31 Mei 2019, tanggal jatuh tempo pinjaman diperpanjang menjadi sampai dengan tanggal 8 Juni 2020. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp2.000.000 dan nihil. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar nihil dan Rp1.000.000.

Bank DKI

On June 8, 2018, the Company obtained a bilateral working capital loan facility from Bank DKI amounting to Rp1,000,000, with maturity date on June 8, 2019. On May 31, 2019, the maturity date of the principal has been amended to June 8, 2020. As of December 31, 2019 and 2018, the principal loan repayment amounted to Rp2,000,000 and nil, respectively. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of this facility amounted to nil and Rp1,000,000, respectively.

Bank Tabungan Negara ("BTN")

Pada tanggal 24 April 2019, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit bilateral dari BTN sebesar Rp1.500.000, dengan jatuh tempo pada 24 April 2029. Pada tanggal 31 Desember 2019, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar Rp1.500.000.

Bank Tabungan Negara ("BTN")

On April 24, 2019, the Company obtained a bilateral capital loan facility from BTN amounting to Rp1,500,000, with maturity date on April 24, 2029. As of December 31, 2019, there is no principal loan repayment. As of December 31, 2019, the outstanding balance of this facility amounted to Rp1,500,000.

Bank Central Asia ("BCA")

Pinjaman Perusahaan 2013
Pada tanggal 23 Desember 2013, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi yang dikoordinasikan oleh BCA sebesar Rp7.000.000, dengan jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2023. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp1.000.000. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp4.000.000 dan Rp5.000.000.

Bank Central Asia ("BCA")

Corporate Loan 2013
On December 23, 2013, the Company obtained a syndicated investment credit facility coordinated by BCA amounting to Rp7,000,000, with maturity date on December 23, 2023. As of December 31, 2019 and 2018, the principal loan repayment amounted to Rp1,000,000, respectively. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of this facility amounted to Rp4,000,000 and Rp5,000,000, respectively.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pinjaman Perusahaan 2017
Pada tanggal 2 November 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi yang dikoordinasikan oleh BCA sebesar Rp12.000.000, dengan jatuh tempo pada tanggal 2 November 2027. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp12.000.000

Corporate Loan 2017
On November 2, 2017, the Company obtained a syndicated investment credit facility coordinated by BCA amounting to Rp12,000,000, with maturity date on November 2, 2027. As of December 31, 2019 and 2018, there is no principal loan repayment. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of this facility amounted to Rp12,000,000, respectively.

Bank Maybank Indonesia

Pada tanggal 2 November 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi yang dikoordinasikan oleh Bank Maybank Indonesia sebesar Rp4.300.000, dengan jatuh tempo pada tanggal 2 November 2027. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp4.300.000.

Bank Maybank Indonesia

On November 2, 2017, the Company obtained a syndicated investment credit facility coordinated by Bank Maybank Indonesia amounting to Rp4,300,000, with maturity date on November 2, 2027. As of December 31, 2019 and 2018, there is no principal loan repayment. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of this facility amounted to Rp4,300,000, respectively.

Bank CIMB Niaga

Pada tanggal 6 Juni 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja bilateral dari Bank CIMB Niaga sebesar Rp4.000.000 dengan jatuh tempo pada tanggal 6 Juni 2019. Pada tanggal 31 Desember 2019 and 2018, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp4.000.000 dan Rp2.000.000. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini adalah masing-masing sebesar nihil dan Rp4.000.000.

Bank CIMB Niaga

On June 6, 2018, the Company obtained a bilateral working capital loan facility from Bank CIMB Niaga amounting to Rp4,000,000, with maturity date on June 6, 2019. As of December 31, 2019 and 2018, the principal loan repayment amounted to Rp4,000,000 and Rp2,000,000. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of this facility amounted to nil and Rp4,000,000, respectively.

Pada tanggal 21 Agustus 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi yang dikoordinasikan oleh Bank CIMB Niaga sebesar Rp4.000.000 Tanggal jatuh tempo pokok pinjaman adalah 21 Agustus 2023. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini adalah masing-masing sebesar Rp4.000.000.

On August 21, 2018, the Company obtained a syndicated investment credit facility coordinated by Bank CIMB Niaga amounting to Rp4,000,000. The maturity date of the principal is on August 21, 2023. As of December 31, 2019 and 2018, there is no principal loan repayment. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of this facility amounted to Rp4,000,000.

Pada tanggal 23 April 2019, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi yang dikoordinasikan oleh Bank CIMB Niaga sebesar Rp3.500.000. Tanggal jatuh tempo pokok pinjaman adalah 23 April 2029. Pada tanggal 31 Desember 2019, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019 jumlah pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar Rp3.500.000.

On April 23, 2019, the Company obtained a syndicated investment credit facility coordinated by Bank CIMB Niaga amounting to Rp3,500,000. The maturity date of the principal is on April 23, 2029. As of December 31, 2019, there is no principal loan repayment. As of December 31, 2019 the outstanding balance of this facility amounted to Rp3,500,000.

Bank HSBC Indonesia

Pada tanggal 26 Juni 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit bilateral untuk tujuan umum perusahaan sebesar Rp1.400.000 dari Bank HSBC Indonesia. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 26 Juni 2019. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp1.400.000 dan nihil. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar nihil.

Bank HSBC Indonesia

On June 26, 2018, the Company obtained a bilateral general purpose credit facility amounting to Rp1,400,000 from Bank HSBC Indonesia. This credit facility will mature on June 26, 2019. As of December 31, 2019 and 2018, the principal loan repayment amounted to Rp1,400,000 and nil, respectively. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of this facility amounted to nil.

Citibank

Pada tanggal 20 Maret 2019, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Citibank sebesar Rp500.000, dengan jatuh tempo pada 20 Maret 2020. Pada tanggal 31 Desember 2019, pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar Rp500.000. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar nihil.

Citibank

On March 20, 2019, the Company obtained a working capital loan facility from Citibank amounting to Rp500,000, with maturity date on March 20, 2020. As of December 31, 2019, the principal loan repayment amounted to Rp500,000. As of December 31, 2019, the outstanding balance of this facility amounted to nil.

Bank DBS Indonesia

Pada tanggal 17 Juli 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit bilateral untuk tujuan umum perusahaan sebesar Rp2.000.000 dari Bank DBS Indonesia. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 17 Juli 2019. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo pinjaman atas fasilitas ini nihil.

Bank DBS Indonesia

On July 17, 2018, the Company obtained a bilateral general purpose credit facility amounting to Rp2,000,000 from Bank DBS Indonesia. This credit facility will mature on July 17, 2019. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of this facility has been amounted to nil.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tanggal 28 Desember 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit *revolving onshore* dan *offshore* sebesar US$150.000.000 dari Bank DBS Indonesia. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 28 Desember 2022. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar US$125.000.000 (setara Rp1.758.625), US$25.000.000 (setara Rp351.725) dan nihil. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing adalah nihil.

On December 28, 2018, the Company obtained a revolving loan facilities onshore and offshore amounting to US$150,000,000 from Bank DBS Indonesia. This credit facility will mature on December 28, 2022. As of December 31, 2019 and 2018, the principal loan repayment amounted to US$125,000,000 (equivalent to Rp1,758,625), US$25,000,000 (equivalent to Rp351,725) and nil. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of this facility amounted nil, respectively.

Pada tanggal 25 Juni 2019, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit *revolving onshore* dan *offshore* sebesar US$1.000.000.000 dari Bank DBS Indonesia. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 25 Juni 2024. Pada tanggal 31 Desember 2019, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar US$502.600.000 (setara Rp6.986.643) dan US$197.400.000 (setara Rp2.744.057).

On June 25, 2019, the Company obtained a revolving loan facilities onshore and offshore amounting to US$1,000,000,000 from Bank DBS Indonesia. This credit facility will mature on June 25, 2024. As of December 31, 2019, there is no principal loan repayment. As of December 31, 2019, the outstanding balance of this facility amounted to US$502,600,000 (equivalent to Rp6,986,643) and US$197,400,000 (equivalent to Rp2,744,057).

Tokyo Mitsubishi Bank

Pada tanggal 13 Desember 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit untuk pendanaan investasi dan tujuan umum perusahaan sebesar US$100.000.000 dari Tokyo Mitsubishi Bank. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 13 Desember 2023. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini adalah masing-masing sebesar US$100.000.000 (setara Rp1.390.100) dan nihil.

Tokyo Mitsubishi Bank

On December 13, 2018, the Company obtained a credit facility to finance capital expenditure and general corporate purposes amounting to US$100,000,000 from Tokyo Mitsubishi Bank,. This credit facility will mature on December 13, 2023. As of December 31, 2019 and 2018, there is no principal loan repayment. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of this facility amounted to US$100,000,000 (equivalent to Rp1,390,100) and nil, respectively.

Standard Chartered Bank ("SCB")

Fasilitas Arun
Pada tanggal 11 Desember 2013, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit ekspor untuk membiayai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas ("PLTMG") Arun sebesar EUR90.000.000. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 30 September 2027. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar EUR7.061.853 (setara Rp111.828) dan

Standard Chartered Bank ("SCB")

Arun Facility
On December 11, 2013, the Company obtained an export credit facility to finance the construction of Arun Solar and Steam Power Plant ("PLTMG") amounting to EUR90,000,000. This credit facility will mature on September 30, 2027. As of December 31, 2019 and 2018, the principal loan repayment amounted to EUR7,061,853 (equivalent to Rp111,828) and EUR7,061,853 (equivalent to Rp121,703), respectively. As of December 31, 2019 and

EUR7.061.853 (setara Rp121.703). Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar EUR56.494.826 (setara Rp880.675) dan EUR63.556.679 (setara Rp1.052.486).

2018, the outstanding balance of this facility amounted to EUR56,494,826 (equivalent to Rp880,675) and EUR63,556,679 (equivalent to Rp1,052,486), respectively.

Fasilitas Bangkanai
Pada tanggal 23 Desember 2013, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit ekspor untuk membiayai pembangunan PLTMG Bangkanai sebesar EUR70.850.000. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 30 September 2027. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar EUR5.904.167 (setara Rp93.496) dan EUR5.904.167 (setara Rp101.751). Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar EUR47.233.333 (setara Rp736.302) dan EUR53.137.500 (setara Rp879.946).

Bangkanai Facility
On December 23, 2013, the Company obtained an export credit facility to finance the construction of Bangkanai PLTMG amounting to EUR70,850,000. This credit facility will mature on September 30, 2027. As of December 31, 2019 and 2018, the principal loan repayment amounted to EUR5,904,167 (equivalent to Rp93.496) and EUR5,904,167 (setara Rp101,751), respectively. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of this facility amounted to EUR47,233,333 (equivalent to Rp736,302) and EUR53,137,500 (equivalent to Rp879,946), respectively.

Agence Francaise De Development ("AFD")

Pada tanggal 7 Mei 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari AFD untuk Trans GIS sebesar EUR100.000.000 dengan jatuh tempo pinjaman sampai dengan 7 Mei 2030. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 tidak terdapat pembayaran pokok atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar EUR28.679.640 (setara Rp447.076) dan EUR22.637.636 (setara Rp374.875).

Agence Francaise De Development ("AFD")

On May 7, 2015, the Company obtained a credit facility from AFD for Trans GIS amounting to EUR100,000,000 with maturity date until May 7, 2030. As of December 31, 2019 and 2018, there is no principal loan repayment. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of this facility amounted to EUR28,679,640 (equivalent to Rp447,076) and EUR22,637,636 (equivalent to Rp374,875), respectively.

Pada tanggal 7 Mei 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari AFD untuk Trans GIS sebesar EUR1.000.000 dengan jatuh tempo pinjaman sampai dengan 7 Mei 2020. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 tidak terdapat pembayaran pokok atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar EUR589.943 (setara Rp9.196) dan EUR58.841 (setara Rp974).

On May 7, 2015, the Company obtained a credit facility from AFD for Trans GIS amounting to EUR1,000,000 with maturity date until May 7, 2020. As of December 31, 2019 and 2018, there is no principal loan repayment. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of this facility amounted to EUR589,943 (equivalent to Rp9,196) and EUR58,841 (equivalent to Rp974), respectively.

Kreditanstalt fur Wiederaufbau ("KfW")

Pada tanggal 8 Mei 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari KfW untuk Kamojang PP sebesar EUR60.000.000 dengan jatuh tempo pinjaman sampai dengan

Kreditanstalt fur Wiederaufbau ("KfW")

On May 8, 2015, the Company obtained a credit facility from KfW for Kamojang PP amounting to EUR60,000,000 with maturity date until June 30, 2030. As of December 31,

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30 Juni 2030. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 tidak terdapat pembayaran pokok atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar EUR1.011.956 (setara Rp15.775) dan EUR840.564 (setara Rp13.920).

2019 and 2018, there is no principal loan repayment. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of this facility amounted to EUR1,011,956 (equivalent to Rp15,775) and EUR840,564 (equivalent to Rp13,920), respectively.

Pada tanggal 8 Mei 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari KfW untuk 1000 *Islands Renewable Energy for Electrification* Program (*Pilot Phase in* Nusa Tenggara Timur) sebesar EUR65.000.000 dengan jatuh tempo pinjaman sampai dengan 30 Juni 2030. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 tidak terdapat pembayaran pokok atas fasilitas ini. Pada tanggal dan 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar EUR326.270 (setara Rp5.086) dan EUR326.270 (setara Rp5.403).

On May 8, 2015, the Company obtained a credit facility from KfW for 1000 Islands Renewable Energy for Electrification Program (Pilot Phase in Nusa Tenggara Timur) amounting to EUR65,000,000 with maturity date until June 30, 2030. As of December 31, 2019 and 2018, there is no principal loan repayment. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of this facility amounted to EUR326,270 (equivalent Rp5,086) and EUR326,270 (equivalent Rp5,403), respectively.

Pada tanggal 15 September 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari KfW untuk Bangkanai Peaker sebesar EUR82.699.200 dengan jatuh tempo pinjaman sampai dengan 15 Desember 2028. Pada 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar EUR8.269.920 (setara Rp131.165) dan nihil. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar EUR38.849.075 (setara Rp605.603) dan nihil.

On September 15, 2017, the Company obtained a credit facility from KfW for Bangkanai Peaker amounting to EUR82,699,200 with maturity date until December 15, 2028. As of December 31, 2019 and 2018, the principal loan repayment amounted to EUR8,269,920 (equivalent to Rp131,165) and nil, respectively. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of this facility amounted to EUR38,849,075 (equivalent to Rp605,603) and nil, respectively.

Asian Development Bank ("ADB")

Pada tanggal 4 Desember 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari ADB untuk penguatan gardu induk regional Sumatera sebesar US$575.000.000 dan US$25.000.000 dengan jatuh tempo pinjaman sampai dengan 15 September 2035. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar US$556.439.836 (setara Rp7.735.070), US$24.215.666 (setara Rp336.622) dan US$444.481.255 (setara Rp6.436.533), US$19.378.064 (setara Rp280.614).

Asian Development Bank ("ADB")

On December 4, 2015, the Company obtained a credit facility from ADB for grid strengthening of Sumatera region amounting to US$575,000,000 and US$25,000,000 with maturity date until September 15, 2035. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of this facility amounted to US$556,439,836 (equivalent to Rp7,735,070), US$24,215,666 (equivalent to Rp336,622) and US$444,481,255 (equivalent to Rp6,436,533), US$19,378,064 (equivalent to Rp280,614), respectively.

Pada tanggal 10 Oktober 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari ADB untuk akses energi berkelanjutan di kawasan Indonesia timur sebesar US$600.000.000 dengan jatuh tempo pinjaman sampai dengan 15 Mei 2037. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar US$434.730.000 (setara Rp6.043.182) dan US$334.500.000 (setara Rp4.843.894).

On October 10, 2017, the Company obtained a credit facility from ADB for sustainable energy access in eastern Indonesia amounting to US$600,000,000 with maturity date until May 15, 2037. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of this facility amounted to US$434,730,000 (equivalent to Rp6,043,182) and US$334,500,000 (equivalent to Rp4,843,894), respectively.

Export Development Canada ("EDC") dan Hungarian Export Import Bank Private Limited Company ("HEXIM")

Pada tanggal 1 Mei 2017 Perusahaan memperoleh pendanaan untuk Batam *mobile power plant* US$14.111.753 denganjatuh tempo pada tanggal 27 Januari 2029. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar US$1.175.979 (setara Rp16.518) dan US$1.175.979 (setara Rp16.293). Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar US$11.171.804 (setara Rp155.299) dan US$12.347.784 (setara Rp178.809).

Export Development Canada ("EDC") and Hungarian Export Import Bank Private Limited Company ("HEXIM")

On May 1, 2017, the Company obtained a credit facility for Batam mobile power plant amounting to US$14,111,753, with maturity date on January 27, 2029. As of December 31, 2019 and 2018, principal loan repayment amounted to US$1,175,979 (equivalent to Rp16,518) and US$1,175,979 (equivalent to Rp16,293), respectively. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of this facility amounted to US$11,171,804 (equivalent to Rp155,299) and US$12,347,784 (equivalent to Rp178,809), respectively.

Pada tanggal 2 Desember 2016 Perusahaan memperoleh pendanaan untuk Batam *mobile power plant* sebesar US$435.888.247 dengan jatuh tempo 27 Januari 2029. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar US$36.324.021 (setara Rp511.461) dan US$36.324.021 (setara Rp503.269). Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar US$345.078.196 (setara Rp4.796.932) dan US$381.402.216 (setara Rp5.523.085).

On December, 2 2016, the Company obtained a credit facility for Batam mobile power plant amounting to US$435,888,247, with maturity date on January 27, 2029. As of December 31, 2019 and 2018, the loan repayment amounted to US$36,324,021 (equivalent to Rp511,461) and US$36,324,021 (equivalent to Rp503,269), respectively. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of this facility amounted to US$345,078,196 (equivalent to Rp4,796,932) and US$381,402,216 (equivalent to Rp5,523,085), respectively.

Japan Bank for International Cooperation ("JBIC")

Pada tanggal 14 Maret 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap ("PLTU") Lontar sebesar US$107.595.235, US$71.730.158, dan JPY16.429.527.239 Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 1 Oktober 2031. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 tidak terdapat

Japan Bank for International Cooperation ("JBIC")

On March 14, 2016, the Company obtained credit facilities to finance the construction of Lontar Steam Electricity Power Plant ("PLTU") amounting to US$107,595,235, US$71,730,158, and JPY16,429,527,239. This credit facilities will mature on October 1, 2031. As of December 31, 2019 and 2018 there is no principal loan repayment. As of

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

pembayaran pokok atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar US$77.504.709 (setara Rp1.077.393), US$51.669.807 (setara Rp718.262), JPY12.906.010.017 (setara Rp1.651.538) dan US$35.594.440 (setara Rp515.442), US$23.729.627 (setara Rp343.629), JPY8.459.647.869 (setara Rp1.109.188).

December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of this facilities amounted to US$77,504,709 (equivalent to Rp1,077,393), US$51,669,807 (equivalent to Rp718,262), JPY12,906,010,017 (equivalent to Rp1,651,538) and US$35,594,440 (equivalent to Rp515,442), US$23,729,627 (equivalent to Rp343,629), JPY8,459,647,869 (equivalent to Rp1,109,188), respectively.

Pada tanggal 20 Oktober 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai pembangunan PLTU Jawa 2 Priok sebesar US$27.224.192, US$18.149.462, dan JPY31.762.594.907. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 30 April 2031. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar US$1.890.569 (setara Rp26,765), JPY1.323.442.000 (setara Rp174.183) dan nihil. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar US$27.224.192 (setara Rp378.444), US$16.258.893 (setara Rp226.015), JPY29.503.437.209 (setara Rp3.775.455) dan US$22.331.494 (setara Rp323.382), US$14.887.663 (setara Rp215.588), JPY22.669.821.318 (setara Rp2.972.356).

On October 20, 2016, the Company obtained credit facilities to finance the construction of Jawa 2 Priok PLTU amounting to US$27,224,192, US$18,149,462 and JPY31,762,594,907 This credit facilities will mature on April 30, 2031. As of December 31, 2019 and 2018, the loan repayment amounted to US$1,890,569 (equivalent to Rp26,765), JPY1,323,442,000 (equivalent to Rp174,183) and nil. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of this facilities amounted to US$27,224,192 (equivalent to Rp378,444), US$16,258,893 (equivalent to Rp226,015), JPY29,503,437,209 (equivalent to Rp3,775,455) and US$22,331,494 (equivalent to Rp323,382), US$14,887,663 (equivalent to Rp215,588), JPY22,669,821,318 (equivalent to Rp2,972,356), respectively.

Pada tanggal 10 Maret 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai pembangunan Fasilitas Muara Karang sebesar US$22.338.000, US$14.892.000, dan JPY15.449.450.242. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 10 Maret 2032. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar US$1.551.250 (setara Rp21.780), JPY643.728.000 (setara Rp82.860) dan nihil. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar US$11.323.380 (setara Rp157.406), US$5.997.670 (setara Rp83.374), JPY4.950.355.212 (setara Rp633.480) dan US$62.640 (setara Rp907), US$41.760 (setara Rp605), JPY63.490.500 (setara Rp8.325).

On March 10, 2017, the Company obtained credit facilities to finance the construction of Muara Karang facilities amounting to US$22,338,000, US$14,892,000, and JPY15,449,450,242 This credit facilities will mature on March 10, 2032. As of December 31, 2019 and 2018, the loan repayment amounted to US$1,551,250 (equivalent to Rp21,780), JPY643,728,000 (equivalent to Rp82,860) and nil. As of December 31, 2019 and 2018 the outstanding balance of this facilities amounted to US$11,323,380 (equivalent to Rp157,406), US$5,997,670 (equivalent to Rp83,374), JPY4,950,355,212 (equivalent to Rp633,480) and US$62,640 (equivalent to Rp907), US$41,760 (equivalent to Rp605), JPY63,490,500 (equivalent to Rp8,325), respectively.

Pada tanggal 20 Juni 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai pembangunan Fasilitas PLTU Kalimantan Selatan sebesar US$53.474.026, US$35.649.351, dan JPY16.939.168.268 Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 20 Juni 2032. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar nihil. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar US$15.060.366 (setara Rp209.354), US$10.040.244 (setara Rp139.569), JPY4.538.090.942 (setara Rp580.724) dan nihil.

On June 20, 2017, the Company obtained credit facilities to finance the construction of South Kalimantan PLTU amounting to US$53,474,026, US$35,649,351, and JPY16,939,168,268 This credit facilities will mature on June 20, 2032. As of December 31, 2019 and 2018, there is no principal loan repayment. As of December 31, 2019 and 2018 the outstanding balance of this facilities amounted to US$15,060,366 (equivalent to Rp209,354), US$10,040,244 (equivalent to Rp139,569), JPY4,538,090,942 (equivalent to Rp580,724) and nil, respectively.

International Bank for Reconstruction and Development ("IBRD")

Pada tanggal 20 Mei 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai *Power Distribution Development Program* sebesar US$500.000.000. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 15 Maret 2036. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar US$462.368.828 (setara Rp6.427.389) dan US$337.573.154 (setara Rp4.888.397).

International Bank for Reconstruction and Development ("IBRD")

On May 20, 2016, the Company obtained a credit facility to finance Power Distribution Development Program amounting to US$500,000,000. This credit facility will mature on March 15, 2036. As of December 31, 2019 and 2018, there is no principal loan repayment. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of this facility amounted to US$462,368,828 (equivalent to Rp6,427,389) and US$337,573,154 (equivalent to Rp4,888,397), respectively.

Korea Exim Bank ("KEXIM"), Sevizi Assicurativi del Commercio Estero ("SACE"), dan Exportni Garancni a Pojistovaci Spolecnost ("EGAP")

Pada tanggal 24 Juni 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai PLTGU Grati sebesar US$36.000.000, US$35.000.000, US$17.013.000, dan EUR40.376.160. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 24 Januari 2031. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar US$3.000.000 (setara Rp42.329), US$2.916.667 (setara Rp41.153), EUR1.417.750 (setara Rp20.029), US$3.049.488 (setara Rp48.256) dan nihil. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar US$33.000.000 (setara Rp458.733), US$32.083.333 (setara Rp445.990), EUR33.544.367 (setara Rp522.910), US$15.595.250 (setara

Korea Exim Bank ("KEXIM"), Sevizi Assicurativi del Commercio Estero ("SACE"), and Exportni Garancni a Pojistovaci Spolecnost ("EGAP")

On June 24, 2016, the Company obtained credit facilities to finance Grati PLTGU amounting to US$36,000,000, US$35,000,000, US$17,013,000, and EUR40,376,160. This credit facilities will mature on January 24, 2031. As of December 31, 2019 and 2018, the loan repayment amounted to US$3,000,000 (equivalent to Rp42,329), US$2,916,667 (equivalent to Rp41,153), EUR1,417,750 (equivalent to Rp20,029), US$3,049,488 (equivalent to Rp48,256) and nil, respectively. As of December, 2019 and 2018, the outstanding balance of this facility amounted to US$33,000,000 (equivalent to Rp458,733), US$32,083,333 (equivalent to Rp445,990), EUR33,544,367 (equivalent to Rp522,910), US$15,595,250 (equivalent to Rp216,790) and

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Rp216.790) dan US$32.145.544 (setara Rp465.500), US$31.168.137 (setara Rp451.345), EUR36.593.855 (setara Rp605.987), US$14.410.354 (setara Rp208.676).

US$32,145,544 (equivalent to Rp465,500), US$31,168,137 (equivalent to Rp451,345), EUR36,593,855 (equivalent to Rp605,985), US$14,410,354 (equivalent to Rp208,676), respectively.

Islamic Development Bank ("IDB")

Pada tanggal 10 Januari 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai *Power Grid Enhancement Program* sebesar US$330.000.000 Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 6 Agustus 2033. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar US$105.375.701 (setara Rp1.464.828) dan US$19.987.032 (setara Rp288.129).

Islamic Development Bank ("IDB")

On January 10, 2017, the Company obtained a credit facility to finance Power Grid Enhancement Project amounting to US$330,000,000 This credit facility will mature on August 6, 2032. As of December 31, 2019 and 2018, there is no principal loan repayment. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of this facility amounted to US$105,375,701 (equivalent to Rp1,464,828) and US$19,987,032, (equivalent to Rp288,129), respectively.

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)

Pada tanggal 30 Maret 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai Pembangkit Listrik Tenaga Air ("PLTA") Jatigede sebesar US$73.324.250. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 30 Maret 2031. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar US$40.209.935 (setara Rp558.958) dan US$24.441.729 (setara Rp353.941).

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)

On March 30, 2017, the Company obtained a credit facility to finance Jatigede Water Electricity Power Plant ("PLTA") amounting to US$73,324,250. This credit facility will mature on March 30, 2031. As of December 31, 2019 and 2018, there is no principal loan repayment. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of this facility amounted to US$40,209,935 (equivalent to Rp558,958) and US$24,441,729 (equivalent to Rp353,941), respectively.

Pada tanggal 1 Agustus 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit berjangka *offshore* sebesar US$938.285.680 dan *onshore* sebesar US$261.714.320. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 1 Agustus 2023. Pada tanggal 9 November 2018, nilai fasilitas kredit berubah menjadi sebesar US$1.022.071.430 untuk porsi *offshore* dan US$297.928.570 untuk porsi *onshore*. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 December 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar US$1.012.071.430 (setara Rp14.068.805), US$307.928.570 (setara Rp4.280.515) dan US$1.012.071.430 (setara Rp14.655.806), US$307.928.570 (setara Rp4.459.113).

On August 1, 2018, the Company obtained a term loan facilities offshore amounting to US$938,285,680 and onshore amounting to US$261,714,320. This credit facility will mature on August 1, 2023. As of November 9, 2018, the facilities amount are amended to US$1,022,071,430 for the offshore portion and US$297,928,570 for the onshore portion. As of December 31, 2019 and 2018, there is no principal loan repayment. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of this facility amounted to US$1,012,071,430 (equivalent to Rp14,068,805), US$307,928,570 (equivalent to Rp4,280,515) and US$1,012,071,430 (equivalent to Rp14,655,806), US$307,928,570 (equivalent to Rp4,459,113), respectively.

Pada tanggal 1 Agustus 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit *revolving* bergulir *offshore* sebesar US$209.571.420 dan *onshore* sebesar US$90.428.580. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 1 Agustus 2021. Pada tanggal 9 November 2018, nilai fasilitas kredit berubah menjadi sebesar US$205.500.000 untuk porsi *offshore* dan US$94.500.000 untuk porsi *onshore*. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar US$205.500.000 (setara Rp2.856.655), US$94.500.000 (setara Rp1.313.645) dan US$205.500.000 (setara Rp2.975.846), US$94.500.000 (setara Rp1.368.455).

On August 1, 2018, the Company obtained a revolving loan facilities offshore amounting to US$209,571,420 and onshore amounting to US$90,428,580. This credit facility will mature on August 1, 2021. As of November 9, 2018, the facilities amount are amended to US$205,500,000 for the offshore portion and US$94,500,000 for the onshore portion. As of December 31, 2019 and 2018, there is no principal loan repayment. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of this facility amounted to US$205,500,000 (equivalent to Rp2,856,655), US$94,500,000 (equivalent to Rp1,313,645) and US$205,500,000 (equivalent to Rp2,975,846), US$94,500,000 (equivalent to Rp1,368,455), respectively.

Pada tanggal 18 Desember 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit bilateral *offshore* sebesar US$50.000.000 dan *onshore* sebesar US$125.000.000. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 18 Desember 2023. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar US$50.000.000 (setara Rp695.050), US$125.000.000 (setara Rp1.737.625) dan nil.

On December 18, 2018, the Company obtained a bilateral loan facilities offshore amounting to US$50,000,000 and onshore amounting to US$125,000,000. This credit facility will mature on December 18, 2023. As of December 31, 2019 and 2018, there is no principal loan repayment. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of this facility amounted to US$50,000,000 (equivalent to Rp695,050), US$125,000,000 (equivalent Rp1,737,625) and nil, respectively.

Mizuho Bank

Pada tanggal 24 Mei 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai Lombok Peaker sebesar EUR74.282.743.. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 20 Mei 2029. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar EUR3.714.137 (setara Rp58.162) dan nihil. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar EUR58.129.979 (setara Rp906.165) dan nihil.

Mizuho Bank

On May 24, 2017, the Company obtained a credit facility to finance Lombok Peaker amounting to EUR74,282,743. This credit facility will mature on May 24, 2029. As of December 31, 2019 and 2018, the loan repayment amounted to EUR3,714,137 (equivalent to Rp58,162) and nil, respectively. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of this facility amounted to EUR58,129,979 (equivalent to Rp906,165) and nil, respectively.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Credit Agricole CIB Paris

Pada tanggal 8 November 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai PLTGU Muara Tawar sebesar US$280.000.000. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 8 Mei 2032. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar US$119.578.745 (setara Rp1.662.264) dan US$14.383.463 (setara Rp208.287).

Credit Agricole CIB Paris

On Novmber 8, 2017, the Company obtained a credit facility to finance PLTGU Muara Tawar amounting to US$280,000,000. This credit facility will mature on May 8, 2032. As of December 31, 2019 and 2018, there is no principal loan repayment. As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of this facility amounted to US$119,578,745 (equivalent to Rp1,662,264) and US$14,383,463 (equivalent to Rp208,287), respectively.

BNP Paribas SA

Pada tanggal 19 Februari 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai Sumbagut 2 Peaker - CESCE *Covered Facility* EUR41.069.311 dan SACE *Covered Facility* EUR66.478.750. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 9 Oktober 2031. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar EUR14.388.126 (setara Rp224.291), EUR22.771.799 (setara Rp354.980), dan nihil.

BNP Paribas SA

On February 19, 2018, the Company obtained a credit facility to finance Sumbagut 2 Peaker - CESCE Covered Facility EUR41,069,311 and SACE Covered Facility EUR66,478,. This credit facility will mature on October 9, 2031. As of December 31, 2019 and 2018, there is no principal loan repayment. As of December 31, 2019 and 2018 the outstanding balance of this facility amounted to EUR14,388,126 (equivalent to Rp224,291), EUR22,771,799 (equivalent to Rp354,980), and nil, respectively.

Bank Gospodarstwa Kratowego ("BGK")

Pada tanggal 21 Februari 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai PLTU Lombok FTP-2 EUR80.816.250. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 28 Februari 2033. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 jumlah pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar EUR2.125.302 (setara Rp33.130) dan nihil.

Bank Gospodarstwa Kratowego ("BGK")

On February 21, 2018, the Company obtained a credit facility to finance PLTU Lombok FTP-2 EUR80,816,250. This credit facility will mature on February 28, 2033. As of December 31, 2019 and 2018, there is no principal loan repayment. As of December 31, 2019 and 2018 the outstanding balance of this facility amounted to EUR2,125,302 (equivalent to Rp33,130) and nil, respectively.

Perusahaan melakukan pembayaran pokok dan bunga bank sesuai dengan jadwal pembayaran dan memenuhi pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam perjanjian pinjaman bank.

The Company made payments of principle and interest of the bank loans in accordance with the schedule of payment and complied with the restrictions specified within the agreements of the bank loans.

28. Utang Obligasi, Sukuk Ijarah dan KIK-EBA / *28. Bonds Payable, Sukuk Ijara and KIK-EBA loans*

a. Obligasi dan sukuk ijarah / *a. Bonds and sukuk ijara*

	2019 Rp	2018 Rp	
Obligasi dan Sukuk Ijarah Rupiah			*Rupiah Bonds and Sukuk Ijara*
Obligasi Berkelanjutan III			*Shelf Registration Bonds III*
PLN Tahap V Tahun 2019	1,912,900	--	*PLN V Year 2019*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III			*Shelf Registration Sukuk Ijara III*
PLN Tahap V Tahun 2019	797,500	--	*PLN V Year 2019*
Obligasi Berkelanjutan III			*Shelf Registration Bonds III*
PLN Tahap IV Tahun 2019	2,953,620	--	*PLN IV Year 2019*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III			*Shelf Registration Sukuk Ijara III*
PLN Tahap IV Tahun 2019	1,250,000	--	*PLN IV Year 2019*
Obligasi Berkelanjutan III			*Shelf Registration Bonds III*
PLN Tahap III Tahun 2019	2,393,000	--	*PLN III Year 2019*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III			*Shelf Registration Sukuk Ijara III*
PLN Tahap III Tahun 2019	863,000	--	*PLN IIIYear 2019*
Obligasi Berkelanjutan III			*Shelf Registration Bonds III*
PLN Tahap II Tahun 2018	832,000	832,000	*PLN II Year 2018*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III			*Shelf Registration Sukuk Ijara III*
PLN Tahap II Tahun 2018	224,000	224,000	*PLN II Year 2018*
Obligasi Berkelanjutan III			*Shelf Registration Bonds III*
PLN Tahap I Tahun 2018	1,278,500	1,278,500	*PLN I Year 2018*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III			*Shelf Registration Sukuk Ijara III*
PLN Tahap I Tahun 2018	750,000	750,000	*PLN I Year 2018*
Obligasi Berkelanjutan II			*Shelf Registration Bonds II*
PLN Tahap III Tahun 2018	2,535,000	2,535,000	*PLN III Year 2018*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II			*Shelf Registration Sukuk Ijara II*
PLN Tahap III Tahun 2018	698,500	698,500	*PLN III Year 2018*
Obligasi Berkelanjutan II			*Shelf Registration Bonds II*
PLN Tahap II Tahun 2017	2,545,500	2,545,500	*PLN II Year 2017*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II			*Shelf Registration Sukuk Ijara II*
PLN Tahap II Tahun 2017	694,500	694,500	*PLN II Year 2017*
Obligasi Berkelanjutan II			*Shelf Registration Bonds II*
PLN Tahap I Tahun 2017	1,600,000	1,600,000	*PLN I Year 2017*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II			*Shelf Registration Sukuk Ijara II*
PLN Tahap I Tahun 2017	400,000	400,000	*PLN I Year 2017*
Obligasi Berkelanjutan I			*Shelf Registration Bonds I*
PLN Tahap II Tahun 2013	651,000	651,000	*PLN II Year 2013*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I			*Shelf Registration Sukuk Ijara I*
PLN Tahap II Tahun 2013	108,000	108,000	*PLN II Year 2013*
Obligasi Berkelanjutan I			*Shelf Registration Bonds I*
PLN Tahap I Tahun 2013	879,000	879,000	*PLN I Year 2013*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I			*Shelf Registration Sukuk Ijara I*
PLN Tahap I Tahun 2013	121,000	121,000	*PLN I Year 2013*
Obligasi PLN XII Tahun 2010	1,855,000	1,855,000	*PLN XII Bonds Year 2010*
Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010	340,000	340,000	*Sukuk Ijara PLN V Year 2010*
Obligasi PLN XI Tahun 2010	1,783,000	1,783,000	*PLN XI Bonds Year 2010*
Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010	167,000	167,000	*Sukuk Ijara PLN IV Year 2010*
Obligasi PLN IX Tahun 2007	1,200,000	1,200,000	*PLN IX Bonds Year 2007*
Obligasi PLN VIII Tahun 2006	865,000	865,000	*PLN VIII Bonds Year 2006*
Surat Utang Jangka			*Global Medium*
Menengah Global - US$			*Term Notes - US$*
Penerbitan tahun 2019	33,362,400	--	*Issued in 2019*
Penerbitan tahun 2018	41,703,000	43,443,000	*Issued in 2018*
Penerbitan tahun 2017	27,802,000	28,962,000	*Issued in 2017*
Penerbitan tahun 2012	13,901,000	14,481,000	*Issued in 2012*
Penerbitan tahun 2011	13,901,000	14,481,000	*Issued in 2011*

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2019 Rp	2018 Rp	
Surat Utang Jangka Menengah Global - EUR			*Global Medium Term Notes - EUR*
Penerbitan tahun 2019	7,794,300	--	*Issued in 2018*
Penerbitan tahun 2018	7,794,300	8,279,900	*Issued in 2018*
Obligasi - JPY			*Obligasi - JPY*
Penerbitan tahun 2019	2,968,825	--	*Issued in 2019*
Obligasi Terjamin - US$			*Guaranteed Notes - US$*
Penerbitan tahun 2009	4,693,478	7,009,919	*Issued in 2009*
Penerbitan tahun 2007	4,007,828	4,175,046	*Issued in 2007*
Subjumlah	**187,625,151**	**140,358,865**	***Subtotal***
Biaya emisi belum diamortisasi	(6,386,375)	(6,556,432)	*Unamortized debt issuance cost*
Jumlah	**181,238,776**	**133,802,433**	***Total***
Disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai:			*Presented in consolidated statements of financial position:*
Liabilitas jangka pendek	6,946,478	2,120,612	*Current liabilities*
Liabilitas jangka panjang	174,292,298	131,681,821	*Non-current liabilites*
Jumlah	**181,238,776**	**133,802,433**	***Total***

Obligasi ini diterbitkan sebesar harga nominal dalam mata uang Rupiah dengan rincian sebagai berikut:

The bonds were issued at nominal value and are denominated in Rupiah, with the following details:

	Pokok/ *Principal* Rp	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Tingkat kupon/ imbalan ijarah per tahun/ *Coupon rate/ ijara fee per annum *)*	
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019				*Shelf Registration Bonds III PLN Tahap V Year 2019*
Seri A	795,700	1 Oktober 2024/ *October 1, 2024*	7.90%	*Series A*
Seri B	445,000	1 Oktober 2026/ *October 1, 2026*	8.40%	*Series B*
Seri C	6,200	1 Oktober 2029/ *October 1, 2029*	8.60%	*Series C*
Seri D	166,000	1 Oktober 2034/ *October 1, 2034*	9.40%	*Series D*
Seri E	500,000	1 Oktober 2039/ *October 1, 2039*	9.90%	*Series E*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019				*Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN Tahap V Year 2019*
Seri A	6,500	1 Oktober 2024/ *October 1, 2024*	Rp513	*Series A*
Seri B	10,000	1 Oktober 2026/ *October 1, 2026*	Rp840	*Series B*
Seri C	92,000	1 Oktober 2029/ *October 1, 2029*	Rp7.912	*Series C*
Seri D	135,000	1 Oktober 2034/ *October 1, 2034*	Rp12.690	*Series D*
Seri E	554,000	1 Oktober 2039/ *October 1, 2039*	Rp54.846	*Series E*

	Pokok/ *Principal* Rp	**Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date***	**Tingkat kupon/ imbalan ijarah per tahun/ *Coupon rate/ ijara fee per annum *)***	
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019				*Shelf Registration Bonds III PLN Tahap IV Year 2019*
Seri A	637,000	1 Agustus 2024/ *August 1, 2024*	8.00%	*Series A*
Seri B	315,250	1 Agustus 2026/ *August 1, 2026*	8.50%	*Series B*
Seri C	549,000	1 Agustus 2029/ *August 1, 2029*	8.70%	*Series C*
Seri D	395,000	1 Agustus 2034/ *August 1, 2034*	9.50%	*Series D*
Seri E	1,057,370	1 Agustus 2039/ *August 1, 2039*	9.98%	*Series E*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019				*Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN Tahap IV Year 2019*
Seri A	274,000	1 Agustus 2024/ *August 1, 2024*	Rp21,920	*Series A*
Seri B	368,000	1 Agustus 2026/ *August 1, 2026*	Rp31,280	*Series B*
Seri C	20,000	1 Agustus 2029/ *August 1, 2029*	Rp1,740	*Series C*
Seri D	49,000	1 Agustus 2034/ *August 1, 2034*	Rp4,655	*Series D*
Seri E	539,000	1 Agustus 2039/ *August 1, 2039*	Rp53,765	*Series E*
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019				*Shelf Registration Bonds III PLN Tahap III Year 2019*
Seri A	369,000	19 Februari 2022/ *February 19, 2022*	8.50%	*Series A*
Seri B	1,212,000	19 Februari 2024/ *February 19, 2024*	9.10%	*Series B*
Seri C	183,000	19 Februari 2026/ *February 19, 2026*	9.35%	*Series C*
Seri D	211,000	19 Februari 2029/ *February 19, 2029*	9.60%	*Series D*
Seri E	263,000	19 Februari 2034/ *February 19, 2034*	9.80%	*Series E*
Seri F	155,000	19 Februari 2039/ *February 19, 2039*	9.95%	*Series F*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019				*Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN Tahap III Year 2019*
Seri A	263,000	19 Februari 2022/ *February 19, 2022*	Rp22,355	*Series A*
Seri B	263,000	19 Februari 2024/ *February 19, 2024*	Rp23,933	*Series B*
Seri C	204,000	19 Februari 2026/ *February 19, 2026*	Rp19,074	*Series C*
Seri D	45,000	19 Februari 2029/ *February 19, 2029*	Rp4,320	*Series D*
Seri E	60,000	19 Februari 2034/ *February 19, 2034*	Rp5,880	*Series E*
Seri F	28,000	19 Februari 2039/ *February 19, 2039*	Rp2,786	*Series F*

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Pokok/ *Principal* Rp	**Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date***	**Tingkat kupon/ imbalan ijarah per tahun/ *Coupon rate/ ijara fee per annum *)***	
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018				*Shelf Registration Bonds III PLN Tahap II Year 2018*
Seri A	210,000	10 Oktober 2023/ *October 10, 2023*	8.65%	*Series A*
Seri B	483,000	10 Oktober 2025/ *October 10, 2025*	9.00%	*Series B*
Seri C	78,000	10 Oktober 2028/ *October 10, 2028*	9.10%	*Series C*
Seri D	15,000	10 Oktober 2033/ *October 10, 2033*	9.30%	*Series D*
Seri E	46,000	10 Oktober 2038/ *October 10, 2038*	9.65%	*Series E*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018				*Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN Tahap II Year 2018*
Seri A	114,000	10 Oktober 2023/ *October 10, 2023*	Rp9,861	*Series A*
Seri B	45,000	10 Oktober 2025/ *October 10, 2025*	Rp4,050	*Series B*
Seri C	15,000	10 Oktober 2028/ *October 10, 2028*	Rp1,365	*Series C*
Seri D	50,000	10 Oktober 2038/ *October 10, 2038*	Rp4,825	*Series D*
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018				*Shelf Registration Bonds III PLN Tahap I Year 2018*
Seri A	78,500	10 Juli 2023/ *July 10, 2023*	7.80%	*Series A*
Seri B	442,000	10 Juli 2025/ *July 10, 2025*	8.35%	*Series B*
Seri C	138,000	10 Juli 2028/ *July 10, 2028*	8.40%	*Series C*
Seri D	281,000	10 Juli 2033/ *July 10, 2033*	8.90%	*Series D*
Seri E	339,000	10 Juli 2028/ *July 10, 2038*	9.00%	*Series E*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018				*Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN Tahap I Year 2018*
Seri A	127,000	10 Juli 2023/ *July 10, 2023*	Rp9,906	*Series A*
Seri B	150,000	10 Juli 2025/ *July 10, 2025*	Rp12,525	*Series B*
Seri C	258,000	10 Juli 2028/ *July 10, 2028*	Rp21,672	*Series C*
Seri D	105,000	10 Juli 2033/ *July 10, 2033*	Rp9,345	*Series D*
Seri E	110,000	10 Juli 2038/ *July 10, 2038*	Rp9,900	*Series E*
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018				*Shelf Registration Bonds II PLN Tahap III Year 2018*
Seri A	457,000	22 Februari 2023/ *February 22, 2023*	6,50%	*Series A*
Seri B	10,000	22 Februari 2025/ *February 22, 2025*	6,80%	*Series B*
Seri C	341,000	22 Februari 2028/ *February 22, 2028*	7,25%	*Series C*
Seri D	362,000	22 Februari 2033/ *February 22, 2033*	8,20%	*Series D*
Seri E	1,365,000	22 Februari 2038/ *February 22, 2038*	8,75%	*Series E*

	Pokok/ *Principal* Rp	**Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date***	**Tingkat kupon/ imbalan ijarah per tahun/ *Coupon rate/ ijara fee per annum *)***	
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018				*Shelf Registration Sukuk Ijara II PLN III Year 2018*
Seri A	104,000	22 Februari 2023/ *February 22, 2023*	Rp6,760	*Series A*
Seri B	88,000	22 Februari 2028/ *February 22, 2028*	Rp6,380	*Series B*
Seri C	57,500	22 Februari 2033/ *February 22, 2033*	Rp4,715	*Series C*
Seri D	449,000	22 Februari 2038/ *February 22, 2038*	Rp39,287	*Series D*
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017				*Shelf Registration Bonds II PLN II Year 2017*
Seri A	451,500	3 November 2022/ *November 3, 2022*	7.20%	*Series A*
Seri B	201,000	3 November 2024/ *November 3, 2024*	7.50%	*Series B*
Seri C	800,000	3 November 2027/ *November 3, 2027*	8.20%	*Series C*
Seri D	1,093,000	3 November 2032/ *November 3, 2032*	8.70%	*Series D*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017				*Shelf Registration Sukuk Ijara II PLN II Year 2017*
Seri A	83,500	3 November 2022/ *November 3, 2022*	Rp6,012	*Series A*
Seri B	121,000	3 November 2027/ *November 3, 2027*	Rp9,922	*Series B*
Seri C	490,000	3 November 2032/ *November 3, 2032*	Rp42,630	*Series C*
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017				*Shelf Registration Bonds II PLN I Year 2017*
Seri A	214,000	11 Juli 2022/ *July 11, 2022*	7.70%	*Series A*
Seri B	169,000	11 Juli 2024/ *July 11, 2024*	8.10%	*Series B*
Seri C	1,217,000	11 Juli 2027/ *July 11, 2027*	8.50%	*Series C*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017				*Shelf Registration Sukuk Ijara II PLN I Year 2017*
Seri A	186,000	11 Juli 2022/ *July 11, 2022*	Rp14,322	*Series A*
Seri B	214,000	11 Juli 2027/ *July 11, 2027*	Rp18,190	*Series B*
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013				*Shelf Registration Bonds I PLN II Year 2013*
Seri B	651,000	10 Desember 2023/ *December 10, 2023*	9.60%	*Series B*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013				*Shelf Registration Sukuk Ijara I PLN II Year 2013*
Seri B	108,000	10 Desember 2023/ *December 10, 2023*	Rp10,368	*Series B*
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013				*Shelf Registration Bonds I PLN I Year 2013*
Seri A	182,000	5 Juli 2020/ *July 5, 2020*	8.00%	*Series A*
Seri B	697,000	5 Juli 2023/ *July 5, 2023*	8.25%	*Series B*

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Pokok/ *Principal* Rp	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Tingkat kupon/ imbalan ijarah per tahun/ *Coupon rate/ ijara fee per annum *)*	
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013	121,000	5 Juli 2020/ *July 5, 2020*	Rp9,680	*Shelf Registration Sukuk Ijara I PLN I Year 2013*
Obligasi PLN XII Tahun 2010 Seri B	1,855,000	8 Juli 2022/ *July 8, 2022*	10.40%	*PLN XII Bonds Year 2010 Series B*
Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010 Seri B	340,000	8 Juli 2022/ *July 8, 2022*	Rp35,360	*Sukuk Ijara PLN V Year 2010 Series B*
Obligasi PLN XI Tahun 2010 Seri B	1,783,000	12 Januari 2020/ *January 12, 2020*	12.55%	*PLN XI Bonds Year 2010 Series B*
Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010 Seri B	167,000	12 Januari 2020/ *January 12, 2020*	Rp20,958	*Sukuk Ijara PLN IV Year 2010 Series B*
Obligasi PLN IX Tahun 2007 Seri B	1,200,000	10 Juli 2022/ *July 10, 2022*	10.90%	*PLN IX Bonds Year 2007 Series B*
Obligasi PLN VIII Tahun 2006 Seri B	865,000	21 Juni 2021/ *June 21, 2021*	13.75%	*PLN VIII Bonds Year 2006 Series B*
Jumlah	**29,697,020**			***Total***

*) Imbalan ijarah per tahun disajikan dalam Rupiah penuh

*) *Ijara fee per annum are presented in Rupiah full amount*

Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019

Pada tanggal 1 Oktober 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PLN tahap V Tahun 2019 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.912.900, terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, Obligasi Seri C, Obligasi Seri D, dan Obligasi Seri E dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal jatuh tempo Obligasi.

Shelf Registration Bonds III PLN V Year 2019

On October 1, 2019, the Company issued Shelf Registration Bonds III PLN phase V Year 2019 with a total nominal value amounting to Rp1,912,900 consisting of Series A, Series B, Series C, Series D, and Series E Bonds, with PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk as Trustee. The payment of interest is based on quarterly basis, starting from January 1, 2020 until the maturity date of the Bonds.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PLN tahap V tahun 2019, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN tahap V tahun 2019 dengan nilai nominal sebesar Rp797.500, terdiri dari Seri A, Seri B, Seri C, Seri D, dan Seri E dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp513 per tahun untuk Seri A,

Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN V Year 2019

Concurrent with the issuance of Shelf Registration Bonds III PLN phase V Year 2019, the Company also issued Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN phase V Year 2019, with a nominal value amounting to Rp797,500 consisting of Series A, Series B, Series C, Series D, and Series E with PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk as Trustee. The total ijara fee amounted to Rp513 per annum for Series A, Rp840 per

Rp840 per tahun untuk Seri B, Rp7.912 per tahun untuk Seri C, Rp12. 690 per tahun untuk Seri D, dan Rp54.846 per tahun untuk Seri E dibayarkan setiap tiga bulan sejak 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal jatuh tempo Sukuk Ijarah.

annum for Series B, Rp7,912 per annum for Series C, Rp12,690 per annum for Series D, and Rp54,486 per annum for Series E which is paid based on a quarterly basis starting from January 1, 2020 until the maturity date of the Sukuk Ijara.

Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019

Pada tanggal 1 Agustus 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PLN tahap IV Tahun 2019 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2.953.620, terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, Obligasi Seri C, Obligasi Seri D, Obligasi dan Obligasi Seri E dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 1 November 2019 sampai dengan tanggal jatuh tempo Obligasi.

Shelf Registration Bonds III PLN IV Year 2019

On August 1 2019, the Company issued Shelf Registration Bonds III PLN phase IV Year 2019 with a total nominal value amounting to Rp2,953,620 consisting of Series A, Series B, Series C, Series D, and Series E Bonds, with PT Bank Tabungan Negara (Persero) as Trustee. The payment of interest is based on quarterly basis, starting from November 1, 2019 until the maturity date of the Bonds.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PLN tahap IV tahun 2019, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN tahap IV tahun 2019 dengan nilai nominal sebesar Rp1.250.000, terdiri dari Seri A, Seri B, Seri C, Seri D, dan Seri E dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp21.920 per tahun untuk Seri A, Rp31.280 per tahun untuk Seri B, Rp1.740 per tahun untuk Seri C, Rp4.655 per tahun untuk Seri D, dan Rp53.765 per tahun untuk Seri E dibayarkan setiap tiga bulan sejak 1 November 2019 sampai dengan tanggal jatuh tempo Sukuk Ijarah.

Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN IV Year 2019

Concurrent with the issuance of Shelf Registration Bonds III PLN phase IV Year 2019, the Company also issued Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN phase IV Year 2019, with a nominal value amounting to Rp1,250,000, consisting of Series A, Series B, Series C, Series D, Series E and Series F with PT Bank Tabungan Negara (Persero) as Trustee. The total ijara fee amounted to Rp21,920 per annum for Series A, Rp31,280 per annum for Series B, Rp1,740 per annum for Series C, Rp4,655 per annum for Series D, and Rp53,765 per annum for Series E which is paid based on a quarterly basis starting from November 1, 2019 until the maturity date of the Sukuk Ijara.

Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019

Pada tanggal 19 Februari 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PLN tahap III Tahun 2019 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2.393.000, terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, Obligasi Seri C, Obligasi Seri D, Obligasi Seri E, dan Obligasi Seri F dengan Bank Tabungan Negara bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal jatuh tempo Obligasi.

Shelf Registration Bonds III PLN III Year 2019

On February 19, 2019, the Company issued Shelf Registration Bonds III PLN phase III Year 2019 with a total nominal value amounting to Rp2,393,000 consisting of Series A, Series B, Series C, Series D, Series E, and Series F Bonds, with Bank Tabungan Negara as Trustee. The payment of interest is based on quarterly basis, starting from May 19, 2019 until the maturity date of the Bonds.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PLN tahap III tahun 2019, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN tahap III tahun 2019 dengan nilai nominal sebesar Rp863.000, terdiri dari Seri A, Seri B, Seri C, Seri D, Seri E, dan Seri F dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp22.355 per tahun untuk Seri A, Rp23.933 per tahun untuk Seri B, Rp19.074 per tahun untuk Seri C, Rp4.320 per tahun untuk Seri D, Rp5.880 untuk Seri E dan Rp2.786 per tahun untuk Seri F dibayarkan setiap tiga bulan sejak 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal jatuh tempo Sukuk Ijarah.

Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN III Year 2019

Concurrent with the issuance of Shelf Registration Bonds III PLN phase III Year 2019, the Company also issued Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN phase III Year 2019, with a nominal value amounting to Rp863,000, consisting of Series A, Series B, Series C, Series D, Series E and Series F with PT Bank Tabungan Negara (Persero) as Trustee. The total ijara fee amounted to Rp22,355 per annum for Series A, Rp23,933 per annum for Series B, Rp19,074 per annum for Series C, Rp4,320 per annum for Series D, Rp5,880 per annum for Series E and Rp2,786 per annum for Series F which is paid based on a quarterly basis starting from May 19, 2019 until the maturity date of the Sukuk Ijara.

Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018

Pada tanggal 10 Oktober 2018, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PLN tahap II Tahun 2018 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp832.000, terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, Obligasi Seri C, Obligasi Seri D, dan Obligasi Seri E dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Shelf Registration Bonds III PLN II Year 2018

On October 10, 2018, the Company issued Shelf Registration Bonds III PLN phase II Year 2018 with a total nominal value amounting to Rp832,000 consisting of Series A, Series B, Series C, Series D, and Series E bonds, with PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk payable as acting as the Trustee. The interest is based on a quarterly basis, starting from January 10, 2019 until the maturity date of the bonds.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PLN tahap II tahun 2018, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN tahap II tahun 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp224.000, terdiri dari seri A, Seri B, Seri C, dan Seri D dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp9.861 per tahun untuk seri A, Rp4.050 per tahun untuk seri B, Rp1.365 per tahun untuk seri C, dan Rp4.825 per tahun untuk Seri D dibayarkan setiap tiga bulan sejak 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal jatuh tempo Sukuk Ijarah.

Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN II Year 2018

Concurrent with the issuance of Shelf Registration Bonds III PLN phase II Year 2018, the Company also issued Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN phase II Year 2018, with a nominal value amounting to Rp224,000, consisting of Series A, Series B, Series C, and Series D with PT Bank Tabungan Negara (Persero) acting as the Trustee. The total ijara per annum fee amounting to Rp9,861 for Series A, Rp4,050 for Series B, Rp1,365 for Series C, and Rp4,825 for Series D which is payable on a quarterly basis starting from January 10, 2019 until the maturity date of the Sukuk Ijara.

Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018
Pada tanggal 10 Juli 2018, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PLN tahap I Tahun 2018 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.278.500, terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, Obligasi Seri C, Obligasi Seri D, dan Obligasi Seri E dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Shelf Registration Bonds III PLN I Year 2018
On July 10, 2018, the Company issued Shelf Registration Bonds III PLN phase I Year 2018 with a total nominal value amounting to Rp1,278,500 consisting of Series A, Series B, Series C, Series D, and Series E bonds, with PT Bank Tabungan Negara (Persero) acting Tbk as the Trustee. The interest is payment on a quarterly basis, starting from October 10, 2018 until the maturity date of the bonds.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018
Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PLN tahap I tahun 2018, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN tahap I tahun 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp750.000, terdiri dari seri A, Seri B, Seri C, Seri D, dan Seri E dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp9.906 per tahun untuk seri A, Rp12.525 per tahun untuk seri B, Rp21.672 per tahun untuk seri C, Rp9.345 untuk Seri D, dan Rp9.900 per tahun untuk Seri E dibayarkan setiap tiga bulan sejak 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal jatuh tempo Sukuk Ijarah.

Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN I Year 2018
Concurrent with the issuance of Shelf Registration Bonds III PLN phase I Year 2018, the Company also issued Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN phase I Year 2018, with a nominal value amounting to Rp750,000, consisting of Series A, Series B, Series C, Series D, and Series E with PT Bank Tabungan Negara (Persero) acting as the Trustee. The total ijara fee per annum amounting to Rp9,906 for Series A, Rp12,525 for Series B, Rp21,672 for Series C, Rp9,345 for series D, and Rp9,900 for Series E which is payable on a quarterly basis, starting from October 10, 2018 until the maturity date of the Sukuk Ijara.

Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018
Pada tanggal 23 Februari 2018, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II PLN tahap III Tahun 2018 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2.535.000, terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, Obligasi Seri C, Obligasi Seri D, dan Obligasi Seri E dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Shelf Registration Bonds II PLN III Year 2018
On February 23, 2018, the Company issued Shelf Registration Bonds II PLN phase III Year 2018 with a total nominal value amounting to Rp2,535,500 consisting of Series A, Series B, Series C, Series D, and Series E bonds, with PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acting as the Trustee. interest is payable on a quarterly basis, starting from May 22, 2018 until the maturity date of the bonds.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018
Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II PLN tahap III tahun 2018, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN tahap III tahun 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp698.500,

Shelf Registration Sukuk Ijara II PLN III Year 2018
Concurrent with the issuance of Shelf Registration Bonds II PLN phase III Year 2018, the Company also issued Shelf Registration Sukuk Ijara II PLN phase III Year 2018, with a nominal value amounting

terdiri dari seri A, Seri B, Seri C, dan Seri D dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp6.760 per tahun untuk seri A, Rp6.380 per tahun untuk seri B, Rp4.715 per tahun untuk seri C, dan Rp39.827 per tahun untuk Seri D dibayarkan setiap tiga bulan sejak 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal jatuh tempo Sukuk Ijarah.

Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017

Pada tanggal 3 November 2017, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II PLN tahap II Tahun 2017 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2.545.500, terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, Obligasi Seri C dan Obligasi Seri D dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017 dengan nilai nominal sebesar Rp694.500, terdiri dari Seri A, Seri B dan Seri C dengan PT Bank Tabungan Negara (Presero) bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp6.012 per tahun untuk Seri A, Rp9.922 per tahun untuk Seri B, dan Rp42.630 per tahun untuk Seri C dibayarkan setiap tiga bulan sejak 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal jatuh tempo sukuk ijarah.

Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017

Pada tanggal 12 Juli 2017, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.600.000, terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, dan Obligasi Seri C dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

to Rp698,500, consisting of Series A, Series B, Series C, and Series D with PT Bank Tabungan Negara (Persero) acting as the Trustee. The total ijara fee per annum amounting to Rp6,760 for Series A, Rp6,380 for Series B, Rp4,715 for Series C, and Rp39,827 for Series D which is payable on a quarterly basis, starting from May 22, 2018 until the maturity date of the Sukuk Ijara.

Shelf Registration Bonds II PLN II Year 2017

On November 3, 2017, the Company issued Shelf Registration Bonds II PLN II Year 2017 with a total nominal value amounting to Rp2,545,500 consisting of Series A, Series B, Series C, and Series D Bonds, with PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from February 3, 2018 until the maturity date of the bonds.

Shelf Registration Sukuk Ijara II PLN II Year 2017

Concurrent with the issuance of Shelf Registration Bonds II PLN II Year 2017, the Company also issued Sustainable Sukuk Ijara II PLN II Year 2017, with a nominal value amounting to Rp694,500 consisting of Series A, Series B and Series C with PT Bank Tabungan Negara (Persero) acting as the Trustee. The total ijara fee per annum amounting to Rp6,012 for Series A, Rp9,922 for Series B and Rp42,630 for Series C is payable on a quarterly basis, starting from February 3, 2018 until the maturity date of the sukuk ijara.

Shelf Registration II PLN I Year 2017

On July 12, 2017, the Company issued Shelf Registration Bonds II PLN I Year 2017 with a total nominal value amounting to Rp1,600,000 consisting of Series A, Series B, and Series C Bonds, with PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from October 11, 2017 until the maturity date of the bonds.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 dengan nilai nominal sebesar Rp400.000, terdiri dari Seri A dan Seri B dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp14.322 per tahun untuk Seri A dan Rp18.190 per tahun untuk Seri B dibayarkan setiap tiga bulan sejak 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal jatuh tempo sukuk ijarah.

Shelf Registration Sukuk Ijara II PLN I Year 2017

Concurrent with the issuance of Shelf Registration Bonds II PLN I Year 2017, the Company also issued Sustainable Sukuk Ijara II PLN I Year 2017, with a nominal value amounting to Rp400,000, consisting of Series A and Series B with PT Bank Tabungan Negara (Persero) acting as the Trustee. The total ijara fee per annum amounting to Rp14,322 for Series A Bonds and Rp18,190 for Series B Bonds is payable on a quarterly basis, starting from October 11, 2017 until the maturity date of the sukuk ijara.

Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013

Pada tanggal 10 Desember 2013, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.244.000, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B dengan PT Bank Permata Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi. Obligasi Seri A senilai Rp593.000 telah dibayar keseluruhannya di 2018.

Shelf Registration Bonds I PLN II Year 2013

On December 10, 2013, the Company issued Shelf Registration Bonds I PLN II Year 2013 with a total nominal value amounting to Rp1,244,000 consisting of Series A and Series B Bonds, with PT Bank Permata Tbk acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from March 10, 2014 until the maturity date of the bonds. Series A bonds amounting to Rp593,000 has been fully repaid in 2018.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 dengan nilai nominal sebesar Rp429.000, terdiri dari Seri A dan Seri B dengan PT Bank Permata Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp28.890 per tahun untuk Obligasi Seri A dan Rp10.368 per tahun untuk Seri B dibayarkan setiap tiga bulan sejak 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal jatuh tempo sukuk ijarah. Sukuk ijarah Seri A senilai Rp321.000 telah dibayar keseluruhannya di 2018.

Shelf Registration Sukuk Ijara I PLN II Year 2013

Concurrent with the issuance of Shelf Registration Bonds I PLN II Year 2013, the Company also issued Sustainable Sukuk Ijara I PLN II Year 2013, with a nominal value amounting to Rp429,000 consisting of Series A and Series B with PT Bank Permata Tbk acting as the Trustee. The total ijara fee per annum amounting to Rp28,890 for Series A and Rp10,368 for Series B is payable on a quarterly basis, starting from March 10, 2014 until the maturity date of the sukuk ijara. Series A sukuk ijara amounting to Rp321,000 has been fully repaid in 2018.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013
Pada tanggal 5 Juli 2013, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp879.000, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B dengan PT Bank Permata Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 5 Oktober 2013 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013
Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN tahap I Tahun 2013 dengan nilai nominal sebesar Rp121.000 dengan PT Bank Permata Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp9.680 per tahun dan dibayarkan setiap tiga bulan sejak 5 Oktober 2013 sampai dengan tanggal jatuh tempo sukuk ijarah.

Obligasi PLN XII tahun 2010
Pada tanggal 8 Juli 2010, Perusahaan menerbitkan Obligasi PLN XII Tahun 2010 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2.500.000, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 8 Oktober 2010 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi. Obligasi Seri A senilai Rp645.000 telah dibayar lunas di tahun 2015.

Sejak tanggal 27 Maret 2018, Wali Amanat berganti menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Obligasi PLN XII Tahun 2010 yang tertuang dalam Akta Notaris No. 19 dari Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.

Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010
Bersamaan dengan penerbitan Obligasi PLN XII Tahun 2010, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010 dengan nilai nominal sebesar Rp500.000, terdiri dari Seri A dan Seri B dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk

Shelf Registration Bonds I PLN I Year 2013

On July 5, 2013, the Company issued Shelf Registration Bonds I PLN I Year 2013 with a total nominal value amounting to Rp879,000 consisting of Series A and Series B Bonds with PT Bank Permata Tbk acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from October 5, 2013 until the maturity date of the bonds.

Shelf Registration Sukuk Ijara I PLN I Year 2013
Concurrent with the issuance of Sustainable Bonds I PLN I Year 2013, the Company also issued Sustainable Sukuk Ijara I PLN I Year 2013 with a nominal value amounting to Rp121,000 with PT Bank Permata Tbk acting as the Trustee. The total ijara fee per annum amounting to Rp9,680 is payable on a quarterly basis, starting from October 5, 2013 until the maturity date of the sukuk ijara.

PLN XII Bonds Year 2010
On July 8, 2010, the Company issued PLN XII Bonds Year 2010 with a total nominal value amounting to Rp2,500,000 consisting of Series A and Series B Bonds with PT Bank CIMB Niaga Tbk acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from October 8, 2010 until the maturity date of the bonds. Series A bonds amounting to Rp645,000 has been fully repaid in 2015.

On March 27, 2018, the acting Trustee was changed to PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk in accordance with the Minutes of Meeting of the Bondholders of PLN XII Bonds Year 2010, as documented in Notarial Deed No. 19 of Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notary in Jakarta.

Sukuk Ijara PLN V Year 2010
Concurrent with the issuance of PLN XII Bonds Year 2010, the Company also issued Sukuk Ijara PLN V Year 2010 with a nominal value amounting to Rp500,000, consisting of Series A and Series B with PT Bank CIMB Niaga Tbk acting as the

bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp15.520 per tahun untuk Seri A dan Rp35.360 per tahun untuk Seri B dan dibayarkan setiap tiga bulan sejak 8 Oktober 2010 sampai dengan tanggal jatuh tempo sukuk ijarah. Sukuk Ijara Seri A senilai Rp160.000 telah dibayar lunas di tahun 2015.

Sejak tanggal 28 Maret 2018, Wali Amanat berganti menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010 yang tertuang dalam Akta Notaris No. 20 dari Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.

Obligasi PLN XI Tahun 2010
Pada tanggal 12 Januari 2010, Perusahaan menerbitkan Obligasi PLN XI Tahun 2010 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2.703.000, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B, dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 12 April 2010 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi. Obligasi Seri A senilai Rp920.000 telah dibayar keseluruhannya di tahun 2017.

Sejak tanggal 17 April 2018, Wali Amanat berganti menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Obligasi PLN XI Tahun 2007 yang tertuang dalam Akta No. 7 dari Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.

Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010
Bersamaan dengan penerbitan Obligasi PLN XI Tahun 2010, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010 dengan nilai nominal sebesar Rp297.000, terdiri dari Seri A dan Seri B dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp15.535 per tahun untuk Seri A dan Rp20.958 per tahun untuk Seri B dibayarkan setiap tiga bulan sejak 12 April 2010 sampai dengan tanggal jatuh tempo sukuk ijarah. Sukuk Ijarah Seri A senilai Rp130.000 telah dibayar keseluruhannya di tahun 2017.

Trustee. The total ijara fee per annum amounting to Rp15,520 for Series A and Rp35,360 for Series B is payable on a quarterly basis, starting from October 8, 2010 until the maturity date of the sukuk ijara. Series A Sukuk Ijara amounting to Rp160,000 has been fully repaid in 2015.

On March 28, 2018, the acting Trustee was changed to PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk in accordance with the Minutes of Meeting of the Bondholders of Sukuk Ijarah PLN V Year 2010, as documented in Notarial Deed No. 20 of Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notary in Jakarta.

PLN XI Bonds Year 2010
On January 12, 2010, the Company issued PLN XI Bonds Year 2010 with a total nominal value amounting to Rp2,703,000, consisting of Series A and Series B bonds, with PT Bank CIMB Niaga Tbk acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from April 12, 2010 until the maturity date of the bonds. Series A Bonds amounting to Rp920,000 has been fully repaid in 2017.

Since April 17, 2018, the acting Trustee was changed to PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk in accordance with the Minutes of Meeting of the Bondholders of PLN XI Bonds Year 2007, as documented in Notarial Deed No. 7 of Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notary in Jakarta.

Sukuk Ijara PLN IV Year 2010
Concurrent with the issuance of PLN XI Bonds Year 2010, the Company also issued Sukuk Ijara PLN IV Year 2010 with a nominal value amounting to Rp297,000 consisting of Series A and Series B with PT Bank CIMB Niaga Tbk acting as the Trustee. The total ijara fee per annum amounting to Rp15,535 for Series A and Rp20,958 for Series B is payable on a quarterly basis, starting from April 12, 2010 until the maturity date of the sukuk ijara. Series A Sukuk Ijara amounting to Rp130,000 has been fully repaid in 2017.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Sejak tanggal 27 Maret 2018, Wali Amanat berganti menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010 yang tertuang dalam Akta No. 18 dari Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.

On March 27, 2018, the acting Trustee was changed to PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk in accordance with the Minutes of Meeting of the Bondholders of Sukuk Ijarah PLN IV Year 2010, as documented in notarial deed No. 18 of Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., notary in Jakarta.

Obligasi PLN IX Tahun 2007
Pada tanggal 10 Juli 2007, Perusahaan menerbitkan Obligasi PLN IX Tahun 2007 dengan jumlah nilai nominal Rp2.700.000, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B, dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 10 Oktober 2007 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi. Obligasi Seri A senilai Rp1.500.000 telah dibayar keseluruhannya di tahun 2017.

PLN IX Bonds Year 2007
On July 10, 2007, the Company issued PLN IX Bonds Year 2007 with a total nominal value amounting to Rp2,700,000 consisting of Series A and Series B Bonds, with PT Bank CIMB Niaga Tbk acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from October 10, 2007 until the maturity date of the bonds. Series A Bonds amounting Rp1,500,000 has been fully repaid in 2017.

Sejak tanggal 27 Maret 2018, Wali Amanat berganti menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Obligasi PLN IX Tahun 2007 yang tertuang dalam Akta No. 16 dari Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.

On March 27, 2018, the acting Trustee was changed to PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk in accordance with the Minutes of Meeting of the Bondholders of PLN IX Bonds Year 2007, as documented in notarial deed No. 16 of Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notary in Jakarta.

Obligasi PLN VIII Tahun 2006
Pada tanggal 21 Juni 2006, Perusahaan menerbitkan Obligasi PLN VIII Tahun 2006 dengan jumlah nilai nominal Rp2.200.100, dengan PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 21 September 2006 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi. Obligasi Seri A senilai Rp1.335.100 telah dibayar keseluruhannya di tahun 2016.

PLN VIII Bonds Year 2006
On June 21, 2006, the Company issued PLN VIII Bonds Year 2006 with a total nominal value amounting to Rp2,200,100 with PT Bank Mega Tbk acting as the Trustee. The interest is payable on a quarterly basis, starting from September 21, 2006 until the maturity date of the bonds. Series A Bonds amounting to Rp1,335,100 has been fully repaid in 2016.

Sejak tanggal 18 Maret 2008, Wali Amanat berganti menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Obligasi PLN VIII Tahun 2006 yang tertuang dalam Akta No. 34 dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

On March 18, 2008, the acting Trustee was changed to PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk in accordance with the Minutes of Meeting of the Bondholders of PLN VIII Bonds Year 2006, as documented in notarial deed No. 34 of Mrs. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta.

Sehubungan dengan penerbitan seluruh obligasi dan sukuk ijarah Rupiah di atas, masing-masing perjanjian perwaliamanatan menetapkan antara lain bahwa:

In relation to the issuance of all Rupiah bonds and sukuk ijara above, each trustee agreement stipulates, among others that:

- Satu tahun sejak tanggal emisi, Perusahaan dapat membeli kembali sebagian atau seluruh obligasi ini sebelum tanggal pelunasan pokok obligasi.
- Seluruh obligasi ini tidak dijamin secara khusus, namun dijamin dengan seluruh aset Perusahaan, serta hak pemegang obligasi adalah pari passu tanpa hak khusus dengan hak-hak kreditur lain.
- Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan antara lain: (a) menjaminkan harta kekayaan Perusahaan; (b) memberikan penjaminan; (c) mengubah bidang usaha, mengurangi modal dasar; modal ditempatkan dan disetor.

  Selain itu Perusahaan juga diwajibkan memenuhi: batasan rasio keuangan antara lain rasio jumlah liabilitas keuangan terhadap jumlah asset, rasio antara laba sebelum beban bunga, pajak dan penyusutan dan amortisasi (EBITDA) dengan beban bunga.
- Perusahaan tidak disyaratkan untuk membentuk penyisihan dana pelunasan obligasi.

Dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019, Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019, Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019, Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018, Obligasi berkelanjutan III PLN Tahap I tahun 2018 dan sukuk ijarah berkelanjutan III PLN Tahap I tahun 2018, Obligasi berkelanjutan II PLN Tahap III tahun 2018 dan sukuk ijarah berkelanjutan II PLN Tahap III tahun 2018, Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017 digunakan untuk mendanai proyek pembangkit, transmisi

- *After one year from the issuance date, the Company is allowed to buy-back either a portion or the entire bonds before the maturity date.*
- *The bonds are not secured by specific collateral but secured by all of the Company's assets and the bondholders' rights are pari passu without preference to the other creditors.*
- *The Company is restricted by certain covenants, which require written approval from the Trustee to: (a) use the Company's assets as collateral; (b) act as a guarantor; (c) change the business activities and decrease the Company's authorized, subscribed and paid-up capital.*

  The Company is also required to comply with certain financial covenants such as a ratio of total financial liabilities to total assets, the ratio of earnings before interest, tax, depreciation and amortization (EBITDA) to interest expense.
- *The Company was not required to provide sinking fund for such bonds.*

The proceeds from the issuance of Shelf Registration Bonds III PLN V Year 2019 and Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN V Year 2019, Shelf Registration Bonds III PLN IV Year 2019 and Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN IV Year 2019, Shelf Registration Bonds III PLN III Year 2019 and Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN III Year 2019, Shelf Registration Bonds III PLN II Year 2018 and Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN II Year 2018, Shelf Registration Bonds III PLN I Year 2018 and Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN I Year 2018, Shelf Registration Bonds II PLN III Year 2018 and Shelf Registration Sukuk Ijara II PLN III Year 2018, Shelf Registration Bonds II PLN II Year 2017 and Shelf Registration Sukuk Ijara II PLN II Year 2017 were used to finance the power plant, transmission and distribution construction projects. Shelf Registration Bonds II PLN I Year 2017 and Shelf Registration Sukuk Ijara II PLN I Year 2017,

dan distribusi. Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017, Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013, Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013, Obligasi PLN XI Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010, Obligasi PLN XI Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010 digunakan untuk mendanai proyek transmisi dan distribusi.

Shelf Registration Bonds I PLN II Year 2013 and Shelf Registration Sukuk Ijara I PLN II Year 2013, Shelf Registration Bonds I PLN I Year 2013 and Shelf Registration Sukuk Ijara I PLN I Year 2013, PLN XI Bonds Year 2010 and Sukuk Ijara V Year 2010, PLN XI Bonds Year 2010 and Sukuk Ijara IV Year 2010 were used to finance the transmission and distribution construction projects.

Obligasi PLN IX, Obligasi PLN VIII dan Sukuk Ijarah PLN II digunakan sebagai modal kerja.

Bonds PLN IX, Bonds PLN VIII, and Sukuk Ijara PLN II were used as working capital.

Perusahaan telah memenuhi pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam perjanjian Wali Amanat masing-masing obligasi dan sukuk ijarah.

The Company has complied with the restrictions specified within the agreements with the acting Trustee of the corresponding bonds and sukuk ijara.

Rincian peringkat untuk seluruh obligasi dan sukuk ijara yang masing *outstanding* dan dimiliki Perusahaan adalah sebagai berikut:

Rating details on all outstanding bonds and shelf registration bonds owned by the Company are as follows:

	2019	
	Peringkat/ *Rating*	**Lembaga pemeringkat/ *Rating agency***
Obligasi/ *Bonds*		
Obligasi/ *Bonds*		
PLN VIII Tahun/ *Year 2006*	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
PLN IX Tahun/ *Year 2007*	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
PLN XI Tahun/ *Year 2010*	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
PLN XII Tahun/ *Year 2010*	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 *Self Registration Bonds I PLN Phase I Year 2013*	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 *Self Registration Bonds I PLN Phase II Year 2013*	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 *Self Registration Bonds II PLN Phase I Year 2017*	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017 *Self Registration Bonds II PLN Phase II Year 2017*	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018 *Self Registration Bonds II PLN Phase III Year 2018*	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018 *Self Registration Bonds III PLN Phase I Year 2018*	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018 *Self Registration Bonds III PLN Phase II Year 2018*	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019 *Self Registration Bonds III PLN Phase III Year 2019*	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019 *Self Registration Bonds III PLN Phase IV Year 2019*	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 *Self Registration Bonds III PLN Phase V Year 2019*	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia

	2019	
	Peringkat/ *Rating*	**Lembaga pemeringkat/ *Rating agency***
PLN II Tahun/ *Year 2007*	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
PLN IV Tahun/ *Year 2010*	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
PLN V Tahun/ *Year 2010*	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 *Self Registration Sukuk Ijara I PLN Phase I Year 2013*	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 *Self Registration Sukuk Ijara I PLN Phase II Year 2013*	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 *Self Registration Sukuk Ijara II PLN Phase I Year 2017*	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017 *Self Registration Sukuk Ijara II PLN Phase II Year 2017*	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018 *Self Registration Sukuk Ijara II PLN Phase III Year 2018*	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018 *Self Registration Sukuk Ijara III PLN Phase I Year 2018*	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018 *Self Registration Sukuk Ijara III PLN Phase II Year 2018*	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019 *Self Registration Sukuk Ijara III PLN Phase III Year 2019*	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019 *Self Registration Sukuk Ijara III PLN Phase IV Year 2019*	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 *Self Registration Sukuk Ijara III PLN Phase V Year 2019*	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia

Surat Utang Jangka Menengah Global dan Obligasi Terjamin

Rincian Surat Utang Jangka Menengah Global dan Obligasi Terjamin adalah sebagai berikut:

Global Medium Term Notes and Guaranteed Notes

The details of Global Medium Term Notes and Guaranteed Notes are as follows:

	Pokok/ *Principal* *) US$	**Harga penerbitan/ *Issuing price* %**	**Jatuh tempo/ *Maturity date***	**Tingkat bunga/ *Interest rate* %**	
Surat utang jangka menengah global					***Global medium term notes***
Penerbitan tahun 2019					*Issued in 2019*
Jatuh tempo 2030	500,000,000	99.775%	5 Februari 2030/ *February 5, 2030*	3.88%	*Due in 2030*
Jatuh tempo 2050	500,000,000	99.567%	5 November 2029/ *November 5, 2029*	4.375%	*Due in 2050*
Jatuh tempo 2029	700,000,000	99.385%	17 Juli 2029/ *July 17, 2029*	3.88%	*Due in 2029*
Jatuh tempo 2049	700,000,000	98.834%	17 Juli 2049/ *July 17, 2049*	4.88%	*Due in 2049*
Subjumlah	**2,400,000,000**				*Subtotal*
Penerbitan tahun 2018					*Issued in 2018*
Jatuh tempo 2028	1,000,000,000	99.62%	21 Mei 2028/ *May 21, 2028*	5.45%	*Due in 2028*
Jatuh tempo 2029	500,000,000	99.00%	25 Oktober 2029/ *October 25, 2029*	5.375%	*Due in 2029*
Jatuh tempo 2048	1,000,000,000	99.32%	21 Mei 2048/ *May 21, 2048*	6.15%	*Due in 2048*
Jatuh tempo 2049	500,000,000	99.29%	25 Oktober 2049/ *October 25, 2049*	6.25%	*Due in 2049*
Subjumlah	3,000,000,000				*Subtotal*

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018 (In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Pokok/ *Principal* *) US$	Harga penerbitan/ *Issuing price* %	Jatuh tempo/ *Maturity date*	Tingkat bunga/ *Interest rate* %	
Penerbitan tahun 2017					*Issued in 2017*
Jatuh tempo 2027	1,500,000,000	98.99%	15 Mei 2027/ *May 15, 2027*	4.13%	*Due in 2027*
Jatuh tempo 2047	500,000,000	98.51%	15 Mei 2047/ *May 15, 2047*	5.25%	*Due in 2047*
Subjumlah	2,000,000,000				*Subtotal*
Penerbitan tahun 2012					*Issued in 2012*
Jatuh tempo 2042	1,000,000,000	98.51%	24 Oktober 2042/ *October 24, 2042*	5.25%	*Due in 2042*
Penerbitan tahun 2011					*Issued in 2011*
Jatuh tempo 2021	1,000,000,000	99.05%	22 November 2021/ *November 22, 2021*	5.50%	*Due in 2021*
Obligasi terjamin					***Guaranteed notes***
Penerbitan tahun 2009					*Issued in 2009*
Jatuh tempo 2020	337,636,000	99.15%	20 Januari 2020/ *January 20, 2020*	7.75%	*Due in 2020*
Jatuh tempo 2019	146,441,000	99.15%	7 Agustus 2019/ *August 7, 2019*	8.00%	*Due in 2019*
Subjumlah	484,077,000				*Subtotal*
Penerbitan tahun 2007					*Issued in 2007*
Jatuh tempo 2037	288,312,000	98.59%	29 Juni 2037/ *June 29, 2037*	7.87%	*Due in 2037*
Jumlah	**10,172,389,000**				***Total***

	Pokok/ *Principal* *) EUR	Harga penerbitan/ *Issuing price* %	Jatuh tempo/ *Maturity date*	Tingkat bunga/ *Interest rate* %	
Surat utang jangka menengah global					***Global medium term notes***
Penerbitan tahun 2019					*Issued in 2019*
Jatuh tempo 2030	500,000,000	99.416%	5 Februari 2031/ *Februari 5, 2031*	1.88%	*Due in 2030*
Penerbitan tahun 2018					*Issued in 2018*
Jatuh tempo 2025	500,000,000	99.22%	25 Oktober 2025/ *October 25, 2025*	2.88%	*Due in 2025*
Jumlah	**1,000,000,000**				***Total***

	Pokok/ *Principal* *) JPY	Harga penerbitan/ *Issuing price* %	Jatuh tempo/ *Maturity date*	Tingkat bunga/ *Interest rate* %	
Obligasi					***Bonds***
Penerbitan tahun 2019					*Issued in 2019*
Jatuh tempo 2022	3,700,000,000	100%	20 September 2022/ *September 20, 2022*	0,430%	*Due in 2022*
Jatuh tempo 2024	18,500,000,000	100%	20 September 2024/ *September 20, 2024*	0,870%	*Due in 2024*
Jatuh tempo 2029	1,000,000,000	100%	20 September 2029/ *September 20, 2029*	1,050%	*Due in 2029*
Jumlah	**23,200,000,000**				***Total***

*) dalam jumlah penuh/ *in full amount*

Obligasi

Pada tanggal 20 September 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Japanese Yen sejumlah JPY23.200.000.000 dengan Sumitomo Mitsui Banking Corporation sebagai Agen Fiskal. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Bonds

On September 20, 2019, the Company issued Japanese Yen Bonds amounting to JPY23,200,000,000, with Sumitomo Mitsui Banking Corporation acting as Fiscal Agent. The interest is payable semiannually starting from March 20, 2020 until the maturity date.

Surat Utang Jangka Menengah Global

Global Medium Term Notes

Penerbitan tahun 2019

Issued in year 2019

Pada tanggal 17 Juli 2019, Perusahaan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah sejumlah US$1.400.000.000 dalam program Surat Utang Jangka Menengah Global dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Utang Jangka Menengah Global.

On July 17, 2019, the Company issued Global Medium Term Notes amounting to US$1,400,000,000, under the Global Medium Term Notes program with Deutsche Bank Trust Company Americas acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from January 1, 2020 until the maturity date of the Global Medium Term Notes.

Pada tanggal 5 November 2019, Perusahaan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah dengan jumlah nilai nominal sebesar US$1.000.000.000 dan EUR500.000.000 dalam program Surat Utang Jangka Menengah Global dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 5 Februari 2020 untuk mata uang USD dan 5 November 2020 untuk mata uang EUR sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Utang Jangka Menengah Global.

On November 5, 2019, the Company issued Global Medium Term Notes amounting to US$1,000,000,000,and EUR500,000,000 under the Global Medium Term Notes program with Deutsche Bank Trust Company Americas acting as the Trustee. The interest is payable semiannually starting from February 5, 2020 for USD currency and November 5, 2020 for EUR currency until the maturity date of the Global Medium Term Notes.

Penerbitan tahun 2018

Issued in year 2018

Pada tanggal 25 Oktober 2018, Perusahaan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah sejumlah US$1.000.000.000 dan EUR500.000.000 dalam program Surat Utang Jangka Menengah Global dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 25 April 2019 sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Utang Jangka Menengah Global.

On October 25, 2018, the Company issued Global Medium Term Notes amounting to US$1,000,000,000 and EUR500,000,000, under the Global Medium Term Notes program with Deutsche Bank Trust Company Americas acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from April 25, 2019 until the maturity date of the Global Medium Term Notes.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tanggal 21 Mei 2018, Perusahaan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah sejumlah US$2.000.000.000 dalam program Surat Utang Jangka Menengah Global dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 21 November 2018 sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Utang Jangka Menengah Global.

On May 21, 2018, the Company issued Global Medium Term Notes amounting to US$2,000,000,000, under the Global Medium Term Notes program with Deutsche Bank Trust Company Americas acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from November 21, 2018 until the maturity date of the Global Medium Term Notes.

Dengan penerbitan Surat Utang tanggal 21 Mei 2018 tersebut, Perusahaan melakukan pembelian kembali dengan skema pelunasan dipercepat terhadap sebagian Obligasi Terjamin penerbitan tahun 2009 dan 2007. Jumlah pokok pelunasan dipercepat sebesar US$1.727.611.000 yang terdiri atas Obligasi Terjamin penerbitan tahun 2009 yang jatuh tempo pada tahun 2020 dan 2019 serta Obligasi Terjamin penerbitan tahun 2007 yang jatuh tempo pada tahun 2037 dengan nilai pelunasan dipercepat sebagian masing-masing sebesar US$912.364.000, US$603.559.000 dan US$211.688.000. Sehingga pada tanggal 31 Desember 2018 jumlah pokok utang Obligasi Terjamin penerbitan tahun 2009 dan penerbitan tahun 2007 adalah sebesar US$772.389.000 yang terdiri atas nilai sisa Obligasi Terjamin penerbitan tahun 2009 sebesar US$337.636.000 dan US$146.441.000 dan Obligasi Terjamin penerbitan tahun 2007 yang sebesar US$288.312.000.

With the issuance of the May 21, 2018 Notes, the Company conducted a buyback portion of Guaranteed Notes with accelerated repayment scheme for bonds issued in 2009 and 2007. The amount of accelerated repayment was US$1,727,611,000 which consist of Guaranteed Notes issued in 2009 matured in 2020 and 2019, and Guaranteed Notes issued in 2007 matured in 2037 with principal amount of partial accelerated repayment amounted to US$912,364,000, US$603,559,000 and US$211,688,000, respectively. Therefore as of December 31, 2018 the principal amount of Guaranteed Notes issued in year 2009 and 2007 amounted to US$772,389,000 that consist of residual amount of Guaranteed Notes issued in 2009 amounted to US$337,636,000 and US$146,441,000, and residual amount of Guaranteed Notes issued in 2007 amounted to US$288,312,000.

Manajemen berpendapat bahwa pelunasan dipercepat Obligasi Terjamin penerbitan tahun 2009 dan penerbitan tahun 2007 tersebut merupakan suatu transaksi modifikasi substansial sehingga mengakui penerbitan Surat Utang sebagai utang baru dan mengakui keuntungan atas penerbitan baru tersebut sebesar US$194.087.599 ditahun yang berjalan.

Management believes that the accelerated repayment of Guaranteed Notes issued in 2009 and 2007 is a substantial modification to the transactions, and that the Company recognizes the issuance of Notes as new debt and recorded a gain on the issuance of new Notes amounted to US$194,087,599 in the current year.

Penerbitan tahun 2017

Pada tanggal 15 Mei 2017, Perusahaan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah sejumlah US$2.000.000.000 dalam program Surat Utang Jangka Menengah Global dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai

Issued in year 2017

On May 15, 2017, the Company issued Global Medium Term Notes amounting to US$2,000,000,000, under the Global Medium Term Notes program with Deutsche Bank Trust Company Americas acting as the Trustee. The interest is

Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 15 November 2017 sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Utang Jangka Menengah Global.

payable semi-annually starting from November 15, 2017 until the maturity date of the Global Medium Term Notes.

Penerbitan tahun 2012

Pada tanggal 24 Oktober 2012, Perusahaan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah sejumlah US$1.000.000.000 dalam program Surat Utang Jangka Menengah Global dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 24 April 2013 sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Utang Jangka Menengah Global.

Issued in year 2012

On October 24, 2012, the Company issued Global Medium Term Notes amounting to US$1,000,000,000, under the Global Medium Term Notes program with Deutsche Bank Trust Company Americas acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from April 24, 2013 until the maturity date of the Global Medium Term Notes.

Penerbitan tahun 2011

Pada tanggal 22 November 2011, Perusahaan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah sejumlah US$1.000.000.000 dalam program Surat Utang Jangka Menengah Global dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 22 Mei 2012 sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Utang Jangka Menengah Global.

Issued in year 2011

On November 22, 2011, the Company issued Global Medium Term Notes amounting to US$1,000,000,000, under the Global Medium Term Notes program with Deutsche Bank Trust Company Americas acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from May 22, 2012 until the maturity date of the Global Medium Term Notes.

Obligasi Terjamin

Penerbitan tahun 2009
Pada tanggal 6 November 2009, MH, entitas anak, yang berdomisili di Belanda menerbitkan Obligasi Terjamin sejumlah US$1.250.000.000 dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 20 Januari 2010 sampai dengan jatuh tempo Obligasi Terjamin. Pada tanggal 21 Mei 2018, Perusahaan melakukan pelunasan dipercepat sebagian sebesar US$912.364.000. Sehingga sisa Obligasi Terjamin menjadi sebesar US$337.636.000.

Pada tanggal 7 Agustus 2009, MH menerbitkan Obligasi Terjamin sejumlah US$750.000.000 dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 8 Februari 2010 sampai dengan jatuh tempo Obligasi Terjamin. Pada tanggal 21 Mei 2018, Perusahaan melakukan pelunasan dipercepat sebagian

Guaranteed Notes

Issued in 2009
On November 6, 2009, MH, a subsidiary, domicile in Netherlands issued Guaranteed Notes amounting to US$1,250,000,000, with Deutsche Bank Trust Company Americas acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from January 20, 2010 until the maturity date of the Guaranteed Notes. On May 21, 2018, the Company made a partial acceleration repayment amounted to US$912,364,000. Therefore, the Guaranteed Notes remaining balance was amounted to US$337,636,000.

On August 7, 2009, MH issued Guaranteed Notes amounting to US$750,000,000, with Deutsche Bank Trust Company Americas acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from February 8, 2010 until the maturity date of the Guaranteed Notes. On May 21, 2018, the Company made a partial acceleration repayment amounted to US$603,559,000.

sebesar US$603.559.000. Sehingga, sisa Obligasi Terjamin menjadi sebesar US$146.441.000. Obligasi tersebut telah dibayar keseluruhan ditahun 2019.

Penerbitan tahun 2007
Pada tanggal 28 Juni 2007, MH menerbitkan Obligasi Terjamin sejumlah US$1.000.000.000 dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 28 Desember 2007 sampai 28 Juni 2017. Pada Juni 2017, Obligasi Terjamin tranche A telah dibayar keseluruhannya di tahun 2017. Pada tanggal 21 Mei 2018, Perusahaan melakukan pelunasan dipercepat sebagian sebesar US$211.688.000. Sehingga, sisa Obligasi Terjamin menjadi sebesar US$288.312.000.

Perjanjian perwaliamanatan menetapkan bahwa:

- Tidak lebih dari 30 hari sejak dua kejadian dimana Pemerintah Indonesia kehilangan kepemilikan lebih dari 50%, baik langsung maupun tidak langsung, hak suara pada Perusahaan atau, jika dan ketika diterbitkan saham Dwiwarna Seri A dan kejadian yang menurunkan peringkat (*Change of Control Triggering Event*), MH dapat diminta untuk melakukan penawaran untuk membeli kembali Obligasi Terjamin dengan harga 101% dari nilai nominal ditambah bunga terutang sampai tanggal pembelian kembali. MH mempunyai opsi dalam waktu tertentu untuk menebus kembali seluruh Obligasi Terjamin ini dengan harga 100% dari nilai nominal, bersama dengan utang bunga dalam hal terjadinya perubahan tertentu terhadap perpajakan di Belanda atau Indonesia.

- Pembatasan tertentu termasuk antara lain: penambahan pinjaman sesuai dengan "Rasio Pengecualian"; pemberian jaminan; pembayaran dividen; penggabungan usaha, akuisisi dan penjualan aset.

Therefore, the Guaranteed Notes balance was amounted to US$146,441,000. The bonds has been fully repaid in 2019.

Issued in 2007
On June 28, 2007, MH issued Guaranteed Notes amounting to US$1,000,000,000, with Deutsche Bank Trust Company Americas acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from December 28, 2007 until June 28, 2017. On June 2017, Guaranteed Notes tranche A has been fully paid in 2017. On May 21, 2018, the Company made a partial acceleration repayment amounted to US$211,688,000. Therefore, the Guaranteed Notes remaining balance was amounted to US$288,312,000.

The Trustee stipulates that:

- *No later than 30 days following the occurrence of two separate events in which the Government of the Republic of Indonesia ceases to own, directly or indirectly, more than 50% of the voting securities of the Company or, if and when issued, the Class A Dwiwarna Share and an event in which a rating declines (Change of Control Triggering Event), MH may be required to make an offer to repurchase all Guaranteed Notes outstanding at a purchase price equal to 101% of their principal amount plus accrued and unpaid interest, if any, to the date of repurchase. The Guaranteed Notes are subject to redemption in whole, at 100% of their principal amount, together with any accrued interest, at the option of MH at a certain time in the event of certain changes affecting the taxes of the Netherlands or Indonesia.*
- *Certain covenants, including, among others: the incurrence of additional indebtedness along with the "Ratio Exception"; the incurrence of liens; the payment of dividends; mergers, acquisitions and disposals.*

Perusahaan dan entitas anak memenuhi pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam perjanjian Wali Amanat.

The Company and its subsidiaries complied with the restrictions specified within the agreements with the acting Trustee.

Dana yang diperoleh dari penerbitan Surat Utang Jangka Menengah Global dan Obligasi Terjamin ini digunakan untuk mendanai kebutuhan investasi program percepatan pembangunan fasilitas tenaga listrik, konstruksi rutin dan untuk tujuan umum korporasi.

The proceeds from the Global Medium Term Notes and Guaranteed Notes issued were used to fund the capital expenditure requirements in connection with the fast track program, regular construction and for general corporate purposes.

	Lembaga pemeringkat/ *Rating agency*			
	Moody"s Investor Service, Inc.,	***Standard and Poor's***	***Fitch***	**Japan Credit Rating**
Surat utang jangka menengah global/ ***Global medium term notes***				
Penerbitan tahun 2019/ *Issued in 2019*	Baa2	BBB	BBB	
Penerbitan tahun 2018/ *Issued in 2018*	Baa2	-	BBB	-
Penerbitan tahun 2017/ *Issued in 2017*	Baa2	-	BBB	-
Penerbitan tahun 2012/ *Issued in 2012*	Baa2	BBB	BBB	-
Penerbitan tahun 2011/ *Issued in 2011*	Baa2	BBB	BBB	-
Obligasi terjamin/ ***Guaranteed notes***				
Penerbitan tahun 2009/ *Issued in 2009*	Baa2	BBB	-	-
Penerbitan tahun 2007/ *Issued in 2007*	Baa2	BBB	-	-
Japanese Yen Bond				
Penerbitan tahun 2019/ *Issued in 2019*	Baa2	BBB	-	BBB

b. Kredit Investasi Kolektif - Efek Beragun Aset ("KIK-EBA")

b. Collective Investment Contract – Asset Backed Securities ("KIK-EBA")

	2019 Rp	**2018 Rp**	
Pembayaran jatuh tempo dalam waktu:			*Minimum lease payments due:*
Tidak lebih dari satu tahun	748,050	909,480	*Not later than one year*
Lebih dari satu tahun	1,473,118	2,501,072	*More than one year*
Jumlah pembayaran minimum	2,221,168	3,410,552	*Total minimum payments*
Biaya keuangan belum diamortisasi	(279,906)	(502,566)	*Unamortized finance cost*
Jumlah	**1,941,262**	**2,907,986**	***Total***
Disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian:			*Presented in consolidated statements of financial position:*
Liabilitas jangka pendek	586,620	686,819	*Current liabilities*
Liabilitas jangka panjang	1,354,642	2,221,167	*Non-current liabilities*
Jumlah	**1,941,262**	**2,907,986**	***Total***

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tanggal 25 April 2017, PT Danareksa Investment Management ("DIM") dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") menandatangani akta perjanjian Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Danareksa Indonesia Power PLN I – Piutang Usaha ("KIK-DIPP1"). Perjanjian tersebut mengalami beberapa kali amandemen, terakhir pada tanggal 14 September 2017. Pada perjanjian tersebut DIM akan bertindak sebagai Manajer Investasi dan BRI akan bertindak sebagai Bank Kustodian.

On April 25, 2017, PT Danareksa Investment Management ("DIM") and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") signed a deed of Collective Investment Contract Asset Backed Securities Danareksa of Indonesia Power PLN I - Accounts Receivable ("KIK-DIPP1"). The agreement has been amended several times, the latest on September 14, 2017. Based on the agreement, DIM will act as Investment Manager and BRI will act as Custodian Bank.

Pada tanggal 11 September 2017 berdasarkan surat pernyataan persetujuan pengalihan piutang komponen A dalam perjanjian jual beli tenaga listrik ("PJBTL"), Perusahaan menyetujui IP, entitas anak, untuk mengalihkan piutang yang timbul atas kewajiban pembayaran tunai Komponen A Suralaya ("SLA") unit 1,2,3 dan 4 atas PJBTL SLA unit 1,2,3,4,5,6 dan 7 yang telah diamandemen pada tanggal 22 Agustus 2017 dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017. Piutang tersebut dialihkan kepada pihak ketiga dalam rangka KIK-DIPP1, maksimal sebesar Rp5.000.000.

On September 11, 2017 based on the statement of approval for the transfer of receivables of component A under the power purchase agreement ("PJBTL"), the Company approved IP, a subsidiary, to transfer the receivables arising from the cash payment obligations of Component A Suralaya steam power plant ("SLA") unit 1,2,3 and 4 of PJBTL SLA unit 1,2,3,4,5,6 and 7 which have been amended on August 22, 2017 and applied retroactively since January 1, 2017. The receivables were transferred to third party for KIK-DIPP1, maximum amount of Rp5,000,000.

Pada tanggal 14 September 2017, IP menandatangani perjanjian pengikatan transaksi sekuritisasi piutang usaha Indonesia Power – PLN I No. 206.PJ/061/IP/2017 dengan DIM dan BRI. Di dalam perjanjian tersebut, IP setuju dan mengikat diri untuk menjual piutang usaha sebesar Rp4.932.107 dengan harga Rp4.000.000.

On September 14, 2017, IP entered into an agreement for trade receivables securitization transaction of Indonesia Power - PLN I No. 206.PJ/061/IP/2017 with DIM and BRI. Under the agreement, IP agreed and binded to sell their accounts receivable amounting to Rp4,932,107 at a value price of Rp4,000,000.

Sejak penandatanganan akta perjanjian ("*Cessie*") tersebut semua pembayaran atas piutang usaha yang dialihkan tetap dilakukan oleh Perusahaan kepada IP yang dalam hal ini akan menerima Dana hasil koleksi pelunasan Piutang Usaha, namun tidak lagi untuk dirinya sendiri, tetapi sebagai kapasitas yang bertindak untuk dan atas nama KIK-DIPP1.

Since the signing of the deed ("Cessie") agreement, all payments made to the transferred trade receivables from the Company are still manage by the IP who will collect the Receivables settlement, however those will not for itself, but act for and on behalf of KIK-DIPP1.

Pada tanggal 15 September 2017, DIM bersama dengan BRI melakukan penawaran umum KIK-DIPP1 sebesar Rp4.000.000 dengan tingkat pengembalian pokok dan hasil Investasi dilakukan dengan *fixed installment* ("anuitas") berdasarkan dari nilai investasi dan *yield* 8,25%. Tanggal akhir pelunasan investasi adalah 19 September 2022. KIK-DIPP1 merupakan investasi dengan peringkat idAAA berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia.

On September 15, 2017, DIM together with BRI initiate a public offering of KIK-DIPP1 amounting to Rp4,000,000 with a principal rate of return and investment proceeds settled with fixed installment ("annuity") based on investment value and 8.25% yield. The final date of settlement of the investment is September 19, 2022. The KIK-DIPP1 is an investment with idAAA rating based on the rating from PT Pemeringkat Efek Indonesia.

Pada laporan keuangan konsolidasian, penerimaan kas dari transaksi sekuritisasi tersebut dicatat sebagai utang Kredit Investasi Kolektif – Efek Beragun Aset ("KIK-EBA").

In the consolidated financial statements, cash receipts from securitization transactions were recorded as Collective Investment Credit - Asset Backed Securities ("KIK-EBA") loans.

Berdasarkan KIK-DIPP1, EBA diterbitkan oleh Bank Kustodian dalam 2 (dua) kelas yaitu:

Based on KIK-DIPP1, EBA is issued by Custodian Bank in 2 (two) classes, namely:

1. EBA Kelas A dengan total nilai nominal sebesar Rp3.688.000 mewakili 92,20% dari keseluruhan aset keuangan. Pemegang EBA Kelas A memiliki hak untuk menerima arus kas tetap setiap 3 (tiga) bulan sekali yang terdiri dari pelunasan bertahap pokok investasi dan pembagian hasil investasi EBA Kelas A.
2. EBA Kelas B dengan total nominal sebesar maksimum 7,80% dari keseluruhan aset keuangan. Pemegang EBA kelas B memiliki hak untuk menerima arus kas tidak tetap pada setiap tanggal pelunasan bertahap dan tanggal pembagian hasil investasi EBA Kelas B.

1. *Class A EBA with a total nominal value of Rp3,688,000 represents 92.20% of total financial assets. Class A EBA holders have the right to receive a fixed cash flow on every 3 (three) months consist of principal gradual settlement and investment return of Class A EBA.*
2. *Class B EBA with a nominal maximum of 7.80% of total financial assets. Class B EBA holders have the right to receive variable non-fixed cash flow on each date of principal gradual settlement and investment return of EBA Class B.*

Semua pembayaran atas EBA semata-mata bersumber dari Perusahaan atas piutang usaha milik IP yang disekuritisasi. Pemegang EBA kelas A mempunyai hak untuk dibayar mendahului pemegang EBA kelas B. Pemegang EBA kelas B akan menerima pembayaran pelunasan bertahap dan hasil investasi EBA kelas B setelah dilakukan pembayaran penuh atas semua EBA kelas A menurut tata urutan pembayaran (*payment waterfall*).

All EBA payments are solely derived from the Company on securitized IP's trade receivable. Class A EBA holders have the privilege to be paid before Class B EBA holders. Class B EBA holders will receive the principal gradual settlement and investment returns after full payment of all Class A EBA according to the payment waterfall.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

29. Utang Listrik Swasta / *29. Electricity Purchase Payable*

Akun ini merupakan utang listrik swasta yang direstrukturisasi melalui renegosiasi dengan IPP.

This account represents electricity purchase payable, which was restructured through renegotiation with IPP.

Rincian berdasarkan pemasok dan jadwal pembayaran pokok adalah sebagai berikut:

Details according to creditors and payment schedules are as follows:

a. Berdasarkan pemasok / *a. By creditor*

	2019 Rp	2018 Rp	
PT Paiton Energy			*PT Paiton Energy*
2019: US$439.164.341			*2019: US$439,164,341*
2018: US$465.344.324	6,104,823	6,738,651	*2018: US$465,344,324*
PT Jawa Power			*PT Jawa Power*
2019:US$52.232.386			*2019: US$52,232,386*
2018: US$53.288.271	726,083	771,668	*2018: US$53,288,271*
Jumlah	**6,830,906**	**7,510,319**	***Total***
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(399,458)	(394,403)	*Less current maturities*
Bagian jangka panjang	**6,431,448**	**7,115,916**	***Long-term portion***

b. Berdasarkan jadwal pembayaran pokok, pada nilai nominal / *b. By installment schedule, at nominal amount*

	2019 Rp	2018 Rp	
Dibayarkan:			*Payable in:*
Dalam satu tahun	399,458	394,403	*Within one year*
Pada tahun kedua	421,784	416,125	*In the second year*
Pada tahun ketiga	445,745	439,383	*In the third year*
Pada tahun keempat	471,530	464,343	*In the fourth year*
Setelah lima tahun	5,092,389	5,796,065	*After five years*
Jumlah pembayaran	**6,830,906**	**7,510,319**	***Total payments***

Utang kepada PT Paiton Energy dan PT Jawa Power dikenakan bunga per tahun masing-masing sebesar 4,81% dan 18,45% dibayar dalam 360 kali angsuran bulanan sejak 1 Januari 2002 sampai dengan 1 Desember 2031.

Payables to PT Paiton Energy and PT Jawa Power bear annual interest of 4.81% and 18.45%, respectively, and are payable in 360 monthly installments from January 1, 2002 until December 1, 2031.

30. Utang Pihak Berelasi / *30. Payable to Related Parties*

Utang kepada PT Riau Power merupakan utang oleh PLN Batam, masing-masing untuk pembelian *switchyard* dan utang atas setoran saham yang belum dibayarkan penuh oleh PLN Batam.

Payable to PT Riau Power is payable by PLN Batam for purchases of switchyard and historical subscription of shares that have not been fully paid by PLN Batam.

31. Utang Usaha / *31. Trade Payables*

Akun ini merupakan liabilitas sehubungan dengan pembelian tenaga listrik, bahan bakar, barang dan jasa.

This account represents payables arising from purchases of electricity, fuel, goods and services.

Rincian utang usaha adalah sebagai berikut:

Details of trade payables are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Pihak berelasi			***Related parties***
Pembelian bahan bakar, barang dan jasa	9,021,121	6,605,433	*Purchase of fuel goods and service*
Pembelian tenaga listrik	2,793,614	2,439,097	*Purchase of electricity*
Subjumlah	11,814,735	9,044,530	*Subtotal*
Pihak ketiga			***Third parties***
Pembelian bahan bakar, barang dan jasa	28,877,826	25,736,924	*Purchase of fuel goods and service*
Pembelian tenaga listrik	11,310,222	13,826,220	*Purchase of electricity*
Subjumlah	40,188,048	39,563,144	*Subtotal*
Jumlah	**52,002,783**	**48,607,674**	***Total***

Rincian utang usaha dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

Details of trade payables in foreign currencies are as follows:

	2019		2018		
	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen/ *Equivalent* Rp	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen/ *Equivalent* Rp	
US$	898,507,498	12,490,157	616,689,475	8,930,280	*US$*
EUR	326,270	5,086	--	--	*EUR*
Lain **)	30,385,801	422,393	10,058,203	145,653	*Others **)*
Jumlah		**12,917,636**		**9,075,933**	***Total***

*) Dalam jumlah penuh
**) Utang usaha dalam mata uang lainnya disajikan dalam jumlah setara US$, menggunakan kurs tanggal pelaporan

*) *In full amount*
**) *Trade payables in other currencies are presented in US$ equivalents using the exchange rate prevailing at reporting date*

32. Utang Lain-Lain / *32. Other Payables*

	2019 Rp	2018 Rp	
Perolehan aset tetap dan pekerjaan dalam pelaksanaan			*Acquisition of property, plant and equipment and construction in progress*
Rupiah	16,976,626	16,614,653	*Rupiah*
US$	7,033,198	9,351,489	*US$*
EUR	1,856,748	1,976,940	*EUR*
JPY	1,726,827	919,748	*JPY*
CHF	99,993	110,236	*CHF*
CNY	4,133	--	*CNY*

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2019 Rp	2018 Rp	
Pemerintah daerah	2,193,064	2,109,136	*Local government*
Uang muka penjualan tenaga listrik	203,386	99,873	*Advances received on sale of electricity*
Karyawan	63,721	145,162	*Employees*
Lain-lain	574,885	1,738,134	*Others*
Jumlah	**30,732,581**	**33,065,371**	***Total***
Dikurangi bagian jangka panjang	133,662	94,427	*Less long-term portion*
Bagian jangka pendek	**30,598,919**	**32,970,944**	***Current portion***

Pemerintah Daerah
Utang kepada Pemerintah Daerah merupakan jumlah yang ditagih Perusahaan dari pelanggan untuk pajak penerangan jalan umum. Selanjutnya jumlah yang dipungut akan diteruskan kepada Pemerintah Daerah.

Local Government
The payable to Local Government represents the amount collected by the Company from the customer for streetlight taxes. This is subsequently remitted to the respective Local Government.

Uang muka penjualan tenaga listrik
Akun ini merupakan kas yang diterima atas penjualan listrik prabayar.

Advances received on sale of electricity
This account represents cash received from the sale of prepaid electricity.

Karyawan
Utang kepada karyawan terutama merupakan penerimaan dimuka atas cicilan penjualan rumah dinas.

Employees
Payable to employees mainly represents receipt of advance installment payment from employees related to house installment.

33. Utang Pajak / *33. Taxes Payable*

	2019 Rp	2018 Rp	
Perusahaan			*The Company*
Pajak kini	--	--	*Current tax*
Pajak penghasilan			*Income taxes*
Pasal 21	60,416	220,338	*Article 21*
Pasal 22	93,169	479,337	*Article 22*
Pasal 23	37,858	70,273	*Article 23*
Pasal 15 dan 4(2)	29,147	112,058	*Article 15 and 4(2)*
Pajak pertambahan nilai	854,600	980,297	*Value added tax*
Subjumlah	1,075,190	1,862,303	*Subtotal*
Entitas anak			*Subsidiaries*
Pajak kini	377,252	192,406	*Current tax*
Pajak penghasilan			*Income taxes*
Pasal 21	154,715	242,449	*Article 21*
Pasal 22	139,000	7,270	*Article 22*
Pasal 23	50,974	33,487	*Article 23*
Pasal 15 dan 4(2)	89,260	70,214	*Article 15, 25 and 26*
Pajak pertambahan nilai	496,889	136,305	*Value added tax*
Pajak bumi dan bangunan	8	17	*Land and building taxes*
Pajak selisih penilaian kembali aset tetap	--	15,677	*Tax on difference in property, plant and equipment revaluation*
Subjumlah	1,308,098	697,825	*Subtotal*
Jumlah	**2,383,288**	**2,560,128**	***Total***

34. Biaya Masih Harus Dibayar / *34. Accrued Expenses*

	2019 Rp	2018 Rp	
Bunga dan beban keuangan			*Interest and financing charges*
Pihak berelasi			*Related parties*
Utang bank	451,137	497,711	*Bank loans*
Utang penerusan pinjaman	331,275	344,854	*Two-step loans*
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non bank	74,699	89,679	*Government and non bank Government financial institution loans*
Jumlah pihak berelasi	857,111	932,244	*Total related parties*
Pihak ketiga			*Third parties*
Utang obligasi dan sukuk ijarah	2,862,048	2,139,946	*Bonds payable and sukuk ijara*
Utang bank	1,470,335	1,265,078	*Bank loans*
Utang sewa pembiayaan	997,880	889,264	*Lease liabilities*
Utang listrik swasta	45,527	50,731	*Electricity purchase payable*
Jumlah pihak ketiga	5,375,790	4,345,019	*Total third parties*
Subjumlah	6,232,901	5,277,263	*Subtotal*
Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek			*Employee benefit liabilities short-term*
Bonus dan insentif prestasi kerja	5,711,171	6,062,464	*Bonus and performance incentives*
Biaya operasional	4,810,568	3,469,291	*Operational charges*
Jumlah	**16,754,640**	**14,809,018**	***Total***

Rincian biaya masih harus dibayar dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

Details of accrued expenses in foreign currencies are as follows:

	2019		2018		
	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen/ *equivalent* Rp	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Ekuivalen/ *equivalent* Rp	
US$	244,021,636	3,392,147	188,553,280	2,730,440	*US$*
JPY	8,882,526,820	1,136,667	7,972,462,852	1,045,310	*JPY*
EUR	5,459,709	85,109	1,142,063	18,912	*EUR*
Lain-lain **)	64,218	893	89,447	1,295	*Others **)*
Jumlah		**4,614,816**		**3,795,957**	***Total***

*) Dalam jumlah penuh
**) Biaya masih harus dibayar dalam mata uang asing lainnya disajikan setara US$ dengan menggunakan kurs tanggal pelaporan.

*) *In full amount*
**) *Accrued expenses denominated in other foreign currencies are presented as US$ equivalents using the exchange rates prevailing at reporting date.*

35. Uang Jaminan Langganan / *35. Customers' Security Deposits*

Akun ini merupakan uang jaminan langganan yang ditentukan berdasarkan besar daya dan golongan tarif. Uang jaminan langganan akan dikembalikan apabila pelanggan berhenti menjadi pelanggan, dengan memperhitungkan rekening listrik belum dibayar.

This account represents Customers' security deposits determined based on power supply and electricity tariff. Customer security deposits will be refunded, net of unpaid electricity bills, upon discontinuation of customers' subscriptions.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

36. Utang Biaya Proyek / *36. Project Cost Payable*

Akun ini merupakan utang kepada kontraktor atas biaya konstruksi dan pengadaan material. Akun ini akan direklasifikasi ke akun penerusan pinjaman pada saat penerbitan *Withdrawal Authorization* (WA) atau dokumen lain yang sejenis.

This account represents payable to contractors arising from construction expense and purchases of materials. This account will be reclassified into the two-step loans account at the issuance of the Withdrawal Authorization (WA) or other similar documents.

37. Penjualan Tenaga Listrik / *37. Sale of Electricity*

Penjualan tenaga listrik menurut pelanggan adalah sebagai berikut:

Sale of electricity by customers is as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Pihak berelasi			***Related parties***
Badan Usaha Milik Negara	5,721,522	5,505,800	*State-Owned Enterprises*
Pihak ketiga			***Third parties***
Umum	257,889,372	246,311,630	*Public*
Lembaga dan kementerian	11,870,575	11,329,024	*Institutions and ministries*
TNI dan Polri	1,431,020	1,328,072	*Indonesian Armed Forces*
Jumlah pihak ketiga	271,190,967	258,968,726	*Total of third parties*
Jumlah	**276,912,489**	**264,474,526**	***Total***
Masa uji coba	(850,564)	(996,975)	***Commisioning test***
Jumlah penjualan bersih	**276,061,925**	**263,477,551**	***Total sales - net***

Testing dan masa uji coba *(commissioning test)* merupakan serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik yang telah selesai dikerjakan dan hendak dioperasikan. Beban dan pendapatan atas penjualan tenaga listrik yang terjadi pada masa uji coba dikapitalisasi ke Pekerjaan Dalam Pelaksanaan konstruksi dikarenakan instalasi listrik belum beroperasi.

Testing and commissioning (commissioning test) are series of inspection and testing activities for electrical installations that have been completed and are going to be operated. The costs and revenues from the sale of electricity that occurred during the commissioning test are capitalized into Construction in Progress because the electrical installation has not been commercially operated.

Penjualan tenaga listrik tahun 2019 dan 2018 didasarkan pada Tarif Dasar Listrik, yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

- Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2016 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 19 Tahun 2019.
- Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No. 38 Tahun 2015 dan peraturan Gubernur Kepulauan Riau No. 21 Tahun 2017 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PLN Batam.

Sale of electricity for the years 2019 dan 2018 are based on the Basic Electricity Tariff determined by the Government and Local Government as follows:

- *Regulation of the Minister of ESDM No. 28 Year 2016 with the latest amended by Regulation of the Minister of ESDM No. 19 Year 2019.*
- *Regulation of the Governor of Riau Islands No. 38 Year 2015 and regulation of the Governor of Riau Islands No. 21 Year 2017, regarding the tariff of electricity provided by PLN Batam.*

Tidak terdapat penjualan kepada pelanggan dengan jumlah melebihi 10% dari penjualan tenaga listrik.

The Company has no single customer from which it generates revenue of more than 10% of total sale of electricity.

38. Subsidi Listrik Pemerintah / *38. Government's Electricity Subsidy*

Pendapatan subsidi merupakan pendapatan dari Pemerintah Indonesia atas selisih antara biaya yang diperbolehkan ditambah marjin 7% dengan harga jual aktual per masing-masing golongan tarif kecuali untuk golongan tarif yang telah mendapatkan penyesuaian tarif otomatis menurut Peraturan Menteri ESDM No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2016 tentang tariff tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero).

Subsidy revenue represent the revenue from the Government of Indonesia for difference between allowable cost plus 7% margin with actual sales price for each tariff group except for tariff group which received automatic tariff adjustment based on the Minister of ESDM Regulation No. 19 Year 2019 regarding changes on the Minister of ESDM Regulation No. 28 Year 2016 regarding electricity tariff provided by PT PLN (Persero).

Pemerintah Republik Indonesia memberikan subsidi listrik kepada pelanggan melalui Perusahaan. Tata cara penghitungan dan pembayaran subsidi listrik periode Anggaran 31 Desember 2019 menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 174/PMK.02/2019 tanggal 22 November 2019. Subsidi listrik dihitung dari selisih negatif antara harga jual tenaga listrik rata-rata (Rp/kWh) dari masing-masing golongan tarif dikurangi Biaya Pokok Penyediaan ("BPP") tenaga listrik (Rp/kWh) pada tegangan di masing-masing golongan tarif dikalikan volume penjualan (kWh) untuk setiap golongan tarif. BPP tenaga listrik dihitung berdasarkan formula, termasuk tingkat susut jaringan transmisi dan distribusi, yang ditetapkan oleh ESDM c.q Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

The Government of the Republic of Indonesia has provided electricity subsidy to customers through the Company. The procedure for calculation and payment of electricity subsidy for Budget period December 31, 2019 are using the Minister of Finance Regulation No. 174/PMK.02/2019 dated November 22, 2019. The electricity subsidy is calculated from the negative difference between the average sales prices (Rp/kWh) of each tariff group less the cost of electricity supplies (Rp/kWh) on the voltage at each tariff group multiplied by the electricity sales volume (kWh) for each tariff group. The cost of electricity supplies is computed based on the formula, including the rate of transmission and distribution losses which is determined by the Directorate General of Electricity under the Ministry of ESDM.

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ("DIPA") No. SP DIPA-999.07.1.979321/2019 tanggal 31 Des Desember 2018 dan No.SP.DIPA-999.07.1.979321/2018 revisi tanggal 27 Desember 2018, pagu tertinggi subsidi listrik tahun anggaran 2019 dan 2018 ditetapkan masing-masing sebesar Rp59.323.456 dan Rp56.507.588. Masing-masing plafon tersebut termasuk 7% marjin diatas BPP tenaga listrik.

Based on the Approval Letter of Budget Performance List ("DIPA") No.SP.DIPA-999.07.1.979321/2019 dated December 31, 2018 and No.SP.DIPA- 999.07.1.979321/2018 revised dated December 27, 2018, the electricity subsidy plafond for budget year 2019 and 2018 amounted to Rp59,323,456 and Rp56,507,588 respectively. Each of the plafond amount includes 7% margin above the costs of electricity supplies.

Besarnya subsidi listrik dalam satu tahun anggaran secara final ditetapkan berdasarkan hasil audit atas ketaatan penggunaan subsidi listrik yang dilakukan oleh auditor yang ditunjuk Menteri Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran.

The amount of the electricity subsidy within a budget year is finalized based on the result of the compliance audit of the usage of the electricity subsidy performed by an auditor assigned by the Directorate General of Budget under the Ministry of Finance.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tanggal 28 April 2020, BPK RI menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Subsidi Listrik dan Perhitungan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik tahun anggaran 2019 No.01/BA/04/2020 yang menetapkan bahwa hasil audit perhitungan subsidi listrik tahun 2019 adalah sebesar Rp51.711.774.

On April 28, 2020 BPK RI has issued an Minutes of Audit on electricity subsidy and calculation of electricity tariff adjustment for fiscal year 2019 No.01/BA/04/2020 which determined that the audit result of electricity subsidy calculation in 2019 was amounted to Rp51,711,774.

Pendapatan subsidi listrik dirinci sebagai berikut:

The details of revenue from electricity subsidy are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Realisasi penerimaan subsidi tahun anggaran berjalan			*Realization of subsidy from current year budget*
Penerimaan tunai	51,288,854	51,207,588	*Cash received*
Saling hapus dengan pajak	1,377,603	--	*Offset with tax*
Kelebihan penerimaan subsidi			*Excess subsidy*
tahun anggaran 2018 (Catatan 25)	--	(3,105,834)	*budget years 2018 (Note 25)*
tahun anggaran 2019 (Catatan 25)	(954,683)	--	*budget years 2019 (Note 25)*
Jumlah	**51,711,774**	**48,101,754**	***Total***

39. Pendapatan Usaha Lain-Lain / *39. Other Revenues*

	2019 Rp	2018 Rp	
Jaringan dan jasa telekomunikasi	1,364,029	1,231,198	*Telecommunication network and service*
Jasa-jasa dan lainnya	889,911	474,378	*Services and others*
Sewa transformator	367,546	381,230	*Transformer rental*
Perubahan daya tersambung dan administrasi	22,581	24,213	*Upgrading of electricity power and administration fees*
Jumlah	**2,644,067**	**2,111,019**	***Total***

40. Beban Bahan Bakar dan Pelumas / *40. Fuel and Lubricants Expense*

	2019 Rp	2018 Rp	
Bahan bakar minyak			*Fuel*
Solar high speed diesel	20,637,756	26,195,314	*Solar high speed diesel*
Residu	2,378,592	3,905,085	*Residue*
Solar industrial diesel	2,313	239	*Solar industrial diesel*
Lainnya	1,710,712	1,637,653	*Others*
Subjumlah	24,729,373	31,738,291	*Subtotal*
Bahan Bakar - Non Minyak			*Nonfuel*
Gas alam	58,054,184	55,438,805	*Natural gas*
Batubara	49,397,601	46,285,905	*Coal*
Panas bumi	3,406,242	3,261,672	*Geothermal*
Air	222,372	275,382	*Water*
Subjumlah	111,080,399	105,261,764	*Subtotal*
Minyak pelumas	274,710	266,623	*Lubricants*
Jumlah	**136,084,482**	**137,266,678**	***Total***

Jumlah pembelian Perusahaan dari pemasok yang melebihi 10% dari total pendapatan Perusahaan adalah masing-masing sebesar Rp29.234.689 dan Rp29.385.495 tahun 2019 dan 2018 dari PT Pertamina (Persero) (pihak berelasi) (Catatan 52).

Purchases from a single supplier exceeding 10% of the Company's total revenues were transacted with PT Pertamina (Persero) (a related party) amounting to Rp29,234,689 and Rp29,385,495 in 2019 and 2018, respectively (Note 52).

41. Beban Pembelian Tenaga Listrik / *41. Purchased Electricity Expenses*

Akun ini termasuk pembelian tenaga listrik dari IPP terkait PPA dan ESC, pembelian tenaga listrik selama masa uji coba dan pembelian tenaga listrik dari kelebihan produksi dari IPP tertentu. Rinciannya adalah sebagai berikut:

This account includes purchase of electricity from certain IPPs in relation to PPAs and ESCs, purchase of electricity during the commissioning stage and purchase of excess electricity generated by certain IPPs. The details are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Pihak berelasi			*Related parties*
PT Sumber Segara Primadaya	7,274,856	7,585,240	*PT Sumber Segara Primadaya*
PT Pertamina Geothermal Energy	2,529,323	2,611,244	*PT Pertamina Geothermal Energy*
PT Bukit Pembangkit Innovative	1,050,730	898,457	*PT Bukit Pembangkit Innovative*
PT Bajradaya Sentranusa	871,617	840,239	*PT Bajradaya Sentranusa*
PT Geo Dipa Energi	791,998	790,389	*PT Geo Dipa Energi*
PT Shenhua Guohua PJBI	405,908	--	*PT Shenhua Guohua PJBI*
PT Dalle Energy Batam	304,021	592,659	*PT Dalle Energy Batam*
Subjumlah	13,228,453	13,318,228	*Subtotal*
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Paiton Energy	13,513,202	10,793,053	*PT Paiton Energy*
PT Jawa Power	8,066,142	8,544,357	*PT Jawa Power*
PT Cirebon Energi Power	4,156,240	4,275,665	*PT Cirebon Energi Power*
Lain-lain (masing - masing dibawah 5% dari jumlah)	44,599,954	47,336,308	*Others (each under 5% of total)*
Subjumlah	70,335,538	70,949,383	*Subtotal*
Jumlah	**83,563,991**	**84,267,611**	***Total***

42. Beban Sewa / *42. Lease Expenses*

Akun ini se qbagian besar merupakan biaya penyewaan mesin diesel dan genset yang ditentukan sebagai sewa operasi.

This account mostly represents the rental of diesel engines and gensets determined as operating leases.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. Beban Pemeliharaan / *43. Maintenance Expenses*

Akun ini merupakan beban yang timbul dari pemakaian material dan jasa borongan untuk keperluan pemeliharaan. Rinciannya adalah sebagai berikut:

This account represents spare parts used and contractor fees for maintenance purposes. The details are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Jasa borongan	16,564,535	15,003,198	*Contractor fees*
Pemakaian material	5,763,643	5,734,403	*Spare parts used*
Jumlah	**22,328,178**	**20,737,601**	***Total***

44. Beban Kepegawaian / *44. Personnel Expenses*

	2019 Rp	2018 Rp	
Jasa produksi dan insentif prestasi kerja	7,635,501	6,379,632	*Bonus and performance incentives*
Imbalan kerja (Catatan 50)	5,935,867	5,325,595	*Employee benefits (Note 50)*
Gaji	4,765,194	4,512,217	*Salaries*
Tunjangan	3,110,165	2,958,662	*Allowances*
Lain-lain	4,462,044	3,773,981	*Others*
Jumlah	**25,908,771**	**22,950,087**	***Total***

45. Beban Usaha Lain-Lain / *45. Other Operating Expenses*

	2019 Rp	2018 Rp	
Baca meter	1,659,005	1,205,846	*Meter reading*
Honorarium	1,121,225	1,204,284	*Honorarium*
Pengelolaan pelanggan	884,219	847,668	*Customer maintenance*
Teknologi informasi	737,720	846,688	*Technological information*
Perjalanan dinas	738,610	668,286	*Travel*
Penagihan rekening dan penertiban pemakaian tenaga listrik	517,997	643,541	*Billing collection and orderliness of electricity used*
Lain-lain (masing-masing di bawah 5% dari jumlah)	2,961,293	2,533,805	*Others (each below 5% of total)*
Jumlah	**8,620,069**	**7,950,118**	***Total***

46. Beban Keuangan / *46. Financial Cost*

	2019 Rp	2018 Rp	
Pihak berelasi			*Related parties*
Utang bank	5,341,726	4,288,070	*Bank loans*
Penerusan pinjaman	650,386	611,107	*Two-step loans*
Utang kepada Pemerintah	374,996	445,348	*Government loans*
Instrumen derivatif	295,118	199,545	*Derivative instruments*
Jumlah pihak berelasi	6,662,226	5,544,070	*Total related parties*
Pihak ketiga			*Third parties*
Utang bank	5,911,827	5,974,801	*Bank loans*
Utang obligasi	6,621,140	5,301,020	*Bonds payable*
Utang sewa pembiayaan	4,903,022	4,221,779	*Lease liabilities*
Utang listrik swasta	439,021	470,745	*Electricity purchase payable*
Lain-lain	82,259	111,761	*Others*
Jumlah pihak ketiga	17,957,269	16,080,106	*Total third parties*
Jumlah	**24,619,495**	**21,624,176**	***Total***

47. Penghasilan (Beban) Lain-Lain – Bersih / *47. Other Income (Expense) – Net*

	2019 Rp	2018 Rp	
Pendapatan dari Pemerintah (Catatan 17)	--	7,456,452	*Income from the Government (Note 17)*
Penyesuaian harga pembelian bahan bakar dan pelumas (Catatan 11)	(6,676,670)	4,042,614	*Penyesuaian harga pembelian bahan bakar dan pelumas (Catatan 11)*
Penghasilan denda administrasi	1,792,297	2,039,146	*Administrative penalty income*
Bagian laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama (Catatan 8)	967,406	1,172,345	*Bagian laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama (Catatan 8)*
Kenaikan nilai wajar properti investasi (Catatan 7)	165,453	421,760	*Kenaikan nilai wajar properti investasi (Catatan 7)*
Keuntungan penjualan aset tidak digunakan dalam operasi (Catatan 6)	185,527	88,550	*Keuntungan penjualan aset tidak digunakan dalam operasi (Catatan 6)*
Penghasilan jasa dan klaim	50,663	47,101	*Claim and service income*
Beban penelitian	(39,444)	(28,338)	*Research expenses*
Program pemberdayaan lingkungan	(298,590)	(250,147)	*Community development programs*
Kerugian penurunan nilai aset tetap tidak digunakan dalam operasi (Catatan 6)	(247,615)	(301,965)	*Kerugian penurunan nilai aset tetap tidak digunakan dalam operasi (Catatan 6)*
Lain-lain	433,307	975,845	*Others*
Jumlah	**(3,667,666)**	**15,663,363**	***Total***

48. Pajak Penghasilan / *48. Income Tax*

Beban pajak Perusahaan dan entitas anak terdiri dari:

Tax Expense of the Company and its subsidiaries consists of the following:

	2019 Rp	2018 Rp	
Beban pajak kini	(782,859)	(507,987)	*Current tax*
Beban pajak tangguhan	(21,014,221)	(7,817,095)	*Deferred tax expenses*
Jumlah beban pajak	**(21,797,080)**	**(8,325,082)**	***Total tax expenses***

a. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan laba kena pajak (rugi fiskal) Perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Current Tax

A reconciliation between income (loss) before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income (fiscal losses) of the Company is as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	26,119,210	19,900,838	*Income before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income*
Laba sebelum pajak entitas anak	(23,051,680)	(15,272,113)	*Income before tax attributable to subsidiaries*
Laba sebelum pajak Perusahaan	3,067,530	4,628,725	*Income before tax - the Company*
Perbedaan waktu:			*Timing differences:*
Sewa pembiayaan	(1,143,435)	(2,162,873)	*Lease expenses*
Penyambungan pelanggan	78,097	(323,256)	*Customer connection fees*
Penyusutan aset tetap	(20,184,284)	(19,780,252)	*Depreciation of property, plant and equipment*
Imbalan kerja	2,174,064	1,508,367	*Employee benefits*

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2019 Rp	2018 Rp	
Biaya (pendapatan) yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal			*Nondeductible expenses (nontaxable income)*
Penyisihan piutang ragu-ragu dan penurunan nilai persediaan	679,513	208,411	*Allowance for doubtful accounts and decline in value of inventories*
Kesejahteraan karyawan	1,043,635	998,979	*Employee welfare*
Penyusutan rumah dinas	18,377	10,304	*Depreciation of guest house*
Penghasilan bunga telah dikenakan pajak final	(503,650)	(463,591)	*Interest income subjected to final tax*
Beban lain tidak dapat dikurangkan	8,811,145	8,008,833	*Other nondeductible expenses*
Laba kena pajak (rugi fiskal) Perusahaan tahun berjalan	(5,959,008)	(7,366,353)	*The Company's taxable income (fiscal loss) for the year*
Rugi fiskal tahun:			*Fiscal losses year:*
2018	(7,366,353)	--	*2018*
2017	(8,244,060)	(8,244,060)	*2017*
2016	(40,686,691)	(40,686,691)	*2016*
Akumulasi rugi fiskal Perusahaan	**(62,256,112)**	**(56,297,104)**	***Accumulated fiscal losses the Company***

Pajak penghasilan kini dihitung berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak. Nilai tersebut menjadi dasar penyusunan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Current income tax is computed based on estimated taxable income. The amount used as the basis for the Annual Tax returns that was filed to the Tax Office.

Pada tanggal 18 Juli 2018, Perusahaan melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan "SPT" Pajak untuk masa pajak tahun 2017. Perusahaan menerapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 107/PMK.03/2017 perihal pengakuan *Deemed Dividend* atas kepemilikan Perusahaan pada Majapahit Holding B.V dan Majapahit Finance B.V, dimana Perusahaan melakukan pembetulan SPT tahun 2017 atas pengakuan pendapatan *Deemed Dividend* pada perhitungan pajak kini Perusahaan tahun 2017 sebesar Rp5.193.370, sehingga rugi fiskal atas tahun 2017 di koreksi dari sebelumnya sebesar Rp13.437.430 menjadi Rp8.244.060.

On July 18, 2018, the Company has done a correction regarding the Annual Tax Returns "ATR" for the year 2017. The Company has complied to the Minister of Finance Decree No. 107/PMK.03/2017 in regards to recognition of Deemed Dividend of the Company's ownership in Majapahit Holding B.V and Majapahit Finance B.V, which the Company has done a correction on ATR year 2017 in regards to the recognition of Deemed Dividend income in the Company's calculation of current tax for the year 2017 amounted to Rp5,193,370, hence the fiscal loss for the year 2017 was corrected from previously amounted to Rp13,437,430 to Rp8,244,060.

Rugi fiskal dapat dikompensasikan dengan laba fiskal pada masa lima tahun mendatang sejak kerugian fiskal terjadi. Manajemen memperkirakan bahwa sebagian akumulasi kerugian fiskal dapat dikompensasikan dengan laba fiskal di masa mendatang. Sehingga per 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan dan entitas anak mengakui aset pajak tangguhan dari akumulasi rugi fiscal masing-masing sebesar Rp6.361.386 dan Rp19.880.394.

The fiscal loss can be compensated against the taxable income for a period of five years subsequent to the year the fiscal loss was incurred. Management believes that it is probable future taxable profits will be available to be utilized partial accumulated fiscal losses. Therefore as of December 31, 2019 and 2018, the Company and its subsidiaries' recognized deferred tax assets from accumulated fiscal losses amounted to Rp6,361,386 and Rp19,880,394, respectively.

Perhitungan beban dan utang pajak kini (pajak penghasilan lebih bayar) adalah sebagai berikut:

Current tax expense and payable (income tax overpayment) are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Beban pajak kini			*Current tax expense*
Perusahaan	--	--	*The Company*
Entitas anak	782,859	507,987	*Subsidiaries*
Jumlah	782,859	507,987	*Total*
Pembayaran pajak dimuka			*Prepayment of taxes*
Perusahaan			*The Company*
Pajak penghasilan			*Income tax*
Pasal 22	175,055	128,950	*Article 22*
Pasal 23	35,772	45,752	*Article 23*
Jumlah	210,827	174,702	*Total*
Entitas anak	1,545,207	1,500,939	*Subsidiaries*
Jumlah	**1,756,034**	**1,675,641**	***Total***
Lebih bayar pajak kini - bersih	(973,175)	(997,077)	*Current tax prepayment - net*
Terdiri dari			*Consist of*
Utang pajak kini			*Current tax payable*
Perusahaan	--	--	*The Company*
Entitas anak	377,252	192,406	*Subsidiaries*
Jumlah utang pajak kini	377,252	192,406	*Total current tax payable*
Pajak penghasilan lebih bayar			*Income tax overpayment*
Perusahaan	(210,827)	(174,702)	*The Company*
Entitas anak	(762,348)	(992,952)	*Subsidiaries*
Jumlah pajak penghasilan lebih bayar	(973,175)	(1,167,654)	*Total income tax overpayment*

b. Pajak Tangguhan

Rincian dari aset dan liabilitas pajak tangguhan Perusahaan dan entitas anak adalah sebagai berikut:

b. Deferred Tax

The details of the Company and its subsidiaries deferred tax assets and liabilities are as follows:

	1 Januari/ *January 1,* 2019 Rp	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi/ *Credited (charged) to income* Rp	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ *Credited to other comprehensive income* Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp	
Aset Pajak tangguhan					***Deferred tax assets***
Akumulasi rugi fiskal	5,806,118	(2,776,072)	--	3,030,046	*Accumulated fiscal losses*
Liabilitas imbalan kerja	1,428,942	141,103	39,263	1,609,308	*Employee benefit liabilities*
Aset tetap	137,082	(2,865,070)	--	(2,727,988)	*Property, plant and equipment*
Bonus	200,097	15,576	--	215,673	*Bonus*
Penyisihan persediaan	9,563	369	--	9,932	*Provision inventories*
Penyisihan piutang usaha	17,111	2,325	--	19,436	*Provision account receivable*
Laba dari entitas asosiasi	(20,527)	(884)	80,967	59,556	*Income from associates*
Aset pajak tangguhan akhir tahun	**7,578,386**	**(5,482,653)**	**120,230**	**2,215,963**	***Deferred tax assets at the end of the year***
Liabilitas pajak tangguhan					***Deferred tax liabilities***
Akumulasi rugi fiskal	14,074,276	(10,742,936)	--	3,331,340	*Accumulated fiscal losses*
Liabilitas imbalan kerja	10,963,931	547,187	904,727	12,415,845	*Employee benefit liabilities*
Pendapatan ditangguhkan	222,312	19,524	--	241,836	*Deferred revenue*
Sewa pembiayaan	(2,801,045)	(290,363)	--	(3,091,408)	*Leases*
Aset tetap	(35,853,555)	(5,066,533)	--	(40,920,088)	*Property, plant and equipment*
Penyisihan persediaan	22	(22)	--	--	*Provision inventories*
Penyisihan piutang usaha	2,143	(809)	--	1,334	*Provision account receivable*
Laba dari entitas asosiasi	(27,907)	2,369	(74,563)	(100,101)	*Income from associates*
Lainnya	(313)	15	--	(298)	*Others*
Liabilitas pajak tangguhan akhir tahun	**(13,420,136)**	**(15,531,568)**	**830,164**	**(28,121,540)**	***Deferred tax liabilities at the end of the year***
		(21,014,221)	**950,394**		

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	1 Januari/ *January 1,* 2018 Rp	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi/ *Credited (charged) to income* Rp	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ *Credited to other comprehensive income* Rp	Reklasifikasi/ *Reclassification* Rp	31 Desember/ *December 31,* 2018 Rp	
Aset Pajak tangguhan						***Deferred tax assets***
Akumulasi rugi fiskal	13,531,030	543,246	--	(8,268,158)	5,806,118	*Accumulated fiscal losses*
Liabilitas imbalan kerja	11,618,700	409,032	(1,019,964)	(9,578,826)	1,428,942	*Employee benefit liabilities*
Pendapatan ditangguhkan	303,126	(80,814)	--	(222,312)	--	*Deferred revenue*
Sewa pembiayaan	(2,283,580)	(514,013)	--	2,797,593	--	*Leases*
Aset tetap	(13,611,905)	(4,802,644)	(16,372,340)	34,923,971	137,082	*Property, plant and equipment*
Bonus	--	--	--	200,097	200,097	*Bonus*
Penyisihan persediaan	147	(147)	--	9,563	9,563	*Provision inventories*
Penyisihan piutang usaha	8,955	4,557	--	3,599	17,111	*Provision account receivable*
Laba dari entitas asosiasi	--	1,097	--	(21,624)	(20,527)	*Income from associates*
Aset pajak tangguhan akhir periode/ tahun	**9,566,473**	**(4,439,686)**	**(17,392,304)**	**19,843,903**	**7,578,386**	***Deferred tax assets at the end of the period/ year***
Liabilitas pajak tangguhan						***Deferred tax liabilities***
Akumulasi rugi fiskal	6,434,999	(628,881)	--	8,268,158	14,074,276	*Accumulated fiscal losses*
Liabilitas imbalan kerja	1,392,134	52,930	(59,959)	9,578,826	10,963,931	*Employee benefit liabilities*
Pendapatan ditangguhkan	12,620	(12,620)	--	222,312	222,312	*Deferred revenue*
Sewa pembiayaan	(3,390)	(62)	--	(2,797,593)	(2,801,045)	*Leases*
Bonus	167,260	32,837	--	(200,097)	--	*Bonus*
Aset tetap	(10,040,338)	(2,831,964)	11,942,718	(34,923,971)	(35,853,555)	*Property, plant and equipment*
Penyisihan persediaan	8,213	1,372	--	(9,563)	22	*Provision inventories*
Penyisihan piutang usaha	3,155	2,587	--	(3,599)	2,143	*Provision account receivable*
Laba dari entitas asosiasi	(40,724)	6,412	(15,219)	21,624	(27,907)	*Income from associates*
Lainnya	(293)	(20)	--	--	(313)	*Others*
Liabilitas pajak tangguhan akhir periode/ tahun	**(2,066,364)**	**(3,377,409)**	**11,867,540**	**(19,843,903)**	**(13,420,136)**	***Deferred tax liabilities at the end of the period/ year***
		(7,817,095)	**(5,524,764)**			

Analisis aset dan liabilitas pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

The analysis of deferred tax assets and deferred tax liabilities is as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Aset pajak tangguhaan			*Deferred tax assets*
Aset pajak tangguhan yang akan dipulihkan setelah 12 bulan	1,970,922	7,351,615	*Deferred tax assets to be recovered after 12 months*
Aset pajak tangguhan yang akan dipulihkan dalam 12 bulan	245,041	226,771	*Deferred tax assets to be recovered within 12 months*
Liabilitas pajak tangguhan			*Deferred tax liabilities*
Liabilitas pajak tangguhan yang akan dipulihkan setelah 12 bulan	(28,364,412)	(13,644,300)	*Deferred tax liabilities to be recovered after 12 months*
Liabilitas pajak tangguhan yang akan dipulihkan dalam 12 bulan	242,872	224,164	*Deferred tax liabilities to be recovered within 12 months*

Rekonsiliasi antara jumlah (manfaat) beban pajak dan hasil perkaitan laba (rugi) sebelum pajak dengan tarif pajak efektif adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax (benefit) expense and the amounts computed by applying the effective tax rates to the profit (loss) before tax is as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	26,119,210	19,900,838	*Profit before tax per consolidated statements of comprehensive income*
Beban pajak sesuai tarif yang berlaku	6,529,803	4,975,210	*Tax expenses at prevailing rate*

	2019 Rp	2018 Rp	
Pengaruh pajak atas:			*Tax effect on:*
Pengakuan pajak tangguhan atas akumulasi rugi fiskal	12,232,686	--	*Unrecognized deferred tax on Allowance for doubtful accounts and*
Biaya (pendapatan) yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal			*Nondeductible expenses (nontaxable income)*
Kesejahteraan karyawan	414,830	477,203	*Employee welfare*
Bagian atas laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	(371,650)	(193,103)	*Share in net income of associates and joint venture*
Penyusutan rumah dinas	4,594	2,576	*Depreciation of guest house*
Penghasilan bunga dikenakan pajak final	--	(147,566)	*Interest income subjected to final tax*
Bunga obligasi internasional	257,382	458,263	*International bond obligation*
Beban lain tidak dapat dikurangkan	2,729,435	2,752,499	*Other nondeductible expenses*
Jumlah	**21,797,080**	**8,325,082**	***Total***

c. Surat Ketetapan Pajak

Perusahaan
Pada bulan Februari 2017, Perusahaan telah menerima keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai sengketa PPh 26 tahun 2007, 2008, dan 2009 yang menyatakan bahwa peninjauan kembali yang diajukan Perusahaan dikabulkan sepenuhnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Perusahaan mengajukan permohonan restitusi kepada DJP dan telah menerima sebagian restitusi sebesar Rp643.379 dan sisanya sebesar Rp925.743 dikompensasikan untuk pembayaran Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") 2016 dan dicatat sebagai pajak dibayar dimuka (Catatan 19).

Pada bulan Desember 2017, Perusahaan telah menerima berbagai putusan pajak oleh DJP antara lain SKPLB PPh Badan tahun 2016 sebesar Rp77.262 yang dikompensasikan dengan STP PPN DN 2016. Perusahaan juga menerima SKPKB atas berbagai pajak untuk tahun 2016 yaitu pajak penghasilan Pasal ("PPh") 21 sebesar Rp17.273, PPh Pasal 22 sebesar Rp1.752.392, PPh Pasal 23 sebesar Rp29.479, PPh Pasal 26 sebesar Rp140.431, PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar Rp1.207.112, SKPKB Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") berbagai masa pada tahun 2016 sebesar Rp2.547.560, STP PPN dalam negeri selama tahun 2016 sebesar Rp5.605.040 dan STP PPN Pungut selama tahun 2016 sebesar Rp20.761. Atas berbagai putusan pajak tersebut,

c. Tax Assessment Letters

The Company
In February 2017, the Company received the decision of Supreme Court of Republic of Indonesia regarding the dispute on Income Tax Article 26 year 2007, 2008, and 2009 which stated that juridical review filled by the Company have been granted. Furthermore, the Company also submitted restitution request for the related tax to DGT and have partly received the restitution amounted to Rp643,379 and for the remaining amount of Rp925,473 were compensated for payment of Tax Underpayment Assessment Letter ("SKPKB") 2016 and recorded it as prepaid taxes (Notes 19).

In December 2017, the Company received various Tax Assessment Letter from DGT such as Tax Overpayment for Corporate Income Tax year 2016 amounted to Rp77,262, Tax Underpayment for various income tax for the 2016 such as Income Tax Article 21 amounted to Rp17,273, Article 22 amounted to Rp1,752,392, Article 23 amounted to Rp29,479, Article 26 amounted to Rp140,431, Article 4(2) amounted to Rp1,207,112, Tax Underpayment for value added tax ("VAT") for various period in 2016 amounted to Rp2,547,560, STP domestic VAT in 2016 amounted to Rp5,605,040 and STP VAT collection amounted to Rp20,761. For the various tax assessment letter above, the Company has paid

Perusahaan telah melakukan pembayaran sebesar Rp1.504.992, dan dicatat sebagai pajak dibayar dimuka pada tahun 2017.

amounted Rp1,504,992, and recorded them as tax prepayment in 2017.

Atas berbagai putusan pajak antara lain SKPLB PPh badan tahun 2016, SKPKB atas berbagai pajak untuk periode tahun 2016 atas PPh 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat 2, SKPKB PPN berbagai masa pada tahun 2016 dan PPN Pungut selama tahun 2016, Perusahaan telah mengajukan keberatan.

For the various tax decision such as tax overpayment for Corporate Income Tax year 2016, tax underpayment for the various Article 21, Article 22, Article 23, Article 26, Article 4(2) year 2016, tax underpayment VAT for various period in 2016, STP collected VAT year 2016, the Company has propose objection.

Pada tanggal 23 Febuari 2018, Perusahaan telah menerima putusan DJP atas permohonan pengurangan atau pembatalan STP PPN dalam negeri masa tahun pajak 2016 yang semula sebesar Rp5.605.040 menjadi Rp564.041. Kemudian pada bulan November 2018, Perusahaan telah menerima keputusan atas keberatan SKPKB PPh Pasal 21 final, PPN DN, dan PPN Put tahun 2016. terhadap keputusan keberatan tersebut, Perusahaan akan mengajukan upaya permohonan banding ke Pengadilan Pajak.

In 23 February 2018, the Company obtained a DGT decision letter regarding the Company's objection on the STP of domestic VAT year 2016 which previously amounted Rp5,605,040 to become Rp564,041. Furthermore in November 2018, the Company obtained the verdict of Tax Underpayment income tax article 21, Domestic VAT, and VAT collection for the year 2016, for the verdict the Company will propose objection to the Tax Court.

Pada April 2018, sesuai dengan surat perintah membayar kelebihan pajak ("SPMKP") yang diterbitkan oleh DJP, Perusahaan telah menerima restitusi kelebihan pembayaran PPN Dalam Negeri sebesar Rp444.367 atas berbagai masa pajak PPN.

In April 2018, in accordance with the warrant letter for tax overpayment compensation ("SPMKP") issued by DGT, the Company has received refunds for domestic VAT payments amounted to Rp444,367 for various VAT tax periods.

Pada bulan Desember 2018, Perusahaan telah menerima berbagai putusan pajak oleh DJP antara lain SKPLB PPh tahun 2017 sebesar Rp90.693, SKPKB atas berbagai pajak tahun 2017 pajak penghasilan Pasal ("PPh") 21 sebesar Rp325.382, PPh Pasal 22 sebesar Rp912.336, PPh Pasal 23 sebesar Rp189.067, PPh Pasal 26 sebesar Rp148.456, PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar Rp1.466.396, SKPKB Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") berbagai masa pada tahun 2017 sebesar Rp2.308.136, STP PPN dalam negeri selama tahun 2017 sebesar Rp219.486 dan STP PPN Pungut selama tahun 2016 sebesar Rp29.358. Atas berbagai putusan pajak tersebut, Perusahaan telah melakukan

In December 2018, the Company received various Tax Assessment Letter from DGT such as SKPLB of Corporate Income Tax year 2017 amounted to Rp90,693, SKPKB for various income tax for the 2017 such as Income Tax Article 21 amounted to Rp325,382, Article 22 amounted to Rp912,336, Article 23 amounted to Rp189,067, Article 26 amounted to Rp148,456, Article 4(2) amounted to Rp1,466,396, SKPKB for value added tax ("VAT") for various period in 2017 amounted to Rp2,308,136, STP domestic VAT in 2017 amounted to Rp219,486 and STP VAT collection amounted to Rp29,358. For the various tax assessment letter above, the Company has paid amounted Rp443,641

pembayaran sebesar Rp443.641, dan dicatat sebagai pajak dibayar dimuka pada tahun 2018.

and recorded them as tax prepayment in 2018.

Terhadap putusan pajak yang terbit tersebut, Perusahaan sedang dalam upaya untuk mengajukan permohonan keberatan ke DJP.

For those Tax Assessment Letter, the Company will propose objection to DGT.

Pada tanggal 28 November 2019, Perusahaan telah menerima SKPKB PPN Dalam Negeri, dan PPN Pemungutan Pajak tahun pajak 2018 masing-masing sebesar Rp29.452 dan Rp1.072.402. Perusahaan telah melakukan pembayaran masing-masing sebesar Rp29.452 dan Rp536.201 yang dicatat sebagai pajak dibayar dimuka pada tahun 2019.

On November 28, 2019, the Company received SKPKB Domestic VAT and VAT tax collection for fiscal years 2018 amounting to Rp29,452 and Rp1,072,402, respectively. The Company has made payments amounting to Rp29,452 and Rp536,201, respectively, which are recorded as prepaid taxes in 2019.

Pada tahun 2019, Perusahaan telah melakukan pembayaran atas berbagai SKPKB pajak tahun 2017 atas PPh 21 sebesar Rp291.795, PPh Pasal 23 sebesar Rp174.886, PPh Pasal 26 sebesar Rp7.347 dan PPN Jasa Luar Negeri sebesar Rp8.705 yang dicatat sebagai pajak dibayar dimuka pada tahun 2019.

In 2019, the Company made payments for various SKPKB fiscal years 2017 for income tax Article 21 amounting to Rp291,795, income tax Article 23 amounting to Rp174,886, income tax Article 26 amounting to Rp7,347 and Overseas VAT amounting to Rp8,705 which was recorded as prepaid tax in 2019.

Pada tahun 2019, atas pengajuan keberatan berbagai SKPKB tahun Pajak 2016 ke DJP telah ditolak oleh DJP atas PPh 21 sebesar Rp17.273, PPh 23 sebesar Rp29.479 dan PPh 26 sebesar Rp140.431. Perusahaan juga melakukan koreksi atas restitusi PPN sebesar Rp232.366.

In 2019, upon the appeal of various 2016 tax year SKPKB to the DGT it was rejected by the DGT for income tax Article 21 amounting to Rp17,273, income tax Article 23 amounting to Rp29,479 and income tax Article 26 amounting to Rp140,431. The Company also made corrections on VAT refunds of Rp232,366.

Pada tanggal 27 dan 30 Desember 2019, Perusahaan melakukan pembayaran berbagai SKPKB tahun pajak 2016, 2017 dan 2018 yang belum dibayar melalui *set-off* piutang kompensasi dan piutang subsidi masing-masing sebesar Rp7.262.621 dan Rp1.377.603 yang telah diterima oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

On December 27 and 30 2019, the Company paid the various unpaid SKPKB for the 2016, 2017 and 2018 fiscal years through the set-off of compensation receivables and Receivables on electricity subsidy amounting to Rp7,262,621 and Rp1,377,603, respectively, which have been received by the Director General of the Treasury.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pada bulan Mei 2019 IP, entitas anak menerima Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") atas berbagai pajakpenghasilan ("PPh") dan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") tahun 2017 dengan jumlah sebesar Rp110.111. IP, entitas anak telah membayar seluruhSKPKB, namun IP, entitas anak masih mengajukan keberatan dan pembatalan ke DJP sebesar Rp110.111 yang dicatat sebagai pajak dibayar di muka.

In May 2019, IP, a subsidiary has received an Underpayment Tax Assesment Letter for ("SKPKB") for various income tax ("PPh") and Value Added Tax ("VAT") for 2017 fiscal year amounting to Rp110,111. IP, a subsidiary has paid all the SKPKB, however IP, a subsidiary had submitted theobjection letter and request of cancellation to DJP amounting to Rp110,111, recorded as prepaid tax.

Pada bulan Mei dan Juni 2019, IP, entitas anak menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") atas PPh Badan tahun 2017 sebesar Rp279.394 dan restitusi atas PPN sebesar Rp225.978.

In May and June 2019, IP, a subsidiary received an Overpayment Tax Assessment Letter ("SKPLB") for 2017 Corporate Income Tax amounting to Rp279,394 and a refund of VAT of Rp225,978.

Pada bulan Juli 2018, IP, entitas anak telah menerima beberapa SKPKB dan Surat Tagihan Pajak ("STP") atas berbagai PPh dan PPN tahun 2016 dengan jumlah sebesar Rp408.773. IP, entitas anak telah membayar seluruh SKPKB dan SPT tersebut namun IP, entitas anak tetap mengajukan keberatan dan pembatalan ke DJP sebesar Rp393.434 yang dicatat sebagai pajak dibayar di muka dan pembayaran sebesar Rp15.339 sebagai beban lain-lain.

In July 2018, IP, a subsidiary has received various SKPKB and Tax Collection Letter ("STP") for various PPh and VAT for 2016 fiscal year amounting to Rp408,773. IP, a subsidiary has paid all the SKPKB and STP, however IP, a subsidiary had submitted the objection letter and request of cancellation to DJP amounting to Rp393,434, recorded as prepaid tax and payment amounting to Rp15,339, recorded as other expense.

Pada bulan Oktober 2019, IP, entitas anak menerima hasil keputusan keberatan atas pemeriksaan Pajak tahun 2016, diantaranya ditolak oleh DJP dan menjadi beban diluar operasi sebesar Rp86.184, diterima oleh DJP sebesar Rp71.010 dan penyesuaian oleh DJP dan menjadi beban luar operasi IP sebesar Rp974. IP, entitas anak mengajukan banding kembali atas PPh sebesar Rp237.201 yang dicatat sebagai pajak dibayar dimuka.

In October 2019, IP, a subsidiary received the results of the objection decision on the 2016 tax audit, including being rejected by the DJP and being a non-operating expense of Rp86,184, received by DJP in the amount of Rp71,010 and adjusting by the DJP and being a non-operating expense of Rp974. IP, a subsidiary appealed again the PPh in the amount of Rp237,201 which was recorded as prepaid tax.

Pada bulan Juli 2018, IP, entitas anakjuga menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") atas PPh Badan tahun 2016 sebesar Rp294.635 dan menetapkan rugi neto fiskal dari Rp11.645.083 menjadi Rp12.417.946. IP, entitas anaktelah mengajukan keberatan atas penetapan rugi neto fiskal tersebut. IP, entitas anakjuga menerima restitusi atas PPN sebesar Rp135.991.

In July 2018, IP, a subsidiary also received Tax Assessment Letter for Overpayment ("SKPLB") of corporate income tax for 2016 fiscal year amounted to Rp294,635 and amend the fiscal net loss from Rp11,645,083 to Rp12,417,946. IP, a subsidiary has filed objection letter for the amended fiscal net loss. IP, a subsidiary also received restitution of VAT amounting to Rp135,991.

d. Pengampunan Pajak

Perusahaan dan entitas anak Perusahaan berpartisipasi dalam pengampunan pajak sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan No.118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.141/PMK.03/2016 dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.PER- 18/PJ/2016 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Tebusan Dalam Rangka Pengampunan Pajak.

Berdasarkan Surat Ketetapan Pengampunan Pajak yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KET-295/PP/WPJ.19/2017 tanggal 5 April 2017, jumlah aset pengampunan pajak Perusahaan yang dilaporkan adalah sebesar Rp46.987. Pada tanggal 31 Desember 2017, nilai tersebut dicatat sebagai tambahan modal disetor.

d. Tax Amnesty

The Company and its subsidiaries participated in Tax Amnesty in connection with the implementation of Regulation of the Minister of Finance No.118/PMK.03/ 2016 on the Implementation of Law No.11 of 2016 regarding Tax Amnesty, as amended by the Minister of Finance Regulation No.141/PMK.03/2016 and the Directorate General of Tax Regulation No.PER-18/PJ/2016 regarding the refund of excess payment on compensation for Tax Amnesty.

Based on Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) issued by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. KET-295/PP/WPJ.19/2017 dated April 5, 2017, the Company declared total tax amnesty assets amounted to Rp46,987. As of December 31, 2017, such amounts are recorded as additional paid-in capital.

49. Laba (Rugi) Per Saham Dasar dan Dilusian

Laba (rugi) bersih
Laba bersih untuk tujuan perhitungan laba per saham dasar untuk tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp4.270.922 dan Rp11.568.286.

Jumlah saham
Rata-rata tertimbang saham untuk tujuan perhitungan laba (rugi) per saham dasar pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebanyak 113.842.383 dan 109.826.527 saham.

Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi dilusi saham, sehingga laba per saham dasar sama dengan laba per saham dilusian.

49. Basic and Diluted Earnings Per Share

Net income
Net income (loss) for the computation of basic earnings per share in 2019 and 2018 amounted to Rp4,270,922 and Rp11,568,286, respectively.

Number of shares
The weighted average number of shares for the computation of basic earnings (loss) per share as of December 31, 2019 and 2018 were amounted 113,842,383 and 109,826,527 shares, respectively.

The Company did not have potential dilutive ordinary shares, thus basic earnings per share are the same as the dilutive earnings per share.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

50. Liabilitas Imbalan Kerja / *50. Employee Benefits Liabilities*

	2019 Rp	2018 Rp	
Liabilitas diakui di laporan posisi keuangan:			*Liabilities recognized on statements of financial position:*
Imbalan pascakerja			*Post-employment benefits*
Program pensiun	276,443	1,067,071	*Pension plan*
Imbalan pascakerja lainnya	12,946,513	10,550,746	*Other post-employment benefits*
Imbalan pemeliharaan kesehatan	41,796,191	37,056,587	*Health care benefits*
Imbalan jangka panjang lainnya	1,051,578	959,380	*Other long-term benefits*
Jumlah	**56,070,725**	**49,633,784**	***Total***
Disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai:			*Presented in consolidated statements of financial position:*
Liabilitas jangka pendek	5,232,467	5,873,558	*Current liabilities*
Liabilitas jangka panjang	50,838,258	43,760,226	*Non-current liabilites*
Jumlah	**56,070,725**	**49,633,784**	***Total***
Beban diakui di laba rugi (Catatan 44):			*Expense recognize in profit or loss (Note 44):*
Imbalan pascakerja			*Post-employment benefits*
Program pensiun	136,640	82,798	*Pension plan*
Imbalan pascakerja lainnya	1,702,376	1,610,504	*Other post-employment benefits*
Imbalan pemeliharaan kesehatan	3,790,974	3,245,462	*Health care benefits*
Imbalan jangka panjang lainnya	305,877	386,831	*Other long-term benefits*
Jumlah	**5,935,867**	**5,325,595**	***Total***
Pengukuran kembali program imbalan pasti diakui di penghasilan komprehensif lain:			*Remeasurement on defined benefit plan recognized in other comprehensive income:*
Program pensiun	(796,603)	768,526	*Pension plan*
Imbalan pascakerja lainnya	2,367,276	(2,534,451)	*Other post-employment benefits*
Imbalan pemeliharaan kesehatan	2,205,286	(2,553,765)	*Health care benefits*
Jumlah	**3,775,959**	**(4,319,690)**	***Total***

Program pensiun imbalan pasti

Perusahaan dan entitas anak menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetap yang memenuhi syarat. Program pensiun ini memberikan imbalan berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan.

Program pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun PLN ("DP-PLN"), pihak berelasi, yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. KEP-284/KM.17/1997 tanggal 15 Mei 1997.

DP-PLN telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam surat keputusan No. KEP-20/NB.1/2017 tanggal 26 April 2017 atas peningkatan imbalan pasti pensiun yang disediakan Perusahaan dan entitas anak dalam program dana pensiun.

Defined benefit pension plan

The Company and its subsidiaries established a defined benefit pension plan covering all of its eligible permanent employees. This pension plan provides benefits based on basic pension income and the period of employment.

This pension plan is managed by Dana Pensiun PLN ("DP-PLN"), a related party, whose deed of establishment was approved by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. KEP-284/KM.17/1997 dated May 15, 1997.

DP-PLN has obtained an approval from the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. KEP-20/NB.1/2017 dated on April 26, 2017 in relation to the increase in pension benefits provided by the Company and its subsidiaries' pension plan.

Pendanaan DP-PLN terutama berasal dari iuran karyawan dan pemberi kerja masing-masing sebesar 6,00% dan 15,45% dari Penghasilan Dasar Pensiun.

DP-PLN is mainly funded by contributions from both the employees and the employer which are 6.00% and 15.45% from basic pension income, respectively.

Imbalan pemeliharaan kesehatan
Selain program pensiun yang dikelola oleh DP-PLN, Perusahaan dan entitas anak menyediakan imbalan program pemeliharaan kesehatan tanpa pendanaan bagi pensiunan dan tanggungannya yang memenuhi persyaratan.

Health care benefits
In addition to the pension plan managed by DP-PLN, the Company and its subsidiaries also provide unfunded health care benefit plans for their pensioners and their eligible dependents.

Imbalan pascakerja lainnya
Selain dari program dana pensiun dan imbalan pemeliharaan kesehatan, Perusahaan dan entitas anak menyediakan imbalan pesangon dan penghargaan purna jabatan tanpa pendanaan bagi pegawai yang memenuhi syarat.

Other post-employment benefits
In addition to the pension plan and health care benefits, the Company and its subsidiaries also provide unfunded severance benefits and completion of employment award for eligible employees.

Imbalan jangka panjang lainnya
Perusahaan dan entitas anak juga memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya seperti uang cuti besar, tunjangan kecelakaan dinas dan penghargaan kesetiaan kerja.

Other long-term benefits
The Company and its subsidiaries also provide other long-term employee benefits such as long leave allowance, disability benefit and loyalty benefit.

Asumsi yang digunakan dalam perhitungan liabilitas imbalan kerja

Assumption used in the calculations of employment benefits liablilities

	2019 dan/ *and* 2018	
Tabel mortalita	CSO-58	*Mortality table*
Tingkat pengunduran diri		*Resignation rate*
Usia 18 s.d. 49 tahun	0.27%	*Age 18 up to 49 years old*
Usia 50 s.d. 55 tahun	0.01%	*Age 50 up to 55 years old*
Usia pensiun normal	56 tahun/ *Years old*	*Normal retirement age*

Asumsi yang berhubungan dengan pengalaman mortalitas masa depan ditentukan berdasarkan saran aktuaris menurut statistik yang telah diterbitkan dan pengalaman Perusahaan dan entitas anak. Asumsi mortalitas yang digunakan adalah tabel mortalita CSO-58 yang diterapkan dalam penghitungan liabilitas kerja jangka panjang yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Assumptions regarding future mortality experience are set based on actuarial advice in accordance with published statistic and experiences by the Company and its subsidiaries. The mortality assumptions used are based on the CSO-58 mortality table which applied in calculating the long term benefits liability recognized within the consolidated statement of financial position.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Penilaian aktuaria atas program pensiun, imbalan pascakerja lainnya, imbalan pemeliharaan kesehatan dan imbalan kerja jangka panjang lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, dilakukan oleh perusahaan konsultan aktuaria terdaftar, PT Binaputera Jaga Hikmah.

The actuarial calculations of pension plan, other post-employment benefits, health care benefits and other long term benefits for the years ended December 31, 2019 dan 2018 were prepared by a registered actuarial consulting firm, PT Binaputera Jaga Hikmah.

Pada tahun 2015, Perusahaan dan entitas anak melakukan studi untuk melihat tabel mortalitas mana yang paling sesuai dengan profil mortalitas pegawai dan pensiunan Perusahaan dan entitas anak. Dalam melakukan studi, Perusahaan dan entitas anak telah mempertimbangkan CSO-58, CSO-58 modifikasian, TMI 1 1993, TMI 2 1999, TMI 3 2011, dan Tabel Mortalita Taspen 2012. Dari studi tersebut, Perusahaan dan entitas anak menemukan bahwa tabel mortalitas yang paling sesuai dengan profil mortalitas pegawai dan pensiunan Perusahaan dan entitas anak adalah CSO-58. Perusahaan dan entitas anak menerapkan CSO-58 secara retrospektif.

In 2015, the Company and its subsidiaries conducted a study to determine which mortality tables that best suits with the Company and its subsidiaries' employee and pensioners' mortality profile. In the study, the Company and its subsidiaries have considered CSO-58, CSO-58 modified, TMI 1 1993, TMI 2 1999, TMI 3 2011, and Taspen mortality table 2012. Based on the study, the Company and its subsidiaries found that mortality table that suits most with mortality profile of the Company and its subsidiaries' employees and pensioners is CSO-58. The Company and its subsidiaries apply CSO-58 retrospectively.

(i) Program Pensiun
Jumlah yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian ditentukan sebagai berikut:

(i) Pension Plan
The amounts recognized in the consolidated statements of financial position are determined as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Nilai kini kewajiban yang didanai	9,420,639	9,178,377	*Present value of funded obligations*
Nilai wajar aset program	(9,144,196)	(8,111,306)	*Fair value of plan assets*
Defisit program yang didanai	276,443	1,067,071	*Deficit of funded plans*
Nilai kini kewajiban yang tidak didanai	--	--	*Present value of unfunded obligations*
Liabilitas pada laporan Posisi keuangan	**276,443**	**1,067,071**	***Liability in the statement of financial position***

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Movement its of present value of defined benefit obligation during the year is as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Pada awal tahun	9,178,377	8,633,567	*At beginning of the year*
Dibebankan ke laba rugi:			*Charged to profit or loss:*
Biaya jasa kini	111,904	114,494	*Current service cost*
Biaya bunga	744,946	597,860	*Interest expense*
	856,850	712,354	

	2019 Rp	2018 Rp	
Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain:			*Charged to other comprehensive income:*
(Keuntungan) kerugian aktuarial dari:			*Actuarial (gain) loss from change in:*
Perubahan asumsi keuangan	123,091	(206,962)	*Financial assumptions*
Penyesuaian atas pengalaman	118,419	845,842	*Experience adjustment*
	10,276,737	9,984,801	
Pembayaran manfaat	(856,098)	(806,424)	*Benefit payment*
Pada akhir tahun	**9,420,639**	**9,178,377**	***At end of the year***

Mutasi nilai wajar aset program selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Movement of fair value of plan assets during the year is as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Pada awal tahun	8,111,306	8,169,822	*At beginning of the year*
Imbal hasil atas aset program	670,510	575,162	*Return on plan assets*
Iuran pemberi kerja	130,665	247,996	*Employer's contributions*
Iuran pekerja	49,700	54,394	*Employee's contributions*
Pembayaran manfaat	(856,098)	(806,424)	*Benefit payment*
Kerugian aktuarial pada aset program	1,038,113	(129,644)	*Actuarial loss on plan assets*
Pada akhir tahun	**9,144,196**	**8,111,306**	***At the end of the year***

Aset program terdiri dari:

Plan assets comprise the following:

	2019				2018				
	Memiliki kuotasi harga/ *Quoted price* Rp	Tidak memiliki kuotasi harga/ *Unquoted price* Rp	Jumlah/ *Total* Rp	%	Memiliki kuotasi harga/ *Quoted price* Rp	Tidak memiliki kuotasi harga/ *Unquoted price* Rp	Jumlah/ *Total* Rp	%	
Surat Berharga Negara	1,246,382	--	1,246,382	13.63%	1,170,438	--	1,170,438	14.43%	*Government bonds*
Tabungan	--	103,680	103,680	1.13%	--	79,406	79,406	0.98%	*Saving accounts*
Deposito *on call*	--	53,330	53,330	0.58%	--	19,325	19,325	0.24%	*Deposits on call*
Depostio berjangka	--	630,000	630,000	6.89%	--	339,250	339,250	4.18%	*Time deposits*
Saham	924,464	--	924,464	10.11%	952,624	--	952,624	11.74%	*Shares*
Obligasi	2,492,698	--	2,492,698	27.26%	2,727,574	--	2,727,574	33.63%	*Bonds*
Sukuk	9,959	--	9,959	0.11%	9,392	--	9,392	0.12%	*Sukuk*
Unit penyertaan reksa dana	1,052,795	--	1,052,795	11.51%	940,800	--	940,800	11.60%	*Mutual fund units*
Efek beragunan aset	30,262	--	30,262	0.33%	38,451	--	38,451	0.47%	*Asset backed securities*
Penempatan langsung	--	919,933	919,933	10.06%	--	691,865	691,865	8.53%	*Direct investments*
Tanah	--	117,095	117,095	1.28%	--	78,274	78,274	0.96%	*Land*
Bangunan	--	412,089	412,089	4.51%	--	418,488	418,488	5.16%	*Bulidings*
Tanah dan bangunan	--	417,094	417,094	4.56%	--	369,889	369,889	4.56%	*Land and buildings*
Lain-lain	--	734,415	734,415	8.03%	--	275,530	275,530	3.40%	*Other*
Total	**5,756,560**	**3,387,636**	**9,144,196**	**100.00%**	**5,839,279**	**2,272,027**	**8,111,306**	**100.00%**	***Total***

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2019	2018	
Tingkat diskonto	7.78%	8.77%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5.00%	5.00%	*Salary increase rate per annum*

Kontribusi yang diharapkan untuk program imbalan pascakerja untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah Rp49.700.

Expected contributions to post-employment benefit plans for the year ended December 31, 2019 are amounted to Rp49,700.

Sensitivitas dari liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit liabilities to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

	Dampak atas liabilitas imbalan pasti/ *Impact on defined benefit liabilities*			
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	**Kenaikan asumsi/ *Increase in assumption***	**Penurunan asumsi/ *Decrease in assumption***	
Tingkat diskonto	1%	Penurunan sebesar/ *Decrease by 1.51%*	Kenaikan sebesar/ *Increase by 1.72%*	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	1%	kenaikan sebesar/ *Increase by 1.77%*	Penurunan sebesar/ *Decrease by 1.58%*	*Salary rate*
Tingkat mortalitas	1%	Penurunan sebesar/ *Decrease by 0.00%*	Kenaikan sebesar/ *Increase by 0.01%*	*Mortality rate*

Analisa sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Imbalan perhitungan sensitivitas liabilitas kerja jangka panjang atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini liabilitas imbalan kerja jangka panjang dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir periode) telah diterapkan seperti dalam perhitungan liabilitas imbalan kerja jangka panjang yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

The sensitivity analysis are based on a change in a single assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the long term benefits liabilities to significant actuarial assumptions, the same method (present value of the long term benefits liabilities calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the long term benefits liabilities recognized in the consolidated statement of financial position.

(ii) Imbalan Pascakerja Lainnya
Mutasi liabilitas imbalan pascakerja lainnya selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

(ii) Other Post-Employment Benefits
Movement of post-employment benefits liabilities during the year is as follows:

	2019 Rp	**2018 Rp**	
Pada awal tahun	10,550,746	13,334,566	*At the beginning of the year*
Dibebankan ke laba rugi			*Charged to profit or loss*
Biaya jasa kini	865,426	710,369	*Current service cost*
Biaya bunga	841,996	903,789	*Interest expense*
Harapan dari hasil investasi	(5,046)	(3,654)	*Expectations on investment returns*
	1,702,376	1,610,504	

	2019 Rp	2018 Rp	
Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain:			*Charged to other comprehensive income:*
(Keuntungan) kerugian aktuarial dari:			*Actuarial (gain) loss from change in:*
Perubahan asumsi demografik	–	734	*Demographic assumptions*
Perubahan asumsi keuangan	837,046	(1,291,963)	*Financial assumptions*
Kombinasi perubahan asumsi	–	(204)	*Combination of change in assumptions*
Penyesuaian atas pengalaman	1,530,230	(1,243,018)	*Experience adjustment*
	14,620,398	12,410,619	
Pembayaran manfaat	(1,673,885)	(1,859,873)	*Benefit payment*
Pada akhir tahun	**12,946,513**	**10,550,746**	***At end of the year***

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2019	2018	
Tingkat diskonto	7.78%	8.52%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji per tahun	8.30%	6.76%	*Salary increase rate per annum*

Sensitivitas dari liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit liabilities to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	Dampak atas liabilitas imbalan pasti/ *Impact on defined benefit liabilities* Kenaikan asumsi/ *Increase in assumption*	Penurunan asumsi/ *Decrease in assumption*	
Tingkat diskonto	1%	Penurunan sebesar/ *Decrease by 7.60%*	Kenaikan sebesar/ *Increase by 9.11%*	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	1%	Kenaikan sebesar/ *Increase by 9.03%*	Penurunan sebesar/ *Decrease by 7.67%*	*Salary rate*
Tingkat mortalitas	1%	Penurunan sebesar/ *Decrease by 0.00%*	Penurunan sebesar/ *Increase by 0.00%*	*Mortality rate*

(iii) Imbalan Pemeliharaan Kesehatan

Perusahaan dan entitas anak memiliki beberapa skema imbalan pemeliharaan kesehatan pascakerja. Metode akuntansi, asumsi dan frekuensi penilaian adalah sama dengan yang digunakan dalam skema pensiun imbalan pasti.

(iii) Health Care Benefits

The Company and its subsidiaries operate a number of post-employment health care benefit schemes. The accounting method, assumptions and the frequency of valuations are similar to those used for defined benefit pension schemes.

Mutasi liabilitas imbalan pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Movement of defined benefit liabilities over the year is as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Pada awal tahun	37,056,587	37,415,582	*At beginning of the year*
Dibebankan ke laba rugi:			*Changed to profit or loss:*
Biaya jasa kini	650,579	566,858	*Current service cost*
Biaya bunga	3,140,395	2,678,604	*Interest expense*
	3,790,974	3,245,462	

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2019 Rp	2018 Rp	
Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain:			*Charged to other comprehensive income:*
(Keuntungan) kerugian aktuarial dari:			*Actuarial (gain) loss from change in:*
Perubahan asumsi keuangan	4,278,197	(1,587,336)	*Financial assumptions*
Kombinasi perubahan asumsi	--	(1,245,819)	*Combination of change in assumptions*
Penyesuaian atas pengalaman	(2,072,911)	279,390	*Experience adjustment*
	43,052,847	38,107,279	
Pembayaran manfaat	(1,256,656)	(1,050,692)	*Benefit payment*
Pada akhir tahun	**41,796,191**	**37,056,587**	***At end of the year***

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2019	2018	
Tingkat diskonto	7.78%	9.19%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7.00%	7.00%	*Salary increase per annum*
Tingkat kenaikan biaya kesehatan jangka panjang	7.00%	7.00%	*Long-term increase rate in health costs*

Sensitivitas dari liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit liabilities to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

		Dampak atas liabilitas pemeliharaan kesehatan/ *Impact on defined health care benefit liabilities*		
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	Kenaikan asumsi/ *Increase in assumption*	Penurunan asumsi/ *Decrease in assumption*	
Tingkat diskonto	1%	Penurunan sebesar/ *Decrease by 11.42%*	Kenaikan sebesar/ *Increase by 14.13%*	*Discount rate*
Tingkat kenaikan biaya kesehatan di masa depan	1%	Kenaikan sebesar/ *Increase by 11.14%*	Penurunan sebesar/ *Decrease by 9.23%*	*Health costs increase rate*
Tingkat mortalitas	1%	Penurunan sebesar/ *Decrease by 0.49%*	Kenaikan sebesar/ *Increase by 0.61%*	*Mortality rate*

(iv) Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Mutasi liabilitas imbalan pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

(iv) Other Long-term Employee Benefits

Movement of defined benefit liabilities during the year is as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Pada awal tahun	959,380	908,056	*At beginning of the year*
Dibebankan ke laba rugi			*Charged to profit or loss*
Biaya jasa kini	232,388	333,180	*Current service cost*
Biaya bunga	73,489	53,651	*Interest expense*
	305,877	386,831	
Pengukuran kembali program imbalan pasti dibebankan ke laba rugi:			*Remeasurement on defined benefit plan charged to profit or loss:*
(Keuntungan) kerugian aktuarial dari:			*Actuarial (gain) loss from change in:*
Perubahan asumsi demografik	--	30	*Demographic assumptions*
Perubahan asumsi keuangan	25,676	(21,285)	*Financial assumptions*
Kombinasi perubahan asumsi	--	7	*Combination of change in assumptions*
Penyesuaian atas pengalaman	(25,676)	21,249	*Experience adjustment*
	1,265,257	1,294,888	
Pembayaran manfaat	(213,679)	(335,508)	*Benefit payment*
Pada akhir tahun	**1,051,578**	**959,380**	***At end of the year***

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2019	2018	
Tingkat diskonto	8.62%	8.62%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7.20%	7.20%	*Salary increase rate per annum*

Sensitivitas dari liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit liabilities to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

	Dampak atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya/ *Impact on other long term employee benefit liabilities*			
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	Kenaikan asumsi/ *Increase in assumption*	Penurunan asumsi/ *Decrease in assumption*	
Tingkat diskonto	1%	Penurunan sebesar/ *Decrease by 2.90%*	Kenaikan sebesar/ *Increase by 3.09%*	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	1%	Kenaikan sebesar/ *Increase by 2.98%*	Penurunan sebesar/ *Decrease by 2.85%*	*Salary rate*
Tingkat mortalitas	1%	Penurunan sebesar/ *Decrease by 0.01%*	Penurunan sebesar/ *Decrease by 0.01%*	*Mortality rate*

Perusahaan dan entitas anak terekspos dengan beberapa risiko melalui program imbalan pasti dan program kesehatan pascakerja. Risiko yang paling signifikan adalah sebagai berikut:

The Company and its subsidiaries are exposed to a number of risks through its defined benefit pension plans and post-employment medical plans. The most significant risks are as follows:

Volatilitas aset
Liabilitas program dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada tingkat imbal hasil surat utang negara. Jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program.

Asset volatility
The plan liabilities are calculated using a discount rate set with reference to government bond yields. It the yield of plan assets is lower, it will generate a deficit program.

Harapan umur hidup
Sebagian besar dari liabilitas program menyediakan manfaat seumur hidup, sehingga kenaikan harapan umur hidup akan mengakibatkan kenaikan liabilitas program.

Life expectancy
The majority of the plans' obligations are to provide lifetime benefit, so that the increase in life expectancy will result in an increase in the plans' liabilities.

Investasi didiversifikasi dengan baik, sehingga kinerja buruk satu investasi tidak akan memberikan dampak material bagi seluruh kelompok aset. Proporsi terbesar aset investasi ditempatkan pada instrumen utang, meskipun Perusahaan dan entitas anak juga berinvestasi pada properti, obligasi, reksadana dan kas. Perusahaan dan entitas anak meyakini bahwa instrumen ekuitas memberikan imbal hasil yang paling baik dalam jangka panjang pada tingkatan risiko yang dapat diterima.

Investments are well-diversified, such that the failure of any single investment would not have a material impact for the entire class of assets. The largest proportion of assets is invested in debt instruments, although the Company and its subsidiaries also invest in property, bonds, mutual funds and cash. The Company and its subsidiaries believe that equities offer the best returns over the long term with an acceptable level of risk.

Rata-rata ekspektasi sisa masa kerja adalah 21,19 tahun.

Average expected remaining service year is 21.19 year.

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted post-employment benefit and other long-term benefit is as follows:

	Kurang dari 1 tahun/ *Less than 1 year* Rp	2 sampai 5 tahun/ *Between 2 to 5 years* Rp	Lebih dari 5 tahun/ *Over 5 years* Rp	Jumlah/ *Total* Rp	
Imbalan pascakerja					*Post-employment benefits*
Program pensiun	731,724	1,550,938	8,627,681	10,910,343	*Pension plan*
Imbalan pemeliharaan kesehatan	1,488,765	3,858,633	115,716,132	121,063,530	*Health care benefits*
Imbalan pascakerja lainnya	2,795,736	4,232,690	138,125,408	145,153,834	*Other post-employment benefit*
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	216,242	1,577,981	1,400,663	3,194,887	*Other long-term employee benefit*
Jumlah	**5,232,467**	**11,220,243**	**263,869,884**	**280,322,594**	***Total***

51. Transaksi Non-Kas / *Non-Cash Transactions*

Tabel di bawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Perusahaan dan Entitas anak yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan nonkas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas konsolidasian Perusahaan dan Entitas anak sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

The table below details changes in the Company's and its Subsidiaries liabilities arising from financing activities, including both cash and non-cash changes. Liabilities arising from financing activities are those for which cash flow were, or future cash flows will be, classified in the Company's and its Subsidiaries consolidated statement of cash flows as cash flows from financing activities.

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 2019 dan 2018:

For the years ended in 2019 and 2018:

		Arus kas dari Aktivitas Pendanaan/ *Cash flows from Financing Activities*		Perubahan Transaksi Non Kas/ *Non-Cash Changes*			
	2018 Rp	Penambahan/ *Additional* Rp	Pembayaran/ *Payment* Rp	Amortisasi/ *Amortization* Rp	Penambahan Aset Tetap/ Addition of *Fixed Asset* Rp	Efek selisih kurs belum ter-realisasi dan yang lainnya/ *Unrealized foreign exchange and others* Rp	2019 Rp
Penerusan pinjaman/ *Two-step loans*	38,635,552	--	(2,566,661)	(34,191)	3,132,964	(1,190,118)	37,977,546
Utang kepada Pemerintah dan LK Pemerintah non-bank/ *Government and non-bank Government LK loans*	7,204,278	--	(1,043,793)	197,560	--	--	6,358,045
Utang sewa pembiayaan/ *Lease liabilities*	17,092,965	--	(2,624,629)	--	--	(358,852)	14,109,484
Utang bank/ *Bank loans*	181,111,734	77,147,139	(49,363,488)	17,473	--	(3,195,700)	205,717,158
Utang obligasi dan sukuk ijarah/ *Bonds payable and sukuk ijarah*	133,802,433	54,597,702	(2,279,812)	170,057	--	(5,051,604)	181,238,776
Utang listrik swasta / *Electricity purchase payable*	7,510,319	--	(394,405)	--	--	(285,008)	6,830,906
Utang KIK - EBA/ *KIK - EBA loans*	2,907,986	--	(966,724)	--	--	--	1,941,262
Jumlah/ *Total*	**388,265,267**	**131,744,841**	**(59,239,512)**	**350,899**	**3,132,964**	**(10,081,282)**	**454,173,177**

		Arus kas dari Aktivitas Pendanaan/ *Cash flows from Financing Activities*		Perubahan Transaksi Non Kas/ *Non-Cash Changes*			
	2017 Rp	Penambahan/ *Additional* Rp	Pembayaran/ *Payment* Rp	Amortisasi/ *Amortization* Rp	Penambahan Aset Tetap/ Addition of *Fixed Asset* Rp	Efek selisih kurs belum ter-realisasi dan yang lainnya/ *Unrealized foreign exchange and others* Rp	2018 Rp
Penerusan pinjaman/ *Two-step loans*	34,221,469	--	(2,950,612)	5,032	4,547,751	2,811,912	38,635,552
Utang kepada Pemerintah/ *Government loans*	7,352,965	--	(1,043,793)	78,250	--	816,856	7,204,278
Utang sewa pembiayaan/ *Lease liabilities*	20,585,178	--	(5,186,938)	--	--	1,694,725	17,092,965
Utang bank/ *Bank loans*	142,566,110	93,391,854	(57,585,860)	--	--	2,739,630	181,111,734
Utang obligasi dan sukuk ijarah/ *Bonds payable and sukuk ijarah*	101,354,360	31,236,379	(914,000)	40,591	--	2,085,103	133,802,433
Utang listrik swasta / *Electricity purchase payable*	7,376,402	--	(368,142)	--	--	502,059	7,510,319
Utang KIK - EBA/ *KIK - EBA loans*	3,538,586	--	(630,600)	--	--	--	2,907,986
Jumlah/ Total	**316,995,070**	**124,628,233**	**(68,679,945)**	**123,873**	**4,547,751**	**10,650,285**	**388,265,267**

Pengungkapan tambahan atas aktivitas investasi dan pendanaan non-kas:

Supplemental disclosures on non-cash investing and financing activites:

	2019 Rp	2018 Rp	
Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi kas:			*Non-cash investing and financing activities:*
Perolehan pekerjaan dalam pelaksanaan melalui:			*Additions to construction in progress through:*
Penarikan pinjaman dan utang biaya proyek	3,132,964	4,547,751	*Drawdown of loans and project cost payable*
Kapitalisasi biaya pinjaman	--	164,008	*Capitalization of borrowing costs*
Utang lain-lain	--	10,778,189	*Other payables*
Piutang lain-lain	--	656,923	*Other receivables*
Penambahan (pengurangan) nilai aset melalui hasil revaluasi dan kenaikan nilai wajar properti investasi	(1,183,109)	48,935,803	*Addition (deduction) of value of assets through revaluation and increase in fair value of investment properties*
Kerugian penurunan nilai aset tetap	247,615	301,965	*Impairment on property, plant and equipment*
Penambahan aset tetap yang berasal dari reklasifikasi properti investasi	7,193	19,382	*Addition of investment property Addition of property, plant and equipment from investment property reclasification*

52. Sifat dan Transaksi dengan Pihak Berelasi

52. Nature of Relationships and Transactions with Related Parties

Sifat Hubungan Berelasi

a. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia yang merupakan pemegang saham Perusahaan dan BUMN.
b. Perusahaan mempunyai hubungan berelasi dengan BUMN lainnya yang dimiliki bersama oleh Kementerian Keuangan.
c. Perusahaan dan entitas anak mempunyai pengaruh signifikan atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama (Catatan 8).
d. Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Perusahaan dan entitas anak.

Nature of Related Parties

a. The Government is the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, the shareholder of the Company and BUMN.

b. The Company is related to other BUMN owned by the Ministry of Finance.

c. The Company and its subsidiaries have significant influence on investments in associates or joint ventures (Note 8).

d. The Board of Commissioners and Directors is a member of the key management of the Company and its subsidiaries.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Perusahaan:

Below is the list of related parties with which the Company has transactions:

Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat hubungan/ *Nature of relationship*	Sifat transaksi/ *Nature of transaction*
Pemerintah Republik Indonesia/ *Government of Republic of Indonesia* ("Pemerintah")	Pemegang saham akhir/ *Ultimate Shareholder*	Penerimaan subsidi listrik, penerimaan penerusan pinjaman, dan utang kepada pemerintah/ *Receipt of electricity subsidy, two step loan and government loan*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Bank Rakyat Indonesia")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan kas dan setara kas, rekening bank dan deposito yang dibatasi penggunaannya, investasi jangka pendek, dan penerimaan utang bank/ *Placement of cash and cash equivalents, restricted cash in bank and time deposits, short-term investment, and receipt of bank loans*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya, kas dan setara kas, investasi jangka pendek, dan penerimaan utang bank/ *Placement of restricted cash in bank and time deposit, cash and cash equivalents, short-term investment, and receipt of bank loans*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Bank Negara Indonesia")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya, kas dan setara kas, dan penerimaan utang bank/ *Placement of restricted cash in bank and time deposit, cash and cash equivalents, and receipt of bank loans*
PT Bank DKI ("Bank DKI")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan kas dan setara kas dan penerimaan utang bank/ *Placement of cash and cash equivalents and receipt of bank loans*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Bank Tabungan Negara")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan kas dan setara kas *Placement of cash and cash equivalents*
PT Pertamina Geothermal Energy	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian tenaga listrik/ *Purchase of electricity*
PT Pertamina (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian bahan bakar dan minyak pelumas/ *Purchase of fuels and lubricants*
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian bahan bakar/ *Purchase of fuels*
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian bahan bakar/ *Purchase of fuels*
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi jasa konstruksi/ *Construction services transaction*
PT Nusantara Regas	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian bahan bakar/ *Purchase of fuels*
PT Surveyor Indonesia (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pelayanan teknik, survei dan pengukuran batubara/ *Engineering services, survey and coal measurement*

Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat hubungan/ *Nature of relationship*	Sifat transaksi/ *Nature of transaction*
PT Sucofindo (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pelayanan teknik, survei dan pengukuran batubara/ *Engineering services, survey and coal measurement*
PT Djakarta Lloyd (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi jasa transportasi bahan bakar dan batubara/ *Fuels and coals transportation services transaction*
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Asuransi bangunan, instalasi dan mesin pembangkit, perlengkapan transmisi serta kapal milik Perusahaan/ *Insurance services for Company's buildings, installation and power plant, transmission equipment and vessels*
Perum Jasa Tirta	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian tenaga listrik/ *Purchase of electricity*
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Penerimaan utang dari lembaga keuangan pemerintah nonbank/ *Receipt of non-bank government financial institution*
PT Geo Dipa Energi (Persero)	Entitas asosiasi/ *Associate*	Transaksi pembelian tenaga listrik/ *Purchase of electricity*
PT Tanjung Kasam Power	Entitas asosiasi/ *Associate*	Transaksi pembelian tenaga listrik/ *Purchase of electricity*
PT Dalle Energy Batam	Entitas asosiasi/ *Associate*	Transaksi pembelian tenaga listrik/ *Purchase of electricity*
PT Mitra Energi Batam	Entitas asosiasi/ *Associate*	Transaksi pembelian tenaga listrik/ *Purchase of electricity*
PT Sumber Segara Primadaya	Entitas asosiasi/ *Associate*	Transaksi pembelian tenaga listrik/ *Purchase of electricity*
PT Bajradaya Sentranusa	Ventura bersama/ *Joint venture*	Transaksi pembelian tenaga listrik/ *Purchase of electricity*
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	Ventura bersama/ *Joint venture*	Transaksi pembelian tenaga listrik dan pemberian pinjaman jangka panjang/ *Purchase of electricity and issuance of long-term loan*
PT Bukit Pembangkit Innovative	Ventura bersama/ *Joint venture*	Transaksi pembelian tenaga listrik/ *Purchase of electricity*
PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali	Ventura bersama/ *Joint venture*	Transaksi pembelian tenaga listrik/ *Purchase of electricity*
PT Perta Daya Gas	Ventura bersama/ *Joint venture*	Pemberian pinjaman jangka panjang/ *Issuance of long-term loan*
Dana pensiun PLN	Program imbalan pascakerja/ *Post-employment benefit plan*	Pembayaran kontribusi program manfaat pasti/ *Payment of contribution for defined benefit plan*
PT Transportasi Gas Indonesia	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control Through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi jasa penyaluran gas/ *Gas distribution services*
PT Wijaya Karya Industri Energi	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control Through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi sewa mesin pembangkit/ *Lease power plant machinery*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control Through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi jasa konstruksi/ *Construction services*

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018 (In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi: / *Balances and transactions with related parties:*

	Catatan/ *Notes*	2019 Rp	2019 % *)	2018 Rp	2018 % *)	
Piutang pihak berelasi	9					*Receivables from related parties*
PT Shenhua Gouhua Pembangkit Jawa Bali		785,639	0.05%	830,188	0.06%	*PT Shenhua Gouhua Pembangkit Jawa Bali*
PT Perta Daya Gas		168,878	0.01%	199,576	0.01%	*PT Perta Daya Gas*
PT Mitra Energi Batam		1,845	0.00%	1,845	0.00%	*PT Mitra Energi Batam*
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali		--	--	5,582	--	*PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali*
Subjumlah		956,362	0.06%	1,037,191	0.07%	*Subtotal*
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	10					*Restricted cash in banks and time deposits*
Bank Mandiri		86,032	0.01%	82,412	0.01%	*Bank Mandiri*
Bank Negara Indonesia		8,979	0.00%	1,348	0.00%	*Bank Negara Indonesia*
Subjumlah		95,011	0.01%	83,760	0.01%	*Subtotal*
Kas dan setara kas	12					*Cash and cash equivalents*
Bank Rakyat Indonesia		13,444,149	0.85%	10,464,753	0.70%	*Bank Rakyat Indonesia*
Bank Negara Indonesia		12,553,296	0.79%	8,635,043	0.58%	*Bank Negara Indonesia*
Bank Mandiri		10,558,351	0.67%	5,651,840	0.38%	*Bank Mandiri*
Bank Tabungan Negara		959,389	0.06%	1,001,303	0.07%	*Bank Tabungan Negara*
Bank DKI		656,755	0.03%	364,828	0.02%	*Bank DKI*
Subjumlah		38,171,940	2.40%	26,117,767	1.76%	*Subtotal*
Investasi jangka pendek	13					*Short-term investment*
Bank Rakyat Indonesia		273,901	0.02%	1,184,511	0.08%	*Bank Rakyat Indonesia*
Bank Mandiri		20,000	0.00%	20,000	0.00%	*Bank Mandiri*
Subjumlah		293,901	0.02%	1,204,511	0.08%	*Subtotal*
Piutang usaha	14					*Trade accounts receivable*
Badan Usaha Milik Negara		823,893	0.05%	596,016	0.04%	*State-Owned Enterprises*
Jumlah		40,341,107	2.54%	29,039,245	1.95%	*Total*
Penerusan pinjaman	24	37,977,546	5.81%	38,635,552	6.86%	*Two-step loans*
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-Bank	25	6,358,045	0.97%	7,204,278	1.13%	*Government and non-bank Government financial institution loans*
Utang sewa pembiayaan	26					*Lease liabilities*
PT Wijaya Karya Industri Energi		--	--	86,466	0.02%	*PT Wijaya Karya Industri Energi*
Utang bank	27					*Bank loans*
Bank Rakyat Indonesia		34,052,157	5.21%	23,271,064	4.13%	*Bank Rakyat Indonesia*
Bank Mandiri		23,650,000	3.62%	24,898,287	4.42%	*Bank Mandiri*
Bank Negara Indonesia		18,314,254	2.80%	20,338,378	3.61%	*Bank Negara Indonesia*
Bank DKI		1,827,679	0.28%	3,078,962	0.55%	*Bank DKI*
Bank Tabungan Negara		1,500,000	0.23%	--	--	
Subjumlah		79,344,090	12.13%	71,586,691	12.71%	*Subtotal*
Utang pihak berelasi	30					*Payable to related parties*
PT Riau Power		92	0.00%	--	--	*PT Riau Power*
PT Mitra Energi Batam		--	--	1,000	0.00%	*PT Mitra Energi Batam*
Subjumlah		92	0.00%	1,000	0.00%	*Subtotal*
Utang usaha	31					*Trade accounts payable*
PT Pertamina (Persero)		4,839,987	0.74%	572,110	0.10%	*PT Pertamina (Persero)*
PT Nusantara Regas		1,397,554	0.21%	727,834	0.13%	*PT Nusantara Regas*
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk		1,363,981	0.21%	1,396,507	--	*PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk*
PT Sumber Segara Primadaya		1,198,471	0.18%	538,466	0.10%	*PT Sumber Segara Primadaya*
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk		883,485	0.14%	247,512	0.04%	*PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk*
PT Pertamina Geothermal Energi		319,027	0.05%	319,336	0.06%	*PT Pertamina Geothermal Energi*
PT Geo Dipa Energi		143,312	0.02%	134,620	0.02%	*PT Geo Dipa Energi*
PT Bajradaya Sentranusa		128,369	0.02%	133,633	0.02%	*PT Bajradaya Sentranusa*
Perum Jasa Tirta		78,163	0.01%	95,669	--	*Perum Jasa Tirta*
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali		35,893	0.01%	--	--	*PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali*
PT Djakarta Lloyd (Persero)		27,540	0.00%	38,881	--	*PT Djakarta Lloyd (Persero)*
PT Dalle Energy Batam		16,494	0.00%	43,005	0.01%	*PT Dalle Energy Batam*
PT Transportasi Gas Indonesia		10,683	0.00%	7,192	0.00%	*PT Transportasi Gas Indonesia*
PT Mitra Energi Batam		14,803	0.00%	14,678	--	*PT Mitra Energi Batam*
Lain-lain (masing - masing dibawah 5% dari jumlah utang usaha)		1,356,973	0.21%	4,775,087	1.12%	*Others (each below 5% of total trade accounts payable)*
Subjumlah		11,814,735	1.81%	9,044,530	1.61%	*Subtotal*

	Catatan/ *Notes*	2019 Rp	2019 % *)	2018 Rp	2018 % *)	
Biaya masih harus dibayar	34					*Accrued expenses*
Bunga dan beban keuangan						*Interest and financing charges*
Penerusan pinjaman		331,275	0.05%	344,854	0.06%	*Two-step loans*
Utang bank						*Bank loans*
Bank Mandiri		210,041	0.03%	256,703	0.05%	*Bank Mandiri*
Bank Rakyat Indonesia		124,847	0.02%	109,888	0.02%	*Bank Rakyat Indonesia*
Bank Negara Indonesia		113,886	0.02%	126,645	0.02%	*Bank Negara Indonesia*
Bank Tabungan Negara		2,363	0.00%	--	--	*Bank Tabungan Negara*
Bank DKI		--	--	4,475	0.00%	*Bank DKI*
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank		74,699	0.01%	89,679	0.02%	*Government and non-bank Government financial institution loans*
Subjumlah		857,111	0.13%	932,244	0.16%	*Subtotal*
Jumlah		136,351,619	20.85%	127,490,761	22.50%	*Total*
Penjualan tenaga listrik	37					*Sale of electricity*
Badan Usaha Milik Negara		5,721,522	2.07%	5,505,800	2.09%	*State-Owned Enterprises*
Subsidi listrik Pemerintah	38	51,711,774	100.00%	48,101,754	100.00%	*Government's electricity subsidy*
Beban bahan bakar dan pelumas	40					*Fuel and lubricants expense*
PT Pertamina (Persero)		29,234,689	21.48%	29,385,495	21.39%	*PT Pertamina (Persero)*
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk		10,678,506	7.85%	10,132,171	7.38%	*PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk*
PT Nusantara Regas		8,494,335	6.24%	10,193,687	7.42%	*PT Nusantara Regas*
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk		6,955,163	5.11%	7,682,414	5.59%	*PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk*
Jumlah		55,362,693	40.68%	57,393,767	33.61%	*Total*
Beban pembelian tenaga listrik	41					*Purchased electricity expenses*
PT Sumber Segara Primadaya		7,274,856	8.71%	7,585,240	9.00%	*PT Sumber Segara Primadaya*
PT Pertamina Geothermal Energy		2,529,323	3.03%	2,611,244	3.10%	*PT Pertamina Geothermal Energy*
PT Bukit Pembangkit Innovative		1,050,730	1.26%	898,457	1.07%	*PT Bukit Pembangkit Innovative*
PT Bajradaya Sentranusa		871,617	1.04%	840,239	1.00%	*PT Bajradaya Sentranusa*
PT Geo Dipa Energi (Persero)		791,998	0.95%	790,389	0.94%	*PT Geo Dipa Energi (Persero)*
PT Shenhua Guohua PJBI		405,908	0.49%	592,659	0.70%	*PT Shenhua Guohua PJBI*
PT Dalle Energi Batam		304,021	0.36%	--	--	*PT Dalle Energi Batam*
Jumlah		13,228,453	15.83%	13,318,228	15.81%	*Total*
Beban pemeliharaan						*Maintenance expenses*
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	43	223,611	1.00%	225,224	1.09%	*PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali*
Beban usaha lain-lain	45					*Other operating expenses*
Asuransi						*Insurance*
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)		341,441	3.96%	283,607	3.57%	*PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)*
Beban keuangan	46					*Financial cost*
Utang bank		5,341,726	21.70%	4,288,070	19.83%	*Bank loans*
Penerusan pinjaman		650,386	2.64%	611,107	2.83%	*Two-step loans*
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank		374,996	1.52%	445,348	2.06%	*Government and non-bank Government financial institution loans*
Instrumen derivatif		295,118	1.20%	199,545	0.92%	*Derivative instruments*
Jumlah		6,662,226	27.06%	5,544,070	25.64%	*Total*

*) Persentase terhadap jumlah aset/ liabilitas/ pendapatan/ beban yang bersangkutan

*) *Percentage to related total assets/ liabilities/ revenues/ expenses*

Jumlah kompensasi Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp86.447 dan Rp74.856.

Total compensation of the Company's Board of Commissioners in 2019 and 2018 amounted to Rp86,447 and Rp74,856, respectively.

Jumlah kompensasi Direksi Perusahaan untuk tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp250.532 dan Rp224.594.

Total compensation of the Company's Directors in 2019 and 2018 amounted to Rp250,532 and Rp224,594, respectively.

Seluruh kompensasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan merupakan imbalan kerja jangka pendek.

All the compensation to the Company's Board of Commissioners and Directors represent short-term employee benefits.

Informasi mengenai kontribusi yang dilakukan Perusahaan dan entitas anak ke DP-PLN diungkapkan di Catatan 50.

Information about the contributions made by the Company and its subsidiaries to DP-PLN is disclosed in Note 50.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018 (In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

53. Aset dan Liabilitas Moneter Dalam Mata Uang Asing / *53. Monetary Assets and Liabilities Denominated In Foreign Currencies*

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan dan entitas anak mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

As of December 31, 2019 dan 2018, the Company and its subsidiaries had monetary assets and liabilities in foreign currencies as follows:

	2019				
	JPY *)	US$ *)	EUR *)	Lain-lain/ *Others* **)	
Aset moneter					***Monetary assets***
Piutang pihak berelasi	--	68,458,611	--	--	*Receivables from related parties*
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	39,796,118,675	49,001,061	--	--	*Restricted cash in banks and time deposits*
Kas dan setara kas	14,334,466,962	816,951,292	244,679,781	148,335	*Cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	--	1,000,000	--		
Jumlah aset moneter	54,130,585,637	935,410,964	244,679,781	148,335	*Total monetary assets*
Liabilitas moneter					***Monetary liabilities***
Penerusan pinjaman	158,867,568,117	1,240,170,346	19,375,532	6,512,892	*Two-step loans*
Utang sewa pembiayaan	103,641,300,467	56,099,845	--	--	*Lease liabilities*
Utang bank	51,897,893,380	6,292,235,622	304,144,617	--	*Bank loans*
Utang obligasi dan sukuk ijarah	23,200,000,000	10,025,948,000	1,000,000,000	--	*Bonds payable and sukuk ijara*
Utang listrik swasta	--	491,396,727	--	--	*Electricity purchase payable*
Utang lain-lain	134,943,554	505,948,920	119,109,383	7,490,571	*Other payables*
Utang biaya proyek	34,466,374	1,046,916	238,610	--	*Project cost payable*
Utang usaha	--	898,507,498	326,270	30,385,801	*Trade payables*
Biaya masih harus dibayar	8,882,526,820	244,021,636	5,459,709	64,218	*Accrued expenses*
Jumlah liabilitas moneter	346,658,698,712	19,755,375,510	1,448,654,121	44,453,482	*Total monetary liabilities*
Liabilitas moneter bersih	(292,528,113,075)	(18,819,964,546)	(1,203,974,340)	(44,305,147)	*Net monetary liabilities*
Ekuivalen Rupiah	(37,433,828)	(261,616,421)	(18,768,268)	(615,886)	*Rupiah equivalent*
Jumlah dalam Rupiah - bersih	**(318,434,403)**				***Total in Rupiah - net***

	2018				
	JPY *)	US$ *)	EUR *)	Lain-lain/ *Others* **)	
Aset moneter					***Monetary assets***
Piutang pihak berelasi	--	71,111,379	--	--	*Receivables from related parties*
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	36,946,110,237	47,702,501	--	--	*Restricted cash in banks and time deposits*
Kas dan setara kas	4,790,819,600	512,384,448	89,538,915	--	*Cash and cash equivalents*
Jumlah aset moneter	41,736,929,837	631,198,328	89,538,915	--	*Total monetary assets*
Liabilitas moneter					***Monetary liabilities***
Penerusan pinjaman	162,912,639,354	1,150,578,646	27,527,396	8,696,746	*Two-step loans*
Utang sewa pembiayaan	121,002,299,155	65,563,142	--	--	*Lease liabilities*
Utang bank	31,192,959,687	5,043,916,293	177,151,348	--	*Bank loans*
Utang obligasi dan sukuk ijarah	--	7,772,389,000	500,000,000	--	*Bonds payable and sukuk ijara*
Utang listrik swasta	--	518,632,595	--	--	*Electricity purchase payable*
Utang lain-lain	7,014,816,839	645,776,451	119,382,223	7,612,447	*Other payables*
Utang biaya proyek	246,561,105	345,310	269,257	--	*Project cost payable*
Utang usaha	--	616,689,475	--	10,058,203	*Trade payables*
Biaya masih harus dibayar	7,972,462,852	188,553,280	1,142,063	89,447	*Accrued expenses*
Jumlah liabilitas moneter	330,341,738,992	16,002,444,192	825,472,287	26,456,843	*Total monetary liabilities*
Liabilitas moneter bersih	(288,604,808,955)	(15,371,245,864)	(735,933,372)	(26,456,843)	*Net monetary liabilities*
Ekuivalen Rupiah	(37,840,448)	(222,591,011)	(12,186,873)	(383,122)	*Rupiah equivalent*
Jumlah dalam Rupiah - bersih	**(273,001,454)**				***Total in Rupiah - net***

*) Dalam jumlah penuh
**) Aset dan liabilitas dalam mata uang asing lainnya disajikan setara US$ dengan menggunakan kurs tanggal pelaporan

*) *In full amount*
**) *Assets and liabilities denominated in other foreign currencies are presented as US$ equivalent using the exchange rate prevailing at the reporting date*

Sehubungan dengan fluktuasi kurs mata uang Rupiah terhadap mata uang asing, Perusahaan dan entitas anak mencatat laba kurs mata uang asing bersih sebesar Rp9.486.326 untuk tahun 2019 dan rugi kurs mata uang asing bersih sebesar Rp10.926.741 untuk tahun 2018.

Apabila aset dan liabilitas dalam mata uang asing pada tanggal 31 December 2019 dijabarkan dengan menggunakan kurs penutupan mata uang asing pada tanggal 18 Mei 2020, maka liabilitas bersih dalam mata uang asing Perusahaan dan entitas anak akan mengalami kenaikan sebesar Rp22.408.699.

In relation to the fluctuation of the Rupiah against foreign currencies, the Company and its subsidiaries recorded net gain on foreign exchange amounting to Rp9,486,326 for December 31,2019 and net loss amounting to Rp10,926,741 for December 31,2018.

If assets and liabilities in foreign currencies as of December 31, 2019 had been translated using the closing rates at issuance of May 18, 2020, the total net foreign currency liabilities of the Company and its subsidiaries would have been increased by Rp22,408,699.

54. Segmen Operasi / *54. Operating Segment*

Informasi Wilayah Geografis
Segmen operasi disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian.

Untuk tujuan pelaporan manajemen, pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan dan entitas anak dibagi dalam operasi geografis Sumatera, Jawa Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Papua. Operasi geografis tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Perusahaan dan entitas anak, rinciannya adalah sebagai berikut:

Geographical Information
The operating segment information is prepared using the accounting policies adopted for preparing and presenting the consolidated financial statements.

For management reporting purposes, as of December 31, 2019 dan 2018, the Company and its subsidiaries were divided into Sumatera, Java Bali and Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi and Maluku Papua. These geographical operations are the basis on which the Company and its subsidiaries report segment information, with the following details:

	2019						
	SUMATERA Rp	JAWA BALI & NUSA TENGGARA Rp	KALIMANTAN Rp	SULAWESI Rp	MALUKU & PAPUA Rp	Jumlah/ *Total* Rp	
Pendapatan usaha							***Revenue***
Pendapatan eksternal	29,337,252	241,099,027	7,268,463	6,706,592	1,229,255	285,640,589	*External revenue*
Hasil segmen	(7,703,799)	(3,758,437)	(4,302,413)	(3,293,859)	(2,856,839)	(21,915,347)	***Segment results***
Pendapatan tidak dapat dialokasikan, bersih						(7,885,002)	*Unallocated income, net*
Rugi usaha sebelum subsidi						(29,800,349)	*Operating loss before subsidy*
Penghasilan lain-lain tidak dapat dialokasikan						55,919,559	*Unallocated other income*
Manfaat pajak						(21,797,080)	*Tax benefit*
Laba tahun berjalan						**4,322,130**	***Income for the year***
Aset segmen	275,137,329	918,261,802	84,042,594	68,782,764	26,671,464	1,372,895,953	***Segment assets***
Aset yang tidak dapat dialokasikan						212,159,060	*Unallocated assets*
Jumlah aset konsolidasi						**1,585,055,013**	***Total consolidated assets***
Liabilitas segmen	272,727,614	181,556,355	89,717,939	72,416,193	30,197,225	646,615,326	***Segment liabilities***
Liabilitas tidak dapat dialokasikan						9,059,274	*Unallocated liabilities*
Jumlah liabilitas konsolidasi						**655,674,600**	*Total*

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018 (In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2018						
	SUMATERA Rp	JAWA BALI & NUSA TENGGARA Rp	KALIMANTAN Rp	SULAWESI Rp	MALUKU & PAPUA Rp	Jumlah/ *Total* Rp	
Pendapatan usaha							***Revenue***
Pendapatan eksternal	25,062,219	233,606,498	7,726,914	5,425,117	1,076,994	272,897,742	*External revenue*
Hasil segmen	(15,008,395)	(26,978,705)	(1,953,277)	(3,605,740)	(2,875,809)	(50,421,926)	***Segment results***
Pendapatan tidak dapat dialokasikan, bersih						15,130,779	*Unallocated income, net*
Rugi usaha sebelum subsidi						(35,291,147)	*Operating loss before subsidy*
Penghasilan lain-lain tidak dapat dialokasikan						55,191,985	*Unallocated other income*
Beban pajak						(8,325,082)	*Tax expense*
Laba tahun berjalan						**11,575,756**	*Income for the year*
Aset segmen	255,232,470	890,896,603	75,786,393	61,484,483	22,979,675	1,306,379,624	***Segment assets***
Aset tidak dapat dialokasikan						186,108,121	*Unallocated assets*
Jumlah aset konsolidasi						**1,492,487,745**	*Total consolidated assets*
Liabilitas segmen	244,790,849	157,323,297	67,251,613	59,126,448	23,745,787	552,237,994	***Segment liabilities***
Liabilitas tidak dapat dialokasikan						12,835,894	*Unallocated liabilities*
Jumlah liabilitas konsolidasi						**565,073,888**	*Total consolidated liabilities*

55. Ikatan dan Kontinjensi / *55. Commitments and Contingencies*

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan dan entitas anak memiliki perikatan penting dan kontinjensi sebagai berikut:

As of December 31, 2019, the Company and its subsidiaries have significant commitments and contingencies, as follows:

a. Perjanjian pengadaan bahan bakar / *a. Fuel supply agreements*

i. Gas / *i. Gas*

Sektor/ *Sector*	Pemasok/ *Supplier*	Periode/ *Period*	Satuan/ *Unit*	Kuantitas/ *Quantity* [d]
Cilegon	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2009-2019	bbtu	109,717
Cilegon	PHE OSES	2019-2020	bbtu	11,979
Muara Karang - Priok	[a]	2004-2018 [f]	bbtu	679,954
Muara Karang	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2009-2019	bbtu	12,533
Muara Tawar	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2009-2019	bbtu	307,871
Muara Tawar, Payo Selincah, Rengat, Duri	[b]	2011-2020	bbtu	197,185
Keramasan, Inderalaya, Borang	Medco E&P Lematang	2017-2027	bbtu	50,933
Gresik	Kangean Energy Indonesia Ltd [g]	2012-2028	bbtu	368,700
Gresik	PT Pertamina Hulu Energy West Madura Offshore	2002-2020	bbtu	483,490
Gresik	PGN SAKA eks Hess Ltd	2006-2026	bbtu	440,000
Pekanbaru	EMP Bentu Ltd. [f]	2007-2021	bbtu	128,619
Keramasan	PT Pertamina EP	2010-2020	bbtu	27,375
Payo Selincah	PT Energasindo Heksa Karya	2009-2021	bbtu	123,658
Tanjung Batu	PT Pertamina EP	2005-2019	bbtu	81,636
Tarakan	PT Pertamina EP	2012-2020	bbtu	3,359
Bontang	Mubadala Petroleum	2019-2020	bbtu	4,380
Batam	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2004-2021	bbtu	72,270
Tanjung Priok	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2012-2019 [f]	bbtu	103,255
Grati	Lapangan Oyong [c]	2009-2020	bbtu	116,070
Talang Duku	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2009-2019	bbtu	22,251
Bangkanai	Ophir Indonesia (Bangkanai) Ltd [e]	2013-2033	bbtu	130,000
Sengkang	Energy Equity Epic (Sengkang) Pty Ltd	2012-2022	bbtu	51,945
Muara Tawar	PT Pertamina EP	2018-2024	bbtu	29,244
Tambak Lorok	PT Sumber Petrindo Perkasa	2011-2022	bbtu	219,000
Grati	Lapangan Wortel [c]	2012-2020	bbtu	55,827
Batam	Premier Oil Natuna Sea B.V.; Natuna 1 B.V.; Natuna 2 B.V.; Kufpec Indonesia (Natuna) B.V.	2011-2022	bbtu	280,100
Grati	PT Sampang Mandiri Perkasa	2012-2019	bbtu	31,793
Grati	PT Pasuruan Migas	2012-2019	bbtu	5,911
Jakabaring (CNG)	PDPDE Prov Sumatera Selatan	2013-2020	bbtu	8,340
Tambak Lorok	PC Muriah Ltd	2014-2026	bbtu	354,780

Sektor/ *Sector*	Pemasok/ *Supplier*	Periode/ *Period*	Satuan/ *Unit*	Kuantitas/ *Quantity* [d]
Melibur	Kondur Petroleum SA	2012-2020	bbtu	831
Tarakan	Medco E&P Indonesia	2010-2021	bbtu	10,134
Nunukan	Pertamina EP	2012-2029	bbtu	4,200
Sanga Sanga (CBM)	Virginia Indonesia Co. CBM Limited	2012-2019	bbtu	366
Muara Karang - Priok (LNG)	PT Nusantara Regas	2012-2022	kargo	191
Tanjung Selor	Perusda Nusa Serambi Persada	2013-2024	bbtu	11,550
Bunyu Kaltim	Pertamina EP	2012-2019 [f]	bbtu	609
Gresik	Santos (Madura Offshore) Peluang	2013-2019	bbtu	49,400
Gresik	PT Surya Cipta Internusa	2015-2020	bbtu	3,580
Purwodadi	PDPDE Prov Sumatera Selatan	2013-2019	bbtu	9,250
Purwodadi	PT Energasindo Heksa Karya	2019-2021	bbtu	1,056
Batam	Inti Daya Latu Prima	2012-2019	bbtu	11,685
Gresik	Petrogas Jatim Utama	2013-2019	bbtu	39,898
Belawan, Muara Karang, Priok (LNG)	Tangguh PSC Contract Parties	2016-2034	kargo	696
Belawan	PTGN	2018-2020	bbtu	13,010
KKA	PHE NSO dan PHE NSB	2019-2020	bbtu	7,647
Rawa Minyak Riau	Petroselat Ltd.	2015-2020	bbtu	7,802
Tana Tidung	PT Pertamina Hulu Energi Simenggaris dan PT Medco E&P Simenggaris	2015-2020	bbtu	805
New Tarahan	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2015-2019	bbtu	4,824
Multidestinasi	Pertamina (hilir)	2017-2022	kargo	[g]
Multidestinasi	Pertamina (hulu)	2018-2022	kargo	[g]
Sutami	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2016-2019	bbtu	4,564
Sumatera	ConocoPhillips (Grissik) Ltd.	2016-2023	bbtu	6,600
MPP 100 MW Lampung	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2016-2021	bbtu	32,193
Mahakam	Pertagas Niaga	2017-2023	bbtu	14,256
Batam	Petrochina	2016-2023	bbtu	41,556
Cilegon	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk [h]	2019-2030	bbtu	9,954
Muara Karang	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk [h]	2019-2030	bbtu	13,688
Muara Tawar	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk [h]	2019-2030	bbtu	16,425
Tanjung Priok	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk [h]	2019-2030	bbtu	29,200
Sutami	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk [h]	2019-2030	bbtu	1,314
MPP 100 MW Lampung	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk [h]	2019-2030	bbtu	6,439
Talang Duku	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk [h]	2019-2030	bbtu	2,482
New Tarahan	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk [h]	2019-2030	bbtu	1,168

a) PT Pertamina Hulu Energy ONWJ; Itochu Oil Exploration Co.Ltd.; Orchard Energy Java BV; Inpex Jawa Ltd.; CNOOC ONWJ Ltd. dan Talisman Resources (North West Java) Ltd.
b) PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang; Talisman (Jambi Merang) Ltd. Dan Pacific Oil & Gas (Jambi Merang) Ltd.
c) Santos (Sampang) Pty Ltd., Singapore Petroleum Sampang Ltd. (formerly Coastal Indonesia Sampang Ltd.) and Cue Sampang Pty Ltd.
d) Dalam jumlah penuh/ *In full amount*
e) Berganti nama dari / *Change name from Salamander Energy (Bangkanai) Ltd.*
f) Dalam proses perpanjangan / *In the process amendment*
g) Penentuan volume LNG dilakukan secara berkala berdasarkan kebutuhan / *Determination of LNG volume is set periodically based on requirement*
h) Perjanjian PPJBG PGN Multidestinasi volume yang tercantum dalam tabel adalah volume gas sesuai konfirmasi gas saat tahun ini, dimana untuk tahun berikutnya akan ditentukan kemudian/ *PPJBG PGN Multidestination volume agreement listed in the table is the volume of gas in accordance with the current gas confirmation for this year, which for the following year will be determined later*

Sehubungan dengan perjanjian diatas, Perusahaan mempunyai fasilitas *stand-by letter of credit* dengan rincian sebagai berikut:

In relation with the above agreement, the Company has facilities stand-by letter of credit with the following details:

Bank Penerbit/ *Issuing Bank*	Penerima Manfaat/ *Beneficiary*	Mata Uang/ *Currency*	Jumlah/ *Total *)*
BRI	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	US$	19,171,800
	Santos (Sampang) Pty. Ltd	US$	14,137,200
	Petrochina Int. Jabung	US$	5,673,801
	Petrogas Kaltim	IDR	82,916,609,243
	SESCO	US$	10,000,000
		MYR	79,000,000
	Ophir	US$	8,697,673
	PT Transportasi Gas Indonesia	US$	953,120
Mandiri	PT Pertamina (Persero)	IDR	537,969,489,451
		US$	11,451,021
	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	US$	1,852,200
	PEARLOIL (SSEBUKU) Ltd	US$	2,177,665
	BP Berau Ltd. (*On Behalf Of* Tangguh)	US$	80,476,029
BNI	Conoco Philips	US$	9,300,000

*) Dalam jumlah penuh/ *In full amount*

Harga pembelian gas pipa pada titik penyerahan berkisar antara US$4,30 sampai dengan US$11,18 per *Million British Thermal Units* ("MMBTU") dan *Liquid Natural Gas* ("LNG") antara US$7,38 sampai dengan US$13,32 per MMBTU.

Gas pipe purchase price at point of delivery ranges from US$4.30 to US$11.18 per Million British Thermal Units ("MMBTU") and the price of Liquid Natural Gas ("LNG") ranges from US$7.38 to US$13.32 per MMBTU.

ii. Batubara / *ii. Coal*

Pemasok/ *Suppliers*	Kuantitas metrik ton per tahun/ *Quantity per year in metric ton *)*	Periode/ *Period*
Rutin/ *Regular*		
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	6,880,000	2004-2031
PT Adaro Indonesia	1,500,000	2014-2023
PT Berau Coal	3,500,000	2009-2023
PT Indominco Mandiri	500,000	2017-2022
PT Oktasan Baruna Persada	600,000	2018-2026
CV Tahiti Coal	120,000	2017-2020

Pemasok/ *Suppliers*	Kuantitas metrik ton per tahun/ *Quantity per year in metric ton *)*	Periode/ *Period*
Rutin/ *Regular*		
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	6,880,000	2004-2031
PT Adaro Indonesia	1,500,000	2014-2023
PT Berau Coal	3,500,000	2009-2023
PT Indominco Mandiri	500,000	2017-2022
PT Oktasan Baruna Persada	600,000	2018-2026
CV Tahiti Coal	120,000	2017-2020
CV Air Mata Emas	36,000	2018-2021
PT Kideco Jaya Agung	1,600,000	2019-2022
PT Kaltim Prima Coal	7,780,000	2016-2022
PT Allied Indo Coal	246,000	2017-2020
PT Arutmin Indonesia	2,400,000	2019-2021
PT Jembayan Muara Bara	500,000	2017-2022
CV Bara Mitra Kencana	90,000	2019-2022
PT Cahaya Bumi Perdana	48,000	2019-2022
CV Putri Surya Pratama Natural	48,000	2019-2022
PT Dasrat Sarana Arang Sejati	48,000	2019-2022
PT Miyor Pratama Coal	30,000	2019-2022
Kerjasama konsorsium/ *Consortium*		
PT Arutmin Indonesia dan PT Darma Henwa	2,005,000	2007-2027
Program Percepatan/ *Fast Track Program*		
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	9,800,000	2012-2030
PT Indexim Coalindo	300,000	2018-2023
PT Titan Infra Energy [1)]	2,920,000	2007-2027
PT Hanson Energy	2,128,000	2011-2034
PT Lanna Harita Indonesia	300,000	2015-2020
PT Rizki Anugrah Pertama	1,186,000	2015-2021
PT Tunas Inti Abadi	600,000	2016-2021
PT Dizamatra Powerindo	500,000	2016-2021
PT Samantaka Batubara	500,000	2016-2021
PT Bara Energi Lestari	500,000	2017-2018
Kerjasama konsorsium/ *Consortium*		
PT Arutmin Indonesia dan PT Darma Henwa	5,553,000	2007-2027
PT Dwi Guna Laksana dan PT Borneo Indo Bara	1,890,000	2009-2029
PT Kasih Industri Indonesia CV Akbar dan/ *and* PT Sarolangun Prima Coal	1,865,000	2009-2029
PT Golden Great Borneo, PT Oktasan Baruna Persada dan/ *and* PT Buana Eltra	576,000	2011-2021
PT Exploitasi Energi Indonesia, CV Multi Bara Persada dan/ *and* PT Borneo Indo Bara	1,178,520	2011-2021
PT Oktasan Baruna Persada dan/ *and* PT Buana Rizky Armia	1,241,000	2009-2032
PT Energi Batubara Lestari dan/ *and* PT Batara Batari Sinergy Nusantara	221,000	2014-2034

*) Dalam jumlah penuh/ *In full amount*
1) Berganti nama dari/ *Changes name from* PT Titan Mining Energy

Pada tanggal 9 Maret 2018, Kementerian ESDM menerbitkan surat keputusan No. 1395 K/30/MEM/2018 mengenai harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang berlaku surut sejak 1 Januari 2018. Sesuai surat keputusan tersebut, harga batubara ditetapkan sebesar US$70/ metrik ton dengan acuan pada kalori 6.322

On March 9, 2018, the Ministry of Energy and Mineral Resources issued Decree No. 1395 K/30/MEM/2018 regarding coal selling price for electricity supply for public interest which was retroactively valid from January 1, 2018. According to the decree, the coal price was regulated at a price of US$70/ metric ton with referenced to coal calories for 6,322

kcal/kg. Surat keputusan tersebut juga mengatur formula untuk menghitung harga dengan spesifikasi yang berbeda seperti yang tercantum dalam keputusan tersebut. Melalui surat keputusan No. 1410 K/30/MEM/2018 tanggal 12 Maret 2018, masa berlaku surat keputusan No. 1395 K/30/MEM/2018 tersebut diubah menjadi berlaku sejak tanggal 12 Maret 2018.

kcal/kg. The decree also regulate the formula to calculate price with differ specification as listed in the decree. Through the Decree No 1410 K/30/MEM/2018 dated March 12, 2018, the validity period of the decree No. 1395 K/30/MEM/2018 was amended to became enacted starting from March 12, 2018.

Harga pembelian batubara berkisar antara Rp300.560 sampai dengan Rp1.110.815 per ton yang disesuaikan terhadap nilai kalori, kadar abu, sulfur, air, *Ash Fusion Temperature* ("AFT") dan *Hardgrove Grindability Index* ("HGI").

The price of coal purchases ranges from Rp300,560 to Rp1,110,815 per ton, which is adjusted against calorific value, ash content, sulphur, water, Ash Fusion Temperature ("AFT") and Hardgrove Grindability Index ("HGI").

PLN Batubara, entitas anak, mengadakan Perjanjian Kerjasama Operasi Penambangan Batubara dengan beberapa pemasok sebagai berikut:

PLN Batubara, a subsidiary, entered into Coal Mining Operation Cooperation Agreement with suppliers as follows:

Pemasok/ *Suppliers*	Lokasi/ *Locations*	Kuantitas metrik ton/ *Quantity in metric ton *)*
PT Tansri Madjid Energi	Muara Enim, Sumatera Selatan/ *South Sumatera*	43,396,322
PT Megapura Prima Industri	Sorong, Papua Barat/ *West Papua*	14,800,000
PT Awang Sejahtera	Parenggean, Kalimantan Tengah/ *Central Kalimantan*	693,680

*) Dalam jumlah penuh/ *In full amount*

iii. Bahan Bakar Minyak

Perusahaan dan PT Pertamina (Persero) ("Pertamina") mengadakan Perjanjian Induk Jual Beli Bahan Bakar Minyak No. 071.PJ/060/DIR/2001 tanggal 8 Oktober 2001. Perjanjian ini telah di adendum tanggal 16 Mei 2007 dimana Perusahaan dan Pertamina menyepakati antara lain: (i) penggunaan harga bahan bakar bulanan ditetapkan oleh Pertamina untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 April 2007 dan harga bahan bakar 109,5% dari *Mean Oil Platts Singapore* ("MOPS") ditambah Pajak Pertambahan Nilai untuk periode 1 Mei 2007 sampai dengan 31 Desember 2007; (ii) harga bahan bakar setelah tanggal 31 Desember 2007 akan ditetapkan oleh kedua belah pihak setiap tahun; (iii) jangka waktu pembayaran berikut pengenaan denda

iii. Fuel

The Company and PT Pertamina (Persero) ("Pertamina") entered into a Fuel Sale and Purchase Agreement No. 071.PJ/060/DIR/2001 dated October 8, 2001. This agreement was amended on May 16, 2007, whereby, the Company and Pertamina agreed among other things: (i) the monthly fuel price to be used for the period January 1 until April 30, 2007 is determined by Pertamina and the fuel price of 109.5% from Mean Oil Platts Singapore ("MOPS") plus Value Added Tax for the period May 1, 2007 until December 31, 2007; (ii) that the fuel price subsequent to December 31, 2007 will be determined by both parties every year; (iii) the terms of payment and penalty charges on late payment is using a monthly rate of Certificate of Bank Indonesia plus 1.3%; (iv) effective on

keterlambatan pembayaran sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia bulanan ditambah 1,3%; (iv) efektif mulai 1 Mei 2007, saldo utang yang belum dibayar atas pembelian bahan bakar sampai dengan 30 April 2007 dikenakan bunga sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia per tahun ditambah 1,3%, sampai diselesaikan dengan menerbitkan obligasi PLN selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2007; (v) utang kepada Pertamina, termasuk obligasi yang akan diterbitkan maksimum sebesar Rp18 triliun; dan (vi) perjanjian ini berlaku untuk lima tahun sejak 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2011.

May 1, 2007, the unpaid balance of payable for the purchases of fuel until April 30, 2007 will bear interest with a rate per annum of Certificate of Bank Indonesia plus 1.3%, until settled by issuance of PLN bonds, which is no later than August 31, 2007; (v) the maximum payable to Pertamina, includes bonds which will be issued amounting to Rp18 trillion; and (vi) this agreement is valid for five years from January 1, 2007 until December 31, 2011.

Berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 16 Mei 2007, PT Sucofindo (Persero) ditunjuk sebagai *independent surveyor*.

Based on the Joint Deal Letter dated May 16, 2007, PT Sucofindo (Persero) is assigned as an independent surveyor.

Berdasarkan Addendum IV Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak tanggal 16 Mei 2017. PLN dan Pertamina menyepakati perpanjangan jangka waktu pasokan hingga tahun 2020.

Based on Amendment IV of the Fuel Sale and Purchase Agreement dated May 16, 2017, PLN and Pertamina agreed to extend the period of supply until 2020.

Berdasarkan Addendum V, kesepakatan harga jual beli bahan bakar minyak (HSD dan MFO) antara Pertamina dan Perusahaan tanggal 17 Oktober 2017, adalah sebagai berikut:

Based on Amendment V, sales and purchase price aggrement for fuel (HSD and MFO) between Pertamina dan the Company dated on October 17, 2017, the result are:

a. Harga transaksi HSD tahun 2017:
   - Januari sampai dengan Juni 2017 adalah 107% dari MOPS.
   - Juli sampai dengan Desember 2017 adalah 104,58% dari MOPS.

a. HSD transaction price for 2017:
   - *January until June 2017 is 107% from MOPS.*
   - *July until December 2017 is 104.58% from MOPS.*

b. Harga transaksi MFO tahun 2017:
   - Januari sampai dengan Juni 2017 adalah 109,5% dari MOPS.
   - Juli sampai dengan Desember 2017 adalah 109,1% dari MOPS.

b. MFO transaction price for 2017:
   - *January until June 2017 is 109.5% from MOPS.*
   - *July until December 2017 is 109.1% from MOPS.*

Berdasarkan Addendum VI, kesepakatan harga jual beli bahan bakar minyak (HSD dan MFO) tahun 2018 sampai dengan 2020 antara Pertamina dan Perusahaan tanggal 20 Mei 2018, adalah sebagai berikut:

Based on Amendment VI, sales and purchase price aggrement for fuel (HSD and MFO) 2018 until 2020 between Pertamina and the Company dated on May 20, 2018, the result are:

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

a. Harga rata-rata transaksi HSD Semester I tahun 2018 adalah 104,77% dari MOPS.
b. Harga rata-rata transaksi MFO Semester I tahun 2018 adalah 106,34% dari MOPS.
c. Harga rata-rata transaksi HSD tahun 2019 untuk Semester I adalah 104,95% dari MOPS dan Semester II adalah 105,03% dari MOPS.
d. Harga rata-rata transaksi MFO tahun 2019 untuk Semester I adalah 106,04% dari MOPS dan Semester II adalah 106,93%.

Perusahaan telah mencatat pembelian HSD dan MFO tahun 2019 berdasarkan harga tersebut.

Pada tanggal 23 Februari 2016, Perusahaan menandatangani Perjanjian Jual Beli HSD dengan PT AKR Corporindo, Tbk untuk Lokasi Pembangkit Listrik Sei Raya, Siantan, Sanggau (Menyurai dan Semboja), dan Ketapang (Sukaharja) sebanyak 450.000 kl selama tiga tahun atau pemenuhan total volume, yang mana terlebih dahulu.

Pada tanggal 14 Juli 2016, Perusahaan menandatangani Perjanjian Jual Beli HSD dengan PT Kutilang Paksi Mas untuk Pembangkit Belawan sebanyak 750.000 kl selama tiga tahun atau pemenuhan total volume, yang mana terlebih dahulu.

Pada tanggal 26 Mei 2017, Perusahaan menandatangani Perjanjian Jual Beli HSD dengan PT Kutilang Paksi Mas untuk Pembangkit Tanjung Batu sebanyak 450.000 kl selama tiga tahun atau pemenuhan total volume, yang mana terlebih dahulu.

Pada tanggal 18 Agustus 2017, Perusahaan menandatangani Perjanjian Jual Beli HSD dengan PT Kutilang Paksi Mas untuk Pembangkit di Bangka Belitung sebanyak 120.000 kl selama tiga tahun atau pemenuhan total volume, yang mana terlebih dahulu.

a. Average HSD transaction price for Semester I 2018 is 104.77% from MOPS.
b. Average MFO transaction price for Semester I 2018 is 106.34% from MOPS.
c. Average HSD transaction price for Semester I 2019 is 104.95% from MOPS and Semester II is 105.03% from MOPS.
d. Aveage MFO transcation price for Semester I 2019 is 106.04% from MOPS and Semester II is 106.93%.

The Company has recorded purchase of HSD and MFO for the year 2019 based on those prices.

On February 23, 2016, the Company entered into a Sale and Purchase Agreement of HSD with PT AKR Corporindo, Tbk Power Plant Location in Sei Raya, Siantan, Sanggau (Menyurai and Semboja) and Ketapang (Sukaharja) for 450,000 kl for three years or fulfillment of total volume, whichever is the first.

On July 14, 2016, the Company entered into a Sale and Purchase Agreement of HSD with PT Kutilang Paksi Mas for Belawan Power Plant for 750,000 kl for three years or fulfillment of total volume, whichever is the first.

On May 26, 2017, the Company entered into a Sale and Purchase Agreement of HSD with PT Kutilang Paksi Mas for Tanjung Batu Power Plant for 450,000 kl for three years or fulfillment of total volume, whichever is the first.

On August 18, 2017, the Company entered into a Sale and Purchase Agreement of HSD with PT Kutilang Paksi Mas for Power Plant in Bangka Belitung Power Plant for 120,000 kl for three years or fulfillment of total volume, whichever is the first.

Pada tanggal 29 Desember 2017, Perusahaan menandatangani Perjanjian Jual Beli HSD dengan PT Kutilang Paksi Mas untuk Pembangkit Belawan dan Kalimantan Selatan dan Tengah sebanyak 750.000 kl selama tiga tahun atau pemenuhan total volume, yang mana terlebih dahulu.

On December 29, 2017, the Company entered into a Sale and Purchase Agreement of HSD with PT Kutilang Paksi Mas for Belawan and South & Central Kalimantan Power Plant for 750,000 kl for three years or fulfillment of total volume, whichever is the first.

iv. Uap Panas Bumi
Pada tahun 2019, Perusahaan memiliki perjanjian dengan beberapa pemasok untuk pengadaan uap panas bumi sebagai berikut:

iv. Geothermal Steam
In 2019, the Company entered geothermal steam agreement with several suppliers, as follows:

Sektor/ *Sector*	Pemasok/ *Supplier*	Periode/ *Period*
Kamojang Unit 1, 2 & 3	PT Pertamina Geothermal Energy	2012-2040
Lahendong Unit 1	PT Pertamina Geothermal Energy	2002-2032
Lahendong Unit 2 & 3	PT Pertamina Geothermal Energy	2007-2039
Lahendong Unit 4	PT Pertamina Geothermal Energy	2011-2041
Ulubelu Unit 1 & 2	PT Pertamina Geothermal Energy	2012-2042
Hululais Unit 1 & 2	PT Pertamina Geothermal Energy	30 tahun/ *years* *)
Sungai Penuh Unit 1 & 2	PT Pertamina Geothermal Energy	30 tahun/ *years* *)
Kotamobagu Unit 1,2,3 & 4	PT Pertamina Geothermal Energy	30 tahun/ *years* *)
Darajat Unit 1	PT Pertamina, Star Energy Geothermal Darajat I Ltd. Texaco Darajat Ltd. PT Star Energy Geothermal Darajat II Ltd.	1994-2030
Gunung Salak Unit 1,2 & 3	PT Pertamina, Unocal Geothermal of Indonesia Ltd. Star Energy Geothermal Salak Pratama Ltd.	1993-2040

*) Sejak *Commercial Date* / *Since Commercial Date*

b. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dan Kontrak Penjualan Energi
Sebelum tahun 1997, Perusahaan mengadakan PPA dan ESC dengan IPP skala besar. Pada tahun 1999, Perusahaan telah melaksanakan renegosiasi terhadap PPA dan ESC melalui Kelompok Kerja Renegosiasi Kontrak Khusus PT PLN (Persero) dibawah arahan Pemerintah. Renegosiasi tersebut meliputi antara lain keseimbangan kondisi kontrak, kewajaran harga dan disparitas harga jual listrik IPP dan harga jual Perusahaan.

Dalam perjanjian dengan IPP tertentu, disepakati bahwa setiap saat selama perjanjian berlaku, Perusahaan dapat melaksanakan opsi untuk membeli hak penjual, milik, dan kepentingan atas proyek yang bersangkutan.

b. Power Purchase Agreements and Energy Sales Contract
Prior to 1997, the Company entered into PPA and ESC with large-scale IPPs. In 1999, the Company entered into renegotiation of the PPA and ESC through a Working Group on PT PLN (Persero) Special Contract Renegotiation under the direction of the Government. Such renegotiation includes, among other subjects, equalization in contract conditions, reasonableness of price and disparity of selling price between the IPP and the Company.

Based on the agreements with certain IPPs, the Company may exercise its option to purchase all of the IPP's rights, title and interest in the projects at any time during the contract period.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tanggal 31 Desember 2019, perjanjian signifikan antara Perusahaan dan entitas anak dengan IPP adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2019 the significant agreements between the Company and its subsidiaries with IPPs are as follows:

i. Sudah Beroperasi / *In Operations*

No.	Perusahaan/*Company*	Proyek/*Project*	Bahan bakar/ *Fuel*	Kapasitas/ *Capacity* (MW)	AF [b] (%)	Periode/ *Period a)*	Tanggal operasi komersial/ *Commercial Operation Date*
1	PT Energi Sengkang	Sengkang, Sulawesi selatan/ *South Sulawesi*	Gas	315	85	1998-2022	12 September 1998/ *September,12 1998*
2	PT Cikarang Listrindo	Cikarang, Jawa Barat/ *West Java*	Gas	300	72	1998-2031	1 Desember 1998/ *December,1 1998*
3	Pertamina, Cevron Drajat Ltd	*Drajat, Jawa Barat/ West Java*	*Panas bumi/ Geothermal*	220	95	2000-2030 2007-2053	*1 Februari 2000 / February,1 2000* 1 Agustus 2007/ *August,1 2007*
4	Star Energy Geothermal Ltd	Wayang Windu, Jawa Barat/ *West Java*	Panas bumi/ *Geothermal*	220	95	2000-2030 2009-2039	1 Juni 2000/ *June,1 2000* 1 Maret 2009/ *March 1, 2009*
5	PT Paiton Energy	Paiton I, Jawa Timur/ *East Java*	Batubara/ *Coal*	1230	85	2000-2040	1 Juli 2000/ *July,1 2000*
6	PT Jawa Power	Paiton II, Jawa Timur/ *East Java*	Batubara/ *Coal*	1220	83	2000-2030	1 November 2000/ *November,1 2000*
7	Dayabumi Salak Pratama Ltd.	Salak, Jawa Barat/ *West Java*	Panas bumi/ *Geothermal*	196.8	90	2000-2040	1 Desember 2000/ *December,1 2000*
8	PT Geo Dipa Energy	Dieng, Jawa Tengah/ *Central Java*	Panas bumi/ *Geothermal*	55	95	2002-2044	1 Oktober 2002/ *October,1 2002*
9	PT Asrigita Prasarana	Palembang Timur, Sumatera Selatan/ *South Sumatera*	Gas	150	85	2004-2024	1 September 2004/ *September,1 2004*
10	Perum Jasa Tirta	Purwakarta, Jawa Barat/ *West Java*	*Tenaga Air/ Hydro*	180	-	2017-2022	1 Agustus 2006/ *August,1 2006*
11	PT Sumber Segara Primadaya	Cilacap, Jawa Tengah/ *Central Java*	Batubara/ *Coal*	562	80	2007-2037	1 Februari 2007/ *February 1, 2007*
12	PT Cipta Daya Nusantara	Mobuya, Sulawesi Utara/ *North Sulawesi*	Tenaga Air/ *Hydro*	3	80	2007-2027	31 Juli 2007/ *July,31 2007*
13	PT Pusaka Jaya Palu Power	Palu, Sulawesi Tengah/ *Central Sulawesi*	Batubara/ *Coal*	27	80	2007-2032	1 November 2007/ *November 1, 2007*
14	PT Meppo Gen	Gunung Megang, Sumatera Selatan/ *South Sumatera*	Gas	110	80	2007-2027	10 November 2007/ *November,10 2007*
15	PT Pertamina Geothermal Energy	Kamojang Unit 4, Jawa Barat *West Java*	Panas bumi/ *Geothermal*	60	90	2008-2038	26 Januari 2008/ *January,26 2008*
16	PT Dizamatra Powerindo	Sebayak, Sumatera Utara/ *North Sumatera*	Panas bumi/ *Geothermal*	11.3	90	2008-2038	1 Agustus 2008/ *August,1 2008*
17	PT Cahaya Fajar Kaltim	Embalut 1 &2 , Kalimantan Timur/ *East Borneo*	Batubara/ *Coal*	45	83	2008-2040	20 Desember 2008/ *December,20 2008*
18	PT Fajar Futura Energi Luwu	Ranteballa, Luwu, Sulawesi Selatan/ *South Sulawesi*	Tenaga Air/ *Hydro*	2.4	-	2010-2035	1 Mei 2010/ *May,1 2010*
19	PT Bajradaya Sentranusa	Asahan, Sumatera Utara/ *Batam Island*	Tenaga Air/ *Hydro*	180	1.175 GWh/th	2010-2040	18 Januari 2011/ *January,18 2011*
20	PT Sulawesi Mini Hydro Power	Tangka, Sinjai, Sulawesi Selatan/ *South Sulawesi*	Tenaga Air/ *Hydro*	10	-	2011-2036	1 Februari 2011 *February,1 2011*
21	PT Eksploitasi Energi Indonesia	Pangkalan Bun, Kalimantan Selatan/ *South Bontaro*	Batubara/ *Coal*	11	80	2011-2036	14 Oktober 2011/ *October,14 2011*
22	PT Paiton Energy	Paiton III, Jawa Timur/ *East Java*	Batubara/ *Coal*	815	85	2012-2042	18 Maret 2012/ *March,18 2012*
23	PT Cirebon Electric Power	Cirebon, Jawa Barat/ *West Java*	Batubara/ *Coal*	660	80	2012-2042	27 Juli 2012/ *July,27 2012*
24	PT Bosowa Energi	Jeneponto, Sulawesi Selatan/ *South Sulawesi*	Batubara/ *Coal*	200	80	2012-2042	1 November 2012/ *November,1 2012*
25	PT Bosowa Energi	Jeneponto, Sulawesi Selatan/ *South Sulawesi*	Batubara/ *Coal*	250	80	2018-2048	1 April 2018/ *April 1, 2018*
26	PT Poso Energy	Poso, Sulawesi Tengah/ *Central Sulawesi*	Tenaga Air/ *Hydro*	195	845,52 GWh/th	2012-2042	30 Desember 2012/ *December,30 2012*
27	PT Bekasi Power	Bekasi, Jawa Barat/ *West Java*	Gas	118.8	80	2013-2033	5 Januari 2013/ *January,5 2013*

No.	Perusahaan/*Company*	Proyek/*Project*	Bahan bakar/ *Fuel*	Kapasitas/ *Capacity* (MW)	AF [b] (%)	Periode/ *Period a)*	Tanggal operasi komersial/ *Commercial Operation Date*
28	PT GH EMM Indonesia	Simpang Belimbing Muara Enim, Sumatera Selatan/ *South Sumatera*	Batubara/ *Coal*	227	80	2011-2041	27 Februari 2013/ *February,27 2013*
29	PT Sepoetih Daya Prima	Lampung Tengah, Sumatera	Batubara/ Coal	12	80	2014-2034	2 Mei 2014/ May,2 2014
30	PT Cahaya Fajar Kaltim	Embalut Unit 3, Kalimantan Timur/ *East Borneo*	Batubara/ *Coal*	50	87	2014-2037	14 Agustus 2014/ *August,14 2014*
31	PT Tenaga Listrik Gorontalo	Molotabu, Gorontalo	Batubara/ *Coal*	21	80	2014-2039	13 September 2014/ *September,13 2014*
32	PT Geo Dipa Energi	Patuha, Jawa Barat/ *West Java*	Panas bumi/ *Geothermal*	55	95	2014-2056	27 September 2014/ *September,27 2014*
33	PT Kerta Negara Energi Perkasa	Senipah, Kalimantan Timur/ *East Bontaro*	Gas	82	85	2015-2040	17 Desember 2015/ *December,17 2015*
34	PT Bukit Pembangkit Innovative	Banjar Sari, Lahat, Sumatera Selatan/ *South Sumatera*	Batubara/ *Coal*	220	80	2015-2045	29 Mei 2015 *May,29 2015*
35	PT General Energy Bali	Celukan Bawang, Bali	Batubara/ *Coal*	380	85	2015-2045	18 Juni 2015/ *June,18 2015* 27 Juni 2015/ *June,27 2015* 31 Juli 2015/ *July,31 2015*
36	PT Pertamina Geothermal Energy	Kamojang Unit 5, Jawa Barat/ *West Java*	Panas bumi/ *Geothermal*	30	90	2015-2045	29 Juni 2015/ *June,29 2015*
37	PT Harmoni Energy Indonesia	Buton, Sulawesi Tenggara/ *Southeast Sulawesi*	Batubara/ *Coal*	14	80	2015-2040	29 Oktober 2015/ *October,29 2015*
38	PT Priamanaya Energi	Keban Agung, Lahat, Sumatera Selatan/ *South Sumatera*	Batubara/ *Coal*	240	80	2016-2046	1 Mei 2016/ *May,1 2016*
39	PT Wampu Electric Power	Wampu, Sumetera Utara/ *North Sumatera*	Tenaga Air/ *Hydro*	45	315,36 GWh/Th	2016-2046	1 Mei 2016/ *May,1 2016*
40	PT Sumber Segara Primadaya	Cilacap Ekspansi, Jawa Tengah/ *Central Java*	Batubara/ *Coal*	614	80	2016-2046	9 Juni 2016/ *June,9 2016*
41	PT Pertamina Geothermal Energy	Ulubelu Unit 3, Sumatera	Panas bumi/ *Geothermal*	55	90	2016-2046	26 Juli 2016/ *July,26 2016*
42	PT Pusaka Jaya Palu Power	Tawaeli Ekspansi (Unit 4 & 5), Palu	Batubara/ *Coal*	30	80	2016-2041	7 September 2016/ *September,7 2016*
43	PT Pertamina Geothermal Energy	Lahendong Unit 5, Sulawesi Utara/ *North Sulawesi*	Panas bumi/ *Geothermal*	20	90	2016-2046	15 September 2016/ *September,15 2016*
44	PT Pertamina Geothermal Energy	Lahendong Unit 6, Sulawesi Utara/ *North Sulawesi*	Panas bumi/ *Geothermal*	20	90	2016-2046	9 Desember 2016/ *December,9 2016*
45	PT DSSP Power Sumsel	Sumsel 5, Banyuasin, Sumatera Selatan/ *South Sumatera*	Batubara/ *Coal*	300	80	2016-2041	20 Desember 2016/ *December,20 2016*
46	Sarulla Operation Ltd	Sibual Buali, Sumatera Utara/ *North Sumatera*	Panas bumi/ *Geothermal*	110	90	2017-2047	18 Maret 2017/ *March,18 2017*
47	PT Pertamina Geothermal Energy	Ulubelu Unit 4, Sumatera	Panas bumi/ *Geothermal*	55	90	2016-2046	25 Maret 2017/ *March,25 2017*
48	PT Lestari Banten Energi	Banten, Jawa Barat/ *West Java*	Batubara/ *Coal*	625	80	2017-2042	28 Maret 2017/ *March,28 2017*
49	PT Lombok Energy Dinamics	Sambelia, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat/ *West Nusa Tenggara*	Batubara/ *Coal*	50	80	2017-2042	10 April 2017/ *April 10, 2017*
50	Sarulla Operation Ltd	Sibual Buali Unit 2, Sumatera Utara/ *North Sumatera*	Panas bumi/ *Geothermal*	110	90	2017-2047	2 Oktober 2017/ *October 2, 2017*
51	Sarulla Operation Ltd	Sibual Buali Unit 3, Sumatera Utara/ *North Sumatera*	Panas bumi/ *Geothermal*	110	90	2017-2047	3 April 2018/ *April 3, 2018*
52	PT Pertamina Geothermal Energy	Garut, Jawa Barat	Panas bumi/ *Geothermal*	30	90	2018-2048	6 April 2018/ *April 6, 2018*
53	PT UPC Sidrap Bayu Energi	Sulawesi Selatan / South Sulawesi	Angin/ *Wind*	70	100	2018-2048	5 April 2018/ *April 5, 2018*
54	PT Tanggamus Electric Power	Lampung, Sumatera	Tenaga Air/ *Hydro*	56	57	2018-2048	7 Juli 2018/ *July 7, 2018*
55	PT Renkind Daya Energi	Mamuju, Sulawesi Barat / *West Sulawesi*	Batubara/ *Coal*	50	80	2018-2043	18 September 2018/ *September 18, 2018*
56	PT Indo Ridlatama Power	Muara Jawa, Kalimantan Timur/ *East Kalimantan*	Batubara/ *Coal*	50	80	2018-2048	30 November 2018/ *November 30, 2018*

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

No.	Perusahaan/*Company*	Proyek/*Project*	Bahan bakar/ *Fuel*	Kapasitas/ *Capacity* (MW)	AF [b] (%)	Periode/ *Period a)*	Tanggal operasi komersial/ *Commercial Operation Date*
57	PT Rajamandala Electric Power	Cianjur, Jawa Barat / *West Java*	Tenaga Air/ *Hydro*	47	44	2019-2049	12 Mei 2019/ *May 12, 2019*
58	PT Indo Matra Power	Kawasan Industri Kabil, Pulau Batam/ *Batam Island*	Gas	17.4	80	2006-2019	11 September 2005/ *September,11 2005* 1 April 2006/ *April,1 2006*
59	PT Dalle Energy Batam	Panaran, Pulau Batam/ *Batam Island*	Gas	85.5	90	2005-2025	1 Desember 2005/ *December,1 2005*
60	PT Mitra Energi Batam	Panaran, Pulau Batam/ *Batam Island*	Gas	55	84	2005-2034	29 Oktober 2004 *October,29 2004*
61	PT Mitra Energi Batam	Panaran, Pulau Batam/ *Batam Island*	Gas	22.2	-	2014-2034	1 September 2014 *September,1 2014*
62	Tanjung Kasam Power	Tanjung Kasam, Pulau Batam/ *Batam Island*	Batubara/ *Coal*	99	85	2012-2042	25 Oktober 2012/ *October, 25 2012* 1 November 2012/ *November,1 2012*
63	PT Energi Listrik Batam	Tanjung Uncang, Pulau Batam/ *Batam Island*	Gas	70	85	2016-2038	1 Mei 2016 *May,1 2016*
64	PT Humbahas Bumi Energi	Hutraja, Sumatera Utara/ *North Sumatera*	Tenaga air/ *Hydro*	5	65	2012-2037	10 Mei 2012/ *May,10 2012*
65	PT Bakti Nugroho Yuda Energy	Baturaja, Sumatera Selatan/ *South Sumatera*	Batubara/ *Coal*	20	80	2014-2039	18 Januari 2014 *January,18 2014*
66	Konsorsium / *Consortium* PT Wijaya Karya PT Navigat Energy	Borang, Sumatera Selatan/ *South Sumatera*	Gas	60	80	2012-2019	29 Juni 2012 *June,29 2012*
67	Konsorsium / *Consortium* PT Modaco Enrgy PT Elektrindo Perkasa Utama Pratt & Whitney Ps. INC Renewable Energy Poweer International	Payo Selincah, Jambi	Gas	94	60	2012-2019	8 Juni 2012 *June,8 2012*
68	Konsorsium / *Consortium* PT PP PT Bangun Energy Resources PT Navigat Energy PT SNC Lavalin TPS General Electric	Talang Duku, Jambi	Gas	57	60	2013-2019	11 Januari 2007 *January,11 2007*
69	PT Pertamina Geothermal Energy	PLTP Lumut Balai, *Sumatera Selatan/ South Sumatera*	Panas Bumi/ *Geothermal*	55	90	2017-2047	1 September 2019/ *September 01, 2019*
70	PT Energi bayu Jeneponto	PLTBayu Tolo Jeneponto *Sulawesi Selatan / South Sulawesi*	Angin/ *Wind*	60	30	20 Th	14 Mei 2019/ *May 14, 2019*
71	PT Sorik Marapi Geothermal Power	PLTP Sorik Marapi, Sumatera Utara/ North Sumatera	Panas Bumi/Geothermal	45	90	2019-2049	1 Oktober 2019/ October 1,2019
72	PT DSS Power Kendari	Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara/ *South east Sulawesi*	Batubara/ Coal	100	80	2019-2044	28 Oktober 2019/ *October 28, 2019*
73	PT Tanjung Power Indonesia	Kalimantan Selatan/ South Borneo	Batubara/ Coal	200	80	2019-2044	14 Desember 2019/ *December 14, 2019*
74	PT Sumber Segara Primadaya	Cilacap, Jawa Tengah/ Central Java	Batubara/ Coal	945	80	2020-2050	9 November 2019/ *November 9, 2019*
75	PT Supreme Energy Muaralaboh	PLTP Muaralaboh, Sumatera Barat/ West Sumatera	Panas Bumi/Geothermal	80	90	2019-2049	16 Desember 2019/ *December 16, 2019*
				13,195			

Selain dari perjanjian jual beli tenaga listrik di atas, Perusahaan dan entitas anak juga memiliki beberapa perjanjian sewa yang termasuk dalam kategori sewa operasi.

In addition to the above power purchase agreements, the Company and its subsidiaries also entered into rental agreements that falls into the category of operating leases.

ii. Belum Beroperasi (Dalam Tahap Pengembangan)

ii. Not Yet in Operation (Development Stage)

No.	Perusahaan/*Company*	Proyek/*Project*	Bahan bakar/ *Fuel*	Kapasitas/ *Capacity* (MW)	AF [b] (%)	Periode/ *Period*	Status/ *Status*
1	PT Bhumi Jati Power	Jawa-4 (FTP2)	Batubara	2000	86%	2021 - 2046	Tahap Pembangunan/ *Construction Stage*
2	PT Indo Raya Tenaga	Jawa-9&10	Batubara	2000	86%	2024 - 2049	Tahap Pembangunan/ *Construction Stage*
3	PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali	Jawa-7 - Bojonegara	Batubara	1982	86%	2020 - 2045	Tahap Pembangunan/ *Construction Stage*
4	PT Bimasena Power Indonesia	Jawa Tengah	Batubara	1900	86%	2020 - 2045	Tahap Pembangunan/ *Construction Stage*
5	PT SKS Listrik Kalimantan	Jawa-1	LNG	1760	60%	2023 - 2048	Tahap Pembangunan/ *Construction Stage*
6	PT Tanjung Jati Power Company	Jawa-3 (FTP2)	Batubara	1320	86%	2025 - 2055	Tahap Pendanaan/ *Financing Stage*
7	PT Huadian Bukit Asam Power	Sumsel-8	Batubara	1200	80%	2023 - 2048	Tahap Pembangunan/ *Construction Stage*
8	PT Cirebon Energi Prasarana	Jawa-1 (FTP2)	Batubara	924	86%	2022 - 2047	Tahap Pembangunan/ *Construction Stage*
9	PT Putra Indotenaga - PT PLN BB1)	Jambi Tahap 1	Batubara	600	80%	2024 - 2049	Tahap Pendanaan/ *Financing Stage*
10	PT Pembangkitan Perkasa Daya	Jambi Tahap 2	Batubara	600	80%	2022 - 2047	Tahap Pendanaan/ *Financing Stage*
11	PT PJB Investasi - PT Gama Energi Negeri1)	Sumut-2	Batubara	600	85%	2024 - 2049	Tahap Pendanaan/ *Financing Stage*
12	PT Shenhua Guohua Lion Power Indonesia	Sumsel-1	Batubara	600	80%	2021 - 2051	Tahap Pembangunan/ *Construction Stage*
13	PT North Sumatra Hydro Energy	PLTA Batang Toru	Tenaga Air/*Hydro*	510		2021-2051	Tahap Pembangunan/ *Construction Stage*
14	PT Meulaboh Power Generation	Meulaboh 3&4	Batubara	400	80%	2022 - 2047	Tahap Pembangunan/ *Construction Stage*
15	PT Kerinci Merangin Hidro	PLTA Merangin	Tenaga Air/*Hydro*	350		2025-2055	Tahap Pendanaan/ *Financing Stage*
16	PT Sumbagselenergi Sakti Pewali	Sumbagsel-1	Batubara	300	80%	2023 - 2048	Tahap Pendanaan/ *Financing Stage*
17	PT PT PJB Investasi - PT PLN BB1)	Sumsel-6	Batubara	300	80%	2027 - 2052	Tahap Pendanaan/ *Financing Stage*
18	PT Medco Ratch Power Riau	Riau	Gas Pipa	275	60%	2021 - 2041	Tahap Pembangunan/ *Construction Stage*
19	PT Poso Energy	PLTA Poso	Tenaga Air/*Hydro*	260		2021-2051	*Operation 195 MW* *COD December 2019 (60 MW)* *Under Construction 260 MW*
20	PT Banyuasin Power Energi	Banyuasin	Batubara	250	80%	2021 - 2051	Tahap Pendanaan/ *Financing Stage*
21	PT Supreme Energy Rajabasa	PLTP Rajabasa, Lampung	Panas Bumi/*Geothermal*	220		2023-2053	Eksplorasi/*Exploration*
22	PT Supreme Energy Rantau Dedap	PLTP Rantau Dadap, Sumatera Selatan/ South Sumatera	Panas Bumi/*Geothermal*	220		2019-2049	*Under Construction*
23	Star Energy	Wayang Windu #3,4, Jawa Barat/ West Java	Panas Bumi/*Geothermal*	220		2020-2050	Exploitation / *exploitasi*
24	PT Sejahtera Alam Energi	PLTP Baturraden, Jawa Tengah/ Central Java	Panas Bumi/*Geothermal*	220		2022-2052	PPA
25	PT PJB Investasi - PT PLN BB1)	Kalselteng-3	Batubara	200	80%	2025 - 2050	Tahap Pendanaan/ *Financing Stage*
26	PT PJB Investasi - PT PLN BB1)	Kalselteng-4	Batubara	200	80%	2027 - 2052	Tahap Pendanaan/ *Financing Stage*
27	PT PJB Investasi - PT PLN BB1)	Kalselteng-5	Batubara	200	80%	3)	Tahap Pendanaan/ *Financing Stage*
28	PT Putra Indotenaga - PT PLN BB1)	Kaltim-3	Batubara	200	80%	2026 - 2051	Tahap Pendanaan/ *Financing Stage*
29	PT Putra Indotenaga - PT PLN BB1)	Kaltim-5	Batubara	200	80%	2028 - 2053	Tahap Pendanaan/ *Financing Stage*
30	PT Putra Indotenaga - PT PLN BB1)	Kaltim-6	Batubara	200	80%	3)	Tahap Pendanaan/ *Financing Stage*
31	PT Tenaga Listrik Bengkulu	Bengkulu	Batubara	200	80%	2020 - 2045	Tahap Pembangunan/ *Construction Stage*
32	PT GCL Indo Tenaga	Kalbar-1	Batubara	200	80%	2020 - 2045	Tahap Pembangunan/ *Construction Stage*
33	PT SKS Listrik Kalimantan	Kalteng-1 / Kalselteng-1	Batubara	200	80%	2020 - 2045	Tahap Pembangunan/ *Construction Stage*
34	PT Graha Power Kaltim	Kaltim-2 (FTP2)	Batubara	200	80%	2021 - 2046	Tahap Pembangunan/ *Construction Stage*
35	PT Indonesia Energi Dinamika (INDOEKA)	Kaltim-4	Batubara	200	80%	2021 - 2046	Tahap Pembangunan/ *Construction Stage*
36	PT Sorik Marapi Geothermal Power	PLTP Sorik Marapi, Sumatera Utara/ *North Sumatera*	Panas Bumi/*Geothermal*	198		2019-2049	*COD Unit 1 tgl 1 October 2019 (42,3MW)* *Financing Process (197,7 MW)* *- 1 Unit telah COD 55 MW (1 Sept.2019)*
37	PT Pertamina Geothermal Energy	PLTP Lumut Balai, Sumatera Selatan/ *South Sumatera*	Panas Bumi/*Geothermal*	165		2017-2047	*- Procurement Unit 2 COD 2020 (55 MW)* *- COD Unit 3 & 4 = 2024 (2x55 MW)*
38	PT Bakrie Darmakarya Energi	PLTP Telaga Ngebel, Jawa Timur/ *East Java*	Panas Bumi/*Geothermal*	165		2024-2054	PPA
39	PT Supreme Energy Muaralaboh	PLTP Muaralaboh, Sumatera Barat/ *West Sumatera*	Panas Bumi/*Geothermal*	140		2019-2049	Eksplorasi/*Exploration*
40	PT Geo Dipa Energi	Dieng #2,3 Jawa Tengah/ *Central Java*	Panas Bumi/*Geothermal*	115		2019-2039	Tahap Pendanaan/ *Financing Stage*
41	PT Medco Cahaya Geothermal	PLTP Ijen, Jawa Timur/ *East Java*	Panas Bumi/*Geothermal*	110		2020-2050	Eksplorasi/*Exploration*
42	PT Sintesa Banten Geothermal	PLTP Rawa Dano, Banten/ *Banten*	Panas Bumi/*Geothermal*	110		2022-2052	PPA
43	PT Pertamina Geothermal Energy	PLTP Hululais	Panas Bumi/*Geothermal*	110	85	*30 Years after COD*	*Feasibility Study and Permit.*
44	PT Pertamina Geothermal Energy	PLTP Sungai Penuh	Panas Bumi/*Geothermal*	110	85	*30 Years after COD*	Eksplorasi/*Exploration*
45	PT Gorontalo Listrik Perdana	Sulbagut-1	Batubara	100	80%	2021 - 2046	Tahap Pembangunan/ *Construction Stage*
46	PT Minahasa Cahaya Lestari	Sulut-3	Batubara	100	80%	2021 - 2046	Tahap Pembangunan/ *Construction Stage*
47	PT Malea Energy	PLTA Malea	Tenaga Air/*Hydro*	90	60%	2020-2050	*Under construction* Eksplorasi/*Exploration*
48	PT Pertamina Geothermal Energy	PLTP Kotamobagu	Panas Bumi/*Geothermal*	80	90	30 *Years after COD*	
49	PT Spring Energy Sentosa	PLTP Guci, Jawa Tengah/ *Central Java*	Panas Bumi/*Geothermal*	55	90	2024-2054	PPA
50	PT Jabar Rekind Geothermal	PLTP Cisolok Cisukarame, Jawa Barat/ *West Java*	Panas Bumi/*Geothermal*	50	90	2025-2055	PPA
	Lainnya / *others*			713			
	Jumlah pindahan / *Balance carry forward*			**23,622**			

a) Perjanjian berlaku sejak ditandatangani, dan jual beli tenaga listrik berlaku antara 20 sampai dengan 30 tahun sejak tanggal operasi komersial.
b) AF= Faktor pemasokan tenaga yang harus diserap Perusahaan.
c) Meliputi kontrak dengan 152 IPP, terdiri dari 37 IPP dalam tahap pembangunan dan 43 IPP dalam tahap pembiayaan, dan 72 *Power Purchase Agreement* berlokasi di berbagai daerah di Indonesia, menggunakan bahan bakar batu bara, panas bumi dan *mini hydro* dengan kapasitas masing-masing pembangkit kurang dari 50 MW.

a) The agreements are effective from the date of signing and buying and selling of electricity is valid between 20 to 30 years starting from the commercial operation date.
b) AF= Power supply factor which should be absorbed by the Company.
c) Represents contracts with 152 IPPs, consisting of 37 IPPs under construction, 43 IPPs in the financing stage, and 72 Power Purchase Agreement which are located in several areas of Indonesia and are generated by coal, geothermal and mini hydro with each power plant's capacity of less than 50 MW.

Harga tenaga listrik per kWh untuk pembangkitan bahan bakar gas, MFO dan batubara ditetapkan berdasarkan formula tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian yang antara lain mengatur pemulihan biaya modal, pembayaran biaya tetap operasi dan pemeliharaan, biaya bahan bakar dan pembayaran biaya variabel operasi, dan biaya pemeliharaan. Untuk pembangkitan

The electricity power price per kWh for gas, MFO and coal power plants are determined by certain formulas as stated in the agreement which regulates, among other subjects, capital cost recovery, fixed operation and maintenance cost payment, fuel expense and variable operation and maintenance cost payment. For geothermal heat power plants, the electricity power

yang menggunakan panas bumi, harga tenaga listrik ditetapkan berdasarkan formula tertentu sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian antara lain *Energy Charge* dan *Capacity Charge*.

price is determined by a certain formula as stated in the agreement, involving, among other things, Energy Charge and Capacity Charge.

c. Perolehan barang modal

Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah ikatan perolehan barang modal berdasarkan kontrak, terutama sehubungan dengan pengadaan pembangkitan, jaringan transmisi dan distribusi adalah sebagai berikut:

c. Capital expenditures

As of December 31, 2019, total commitments on capital expenditures based on contracts, which are related to procurement of power plants, transmissions and distributions are as follows:

	Mata uang/ *Currencies*	Jumlah dalam mata uang asing/ *Amount in foreign currencies *)*	Setara/ *equivalent* Rp	
Program percepatan				*Fast track program*
Kontrak pembangkitan	US$	178,574,002	2,482,358	*Power plant contracts*
	EUR	14,777,789	230,365	
	NZD	542,100	5,074	
	JPY	12,242,937	1,567	
	Rupiah		7,763,115	
			10,482,479	
Kontrak transmisi	Rupiah		797,796	*Transmission contracts*
Kontrak konstruksi rutin	US$	55,339,743	769,278	*Regular construction contracts*
	EUR	9,267,399	144,466	
	JPY	10,594,580,916	1,355,752	
	Rupiah		115,001	
			2,384,497	

Jumlah diatas adalah diluar dari nilai tersisa pembayaran dimuka yang sudah dibayarkan oleh Perusahaan dan entitas anak sesuai dengan masing-masing kontrak, yang nantinya akan mengurangi pembayaran di masa depan yang dilakukan oleh Perusahaan dan entitas anak.

The above amount excludes the remaining advance payments that has been paid by the Company and its subsidiaries in accordance with the respective contracts, which then will reduce future payments to be made by the Company and its subsidiaries.

Program Percepatan

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2006 tanggal 5 Juli 2006 yang kemudian diubah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 tanggal 23 Desember 2009, Pemerintah menugaskan Perusahaan untuk membangun PLTU berbahan bakar batubara di 42 lokasi di Indonesia, meliputi 10 pembangkit dengan jumlah kapasitas 7.490 MW di Jawa - Bali dan 32 pembangkit dengan jumlah kapasitas 2.769 MW di luar Jawa - Bali.

Fast Track Program

Based on the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 71 Year 2006 dated July 5, 2006 which was amended by the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 59 dated December 23, 2009, the Government mandates the Company to build coal-fired PLTU at 42 locations in Indonesia, which include 10 power plants with aggregate capacity of 7,490 MW in Java - Bali and 32 power plants with aggregate capacity of 2,769 MW outside Java - Bali.

Kontrak Pembangkitan
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan telah menandatangani 37 kontrak EPC meliputi 10 pembangkit tenaga listrik dengan jumlah kapasitas 7.490 MW di Jawa - Bali dan 27 pembangkit tenaga listrik dengan jumlah kapasitas 2.489 MW di luar Jawa - Bali. Berdasarkan kontrak EPC tersebut, Perusahaan diharuskan membayar uang muka sekitar 15% dari nilai kontrak dan 85% akan didanai melalui fasilitas kredit perbankan.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan telah membayar uang muka sebesar US$876.217.780 dan Rp4.790.016 untuk 35 kontrak EPC yang dicatat sebagai pekerjaan dalam pelaksanaan (Catatan 6). Uang muka tersebut didanai dari hasil penerbitan Obligasi Terjamin dan penarikan fasilitas kredit program percepatan.

Kontrak Transmisi
Kontrak transmisi merupakan kontrak untuk peningkatan dan pembangunan transmisi baru dan gardu induk di Jawa dan luar Jawa. Proyek ini dibiayai melalui dana sendiri dan penarikan fasilitas kredit perbankan.

Kontrak Konstruksi Rutin
Ikatan pengadaan barang modal untuk konstruksi rutin merupakan kontrak yang telah ditandatangani untuk tambahan pembangkit listrik dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi. Proyek ini dibiayai melalui dana sendiri dan pihak luar melalui pinjaman luar negeri, bantuan dan proyek investasi sebagai bagian dari anggaran belanja negara.

Power Plant Contracts
Until December 31, 2019, the Company signed 37 EPC contracts which consist of 10 electricity power plants with aggregate capacity of 7,490 MW in Java - Bali and 27 electricity power plants with aggregate capacity of 2,489 MW outside Java - Bali. Under the terms of such contracts, the Company is required to pay the contractor a down payment, which is approximately 15% of the contract price and the remaining 85% will be funded through credit facilities from banks.

Until December 31, 2019, the Company made a total down payment of US$876,217,780 and Rp4,790,016 for 35 EPC contracts which is recorded as construction in progress (Note 6). Such down payments are funded by the proceeds of the issued Guaranteed Notes and withdrawal of credit facilities for the fast track program.

Transmission Contracts
Transmission contracts are contracts for upgrading and constructing new transmission and sub-stations in Java and outside Java. These projects are financed by the Company's own funds and withdrawal of credit facilities from banks.

Regular Construction Contracts
Capital expenditure commitments for regular construction represent project contracts signed for additional electricity generating plants and development of the transmission and distribution network. These projects are financed by the Company's own funds and other external funding through offshore loans, grants and investment projects from the State budget.

d. Fasilitas pinjaman belum digunakan

Penerusan pinjaman

d. Unused loan facilities

Two-step loans

Mata uang/ *Currencies*	Dalam mata uang asing/ *In foreign currencies *)*	Setara/ *Equivalent* Rp
US$	131,249,262	1,824,497
EUR	--	--
JPY	63,457,649,120	8,122,763
Jumlah/ *Total*		**9,947,260**

*) Dalam jumlah penuh/ *In full amounts*

Pada tanggal 31 Desember 2019, fasilitas pinjaman belum digunakan setara Rp6.602.820 dikenakan provisi sebesar 0,10% - 0,40% per tahun, sedangkan fasilitas sebesar Rp3.344.440 tidak dikenakan provisi. Fasilitas ini berakhir antara tahun 2020 sampai dengan 2055.

As of December 31, 2019 the unused facilities equivalent to Rp6,602,820 bear a provision charge of 0.10% - 0.40% per annum, while the remaining facilities of Rp3,344,440 do not bear any provision charge. These facilities will be due between 2020 and 2055.

Perjanjian pinjaman tidak terkait program percepatan
Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, rincian fasilitas pinjaman tidak terkait program percepatan adalah sebagai berikut:

Loan agreements for non fast track program
As of the date of the issuance of the consolidated financial statements, details of loan facilities non-related to the fast track program are as follows:

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek/ *Creditor and project funded*	Fasilitas maksimum/ *Maximum facility *)*	Fasilitas pinjaman belum digunakan/ *Unused loan facilities *)*	Premi Asuransi/ *Insurance premium *)*	Tanggal perjanjian/ *Date of agreement*	Periode/ *Period* **) Tahun/ *Year*
	Fasilitas pinjaman dalam US$/ *US$ loan facilities*					
1	Asian Development Bank Gardu induk/ *Grid*	575	19	--	4 Desember 2015/ *December 4, 2015*	20
2	Asian Development Bank Gardu induk/ *Grid*	25	1	--	4 Desember 2015/ *December 4, 2015*	20
3	Japan Bank for International Cooperation PLTU Lontar Extension Facility Tr.A	108	30	--	14 Maret 2016/ *March 14, 2016*	16
4	Japan Bank for International Cooperation PLTU Lontar Extension Facility Tr.B	72	20	4.8	14 Maret 2016/ *March 14, 2016*	16
5	International Bank for Reconstruction and Development/	500	38	--	20 Mei 2016/ *May 20, 2016*	20
11	Islamic Development Bank Power Grid Enhacement Project	330	225	--	10 Januari 2017/ *January 10, 2017*	15
12	Japan Bank for International Cooperation Muara Karang	22	11	--	10 Maret 2017/ *March 10, 2017*	15
13	Japan Bank for International Cooperation Muara Karang	15	7	--	10 Maret 2017/ *March 10, 2017*	15
14	Sumitomo Mitsui Banking Corporation PLTA Jatigede	73	33	--	30 Maret 2017/ *March 30, 2017*	14
15	Japan Bank for International Cooperation PLTU Kalselteng 2 Facility Tr. A	53	38	--	20 Juni 2017/ *June 20, 2017*	15
16	Japan Bank for International Cooperation PLTU Kalselteng 2 Facility Tr. B	36	26	--	20 Juni 2017/ *June 20, 2017*	15
17	Asian Development Bank Gardu Induk/ Grid	600	165	--	10 Oktober 2017/ *October 10, 2017*	20
18	Credit Agricole CIB Paris PLTGU Muara Tawar	280	160	6.165	8 November 2017/ *November 8, 2017*	15
19	HSBC PLTGU Tambak Lorok III	214	214	6.42	8 November 2017/ *November 8, 2017*	15
20	PT Bank DBS Indonesia Term loan facilities - DBS 2019 - Onshore	275	78	--	25 Juni 2019/ *June 25, 2019*	5
	Term loan facilities - DBS 2019 - Offnshore	725	222	--	25 Juni 2019/ *June 25, 2019*	5
21	PT Bank DBS Indonesia Revolving Credit Facilities - DBS 2018 - Onshore	25	25	--	28 Desember 2019/ *December 28, 2019*	4
	Revolving Credit Facilities - DBS 2018 - Offshore	125	125	--	28 Desember 2019/ *December 28, 2019*	4
	Jumlah dalam US$/ *Total in US$*	**4,053**	**1,437**	**17.4**		

*) Dalam jutaan/ *In million*
**) Termasuk masa tenggang/ *Include grace period*

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek/ *Creditor and project funded*	Fasilitas maksimum/ *Maximum facility *)*	Fasilitas pinjaman belum digunakan/ *Unused loan facilities *)*	Premi Asuransi/ *Insurance premium *)*	Tanggal perjanjian/ *Date of agreement*	Periode/ *Period* **) Tahun/ *Year*
	Fasilitas pinjaman dalam EUR/ *EUR loan facilities*					
1	Agence Francaise De Development Trans GIS	100	72	--	7 Mei 2015/ *May 7, 2015*	15
2	Agence Francaise De Development Trans Grid	1	--	--	7 Mei 2015/ *May 7, 2015*	5
3	Kreditanstalt fur Wiederaufbau Suralaya rehabilitation	175	175	--	8 Mei 2015/ *May 8, 2015*	12
4	Kreditanstalt fur Wiederaufbau Kamojang rehabilitation	65	65	--	8 Mei 2015/ *May 8, 2015*	15
5	Kreditanstalt fur Wiederaufbau Kamojang rehabilitation	60	59	--	8 Mei 2015/ *May 8, 2015*	15
6	Kreditanstalt fur Wiederaufbau Transmisi/ *Transmission*	45	45	--	23 Mei 2016/ *May 23, 2016*	13
7	ING Bank, a Branch of ING-DiBa dan/ *and Societe Generale* PLTGU Grati	40	4	3.0	24 Juni 2016/ *June 24, 2016*	14.5
8	Mizuho Lombok Peaker	74	12	--	24 Mei 2017/ *May 24, 2017*	12
9	Kreditanstalt fur Wiederaufbau Bangkanai Peaker	83	36	5.6	15 September 2017/ *September 15, 2017*	11.25
10	Kreditanstalt Fur Wiederaufbau Power Plant Kumbih	85	85	--	15 Desember 2017/ *December 15, 2017*	15
11	BNP Paribas SA Sumbagut 2 Peaker - CESCE Covered Facility	41	27	6.5	9 Februari 2018/ *February 9, 2018*	12
12	BNP Paribas SA Sumbagut 2 Peaker - SACE Covered Facility	66	44	6.5	9 Februari 2018/ *February 9, 2018*	12
13	BGK PLTU Lombok FTP-2	81	79	6.8	21 Februari 2018/ *February 21, 2018*	15
14	Kreditanstalt fur Wiederaufbau Geothermal Energy Program	150	150	--	11 Oktober 2018/ *October 11, 2018*	15
15	Kreditanstalt fur Wiederaufbau Bakaru I + II Hydro Power Project	225	225	--	5 September 2019/ *September 5, 2019*	14
16	Kreditanstalt fur Wiederaufbau 1000 Islands Renewable Energy for electrification Program	70	70	--	5 September 2019/ *September 5, 2019*	14
	Jumlah dalam EUR/ *Total in EUR*	**1,361**	**1,148**	**28**		
	Fasilitas pinjaman dalam JPY/ *JPY loan facilities*					
1	Japan Bank for International Cooperation PLTU Lontar	16,430	3,524	441	14 Maret 2016/ *March 14, 2016*	15.5
2	Sumitomo Mitsui Banking Corporation Muara Karang	15,449	9,855	252	10 Maret 2017/ *March 10, 2017*	15
3	Japan Bank for International Cooperation PLTU Kalselteng 2	16,939	12,401	367	20 Juni 2017/ *June 20, 2017*	15
	Jumlah dalam JPY/ *Total in JPY*	**48,818**	**25,780**	**1,476**		

*) Dalam jutaan/ *In million*
**) Termasuk masa tenggang/ *Include grace period*

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

No.	Kreditur/ *Agent*	Fasilitas maksimum/ *Maximum facility *)*	Fasilitas pinjaman belum digunakan/ *Unused loan facilities *)*	Tanggal perjanjian/ *Date of agreement*	Periode/ *Period* **) Tahun/ *Year*
	Fasilitas pinjaman dalam Rupiah/ *Rupiah loan facilities*				
1	PT Bank Rakyat Indonesia	4,506,787	3,188,708	14 November 2018/ *November 14, 2018*	10
2	PT Bank Negara Indonesia	5,071,000	5,071,000	18 Desember 2019/ *December 18, 2019*	3
3	PT Bank Mandiri Syariah	2,846,000	2,846,000	18 Desember 2019/ *December 18, 2019*	3
4	PT Bank Rakyat Indonesia *Revolving credit facilities*	28,000,000	28,000,000	21 Juni 2019/ *June 21, 2019*	1
5	PT Bank DKI *Revolving credit facilities*	1,000,000	1,000,000	8 Juni 2019/ *June 8, 2019*	1
6	PT Bank HSBC Indonesia *Revolving credit facilities*	1,400,000	1,400,000	26 Juni 2019/ *June 26, 2019*	1
7	Citibank *Revolving credit facilities*	500,000	500,000	20 Maret 2019 *March 20, 2019*	1
8	PT BCA Tbk *Revolving credit facilities*	1,500,000	1,500,000	6 September 2019/ *September 6, 2019*	1
9	PT Bank QNB Indonesia Tbk *Revolving credit facilities*	300,000	300,000	8 November 2019/ *November 8, 2019*	1
10	PT Bank Danamon Indonesia Tbk *Revolving credit facilities*	1,000,000	1,000,000	12 Desember 2019/ *December 12, 2019*	1
	Jumlah dalam Rupiah/ *Total in Rupiah*	**46,123,787**	**44,805,708**		

*) Dalam jutaan/ *In million*
**) Termasuk masa tenggang/ *Include grace period*

	2019	2018	
Tingkat suku bunga per tahun			***Interest rate per annum***
Rupiah	7.80385%	--	*Rupiah*
US$	2.41255% - 4.41%	2.995% - 4.41%	*US$*
JPY	1.58% - 1.74%	1.58% - 1.74%	*JPY*
EUR	0.97% - 2.20%	0.84% - 2.20%	*EUR*

e. Program operasi dan pemeliharaan
Untuk meningkatkan dan memulihkan daya guna unit pembangkit sampai pada tingkat tertentu, Perusahaan menandatangani *Operation and Maintenance Agreement* dengan beberapa kontraktor. Nilai kontrak terdiri dari porsi tetap dan tidak tetap. Kontraktor diharuskan memenuhi target tertentu dan akan dikenakan denda jika target tersebut tidak tercapai. Komitmen dengan kontraktor untuk porsi tetap adalah sebagai berikut:

e. Operation and maintenance programs
In order to improve and restore the performance of generator units up to a certain level, the Company has entered into Operation and Maintenance Agreements with contractors. The contract payment comprises fixed and variable portions. The contractors have to meet certain targets and will be charged a penalty if these targets are not met. The commitments with the contractors for the fixed portion are as follows:

Pembangkitan/ *Power plant*	Kontraktor/ *Contractors*	Nilai kontrak setara/ *Contract amount equivalent* Rp	Periode/ *Period*
PLTU Tanjung Jati B	PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	1,942,479	2010-2032
PLTU Tanjung Jati B	Konsorsium/ *consortium of* Fortum Service OY & PT Medco Energy	398,255	2005-2030
Jumlah/ *Total*		**2,340,734**	

f. Litigasi

(i) Pada tahun 2001, Perusahaan menghadapi gugatan perdata perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Pangemanan Nelwan dan kawan-kawan sebagai ahli waris dari Hendrik Meinder Nelwan terhadap tanah yang telah dipergunakan Perusahaan sebagai PLTA Tonsealama dengan tuntutan ganti rugi sebesar Rp54.000 di Pengadilan Negeri Manado. Dalam proses berperkara, mulai dari Tingkat Pertama sampai dengan Tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, Perusahaan kalah.

Pada saat akan dilakukan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Manado, Perusahaan melakukan Gugatan Perlawanan Ketiga atas Eksekusi (*Derden Verzet*) tanah tersebut mengingat Perusahaan merupakan *bezitter* yang baik dengan menguasai tanah serta mengoperasikan PLTA Tonsealama selama lebih dari 50 tahun, namun Gugatan Perlawanan tersebut ditolak.

Perusahaan melaporkan perbuatan tindak pidana pemalsuan dokumen terhadap Hendrik Meinder Nelwan (Penggugat) atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Tahun 2018 perkara pidana tersebut telah diputus pada tingkat Kasasi dengan amar putusan Hendrik Meinder Nelwan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menggunakan dokumen palsu dalam perkara perdata PLTA Tonsealama.

Pada bulan Agustus 2018, berdasarkan novum tahun 2018 putusan pidana pemalsuan dokumen perkara PLTA Tonsealama, Perusahaan telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap Perkara Perdata Pangemanan Nelwan dan kawan-kawan di Mahkamah Agung. Pada tanggal 26 Agustus 2019 Mahkamah Agung

f. Litigation

(i) In 2001, Pangemanan Nelwan and co-claimants as heirs of Hendrik Meinder Nelwan filed claims for compensation over the land rights that has been utilized by the Company as hydroelectric power plant PLTA Tonsealama, which demanded compensation amounting to Rp54,000 in the District Court of Manado. In the process of court trial from District Court to Review in the Supreme Court, the Company lost.

In the preparation of Execution by District Court of Manado, the Company filed a Third Resistance of the Execution (Derden Verzet) regarding the land rights considering the Company is a good bezitter that has been effectively controlling and operating PLTA Tonsealama for more than 50 years, but the Resistance of the Execution was later denied.

The Company has filed claims for criminal action regarding document forgery in the name of Hendrik Meinder Nelwan (the Plaintiff) that were used as evidence materials against the Company for civil action. On 2018, The Supreme Court of the Republic of Indonesia has ruled that Hendrik Meinder Nelwan is proven and reassured of doing a criminal action by using false documents in the civil case of PLTA Tonsealama.

On August 2018, based on the 2018 novum of the criminal verdict regarding document forgery of PLTA Tonsealama, the Company has filed for a Civil Case Review against Pangemanan Nelwan and co-claimants in the Supreme Court. On August 26, 2019, the Supreme Court grant the request for Civil Case Review 2 submitted by the Company

mengabulkan permohonan upaya hukum Peninjauan Kembali 2 yang diajukan Perusahaan dan membatalkan putusan dari tingkat pengadilan negeri sampai Peninjauan kembali 1 di Mahkamah Agung.

and cancel all previous verdict from District Court to Review 1 in the Supreme Court.

(ii) Pada tanggal 20 September 2017 Perusahaan menghadapi gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PT Putera Daya Perkasa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait aset Perusahaan berupa Gardu Induk 150 kV yang terletak di Kawasan Industri Pasar Kemis. Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp81.298. Pada tanggal 4 April 2019 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan perkara ini dengan amar putusan menolak ganti kerugian dan sewa yang dituntut oleh Penggugat. Penggugat mengajukan banding atas putusan tersebut ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Penggugat mengajukan banding atas putusan tersebut ke Pengadilan Tinggi Jakarta dan perkara ini telah diputus pada tanggal 9 Januari 2020 dengan amar putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penggugat mengajukan kasasi atas putusan banding tersebut ke Mahkamah Agung. Sampai dengan tanggal laporan ini diterbitkan, perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung.

(ii) On September 20, 2017, the Company faced a lawsuit filed by PT Putera Daya Perkasa in District Court of South Jakarta regarding the Company assets in the form of Substations 150 kV which is located in the Industrial Estate of Pasar Kemis. The Plaintiff demanded compensation amounting to Rp81,298. On April 4, 2019 the District Court of South Jakarta has decided with a verdict to deny the lawsuit. The plaintiff has filed for an appeal in the High Court of Jakarta. The Plaintiff has filed an appeal to the High Court of Jakarta and it was decided on January 9, 2020 with a verdict in which strengthen the previous verdict of the District Court of South Jakarta. The Plaintif has filed a cassasion in the Supreme Court regarding the verdict. As of the date of the issuance of this report the case is currently still on process in the Supreme Court.

(iii) Pada tanggal 17 November 2017 Perusahaan mengajukan permohonan arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”) Jakarta terhadap Konsorsium PT Mega Eltra, PT Sakti Mas Mulia, dan Zibo Sangte Power Equipment Co. Ltd terkait pengembalian uang muka yang telah dibayarkan kepada konsorsium akibat wanprestasi pembangunan proyek PLTU Bau-Bau 2x10 MW dengan tuntutan ganti rugi sebesar Rp51.970. Perkara sudah diputus tanggal 26 Oktober 2018 dengan amar putusan menghukum konsorsium untuk membayar kepada perusahaan sebesar US$390.711,79 dan Rp15.747. Pada tanggal 11 Desember 2018,

(iii) On November 17, 2017, the Company filed an arbitration request to the Indonesian National Arbitration Board (“BANI”) Jakarta against Consortium PT Mega Eltra, PT Sakti Mas Mulia and Zibo Sangte Power Equipment Co. Ltd regarding the refund of the down payment that has been paid to the consortium due to the defaults on the construction of the PLTU Bau-Bau 2x10 MW which demanded compensation amounting to Rp51,970. The case was decided on October 26, 2018, with a verdict that the consortium has to pay to Company US$390,711.79 and Rp15,747. On December 11, 2018, Consortium Mega Eltra filed for the annulling of the BANI verdict in the

Konsorsium Mega Eltra mengajukan pembatalan putusan BANI Jakarta ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan tetapi ditolak pengadilan negeri Jakarta Selatan. Pada tanggal 26 Februari 2019 Konsorsium PT Mas Sakti Mulia mengajukan banding ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada tanggal 10 September 2019 banding tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung sehingga terhadap putusan tesebut telah memiliki kekuatan hukum tetap *(inkracht)*.

District Court of South Jakarta and the request has been rejected. On February 26, 2019, PT Mas Sakti Mulia filed for an appeal in the Supreme Court regarding the verdict. On September, 10, 2019 the request has been rejected therefore the verdict is final Judgment, binding and executable (inkracht).

(iv) Pada tanggal 29 Maret 2018 Perusahaan menghadapi gugatan perdata perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Ronny Rotinsulu Tumengkol di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait tanah PLTA Tonsealama. Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp119.796. pada tanggal 24 Juni 2019 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan perkara ini dengan amar putusan menolak ganti kerugian yang dituntut oleh Penggugat. Pada tanggal 3 Juli 2019, Penggugat telah mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Jakarta. Sampai dengan tanggal laporan ini diterbitkan, perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Jakarta.

(iv) On March 29, 2018, the Company faces a lawsuit filed by Ronny Rotinsulu Tumengkol in the District Court of South Jakarta regarding the land compensation of PLTA Tonsealama. The plaintiff demanded compensation amounting to Rp119,796. On June 24, 2019 the District Court of South Jakarta has decided with a verdict to deny the lawsuit. The Plaintiff has filed for an appeal, on July 03, 2019, the Plaintiff has filed for an appeal in the High Court of Jakarta. As of the date of the issuance of this report the case is currently still on process in the High Court of Jakarta.

(v) Pada tanggal 8 Mei 2018 Perusahaan menghadapi gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Ahli Waris Tjotjong bin Runah (Halimah binti Sairih dan kawan-kawan) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait aset Perusahaan berupa tanah seluas 4.096 Ha yang terletak di Kawasan PLTGU Muara Tawar Blok 5 Tahap 2. Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp54.196. Pada tanggal 12 Maret 2020 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan Penggugat. Penggugat tidak mengajukan upaya hukum sehingga putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap *(inkracht)*.

(v) On May 8, 2018, the Company faces a lawsuit filed by the heir of Tjotjong bin Runah (Halimah binti Sairih and co-claimants) in the District Court of South Jakarta regarding the Company's asset with land of 4,096 Ha located in PLTGU Muara Tawar Block 5 Phase 2. The plaintiff demanded compensation amounting to Rp54,196. On March 12, 2020 the District Court of South Jakarta has decided with a verdict to deny the lawsuit. the plaintiff did not appeal therefore the verdict is final Judgment, binding and executable (inkracht).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

(vi) Pada tanggal 29 Agustus 2018, Perusahaan menghadapi Permohonan Arbitrase yang diajukan oleh PT Kalimantan Jawa Gas sebagai Pemohon melawan PC Muriah Ltd (PCML) dan Perusahaan di *International Court of Commerce* (ICC) terkait kekurangan pembayaran atas biaya Gas Transport ke PLTGU Tambak Lorok. Pemohon menuntut pengembalian sejumlah uang yang dipotong oleh Perusahaan dari tagihan Pemohon sejak April 2018 dan secara alternative bertanggung jawab atas *Ship or Pay* 2016 senilai US$8.853.849,22 ditambah biaya-biaya (*pre-award* dan *post-award*) dan *Ship or Pay* 2017 senilai US$20.602.614,78 ditambah biaya-biaya (*pre-award* dan *post-award*). Sampai dengan tanggal laporan ini diterbitkan, perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di ICC.

(vi) On August 29, 2018, the Company faced an Arbitration Request filed by PT Kalimantan Jawa Gas as the Applicant against PC Muriah Ltd (PCML) and the Company in the International Court of Commerce (ICC) regarding the shortage of payments for Transport Gas to PLTGU Tambak Lorok. The applicant demands a refund of the amount deducted by the Company from the Applicant's bill since April 2018 and find that PCML or the Company alternatively, is liable for 2016 Ship or Pay amounting to US$8,853,849.22 plus pre-award and post-award and for 2017 Ship or Pay amounting to US$20,602,614.78 plus pre-award and post-award. As of the date of the issuance of this report, the case is currently still on process in ICC.

(vii) Pada 27 Mei 2019, Perusahaan menghadapi gugatan dari Konsorsium Hubei Hongyuan Power Engineering, Co.Ltd dan PT Bagus Karya terkait pembayaran biaya pekerjaan pembangunan PLTU Sulawesi Selatan di BANI Jakarta. Pemohon menuntut Perusahaan membayar biaya Pekerjaan *Load Rejection* (FCB) dan *Denitrolic System* sementara Perusahaan menyatakan secara kontraktual tidak termasuk scope pekerjaan. Selain itu Pemohon juga menuntut klaim kerugian akibat menanggung bunga bank komersil sehingga total tuntutan sebesar Rp123.438. Pada tanggal 24 Januari 2020, perkara ini telah dicabut oleh BANI dari daftar perkara BANI Jakarta melalui surat No.20.206/I/BANI/WD-ed.

(vii) On May 27, 2019 the Company faced an arbitration Request filed by Consortium of Hubei Hongyuan Power Engineering, Co.Ltd and PT Bagus Karya regarding the Contract Payment of Coal Fired Steam Power Plant Project PLTU Sulawesi Selatan in BANI Jakarta. The Plaintiff demanded Company to pay the works of Load Rejection (FCB) and Denitrolic System, that contractually not included in the scope of works. The Plaintiff also demanded the compensation of bank loan interest, so that total demands amounting to Rp123,438. On January 24, 2020, this case has been revoked by BANI from caseregister BANI Jakarta by letter No. 20.206/I/BANI/WD-ed.

(viii) Pada 22 Agustus 2019, Perusahaan menghadapi gugatan dari PT Boskalis Internasional Indonesia di BANI Jakarta terkait Klaim pekerjaan pembangunan kabel bawah laut Jawa Bali Sirkuit #3 dan #4 akibat perbedaan spesifikasi dalam izin prinsip pekerjaan dengan spesifikasi dalam kontrak, hal tersebut

(viii) On August 22, 2019, the Company faced an arbitration Request filed PT Boskalis Internasional Indonesia in the BANI Jakarta regarding Claim installation Java Bali Submarine Cable Circuit #3 and #4 due to differentiation between specification in Principal Permit and specification in contract, it

disebabkan adanya perubahan regulasi tentang kedalaman pemendaman kabel bawah laut setelah para pihak menandatangani kontrak. Pada gugatan tersebut Pemohon menuntut dalam 5 klaim dengan total tuntutan sebesar EUR8.516.490. Pada tanggal 13 Maret 2020, perkara ini telah diputus oleh BANI Jakarta dengan pertimbangan bahwa Perusahaan dan PT Boskalis harus menanggung biaya secara bersama karena tidak dapat mengantisipasi dengan baik permasalahan. Namun, Perusahaan berhasil mengurangi klaim sebesar EUR5.666.246 sehingga Perusahaan hanya membayar ganti rugi kepada PT Boskalis sebesar EUR 2.850.244 dan menolak permohonan PT Boskalis untuk selebihnya.

is caused by change of law about submarine cable burial depth after the parties signing the contract. In this Arbitration request, the Plantiff demanded 5 claims amounting to EUR8,516,490. On March 13, 2020, the case was decided by BANI Jakarta with consideration that Company and Plaintiff must bear the cost together because of failure to anticipate the problems properly. However, the Company has managed to reduced the claims to EUR5,666,246 therefore the Company only paid compensation to Plaintiff amounting to EUR2,850,244 and reject the rest of the request.

(ix) Perusahaan dan entitas anak perusahaan juga menghadapi gugatan ganti rugi dalam jumlah yang tidak material di beberapa lokasi bangunan jaringan transmisi/ distribusi, perselisihan dengan karyawan, perkara dengan pelanggan dan pemasok. Manajemen berpendapat klaim-klaim tersebut tidak material dan tidak mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan.

(ix) The Company and its subsidiaries also face claims for compensation of losses, which are immaterial in amount, in several areas of the Company's transmission/ distribution facilities, disputes with the Company's employees and cases with customers and suppliers. Management believes that such claims are not material and will not significantly affect the Company's operations.

Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, hasil litigasi-litigasi di atas belum dapat dipastikan dan estimasi andal tidak dapat ditentukan pada saat ini, atau Perusahaan memiliki dasar yang kuat dalam kasus ini karena keputusan pengadilan terakhir menguntungkan Perusahaan dan entitas anak, sehingga tidak ada provisi kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan konsolidasian ini.

As of the completion date of these consolidated financial statements, the results of the above litigations are either still uncertain and there are no reliable estimate that can be made at this point, or the Company has strong grounds supporting the case as the recent court decisions were in favor of the Company and subsidiaries, therefore no provision has been recorded in these consolidated financial statements.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

56. Instrumen Keuangan, Manajemen Risiko Keuangan dan Risiko Modal / *56. Financial Instruments, Financial Risk and Capital Risk Management*

a. Kategori dan klasifikasi instrumen keuangan / *a. Categories and classes of financial instruments*

Tabel berikut ini mengungkapkan rincian instrumen keuangan Perusahaan dan entitas anak berdasarkan klasifikasi aset keuangan:

The following table discloses the details of the Company and its subsidiaries' financial asset classifications:

	2019			
	Klasifikasi instrumen keuangan/ *Financial instrument classification*			
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ *Loans and receivables* Rp	Tersedia untuk dijual/ *Available-for-sale* Rp	Jumlah aset dan liabilitas keuangan/ *Total of financial assets and liabilities* Rp	
Aset keuangan				***Finacial assets***
Aset tidak lancar				***Non-current assets***
Piutang pihak berelasi	951,643	--	951,643	*Receivables from related parties*
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	5,980,703	--	5,980,703	*Restricted cash in banks and time deposits*
Piutang lain-lain	824,545	--	824,545	*Other receivables*
Aset tidak lancar lain	--	7,368	7,368	*Other non-current assets*
Jumlah aset tidak lancar	7,756,891	7,368	7,764,259	*Total non-current assets*
Aset lancar				***Current assets***
Kas dan setara kas	46,598,783	--	46,598,783	*Cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	334,153	--	334,153	*Short-term investments*
Piutang usaha	25,130,538	--	25,130,538	*Trade receivables*
Piutang lain-lain	46,973,724	--	46,973,724	*Other receivables*
Piutang pihak berelasi	4,719	--	4,719	*Receivables from related parties*
Aset lancar lain	72,241	--	72,241	*Other current assets*
Jumlah aset lancar	119,114,158	--	119,114,158	*Total current assets*
Jumlah aset keuangan	**126,871,049**	**7,368**	**126,878,417**	***Total financial assets***

	2018			
	Klasifikasi instrumen keuangan/ *Financial instrument classification*			
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ *Loans and receivables* Rp	Tersedia untuk dijual/ *Available-for-sale* Rp	Jumlah aset dan liabilitas keuangan/ *Total of financial assets and liabilities* Rp	
Aset keuangan				***Finacial assets***
Aset tidak lancar				***Non-current assets***
Piutang pihak berelasi	1,031,237	--	1,031,237	*Receivables from related parties*
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	5,688,712	--	5,688,712	*Restricted cash in banks and time deposits*
Piutang lain-lain	961,377	--	961,377	*Other receivables*
Aset tidak lancar lain	--	4,751	4,751	*Other non-current assets*
Jumlah aset tidak lancar	7,681,326	4,751	7,686,077	*Total non-current assets*
Aset lancar				***Current assets***
Kas dan setara kas	33,294,560	--	33,294,560	*Cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	1,216,886	--	1,216,886	*Short-term investments*
Piutang usaha	23,802,663	--	23,802,663	*Trade receivables*
Piutang kompensasi	23,173,464	--	23,173,464	*Compensation receivables*
Piutang lain-lain	9,507,768	--	9,507,768	*Other receivables*
Piutang pihak berelasi	5,954	--	5,954	*Receivables from related parties*
Aset lancar lain	5,697	--	5,697	*Other current asset*
Jumlah aset lancar	91,006,992	--	91,006,992	*Total current assets*
Jumlah aset keuangan	**98,688,318**	**4,751**	**98,693,069**	***Total financial assets***

Seluruh liabilitas keuangan milik Perusahaan dan entitas anak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan rincian sebagai berikut:

All of the Company and its subsidiaries' financial liabilities are classified as financial liabilities measure at amortized cost, details are as follows:

	2019 Rp	2018 Rp	
Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan amortisasi			***Amortised cost measured at financial liabilities***
Liabilitas jangka panjang			***Non-current liabilities***
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun			*Long-term liabilities - net of current maturities*
Penerusan pinjaman	35,251,741	36,105,279	*Two-step loans*
Utang kepada Pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah Non-bank	4,359,569	5,343,629	*Government and non-bank Government Financial Institution loan*
Utang sewa pembiayaan	11,569,377	14,468,336	*Lease liabilities*
Utang bank	184,023,820	152,965,997	*Bank loan*
Utang obligasi dan sukuk ijarah	174,292,298	131,681,821	*Bonds payable and sukuk ijara*
Utang listrik swasta	6,431,448	7,115,916	*Electricity purchase payable*
Utang KIK - EBA	1,354,642	2,221,167	*KIK - EBA loans*
Utang pihak berelasi	92	1,000	*Payable to related parties*
Utang lain-lain	133,662	94,427	*Other payables*
Jumlah liabilitas jangka panjang	417,416,649	349,997,572	*Total non-current liabilities*
Liabilitas jangka pendek			***Current liabilities***
Utang usaha	52,002,783	48,607,674	*Trade payables*
Uang jaminan langganan	14,235,879	13,465,735	*Customers' security deposits*
Utang biaya proyek	150,664	315,828	*Project cost payable*
Biaya yang masih harus dibayar	16,754,640	14,809,018	*Accrued expenses*
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun			*Current maturities of long-term liabilities*
Penerusan pinjaman	2,725,805	2,530,273	*Two-step loans*
Utang kepada Pemerintah Lembaga Keuangan Pemerintah Non-bank	1,998,476	1,860,649	*Government and non-bank Government Financial Institution loan*
Utang sewa pembiayaan	2,540,107	2,624,629	*Lease liabilities*
Utang bank	21,693,338	28,145,737	*Bank loan*
Utang obligasi dan sukuk ijarah	6,946,478	2,120,612	*Bonds payable and sukuk ijara*
Utang listrik swasta	399,458	394,403	*Electricity purchase payable*
Utang KIK - EBA	586,620	686,819	*KIK - EBA loans*
Utang lain-lain	30,395,533	32,871,070	*Other payables*
Jumlah liabilitas jangka pendek	150,429,781	148,432,447	*Total financial liabilities*
Jumlah liabilitas keuangan	**567,846,430**	**498,430,019**	***Total financial liabilities***

b. Manajemen risiko modal

Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha dan untuk memastikan pemenuhan batasan rasio kecukupan modal. Struktur modal Perusahaan dan entitas anak terdiri dari pinjaman (Catatan 24, 25, 26, 27, 28 dan 29) dan ekuitas pemegang saham induk, yang terdiri dari modal yang ditempatkan, saldo laba (Catatan 21), dan tambahan modal disetor (Catatan 22).

b. Capital risk management

The Company and its subsidiaries manage capital risk to ensure that they will be able to continue as a going concern and to ensure compliance with the covenants of the capital adequacy ratio. The Company and its subsidiaries' capital structure consists of debt (Notes 24, 25, 26, 27, 28 and 29) and equity shareholders of the holding that consists of capital stock, retained earnings (Note 21) and additional paid-in capital (Note 22).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Dewan Direksi Perusahaan dan entitas anak secara berkala melakukan tinjauan struktur permodalan Perusahaan dan entitas anak. Sebagai bagian dari tinjauan ini, Dewan Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

The Board of Directors of the Company and its subsidiaries periodically review the Company and its subsidiaries' capital structure. As part of this review, the Board of Directors considers the cost of capital and related risks.

Batasan pinjaman Perusahaan mensyaratkan antara lain pemenuhan rasio pinjaman terhadap ekuitas dan rasio kecukupan modal. Manajemen secara berkala memonitor persyaratan tersebut untuk memastikan tidak terdapat pelanggaran dalam batasan pinjaman Perusahaan.

The Company's loan covenants require among other things, the fullfilment of a certain debt to equity ratio and capital adequacy ratio. Management regularly monitors such requirements to ensure that there are no defaults on the loans of the Company.

Perusahaan dan entitas anak berusaha untuk meminimalkan biaya pinjaman sehingga dapat memaksimalkan nilai Perusahaan dan entitas anak. Oleh karena itu, kebijakan Perusahaan dan entitas anak dalam mencari pendanaan melalui utang selalu memperhitungkan risiko keuangan yang mungkin timbul di masa depan.

The Company and its subsidiaries aim to minimize the cost of debt in order to maximize their value. Therefore, in their financing policies, the Company and its subsidiaries always take into account the financial risk that may arise in the future.

c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan dan entitas anak adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Perusahaan dan entitas anak beroperasi dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh Dewan Direksi.

Dalam pengelolaan risiko, Perusahaan membentuk Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan ("DIVMRK") yang bertanggung jawab terhadap penyusunan kebijakan, kerangka kerja, pedoman penerapan manajemen risiko dan infrastruktur pengelolaan risiko, serta memastikan implementasi manajemen risiko tersebut di lingkungan Perusahaan. Divisi ini juga bertugas untuk memfasilitasi penyusunan profil risiko yang bersifat strategis sebagai himbauan awal kepada manajemen Perusahaan dan entitas anak. DIVMRK bertanggung jawab kepada Direktur Perencanaan Korporat ("DIRREN").

c. Financial risk management objectives and policies

The objectives and policies of the Company and its subsidiaries' financial risk management are to ensure that adequate financial resources are available for the operation and development of their business, while managing their exposure to market risks (including foreign currency risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. The Company and its subsidiaries operate within defined policies approved by the Board of Directors.

In managing those risks, the Company established a Risk Management and Compliance Division ("DIVMRK") which is responsible for the preparation of the policies, the relevant frameworks, implementation guideline and the necessary risk management infrastructure to ensure the implementation of risk management in the Company's environment. The division is also established to facilitate a strategic risk profile as an early warning to the Company and its subsidiaries' management. DIVMRK is responsible to the Corporate Planning Director ("DIRREN").

Perusahaan telah menetapkan taksonomi risiko dengan membagi risiko menjadi lima kelompok yaitu risiko strategis, risiko keuangan, risiko operasional, risiko proyek, dan risiko kepatuhan. Risiko keuangan diantaranya adalah risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Dalam mengelola risiko, Perusahaan mempertimbangkan skala prioritas yang didasarkan pada tingkat risikonya. Tingkat risiko ditentukan berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya dan skala dampak yang ditimbulkan.

The Company has established risk taxonomy by dividing risk into five categories, such as strategic risk, financial risk, operational risk, project risk and compliance risk. Financial risk includes market risk (including foreign currency risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. In managing those risks, the Company considers prioritization based on risk level. Risk level is determined by the level of possibility and scale of potential impact.

Terkait dengan risiko keuangan, Perusahaan telah menetapkan kebijakan manajemen untuk melakukan transaksi lindung nilai. Sebagai salah satu BUMN, kebijakan manajemen yang telah disetujui menjadi sangat penting agar tidak timbul masalah pada waktu pelaksanaan akuntansi lindung nilai tersebut. Seluruh instrumen derivatif dicatat dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan nilai wajarnya. Nilai wajar tersebut ditentukan berdasarkan harga pasar dengan menggunakan kurs Bloomberg pada tanggal laporan. Aset dan liabilitas derivatif disajikan sebesar keuntungan maupun kerugian yang belum direalisasi dari kontrak derivatif. Kontrak derivatif Perusahaan dan entitas anak diklasifikasikan sebagai Aset Keuangan yang diukur pada FVTPL. Transaksi ini semata-mata dimaksudkan untuk memitigasi risiko nilai tukar, tidak untuk diperdagangkan, dan memastikan ketersediaan likuiditas valas untuk pembayaran sebagian kewajiban valas yang jatuh tempo dalam jangka waktu 1-3 bulan pada periode pelaporan Perusahaan dan entitas anak. Lihat Catatan 3 untuk kebijakan akuntansi untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan dan Catatan 56 untuk klasifikasi instrumen keuangan. Perusahaan dan entitas anak tidak menerapkan akuntansi lindung nilai atas transaksi-transaksi tersebut.

Related to financial risks, the Company has established management's policy related to hedging transactions. As a BUMN, the approved management policy is very important in order to avoid any issues that may arise during the implementation of such hedging programs. All derivative instruments are recognized in the consolidated statement of financial position at their fair values. Fair value is determined based on market value using the Bloomberg rate at the reporting date. Derivative assets or liabilities are presented at the amount of unrealized gain or loss from derivative contracts. The Company and its subsidiaries derivative contracts are classified as Financial Assets measured in FVTPL. These transactions are solely intended for mitigating foreign exchange risk, not for trading and ensuring the availability of foreign currency liquidity for principal and interest payment due in the 1-3 months of the Company and its subsidiaries reporting period. Refer to Note 3 for the accounting policy of financial assets and liabilities, as well as Note 56 for the financial instruments classification. The Company and its subsidiaries does not apply hedge accounting on those transactions.

i. Manajemen risiko mata uang asing

Perusahaan dan entitas anak memiliki banyak transaksi dan sumber pendanaan dalam mata uang asing. Sebagai akibatnya timbul eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

Perusahaan dan entitas anak telah melakukan diskusi dengan Bank Indonesia ("BI") untuk mendapatkan pemahaman komprehensif atas keadaan pasar. Perusahan dan entitas anak kemudian akan mempertimbangkan keadaan pasar ke dalam proyeksi keuangan internal mereka dan mengembangkan strategi yang telah disetujui bersama untuk memitigasi eksposur risiko mata uang asing dengan membeli instrumen mata uang asing yang dibutuhkan disaat yang tepat.

Jumlah eksposur mata uang asing bersih Perusahaan dan entitas anak pada tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 53.

Sensitivitas mata uang asing

Tabel di bawah ini memaparkan rincian sensitivitas Perusahaan dan entitas anak untuk setiap 10% kenaikan dan penurunan Rupiah terhadap mata uang asing yang relevan. Kenaikan dan penurunan 10% menggambarkan penilaian manajemen terhadap perubahan yang rasional pada nilai tukar dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini. Analisis sensitivitas ini mencakup saldo item moneter setelah pajak dalam mata uang asing dan menyesuaikan translasi pada akhir tahun untuk 10% perubahan dalam nilai tukar mata uang asing.

Analisa sensitivitas ini tidak memperhitungkan dampak dan perubahan kurs mata uang asing yang dapat dikapitalisasi sebagai aset pekerjaan dalam penyelesaian sesuai dengan PSAK 26: Biaya Pinjaman.

i. Foreign currency risk management

The Company and its subsidiaries undertake many transactions and funding sources denominated in foreign currencies. Consequently, there is exposures to exchange rate fluctuations.

The Company and its subsidiaries held regular discussions with Bank Indonesia ("BI") to get a comprehensive understanding of the market outlook. The Company and its subsidiaries then incorporated this outlook into its internal financial forecast and developed a concerted strategy to mitigate its foreign currency exposure by purchasing the required foreign currency denominated instruments at the right time.

The Company and its subsidiaries' foreign currency exposure as of the reporting date is disclosed in Note 53.

Foreign currency sensitivity

The following table explains the details of the Company's and its subsidiaries' sensitivity to a 10% increase and decrease in Rupiah against the relevant foreign currencies. This 10% increase or decrease represents management's assessment of the reasonably possible changes in foreign currency rates considering the current economic conditions. The sensitivity analysis includes after tax outstanding foreign denominated monetary items and adjusts their translation at the end of the year for a 10% change in foreign currency rates.

This sensitivity analysis does not consider the potential changes to the amount of foreign exchange differences that can be capitalized as construction in progress assets in accordance with SFAS 26: Borrowing Costs.

Dampak terhadap laba setelah pajak/ *Effect to profit after tax *)*
2019

	USD		JPY		
	10%	-10%	10%	-10%	
Aset keuangan					***Financial assets***
Piutang pihak berelasi	(71,373,262)	71,373,262	--	--	*Receivables from related parties*
Rekening dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	(51,087,300)	51,087,300	(381,943,050)	381,943,050	*Restricted cash in banks and time deposits*
Kas dan setara kas	(851,733,300)	851,733,300	(137,574,975)	137,574,975	*Cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	(1,042,575)	1,042,575	--	--	*Short-term investments*
Jumlah aset keuangan	(975,236,437)	975,236,437	(519,518,025)	519,518,025	*Total financial assets*
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Penerusan pinjaman	1,292,971,064	(1,292,971,064)	1,524,730,691	(1,524,730,691)	*Two-step loans*
Utang sewa pembiayaan	58,488,317	(58,488,317)	994,696,863	(994,696,863)	*Lease liabilities*
Utang bank dan surat utang jangka menengah	6,560,129,913	(6,560,129,913)	(498,089,772)	498,089,772	*Bank loans and medium term notes*
Utang obligasi	10,452,806,496	(10,452,806,496)	(222,661,884)	222,661,884	*Bonds payable*
Utang listrik swasta	512,318,127	(512,318,127)	--	--	*Electricity purchase payable*
Utang lain-lain	527,489,885	(527,489,885)	1,295,120	(1,295,120)	*Other payables*
Utang biaya proyek	1,091,489	(1,091,489)	330,791	(330,791)	*Project cost payable*
Utang usaha	936,761,792	(936,761,792)	--	--	*Trade payables*
Biaya masih harus dibayar	256,742,059	(256,742,059)	85,247,942	(85,247,942)	*Accrued expenses*
Jumlah liabilitas keuangan	20,598,799,142	(20,598,799,142)	1,885,549,751	(1,885,549,752)	*Total financial liabilities*
Jumlah - bersih	**19,623,562,705**	**(19,623,562,705)**	**1,366,031,726**	**(1,366,031,727)**	***Total - net***

Dampak terhadap laba setelah pajak/ *Effect to profit after tax *)*
2019

	EUR		Lain-lain/*Others **)*		
	10%	-10%	10%	-10%	
Aset keuangan					***Financial assets***
Kas dan setara kas	(286,066,051)	286,066,051	(154,650)	154,650	*Cash and cash equivalents*
Jumlah aset keuangan	(286,066,051)	286,066,051	(154,650)	154,650	*Total financial assets*
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Penerusan pinjaman	(22,652,799)	22,652,799	(5,851,863)	5,851,863	*Two-step loans*
Utang bank dan surat utang jangka menengah	(355,589,044)	355,589,044	--	--	*Bank loans and medium term notes*
Utang obligasi	(1,169,144,625)	1,169,144,625	--	--	*Bonds payable*
Utang lain-lain	(139,256,095)	139,256,095	(7,809,485)	7,809,485	*Other payables*
Utang biaya proyek	(278,970)	278,970	--	--	*Project cost payable*
Utang usaha	(381,457)	381,457	(31,679,488)	31,679,488	*Trade payables*
Biaya masih harus dibayar	(6,383,173)	6,383,173	(66,952)	66,952	*Accrued expenses*
Jumlah liabilitas keuangan	(1,693,686,163)	1,693,686,163	(45,407,788)	45,407,788	*Total financial liabilities*
Jumlah - bersih	**(1,979,752,214)**	**1,979,752,214**	**(45,562,438)**	**45,562,438**	***Total - net***

Dampak terhadap laba setelah pajak/ *Effect to profit after tax *)*
2018

	USD		JPY		
	10%	-10%	10%	-10%	
Aset keuangan					***Financial assets***
Piutang pihak berelasi	(77,232,291)	77,232,291	--	--	*Receivables from related parties*
Rekening dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	(51,808,500)	51,808,500	(363,300,898)	363,300,898	*Restricted cash in banks and time deposits*
Kas dan setara kas	(726,156,094)	726,156,094	(47,152,568)	47,152,568	*Cash and cash equivalents*
Jumlah aset keuangan	(855,196,885)	855,196,885	(410,453,466)	410,453,466	*Total financial assets*
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Penerusan pinjaman	1,249,614,703	(1,249,614,703)	1,602,023,025	(1,602,023,025)	*Two-step loans*
Utang sewa pembiayaan	71,206,489	(71,206,489)	1,189,892,142	(1,189,892,142)	*Lease liabilities*
Utang bank dan surat utang jangka menengah	5,478,071,390	(5,478,071,390)	(306,740,102)	306,740,102	*Bank loans and medium term notes*
Utang obligasi	8,441,397,384	(8,441,397,384)	--	--	*Bonds payable*
Utang listrik swasta	563,273,896	(563,273,896)	--	--	*Electricity purchase payable*
Utang lain-lain	701,361,659	(701,361,659)	68,981,131	(68,981,131)	*Other payables*
Utang biaya proyek	375,033	(375,033)	2,424,591	(2,424,591)	*Project cost payable*
Utang usaha	669,771,022	(669,771,022)	--	--	*Trade payables*
Biaya masih harus dibayar	204,783,004	(204,783,004)	78,398,270	(78,398,270)	*Accrued expenses*
Jumlah liabilitas keuangan	17,379,854,580	(17,379,854,580)	2,634,979,057	(2,634,979,057)	*Total financial liabilities*
Jumlah - bersih	**16,524,657,695**	**(16,524,657,695)**	**2,224,525,591**	**(2,224,525,591)**	***Total - net***

	Dampak terhadap laba setelah pajak/ *Effect to profit after tax *)* 2018				
	EUR		Lain-lain/*Others **)*		
	10%	-10%	10%	-10%	
Aset keuangan					***Financial assets***
Kas dan setara kas	(111,205,654)	111,205,654	--	--	*Cash and cash equivalents*
Jumlah aset keuangan	(111,205,654)	111,205,654	--	--	*Total financial assets*
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Penerusan pinjaman	(34,188,510)	34,188,510	(9,445,318)	9,445,318	*Two-step loans*
Utang bank dan surat utang jangka menengah	(220,018,653)	220,018,653	--	--	*Bank loans and medium term notes*
Utang obligasi	(620,990,625)	620,990,625	--	--	*Bonds payable*
Utang lain-lain	(148,270,483)	148,270,483	(8,267,688)	8,267,688	*Other payables*
Utang biaya proyek	(334,412)	334,412	--	--	*Project cost payable*
Utang usaha	--	--	(10,923,963)	10,923,963	*Trade payables*
Biaya masih harus dibayar	(1,418,421)	1,418,421	(97,146)	97,146	*Accrued expenses*
Jumlah liabilitas keuangan	(1,025,221,104)	1,025,221,104	(28,734,115)	28,734,115	*Total financial liabilities*
Jumlah - bersih	**(1,136,426,758)**	**1,136,426,758**	**(28,734,115)**	**28,734,115**	***Total - net***

*) Tidak memperhitungkan efek atas kapitalisasi biaya pinjaman
**) Mata uang asing lainnya disajikan dalam jumlah setara US$ menggunakan kurs tanggal pelaporan

*) *Not considering the effect of borrowing cost capitalization*
**) *Other foreign currencies are presented as US$ equivalent using the exchange rates prevailing at reporting date*

ii. Manajemen risiko tingkat suku bunga

Perusahaan dan entitas anak memiliki transaksi pada tingkat suku bunga tetap dan tingkat suku bunga mengambang. Transaksi dengan tingkat suku bunga mengambang terekspos terhadap risiko suku bunga arus kas. Pinjaman yang diterbitkan dengan tingkat suku bunga tetap mengekspos Perusahaan dan entitas anak dengan risiko suku bunga nilai wajar. Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko dengan menyeimbangkan porsi pinjaman dengan bunga tetap dan bunga mengambang.

ii. Interest rate risk management

The Company and its subsidiaries have transactions at fixed and floating interest rates. Transactions at floating interest rates are exposed to cash flow interest rate risk. Borrowing issued at fixed rates exposes the Company and its subsidiaries to fair value interest risk. The Company and its subsidiaries manage the risk by maintaining an appropriate mix of fixed and floating rate borrowings.

Sensitivitas tingkat suku bunga

Analisis sensitivitas berikut telah ditentukan berdasarkan eksposur Perusahaan dan entitas anak terhadap tingkat suku bunga untuk saldo instrumen keuangan terutang setelah pajak pada tanggal pelaporan. Analisis ini disusun dengan mengasumsikan jumlah saldo aset dan liabilitas terutang pada akhir periode pelaporan, terutang sepanjang tahun. Analisis sensitivitas ini menggunakan asumsi kenaikan dan penurunan sebesar 50 basis poin ("bp") pada tingkat bunga yang relevan dengan variabel lain dianggap konstan. Kenaikan dan penurunan sebesar 50 bp merupakan penilaian

Interest rate sensitivity

The sensitivity analysis below has been determined based on the Company and its subsidiaries' exposure to interest rates for financial instruments after tax outstanding at the reporting date. The analysis is prepared assuming the amount of assets and liabilities outstanding at the end of the reporting period was outstanding for the whole year. The sensitivity analysis uses an assumption of a 50 basis point ("bp") increase and decrease in the relevant interest rates with all other variables held constant. A 50 bp increase or decrease represents management's assessment of the

manajemen atas kemungkinan perubahan yang rasional terhadap tingkat bunga setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini.

reasonably possible change in interest rates after considering the current economic conditions.

	Dampak terhadap laba setelah pajak/ *Effect to profit after tax* 2019 *)		
	+50 bp Rp	-50 bp Rp	
Aset Keuangan			***Financial Assets***
Kas dan setara kas	174,745	(174,745)	*Cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	1,253	(1,253)	*Short-term investments*
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	22,428	(22,428)	*Restricted cash in banks and time deposits*
Subjumlah laba (rugi)	198,426	(198,426)	*Subtotal income (loss)*
Liabilitas Keuangan			***Financial Liabilities***
Penerusan pinjaman	(142,416)	142,416	*Two-step loans*
Utang bank	(771,439)	771,439	*Bank loans*
Subjumlah laba (rugi)	(913,855)	913,855	*Subtotal income (loss)*
Total laba (rugi)	**(715,429)**	**715,429**	***Total income (loss)***

	Dampak terhadap laba setelah pajak/ *Effect to profit after tax* 2018 *)		
	+50 bp Rp	-50 bp Rp	
Aset Keuangan			***Financial Assets***
Kas dan setara kas	124,855	(124,855)	*Cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	4,563	(4,563)	*Short-term investments*
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	21,333	(21,333)	*Restricted cash in banks and time deposits*
Subjumlah laba (rugi)	150,751	(150,751)	*Subtotal income (loss)*
Liabilitas Keuangan			***Financial Liabilities***
Penerusan pinjaman	(144,883)	144,883	*Two-step loans*
Utang bank	(679,169)	679,169	*Bank loans*
Subjumlah laba (rugi)	(824,052)	824,052	*Subtotal income (loss)*
Total laba (rugi)	**(673,301)**	**673,301**	***Total income (loss)***

*) Tidak memperhitungkan efek atas kapitalisasi biaya pinjaman

*) *Not considering the effect of borrowing cost capitalization*

iii. Manajemen risiko kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko bahwa pihak ketiga akan gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan dan entitas anak. Sebagai perusahaan yang diberikan kewajiban untuk melayani publik oleh Pemerintah Republik Indonesia, Perusahaan dan entitas anak diwajibkan melayani semua pelanggan tanpa melihat apakah nantinya akan bisa membayar atau tidak. Dalam meminimalkan risiko tidak tertagihnya piutang, Perusahaan

iii. Credit risk management

Credit risk refers to the risk that the counterparties will default on their contractual obligations resulting in a loss to the Company and its subsidiaries. As a company that performs a public service obligation on behalf of the Government of the Republic of Indonesia, the Company and its subsidiaries are obliged to serve all customers regardless of the ability to pay. In minimizing the risk of uncollected receivables, the Company and its subsidiaries collect customers

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

dan entitas anak menerapkan uang jaminan pelanggan dan melakukan pemutusan sambungan listrik ke pelanggan ditentukan jika pelanggan tidak membayar lewat dari tiga bulan untuk meminimalkan risiko kredit. Untuk kas dan setara kas, Perusahaan dan entitas anak mengelola rekening pada beberapa Bank untuk menghindari konsentrasi kas yang signifikan dengan satu institusi.

security deposits and will terminate the electricity connection to the customer if a customer does not make payment on time after three-months to minimize the Company's credit risk. For cash and cash equivalents, the Company and its subsidiaries maintain accounts with several banks to avoid significant concentration of cash with one institution.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan penyisihan untuk kerugian mencerminkan eksposur Perusahaan dan entitas anak terhadap risiko kredit. Lihat Catatan 56.a untuk rinciannya.

The carrying amount of financial assets recorded in the consolidated financial statements, net of any allowance for losses represents the Company's and its subsidiaries exposure to credit risk. See Note 56.a for details.

Kualitas kredit piutang usaha

Perusahaan dan entitas anak berkeyakinan bahwa tidak ada risiko kredit kualitas yang buruk karena piutang usaha Perusahaan dan entitas anak tersebar merata atas jumlah pelanggan yang besar yang meliputi berbagai industri dan wilayah geografis. Perusahaan dan entitas anak juga melakukan evaluasi kredit berkelanjutan atas kondisi keuangan piutang secara berkala. Lihat Catatan 14 untuk rincian umur piutang dan analisa cadangan penurunan nilai.

Credit quality of trade accounts receivable
The Company and its subsidiaries believe that there is no heightened risk of poor credit quality because its trade receivables are spread over a large number of customers across diverse industries and geographic areas. The Company and its subsidiaries also performs ongoing credit evaluation on the financial condition of its accounts receivable. See Note 14 for detailed information of the aging of receivables and impairment assessment of trade receivables.

Kualitas kredit piutang subsidi listrik
Perusahaan dan entitas anak berkeyakinan bahwa piutang subsidi listrik dapat diterima sepenuhnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dari Pemerintah Republik Indonesia. Perusahaan dan entitas anak berkeyakinan bahwa tidak ada risiko gagal bayar oleh Pemerintah.

Credit quality of electricity subsidy
The Company and its subsidiaries believes that receivables on electricity subsidy can be fully recovered in time because it is to be collected from the Government of the Republic of Indonesia. The Company and its subsidiaries believes there is no risk of default by the Government.

Kualitas kredit kas, deposito berjangka dan kas yang dibatasi penggunaannya
Perusahaan dan entitas anak menempatkan kas dan setara kas, deposito berjangka dan rekening deposito yang dibatasi penggunaannya pada bank yang memiliki kualitas kredit yang baik. Oleh karena itu, Perusahaan dan entitas anak berkeyakinan bahwa risiko kredit atas

Credit qualities of cash, time deposits and restricted cash
The Company and its subsidiaries placed cash and cash equivalents, time deposits and restricted cash with reputable counterparties that have good credit rating or bank standing. Consequently, the Company and its subsidiaries believe that the credit risk of such financial assets is minimal.

aset keuangan ini adalah minimal. Pihak ketiga yang dimaksud termasuk institusi keuangan utama dan BUMN lainnya.

These counterparties include large financial institutions and other BUMN.

Kualitas kredit piutang lainnya
Piutang lainnya ditagihkan kepada pihak berelasi dan karyawan Perusahaan dan entitas anak. Oleh karena itu, Perusahaan dan entitas anak dapat memonitor kolektibilitas piutang-piutang ini dengan seksama. Perusahaan dan entitas anak memiliki tingkat kolektibilitas yang baik atas piutang-piutang terkait.

Credit quality of other receivables
Other receivables are to be collected from the Company and its subsidiaries related parties and employees. Thus, the Company and its subsidiaries can closely monitor the collectability of these receivables. The Company and its subsidiaries have a good historical collection rate of these financial assets.

Tabel berikut menunjukan kualitas aset keuangan Perusahaan dan entitas anak sebelum cadangan kerugian penurunan nilai:

The following table shows the quality of financial assets of the Company and its subsidiaries before allowance for impairment losses:

	2019				
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impaired* Rp	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ *Past due but not impaired* Rp	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired* Rp	Jumlah/ *Total* Rp	
Aset keuangan					***Financial assets***
Aset tidak lancar					***Non-current assets***
Piutang pihak berelasi	951,643	--	--	951,643	*Receivables from related parties*
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunannya	5,980,703	--	--	5,980,703	*Restricted cash in banks and time deposits*
Piutang lain-lain	824,545	--	--	824,545	*Other receivables*
Aset tidak lancar lainnya	7,368	--	--	7,368	*Other non-current assets*
Jumlah aset tidak lancar	7,764,259	--	--	7,764,259	*Total non-current assets*
Aset lancar					***Current assets***
Kas dan setara kas	46,598,783	--	--	46,598,783	*Cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	334,153	--	--	334,153	*Short-term investments*
Piutang usaha	23,432,282	3,654,970	(1,956,714)	25,130,538	*Trade receivables*
Piutang lain-lain	46,973,724	--	--	46,973,724	*Other receivables*
Piutang pihak berelasi	4,719	--	--	4,719	*Receivables from related parties*
Aset lancar lainnya	72,241	--	--	72,241	*Other current assets*
Jumlah aset lancar	117,415,902	3,654,970	(1,956,714)	119,114,158	*Total current assets*
Jumlah aset keuangan	**125,180,161**	**3,654,970**	**(1,956,714)**	**126,878,417**	***Total financial assets***

	2018				
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impaired* Rp	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ *Past due but not impaired* Rp	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired* Rp	Jumlah/ *Total* Rp	
Aset keuangan					***Financial assets***
Aset tidak lancar					***Non-current assets***
Piutang pihak berelasi	1,031,237	--	--	1,031,237	*Receivables from related parties*
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunannya	5,688,712	--	--	5,688,712	*Restricted cash in banks and time deposits*
Piutang lain-lain	961,377	--	--	961,377	*Other receivables*
Aset tidak lancar lain	4,751	--	--	4,751	*Other non-current assets*
Jumlah aset tidak lancar	7,686,077	--	--	7,686,077	*Total non-current assets*
Aset lancar					***Current assets***
Kas dan setara kas	33,294,560	--	--	33,294,560	*Cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	1,216,886	--	--	1,216,886	*Short-term investments*
Piutang usaha	21,628,281	3,463,450	(1,289,068)	23,802,663	*Trade receivables*
Piutang kompensasi	23,173,464	--	--	23,173,464	*Compensation receivables*
Piutang lain-lain	9,507,768	--	--	9,507,768	*Other receivables*
Piutang pihak berelasi	5,954	--	--	5,954	*Receivables from related parties*
Aset lancar lain	5,697	--	--	5,697	*Other current assets*
Jumlah aset lancar	88,832,610	3,463,450	(1,289,068)	91,006,992	*Total current assets*
Jumlah aset keuangan	**96,518,687**	**3,463,450**	**(1,289,068)**	**98,693,069**	***Total financial assets***

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

iv. Manajemen risiko likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko bahwa Perusahaan dan entitas anak akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban terkait dengan liabilitas keuangan yang diselesaikan dengan pembayaran kas atau aset keuangan lainnya. Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada Direksi, yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang Perusahaan dan entitas anak. Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan kas, simpanan, fasilitas bank dan cadangan fasilitas pinjaman dengan terus menerus memonitor perkiraan dan realisasi arus kas dan mencocokkan profil jatuh tempo liabilitas keuangan.

Selanjutnya Perusahaan dan entitas anak juga memelihara kecukupan dana dengan cara mempertahankan kecukupan jumlah kas dan setara kas dan investasi jangka pendek yang mudah dikonversi menjadi uang tunai ketika mengalami gangguan yang tak terduga dari penagihan kas.

Tabel berikut ini memberikan rincian tanggal jatuh tempo kontraktual untuk liabilitas keuangan dengan pembayaran yang telah disepakati pada periode 31 Desember 2019. Tabel tersebut telah disusun berdasarkan arus kas liabilitas keuangan yang tidak didiskontokan berdasarkan tanggal paling awal dimana Perusahaan dan entitas anak diwajibkan untuk membayar. Untuk arus bunga dengan tingkat bunga mengambang, nilai arus kas yang tidak terdiskonto diperoleh dari kurva suku bunga pada akhir periode. Untuk liabilitas keuangan yang didenominasi dengan mata uang asing, jumlah yang

iv. Liquidity risk management

Liquidity risk is defined as the risk that the Company and its subsidiaries will encounter difficulty in meeting its obligations associated with financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset. Ultimate responsibility for liquidity risk management rests with the Board of Directors, which has built an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Company and its subsidiaries, short, medium and long-term funding and liquidity management requirements. The Company and its subsidiaries manage liquidity risk by maintaining adequate cash, reserves, banking facilities and reserve borrowing facilities by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial liabilities.

In addition, the Company and its subsidiaries maintain an adequate amount of cash and cash equivalents and short-time investments, which may be readily converted to cash upon any unforeseen interruption of their cash collections.

The following table details the remaining contractual maturity for its financial liabilities with an agreed repayment period as of December 31, 2019. The table has been drawn up based on the undiscounted cash flow of financial liabilities based on the earliest date on which the Company and its subsidiaries are required to pay. To the extent that interest flows are floating rate, the undiscounted cash flow is derived from interest rate curves at the end of the reporting period. For foreign currency denominated financial liabilities, the undiscounted amortization is

tidak didiskontokan ditranslasi dengan kurva nilai tukar *forward* yang relevan pada akhir periode pelaporan.

translated using the relevant forward exchange curve at the end of the reporting period.

	2019					
	Kurang dari satu tahun/ *Less than one year* Rp	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ *Over one year but not longer than three years* Rp	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ *Over three years but not longer than five years* Rp	Lebih dari lima tahun/ *Over five years* Rp	Jumlah/ *Total* Rp	
Liabilitas keuangan						***Financial liabilities***
Penerusan pinjaman	2,725,805	5,793,221	5,523,107	23,935,413	37,977,546	*Two-step loans*
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank	1,998,476	1,500,000	1,500,000	1,359,569	6,358,045	*Government and non-bank Government financial institution loans*
Utang sewa pembiayaan	2,540,107	6,179,307	1,013,631	4,376,439	14,109,484	*Lease liabilities*
Utang bank	21,693,338	57,720,495	69,054,325	57,249,000	205,717,158	*Bank loans*
Utang obligasi dan sukuk ijarah	6,946,478	20,201,481	8,472,082	145,618,735	181,238,776	*Bonds payable and sukuk ijara*
Utang listrik swasta	399,458	867,530	970,890	4,593,028	6,830,906	*Electricity purchase payable*
Utang KIK - EBA	586,620	1,354,642	--	--	1,941,262	*KIK-EBA loans*
Utang pihak berelasi	--	92	--	--	92	*Related parties payables*
Utang usaha	52,002,783	--	--	--	52,002,783	*Trade payables*
Uang jaminan langganan	14,235,879	--	--	--	14,235,879	*Customer's security deposits*
Utang biaya proyek	150,664	--	--	--	150,664	*Project cost payable*
Biaya masih harus dibayar	16,754,640	--	--	--	16,754,640	*Accrued expenses*
Utang lain-lain	30,598,919	133,662	--	--	30,732,581	*Other payables*
Jumlah	**150,633,167**	**93,750,430**	**86,534,035**	**237,132,184**	**568,049,816**	***Total***

	2018					
	Kurang dari satu tahun/ *Less than one year* Rp	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ *Over one year but not longer than three years* Rp	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ *Over three years but not longer than five years* Rp	Lebih dari lima tahun/ *Over five years* Rp	Jumlah/ *Total* Rp	
Liabilitas keuangan						***Financial liabilities***
Penerusan pinjaman	2,530,273	5,156,171	5,510,200	25,438,908	38,635,552	*Two-step loans*
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank	1,860,649	1,793,793	1,500,000	2,049,836	7,204,278	*Government and non-bank Government financial institution loans*
Utang sewa pembiayaan	2,624,629	5,513,648	1,354,210	7,600,478	17,092,965	*Lease liabilities*
Utang bank	28,145,737	42,498,456	64,785,461	45,682,080	181,111,734	*Bank loans*
Utang obligasi dan sukuk ijarah	2,120,612	20,367,695	6,876,500	104,437,626	133,802,433	*Bonds payable and sukuk ijara*
Utang listrik swasta	394,403	855,508	955,548	5,304,860	7,510,319	*Electricity purchase payable*
Utang KIK - EBA	686,819	1,562,790	658,377	--	2,907,986	*KIK-EBA loans*
Utang pihak berelasi	--	1,000	--	--	1,000	*Related parties payables*
Utang usaha	48,607,674	--	--	--	48,607,674	*Trade payables*
Uang jaminan langganan	13,465,735	--	--	--	13,465,735	*Customer's security deposits*
Utang biaya proyek	315,828	--	--	--	315,828	*Project cost payable*
Biaya masih harus dibayar	14,809,018	--	--	--	14,809,018	*Accrued expenses*
Utang lain-lain	32,970,944	94,427	--	--	33,065,371	*Other payables*
Jumlah	**148,532,321**	**77,843,488**	**81,640,296**	**190,513,788**	**498,529,893**	***Total***

d. Nilai wajar instrumen keuangan

Kecuali dijabarkan pada tabel berikut ini, manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan konsolidasian mendekati nilai wajarnya baik yang jatuh tempo dalam jangka pendek, instrumen tersebut dijamin penuh atau mempunyai tingkat suku bunga pasar:

d. Fair value of financial instruments

Except as detailed in the following table, the management considers that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost in the consolidated financial statements approximate their fair values either because of their short-term maturities, because the instruments are fully collateralized or because they carry a market interest rate:

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2019		2018		
	Nilai tercatat/ *Carrying amount* Rp	Nilai wajar/ *Fair value* Rp	Nilai tercatat/ *Carrying amount* Rp	Nilai wajar/ *Fair value* Rp	
Pinjaman diberikan dan piutang					***Loans and receivables***
Piutang pihak berelasi	956,362	956,362	1,037,191	1,037,191	*Receivables from related parties*
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	5,980,703	5,980,703	5,688,712	5,688,712	*Restricted cash in banks and time deposits*
Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi					***Liabilities at amortised cost***
Penerusan pinjaman	37,977,545	41,324,570	38,635,552	41,794,757	*Two-step loans*
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank	6,358,045	6,918,390	7,204,278	5,280,327	*Government and non-bank Government financial institution loans*
Utang sewa pembiayaan	14,109,484	15,352,976	17,092,965	16,822,994	*Lease liabilities*
Utang obligasi dan sukuk ijarah	181,238,776	197,211,651	133,802,433	141,499,687	*Bonds payable and sukuk ijara*
Utang listrik swasta	6,830,906	7,432,925	7,510,319	8,531,622	*Electricity purchase payable*
Utang pihak berelasi	92	92	1,000	1,000	*Payable to related parties*
Utang bank	205,717,158	223,847,354	181,111,734	182,117,875	*Bank loans*

Nilai wajar instrumen keuangan diatas, kecuali untuk utang obligasi, ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan menggunakan suku bunga pasar dengan penyesuaian kredit pada tanggal pelaporan. Nilai wajar instrumen keuangan diatas diklasifikasikan sebagai tingkat dua dalam hirarki nilai wajar.

The fair value for the above financial instruments, except for bonds payable, was determined by discounting estimated future cash flows with credit adjusted market interest rates at the reporting date. The fair values of the above financial instruments are within level two of the fair value hierarchy.

Nilai wajar dari utang obligasi, ditentukan dengan mengacu pada harga pasar yang dikuotasikan pada tanggal pelaporan. Nilai wajar utang obligasi diatas diklasifikasikan sebagai tingkat satu dalam hirarki nilai wajar.

The fair value of bonds payable is determined by quoted the closing ask price at the reporting date. The fair values of the above financial instruments are within level one of the fair value hierarchy.

e. Aset Derivatif
Perusahaan melaksanakan *hedging* terbatas untuk memitigasi risiko selisih kurs atas transaksi-transaksi tertentu. Jenis transaksi *hedging* yang dilaksanakan adalah kontrak-kontrak *currency swap* dengan jumlah rincian per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

e. Derivative Asset
The Company has implemented limited hedge on certain transactions to mitigate its foreign currency exposure. The type of hedge transaction is currency swap contract with details as of December 31, 2019 as follows:

Pihak lawan/ *Counterparties*	Jangka waktu *hedging*/ *Hedging periods*	Jumlah Notional/ *Notional amount* Rp	Aset (Liabilitas) Derivatif/ *Derivative Assets (Liabilities)* Rp
BNI	> 1 Bulan/ *Months*	1,747,225	29,868
BRI	> 1 Bulan/ *Months*	1,417,075	27,709
Mandiri	> 1 Bulan/ *Months*	1,408,675	26,886
BNI	< 1 Bulan/ *Months*	703,175	(8,051)
Mandiri	< 1 Bulan/ *Months*	351,650	(4,172)
		5,627,800	**72,240**

57. Informasi Tambahan terkait Penerapan POJK No. 6

57. Additional Information Related to Implementation of POJK No.6

Sejak 1 Januari 2016, Perusahaan menerapkan secara prospektif POJK No.6 untuk transaksi berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan IPP. Dampak penerapan POJK No.6 telah disesuaikan ke saldo laba 1 Januari 2016 (Catatan 2.a).

Since January 1, 2016, the Company has implemented POJK No.6 prospectively for transactions based on Power Purchase Agreement with IPPs. The effect of POJK No.6 implementation has been accounted for by adjustment to retained earnings as of January 1, 2016 (Note 2.a).

Sesuai POJK No.6 maka setiap transaksi berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, diperlakukan sebagai transaksi jual beli, meskipun sebenarnya mengandung substansi selain jual beli (Catatan 3.l dan 3.w). Tabel berikut ini disajikan sebagai informasi tambahan, jika perjanjian jual beli listrik dianggap mengandung sewa.

In accordance with POJK No.6, all transaction based on Power Purchase Agreement is treated as a sales and purchase transaction, although it contains substance other than sales and purchase (Notes 3.l and 3.w). The following tables are presented as an additional information if a certain power purchase agreement is deemed to contain a lease.

	Dengan/ *Under* ISAK 8		
	31 Desember/ *December 31*, 2019 Rp	31 Desember/ *December 31*, 2018 Rp	
Laporan posisi keuangan konsolidasian			*Consolidated statements of financial position*
Aset tidak lancar			*Non current assets*
Aset tetap	1,536,415,978	1,437,128,830	*Property, plant and equipment*
Aset pajak tangguhan	2,215,963	25,376,110	*Deferred tax assets*
Ekuitas			*Equity*
Saldo laba - tidak ditentukan penggunaannya	21,856,454	25,460,243	*Retained earnings - unappropriated*
Liabilitas jangka panjang			*Non-current liabilities*
Liabilitas pajak tangguhan	11,480,085	--	*Deferred Tax Payables*
Utang sewa pembiayaan	208,265,236	182,580,812	*Lease liabilities*
Utang listrik swasta	5,722,992	6,474,612	*Electricity purchase payable*
Liabilitas jangka pendek			*Current liabilities*
Utang usaha			*Trade payables*
Pihak berelasi	11,412,669	8,743,335	*Related parties*
Pihak ketiga	37,206,116	37,726,650	*Third parties*
Biaya masih harus dibayar	19,838,274	16,726,497	*Accrued expenses*
Utang listrik swasta	381,832	379,112	*Electricity purchase payable*
Utang sewa pembiayaan	8,384,288	6,758,279	*Lease liabilities*
Utang lain-lain	30,598,920	32,970,941	*Other payables*
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian			*Consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income*
Beban usaha:			*Operating expenses:*
Bahan bakar dan pelumas	162,051,377	163,913,402	*Fuel and lubricants*
Pembelian tenaga listrik	7,274,063	10,636,627	*Purchased electricity*
Sewa	8,615,643	7,077,750	*Lease*
Pemeliharaan	28,430,079	26,296,539	*Maintenance*
Penyusutan	41,136,593	35,679,954	*Depreciation*

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018 (In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Dengan/ *Under* ISAK 8		
	31 Desember/ *December 31*, 2019 Rp	**31 Desember/ *December 31*, 2018 Rp**	
Laba usaha setelah subsidi	77,569,286	46,495,019	*Operating income after subsidy*
Pendapatan (beban) lain-lain			*Other income (expense)*
Beban keuangan	(59,762,120)	(55,856,045)	*Financial cost*
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih	16,477,837	(21,905,908)	*Gain (loss) on foreign exchange - net*
Penghasilan (beban) lain-lain - bersih	(3,667,667)	38,836,829	*Others income (expense) - net*
Laba sebelum pajak	31,372,441	8,374,216	*Income before tax*
Beban pajak	(23,121,783)	(5,421,231)	*Tax expenses*
Laba tahun berjalan	8,250,658	2,952,985	*Income for the year*
Laba per saham dasar/ (Dalam Rupiah penuh)	72,025	26,820	*Basic/ earning per share (In Rupiah full amount)*
Laporan arus kas konsolidasian			*Consolidated statements of cash flows*
Arus kas dari aktivitas operasi			*Cash flows from operating activities*
Pembayaran kas kepada pemasok	(211,222,660)	(216,803,330)	*Cash paid to suppliers*
Kas diperoleh dari aktivitas operasi	52,683,880	37,219,439	*Cash provided by operating activites*
Pembayaran bunga	(57,118,326)	(53,962,154)	*Interest expense paid*
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	43,525,315	39,335,367	*Net cash provided by operating activities*
Arus kas dari aktivitas pendanaan			*Cash flows from financing activities*
Pembayaran utang listrik swasta	(379,115)	(355,410)	*Payments of electricity purchase payable*
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(6,482,730)	(9,493,013)	*Payments of lease liabilities*
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	71,159,780	51,345,128	*Net cash provided by financing activities*

Nilai tunai pembayaran minimum atas utang sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 jika perusahaan menerapkan ISAK 8 adalah sebagai berikut:

The present value of minimum lease payments on lease liabilities as of December 31, 2019 and 2018 if the Company applied ISFAS 8 were as follows:

	2019 Rp	**2018 Rp**	
Pembayaran jatuh tempo dalam waktu:			*Minimum lease payments due:*
Tidak lebih dari satu tahun	43,823,447	37,760,924	*Not later than one year*
Antara lebih dari satu tahun sampai lima tahun	162,937,336	147,209,652	*Later than one year and not later than five years*
Lebih dari lima tahun	496,765,186	421,833,591	*Later than five years*
Jumlah pembayaran minimum sewa pembiayaan	703,525,969	606,804,167	*Total minimum lease payments*
Dikurangi bunga	486,876,445	417,465,076	*Less interest*
Nilai tunai pembayaran minimum sewa pembiayaan masa datang	216,649,524	189,339,091	*Present value of future minimum lease payments*
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	8,384,288	6,758,279	*Less current maturity*
Bagian jangka panjang	**208,265,236**	**182,580,812**	***Long-term portion***

58. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan / *58. Events After Reporting Period*

a. Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No. SK-22/MBU/01/2020 tanggal 16 Januari 2020, Murtaqi Syamsuddin diangkat sebagai Komisaris Independen dan Dudy Purwagandhi diangkat sebagai komisaris.

a. Based on the Decision Letter of the Minister of BUMN of the Republic of Indonesia No. SK- 22/MBU/01/2020 dated January 16, 2020, Murtaqi Syamsuddin was appointed as Independent Commissioner and Dudy Purwagandhi was appointed as Commissioner.

b. Pada tanggal 18 Februari 2020, Kementerian ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan keempat atas Peraturan Menteri ESDM No.28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero).

b. On February 18, 2020, the Ministry of ESDM issued Regulation of the Minister of ESDM No. 3 Year 2020 regarding the fourth amendment to Regulation of the Minister of ESDM No.28 Year 2016 regarding electricity tariff provided by PT PLN (Persero).

c. Pada tanggal 18 Februari 2020 Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2020 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

c. On February 18, 2020, the Company issued Shelf Regristration Bonds III Phase VI Year 2020 and Shelf Registration Sukuk Ijara III Phase VI Year 2020 with details as follows:

	Pokok/ *Principal*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Tingkat kupon imbalan ijara per tahun/ *Coupon rate ijara fee per annum *)*	
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020				*Shelf Registration Bonds III PLN VI Year 2020*
Seri A	540,630	18 Februari/ *February 18*, 2025	7.20%	*Series A*
Seri B	672,500	18 Februari/ *February 18*, 2027	7.70%	*Series B*
Seri C	544,250	18 Februari/ *February 18*, 2030	8.00%	*Series C*
Seri D	1,459,000	18 Februari/ *February 18*, 2035	8.70%	*Series D*
Seri E	1,596,050	18 Februari/ *February 18*, 2040	9.05%	*Series E*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020				*Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN VI Year 2020*
Seri A	40,500	18 Februari/ *February 18*, 2027	Rp3.119	*Series A*
Seri B	3,500	18 Februari/ *February 18*, 2030	Rp 280	*Series B*
Seri C	9,000	18 Februari/ *February 18*, 2035	Rp 783	*Series C*
Seri D	62,500	18 Februari/ *February 18*, 2040	Rp5.656	*Series D*
Jumlah	**4,927,930**			***Total***

*) Imbalan ijarah per tahun disajikan dalam Rupiah penuh

**) Ijara fee per annum are presented in Rupiah full amount*

d. Pada tanggal 5 Maret 2020, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari MUFG Bank berjangka *offshore* sebesar JPY18.700.000.000 dan *onshore* sebesar JPY14.300.000.000 yang akan berakhir pada tanggal 5 Maret 2025. Selanjutnya, pada tanggal 13 Maret 2020, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari Mizuho Bank untuk membiayai pembangunan PLTMG Riau Peaker sebesar EUR84.597.923,78 dan akan berakhir pada tanggal 13 Maret 2032. Kedua pinjaman tersebut dikenakan tingkat bunga antara 0.98% s.d. LIBOR + 0.7% per tahun.

d. On March 5, 2020, the Company obtained credit facilities from MUFG offshore amounting to JPY18,700,000,000 and onshore amounting to JPY14,300,000,000, respectively and will mature on March 5, 2025. Moreover, on March 13, 2020, the Company obtained a credit facility from Mizuho Bank to fund the construction of PLTMG Riau Peaker amounting to EUR84,597,923.78 and will mature on March 13, 2032. Both of the loans bear interest rate in the range of 0.98% to LIBOR + 0.07% per annum.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

e. Pada tanggai 11 Maret 2020 Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan penyebaran virus corona (COVID-19) sebagai pandemi global, sekaligus merekomendasikan tindakan pencegahan dan mitigasinya pada sebagian besar negara-negara, termasuk Indonesia.

Pandemi Covid-19 menyebabkan sebagian besar aktivitas ekonomi terganggu seperti sektor industri, sektor pariwisata, perhotelan, perdagangan, transportasi tidak terkecuali sektor usaha kecil dan menengah. Kondisi ini berdampak terhadap penurunan kebutuhan konsumsi listrik *[demand]* dan pertumbuhan penjualan tenaga listrik. Manajemen melakukan beberapa bentuk mitigasi risiko atas kondisi tersebut dengan menghentikan kegiatan operasional pembangkit tenaga listrik yang tidak efisien serta penghematan biaya penyediaan tenaga listrik.

Kondisi ekonomi makro juga bergerak dengan volatilitas yang sangat tinggi yang melemahkan asumsi-asumsi yang telah dibangun Perusahaan pada akhir tahun 2019 dalam perencanaan korporasi seperti inflasi, *Indonesian Crued Price*, kurs, tingkat suku bunga acuan, Harga Batubara Acuan dan lain-lain yang akan berpengaruh pada hasil operasi Perusahaan, yaitu peningkatan biaya operasi, penurunan pertumbuhan penjualan, dan penerimaan dari pelanggan. Selain itu kondisi tersebut juga berpotensi meningkatan nilai utang dan mengganggu perolehan sumber pendanaan yang dibutuhkan Perusahaan dari pihak eksternal.

Perusahaan menyadari bahwa pelemahan nilai rupiah terhadap mata uang asing dan faktor inflasi akan mengakibatkan peningkatan biaya operasional Perusahaan, akan tetapi manajemen telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi risiko tersebut. Selain itu sesuai dengan UU No. 19 tahun 2003 dan konsep *cost plus margin,* Pemerintah akan mengganti biaya dimaksud melalui subsidi dan pendapatan kompensasi. Sebagai bagian dari *prudent risk management*, Perusahaan memitigasi risiko nilai tukar

e. On March 11, 2019, the World Health Organisation has made an announcement regarding the spread of corona virus (COVID-19) as a global pandemic, simultaneously recommending preventive actions and mitigation for some of the large countries, including Indonesia.

The Covid-19 pandemic has caused disruptions to most of economic activities, for instance industrial sector, tourism sector, hospitality, trading sector, transportation and without exception to small and medium enterprises. This condition has an impact in declining demands of electricity consumption. The management has done several risk mitigations regarding this condition by stopping inefficient power plants' operational activities and cost savings of electricity supplies.

The macro economics condition has also shifted in such rapid volatility in which has weaken the preceding assumptions that has been set forth by the Company at the end of the year 2019 in the corporate planning, such as inflation, Indonesian Crued Price, exchange rate, reference interest rate, Coal Reference Price, and others in which will affect the Company's operation outcome such as an increase in operating cost, a decrease in sale growth and customer receipts. Moreover, this condition also potentially increases the amount of payables and interferes disrupts obtaining source of funds needed by the Company from external parties.

The Company realizes that the weakening of rupiah rate towards foreign exchange rate and inflation factors will result in an increase of Company's operational cost, however they Management has taken several strategies to anticipate those risks. Moreover, in compliance to UU No.19 year 2003 and cost plus margin concept, the government will replace such costs through subsidy and compensation income. As part of the prudent risk management, the Company mitigates the exchange rate risks on foreign exchange obligations over

atas liabilitas mata uang asing dari liabilitas pembayaran pokok dan bunga pinjaman, tagihan IPP dan tagihan energi primer dengan melakukan lindung nilai (*hedging*) dengan berpedoman pada peraturan Bank Indonesia No. 16/21/PBI/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank dimana manajemen konsisten melakukan lindung nilai (*hedging*) minimum 25% x net eksposur valas (selisih aset valas – liabilitas valas) dan rasio likuiditas minimum (aset valas/liabilitas valas) > 70% .

outstanding payment obligations and interest, invoices from IPPs and invoices from primary energies by hedging in accordance to Bank Indonesia regulation No. 16/21/PBI/2014 dated December 29, 2014 regarding Application of Prudential Principles in Managing Foreign Debt of Nonbank Corporations where Management consistently performs minimum hedging of 25% x foreign exchange rate net exposure (difference foreign exchange assets – foreign exchange liability) and minimum liquidity ratio of (foreign exchange assets /foreign exchange liability) > 70%.

Pemerintah melalui Presiden Republik Indonesia dan ditindaklanjuti dengan Surat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan No. 707/26/DJL.3/2020 tanggal 31 Maret 2020, memberikan kebijakan bahwa golongan pelanggan dengan daya 450 VA sebanyak 24 juta pelanggan dibebaskan tagihan listriknya selama 3 bulan (April - Juni 2020) dan golongan pelanggan dengan daya 900 VA sebanyak 7 juta pelanggan diberikan diskon 50%, yang selanjutnya piutang dari kedua golongan pelanggan ini akan dibayar Pemerintah kepada Perusahaan. Kebijakan Pemerintah untuk menanggung tagihan listrik pelanggan merupakan program jaring pengaman sosial untuk membantu ekonomi masyarakat yang terkena dampak COVID-19.

The Government through President of Republic of Indonesia and followed by a letter from the General Director of Electricity No.707/26/DJL.3/2020 dated March 31, 2020 provides policies in which group of customers with electricity power of 450 VA amounting to 24 million customers are freed from their electricity bills for 3 months (April - June 2020) and group of customers with electricity power of 900 VA amounting to 7 million customers are given 50% discount in which the receivables occurs from both of the group of customers will be paid off by the Government to the Company. The Government regulation to bear the customers' electricity bills is part of social safety net program in order to help the economy of the community affected by COVID-19.

Perusahaan dan entitas anak belum dapat secara akurat memprediksi dan mengkuantifikasi seberapa lama atau sejauh mana wabah COVID-19 tersebut berdampak terhadap hasil operasi, posisi keuangan, dan arus kas Perusahaan dan entitas anak. Manajemen optimis bahwa dengan dukungan pemerintah dan stakeholder lainnya, serta langkah-langkah strategis internal maka operasional Perusahaan dan entitas anak akan terus berjalan dan kondisi keuangan tetap terkendali.

The Company and subsidiaries are yet to accurately predict and quantify how long or how far the COVID-19 pandemic will affect the operating results, financial position, and cash flows of the Company and subsidiaries. The Management is optimist that with the help of the government and other stakeholders, followed by internal strategic steps, the operations of the Company and subsidiaries will carry on and the financial conditions remain manageable.

f. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 tahun 2020 ("Peraturan") telah diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2020.

f. Government Regulation in Lieu of Law No. 1 Year 2020 ("the Regulation") has been issued on 31 March 2020.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Peraturan ini mengatur mengenai kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem Keuangan. Peraturan ini salah satunya mengatur penyesuaian tarif PPh Badan dalam negeri menjadi sebesar 22% pada tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021, dan 20% pada tahun 2022.

The Regulation is concerning the state financial policy and financial system stability in response to the COVID-19 pandemic and/or the threats that endanger the national economy and/or financial system stability. The Regulation, among others, regulates the adjustment of domestic Corporate Income Tax rate to become 22% in the fiscal years of 2020 and 2021 and 20% in 2022 fiscal year.

Peraturan tersebut tidak berdampak kepada pengukuran aset dan kewajiban pajak kini maupun tangguhan, termasuk beban terkait, yang dilaporkan pada laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2019 dan baru berdampak pada pelaporan keuangan setelah tahun 2019. Jika Perusahaan dan entitas anak menggunakan tarif pajak 22% untuk tahun 2019, aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan yang dilaporkan oleh Perusahaan dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2019 akan turun masing-masing sebesar Rp66.479 dan Rp843.646.

The Regulation does no affect the measurement of the current and deferred tax assets and liabilities, including its related expenses, which were reported in the consolidated financial statements of December 31, 2019 and would only impact the financial reporting after 2019. Had the Company and subsidiaries used the 22% tax rate in 2019, the deferred tax assets and liabilities reported by the Company and subsidiaries as at December 31, 2019 would have decreased amounting to Rp66,479 and Rp843,646, respectively.

g. Pada tanggal 6 Mei 2020, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap VII tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

g. On 6 May 2020, the Company issued Shelf Regristration Bonds III Phase VII year 2020 with details as follows:

	Pokok/ *Principal*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Tingkat kupon per tahun/ *Coupon rate per annum *)*	
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VII Tahun 2020				*Shelf Registration Bonds III PLN VII Year 2020*
Seri A	316,700	6 Mei/ *May 6*, 2023	7.92%	*Series A*
Seri B	99,155	6 Mei/ *May 6*, 2025	8.25%	*Series B*
Seri C	312,180	6 Mei/ *May 6*, 2027	8.55%	*Series C*
Seri D	1,009,100	6 Mei/ *May 6*, 2030	9.10%	*Series D*

h. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Republik Indonesia No.SK-147/MBU/05/2020 tanggal 14 Mei 2020:

- Memberhentikan dengan hormat anggota-anggota Dewan Direksi:
  - Sripeni Inten Cahya sebagai Direktur Pengadaan Strategis 1;
  - Djoko Rahardjo Abu Manan sebagai Direktur Pengadaan Strategis 2;
  - Muhamad Ali sebagai Direktur *Human Capital Management;*

h. Based on the Decision of the Minister of BUMN of the Republic of Indonesia No.SK-147/MBU/05/2020 dated May 14, 2020:

- *Honorably discharged members of the Board of Directors:*
  - *Sripeni Inten Cahya as Director of Strategic Procurement 1;*
  - *Djoko Rahardjo Abu Manan as Director of Strategic Procurement 2;*
  - *Muhamad Ali as Director of Human Capital Management;*

- Ahmad Rofiq sebagai Direktur Bisnis Regional Maluku, Papua dan Nusa Tenggara.

- Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Dewan Direksi Perusahaan menjadi sebagai berikut:
  - Direktur Pengadaan Strategis 1 menjadi Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan;
  - Direktur Pengadaan Strategis 2 menjadi Direktur Energi Primer;
  - Direktur *Human Capital Management* menjadi Direktur *Human Capital* dan *Management;*
  - Direktur Bisnis Regional Sumatera menjadi Direktur Bisnis Regional Sumatera Kalimantan;
  - Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Kalimantan menjadi Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara;
  - Direktur Bisnis Regional Maluku, Papua dan Nusa Tenggara menjadi Direktur Mega Project.
- Mengalihkan penugasan anggota-anggota Dewan Direksi:
  - Syofvi Felienty Roekman semula Direktur Perencanaan Korporat menjadi Direktur *Human Capital* dan *Management*;
  - Wiluyo Kusdwiharto semula Direktur Bisnis Regional Sumatera menjadi Direktur Bisnis Regional Sumatera Kalimantan;
  - Syamsul Huda semula Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Kalimantan menjadi Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara.
- Mengangkat anggota-anggota Dewan Direksi:
  - Muhammad Ikbal Nur sebagai Direktur Perencanaan Korporat;
  - Bob Sahril sebagai Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan;
  - Rudy Hendra Prastowo sebagai Direktur Energy Primer;
  - M. Ikhsan Asaad sebagai Direktur Mega Project.

- *Ahmad Rofiq as Director of Regional Business of Maluku, Papua and Nusa Tenggara.*

- *Changed the nomenclature position of the members of the Company's Board of Directors as follows:*
  - *Director of Strategic Procurement 1 became Director of Commerce and Customer Management;*
  - *Director of Strategic Procurement 2 became Director of Primary Energy;*
  - *Director of Human Capital Management became Director of Human Capital and Management;*
  - *Director of Regional Business of Sumatera became Director of Regional Business of Sumatera Kalimantan;*
  - *Director of Regional Business of Sulawesi and Kalimantan became Director of Regional Business of Sulawesi, Maluku, Papua and Nusa Tenggara;*
  - *Director of Regional Business of Maluku, Papua and Nusa Tenggara became Director of Mega Project.*
- *Transfer the assignments of the members of the Board of Directors:*
  - *Syofvi Felienty Roekman that was previously Director of Corporate Planning to become Director of Human Capital and Management;*
  - *Wiluyo Kusdwiharto that was previously Director of Regional Business of Sumatera to become Director of Regional Business of Sumatera Kalimantan;*
  - *Syamsul Huda that was previously Director of Regional Business of Sulawesi and Kalimantan to become Director of Regional Business of Sulawesi, Maluku, Papua and Nusa Tenggara.*
- *Appoint members of the Board of Directors:*
  - *Muhammad Ikbal Nur as Director of Corporate Planning;*
  - *Bob Sahril as Director of Commerce and Customer Management;*
  - *Rudy Hendra Prastowo as Director of Primary Energy;*
  - *M. Ikhsan Asaad as Director of Mega Project.*

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

59. Tanggung Jawab Manajemen dan Persetujuan atas Laporan Keuangan Konsolidasian / *59. Management's Responsibility and Approval of the Consolidated Financial Statements*

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian merupakan tanggung jawab manajemen dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 18 Mei 2020.

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements were the responsibilities of the management and were approved by the Directors for issuance on May 18, 2020.

Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2019 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Board of Commissioners and Board of Directors Statement of Accountability for 2019 Annual Report of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2019 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Board of Commissioners and Board of Directors Statement of Accountability for 2019 Annual Report of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Amien Sunaryadi
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner concurrently Independent Commissioner

Suahasil Nazara
Wakil Komisaris Utama
Vice President Commissioner

Deden Juhara
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Murtaqi Syamsuddin
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Ilya Avianti
Komisaris
Commissioner

Rida Mulyana
Komisaris
Commissioner

Mohamad Ikhsan
Komisaris
Commissioner

Dudy Purwagandhi
Komisaris
Commissioner

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tahun 2019 telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 2020

We, the signatories, hereby stated that all information contained in the 2019 Annual Report of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) has been comprehensively presented and that we are fully accountable for the accuracy of the content of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Annual Report.

This Statement is made truthfully.

Jakarta, 2020

Direksi
Board of Directors

Zulkifli Zaini
Direktur Utama
President Director

Darmawan Prasodjo
Wakil Direktur Utama
Vice President Director

Syofvi Felienty Roekman
Direktur Human Capital dan Management
Director of Human Capital and Management

Sinthya Roesly
Direktur Keuangan
Director of Finance

Muhammad Ikbal Nur
Direktur Perencanaan Korporat
Director of Corporate Planning

Bob Saril
Direktur Niaga dan
Manajemen Pelanggan
Director of Commerce and
Customer Management

Rudy Hendra Prastowo
Direktur Energy Primer
Director of Primary Energy

Muhammad Ikhsan Asaad
Direktur Mega Project
Director of Mega Project

Haryanto WS
Direktur Bisnis Regional
Jawa, Madura, dan Bali
Regional Business Director of
Java, Madura, and Bali

Wiluyo Kusdwiharto
Direktur Bisnis Regional
Sumatera Kalimantan
Regional Business Director of
Sumatra Kalimantan

Syamsul Huda
Direktur Bisnis Regional
Sulawesi, Maluku, Papua,
dan Nusa Tenggara
Regional Business Director of
Sulawesi, Maluku, Papua,
and Nusa Tenggara

Surat Pernyataan Direksi Tentang Penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2019

The Board of Directors' Statement Regarding The Signing of Statement of The 2019 Annual Report

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 Pasal 67 ayat (2), dengan ini kami menyatakan bahwa sehubungan dengan terdapatnya beberapa anggota Direksi dan Komisaris PT PLN (Persero) yang menjabat dalam Tahun Buku 2019, saat ini sudah tidak menjabat sebagai Direksi dan Dewan Komisaris, sehingga yang bersangkutan tidak dapat menandatangani Laporan Tahunan PLN Tahun 2019 ini, namun demikian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 67 ayat (3) yang bersangkutan tetap bertanggung jawab terhadap Laporan Tahunan 2019 sesuai dengan masa jabatannya, sebagai berikut:

We, the undersigned:

With reference to the provisions of the Law of the Republic of Indonesia Law Number 40/2007 Article 67 paragraph (2), we hereby declare that in connection with the presence of several members of the Board of Directors and Commissioners of PT PLN (Persero) who have served in Fiscal Year 2019, currently no longer serve as Directors and The Board of Commissioners, so that the person concerned cannot sign the 2019 PLN Annual Report, however according to the provisions of the Republic of Indonesia Law No. 40/2007 Article 67 paragraph (3), the person remains responsible for the 2019 Annual Report in accordance with his tenure, as follows:

MANTAN DEWAN KOMISARIS FORMER BOARD OF COMMISSIONERS

No	Nama Name	Jabatan Position	Periode Pemberhentian Dismissed Period	Keterangan Explanation
1	Oegroseno	Komisaris Independen Independent Commissioner	28 Februari 2019 February, 28th 2019	Diberhentikan oleh Pemegang Saham sesuai Keputusan Menteri BUMN No. SK-55/MBU/02/2019 Dismissed by Shareholders according to Ministerial Decree No. SK-55/MBU/02/2019
2	Andy Noorsaman Sommeng	Komisaris Commissioner	28 Februari 2019 February, 28th 2019	Diberhentikan oleh Pemegang Saham sesuai Keputusan Menteri BUMN No. SK-55/MBU/02/2019 Dismissed by Shareholders according to Ministerial Decree No. SK-55/MBU/02/2019
3	Rionald Silaban	Komisaris Commissioner	30 Agustus 2019 August, 30th 2019	Diberhentikan oleh Pemegang Saham sesuai Keputusan Menteri BUMN No. SK-189/MBU/08/2019 Dismissed by Shareholders according to Ministerial Decree No. SK-189/MBU/08/2019
4	Aloysius Kiik Ro	Komisaris Commissioner	23 Desember 2019 December, 23rd 2019	Diberhentikan oleh Pemegang Saham sesuai Keputusan Menteri BUMN No. SK-326/MBU/12/2019 Dismissed by Shareholders according to Ministerial Decree No. SK-326/MBU/12/2019
5	Sumiyati	Komisaris Commissioner	23 Desember 2019 December, 23rd 2019	Diberhentikan oleh Pemegang Saham sesuai Keputusan Menteri BUMN No. SK-326/MBU/12/2019 Dismissed by Shareholders according to Ministerial Decree No. SK-326/MBU/12/2019
6	Darmawan Prasodjo	Komisaris Commissioner	26 Desember 2019 December, 26th 2019	Diberhentikan oleh Pemegang Saham sesuai Keputusan Menteri BUMN No. SK-334/MBU/12/2019 Dismissed by Shareholders according to Ministerial Decree No. SK-334/MBU/12/2019
7	Budiman	Komisaris Commissioner	16 Januari 2020 January, 16th 2020	Diberhentikan oleh Pemegang Saham sesuai Keputusan Menteri BUMN No. SK-22/MBU/01/2020 Dismissed by Shareholders according to Ministerial Decree No. SK-22/MBU/01/2020

MANTAN ANGGOTA DIREKSI FORMER BOARD OF DIRECTORS

No	Nama Name	Jabatan Position	Periode Pemberhentian Dismissed Period	Keterangan Explanation
1	Sofyan Basir	Direktur Utama President Director	29 Mei 2019 May, 29th 2019	Diberhentikan oleh Pemegang Saham sesuai Keputusan Menteri BUMN No. SK-109/MBU/05/2019 Dismissed by Shareholders according to Ministerial Decree No. SK-109/MBU/05/2019
2	Machnizon	Direktur Bisnis Regional Kalimantan Regional Business Director of Kalimantan	2 Agustus 2019 August, 2nd 2019	Diberhentikan oleh Pemegang Saham sesuai Keputusan Menteri BUMN No. SK-169/MBU/08/2019 Dismissed by Shareholders according to Ministerial Decree No. SK-169/MBU/08/2019
3	Sarwono Sudarto	Direktur Keuangan Director of Finance	23 Desember 2019 December, 23rd 2019	Diberhentikan oleh Pemegang Saham sesuai Keputusan Menteri BUMN No. SK-325/MBU/12/2019 Dismissed by Shareholders according to Ministerial Decree No. SK-325/MBU/12/2019
4	Amir Rosidin	Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah Regional Business Director of Central Java	23 Desember 2019 December, 23rd 2019	Diberhentikan oleh Pemegang Saham sesuai Keputusan Menteri BUMN No. SK-325/MBU/12/2019 Dismissed by Shareholders according to Ministerial Decree No. SK-325/MBU/12/2019
5	Supangkat Iwan Santoso	Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Regional Business Director of East Java, Bali, and Nusa Tenggara	23 Desember 2019 December, 23rd 2019	Diberhentikan oleh Pemegang Saham sesuai Keputusan Menteri BUMN No. SK-325/MBU/12/2019 Dismissed by Shareholders according to Ministerial Decree No. SK-325/MBU/12/2019
6	Sripeni Inten Cahyani	Direktur Pengadaan Strategis 1 Director of Strategic Procurement 1	14 Mei 2020 May, 14th 2020	Diberhentikan oleh Pemegang Saham sesuai Keputusan Menteri BUMN No. SK-147/MBU/05/2020 Dismissed by Shareholders according to Ministerial Decree No. SK-147/MBU/05/2020
7	Djoko Rahardjo Abu Manan	Direktur Pengadaan Strategis 2 Director of Strategic Procurement 2	14 Mei 2020 May, 14th 2020	Diberhentikan oleh Pemegang Saham sesuai Keputusan Menteri BUMN No. SK-147/MBU/05/2020 Dismissed by Shareholders according to Ministerial Decree No. SK-147/MBU/05/2020
8	Muhamad Ali	Direktur Human Capital Management Director of Human Capital Management	14 Mei 2020 May, 14th 2020	Diberhentikan oleh Pemegang Saham sesuai Keputusan Menteri BUMN No. SK-147/MBU/05/2020 Dismissed by Shareholders according to Ministerial Decree No. SK-147/MBU/05/2020
9	Ahmad Rofik	Direktur Bisnis Regional Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Regional Business Director of Maluku, Papua, and Nusa Tenggara	14 Mei 2020 May, 14th 2020	Diberhentikan oleh Pemegang Saham sesuai Keputusan Menteri BUMN No. SK-147/MBU/05/2020 Dismissed by Shareholders according to Ministerial Decree No. SK-147/MBU/05/2020

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 2020

This is our statement which has been made truthfully.

Jakarta, 2020

Direksi
Board of Directors

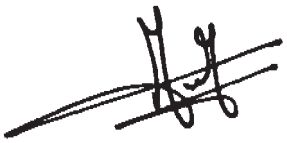

Zulkifli Zaini
Direktur Utama
President Director

Darmawan Prasodjo
Wakil Direktur Utama
Vice President Director

Syofvi Felienty Roekman
Direktur Human Capital dan Management
Director of Human Capital and Management

Sinthya Roesly
Direktur Keuangan
Director of Finance

Muhammad Ikbal Nur
Direktur Perencanaan Korporat
Director of Corporate Planning

Bob Saril
Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan
Director of Commerce and Customer Management

Rudy Hendra Prastowo
Direktur Energy Primer
Director of Primary Energy

Muhammad Ikhsan Asaad
Direktur Mega Project
Director of Mega Project

Haryanto WS
Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura, dan Bali
Regional Business Director of Java, Madura, and Bali

Wiluyo Kusdwiharto
Direktur Bisnis Regional Sumatera Kalimantan
Regional Business Director of Sumatra Kalimantan

Syamsul Huda
Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara
Regional Business Director of Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara

Checklist Isi Laporan Tahunan Berdasarkan Surat Edaran OJK No. 30 Tahun 2016 ("SEOJK 30/2016")

Checklist of the Annual Report Contents Pursuant to the Circular Letter of OJK No. 30/2016 ("SEOJK 30/2016")

Referensi Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2016:

Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan SEOJK No. 30/SEOJK.04/2016: Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

OJK Reference No. 29/POJK.04/2016:

Annual Report of Public Company and SEOJK NO 30/SEOJK.04/2016: Form and Content of Annual Report of Public Company

Keterangan	Halaman Page	Description
I. Ketentuan Umum		**I. General Provision**
1. Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik merupakan sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.		1. Annual Report of a listed company is one of the most important sources as the base for investors or shareholders in making investment decision, and is a means of monitoring issuers or public company.
2. Seiring dengan perkembangan Pasar Modal dan meningkatnya kebutuhan investor atau pemegang saham atas keterbukaan informasi, Direksi dan Dewan Komisaris dituntut untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi melalui Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.		2. Along with the development of Capital Market and the growing needs of investors or shareholders regarding information disclosure, the Board of Directors and the Board of Commissioners are required to improve the quality of information disclosure through annual report.
3. Laporan Tahunan yang disusun secara teratur dan informatif dapat memberikan kemudahan bagi investor atau pemegang saham dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.		3. Annual Report should be prepared in an orderly manner and should be informative to provide conveniences for the investors or shareholders in getting the information they need.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan pedoman bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang wajib diterapkan dalam menyusun Laporan Tahunan.		4. This Circular Letter of the Financial Service Agency serves a guidelines for Issuers or Public Companies that should be applied in preparing their Annual Report.
II. Bentuk Laporan Tahunan		**II. Format of Annual Report**
1. Laporan Tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan salinan dokumen elektronik.	√	1. Annual Report should be presented in the printed format and in electronic document copy.
2. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik.	√	2. The printed version of the Annual Report should be printed on light-colored paper of fine quality, in A4 size, bound and can be reproduced in good quality.
3. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk salinan dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam format pdf.	√	3. The Annual Report presented in electronic document format is the Annual Report converted into pdf format.
III. Isi Laporan Tahunan		**III. Content Of Annual Report**
1. Ketentuan Umum		1. General Provision
a. Laporan Tahunan paling sedikit memuat informasi mengenai:		a. Annual Report should contain at least the following information:
1) ikhtisar data keuangan penting;	22	1) summary of key financial information;
2) informasi saham (jika ada);	26	2) stock information (if any);
3) laporan Direksi;	68	3) the Board of Directors report;
4) laporan Dewan Komisaris;	48	4) the Board of Commissioners report;
5) profil Emiten atau Perusahaan Publik;	86	5) profile of Issuer or Public Company;
6) analisis dan pembahasan manajemen;	174	6) management discussion and analysis;

Keterangan	Halaman Page	Description
7) tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;	272	7) corporate governance applied by the Issuer or Public Company;
8) tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik;	458	8) corporate social and environmental responsibility of the Issuer or Public Company;
9) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan	578	9) audited annual report; and
10) surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan;	826	10) statement that the Board of Directors and the Board of Commissioners are fully responsible for the Annual Report;
b. Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami;		b. Annual Report may present the information in form of images, charts, tables, and diagrams are presented by mentioning the title and/or clear description, that is easy to read and be understood;
2. Uraian Isi Laporan Tahunan		2. Description of Content of Annual Report
a. Ikhtisar Data Keuangan Penting Ikhtisar Data Keuangan Penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat:	22	a. Summary of Key Financial Information Summary of Key Financial Information contains financial information presented in comparison with previous 3 (three) fiscal years or since commencement of business if the Issuers or the Public Company commencing the business less than 3 (three) years, at least contain:
1) pendapatan/penjualan;	√	1) income/sales;
2) laba bruto;	√	2) gross profit;
3) laba (rugi);	√	3) profit (loss);
4) jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	√	4) total profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and non-controlling interest;
5) total laba (rugi) komprehensif;	√	5) total comprehensive profit (loss);
6) jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	√	6) total comprehensive profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and non controlling interest;
7) laba (rugi) per saham;	√	7) earning (loss) per share;
8) jumlah aset;	√	8) total assets;
9) jumlah liabilitas;	√	9) total liabilities;
10) jumlah ekuitas;	√	10) total equities;
11) rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;	√	11) profit (loss) to total assets ratio;
12) rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;	√	12) profit (loss) to equities ratio;
13) rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan;	√	13) profit (loss) to income ratio;
14) rasio lancar;	√	14) current ratio;
15) rasio liabilitas terhadap ekuitas;	√	15) liabilities to equities ratio;
16) rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan	√	16) liabilities to total assets ratio; and
17) informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya;	√	17) other information and financial ratios relevant to the Issuer or Public Company and type of industry;
b. Informasi Saham	26, 106	b. Stock Information
Informasi Saham (jika ada) paling sedikit memuat:		Stock Information (if any) at least contains:
1) saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan (jika ada) yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:	N/A	1) shares issued for each three-month period in the last 2 (two) fiscal years (if any), at least covering:
a) jumlah saham yang beredar;		a) number of outstanding shares;

Keterangan	Halaman Page	Description
b) kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;		b) market capitalization based on the price at the Stock Exchange where the shares listed on;
c) harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan		c) highest share price, lowest share price, closing share price at the Stock Exchange where the shares listed on; and
d) volume perdagangan pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;		d) share volume at the Stock Exchange where the shares listed on;
Informasi pada huruf a) diungkap oleh Emiten yang merupakan Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat maupun tidak tercatat di Bursa Efek;		Information in point a) should be disclosed by the Issuer, the public company whose shares is listed or not listed in the Stock Exchange;
Informasi pada huruf b), c), dan huruf d) hanya diungkapkan jika Emiten merupakan Perusahaan Terbuka dan sahamnya tercatat di Bursa Efek;		Information in point b), point c), and point d) only be disclosed if the Issuer is a public company whose shares is listed in the Stock Exchange;
2) dalam hal terjadi aksi korporasi, seperti pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:	N/R	2) in the event of corporate actions, including stock split, reverse stock, dividend, bonus share, and change in par value of shares, then the share price referred to in point 1), should be added with explanation on:
a) tanggal pelaksanaan aksi korporasi;		a) date of corporate action;
b) rasio pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham;		b) stock split ratio, reverse stock, dividend, bonus shares, and change in par value of shares;
c) jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; dan		c) number of outstanding shares prior to and after corporate action; and
d) harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi;		d) share price prior to and after corporate action;
3) dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*), dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*) dalam tahun buku, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*) tersebut; dan	N/R	3) in the event that the company's shares were suspended and/or delisted from trading during the year under review, then the Issuers or Public Company should provide explanation on the reason for the suspension and/or delisting; and
4) dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*) sebagaimana dimaksud pada angka 3) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*) tersebut;	N/R	4) in the event that the suspension and/or delisting as referred to in point 3) was still in effect until the date of the Annual Report, then the Issuer or the Public Company should also explain the corporate actions taken by the company in resolving the suspension and/or delisting;
c. Laporan Direksi	68-83	c. The Board of Directors Report
Laporan Direksi paling sedikit memuat:		The Board of Directors Report should at least contain the following items:
1) uraian singkat mengenai kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit meliputi:		1) the performance of the Issuer or Public Company, at least covering:
a) strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;	71	a) strategy and strategic policies of the Issuer or Public Company;

Keterangan	Halaman Page	Description
b) perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan	72	b) comparison between achievement of results and targets; and
c) kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik;	76	c) challenges faced by the Issuer or Public Company;
2) gambaran tentang prospek usaha;	78	2) description on business prospects;
3) penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; dan	80	3) implementation of good corporate governance by Issuer or Public Company; and
4) perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya (jika ada);	81	4) changes in the composition of the Board of Directors and the reason behind (if any);
d. Laporan Dewan Komisaris	48-65	d. The Board of Commissioners Report
Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat:		The Board of Commissioners Report should at least contain the following items:
1) penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik;	50	1) assessment on the performance of the Board of Directors in managing the Issuer or the Public Company;
2) pengawasan terhadap implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik;	53	2) supervision on the implementation of the strategy of the Issuer or Public Company;
3) pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi;	61	3) view on the business prospects of the Issuer or Public Company as established by the Board of Directors;
4) pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;	58	4) view on the implementation of the corporate governance by the Issuer or Public Company;
5) perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya (jika ada); dan	63	5) changes in the composition of the Board of Commissioners and the reason behind (if any); and
6) frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota Direksi;	62	6) the frequency and procedure of providing advice to members of the Board of Directors;
e. Profil Emiten atau Perusahaan Publik	86-172	e. Profile of the Issuer or Public Company
Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat:		Profile of the Issuer or Public Company should cover at least:
1) nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku;	88-91	1) name of Issuer or Public Company, including change of name, reason of change, and the effective date of the change of name during the year under review;
2) akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:	88, 157-161	2) access to Issuer or Public Company, including branch office or representative office, where public can have access of information of the Issuer or Public Company, which include:
a) alamat;	√	a) address;
b) nomor telepon;	√	b) telephone number;
c) nomor faksimile;	√	c) facsimile number;
d) alamat surat elektronik; dan	√	d) e-mail address; and
e) alamat Situs *Web*;	√	e) website address;
3) riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik;	89	3) brief history of the Issuer or Public Company;
4) visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik;	100	4) vision and mission of the Issuer or Public Company;
5) kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan;	94	5) line of business according to the latest Articles of Association, and types of products and/or services produced;

Keterangan	Halaman Page	Description
6) struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, disertai dengan nama dan jabatan;	98	6) structure of organization of the Issuer or Public Company in chart form, at least 1 (one) level below the Board of Directors, with the names and titles;
7) profil Direksi, paling sedikit memuat:	116-126	7) the Board of Directors profiles include:
a) nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;	√	a) name and short description of duties and functions;
b) foto terbaru;	√	b) latest photograph;
c) usia;	√	c) age;
d) kewarganegaraan;	√	d) citizenship;
e) riwayat pendidikan;	√	e) education;
f) riwayat jabatan, meliputi informasi:		f) history position, covering information on:
(1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	√	(1) legal basis for appointment as member of the Board of Directors to the said Issuer or Public Company;
(2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	√	(2) dual position, as member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or member of committee, and other position (if any); and
(3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	√	(3) working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
g) pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti anggota Direksi dalam meningkatkan kompetensi dalam tahun buku (jika ada); dan	√	g) competency enhancement education and/or training program for member of the Board of Directors during the year under review (if any); and
h) hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama (jika ada) meliputi nama pihak yang terafiliasi;	√	h) disclosure of affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and major shareholders (if any) including name of the affiliated party;
8) profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	110-115	8) the Board of Commissioners profiles, at least include:
a) nama;	√	a) name;
b) foto terbaru;	√	b) latest photograph;
c) usia;	√	c) age;
d) kewarganegaraan;	√	d) citizenship;
e) riwayat pendidikan;	√	e) education;
f) riwayat jabatan, meliputi informasi:	√	f) history position, covering information on:
(1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	√	(1) legal basis for the appointment as member of the Board of Commissioners who is not Independent Commissioner at the said Issuer or Public Company;
(2) dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	√	(2) legal bases for the first appointment as member of the Board of Commissioners who also Independent Commissioner at the said Issuer or Public Company;

Keterangan	Halaman Page	Description
(3) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	√	(3) dual position; as member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or member of committee and other position (if any); and
(4) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	√	(4) working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
g) pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti anggota Dewan Komisaris dalam meningkatkan kompetensi dalam tahun buku (jika ada);	√	g) competency enhancement education and/or training program for member of the Board of Commissioner during the year under review (if any);
h) hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham utama (jika ada) meliputi nama pihak yang terafiliasi; dan	√	h) affiliation with other members of the Board of Commissioners, and major shareholders (if any) including name of the affiliated party; and
i) pernyataan independensi Komisaris Independen dalam hal Komisaris Independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode (jika ada);	N/R	i) statement of independence of Independent Commissioner in the event that the Independent Commissioner has been appointed more than 2 (two) periods (if any);
9) dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya;	√	9) in the event that there were changes in the composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors occurring between the period after year-end until the date the Annual Report submitted, then the last and the previous composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors shall be stated in the Annual Report;
10) jumlah karyawan dan deskripsi sebaran tingkat pendidikan dan usia karyawan dalam tahun buku;	129	10) number of employees and description of distribution of education level and age of the employee in the year under review;
11) nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada akhir tahun buku, yang terdiri dari:	26, 106	11) names of shareholders and ownership percentage at the end of the fiscal year, including:
a) pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik;		a) shareholders having 5% (five percent) or more shares of Issuer or Public Company;
b) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik; dan		b) Commissioners and Directors who own shares of the Issuers or Public Company; and
c) kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik;		c) groups of public shareholders, or groups of shareholders, each with less than 5% (five percent) ownership shares of the Issuers or Public Company;
12) jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi:	N/R	12) number of shareholders and ownership percentage at the end of the fiscal year, based on:
a) kepemilikan institusi lokal;		a) ownership of local institutions;
b) kepemilikan institusi asing;		b) ownership of foreign institutions;
c) kepemilikan individu lokal; dan		c) ownership of local individual; and
d) kepemilikan individu asing;		d) ownership of foreign individual;

Keterangan	Halaman Page	Description
13) informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;	26, 106	13) information on major shareholders and controlling shareholders the Issuers of Public Company, directly or indirectly, and also individual shareholder, presented in the form of scheme or diagram;
14) nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi Emiten atau Perusahaan Publik tersebut (jika ada);	142-147	14) name of subsidiaries, associated companies, joint venture controlled by Issuers or Public Company, with entity, percentage of stock ownership, line of business, total assets and operating status of the Issuers of Public Company (if any);
Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut;	142	For subsidiaries, include the addresses of the said subsidiaries;
15) kronologi pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan (jika ada);	N/R	15) chronology of share listing, number of shares, par value, and bid price from the beginning of listing up to the end of the financial year, and name of Stock Exchange where the Issuers of Public Company shares are listed;
16) kronologi pencatatan Efek lainnya selain Efek sebagaimana dimaksud pada angka 15), yang paling sedikit memuat nama Efek, tahun penerbitan, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat Efek (jika ada);	26, 106	16) chronology of securities listing in addition to the said security in point 15), which at least should contain the name of the Securities, year of issuance, date of maturity, bid price, and rating of the securities (if any);
17) nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal;	152-156	17) name and address of capital market supporting institutions and/or professionals;
18) dalam hal terdapat profesi penunjang pasar modal yang memberikan jasa secara berkala kepada Emiten atau Perusahaan Publik, diungkapkan informasi mengenai jasa yang diberikan, komisi (fee), dan periode penugasan; dan	√	18) in the event that the capital market supporting professionals provide services on a regular basis to the Issuer or the Public Company, then information on the services provided, fee and period of assignment should be disclosed; and
19) penghargaan dan/atau sertifikasi yang diterima Emiten atau Perusahaan Publik baik yang berskala nasional maupun internasional dalam tahun buku terakhir (jika ada), yang memuat:	164-169	19) awards and/or certification of national and international scales bestowed on the Issuer or Public Company during the last fiscal year (if any), covering:
a) nama penghargaan dan/atau sertifikasi;	√	a) name of award and/or certification;
b) badan atau lembaga yang memberikan; dan	√	b) organization/institution that gives the awards; and
c) masa berlaku penghargaan dan/atau sertifikasi (kalau ada);	√	c) award/certificate validity period (if any);
f. Analisis dan Pembahasan Manajemen		f. Management Discussion and Analysis
Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat:	174-271	Management Analysis and Discussion Annual should contain discussion and analysis on financial statements and other material information emphasizing material changes that occurred during the year under review, at least including:
1) tinjauan operasi per segmen operasi sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	188	1) operational review per business segment, according to the type of industry of the Issuer or Public Company including:
a) produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya;	195	a) production, including process, capacity, and growth;
b) pendapatan/penjualan; dan	189	b) income/sales; and
c) profitabilitas;	203, 271	c) profitability;

Keterangan	Halaman Page	Description
2) kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai:	204-222	2) comprehensive financial performance analysis which includes a comparison between the financial performance of the last 2 (two) fiscal years, and explanation on the causes and effects of such changes, among others concerning:
a) aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;	205-210	a. current assets, non-current assets, and total assets;
b) liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas;	210-212	b) short term liabilities, long term liabilities, total liabilities;
c) ekuitas;	213	c) equities;
d) pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan	213-220	d) sales/operating revenues, expenses and profit (loss), other comprehensive revenues, and total comprehensive profit (loss); and
e) arus kas;	220-222	e) cash flows;
3) kemampuan membayar utang dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	222-224	3) the capacity to pay debts by including the computation of relevant ratios;
4) tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	225	4) accounts receivable collectability of the Issuer or Public Company, including the computation of the relevant ratios;
5) struktur modal (*capital structure*) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (*capital structure*) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud;		5) capital structure and management policies concerning capital structure, including the basis for determining the said policy;
6) bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit meliputi:	227-229	6) discussion on material ties for the investment of capital goods, including the explanation on at least:
a) tujuan dari ikatan tersebut;	√	a) the purpose of such ties;
b) sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut;	√	b) source of funds expected to fulfill the said ties;
c) mata uang yang menjadi denominasi; dan	√	c) currency of denomination; and
d) langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;	√	d) steps taken by the Issuer of Public Company to protect the position of a related foreign currency against risks;
7) bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:	229-231	7) discussion on investment of capital goods which was realized in the last fiscal year, at least include:
a) jenis investasi barang modal;	√	a) type of investment of capital goods;
b) tujuan investasi barang modal; dan	√	b) objective of the investment of capital goods; and
c) nilai investasi barang modal yang dikeluarkan;	√	c) value of the investment of capital goods;
8) informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada);	233-238	8) material Information and facts that occurring after the date of the accountant's report (if any);
9) prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya;	238-240	9) information on the prospects of the Issuer or the Company in connection with industry,economy in general, accompanied with supporting quantitative data if there is a reliable data source;
10) perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:	231-232	10) comparison between target/projection at beginning of year and result (realization), concerning:
a) pendapatan/penjualan;	√	a) income/sales;

Keterangan	Halaman Page	Description
b) laba (rugi);	√	b) profit (loss);
c) struktur modal (capital structure); atau	N/A	c) capital structure; or
d) hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	√	d) others that deemed necessary for the Issuer or Public Company;
11) target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai:	232-233	11) target/projection at most for the next one year of the Issuer or Public Company, concerning:
a) pendapatan/penjualan;	√	a) income/sales;
b) laba (rugi);	√	b) profit (loss);
c) struktur modal (*capital structure*);	N/A	c) capital structure; or
d) kebijakan dividen; atau		d) dividend policy;
e) hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	√	e) or others that deemed necessary for the Issuer or Public Company;
12) aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar;	240-253	12) marketing aspects of the company's products and/or services the Issuer or Public Company, among others marketing strategy and market share;
13) uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada), paling sedikit:	254	13) description regarding the dividend policy during the last 2 (two) fiscal years, at least:
a) kebijakan dividen;	√	a) dividend policy;
b) tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas;	√	b) the date of the payment of cash dividend and/or date of distribution of non-cash dividend;
c) jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan	√	c) amount of cash per share (cash and/or non cash); and
d) jumlah dividen per tahun yang dibayar;	√	d) amount of dividend per year paid;
14) realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, dengan ketentuan:	254	14) use of proceeds from Public Offerings, under the condition of:
a) dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan		a) during the year under review, on which the Issuer has the obligation to report the realization of the use of proceeds, then the realization of the cumulative use of proceeds until the year end should be disclosed; and
b) dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut;		b) in the event that there were changes in the use of proceeds as stipulated in the Regulation of the Financial Services Authority on the Report of the Utilization of Proceeds from Public Offering, then Issuer should explain the said changes;

Keterangan	Halaman Page	Description
15) informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi Afiliasi, dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, antara lain memuat:	257-264	15) material information (if any), among others concerning investment, expansion, divestment, acquisition, debt/capital restructuring, transactions with related parties and transactions with conflict of interest that occurred during the year under review, among others include:
a) tanggal, nilai, dan objek transaksi;		a) transaction date, value, and object;
b) nama pihak yang melakukan transaksi;		b) name of transacting parties;
c) sifat hubungan Afiliasi (jika ada);		c) nature of related parties (if any);
d) penjelasan mengenai kewajaran transaksi; dan		d) description of the fairness of the transaction; and
e) pemenuhan ketentuan terkait;		e) compliance with related rules and regulations;
16) perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan	264-267	16) changes in regulation which have a significant effect on the Issuer or Public Company and impacts on the company (if any); and
17) perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada);	268-269	17) changes in the accounting policy, rationale and impact on the financial statement (if any);
g. Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik	272-457	g. Corporate Governance of the Issuer or Public Company
Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:		Corporate Governance of the Issuer or Public Company contains at least:
1) Direksi, mencakup antara lain:		1) the Board of Directors, covering:
a) tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;	371-378	a) the tasks and responsibilities of each member of the Board of Directors;
b) pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Direksi;	369, 364	b) statement that the Board of Directors has already have board manual or charter;
c) prosedur, dasar penetapan, struktur, dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi, serta hubungan antara remunerasi dengan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;	383-385	c) procedure, legal basis, structure, and amount of remuneration of each member of the Board of Directors, relation between remuneration and performance of the Issuer or Public Company;
d) kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Direksi, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut;	385-391 323-327	d) the policies and the frequency of the meeting of the Board of Directors, including the joint meeting with Board of Commissioners, and attendance of member of the Board of Directors in the said meeting;
e) informasi mengenai keputusan RUPS 1 (satu) tahun sebelumnya, meliputi:	305	e) information on the resolution from the AGM of the previous 1 (one) year, covering:
(1) keputusan RUPS yang direalisasikan pada tahun buku; dan	N/A	(1) AGM resolutions that were realized during the fiscal year; and
(2) alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan;	N/A	(2) explanation for the unrealized resolution;

Keterangan	Halaman Page	Description
f) informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku, meliputi:	297-305	f) information regarding the AGM resolution in the year under review, including:
(1) keputusan RUPS yang direalisasikan pada tahun buku; dan		(1) AGM resolutions that were realized during the fiscal year; and
(2) alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan; dan		(2) explanation for the unrealized resolution;
g) penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi;	396	g) assessment on the performance of the committee under the Board of Directors;
2) Dewan Komisaris, mencakup antara lain:		2) the Board of Commissioners, among others include:
a) tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;	409-310	a) duties and responsibilities of the Board of Commissioners;
b) pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Dewan Komisaris;	309, 364	b) statement that the Board of Commissioner has already have the board manual or charter;
c) prosedur, dasar penetapan, struktur, dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris;	315-317	c) procedure, legal basis, structure, and amount of remuneration for each member of Board of Commissioners;
d) kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat bersama Direksi, dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut;	318-322 323-327	d) policies and frequency of meeting of the Board of Commissioners, including meeting with the Board of Directors, and attendance of each member of the Board of Commissioners in the said meetings;
e) kebijakan Emiten atau Perusahaan Publik tentang penilaian terhadap kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan pelaksanaannya, paling sedikit meliputi:	328-330 391-393	e) policies of the Issuer or Public Company regarding the assessment on the performance of the Board of Directors and Board of Commissioners and the implementation, at least covering:
(1) prosedur pelaksanaan penilaian kinerja;	√	(1) procedure for the implementation of performance assessment;
(2) kriteria yang digunakan; dan	√	(2) criteria for assessment; and
(3) pihak yang melakukan penilaian;	√	(3) assessor;
f) penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris; dan	347, 355, 362	f) assessment on the performance of the committees under the Board of Commissioners; and
g) dalam hal Dewan Komisaris tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, dimuat informasi paling sedikit mengenai:	N/R	g) in the event that the Board of Commissioners does not establish the Nomination and Remuneration Committee, than should contain at least:
(1) alasan tidak dibentuknya komite; dan		(1) reason not to establish the committee; and
(2) prosedur nominasi dan remunerasi yang dilakukan dalam tahun buku;		(2) procedure of nomination and remuneration performed in the year under review;
3) Dewan Pengawas Syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat:	N/R	3) Sharia Supervisory Board, for Issuer or Public Company that conduct business based on sharia law, as stipulated in the articles of association, at least containing:
a) nama;		a) name;
b) tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; dan		b) duty and responsibility of Sharia Supervisory Board; and

Keterangan	Halaman Page	Description
c) frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik;		c) frequency and procedure in providing advice and suggestion, as well as the compliance of Sharia Principles by the Issuer or Public Company in the Capital Market;
4) Komite Audit, mencakup antara lain:	340-349	4) Audit Committee, among others covering:
a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	√	a) name and position in the committee;
b) usia;	√	b) age;
c) kewarganegaraan;	√	c) citizenship;
d) riwayat pendidikan;	√	d) education background;
e) riwayat jabatan, meliputi informasi:	√	e) history of position; including:
(1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	√	(1) legal basis for the appointment as member of the committee;
(2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	√	(2) dual position, as member of Board of Commissioners, member of Board of Directors, and/or member of committee, and other position (if any); and
(3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	√	(3) working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
f) periode dan masa jabatan anggota Komite Audit;	343	f) period and terms of office of the member of Audit Committee;
g) pernyataan independensi Komite Audit;	343	g) statement of independence of the Audit Committee;
h) kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Komite Audit dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat tersebut;	346	h) policies and implementation of the frequency of meeting of the Audit Committee and attendance of member of Audit Committee;
i) pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan	341-343	i) education and/or training during the year under review (if any); and
j) pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (*charter*) Komite Audit;	346	j) the activities of the Audit Committee in the year under review, in accordance with the Audit Committee Charter;
5) komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi dan/atau Dewan Komisaris, seperti Komite Nominasi dan Remunerasi, mencakup antara lain:	349-357 357-364	5) other committee of the Issuer or the Public Company formed to support the function and duty of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners, such as Nomination and Remuneration Committee, containing:
a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	√	a) name and position in the Committee;
b) usia;	√	b) age;
c) kewarganegaraan;	√	c) citizenship;
d) riwayat pendidikan;	√	d) education background;
e) riwayat jabatan, meliputi informasi:	√	e) history of position, including:
(1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	√	(1) legal basis for the appointment as member of the committee;
(2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	√	(2) dual position, as member of Board of Commissioners, member of Board of Directors, and/or member of committee, and other position (if any); and

Keterangan	Halaman Page	Description
(3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	√	(3) working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
f) periode dan masa jabatan anggota komite;	352, 359	f) period and terms of office of the member of Audit Committee;
g) uraian tugas dan tanggung jawab;	354, 360	g) description of duty and responsibility;
h) pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*) komite;	353, 360	h) statement that the Committee has already have the Charter;
i) pernyataan independensi komite;	353, 359	i) statement of independence of the Committee;
j) kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut;	355, 361	j) policies and frequency of meeting of the committee, and attendance of each member of the committee in the said meetings;
k) pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan	350-352 358-359	k) education and/or training during the year under review (if any); and
l) uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku;	354, 361	l) brief description on the activities of the committee;
6) Sekretaris Perusahaan, mencakup antara lain:	398-401	6) Corporate Secretary, including:
a) nama;	√	a) name;
b) domisili;	√	b) domicile;
c) riwayat jabatan, meliputi informasi:		c) history of position, including:
(1) dasar hukum penunjukan sebagai Sekretaris Perusahaan; dan	√	(1) legal basis for the appointment as Corporate Secretary; and
(2) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	√	(2) working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
d) riwayat pendidikan;	√	d) education background;
e) pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku; dan	√	e) education and/or training during the year under review; and
f) uraian singkat pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan pada tahun buku;	400	f) brief description on the implementation of duties of the Corporate Secretary in the year under review;
7) Unit Audit Internal, mencakup antara lain:	402-409	7) Internal Audit Unit, among others including:
a) nama kepala Unit Audit Internal;	√	a) name of Head of Internal Audit Unit;
b) riwayat jabatan, meliputi informasi:		b) history of position, including:
(1) dasar hukum penunjukan sebagai kepala Unit Audit Internal; dan	√	(1) legal basis for the appointment as Head of Internal Audit Unit; and
(2) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	√	(2) working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
c) kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada);	√	c) qualification or certification as internal auditor (if any);
d) pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku;	√	d) education and/or training during the year under review;
e) struktur dan kedudukan Unit Audit Internal;	403	e) structure and position of Internal Audit Unit;
f) uraian tugas dan tanggung jawab;	406	f) description of duties and responsibilities;

Keterangan	Halaman Page	Description
g) pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) Unit Audit Internal; dan	405	g) statement that the Internal Audit Unit has already have Internal Audit Unit charter; and
h) uraian singkat pelaksanaan tugas Unit Audit Internal pada tahun buku;	408-409	h) brief description on the implementation of duty of Internal Audit Unit during the year under review;
8) uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	420-422	8) description on internal control system adopted by the Issuer or Public Company, at least covering:
a) pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; dan	√	a) financial and operational control, and compliance to the other prevailing rules; and
b) tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal;	√	b) review on the effectiveness of internal control systems;
9) sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	411-417	9) risk management system implemented by the company, at least includes:
a) gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik;	411-412	a) general description about the company's risk management system the Issuer or Public Company;
b) jenis risiko dan cara pengelolaannya; dan	413-416	b) types of risk and the management; and
c) tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik;	416-417	c) review the effectiveness of the risk management system applied by the Issuer or Public Company;
10) perkara penting yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), antara lain meliputi:	428-431	10) important cases faced by the Issuer or Public Company, subsidiaries, current members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, among others include:
a) pokok perkara/gugatan;	√	a) substance of the case/claim;
b) status penyelesaian perkara/gugatan; dan	√	b) status of settlement of case/claim; and
c) pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik;	√	c) potential impacts on the condition of the Issuer or Public Company;
11) informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas Pasar Modal dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada);	431	11) information about administrative sanctions imposed to Issuer or Public Company, members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, by the Capital Market Authority and other authorities during the last fiscal year (if any);
12) informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi:	435-438	12) information about codes of conduct of the Issuer or Public Company, includes:
a) pokok-pokok kode etik;	√	a) key points of the code of conduct;
b) bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan	√	b) socialization of the code of conduct and enforcement; and
c) pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;	√	c) statement that the code of conduct is applicable for the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees of the Issuer of Public Company;
13) informasi mengenai budaya perusahaan (*corporate culture*) atau nilai-nilai perusahaan (jika ada);	103-104	13) information about corporate culture (if any) of the Issuer or Public Company;

Keterangan	Halaman Page	Description
14) uraian mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain mengenai:	254, 441	14) description of employee or management stock ownership program of the Issuer or Public Company, among others contains:
a) jumlah saham dan/atau opsi;		a) number of share and/or option;
b) jangka waktu pelaksanaan;		b) period;
c) persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan		c) requirement for eligible employee and/or management; and
d) harga pelaksanaan;		d) exercised price;
15) uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) di Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain meliputi:	442-445	15) description of whistleblowing system at the Issuer or Public Company (if any), among others include:
a) cara penyampaian laporan pelanggaran;	√	a) mechanism for violation reporting;
b) perlindungan bagi pelapor;	√	b) protection for the whistleblower;
c) penanganan pengaduan;	√	c) handling of violation reports;
d) pihak yang mengelola pengaduan; dan	√	d) unit responsible for handling of violation report; and
e) hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit meliputi:	√	e) results from violation report handling, at least includes:
(1) jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan	√	(1) number of complaints received and processed during the fiscal year; and
(2) tindak lanjut pengaduan;	√	(2) follow up of complaints;
16) penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi:	437-443	16) implementation of the Guidelines of Corporate Governance for Public Companies for Issuer issuing Equity-based Securities or Public Company, including:
a) pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau	√	a) statement regarding recommendation that have been implemented; and/or
b) penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada);	√	b) description of recommendation that have not been implemented, along with the reason and alternatives of implementation (if any);
h. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik	458-577	h. Social and Environmental Responsibility of the Issuer or Public Company
1) Informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan, antara lain terkait aspek:		1) Information on social and environmental responsibility of the Issuer or Public Company that covers policies, types of programs, and cost, among others related to:
a) lingkungan hidup, antara lain:	514-539	a) environment, among others:
(1) penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang;	532	(1) the use of environmentally friendly and recyclable materials and energy;
(2) sistem pengolahan limbah Emiten atau Perusahaan Publik;	535	(2) the waste treatment systems of the Issuer or Public Company;
(3) mekanisme pengaduan masalah lingkungan; dan	527	(3) mechanism for filling complaint on environmental issues; and
(4) sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki;	537	(4) environmental certifications;

Keterangan	Halaman Page	Description
b) praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, antara lain:	500-512	b) employment practices, occupational health and safety, among others:
(1) kesetaraan gender dan kesempatan kerja;	500-502	(1) gender equality and equal work opportunity;
(2) sarana dan keselamatan kerja;	507	(2) work and safety facilities;
(3) tingkat perpindahan (turnover) karyawan;	511	(3) employee turnover;
(4) tingkat kecelakaan kerja;	511	(4) work incident rate;
(5) pendidikan dan/atau pelatihan;	510	(5) education and/or training;
(6) remunerasi; dan	510	(6) remuneration; and
(7) mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan;	507	(7) mechanism for filling complaint on employment issues;
c) pengembangan sosial dan kemasyarakatan, antara lain:	540-555	c) social and community development, among others:
(1) penggunaan tenaga kerja lokal;		(1) the use of local work force;
(2) pemberdayaan masyarakat sekitar Emiten atau Perusahaan Publik antara lain melalui penggunaan bahan baku yang dihasilkan oleh masyarakat atau pemberian edukasi;	547-548	(2) empowerment of local communities among others through the use of raw material produced by the community or by providing education;
(3) perbaikan sarana dan prasarana sosial;	552-554	(3) improvement of public social facilities and infrastructure;
(4) bentuk donasi lainnya; dan	548	(4) other form of donation; and
(5) komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi di Emiten atau Perusahaan Publik, serta pelatihan mengenai anti korupsi (jika ada);	478-488	(5) dissemination of the policies and procedures of anti-corruption at the Issuers or Public Company, and training on anti-corruption (if any);
d) tanggung jawab barang dan/atau jasa, antara lain:	556-577	d) products and/or services responsibilities, among others:
(1) kesehatan dan keselamatan konsumen;	564-567, 576	(1) consumers' health and safety;
(2) informasi barang dan/atau jasa; dan	241-249	(2) products and/or services information; and
(3) sarana, jumlah, dan penanggulangan atas pengaduan konsumen.	547-573	(3) facilities, number, and resolution of consumer complaint.
2) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyajikan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada angka 1) pada laporan tersendiri seperti laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau laporan keberlanjutan (*sustainability report*), Emiten atau Perusahaan Publik dikecualikan untuk mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Laporan Tahunan; dan	√	2) In the event that the Issuer or the Public Company imparts information on social and environmental responsibility as referred to in point 1) in separate report such corporate social and environmental responsibility report, or sustainability report, then the Issuers or the Public Company is excluded from disclosing information on social and environmental responsibility in Annual Report; and
3) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan;	√	3) The said report in point 2) should be submitted to the Financial Service Authority along with the Annual Report;
i. Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit	578	i. Audited Annual Financial Statement

Keterangan	Halaman Page	Description
Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh Akuntan. Laporan keuangan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan berkala Perusahaan Efek dalam hal Emiten merupakan Perusahaan Efek; dan		Financial Statements included in Annual Report should be prepared in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia and audited by an Accountant. The said financial statement should be included with statement of responsibility for financial report as stipulated in the legislations in the Capital Markets sector governing the responsibility of the Board of Directors on the financial report or the legislations in the Capital Markets sector governing the periodic reports of securities company in the event the Issuer is a Securities Company; and
j. Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan	826	j. Letter of Statement of the Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the Responsibility for Annual Reporting
Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.	826	Letter of statement of the Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the responsibility for Annual Reporting should be prepared according to the format of letter of statement of member of Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the responsibility for Annual Reporting as attached in the Attachment, which is an integral part of this Circulation Letter of the Financial Services Authority.

Catatan | Note: N/A; Not Available
N/R: Not Relevant

Kriteria Annual Report Award 2018

Annual Report 2018 Criteria

Kriteria Annual Report Awards 2018

2018 Annual Report Award Criteria

Kriteria dan Penjelasan		Halaman Page	Criteria and Explanations	
I.	**Umum**		**I.**	**General**
1.	Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris	√	1.	The Annual Report shall be written in good and correct Indonesian, and is recommended to be presented in English
2.	Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca	√	2.	The Annual Report shall be printed with good quality using readable type and size of fonts
3.	Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas	√	3.	The Annual Report shall present clear identity of the company
4.	Nama perusahaan dan tahun *annual report* ditampilkan di: a. Sampul muka; b. Samping; c. Sampul belakang; dan d. Setiap halaman.	√	4.	Company name and the annual report financial year shall be presented on: a. Front Cover; b. Side Cover; c. Back Cover; and d. Every page
5.	Laporan tahunan ditampilkan di *website* perusahaan Mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir.	√	5.	The Annual Report shall be posted in the company's website Including the latest annual report as well as those for the last four years, at least.
II.	**Ikhtisar Data Keuangan Penting**		**II.**	**Key Financial Highlights**
1.	Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun Informasi memuat antara lain: a. Penjualan/pendapatan usaha; b. Laba (rugi): • Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan • Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; c. Penghasilan komprehensif periode berjalan : • Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan • Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; dan d. Laba (rugi) per saham. Catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba (rugi) dan penghasilan komprehensif periode berjalan secara total.	22	1.	Income statement in comparison for 3 (three) financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years Information contains the following: a. Income; b. Profit (loss): • Attributable to equity holders of the parent entity; and • Attributable to non controlling interest; c. Total comprehensive profit (loss): • Attributable to equity holders of the parent entity; and • Attributable to non controlling interest; d. Earning (loss) per share. Note: If the company does not have subsidiaries, the profit (loss) and other comprehensive income is presented in total.
2.	Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun Informasi memuat antara lain: a. Jumlah investasi pada entitas asosiasi; b. Jumlah aset; c. Jumlah liabilitas; dan d. Jumlah ekuitas.	22	2.	Financial position in comparison for 3 (three) financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years Information contains the following: a. Total investment on associates; b. Total assets c. Total liabilities; and d. Total equity.

Kriteria dan Penjelasan		Halaman Page	Criteria and Explanations	
3.	Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan.	23	3.	Financial ratio in comparison for 3 (three) financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years Information covers 5 (five) financial ratios, which are generally applied and relevant to the company's industry.
4	Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik a. Jumlah saham yang beredar; b. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: • Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; • Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan • Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. c. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang: • Harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan • Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. Untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kapitalisasi pasar, informasi harga saham, dan volume perdagangan saham, agar diungkapkan.	N/A	4	Share price information in tables and charts a. Number of shares outstanding; b. The table forms contain the following information: • Market capitalization based on share price on the Stock Exchange where the shares are listed; • Highest, lowest and closing share price based on share price on the Stock Exchange where the shares are listed; and • Trading volume of shares on the Stock Exchange where the shares are listed. c. The graph forms contain at least the following information: • The closing price of shares based on share price on the Stock Exchange where the shares are listed; and • Trading volume of shares on the Stock Exchange where the shares are listed For each quarter in the latest 2 (two) financial years. Note: Should be disclosed if the company does not have market capitalization, share price, and share trading volume.
5.	Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir Informasi memuat: a. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (*outstanding*); b. Tingkat bunga/imbalan; c. Tanggal jatuh tempo; dan d. Peringkat obligasi/sukuk tahun 2017 dan 2018. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/sukuk/obligasi konversi, agar diungkapkan.	26	5.	Information regarding outstanding bonds, sukuk or convertible bonds, in 2 (two) latest financial years Information contains: a. Number of outstanding bonds, sukuk or convertible bonds; b. Interest rate/yield; c. Maturity date; and d. Rating of bonds/sukuk in 2017 and 2018. Note: Should be disclosed if the company does not have outstanding bonds, sukuk or convertible bonds.
III.	**Laporan Dewan Komisaris dan Direksi**		**III.**	**Board of Commissioners and Board of Directors' Report**
1.	Laporan Dewan Komisaris Memuat hal-hal sebagai berikut: a. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya; b. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya; c. Pandangan atas penerapan/pengelolaan *whistleblowing system* (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut; dan d. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya.	48-65	1.	Board of Commissioners' Report Contain the following: a. Assessment on the performance of the Board of Directors in managing the company and the basis for such evaluation; b. Views on the business prospects of the company as prepared by the Board of Directors and the basis for such consideration; c. Views on the implementation/management of the company's whistleblowing system (WBS), and the role of the Board of Commissioners in the WBS; and d. Changes in the composition of the Board of Commissioners (if any) and the reason for such changes.

Kriteria dan Penjelasan		Halaman Page	Criteria and Explanations	
2.	Laporan Direksi Memuat hal-hal sebagai berikut: a. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain: • kebijakan strategis; • perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan • kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dan langkah-langkah penyelesaiannya; b. Analisis tentang prospek usaha; c. Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan pada tahun buku; dan d. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya.	68-83	2.	Board of Directors' report Contain the following: a. Analysis of the company's performance, covering among others: • strategic policies; • comparison between targets and achievements; and • challenges faced by the company and initiatives to deal with those challenges; b. Analysis on business prospects; c. Developments in the implementation of GCG during the fiscal year; and d. Changes in the composition of the Board of Directors (if any) and the reason for such changes.
3	Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Memuat hal-hal sebagai berikut: a. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri; b. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan; c. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan d. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.	826	3	Signatures of members of the Board of Commissioners and Board of Directors Contain the following: a. Signatures on a separate page; b. Statement of responsibility of the Board of Commissioners and Board of Directors for the accuracy of the contents of the Annual Report; c. Signed by all members of the Board of Commissioners and Board of Directors by stating their names and position; and d. Written explanation in separate letter from the person(s) concerned in the event that member(s) of Board of Commissioners or Board of Directors fail to sign the annual report; or: written explanation in separate letter from other member(s) in the event that there is no written explanation from the person(s) concerned.
IV.	**Profil Perusahaan**		**IV.**	**Company Profile**
1.	Nama dan alamat lengkap perusahaan Informasi memuat antara lain: nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan *website*.	88	1.	Name and complete address of the company Information contains, among others, name and address, post code, telephone number, fax, email and website.
2.	Riwayat singkat perusahaan Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan. Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan	89, 91	2.	Brief history of the company Contain among others: date/year of establishment, name of the company, change of name (if any), and effective date of the change of name. Note: to be disclosed if the company never had a change of name
3.	Bidang usaha Uraian mengenai antara lain: a. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir; b. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan c. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.	94	3.	Line of business Description of, among others: a. The line of business as stated in the latest Articles of Association; b. Business activities; and c. Product and/or services offered.
4	Struktur Organisasi Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah Direksi.	98	4	Organization structure Diagram of organization structure, containing name and position of personnel up to one level below Director, at least
5.	Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan Mencakup: a. Visi perusahaan; b. Misi perusahaan; c. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direviu dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris pada tahun buku; dan d. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (*corporate culture*) yang dimiliki perusahaan.	100, 103	5.	Vision, Mission and Corporate Culture Covers: a. Vision; b. Mission; c. Statement that the vision and mission have been reviewed and approved by the Board of Commissioners/Directors in the fiscal year; and d. Statement on the corporate culture.

Kriteria dan Penjelasan		Halaman Page	Criteria and Explanations	
6.	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris Informasi memuat antara lain: a. Nama; b. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); c. Umur; d. Domisili; e. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); f. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan g. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	110-115	6.	Profiles of members of the Board of Commissioners Contain information on: a. Name; b. Position and period in position (including position(s) held at other company/institution); c. Age; d. Domicile; e. Education (study field and education institution); f. Work experience (position, company, and period in position); and g. History of assignments (period and position) as member of the Board of Commissioners at the company since the first appointment.
7.	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi Informasi memuat antara lain: a. Nama; b. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); c. Umur; d. Domisili; e. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); f. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan g. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Direksi di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	116-126	7.	Profiles of members of the Board of Directors Contain information on: a. Name; b. Position and period in position (including position(s) held at other company/institution); c. Age; d. Domicile; e. Education (study field and education institution); f. Work experience (position, company, and period in position); and g. History of assignments (period and position) as member of the Board of Directors at the company since the first appointment.
8.	Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan data pengembangan kompetensi karyawan yang mencerminkan adanya kesempatan untuk masing-masing level organisasi Informasi memuat antara lain: a. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi; b. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan; c. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian; d. Data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan; dan e. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku.	129-133	8.	Total number of employees (comparative for 2 years) and data on employee competence development programs reflecting equal opportunities for each level of the organization Information contains, among others: a. Number of employees at each level of the organization; b. Number of employees by education; c. Number of employees by employment status; d. Data on employee competence development programs during the fiscal year, concerning position of participants, type of training, and purpose of training; and e. The costs of employee competence development programs in the fiscal year.
9.	Komposisi Pemegang saham Mencakup antara lain: a. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya; b. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi: • Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham; dan • Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%. c. Nama Direktur dan Komisaris serta persentase kepemilikan sahamnya secara langsung dan tidak langsung. Catatan: apabila Direktur dan Komisaris tidak memiliki saham langsung dan tidak langsung, agar diungkapkan.	106, 293 N/R	9.	Shareholders composition Covering among others: a. Names of the 20 largest shareholders and their shareholding percentage; b. Details of shareholders and shareholding percentage: • Names of shareholders with 5% or more shareholding; and • Group of public shareholders with individual shareholding of less than 5% each. c. Names of Director and Commissioner with direct or indirect share-ownership and the percentage of such shareholding. Note: should be disclosed if the Director and Commissioner does not own shares, directly or indirectly.

	Kriteria dan Penjelasan	Halaman Page		Criteria and Explanations
10.	Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi Dalam bentuk tabel memuat informasi antara lain: a. Nama entitas anak dan/atau asosiasi; b. Persentase kepemilikan saham; c. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan d. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).	142-147	10.	List of subsidiaries and/or associated entities In table form, containing: a. Name of subsidiary and/or associated entity; b. Share-ownership percentage; c. Line of business of subsidiary and/or associated entity; and d. Operational status of subsidiary and/or associated entity (in commercial operation/ not yet in commercial operation).
11.	Struktur grup perusahaan Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi, *joint venture*, dan *special purpose vehicle* (SPV).	148	11.	Corporate group structure Diagram of corporate group structure involving relationship of the parent company, subsidiary, associated entity, joint venture, and special purpose vehicle (SPV).
12.	Kronologi penerbitan saham (termasuk *private placement*) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku Mencakup antara lain: a. Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*); b. Jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*); dan c. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham, agar diungkapkan.	106 N/R	12.	Chronology of share listing (including private placement) and/or share listing from the share issuance up to the end of the fiscal year Covers, among others: a. Year of share issuance, number of shares issued, par value, and share offer price, for each separate corporate action; b. Total number of shares outstanding following the corporate action; and c. The stock exchange where the shares are listed. Note: should be disclosed if the company does not have a chronology of share listing.
13.	Kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku Mencakup antara lain: a. Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; b. Nilai penawaran efek lainnya; c. Nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan; dan d. Peringkat efek. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi penerbitan dan pencatatan efek lainnya, agar diungkapkan	106	13.	Chronology of other securities issuance and/or listing from the time of issuance up until the end of the fiscal year Covers, among others: a. Name of security instrument, year of issuance, interest rate/yield of securities, and maturity date; b. Offering price of other securities; c. The stock exchange where the securities are listed; and d. Rating of securities. Note: should be disclosed if the company does not have chronology of other securities issuance/ listing
14.	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang Informasi memuat antara lain: a. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan; b. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan c. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek.	152	14.	Name and address of supporting institutions and/or professionals Covers, among others: a. Name and address of the company's Share Registrar; b. Name and address of Public Accountant Firm; and c. Name and address of rating agencies.
15.	Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional Informasi memuat antara lain: a. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi; b. Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi; c. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi; dan d. Masa berlaku (untuk sertifikasi).	164	15.	Awards received during the fiscal year, or valid certification in the fiscal year, at both national and international levels Covers, among others: a. Name of award and/or certification; b. Year received/issued; c. Name of institution that issued the award/ certification; and d. Validity period (certification).

Kriteria dan Penjelasan		Halaman Page		Criteria and Explanations
16.	Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada) Memuat informasi antara lain: a. Nama dan alamat entitas anak; dan b. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan	157	16.	Name and address of subsidiaries and/or branch offices or representative offices (if any) Covers information on: a. Name and address of subsidiaries; and b. Name and address of branch/representative office. Note: should be disclosed if the company does not have a subsidiary, branch office or representative office.
17.	Informasi pada *Website* Perusahaan Meliputi paling kurang: a. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu; b. Isi Kode Etik; c. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan; d. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir); e. Profil Dewan Komisaris dan Direksi; dan f. Piagam/*Charter* Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal.	162	17.	Information in the corporate website Covers at the very least: a. Information of shareholders up to the individual ultimate shareholder; b. Contents of the Code of Conduct; c. Information on the General Meeting of Shareholders (GMS), covering at least agenda of the GMS, summary of GMS resolutions, and information of pertinent dates, namely the dates of GMS announcement, GMS invitation, GMS event, and announcement of summary GMS resolutions; d. Annual financial statements (last 5 years); e. Profiles of the Board of Commissioners and Directors; and f. Board manual/Charter of the BoC. BoD, Committees and Internal Audit Unit.
18.	Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal Meliputi paling kurang informasi (jenis dan pihak yang relevan dalam mengikuti): a. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris; b. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Direksi; c. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Audit; d. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi; e. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Lainnya; f. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan; dan g. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Unit Audit Internal. yang diikuti pada tahun buku. Catatan: apabila tidak terdapat pendidikan dan/atau pelatihan pada tahun buku, agar diungkapkan	 110-115 116-126, 380-382 341-343 358-359 350-352 399 403	18.	Training and education for Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit Cover at least information of type of training and participant of: a. Training and/or education for Board of Commissioners; b. Training and/or education for Board of Directors; c. Training and/or education for Audit Committee; d. Training and/or education for Nomination and Remuneration Committee; e. Training and/or education for other Committee(s); f. Training and/or education for Corporate Secretary; and g. Training and/or education for Internal Audit Unit. During the fiscal year. Note: should be disclosed if there are no training and/or education during the fiscal year
V.	**Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan**	**204-291**	**V.**	**Management Discussion and Analysis on the Company Performance**
1.	Tinjauan operasi per segmen usaha Memuat uraian mengenai: a. Penjelasan masing-masing segmen usaha. b. Kinerja per segmen usaha, antara lain: • Produksi; • Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; • Penjualan/pendapatan usaha; dan • Profitabilitas.	176-271 188 189-203 203, 271	1.	Operation review per business segment Includes analysis on: a. Elaboration on each business segment. b. Performance of each business segment, among others: • Production; • Increase/Decrease of production capacity; • Sales/income; and • Profitability.

	Kriteria dan Penjelasan	Halaman Page		Criteria and Explanations
2.	Uraian atas kinerja keuangan perusahaan Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan suatu akun (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: a. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; b. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas; c. Ekuitas; d. Penjualan/pendapatan usaha, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan penghasilan komprehensif periode berjalan; dan e. Arus kas.	204-271 205 210 213 214 220	2.	Description on the Company's financial performance An analysis comparing the performance of the current year and that of the previous year (in the form of narration and tables) and the reasons for the increase/decrease of the accounts, including in: a. Current assets, non-current assets, and total assets; b. Short-term liabilities, long-term liabilities, and total liabilities; c. Equity; d. Sales/operating revenues, expenses, Profit (Loss), other comprehensive income, comprehensive income for the current year; and e. Cash flows.
3.	Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan Penjelasan tentang: a. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan b. Tingkat kolektibilitas piutang.	222-225 222 225	3.	Discussion and analysis on solvability and level of the company receivables collectibility, by presenting relevant ratio calculation in line with the company's type of industry Explanation on: a. Solvability, both short term and long term; and b. Level of receivables collectibility.
4.	Bahasan tentang struktur modal (*capital structure*) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (*capital structure policy*) Penjelasan atas: a. Rincian struktur modal (*capital structure*) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas; dan b. Kebijakan manajemen atas struktur modal (*capital structure policies*); dan c. Dasar pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal.	226-227 226 226 227	4.	Discussion on capital structure, and management policy on capital structure Explanation of: a. Details of capital structure comprising of interest-bearing debts/sukuk and equity; b. Capital structure policies; and c. Basis for the determination of capital structure policies.
5.	Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir Penjelasan tentang: a. Nama pihak yang melakukan ikatan; b. Tujuan dari ikatan tersebut; c. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; d. Mata uang yang menjadi denominasi; dan e. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.	227-229 227 227 229 229 229 	5.	Discussion on material commitments of capital investments (instead of funding commitments) in the last fiscal year Explanation on: a. Parties in the commitments; b. Objectives of the commitments; c. Sources of funds to meet the commitments; d. Denomination currency of commitments; and e. Initiatives taken to mitigate exchange rate risk. Note: should be disclosed if the company does not have any material commitment for capital investments in the fiscal year.
6.	Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir Penjelasan tentang: a. Jenis investasi barang modal; b. Tujuan investasi barang modal; dan c. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.	229-231 230 229 230 	6.	Discussion on capital investment realized at the latest financial year Explanation on: a. Type of capital investment; b. Objectives of capital investment; and c. Nominal value of capital investment realized in the last fiscal year. Note: should be disclosed if there are no capital investment.

Kriteria dan Penjelasan		Halaman Page	Criteria and Explanations	
7.	Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan. Informasi memuat antara lain: a. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); dan b. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang.	231-233	7.	Information on the comparison between initial target at the beginning of financial year and the realization and target or projection for the next year concerning income, profit, capital structure, and others considered significant target for the company. Contain information on: a. Comparison of targets at the beginning of fiscal year and achievements; and b. Targets or projections set for the next 1 (one) year.
8.	Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan.	233-238	8.	Information and material facts following the date of accounting report (Subsequent events) Description of significant events following the date of accounting report including its impact on business risk and performance in the future. Note: should be disclosed if there are no subsequent events.
9.	Uraian tentang prospek usaha perusahaan Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.	238-240	9.	Business prospects Description on business prospects related to the general industry and economy including quantitative supporting data from reliable resources
10.	Uraian tentang aspek pemasaran Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar.	240-253	10.	Marketing aspects Description on marketing aspects of the company's products and/or services, among others marketing strategy and market shares
11.	Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir Memuat uraian mengenai: a. Kebijakan pembagian dividen; b. Total dividen yang dibagikan; c. Jumlah dividen kas per saham; d. *Payout ratio*; dan e. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas. untuk masing-masing tahun. Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.	254	11.	Description on dividend policy and total cash dividend per share and total dividend per year that are published or disbursed during last 2 (two) financial years Contain information on: a. Dividend payout policy; b. Total dividend disbursement; c. Total cash dividend per share; d. Payout ratio; and e. Announcement date and cash dividend payout for each year. Note: To disclose if there are no dividend disbursement and its reasons.
12.	Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) yang masih ada sampai tahun buku Memuat uraian mengenai: a. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; b. Jangka waktu; c. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan d. Harga *exercise*. Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan.	254, 441 N/A	12.	Employee/Management Share Ownership Program (ESOP/MSOP) still ongoing in the fiscal year Contain information on: a. Number of ESOP/MSOP shares and its execution; b. Period; c. Eligible employee/management; and d. Exercise price. Note: should be disclosed if there are no such programs

Kriteria dan Penjelasan		Halaman Page	Criteria and Explanations	
13.	Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana) Memuat uraian mengenai: a. Total perolehan dana; b. Rencana penggunaan dana; c. Rincian penggunaan dana; d. Saldo dana; dan e. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada). Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan.	254	13.	Realization of initial public offering proceeds (in the event of the company is obligated to submit the report) Covers the following: a. Total proceeds; b. Proceeds utilization plan; c. Proceeds utilization details; d. Proceeds balance; and e. The date of GMS/GMB resolution on the change of proceeds utilization (if any). Note: should be disclosed if there are no such information of realization of proceeds of public offering.
14.	Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi Memuat uraian mengenai: a. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; b. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; c. Alasan dilakukannya transaksi; d. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir; e. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; dan f. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait. Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan.	257-263	14.	Material transaction information with conflict of interest and/or transaction with related parties Covers the following: a. Name of transacting parties and the nature of related parties; b. Description of the transaction fairness; c. Transaction background; d. Transaction realization at the last financial year; e. Company policy related with transaction review mechanism; and f. Compliance to relevant regulations and provisions. Note: To disclose if there are no transactions.
15.	Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir Uraian memuat antara lain: a. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan b. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	264	15.	Description on changes in laws and regulations during the fiscal year that impacted on the company Covers information on: a. Name of regulations; and b. The impact (quantitative and/or qualitative) on the company, or statement of the insignificant impact Note: To disclose if there are no changes in the laws and regulations that have significant impacts
16.	Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir Uraian memuat antara lain: a. Perubahan kebijakan akuntansi; b. Alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan c. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	268	16.	Description on the changes in accounting policy implemented by the company at the last financial year Descriptions include among others: a. Changes in accounting policy; b. Reasons for the change; and c. Quantitative impact on the financial statements Note: To disclose if there are no changes in accounting policies during the fiscal year

	Kriteria dan Penjelasan	Halaman Page		Criteria and Explanations
17.	Informasi kelangsungan usaha Pengungkapan informasi mengenai: a. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir; b. *Assessment* manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan c. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan *assessment*. Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir.	270	17.	Information on business continuity Disclosures on: a. Significant issues on the company business continuity at the last financial year; b. Management assessment on point 1; and c. Assumption implemented by the management in conducting the assessment. Note: if there are no issues that potentially have significant influences to the company's business continuity at the last financial year, to disclose the basis of management assumption in ensuring that there are no issues that potentially have significant influences to the company's business continuity at the last financial year.
VI.	**Good Corporate Governance**		**VI.**	**Good Corporate Governance**
1.	Uraian Dewan Komisaris Uraian memuat antara lain: a. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris; b. Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dan dasar penilaiannya; dan c. Pengungkapan mengenai *Board Charter* (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris).	306-337 309 347, 355, 362 309, 364	1.	Description on the Board of Commissioners Covers the following: a. Board of Commissioners responsibilities; b. Assessment of performance of committees under the Board and the basis for such assessment; and c. Board Charter disclosures (Board of Commissioners work guidelines and procedures)
2.	Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris) Meliputi antara lain: a. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan b. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen.	307	2.	Independent Commissioners (at least 30% of the total personnel of the Board of Commissioners) Covers the following: a. Assignment criteria of Independent Commissioners; and b. Independency statement of each Independent Commissioner.
3.	Uraian Direksi Uraian memuat antara lain: a. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; b. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada); dan c. Pengungkapan mengenai *Board Charter* (pedoman dan tata tertib kerja Direksi).	366-395 371 397 369, 364	3.	Description on the Board of Directors Covers information on, among others: a. Duties and responsibilities of each member of the Board of Directors; b. Assessment of performance of committees under the Board (if any); and c. Board Charter disclosures (Board of Directors work guidelines and procedures)
4.	Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2018 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi Memuat uraian mengenai: a. Kriteria yang digunakan dalam penilaian; b. Pihak yang melakukan penilaian; c. Skor penilaian masing-masing kriteria; d. Rekomendasi hasil penilaian; dan e. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi. Catatan: apabila tidak ada penilaian penerapan GCG untuk tahun buku 2018, agar diungkapkan.	283-290	4.	GCG implementation assessment for 2018, at least for aspects of the Board of Commissioners and/or Board of Directors Covers the following: a. Assessment criteria; b. Assessor; c. Assessment score on each criteria; d. Recommendations on results of assessment; and e. Reasons for the delay or non implementation of such recommendations. Note: should be disclosed if there are no GCG assessment for fiscal 2018.

Kriteria dan Penjelasan		Halaman Page		Criteria and Explanations
5.	Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Mencakup antara lain: a. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Dewan Komisaris; b. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Direksi; c. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris; d. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Direksi; e. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi; dan f. Pengungkapan bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/atau opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi (jika ada). Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan.	315-317 315 383 316 383 383 317, 384	5.	Description of the remuneration policy for the Board of Commissioners and Board of Directors Covers the following: a. Disclosure of procedure for the proposal and determination of remuneration for the Board of Commissioners; b. Disclosure of procedure for the proposal and determination of remuneration for the Board of Directors; c. Remuneration structure showing the remuneration components and amounts per component for each member of the Board of Commissioners; d. Remuneration structure showing the remuneration components and amounts per component for each member of the Board of Directors; e. Disclosure of indicators for the remuneration of the Board of Directors; and f. Disclosure of performance bonus, non-performance bonus, and/or share option received by each members of the Board of Commissioners and Directors (if any). Note: should be disclosed if there are no performance bonus, non-performance bonus, and/or share option received by each members of the Board of Commissioners and Directors.
6.	Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat yang dihadiri mayoritas anggota pada rapat Dewan Komisaris (minimal 1 kali dalam 2 bulan), Rapat Direksi (minimal 1 kali dalam 1 bulan), dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (minimal 1 kali dalam 4 bulan) Informasi memuat antara lain: a. Tanggal Rapat; b. Peserta Rapat; dan c. Agenda Rapat. untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan.	318-322 323-327 385-391	6.	Meeting frequency and attendance of Board of Commissioners (at least once in 2 months), Board of Directors (at least once in a month), and joint meetings of BoC and BoD (at least once in 4 months) Covers among others: a. Date; b. Attendance; and c. Agenda. of each of the meetings of BoC, BoD and Joint Meetings of BoC and BoD.
7.	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu Dalam bentuk skema atau diagram yang memisahkan pemegang saham utama dengan pemegang saham pengendali. Catatan: yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali.	293 N/R	7.	Information on majority and controlling shareholders, direct or indirect, up to the ultimate individual shareholder Diagram with separate illustration for majority shareholders and controlling shareholders Note: majority shareholders are parties that own, directly or indirectly, at least 20% of the voting rights of the total share with voting rights issued by the company, but is not the controlling shareholder

Kriteria dan Penjelasan		Halaman Page		Criteria and Explanations
8.	Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali Mencakup antara lain: a. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya; b. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; c. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali; d. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan e. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali. Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan.	336, 378	8.	Disclosure of affiliation between members of the Board of Directors, Board of Commissioners and Majority/Controlling Shareholders Covers, among others: a. Affiliation between a member of the Board of Directors with fellow members of the Board of Directors; b. Affiliation between a member of the Board of Directors with members of the Board of Commissioners; c. Affiliation between a member of the Board of Directors with Majority and/or Controlling Shareholder; d. Affiliation between a member of the Board of Commissioners with fellow members of the Board of Commissioners; and e. Affiliation between a member of the Board of Commissioners with Majority and/or Controlling Shareholder. Note: should be disclosed if there are no affiliation relationship
9	Komite Audit Mencakup antara lain: a. Nama, jabatan, dan periode jabatan anggota komite audit; b. Riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) anggota komite audit; c. Independensi anggota komite audit; d. Uraian tugas dan tanggung jawab; e. Uraian pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku; dan f. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit.	340-349 341-343 343 345 346 346	9	Audit Committee Includes the following: a. Name, position and tenure of audit committee members; b. Education qualifications (study field and institution) and work experience (position, company and tenure) of audit committee members; c. Independency of audit committee members; d. Duties and responsibilities; e. Brief report of audit committee activity; and f. Meeting frequency and attendance of audit committee.
10.	Komite Nominasi dan/atau Remunerasi Mencakup antara lain: a. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/atau remunerasi; b. Independensi komite nominasi dan/atau remunerasi; c. Uraian tugas dan tanggung jawab; d. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/atau remunerasi pada tahun buku; e. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan/atau remunerasi; f. Pernyataan adanya pedoman komite nominasi dan/atau remunerasi; dan g. Kebijakan mengenai suksesi Direksi.	357-363 358-359 359 360 361 361 360 363	10.	Nomination and/or Remuneration Committee Includes the following: a. Name, position and brief profiles of members of the Nomination and/or Remuneration Committee; b. Independency of Nomination and/or Remuneration Committee; c. Duties and responsibilities ; d. Brief report of committee activity in the fiscal year; e. Meeting frequency and attendance; f. Statement of committee charter; and g. Policies on Director succession.
11.	Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan Mencakup antara lain: a. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain; b. Independensi komite lain; c. Uraian tugas dan tanggung jawab; d. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain pada tahun buku; dan e. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain.	349-357 350-352 353 354 355 355	11.	Other committees under the Board of Commissioners Includes the following: a. Name, position and brief profile of members of committee; b. Independency of committee; c. Duties and responsibilities ; d. Committee activity in the fiscal year; and e. Committee meeting frequency and attendance.

Kriteria dan Penjelasan		Halaman Page	Criteria and Explanations	
12.	Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan Mencakup antara lain: a. Nama, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; b. Domisili; c. Uraian tugas dan tanggung jawab; dan d. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku.	398-401 399 399 400	12.	Description of duties and functions of Corporate Secretary Information on, among others: a. Name and brief work experience of Corporate Secretary; b. Domicile; c. Duties and responsibilities; and d. Report of activities of Corporate Secretary in the fiscal year.
13.	Uraian mengenai unit audit internal Mencakup antara lain: a. Nama ketua unit audit internal; b. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal; c. Sertifikasi sebagai profesi audit internal; d. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan; e. Uraian pelaksanaan kegiatan unit audit internal pada tahun buku; dan f. Pihak yang mengangkat dan memberhentikan ketua unit audit internal.	402-409 403 404 404 403 408 402	13	Description on Internal Audit Unit Includes the following: a. Name of internal audit unit head; b. Total employees (internal auditors) in internal audit unit; c. Certification on internal audit profession; d. Internal audit unit composition in the company's structure; e. Brief report on internal audit unit activity implementation; and f. The parties responsible to appoint/terminate the internal audit unit head.
14.	Akuntan Publik Informasi memuat antara lain: a. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; b. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; c. Besarnya *fee* untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir; dan d. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.	410	14.	Public Accountant Includes the following: a. Name and year of public accountant that audits the annual financial statements in the last 5 years; b. Name and year of Public Accountant Firm that audits the annual financial statements in the last 5 years; c. The amount of fee for each service provided by public accountant at the last financial year; and d. Other services provided by the accountant apart from the audit service of annual financial statements at the last financial year. Note: to disclose if there are no other services rendered
15.	Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan Mencakup antara lain: a. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan; b. Penjelasan mengenai hasil reviu yang dilakukan atas sistem manajemen risiko pada tahun buku; c. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan d. Upaya untuk mengelola risiko tersebut.	411-417 411 416 413 413	15.	Description on risk management of the company Includes the following: a. Explanation on risk management system implemented by the company; b. Explanation on risk management system effectiveness evaluation; c. Explanation on risks faced by the company; and d. Risk mitigation.
16.	Uraian mengenai sistem pengendalian intern Mencakup antara lain: a. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional; b. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – *internal control framework*); dan c. Penjelasan mengenai hasil reviu yang dilakukan atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pada tahun buku.	420-422 420 420 422	16.	Description of internal control system Includes the following: a. Brief explanation on internal control system, among others on financial and operational control; b. Explanation on internal control system alignment with international standard framework (COSO – internal control framework); and c. Explanation on internal control system effectiveness evaluation.

	Kriteria dan Penjelasan	Halaman Page		Criteria and Explanations
17	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait tata kelola Tanggung jawab sosial: a. Informasi komitmen pada tanggung jawab sosial b. Informasi mengenai methoda dan lingkup due diligent terhadap dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari aktivitas perusahaan c. Informasi tentang stakeholder penting yang terdampak atau berpengaruh pada dampak dari kegiatan perusahaan d. Informasi tentang isu isu penting sosial ekonomi dan lingkungan terkait dampak kegiatan perusahaan e. Informasi tentang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan baik yang merupakan kewajiban maupun yang melebihi kewajiban f. Informasi tentang strategi dan program kerja perusahaan dalam menangani isu isu sosial, ekonomi dan lingkungan dalam upaya stakeholders engagement dan meningkatkan value untuk stakeholder dan shareholder g. Informasi tentang berbagai program yang melebihi tanggung jawab minimal perusahaan yang relevan dengan bisnis yang dijlaankan h. Informasi tentang pembiayaan dan anggaran tanggung jawab sosial	462-477 463 465 468 467 473 475 545	17.	Description of corporate social responsibility related to organizational governance of social responsibility: a. Information on Company's commitment to social responsibility; b. Information on methods and scope of due diligence on the social, economic and environmental impacts of Company's activities; c. Information on significant stakeholders that are impacted by, or having an influence to the impact of, the Company's activities; d. Information on significant social, economic and environmental issues related to impact of the Company's activities; e. Information on the scope of the Company's corporate social responsibility, both obligatory as well as beyond obligatory; f. Information on the Company's strategy and work programs in the management of social, economic and environmental issues, as a form of stakeholder engagement and in creating value for stakeholders and shareholders; g. Information on programs that are beyond the minimum obligatory level for the Company as relevant with its business activities; h. Information on the funding and budgeting of social responsibility programs.
18	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait core subject Hak Azasi Manusia a. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial core subject Hak Azasi Manusia b. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial core subject Hak Azasi Manusia c. Informasi tentang perencanaan corporate social responsibility bidang Hak Azasi Manusia d. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang Hak Azasi Manusia e. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang Hak Azasi Manusia	490-499 490 491 496 497 499	18.	Description of corporate social responsibility related to core subject - Human Rights: a. Information on commitment and policies related to social responsibility core subject - Human Rights; b. Information on Company's definition on the scope of social responsibility core subject - Human Rights; c. Information on the planning of CSR initiatives in the area of Human Rights; d. Information on the execution of CSR initiatives in the area of Human Rights; e. Information on achievements and awards for CSR initiatives in the area of Human Rights.
19	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait core subject Operasi yang adil a. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial core subject Operasi yang adil b. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial core subject operasi yang adil c. Informasi tentang perencanaan corporate social responsibility bidang operasi yang adil d. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil e. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil	478-488 478 480 485 487	19.	Description of corporate social responsibility related to core subject - fair operating practices: a. Information on commitment and policies related to social responsibility core subject - fair operating practices; b. Information on Company's definition on the scope of social responsibility core subject - fair operating practices; c. Information on the planning of CSR initiatives related to fair operating practices; d. Information on the execution of CSR initiatives related to fair operating practices; e. Information on achievements and awards for CSR initiatives related to fair operating practices.

Kriteria dan Penjelasan		Halaman Page		Criteria and Explanations
20	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan lingkungan hidup, penyampaian informasi tentang;	514-539	20.	Description of corporate social responsibility related to the environment:
	a. Informasi tentang komitmen dan kebijakan lingkungan	514		a. Information on commitment and policies on environment;
	b. Informasi tentang dampak dan resiko lingkungan penting yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan perusahaan	516		b. Information on significant environmental impact and risks, both directly or indirectly related to the Company;
	c. Informasi tentang target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen;	519		c. Information on 2018 activity target/plan established by the Management;
	d. Informasi tentang kegiatan yang dilakukan dan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan	520		d. Information on environment-related activities or programs undertaken as related to the Company's operational activities;
	e. Informasi tentang pelaksanaan inisitaif CSR terkait lingkungan hidup	529		e. Information on the execution of CSR initiatives related to the environment;
	f. Informasi tentang capaian dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut; dan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, mekanisme pengaduan masalah lingkungan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain.	530-537		f. Information on the quantitative impact or achievement of such CSR initiatives, such as the use of environmental-friendly and recyclable material and energy, waste processing system, mechanism for environment-related complaints, consideration of environmental aspects in the granting of credit to creditors, and others.
	g. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki.	537-539		g. Environment-related certification.
21	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, mencakup antara lain informasi tentang:	500-512	21.	Description of corporate social responsibility related to labor practices, covering information on, among others:
	a. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan core subjeck ketenagakerjaan	500		a. Commitment and policies on social responsibility core subject - labor practices;
	b. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang ketenagakerjaan	503		b. Information on scope and definition of social responsibility related to labor practices;
	c. Informasi terkait target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen; dan	506		c. Information on 2018 activity target/plan established by the Management;
	d. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut	509, 511		d. Information on initiatives undertaken and the quantitative impact of such initiatives;
	e. Informasi terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat turnover karyawan, tingkat kecelakaan kerja, remunerasi, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan, dan lain-lain.	512		e. Information related to labor practices and work health and safety, such as gender equality and equal work opportunity, work health and safety equipment, employee turnover rate, work accident rate, employee remuneration, mechanism for labor-related complaints, and others.
22	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen, Mencakup antara lain:	538	22.	Description of corporate social responsibility related to consumer issues, covering among others:
	a. Target/rencana kegiatan yang pada tahun 2018 ditetapkan manajemen; dan	569		a. Information on 2018 activity target/plan established by the Management;
	b. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut	560		b. Initiatives undertaken and the impact of such initiatives;
	c. Terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.	565-567 567-569 571		c. Information related to product stewardship, such as consumer health and safety issues, product information, mechanism, number and resolution of consumer complaints, and others.

	Kriteria dan Penjelasan	Halaman Page		Criteria and Explanations
23	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan, mencakup antara lain informasi tentang: a. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan core subjeck pengembangan sosial dan kemasyarakatan b. Informasi tentang isu isu sosial yang relevan dengan perusahaan c. Informasi tentang resiko sosial yang dikelola perusahaan d. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan e. Target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen; f. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut; dan g. Biaya yang dikeluarkan h. Terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, pelatihan mengenai anti korupsi, dan lain-lain.	540-555 540 543 543 541 544 546-548, 552-555 549	23.	Description of corporate social responsibility related to community involvement and development, covering among others: a. Commitment and policies on social responsibility core subject - community involvement and development; b. Information on social issues relevant to the Company; c. Information on social risks managed by the Company; d. Information on scope and definition of social responsibility related to community involvement and development; e. Information on 2018 activity target/plan established by the Management; f. Initiatives undertaken and the impact of such initiatives; g. Budget spent; h. Information related to community involvement and development, such as use of local workers, empowerment of surrounding communities, improvement of public facilities or infrastructure, other forms of donations, communications on anti-corruption policies and procedures, training on anti-corruption, and others.
24.	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan Mencakup antara lain: a. Pokok perkara/gugatan; b. Status penyelesaian perkara/gugatan; c. Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan; dan d. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi). Catatan: dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan.	428-431 431	24.	Significant litigation currently faced by the company, subsidiaries, and members of the Board of Commissioners and Board of Directors that served the position at the annual report period Includes the following: a. The principal litigation/claims; b. Settlement status of litigation/claims; c. Impact to the company's condition; and d. Administration sanctions charged to the company, members of the Board of Commissioners and Board of Directors, by relevant authorities (capital market, banking and others) at the last fiscal year (or a statement of no administration sanction being charged) Note: To disclose in the event of no litigation
25.	Akses informasi dan data perusahaan Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui *website* (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, *mailing list,* buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya.	432-434	25.	Access to company information and data Description on the availability of company information and data for public access, including dissemination through company website (in Bahasa and English), mass media, mailing list, bulletin, analyst gatherings, and others.
26.	Bahasan mengenai kode etik Memuat uraian antara lain: a. Pokok-pokok kode etik; b. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi; c. Penyebarluasan kode etik; d. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan e. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	435-438 435 436 437 437 438	26.	Discussion on code of conduct Includes the following: a. Contents of Code of Conduct; b. Disclosure of code of conduct application in all level of organization; c. Code of conduct dissemination; d. Sanctions on code of conduct violations; and e. Number of violation and sanction in the last fiscal year. Note: should be disclosed if there are no violations of code of conduct in the last fiscal year.

Kriteria dan Penjelasan		Halaman Page	Criteria and Explanations	
27.	Pengungkapan mengenai whistleblowing system Memuat uraian tentang mekanisme *whistleblowing system* antara lain: a. Penyampaian laporan pelanggaran; b. Perlindungan bagi *whistleblower*; c. Penanganan pengaduan; d. Pihak yang mengelola pengaduan; dan e. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir; dan f. Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku. Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk dan telah selesai diproses pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	442-445	27.	Disclosure on whistleblowing system Includes the following mechanism of whistleblowing system: a. Violations report submission; b. Whistleblowers protection; c. Claims handling; d. Claims managers; and e. Total claims registered; and f. Sanctions/report processed at the last fiscal year including its follow up measures. Note: should be disclosed if there is no report and follow up action in the last fiscal year.
28.	Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Uraian kebijakan tertulis Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya.	337, 394	28.	Diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors Composition Description of written policy regarding diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors composition regarding education, work experience, age, and gender Note: to disclose the reasons and considerations, if there is no policy applied
VII.	**Informasi Keuangan**		**VII.**	**Financial Information**
1.	Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan.	582	1.	Board of Directors and/or Board of Commissioners' Statements regarding the Responsibility for the Financial Statements Conformity with related regulations regarding the Financial Statements Responsibility
2.	Opini auditor independen atas laporan keuangan	584	2.	Independent auditor opinion on financial statements
3.	Deskripsi Auditor Independen di Opini Deskripsi memuat tentang: a. Nama dan tanda tangan; b. Tanggal Laporan Audit; dan c. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik.	585	3.	Independent Auditor Description in the Opinion Description contains the following: a. Name & signatures; b. Audit Report date; and c. License of Public Accountant Firm and license of Public Accountant
4.	Laporan keuangan yang lengkap Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: a. Laporan posisi keuangan; b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; c. Laporan perubahan ekuitas; d. Laporan arus kas; e. Catatan atas laporan keuangan; f. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan g. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan).	580-825	4.	Comprehensive financial statements Comprehensively covers the financial statements elements: a. Statements of financial position; b. Statements of comprehensive income and other comprehensive income; c. Statements of changes in equity; d. Statements of cash flows; e. Notes to financial statements; f. Comparative information on previous periods; and g. Statements of financial position at the beginning of previous periods upon the application of retrospective accounting policy by the entity or representation of financial statements postings, or reclassifications of postings in the financial statements (if relevant).
5.	Perbandingan tingkat profitabilitas Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya	589	5.	Profitability level comparison Comparison of current profit (loss) with the previous year

Kriteria dan Penjelasan		Halaman Page	Criteria and Explanations	
6.	Laporan Arus Kas Memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan; b. Penggunaan metode langsung (*direct method*) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi; c. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan d. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.	592	6.	Statements of Cash Flows Conformity to the following provisions: a. Grouping into three category of activities of operations, investment, and financing; b. Direct method application in the statements of cash flows from operations activity; c. Separation of presentation between cash in and or cash out during current year in the operation, investment and financing activities; d. Disclosure of non cash transaction shall be stated in the notes to financial statements.
7.	Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Meliputi sekurang-kurangnya: a. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK; b. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; c. Pajak penghasilan; d. Imbalan kerja; dan e. Instrumen Keuangan.	602-653	7.	Summary of accounting policies Including at least: a. Compliance statement to SAK; b. Basis of measurement and formulation of financial statements; c. Recognition of income and expense; d. Employee benefits; and e. Financial instrument.
8.	Pengungkapan transaksi pihak berelasi Hal-hal yang diungkapkan antara lain: a. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; b. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan c. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait.	776-780	8.	Disclosure of related parties transactions The disclosures includes: a. Name of related parties, and the nature and relationship with related parties; b. Transaction values and its percentage to total income and expense; and c. Total balance and its percentage to total assets or liabilities.
9.	Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan Hal-hal yang harus diungkapkan: a. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; b. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; c. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2016; d. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan e. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.	758	9.	Disclosure related to taxes The disclosures shall includes: a. Fiscal reconciliation and current tax expense calculation; b. Explanation of relationship between tax expenses (income) and accounting profit; c. Statement that Taxable Income as a result of reconciliation is use as the basis in completing the 2016 Annual corporate income tax return; d. The details of deferred tax assets and liabilities recognized in the financial position statements for every presentation period, and total deferred tax expenses (income) recognized in the income statements if the total are not visible from the total deferred tax assets or liabilities recognized in the financial position statements; and e. Disclosure of availability or un-availability of tax disputes.
10.	Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap Hal-hal yang harus diungkapkan: a. Metode penyusutan yang digunakan; b. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya; c. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan d. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi.	626	10.	Disclosure related to fixed assets The disclosures shall includes: a. Used depreciation method; b. Description on accounting policies selected between revaluation model and cost model; c. Significant methods and assumptions used in estimation of fixed assets fair value (for revaluation model) or disclosure of fixed assets fair value (for cost model); and d. Reconciliation of gross total recorded and accumulation of fixed assets depreciation at the beginning and end of period by presenting: addition, deduction and reclassification.

Kriteria dan Penjelasan		Halaman Page	Criteria and Explanations	
11	Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi Hal-hal yang harus diungkapkan: a. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; b. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; c. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan d. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama.	647, 782	11	Disclosure related to operations segments The disclosures shall includes: a. General information covering factors used to identify reported segments; b. Information on segment's reported profit loss, assets, and liabilities; c. Reconciliation of segment's total revenues, segment's reported profit loss, segment's assets, segment's liabilities, and segment's other material elements to related total in entity; and d. Disclosure of entity level, which covers information on products and/or services, geographic areas and main customers.
12.	Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan Hal-hal yang harus diungkapkan: a. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya; b. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan; c. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; d. Kebijakan manajemen risiko; dan e. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif.	805	12.	Disclosure related to Financial Instruments The disclosures shall includes: a. Financial instrument classification; b. Fair value of every financial instrument group; c. Explanation on risks related to financial instrument: market risk, credit risk and liquidity risk; d. Risk management objectives and policies; and e. Risk analysis related to financial instrument in quantitative way.
13.	Penerbitan laporan keuangan Hal-hal yang diungkapkan antara lain: a. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan b. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.	825	13.	Financial statements publication The disclosures includes: a. Date of financial statements authorized for publication; and b. Parties responsible to authorize the financial statements.

Laporan Tahunan Annual Report

2019

Memaknai Tantangan, Meningkatkan Layanan

Redefining Challenges, Enhancing Services

PT PLN (Persero)
Jalan Trunojoyo Blok M – I No 135
Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia
Tel : 021 – 7251234, 7261122
Fax : 021 – 7221330
www.pln.com